Buku I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024
DI LIWA

DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA V
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
DI BANDAR LAMPUNG

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 terdiri dari dua laporan yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

Laporan ini memuat:

a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;

b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan

c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Buku 1) harus ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk seluruh komponen Laporan Keuangan tanpa tanggal dan tempat serta harus memuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pimpinan Entitas.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Laporan ini memuat:

a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

y 9

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 3
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 24B/LHP/XVIII.BLP/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 23 Mei 2025
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Puspitaningtyas, S.E., M.S.E., M.Ec., Ak., CA.
Register Negara Akuntan No. RNA-12650

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 yang didasarkan pada kriteria:

a. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
b. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
c. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang memiliki 45 Perangkat Daerah (PD) Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari:

a. Neraca per 31 Desember 2024;
b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
c. Laporan Operasional (LO);
d. Laporan Arus Kas (LAK);
e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan LPSAL per 31 Desember 2024;
b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LRA, LO, dan LAK untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;
c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LO dan LPE untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;
d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada CaLK;
e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;

f. Efektivitas desain dan implementasi SPI termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam LKPD; dan
g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk SPI terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, perhitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 55 hari, terdiri dari pemeriksaan interim selama 25 hari mulai 17 Februari s.d. 13 Maret 2025 dan pemeriksaan terinci selama 30 hari mulai 9 April s.d. 8 Mei 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 15/ST/XVIII.BLP/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 dan 48/ST/XVIII.BLP/03/2025 tanggal 27 Maret 2025.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak sengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN 2024

AUDITED

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)
NERACA
LAPORAN OPERASIONAL (LO)
LAPORAN ARUS KAS (LAK)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Jalan Raden Intan II No. 01 Way Mengaku
Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat 34874
https://www.lampungbaratkab.go.id/

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dengan status telah diperiksa (*Audited*), sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

LKPD Tahun 2024 (*Audited*) disusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan keuangan ini terdiri dari 7 (tujuh) komponen, yaitu: (a) Laporan Realisasi APBD; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat secara konsisten terus berupaya meningkatkan kualitas LKPD dan pengelolaan keuangan daerah, dengan melakukan upaya perbaikan sepanjang tahun 2024, antara lain:

a. Menyempurnakan kebijakan akuntasi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah.
b. Melakukan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah sehingga dapat meminimalkan temuan berulang seperti temuan terkait pengelolaan kas, penatausahaan Barang Milik Daerah, serta terkait penganggaran dan pelaksanaan anggaran.
c. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan melakukan pemantauan tindak lanjut penyelesaiannya, agar secara komprehensif dan efektif dapat mengatasi substansi permasalahan, sehingga tidak menjadi temuan berulang di masa yang akan datang.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Liwa, 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar
Daftar Isi i
Daftar Tabel ii
Daftar Grafik x
Daftar Lampiran xi
Daftar Singkatan dan Akronim xiii
Daftar Gambar xviii
Pernyataan Tanggungjawab xix
Ringkasan Eksekutif xx
I. Laporan Realisasi Anggaran 1
II. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 2
III. Neraca 3
IV. Laporan Operasional 5
V. Laporan Arus Kas 6
VI. Laporan Perubahan Ekuitas 8
VII. Catatan atas Laporan Keuangan 9
Bab 1 Pendahuluan 9
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 9
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 11
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 14
1.4. Profil dan Penjelasan Teknis 15
Bab 2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 19
2.1. Ekonomi Makro 19
2.2. Ketenagakerjaan 37
2.3. Kebijakan Keuangan 45
2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 50
Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 56
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 56
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan 61
Bab 4 Kebijakan Akuntansi 63
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 63
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 65
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 67
4.4. Kebijakan Akuntansi 67
Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 79
5.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 79
5.2. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 164
5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca 167
5.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional 244
5.5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas 300
5.6. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 306
5.7. Hubungan antar Komponen Laporan Keuangan 309
Bab 6 Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan 321
6.1. Kegiatan yang Tidak Dapat Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran 2024 321
6.2. Kegiatan yang Pencapaiannya Masih Dibawah Target pada Tahun Anggaran 2024 323
Bab 7 Penutup 334

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tabel 1 Ringkasan Realisasi APBD TA 2024 dan 2023 xv
Tabel 2 Ringkasan Laporan Perubahan SAL Tahun 2024 dan 2023 xv
Tabel 3 Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2024 dan 2023 xv
Tabel 4 Ringkasan Laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023 xvi
Tabel 5 Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2024 dan 2023 xvi
Tabel 6 Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2024 dan 2023 xvi
Tabel 7 Ringkasan Ekonomi Makro xviii

BAB 1

Tabel 8 Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah Tahun 2024 18

BAB 2

Tabel 9 Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 – 2024 19
Tabel 10 Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020–2024 20
Tabel 11 Perkembangan Luas Lahan Tanaman Perkebunan Tahun 2020–2024 22
Tabel 12 Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 – 2024 23
Tabel 13 Perkembangan Populasi dan Produksi Ternak pada Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 – 2024 24
Tabel 14 Potensi Lahan dan Produksi Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 – 2024 25
Tabel 15 Data Kewirausahaan dan Kewiraswastaan Tahun 2020 – 2024 26
Tabel 16 Data Konstribusi PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Lampung Barat 27
Tabel 17 Daftar IKM Berdasarkan Jenis Usahanya Tahun 2020 – 2024 28
Tabel 18 Daftar Kawasan Ekowisata Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 31
Tabel 19 Klasifikasi Zona Pembangunan Objek Wisata Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 33
Tabel 20 PDRB Per Kapita Kabupaten Lampung Barat (Rupiah) Periode 2019-2024 36
Tabel 21 PDRB ADHK, ADHB, Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung Barat Tahun 2018 – 2024 36
Tabel 22 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lampung Barat Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2024 37
Tabel 23 Statistik Ketenagakerjaan Lampung BaratTahun 2019 – 2024 39
Tabel 24 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2024 41
Tabel 25 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab Lampung Barat Tahun 2020 – 2024 42
Tabel 26 Gini Ratio Kab. Lampung Barat Tahun 2018 – 2024 42
Tabel 27 Tingkat Kemiskinan Kab Lampung Barat Tahun 2019 - 2024 42
Tabel 28 Belanja Mandatory Spending Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 43
Tabel 29 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 – 2024 46
Tabel 30 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 47
Tabel 31 Alokasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Lampung Barat 48

Halaman

		Tahun Anggaran 2024	
Tabel	32	Target dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 -2024	48
Tabel	33	Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	49
Tabel	34	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024	51
Tabel	35	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024	51
BAB 3			
Tabel	36	Pencapaian Target Kinerja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	60
BAB 4			
Tabel	37	Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap Karena Adanya Perbaikan	70
Tabel	38	Besaran Penyisihan Piutang Tak Tertagih	76
Tabel	39	Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap	77
Tabel	40	Klasifikasi Aset Lainnya	77
BAB 5			
Tabel	41	Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023	79
Tabel	42	Struktur Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan 2024	80
Tabel	43	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 dan 2023	85
Tabel	44	Pajak Daerah TA 2024 dan 2023	85
Tabel	45	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron TA 2024 dan 2023	87
Tabel	46	Pajak Reklame Kain TA 2024 dan 2023	87
Tabel	47	Pajak Air Tanah TA 2024 dan 2023	88
Tabel	48	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) TA 2024 dan 2023	89
Tabel	49	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) TA 2024 dan 2023	90
Tabel	50	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2024 dan 2023	91
Tabel	51	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) TA 2024 dan 2023	92
Tabel	52	Pajak Daerah Tahun 2023, Pada Tahun 2024 Nomenklatur Menjadi PBJT	92
Tabel	53	PBJT – Makanan dan/atau Minuman Tahun 2024 dan 2023	93
Tabel	54	PBJT – Tenaga Listrik Tahun 2024 dan 2023	93
Tabel	55	PBJT – Jasa Perhotelan Tahun 2024 dan 2023	94
Tabel	56	PBJT – Jasa Parkir Tahun 2024 dan 2023	94
Tabel	57	PBJT - Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2024 dan 2023	96
Tabel	58	Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023	96
Tabel	59	Retribusi Jasa Umum TA 2024 dan 2023	97
Tabel	60	Retribusi Pelataran TA 2024 dan 2023	99
Tabel	61	Retribusi Los TA 2024 dan 2023	99
Tabel	62	Retribusi Kios TA 2024 dan 2023	99
Tabel	63	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KB) TA 2024 dan 2023	100
Tabel	64	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair TA 2024 dan 2023	100
Tabel	65	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang TA 2024 dan 2023	100
Tabel	66	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2024 dan 2023	101
Tabel	67	Rincian Retribusi Jasa Umum per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023	101
Tabel	68	Retribusi Jasa Usaha TA 2024 dan 2023	102
Tabel	69	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan TA 2024 dan 2023	102
Tabel	70	Retribusi Penyewaan Tanah TA 2024 dan 2023	103
Tabel	71	Retribusi Pemakaian Ruangan TA 2024 dan 2023	103
Tabel	72	Retribusi Pemakaian Alat TA 2024 dan 2023	103

Halaman

Tabel	73	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan TA 2024 dan 2023	104
Tabel	74	Retribusi Terminal TA 2024 dan 2023	105
Tabel	75	Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2024 dan 2023	105
Tabel	76	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa TA 2024 dan 2023	106
Tabel	77	Retribusi Potong Hewan TA 2024 dan 2023	106
Tabel	78	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2024 dan 2023	107
Tabel	79	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman TA 2024 dan 2023	108
Tabel	80	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan TA 2024 dan 2023	109
Tabel	81	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan TA 2024 dan 2023	109
Tabel	82	Rincian Retribusi Jasa Usaha per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023	110
Tabel	83	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 dan 2023	112
Tabel	84	Rincian Retribusi Perizinan Tertentu Per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023	113
Tabel	85	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dan 2023	114
Tabel	86	Lain-Lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023	115
Tabel	87	Hasil Penjualan BMD yang Dipisahkan TA 2024 dan 2023	115
Tabel	88	Rincian Sumber Penerimaan Jasa Giro TA 2024 dan 2023	116
Tabel	89	Rincian Pendapatan Bunga Tahun 2024	116
Tabel	90	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah TA 2024 dan 2023	116
Tabel	91	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain TA 2024 dan 2023	117
Tabel	92	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2024 dan 2023	117
Tabel	93	Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2024 dan 2023	117
Tabel	94	Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2024 dan 2023	118
Tabel	95	Rincian Pendapatan BLUD TA 2024 dan 2023	119
Tabel	96	Pendapatan BLUD per OPD TA 2024 dan 2023	119
Tabel	97	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2024 dan 2023	120
Tabel	98	Lain-Lain PAD yang Sah Per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023	120
Tabel	99	Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023	121
Tabel	100	Dana Perimbangan TA 2024 dan 2023	121
Tabel	101	Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023	122
Tabel	102	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2024 dan 2023	122
Tabel	103	Rincian DAU Berdasarkan Penggunaannya TA 2024 dan 2023	123
Tabel	104	Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan 2023	124
Tabel	105	Dana Alokasi Khusus per Bidang Kegiatan TA 2024 dan 2023	124
Tabel	106	Insentif Fiskal TA 2024 dan 2023	126
Tabel	107	Dana Desa/ Pekon TA 2024 dan 2023	126
Tabel	108	Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2024 dan 2023	127
Tabel	109	Dasar Hukum Penganggaran Pendapatan Bagi Hasil Provinsi Tahun 2024	127
Tabel	110	Rincian Transfer Pemerintah Provinsi TA 2024 dan 2023	127
Tabel	111	Belanja Daerah TA 2024 dan 2023	128
Tabel	112	Belanja Pegawai ASN (PNS dan PPPK) TA 2024 dan 2023	129
Tabel	113	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2024 dan 2023	130
Tabel	114	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2024 dan 2023	131
Tabel	115	Belanja Pegawai BLUD TA 2024 dan 2023	132
Tabel	116	Belanja Pegawai Per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023	132
Tabel	117	Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023	133

Halaman

Tabel 118 Belanja Barang TA 2024 dan 2023 134
Tabel 119 Belanja Jasa TA 2024 dan 2023 136
Tabel 120 Belanja Pemeliharaan TA 2024 dan 2023 140
Tabel 121 Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023 142
Tabel 122 Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak lain / Masyarakat TA 2024 dan 2023 143
Tabel 123 Belanja Barang & Jasa BOSP TA 2024 dan 2023 143
Tabel 124 Belanja Barang & Jasa BOK Puskemas TA 2024 dan 2023 144
Tabel 125 Belanja Barang & Jasa BLUD TA 2024 dan 2023 144
Tabel 126 Belanja Barang dan Jasa Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 144
Tabel 127 Belanja Bunga Tahun Anggaran 2024 dan 2023 146
Tabel 128 Belanja Hibah TA 2024 dan 2023 146
Tabel 129 Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 148
Tabel 130 Belanja Modal TA 2024 dan 2023 149
Tabel 131 Rincian Belanja Modal TA 2024 dan 2023 149
Tabel 132 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023 151
Tabel 133 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023 154
Tabel 134 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 dan 2023 156
Tabel 135 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023 157
Tabel 136 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 dan 2023 157
Tabel 137 Belanja Modal Per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023 158
Tabel 138 Belanja Tidak Terduga TA 2024 dan 2023 159
Tabel 139 Belanja Transfer TA 2024 dan 2023 160
Tabel 140 Belanja Bagi Hasil TA 2024 dan 2023 160
Tabel 141 Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023 160
Tabel 142 Surplus/ (Defisit) Laporan Realisasi Anggaran TA 2024 dan 2023 161
Tabel 143 Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 161
Tabel 144 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2024 dan 2023 161
Tabel 145 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TA 2024 dan 2023 162
Tabel 146 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2024 dan 2023 162
Tabel 147 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2024 dan 2023 163
Tabel 148 Saldo Anggaran Lebih TA 2024 dan 2023 164
Tabel 149 Rincian Saldo Anggaran Lebih TA 2024 dan 2023 165
Tabel 150 Pelampaian / Penghematan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2024 165
Tabel 151 Neraca Per 31 Desember 2024 dan 2023 167
Tabel 152 Aset Per 31 Desember 2024 dan 2023 168
Tabel 153 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023 168
Tabel 154 Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023 169
Tabel 155 Kas di BLUD Per 31 Desember 2024 dan 2023 169
Tabel 156 Kas Dana BOS Per 31 Desember 2024 dan 2023 170
Tabel 157 Kas Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 171
Tabel 158 Kas Dana BOSP Per 31 Desember 2024 dan 2023 171
Tabel 159 Kas Dana BOK Puskesmas Per 31 Desember 2024 dan 2023 172
Tabel 160 Daftar Piutang Per 31 Desember 2024 dan 2023 173
Tabel 161 Perhitungan Piutang Per 31 Desember 2024 173
Tabel 162 Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023 174
Tabel 163 Perhitungan Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2024 174

Halaman

Tabel 164 Piutang Retribusi Daerah Per Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023 175
Tabel 165 Perhitungan Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2024 176
Tabel 166 Perhitungan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Per 31 Desember 2024 176
Tabel 167 Piutang HKPYD Per 31 Desember 2024 dan 2023 178
Tabel 168 Perhitungan Piutang HKPYD Per 31 Desember 2024 178
Tabel 169 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Per Objek Per 31 Desember 2024 dan 2023 178
Tabel 170 Perhitungan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2024 178
Tabel 171 Rincian Selisih antara Piutang Akhir dengan Rumus Piutang Akhir Per 31 Desember 2024 179
Tabel 172 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Per OPD Per 31 Desember 2024 dan 2023 179
Tabel 173 Rincian Piutang Pendapatan BLUD Tahun 2024 dan 2023 180
Tabel 174 Rincian Selisih antara Piutang Akhir dengan Rumus Piutang Lain-lain PAD yang Sah Akhir Per 31 Desember 2024 180
Tabel 175 Piutang Transfer Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2024 dan 2023 182
Tabel 176 Perhitungan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2024 182
Tabel 177 Rincian Selisih antara Piutang Akhir dengan Rumus Piutang Akhir Per 31 Desember 2024 182
Tabel 178 Piutang Transfer Antar Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023 185
Tabel 179 Perhitungan Piutang Transfer Antar Daerah Per 31 Desember 2024 185
Tabel 180 Dasar Hukum Pendapatan dan Piutang Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 186
Tabel 181 Dasar Hukum Piutang Transfer Antar Daerah Per 31 Desember 2024 187
Tabel 182 Kategori Kualitas Penyisihan Piutang 188
Tabel 183 Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2024 dan 2023 188
Tabel 184 Perhitungan Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2024 188
Tabel 185 Penyisihan Piutang Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023 189
Tabel 186 Beban Jasa Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024 dan 2023 190
Tabel 187 Rincian Beban Jasa Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024 190
Tabel 188 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 191
Tabel 189 Perbandingan Persediaan Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 192
Tabel 190 Rincian Persediaan Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023 193
Tabel 191 Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2024 dan 2023 202
Tabel 192 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir Per 31 Desember 2024 dan 2023 202
Tabel 193 Dana Bergulir Bersih Per 31 Desember 2024 dan 2023 203
Tabel 194 Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih dan Kas Per 31 Desember 2024 203
Tabel 195 Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir Per 31 Desember 2024 dan 2023 203
Tabel 196 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Netto Per 31 Desember 2024 dan 2023 204
Tabel 197 Investasi Jangka Panjang Permanen Per 31 Desember 2024 dan 2023 205
Tabel 198 Jumlah Penyertaan, Tingkat Pengendalian dan Metode Penilaian Investasi Per 31 Desember 2024 dan 2023 205
Tabel 199 Nilai Penyertaan pada Perumda Limau Kunci Per 31 Desember 2023 dan 2024 205
Tabel 200 Posisi Nilai Ekuitas pada Perumda Limau Kunci per 31 Desember 2024 dan 2023 206

Halaman

Tabel 201 Proporsi Nilai Penyertaan, laba Ditaham, dan Modal Bersih Akhir Perumda Air Minum Limau Kunci Per 31 Desember 2024 dan 2023 206
Tabel 202 Penyertaan Modal pada PT Pesagi Mandiri (Perseroda) Per 31 Desember 2023 dan 2024 206
Tabel 203 Posisi Nilai Ekuitas Pada PT Pesagi Mandiri (Perseroda) 207
Tabel 204 Proporsi Nilai Penyertaan, Rugi dan Laba serta Modal Akhir 207
Tabel 205 Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Pada PD Pesagi Mandiri (Perseroda) 207
Tabel 206 Penyertaan Modal pada PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda) Per 31 Desember 2023 dan 2024 208
Tabel 207 Posisi Nilai Ekuitas pada PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda) Per 31 Des 2024 208
Tabel 208 Proporsi Nilai Penyertaan, Rugi dan Laba serta Modal Akhir PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda) Per 31 Desember 2024 208
Tabel 209 Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda) 209
Tabel 210 Rincian Bukti Saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Per 31 Desember 2024 209
Tabel 211 Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung 210
Tabel 212 Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2024 211
Tabel 213 Mutasi Aset Tetap Tahun 2024 211
Tabel 214 Bukti Kepemilikian Aset Tanah Per 31 Desember 2024 214
Tabel 215 Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2024 214
Tabel 216 Aset Tetap – Kendaraan yang Belum Dilengkapi Naskah Hibah dan BAST 215
Tabel 217 Perubahan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 217
Tabel 218 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 217
Tabel 219 Perubahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 220
Tabel 220 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 220
Tabel 221 Perubahan Nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Des 2024 222
Tabel 222 Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 222
Tabel 223 Perubahan Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024 224
Tabel 224 Mutasi Aset Tetap Berupa Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 224
Tabel 225 Aset Tetap Lainnya Diperuntukkan Bagi Sekolah Swasta Tahun 2024 225
Tabel 226 Konstruksi Dalam Pengerjaan di Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 226
Tabel 227 Mutasi Aset Tetap Berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 226
Tabel 228 Rincian Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024 227
Tabel 229 Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2024 227
Tabel 230 Rincian Mutasi Aset Lainnya Tahun 2024 228
Tabel 231 Tagihan Jangka Panjang Per 31 Desember 2024 dan 2023 228
Tabel 232 Aset Lainnya Berupa Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 229
Tabel 233 Mutasi Aset Lainnya Berupa Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 229
Tabel 234 Rincian Aset Lainnya Berupa Aset Tidak Berwujud Per 31 Des 2024 230
Tabel 235 Mutasi Aset Lainnya Berupa Aset Lain-lain Tahun 2024 232
Tabel 236 Rincian Aset Lain-lain Berupa Aset Lain-lain Per 31 Desember 2024 dan 2023 233
Tabel 237 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2024 234

Halaman

dan 2023 ....

Tabel 238 Nilai Perolehan, Akumulasi Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 234

Tabel 239 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 234

Tabel 240 Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Lain-lain Tahun 2024 234

Tabel 241 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Per 31 Des 2024 dan 2023 235

Tabel 242 Kewajiban Per 31 Desember 2024 dan 2023 236

Tabel 243 Utang PFK Per 31 Desember 2024 dan 2023 236

Tabel 244 Utang Bunga Per 31 Desember 2024 dan 2023 237

Tabel 245 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Per 31 Desember 2024 dan 2023 237

Tabel 246 Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2024 dan 2023 238

Tabel 247 Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023 239

Tabel 248 Utang Belanja tiap OPD Per 31 Desember 2024 dan 2023 239

Tabel 249 Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 242

Tabel 250 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Per 31 Desember 2024 dan 2023 243

Tabel 251 Pendapatan LO TA 2024 dan 2023 244

Tabel 252 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO TA 2024 dan 2023 244

Tabel 253 PAD – Pajak Daerah – LO TA 2024 dan 2023 245

Tabel 254 Perbedaan PAD – Pajak Daerah dan LO TA 2024 245

Tabel 255 Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO TA 2024 dan Pendapatan Pajak 2023 yang disatukan menjadi PBJT-LO Tahun 2024 247

Tabel 256 Perbedaan Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO dan LRA 247

Tabel 257 Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023 249

Tabel 258 Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2024 dan 2023 249

Tabel 259 Perbedaan Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO dan LRA 250

Tabel 260 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023 251

Tabel 261 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2024 dan 2023 252

Tabel 262 Perbedaan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO dan LRA 252

Tabel 263 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023 255

Tabel 264 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 dan 2023 256

Tabel 265 Perbedaan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertetnu-LO dan LRA 256

Tabel 266 Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023 257

Tabel 267 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2024 dan 2023 257

Tabel 268 Perbedaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan LRA 257

Tabel 269 Lain-lain PAD yang Sah - LO TA 2024 dan 2023 258

Tabel 270 Perbedaan Lain-lain PAD yang Sah-LO dan LRA 259

Tabel 271 Lain-lain PAD yang Sah - LO per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023 263

Tabel 272 Pendapatan Transfer – LO TA 2024 dan 2023 264

Tabel 273 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2024 dan 2023 265

Tabel 274 Dana Perimbangan – DBH Pajak TA 2024 dan 2023 265

Halaman

Tabel 275 Perbedaan Dana Perimbangan-DBH Pajak-LO dan LRA 265
Tabel 276 Dana Perimbangan – DBH Sumber Daya Alam TA 2024 dan 2023 267
Tabel 277 Perbedaan Dana Perimbangan-DBH SDA-LO dan LRA 267
Tabel 278 Dana Alokasi Umum TA 2024 dan 2023 269
Tabel 279 Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan 2023 270
Tabel 280 Perbedaan Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO dan LRA 270
Tabel 281 Dana Alokasi Khusus Per Bidang Kegiatan TA 2024 dan 2023 270
Tabel 282 Insentif Fiskal TA 2024 dan 2023 275
Tabel 283 Perbedaan Dana Insentif Fiskal- LO dan LRA 275
Tabel 284 Dasar Hukum Penetapan Transfer Antar Daerah 276
Tabel 285 Transfer Pemerintah Provinsi TA 2024 dan 2023 276
Tabel 286 Rincian Transfer Pemerintah Provinsi TA 2024 dan 2023 276
Tabel 287 PerbedaanTransfer Pemerintah Provinsi - LO dan LRA 276
Tabel 288 Pendapatan Hibah - LO TA 2024 dan 2023 279
Tabel 289 Rincian Pendapatan Hibah - LO TA 2024 dan 2023 279
Tabel 290 Beban Daerah TA 2024 dan 2023 280
Tabel 291 Beban Operasi TA 2024 dan 2023 280
Tabel 292 Beban Pegawai TA 2024 dan 2023 280
Tabel 293 Perbedaan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun 2024 281
Tabel 294 Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023 284
Tabel 295 Selisih Beban Barang dan Jasa dengan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 285
Tabel 296 Beban Bunga TA 2024 dan 2023 290
Tabel 297 Beban Bunga Per Bulan Tahun 2024 290
Tabel 298 Beban Hibah TA 2024 dan 2023 291
Tabel 299 Selisih Beban Hibah dengan Belanja Hibah Tahun 2024 291
Tabel 300 Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 292
Tabel 301 Beban Penyisihan Piutang TA 2024 dan 2023 292
Tabel 302 Beban Penyisihan Piutang Per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023 292
Tabel 303 Perhitungan Beban Penyisihan Piutang TA 2024 294
Tabel 304 Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023 295
Tabel 305 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023 295
Tabel 306 Beban Bagi Hasil TA 2024 dan 2023 296
Tabel 307 Selisih Beban Bagi Hasil dengan Belanja Bagi Hasil Tahun 2024 296
Tabel 308 Beban Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023 297
Tabel 309 Selisih Beban Bantuan Keuangan dengan Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024 297
Tabel 310 Rincian Surplus Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023 297
Tabel 311 Rincian Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO 2024 dan 2023 298
Tabel 312 Rincian Beban Luar Biasa TA 2024 dan 2023 298
Tabel 313 Arus Kas Per 31 Desember 2024 dan 2023 300
Tabel 314 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2024 dan 2023 300
Tabel 315 Arus Masuk Kas dari PAD Tahun 2024 dan 2023 300
Tabel 316 Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023 301
Tabel 317 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023 303
Tabel 318 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 304
Tabel 319 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2024 dan 2023 305
Tabel 320 Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2024 dan 2023 305
Tabel 321 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2024 306
Tabel 322 Penjelasan Perbedaan Laporan Operasional dengan LRA 311

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1 PDRB Perkapita Lampung Barat Tahun 2019 - 2023 37

Grafik 2 Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2019 - 2024 37

Grafik 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 – 2023 40

Grafik 4 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Barat 2019-2024 41

Grafik 5 Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Lampung Barat 2013-2024 (dalam miliar rupiah) 49

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Rekap Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah TA 2024
Lampiran	2	Rekap Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Per Perangkat Daerah TA 2024
Lampiran	3	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024
Lampiran	4	Rekap Pembayaran Bunga TA 2024
Lampiran	5	Rincian Belanja Hibah TA 2024
Lampiran	6	Rincian Belanja Hibah Aset Tetap TA 2024
Lampiran	7	Rincian Belanja Tidak Terduga TA 2024
Lampiran	8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa TA 2024
Lampiran	9	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa TA 2024
Lampiran	10	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa (DD) TA 2024
Lampiran	11	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa (ADD) TA 2024
Lampiran	12	Daftar Rekening Tidak Dipergunakan Tahun 2024
Lampiran	13	Daftar Rekening Masih Dipergunakan Tahun 2024 belum ada SK Bupati
Lampiran	14	Rincian Sisa Kas pada BLUD Puskesmas Per 31 Desember 2024
Lampiran	15	Rincian Sisa Kas pada Bendahara BOSP Per 31 Desember 2024
Lampiran	16	Daftar Piutang Per 31 Desember 2024
Lampiran	17	Aging Schedule Piutang Per 31 Desember 2024
Lampiran	18	Mutasi Penyisihan Piutang Per Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran	19	Rincian Persediaan obat Kedaluwarsa sampai dengan 31 Desember 2024
Lampiran	20	Rincian Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang Per 31 Desember 2024
Lampiran	21	Rincian Utang pada PT Sarana Multi Infrastruktur
Lampiran	22	Daftar Analisis Umur & Penyisihan Dana Bergulir Per 31 Desember 2024
Lampiran	23	Daftar Tagihan Jangka Panjang Per 31 Desember 2024
Lampiran	24	Rincian Pendapatan Hibah - LO TA 2024
Lampiran	25	Rincian Aset Tetap Per Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran	26	Data Bidang Tanah Berdasarkan Bukti Kepemilikan
Lampiran	27	Rincian Aset Tetap Tanah Per Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran	28	Mutasi Kurang Penghentian Aset Tanah
Lampiran	29	Rincian Aset Peralatan dan Mesin Per Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran	30	Mutasi Aset Peralatan dan Mesin
Lampiran	31	Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran	32	Reklasifikasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Ke Aset Peralatan Dan Mesin
Lampiran	33	Mutasi Kurang Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Ke Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Lampiran	34	Mutasi Kurang Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran	35	Mutasi Kurang Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Ke Aset Extra Comptable

Lampiran	36	Mutasi Kurang Reklasifikasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Ke Non Aset
Lampiran	37	Mutasi Tambah Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Ke Aset Gedung Dan Bangunan
Lampiran	38	Mutasi Tambah Mutasi SKPD Gedung Dan Bangunan
Lampiran	39	Mutasi Kurang Penghentian Aset Gedung Dan Bangunan
Lampiran	40	Mutasi Kurang Mutasi Skpd Gedung Dan Bangunan
Lampiran	41	Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Per Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran	42	Mutasi Tambah Reklasifikasi Aset Peralatan Dan Mesin Ke Aset Jalan, Irigasi, dan Bangunan
Lampiran	43	Mutasi Tambah Reklasifikasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Ke Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Lampiran	44	Mutasi Tambah Mutasi SKPD Atas Aset Jalan, Irigasi, Dan Jaringan
Lampiran	45	Rincian Aset Tetap Lainnya Per Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran	46	Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024
Lampiran	47	Rincian Aset Tak Berwujud Per Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran	48	Rincian Aset Lain-Lain Per Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran	49	Koreksi Akumulasi Penyusutan JJI SMT II 2023
Lampiran	50	Beban Penyusutan Tahun 2024
Lampiran	51	Daftar Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024
Lampiran	52	Perhitungan Utang Bunga Tahun 2024

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

ADHB	:	Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	:	Atas Dasar Harga Konstan
ADP	:	Alokasi Dana Pekon
AHH	:	Angka Harapan Hidup
AJP	:	Ayat Jurnal Penyesuaian
AKI - AKB	:	Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
AMPK	:	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
ATM	:	Anjungan Tunai Mandiri

B

BAPENDA	:	Badan Pendapatan Daerah
BAST	:	Berita Acara Serah Terima
BBNKB	:	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BI	:	Bank Indonesia
BKAD	:	Badan Keuangan dan Aset Dareah
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BMD	:	Barang Milik Daerah
BMN	:	Barang Milik Negara
BOKKB-BOK	:	Bantuan Operasional Kesehatan Keluarga Berencana - Bantuan Operasional Kesehatan
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BOSP-BOP Kesetaraan	:	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan - Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
BOSP-BOP-PAUD	:	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan - Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini.
BOSP-BOS	:	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan - Bantuan Operasional Sekolah
BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPHTB	:	Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK RI	:	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BRIDA	:	Badan Riset dan Inovasi Daerah
BTT	:	Belanja Tidak Terduga
BUD	:	Bendahara Umum Daerah
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negera

C

CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
CHT	:	Cukai Hasil Tembakau
Covid-19	:	Corona Virus Disease 2019

D

DAK Fisik	:	Dana Alokasi Khusus Fisik

DAK Non Fisik	:	Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Dana BOSP	:	Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
Dana TDF	:	Dana Treasury Deposit Facility
Danramil	:	Komandan Komando Rayon Militer
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DBH	:	Dana Bagi Hasil
Dinas PMP	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Dinas PP, KB PP dan PA	:	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas PU PR	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dinkes	:	Dinas Kesehatan
Diskominfo	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
DPA	:	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DSCR	:	Debt Service Coverage Ratio
DSR	:	Debt Service Ratio
DTU	:	Dana Transfer Umum
F		
FLS2N	:	Festival Lomba Seni Siswa Nasional
H		
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HLS	:	Harapan Lama Sekolah
I		
IKM	:	Industri Kecil Menengah
IKN	:	Ibu Kota Nusantara
ILO	:	International Labor Organization
IPH	:	Indeks Perkembangan Harga
IPH M4	:	Indeks Perkembangan Harga Minggu Ke 4
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
J		
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
K		
KAP	:	Kantor Akuntan Publik
Kapolsek	:	Kepala Kepolisian Sektor
KDH/WKDH	:	Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
Kepmendagri	:	Keputusan Menteri Dalam Negeri
KIN	:	Kebijakan Industri Nasional
KIPI	:	Kejadian Ikutan Pascaimunisasi
KJA	:	Keramba Jaring Apung
KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
KSPN	:	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
KTP	:	Kartu Tanda Penduduk

KUA	:	Kebijakan Umum Anggaran
L		
LAK	:	Laporan Arus Kas
LHA KAP	:	Laporan Hasil Audit,Kantor Akuntan Publik
LKBB	:	Lembaga Keuangan Bukan Bank
LKPD	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LLAJ	:	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
LPSAL	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
M		
MBLB	:	Mineral Bukan Logam dan Batuan
N		
NJOP	:	Nilai Jual Objek Pajak
NJOPTKP	:	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
NPHD	:	Naskah Perjanjian Hibah Daerah
O		
O2SN	:	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
ODHIV	:	Orang dengan Human Immunodeficiency Virus
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
Opsen BBNKB	:	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Opsen PKB	:	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
OSN	:	Olimpiade Sains Nasional
P		
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PAP	:	Pajak Air Permukaan
PAT	:	Pajak Air Tanah
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan
PBB P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PBBKB	:	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PBG	:	Persetujuan Bangunan Gedung
PBJT	:	Pajak Barang dan Jasa Tertentu
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
PDRD	:	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PEN	:	Pemulihan Ekonomi Nasional
Perda	:	Peraturan Daerah
Perpres	:	Peraturan Presiden
PFK	:	Perhitungan Fihak Ketiga
Pj.	:	Penjabat
PK2UKM	:	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Plt.	:	Pelaksana Tugas
PMI	:	Palang Merah Indonesia
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan

PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PPAS	:	Prioritas Plafon Anggaran Sementara
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPK BLUD	:	Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
PPKD	:	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPK-PD	:	Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah
PPK-SKPD	:	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
PPPK	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Prolanis	:	Pengelolaan Penyakit Kronis
PSDH	:	Provisi Sumber Daya Hutan
PT BPRS	:	PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda)
PT PLN	:	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT SMI	:	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PTSP	:	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PTUN	:	Pengadilan Tata Usaha Negara
PUD	:	Produk Unggulan Daerah

R

RAKERNAS	:	Rapat Kerja Nasional
RAPBD	:	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Renstra	:	Rencana Strategis
RIPIN	:	Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKUD	:	Rekening Kas Umum Daerah
RKUN	:	Rekening Kas Umum Negara
RLS	:	Rata-rata Lama Sekolah
RPD	:	Rencana Pembangunan Daerah
RPIK	:	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten
RPJPD	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham

S

SAKERNAS	:	Survei Angkatan Kerja Nasional
SAKIP	:	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
Satdikdas	:	Satuan Pendidikan Dasar
SBU	:	Standar Biaya Umum
SD	:	Sekolah Dasar
SDA	:	Sumber Daya Alam
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SiKPA	:	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SiLPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIPD RI	:	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia
SK Bupati	:	Surat Keputusan Bupati
SK Gub	:	Surat Keputusan Gubernur
SKHU	:	Surat Kabar Harian Umum
SKP2K	:	Surat Ketetapan Penggantian Pajak dan/atau Kepabeanan
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPKD	:	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

SKRD	:	Surat Ketetapan Retribusi Daerah
SKTJM	:	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SP	:	Sensus Penduduk
SP2010	:	Sensus Penduduk Tahun 2010
SP2020	:	Sensus Penduduk Tahun 2020
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SPAM IKK	:	Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan
SPAM PDAM	:	Sistem Penyediaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum
SPBE	:	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
SUPAS	:	Survei Penduduk Antar Sensus
SUSENAS	:	Survei Sosial Ekonomi Nasional
T		
TA	:	Tahun Anggaran
Tamsil Guru PNSD	:	Tambahan Penghasilan Guru PNSD
THR	:	Tunjangan Hari Raya
TK	:	Taman Kanak-kanak
TKD	:	Transfer ke Daerah
TKG PNSD	:	Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
TP/TGR	:	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPG PNSD	:	Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
TPP	:	Tambahan Penghasilan Pegawai
TPT	:	Tingkat Pengganggguran Terbuka
U		
UHH	:	Usia Harapan Hidup
UKM	:	Usaha Kecil Menengah
Ukom	:	Ujian Kompetensi
UKT	:	Uang Kuliah Tunggal
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UPTD	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU	:	Undang Undang
UUD 1945	:	Undang – Undang Dasar Tahun 1945
W		
WP	:	Wajib Pajak
WPOPDN	:	Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
WPPI	:	Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri
Z		
ZNT	:	Zona Nilai Tanah

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Hubungan Antar Laporan Keuangan Tahun 2024 310

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Liwa, 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

Jl. Raden Intan II No. 1 Way Mengaku, Liwa 34811 Telp (0728) 21155 Fax. (0728) 21139

RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realiasai Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPD ini merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan PPKD.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi APBD untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 secara ringkas disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. Ringkasan Realisasi APBD TA 2024 dan 2023

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023	Naik/ (Turun)	
		Anggaran	Realisasi	%		Jumlah	%
1	Pendapatan Daerah	1.119.418.377.234,92	1.111.191.957.433,81	99,27	985.836.203.764,84	125.355.753.668,97	12,72
2	Belanja Daerah	1.130.182.927.936,00	1.068.232.029.400,82	94,52	984.409.205.393,80	83.822.824.007,02	8,52
3	Surplus/ (Defisit) Anggaran	(10.764.550.701,08)	42.959.928.032,99	(399,09)	1.426.998.371,04	41.532.929.661,95	2.910,51
4	Pembiayaan Netto	10.764.550.701,08	10.765.115.181,08	100,01	29.256.214.950,04	(18.491.099.768,96)	(63,20)
5	**SiLPA (SiKPA)**	**0,00**	**53.725.043.214,07**	**-**	**30.683.213.321,08**	**23.041.829.892,99**	**75,10**

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

SiLPA sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp53.725.043.214,07 menghasilkan SAL akhir sebesar Rp53.725.043.214,07. Berikut merupakan ringkasan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2024 dan 2023.

Tabel 2. Ringkasan Laporan Perubahan SAL Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)	Naik/ (Turun)	
				Jumlah	%
1.	SAL Awal	30.683.213.321,08	48.174.340.190,04	(17.491.126.868,96)	(36,31)
2.	Penggunaan SAL	(30.683.213.321,08)	(48.174.340.190,04)	(17.491.126.868,96)	(36,31)
3.	SiLKPA/SiKPA	53.725.043.214,07	30.683.213.321,08	23.041.829.892,99	75,10
4.	**SAL Akhir (1 s.d. 3)**	**53.725.043.214,07**	**30.683.213.321,08**	**23.041.829.892,99**	**75,10**

3. NERACA

Berikut merupakan ringkasan Neraca Per 31 Desember 2024 dan 2023.

Tabel 3. Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Des 2024 (Audited)	31 Des 2023 (Audited)	Naik/ (Turun)	
				Jumlah	%
1.	**Aset**				
	Aset Lancar	137.930.836.166,19	92.436.350.839,98	45.494.484.326,21	49,22
	Investasi Jangka Panjang	43.574.267.933,83	41.330.213.725,66	2.244.054.208,17	5,43
	Aset Tetap	2.539.729.666.032,10	2.558.944.191.578,45	(19.214.525.546,35)	(0,75)
	Aset Lainnya	197.386.200.457,74	225.439.714.024,39	(28.053.513.566,65)	(12,44)
	Total Aset	**2.918.620.969.589,86**	**2.918.150.470.168,48**	**470.499.421,38**	**0,02**

No	Uraian	31 Des 2024 (Audited)	31 Des 2023 (Audited)	Naik/ (Turun)	
				Jumlah	%
2.	**Kewajiban**				
	Kewajiban Jangka Pendek	40.029.721.447,25	29.937.934.224,15	10.091.787.223,10	33,71
	Kewajiban Jangka Panjang	16.424.888.255,00	34.342.951.595,00	(17.918.063.340,00)	(52,17)
	Total Kewajiban	**56.454.609.702,25**	**64.280.885.819,15**	**(7.826.276.116,90)**	**(12,18)**
3.	**Ekuitas**	**2.862.166.359.887,61**	**2.853.869.584.349,33**	**8.296.775.538,28**	**0,29**
4.	**Total Kewajiban dan Ekuitas**	**2.918.620.969.589,86**	**2.918.150.470.168,48**	**470.499.421,38**	**0,02**

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 secara ringkas disajikan sebagai berikut.

Tabel 4. Ringkasan Laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)	Naik/ (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Pendapatan Daerah	1.059.015.841.156,39	936.480.581.676,54	122.535.259.479,85	13,08
2.	Beban Daerah	957.858.382.214,46	872.633.550.490,49	85.224.831.723,97	9,77
3.	Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional	101.157.458.941,93	63.847.031.186,05	**37.310.427.755,88**	**58,44**
4.	Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(5.678.954.218,00)	(13.245.157,00)	**(5.665.709.061,00)**	**42.775,70**
5.	Surplus / (Defisit) dari Pos Luar Biasa	(1.878.670.650,00)	(5.111.576.537,00)	**3.232.905.887,00**	**(63,25)**
6.	Surplus / (Defisit) LO	93.599.834.073,93	58.722.209.492,05	34.877.624.581,88	59,39

5. LAPORAN ARUS KAS

Ringkasan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 secara ringkas disajikan sebagai berikut.

Tabel 5. Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)	Naik/ (Turun)	
				Jumlah	%
1.	**Saldo Awal Kas**	**30.858.681.962,23**	**48.306.801.785,85**	**(17.448.119.823,62)**	**(36,12)**
2.	**Kenaikan / (Penurunan) Kas**				
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	198.308.591.695,99	118.233.860.915,04	80.074.730.780,95	67,73
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(157.348.663.663,00)	(117.808.862.544,00)	(39.541.801.119,00)	33,56
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(17.918.098.140,00)	(17.918.125.240,00)	27.100,00	(0,00)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(162.309.324,15)	43.007.045,34	(205.316.369,49)	(477,40)
	Kenaikan / (Penurunan) Kas	**22.879.520.568,84**	**(17.448.119.823,62)**	**40.327.640.392,46**	**(231,13)**
3.	**Saldo Akhir Kas**	**53.738.202.531,07**	**30.858.681.962,23**	**22.879.520.568,84**	**74,14**

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 secara ringkas disajikan sebagai berikut.

Tabel 6. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)	Naik/ (Turun)	
				Jumlah	%
1.	**Ekuitas Awal**	**2.803.869.304.349,33**	**2.766.774.673.857,60**	**87.094.710.491,73**	**3,15**
2.	Surplus/ (Defisit) – LO	**93.599.834.073,93**	58.722.209.492,05	34.877.624.581,88	59,39
3.	Koreksi-koreksi yang langsung Menambah/ Mengurangi Ekuitas	(85.303.058.535,65)	28.372.500.999,68	(113.675.559.535,33)	(400,65)
4.	**Ekuitas Akhir**	**2.862.166.359.887,61**	**2.853.869.584.349,33**	**8.296.775.538,28**	**0,29**

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) LKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 (*Audited*) memuat informasi antara lain sebagai berikut.

a. Informasi mengenai entitas pelaporan dan entitas akuntansi

LKPD merupakan laporan konsolidasian yang disusun oleh entitas pelaporan pemerintah daerah terdiri dari 45 Perangkat Daerah sebagai Entitas Akuntansi dan 1 PPKD sebagai Entitas Pelaporan.

b. Ekonomi Makro

Berikut merupakan ringkasan capaian makro ekonomi sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 7. Ringkasan Ekonomi Makro

No	Uraian	Satuan/Unit	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2023	Naik/ (Turun)	
					Jumlah	%
1.	Penduduk[1]	Orang	313.756	310.990	2.766	0,89
2.	Angka Harapan Hidup[2]	Tahun	73,96	73,78	0,18	0,24
3.	Angka Melek Huruf Usia 15+[2]	%	98,59	98,34	0,25	0,25
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK[2]	%	82,83	82,01	0,82	1,00
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka – TPT[2]	%	2,09	2,25	(0,16)	(7,11)
6.	Penduduk Miskin[2]	Juta Orang	0,0334	0,0347	(0,0013)	(3,75)
7.	Persentase Penduduk Miskin[2]	%	10,68	11,17	(0,49)	(4,39)
8.	Indeks Pembangunan Manusia (UHH SP2020)[2]	-	72,41	71,72	0,69	0,96
9.	PDRB / GRDP[2]					
	- PDRB ADHB / *at current price*	Triliun Rupiah	9,903	9,017	0,89	9,87
	- PDRB Per Kapita Harga Berlaku	Juta Rupiah	31,35	28,86	2,49	8,63
10.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Tahun Dasar 2010)[2]	%	4,36	4,68	(0,32)	(6,84)
11.	Indeks Perkembangan Harga (IPH) M4 Desember[2]	-	2,35	(1,21)	3,56	(294,21)
12.	Inflasi (yoy) **Provinsi Lampung** / IHK 2022=100[3]	%	1,57	3,47	(1,90)	(54,76)
13.	Mandatory Spending[4]					
	a. Belanja Bidang Pendidikan (20%)	%	30,70	30,90	(0,20)	(0,65)
	b. Belanja Bidang Kesehatan (10%)	%	16,53	18,88	(0,35)	(1,85)
	c. Belanja Pengawasan (0,75%)	%	0,71	0,91	(0,20)	(21,98)
	d. Bagi Hasil Pajak Daerah ke Pekon (10%)	%	9,31	9,47	(0,16)	(1,69)
	e. Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Pekon (10%)	%	10,14	9,88	0,26	2,63
	f. Belanja ADP ke Pekon (10%)	%	10,11	9,92	0,19	1,92
	g. Belanja Infrastruktur	%	42,24	40,31	1,93	4,79

Sumber : [1] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Barat, Buku Agregat DKB II 2024
[2] BPS Lampung Barat, LBDA 2025 Volume 33, 2025
[3] BPS Prov.Lampung, PLDA 2025 Volume 56, 2025
[4] PTj, APBD Kab. Lampung Barat TA 2024

c. Ikhtisar hasil pencapaian target keuangan berupa penjelasan mengenai hasil pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari kinerja pendapatan dan kinerja belanja APBD.

d. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan LKPD Tahun 2024 mengacu kepada PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan yang tercantum dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Kebijakan akuntansi dalam penyusunan LKPD ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Catatan	2024 (Audited)			2023 (Audited)
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7
1	**PENDAPATAN DAERAH**	5.1.1.				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	5.1.1.1.				
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1.	15.567.332.172,00	15.820.932.785,00	101,63	14.854.325.262,00
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2.	2.356.824.872,00	2.166.946.349,00	91,94	2.305.628.800,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3.	5.854.018.934,00	5.854.018.934,91	100,00	5.653.827.320,95
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4.	45.482.770.679,32	47.981.878.678,90	105,49	45.934.744.371,89
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (3 s.d. 6)**		**69.260.946.657,32**	**71.823.776.727,81**	**103,70**	**68.748.525.754,84**
8	**PENDAPATAN TRANSFER**	5.1.1.2.				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1.	963.684.407.500,00	956.625.034.394,00	99,27	855.646.664.112,00
10	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2.	86.473.023.077,60	82.743.146.312,00	95,69	61.441.013.898,00
11	**Jumlah Pendapatan Transfer (9 s.d. 10)**		**1.050.157.430.577,60**	**1.039.368.180.706,00**	**98,97**	**917.087.678.010,00**
12	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	5.1.1.3.				
13	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (13)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**JUMLAH PENDAPATAN (7 + 11 + 14)**		**1.119.418.377.234,92**	**1.111.191.957.433,81**	**99,27**	**985.836.203.764,84**
16	**BELANJA DAERAH**	5.1.2.				
17	**BELANJA OPERASI**	5.1.2.1.				
18	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.	478.369.824.473,00	444.086.880.344,07	92,83	413.304.423.702,00
19	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2.	264.580.882.920,00	247.658.956.651,75	93,60	243.673.449.949,80
20	Belanja Bunga	5.1.2.1.3.	3.720.929.625,00	2.534.971.060,00	68,13	3.555.499.082,00
21	Belanja Subsidi	5.1.2.1.4.	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Hibah	5.1.2.1.5.	40.336.230.502,00	40.232.656.643,00	99,74	32.310.714.788,00
23	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6.	45.000.000,00	0,00	0,00	244.550.000,00
24	**Jumlah Belanja Operasi (18 s.d. 23)**		**787.052.867.520,00**	**734.513.264.698,82**	**93,32**	**693.088.637.501,80**
25	**BELANJA MODAL**	5.1.2.2.				
26	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2.	20.805.825.852,00	20.116.516.662,00	96,69	23.471.410.062,00
28	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3.	96.479.225.145,00	88.928.047.259,00	92,17	20.128.517.160,00
29	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.1.2.2.4.	41.635.055.304,00	41.372.206.332,00	99,37	67.418.166.745,00
30	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5.	4.774.708.633,00	4.734.413.410,00	99,16	5.836.651.645,00
31	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6.	197.930.000,00	197.480.000,00	99,77	152.680.500,00
32	**Jumlah Belanja Modal (26 s.d. 31)**		**163.892.744.934,00**	**155.348.663.663,00**	**94,79**	**117.007.426.132,00**
33	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	5.1.2.3.				
34	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1.	2.150.745.082,00	1.961.201.439,00	91,19	1.508.132.360,00
35	**Jumlah Belanja Tidak Terduga (34)**		**2.150.745.082,00**	**1.961.201.439,00**	**91,19**	**1.508.132.360,00**
36	**BELANJA TRANSFER**	5.1.2.4.				
37	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1.	2.370.534.400,00	1.692.883.600,00	71,41	1.634.829.400,00
38	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2.	174.716.036.000,00	174.716.036.000,00	100,00	171.170.180.000,00
39	**Jumlah Belanja Transfer (37 s.d. 38)**		**177.086.570.400,00**	**176.408.899.600,00**	**99,62**	**172.805.009.400,00**
40	**JUMLAH BELANJA DAERAH (24+32+35+39)**		**1.130.182.927.936,00**	**1.068.232.029.400,82**	**94,52**	**984.409.205.393,80**
41	**SURPLUS / (DEFISIT) (15 - 40)**	5.1.3	**(10.764.550.701,08)**	**42.959.928.032,99**	**(399,09)**	**1.426.998.371,04**
42	**PEMBIAYAAN DAERAH**	5.1.4.				
43	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	5.1.4.1.				
44	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.1.	30.683.213.321,08	30.683.213.321,08	100,00	48.174.340.190,04
45	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.4.1.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan (44 s.d. 45)**		**30.683.213.321,08**	**30.683.213.321,08**	**100,00**	**48.174.340.190,04**
47	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	5.1.4.2.				
48	Penyertaan Modal Daerah	5.1.4.2.1.	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
49	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.4.2.2.	17.918.662.620,00	17.918.098.140,00	100,00	17.918.125.240,00
50	**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (48 s.d. 49)**		**19.918.662.620,00**	**19.918.098.140,00**	**100,00**	**18.918.125.240,00**
51	**PEMBIAYAAN NETO (46 - 50)**		**10.764.550.701,08**	**10.765.115.181,08**	**100,01**	**29.256.214.950,04**
52	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (41 + 51)**	5.1.5	**(0,00)**	**53.725.043.214,07**	**0,00**	**30.683.213.321,08**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAPORAN PERUBAHAN SAL

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2024 (*Audited*)	2023 (*Audited*)
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1.	30.683.213.321,08	48.174.340.190,04
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2.	30.683.213.321,08	48.174.340.190,04
3	**Subtotal (1-2)**		**0,00**	**0,00**
4	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3.	53.725.043.214,07	30.683.213.321,08
5	**Subtotal (3+4)**		**53.725.043.214,07**	**30.683.213.321,08**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4.	0,00	0,00
7	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6)**	**5.2.5.**	**53.725.043.214,07**	**30.683.213.321,08**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2024 (Audited)	2023 (Audited)
1	2	3	4	5
1	**ASET**	**5.3.1.**		
2	**ASET LANCAR**	**5.3.1.1.**		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.	50.743.497.315,01	25.819.052.572,19
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2.	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3.	0,00	0,00
6	Kas di BLUD	5.3.1.1.4.	2.651.046.117,70	4.597.603.900,41
7	Kas Dana BOS	5.3.1.1.5.	0,00	281.132.047,63
8	Kas Lainnya	5.3.1.1.6.	0,00	15.842.200,00
9	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.7.	168.387.764,38	0,00
10	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.8.	175.271.334,00	145.051.242,00
11	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.9.	47.271.712,00	55.285.946,00
12	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.10.	3.905.529.291,00	41.882.856,00
13	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.11.	118.450.130,00	0,00
14	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.12.	167.260.589,28	2.501.714.574,80
15	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.13.	2.000.176.000,00	112.945.547,00
16	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.14.	64.358.083.112,00	58.541.978.212,00
17	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.15.	(1.382.162.549,78)	(13.464.942.016,30)
18	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.16.	13.081.250,00	13.081.250,00
19	Persediaan	5.3.1.1.17.	14.964.943.100,62	13.775.722.508,25
20	**Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 19)**		**137.930.835.166,19**	**92.436.350.839,98**
21	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**5.3.1.2.**		
22	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1.	1.318.613.500,00	438.454.309,00
23	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2.	42.255.654.433,83	40.891.759.416,66
24	**Jumlah Investasi Jangka Panjang (22 s.d. 23)**		**43.574.267.933,83**	**41.330.213.725,66**
25	**ASET TETAP**	**5.3.1.3.**		
26	Tanah	5.3.1.3.1.	652.407.269.415,00	652.395.963.880,00
27	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2.	496.992.316.759,69	478.161.840.538,69
28	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3.	962.812.710.355,34	934.369.586.791,34
29	Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.3.1.3.4.	2.147.722.976.063,07	2.064.141.579.802,07
30	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5.	74.975.254.591,39	70.217.802.881,39
31	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6.	42.683.942.566,00	1.787.455.818,00
32	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7.	(1.837.864.803.718,39)	(1.642.130.036.933,04)
33	**Nilai Buku Aset Tetap (26 s.d. 32)**		**2.539.729.666.032,10**	**2.558.944.191.578,45**
34	**DANA CADANGAN**	**5.3.1.4.**		
35	Dana Cadangan	5.3.1.4.1.	0,00	0,00
36	**Jumlah Dana Cadangan (35)**		**0,00**	**0,00**
37	**ASET LAINNYA**	**5.3.1.5.**		
38	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1.	9.536.724.645,74	3.508.157.928,39
39	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.2.	3.865.476.371,00	3.667.996.371,00
40	Aset Lain-lain	5.3.1.5.3.	219.918.057.970,00	217.471.012.300,00
41	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.4.	(3.107.357.122,00)	(2.870.439.575,00)
42	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.5.5.	(32.978.062.407,00)	0,00
43	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.6.	151.861.000,00	3.662.987.000,00
44	**Jumlah Aset Lainnya (38 s.d. 43)**		**197.386.200.457,74**	**225.439.714.024,39**
45	**PROPERTI INVESTASI**	**5.3.1.6.**		
46	Properti Investasi Tanah	5.3.1.6.1.	0,00	0,00
47	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.6.2.	0,00	0,00
48	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.6.3.	0,00	0,00
49	**Jumlah Properti Investasi (46 s.d. 48)**		**0,00**	**0,00**
50	**JUMLAH ASET (20+24+33+36+44+49)**		**2.918.620.969.589,86**	**2.918.150.470.168,48**

NO	URAIAN	Catatan	2024 (Audited)	2023 (Audited)
1	2	3	4	5
51	**KEWAJIBAN**	**5.3.2.**		
52	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**5.3.2.1.**		
53	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1.	10.228.878,00	172.538.202,15
54	Utang Bunga	5.3.2.1.2.	32.396.851,00	49.299.557,00
55	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.3.	17.918.063.340,00	17.918.063.340,00
56	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.4.	8.483.850.689,25	3.430.680.684,00
57	Utang Belanja	5.3.2.1.5.	11.130.322.842,00	7.983.610.755,00
58	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6.	2.454.658.847,00	383.741.686,00
59	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (53 s.d. 58)**		**40.029.721.447,25**	**29.937.934.224,15**
60	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**5.3.2.2.**		
61	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.3.2.2.1.	16.424.888.255,00	34.342.951.595,00
62	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (61)**		**16.424.888.255,00**	**34.342.951.595,00**
63	**JUMLAH KEWAJIBAN (59 + 62)**		**56.454.609.702,25**	**64.280.885.819,15**
64	**EKUITAS**	**5.3.3.**		
65	**EKUITAS**	**5.3.3.1.**		
66	Ekuitas	5.3.3.1.1.	2.862.166.359.887,61	2.853.869.584.349,33
67	**JUMLAH EKUITAS (66)**		**2.862.166.359.887,61**	**2.853.869.584.349,33**
68	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (63 + 67)**		**2.918.620.969.589,86**	**2.918.150.470.168,48**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	Catatan	2024 (*Audited*)	2023 (*Audited*)
1	2	3	4	5
1	**PENDAPATAN DAERAH-LO**	**5.4.1.**		
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	**5.4.1.1.**		
3	Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1.	15.812.918.531,00	14.870.851.762,00
4	Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2.	38.100.447.232,00	2.356.222.250,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3.	5.972.469.064,91	4.895.841.920,94
6	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4.	21.845.619.337,48	48.965.554.967,60
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO (3 s.d. 6)**		**81.731.454.165,39**	**71.088.470.900,54**
8	**PENDAPATAN TRANSFER-LO**	**5.4.1.2.**		
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5.4.1.2.1.	836.551.403.847,00	739.244.658.525,00
10	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.2.2.	88.559.251.212,00	103.093.724.029,00
11	**Jumlah Pendapatan Transfer - LO (9 s.d. 10)**		**925.110.655.059,00**	**842.338.382.554,00**
12	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO**	**5.4.1.3.**		
13	Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.1.	52.173.731.932,00	23.053.728.222,00
14	**Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO (13)**		**52.173.731.932,00**	**23.053.728.222,00**
15	**JUMLAH PENDAPATAN DAERAH - LO (7+11+14)**		**1.059.015.841.156,39**	**936.480.581.676,54**
16	**BEBAN DAERAH**	**5.4.2.**		
17	**BEBAN OPERASI**	**5.4.2.1.**		
18	Beban Pegawai	5.4.2.1.1.	445.438.193.423,07	414.097.472.312,00
19	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2.	252.185.752.710,38	245.179.858.903,10
20	Beban Bunga	5.4.2.1.3.	2.518.033.554,00	3.604.736.719,00
21	Beban Subsidi	5.4.2.1.4.	0,00	0,00
22	Beban Hibah	5.4.2.1.5.	51.766.978.290,00	32.310.714.788,00
23	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.6.	0,00	244.550.000,00
24	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.7.	342.946.375,66	10.408.433.265,21
25	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.8.	147.462.735.661,35	111.250.768.130,18
26	**Jumlah Beban Operasi (18 s.d. 25)**		**899.714.640.014,46**	**817.096.534.117,49**
27	**BEBAN TRANSFER**	**5.4.2.2.**		
28	Beban Bagi Hasil	5.4.2.2.1.	1.798.762.200,00	1.715.995.373,00
29	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.2.2.	56.344.980.000,00	53.821.021.000,00
30	**Jumlah Beban Transfer (28 s.d. 29)**		**58.143.742.200,00**	**55.537.016.373,00**
31	**JUMLAH BEBAN (26 + 30)**		**957.858.382.214,46**	**872.633.550.490,49**
32	**SURPLUS/ (DEFISIT) DARI OPERASI (15-31)**	**5.4.2.3.**	**101.157.458.941,93**	**63.847.031.186,05**
33	**SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**	**5.4.3.**		
34	**SURPLUS NON OPERASIONAL-LO**	**5.4.3.1.**		
35	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.3.1.1.	0,00	160.196.170,00
36	**Jumlah Surplus Non Operasional - LO (35)**		**0,00**	**160.196.170,00**
37	**DEFISIT NON OPERASIONAL-LO**	**5.4.3.2.**		
38	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.3.2.1.	5.678.954.218,00	173.441.327,00
39	**Jumlah Defisit Non Operasional - LO (38)**		**5.678.954.218,00**	**173.441.327,00**
40	**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (36 - 39)**		**(5.678.954.218,00)**	**(13.245.157,00)**
41	**SURPLUS/DEFISIT - LO SEBELUM POS LUAR BIASA (32+40)**	**5.4.3.3.**	**95.478.504.723,93**	**63.833.786.029,05**
42	**POS LUAR BIASA**	**5.4.4.**		
43	**PENDAPATAN LUAR BIASA - LO**	**5.4.4.1.**		
44	Pendapatan Luar Biasa - LO	5.4.4.1.1.	0,00	0,00
45	**Jumlah Pendapatan Luar Biasa - LO (44)**		**0,00**	**0,00**
46	**BEBAN LUAR BIASA**	**5.4.4.2.**		
47	Beban Luar Biasa	5.4.4.2.1.	1.878.670.650,00	5.111.576.537,00
48	**Jumlah Beban Luar Biasa - LO (47)**		**1.878.670.650,00**	**5.111.576.537,00**
49	**JUMLAH POS LUAR BIASA (45 - 48)**		**(1.878.670.650,00)**	**(5.111.576.537,00)**
50	**SURPLUS/DEFISIT-LO (41 + 49)**	**5.4.5.**	**93.599.834.073,93**	**58.722.209.492,05**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
METODE LANGSUNG

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2024 (Audited)	2023 (Audited)
1	2	3	4	5
1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**	**5.5.1.**		
2	**Arus Masuk Kas**	**5.5.1.1.**		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.1.	15.820.932.786,00	14.854.325.262,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2.	2.166.946.349,00	2.305.628.800,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3.	5.854.018.934,91	5.663.827.320,95
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.4.	47.981.878.678,90	45.734.180.783,89
7	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.1.5.	956.625.034.394,00	856.646.664.112,00
8	Penerimaan Transfer Antar Daerah	5.5.1.1.6.	82.743.146.312,00	61.441.013.898,00
9	**Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 8)**		**1.111.191.957.433,81**	**985.635.640.176,84**
10	**Arus Keluar Kas**	**5.5.1.2.**		
11	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1.	444.086.680.344,07	413.304.423.702,00
12	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2.2.	247.658.956.651,75	243.673.449.949,80
13	Pembayaran Bunga	5.5.1.2.3.	2.534.971.060,00	3.555.498.062,00
14	Pembayaran Hibah	5.5.1.2.4.	40.232.656.643,00	32.310.714.788,00
15	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.5.	0,00	244.550.000,00
16	Pembayaran Bagi Hasil	5.5.1.2.6.	1.692.863.600,00	1.634.829.400,00
17	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.7.	174.716.036.000,00	171.170.180.000,00
18	Pembayaran Tidak Terduga	5.5.1.2.8.	1.961.201.439,00	1.508.132.360,00
19	**Jumlah Arus Keluar Kas (11 s.d. 18)**		**912.883.365.737,82**	**867.401.779.261,80**
20	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (9 - 19)**	**5.5.1.3.**	**198.308.591.695,99**	**118.233.860.915,04**
21	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**	**5.5.2.**		
22	**Arus Masuk Kas**	**5.5.2.1.**		
23	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.1.	0,00	200.563.588,00
24	**Jumlah Arus Masuk Kas (23)**		**0,00**	**200.563.588,00**
25	**Arus Keluar Kas**	**5.5.2.2.**		
26	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.1.	20.116.516.662,00	23.471.410.062,00
27	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.2.	88.928.047.259,00	20.128.517.180,00
28	Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.5.2.2.3.	41.372.206.332,00	67.418.166.745,00
29	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.4.	4.734.413.410,00	5.836.651.645,00
30	Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2.5.	197.480.000,00	152.880.500,00
31	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2.6.	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00
32	**Jumlah Arus Keluar Kas (26 s.d. 31)**		**157.348.663.663,00**	**118.007.426.132,00**
33	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (24 - 32)**	**5.5.2.3**	**(157.348.663.663,00)**	**(117.806.862.544,00)**
34	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**	**5.5.3.**		
35	**Arus Masuk Kas**	**5.5.3.1.**		
36	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.1.1	0,00	0,00
37	**Jumlah Arus Masuk Kas (36)**		**0,00**	**0,00**
38	**Arus Keluar Kas**	**5.5.3.2.**		
39	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.2.1.	17.918.098.140,00	17.918.125.240,00
40	**Jumlah Arus Keluar Kas (39)**		**17.918.098.140,00**	**17.918.125.240,00**
41	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan (37 - 40)**	**5.5.3.3**	**(17.918.098.140,00)**	**(17.918.125.240,00)**
42	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**	**5.5.4**		
43	**Arus Masuk Kas**	**5.5.4.1.**		
44	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1.	62.296.628.966,86	52.760.557.226,15
45	**Jumlah Arus Masuk Kas (44)**		**62.296.628.966,86**	**52.760.557.226,15**

NO	URAIAN	Catatan	2024 (Audited)	2023 (Audited)
1	2	3	4	5
46	**Arus Keluar Kas**	**5.5.4.2.**		
47	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1.	62.458.938.291,01	52.717.121.430,81
48	Koreksi Pencatatan Saldo Akhir Kas BOS Kinerja	5.5.4.2.2.	0,00	428.750,00
49	**Jumlah Arus Keluar Kas (47 s.d. 48)**		**62.458.938.291,01**	**52.717.550.180,81**
50	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris (45 - 49)**	**5.5.4.3.**	**(162.309.324,15)**	**43.007.045,34**
51	**Kenaikan/Penurunan Kas (20 + 33 + 41 + 50)**		**22.879.520.568,84**	**(17.448.119.823,62)**
52	**Saldo Awal Kas**		**30.858.681.962,23**	**48.306.801.785,85**
53	**Saldo Akhir Kas (51 + 52)**	**5.5.5.**	**53.738.202.531,07**	**30.858.681.962,23**
54	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		50.743.497.315,01	25.819.052.572,19
55	Saldo Akhir Kas di BLUD		2.651.046.117,70	4.597.603.900,41
56	Saldo Akhir Kas Dana BOS		0,00	281.132.047,63
57	Saldo Akhir Kas Dana BOSP		168.387.764,36	0,00
58	Saldo Akhir Kas Lainnya		0,00	15.842.200,00
59	Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas		175.271.334,00	145.051.242,00
60	**Saldo Akhir Kas (54 s.d. 59)**		**53.738.202.531,07**	**30.858.681.962,23**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2024 (*Audited*)	2023 (*Audited*)
1	2	3	4	5
1	**EKUITAS AWAL**	**5.6.1.**	**2.853.869.584.349,33**	**2.766.774.873.857,60**
2	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	**5.6.2.**	**93.599.834.073,93**	**58.722.209.492,05**
3	**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR :**			
4	Koreksi Nilai Persediaan	5.6.3.	0,00	0,00
5	Selisih Revaluasi Aktiva Tetap	5.6.4.	0,00	0,00
6	Lain-lain	5.6.5.	(85.303.058.535,65)	28.372.500.999,68
7	**EKUITAS AKHIR**	**5.6.6.**	**2.862.166.359.887,61**	**2.853.869.584.349,33**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

CATATAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat yang pada hakikatnya merupakan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial ekonomi daerah, dan juga dikaitkan tolok ukur Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya setiap tahun anggaran, yaitu dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hal tersebut sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota Menyampaikan Rancangan Undang-Undang/Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD kepada Lembaga Perwakilan berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan Keuangan Kabupaten Lampung Barat disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Kabupaten Lampung Barat yang disusun dan disajikan dengan basis akrual dapat menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel serta memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun non keuangan. CaLK ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya yang terdiri atas LRA, LP SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Informasi yang disajikan dalam keenam laporan tersebut harus secara bersama-sama dengan informasi yang disajikan dalam CaLK.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari : 9

1. Laporan Realisasi Anggaran
   Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca
   Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional
   Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas
   Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas
   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
   CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mendanai seluruh aktivitasnya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat aktivitas yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat ini disusun berdasarkan ketentuan–ketentuan yang diatur dalam:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmoni Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten /Kota;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

41. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

43. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Derah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 6);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 1);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 3);

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- 1.4. Profil dan Penjelasan Teknis

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi
- 4.3. Dasar Pengukuran
- 4.4. Kebijakan Akuntansi

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Nonkeuangan
- 6.1. Kegiatan yang Tidak Dapat Dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024
- 6.2. Kegiatan yang Pencapaiannya Masih Dibawah Target
- 6.3. Kegiatan yang Sumber Dananya Non APBD Kabupaten

1.4. PROFIL DAN PENJELASAN TEKNIS

Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat tanggal 16 Agustus 1991 dengan ibu kota Liwa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan didasarkan pada azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam rangka menyusun kewenangan dan organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Barat, maka telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah, sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja;

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tersebut tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah yang terdiri dari 11 (Sebelas) Bagian;
2. Sekretariat DPRD yang terdiri dari 3 (tiga) Bagian;
3. Inspektorat;
4. Dinas-Dinas Daerah berjumlah 20 (dua puluh) Dinas;
5. Rumah Sakit Umum Daerah berjumlah 1 (satu);
6. Badan berjumlah 7 (tujuh) Badan;
7. Kecamatan berjumlah 15 (lima belas) Kecamatan;
8. Kelurahan berjumlah 5 (lima) Kelurahan.

Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022 disebutkan bahwa Bupati yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, oleh karena itu telah disusun Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat Gambaran Umum, Gambaran Keuangan Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Kerangka Pendanaan serta Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, didalam RPD tidak memuat Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 tidak terlepas dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dimana RPD merupakan Tujuan dan Sasaran pada level Pemerintah Daerah yang selanjutnya dijabarkan ke Renstra sebagai tujuan dan Sasaran Kepala Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 harus memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lampung Barat sampai dengan Tahun 2025;

3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;
4. RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional;
7. Regulasi yang berlaku.

Maksud penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah secara sinergis pada periode tahun 2023-2026.

Adapun tujuan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 adalah:

1. Menyusun perumusan tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan dan program pembangunan untuk jangka waktu empat tahun;
2. Menyediakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah agar terjadi keselarasan dan sikronisasi dalam pencapaian tujuan, dan sasaran RPD;
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahun berupa program, kegiatan dan subkegiatan beserta target dan pagu sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPD);
4. Menyediakan instrument sikronisasi penyelenggaran pembangunan daerah mulai dari perencanaan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

Seluruh kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Susunan Organisasi dan Pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2024, sebagai berikut:

1.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
	Pj. Bupati	: Drs. Nukman, M.M.
2.	Dua Sekretaris	
	1) Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat	: Drs. Ismet Inoni, M.M
	Pj. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan	: Drs. Ahmad Hikami
	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	: Wasisno Sembiring, S.E., M.P.
	Asisten Bidang Administrasi Umum	: Drs. Ismet Inoni, M.M
	2) Sekretaris DPRD	: Pirwan, S.E., M.M.
3.	Satu Plt. Inspektur	: Mat Sukri, S.Sos., M.P
4.	Tujuh Kepala Badan	
	1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	: Padang Priyo Utomo, S.H.
	2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	: Agustanto Basmar, S.P., M.Si.
	3) Kepala Badan Pendapatan Daerah	: Drs. Daman Nasir, M.P.
	4) Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	: Sumadi, S.IP., M.M
	5) Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	: Mazdan, S.Sos., M.M.
	6) Plt. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah	: Agustanto Basmar, S.P., M.Si.
	7) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	: Burlianto Eka Putra, S.H

5. Dua Puluh Kepala Dinas
   1) Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : Bulki, S.Pd.
   2) Kepala Dinas Kesehatan : dr. Widyatmoko Kurniawan, Sp.B.
   3) Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat : Mia Miranda, ST
   4) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan : Haiza Rinsa, S.H.
   5) Kepala Dinas Sosial : Jaimin, S.I.P.
   6) Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian : Sri Wiyatmi, S.T.,M.P.
   7) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan PA : M. Danang Harisuseno, S.Ag., M.H.
   8) Kepala Dinas Ketahanan Pangan : Maidar, S.H., M.Si.
   9) Kepala Dinas Lingkungan Hidup : M. Henry Faisal, S.H., M.H.
   10) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : Ruspan Anwar, S.H.
   11) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon : Bulki, S.Pd.
   12) Kepala Dinas Perhubungan : Reza Mahendra, S.H., M.H.
   13) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika : Munandar, S.Sos.
   14) Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan : Tri Umaryani, S.P., M.Si.
   15) Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Ir. Sugeng Raharjo, MT
   16) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata : Drs. Dahlin, M.Pd.
   17) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan : Syafaruddin, S.Pd., M.Pd.I
   18) Kepala Dinas Perikanan : Kamaludin, S.T.
   19) Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura : Ir. Nata Djudin Amran, M.M.
   20) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan : Yudha Setiawan, S.IP.
6. RSUD Alimuddin Umar : dr. Iman Hendarman, M.Kes., Sp.A.
7. Lima Belas Camat
   1) Camat Sumber Jaya : Agus Hadi Purnama, S.IP.
   2) Camat Way Tenong : Nowo Wibawono, M.Pd.
   3) Camat Sekincau : Andy Chahyadi, S.H., M.A.
   4) Plt. Camat Belalau : Wahyudi Heru Iskandar,S.Sos.,M.P
   5) Camat Batu Brak : Ruspel Gultom, SH.,MH
   6) Camat Balik Bukit : M. Yones, S.STP., M.H.
   7) Camat Sukau : Juremi, S.H., M.M
   8) Camat Suoh : Dapet Jakson, S.Sos.
   9) Camat Gedung Surian : Tati Sulastri, S.Sos .M.M
   10) Camat Kebun Tebu : Ernawati, S.E.
   11) Camat Air Hitam : Bambang Hermanto, S.Pdi., M.M.
   12) Camat Pagar Dewa : Mat Patoni, S.Sos., M.Si.
   13) Camat Batu Ketulis : Sri Handayani, S.H.
   14) Camat Bandar Negeri Suoh : Mandala Harto, S.IP.
   15) Camat Lumbok Seminung : Erwin Ardiansya Indra Guna, S.Pdi.
8. Lima Kelurahan
   1) Lurah Way Mengaku : Yusrin, S.H.
   2) Lurah Pasar Liwa : Agusrin, S.Pd.
   3) Lurah Tugu Sari : Enna Juwita, SP
   4) Lurah Pajar Bulan : Erna Risnawati, S.E., M.M.
   5) Lurah Sekincau : Juarsah, S.Kom.

Pada Tahun 2024 beberapa Perangkat Daerah yang berubah nama dan/ atau dipisah lebih dari satu Perangkat Daerah dari tahun 2023, antara lain:

Tabel 8. Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah
Tahun 2024

No	OPD Lama (Tahun 2023)	OPD Baru (Tahun 2024)	Keterangan
1.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Badan Keuangan dan Aset Daerah	Berubah nama dan dipisah menjadi 2 OPD
		2. Badan Pendapatan Daerah	
2.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	1. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Berubah nama dan dipisah menjadi 2 OPD
		2. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
3.	Badan Penelitian dan Pengembangan	1. Badan Riset dan Inovasi Daerah	Berubah nama

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian Kabupaten Lampung Barat. Pengaruh tersebut tidak saja terjadi pada aspek pengeluaran belanja daerah, tetapi juga terhadap berbagai aspek penerimaan Pendapatan Daerah.

Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi.

Ekonomi Makro, mengkaji dan mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat (keseluruhan). Variabel-variabel yang juga berdampak atas beragam tindakan pemerintah tersebut, antara lain: pendapatan nasional, kesempatan kerja dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional.

Pembangunan ekonomi merupakan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperbesar kesempatan kerja, meningkatkan pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi, dan menggeliatkan pertumbuhan ekonomi.

2.1.1. Potensi Unggulan Daerah

Dalam rangka peningkatan kualitas manusia secara berkelanjutan maka dengan memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam yang ada di daerah dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada era otonomi saat ini menjadikan daerah secara kreatif berupaya melakukan peningkatan dalam pengelolaan potensi wilayahnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan nilai tambah pada pendapatan daerah. Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu daerah yang terus menerus berupaya mengoptimalkan potensi yang ada dalam rangka menarik peluang investasi. Potensi unggulan Kabupaten Lampung Barat sangat beragam berupa sumber daya pertanian, perikanan, pariwisata, industri rumah tangga yang sangat mendukung dalam menciptakan dan meningkatkan kehidupan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Beberapa potensi yang bisa dijadikan komoditas unggulan dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

2.1.1.1. Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sektor tanaman pangan dan hortikultura merupakan salah satu pilar utama dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat dan memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap PDRB. Komoditas utama tanaman pangan dan hortikultura yaitu padi, jagung, ubi, sayuran, dan kacang-kacangan.

Keragamanan tanaman, hasil panen produksi beberapa komoditas tanaman pangan dan hortikultura dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 – 2024

Komoditi	Luas Panen (Hektare)				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Padi Sawah	25.799	21.246	17.368	15.634	16.314
Padi Ladang	930	0	0	0	0

Komoditi	Luas Panen (Hektare)				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Jagung	160	150	130	215	143
Kedelai	1.063	320	30	2	0
Kacang Tanah	189	200	158	164	173
Kacang Hijau	28	5	0	0	0
Ubi Kayu	165	175	134	128	140
Ubi Jalar	397	392	352	337	338
Sayuran	3.641	3.214	3.027	3.006	3.776

Sumber : Dinas TPH, Survey Pertanian (2020-2024)

Tabel 10. Produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020-2024

Komoditi	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
Padi Sawah	134.051	5,20	104.318	4,91	85.644	4,93	83.981	5,37	85.618	5,25
Padi Ladang	2.733	2,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Padi	**136.784**	**5,12**	**104.318**	**4,91**	**85.644**	**4,93**	**83.981**	**5,37**	**85.618**	**5,25**
Jagung	791	4,39	629	4,19	544	4,19	899	4,19	766	5,36
Kedelai	1.667	1,57	413	1,29	46	1,52	3	1,29	0	0
Kacang Tanah	258	1,37	244	1,22	192	1,22	200	1,22	238	1,36
Kacang Hijau	25	0,89	4	0,89	0	0	0	0	0	0
Ubi Kayu	3.947	23,92	4.169	23,83	3.188	23,83	3.043	23,83	3.651	26,08
Ubi Jalar	5.407	13,62	4.154	10,60	3.730	10,06	3.570	10,60	8.374	24,78
Sayuran	58.839	0	45.187	0	42.264	0	49.060	0	33.861	0

Sumber : Dinas TPH, Survey Pertanian (2020-2024)

Tabel di atas menggambarkan kondisi luas panen dan produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura Tahun 2020-2024. Dari gambaran di atas dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2024 produksi padi di Lampung Barat mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan faktor iklim yang mendukung budidaya padi. Musim kemarau/kering di Lampung Barat tidak terlalu ekstrim sehingga ketersediaan air sebagai pendukung budidaya padi dalam kondisi cukup. Dukungan pemerintah pusat sangat mempengaruhi peningkatan produksi padi. Pada tahun 2024 di alokasikan kegiatan Penambahan Areal Tanam (PAT) yang mengoptimalkan budidaya padi di lahan tadah hujan dan lahan bera serta didukung dengan bantuan pompa air dan irigasi perpompaan yang dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan air;
2. Produksi komoditas palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar) berfluktuasi selama periode 2020-2024. Produksi jagung mengalami kenaikan dikarenakan bantuan sarana produksi berupa benih dan pupuk cair. Tidak adanya produksi kedelai dikarenakan ketergantungan terhadap ada/tidaknya bantuan sarana produksi dari pemerintah. Hal ini dikarenakan komoditas palawija bukan merupakan komoditas utama yang dibudidayakan oleh petani. Kebiasaan di Lampung Barat, budidaya palawija dilakukan untuk melakukan rotasi tanaman khususnya untuk pertanaman sayuran;
3. Komoditas sayuran mengalami fluktuasi produksi selama periode 2020-2024. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi iklim dan permodalan usaha petani. Kenaikan harga sarana produksi (pupuk dan obat-obatan) yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan minimal sarana produksi dalam rangka mendukung budidaya usaha tani. Komoditas sayuran yang dibudidayakan sebagian petani di Lampung Barat antara lain Kubis, Wortel, Cabe Merah Besar, Cabai Rawit, Tomat, Sawi, Bawang Daun, kentang, dan Labu Siam. Terdapat komoditas yang sedang digalakkan untuk dikembangkan yaitu bawang merah dimana tujuannya adalah memperluas daerah penghasil dan dapat berpengaruh dalam mengendalikan laju inflasi. Sentra utama sayuran di Lampung Barat adalah kecamatan Balik Bukit dan

Sukau. Daerah lain yang menjadi sentra ukuran menengah adalah Lumbok Seminung, Sumberjaya, Batu Brak dan Kebun Tebu.

2.1.1.2. Perkebunan dan Peternakan

2.1.1.2.1. Perkebunan

Pembangunan sub sektor perkebunan dan peternakan memiliki peran yang strategis dalam mendukung perekonomian di Kabupaten Lampung Barat. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui peningkatan produksi komoditas perkebunan, penyerapan tenaga kerja, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktik usaha tani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis sub sektor perkebunan dan peternakan dimaksud sejalan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Barat diantaranya meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan sektor pariwisata. Pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan PDRB dan pendapatan per kapita masyarakat dimana fokus pembangunan dititikberatkan pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata. Hal tersebut juga selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Lampung yaitu Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan.

Pembangunan perkebunan dan peternakan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan. Tujuan pembangunan perkebunan dan peternakan pada dasarnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Tantangan pembangunan perkebunan dan peternakan Lampung Barat ke depan antara lain bagaimana terus meningkatkan produksi, produkitivitas, dan mutu komoditas perkebunan, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan, meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk perkebunan, meningkatkan populasi dan nilai tambah ternak, meningkatkan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, memperkokoh kelembagaan kelompok tani perkebunan dan peternak, dan mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup.

Mayoritas penduduk Lampung Barat pendapatannya tergantung pada sub sektor perkebunan terutama didominasi oleh beberapa komoditas utama antara lain: kopi, kakao, cengkeh, lada, aren dan lainnya. Kabupaten Lampung Barat merupakan produsen kopi robusta terbesar di Provinsi Lampung. Berdasarkan Data Statistik Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung Barat Angka Sementara Tahun 2024 produksi kopi robusta di Lampung Barat mencapai 62.979,5 Ton dengan luas budidaya kopi mencapai 54.096,1 Ha, dan produktivitas mencapai 1.260 Kg/Ha/Tahun.

Kemajuan pembangunan perkebunan di Kabupaten Lampung Barat juga didukung oleh adanya Kawasan Klaster Kopi di Kecamatan Air Hitam dan Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Komoditi Kopi di Kecamatan Way Tenong yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Perindustrian, pembangunan Agro Tekno Park Kopi Robusta Liwa Lampung (ATP Korolla) di Kecamatan Sumber Jaya, pembangunan Desa Wisata "Kampoeng Kopi Rigis Jaya" di Kecamatan Air Hitam serta pembangunan Sekolah Kopi di Kecamatan Sumber Jaya.

Kopi Robusta merupakan komoditas perkebunan yang sangat mendominasi di Kabupaten Lampung Barat dan menjadi salah satu produk unggulan serta merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Barat. Areal pertanaman kopi tersebar di seluruh wilayah Kecamatan dan budidaya Kopi Robusta telah diusahakan secara turun temurun oleh masyarakat Lampung Barat. Selain komoditas kopi, komoditas aren juga merupakan Produk Unggulan Daerah (PUD) yang telah ditetapkan berdasarkan SK Bupati Lampung Barat Nomor B/336/KPTS/III.2/2014, tanggal 11 September 2014 tentang Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Lampung Barat.

Produk Kopi Robusta Lampung Barat telah mendapat Sertifikasi Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2014 dengan nama "KOPI ROBUSTA LAMPUNG". Selain itu perkebunan kopi di Kabupaten Lampung Barat juga telah ditetapkan sebagai Kawasan Perkebunan Kopi Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional, Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu wilayah pengembangan komoditas kopi yang menunjukkan keberadaan perkebunan kopi di Lampung Barat sangat menentukan eksistensi perkopian nasional.

Dengan keberadaan komoditas Kopi Robusta yang menjadi unggulan perkebunan Lampung Barat, telah dilakukan upaya pedaftaran klon-klon produktif lokal dan pada Tahun 2019 telah dilepas Varietas Unggul Tanaman Kopi Robusta melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 35-38/KPTS/KB.020/2/2019 Tanggal 1 Februari 2019, yaitu Korolla (Kopi Robusta Liwa Lampung) 1 s.d 4. Pada Tahun 2022 telah terdaftar 2 (dua) Varietas Lokal Unggul yaitu Varietas CIPTO dengan Tanda Daftar Varietas Tanaman Nomor : 1948/PVL/2022 Tanggal 20 Desember 2022 dan Varietas IMAM GIHAM dengan Tanda Daftar Varietas Tanaman Nomor : 1961/PVL/2022 Tanggal 20 Desember 2022 dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian RI. Pada Tahun 2023 telah didaftarkan kembali 2 (dua) Varietas Lokal Unggul yaitu Varietas ROHIBAT dan DARMANI. Untuk Varietas ROHIBAT telah terbit Tanda Daftar Varietas Tanaman Nomor : 2161/PVL/2024 Tanggal 26 Vebruari 2024, namun untuk Varietas DARMANI sampai saat ini belum terbit Tanda Daftar Varietas Tanaman dan masih dalam proses di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian RI karena masih terdapat persyaratan deskripsi tanaman yang belum sesuai. Pada Tahun 2024 didaftarkan kembali 2 (dua) Varietas Lokal Unggul yaitu Varietas ROPE DORA dan BAGIO. Untuk Varietas ROPE DORA telah terbit Tanda Daftar Varietas Tanaman Nomor : 191/A.9/11/2024 Tanggal 18 November 2024, sedangkan Varietas BAGIO tidak dapat diterbitkan sebagai varietas lokal unggul Lampung Barat karena varietas ini telah berkembang juga di wilayah Provinsi Bengkulu.

Budidaya Kopi Robusta di Lampung Barat tersebar di seluruh wilayah kecamatan yang dilakukan secara turun temurun dengan pola budidaya yang bervariasi. Sebagian besar petani telah menerapkan pola mix farming atau pola diversifikasi dengan komoditas lain, tetapi masih terdapat budidaya dengan pola monokultur di sebagian wilayah. Komoditas kopi robusta telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi di kabupaten Lampung Barat.

Di Kabupaten Lampung Barat terdapat dua pola budidaya kopi yang menjadi contoh terbaik yaitu pola budidaya sistem Good Agricultur Practises (GAP) yaitu pola tanam dengan jarak tanam : 2 x 2 m (populasi 2.500 Batang/Ha), memiliki tanaman penaung, dengan pola diversifikasi tanaman kopi dengan pisang, pepaya, dan cabai serta beberapa naungan sebagai tajar lada. Contoh perkebunan kopi dengan pola budidaya sistem Good Agricultur Practises (GAP) adalah kebun milik Hi. Syafruddin Pekon Kembahang Kecamatan Balik Bukit yang telah dikunjungi oleh Presiden RI Tahun 2024. Pola budidaya kedua adalah Sistem Pagar yaitu pola tanam modern dengan intensitas tinggi dengan jarak tanam dalam baris 1 m dan antar baris 2,5 m, tanpa penaung. Contoh perkebunan kopi dengan pola budidaya Sistem Pagar adalah kebun milik Ahmad Supriyono Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau yang telah dikunjungi oleh Gubernur Lampung Tahun 2024.

Selain produk unggulan kopi dan aren, terdapat beberapa komoditas perkebunan penunjang perekonomian masyarakat Lampung Barat diantaranya kakao, lada, cengkeh, dan kelapa dalam. Berikut ini disajikan perkembangan luas lahan dan produksi beberapa komoditas perkebunan secara rinci terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11. Perkembangan Luas Lahan Tanaman Perkebunan Tahun 2020 – 2024

No	Komoditi	Luas Areal (Ha)				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Kopi Robusta	54.106	54.104	54.104	54.096,1	54.096
2	Lada	7.582	7.469	7.469	7.488,4	7.488
3	Kakao	1.698	1.689	1.689	1.679,8	1.680

No	Komoditi	Luas Areal (Ha)				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
4	Kayu Manis	694	645	645	646,8	647
5	Kelapa Dalam	511	512	512	511,5	512
6	Cengkeh	897	961	961	963,3	963
7	Aren	398	405	405	406,1	406
8	Kemiri	96	97	97	96,3	96

Sumber : Dinas Perkebunan & Peternakan Kabupaten Lampung Barat, 2020 – 2024

Tabel 12. Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 – 2024

NO	KOMODITI	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha/th)	Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha/th)	Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha/th)	Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha/th)	Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha/th)
1	Kopi Robusta	56.054,4	1.092,7	54.563,2	1.092,7	56.054,4	1.122,5	52.325,8	1.046,1	62.979,5	1.260,0
2	Lada	3.061,6	587,6	3.061,6	587,6	3.061,6	587,6	2.649,0	541,9	2.090,9	552,1
3	Kakao	1.093,7	1.200,2	1.093,7	1.200,2	1.093,7	1.200,2	901,4	989,1	901,4	989,1
4	Kayu Manis	608,3	1.384,7	608,3	1.384,7	608,3	1.384,7	603,4	1.378,5	603,4	1.378,5
5	Kelapa Dalam	459,4	1.013,3	459,4	1.013,3	459,4	1.013,3	444,2	978,2	444,2	978,2
6	Cengkeh	125,1	333,9	125,1	333,9	125,1	333,9	126,9	330,0	126,9	330,0
7	Aren	296,9	1.302,3	296,9	1.302,3	296,9	1.302,3	329,8	1.451,5	329,8	1.451,5
8	Kemiri	109,1	1.717,6	109,1	1.717,6	109,1	1.717,6	107,0	1.668,8	107,0	1.668,8

Sumber : Dinas Perkebunan & Peternakan Kabupaten Lampung Barat, 2020 – 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa rata-rata produksi komoditas unggulan Kopi Robusta setiap tahun mengalami fluktusi dan belum optimalnya produktivitas rata-rata yang dicapai petani kopi di Lampung Barat merupakan sebagian dari permasalahan dalam pengembangan komoditas Kopi Robusta.

Upaya mempertahankan dan mendorong peningkatan produktivitas produk unggulan Kopi Robusta dilaksanakan melalui langkah-langkah yang terpadu, antara lain:

1. Penggunaan Bibit Unggul, yaitu bibit yang tahan terhadap hama dan penyakit, memiliki potensi produksi yang lebih tinggi, menjaga kualitas rasa dan meminimalkan resiko gagal panen;
2. Penerapan Teknik Budidaya yang Tepat, yaitu penanaman dengan jarak yang optimal, pemangkasan, pemupukan yang tepat dan pengendalian OPT;
3. Pengelolaan Lahan secara Berkelanjutan, yaitu dengan menjaga kesuburan lahan dan erosi, menjaga ketersediaan air;
4. Pemanfaatan Teknologi, yaitu penggunaan alsintan yang cangging dalam penanaman, budidaya, panen pasca panen dan pengolahan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran;
5. Peningkatan SDM Petani, yaitu pelatihan bagi petani dan pelaku usaha perkopian agar memperoleh pengetahuan baru tentang tatacara budidaya yang efektif dan efisien, memahami standar kualitas yang dibutuhkan pasar internasional.

2.1.1.2.2. Peternakan

Subkategori peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan dan budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong dan diambil hasilnya baik yang dilakukan oleh rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Subkategori ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas

peternakan yang diusahakan di Kabupaten Lampung Barat meliputi 15 jenis ternak yaitu : Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing, Domba, Kuda, Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, Itik, Kelinci, Puyuh, Merpati dan Itik Manila.

Keberhasilan yang dicapai Kabupaten Lampung Barat tampak pada populasi beberapa jenis ternak seperti dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 13.Perkembangan Populasi dan Produksi Ternak
Pada Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	ST 2023	
					2023[1]	2024[1]
A	Populasi Ternak					
1.	Sapi (ekor)	8.063	7.505	7.606	1.434	1.485
2.	Kerbau (ekor)	375	375	380	38	39
3.	Kambing (ekor)	81.780	80.011	80.722	48.286	50.607
4.	Domba	6.413	6.453	6.498	2.076	2.149
5.	Ayam buras	2.300.900	2.301.003	2.319.673	100.653	106.895
6.	Itik	68.626	68.907	69.192	4.897	4.946
B	Produksi					
1.	Daging (kg)	3.127.000	3.132.935	3.132.935	198.494	209.627
2.	Telur (butir)	2.160.000	2.161.535	2.161.535	93.791	99.607
3.	Susu (liter)	25.000	10.000	10.000	-	-

[1] Hasil verifikasi dan validasi tingkat Nasional diarpakai menggunakan angka hasil Sensus Pertanian 2023
Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan, Tahun 2020 - 2024

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan populasi ternak besar di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 sampai dengan 2024 cenderung mengalami peningkatan meskipun terdapat fluktuasi. Di Kabupaten Lampung Barat belum terdapat perusahaan breeding maupun feedloter yang mengelola ternak besar secara intensif dan profesional. Ternak yang ada merupakan ternak masyarakat yang pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Kebijakan pemerintah diikuti dengan upaya pembinaan yang intensif dari petugas Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat serta pelaksanaan pengobatan dan vaksinasi yang dapat meningkatkan produktivitas ternak. Pada hakikatnya upaya kesehatan, termasuk kesehatan hewan, merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan melalui status kesehatan hewan nasional dan pengendalian Penyakit Hewan Menular (PHM) sehingga mencapai kondisi kesehatan, produksi dan produktivitas hewan yang meningkat secara optimal.

Salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah kesehatan hewan adalah dengan membentuk Puskeswan. Disamping pelayanan kesehatan hewan dan reproduksi yang bersifat individual, Puskeswan juga mengemban amanah yang bersifat publik yakni pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan. Dalam hal ini Puskeswan merupakan ujung tombak yang berhadapan langsung dengan kasus dilapangan sehingga dapat melakukan deteksi dini, pelaporan dini dan respon dini (early warning system). Diharapkan kasus penyakit hewan menular dapat dikendalikan dan tidak menyebar serta dapat dibebaskan kembali.

Dinas Perkebunan dan Peternakan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dalam pelayanan kesehatan hewan yang berjumlah 6 (enam) Puskeswan untuk melayani 15 Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat. Masyarakat dapat datang membawa hewan ternaknya ke Puskeswan pada jam kerja untuk mendapatkan pelayanan pengobatan, vaksinasi dan konsultasi kesehatan hewan. Model pelayanan ini kami sebut sebagai "Pelayanan Pasif".

Disamping Model Pelayanan Pasif, Dinas Perkebunan dan Peternakan juga melaksanakan Model "Pelayanan Aktif" yaitu mendatangi peternak dan pemilik hewan peliharaan dari kandang ke kandang melalui permohonan masyarakat secara berkelompok maupun melalui komunitas-komunitas pecinta hewan ternak.

Guna mencapai tujuan pembangunan perkebunan dan peternakan, pemerintah terus berupaya memfasilitasi melalui pelaksanaaan program pembangunan yang didanai APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Program pembangunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 mengacu pada dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, Perda APBD Kabupaten Lampung Barat, dan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024.

2.1.1.3. Perikanan

Sektor Perikanan Lampung Barat memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dalam rangka meningkatan taraf hidup masyarakat. Potensi tersebut terdiri dari perikanan budidaya yang meliputi budidaya darat dan perairan umum serta penangkapan ikan perairan umum yang tersebar di 15 kecamatan. Produksi kegiatan budidaya ikan yang meliputi budidaya ikan di kolam, budidaya di perairan umum (KJA) dan mina padi adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Potensi Lahan dan Produksi Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Perairan Umum (ton)	475,3	586,2	714,9	750,6	766,2
Budidaya (ton)	8.850,84	9.935,41	8.940,04	9.349	10.002,36
Jumlah	9.326,14	10.521,61	9.654,94	10.099,6	10.768,56
Potensi Lahan					
- Kolam	2.349,40	2.429,00	2.429,00	2.429,00	2.429,00
- Mina Padi	412,00	452,00	452,00	452,00	452,00
- Perairan Danau Ranau	40,80	84,00	84,00	84,00	45,00
Budidaya Kolam	3.208,70	3.355,98	2.536,17	2.648,54	2.800,66
Potensi Mina Padi	132,60	370,00	1.010,09	1.130,00	1.200,28

Sumber : Dinas Perikanan Tahun 2024

Potensi lahan darat di Kabupaten Lampung Barat yang dapat dikembangkan untuk budidaya kolam pada Tahun 2024 seluas 2.429,00 Ha, sementara Potensi untuk budidaya mina padi Tahun 2024 seluas 452 Ha,. Potensi pengembangan perikanan budidaya di darat didominasi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Sumberjaya, Kebun Tebu, Gedung Surian.

Terjadi kenaikan produksi budidaya sebesar 6,98% atau 653,36 ton dari tahun sebelumnya dikarenakan produksi pembesaran dan pembenihan di tahun 2024 meningkat, selain itu didukung oleh curah hujan yang merata di sub sektor budidaya sehingga tidak terjadi banjir yang biasanya menyebabkan kerugian pada budidaya dikolam.

Potensi perairan umum di Kabupaten Lampung Barat yang menjadi fokus untuk pengembangan perikanan budidaya adalah Perairan Umum Danau Ranau yang terletak di Kecamatan Lumbok Seminung. Untuk pengembangan perikanan budidaya di perairan umum Danau Ranau difokuskan untuk pengembangan budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) yang terletak di 3 (tiga) pekon yaitu Keagungan, Sukabanjar dan Tawan Sukamulya.

2.1.1.4. Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Lebih dari 90% pelaku usaha di Indonesia masih didominasi oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tentang UMKM ini, di samping merupakan bagian terbesar dilihat dari unit bisnisnya, juga terbesar dalam menyerap tenaga kerja, tidak membutuhkan modal (investasi dan operasional), serta paling tahan menghadapi krisis multi-dimensi yang pernah melanda Indonesia pada pertengahan 1997. Tetapi, kenyataan lain menunjukan bahwa UMKM termasuk golongan pelaku usaha ekonomi lemah. Tidak saja lemah dalam kepemilikan modal atau aset, lemah pengetahuan, lemah keterampilan dan teknologi yang digunakan, lemah aksesibilitasnya terhadap kebijakan, modal, pasar dan informasi, seringkali juga lemah dalam semangatnya untuk maju.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi

UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada.

Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok menyelenggaran sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan asas otonomi dapat membantu mengembangkan UKM, IKM dan UMKM yang berada di Kabupaten Lampung Barat.

Pengembangan UMKM di Lampung Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat telah menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Lampung Barat tahun 2018-2038 yang mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional "Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh". Dalam RIPIN 2015-2035, Lampung Barat ditetapkan sebagai Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dan Pengembangan sentra IKM.

Tabel 15. Data Kewirausahaan dan Kewiraswastaan Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi (unit)	160	165	167	167	167
2	Jumlah Anggota (orang)	5.637	7.796	7.379	7.415	8.051
3	Jumlah UKM	7.667	8.747	9.736	12.583	16.232
4	Jumlah Industri Kecil (IKM)	790	823	863	979	1.029

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Lampung Barat, 2024

Pembangunan ekonomi merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan disegala bidang. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian dinyatakan bahwa industri merupakan salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana.

Sektor industri khususnya industri kecil dan menengah secara nyata telah terbukti memberikan andil yang cukup tinggi bagi perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sub sektor ini terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Barat yang menduduki peringkat ketiga setelah sektor pertanian dan sektor perdagangan. Oleh karena itu, Pembangunan Industri di Kabupaten Lampung Barat penting untuk disusun guna mempercepat tercapainya tujuan pembangunan industri tersebut. Industri kecil dan menengah di Kabupaten Lampung Barat meliputi . industri aneka makanan olahan, industri tekstil termasuk anyaman dan kerajinan, industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, industri hasil kayu olahan dan rotan, industri pembuatan bahan bangunan, industri pertukangan (*meubelair/furniture*), industri pengolahan besi dan baja, industri jasa dan industri lainnya.

Berbagai produk sektor-sektor perekonomian yang dihasilkan di Lampung Barat masih diperdagangkan dalam bentuk produk primer, sehingga nilai tambah produk belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Lampung Barat. Pembangunan sektor industri yang ditujukan untuk memperluas lapangan/kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah sumberdaya lokal, serta mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi dan UMKM masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Permasalan yang dihadapi meliputi:

a. Permasalahan disektor industri meliputi rendahnya inovasi teknologi, ketersediaan bahan baku, rendahnya akses permodalan, keterampilan tenaga kerja, dan daya saing produk;
b. Sarana dan prasarana perhubungan dan sistem transportasi masih belum memadai untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi yang cepat;
c. Permasalahan pada aspek ketenagakerjaan meliputi penyediaan lapangan kerja, rendahnya kompetensi calon tenaga kerja, sarana dan prasarana latihan kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan;
d. Permasalahan pada aspek investasi perlu mendapat perhatian besar seperti promosi investasi, perbaikan iklim investasi dan penyediaan lahan usaha.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat berupaya dengan mengadakan berbagai pelatihan yang dapat meningkatkan sumber daya manusia, memberikan permodalan usaha untuk pengembangan permodalan, bantuan alat produksi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Selain itu untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk Industri Kecil Menengah dilakukan juga upaya fasilitasi sertifikasi produk antara lain sertifikasi P-IRT, Sertifikasi Halal, Sertifikasi P3DN, fasilitasi desain kemasan modern dan fasilitasi sertifikasi – sertifikasi lainnya.

Selanjutnya dalam bidang pemasaran, dilakukan upaya fasilitasi penjualan produk IKM seperti pameran skala lokal, temu bisnis dengan pengusaha besar, maupun upaya promosi ke perusahaan retail modern. Upaya–upaya diatas bukan tanpa kendala. Kendala yang paling utama adalah berasal dari internal pelaku usaha IKM, dimana diperlukan usaha untuk merubah pola fikir dan pola kerja menjadi lebih terbuka terhadap perubahan yang sangat dinamis.

Sektor perdagangan menempati urutan ke 2 dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat. Angka kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, ini terlihat pada tabel kontribusi sektor perdagangan sebagai berikut :

Tabel 16. Data Konstribusi PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

No	LAPANGAN USAHA	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
1.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.20	12.86	14.53	15.38	15.45

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Lampung Barat, LSDA 2024

Dari data diatas menunjukkan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran menjadi usaha yang cukup berkembang di Kabupaten Lampung Barat. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus mendorong pertumbuhan sektor ini dengan kebijakan disemua bidang yang bisa mendukung pertumbuhan sektor perdagangan. Kebijakan tersebut antara lain kemudahan perijinan dan investasi, penyediaan sarana perdagangan hingga kebijakan perlindungan konsumen. Selain itu kebijakan peningkatan kualitas produksi hasil pertanian dan perkebunan maupun upaya peningkatan nilai tambah produk juga dilakukan dengan harapan akan ikut berperan dalam meningkatkan transaksi di sektor perdagangan besar maupun eceran serta meningkatkan daya beli masyarakat.

2.1.1.5. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Lebih dari 90% pelaku usaha di Indonesia masih didominasi oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tentang UMKM ini, di samping merupakan bagian terbesar dilihat dari unit bisnisnya, juga terbesar dalam menyerap tenaga kerja, tidak membutuhkan modal (investasi dan operasional), serta paling tahan menghadapi krisis multi-dimensi yang pernah melanda Indonesia pada pertengahan 1997. Tetapi, kenyataan lain menunjukan bahwa UMKM termasuk golongan pelaku usaha ekonomi lemah. Tidak saja lemah dalam kepemilikan modal atau aset, lemah pengetahuan, lemah keterampilan dan teknologi yang digunakan, lemah aksesibilitasnya terhadap kebijakan, modal, pasar dan informasi, seringkali juga lemah dalam semangatnya untuk maju.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada.

Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok menyelenggaran sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan asas otonomi dapat membantu mengembangkan UKM, IKM dan UMKM yang berada di Kabupaten Lampung Barat.

Pengembangan UMKM di Lampung Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat telah menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Lampung Barat tahun 2018-2038 yang mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional "Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh". Dalam RIPIN 2015-2035, Lampung Barat ditetapkan sebagai Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dan Pengembangan sentra IKM.

Tabel 17. Daftar IKM Berdasarkan Jenis Usahanya Tahun 2020- 2024

No	JENIS USAHA	JUMLAH					TENAGA KERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tempe tahu	84	85	86	61	61	396	411	401	298	208
2.	Gula merah	27	27	27	42	43	118	118	118	143	144
3.	Pengolahan kopi dan Teh	121	131	162	217	227	628	692	795	925	965
4.	Industri Kain Sulaman	5	6	10	11	12	15	15	18	19	20
5.	Anyaman dari Rotan dan Bambu	63	63	63	33	33	192	192	192	94	94
6.	Kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	43	52	71	135	147	239	287	354	513	533
7.	Batu bata/keramik	21	21	21	19	19	69	69	69	60	60
8.	Pengolahan ikan	6	6	6	22	23	28	28	28	59	61
9.	Industri Obat Tradisional	0	0	11	17	17	0	0	48	59	59
10.	Furniture dari kayu	66	66	66	43	44	191	191	191	137	139
11.	Ukiran dari kayu bukan mebelar	17	22	23	23	24	39	39	40	49	50
12.	Industri Makanan Lainnya	13	13	17	23	24	88	88	99	118	120
13.	Industri minuman	18	18	9	9	10	82	82	38	38	40
14.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	36	36	36	15	15	121	121	121	58	58
15.	Industri baja dan besi	13	13	0	0	0	26	26	0	0	0
16.	Industri dari kedelai bukan tahu/tempe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Industri pengolasan dan mesin	18	18	20	21	22	58	58	62	64	65
18.	Industri peralatan rumah tangga	0	0	0			0	0	0	0	0
19.	Industri kimia dan pupuk	2	2	2	2	3	35	35	35	35	40
20.	Industri penostakan	54	54	7	7	7	172	172	32	32	32
21.	Industri penggilingan padi dan pembersihan biji-bijian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Industri alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian	0	0	18	9	15	0	0	37	20	31
23.	Industri lainnya	71	75	71	63	63	253	276	271	252	252
24.	Industri logam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Industri pakaian jadi	14	14	15	15	15	37	37	38	38	38
26.	Sale Pisang	26	26	27	37	39	238	238	242	264	268
27.	Industri Produk Roti dan Kue	19	21	35	93	102	144	171	224	355	373
28.	Industri Barang Plastik lainnya	6	6	6	6	6	18	18	18	18	18
29.	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9
30.	Kerajinan Anyaman plastik	12	12	12	13	13	15	15	15	16	16
31.	Kerajinan Batu-batuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Industri Permintalan, Perlenunan	0	0	2	2	2	0	0	4	4	4
34.	Kerajinan Pandai Besi	0	0	0			0	0	0		
35.	Kerajinan Kerajinan Kain	19	20	20	24	24	47	46	45	49	49
36.	Industri Kerajinan YTDL	0	0	3	3	3	0	0	4	4	4
37.	Kerajinan Al Sintan	9	9	10	7	9	37	37	47	31	37
	Jumlah	790	823	863	979	1029	3295	3473	3595	3761	3877

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat, 2024

Pembangunan ekonomi merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di semua bidang. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian dinyatakan bahwa industri merupakan salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana.

Sektor industri khususnya industri kecil dan menengah secara nyata telah terbukti memberikan andil yang cukup tinggi bagi perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sub sektor ini terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Barat yang menduduki peringkat ketiga setelah sektor pertanian dan sektor perdagangan. Oleh karena itu, Pembangunan Industri di Kabupaten Lampung Barat penting untuk disusun guna mempercepat tercapainya tujuan pembangunan industri tersebut. Industri kecil dan menengah di Kabupaten

Lampung Barat meliputi : industri aneka makanan olahan, industri tekstil termasuk anyaman dan kerajinan, industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, industri hasil kayu olahan dan rotan, industri pembuatan bahan bangunan, industri pertukangan (*meubelair/furniture*), industri pengolahan besi dan baja, industri jasa dan industri lainnya.

Berbagai produk sektor-sektor perekonomian yang dihasilkan di Lampung Barat masih diperdagangkan dalam bentuk produk primer, sehingga nilai tambah produk belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Lampung Barat. Pembangunan sektor industri yang ditujukan untuk memperluas lapangan/kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah sumberdaya lokal, serta mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi dan UMKM masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Permasalan yang dihadapi meliputi:

a. Permasalahan disektor industri meliputi rendahnya inovasi teknologi, ketersediaan bahan baku, rendahnya akses permodalan, keterampilan tenaga kerja, dan daya saing produk;
b. Sarana dan prasarana perhubungan dan sistem transportasi masih belum memadai untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi yang cepat;
c. Permasalahan pada aspek ketenagakerjaan meliputi penyediaan lapangan kerja, rendahnya kompetensi calon tenaga kerja, sarana dan prasarana latihan kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan;
d. Permasalahan pada aspek investasi perlu mendapat perhatian besar seperti promosi investasi, perbaikan iklim investasi dan penyediaan lahan usaha.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat berupaya dengan mengadakan berbagai pelatihan yang dapat meningkatkan sumber daya manusia, memberikan permodalan usaha untuk pengembangan permodalan, bantuan alat produksi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Selain itu untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk Industri Kecil Menengah dilakukan juga upaya fasilitasi sertifikasi produk antara lain sertifikasi P-IRT, Sertifikasi Halal, Sertifikasi P3DN, fasilitasi desain kemasan modern dan fasilitasi sertifikasi – sertifikasi lainnya.

Selanjutnya dalam bidang pemasaran, dilakukan upaya fasilitasi penjualan produk IKM seperti pameran skala lokal, temu bisnis dengan pengusaha besar, maupun upaya promosi ke perusahaan retail modern. Upaya – upaya diatas bukan tanpa kendala. Kendala yang paling utama adalah berasal dari internal pelaku usaha IKM, dimana diperlukan usaha untuk merubah pola fikir dan pola kerja menjadi lebih terbuka terhadap perubahan yang sangat dinamis.

2.1.1.6. Pariwisata

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki banyak area alami yang berpotensi untuk dijadikan objek wisata berbasis lingkungan mulai dari danau, pegunungan, wisata alam, air terjun, dan wisata petualangan. Dikutip dari Buku Kabupaten Lampung Barat memiliki luas wilayah sebesar 2.116.59 Km2 atau sebesar 6,2% dari luas Provinsi Lampung Kecamatan dengan luas terbesar adalah Kecamatan Bandar Negeri Suoh yaitu sebesar 267,23 Km2. Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Kebun Tebu yaitu sebesar 61,55 Km2.

Adapun batas wilayah Kabupaten Lampung Barat yaitu sebelah utara berbatasan dengan Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dan Way Kanan Lampung, Sebelah Timur berbatasan dengan Lampung Utara, Tanggamus. Sebelah selatan berbatasan dengan Pesisir Barat dan Tanggamus, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat.

Kabupaten Lampung Barat meliputi 15 kecamatan, 131 pekon dan 5 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 303,397 ribu jiwa yang terdiri dari 157.396 laki-laki dan 146.001 perempuan. Ditinjau dari tingkat usianya, penduduk Kabupaten Lampung Barat didominasi terbanyak oleh penduduk yang berusia 0-4 tahun.

Pembangunan pariwisata menjadi salah satu program unggulan di Lampung Barat, dan dituangkan dalam misi ke-3 Meningkatkan Perekonomian yang berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata berbasis sumberdaya lokal industri sektor pariwisata, dengan indikator berupa rata-rata lama tinggal, jumlah kunjungan wisatawan dan rata-rata jumlah pengeluaran wisatawan.

Prospek pariwisata di Lampung Barat cukup baik, dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung tahun 2021 tercatat sebanyak 688.790 kunjungan wisatawan nusantara, pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup baik yaitu berjumlah 1.798.166 terdiri dari 1.798.010 wisatawan nusantara dan 156 wisatawan mancanegara. Di tahun 2023, wisatawan nusantara sebanyak 1.390.601 dan wisatawan mancanegara sebanyak 252 orang. Pada tahun 2024 terdapat sejumlah 1.049.627 wisatawan nusantara dan 169 wisatawan mancanegara yang melakukan kunjungan wisata di berbagai destinasi Kabupaten Lampung Barat.

Wisatawan yang berkunjung ke Lampung Barat menurut tingkat kunjungan yang terdata pada destinasi pariwisata yang setiap tahunnya cukup banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang menjadikan Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu tujuan wisata utama. Potensi-potensi wisata alami di Kabupaten Lampung Barat diantaranya adalah Arung Jeram Way Besai, Air Terjun Cengkaan, Air Terjun Cipta Mulya, Daerah Wisata Pekon Hujung, Gunung Pesagi, Daerah Agrowisata, Lumbok Seminung Resort, Kawasan Air Panas Gemburak, Taman Nasional Bukit Barisan, Danau Vulkanik Suoh, dan destinasi baru yaitu Sunrise Point Limau Kunci, Sunrise Point Petik Bintang dan Bukit Embun serta masih banyak area alami lainnya yang dapat dijadikan daerah tujuan wisata. Selain itu salah satu wisata yang sedang ramai dikunjungi oleh wisatawan adalah Ekowisata Kebun Raya Liwa yang mengusung tema pengembangan tanaman hias nusantara dan flora sumatera, lokasinya sangat strategis berada di pusat Kota Liwa dan berlatar belakang Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dimana untuk koleksi macam-macam tanaman yang sudah ada saat ini mencapai 6297 dengan berbagai jenis tanaman seperti tanaman obat, buah-buahan, anggrek, dan tanaman hias.

Disamping objek wisata alam, Lampung Barat juga memiliki objek wisata budaya dan sejarah, seperti peninggalan zaman prasejarah, situs-situs megalitik, rumah tradisional Lampung, dan berbagai macam budaya khas daerah Lampung. Kabupaten Lampung Barat memiliki ciri adat budaya yang khas mengingat Lampung Barat merupakan asal usul Lampung atau dikenal dengan *The Origin of Lampung*. Hal ini mengindikasikan bahwa wisatawan yang ingin lebih mengenal adat istiadat dan budaya Lampung harus berkunjung ke daerah Lampung Barat karena masyarakat daerah ini masih menjaga tradisi dan menyimpan aset-aset budaya daerah.

Di Lampung Barat terdapat upacara adat yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Lampung Barat. Upacara Adat tersebut dilakukan pada saat pengangkatan raja, pernikahan, menyambut tamu agung, dan sebagainya. Upacara adat yang dilakukan diantaranya adalah Upacara Adat Pernikahan, Alam Gemisikh, Upacara Pengangkatan Raja, dan Nyambai Agung. Sejalan dengan ini, Lampung Barat juga memiliki acara tahunan yang memperkaya ragam budaya yang ada di daerah ini, seperti Gebyar Pesona Lumbok Ranau, Malaman Pitu Likukh, Pesta Sekura Cakak Buah, dan Festival Budaya Sekala Brak. Oleh karena banyaknya destinasi wisata baik wisata alam maupun wisata budaya, maka Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah yang sangat tepat untuk pengembangan industri ekowisata yang dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.

Salah satu kawasan wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah Kawasan Wisata Terpadu Seminung Lumbok Resort. Resort ini sudah dilengkapi dengan sejumlah sarana dan fasilitas yang cukup memadai diantaranya hotel, convention hall, dan cottage. Sejak tahun 2024 tengah dikembangkan objek wisata baru di sekitar Seminung Lumbok Resort yaitu Pasar Tematik Jelajah wisata Danau Ranau yang diharapkan di masa depan akan menjadi destinasi unggulan baru.

Objek wisata lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dan pada tahun 2016 telah dilakukan renovasi dan pengembangan adalah objek wisata Rest Area di Sindang Pagar Sumber Jaya yang merupakan suatu objek wisata yang menampilkan panorama keindahan dari puncak bukit, Selain itu objek Wisata Arung Jeram di Pekon Suka Jaya Kec. Sumber Jaya juga merupakan salah satu wisata minat khusus yang ada di Lampung Barat.

Selain dari objek wisata yang telah dikelola oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten Lampung Barat yang dianugerahi panorama keindahan alam memiliki banyak potensi objek wisata yang beragam dan jumlahnya tersebar di beberapa kecamatan. Beberapa objek wisata tersebut telah dikenal luas bahkan sampai ke mancanegara dan menjadi salah satu objek wisata unggulan

Kabupaten Lampung Barat, diantaranya Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Panas Bumi Suoh.

Untuk wisata kuliner kabupaten Lampung Barat juga tidak kalah dalam menjajakan cita rasanya yang khas, dan makanan bisa menjadi salah satu identitas bagi suatu daerah, Kabupaten Lampung Barat diselimuti dengan begitu banyak kuliner tradisional dan kreasi, baik makanan ringan seperti buak tat (kue tat), cucukh bangik, lemang dan masih banyak lagi. Untuk minuman Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memilki hasil kopi yang unggul dalam segi kualitas dan rasa, ditambah juga dengan adanya kopi luwak yang masih di kelola secara alami dan menjadi salah satu kuliner wajib yang harus dicoba bagi wisatawan. Untuk makanan berat sendiri yang bisa wisatawan cicipi adalah seperti pupput, pekhos masin, sambol pajak, gulai taboh, dan ratusan panganan lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, dimana Danau Ranau telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang meliputi dua provinsi yaitu Lampung Barat (Provinsi Lampung) dan OKU Selatan (Provinsi Sumatera Selatan). Sebagian besar wilayah administrasi Lampung Barat merupakan Kawasan Hutan Negara (sekitar 61,5% dari luas administrasi) sehingga destinasi wisata yang ditawarkan adalah wisata dengan objek keindahan alam atau wisata minat khusus seperti ekowisata, agrowisata dan wisata tirta (danau) serta wisata religi/wisata budaya.

Kabupaten Lampung Barat memiliki 10 (sepuluh) Destinasi Unggulan yang terdiri dari:

1. Kebun Raya Liwa
2. Kawasan Seminung Lumbok Resort
3. Ekowisata Suoh
4. Kampung Kopi Rigis Jaya
5. Taman Nasional Bukit Barisan Kubu Perahu
6. Puncak Bawang Bakung
7. Aurng Jeram Way Besai
8. Pinusan Rest Area
9. Wisata Festival Budaya Paksi Pak Sekala Bekhak.

Tabel 18.Daftar Kawasan Ekowisata Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

NO.	OBJEK WISATA	ALAMAT
I.	**Kawasan Ekowisata**	
1.	Hutan Kemasyarakatan	Pekon Tribudi Sukur, Kec. Kebun Tebu
2.	TNBBS Kisbu Perahu	Kecamatan Balik Bukit
3.	TNBBS Suoh	Kecamatan Suoh
4.	Kebun Kopi Sukau	Kecamatan Sukau
5.	Kebun Raya Liwa	Kecamatan Balik Bukit
6.	Sentra Kopi Organik Air Hitam	Kecamatan Air Hitam
7.	Agrowisata Sekincau	Kecamatan Sekincau
8.	Budidaya Benih Ikan (BBI).	Kecamatan Sumber Jaya
9.	TNBBS Sekincau	Kecamatan Sekincau
10.	Taman Wisata Trihita Karana	Pekon Srinanti Kec. Air Hitam
11.	Agro Wisata Alam Segar Sari	Pekon giham suka maju Kec. Sekincau
12.	Bumi Perkemahan Sukaraja	Pekon Sukaraja Kecamatan Kec. Way Tenong
13.	Puncak Gerday Bawang Bakung	Pekon Negeri ratu Kec. Batu Brak
14.	Puncak Tembangan Hill	PekonTrimulyo Kec.Gedung Surian
15.	Sunrise Point Limau Kunci	Pekon Padang Cahaya Kec. Balik Bukit
II.	**Wisata Danau**	
1.	Danau Ranau	Pekon Lumbok, Kec. Lumbok Seminung
2.	Danau Asam	Pekon Sukamarga, Kecamatan Suoh
3.	Danau Lebar	Pekon Sukamarga, Kecamatan Suoh
4.	Danau Belibis/Minyak	Pekon Sukamarga, Kecamatan Suoh
III.	**Wisata Air Terjun**	

NO.	OBJEK WISATA	ALAMAT
1.	Air Terjun Sepapah Kiri dan Sepapah Kanan	TNBBS Kubu Perahu, Kec. Balik Bukit
2.	Air Terjun Kubu Perahu	Kec. Balik Bukit
3.	Air Terjun Way Tutung	Pekon Negeri Ratu, Kec. Batu Brak
4.	Air Terjun Way Sepuga	Pekon Sukarame, Kec. Belalau
5.	Air Terjun Way Pahitan	Pekon Sukarame, Kec. Belalau
6.	Air Terjun Way Semaka	Pekon Sukarame, Kec. Belalau
7.	Air Terjun Purawiwitan	Pekon Purawiwitan, Kec. Kebun Tebu
8.	Air Terjun Cengkaan 1	Pekon Way Petai, Kec. Sumber Jaya
9.	Air Terjun Cengkaan 2	Pekon Way Petai, Kec. Sumber Jaya
10.	Air Terjun Padang Tambak	Pekon Padang Tambak, Kec. Way Tenong
11.	Air Terjun Kedung Lesung	Pekon Tugu Ratu, Kec. Suoh
12.	Air Terjun Mekar Sari	Kecamatan Pagar Dewa
13.	Air Terjun Cipta Mulya	Pekon Cipta Mulya, Kec Kebun Tebu
14.	Air Terjun Way Segening	Pekon Turgak, Kec. Belalau
15.	Air Terjun Pedas	Pekon Mutar Alam Kec. Way Tenong
IV.	**Wisata Sungai**	
1.	Sungai Way Semaka	Pekon Tugu Ratu, Kecamatan Suoh
2.	Sungai Way Besai	Pekon Suka Jaya, Kecamatan Sumber Jaya
V.	**Wisata Air Panas**	
1.	Gemburak	Pekon Sukaraja, Kecamatan Way Tenong
2.	Keramikan	Banding Rejo, Kecamatan Suoh
3.	Pemandian Air Panas Sedampah Indah	Pekon Sedampah Indah, Kec. Balik Bukit
4.	Sumber Air Panas Bumi	Dusun Ujung, Pekon Kagungan, Kec. Lumbok Seminung
VI.	**Situs Purbakala**	
1.	Situs Batu Andak Way Kenihang	Pekon Sukamulya, Kec. Lumbok Seminung
2.	Situs Si Pahit Lidah	Pekon Sukabanjar, Kec. Lumbok Seminung
3.	Situs Batu Lumpang 1	Pekon Sukabanjar, Kec. Lumbok Seminung
4.	Situs Batu Lumpang 2	Pekon Sukabanjar, Kec. Lumbok Seminung
5.	Situs Johor	Pekon Lumbok, Kec. Lumbok Seminung
6.	Situs Way Lumbok	Pekon Lumbok, Kec. Lumbok Seminung
7.	Situs Pesiwoan	Pekon Lumbok, Kec. Lumbok Seminung
8.	Situs Batin Katung	Pekon Sukamaju, Kec. Lumbok Seminung
9.	Situs Hujung Cumalagi	Dusun Hujung, Pekon Kagungan, Kec. Lumbok Seminung
10.	Situs Langkat	Pekon Hujung, Kec. Lumbok Seminung
11.	Makam Si Pahit Lidah dan Si Mata Empat	Pekon Sukabanjar, Kec. Lumbok Seminung
12.	Batu Kebilis Hujung di Langit Harakuning	Pekon, Hanakau, Kecamatan Sukau
13.	Batu Tulis/Gores	Pekon, Tanjung Raya, Kec. Sukau
14.	Bambu Buntu Telu Tungku Ajab	Pekon, Tapak Siring, Kec. Sukau
15.	Makam Bergerak	Pekon, Tanjung Raya, Kec. Sukau
16.	Makam Bergerak Suluh	Pekon, Tapak Siring, Kec. Sukau
17.	Situs Tanjung Raya	Pekon, Tanjung Raya, Kec. Sukau
18.	Batu Asah Taji	Pekon, Tanjung Raya, Kec. Sukau
19.	Batu Muli Sri Kembang	Pekon Sugihan Tuha, Kec. Balik Bukit
20.	Makam Panjang Punebap Imbokh	Pekon Negeri Ratu, Kec. Batu Brak
21.	Makam H. Baha Udin	Pekon Negeri Ratu, Kec. Batu Brak
22.	Makam Raja Betani	Pekon Kembahang, Kec. Batu Brak
23.	Batu Kenyangan	Pekon Balak, Kec. Batu Brak
24.	Keramat Khatu Majangau	Pekon Negeri Ratu, Kec. Batu Brak
25.	Keramat Khekhiya Jadi	Pekon Kedamaian, Kec. Belalau
26.	Keramat Cambay Mak Bejunjung	Pekon Kembahang, Kec. Batu Brak
27.	Keramat Melebui	Pekon Tembelang, Kec. Suoh
28.	Batu Sembilan	Pekon Roworejo, Kec. Suoh
29.	Batu Tulis	Pekon Roworejo, Kec. Suoh
30.	Batu Langgar	Pekon Roworejo, Kec. Suoh

NO.	OBJEK WISATA	ALAMAT
31.	Batu Kepangpang	Pekon Kenali, Kec. Belalau
32.	Situs Megalitik Batu Brak	Pekon Purajaya, Kec. Kebun Tebu
33.	Situs Megalitik Batu Jagur	Pekon Purajaya, Kec. Kebun Tebu
34.	Situs Purbakala Dolmen 8 buah	Pekon Bungin, Kec. Gedung Surian
35.	Situs Megalitik Telaga Mukmin	Pekon Puramekar, Kec. Gedung Surian
36.	Telaga Mukmin	Pekon Muara Jaya, Kec. Kebun Tebu
37.	Situs Cipta Mulya	Pekon Cipta Mulya, Kec. Kebun Tebu
38.	Situs Batu Temang	Pekon Pura Jaya, Kec. Kebun Tebu
39.	Keramat Batu Kebayan	Pekon Batu Kebayan, Kec. Batu Ketulis
40.	Batu Seheklar	Pekon Pehayu Jaya, Kec. Pagar Dewa
41.	Batu Ikhau	Pekon Hujung, Kec. Belalau
42.	Batu Ngiyu	Pekon Serungkuk, Kec. Belalau
43.	Makam Raja Selalau	Pekon Balak, Kec. Batu Berak
VII.	Rumah Adat	
1.	Rumah Adat Paksi Buay Nyerupa	Pekon Tanjung Raya, Kec. Sukau
2.	Rumah Adat Paksi Buay Bejalan Diway	Pekon Kembahang, Kec. Batu Berak
3.	Rumah Adat Paksi Buay Pemong	Pekon Balak Kecamatan Batu Berak
4.	Rumah Adat Paksi Buay Belunguh	Pekon Kenali, Kec. Belalau
5.	Rumah Tradisional Hujung	Pekon Hujung, Kec. Belalau

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat, 2024

Dalam Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat membagi zona pengembangan pariwisata menjadi empat zona wisata yaitu Zona Objek Wisata Alam, Zona Ekowisata, Zona Objek Wisata Tirta, dan Zona Objek Wisata Budaya Dan Sejarah. Keempat zona tersebut dijelaskan secara rinci tabel berikut ini:

Tabel 19. Klasifikasi Zona Pembangunan Objek Wisata Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

Jenis	Objek Wisata
Alam	1. Objek Wisata Komplek Desa Wisata 2. Kawasan Wisata Terpadu 3. Gunung Pesagi 4. Gunung Seminung 5. Sunrise Point Limau Kunci (dibentuk Tahun 2020)
Ekowisata	1. Kebun Raya Liwa (Launching 2018) 2. Sentra Kopi Organik Air Hitam 3. Agrowisata Sekincau 4. Kebun Kopi AEKI Sukau 5. Pinus Sumber Jaya 6. Budidaya Benih Ikan (BBI) Sumber Jaya 7. Kawasan Hutan Kemasyarakatan 8. Kawasan TNBBS Kubu Perahu 9. Kawasan TNBBS Suoh
Tirta	1. Telaga Mukmin 2. Air Terjun Padang Tambak 3. Air Terjun Cengkuan 1, Way Petai 4. Air Terjun Cengkuan 2, Way Petai 5. Air Terjun Padang Tambak 6. Air Terjun Puriwiwian 7. Waduk Gedung Surian 8. Arung Jeram Sumber Jaya 9. Air Panas Gembenk Way Tenong 10. Taman Kota Ham Tobiu 11. Danau Asam Suoh 12. Danau Lebar Suoh 13. Danau Belibis Suoh 14. Danau Minyak Suoh
Budaya	1. Situs Megalitik Batu Jagur 2. Situs Megalitik Telaga Mukmin 3. Tugu Soekarno, Tugu Sari 4. Jembatan Panjang Sukapura

Jenis	Objek Wisata
	5. Lamban Gedung Buay Pemong 6. Lamban Gedung Buay Nyerupa 7. Buay Bejalan di Way 8. Situs Megalitik Batu Brak 9. Saka Pita 10. Lamban Gedung Buay Bolanguh 11. Batu Kebayan

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat, 2024

2.1.2. Pendapatan Regional

Pendapatan regional adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau daerah. Tingkat pendapatan dapat diukur dari total pendapatan wilayah maupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. Dalam menghitung pendapatan regional hanya dipakai konsep Domestik, yang berarti seluruh nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya disuatu wilayah (baik kabupaten maupun provinsi) dihitung dan dimasukkan ke produk wilayah tersebut tanpa memperhatikan kepemilikan faktor-faktor produksi tersebut, dengan kata lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan gambaran "*Product Originated*".

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional. Dengan perkataan lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar. Tahun dasar yang digunakan dalam publikasi ini adalah tahun 2010.

PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.

Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PDRB yang disajikan secara berkala, wajar dan komprehensif akan dapat diketahui indikator:

a. Tingkat pertumbuhan ekonomi
b. Perkembangan pendapatan perkapita
c. Tingkat kemakmuran masyarakat
d. Tingkat inflasi dan deflasi
e. Struktur perekonomian suatu daerah *(PDRB hal. 1-2)*

Nilai PDRB Kabupaten Lampung Barat atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2024 mencapai 9,90 triliun rupiah. Secara Nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 0,89 triliun rupiah dibandingkan 2023 yang mencapai 9,02 triliun rupiah. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya inflasi dan semakin membaiknya perekonomian.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami kenaikan dari 5,50 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 5,74 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 perekonomian Lampung Barat mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat mengalami kenaikan hingga 4,36 persen.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2020- 2024) struktur perekonomian Lampung Barat didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Lampung Barat.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Lampung Barat pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 43,96 persen (angka ini menurun dari 47,75 persen di tahun 2020). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,45 persen (naik dari 12,20 persen di tahun 2020), disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 6,54 persen (turun dari 6,80 persen di tahun 2020).

Di antara ketiga lapangan usaha tersebut, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan dua lapangan usaha yang lain, peranannya berfluktuasi namun cenderung naik. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 6 persen.

Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. (*PDRB hal.73-74*)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Lampung Barat pada tahun 2024 mengalami Kenaikan. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Lampung Barat atas dasar harga konstan 2024, mencapai 5,74 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 5,50 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,36 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 4,68 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi di 2024 dicapai oleh kategori Industri Pengolahan, yang mampu tumbuh hingga 11,88 persen. Kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang memiliki pertumbuhan terendah di tahun 2024, yakni sebesar -2,09 persen. *(PDRB hal.75-76)*

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB

sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 20. PDRB Per Kapita Kabupaten Lampung Barat (Rupiah) Periode 2019 - 2024

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023*	2024**
Nilai PDRB/GRDP (Miliar Rupiah/Billion Rupiah)						
- ADHB/at current price	7.095,65	7.131,89	7.477,51	8.279,70	9.015,23	9.903,24
- ADHK/at 2010 Constant price	4.984,13	4.926,30	5.051,88	5.256,95	5.502,92	5.742,84
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Juta Rupiah/Million Rupiah)						
- ADHB/at current price	23,40	23,66	24,50	26,80	28,85	31,35
- ADHK/at 2010 Constant price	16,44	16,34	16,55	17,02	17,61	18,18
- Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010/Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	4,32	(0,61)	1,28	2,84	3,47	3,24
Jumlah Penduduk (orang)/Population(People)	303.180	301.386	305.171	308.851	312.433	315.923
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (persen)/Population Growth (Percent)			1,26	1,23	1,21	1,18

*) Angka Sementara/*Preliminary Figures*
**) Angka Sangat Sementara/ *Very Preliminary Figures*

Pada tahun 2024, PDRB Per kapita Lampung Barat ADHB mencapai 31,35 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 8,66 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan kenaikan PDRB Perkapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Pada tahun 2024 pertumbuhan PDRB per kapita secara riil adalah 3,24 persen. Hal ini terjadi karena pada tahun 2024 terjadi percepatan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perlu diketahui bahwa indikator PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan perkapita penduduk. Indikator ini lebih tepat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah bagi masyarakat melalui hasil kreatifitas usaha dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Namun dengan segala keterbatasannya, indicator PDRB perkapita dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. *(PDRB hal.77-78).*

Hal yang sama juga terlihat pada PDRB atas dasar konstan (PDRB riil). Kenaikan PDRB atas dasar konstan mampu menunjukkan adanya peningkatan volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh Kabupaten Lampung Barat. PDRB riil tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 dimana sebelumnya 4,98 triliun rupiah menjadi 4,92 triliun rupiah. Tahun 2021 PDRB riil menjadi 5,05 triliun rupiah. Nilai PDRB Lampung Barat atas dasar harga konstan 2023 mencapai 5,05 triliun rupiah, nilai PDRB Lampung Barat atas dasar harga konstan 2024 mencapai 5,74 triliun rupiah mengalami kenaikan disbanding tahun 2023, hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,36 persen. Kenaikan PDRB atas dasar harga konstan selama 2019-2024 bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 21. PDRB ADHK, ADHB, Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung Barat Tahun 2019 – 2024

Tahun	PDRB ADHK (juta rupiah)	PDRB ADHB (juta rupiah)	Laju Pertumbuhan Ekonomi %
2019	4.984.128,87	7.095.651,44	5,18
2020	4.926.295,10	7.131.893,53	(1,16)
2021	5.051.879,09	7.477.511,69	2,55
2022	5.258.950,01	8.277.702,36	4,06
2023*)	5.502.918,37	9.015.228,03	4,68
2024**)	5.742.843,05	9.903.244,88	4,36

*) Angka Sementara / *Preliminary figures*
**) Angka Sangat Sementara / *Very preliminary figures*
Sumber : BPS Lampung Barat 2024.

PDRB Lampung Barat perkapita 2024 mencapai 31,35 juta rupiah. Perekonomian Lampung Barat didominasi oleh sektor pertanian, yaitu 4,82%. Secara lengkap bisa dilihat Distribusi

persentase PDRB Lampung Barat 2023, PDRB Perkapita Lampung Barat Tahun 2019-2023, menurut data BPS PDRB menurut lapangan usaha 2019-2023 untuk data tahun 2024 akan disajikan di PDRB 2020-2024 pada tahun 2025 dan Laju pertumbuhan PDRB Lampung Barat Tahun 2019-2024 pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 22. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lampung Barat Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2024

LAPANGAN USAHA / INDUSTRY (%)	2019	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	46,92	47,75	47,22	46,10	44,29	43,96
Pertambangan dan Penggalian	2,71	2,61	2,44	2,34	2,42	2,41
Industri Pengolahan	5,49	5,29	5,33	5,06	4,97	5,32
Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,12	0,11	0,10	0,09	0,09
Konstruksi	4,26	3,99	4,29	4,36	4,45	4,38
Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,83	12,20	12,86	14,53	15,38	15,45
Transportasi dan Pergudangan	2,73	2,63	2,57	3,23	3,96	4,05
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,42	1,35	1,29	1,31	1,37	1,37
Informasi dan Komunikasi	3,01	3,22	3,19	3,06	3,07	3,07
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,82	1,86	1,95	1,87	1,82	1,78
Real Estat	4,60	4,45	4,33	4,12	3,91	3,86
Jasa Perusahaan	0,19	0,19	0,18	0,17	0,16	0,17
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,60	6,80	6,81	6,23	6,57	6,54
Jasa Pendidikan	4,33	4,50	4,46	4,36	4,24	4,18
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,41	1,55	1,57	1,45	1,41	1,44
Jasa Lainnya	1,56	1,47	1,38	1,68	1,88	1,92

* Angka Sementara / *Preliminary figures*
** Angka Sangat Sementara / *Very preliminary figures*
Sumber : BPS Lampung Barat 2024

Grafik 1 PDRB Perkapita Lampung Barat Tahun 2019 – 2023

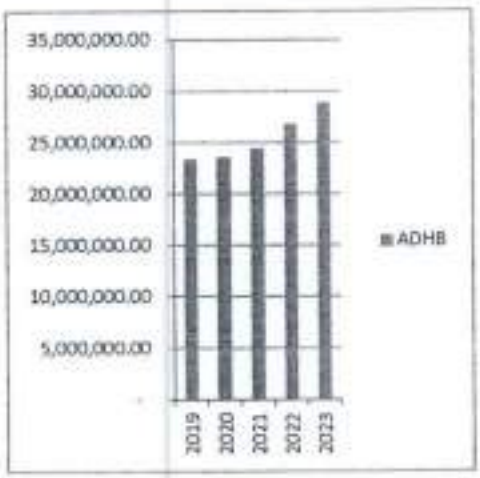

Sumber : BPS Lampung Barat

Grafik 2 Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2019 - 2024

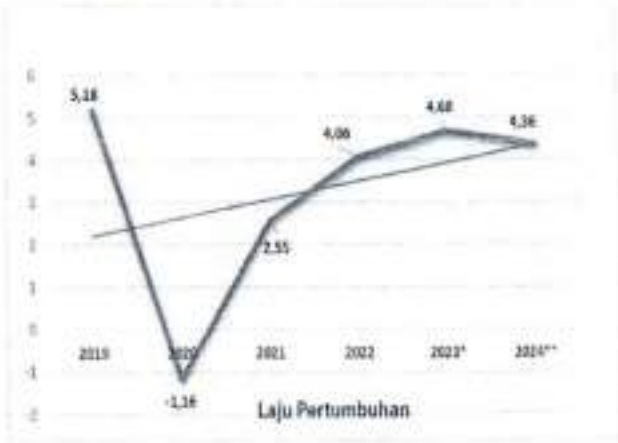

Sumber : BPS Lampung Barat

2.2. KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Usaha untuk menciptakan kesempatan kerja guna mengurangi pengangguran dan sekaligus menampung pertambahan tenaga kerja merupakan bagian kesatuan dari seluruh kebijakan dan program-program pembangunan. Bahkan seluruh kebijakan dan

program pembangunan ekonomi dan sosial, mempertimbangkan sepenuhnya tujuan-tujuan perluasan kesempatan kerja serta kegiatan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berdampak pada penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Hal ini dimungkinkan ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut ditopang oleh sektor sektor usaha yang memiliki elastisitas lapangan kerja rendah. Dudley Seers (1979) dalam BPS (1984) menjelaskan bahwa ada tiga masalah pokok yang perlu diperhatikan dalam mengukur tingkat pembangunan suatu negara yaitu tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan di berbagai bidang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan berarti apabila diikuti oleh pemerataan atas hasil-hasil pembangunan.

Pada hakekatnya, pembangunan yang dilaksanakan merupakan suatu proses berkelanjutan yang mengarah pada suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat khususnya di bidang perekonomian, berbagai kebijakan dan strategi yang sesuai dengan kondisi dan sumber daya lokal yang tersedia perlu untuk segera direalisasikan.

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang menonjol dalam proses pembangunan, khususnya di negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan masalah ketenagakerjaan selalu mengetengahkan isu-isu tentang pengangguran, kesempatan kerja dan partisipasi angkatan kerja yang tentunya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja akan memunculkan problematika sosial budaya berupa pengangguran, karena tidak semua tenaga kerja mampu diserap oleh pasar. Meningkatnya angka pengangguran tentu akan berdampak kepada penurunan tingkat kesejahteraan rakyat. Penawaran tenaga kerja sendiri selama ini berkorelasi positif dengan pertumbuhan penduduk.

Sejalan dengan strategi pembangunan pemerintah pusat yang menitikberatkan pada tiga pendekatan atau triple track strategy yaitu progrowth (pertumbuhan ekonomi), pro-job (kesempatan/lapangan kerja) dan pro-poor (kemiskinan), ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas penting dalam pembangunan karena tenaga kerja merupakan modal penting dalam menggerakan roda pembangunan di daerah. Karena itu, evaluasi tentang sejauh mana pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Lampung Barat merupakan hal yang sangat perlu untuk dilakukan guna mengetahui hal-hal yang telah dicapai dalam bidang ketenagakerjaan. Data-data dan indikator ketenagakerjaan dalam hal ini juga diperlukan untuk penyusunan perencanaan sektor ketenagakerjaan di masa mendatang.

Untuk dapat memahami masalah ketenagakerjaan dibutuhkan data yang dapat dipercaya dan cukup terperinci mengenai karakteristik angkatan kerja dan struktur penyerapan tenaga kerja. Ketersediaan data ketenagakerjaan tersebut dapat diperoleh dari beberapa kegiatan pendataan yang dilakukan oleh BPS seperti Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Sumber-sumber data ketenagakerjaan tersebut tidak semuanya dapat dibandingkan dalam melihat perkembangan dan perubahan partisipasi angkatan kerja serta penyerapan tenaga kerja. Kenyataan ini disebabkan oleh perbedaan dalam konsep dan definisi, serta ketidakseragaman dalam klasifikasi. Oleh karena itu, diperlukan kecermatan dan kehati-hatian para peneliti dalam menganalisis, menarik kesimpulan tentang ketenagakerjaan dari waktu ke waktu dan membuat perbandingan antar wilayah. Berbeda dengan indikator komponen demografi lainnya, beberapa konsep pokok ketenagakerjaan seperti tingkat partisipasi, bekerja, pengangguran, sektor, jenis pekerjaan dan status pekerjaan sangat bergantung pada konsep yang dipakai dan penerapannya di lapangan.

Di negara berkembang seperti Indonesia, permasalahan ketenagakerjaan lebih dikaitkan dengan produktivitas tenaga kerja yang rendah dan bukan pada masalah pengangguran terbuka. Rendahnya produktivitas kerja ini berkaitan dengan pendidikan yang rendah dan berakibat pada rendahnya upah yang diterima. Dengan upah yang rendah ini, kesejahteraan akan menjadi rendah atau dengan kata lain, akan timbul masalah kemiskinan.

Pada akhirnya, hubungan penduduk yang bekerja dengan produktivitas rendah, pendidikan rendah, penghasilan rendah, dan kemiskinan akan menjadi sebuah lingkaran setan *(vicious*

circle). Tenaga kerja yang produktivitas kerjanya rendah dalam ekonomi pembangunan biasa disebut sebagai setengah pengangguran (*underemployment*).

Menurut Ananta dan Sugiharso (1993), ketersediaan tenaga kerja dan pertumbuhan tenaga kerja di Indonesia merupakan akibat dari adanya pertumbuhan penduduk dan transformasi demografi dan bukan akibat adanya pertumbuhan ekonomi. Isu yang menarik adalah *window of opportunities* yang menyebabkan adanya "Bonus Demografi" yang diramalkan oleh para demografer. Bonus Demografi merupakan fenomena dengan definisi bahwa penduduk di Indonesia mengalami transisi struktur umur dan sebagian besar berada pada kelompok usia produktif (15 – 65). Bila fenomena ini dipersiapkan secara matang maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan dengan lonjakan pertumbuhan ekonomi tetapi jika tidak dipersiapkan maka yang terjadi adalah timbulnya berbagai masalah sosial.

Penyediaan data dan indikator ketenagakerjaan didasarkan pada Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan pada bulan Agustus. Pendekatan teori ketenagakerjaan dalam Sakernas menggunakan *Standard Labour Force Concept* yang dikeluarkan oleh *International Labor Organization (ILO)*. Berdasarkan keputusan Konvensi *International Labor Organization (ILO)* No.138 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 1973 di Jenewa, batasan minimum umur penduduk yang diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun. Dengan demikian, dalam penyusunan indikator ketenagakerjaan ini, digunakan batasan penduduk usia 15 tahun keatas. Indikator ketenagakerjaan yang biasa digunakan dalam evaluasi kebijakan pemerintah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengganggguran Terbuka (TPT), dan struktur penyerapan tenaga kerja baik berdasarkan lapangan usaha, status pekerjaan, jenis pekerjaan, dan jumlah jam kerja. Berikut ini akan diuraikan masing-masing indikator ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

Tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan besaran rasio antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Adapun yang termasuk angkatan kerja (laborforce) adalah penduduk usia kerja yang bekerja (*employed*), tidak bekerja, dan mencari pekerjaan (*unemployed*). Yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja (*notinlaborforce*) adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kegiatan lainnya (pensiun, cacat,dan sebagainya).

Pendekatan angkatan kerja memiliki aturan dasar yang harus konsisten. Azas pertama adalah eksklusivitas yang berarti bahwa penduduk usia kerja hanya dapat digolongkan dalam satu kategori dalam komposisi penduduk usia kerja. Seseorang yang dikategorikan bekerja tidak boleh dimasukkan lagi dalam kategori sekolah atau mengurus rumah tangga meskipun dalam kenyataannya orang tersebut melakukan dua aktivitas yang berbeda. Azas kedua adalah prioritas yang berarti bahwa urutan prioritas kategori ditentukan secara pasti, yaitu bekerja, mencari pekerjaan, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Jika seseorang bekerja tetapi juga sekolah maka orang tersebut digolongkan sebagai penduduk bekerja. Demikian juga, bila seseorang mengurus rumah tangga tetapi juga bekerja maka orang tersebut dikategorikan sebagai bekerja meskipun sebagian besar waktu yang dimiliki digunakan untuk mengurus rumah tangga atau sekolah. Azas ketiga adalah rujukan waktu dan BPS menggunakan konsep seminggu terakhir sebagai rujukan waktu survei. Secara lengkap bisa dilihat Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 - 2024 pada tabel di bawah ini.

Tabel 23. Statistik Ketenagakerjaan Lampung Barat Tahun 2019 – 2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	79,51	83,48	83,23	83,17	82,01	82,83
Tingkat Pengangguran (%)	1,66	2,13	2,83	2,10	2,25	2,09
Bekerja (%)	98,34	97,87	97,17	97,90	97,75	97,91

Sumber : BPS Lampung Barat, Sakernas 2024

Jumlah penduduk usia kerja berkaitan erat dengan besarnya jumlah penduduk itu sendiri, karena penduduk usia kerja merupakan bagian dari jumlah penduduk secara keseluruhan, Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2019-2023, diketahui bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Lampung Barat di tahun 2023 TPAK Kabupaten Lampung Barat mengalami penurunan sebanyak (1,16%) menjadi sebesar 82,01%, Hal tersebut tentunya sejalan dengan

kenaikan Tingkat pengangguran terbuka dimana pada tahun 2023, TPT di Kabupaten Lampung Barat mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022.

Di Kabupaten Lampung Barat, persentase penduduk angkatan kerja mengalami kenaikan sebesar 3,97 persen ditahun 2020 menjadi 83,48 persen dari sebelumnya yang berjumlah 79,51% sedangkan ditahun 2023 angkatan kerja mengalami penurunan menjadi 1,7 persen dari sebelumnya yang berjumlah 83,71 persen, Penurunan persentase angkatan kerja ini diikuti dengan penurunan penduduk yang bekerja dan kenaikan penduduk yang menganggur, Jumlah persentase penduduk yang bekerja naik sebesar 0,51% sedangkan penduduk yang menganggur mengalami kenaikan sebesar 0,15%.

Grafik 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 – 2023

Sumber: BPS Lampung Barat, LBDA 2023

Jika dilihat dari grafik diatas maka tingkat partisipasi angkatan kerja selama kurun waktu tahun 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Susanti dkk. (1995) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja adalah jenis kelamin. Perbedaan tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin ini disebabkan karena laki-laki lebih memiliki tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi (baik bekerja maupun mencari kerja) sedangkan perempuan cenderung mengurus rumah tangga.

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah Indikator yang mengindikasikan bahwa kualitas manusia yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Berdasarkan skala internasional, pencapaian IPM dikategorikan dalam 4 kategori, yaitu kategori sangat tinggi (IPM ≥80), kategori tinggi (70≤IPM<80), kategori sedang (60≤IPM<70), dan kategori rendah (IPM<60).

Pada masa Jabatan Periode Pertama Penjabat Bupati Kabupaten Lampung Barat, IPM Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 (berdasarkan sensus penduduk 2020) mencapai angka 71,72 poin naik 0,71 poin dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 71,01 poin. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Lampung Barat berada di posisi ke-6 se Provinsi Lampung dan masuk kedalam kategori tinggi. Sedangkan untuk capaian masa jabatan Periode ke-2 (dua) di tahun anggaran 2024, IPM Kabupaten Lampung Barat kembali mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 72.41 Point atau naik sebesar 0,69 Point.

Grafik 4 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Barat 2019 - 2024

Sumber: BPS Lampung Barat, IPM 2024

Tabel 24. Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM UHH SP2010)	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Lampung Barat	67,50	67,80	67,90	68,39	69,11	69,84

Indeks Pembangunan Manusia (IPM UHH SP2020)	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Lampung Barat		70,47	70,55	71,01	71,72	72,41

Sumber : BPS Lampung Barat, IPM 2024

IPM merupakan ukuran kualitas hidup yang dihitung berdasarkan tiga dimensi dasar tersebut. IPM dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Adapun Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain :

Komponen-komponen pembentuk IPM adalah:
- Umur panjang dan hidup sehat: Diukur dengan angka harapan hidup saat lahir
- Pengetahuan: Diukur dengan angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah
- Standar hidup layak: Diukur dengan produk nasional bruto per kapita

Capaian Komponen IPM
Komposit dalam perhitungan IPM terdiri dari 4 (empat) Indikator antara lain :

- Angka Harapan Hidup (AHH)
  2023 : 73,78 Tahun (↑) sebesar 0,55 dari tahun sebelumnya.
  2024 : 73,96 Tahun (↑) sebesar 0,18 dari tahun sebelumnya.
- Harapan Lama Sekolah (HLS)
  2023 : 12,26 Tahun (↑) sebesar 0,02 dari tahun sebelumnya.
  2024 : 12,30 Tahun (↑) sebesar 0,04 dari tahun sebelumnya.
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
  2023 : 8,36 Tahun (↑) sebesar 0,16 dari tahun sebelumnya.
  2024 : 8,56 Tahun (↑) sebesar 0,2 dari tahun sebelumnya.
- Pengeluaran Perkapita
  2023 : Rp 10.593.000 (↑) sebesar Rp418.000 dari tahun sebelumnya.
  2024 : Rp 10.965.000 (↑) sebesar Rp372.000 dari tahun sebelumnya.

2.2.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT dapat dihitung dengan membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja, lalu dikalikan 100. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa banyak angkatan kerja yang tidak terserap di pasar kerja. Hal ini dapat menjadi masalah dalam perekonomian, karena dapat menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi TPT antara lain: Pertumbuhan ekonomi, Upah, Inflasi, Investasi.

Pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Lampung Barat sebesar 2,10% atau sebesar 4.272 Jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Jumlah pengangguran di Kabupaten Lampung Barat mengalami sedikit Kenaikan yang sebelumnya sebesar 0,15%. Namun, pada tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka kembali mengalami penurunan sebesar 2,09% atau sebesar 4.043 Jiwa, turun sebanyak 0,16%. Kenaikan dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dilihat dari Tabel Dibawah.

Tabel 25. Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Lampung Barat Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,13	2,83	2,10	2,25	2,09

Sumber : BPS Lampung Barat, Lampiran 8 TPT

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,09 persen yang artinya dari 100 orang angkatan kerja terdapat 2 hingga 3 orang yang menganggur.

2.2.3. Indeks Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1, semakin tinggi nilai rasio Gini, maka semakin tinggi ketimpangan . Berikut disajikan tabel Indeks Gini.

Tabel 26. Gini Ratio Kab. Lampung Barat Tahun 2018 - 2024

No	Uraian	Tahun (%)						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Gini Ratio	0,314	0,296	0,295	0,281	0,284	0,274	0,274

Sumber : BPS Lampung, 2024

Pada tahun 2024, Gini Rasio Kabupaten Lampung Barat tercatat 0,274 Point atau sama dengan tahun sebelumnya.

2.2.4. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah standar hidup minimum yang mencukupi di suatu Negara/ daerah. Berikut disajikan tabel

Tabel 27. Tingkat Kemiskinan Kab. Lampung Barat Tahun 2019 - 2024

No	Uraian	Tahun (%)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk Miskin (000)	39,05	38,12	39,36	36,2	34,73	33,43
2.	Garis Kemiskinan Kapita Perbulan (Rp/Kap/Bulan)	400,862	443,313	457,478	495,283	530,803	563,531
3.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,38	0,55	0,80	0,45	0,80	0,40
4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,86	2,00	2,69	1,89	2,34	1,51
5.	Persentase Penduduk Miskin	12,92	12,51	12,82	11,71	11,17	10,68

Sumber : BPS, Tahun 2024

Salah satu indikator yang menjadi tolok ukur akan keberhasilan dari Penjabat Kepala Daerah adalah tingkat kemiskinan, pada tahun 2023 di Kabupaten Lampung Barat tingkat kemiskinan

sebesar 11,17% sedangkan Untuk jumlah penduduk miskin sendiri di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 34,730 Jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat mengalami Penurunan dimana pada tahun 2022 sebesar 11,71% setara dengan 36,200 Jiwa, sehingga tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat mengalami Penurunan sebanyak 0,54%.

Pada tahun 2024 capaian kinerja kemiskinan menunjukan hasil yang positif, Angka Kemiskinan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan sebesar (0,49%) menjadi 10,68% dari tahun sebelumnya, untuk jumlah penduduk miskin sendiri pada tahun 2024 turun menjadi 33,430 Jiwa.

2.2.5. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi merupakan salah satu indikator bahwa kondisi ekonomi suatu negara / daerah sedang tidak baik. Karena Lampung Barat bukan kota inflasi, maka angka inflasi dihitung dengan angka Indeks Perkembangan Harga (IPH) yg menjadi proxy inflasi. Adapun IPH M4 Des 2023 =-1,21(deflasi) sedangkan IPH M4 Des 2024=2,35 (Sumber BPS Lampung Barat 2024).

2.2.6. Mandatory Spending

Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah, dengan beberapa ketentuan :

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) serta pelaksanaannya dengan KMK Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam APBD.
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
4. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari DTU (Dana Alokasi Umum dan DBH) tidak termasuk DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH SDA Kehutanan Reboisasi, DBH SDA Perkebunan Sawit, dan Tambahan Dana DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus Permendagri 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2024.

Berikut rincian capaian realisasi mandatory spending pada Tahun Anggaran 2024

Tabel 28. Belanja Mandatory Spending
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

NO	KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	**Belanja Bidang Pendidikan (20%)**			
	Belanja Dinas Pendidikan	303.930.011.046,00	292.291.665.939,00	96,17
	Belanja Dinas Perpustakaan	11.722.379.533,00	11.635.091.126,00	99,26
	Dinas Lingkungan Hidup	8.222.319.215,00	7.946.529.769,00	96,67
	SATPOLPP	4.130.531.225,00	4.000.968.968,00	96,86
	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.068.009.070,00	3.765.938.180,00	92,57
	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.534.437.107,00	1.491.616.259,00	97,21
	Dinas Kesehatan	1.156.653.200,00	1.069.684.184,00	92,48

NO	KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Dinas Sosial	1.149.438.500,00	1.136.390.834,00	98,86
	Kantor Kesbang dan Politik	893.210.840,00	890.326.268,00	99,68
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	849.314.700,00	837.351.200,00	98,59
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	829.771.460,00	824.712.570,00	99,39
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	373.754.100,00	372.758.100,00	99,73
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	346.340.400,00	345.719.740,00	99,82
	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	317.061.100,00	305.366.156,00	96,62
	Badan Pendapatan Daerah	265.006.800,00	252.591.800,00	95,32
	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	245.691.000,00	218.631.375,00	88,99
	Dinas Perikanan	217.130.200,00	204.045.400,00	93,97
	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	162.187.600,00	161.040.625,00	99,29
	Dinas PUPR	111.820.000,00	80.890.400,00	72,34
	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	86.187.200,00	86.120.700,00	99,92
	Jumlah (a)	340.611.274.286,00	327.920.429.593,00	96,27
	Basis Total Belanja Daerah (b)	1.130.182.927.936,00	1.068.232.029.400,82	94,52
	% Mandatory Spending (a/b)	30,14	30,70	
2.	**Belanja Bidang Kesehatan (10%)**			
	a. Total Belanja Daerah	1.130.182.927.936,00	1.068.232.029.400,82	94,52
	b. Gaji Pokok ASN	248.507.663.980,00	234.253.991.226,00	94,26
	c. Total Belanja Daerah Dikurangi Gapok ASN (a-b)	881.675.263.956,00	833.978.038.174,82	94,59
	d. Belanja Dinkes + RSUD AU	163.945.201.229,00	154.547.654.373,82	94,27
	% Mandatory Spending (d/c)	18,59	18,53	
3.	**Belanja Pengawasan (0,75%), Anggaran Belanja >1 Triliun**			
	Belanja pada PD Inspektorat (a)	8.493.390.261,00	7.630.401.985,00	89,84
	Total Belanja Daerah (b)	1.130.182.927.936,00	1.068.232.029.400,82	94,52
	% Mandatory Spending (a/b)	0,75	0,71	
4.	**Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemdes (10%)**			
	a. Pendapatan Pajak Daerah	15.567.332.172,00	15.820.932.765,00	101,63
	b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kpd Pemdes	2.037.512.700,00	1.473.076.700,00	72,30
	% Mandatory Spending (b/a)	13,09	9,31	
5.	**Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemdes (10%)**			
	a. Pendapatan Retribusi Daerah	2.356.824.872,00	2.166.946.349,00	91,94
	b. Belanja Bg Hasil Retribusi Daerah kpd Pemdes	333.021.700,00	219.766.900,00	66,00
	% Mandatory Spending (b/a)	14,13	10,14	
6.	**Alokasi Dana Desa (ADD) / Alokasi Dana Pekon (ADP) (10%)**			
	Dana Transfer Umum (DTU):			
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	19.115.735.000,00	19.128.645.000,00	100,07
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	543.123.256.000,00	541.231.171.108,00	99,65
	Jumlah DTU (a)	**562.238.991.000,00**	**560.359.816.108,00**	**99,67**
	Pengurang			
	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	126.210.000,00	139.120.000,00	110,23
	DBH Sawit	3.679.357.000,00	3.679.357.000,00	100,00
	Jumlah Pengurang (b)	**3.805.567.000,00**	**3.818.477.000,00**	**100,34**
	Basis DTU yang diperhitungkan c = (a - b)	558.433.424.000,00	556.541.339.108,00	99,66
	Realisasi Alokasi Dana Desa (c)	56.266.301.000,00	56.266.301.000,00	100,00
	% Mandatory Spending (b/a)	10,08	10,11	100,34
7.	**Belanja Infrastruktur Daerah (40%)**			
	A. Total Belanja Daerah	1.130.182.927.936,00	1.068.232.029.400,82	94,52
	B. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa			
	a. belanja bagi hasil	2.370.534.400,00	1.692.863.600,00	71,41
	b. bantuan keuangan	174.716.036.000,00	174.716.036.000,00	100,00
	Jumlah (a+b)	177.086.570.400,00	176.408.899.600,00	99,62
	C. Selisih (1-2)	953.096.357.536,00	891.823.129.800,82	93,57
	Minimal belanja infrastruktur 40% x Selisih	381.238.543.014,40	356.729.251.920,33	93,57
	D. Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah	385.767.455.861,00	376.720.637.629,00	97,65
	% = D/C	40,48	42,24	

Sumber : APBD P Lambar, Tahun 2024

Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dibayarkan ke Pemerintahan Desa sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, untuk tahun 2024 realisasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Triwulan III Tahun 2024, sedangkan untuk DBH pajak daerah dan retribusi daerah TW IV akan dibayarkan sebagai kurang bayar tahun 2024 yang direalisasikan pada tahun 2025.

2.3. KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam mengelola keuangan daerah, agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu kebijakan dan perencanaan yang matang dalam memperoleh sumber pendanaan dan penggunaan dana yang telah diperoleh. Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menetapkan baik berkaitan dengan Pendapatan dan Belanja secara umum sebagai berikut.

2.3.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam pengelolaan pendapatan menghindari penetapan peraturan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Hal ini sebagai upaya agar masyarakat Lampung Barat merasakan keadilan dan manfaat atas pengenaan pajak dan retribusi daerah.

Namun demi kesinambungan pemerintahan dan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu mengambil kebijakan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah, baik berupa intensifikasi PAD dan/atau ekstensifikasi PAD.

a. Intensifikasi PAD

Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi PAD adalah upaya meningkatkan PAD dengan cara mengintensifkan jenis-jenis pungutan yang sudah ada sehingga didapat hasil yang lebih optimal dari sebelumnya. Intensifikasi dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, diantaranya dengan menaikkan tarif, memperbaiki sistem pemungutan, penguatan perpajakan daerah, peningkatan efektivitas pengawasan pungutan daerah, dan penyempurnaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Upaya riil yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat hingga kini antara lain: membentuk kelembagaan dalam rangka peningkatan PAD, melakukan revisi beberapa Peraturan Daerah, dan melakukan penyusunan peraturan pelaksanaan tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta pengelolaan keuangan.

Dalam mengelola pendapatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan, dan BPHTB, dan Retribusi Daerah.

Peningkatan yang ada memang belum memuaskan dari segi kuantitas, namun paling tidak upaya Pemda untuk meningkatkan pendapatan terus berlangsung. Beberapa langkah strategis yang telah dilaksanakan adalah Sosialisasi pajak dan retribusi daerah, pemutakhiran data pajak daerah dan PBB, pembentukan Tim Intensifikasi PAD dan PBB, Tim Terpadu Perizinan, dan Tim Penagih PAD, melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi PAD dan PBB secara berkala dan perbaikan tata kelola pemungutan pajak daerah.

Selain melaksanakan penagihan langsung, Pemda juga berupaya untuk meningkatkan PAD dengan perubahan struktur tarif pajak dan retribusi daerah. Hal ini telah dilakukan dengan melakukan upaya Revisi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retrubsi Daerah yang telah disahkan pada Tahun 2024. Untuk memperbaiki tatakelola pemungutan pajak, Pemerintah Daerah telah melakukan upaya penyetoran pajak langsung oleh wajib pajak ke Bank Persepsi tanpa melalui Bendahara Penerimaan.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung

Barat melalui Badan Pendapatan Daerah telah menjalin Kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat juga dengan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Barat, untuk mensyaratkan penyelesaian kewajiban perpajakan daerah bagi masyarakat yang mengajukan permohonan pelayanan di kedua Instansi tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat pada APBD TA 2024 menganggarkan penerimaan dari PAD sebesar Rp69.260.946.657,32 dan terealisasi sebesar Rp71.823.776.727,81 atau pencapaian 103,70%.

Secara keseluruhan, perbandingan PAD untuk tahun anggaran 2024 terhadap anggaran tahun 2023 adalah sebagai berikut: target PAD TA 2024 adalah sebesar Rp69.260.946.657,32 target PAD TA. 2023 adalah sebesar Rp65.358.127.413,00 dan kenaikan target PAD adalah Rp3.902.819.244,32 atau 5,97%.

b. Ekstensifikasi PAD

Peningkatan pendapatan daerah dengan ekstensifikasi PAD, yaitu suatu cara peningkatan PAD dengan menggali dan mencari sumber-sumber PAD baru yang potensial dan belum termanfaatkan namun tidak bertentangan dengan hukum. Sumber-sumber tersebut dapat berupa pajak daerah, retribusi daerah, maupun penerimaan dari pihak ketiga, serta penanaman modal (andil) pada BUMD/BUMN yang sehat dan menguntungkan.

Akan tetapi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pungutan pajak daerah dan retribusi daerah bersifat closed list, artinya pemerintah daerah hanya boleh memungut jenis pajak dan retribusi daerah yang tercantum di dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, upaya ekstensifikasi PAD hanya mungkin dilaksanakan dengan upaya penanaman modal (investasi), pembentukan dan/atau peningkatan kapasitas produksi usaha daerah (dapat dipungut Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah), atau pengelolaan aset daerah yang tidak dipisahkan.

c. Target dan Realisasi Pendapatan

Secara sederhana perbandingan target dan realisasi PAD ditampilkan dalam jutaan rupiah berikut ini.

Tabel 29. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 – 2024

NO	TAHUN ANGGARAN	PENDAPATAN DAERAH			PAD		
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
		(Rpjuta)	(Rpjuta)	(%)	(Rpjuta)	(Rpjuta)	(%)
1.	2013	853.495,37	854.217,65	100,08	29.390,62	33.829,81	115,10
2.	2014	627.235,48	634.237,10	101,12	37.390,48	40.800,35	109,12
3.	2015	873.853,51	895.544,66	102,48	41.023,96	46.434,65	113,19
4.	2016	1.083.459,00	1.020.799,72	94,22	47.565,00	49.078,91	103,18
5.	2017	1.094.402,57	1.069.132,04	97,68	82.742,62	46.789,23	56,55
6.	2018	1.143.216,49	1.124.169,35	98,34	50.056,05	50.471,54	100,83
7.	2019	1.135.122,89	1.122.307,63	98,87	64.189,79	65.267,42	101,68
8.	2020	1.020.583,35	1.011.011,75	99,06	65.771,30	61.219,45	93,08
9.	2021	1.023.153,91	1.007.143,61	98,44	67.978,32	71.498,89	105,18
10.	2022	1.035.258,10	1.024.279,16	98,94	74.228,15	70.315,34	94,73
11.	2023	988.918,70	985.836,20	99,69	65.358,12	68.748,52	105,19
12.	2024	1.119.416,37	1.111.191,95	99,27	69.260,94	71.823,77	103,70

Jika dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2024 hampir seluruh penerimaan yang ditargetkan dapat terpenuhi bahkan melebihi target penerimaan, tetapi pada TA 2017 PAD hanya tercapai 56,55% hal ini disebabkan karena penerimaan dana BOS semula dianggarkan dalam lain-lain PAD yang Sah sementara realisasinya masuk ke dalam Lain-lain Pendapatan Yang Sah, sedangkan pada TA 2020 PAD hanya tercapai 93,08% hal ini disebabkan adanya penerimaan retribusi pelayanan pasar, dan retribusi pasar grosir dan pertokoan yang realisasinya jauh dari target yang telah ditetapkan.

Retribusi pelayanan Kesehatan tidak mencapai target yang ditetapkan karena sejak Bulan April 2020 sampai Oktober 2020 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menghentikan pungutan retribusi pelayanan Kesehatan dalam rangka membantu masyarakat menghadapi dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Sedangkan untuk retribusi pelayanan pasar dan retribusi dan volume hari-hari pasaran karena dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Memperhatikan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat hampir selalu tercapai bahkan pada TA 2013 s.d. 2015 melebihi target yang telah ditetapkan setiap tahun, sedangkan pada TA 2016 s.d. 2024 masih dibawah target.

Secara detail Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 30. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
A.	PAD			
1.	Pajak Daerah	15.567.332.172,00	15.820.932.765,00	101,63
2.	Retribusi Daerah	2.356.824.872,00	2.166.946.349,00	91,94
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.854.018.934,00	5.854.018.934,91	100,00
4.	Lain-lain PAD yang Sah	45.482.770.679,32	47.981.878.678,90	105,49
	Jumlah	69.260.946.657,32	71.823.776.727,81	103,70
B.	PENDAPATAN TRANSFER			
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	825.127.934.500,00	818.068.561.394,00	99,14
2.	Insentif Fiskal	20.106.738.000,00	20.106.738.000,00	100,00
3.	Dana Desa	118.449.735.000,00	118.449.735.000,00	100,00
4.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	86.473.023.077,60	82.743.148.312,00	95,69
	Jumlah	1.050.157.430.577,60	1.039.368.180.706,00	98,97
	Jumlah Pendapatan Daerah	1.119.418.377.234,92	1.111.191.957.433,81	99,27

Permasalahan yang ada dalam pengelolaan pendapatan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ketidakseimbangan kontribusi antar unsur pendapatan dalam struktur APBD. Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Lampung Barat masih sangat rendah sekitar 4-6%;
2. Rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah dalam melakukan kewajiban perpajakannya; dan
3. Sumber daya manusia baik jumlah maupun kompetensi pegawai perlu di tingkatkan.

Dalam struktur APBD bahwa pendapatan daerah terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dana perimbangan merupakan unsur yang paling tinggi memberikan kontribusi terhadap APBD Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2013 hingga tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan melakukan upaya agar terjadi keseimbangan antara PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam memberikan kontribusi terhadap APBD Kabupaten Lampung Barat. Upaya tersebut telah dilaksanakan dengan penetapan peraturan daerah tentang perpajakan daerah termasuk melakukan perubahan tarif pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga melaksanakan upaya sosialisasi atas pemberlakuan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat, baik melalui media luar ruang maupun sosialisasi secara langsung secara formal dan non formal.
Upaya pendataan potensi PAD juga tetap dilaksanakan secara berkala agar dapat diketahui secara pasti berapa sebenarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Lampung Barat. Dengan diketahuinya potensi PAD yang belum tergali ini diharapkan PAD dapat ditingkatkan sehingga pada akhirnya kontribusi PAD terhadap APBD dapat lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

2.3.2. Pengelolaan Belanja Daerah

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pelaksanaan otonomi daerah mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditingkatkan untuk memenuhi pelayanan dasar publik serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk, antara lain peningkatan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), fasilitas sosial, fasilitas yang layak, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

a. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Mengacu pada peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan dasar, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum.

Pada Tahun Anggaran 2024, Kabupaten Lampung Barat menganggarkan kegiatan pembangunan melalui alokasi belanja daerah sebesar Rp1.130.182.927.936,00 yang terdiri dari belanja operasi Rp787.052.867.520,00 belanja modal Rp163.892.744.934,00 belanja tidak terduga Rp2.150.745.082,00 dan belanja transfer bagi hasil ke desa dan bantuan keuangan sebesar Rp177.086.570.400,00. Alokasi belanja tersebut digunakan untuk biaya pembangunan daerah yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perencanaan pembangunan, perhubungan dan infokom, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, koperasi dan usaha kecil menengah, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, urusan umum dan administrasi keuangan, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, dan perikanan dan kelautan.

Alokasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Alokasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)
1	Pendapatan Daerah	1.119.418.377.234,92
2	Belanja Daerah	1.130.182.927.936,00
3	Pembiayaan a. Penerimaan Rp30.683.213.321,08 b. Pengeluaran (Rp19.918.662.620,00)	
	Total Penerimaan Daerah (1 + 3a)	1.150.101.590.556,00
	Total Pengeluaran Daerah (2 + 3b)	1.150.101.590.556,00

Berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan target dan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang diringkas dalam jutaan rupiah, dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2024.

Tabel 32. Target dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 -2024

No	Tahun	Target (juta rupiah)	Realisasi (juta rupiah)	%
1.	2013	911.001	844.853	92,74
2.	2014	693.186	627.029	90,46
3.	2015	938.676	893.361	95,15
4.	2016	1.142.239	999.084	87,47
5.	2017	1.175.327	1.122.380	95,50
6.	2018	1.169.303	1.109.753	94,91
7.	2019	1.174.086	1.126.019	95,91
8.	2020	1.051.635	984.538	93,61

No	Tahun	Target (juta rupiah)	Realisasi (juta rupiah)	%
9	2021	1.097.161	1.025.317	93,45
10	2022	1.140.035	1.081.590	94,87
11	2023	1.017.174	984.409	96,78
12	2024	1.130.182	1.068.232	94,52

Berikut disajikan grafik target dan realisasi belanja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2024 dalam miliar rupiah.

Grafik 5 Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Lampung Barat 2013 – 2024 (dalam miliar rupiah)

Target dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 33. Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1	**Belanja Operasi**			
	- Belanja Pegawai	478.369.824.473,00	444.085.680.344,07	92,83
	- Belanja Barang dan Jasa	264.580.882.920,00	247.658.956.651,75	93,60
	- Belanja Bunga	3.720.929.625,00	2.534.971.060,00	68,13
	- Belanja Hibah	40.336.230.502,00	40.232.656.643,00	99,74
	- Belanja Bantuan Sosial	45.000.000,00	0,00	0,00
	Sub Jumlah	**787.052.867.520,00**	**734.513.264.698,82**	**93,32**
2	**Belanja Modal**			
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.805.825.852,00	20.116.516.662,00	96,69
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.479.225.145,00	88.928.047.259,00	92,17
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	41.635.055.304,00	41.372.206.332,00	99,37
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.774.708.633,00	4.734.413.410,00	99,16
	- Belanja Modal Aset Lainnya	197.930.000,00	197.480.000,00	99,77
	Sub Jumlah	**163.892.744.934,00**	**155.348.663.663,00**	**94,79**
3	**Belanja Tidak Terduga**			
	- Belanja Tidak Terduga	2.150.745.082,00	1.961.201.439,00	91,19
	Sub Jumlah	**2.150.745.082,00**	**1.961.201.439,00**	**91,19**
4	**Belanja Transfer**			
	- Belanja Bagi Hasil	2.370.534.400,00	1.692.863.600,00	71,41
	- Belanja Bantuan Keuangan	174.716.036.000,00	174.716.036.000,00	100,00
	Sub Jumlah	**177.086.570.400,00**	**176.408.899.600,00**	**99,62**
	JUMLAH	**1.130.182.927.936,00**	**1.068.232.029.400,82**	**94,52**

Permasalahan umum yang masih dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang masih terbatas. Pemerintah Daerah senantiasa melakukan peningkatan sumber daya manusia seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi sehingga penatausahaan keuangan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual terhitung sejak tahun 2015. Dalam pelaksanaannya sudah tentu masih banyak ditemukan kendala dan permasalahan, namun Pimpinan Daerah beserta seluruh jajarannya berupaya mewujudkan tata kelola keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.4. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tema Pembangunan Nasional sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UndangUndang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi, dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan pelaksanaan 5 (lima) arahan Presiden tersebut, didefinisikan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu diperkuat, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selanjutnya tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah "Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM menuju Rakyat Lampung Berjaya". Dengan prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan;
2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia;
3. Pembangunan Infrastruktur;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya;
6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana. *(RKPD – IV- 8-20)*

Berdasarkan tema pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2024, maka tema pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 adalah "Transformasi Ekonomi dan Nilai Tambah Produk Unggulan menuju masyarakat yang sejahtera". Berdasarkan isu strategis pada tahun 2024 yaitu:

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan pemasaran hasil pertanian Peningkatan nilai tambah (value added) sektor pertanian;
2. Penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran;
3. Penciptaan lapangan kerja baru melalui usaha mikro, kecil dan menengah serta perluasan kesempatan kerja melalui penguatan iklim investasi;
4. Kurang didorongnya pengembangan kewirausahan, industri berbasis sumber daya lokal yang menyerap tenaga kerja local. *(RKPD – IV-21)*

Berikut adalah Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat tahun 2024:

Tabel 34. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pendapatan Perkapita	Pendapatan Perkapita	28.020.689
	-	Gini Ratio	0.261
2.	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	11,30%
	-	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,90%
3.	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,52
4.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	70,16
5.	Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	86,61
6.	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Indeks Resiko Bencana	158,93
7.	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	58,05
	-	Nilai SAKIP	70,50
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	2,55
9.	Meningkatkan Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	84,15
10.	Meningkatnya Pelestarian warisan budaya tak benda dan cagar budaya daerah	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	15,50
	-	Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	6,40

Sumber : RKPD 2024 (table 6.1 hal. VI-1 s.d VI-2)

Tabel 35. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN
1.	Peningkatan Pertumbuhan Sektorsektor Ekonomi Potensial.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
		3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
		4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
		6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		7. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		9. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
		10. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
		11. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		12. Program Pemasaran Pariwisata
		13. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
		14. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		15. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		16. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		17. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN
		18. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		19. Program Penyuluhan Pertanian
		20. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		21. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		22. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		23. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		24. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		25. Program Penyuluhan Perikanan
		26. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		27. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		28. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
		29. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		30. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		31. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		32. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		33.Program Pemberdayaan Sosial
		34. Program Rehabilitasi Sosial
		35. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		36. Program Penanganan Bencana
		37. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
		38. Program Perencanaan Tenaga Kerja
		39. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		40. Program Penempatan Tenaga Kerja
		41. Program Hubungan Industrial
		42. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		43. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
		44. Program Penanganan Kerawanan Pangan
		45. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		46. Program Pengawasan Keamanan Pangan
2.	Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia	1. Program Pengelolaan Pendidikan
		2. Program Pengembangan Kurikulum
		3. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
		4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		6. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
		7. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		8. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
		9. Program Perlindungan Perempuan
		10. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		11. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
		12. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
		13. Program Perlindungan Khusus Anak
		14. Program Pengendalian Penduduk
		15. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
		16. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
		17. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		18. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kelahragaan
		19. Program Pembinaan Perpustakaan
		20. Program Pengelolaan Arsip
3.	Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2. Program Pengelolaan Pendidikan
		3. Program Pengembangan Kurikulum
		4. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN
		5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		6. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		8. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
		9. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		11. Program Pembinaan Perpustakaan
		12. Program Pengelolaan Arsip
		13. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
		14. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		15.Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
		16. Program Perlindungan Perempuan
		17. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		18. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
		19. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
		20. Program Perlindungan Khusus Anak
		21. Program Pengendalian Penduduk
		22. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
		23. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
		24. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		25. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		26. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kelolahragaan
4.	Reformasi Birokrasi	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		4. Program Penyelenggaraan Pengawasan
		5. Program Perumusankebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
		6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		7. Program Perencanaan,Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		8. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		10. Program Kepegawaian Daerah
		11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		12. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		13. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		14. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		15. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
		16. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		17. Program Penataan Desa
		18. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
		19. Program Administrasi Pemerintahan Desa
		20. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
		21. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		22. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		23. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		24. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		25. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		26. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		27. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		28. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		29. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		30. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		31. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		32. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN
		33. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		34. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		35. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		36. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		37. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		38. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		39. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		40. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		41. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		42. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		43. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		44. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		45. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		46. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		47. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		48. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		49. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		50. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		51. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		52. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		53. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		54. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		55. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		56. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		57. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		58. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		59. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		60. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		61. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		62. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		63. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		64. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		65. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		66. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		67. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		68. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		69. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		70. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		71. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		72. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		73. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		74. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		75. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		76. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		77. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		78. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		79. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		80. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		81. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		82. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		83. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		84. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		85. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		86. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		87. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN
		88. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		89. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		90. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		91. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		92. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		93. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		94. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		95. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		96. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		97. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		98. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		99. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		100. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		101. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		102. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		103. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		104. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		105. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		106. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		107. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		108. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		109. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
		110. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		111. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		112. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
		113. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		114. Program Pendaftaran Penduduk
		115. Program Pencatatan Sipil
		116. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		117. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
		118. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		119. Program Pelayanan Penanaman Modal
		120. Program Promosi Penanaman Modal
		121. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		122. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		123. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		124. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		125. Program Perekonomian Dan Pembangunan
5.	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		4. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
		5. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		6. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		7. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
		8. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
		9. Program Pengembangan Kebudayaan
		10. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		11. Program Pembinaan Sejarah
		12. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Sumber : RKPD Kabupaten Lampung Barat 2024 (hal.IV-33 s.d IV-62)

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 belum sempurna sebagaimana harapan banyak pihak karena belum dapat mencapai angka sempurna yaitu 100%. Namun secara persentase pencapaian target kinerja Tahun 2024 cukup baik. Pencapaian target kinerja Tahun 2024 masih terkendala oleh berbagai hal, diantaranya rentang kendali antar wilayah yang jauh karena Kabupaten Lampung Barat cukup luas, prasarana khususnya infrastruktur yang belum tersedia dengan cukup baik dan keterbatasan kualitas sumber daya manusia.

3.1.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada awal tahun anggaran pemerintah daerah menyusun APBD yang merupakan rencana keuangan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya selama satu tahun anggaran.

Untuk menilai pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024, diperlukan suatu analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Analisis tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, diantaranya apakah posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sesuai yang diharapkan, apakah perkembangan posisi keuangan mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan metode analisis yang lazim digunakan untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan, sebagai berikut.

1. **Rasio Antar Pos Neraca**
   a. Rasio Cair (*Quick Ratio*);
   b. Rasio Utang terhadap Total Aset;
   c. Rasio Ekuitas terhadap Total Aset.
2. **Rasio Antar Pos Laporan Realisasi APBD**
   a. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja;
   b. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja;
   c. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan;
   d. *Debt Service Ratio* (DSR);
   e. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR);
   f. Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan.
3. **Rasio Antar Pos Neraca**
   a. **Rasio Cair (*Quick Ratio*)**

$$\text{Rasio Cair (Quick Ratio)} = \frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Jangka Pendek}}$$

$$= \frac{137.930.835.166,19 - 14.964.943.100,62}{40.029.721.447,25} = \boxed{307,19\%}$$

Rasio Cair (*Quick Ratio*) dihitung dengan mengurangkan persediaan dari aset lancar dan hasilnya dibagi dengan utang jangka pendek. Aset lancar terdiri atas kas di kas daerah, kas di bendahara pengeluaran, bagian lancar tagihan penjualan, bagian lancar pinjaman, bagian lancar TGR, piutang pajak, piutang lain-lain dan persediaan. Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan.

Analisis rasio ini bertujuan menilai kemampuan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Angka rasio sebesar 307,19% menunjukkan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mempunyai kemampuan yang relatif sangat baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

b. Rasio Utang Terhadap Aset (*Debt Ratio*)

$$\text{Rasio Utang Terhadap Aset (\textit{Debt Ratio})} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$$

$$= \frac{56.454.609.702,25}{2.918.620.969.589,86} = \boxed{1,93\%}$$

Rasio utang terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan total aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Kewajiban tersebut terdiri atas utang PFK, utang luar negeri, utang pada pemerintah pusat, utang kepada pihak lain, dan utang bunga. Analisis rasio ini bertujuan mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari pemerintah pusat/kreditur/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan. Angka rasio sebesar 1,93% menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki kewajiban yang sangat rendah, artinya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat relatif sangat kecil menggunakan fasilitas utang untuk pembiayaan pembangunan.

Analisis rasio utang terhadap total aset harus dihubungkan dengan *debt service ratio*, yaitu rasio yang menghitung jumlah pembayaran pokok pinjaman dan bunga terhadap seluruh pendapatan. Dengan menghubungkan kedua rasio ini maka akan diperoleh rasio utang terhadap total aset yang terbaik bagi pemerintah daerah.

c. Rasio Ekuitas Terhadap Total Aset

$$\text{Rasio Ekuitas terhadap Total Aset} = \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Total Aset}}$$

$$= \frac{2.862.166.359.887,61}{2.918.620.969.589,86} = \boxed{98,07\%}$$

Rasio ekuitas terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total ekuitas dengan total aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Rasio ini merupakan kebalikan dari rasio utang terhadap total aset, sehingga yang diukur adalah persentase jumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sendiri dalam membiayai pembangunan. Pencapaian 98,07% menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang sangat baik, artinya seluruh kegiatan dibiayai sendiri.

4. Rasio Antar Pos Laporan Realisasi APBD

a. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}}$$

$$= \frac{734.513.264.698,82}{1.068.232.029.400,82} = \boxed{68,76\%}$$

Rasio belanja operasi terhadap total belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja operasi dengan total realisasi belanja. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai,

belanja barang/jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja yang bersifat rutin lainnya.

Rasio ini mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin dibandingkan seluruh realisasi belanja. Para pemakai laporan keuangan akan menilai kecenderungan, apakah realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin, atau untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik. Bila persentase tersebut menghasilkan angka di atas 50,00% maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak untuk membiayai kegiatan rutin.

b. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

$$= \frac{155.348.663.663,00}{1.068.232.029.400,82} = \boxed{14,54\%}$$

Rasio belanja modal terhadap total belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja modal dengan total realisasi belanja. Belanja modal terdiri atas belanja modal Aset Tetap dan belanja modal Aset Lainnya.

Rasio ini mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik dibandingkan seluruh realisasi belanja. Bila rasio di atas 50,00% dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik infrastruktur yang membawa ke arah perkembangan pembangunan yang lebih baik. Sebagai kebalikan dari rasio belanja operasi terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebesar 14,54% adalah hal yang tidak dapat dihindari, sebagai konsekuensi dari belanja operasi dan belanja transfer ke desa sebesar 85,46% dari total belanja dan transfer ke desa sebesar Rp1.068.232.029.400,82.

c. Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan

$$\text{Rasio PAD terhadap Total Pendapatan} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$= \frac{71.823.776.727,81}{1.111.191.957.433,81} = \boxed{6,46\%}$$

Rasio PAD terhadap total pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PAD dan total realisasi pendapatan. Termasuk di dalam PAD antara lain pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD.

Rasio ini mengukur sumbangan PAD dalam menyediakan dana pembangunan. Rasio ini dapat digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Semakin besar rasio yang dihasilkan maka pemerintah daerah semakin mandiri dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Bila hasil rasio mendekati 100% berarti pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh usaha pemerintah daerah sendiri. Semakin kecil angka rasio berarti semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat/pihak lain.

d. ***Debt Service Ratio* (DSR)**

$$DSR = \frac{\text{Total Realisasi Pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$= \frac{20.452.999.600,00}{1.111.191.957.433,81} = \boxed{1,84\%}$$

DSR dihitung dengan membandingkan antara jumlah pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman dibanding total pendapatan. Termasuk dalam perhitungan tersebut adalah pembayaran utang dan bunga, serta biaya pinjaman lainnya yang dibayar dalam tahun anggaran.

Rasio yang tepat untuk menetapkan standar DSR yang baik dapat dihasilkan dari pengalaman yang dialami pemerintah daerah lainnya yang mempunyai tanggungan utang. Pengalaman Indonesia yang kesulitan membayar pokok dan bunga utang akhir-akhir ini dapat menjadi standar bahwa DSR yang ada di Indonesia sudah terlalu tinggi. Rasio DSR yang konservatif (minimal) dapat diartikan baik, dan semakin besar angka rasio maka semakin tidak bagus kondisi keuangan pemerintah daerah atau semakin berat beban APBD.

Angka DSR sebesar 1,84% tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mempunyai kemampuan yang sangat tinggi memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.

e. ***Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)**

$$\boxed{DSCR} = \frac{\text{[PAD+DAU+(DBH-DBH DR) – Belanja Adum/Wajib}}{\text{Pembayaran Pokok+ Bunga+Biaya Lain}}$$

$$= \frac{632.183.592.835,81 - 548.057.650.551,82}{20.522.131.297,00} = \boxed{409,93\%}$$

DSCR memiliki logika yang tidak berbeda dengan DSR, yaitu untuk mengukur kemampuan daerah dalam membayar utang. Namun DSCR mengukur dari sisi kemampuan pendapatan daerah dalam menutup kewajiban pembayaran pokok pinjaman plus biaya pinjaman. DSCR adalah perbandingan antara penjumlahan PAD, bagian daerah dari PBB, bea perolehan hak atas Tanah dan bangunan, penerimaan SDA, dan bagian daerah lainnya seperti PPh Perseorangan, serta DAU setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

Untuk memperoleh pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, rasio DSCR dipersyaratkan minimal 2,5 atau 250% (Pasal 16, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah). Dengan capaian DSCR sebesar 409,93% atau 4,09 kali menunjukkan masih terbukanya peluang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk mencari alternatif pembiayaan berupa pinjaman daerah jika diperlukan.

f. **Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan**

$$\boxed{\text{Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan}} = \frac{\text{Total Pendapatan Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$= \frac{818.068.561.394,00}{1.111.191.957.433,81} = \boxed{73,62\%}$$

Rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dana perimbangan dan total realisasi pendapatan. Termasuk di

dalam dana perimbangan antara lain pendapatan bagian daerah dari PBB, PPh, sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Rasio ini mengukur sumbangan dana perimbangan dalam menyediakaan dana pembangunan.

Standar ideal, porsi terbesar dalam unsur pendapatan adalah PAD. Sisanya diperoleh dari dana perimbangan dan dana pinjaman yang bersifat menutup defisit anggaran. Semakin kecil rasio yang dihasilkan maka semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan sendiri. Rasio di atas 50,00% berarti tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat masih sangat tinggi.

3.1.2. Pencapaian Target Kinerja Belanja Daerah

Realisasi pencapaian target kinerja belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelola keuangan negara sebagaimana yang tercantum dalam APBD perubahan pada tabel berikut.

Tabel 36. Pencapaian Target Kinerja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		LEBIH/ (KURANG) (Rp)
			(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
1	PELAYANAN UMUM	824.874.374.902,00	781.588.616.315,82	94,75	(43.285.758.586,18)
1.01.1.01	Pendidikan	237.334.204.146,00	228.150.744.929,00	96,13	(9.183.459.217,00)
1.01.1.02	Kesehatan	107.658.602.759,00	102.428.080.172,82	95,14	(5.230.522.586,18)
1.01.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.116.148.700,00	6.781.882.592,00	95,30	(334.266.108,00)
1.01.1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	11.597.487.100,00	11.133.261.496,00	96,00	(464.225.604,00)
1.01.1.06	Sosial	3.188.224.828,00	3.047.338.414,00	95,58	(140.886.412,00)
1.01.2.07	Tenaga Kerja	2.873.697.735,00	1.753.904.714,00	61,03	(1.119.793.021,00)
1.01.2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.384.746.776,00	3.193.745.211,00	94,36	(191.001.565,00)
1.01.2.09	Pangan	2.671.902.715,00	2.394.550.744,00	89,62	(277.351.971,00)
1.01.2.11	Lingkungan Hidup	3.804.710.396,00	3.535.096.154,00	92,91	(269.614.242,00)
1.01.2.12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.487.285.052,00	4.244.408.253,00	95,01	(222.876.799,00)
1.01.2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.457.361.916,00	5.218.284.870,00	95,62	(239.077.046,00)
1.01.2.15	Perhubungan	3.112.083.073,00	2.887.227.240,00	92,77	(224.855.833,00)
1.01.2.16	Komunikasi dan Informatika	3.007.476.860,00	2.921.031.845,00	97,13	(86.445.015,00)
1.01.2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.565.608.175,00	3.293.324.794,00	92,36	(272.283.381,00)
1.01.2.18	Penanaman Modal	2.271.286.688,00	2.067.429.476,00	91,02	(203.857.212,00)
1.01.2.19	Kepemudaan dan Olahraga	3.820.174.203,00	3.596.023.830,00	94,04	(228.150.373,00)
1.01.2.20	Statistik	145.001.000,00	138.029.625,00	95,19	(6.971.375,00)
1.01.2.22	Kebudayaan	385.634.600,00	309.111.499,00	80,16	(76.523.101,00)
1.01.2.23	Perpustakaan	2.345.094.889,00	2.136.761.253,00	91,12	(208.333.636,00)
1.01.2.24	Kearsipan	205.825.500,00	204.819.647,00	99,51	(1.005.853,00)
1.01.3.25	Kelautan dan Perikanan	3.589.948.064,00	3.349.242.605,00	93,30	(240.705.459,00)
1.01.3.27	Pertanian	14.476.320.725,00	13.407.405.868,00	92,62	(1.068.914.857,00)
1.01.4.01	Sekretariat Daerah	68.727.162.951,00	59.295.065.773,00	86,28	(9.432.097.178,00)
1.01.4.02	Sekretariat DPRD	39.544.374.105,00	37.108.136.792,00	93,84	(2.436.237.313,00)
1.01.5.01	Perencanaan	6.592.244.713,00	6.349.435.917,00	96,32	(242.808.796,00)
1.01.5.02	Keuangan	216.224.212.866,00	208.241.213.390,00	96,31	(7.982.999.476,00)
1.01.5.03	Kepegawaian	4.555.464.843,00	4.030.238.348,00	88,47	(525.226.495,00)
1.01.5.05	Penelitian dan Pengembangan	4.854.006.049,00	4.582.474.515,00	94,41	(271.531.534,00)
1.01.6.01	Inspektorat	13.049.689.544,00	11.781.166.270,00	90,28	(1.268.523.274,00)
1.01.7.01	Kecamatan	13.049.318.102,00	12.456.832.945,00	95,46	(592.485.157,00)
1.01.8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	31.793.075.831,00	31.550.347.134,00	99,24	(242.728.697,00)
2	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	6.012.475.475,00	5.876.946.378,00	97,75	(135.529.097,00)
2.03.1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta	5.847.630.475,00	5.712.183.783,00	97,68	(135.446.692,00)

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		LEBIH (KURANG) (Rp)
			(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
	Perlindungan Masyarakat				
2.03.1.06	Sosial	164.845.000,00	164.762.595,00	99,95	(82.405,00)
3	EKONOMI	137.169.738.268,00	128.234.082.600,00	93,49	(8.935.655.668,00)
3.04.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	45.623.356.813,00	45.306.557.839,00	99,30	(317.798.974,00)
3.04.2.07	Tenaga Kerja	541.378.700,00	513.142.053,00	94,78	(28.236.647,00)
3.04.2.08	Pangan	877.781.100,00	873.999.202,00	99,57	(3.781.898,00)
3.04.2.15	Perhubungan	1.049.306.850,00	1.021.510.510,00	97,35	(27.796.340,00)
3.04.2.16	Komunikasi dan Informatika	3.834.350.135,00	3.522.327.626,00	91,88	(312.022.509,00)
3.04.2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	833.864.000,00	817.617.468,00	98,05	(16.246.532,00)
3.04.2.18	Penanaman Modal	1.326.636.120,00	1.255.389.942,00	94,63	(71.246.178,00)
3.04.2.21	Persandian	253.110.250,00	247.662.600,00	97,85	(5.447.650,00)
3.04.3.25	Kelautan dan Perikanan	1.039.874.550,00	1.026.099.300,00	98,68	(13.775.250,00)
3.04.3.27	Pertanian	4.403.031.100,00	4.222.624.959,00	95,90	(180.406.141,00)
3.04.3.30	Perdagangan	71.775.196.450,00	64.179.863.202,00	89,42	(7.595.333.248,00)
3.04.3.31	Perindustrian	5.611.852.200,00	5.248.287.899,00	93,52	(363.564.301,00)
4	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	12.787.825.972,00	12.444.566.167,00	97,32	(343.259.805,00)
4.05.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	665.991.757,00	629.061.700,00	94,45	(36.930.057,00)
4.05.2.10	Pertanahan	544.308.000,00	523.374.698,00	96,15	(20.933.302,00)
4.05.2.11	Lingkungan Hidup	11.577.526.215,00	11.292.129.769,00	97,53	(285.396.446,00)
5	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	794.291.146,00	705.475.077,00	88,82	(88.816.069,00)
5.06.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	549.988.900,00	546.528.677,00	99,37	(3.460.223,00)
5.06.1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	244.302.246,00	158.946.400,00	65,06	(85.355.846,00)
6	KESEHATAN	61.385.999.970,00	55.308.593.204,00	90,10	(6.077.406.766,00)
6.07.1.02	Kesehatan	56.286.598.470,00	52.119.574.201,00	92,60	(4.167.024.269,00)
6.07.2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.099.401.500,00	3.189.019.003,00	62,54	(1.910.382.497,00)
7	PARIWISATA	4.093.815.370,00	3.804.634.527,00	92,94	(289.180.843,00)
7.08.3.26	Pariwisata	4.093.815.370,00	3.804.634.527,00	92,94	(289.180.843,00)
8	PENDIDIKAN	80.618.788.933,00	77.966.859.195,00	96,71	(2.651.929.738,00)
8.010.1.01	Pendidikan	66.146.474.700,00	63.661.265.536,00	96,21	(2.485.209.164,00)
8.010.2.19	Kepemudaan dan Olahraga	1.612.965.200,00	1.590.313.296,00	98,60	(22.651.904,00)
8.010.2.22	Kebudayaan	1.136.969.500,00	1.080.189.237,00	95,01	(56.780.263,00)
8.010.2.23	Perpustakaan	11.722.379.533,00	11.635.091.126,00	99,26	(87.288.407,00)
9	PERLINDUNGAN SOSIAL	2.445.617.900,00	2.302.255.937,00	94,14	(143.361.963,00)
9.011.1.06	Sosial	1.472.068.300,00	1.457.928.124,00	99,04	(14.140.176,00)
9.011.2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	973.549.600,00	844.327.813,00	86,73	(129.221.787,00)
BELANJA DAERAH		1.130.182.927.936,00	1.068.232.029.400,82	94,52	(61.950.898.535,18)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		19.918.662.620,00	19.918.098.140,00	100,00	(564.480,00)
JUMLAH		1.150.101.590.556,00	1.088.150.127.540,82	94,61	(61.951.463.015,18)

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 telah mencapai berbagai kemajuan. Berdasarkan kondisi tersebut maka masalah dan tantangan utama yang harus dipecahkan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut sesuai dengan capaian pembangunan pada tahun 2024:

1. Masih rendahnya pendapatan perkapita tahun 2023 sebesar Rp28.860.000,00 pertahun.
2. Masih tingginya angka kemiskinan tahun 2024 sebesar 10,68%.
3. Pertumbuhan ekonomi terjadi perlambatan menjadi 4,69% pada tahun 2023 jika dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi covid19.
4. Belum maksimalnya angka IPM tahun 2024 sebesar 72,41 poin sedangkan untuk komposit perhitungan IPM antara lain : masih Rendahnya harapan lama sekolah pada tahun 2024 sebesar 12,30 tahun, Rendahnya rata-rata lama sekolah pada tahun 2024 sebesar 8,56 tahun dan Usia Harapan Hidup tahun 2024 masih di angka 73,96 tahun, Pengeluaran Perkapita pada tahun 2024 masih di angka Rp10.965.000.
5. Masih tingginya indeks risiko bencana Lampung Barat tahun 2024 sebesar 176,28 poin.
6. Masih lambatnya kenaikan predikat SAKIP tahun 2024 yaitu 67,25 poin (B) hanya naik 0,84 dari tahun 2023.
7. Masih rendahnya indeks SPBE pada tahun 2024 sebesar 2,62 poin (baik).
8. Masih rendahnya Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi tahun 2024 sebesar 12,25%
9. Masih rendahnya Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten tahun 2024 sebesar 5,32%

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga Perangkat Daerah dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

4.1.1. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah Perangkat Daerah yang melakukan serangkaian kegiatan/proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan suatu entitas itu sendiri. Oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Berikut Dasar Hukum pembentukan Struktur Perangkat Daerah pada Kabupaten Lampung Barat;

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 Tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi Pada Dinas Kesehatan.

Dalam struktur organisasi Kabupaten Lampung Barat entitas akuntansi merupakan semua Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat meliputi:

1. Dua Sekretariat, yaitu:
   1) Sekretariat Daerah;
   2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Satu Inspektorat;
3. Tujuh Badan, yaitu:
   1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   2) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;

3) Badan Pendapatan Daerah;
4) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
5) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6) Badan Riset dan Inovasi Daerah;
7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

4. Dua Puluh Dinas, yaitu:
   1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   2) Dinas Kesehatan;
   3) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   4) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
   5) Dinas Sosial;
   6) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
   7) Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan PA;
   8) Dinas Ketahanan Pangan;
   9) Dinas Lingkungan Hidup;
   10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
   12) Dinas Perhubungan;
   13) Dinas Komunikasi dan Informatika;
   14) Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan;
   15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
   16) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
   17) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
   18) Dinas Perikanan;
   19) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   20) Dinas Perkebunan dan Peternakan;

5. Lima Belas Kecamatan,yaitu:
   1) Sumber Jaya;
   2) Way Tenong;
   3) Sekincau;
   4) Belalau;
   5) Batu Brak;
   6) Balik Bukit;
   7) Sukau;
   8) Suoh;
   9) Gedung Surian;
   10) Kebun Tebu;
   11) Air Hitam;
   12) Pagar Dewa;
   13) Batu Ketulis;
   14) Bandar Negeri Suoh;
   15) Lumbok Seminung.

6. Lima Kelurahan, yaitu:
   1) Way Mengaku;
   2) Pasar Liwa;
   3) Tugu Sari;
   4) Sekincau;
   5) Pajar Bulan;

7. Unit Organisasi pada Dinas Kesehatan, yaitu:
   1) RSUD Alimuddin Umar;
   2) Puskesmas Gedung Surian;
   3) Puskesmas Kebun Tebu;
   4) Puskesmas Sumberjaya;
   5) Puskesmas Air Hitam;

6) Puskesmas Fajar Bulan,
7) Puskesmas Sekincau,
8) Puskesmas Pagar Dewa,
9) Puskesmas Batu Ketulis,
10) Puskesmas Kenali,
11) Puskesmas Batu Brak,
12) Puskesmas Bandar Negeri Suoh,
13) Puskesmas Srimulyo,
14) Puskesmas Liwa,
15) Puskesmas Buay Nyerupa;
16) Puskesmas Lombok.

4.1.2. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu semua entitas akuntansi juga merupakan entitas pelaporan sedangkan entitas pelaporan untuk laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Keuangan dan Aset Dareah (BKAD) Kabupaten Lampung Barat yang merupakan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengacu pada Delapan prinsip, kedelapan prinsip tersebut yaitu:

1. Basis Akuntansi
2. Prinsip Nilai Historis
3. Prinsip Realisasi
4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal
5. Prinsip Periodisasi
6. Prinsip Konsistensi
7. Prinsip Pengungkapan Lengkap
8. Prinsip Penyajian Wajar

Dari delapan prinsip yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.2.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah Basis Akrual untuk pengakuan pada Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah. Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban-LO, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas, artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.2.2. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menerapkan nilai historis karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

4.2.3. Realisasi (*Realization*)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

4.2.4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.2.5. Periodisitas (*Periodicity*)

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk Laporan LRA dan penjabarannya, semester untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Arus Kas (PPKD), tahunan untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Perubahan Ekuitas, Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Arus Kas (PPKD) dan CaLK.

4.2.6. Konsistensi (*Consistency*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 tidak ada perubahan metode akuntansi.

4.2.7. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan yang disajikan diupayakan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna Laporan Keuangan ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

4.2.8. Penyajian Wajar

Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan wajar. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tidak menerapkan kebijakan pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konversi-konversi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang merupakan entitas pelaporan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut.

4.4.1. Pendapatan- LRA

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat (a) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau (b) Diterima oleh Perangkat Daerah; atau (c) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

3. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi sumber pendapatan.

4.4.2. Pendapatan - LO

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu) dan pendapatan direalisasi (tanpa didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu).
3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi sumber pendapatan.

4.4.3. Belanja

1. Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja diakui pada saat. (a) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di Perangkat Daerah dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di Perangkat Daerah dan PPKD; (b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-Perangkata Daerah; (c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
3. Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.
4. Belanja disajikan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

4.4.4. Beban

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Dan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
2. Beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat: (a) Timbulnya kewajiban, yaitu saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah; (b) Terjadinya konsumsi aset, terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah; (c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu.
3. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
4. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

4.4.5. Aset

1. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

   Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

2. Kas dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan Kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca. Saldo kas dan setara kas disajikan dalam Neraca.

3. Piutang diakui saat timbul klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika: (a) diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau (b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau (c) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

4. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

5. Persediaan diakui : (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

   Pendekatan untuk pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan beban, dalam pendekatan beban setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.

   Persediaan dinilai dengan menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama untuk persediaan: Persediaan Bahan Pakai Habis, Persediaan Bahan/ Material (kecuali Persediaan Bahan Obat-obatan, dan Persediaan Bahan Kimia yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat), serta Persediaan Barang Lainnya.

   Persediaan dinilai dengan menggunakan Pembelian Terakhir untuk persediaan: Persediaan Bahan obat-obatan, dan Persediaan Bahan Kimia yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

   Apabila terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname* yang dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluwarsa, atau rusak, dan jika selisih persediaan tersebut dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pada akhir periode pelaporan persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi, dan yang sejenis.

6. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

   Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
   Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

   Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

   Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi terhadap pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); (b) Pengeluran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian serta bibit/benih.

7. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi berlaku untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan ditentukan sebagai berikut:

Tabel 37. Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap Karena Adanya Perbaikan

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI /RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT	
				TAHUN	SEMESTER
1.	Peralatan Dan Mesin				
a.	Alat Besar				
	Alat Besar Darat	Overhaul	> 0% s.d. 30%	1	2
			> 30% s.d. 45%	3	6
			> 45% s.d. 100%	5	10
	Alat Besar Apung	Overhaul	> 0% s.d. 30%	1	2
			> 30% s.d. 45%	2	4
			> 45% s.d. 100%	4	8
	Alat Bantu	Overhaul	> 0% s.d. 30%	1	2
			> 30% s.d. 45%	2	4
			> 45% s.d. 100%	4	8
b.	Alat Angkutan				
	Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	3	6
			> 75% s.d. 100%	4	8
	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	1	2

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI /RESTORASI OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT	
				TAHUN	SEMESTER
	Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	3	6
			> 50% s.d. 75%	4	8
			> 75% s.d. 100%	6	12
	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	2	4
	Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3	6
			> 25% s.d. 50%	6	12
			> 50% s.d. 75%	9	18
			> 75% s.d. 100%	12	24
c.	**Alat Bengkel Dan Alat Ukur**				
	Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	3	6
			> 75% s.d. 100%	4	8
	Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	0	0
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	1	2
	Alat Ukur	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	3	6
d.	**Alat Pertanian**				
	Alat Pengolahan	Overhaul	> 0% s.d. 20%	1	2
			> 20% s.d. 40%	2	4
			> 40% s.d. 100%	5	10
e.	**Alat Kantor Dan Rumah Tangga**				
	Alat Kantor	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	3	6
	Alat Rumah Tangga	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	3	6
	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	3	6
f.	**Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar**				
	Alat Studio	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	3	6
	Alat Komunikasi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	3	6
	Peralatan Pemancar	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	3	6
			> 50% s.d. 75%	4	8
			> 75% s.d. 100%	5	10
	Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI /RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT	
				TAHUN	SEMESTER
			> 25% s.d. 50%	5	10
			> 50% s.d. 75%	7	14
			> 75% s.d. 100%	9	18
g.	Alat Kedokteran Dan Kesehatan				
	Alat Kedokteran	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	3	6
	Alat Kesehatan Umum	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	3	6
h.	Alat Laboratorium				
	Unit Alat Laboratorium	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	3	6
			> 50% s.d. 75%	3	6
			> 75% s.d. 100%	4	8
	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3	6
			> 25% s.d. 50%	5	10
			> 50% s.d. 75%	7	14
			> 75% s.d. 100%	8	16
	Alat Peraga Praktek Sekolah	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	5	10
			> 75% s.d. 100%	5	10
	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3	6
			> 25% s.d. 50%	5	10
			> 50% s.d. 75%	7	14
			> 75% s.d. 100%	8	16
	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	5	10
			> 75% s.d. 100%	6	10
	Destructive Testing Laboratory	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	5	10
			> 75% s.d. 100%	6	10
	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	3	6
			> 75% s.d. 100%	4	8
	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3	6
			> 25% s.d. 50%	5	10
			> 50% s.d. 75%	7	14
			> 75% s.d. 100%	8	16
	Alat Laboratorium Standartisasi Kalibrasi Dan Instrumen	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	3	6
			> 50% s.d. 75%	4	8
			> 75% s.d. 100%	4	8
i.	Alat Persenjataan				
	Senjata Api	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	3	6
			> 75% s.d. 100%	4	8
	Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	0	0
			> 50% s.d. 75%	1	2

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI /RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT	
				TAHUN	SEMESTER
			> 75% s.d. 100%	1	2
	Senjata Senar	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	0	0
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	1	2
	Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	2	4
j.	Komputer				
	Komputer Unit	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	2	4
	Peralatan Komputer	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	2	4
k.	Alat Eksplorasi				
	Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	2
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	3	6
	Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	5	10
			> 75% s.d. 100%	5	10
l.	Alat Pengeboran				
	Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	6	12
			> 75% s.d. 100%	7	14
	Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	2	4
m.	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian				
	Sumur	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	2	4
	Produksi	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	2	4
	Pengolahan Dan Pemurnian	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3	6
			> 25% s.d. 50%	5	10
			> 50% s.d. 75%	7	14
			> 75% s.d. 100%	8	16
n.	Alat Bantu Eksplorasi				
	Alat Bantu Eksplorasi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	6	12
			> 75% s.d. 100%	7	14
	Alat Bantu Produksi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI /RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT	
				TAHUN	SEMESTER
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	6	12
			> 75% s.d. 100%	7	14
o.	Alat Keselamatan Kerja				
	Alat Deteksi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	3	6
	Alat Pelindung	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	0	0
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	2	4
	Alat Sar	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	1	2
	Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	3	6
			> 50% s.d. 75%	4	8
			> 75% s.d. 100%	6	12
p.	Alat Peraga				
	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	5	10
			> 75% s.d. 100%	5	10
q.	Peralatan Proses/Produksi				
	Unit Peralatan Proses/Produksi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	3	6
			> 50% s.d. 75%	4	8
			> 75% s.d. 100%	4	8
r.	Rambu - Rambu				
	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	3	6
			> 75% s.d. 100%	4	8
	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	4	8
	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	5	10
			> 50% s.d. 75%	7	14
			> 75% s.d. 100%	9	18
s.	Peralatan Olah Raga				
	Peralatan Olah Raga	Renovasi	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	2	4
2.	Gedung Dan Bangunan				
a.	Bangunan Gedung				
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	> 0% s.d. 25%	5	10
			> 25% s.d. 50%	10	20
			> 50% s.d. 75%	15	30
			> 75% s.d. 100%	50	100
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5	10
			> 30% s.d. 45%	10	20

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI (RESTORASI) OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT	
				TAHUN	SEMESTER
			> 45% s.d. 100%	15	30
b.	Monumen				
	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5	10
			> 30% s.d. 45%	10	20
			> 45% s.d. 100%	15	30
c.	Bangunan Menara				
	Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5	10
			> 30% s.d. 45%	10	20
			> 45% s.d. 100%	15	30
d.	Tugu Titik Kontrol/Pasti				
	Tugu/Tanda Batas	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5	10
			> 30% s.d. 45%	10	20
			> 45% s.d. 100%	15	30
3.	Jalan, Jaringan dan Irigasi				
a.	Jalan dan Jembatan				
	Jalan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2	4
			> 30% s.d. 45%	5	10
			> 45% s.d. 100%	10	20
	Jembatan	Renovasi	> 0% s.d. 25%	5	10
			> 25% s.d. 50%	10	20
			> 50% s.d. 75%	15	30
			> 75% s.d. 100%	15	30
b.	Bangunan Air				
	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	> 0% s.d. 5%	2	4
			> 5% s.d. 10%	5	10
			> 10% s.d. 100%	10	20
	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	> 0% s.d. 5%	2	4
			> 5% s.d. 10%	5	10
			> 10% s.d. 100%	10	20
	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	Renovasi	> 0% s.d. 5%	1	2
			> 5% s.d. 10%	3	6
			> 10% s.d. 100%	5	10
	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	> 0% s.d. 5%	1	2
			> 5% s.d. 10%	2	4
			> 10% s.d. 100%	3	6
	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	Renovasi	> 0% s.d. 5%	1	2
			> 5% s.d. 10%	2	4
			> 10% s.d. 100%	3	6
	Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5	10
			> 30% s.d. 45%	10	20
			> 45% s.d. 100%	15	30
	Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5	10
			> 30% s.d. 45%	10	20
			> 45% s.d. 100%	15	30
c.	Instalasi				
	Instalasi Air Bersih / Air Baku	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2	4
			> 30% s.d. 45%	7	14
			> 45% s.d. 100%	10	20
	Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2	4
			> 30% s.d. 45%	7	14
			> 45% s.d. 100%	10	20
	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1	2
			> 30% s.d. 45%	3	6
			> 45% s.d. 100%	5	10
	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1	2

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI /RESTORASI OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT	
				TAHUN	SEMESTER
			> 30% s.d. 45%	3	6
			> 45% s.d. 100%	5	10
	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5	10
			> 30% s.d. 45%	10	20
			> 45% s.d. 100%	15	30
	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5	10
			> 30% s.d. 45%	10	20
			> 45% s.d. 100%	15	30
	Instalasi Pertahanan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1	2
			> 30% s.d. 45%	3	6
			> 45% s.d. 100%	5	10
	Instalasi Gas	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5	10
			> 30% s.d. 45%	10	20
			> 45% s.d. 100%	15	30
	Instalasi Pengaman	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1	2
			> 30% s.d. 45%	1	2
			> 45% s.d. 100%	3	6
	Instalasi Lain	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1	2
			> 30% s.d. 45%	1	2
			> 45% s.d. 100%	3	6
d.	Jaringan				
	Jaringan Air Minum	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2	4
			> 30% s.d. 45%	7	14
			> 45% s.d. 100%	10	20
	Jaringan Listrik	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5	10
			> 30% s.d. 45%	10	20
			> 45% s.d. 100%	15	30
	Jaringan Telepon	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2	4
			> 30% s.d. 45%	5	10
			> 45% s.d. 100%	10	20
	Jaringan Gas	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2	4
			> 30% s.d. 45%	7	14
			> 45% s.d. 100%	10	20

8. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

   Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

   Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut: (a) Kualitas Piutang Lancar; (b) Kualitas Piutang Kurang Lancar; (c) Kualitas Piutang Diragukan; (d) Kualitas Piutang Macet. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 38. Besaran Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,50 %
2	Kurang Lancar	10,00 %
3	Diragukan	50,00 %
4	Macet	100,00 %

9. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan tidak dilakukan terhadap: (a) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah disetujui usulan untuk dilakukan penghapusan; dan (b) Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah disetujui usulan untuk dipindahtangankan, dimusnahkan, atau dihapuskan; (c) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan keatas nilai hasil perhitungan sama dengan atau lebih dari Rp0,50 atas jumlah penyusutan untuk setiap unit aset tetap hingga satuan rupiah terkecil dan penyesuaian hasil pembulatan akumulasi penyusutan pada akhir masa.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata selama masa manfaat.

Perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka perubahan nilai penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

Perubahan masa manfaat aset tetap sebagai akibat perbaikan (renovasi, restorasi, atau *overhaul*) aset tetap diperhitungkan dalam penambahan masa manfaat aset tetap pada akhir periode penyusutan berikutnya, serta akumulasi sisa masa manfaat dan penambahan masa manfaat sebagaimana dampak atas perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat, tidak dapat melebihi tabel masa manfaat.

Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan: (a) daya pakai; dan (b) tingkat keausan fisik dan/atau keusangan, dari aset tetap yang bersangkutan. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut.

Tabel 39. Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

No	Kelompok AsetTetap	Masa Manfaat	Penambahan Masa Manfaat Akibat Perbaikan
1	Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun	1 s.d. 12 tahun
2	Gedung dan Bangunan	7 s.d. 50 tahun	5 s.d. 50 tahun
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	10 s.d. 50 tahun	5 s.d. 15 tahun
4	Aset Tetap Lainnya	0 s.d. 2 tahun	0 tahun

10. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut.

Tabel 40. Klasifikasi Aset Lainnya

Objek Akun	Rincian Objek Akun
Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa Kerjasama Pemanfaatan Bangunan
Aset Tidak Berwujud	*Goodwill* Lisensi dan *Franchise* Hak Cipta Paten Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-lain

4.4.6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika: (a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan, (b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; (c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

4.4.7. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi Perangkat Daerah dan PPKD.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi Perangkat Daerah dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah R/K Dinas dieliminasi menjadi R/K Kasda dan R/K Dinas Aset dieliminasi menjadi R/K Aset.

BAB V PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan SKPD sebagai entitas akuntansi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Bab XXVIII. Laporan Keuangan Konsolidasian.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

5.1.1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp1.119.418.377.234,92 dan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.111.191.957.433,81 atau 99,27% dari target. Nilai Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp125.355.753.668,97 atau 12,72% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2023 yang sebesar Rp985.836.203.764,84.

Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp71.823.776.727,81, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.039.368.180.706,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 41. Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA. 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	69.260.945.657,32	71.823.776.727,81	103,70	2.562.830.070,49	68.748.525.754,84	3.075.250.972,97	4,47
2	Pendapatan Transfer	1.050.157.430.577,60	1.039.368.180.706,00	98,97	(10.789.249.871,60)	917.087.678.010,00	122.280.502.696,00	13,33
Jumlah		1.119.418.377.234,92	1.111.191.957.433,81	99,27	(8.226.419.801,11)	985.836.203.764,84	125.355.753.668,97	12,72

Sehubungan dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Keputusan Mendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah, berikut disajikan perbedaan Struktur Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Tabel 42. Struktur Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan 2024

TAHUN 2023		TAHUN 2024	
KODE REKENING	URAIAN	KODE REKENING	URAIAN
4	PENDAPATAN DAERAH	4	PENDAPATAN DAERAH
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.1.01	PAJAK DAERAH	4.1.01	Pajak Daerah
4.1.01.06	Pajak Hotel		
4.1.01.06.01	Pajak Hotel		
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel		
4.1.01.06.03	Pajak Losmen		
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen		
4.1.01.07	Pajak Restoran		
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya		
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya		
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya		
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya		
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya		
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya		
4.1.01.08	Pajak Hiburan		
4.1.01.08.04	Pajak Pameran		
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran		
4.1.01.09	Pajak Reklame	4.1.01.09	Pajak Reklame
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan		
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain		
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain		
4.1.01.11	Pajak Parkir		
4.1.01.11.01	Pajak Parkir		
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir		
		4.1.01.12	Pajak Air Tanah
		4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah
		4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah
		4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
		4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
		4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
4.1.01.15.01	PBBP2	4.1.01.15.01	PBBP2
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	4.1.01.15.01.0001	PBBP2
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak
		4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
		4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman
		4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran
		4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik
		4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
		4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan
		4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel
		4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen
		4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir
		4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
		4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
		4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
4.1.02	RETRIBUSI DAERAH	4.1.02	RETRIBUSI DAERAH
4.1.02.01	RETRIBUSI JASA UMUM	4.1.02.01	RETRIBUSI JASA UMUM

TAHUN 2023		TAHUN 2024	
KODE REKENING	URAIAN	KODE REKENING	URAIAN
4.1.02.01.02	**Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan**	4.1.02.01.02	**Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan**
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
4.1.02.01.04	**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**	**4.1.02.01.04**	**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4.1.02.01.05	**Retribusi Pelayanan Pasar**	**4.1.02.01.05**	**Retribusi Pelayanan Pasar**
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios
4.1.02.01.06	**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**		
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		
4.1.02.01.10	**Retribusi Pengolahan Limbah Cair**		
4.1.02.01.10.0001	Retribusi Rumah Tangga		
4.1.02.01.11	**Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**		
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya		
4.1.02.01.13	**Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**		
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi		
4.1.02.02	**RETRIBUSI JASA USAHA**	**4.1.02.02**	**RETRIBUSI JASA USAHA**
4.1.02.02.01	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**	**4.1.02.02.01**	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat
4.1.02.02.02	**Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**	**4.1.02.02.02**	**Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
4.1.02.02.04	**Retribusi Terminal**		
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha		
4.1.02.02.05	**Retribusi Tempat Khusus Parkir**	**4.1.02.02.05**	**Retribusi Tempat Khusus Parkir**
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir
4.1.02.02.06	**Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila**	**4.1.02.02.06**	**Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila**
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
4.1.02.02.07	**Retribusi Rumah Potong Hewan**	**4.1.02.02.07**	**Retribusi Rumah Potong Hewan**
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan
4.1.02.02.09	**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**	**4.1.02.02.09**	**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
4.1.02.02.11	**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**	**4.1.02.02.11**	**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman		
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
4.1.02.03	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**4.1.02.03**	**Retribusi Perizinan Tertentu**
4.1.02.03.04	**Retribusi Izin Usaha Perikanan**		
4.1.02.03.04.0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan		
4.1.02.03.07	**Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**	**4.1.02.03.07**	**Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**4.1.03**	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**
4.1.03.02	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD**	**4.1.03.02**	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD**
4.1.03.02.01	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)**	**4.1.03.02.01**	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)**
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)

TAHUN 2023		TAHUN 2024	
KODE REKENING	URAIAN	KODE REKENING	URAIAN
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		
4.1.04.01.02.0057	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Roda Dua		
4.1.04.05	Jasa Giro	4.1.04.05	Jasa Giro
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	4.1.04.07	Pendapatan Bunga
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		
		4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
		4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
		4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan		
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan		
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa
		4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
		4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa
4.1.04.15.16.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	4.1.04.15.16.0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
4.1.04.15.88	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS		
4.1.04.15.88.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS		
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD		
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD		
		4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

TAHUN 2023		TAHUN 2024	
KODE REKENING	URAIAN	KODE REKENING	URAIAN
		4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan
		4.1.04.16.04	**Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain**
		4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain
		4.1.04.16.06	**Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah**
		4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro
4.1.04.19	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**	**4.1.04.19**	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**4.2**	**PENDAPATAN TRANSFER**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**4.2.01**	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**
4.2.01.01	**Dana Perimbangan**	**4.2.01.01**	**Dana Perimbangan**
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29WPOPDN	4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29WPOPDN
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty		
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan
		4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit
4.2.01.01.02	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)**	**4.2.01.01.02**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)**
4.2.01.01.02.0001	DAU	4.2.01.01.02.0001	DAU
4.2.01.01.03	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**	**4.2.01.01.03**	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
		4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
		4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pe mbangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
		4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
4.2.01.01.03.0061	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan	4.2.01.01.03.0061	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan
4.2.01.01.04	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**	**4.2.01.01.04**	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan

TAHUN 2023		TAHUN 2024	
KODE REKENING	URAIAN	KODE REKENING	URAIAN
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisatan	4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisatan
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM
4.2.01.05	**Dana Desa**	**4.2.01.05**	**Dana Desa**
4.2.01.05.01	**Dana Desa**	**4.2.01.05.01**	**Dana Desa**
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	4.2.01.05.01.0001	Dana Desa
4.2.01.06	**Insentif Fiskal**	**4.2.01.06**	**Insentif Fiskal**
4.2.01.06.01	**Insentif Fiskal**	**4.2.01.06.01**	**Insentif Fiskal**
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**4.2.02**	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**
4.2.02.01	**Pendapatan Bagi Hasil**	**4.2.02.01**	**Pendapatan Bagi Hasil**
4.2.02.01.01	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**	**4.2.02.01.01**	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok

Dengan adanya struktur pendapatan Tahun 2024 tersebut terdapat beberapa item PAD yang digabungkan menjadi satu seperti Pajak Hotel, Losmen, Warung digabung menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Serta terdapat jenis pendapatan baru seperti pajak air tanah, pajak MBLB.

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 mencapai target adalah Pendapatan Asli Daerah, sedangkan pendapatan yang tidak mencapai target terdapat pada Pendapatan Transfer. Adapun anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah dan Pendapatan Daerah Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan pada lampiran 1 dan 2.

5.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Realisasi PAD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp69.260.946.657,32 dan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp71.823.776.727,81 atau 103,70% dari target. Nilai Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp3.075.250.972,97 atau 4,47% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2023 yang sebesar Rp68.748.525.754,84.

Realisasi PAD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp15.820.932.765,00, Retribusi Daerah sebesar Rp2.166.946.349,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp5.845.018.934,91, dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp47.981.878.678,90. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 43. Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Pajak Daerah	15.567.332.172,00	15.820.932.765,00	101,63	253.600.593,00	14.854.325.262,00	966.607.503,00	6,51
2.	Retribusi Daerah	2.356.824.872,00	2.166.946.349,00	91,94	(189.878.523,00)	2.305.628.800,00	(138.682.451,00)	(6,01)
3.	Hasil Pengelolaan KYD	5.854.018.934,00	5.854.018.934,91	100,00	0,91	5.653.827.320,95	200.191.613,96	3,54
4.	Lain-lain PAD yang Sah	45.482.770.679,32	47.981.878.678,90	105,49	2.499.107.999,58	45.934.744.371,89	2.047.134.307,01	4,46
Jumlah		69.260.946.657,32	71.823.776.727,81	103,70	2.562.830.070,49	68.748.525.754,84	3.075.250.972,97	4,47

Lebih rinci terkait Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan berikut.

5.1.1.1.1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.1 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa jenis pajak terdiri atas.

a. PBB-P2;
b. BPTHB;
c. BPJT atas : 1) Makanan dan/ atau minuman, 2) Tenaga Listrik, 3) Jasa Perhotelan, 4) Jasa Parkir, dan 5) Jasa Kesenian dan Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. PAT;
f. Pajak MBLB;
g. Pajak Sarang Burung Walet;
h. Opsen PKB (mulai berlaku pada tahun 2025); dan
i. Opsen BBNKB (mulai berlaku pada tahun 2025).

Pengelolaan penerimaan Pajak Daerah ini dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp15.820.932.765,00 atau 101,63% dari target yang ditetapkan sebesar Rp15.567.332.172,00 dengan demikian realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 melebihi target sebesar Rp253.600.593,00 atau 1,63%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp966.607.503,00 atau 6,51% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah Anggaran 2023 sebesar Rp14.854.325.262,00 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 44. Pajak Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)		Ket
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)				
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)	
1.	Pajak Reklame	120.929.700,00	247.192.326,00	204,41	126.262.626,00	158.057.616,00	89.134.710,00	56,39	Tetap
2.	Pajak Air Tanah	0,00	606.472,00	∞	606.472,00	0,00	606.472,00	∞	Tetap
3.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	300.000.000,00	462.039.288,00	154,01	162.039.288,00	0,00	462.039.288,00	∞	Baru
4.	PBB P2	5.232.505.380,00	5.273.166.288,00	100,78	40.660.908,00	4.699.447.572,00	573.718.716,00	12,21	Tetap
5.	Pajak BPHTB	300.000.000,00	328.368.600,00	109,46	28.368.600,00	368.025.100,00	(39.656.500,00)	(10,78)	Tetap
6.	Pajak Barang dan	9.613.897.092,00	9.509.557.791,00	98,91	(104.339.301,00)	0,00	9.509.557.791,00	∞	Baru

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)		Ket
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)				
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)	
	Jasa Tertentu (PBJT)								
7.	Pajak Hotel	0,00	0,00	-	0,00	153.554.250,00	(153.554.250,00)	(100,00)	Menjadi bagian dari PBJT
8.	Pajak Restoran	0,00	0,00	-	0,00	1.712.757.842,00	(1.712.757.842,00)	(100,00)	
9.	Pajak Hiburan	0,00	0,00	-	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
10.	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	-	0,00	7.653.132.882,00	(7.653.132.882,00)	(100,00)	
11.	Pajak Parkir	0,00	0,00	-	0,00	104.350.000,00	(104.350.000,00)	(100,00)	
Jumlah		15.567.332.172,00	15.820.932.765,00	101,63	253.600.593,00	14.854.325.262,00	966.607.503,00	6,51	

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Objek Pajak Reklame meliputi:

1) Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya;
2) Reklame kain/Baliho;
3) Reklame melekat, stiker;
4) Reklame selebaran;
5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6) Reklame udara;
7) Reklame apung;
8) Reklame suara;
9) Reklame film/slide; dan
10) Reklame peragaan.

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

1) Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
4) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah;dan
5) Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Cara perhitungan dan hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Realisasi Pajak Reklame Tahun 2024 adalah sebesar Rp247.192.326,00 atau 204,41% dari target yang ditetapkan sebesar Rp120.929.700,00, dengan demikian realisasi Pajak Reklame melebihi target sebesar Rp126.262.626,00 atau 104,41%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp89.134.710,00 atau 56,39% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Reklame Tahun 2023 sebesar Rp158.057.616,00.

Penerimaan Pajak Reklame terdiri atas 2 (dua) sumber yaitu Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron, dan Pajak Reklame Kain sebagaimana dijelaskan berikut.

a) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron

Penerimaan Pajak Reklame bersumber dari Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 realisasi sebesar Rp230.774.001,00 dari anggaran sebesar Rp115.079.700,00 mencapai 200,53%, jika dibandingkan dengan Realisasi tahun 2023 sebesar Rp153.057.616,00 mengalami peningkatan sebesar Rp77.716.385,00 atau 50,78% ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 45.Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron / Megatron	115.079.700,00	230.774.001,00	200,53	115.694.301,00	153.057.616,00	77.716.385,00	50,78
Jumlah		115.079.700,00	230.774.001,00	200,53	115.694.301,00	153.057.616,00	77.716.385,00	50,78

b) Pajak Reklame Kain

Penerimaan Pajak Reklame bersumber dari Reklame Kain di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 realisasi sebesar Rp16.418.325,00 dari anggaran sebesar Rp5.850.000,00 mencapai 280,66%, jika dibandingkan dengan Realisasi tahun 2023 sebesar Rp5.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp11.418.325,00 atau 228,37%, ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 46.Pajak Reklame Kain TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Pajak Reklame Kain	5.850.000,00	16.418.325,00	280,66	10.568.325,00	5.000.000,00	11.418.325,00	228,37
Jumlah		5.850.000,00	16.418.325,00	280,66	10.568.325,00	5.000.000,00	11.418.325,00	228,37

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara lain:

1) Elektronifikasi pendaftaran dan pembayaran pajak reklame melalui optimalisasi penggunaan aplikasi PM. Santun.
2) Bekerjasama dengan Toko Waralaba (Alfamart dan Indomaret), dan E-Commerce (Tokopedia) untuk mempermudah pembayaran pajak Reklame.
3) Melakukan perbaikan tarif pajak reklame dengan peninjauan kembali Nilai Sewa Reklame.
4) Mengintensifkan penagihan kepada vendor/penyedia jasa reklame yang melakukan pemasangan pajak reklame di Kabupaten Lampung Barat.
5) Melakukan sosialisasi pendaftaran, pembayaran, tarif dan ketetentuan pemasangan reklame di Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6) Melakukan perbaikan tatakelola pemungutan pajak reklame, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak.

Walaupun realisasi Pajak Reklame mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

1) Masih banyaknya obyek pajak reklame yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.
2) Masih sulitnya menemukan vendor/penyelenggaran pajak reklame yang menyelenggarakan pemasangan reklame khususnya reklame yang bersifat temporer.

3) Masih banyak reklame khususnya reklame kain yang menunjukan identitas usaha dikelola oleh usaha yang bersifat usaha keluarga/sederhana yang tidak memperhitungkan kewajiban pembayaran pajak reklame

b. Pajak Air Tanah (PAT)

Pajak Air Tanah (PAT) yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, adapun yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk : a) keperluan dasar rumah tangga; b) pengairan pertanian rakyat; c) peternakan rakyat; d) keperluan keagamaan; dan f) kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Subjek dan Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Sampai saat ini wajib PAT di Kabupaten Lampung Barat adalah PT PLN Nusantara Power (PLTA Way Besay).

Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah (hasil perkalian antara harga baku dengan bobot Air Tanah) yang ditetapkan oleh Gubernur dengan tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah. Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang berdasarkan faktor-faktor : a) jenis sumber air; b) lokasi sumber air; c) tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d) volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e) kualitas air; dan f) tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Realisasi PAT Tahun 2024 adalah sebesar Rp608.472,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp608.472,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp0,00, ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 47.Pajak Air Tanah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Pajak Air Tanah	0,00	608.472,00	-	608.472,00	0,00	608.472,00	-
	Jumlah	0,00	608.472,00	-	608.472,00	0,00	608.472,00	-

c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.

Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi : asbes; batu tulis; batu setengah permata; batu kapur; batu apung; batu permata; bentonit, dolomit; feldspar; garam batu (halite); grafit; granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit; magnesit; mika; marmer; nitrat; obsidian, oker; pasir dan kerikil; pasir kuasa; perlit; fosfat; talk; tanah serap (fullers earth); tanah diatom; tanah liat; tawas (alum); tras; yarosit; zeolit; basal; trakhit; belerang; MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan MBLB lainnya sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB yaitu pengambilan MBLB : a) untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan b) untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telpon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Subjek dan Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

DPP MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB dengan dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan dengan harga patokan tiap jenis MBLB, harga patokan dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Per-UU di bidang

pertambangan mineral dan batu bara. Nilai harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Barat dengan memperhatikan hasil survey terhadap harga MBLB yang ada di Wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20%, besaran pokok pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan DPP MBLB dengan tarif pajak, saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang. Realisasi Pajak MBLB Tahun 2024 adalah sebesar Rp462.039.288,00 atau 154,01% dari target yang ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak MBLB melebihi target sebesar Rp162.039.288,00 atau 54,01%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp462.039.288,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp0,00 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 48.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00	462.039.288,00	154,01	162.039.288,00	0,00	462.039.288,00	∞
Jumlah		300.000.000,00	462.039.288,00	154,01	162.039.288,00	0,00	462.039.288,00	∞

Pajak MBLB merupakan jenis pajak baru yang diatur di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024.

d. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah:

1) Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai BMN / BMD;
2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
6) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
7) Bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (MRT), lintas raya terpadu (LRT), atau sejenisnya;
8) Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
9) Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut PBB oleh pemerintah pusat.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen) dan 0,3% (nol koma tiga persen) khusus untuk obyek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Realisasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan Tahun 2024 adalah sebesar Rp5.273.166.288,00 atau 100,78% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.232.505.380,00, dengan demikian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melebihi target sebesar Rp40.660.908,00 atau 0,78%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp573.718.716,00 atau 12,21% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp4.699.447.572,00. ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 49 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan	5.232.505.380,00	5.273.166.288,00	100,78	40.660.908,00	4.699.447.572,00	573.718.716,00	12,21
Jumlah		5.232.505.380,00	5.273.166.288,00	100,78	40.660.908,00	4.699.447.572,00	573.718.716,00	12,21

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara lain:

1) Melakukan kerjasama host to host dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat, yang mewajibkan pelunasan PBB-P2 sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat.
2) Melakukan perbaikan sistem aplikasi PBB-P2 yang terintegrasi dengan Bank Lampung dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat, untuk memudahkan proses pendaftaran dan pembayaran PBB-P2.
3) Bekerjasama dengan Toko Waralaba (Alfamart dan Indomaret), dan E-Commerce (Tokopedia) untuk mempermudah pembayaran PBB-P2.
4) Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak baik secara langsung maupun melalui media cetak Surat Kabar Harian Umum (SKHU).
5) Melakukan pendataan untuk dalam rangka intensifikasi pemungutan PBB-P2, mengingat saat ini masih cukup banyak obyek pajak yang belum terdaftar.
6) Melakukan verifikasi dan validasi data obyek pajak yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
7) Memberikan bantuan transport kepada penagih PBB-P2 sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
8) Melakukan penagihan secara berkala kepada wajib PBB-P2.

Walaupun realisasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

1) Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran PBB-P2.
2) Masih banyaknya obyek pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.
3) Ketidaksesuaian data pelaporan PBB-P2 oleh wajib pajak dengan kondisi dilapangan.

e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang berasal dari:

1) Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
2) Negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

3) Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
4) Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama ;
5) orang pribadi atau Badan karena wakaf dan
6) orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Tarif Pajak BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari harga transaksi peralihan hak dikurangi nilai jual obyek tidak kena pajak (NJOPTKP). Untuk tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 NJOTKP ditetapkan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk peralihan hak pertama dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk hibah atau waris.

Realisasi BPHTB Tahun 2024 adalah sebesar Rp328.368.600,00 atau 109,46% dari target yang ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Parkir melebihi target sebesar Rp28.368.600,00 atau 9,46%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp39.656.500,00) atau (10,78%) jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp368.025.100,00. ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 50.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	300.000.000,00	328.368.600,00	109,46	28.368.600,00	368.025.100,00	(39.656.500,00)	(10,78)
Jumlah		300.000.000,00	328.368.600,00	109,46	28.368.600,00	368.025.100,00	(39.656.500,00)	(10,78)

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara lain:
1) Melakukan kerjasama host to host dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat, yang mewajibkan pelunasan BPHTB sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat.
2) Melakukan perbaikan sistem aplikasi BPHTB yang terintegrasi dengan Bank Lampung dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat, untuk memudahkan proses pendaftaran dan pembayaran BPHTB.
3) Bekerjasama dengan Toko Waralaba (Alfamart dan Indomaret), dan E-Commerce (Tokopedia) untuk mempermudah pembayaran pajak BPHTB.
4) Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak baik secara langsung maupun melalui media cetak Surat Kabar Harian Umum (SKHU).
5) Melakukan verifikasi dan validasi data obyek pajak yang ada di Kabupaten Lampung Barat
6) Melakukan Sosialisasi kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris untuk dapat memberikan informasi yang lengkap dan benar terkait transaksi peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
7) Melakukan verifikasi dan validasi data transaksi peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai syarat pengajuan sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan.

Walaupun realisasi BPHTB mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:
1) Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran BPHTB
2) Masih banyaknya obyek pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.
3) Ketidaksesuaian data pelaporan transaksi nilai perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh wajib pajak/PPAT/Notaris dengan transaksi yang sebenarnya.
4) Belum adanya data Zona Nilai Tanah (ZNT) sebagai dasar penetapan harga perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan / atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan.

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi: a) Makanan dan/ atau minuman, b) Tenaga Listrik, c) Jasa Perhotelan, d) Jasa Parkir, dan e) Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pemungutan PBJT telah dilakukan sejak tahun – tahun sebelumnya, tetapi masih menggunakan nama Bagan Akun Standar masing-masing secara terpisah seperti pajak hotel, pajak losmen, pajak restoran, sedangkan pada tahun 2024 semua pajak tersebut digabungkan menjadi satu yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Berikut disajikan tabel penerimaan PBJT Tahun 2024 dan 2023

Tabel 51. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	PBJT-Makanan dan/atau Minuman							
	- PBJT Restoran	2.019.067.241,00	1.785.079.227,00	88,41	(233.988.014,00)	0,00	1.785.079.227,00	∞
2.	PBJT-Tenaga Listrik							
	- PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.303.656.751,00	7.431.331.045,00	101,75	127.674.294,00	0,00	7.431.331.045,00	∞
3.	PBJT-Jasa Perhotelan							
	- PBJT-Hotel	138.013.100,00	154.354.762,00	111,84	16.341.662,00	0,00	154.354.762,00	∞
	- PBJT-Losmen	33.960.000,00	19.942.757,00	58,72	(14.017.243,00)	0,00	19.942.757,00	∞
4.	PBJT-Jasa Parkir							
	- PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	112.200.000,00	109.850.000,00	97,91	(2.350.000,00)	0,00	109.850.000,00	∞
5.	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan							
	- PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	7.000.000,00	9.000.000,00	128,57	2.000.000,00	0,00	9.000.000,00	∞
	Jumlah	9.613.897.092,00	9.509.557.791,00	98,91	(104.339.301,00)	0,00	9.509.557.791,00	∞

PBJT merupakan jenis pajak yang baru diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024.

Pemungutan PBJT telah dilakukan sejak tahun – tahun sebelumnya sebesar Rp9.628.794.974,00 tetapi masih menggunakan nama Bagan Akun Standar masing-masing secara terpisah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak parkir sedangkan pada tahun 2024 semua pajak tersebut digabungkan menjadi satu akun yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Berikut disajikan tabel penerimaan pajak daerah Tahun 2023 masih menggunakan Bagan Akun Standar masing-masing secara terpisah.

Tabel 52. Pajak Daerah Tahun 2023, Pada Tahun 2024 Nomenklatur Menjadi PBJT

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	153.564.250,00	(153.564.250,00)	(100,00)
2.	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.757.842,00	(1.712.757.842,00)	(100,00)
3.	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
4.	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	7.653.132.882,00	(7.653.132.882,00)	(100,00)
5.	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	104.350.000,00	(104.350.000,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	9.628.794.974,00	(9.628.794.974,00)	(100,00)

a) PBJT - Makanan dan / atau Minuman

Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:

1) Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minuman.
2) Penyedia jasa boga atau katering yang, melakukan
   - Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
   - Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimapanan dilakukan
   - Penyajian dilakukan dengan tanpa peralatan dan petugasnya.

Dikecualikan dari objek PBJT yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman :

1) Dengan peredaran usaha tidak melebihan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari
2) Dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/ atau minuman
3) Dilakukan oleh pabrik makanan dan/ atau minuman
4) Disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Berikut disajikan PBJT – Makanan dan/atau Minuman tahun 2024 serta Pajak Restoran tahun 2023 yang pada tahun 2024 telah disatukan menjadi PBJT – Makanan dan/atau Minuman.

Tabel 53.PBJT – Makanan dan/atau Minuman Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	PBJT Restoran	2.019.067.241,00	1.785.079.227,00	88,41	(233.988.014,00)	0,00	1.785.079.227,00	-
2.	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.757.842,00	(1.712.757.842,00)	(100,00)
Jumlah		2.019.067.241,00	1.785.079.227,00	88,41	(233.988.014,00)	1.712.757.842,00	72.321.385,00	4,22

b) PBJT - Tenaga Listrik

Objek PBJT Tenaga Listrik adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir, yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik tersebut meliputi:

1) Konsumsi Tenaga Listri oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
2) Konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
3) Konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis
4) Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Berikut disajikan PBJT – Tenaga Listrik tahun 2024 serta Pajak Penerangan Jalan tahun 2023 yang pada tahun 2024 telah disatukan menjadi PBJT – Tenaga Listrik.

Tabel 54.PBJT – Tenaga Listrik Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.303.656.751,00	7.431.331.045,00	101,75	127.674.294,00	0,00	7.431.331.045,00	-
2.	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	7.653.132.882,00	(7.653.132.882,00)	(100,00)
Jumlah		7.303.656.751,00	7.431.331.045,00	101,75	127.674.294,00	7.653.132.882,00	(221.801.837,00)	(2,90)

c) PBJT – Jasa Perhotelan

Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti : hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan (guesthouse, bungalo, resort, cottage), tempat tingal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, glamping.

Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan meliputi :

1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
2) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenisnya;
3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata;
5) Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel

Penerimaan Pajak Hotel terdiri atas 2 (dua) sumber yaitu Pajak Hotel dan Pajak Losmen.

Berikut disajikan PBJT – Jasa Perhotelan tahun 2024 serta Pajak Hotel tahun 2023 yang pada tahun 2024 telah disatukan menjadi PBJT – Jasa Perhotelan.

Tabel 55.PBJT – Jasa Perhotelan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	PBJT-Hotel	138.013.100,00	154.354.762,00	111,84	16.341.662,00	0,00	154.354.762,00	∞
2.	PBJT-Losmen	33.960.000,00	19.942.757,00	58,72	(14.017.243,00)	0,00	19.942.757,00	∞
3.	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	153.554.250,00	(153.554.250,00)	(100,00)
	Jumlah	**171.973.100,00**	**174.297.519,00**	**101,35**	**2.324.419,00**	**153.554.250,00**	**20.743.269,00**	**13,51**

d) PBJT - Jasa Parkir

Jasa Parkir meliputi:

1) Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir, dan/atau
2) Pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir meliputi:

1) Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2) Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
3) Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Berikut disajikan PBJT – Jasa Parkir tahun 2024 serta Pajak Hotel tahun 2023 yang pada tahun 2024 telah disatukan dengan PBJT – Jasa Perhotelan.

Tabel 56.PBJT – Jasa Parkir Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	112.200.000,00	109.850.000,00	97,91	(2.350.000,00)	0,00	109.850.000,00	∞
2.	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	104.350.000,00	(104.350.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**112.200.000,00**	**109.850.000,00**	**97,91**	**(2.350.000,00)**	**104.350.000,00**	**5.500.000,00**	**5,27**

e) PBJT - Jasa Kesenian dan Hiburan

Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi:

1) Tontonan film atau bentuk tontotan atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
2) Pergelaran kesenian, musik, tari, dan/ atau busana;
3) Kontes kecantikan;
4) Kontes binaraga;
5) Pameran;
6) Pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
7) Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
8) Permainan ketangkasan;
9) Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan / atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
10) Rekreasi wahana air, wahan ekologi, wahan pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahan permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
11) Panti pijat dan pijat refleksi; dan
12) Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa

Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan yakni jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk:

1) Promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayar; dan/atau
2) Kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu, Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:

a. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan / atau minuman untuk PBJT atas makan dan/atau minuman;
b. Nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
c. Jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa perhotelan
d. Jumlah pembayara kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyeida layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir;
e. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), khsusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen), tarif PBJT atas tenaga listrik terdiri atas : a) konsusmi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen), b) konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebeser 1,5% (satu koma lima persen).

Besaran Pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

a. Pembayaran atau penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman
b. Konsumsi atau pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik
c. Pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan
d. Pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir
e. Pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Berikut disajikan PBJT - Jasa Kesenian dan Hiburan tahun 2024 serta Pajak Hiburan tahun 2023 yang pada tahun 2024 telah disatukan menjadi PBJT – Jasa Jasa Kesenian dan Hiburan.

Tabel 57 PBJT - Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	7.000.000,00	9.000.000,00	128,57	2.000.000,00	0,00	9.000.000,00	∞
2	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
Jumlah		7.000.000,00	9.000.000,00	128,57	2.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	80,00

5.1.1.1.2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Realisasi Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp2.166.946.349,00 atau 91,94% dari target Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp2.356.824.872,00, dengan demikian realisasi penerimaan tidak mencapai target sebesar (Rp189.878.523,00) atau (8,06%). Apabila realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp2.305.628.800,00 mengalami penurunan sebesar (Rp138.682.451,00) atau (6,01%).

Berikut disajikan rincian data realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 58. Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Retribusi Jasa Umum	595.572.172,00	478.126.572,00	80,28	(117.445.600,00)	844.193.272,00	(366.066.700,00)	(43,36)
2	Retribusi Jasa Usaha	1.561.252.700,00	1.484.404.800,00	95,08	(76.847.900,00)	1.236.243.800,00	248.161.000,00	20,07
3	Retribusi Perizinan Tertentu	200.000.000,00	204.414.977,00	102,21	4.414.977,00	225.191.728,00	(20.776.751,00)	(9,23)
Jumlah		2.356.824.872,00	2.166.946.349,00	91,94	(189.878.523,00)	2.305.628.800,00	(138.682.451,00)	(6,01)

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

5.1.1.1.2.1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun obyeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dasar hukum pemungutan Retribusi Jasa Umum pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Realisasi Retribusi Jasa Umum sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp478.126.572,00 atau 80,28% dari target sebesar Rp595.572.172,00, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum tidak mencapai target sebesar (Rp117.445.600,00) atau (19,72%). Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 yang jumlahnya tercatat Rp844.193.272,00 terlihat penerimaan Retribusi Jasa Umum di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp366.066.700,00) atau (43,36%).

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2024 pada tabel berikut.

Tabel 59. Retribusi Jasa Umum TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retr. Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	158.844.000,00	149.936.000,00	94,39	(8.908.000,00)	134.608.000,00	15.328.000,00	11,39
2.	Retr. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	144.216.000,00	89.250.000,00	61,89	(54.966.000,00)	75.520.000,00	13.730.000,00	18,18
3.	Retr. Pelayanan Pasar	292.512.172,00	238.940.572,00	81,69	(53.571.600,00)	199.168.972,00	39.771.600,00	19,97
4.	Retr. Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	(55.000.000,00)	(100,00)
5.	Retr. Pengolahan Limbah Cair	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.500,00	(1.553.500,00)	(100,00)
6.	Retr. Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	(4.400.000,00)	(100,00)
7.	Retr. Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	373.942.800,00	(373.942.800,00)	(100,00)
	Jumlah	595.572.172,00	478.126.572,00	80,26	(117.445.600,00)	844.193.272,00	(366.066.700,00)	(43,36)

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan retribusi atas pelayanan kebersihan lingkungan yang diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah, dan jangka waktu pelayanan meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah dengan memperhatikan biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan dan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun 2024 adalah sebesar Rp149.936.000,00 atau 94,39% dari target yang ditetapkan sebesar Rp158.844.000,00, dengan demikian realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak mencapai target sebesar (Rp8.908.000,00) atau (5,61%). Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp15.328.000,00 atau 11,39% jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun 2023 sebesar Rp134.608.000,00.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:

1) Melakukan perbaikan tatakelola pemungutan dan pembayaran retribusi persampahan.
2) Melakukan sosialisasi pelayanan dan pemungutan retribusi persampahan.
3) Melakukan intensifikasi dengan penambahan jumlah pelanggan yang mendapatkan pelayanan persampahan.
4) Melakukan penagihan secara berkala kepada pelanggan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

1) Kesadaran wajib retribusi untuk melakukan pengelolaan sampah dan pembayaran retribusi persampahan yang masih perlu ditingkatkan.
2) Terbatasnya biaya operasional sehingga pelayanan kepada pelanggan kurang maksimal.
3) Kurangnya tong sampah yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, sehingga banyak pelanggan yang enggan melakukan pembayaran.

b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut atas pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditentukan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dalam setiap kali pemakaian tempat parkir.

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Realisasi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2024 adalah sebesar Rp89.250.000,00 atau 61,89% dari target yang ditetapkan sebesar Rp144.216.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Parkir di Tepi Jalan Umum tidak mencapai target sebesar (Rp54.966.000,00) atau (38,11%). Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp13.730.000,00 atau 18,18% jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2023 sebesar Rp75.520.000,00.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:

1) Melakukan penambahan obyek yang menjadi lokasi retribusi parkir tepi jalan umum.
2) Perbaikan tatakelola pemungutan dan pembayaran retribusi parkir tepi jalan umum.
3) Intensifikasi pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum, khususnya pada obyek retribusi yang dianggap potensial.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

1) Berkurangnya area parkir tepi jalan umum, khususnya di wilayah sekitar pasar pemda yang banyak digunakan untuk berdagang.
2) Keterbatasan jumlah petugas parkir yang bertugas melakukan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum.
3) Tatakelola sistem pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum masih perlu ditingkatkan.

c. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar merupakan retribusi atas penyediaan pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran atau amparan, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dikecualikan pada pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Retribusi Pelayanan Pasar ini dipungut berdasarkan luas pemakaian fasilitas pasar dan tipe pasar dengan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah meliputi pasar tipe A, B, C dan D.

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2024 adalah sebesar Rp238.940.572,00 atau 81,69% dari target yang ditetapkan sebesar Rp292.512.172,00, dengan demikian realisasi Retribusi Pelayanan Pasar tidak mencapai target sebesar (Rp53.571.600,00) atau (18,31%). Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp39.771.600,00 atau 19,97% jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2023 sebesar Rp199.168.972,00.

Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar terdiri atas 3 (tiga) sumber yaitu Retribusi Pelataran, Retribusi Los, dan Retribusi Kios sebagaimana dijelaskan berikut.

a) Retribusi Pelataran

Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar bersumber dari Pelataran di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 realisasi sebesar Rp50.164.000,00 dari anggaran sebesar Rp52.800.000,00 mencapai 95,01%, jika dibandingkan dengan Realisasi tahun 2023 sebesar Rp35.648.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp14.516.000,00 atau 40,72% ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 60. Retribusi Pelataran TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retribusi Pelataran	52.800.000,00	50.164.000,00	95,01	(2.636.000,00)	35.648.000,00	14.516.000,00	40,72
Jumlah		52.800.000,00	50.164.000,00	95,01	(2.636.000,00)	35.648.000,00	14.516.000,00	40,72

b) Retribusi Los

Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar bersumber dari Los di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 realisasi sebesar Rp139.347.200,00 dari anggaran sebesar Rp167.251.200,00 mencapai 83,32%, jika dibandingkan dengan Realisasi tahun 2023 sebesar Rp111.176.800,00 mengalami peningkatan sebesar Rp28.170.400,00 atau 25,34%, ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 61. Retribusi Los TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retribusi Los	167.251.200,00	139.347.200,00	83,32	(27.904.000,00)	111.176.800,00	28.170.400,00	25,34
Jumlah		167.251.200,00	139.347.200,00	83,32	(27.904.000,00)	111.176.800,00	28.170.400,00	25,34

c) Retribusi Kios

Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar bersumber dari Kios di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 realisasi sebesar Rp49.429.372,00 dari anggaran sebesar Rp72.460.972,00 mencapai 68,22%, jika dibandingkan dengan Realisasi tahun 2023 sebesar Rp52.344.172,00 atau tidak mengalami penurunan sebesar (Rp2.914.800,00) atau (5,57%), ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 62. Retribusi Kios TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retribusi Kios	72.460.972,00	49.429.372,00	68,22	(23.031.600,00)	52.344.172,00	(2.914.800,00)	(5,57)
Jumlah		72.460.972,00	49.429.372,00	68,22	(23.031.600,00)	52.344.172,00	(2.914.800,00)	(5,57)

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:

1) Intensifikasi pemungutan retribusi kepada wajib retribusi.
2) Monitoring dan evaluasi secara berkala kepada petugas pemungut retribusi untuk memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Dalam proses pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

1) Jumlah wajib retribusi pelayanan pasar yang mulai banyak berkurang, hal ini disebabkan karena banyak pedagang lebih memilih berdagang menggunakan kendaraan bak terbuka.
2) Pengunjung pasar pemda banyak berkurang, sehingga mengurangi antusiasme para pedagang dalam berdagang. Para pedagang cenderung hanya berdagang pada hari-hari tertentu yang mereka anggap menjanjikan.
3) Tatakelola pemungutan retribusi pelayanan pasar perlu ada perbaikan, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat meningkat.

Dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mencabut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berikut item pendapatan retribusi jasa umum yang dihapuskan antara lain Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor, Pengolahan Limbah Cair, Pelayanan Tera/ Tera Ulang, dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, disajikan berikut ini.

d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pada Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki anggaran dan realisasi retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp55.000.000,00) atau (100,00%) jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2023 sebesar Rp55.000.000,00. Ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 63. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KB) TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Retribusi Pengujian KB	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	(55.000.000,00)	(100,00)
Jumlah		0,00		0,00	0,00	55.000.000,00	(55.000.000,00)	(100,00)

e. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Pada Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki anggaran dan realisasi retribusi Pengolahan Limbah Cair. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp1.553.500,00) atau (100,00%) jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Tahun 2023 sebesar Rp1.553.500,00. Ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 64. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.500,00	(1.553.500,00)	(100,00)
Jumlah		0,00		0,00	0,00	1.553.500,00	(1.553.500,00)	(100,00)

f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pada Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki anggaran dan realisasi retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp4.400.000,00) atau (100,00%) jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Tahun 2023 sebesar Rp4.400.000,00. Ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 65. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	(4.400.000,00)	(100,00)
Jumlah		0,00		0,00	0,00	4.400.000,00	(4.400.000,00)	(100,00)

g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pada Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki anggaran dan realisasi retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp373.942.800,00) atau (100,00%) jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2023 sebesar Rp373.942.800,00. Ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 66. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	373.942.800,00	(373.942.800,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00		0,00	0,00	373.942.800,00	(373.942.800,00)	(100,00)

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 pada tabel dibawah ini.

Tabel 67. Rincian Retribusi Jasa Umum per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	**Dinas Perhubungan**							
	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	144.216.000,00	89.250.000,00	61,89	(54.966.000,00)	75.520.000,00	13.730.000,00	18,18
	Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	-	0,00	55.000.000,00	(55.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**144.216.000,00**	**89.250.000,00**	**61,89**	**(54.966.000,00)**	**130.520.000,00**	**(41.270.000,00)**	**(31,62)**
2.	**Dinas Komunikasi dan Informatika**							
	Retr. Pengawasan & Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	-	0,00	373.942.800,00	(373.942.800,00)	(100,00)
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**373.942.800,00**	**(373.942.800,00)**	**(100,00)**
3.	**Dinas Lingkungan Hidup**							
	Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	106.044.000,00	106.080.000,00	100,03	36.000,00	100.060.000,00	6.020.000,00	6,02
	Retr. Rumah Tangga	0,00	0,00	-	0,00	1.553.500,00	(1.553.500,00)	(100,00)
	Jumlah	**106.044.000,00**	**106.080.000,00**	**100,03**	**36.000,00**	**101.613.500,00**	**4.466.500,00**	**4,40**
4.	**Dinas Koperasi, UKM, & Perdagangan**							
	Retr. Pengujian Alat-alat Ukur, Timbang, dan Perlengkapan	0,00	0,00	-	0,00	4.400.000,00	(4.400.000,00)	(100,00)
	Retr. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	52.800.000,00	43.856.000,00	83,06	(8.944.000,00)	34.548.000,00	9.308.000,00	26,94
	Retr. Pelayanan Pasar	292.512.172,00	238.940.572,00	81,69	(53.571.600,00)	199.168.972,00	39.771.600,00	19,97
	Jumlah	**345.312.172,00**	**282.796.572,00**	**81,90**	**(62.515.600,00)**	**238.116.972,00**	**44.679.600,00**	**18,76**
	Jumlah Keseluruhan	595.572.172,00	478.126.572,00	80,29	(117.445.600,00)	844.193.272,00	(366.066.700,00)	(43,36)

5.1.1.1.2.2. Retribusi Jasa Usaha

Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha, sedangkan yang menjadi objeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dasar hukum penarikan Retribusi Jasa Usaha ini adalah Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Realisasi Retribusi Jasa Usaha sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp1.484.404.800,00 atau 95,08% dari target sebesar Rp1.561.252.700,00, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha tidak mencapai target sebesar (Rp76.847.900,00) atau (4,92%). Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2023 yang jumlahnya tercatat Rp1.236.243.800,00 terlihat penerimaan Retribusi Jasa Usaha di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp248.161.000,00 atau 20,07%.

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2024 pada tabel berikut.

Tabel 68. Retribusi Jasa Usaha TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	788.595.000,00	768.997.500,00	97,51	(19.597.500,00)	574.939.500,00	194.058.000,00	33,75
2.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	359.400.000,00	349.280.000,00	97,18	(10.120.000,00)	369.046.400,00	(19.766.400,00)	(5,36)
3.	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	(6.300.000,00)	(100,00)
4.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	33.468.000,00	10.700.000,00	31,97	(22.768.000,00)	25.348.000,00	(14.648.000,00)	(57,79)
5.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	160.000.000,00	124.118.500,00	77,57	(35.881.500,00)	88.894.000,00	35.224.500,00	39,63
6.	Retribusi Rumah Potong Hewan	5.953.500,00	5.953.500,00	100,00	0,00	5.376.000,00	577.500,00	10,74
7.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	129.094.000,00	141.636.000,00	109,72	12.542.000,00	79.033.000,00	62.603.000,00	79,21
8.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	84.742.200,00	83.719.300,00	98,79	(1.022.900,00)	87.306.900,00	(3.587.600,00)	(4,11)
Jumlah		1.561.252.700,00	1.484.404.800,00	95,08	(76.847.900,00)	1.236.243.800,00	248.161.000,00	20,07

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh 13 perangkat daerah yaitu : 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 2) Dinas Kesehatan; 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian; 5) Dinas Perhubungan; 6) Dinas Lingkungan Hidup; 7) Badan Riset dan Inovasi Daerah; 8) Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan; 9) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; 10) Dinas Perikanan; 11) Dinas Perkebunan dan Peternakan; 12) Badan Pendapatan Daerah; 13) Sekretariat Daerah; 14) Sekretariat Daerah.

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp768.997.500,00 atau 97,51% dari target yang ditetapkan sebesar Rp788.595.000,00, dengan demikian realisasi tersebut tidak mencapai target sebesar (Rp19.597.500,00) atau (2,49%). Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp194.058.000,00 atau 33,75% jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp574.939.500,00.

Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdiri atas 4 (empat) sumber yaitu Penyewaan Tanah dan Bangunan, Penyewaan Tanah, Pemakaian Ruangan, dan Pemakaian Alat sebagaimana dijelaskan berikut.

a) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan

Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari Penyewaan Tanah dan Bangunan di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 realisasi sebesar Rp532.950.000,00 dari anggaran sebesar Rp546.750.000,00 atau 97,48%, jika dibandingkan dengan Realisasi tahun 2023 sebesar Rp357.700.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp175.250.000,00 atau 48,99% ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 69. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	546.750.000,00	532.950.000,00	97,48	(13.800.000,00)	357.700.000,00	175.250.000,00	48,99
Jumlah		546.750.000,00	532.950.000,00	97,48	(13.800.000,00)	357.700.000,00	175.250.000,00	48,99

b) Retribusi Penyewaan Tanah

Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari Penyewaan Tanah di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 realisasi sebesar Rp69.047.500,00 dari anggaran sebesar Rp72.045.000,00 mencapai 95,84%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp79.789.500,00 mengalami penurunan sebesar (Rp10.742.000,00) atau (13,46%) ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 70. Retribusi Penyewaan Tanah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retribusi Penyewaan Tanah	72.045.000,00	69.047.500,00	95,84	(2.997.500,00)	79.789.500,00	(10.742.000,00)	(13,46)
Jumlah		72.045.000,00	69.047.500,00	95,84	(2.997.500,00)	79.789.500,00	(10.742.000,00)	(13,46)

c) Retribusi Pemakaian Ruangan

Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari Pemakaian Ruangan di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 realisasi sebesar Rp63.800.000,00 dari anggaran sebesar Rp66.600.000,00 mencapai 95,80%, jika dibandingkan dengan Realisasi tahun 2023 sebesar Rp34.250.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp29.550.000,00 atau 86,28% ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 71. Retribusi Pemakaian Ruangan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retribusi Pemakaian Ruangan	66.600.000,00	63.800.000,00	95,80	(2.800.000,00)	34.250.000,00	29.550.000,00	86,28
Jumlah		66.600.000,00	63.800.000,00	95,80	(2.800.000,00)	34.250.000,00	29.550.000,00	86,28

d) Retribusi Pemakaian Alat

Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari Pemakaian Alat di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 realisasi sebesar Rp103.200.000,00 dari anggaran sebesar Rp103.200.000,00 mencapai 100,00%, jika dibandingkan dengan Realisasi tahun 2023 sebesar Rp103.200.000,00 tidak mengalami perubahan realisasi, ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 72. Retribusi Pemakaian Alat TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retribusi Pemakaian Alat	103.200.000,00	103.200.000,00	100,00	0,00	103.200.000,00	0,00	0,00
Jumlah		103.200.000,00	103.200.000,00	100,00	0,00	103.200.000,00	0,00	0,00

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:

1) Melakukan pendataan terhadap pemakai kekayaan daerah Kabupaten Lampung Barat.
2) Bekerjasama dengan pengelola gaji untuk melakukan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah khususnya penyewaan tanah dan bangunan berupa rumah dinas.
3) Membuat Berita Acara Perjanjian Sewa Menyewa khususnya pemakaian kekayaan daerah berupa tanah, untuk memberikan kepastian hukum penyewaan dan hak atas tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
4) Mengintensifkan penagihan terhadap retribusi pemakaian kekayaan daerah.

5) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Walaupun realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

1) Sering terjadi pemindahtanganan pemakai kekayaan daerah yang tidak dilaporkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
2) Kurangnya kesadaran pemakai kekayaan daerah untuk melaksanakan kewajibannya.
3) Harga hasil pertanian yang tidak menentu, sehingga menyulitkan penyewa tanah melaksanakan kewajibannya.

b. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan.

Realisasi Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Tahun 2024 adalah sebesar Rp349.280.000,00 atau 97,18% dari target yang ditetapkan sebesar Rp359.400.000,00, dengan demikian realisasi Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan tidak mencapai target sebesar (Rp10.120.000,00) atau (2,82%). Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp19.766.400,00) atau (5,36%) jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Tahun 2023 sebesar Rp369.046.400,00, ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 73.Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	359.400.000,00	349.280.000,00	97,18	(10.120.000,00)	369.046.400,00	(19.766.400,00)	(5,36)
Jumlah		359.400.000,00	349.280.000,00	97,18	(10.120.000,00)	369.046.400,00	(19.766.400,00)	(5,36)

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:

1) Mengintensifkan penagihan kepada wajib retribusi pasar grosir dan pertokoan di Pasar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
2) Memperbaiki tatakelola pemungutan dan pembayaran retribusi pasar grosir dan pertokoan.
3) Memperbaiki struktur tarif penyewaan pasar grosir dan pertokoan dengan memperhatikan kondisi sosial perekonomian masyarakat.
4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pemungutan dan pembayaran retribusi pasar grosir/pertokoan.

Walaupun realisasi Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, sehingga masih ada wajib retribusi yang kesulitan melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan.
2) Kondisi pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang masih membutuhkan perhatian, sehingga ada beberapa los/kios yang tidak berpenghuni.
3) Perlu perbaikan tatakelola pemungutan dan pembayaran retribusi pasar grosir/pertokoan.

c. Retribusi Terminal

Dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Retribusi Terminal pada Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut lagi.

Pada Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki anggaran dan realisasi atas Retribusi Terminal. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp6.300.000,00) atau (100,00%) jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Terminal Tahun 2023 sebesar Rp6.300.000,00. ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 74 Retribusi Terminal TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	(6.300.000,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	(6.300.000,00)	(100,00)

d. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan subjek orang pribadi atau Badan, diukur berdasarkan jenis tempat, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaannya. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi Tempat Khusus Parkir Tahun 2024 adalah sebesar Rp10.700.000,00 atau 31,97% dari target yang ditetapkan sebesar Rp33.468.000,00, dengan demikian realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir tidak mencapai target sebesar (Rp22.768.000,00) atau (68,03%). Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp14.648.000,00) atau (57,79%) jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2023 sebesar Rp25.348.000,00. Penurunan realisasi ini disebabkan karena adanya penyerahan Terminal Liwa kepada Pemerintah Provinsi Lampung, sehingga Retribusi Tempat Khusus Parkir Terminal Liwa tidak dapat lagi dipungut. Perbandingan realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2024 dan Tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 75. Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	33.468.000,00	10.700.000,00	31,97	(22.768.000,00)	25.348.000,00	(14.648.000,00)	(57,79)
Jumlah		33.468.000,00	10.700.000,00	31,97	(22.768.000,00)	25.348.000,00	(14.648.000,00)	(57,79)

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:

1) Melakukan penagihan secara intensif kepada kendaraan yang terparkirdi lingkungan terminal liwa dan sekincau.
2) Memperbaiki tatakelola pengelolaan perparkiran dan pemungutan retribusi parkir di lingkungan terminal liwa dan sekincau.

Masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

1) Terbatasnya jumlah kendaraan yang parkir di Terminal, karena sampai saat ini terminal liwa dan sekincau belum melayani bus/angkutan antar daerah/kota.
2) Tidak adanya kendaraan angkutan yang berhenti dan masuk terminal, sehingga wajib retribusi masih terbatas pada pengunjung pasar Pemda Liwa dan Pasar Bandar Betung.
3) Perlu perbaikan tatakelola pemungutan dan pembayaran retribusi terminal.

e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan penerapan tarif berdasarkan jenis tempat, tipe kamar, dan jangka waktu penggunaannya. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kepemudaan, Olaharaga dan Pariwisata.

Realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Tahun 2024 adalah sebesar Rp124.118.500,00 atau 77,57% dari target yang ditetapkan sebesar Rp160.000.000,00, dengan demikian realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tidak mencapai target sebesar (Rp35.881.500,00) atau (22,43%). Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp35.224.500,00 atau 39,63% jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi tersebutTempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa Tahun 2023 sebesar Rp88.894.000,00. ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 76.Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	160.000.000,00	124.118.500,00	77,57	(35.881.500,00)	88.894.000,00	35.224.500,00	39,63
Jumlah		160.000.000,00	124.118.500,00	77,57	(35.881.500,00)	88.894.000,00	35.224.500,00	39,63

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:

1) Pemasangan alat perekam elektronik (Tapping Box) pada wisma sindalapai.
2) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pengunjung/tamu.
3) Perbaikan tatakelola pemungutan dan pembayaran retribusi penginapan/ pesanggrahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Walaupun realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

1) Kurangnya jumlah pengunjung pada Penginapan/Pesanggrahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, karena banyaknya pesaing yang mampu memberikan pelayanan dan harga yang lebih menjanjiikan.
2) Kondisi Penginapan/pesanggrahan yang kurang memadai.
3) Terbatasnya jumlah kunjungan wisatawan luar daerah ke Lampung Barat.
4) Tatakelola penginapan/pesanggrahan yang masih perlu diperbaiki.

f. Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian dan pelayanan fasilitas rumah potong hewan dan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan diukur berdasarkan jenis hewan, jumlah hewan dan jenis pelayanan Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun 2024 adalah sebesar Rp5.953.500,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.953.500,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp577.500,00 atau 10,74% jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun 2023 sebesar Rp5.376.000,00. ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 77. Retribusi Potong Hewan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retribusi Rumah Potong Hewan	5.953.500,00	5.953.500,00	100,00	0,00	5.376.000,00	577.500,00	10,74
Jumlah		5.953.500,00	5.953.500,00	100,00	0,00	5.376.000,00	577.500,00	10,74

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:

1) Pendataan wajib retribusi pemotongan hewan

2) Sosialisasi kepada masyarakat akan pemotongan hewan di rumah potong hewan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
3) Peningkatan pelayanan kepada wajib retribusi Rumah Potong Hewan
4) Mengintensifkan penagihan retribusi Rumah Potong Hewan

Walaupun realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:
1) Masih kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pemotongan hewan di rumah Potong Hewan.
2) Lokasi Rumah Potong Hewan yang cukup jauh dari pemukiman sehingga menyulitkan masyarakat melakukan pemotongan di Rumah Potong Hewan.
3) Kurangnya sumberdaya manusia, khususnya tenaga kesehatan hewan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut sebagai pembayaran atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dalam rangka pembinaan dan prestasi olah raga serta berusaha untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi masuk, jumlah orang, jenis olahraga dan jenis organisasi. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2024 adalah sebesar Rp141.636.000,00 atau 109,72% dari target yang ditetapkan sebesar Rp129.094.000,00,00, dengan demikian realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga melebihi target sebesar Rp12.542.000,00 atau 9,72%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp62.603.000,00 atau 79,21% jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2023 sebesar Rp79.033.000,00. ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 78. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	129.094.000,00	141.636.000,00	109,72	12.542.000,00	79.033.000,00	62.603.000,00	79,21
Jumlah		129.094.000,00	141.636.000,00	109,72	12.542.000,00	79.033.000,00	62.603.000,00	79,21

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:
1) Melakukan sosialisasi tentang tempat-tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
2) Perbaikan tatakelola pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga, diantaranya dengan pemasangan pintu masuk elektronik di Kebun Raya Liwa.
3) Perbaikan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
4) Meningkatkan kualitas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Walaupun realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

1) Masih perlu adanya perbaikan tatakelola pemungutan dan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
2) Belum adanya dasar hukum/peraturan untuk melakukan pemungutan retribusi di beberapa tempat rekreasi/olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
3) Kurangnya kegiatan-kegiatan perlombaan olahraga yang menggunakan fasilitas tempat olahraga di Kabupaten Lampung Barat.

h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. Subjek retribusi ini adalah orang pribadi atau Badan dan diukur berdasarkan jenis dan volume barang usaha daerah.

Tingkat penggunaan jasa Produksi Usaha Daerah Penjualan Benih Ikan dan Bibit Ternak diukur berdasarkan jenis, volume dan harga pedoman yang dipungut oleh Dinas Perikanan. Jasa Produksi Usaha penjualan kompos dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup sedangkan Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan dipungut oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan.

Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp83.719.300,00 atau 98,79% dari target yang ditetapkan sebesar Rp84.742.200,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp3.587.600,00) atau (4,11%) jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2023 sebesar Rp87.306.900,00.

Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terdiri atas 3 (tiga) sumber yaitu Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman, Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan, dan Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan sebagaimana dijelaskan berikut.

a) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman

Kabupaten Lampung Barat pada Tahun Anggaran 2024 tidak memiliki anggaran dan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah bersumber dari Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp10.433.400,00 mengalami penurunan sebesar (Rp10.433.400,00) atau (100,00%) ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 79. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	10.433.400,00	(10.433.400,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	10.433.400,00	(10.433.400,00)	(100,00)

b) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan

Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah bersumber dari Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 realisasi sebesar Rp64.850.000,00 dari anggaran sebesar Rp64.800.000,00 mencapai 100,08%, jika dibandingkan dengan Realisasi tahun 2023 sebesar Rp64.800.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp50.000,00 atau 0,08% ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 80. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	64.800.000,00	64.850.000,00	100,08	50.000,00	64.800.000,00	50.000,00	0,08
Jumlah		64.800.000,00	64.850.000,00	100,08	50.000,00	64.800.000,00	50.000,00	0,08

c) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan

Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah bersumber dari Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 realisasi sebesar Rp18.869.300,00 dari anggaran sebesar Rp19.942.200,00 mencapai 94,62%, jika dibandingkan dengan Realisasi tahun 2023 sebesar Rp12.073.500,00 mengalami peningkatan sebesar Rp6.795.800,00 atau 56,29% ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 81. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	19.942.200,00	18.869.300,00	94,62	(1.072.900,00)	12.073.500,00	6.795.800,00	56,29
Jumlah		19.942.200,00	18.869.300,00	94,62	(1.072.900,00)	12.073.500,00	6.795.800,00	56,29

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:

1) Melakukan sosialisasi untuk memasarkan hasil produksi usaha daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hasil usaha daerah sesuai dengan kemampuan dan permintaan pasar.

Walaupun realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

1) Ketersediaan sumber daya untuk memproduksi hasil usaha daerah yang berkualitas.
2) Kurangnya sosialisasi/ pemasaran atas hasil produksi usaha daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
3) Banyak pesaing yang memproduksi barang/jasa sejenis dengan harga dan kualitas yang lebih baik.

Rincian Retribusi Jasa Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 82. Rincian Retribusi Jasa Usaha per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**							
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah							
	Ret. Penyewaan Tanah dan Bangunan	289.800.000,00	280.650.000,00	96,84	(9.150.000,00)	173.700.000,00	106.950.000,00	61,57
	Retribusi Pemakaian Ruangan	36.000.000,00	24.750.000,00	68,75	(11.250.000,00)	4.750.000,00	20.000.000,00	421,05
	Jumlah	**325.800.000,00**	**305.400.000,00**	**93,74**	**(20.400.000,00)**	**178.450.000,00**	**126.950.000,00**	**71,14**
2.	**Dinas Kesehatan**							
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah							
	Ret. Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	1.800.000,00	1.200.000,00	66,67
	Jumlah	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**1.200.000,00**	**66,67**
3.	**Dinas PU PR**							
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah							
	Ret. Penyewaan Tanah dan Bangunan	15.600.000,00	16.200.000,00	103,85	600.000,00	10.950.000,00	5.250.000,00	47,95
	Ret. Pemakaian Ruangan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00	8.000.000,00	4.000.000,00	50,00
	Ret. Pemakaian Alat	103.200.000,00	103.200.000,00	100,00	0,00	103.200.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**130.800.000,00**	**131.400.000,00**	**100,46**	**600.000,00**	**122.150.000,00**	**9.250.000,00**	**7,57**
4.	**Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**							
	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah							
	Ret. Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	12.600.000,00	12.782.000,00	101,44	182.000,00	0,00	12.782.000,00	-
	Jumlah	**12.600.000,00**	**12.782.000,00**	**101,44**	**182.000,00**	**0,00**	**12.782.000,00**	**-**
5.	**Dinas Lingkungan Hidup**							
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah							
	Ret. Penyewaan Tanah dan Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00	7.200.000,00	4.800.000,00	66,67
	Ret.Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga		7.512.000,00	-	7.512.000,00		7.512.000,00	-
	Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga							
	Ret. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	-	0,00	72.258.000,00	(72.258.000,00)	(100,00)
	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah							
	Ret. Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	7.342.200,00	6.087.300,00	82,91	(1.254.900,00)	0,00	6.087.300,00	-
	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	0,00	0,00	-	0,00	10.433.400,00	(10.433.400,00)	(100,00)
	Jumlah	**19.342.200,00**	**25.599.300,00**	**132,35**	**6.257.100,00**	**89.691.400,00**	**(64.292.100,00)**	**(71,52)**
6.	**Dinas Perhubungan**							
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah							
	Ret. Penyewaan Tanah dan Bangunan	7.200.000,00	3.500.000,00	48,61	(3.700.000,00)	2.700.000,00	800.000,00	29,63
	Ret. Terminal							
	Ret. Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	0,00	0,00	-	0,00	6.300.000,00	(6.300.000,00)	(100,00)
	Ret. Tempat Khusus Parkir							
	Ret. Pelayanan Tempat Khusus Parkir	33.468.000,00	10.700.000,00	31,97	(22.768.000,00)	25.348.000,00	(14.648.000,00)	(57,79)
	Jumlah	**40.668.000,00**	**14.200.000,00**	**34,92**	**(26.468.000,00)**	**34.348.000,00**	**(20.148.000,00)**	**(58,66)**
7.	**Dinas Komunikasi dan Informatika**							
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah							
	Ret. Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	-	0,00	5.400.000,00	(5.400.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**5.400.000,00**	**(5.400.000,00)**	**(100,00)**
8.	**Dinas Koperasi, UKM, Perindag**							
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah							
	Ret. Penyewaan Tanah dan Bangunan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00	5.700.000,00	3.300.000,00	57,89
	Ret. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan							
	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	359.400.000,00	349.280.000,00	97,18	(10.120.000,00)	369.046.400,00	(19.766.400,00)	(5,36)
	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah							
	Ret. Penjualan Produksi Hasil Usaha	0,00	0,00	-	0,00	12.073.500,00	(12.073.500,00)	(100,00)

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan						)	
	Jumlah	368.400.000,00	358.280.000,00	97,25	(10.120.000,00)	386.819.900,00	(28.539.900,00)	(7,38)
9.	**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**							
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah							
	Ret. Penyewaan Tanah dan Bangunan	6.600.000,00	7.550.000,00	114,39	950.000,00	4.750.000,00	2.800.000,00	58,95
	Ret. Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila							
	Ret. Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	160.000.000,00	124.118.500,00	77,57	(35.881.500,00)	88.894.000,00	35.224.500,00	39,63
	Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga							
	Ret. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	6.500.000,00	7.750.000,00	119,23	1.250.000,00	6.775.000,00	975.000,00	14,39
	Jumlah	173.100.000,00	139.418.500,00	80,54	(33.681.500,00)	100.419.000,00	38.999.500,00	38,84
10.	**Dinas Perikanan**							
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah							
	Ret. Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	0,00	2.400.000,00	1.200.000,00	50,00
	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah							
	Ret. Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	64.800.000,00	64.850.000,00	100,08	50.000,00	64.800.000,00	50.000,00	0,08
	Jumlah	68.400.000,00	68.450.000,00	100,07	50.000,00	67.200.000,00	1.250.000,00	1,86
11.	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**							
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah							
	Ret. Penyewaan Tanah dan Bangunan	9.000.000,00	8.400.000,00	93,33	(600.000,00)	5.400.000,00	3.000.000,00	55,56
	Ret. Pemakaian Ruangan	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	(500.000,00)	(100,00)
	Ret. Rumah Potong Hewan							
	Ret. Pelayanan Rumah Potong Hewan	5.953.500,00	5.953.500,00	100,00	0,00	5.376.000,00	577.500,00	10,74
	Ret.Tempat Rekreasi dan Olahraga							
	Ret. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	47.594.000,00	47.594.000,00	100,00	0,00	0,00	47.594.000,00	-
	Jumlah	62.547.500,00	61.947.500,00	99,04	(600.000,00)	11.276.000,00	50.671.500,00	449,37
12.	**Sekretariat Daerah**							
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah							
	Ret. Penyewaan Tanah dan Bangunan	55.200.000,00	38.800.000,00	70,29	(16.400.000,00)	39.350.000,00	(550.000,00)	(1,40)
	Ret. Pemakaian Ruangan	9.000.000,00	17.450.000,00	193,89	8.450.000,00	14.000.000,00	3.450.000,00	24,64
	Jumlah	64.200.000,00	56.250.000,00	87,62	(7.950.000,00)	53.350.000,00	2.900.000,00	5,44
13.	**Badan Pendapatan Daerah**							
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah							
	Ret. Penyewaan Tanah dan Bangunan	133.500.000,00	148.000.000,00	110,86	14.500.000,00	0,00	148.000.000,00	-
	Ret. Penyewaan Tanah	72.045.000,00	69.047.500,00	95,84	(2.997.500,00)	0,00	69.047.500,00	-
	Ret. Pemakaian Ruangan	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	0,00	0,00	9.600.000,00	-
	Jumlah	215.145.000,00	226.647.500,00	105,35	11.502.500,00	0,00	226.647.500,00	-
14.	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**							
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah:							
	Ret. Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	-	0,00	98.350.000,00	(98.350.000,00)	(100,00)
	Ret. Penyewaan Tanah	0,00	0,00	-	0,00	79.789.500,00	(79.789.500,00)	(100,00)
	Ret. Pemakaian Ruangan	0,00	0,00	-	0,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	0,00	-	0,00	185.139.500,00	(185.139.500,00)	(100,00)
15.	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**							
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah:							
	Ret. Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	0,00	0,00	2.250.000,00	-
	Ret. Tempat Rekreasi & Olahraga							
	Ret. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	75.000.000,00	78.780.000,00	105,04	3.780.000,00	0,00	78.780.000,00	-
	Jumlah	77.250.000,00	81.030.000,00	104,89	3.780.000,00	0,00	81.030.000,00	-
Jumlah Keseluruhan		1.561.252.700,00	1.484.404.800,00	95,08	(76.847.900,00)	1.236.243.800,00	248.161.000,00	20,07

5.1.1.1.2.3. Retribusi Perizinan Tertentu

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan objeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan terdiri atas Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Izin Penggunanaan Tenaga Kerja Asing. Dasar hukum pemungutan retribusi ini adalah Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten Lampung Barat.

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp204.414.977,00 atau 102,21% dari target sebesar Rp200.000.000,00, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha melebihi target sebesar Rp4.414.977,00 atau 2,21%. Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023 yang jumlahnya tercatat Rp225.191.728,00 terlihat penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp20.776.751,00) atau (9,23%).

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2024 dan 2023 pada tabel berikut.

Tabel 83. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	22.609.000,00	(22.609.000,00)	(100,00)
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00	204.414.977,00	102,21	4.414.977,00	202.582.728,00	1.832.249,00	0,90
Jumlah		200.000.000,00	204.414.977,00	102,21	4.414.977,00	225.191.728,00	(20.776.751,00)	(9,23)

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2024 antara lain:

a. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Retribusi Izin Usaha Perikanan Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut lagi.

Realisasi Retribusi Izin Usaha Perikanan Tahun 2024 tidak memiliki anggaran dan realisasi pendapatan. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp22.609.000,00) atau (100,00%) jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Usaha Perikanan Tahun 2023 sebesar Rp22.609.000,00.

b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung merupakan retribusi atas jasa pelayanan pemberian izin yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun 2024 adalah sebesar Rp204.414.977,00 atau 102,21% dari target yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00, dengan demikian realisasi Retribusi ini melebihi target sebesar Rp4.414.977,00 atau 2,21%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.832.249,00 atau 0,90% jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun 2023 sebesar Rp202.582.728,00.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:

1) Melakukan sosialisasi tentang Perizinan Bangunan Gedung dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat.
2) Perbaikan tarif retribusi perizinan bangunan gedung yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3) Mempermudah pengurusan Perizinan Bangunan Gedung dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
4) Perbaikan tatakelola pemungutan dan pembayaran retribusi bangunan gedung.

Walaupun realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

1) Kurangnya kesadaran masyakarat untuk mengajukan perizinan bangunan gedung, sesuai dengan ketentuan yang ada.
2) Peraturan Daerah tentang Perizinan Bangunan Gedung masih tergolong baru, sehingga masih belum banyak diketahui oleh masyarakat.
3) Kurangnya sanksi atas pelanggaran pendirian bangunan gedung.
4) Kurangnya tenaga ahli yang dapat dijadikan tenaga teknis dalam penerbitan Perizinan Bangunan Gedung.

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 pada tabel berikut.

Tabel 84. Rincian Retribusi Perizinan Tertentu Per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Dinas PU PR							
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00	204.414.977,00	102,21	4.414.977,00	202.582.728,00	1.832.249,00	0,90
	Jumlah	200.000.000,00	204.414.977,00	102,21	4.414.977,00	202.582.728,00	1.832.249,00	0,90
2	Dinas Perikanan							
	Retribusi Izin Usaha Perikanan							
	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	-	0,00	22.609.000,00	(22.609.000,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	0,00	-	0,00	22.609.000,00	(22.609.000,00)	(100,00)
	Jumlah Seluruhnya	200.000.000,00	204.414.977,00	102,21	4.414.977,00	225.191.728,00	(20.776.751,00)	(9,23)

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan sumber PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada Tahun Anggaran 2024, pendapatan ini berasal dari hasil penempatan modal pada PT Bank Lampung, pembagian laba ditahan dari PT BPRS Lampung Barat.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp5.854.018.934,91 atau 100,00% dari target sebesar Rp5.854.018.934,00. Apabila realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang jumlahnya tercatat Rp5.653.827.320,95 terlihat penerimaan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp200.191.613,96 atau 3,54%.

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 pada tabel berikut.

Tabel 85 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)							
	PT Bank Lampung	5.200.031.196,00	5.200.031.196,51	100,00	0,51	4.895.841.920,94	304.189.275,57	6,21
	PT BPR Syariah Lampung Barat	653.987.738,00	653.987.738,40	100,00	0,40	757.985.400,01	(103.997.661,61)	(13,72)
Jumlah		5.854.018.934,00	5.854.018.934,91	100,00	0,91	5.653.827.320,95	200.191.613,96	3,54

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan masing-masing objek dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD – PT Bank Lampung

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada PT Bank Lampung Tahun Anggaran 2024, ditargetkan sebesar Rp5.200.031.196,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.200.031.196,51 atau 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp4.895.841.920,94 terjadi kenaikan sebesar Rp304.189.275,57 atau 6,21%. Target dan realisasi ini mengacu pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Lampung Tahun 2024.

b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD – PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda)

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda) Tahun Anggaran 2024, ditargetkan sebesar Rp653.987.738,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp653.987.738,40 atau 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp757.985.400,01 terjadi penurunan sebesar (Rp103.997.661,61) atau (13,72%). Target dan realisasi ini mengacu pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda) Tahun 2023. Dividen ini adalah dividen Tahun 2023 yang disetor pada tahun 2024.

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD yang Sah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Penerimaan terdapat pada 4 (empat) perangkat daerah yaitu : 1) Dinas Kesehatan; 2) RSUD Alimuddin Umar; 3) Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan; 4) Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp47.981.878.678,90 atau 105,49% dari target sebesar Rp45.482.770.679,32, dengan demikian realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah melebihi target sebesar Rp2.499.107.999,58 atau 5,49%. Apabila realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 yang jumlahnya tercatat Rp45.934.744.371,89 terlihat penerimaan Lain-lain PAD yang sah di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp2.047.134.307,01 atau 4,46%.

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 pada tabel berikut

Tabel 86. Lain-Lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	∞	0,00	200.563.588,00	(200.563.588,00)	(100,00)
2.	Jasa Giro	1.888.895.000,00	2.086.692.088,95	110,47	197.797.088,95	1.465.965.881,46	620.726.207,49	42,34
3.	Pendapatan Bunga	840.821.917,86	965.301.990,16	114,80	124.480.072,30	2.135.069.676,21	(1.169.767.686,05)	(54,79)
4.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.133.278.118,46	3.743.329.692,53	175,47	1.610.051.574,07	1.886.726.648,86	1.856.603.043,67	98,40
5.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	∞	0,00	6.372.100,00	(6.372.100,00)	(100,00)
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00	3.780.393,00	7,56	(46.219.607,00)	0,00	3.780.393,00	∞
7.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	204.360,00	1.139.695,00	557,69	935.335,00	1.376.257,00	(236.562,00)	(17,19)
8.	Pendapatan dari Pengembalian	266.583.000,00	235.184.653,00	88,22	(31.398.347,00)	269.290.804,00	(34.106.151,00)	(12,67)
9.	Pendapatan BLUD	40.262.413.283,00	40.936.131.575,00	101,67	673.718.292,00	39.956.934.804,00	979.196.771,00	2,45
10.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	40.575.000,00	10.318.591,26	25,43	(30.256.408,74)	12.444.612,36	(2.126.021,10)	(17,08)
	Jumlah	45.482.770.679,32	47.981.878.678,90	105,49	2.499.107.999,58	45.934.744.371,89	2.047.134.307,01	4,46

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Hasil Penjualan BMD yang Dipisahkan

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dalam merupakan penjualan inventaris/barang bekas milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang telah dihapuskan karena usia pemakaiannya bertambah seperti kendaraan bermotor, gedung dan bangunan lainnya serta inventaris kantor yang tidak terpakai.

Kabupaten Lampung Barat pada Tahun Anggaran 2024 tidak memiliki anggaran dan realisasi atas Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp200.563.588,00, maka realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp200.563.588,00) atau (100,00%). Berikut disajikan tabel Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Dipisahkan.

Tabel 87. Hasil Penjualan BMD yang Dipisahkan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	200.563.588,00	(200.563.588,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	200.563.588,00	(200.563.588,00)	(100,00)

b. Jasa Giro

Jasa Giro Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.888.895.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp2.086.692.088,95 atau 110,47%, dengan demikian realisasi Jasa Giro melebihi target sebesar Rp197.797.088,95 atau 10,47%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Jasa Giro Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp1.465.965.881,46, maka realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp620.726.207,49 atau 42,34%. Berikut disajikan tabel Rincian Sumber Penerimaan Jasa Giro Tahun 2024 dan 2023.

Tabel 88. Rincian Sumber Penerimaan Jasa Giro TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	(%)
				(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Jasa Giro sumber RKUD	2.004.054.074,34	1.419.187.108,77	584.866.965,57	41,21
2.	Jasa Giro sumber Bendahara OPD	9.341.238,60	23.214.527,14	(13.873.288,74)	(59,76)
3.	Jasa Giro sumber BOS	11.093.731,84	4.667.762,72	6.425.969,12	137,67
4.	Jasa Giro sumber Lainnya-Lembaga/Organisasi/Badan Hukum	4.935.133,95	3.173.509,49	1.761.624,46	55,51
5.	Jasa Giro sumber Lainnya-Sekolah	9.429.586,94	2.292.511,61	7.137.075,33	311,32
6.	Jasa Giro sumber Pekon/Desa/Kelurahan	22.756.307,48	13.430.461,73	9.325.845,75	69,44
7.	Jasa Giro Puskesmas	25.082.016,00	0,00	25.082.016,00	-
	Jumlah	2.086.692.088,95	1.465.965.881,46	620.726.207,49	42,34

c. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp840.821.917,86. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp965.301.990,16 atau 114,80%, dengan demikian realisasi Pendapatan Bunga melebihi target sebesar Rp124.480.072,30 atau 14,80%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bunga Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp2.135.069.676,21, maka realisasi Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp1.169.767.686,05) atau (54,79%).

Rincian pendapatan bunga tahun 2024 di sajikan pada tabel berikut

Tabel 89. Rincian Pendapatan Bunga Tahun 2024

No	Uraian	Lembaga Keuangan Bank	Rekening / Nomor Seri	Nominal	Tanggal		Bunga
					Penempatan	Penutupan	
1.	Deposito	PT Bank Lampung	3870401005872 / AA1032027	10.000.000.000,00	08 Mei 2024	14 Agt 2024	138.630.136,99
2.	Deposito	PT Bank Lampung	3870401005885 / AA1032028	10.000.000.000,00	08 Mei 2024	09 Des 2024	322.465.753,43
3.	Deposito	PT Bank Lampung	3870401005897 / AA1032029	10.000.000.000,00	08 Mei 2024	09 Des 2024	323.972.602,75
4.	Deposito	PT Bank Lampung	3870401005911 / AA1032032	10.000.000.000,00	5 Sep 2024	05 Des 2024	138.630.136,99
5.	Remunerasi TDF	Kantor Pusat Bank Indonesia	519000289960	41.603.360,00	29 Des 2023	06 Des 2024	41.603.360,00
	Jumlah			40.041.603.360,00			965.301.990,16

d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp2.133.278.118,46. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp3.743.329.692,53 atau 175,47%, dengan demikian realisasi Peneriman Tuntutan Ganti Kerugian Daerah melebihi target sebesar Rp1.610.051.574,07 atau 75,47%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.886.726.648,86, maka realisasi Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp1.856.603.043,67 atau 98,40%.

Rincian pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun 2024 dan 2023 di sajikan pada tabel berikut.

Tabel 90. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.850.000,00	0,00	0,00	(1.850.000,00)	39.300.000,00	(39.300.000,00)	(100,00)
2.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.131.428.118,46	3.743.329.692,53	175,63	1.611.901.574,07	1.847.426.648,86	1.895.903.043,67	102,62
	Jumlah	2.133.278.118,46	3.743.329.692,53	175,47	1.610.051.574,07	1.886.726.648,86	1.856.603.043,67	98,40

e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Anggaran 2024 ditargetkan Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 atau 100,00%.
Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp6.372.100,00, maka realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp6.372.100,00) atau (100,00%).

Tabel 91 Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372.100,00	(6.372.100,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	6.372.100,00	(6.372.100,00)	(100,00)

f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp50.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.780.393,00 atau 7,56%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp0,00, maka realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp3.780.393,00.

Tabel 92 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00	3.780.393,00	7,56	(46.219.607,00)	0,00	3.780.393,00	-
Jumlah		50.000.000,00	3.780.393,00	7,56	(46.219.607,00)	0,00	3.780.393,00	-

g. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp204.360,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.139.695,00 atau 557,69%, realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah melebihi target sebesar Rp935.335,00 atau 457,69%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp1.376.257,00, maka realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp236.562,00) atau (17,19%).

Tabel 93 Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	204.360,00	1.139.695,00	557,69	935.335,00	1.376.257,00	(236.562,00)	(17,19)
Jumlah		204.360,00	1.139.695,00	557,69	935.335,00	1.376.257,00	(236.562,00)	(17,19)

h. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp266.583.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp235.184.653,00 atau 88,22%, realisasi Pendapatan dari Pengembalian tidak mencapai target sebesar (Rp31.398.347,00) atau (11,78%).

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp269.290.804,00, maka realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp34.106.151,00) atau (12,67%).

Tabel 94. Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	3.858.000,00	5.518.000,00	143,03	1.660.000,00	1.250.000,00	4.268.000,00	341,44
2.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	200.000.000,00	222.681.005,00	111,34	22.681.005,00	264.069.435,00	(41.388.430,00)	(15,67)
3.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	62.725.000,00	6.985.648,00	11,14	(55.739.352,00)	1.381.369,00	5.604.279,00	405,70
4.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590.000,00	(2.590.000,00)	(100,00)
Jumlah		266.583.000,00	235.184.653,00	88,22	(31.398.347,00)	269.290.804,00	(34.106.151,00)	(12,67)

i. Pendapatan BLUD

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki 16 (enam belas) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terdiri atas : a) BLUD RSUD Alimuddin Umar yang mulai efektif menerapkan Pola Keuangan – BLUD (PPK-BLUD) pada tahun 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/148/KPTS/03/2012; b) 15 (lima belas) PPK BLUD Puskesmas yang mulai efektif menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Daerah (PPK BLUD) pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/382/KPTS/III.02/2020.

Adapun tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kinerja seperti layanan kesehatan.

Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Daerah.

Secara periodik BLUD mengajukan pengajuan proses pengesahan pendapatan dan belanja BLUD dengan mengajukan SP3BP kepada BUD. Pengajuan proses pengesahan pendapatan BLUD secara periodik tersebut dilakukan terhadap pendapatan BLUD yang secara transaksionalnya pada tahun anggaran berjalan telah terlebih dahulu diakui pendapatannya berdasarkan kas yang diterima BLUD.

Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp40.262.413.283,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp40.936.131.575,00 atau 101,67%, realisasi Pendapatan dari Pengembalian melebihi target sebesar Rp673.718.292,00 atau 1,67%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan BLUD

Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp39.956.934.804,00, maka realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp979.196.771,00 atau 2,45%.

Berikut disajikan tabel Rincian Pendapatan BLUD dan Pendapatan BLUD per OPD sebagai berikut.

Tabel 95. Rincian Pendapatan BLUD TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00		39.956.934.804,00	(39.956.934.804,00)	(100,00)
2.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	40.138.763.283,00	40.856.265.166,00	101,79	717.501.883,00	0,00	40.856.265.166,00	-
3.	Pendapatan BLUD dari Hasil KerjaBank Sama dengan Pihak Lain	75.700.000,00	64.640.771,00	85,39	(11.059.229,00)	0,00	64.640.771,00	-
4.	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	47.950.000,00	15.225.638,00	31,75	(32.724.362,00)	0,00	15.225.638,00	-
	Jumlah	40.262.413.283,00	40.936.131.575,00	101,67	673.718.292,00	39.956.934.804,00	979.196.771,00	2,45

Tabel 96. Pendapatan BLUD per OPD TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	RSUD Alimuddin Umar	22.686.318.000,00	24.457.700.725,00	107,81	1.771.382.725,00	24.316.518.661,00	141.182.064,00	0,50
2.	Puskesmas Sumberjaya	1.170.487.349,00	1.354.547.323,00	115,73	184.059.974,00	1.198.733.859,00	155.813.464,00	13,00
3.	Puskesmas Kebun Tebu	1.402.199.840,00	1.326.872.458,00	94,63	(75.327.382,00)	1.154.036.576,00	172.835.882,00	14,98
4.	Puskesmas Gedung Surian	1.091.500.000,00	1.056.829.577,00	96,73	(35.670.423,00)	980.846.506,00	74.983.071,00	7,64
5.	Puskesmas Air Hitam	564.022.424,00	536.207.433,00	95,07	(27.814.991,00)	504.953.499,00	31.253.934,00	6,19
6.	Puskesmas Fajar Bulan	1.757.600.231,00	1.775.235.151,00	101,00	17.634.920,00	1.513.985.675,00	261.249.476,00	17,62
7.	Puskesmas Sekincau	1.648.753.249,00	1.220.719.749,00	74,04	(428.033.500,00)	1.151.552.439,00	69.167.310,00	6,01
8.	Puskesmas Pagar Dewa	782.212.736,00	739.136.677,00	94,49	(43.076.059,00)	679.519.834,00	59.616.843,00	8,77
9.	Puskesmas Batu Ketuks	965.907.220,00	937.587.082,00	97,07	(28.320.138,00)	765.014.279,00	172.572.803,00	22,55
10.	Puskesmas Kenali	1.179.771.960,00	1.130.434.071,00	95,82	(49.337.889,00)	1.074.891.475,00	55.542.596,00	5,17
11.	Puskesmas Batu Brak	1.195.301.057,00	932.546.963,00	78,02	(262.754.094,00)	983.258.492,00	(50.711.529,00)	(5,16)
12.	Puskesmas Bandar Negeri Suoh	1.300.000.000,00	1.125.886.487,00	86,61	(174.113.513,00)	1.164.970.210,00	(39.083.723,00)	(3,35)
13.	Puskesmas Srimulyo	1.141.880.000,00	969.476.678,00	84,90	(172.403.322,00)	1.025.885.343,00	(56.408.665,00)	(5,50)
14.	Puskesmas Liwa	1.772.054.887,00	1.593.607.280,00	89,93	(178.447.607,00)	1.602.465.772,00	(8.858.492,00)	(0,55)
15.	Puskesmas Buay Nyerupa	1.104.512.000,00	1.279.604.077,00	115,85	175.092.077,00	1.364.775.025,00	(85.170.948,00)	(6,24)
16.	Puskesmas Lombok	499.692.330,00	500.739.844,00	100,17	847.514,00	475.527.159,00	25.212.685,00	5,30
	Jumlah	40.262.413.283,00	40.936.131.575,00	101,67	673.718.292,00	39.956.934.804,00	979.196.771,00	2,45

j. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp40.575.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.318.591,26 atau 25,43%, realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir tidak mencapai target sebesar (Rp30.256.408,74) atau (74,57%).

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp12.444.612,36, maka realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp2.126.021,10) atau (17,08%).

Tabel 97 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	40.575.000,00	10.318.591,26	25,43	(30.256.408,74)	12.444.612,36	(2.126.021,10)	(17,08)
Jumlah		40.575.000,00	10.318.591,26	25,43	(30.256.408,74)	12.444.612,36	(2.126.021,10)	(17,08)

Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 98. Lain-Lain PAD yang Sah Per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Dinas Kesehatan:							
	Pendapatan BLUD	17.576.095.283,00	16.478.430.850,00	93,75	(1.097.664.433,00)	15.640.416.143,00	838.014.707,00	5,36
	Jumlah	17.576.095.283,00	16.478.430.850,00	93,75	(1.097.664.433,00)	15.640.416.143,00	838.014.707,00	5,36
2.	RSUD Alimuddin Umar:							
	Pendapatan BLUD	22.686.318.000,00	24.457.700.725,00	107,81	1.771.382.725,00	24.316.518.661,00	141.182.064,00	0,58
	Jumlah	22.686.318.000,00	24.457.700.725,00	107,81	1.771.382.725,00	24.316.518.661,00	141.182.064,00	0,58
3.	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan							
	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	40.575.000,00	10.318.591,26	25,43	(30.256.408,74)	12.444.612,36	(2.126.021,10)	(17,08)
	Jumlah	40.575.000,00	10.318.591,26	25,43	(30.256.408,74)	12.444.612,36	(2.126.021,10)	(17,08)
4.	BKAD							
	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	200.563.588,00	(200.563.588,00)	(100,00)
	Jasa Giro	1.888.895.000,00	2.086.692.088,95	110,47	197.797.088,95	1.465.965.881,46	620.726.207,49	42,34
	Pendapatan Bunga	840.821.917,86	965.301.990,16	114,80	124.480.072,30	2.135.069.676,21	(1.169.767.686,05)	(54,79)
	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.133.278.118,46	3.743.329.692,53	175,47	1.610.051.574,07	1.886.726.648,86	1.856.603.043,67	98,40
	Penerimaan Konsesi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372.100,00	(6.372.100,00)	(100,00)
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00	3.780.393,00	7,56	(46.219.607,00)	0,00	3.780.393,00	-
	Pendapatan Denda Pajak Daerah	204.360,00	1.139.695,00	557,69	935.335,00	1.376.257,00	(236.562,00)	(17,19)
	Pendapatan dari Pengembalian	266.583.000,00	235.184.653,00	88,22	(31.398.347,00)	269.290.804,00	(34.106.151,00)	(12,67)
	Jumlah	5.179.782.396,32	7.035.428.512,64	135,82	1.855.646.116,32	5.965.364.955,53	1.070.063.557,11	17,94
Jumlah		45.482.770.679,32	47.981.878.678,90	105,49	2.499.107.999,58	45.934.744.371,89	2.047.134.307,01	4,46

5.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Serta Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa Pemungutan oleh Pemerintah Provinsi Lampung atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB

KB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok sebagian diberikan kepada Kabupaten/Kota.

Realisasi Pendapatan Transfer sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp1.039.368.180.706,00 atau 98,97% dari target sebesar Rp1.050.157.430.577,60, dengan demikian realisasi penerimaan Pendapatan Transfer kurang dari target sebesar (Rp10.789.249.871,60) atau (1,03%). Apabila realisasi Pendapatan Transfer tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 yang jumlahnya tercatat Rp917.087.678.010,00 terlihat penerimaan Pendapatan Transfer di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp122.280.502.696,00 atau 13,33%.

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Pendapatan Transfer yang Sah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 pada tabel berikut.

Tabel 99. Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat							
	a. Dana Perimbangan	825.127.934.500,00	818.068.561.394,00	99,14	(7.059.373.106,00)	731.983.070.112,00	86.085.491.282,00	11,76
	b. Insentif Fiskal	20.106.738.000,00	20.106.738.000,00	100,00	0,00	5.893.114.000,00	14.213.624.000,00	241,19
	c. Dana Desa	118.449.735.000,00	118.449.735.000,00	100,00	0,00	117.770.480.000,00	679.255.000,00	0,58
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah							
	a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	86.473.023.077,60	82.743.146.312,00	95,69	(3.729.876.765,60)	61.441.013.898,00	21.302.132.414,00	34,67
Jumlah		1.050.157.430.577,60	1.039.368.180.706,00	98,97	(10.789.249.871,60)	917.087.678.010,00	122.280.502.696,00	13,33

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan bagian daerah dari Pendapatan Transfer Tahun 2024 sebagai berikut.

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp956.625.034.394,00 terdiri atas Dana Perimbangan sebesar Rp818.068.561.394,00, Dana Insentif Fiskal sebesar Rp20.106.738.000,00, dan Dana Desa sebesar Rp118.449.735.000,00 masing-masing dijelaskan dibawah ini.

5.1.1.2.1.1. Dana Perimbangan

Anggaran dan realisasi penerimaan Dana Perimbangan pada Kabupaten Lampung Barat untuk Periode TA 2024 dan TA 2023 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 100. Dana Perimbangan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DBH Pajak	6.667.969.000,00	6.700.879.000,00	100,19	12.910.000,00	10.948.460.370,00	(4.247.581.370,00)	(38,80)
2	DBH Bukan Pajak/SDA	12.427.766.000,00	12.427.766.000,00	100,00	0,00	12.618.632.104,00	(190.866.104,00)	(1,51)
3	Dana Alokasi Umum	543.123.256.000,00	541.231.171.108,00	99,65	(1.892.084.892,00)	514.643.114.814,00	26.588.056.294,00	5,17
4	Dana Alokasi Khusus Fisik	120.727.108.500,00	119.832.295.786,00	99,26	(894.812.714,00)	54.035.898.900,00	65.796.396.886,00	121,76
5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	142.161.835.000,00	137.876.449.500,00	96,99	(4.285.385.500,00)	139.736.963.924,00	(1.860.514.424,00)	(1,33)
Jumlah		825.127.934.500,00	818.068.561.394,00	99,14	(7.059.373.106,00)	731.983.070.112,00	86.085.491.282,00	11,76

Untuk lebih rinci masing-masing penerimaan Dana Perimbangan pada TA 2024 dan 2023 dijelaskan pada uraian dibawah ini.

5.1.1.2.1.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan kepada Kabupaten Lampung Barat untuk periode TA 2024 dan 2023, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 101. Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	DBH Pajak Bumi & Bangunan	1.786.306.000,00	1.786.306.000,00	100,00	0,00	6.089.005.142,00	(4.302.699.142,00)	(70,66)
2.	DBH PPh Pasal 21	4.609.734.000,00	4.609.734.000,00	100,00	0,00	4.580.135.674,00	29.598.326,00	0,65
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/ WPOPDN	165.719.000,00	165.719.000,00	100,00	0,00	167.793.417,00	(2.074.417,00)	(1,24)
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau	126.210.000,00	139.120.000,00	110,23	12.910.000,00	111.526.137,00	27.593.863,00	24,74
	Jumlah	6.687.969.000,00	6.700.879.000,00	100,19	12.910.000,00	10.948.460.370,00	(4.247.581.370,00)	(38,80)

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp6.687.969.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp6.700.879.000,00 atau 100,19%, dengan demikian Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak tahun 2024 telah melebihi target sebesar Rp12.910.000,00 atau 0,19%.

Realisasi Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp4.247.581.370,00) atau (38,80%) jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp10.948.460.370,00.

5.1.1.2.1.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam

DBH Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan kepada Kabupaten Lampung Barat untuk periode TA 2024 dan 2023, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 102. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		+/-			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	DBH SDA Minyak Bumi	3.382.434.000,00	3.382.434.000,00	100,00	0,00	7.456.819.873,00	(4.074.385.873,00)	(54,64)
2.	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	3.862.774.000,00	3.862.774.000,00	100,00	0,00	3.083.850.360,00	778.923.640,00	25,26
3.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	189.229.000,00	189.229.000,00	100,00	0,00	253.164.497,00	(63.935.497,00)	(25,25)
4.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	0,00	0,00	69.384.010,00	(69.384.010,00)	(100,00)
5.	DBH SDA Provisi Sumber Daya Hutan	216.817.000,00	216.817.000,00	100,00	0,00	256.911.153,00	(40.094.153,00)	(15,61)
6.	DBH SDA Perikanan	1.097.155.000,00	1.097.155.000,00	100,00	0,00	1.498.502.211,00	(401.347.211,00)	(26,78)
7.	DBH Sawit	3.679.357.000,00	3.679.357.000,00	100,00	0,00	0,00	3.679.357.000,00	-
	Jumlah	12.427.766.000,00	12.427.766.000,00	100,00	0,00	12.618.632.104,00	(190.866.104,00)	(1,51)

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp12.427.766.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp12.427.766.000,00 atau 100,00%. Realisasi Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp190.866.104,00) atau (1,51%) jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer

Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp12.618.632.104,00.

5.1.1.2.1.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, rincian dana DAU kepada Kabupaten Lampung Barat untuk TA 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 103. Rincian DAU Berdasarkan Penggunaannya TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Tidak ditentukan penggunaannya	434.843.839.000	434.843.839.000	100,00	0,00	380.756.141.814,00	54.087.697.186,00	14,21
2.	Penggajian PPPK	9.501.273.000,00	7.609.188.108,00	80,09	(1.892.084.892,00)	6.989.766.000,00	619.422.108,00	8,86
3.	Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
4.	Bidang Pendidikan	46.169.037.000	46.169.037.000	100,00	0,00	56.968.257.000,00	(10.799.220.000,00)	(18,96)
5.	Bidang Kesehatan	29.483.685.000	29.483.685.000	100,00	0,00	44.853.018.000,00	(15.369.333.000,00)	(34,27)
6.	Bidang Pekerjaan Umum	16.969.646.000	16.969.646.000	100,00	0,00	24.075.932.000,00	(7.106.286.000,00)	(29,52)
7.	Dukungan THR & Gaji ke-13 Bagi Guru ASN	5.155.776.000	5.155.776.000	100,00	0,00	0,00	5.155.776.000,00	-
	Jumlah	543.123.256.000,00	541.231.171.108,00	99,65	(1.892.084.892,00)	514.643.114.814,00	26.588.056.294,00	5,17

Transfer DAU Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp543.123.256.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp541.231.171.108,00 atau 99,65%, dengan demikian Penerimaan Transfer DAU tahun 2024 tidak mencapai target sebesar (Rp1.892.084.892,00) atau (0,35%).

DAU yang tidak mencapai target adalah DAU untuk Penggajian **PPPK**. Daerah dianggarkan sebesar Rp9.501.273.000,00 terealisasi sebesar Rp7.609.188.108,00 hal ini karena telah sesuai dengan realisasi kebutuhan penggajian PPPK pada Kabupaten Lampung Barat.

Realisasi Penerimaan Transfer Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp26.588.056.294,00 atau 5,17% jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp514.643.114.814,00.

5.1.1.2.1.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus diatur dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2024, DAK yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yaitu jenis DAK Fisik (yaitu jenis DAK Fisik Reguler, Penugasan) dan DAK Non Fisik. Penyaluran DAK Fisik dan DAK Non Fisik dilaksanakan setelah daerah menyampaikan persyaratan penyaluran secara lengkap dan benar.

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp262.888.943.500,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai

Rp257.708.745.286,00 atau 98,03%, dengan demikian Penerimaan Dana Transfer Khusus - DAK tahun 2024 tidak mencapai target sebesar (Rp5.180.198.214,00) atau (1,97%).

Realisasi Penerimaan Dana Transfer Khusus - DAK Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp63.935.882.462,00 atau 33,00% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Khusus - DAK Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp193.772.862.824,00.

Rincian penerimaan DAK periode TA. 2024 dan TA. 2023 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 104. Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DAK Fisik	120.727.108.500,00	119.832.295.786,00	99,26	(894.812.714,00)	54.035.898.900,00	65.796.396.886,00	121,76
2	DAK Non Fisik	142.161.835.000,00	137.876.449.500,00	96,99	(4.285.385.500,00)	139.736.963.924,00	(1.860.514.424,00)	(1,33)
Jumlah		262.888.943.500,00	257.708.745.286,00	98,03	(5.180.198.214,00)	193.772.862.824,00	63.935.882.462,00	33,00

Rincian Dana Alokasi Khusus pada masing – masing bidang kegiatan dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 105. Dana Alokasi Khusus per Bidang Kegiatan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DAK FISIK							
	- Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	896.961.000,00	894.596.000,00	99,74	(2.365.000,00)	1.059.883.000,00	(165.287.000,00)	(15,59)
	- Bidang Pendidikan-Reguler-SD	6.613.008.000,00	6.570.203.034,00	99,35	(42.804.966,00)	4.201.354.000,00	2.368.849.034,00	56,38
	- Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.316.148.000,00	3.306.813.279,00	99,72	(9.334.721,00)	3.515.858.800,00	(209.045.521,00)	(5,95)
	- Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.183.774.000,00	10.137.377.300,00	99,54	(46.396.700,00)	0,00	10.137.377.300,00	-
	- Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	512.660.000,00	469.130.000,00	91,51	(43.530.000,00)	0,00	469.130.000,00	-
	- Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	3.321.738.000,00	3.310.290.277,00	99,66	(11.447.723,00)	10.019.159.187,00	(6.708.868.910,00)	(66,95)
	- Bidang Pariwisata-Penugasan	1.638.787.500,00	1.629.450.640,00	99,43	(9.336.860,00)	2.302.102.913,00	(672.652.273,00)	(29,22)
	- Bidang Jalan-Reguler-Jalan	15.876.742.000,00	15.722.129.000,00	99,03	(154.613.000,00)	30.849.503.000,00	(15.127.374.000,00)	(49,04)
	- Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	3.355.207.000,00	3.343.600.000,00	99,65	(11.607.000,00)	1.727.200.000,00	1.616.400.000,00	93,58
	- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	5.012.093.000,00	4.948.937.256,00	98,74	(63.145.744,00)	0,00	4.948.937.256,00	-
	- Bidang Perdagangan-Penugasan	70.000.000.000,00	69.499.769.000,00	99,29	(500.231.000,00)	0,00	69.499.769.000,00	-
	- Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	-	0,00	360.858.000,00	(360.858.000,00)	(100,00)
	Sub Jumlah	120.727.108.500,00	119.832.295.786,00	99,26	(894.812.714,00)	54.035.898.900,00	65.796.396.886,00	121,76
2	DAK NON FISIK							
	- BOS Reguler	37.942.350.000,00	37.853.439.558,00	99,77	(88.910.442,00)	38.075.219.937,00	(221.780.379,00)	(0,58)
	- BOS Kinerja	1.315.000.000,00	1.315.000.000,00	100,00	0,00	1.550.428.750,00	(235.428.750,00)	(15,18)
	- TPG PNSD	66.253.518.000,00	63.856.385.000,00	96,38	(2.397.133.000,00)	61.436.351.940,00	2.420.033.060,00	3,94
	- Tamsil Guru PNSD	1.119.518.000,00	1.119.518.000,00	100,00	0,00	1.430.574.321,00	(311.056.321,00)	(21,74)
	- TKG PNSD	404.163.000,00	321.177.000,00	79,47	(82.986.000,00)	297.750.063,00	23.426.937,00	7,87
	- BOP PAUD	3.021.330.000,00	3.013.095.000,00	99,73	(8.235.000,00)	3.307.420.000,00	(294.325.000,00)	(8,90)
	- BOP Pendidikan Kesetaraan	1.153.140.000,00	1.084.350.602,00	94,03	(68.789.398,00)	1.323.690.000,00	(239.339.398,00)	(18,08)
	- BOKKB-BOK	21.588.602.000,00	20.668.793.081,00	95,74	(919.808.919,00)	22.108.085.456,00	(1.439.292.375,00)	(6,51)
	- BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	364.744.000,00	364.744.000,00	100,00	0,00	0,00	364.744.000,00	-

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	- BOKKB-BOKB	4.853.514.000,00	4.513.701.365,00	93,00	(339.812.635,00)	4.794.125.304,00	(280.423.939,00)	(5,85)
	- PK2UKM	514.556.000,00	514.556.000,00	100,00	0,00	417.482.653,00	97.073.347,00	23,25
	- Dana Pelayanan Kepariwisataan	1.091.220.000,00	1.040.018.900,00	95,31	(51.201.100,00)	977.853.000,00	62.165.900,00	6,36
	- Fasilitasi Penanaman Modal	415.178.000,00	400.979.600,00	96,58	(14.198.400,00)	388.358.000,00	12.621.600,00	3,25
	- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	268.224.500,00	66,07	(137.775.500,00)	229.205.100,00	39.019.400,00	17,02
	- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	∞	0,00	650.419.400,00	(650.419.400,00)	(100,00)
	- Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.719.002.000,00	1.542.466.894,00	89,73	(176.535.106,00)	2.750.000.000,00	(1.207.533.106,00)	(43,91)
	Sub Jumlah	142.161.835.000,00	137.876.449.500,00	96,99	(4.285.385.500,00)	139.736.963.924,00	(1.860.514.424,00)	(1,33)
TOTAL DAK		262.888.943.500,00	257.708.745.286,00	98,03	(5.180.198.214,00)	193.772.862.824,00	63.935.882.462,00	33,00

Pendapatan DAK Non Fisik-BOS Reguler sebesar Rp37.853.439.558,00 terdiri atas:

- DAK Non Fisik – BOS Reguler untuk SD Negeri Rp 23.070.316.179,00
- DAK Non Fisik – BOS Reguler untuk SMP Negeri Rp 11.277.371.379,00
- DAK Non Fisik – BOS Reguler untuk SD Swasta Rp 2.411.029.800,00
- DAK Non Fisik – BOS Reguler untuk SMP Swasta Rp 1.094.722.200,00

Pendapatan DAK Non Fisik-BOS Kinerja sebesar Rp1.315.000.000,00 terdiri atas

- DAK Non Fisik – BOS Reguler untuk SD Negeri Rp 652.500.000,00
- DAK Non Fisik – BOS Reguler untuk SMP Negeri Rp 480.000.000,00
- DAK Non Fisik – BOS Reguler untuk SD Swasta Rp 112.500.000,00
- DAK Non Fisik – BOS Reguler untuk SMP Swasta Rp 70.000.000,00

Pendapatan BOS pada Sekolah Negeri akan dibelanjakan berupa belanja Barang dan Jasa Bos, Belanja Modal BOS, sedangkan pendapatan yang diterima oleh Sekolah Swasta langsung dibelanjakan berupa Belanja Hibah Dana BOS senilai jumlah yang diterima dengan bukti belanja yaitu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai dengan Pasal 12 Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah.

5.1.1.2.1.2. Insentif Fiskal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Insentif Fiskal dapat diberikan kepada daerah atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja berdasarkan kriteria pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan Umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.

Penerimaan Insentif Fiskal pada Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 senilai Rp14.535.665.000,00 dan PMK Nomor 295 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal TA 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp5.571.073.000,00.

Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp20.106.738.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp20.106.738.000,00 atau 100,00%.

Realisasi Penerimaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 juga mengalami peningkatan sebesar Rp14.213.624.000,00 atau 241,19% jika dibandingkan dengan realisasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp5.893.114.000,00, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 106. Insentif Fiskal TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Dana Insentif Daerah – Insentif Fiskal	20.106.738.000,00	20.106.738.000,00	100,00	0,00	5.893.114.000,00	14.213.624.000,00	241,19
Jumlah		20.106.738.000,00	20.106.738.000,00	100,00	0,00	5.893.114.000,00	14.213.624.000,00	241,19

5.1.1.2.1.3. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Daerah hanya mencatat penerimaan dan langsung mencatat pengeluarannya, adapun uang secara fisik langsung dari RKUN ke Rekening Kas Desa.

Penerimaan Dana Desa diatur dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 dan KMK 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 .

Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp118.449.735.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp118.449.735.000,00 atau 100,00%.

Realisasi Penerimaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp679.255.000,00 atau 0,58% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp117.770.480.000,00.

Rincian penerimaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada abel berikut.

Tabel 107. Dana Desa/ Pekon TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Dana Desa							
	Rincian							
	- Perpres 76 / 2023	114.547.803.000,00	114.547.803.000,00	100,00	0,00	0,00	114.547.803.000,00	100,00
	- KMK 352 / 2024	3.901.932.000,00	3.901.932.000,00	100,00	0,00	0,00	3.901.932.000,00	100,00
	- 201 / PMK.07 / 2022					114.000.146.000,00	(114.000.146.000,00)	(100,00)
	- PMK 98 Tahun 2023					3.770.334.000,00	(3.770.334.000,00)	(100,00)
Jumlah		118.449.735.000,00	118.449.735.000,00	100,00	0,00	117.770.480.000,00	679.255.000,00	0,58

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

5.1.1.2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Penerimaan Transfer Antar Daerah adalah berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Lampung yang dialokasikan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat meliputi dana bantuan untuk pembangunan berupa Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (BH PKB), Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BH BBN KB), Bagi Hasil Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BH BBKB), Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (BH PAP), dan Bagi Hasil Pajak Rokok.

Penerimaan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp86.473.023.077,60. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp82.743.146.312,00 atau 95,69%, dengan demikian Penerimaan Bagi Hasil Pajak tahun 2024 tidak mencapai sebesar (Rp3.729.876.765,00) atau (4,31%).

Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp21.302.132.414,00 atau 34,67% jika dibandingkan dengan realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp61.441.013.898,00.

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Lampung TA 2024 dan 2023 dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 108. Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DBH Pajak Provinsi	86.473.023.077,60	82.743.146.312,00	95,69	(3.729.876.765,60)	61.441.013.898,00	21.302.132.414,00	34,67
Jumlah		86.473.023.077,60	82.743.146.312,00	95,69	(3.729.876.765,60)	61.441.013.898,00	21.302.132.414,00	34,67

Berikut disajikan tabel dasar hukum penganggaran Bagi Hasil Provinsi Tahun Anggaran 2024

Tabel 109. Dasar Hukum Penganggaran Pendapatan Bagi Hasil Provinsi Tahun 2024

No	Keputusan Gubernur Lampung			APBD Perubahan	Realisasi 2024	Lebih/(Kurang)
	Nomor	Uraian	Nominal			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 = 5-6
1.	G/349/VI.03/HK/2023	BH Pajak TW I 2023	14.789.537.829,00	8.483.266.513,00	8.483.266.513,00	0,00
2.	G/460/VI.03/HK/2023	BH Pajak TW II 2023	14.650.377.960,00	14.650.377.960,00	14.650.377.960,00	0,00
3.	G/885/VI.03/HK/2023	BH Pajak TW III 2023	16.167.655.477,00	16.167.655.477,00	16.167.655.477,00	0,00
4.	G/155/VI.03/HK/2024	BH Pajak TW IV 2023	15.248.839.565,00	15.248.839.565,00	15.248.839.565,00	0,00
5.	G/343/VI.03/HK/2024	BH Pajak TW I 2024	14.293.121.844,00	6.132.893.434,60	3.591.323.914,00	2.541.569.520,60
6.	G/819/VI.03/HK/2023	BH Pajak Rokok TW IV 2023	3.991.838.697,00	3.991.838.697,00	3.991.838.697,00	0,00
7.	G/322/VI.03/HK/2024	BH Pajak Rokok Desember 2023	3.760.513.141,00	3.760.513.141,00	3.760.513.141,00	0,00
8.	G/323/VI.03/HK/2024	BH Pajak Rokok TW I 2024	5.866.849.613,00	5.866.849.613,00	5.866.849.613,00	0,00
9.	G/430/VI.03/HK/2024	BH Pajak Rokok TW II 2024	5.100.137.973,00	5.100.137.973,00	5.100.137.973,00	0,00
10	G/714/VI.03/HK/2024	BH Pajak Rokok TW III 2024	5.882.343.459,00	7.070.650.704,00	5.882.343.459,00	1.188.307.245,00
		Jumlah	99.751.215.555,00	86.473.023.077,60	82.743.146.312,00	3.729.876.765,60

Rincian penerimaan DBH Pajak Daerah masing – masing akun dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 110. Rincian Transfer Pemerintah Provinsi TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Bagi Hasil PKB	16.775.300.368,60	15.815.497.353,00	94,28	(959.803.015,60)	14.291.521.446,00	1.523.975.907,00	10,66
2.	Bagi Hasil BBN KB	12.912.280.450,00	7.028.302.719,00	54,43	(5.883.977.731,00)	7.910.739.159,00	(882.436.440,00)	(11,15)
3.	Bagi Hasil PBB KB	30.523.382.623,00	34.812.496.882,00	114,05	4.289.114.259,00	16.119.562.836,00	18.692.934.046,00	115,96
4.	Bagi Hasil PAP	472.069.508,00	485.166.475,00	102,77	13.096.967,00	403.579.824,00	81.586.651,00	20,22
5.	Bagi Hasil Pajak Rokok	25.789.990.128,00	24.601.682.883,00	95,39	(1.188.307.245,00)	22.715.610.633,00	1.886.072.250,00	8,30
Jumlah		86.473.023.077,60	82.743.146.312,00	95,69	(3.729.876.765,60)	61.441.013.898,00	21.302.132.414,00	34,67

5.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bukan pula dari transfer (dari pemerintah pusat dana perimbangan, dan bagi hasil pemerintah daerah).

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah adalah penerimaan daerah dalam bentuk uang, barang, jasa, atau surat berharga yang diberikan oleh pemberi hibah tanpa harus dibayar kembali. Pada tahun anggaran 2024 dan 2023, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tidak menganggarkan Pendapatan Hibah sehingga tidak terdapat realisasi atas pendapatan hibah.

5.1.2. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Termasuk dalam Belanja Daerah adalah Belanja Operasional BLUD yang dikeluarkan dari rekening kas BLUD yang bersumber dari Pendapatan Operasional BLUD.

Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*performance-based budgeting*), yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan.

Belanja Daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijabarkan menurut klasifikasi ekonomi sesuai penyajian pada Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan penyajian Belanja Daerah sesuai dokumen APBD adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang dijabarkan menurut klasifikasi kelompok dan urusan.

Klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan Belanja dan Transfer yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi Ekonomi berdasarkan jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga, serta Transfer.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.130.182.927.936,00. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.068.232.029.400,82 atau 94,52%. Adapun sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar (Rp61.950.898.535,18) atau (5,48%). Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp83.822.824.007,02 atau 8,52% dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp984.409.205.393,00.

Rincian realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 111. Belanja Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
I.	**Belanja Operasi**							
1.	Belanja Pegawai	478.369.624.473,00	444.086.680.344,07	92,83	(34.283.144.128,93)	413.304.423.702,00	30.782.256.642,07	7,45
2.	Belanja Barang & Jasa	264.580.882.920,00	247.658.956.661,75	93,60	(16.921.926.258,25)	243.673.449.949,80	3.985.506.701,95	1,64
3.	Belanja Bunga	3.720.929.625,00	2.534.971.060,00	68,13	(1.185.958.565,00)	3.555.499.062,00	(1.020.528.002,00)	(28,70)
4.	Belanja Hibah	40.336.230.502,00	40.232.656.643,00	99,74	(103.573.859,00)	32.310.714.788,00	7.921.941.855,00	24,52
5.	Belanja Bantuan Sosial	45.000.000,00	0,00	0,00	(45.000.000,00)	244.550.000,00	(244.550.000,00)	(100,00)
	Sub Jumlah	**787.052.867.520,00**	**734.513.264.698,82**	**93,32**	**(52.539.602.821,18)**	**693.088.637.501,80**	**41.424.627.197,02**	**5,98**
II.	**Belanja Modal**							
1.	Peralatan dan Mesin	20.805.825.852,00	20.116.516.662,00	96,69	(689.309.190,00)	23.471.410.062,00	(3.354.893.400,00)	(14,29)
2.	Gedung dan Bangunan	96.479.225.145,00	88.928.047.259,00	92,17	(7.551.177.886,00)	20.128.517.180,00	68.799.530.079,00	341,80
3.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	41.635.055.304,00	41.372.206.332,00	99,37	(262.848.972,00)	67.418.166.745,00	(26.045.960.413,00)	(38,63)
4.	Aset Tetap Lainnya	4.774.708.633,00	4.734.413.410,00	99,16	(40.295.223,00)	5.836.651.645,00	(1.102.238.235,00)	(18,88)
5.	Aset Lainnya	197.930.000,00	197.480.000,00	99,77	(450.000,00)	152.680.500,00	44.799.500,00	29,34
	Sub Jumlah	**163.892.744.934,00**	**155.348.663.663,00**	**94,79**	**(8.544.081.271,00)**	**117.007.426.132,00**	**38.341.237.531,00**	**32,77**
III.	**Belanja Tidak Terduga**							
6	Belanja Tidak Terduga	2.150.745.082,00	1.961.201.439,00	91,19	(189.543.643,00)	1.508.132.360,00	453.069.079,00	30,04

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
	Sub Jumlah	2.150.745.082,00	1.961.201.439,00	91,19	(189.543.643,00)	1.508.132.360,00	453.069.079,00	30,04
IV.	Belanja Transfer							
1.	Belanja Transfer	177.086.570.400,00	176.408.899.600,00	99,62	(677.670.800,00)	172.805.009.400,00	3.603.890.200,00	2,09
	Sub Jumlah	177.086.570.400,00	176.408.899.600,00	99,62	(677.670.800,00)	172.805.009.400,00	3.603.890.200,00	2,09
Jumlah		1.130.182.927.936,00	1.068.232.029.400,82	94,52	(61.950.898.535,18)	984.409.205.393,80	83.822.824.007,02	8,52

Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi (jenis belanja) Anggaran Tahun 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut. Rincian realisasi belanja daerah terdapat pada lampiran 3.

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja Operasi Tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp787.052.867.520,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun anggaran 2024 mencapai Rp734.513.264.698,82 atau 93,32%. Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif.

Belanja Pegawai Tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp478.369.824.473,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun anggaran 2024 sebesar Rp444.068.680.344,07 atau 92,83%. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp30.782.256.642,07 atau 7,45% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp413.304.423.702,00.

Kenaikan belanja pegawai sebesar 7,45% ini dari tahun 2023 disebabkan salah satunya dengan adanya penambahan formasi PPPK dan adanya kenaikan pangkat PNS.

5.1.2.1.1.1. Belanja Pegawai ASN (PNS dan PPPK)

Berikut rincian realisasi belanja pegawai ASN (PNS dan PPPK) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024.

Tabel 112. Belanja Pegawai ASN (PNS dan PPPK) TA. 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Belanja Pegawai PNS							
1.	Gaji dan Tunjangan PNS	278.131.846.463,00	262.576.612.375,00	94,41	(15.555.234.087,00)	252.930.273.740,00	9.646.338.636,00	3,81
	Gaji Pokok PNS	209.540.463.489,00	200.381.108.320,00	95,63	(9.159.355.169,00)	192.141.748.920,00	8.239.359.400,00	4,29
	Tunjangan Keluarga PNS	20.542.520.284,00	18.723.903.851,00	91,15	(1.818.616.433,00)	17.988.719.795,00	735.184.056,00	4,09
	Tunjangan Jabatan PNS	6.073.269.500,00	5.307.435.000,00	87,39	(765.834.500,00)	5.351.270.000,00	(43.835.000,00)	(0,82)
	Tunjangan Fungsional PNS	15.708.628.200,00	14.543.614.000,00	92,58	(1.165.014.200,00)	14.464.273.000,00	79.341.000,00	0,55
	Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.106.172.900,00	1.852.785.000,00	88,01	(252.387.900,00)	2.358.861.600,00	(506.076.600,00)	(21,45)
	Tunjangan Beras PNS	11.308.357.440,00	10.311.449.280,00	91,18	(996.908.160,00)	10.776.096.000,00	(464.646.720,00)	(4,31)
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	585.243.838,00	544.467.726,00	93,03	(40.776.112,00)	313.680.434,00	230.787.292,00	73,57
	Pembulatan Gaji PNS	2.781.476,00	2.559.834,00	92,03	(221.642,00)	2.706.390,00	(146.556,00)	(5,42)
	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.233.131.100,00	9.265.336.475,00	90,54	(967.794.625,00)	7.953.605.237,00	1.311.731.238,00	16,49
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	508.069.536,00	410.988.221,00	80,89	(97.081.315,00)	395.098.088,00	15.890.133,00	4,02
	Iuran Jaminan Kematian PNS	1.524.208.700,00	1.232.964.669,00	80,89	(291.244.031,00)	1.184.214.276,00	48.750.393,00	4,12
2.	Tambahan Penghasilan PNS	53.851.162.101,00	48.456.675.799,00	89,98	(5.394.486.302,00)	46.978.746.776,00	1.477.929.023,00	3,15
	Tambahan Penghasilan berdasarkan	53.851.162.101,00	48.456.675.799,00	89,98	(5.394.486.302,00)	46.961.946.776,00	1.494.729.023,00	3,18

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Beban Kerja PNS							
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	(16.800.000,00)	(100,00)
3.	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya PNS**	77.361.144.881,00	73.975.616.711,07	95,62	(3.385.528.169,93)	66.759.299.747,00	7.216.316.964,07	10,81
	TPG PNSD	72.598.560.460,00	69.575.053.980,00	95,84	(3.023.506.480,00)	60.231.760.240,00	9.343.293.740,00	15,51
	TKG PNSD	447.720.600,00	346.308.000,00	77,35	(101.412.600,00)	282.931.800,00	63.376.200,00	22,40
	Tamsil Guru PNSD	1.389.267.321,00	1.206.000.000,00	86,81	(183.267.321,00)	1.846.900.000,00	(640.900.000,00)	(34,70)
	Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.011.136.500,00	1.968.014.731,07	97,86	(43.121.768,93)	2.534.925.547,00	(566.910.815,93)	(22,36)
	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	913.710.000,00	880.240.000,00	96,34	(33.470.000,00)	1.861.020.000,00	(980.780.000,00)	(52,70)
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	(680.000,00)	(100,00)
	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	750.000,00	0,00	0,00	(750.000,00)	0,00	0,00	-
	Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	-	0,00	1.082.160,00	(1.082.160,00)	(100,00)
	Sub Jumlah	409.344.153.445,00	385.008.904.886,07	94,06	(24.335.248.558,93)	366.668.320.263,00	18.340.584.623,07	5,00
	Belanja Pegawai PPPK							
1.	**Gaji dan Tunjangan PPPK**	51.522.521.635,00	43.076.192.288,00	83,61	(8.446.329.347,00)	30.578.340.177,00	12.497.852.111,00	40,87
	Gaji Pokok PPPK	38.967.200.491,00	33.872.882.906,00	86,93	(5.094.317.585,00)	23.749.499.600,00	10.123.383.306,00	42,63
	Tunjangan Keluarga PPPK	4.891.129.304,00	3.282.934.984,00	67,12	(1.608.194.320,00)	2.408.710.060,00	874.224.924,00	36,29
	Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.889.931.502,00	1.966.143.700,00	68,03	(923.787.802,00)	1.496.980.000,00	469.163.700,00	31,34
	Tunjangan Beras PPPK	2.515.270.080,00	2.259.866.100,00	89,85	(255.403.980,00)	1.773.855.480,00	486.010.620,00	27,40
	Pembulatan Gaji PPPK	934.314,00	625.257,00	66,92	(309.057,00)	426.406,00	198.851,00	46,63
	Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.881.329.100,00	1.406.156.491,00	74,74	(475.172.609,00)	952.549.147,00	453.607.344,00	47,62
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	94.181.710,00	71.895.711,00	76,34	(22.285.999,00)	49.079.868,00	22.815.843,00	46,49
	Iuran Jaminan Kematian PPPK	282.545.134,00	215.687.139,00	76,34	(66.857.995,00)	147.239.616,00	68.447.523,00	46,49
2.	**Tambahan Penghasilan PPPK**	849.483.570,00	744.885.456,00	87,69	(104.598.114,00)	431.925.000,00	312.960.456,00	72,46
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	849.483.570,00	744.885.456,00	87,69	(104.598.114,00)	431.925.000,00	312.960.456,00	72,46
	Sub Jumlah	52.372.005.205,00	43.821.077.744,00	83,67	(8.550.927.461,00)	31.010.265.177,00	12.810.812.567,00	41,31
	Jumlah	461.716.158.650,00	428.829.982.630,07	92,88	(32.886.176.019,93)	397.678.585.440,00	31.151.397.190,07	7,83

Kenaikan jumlah belanja pegawai PNSD pada Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023 disebabkan karena terdapat peningkatan Gaji Pokok PNS sesuai dengan Perpres Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, serta peningkatan jumlah PPPK sebanyak 335 orang berdarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor 823/135/KPTS/IV.05/2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

5.1.2.1.1.2. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Berikut rincian realisasi belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 dan 2023.

Tabel 113. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA. 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	**Gaji dan Tunjangan DPRD**							
	Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	779.835.000	99,72	(2.205.000,00)	780.465.000,00	(630.000,00)	(0,08)
	Tunjangan Keluarga DPRD	109.485.600,00	64.071.000	58,52	(45.414.600,00)	62.212.500,00	1.858.500,00	2,99
	Tunjangan Beras DPRD	121.665.600,00	91.828.560	75,46	(29.837.040,00)	89.511.120,00	2.317.440,00	2,59
	Uang Paket DPRD	84.000.000,00	77.983.500	92,84	(6.016.500,00)	78.046.500,00	(63.000,00)	(0,08)
	Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.130.760.750	99,72	(3.197.250,00)	1.131.674.250,00	(913.500,00)	(0,08)
	Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.784.100,00	83.585.250	66,96	(41.198.850,00)	100.119.600,00	(16.534.350,00)	(16,51)

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	5.000.000,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00		
	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00	2.646.000.000	100,00	0,00	2.639.700.000,00	6.300.000,00	0,24
	Tunjangan Reses DPRD	561.500.000,00	441.000.000	78,54	(120.500.000,00)	661.500.000,00	(220.500.000,00)	(33,33)
	Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	3.500.000,00	996.290	28,47	(2.503.710,00)	971.465,00	24.825,00	2,56
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	72.000.000,00	67.695.390	94,02	(4.304.610,00)	67.833.360,00	(137.970,00)	(0,20)
	Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.000.000,00	1.603.476	53,45	(1.396.524,00)	1.604.988,00	(1.512,00)	(0,09)
	Jaminan Kematian DPRD	6.000.000,00	4.810.428	80,17	(1.189.572,00)	4.814.964,00	(4.536,00)	(0,09)
	Tunjangan Perumahan DPRD	3.791.800.000,00	3.418.818.070	90,16	(372.981.930,00)	3.717.512.324,00	(298.694.254,00)	(8,03)
	Tunjangan Transportasi DPRD	4.623.813.703,00	4.321.020.000	93,45	(302.793.703,00)	4.672.612.191,00	(351.592.191,00)	(7,52)
	Uang Jasa Pengabdian DPRD	379.900.000,00	313.110.000	82,42	(66.790.000,00)	12.600.000,00	300.510.000,00	2.385,00
	Sub Jumlah	**14.448.447.003,00**	**13.443.117.714,00**	**93,04**	**(1.005.329.289,00)**	**14.021.178.262,00**	**(578.060.548,00)**	**(4,12)**
2.	**Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD**							
	Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	92.400.000,00	83,33	(18.480.000,00)	110.880.000,00	(18.480.000,00)	(16,67)
	Sub Jumlah	**110.880.000,00**	**92.400.000,00**	**83,33**	**(18.480.000,00)**	**110.880.000,00**	**(18.480.000,00)**	**(16,67)**
	Jumlah	**14.559.327.003,00**	**13.535.517.714,00**	**92,97**	**(1.023.809.289,00)**	**14.132.058.262,00**	**(596.540.548,00)**	**(4,22)**

5.1.2.1.1.3. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Berikut rincian realisasi belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 dan 2023.

Tabel 114. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA. 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	**Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**	**84.938.820,00**	**0,00**	**0,00**	**(84.938.820,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gaji Pokok KDH/WKDH	64.278.000,00	0,00	0,00	(64.278.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.184.100,00	0,00	0,00	(5.184.100,00)	0,00	0,00	0,00
	Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	857.500,00	0,00	0,00	(857.500,00)	0,00	0,00	0,00
	Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.714.900,00	0,00	0,00	(5.714.900,00)	0,00	0,00	0,00
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.264.200,00	0,00	0,00	(3.264.200,00)	0,00	0,00	0,00
	Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.328.600,00	0,00	0,00	(2.328.600,00)	0,00	0,00	0,00
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	2.669.520,00	0,00	0,00	(2.669.520,00)	0,00	0,00	0,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	161.000,00	0,00	0,00	(161.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	481.000,00	0,00	0,00	(481.000,00)	0,00	0,00	0,00
2.	**Penerimaan Lainnya Pimpinan KDH/WKDH**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**100,00**	**0,00**	**390.000.000,00**	**10.000.000,00**	**2,56**
	Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	0,00	390.000.000,00	10.000.000,00	2,56
	Jumlah	**484.938.820,00**	**400.000.000,00**	**82,48**	**(84.938.820,00)**	**390.000.000,00**	**10.000.000,00**	**2,56**

5.1.2.1.1.4. Belanja Pegawai BLUD

Berikut rincian realisasi belanja Pegawai BLUD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 dan 2023.

Tabel 115 Belanja Pegawai BLUD TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Pegawai BLUD							
	Belanja Pegawai BLUD	1.609.400.000,00	1.321.180.000,00	82,09	(288.220.000,00)	1.103.780.000,00	217.400.000,00	19,70
	Jumlah	1.609.400.000,00	1.321.180.000,00	82,09	(288.220.000,00)	1.103.780.000,00	217.400.000,00	19,70

Belanja pegawai untuk masing-masing Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 116. Belanja Pegawai Per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	236.682.206.846,00	227.585.451.166,00	96,16	(9.096.755.680,00)	213.378.435.941,00	14.207.015.225,00	6,66
2.	Dinas Kesehatan	58.673.086.234,00	55.554.048.719,07	94,68	(3.119.037.514,93)	42.329.680.292,00	13.224.368.427,07	31,24
3.	RSUD Alimuddin Umar	5.060.921.966,00	4.653.049.506,00	91,94	(407.872.460,00)	14.844.272.190,00	(10.191.222.684,00)	(68,65)
4.	Dinas PU PR	5.796.263.861,00	5.476.076.148,00	94,48	(320.187.713,00)	5.196.513.075,00	279.563.073,00	5,38
5.	Satpol PP	8.545.091.569,00	8.170.429.499,00	95,62	(374.662.070,00)	7.910.766.245,00	259.663.254,00	3,28
6.	BPBD	2.234.634.631,00	2.157.847.707,00	96,56	(76.786.924,00)	2.025.205.130,00	132.642.577,00	6,55
7.	Dinas Sosial	2.614.038.926,00	2.486.267.632,00	95,11	(127.771.294,00)	2.336.454.656,00	149.812.976,00	6,41
8.	Dinaskperpin	2.456.772.235,00	1.370.865.187,00	55,80	(1.085.907.048,00)	0,00	1.370.865.187,00	∞
9.	Dinas PP, KB PP dan PA	2.866.109.226,00	2.702.705.827,00	94,30	(163.403.399,00)	2.543.217.803,00	159.488.024,00	6,27
10.	Dinas Ketahanan Pangan	2.389.391.315,00	2.135.025.134,00	89,35	(254.366.181,00)	2.004.872.645,00	130.152.489,00	6,49
11.	Dinas Lingkungan Hidup	3.057.561.906,00	2.931.709.148,00	95,88	(125.852.758,00)	3.003.014.704,00	(71.305.556,00)	(2,37)
12.	Disduk dan Capil	3.006.234.602,00	2.812.427.420,00	93,55	(193.807.182,00)	2.841.904.081,00	(29.476.661,00)	(1,04)
13.	Dinas PMP	2.529.288.786,00	2.315.571.416,00	91,55	(213.717.370,00)	2.038.417.727,00	277.153.689,00	13,60
14.	Dinas Perhubungan	2.554.962.623,00	2.350.896.553,00	92,01	(204.066.070,00)	2.013.050.250,00	337.846.303,00	16,78
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.557.838.800,00	2.493.097.818,00	97,47	(64.740.982,00)	2.448.657.101,00	44.440.717,00	1,81
16.	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	2.995.332.940,00	2.837.565.010,00	94,73	(157.767.930,00)	2.886.435.019,00	(48.870.009,00)	(1,69)
17.	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker	1.891.691.388,00	1.718.695.015,00	90,85	(172.996.373,00)	1.667.752.074,00	50.942.941,00	3,05
18.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.252.802.303,00	3.092.192.006,00	95,06	(160.610.297,00)	3.660.061.147,00	(567.869.141,00)	(15,52)
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1.961.253.589,00	1.782.887.724,00	90,91	(178.365.865,00)	1.819.116.685,00	(36.228.961,00)	(1,99)
20.	Dinas Perikanan	2.915.687.264,00	2.707.612.943,00	92,86	(208.074.321,00)	2.472.318.479,00	235.294.464,00	9,52
21.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	8.220.878.784,00	7.602.313.727,00	92,48	(618.565.057,00)	7.309.092.537,00	293.221.190,00	4,01
22.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	4.961.264.221,00	4.601.657.644,00	92,75	(359.606.577,00)	4.168.910.538,00	432.747.106,00	10,38
23.	Sekretariat Daerah	47.541.989.421,00	39.377.420.867,00	82,83	(8.164.568.554,00)	32.167.990.258,00	7.209.430.609,00	22,41
24.	Sekretariat DPRD	17.764.596.100,00	16.465.575.237,00	92,69	(1.299.020.863,00)	16.921.043.395,00	(455.468.158,00)	(2,69)
25.	BAPPEDA	2.834.883.946,00	2.675.542.909,00	94,38	(159.341.037,00)	2.573.080.060,00	102.462.849,00	3,98
26.	Bapenda	3.499.328.682,00	1.703.259.953,00	48,67	(1.796.068.729,00)	0,00	1.703.259.953,00	∞
27.	BKAD	19.301.643.163,00	16.400.431.134,00	84,97	(2.901.212.029,00)	15.908.654.167,00	491.776.967,00	3,09
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2.468.660.843,00	2.309.465.263,00	93,55	(159.195.580,00)	2.220.960.393,00	88.504.870,00	3,98
29.	BPRDA	2.446.488.042,00	2.229.916.484,00	91,15	(216.571.558,00)	2.003.930.109,00	225.986.375,00	11,28
30.	Inspektorat	7.865.958.144,00	6.649.612.804,00	84,54	(1.216.345.340,00)	5.965.152.927,00	684.459.877,00	11,47
31.	Kec. Sumber Jaya	426.116.200,00	358.188.005,00	84,06	(67.928.195,00)	441.240.000,00	(83.051.995,00)	(18,82)
32.	Kec. Way Tenong	427.887.869,00	376.153.600,00	87,91	(51.734.269,00)	391.340.000,00	(15.186.400,00)	(3,88)
33.	Kec. Sekincau	407.010.094,00	390.835.250,00	96,03	(16.174.844,00)	395.383.500,00	(4.548.250,00)	(1,15)
34.	Kec. Belalau	372.435.212,00	345.804.038,00	92,85	(26.631.174,00)	353.720.000,00	(7.915.962,00)	(2,24)
35.	Kec. Batu Brak	329.726.927,00	313.461.907,00	95,07	(16.267.020,00)	300.190.000,00	13.271.907,00	4,42

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
36.	Kec. Balik Bukit	669.000.675,00	633.143.167,00	94,64	(35.857.508,00)	598.092.750,00	35.050.417,00	5,86
37.	Kec. Sukau	376.497.826,00	361.144.905,00	95,92	(15.352.921,00)	357.467.125,00	3.677.780,00	1,03
38.	Kec. Suoh	313.660.575,00	288.759.600,00	92,06	(24.900.975,00)	292.920.000,00	(4.160.400,00)	(1,42)
39.	Kec. Gedung Surian	311.093.775,00	284.333.000,00	91,40	(26.760.775,00)	274.220.000,00	10.113.000,00	3,69
40.	Kec. Kebun Tebu	315.395.235,00	286.082.800,00	90,71	(29.312.435,00)	305.490.000,00	(19.407.200,00)	(6,35)
41.	Kec. Air Hitam	308.721.762,00	288.516.720,00	93,46	(20.205.042,00)	289.640.000,00	(1.123.280,00)	(0,39)
42.	Kec. Pagar Dewa	283.394.817,00	231.513.400,00	81,69	(51.881.417,00)	244.781.176,00	(13.267.776,00)	(5,42)
43.	Kec. Batu Ketulis	368.782.503,00	345.960.206,00	93,81	(22.822.297,00)	329.563.000,00	16.397.206,00	4,98
44.	Kec. Bandar Negeri Suoh	337.092.627,00	249.174.120,00	73,92	(87.918.507,00)	287.920.000,00	(38.745.880,00)	(13,46)
45.	Kec. Lumbok Seminung	294.121.331,00	280.252.503,00	95,28	(13.868.828,00)	273.620.000,00	6.632.503,00	2,42
46.	Kantor Kesbangpol	1.882.022.689,00	1.703.739.523,00	90,53	(178.283.166,00)	1.609.876.523,00	193.863.000,00	12,04
	Jumlah	**478.369.824.473,00**	**444.086.680.344,07**	**92,83**	**(34.283.144.128,93)**	**413.304.423.702,00**	**30.782.256.642,07**	**7,45**

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp264.580.882.920,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun anggaran 2024 sebesar Rp247.658.956.651,75 atau 93,60%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp3.985.506.701,95 atau 1,64% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp243.673.449.949,80.

Rincian belanja barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 pada disajikan pada tabel berikut.

Tabel 117. Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1.	Belanja Barang Pakai Habis	47.632.318.756,00	44.939.131.868,00	94,35	(2.693.186.888,00)	51.478.844.617,00	(6.539.712.749,00)	(12,70)
2.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	21.283.280,00	20.462.790,00	96,14	(820.490,00)	22.804.420,00	(2.341.630,00)	(10,27)
3.	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	21.160.000,00	20.920.000,00	98,87	(240.000,00)	0,00	20.920.000,00	-
4.	Belanja Jasa Kantor	51.209.929.546,00	45.388.119.288,00	88,63	(5.821.810.258,00)	49.929.669.477,00	(4.541.550.189,00)	(9,10)
5.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.799.576.556,00	13.733.705.874,00	86,92	(2.065.870.682,00)	11.748.723.654,00	1.984.982.220,00	16,90
6.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.912.103.740,00	1.785.010.000,00	93,35	(127.093.740,00)	1.993.321.500,00	(208.311.500,00)	(10,45)
7.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.988.475.000,00	1.519.323.000,00	76,41	(469.152.000,00)	1.407.859.999,00	111.463.001,00	7,92
8.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	324.250.000,00	297.250.000,00	91,67	(27.000.000,00)	182.750.000,00	114.500.000,00	62,65
9.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.821.279.450,00	2.653.236.244,00	94,04	(168.043.206,00)	639.186.400,00	2.014.049.844,00	315,10
10.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.572.930.000,00	2.558.904.940,00	99,45	(14.025.060,00)	3.207.483.740,00	(648.578.800,00)	(20,22)
11.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.672.642.000,00	2.323.786.079,00	86,95	(348.855.921,00)	3.089.266.000,00	(765.479.921,00)	(24,78)
12.	Belanja Pemeliharaan Tanah	228.110.000,00	227.432.820,00	99,70	(677.180,00)	123.008.500,00	104.424.320,00	84,89

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.325.046.425,00	4.973.697.653,00	93,40	(351.348.772,00)	5.309.928.862,00	(336.231.209,00)	(6,33)
14.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	531.724.000,00	530.809.850,00	99,83	(914.150,00)	422.212.248,00	108.597.602,00	25,72
15.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	684.394.000,00	683.171.000,00	99,82	(1.223.000,00)	558.874.000,00	124.297.000,00	22,24
16.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	8.170.000,00	8.170.000,00	100,00	0,00	0,00	8.170.000,00	-
17.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.144.921.500,00	41.155.717.170,00	93,23	(2.989.204.330,00)	45.284.426.103,00	(4.128.708.933,00)	(9,12)
18.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.720.060.000,00	1.412.882.500,00	82,14	(307.177.500,00)	681.341.388,00	731.541.112,00	107,37
19.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.563.035.000,00	3.523.287.896,00	98,88	(39.747.104,00)	3.459.396.536,00	63.891.360,00	1,85
20.	Belanja Barang & Jasa Dana BOS	17.810.106.700,00	17.798.600.601,00	99,94	(11.506.099,00)	28.653.558.146,00	(10.854.957.545,00)	(37,88)
21.	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	9.804.983.781,00	9.754.084.359,00	99,48	(50.899.422,00)	0,00	9.754.084.359,00	-
22.	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	528.095.000,00	528.095.000,00	100,00	0,00	0,00	528.095.000,00	-
23.	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	148.503.000,00	148.503.000,00	100,00	0,00	0,00	148.503.000,00	-
24.	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	12.746.241.500,00	12.614.091.934,93	98,96	(132.149.565,07)	0,00	12.614.091.934,93	-
25.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	40.361.543.686,00	39.060.562.784,82	96,78	(1.300.980.901,18)	35.480.794.359,80	3.579.768.425,02	10,09
	Jumlah	264.580.882.920,00	247.658.956.651,75	93,60	(16.921.926.268,25)	243.673.449.949,80	3.985.506.701,95	1,64

Berikut lebih rinci belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan sebagai berikut:

5.1.2.1.2.1. Belanja Barang

Belanja Barang pada Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 118. Belanja Barang TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	**Belanja Barang Pakai Habis**	**47.632.318.756,00**	**44.939.131.868,00**	**94,35**	**(2.693.186.888,00)**	**51.478.844.617,00**	**(6.539.712.749,00)**	**(12,70)**
	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.084.449.270,00	997.601.990,00	91,99	(86.847.280,00)	937.504.570,00	60.097.420,00	6,41
	Bahan-Bahan Kimia	2.647.199.017,00	2.579.285.865,00	97,43	(67.913.152,00)	337.451.000,00	2.241.834.865,00	664,34
	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.811.080.294,00	1.709.263.010,00	94,38	(101.817.284,00)	1.439.343.438,00	269.919.572,00	18,75
	Bahan-Bahan Baku	0,00	0,00	-	0,00	18.135.000,00	(18.135.000,00)	(100,00)
	Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	256.159.000,00	224.659.000,00	87,70	(31.500.000,00)	117.640.900,00	107.018.100,00	90,97
	Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00	0,00	23.000.000,00	8.500.000,00	36,96
	Bahan-Isi Tabung Gas	155.725.000,00	155.725.000,00	100,00	0,00	78.225.000,00	77.500.000,00	99,07
	Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	136.250.000,00	136.250.000,00	100,00	0,00	113.833.000,00	22.417.000,00	19,69
	Bahan-Bahan Lainnya	77.413.740,00	77.394.300,00	99,97	(19.440,00)	3.395.120.998,00	(3.317.726.698,00)	(97,72)
	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.555.000,00	4.555.000,00	100,00	0,00	100.400.000,00	(95.845.000,00)	(95,46)
	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	67.762.972,00	61.193.052,00	90,30	(6.569.920,00)	123.860.764,00	(62.667.712,00)	(50,60)

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00	299.850.000,00	(293.850.000,00)	(98,00)
	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	3.432.000,00	3.432.000,00	100,00	0,00	225.302.000,00	(221.870.000,00)	(98,48)
	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	13.620.000,00	13.620.000,00	100,00	0,00	5.930.000,00	7.690.000,00	129,68
	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	960.000,00	960.000,00	100,00	0,00	14.026.000,00	(13.066.000,00)	(93,16)
	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	9.100.000,00	7.100.000,00	78,02	(2.000.000,00)	10.600.000,00	(3.500.000,00)	(33,02)
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.711.511.900,00	4.352.215.200,00	92,37	(359.296.700,00)	2.132.264.000,00	2.219.951.200,00	104,11
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.651.367.320,00	1.629.274.335,00	98,66	(22.092.985,00)	1.513.970.600,00	115.303.735,00	7,62
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.309.930.800,00	2.271.303.720,00	98,33	(38.627.080,00)	7.598.738.715,00	(5.327.434.995,00)	(70,11)
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	166.430.000,00	165.966.000,00	99,72	(464.000,00)	157.129.000,00	8.837.000,00	5,62
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	10.277.500,00	4.490.000,00	43,69	(5.787.500,00)	6.705.000,00	(2.215.000,00)	(33,04)
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.584.771.100,00	1.557.082.876,00	98,25	(27.688.224,00)	1.378.418.750,00	178.664.126,00	12,96
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	391.315.630,00	383.368.220,00	97,97	(7.947.410,00)	355.874.424,00	27.493.796,00	7,73
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	582.717.295,00	581.118.879,00	99,73	(1.598.416,00)	566.506.650,00	14.612.229,00	2,58
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	989.647.100,00	981.479.586,00	99,17	(8.167.514,00)	1.120.267.500,00	(138.787.914,00)	(12,39)
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	1.031.000,00	1.031.000,00	100,00	0,00	0,00	1.031.000,00	-
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	8.784.000,00	8.584.000,00	97,72	(200.000,00)	930.000,00	7.654.000,00	823,01
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cenderamata	257.593.000,00	257.057.000,00	99,79	(536.000,00)	199.173.000,00	57.884.000,00	29,06
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.060.119.610,00	5.021.510.653,00	99,24	(38.608.957,00)	619.445.660,00	4.402.064.993,00	710,65
	Obat-Obatan-Obat	1.768.524.783,00	1.691.893.973,00	95,67	(76.630.810,00)	2.835.676.950,00	(1.143.782.977,00)	(40,34)
	Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	47.255.000,00	43.505.000,00	92,06	(3.750.000,00)	26.022.000,00	17.483.000,00	67,19
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.717.436.107,00	5.395.699.744,00	94,37	(321.736.363,00)	7.638.029.765,00	(2.242.330.021,00)	(29,36)
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	2.777.077.098,00	2.763.170.225,00	99,50	(13.906.873,00)	1.981.895.700,00	781.274.525,00	39,42
	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	63.001.000,00	62.301.000,00	99,00	(300.000,00)	30.000.000,00	32.001.000,00	107,04
	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	370.000,00	370.000,00	100,00	0,00	124.000,00	246.000,00	198,39
	Natura dan Pakan-Natura	1.005.784.720,00	999.141.920,00	99,34	(6.642.800,00)	4.192.017.723,00	(3.192.875.803,00)	(76,17)
	Natura dan Pakan-Pakan	60.197.000,00	60.197.000,00	100,00	0,00	72.894.500,00	(12.697.500,00)	(17,42)

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	105.000.000,00	85.280.000,00	81,22	(19.720.000,00)	20.926.000,00	64.354.000,00	307,53
	Makanan dan Minuman Rapat	7.264.663.500,00	6.508.836.920,00	89,60	(755.826.580,00)	8.701.143.010,00	(2.192.306.090,00)	(25,20)
	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.747.305.000,00	1.594.731.400,00	91,27	(152.573.600,00)	1.207.990.500,00	386.740.900,00	32,02
	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	0,00	-	0,00	62.790.000,00	(62.790.000,00)	(100,00)
	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	212.250.000,00	206.175.000,00	97,14	(6.075.000,00)	0,00	206.175.000,00	-
	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	573.878.500,00	573.878.500,00	100,00	0,00	494.777.000,00	79.101.500,00	15,99
	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.127.028.500,00	1.099.365.500,00	97,55	(27.663.000,00)	1.248.161.500,00	(148.796.000,00)	(11,92)
	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	525.000.000,00	31.500.000,00	6,00	(493.500.000,00)	0,00	31.500.000,00	-
	Pakaian Sipil Harian (PSH)	80.035.000,00	78.985.000,00	98,69	(1.050.000,00)	9.900.000,00	69.085.000,00	697,83
	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	189.500.000,00	187.750.000,00	99,08	(1.750.000,00)	14.300.000,00	173.450.000,00	1.212,94
	Pakaian Dinas Harian (PDH)	48.575.000,00	47.695.000,00	98,19	(880.000,00)	17.850.000,00	29.845.000,00	167,20
	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00	0,00	5.400.000,00	200.000,00	3,70
	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	87.500.000,00	85.750.000,00	98,00	(1.750.000,00)	0,00	85.750.000,00	-
	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	10.035.000,00	10.035.000,00	100,00	0,00	4.950.000,00	5.085.000,00	102,73
	Pakaian Adat Daerah	185.000.000,00	183.250.000,00	99,05	(1.750.000,00)	0,00	183.250.000,00	-
	Pakaian Kerja Bengkel	0,00	0,00	-	0,00	12.950.000,00	(12.950.000,00)	(100,00)
	Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	-	0,00	9.900.000,00	(9.900.000,00)	(100,00)
2.	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**	**21.283.280,00**	**20.462.790,00**	**96,14**	**(820.490,00)**	**22.804.420,00**	**(2.341.630,00)**	**(10,27)**
	Komponen-Komponen Rambu-Rambu	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	0,00	9.500.000,00	(2.300.000,00)	(24,21)
	Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	11.136.500,00	11.136.500,00	100,00	0,00	12.895.440,00	(1.758.940,00)	(13,64)
	Pipa-Pipa Lainnya	2.946.780,00	2.126.290,00	72,16	(820.490,00)	408.980,00	1.717.310,00	419,90
3.	**Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**	21.160.000,00	20.920.000,00	98,87	(240.000,00)	0,00	20.920.000,00	-
	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.160.000,00	4.920.000,00	95,35	(240.000,00)	0,00	4.920.000,00	-
	Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	0,00	0,00	16.000.000,00	-
Jumlah		47.674.762.036,00	44.980.514.658,00	94,35	(2.694.247.378,00)	51.501.649.037,00	(6.521.134.379,00)	(12,66)

5.1.2.1.2.2. Belanja Jasa

Belanja Jasa pada Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 119. Belanja Jasa TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	**Belanja Jasa Kantor:**	51.209.929.546,00	45.388.119.288,00	88,63	(5.821.810.258,00)	49.929.669.477,00	(4.541.550.189,00)	(9,10)
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	50.000.000,00	33.117.640,00	66,24	(16.882.360,00)	0,00	33.117.640,00	-
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.643.200.000,00	2.164.700.000,00	81,90	(478.500.000,00)	1.885.510.000,00	279.190.000,00	14,81
	Honorarium Tim Pelaksana	359.620.046,00	343.010.000,00	95,38	(16.610.046,00)	963.840.000,00	(620.830.000,00)	(64,41)

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan							
	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	6.000.000,00	-
	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	618.750.000,00	576.750.000,00	93,21	(42.000.000,00)	178.200.000,00	398.550.000,00	223,65
	Honorarium Rohaniwan	27.250.000,00	20.650.000,00	75,78	(6.600.000,00)	5.088.500.000,00	(5.067.850.000,00)	(99,59)
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	30.960.000,00	30.960.000,00	100,00	0,00	649.120.000,00	(618.160.000,00)	(95,23)
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	203.100.000,00	203.100.000,00	100,00	0,00	166.600.000,00	36.500.000,00	21,91
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	835.800.000,00	742.800.000,00	88,87	(93.000.000,00)	379.200.000,00	363.600.000,00	95,89
	Jasa Tenaga Pendidikan	6.113.600.000,00	4.656.920.000,00	76,17	(1.456.680.000,00)	3.595.239.600,00	1.061.680.400,00	29,53
	Jasa Tenaga Kesehatan	6.879.595.000,00	5.822.596.500,00	84,64	(1.056.998.500,00)	5.976.550.000,00	(153.953.500,00)	(2,58)
	Jasa Tenaga Laboratorium	14.250.000,00	13.420.300,00	94,18	(829.700,00)	0,00	13.420.300,00	-
	Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.492.949.000,00	4.491.443.800,00	99,97	(1.505.200,00)	4.123.114.000,00	368.329.800,00	8,93
	Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.536.200.000,00	2.440.420.000,00	96,22	(95.780.000,00)	152.400.000,00	2.288.020.000,00	1.501,33
	Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.602.600.000,00	1.584.100.000,00	98,85	(18.500.000,00)	0,00	1.584.100.000,00	-
	Jasa Tenaga Penanganan Bencana	409.960.000,00	409.960.000,00	100,00	0,00	160.080.000,00	249.880.000,00	156,10
	Jasa Tenaga Penanganan Sosial	216.500.000,00	216.499.384,00	100,00	(616,00)	191.164.915,00	25.334.469,00	13,25
	Jasa Tenaga Sumber Daya Air	132.000.000,00	132.000.000,00	100,00	0,00	132.000.000,00	0,00	0,00
	Jasa Tenaga Perhubungan	49.100.000,00	49.100.000,00	100,00	0,00	0,00	49.100.000,00	-
	Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	27.800.000,00	27.800.000,00	100,00	0,00	22.000.000,00	5.800.000,00	26,36
	Jasa Tenaga Administrasi	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	0,00	545.700.000,00	(473.700.000,00)	(86,81)
	Jasa Tenaga Operator Komputer	164.450.000,00	104.026.000,00	63,26	(60.424.000,00)	156.900.000,00	(52.874.000,00)	(33,70)
	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.928.000.000,00	1.895.250.000,00	98,30	(32.750.000,00)	2.357.400.000,00	(462.150.000,00)	(19,60)
	Jasa Tenaga Ahli	1.632.720.000,00	1.467.334.497,00	89,87	(165.385.503,00)	2.128.370.000,00	(661.035.503,00)	(31,06)
	Jasa Tenaga Kebersihan	1.278.870.000,00	1.205.850.000,00	94,29	(73.020.000,00)	1.093.940.000,00	111.910.000,00	10,23
	Jasa Tenaga Keamanan	642.600.000,00	626.540.000,00	97,50	(16.060.000,00)	3.474.600.000,00	(2.848.060.000,00)	(81,97)
	Jasa Tenaga Supir	446.400.000,00	446.400.000,00	100,00	0,00	450.600.000,00	(4.200.000,00)	(0,93)
	Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	54.282.000,00	54.250.000,00	99,94	(32.000,00)	24.790.587,00	29.459.413,00	118,83
	Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	59.600.000,00	49.550.000,00	83,14	(10.050.000,00)	13.650.000,00	35.900.000,00	263,00
	Jasa Tata Rias	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)
	Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	303.800.000,00	302.601.000,00	99,61	(1.199.000,00)	0,00	302.601.000,00	-
	Jasa Tenaga Operator Tiket	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	0,00	0,00	33.600.000,00	-
	Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	9.000.000,00	7.967.718,00	88,53	(1.032.282,00)	0,00	7.967.718,00	-
	Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	142.540.000,00	72.727.097,00	51,02	(69.812.903,00)	103.310.514,00	(30.583.417,00)	(29,60)
	Jasa Pelayanan Perpustakaan	116.800.000,00	102.400.000,00	87,67	(14.400.000,00)	126.400.000,00	(24.000.000,00)	(18,99)
	Jasa Pelayanan Kearsipan	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	0,00	20.000.000,00	(15.200.000,00)	(76,00)
	Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	75.000.000,00	74.537.000,00	99,38	(463.000,00)	0,00	74.537.000,00	-
	Jasa Penyelenggaraan Acara	88.230.000,00	88.000.000,00	99,74	(230.000,00)	50.000.000,00	38.000.000,00	76,00
	Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Alat Rumah Tangga							
	Jasa Kalibrasi	25.000.000,00	24.900.000,00	99,60	(100.000,00)	23.653.500,00	1.246.500,00	5,27
	Jasa Pengolahan Sampah	150.190.000,00	148.498.902,00	98,87	(1.691.098,00)	184.535.090,00	(36.036.188,00)	(19,53)
	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.116.500.000,00	4.753.630.000,00	92,91	(362.870.000,00)	5.368.029.000,00	(614.399.000,00)	(11,45)
	Tagihan Telepon	177.050.000,00	129.560.890,00	73,18	(47.489.110,00)	375.100.934,00	(245.540.044,00)	(65,46)
	Tagihan Air	248.350.000,00	143.325.135,00	57,71	(105.024.865,00)	174.046.416,00	(30.721.281,00)	(17,65)
	Tagihan Listrik	5.608.160.000,00	5.018.836.975,00	89,49	(589.323.025,00)	5.035.606.660,00	(16.769.685,00)	(0,33)
	Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.106.750.000,00	1.982.027.000,00	94,08	(124.723.000,00)	2.031.045.000,00	(49.018.000,00)	(2,41)
	Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.356.691.000,00	2.124.947.905,00	90,17	(231.743.095,00)	2.048.012.460,00	76.935.445,00	3,76
	Paket/Pengiriman	207.136.500,00	69.233.610,00	33,42	(137.902.890,00)	48.802.000,00	20.431.610,00	41,87
	Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	736.175.000,00	244.929.315,00	33,27	(491.245.685,00)	255.659.796,00	(10.730.481,00)	(4,20)
	Medical Check Up	124.000.000,00	123.048.620,00	99,23	(951.380,00)	120.999.005,00	2.049.615,00	1,69
2.	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	**15.799.576.556,00**	**13.733.705.874,00**	**86,92**	**(2.065.870.682,00)**	**11.748.723.654,00**	**1.984.982.220,00**	**16,90**
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.257.725.080,00	2.186.390.976,00	96,84	(71.334.104,00)	1.867.147.778,00	319.243.198,00	17,10
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.008.502.800,00	11.217.164.898,00	86,23	(1.791.337.902,00)	9.683.215.876,00	1.533.949.022,00	15,84
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	297.842.892,00	177.133.335,00	59,47	(120.709.557,00)	103.360.020,00	73.773.315,00	71,38
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	235.505.784,00	153.016.665,00	64,97	(82.489.119,00)	94.999.980,00	58.016.685,00	61,07
3.	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**1.912.103.740,00**	**1.785.010.000,00**	**93,35**	**(127.093.740,00)**	**1.993.321.500,00**	**(208.311.500,00)**	**(10,45)**
	Sewa Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00	(25.200.000,00)	(100,00)
	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.064.328.740,00	993.260.000,00	93,32	(71.068.740,00)	1.061.604.000,00	(68.344.000,00)	(6,44)
	Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	0,00	30.000.000,00	(13.000.000,00)	(43,33)
	Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	0,00	327.000.000,00	(152.000.000,00)	(46,48)
	Sewa Alat Kantor Lainnya	244.750.000,00	195.800.000,00	80,00	(48.950.000,00)	103.000.000,00	92.800.000,00	90,10
	Sewa Mebel	119.775.000,00	119.025.000,00	99,37	(750.000,00)	69.217.500,00	49.807.500,00	71,96
	Sewa Alat Pendingin	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	0,00	3.150.000,00	1.750.000,00	55,56
	Sewa Alat Dapur	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-
	Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	211.525.000,00	205.200.000,00		(6.325.000,00)	260.150.000,00	(54.950.000,00)	(21,12)
	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	0,00	0,00	5.250.000,00	-
	Sewa Peralatan Studio Audio	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-
	Sewa Alat Studio Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
	Sewa Very High Frequence Omni Range (VOR)	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00	2.500.000,00	5.000.000,00	200,00
	Sewa Alat Laboratorium Cocok Tanam	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	(52.500.000,00)	(100,00)
	Sewa Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Elektronik/Electric	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	Sewa Peralatan Bantu	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00	25.000.000,00	-
	Sewa Peralatan Olahraga Air	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00	3.000.000,00	(2.300.000,00)	(76,67)
	Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	875.000,00	875.000,00	100,00	0,00	3.500.000,00	(2.625.000,00)	(75,00)
4.	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**	**1.988.475.000,00**	**1.519.323.000,00**	**76,41**	**(469.152.000,00)**	**1.407.859.999,00**	**111.463.001,00**	**7,92**
	Sewa Bangunan Gedung Kantor	93.350.000,00	93.350.000,00	100,00	0,00	46.600.000,00	46.750.000,00	100,32

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	157.150.000,00	113.590.000,00	72,28	(43.560.000,00)	122.790.000,00	(9.200.000,00)	(7,49)
	Sewa Bangunan Terbuka	370.300.000,00	312.400.000,00	84,36	(57.900.000,00)	261.900.000,00	50.500.000,00	19,28
	Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	73.000.000,00	69.955.000,00	95,83	(3.045.000,00)	70.800.000,00	(845.000,00)	(1,19)
	Sewa Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
	Sewa Taman	18.500.000,00	18.500.000,00	100,00	0,00	9.500.000,00	9.000.000,00	94,74
	Sewa Rumah Negara Golongan II	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	10.000.000,00	-
	Sewa Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	0,00	0,00	2.250.000,00	-
	Sewa Hotel	1.227.700.000,00	863.053.000,00	70,30	(364.647.000,00)	810.044.999,00	53.008.001,00	6,54
	Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	36.225.000,00	36.225.000,00	100,00	0,00	36.225.000,00	0,00	0,00
5.	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**	**324.250.000,00**	**297.250.000,00**	**91,67**	**(27.000.000,00)**	**182.750.000,00**	**114.500.000,00**	**62,65**
	Sewa Alat Musik	269.750.000,00	250.750.000,00	92,96	(19.000.000,00)	148.250.000,00	102.500.000,00	69,14
	Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	52.000.000,00	44.000.000,00	84,62	(8.000.000,00)	32.000.000,00	12.000.000,00	37,50
6.	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**2.821.279.450,00**	**2.653.236.244,00**	**94,04**	**(168.043.206,00)**	**639.186.400,00**	**2.014.049.844,00**	**315,10**
	Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	789.664.000,00	749.003.580,00	94,85	(40.660.420,00)	0,00	749.003.580,00	-
	Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	31.215.000,00	31.148.820,00	99,79	(66.180,00)	0,00	31.148.820,00	-
	Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	141.105.600,00	(141.105.600,00)	(100,00)
	Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	178.000.000,00	177.000.250,00	99,44	(999.750,00)	0,00	177.000.250,00	-
	Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	333.500.000,00	284.606.109,00	85,34	(48.893.891,00)	251.336.800,00	33.269.309,00	13,24
	Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	165.000.000,00	160.955.550,00	97,55	(4.044.450,00)	0,00	160.955.550,00	-
	Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.303.900.450,00	1.230.714.540,00	94,39	(73.185.910,00)	235.044.000,00	995.670.540,00	423,61
	Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00	(11.700.000,00)	(100,00)
	Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	20.000.000,00	19.807.395,00	99,04	(192.605,00)	0,00	19.807.395,00	-
7.	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**	**2.572.930.000,00**	**2.558.904.940,00**	**99,45**	**(14.025.060,00)**	**3.207.483.740,00**	**(648.578.800,00)**	**(20,22)**
	Jasa Konsultansi Berorientasi	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	64.500.000,00	(49.500.000,00)	(76,74)

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Bidang-Telematika							
	Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	83.520.000,00	(83.520.000,00)	(100,00)
	Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	670.000.000,00	665.219.000,00	99,29	(4.781.000,00)	597.230.500,00	67.988.500,00	11,38
	Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	171.930.000,00	171.409.800,00	99,70	(520.200,00)	316.172.000,00	(144.762.200,00)	(45,79)
	Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Menajemen	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00	0,00	100.000.000,00	-
	Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.616.000.000,00	1.607.276.140,00	99,46	(8.723.860,00)	2.146.061.240,00	(538.785.100,00)	(25,11)
8.	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**	**2.672.642.000,00**	**2.323.786.079,00**	**86,95**	**(348.855.921,00)**	**3.089.266.000,00**	**(765.479.921,00)**	**(24,78)**
	Kursus Singkat/Pelatihan	2.453.252.000,00	2.127.396.079,00	86,72	(325.855.921,00)	2.933.376.000,00	(805.979.921,00)	(27,48)
	Sosialisasi	0,00				5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	Bimbingan Teknis	37.500.000,00	14.500.000,00	38,67	(23.000.000,00)	105.000.000,00	(90.500.000,00)	(86,19)
	Diklat Kepemimpinan	181.890.000,00	181.890.000,00	100,00	0,00	45.890.000,00	136.000.000,00	296,36
Jumlah		79.301.186.292,00	70.259.335.425,00	88,60	(9.041.850.867,00)	72.198.260.770,00	(1.938.925.345,00)	(2,69)

5.1.2.1.2.3. Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan pada Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 120. Belanja Pemeliharaan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	**Belanja Pemeliharaan Tanah**	**228.110.000,00**	**227.432.820,00**	**99,70**	**(677.180,00)**	**123.008.500,00**	**104.424.320,00**	**84,89**
	Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	214.110.000,00	213.432.820,00	99,68	(677.180,00)	123.008.500,00	90.424.320,00	73,51
	Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	0,00		14.000.000,00	
2.	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**5.325.046.425,00**	**4.973.697.653,00**	**93,40**	**(351.348.772,00)**	**5.309.928.862,00**	**(336.231.209,00)**	**(6,33)**
	Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	101.410.000,00	93.615.000,00	92,31	(7.795.000,00)	118.232.500,00	(24.617.500,00)	(20,82)
	Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	0,00	0,00	14.500.000,00	-
	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.563.996.300,00	3.316.248.838,00	93,05	(247.749.462,00)	3.733.318.365,00	(417.069.527,00)	(11,17)
	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	156.000.000,00	136.071.000,00	87,23	(19.929.000,00)	0,00	136.071.000,00	-

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	713.175.000,00	666.471.725,00	93,45	(46.703.275,00)	757.810.467,00	(91.338.742,00)	(12,05)
	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	12.000.000,00	5.360.000,00	44,67	(6.640.000,00)	0,00	5.360.000,00	-
	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	195.420.125,00	192.051.090,00	98,28	(3.369.035,00)		192.051.090,00	-
	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	48.250.000,00	47.600.000,00	98,65	(650.000,00)	16.780.000,00	30.820.000,00	183,67
	Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	71.713.000,00	64.717.000,00	90,24	(6.996.000,00)	335.610.020,00	(270.893.020,00)	(80,72)
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	300.000,00	150.000,00	50,00	(150.000,00)	150.000,00		
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.400.000,00	10.375.000,00	99,76	(25.000,00)	10.400.000,00	(25.000,00)	(0,24)
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	8.500.000,00	8.000.000,00	94,12	(500.000,00)	1.000.000,00	7.000.000,00	700,00
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	40.010.000,00	39.450.000,00	98,60	(560.000,00)	27.800.000,00	11.650.000,00	41,91
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00	7.500.000,00	(3.000.000,00)	(40,00)
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	6.200.000,00	6.200.000,00	100,00	0,00	2.800.000,00	3.400.000,00	121,43
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	50,00
	Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	39.200.000,00	38.253.000,00	97,58	(947.000,00)	22.280.000,00	15.973.000,00	71,69
	Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	219.540.000,00	219.310.000,00	99,99	(230.000,00)	193.267.510,00	26.042.490,00	13,47
	Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	34.500.000,00	34.500.000,00	100,00	0,00	43.230.000,00	(8.730.000,00)	(20,19)
	Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	24.180.000,00	15.075.000,00	62,34	(9.105.000,00)	0,00	15.075.000,00	-
	Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	9.750.000,00	9.750.000,00	100,00	0,00	9.750.000,00	0,00	0,00
3.	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**531.724.000,00**	**530.809.850,00**	**99,83**	**(914.150,00)**	**422.212.248,00**	**108.597.602,00**	**25,72**
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	323.029.250,00	322.365.750,00	99,79	(663.500,00)	347.925.748,00	(25.559.998,00)	(7,35)
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-	128.694.750,00	128.644.100,00	99,96	(50.650,00)	0,00	128.644.100,00	

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan							
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	49.986.500,00	(19.986.500,00)	(39,98)
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300.000,00	(24.300.000,00)	(100,00)
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	50.000.000,00	49.800.000,00	99,60	(200.000,00)	0,00	49.800.000,00	-
4.	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi**	684.394.000,00	683.171.000,00	99,82	(1.223.000,00)	558.874.000,00	124.297.000,00	22,24
	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	181.944.000,00	181.944.000,00	100,00	0,00		181.944.000,00	-
	Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	502.450.000,00	501.227.000,00	99,76	(1.223.000,00)	558.874.000,00	(57.647.000,00)	(10,31)
5.	**Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	8.170.000,00	8.170.000,00	100,00	0,00	0,00	8.170.000,00	-
	Belanja Pemeliharaan Barang Berciri Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Berciri Kesenian-Alat Musik	8.170.000,00	8.170.000,00	100,00	0,00	0,00	8.170.000,00	-
Jumlah		6.777.444.425,00	6.423.281.323,00	94,77	(354.163.102,00)	6.414.023.610,00	9.257.713,00	0,14

5.1.2.1.2.4. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Pemeliharaan pada Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 121. Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**							
	Perjalanan Dinas Biasa	28.145.446.000,00	27.546.604.339,00	97,87	(598.841.661,00)	25.180.887.364,00	2.365.716.975,00	9,39
	Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.944.658.500,00	8.390.978.382,00	93,81	(553.680.118,00)	7.516.032.835,00	874.945.547,00	11,64
	Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.679.415.000,00	4.273.083.376,00	72,68	(1.606.331.624,00)	12.423.697.804,00	(8.150.614.428,00)	(65,61)
	Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.175.402.000,00	945.051.073,00	80,40	(230.350.927,00)	163.808.100,00	781.242.973,00	476,93
Jumlah		44.144.921.500,00	41.155.717.170,00	93,23	(2.989.204.330,00)	45.284.426.103,00	(4.128.708.933,00)	(9,12)

5.1.2.1.2.5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 122. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak lain / Masyarakat TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	1.720.060.000,00	1.412.882.500,00	82,14	(307.177.500,00)	681.341.388,00	731.541.112,00	107,37
	Penghargaan atas Suatu Prestasi	737.200.000,00	647.450.000,00	87,83	(89.750.000,00)	284.350.000,00	363.100.000,00	127,69
	Beasiswa	982.860.000,00	765.432.500,00	77,88	(217.427.500,00)	396.991.388,00	368.441.112,00	92,81
2.	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	3.563.035.000,00	3.523.287.896,00	98,88	(39.747.104,00)	3.459.396.536,00	63.891.360,00	1,85
	Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.563.035.000,00	3.523.287.896,00	98,88	(39.747.104,00)	3.176.594.536,00	346.693.360,00	10,91
	Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	282.802.000,00	(282.802.000,00)	(100,00)
Jumlah		5.283.095.000,00	4.936.170.396,00	93,43	(346.924.604,00)	4.140.737.924,00	795.432.472,00	19,21

5.1.2.1.2.6. Belanja Barang & Jasa Dana BOSP

Belanja Barang dan Jasa Dana BOSP pada Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 123. Belanja Barang & Jasa BOSP TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	**Belanja Barang & Jasa BOS**							
	Barang dan Jasa BOS	17.810.106.700,00	17.798.600.601,00	99,94	(11.506.099,00)	28.653.558.146,00	(10.854.957.545,00)	(37,88)
	Sub Jumlah	17.810.106.700,00	17.798.600.601,00	99,94	(11.506.099,00)	28.653.558.146,00	(10.854.957.545,00)	(37,88)
2.	**Belanja Barang dan Jasa BOSP**							
	Barang dan Jasa BOSP-BOS							
	- Barang dan Jasa BOSP – BOS Reguler	8.856.493.631,00	8.833.794.459,00	99,74	(22.699.172,00)	0,00	8.833.794.459,00	-
	- Barang dan Jasa BOSP – BOS Kinerja	948.490.150,00	920.289.900,00	97,03	(28.200.250,00)	0,00	920.289.900,00	-
	Sub Jumlah	9.804.983.781,00	9.754.084.359,00	196,77	(50.899.422,00)	0,00	9.754.084.359,00	-
	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD							
	- Barang dan Jasa BOSP – BOS Reguler	528.095.000,00	528.095.000,00	100,00	0,00	0,00	528.095.000,00	-
	Sub Jumlah	528.095.000,00	528.095.000,00	100,00	0,00	0,00	528.095.000,00	-
	Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan							
	- Barang dan Jasa BOSP – BOP Kesetaraan Reguler	148.503.000,00	148.503.000,00	100,00	0,00	0,00	148.503.000,00	-
	Sub Jumlah	148.503.000,00	148.503.000,00	100,00	0,00	0,00	148.503.000,00	-
Jumlah		28.291.688.481,00	28.229.282.960,00	99,78	(62.405.521,00)	28.653.558.146,00	(424.275.186,00)	(1,48)

Belanja BOSP pada tahun 2024 sebesar Rp10.430.682.359,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.430.682.359,00 jika dibandingkan dengan tahun 2023, hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 Belanja BOSP disajikan pada kode rekening Belanja BOS.

Berikut dijelaskan sekolah-sekolah penerima dana Belanja Barang dan Jasa BOS, BOSP tahun 2024

1. Belanja Barang dan Jasa BOS Reguler SD Negeri Rp 17.798.600.601,00

2.	Belanja Barang dan Jasa BOS Reguler SMP Negeri	Rp	8.833.794.459,00
3.	Belanja Barang dan Jasa BOS Kinerja SD Negeri	Rp	552.524.500,00
4.	Belanja Barang dan Jasa BOS Kinerja SMP Negeri	Rp	367.765.400,00
5.	Belanja Barang dan Jasa BOP Kesetaraan Reguler Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Balik Bukit	Rp	148.503.000,00
6.	Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD Reguler TK Negeri	Rp	509.995.000,00
7.	Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD Reguler SKB Negeri	Rp	18.100.000,00
	Jumlah	Rp	28.229.282.960,00

5.1.2.1.2.7. Belanja Barang & Jasa BOK Puskesmas

Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas pada Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 124. Belanja Barang & Jasa BOK Puskesmas TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas							
1.	Barang dan Jasa BOK Puskesmas	12.746.241.500,00	12.614.091.934,93	98,96	(132.149.565,07)	0,00	12.614.091.934,93	∞
Jumlah		12.746.241.500,00	12.614.091.934,93	98,96	(132.149.565,07)	0,00	12.614.091.934,93	∞

Belanja BOK Puskesmas pada tahun 2024 sebesar Rp12.614.091.934,93 mengalami kenaikan sebesar Rp12.614.091.934,93 jika dibandingkan dengan tahun 2023, hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 Belanja BOK Puskesmas disajikan pada kode rekening sub rincian objek, sementara pada tahun 2024 ini belanja disajikan berdasarkan sumber dana.

5.1.2.1.2.8. Belanja Barang & Jasa BLUD

Belanja Barang & Jasa BLUD pada Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 125. Belanja Barang & Jasa BLUD TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**							
	Barang dan Jasa BLUD	40.361.543.686,00	39.060.562.784,82	96,78	(1.300.980.901,18)	35.480.794.359,80	3.579.768.425,02	10,09
	Jumlah	40.361.543.686,00	39.060.562.784,82	96,78	(1.300.980.901,18)	35.480.794.359,80	3.579.768.425,02	10,09

Belanja Barang dan Jasa untuk masing-masing Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 126. Belanja Barang dan Jasa Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	38.642.021.781,99	36.164.772.912,00	93,59	(2.477.249.769,00)	38.786.508.001,00	(2.621.735.989,00)	(6,76)
2.	Dinas Kesehatan	62.098.362.424,00	57.557.830.582,75	92,69	(4.540.531.841,25)	56.113.516.728,80	1.444.313.853,95	2,57
3.	RSUD Alimuddin Umar	29.236.857.517,00	28.384.010.157,00	97,08	(852.847.360,00)	26.103.541.981,00	2.280.468.176,00	8,74
4.	Dinas PU PR	7.783.500.540,00	7.603.645.290,00	97,69	(179.855.250,00)	7.364.337.403,00	239.307.887,00	3,25
5.	Kantor Satpol PP	4.793.190.925,00	4.655.562.277,00	97,13	(137.628.648,00)	4.495.767.852,00	159.794.425,00	3,55
6.	BPBD	1.426.378.250,00	1.420.283.596,00	99,57	(6.094.654,00)	1.636.457.978,00	(216.174.382,00)	(13,21)
7.	Dinas Sosial	2.028.259.200,00	2.000.921.501,00	98,65	(27.337.699,00)	2.386.929.317,00	(386.007.816,00)	(16,17)
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3.103.055.900,00	2.688.699.501,00	86,65	(414.356.399,00)	0,00	2.688.699.501,00	∞

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
9.	Dinas PP KB PP & PA	6.221.468.650,00	4.164.266.200,00	66,93	(2.057.202.450,00)	5.801.357.059,00	(1.637.090.859,00)	(28,22)
10.	Dinas Ketahanan Pangan	1.160.292.500,00	1.133.524.812,00	97,69	(26.767.688,00)	926.715.023,00	206.809.789,00	22,32
11.	Dinas Lingkungan Hidup	8.839.533.905,00	8.422.983.775,00	95,29	(416.550.130,00)	9.163.469.280,00	(740.485.505,00)	(8,08)
12.	Dinduk dan Capil	1.423.450.450,00	1.394.380.833,00	97,96	(29.069.617,00)	1.185.396.287,00	208.984.546,00	17,63
13.	Dinas PMP	2.787.073.130,00	2.761.713.454,00	99,09	(25.359.676,00)	1.315.438.461,00	1.446.274.993,00	109,95
14.	Dinas Perhubungan	1.135.052.300,00	1.087.345.287,00	95,80	(47.707.013,00)	735.687.839,00	351.657.448,00	47,80
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.255.645.995,00	3.909.500.428,00	91,87	(346.145.567,00)	4.133.002.822,00	(223.502.394,00)	(5,41)
16.	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	4.079.400.685,00	3.783.724.406,00	92,75	(295.676.279,00)	5.306.173.146,00	(1.522.448.740,00)	(28,69)
17.	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Naker	1.464.863.420,00	1.367.384.403,00	93,35	(97.479.017,00)	1.357.362.582,00	10.021.821,00	0,74
18.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.485.195.470,00	3.114.947.824,00	89,38	(370.247.646,00)	3.008.424.823,00	106.523.001,00	3,54
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1.351.166.000,00	1.294.719.699,00	95,82	(56.446.301,00)	765.209.888,00	529.509.811,00	69,20
20.	Dinas Perikanan	1.684.004.550,00	1.637.868.962,00	97,26	(46.195.588,00)	1.563.456.704,00	74.412.258,00	4,76
21.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.367.001.850,00	2.278.210.963,00	96,25	(88.790.887,00)	1.847.867.401,00	430.343.562,00	23,29
22.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	2.789.786.670,00	2.609.052.075,00	93,52	(180.734.595,00)	3.293.317.794,00	(684.265.719,00)	(20,78)
23.	Sekretariat Daerah	19.174.732.420,00	17.991.616.275,00	93,83	(1.183.116.145,00)	22.512.390.975,00	(4.520.774.700,00)	(20,08)
24.	Sekretariat DPRD	21.676.278.005,00	20.539.478.805,00	94,76	(1.136.799.200,00)	19.661.515.416,00	877.963.389,00	4,47
25.	BAPPEDA	3.707.388.170,00	3.623.920.411,00	97,75	(83.467.759,00)	3.316.030.272,00	307.890.139,00	9,28
26.	Badan Pendapatan Daerah	2.947.783.300,00	2.788.812.356,00	94,61	(158.970.944,00)	0,00	2.788.812.356,00	∞
27.	BKAD	7.219.389.126,00	6.170.571.811,00	85,47	(1.048.817.315,00)	7.394.756.962,00	(1.224.185.151,00)	(16,55)
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2.004.804.000,00	1.638.773.085,00	81,74	(366.030.915,00)	2.021.342.522,00	(382.569.437,00)	(18,93)
29.	Badan Riset Daerah	2.326.068.007,00	2.279.149.031,00	97,99	(46.918.976,00)	1.084.460.736,00	1.194.688.293,00	110,16
30.	Inspektorat	4.886.032.400,00	4.833.854.466,00	98,93	(52.177.934,00)	2.914.564.960,00	1.919.289.506,00	65,85
31.	Kec. Sumber Jaya	684.083.600,00	680.045.556,00	99,41	(4.038.044,00)	691.590.774,00	(11.545.218,00)	(1,67)
32.	Kec. Way Tenong	705.953.100,00	695.549.867,00	98,53	(10.403.233,00)	682.873.233,00	12.676.634,00	1,86
33.	Kec. Sekincau	669.544.980,00	666.188.036,00	99,50	(3.356.944,00)	652.367.199,00	13.820.837,00	2,12
34.	Kec. Belalau	286.278.480,00	277.010.302,00	96,76	(9.268.158,00)	241.345.020,00	35.665.282,00	14,78
35.	Kec. Batu Brak	277.906.200,00	274.449.484,00	98,76	(3.456.716,00)	262.412.202,00	12.037.282,00	4,59
36.	Kec. Balik Bukit	984.397.600,00	978.055.891,00	99,36	(6.341.709,00)	925.059.714,00	52.996.177,00	5,73
37.	Kec. Sukau	261.793.000,00	247.696.853,00	94,62	(14.096.147,00)	222.913.885,00	24.782.968,00	11,12
38.	Kec. Suoh	270.493.900,00	265.343.900,00	98,10	(5.150.000,00)	272.725.000,00	(7.381.100,00)	(2,71)
39.	Kec. Gedung Surian	269.318.200,00	265.544.992,00	98,60	(3.773.208,00)	258.379.692,00	7.165.300,00	2,77
40.	Kec. Kebun Tebu	275.954.000,00	274.565.925,00	99,50	(1.388.075,00)	225.522.330,00	49.043.595,00	21,75
41.	Kec. Air Hitam	305.784.000,00	304.184.000,00	99,48	(1.600.000,00)	216.245.000,00	87.939.000,00	40,67
42.	Kec. Pagar Dewa	267.816.000,00	265.836.000,00	99,26	(1.980.000,00)	258.695.600,00	7.140.400,00	2,76
43.	Kec. Batu Ketulis	290.767.900,00	282.686.200,00	97,22	(8.081.700,00)	246.869.400,00	35.816.800,00	14,51
44.	Kec. Bandar Negeri Suoh	238.761.900,00	228.021.900,00	95,50	(10.740.000,00)	248.052.400,00	(20.030.500,00)	(8,08)
45.	Kec. Lumbok Seminung	275.864.000,00	274.677.800,00	99,57	(1.186.200,00)	247.353.325,00	27.324.475,00	11,05
46.	Kantor Kesbangpol	2.415.468.540,00	2.377.575.668,00	98,43	(37.892.872,00)	1.826.044.961,00	551.530.707,00	30,20
	Jumlah	264.580.882.920,00	247.658.956.651,75	93,60	(16.921.926.268,25)	243.673.449.949,80	3.985.506.701,95	1,64

5.1.2.1.3. Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga yang dihitung atas kewajiban pokok utang, berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja Bunga Tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.720.929.625,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.534.971.060,00 atau 68,13%. Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp1.020.528.002,00) atau (28,70%) dibandingkan dengan realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2023 yang sebesar

Rp3.555.499.062,00. Belanja bunga pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena perhitungan pembayaran bunga berdasarkan saldo pokok pinjaman yang menurun setiap tahun.

Belanja Bunga untuk masing-masing Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 127. Belanja Bunga Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	3.720.929.625,00	2.534.971.060,00	68,13	(1.185.958.565,00)	3.555.499.062,00	(1.020.528.002,00)	(28,70)
	Jumlah	3.720.929.625,00	2.534.971.060,00	68,13	(1.185.958.565,00)	3.555.499.062,00	(1.020.528.002,00)	(28,70)

Realisasi Belanja Bunga Tahun 2024 ini merupakan pembayaran Bunga atas pinjaman dana dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) total sebesar Rp2.534.971.060,00 lebih rinci belanja bunga disajikan dalam lampiran 4 pada laporan keuangan ini.

5.1.2.1.4. Belanja Subsidi

Pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki anggaran dan realisasi atas belanja subsidi.

5.1.2.1.5. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian Belanja Hibah diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa pemberian hibah tidak wajib sesuai kemampuan keuangan daerah, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Belanja Hibah Tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp40.336.230.502,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun anggaran 2024 sebesar Rp40.232.656.643,00 atau 99,74%. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp7.921.941.855,00 atau 24,52% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp32.310.714.788,00.

Realisasi Belanja Hibah dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 128. Belanja Hibah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	**Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat**							
a.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	25.519.241.881,00	25.519.241.057,00	100,00	(824,00)	15.473.389.371,00	10.045.851.686,00	64,92
b.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	723.739.062,00	716.137.227,00	98,95	(7.601.835,00)	223.545.345,00	492.591.882,00	220,35
	Sub Jumlah	**26.242.980.943,00**	**26.235.378.284,00**	**99,97**	**(7.602.659,00)**	**15.696.934.716,00**	**10.538.443.568,00**	**67,14**
2.	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**							
a.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.742.556.000,00	3.691.002.800,00	98,62	(51.553.200,00)	6.886.252.000,00	(3.195.249.200,00)	(46,40)

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
b.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.978.655.000,00	2.936.230.000,00	98,58	(42.425.000,00)	4.529.865.000,00	(1.593.635.000,00)	(35,18)
c.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	375.000.000,00	375.000.000,00	100,00	0,00	762.000.000,00	(387.000.000,00)	(50,79)
d.	Belanja Hibah kepada Koperasi	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
e.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	165.000.000,00	165.000.000,00	100,00	0,00	190.000.000,00	(25.000.000,00)	(13,16)
	Sub Jumlah	**7.276.211.000,00**	**7.182.232.800,00**	**98,71**	**(93.978.200,00)**	**12.383.117.000,00**	**(5.200.884.200,00)**	**(42,00)**
3.	**Belanja Hibah Dana BOS**							
	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.688.720.000,00	3.688.252.000,00	99,99	(468.000,00)	3.559.408.800,00	128.843.200,00	3,62
	Sub Jumlah	**3.688.720.000,00**	**3.688.252.000,00**	**99,99**	**(468.000,00)**	**3.559.408.800,00**	**128.843.200,00**	**3,62**
4.	**Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**							
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	667.578.559,00	667.578.559,00	100,00	0,00	671.254.272,00	(3.675.713,00)	(0,55)
	Sub Jumlah	**667.578.559,00**	**667.578.559,00**	**100,00**	**0,00**	**671.254.272,00**	**(3.675.713,00)**	**(0,55)**
5.	**Belanja Hibah Dana BOSP**							
	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.460.740.000,00	2.459.215.000,00	99,94	(1.525.000,00)	0,00	2.459.215.000,00	-
	Sub Jumlah	**2.460.740.000,00**	**2.459.215.000,00**	**99,94**	**(1.525.000,00)**	**0,00**	**2.459.215.000,00**	**-**
Jumlah		**40.336.230.502,00**	**40.232.656.643,00**	**99,74**	**(103.573.859,00)**	**32.310.714.788,00**	**7.921.941.855,00**	**24,52**

Realisasi belanja hibah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Belanja hibah kepada pemerintah pusat adalah hibah yang diberikan kepada instansi pemerintah pusat dalam rangka mendukung keberlangsungan operasional instansi Pemerintah Pusat yang berlokasi dan berperan serta dalam menyediakan pelayanan di wilayah Kabupaten Lampung Barat. Belanja hibah kepada pemerintah pusat dianggarkan sebesar Rp26.242.980.943,00 terealisasi sebesar Rp26.235.378.284,00 atau 99,97%. Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp10.538.443.568,00 atau 67,14% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp15.696.934.716,00.

b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat adalah hibah yang diberikan kepada Badan/Lembaga kemasyarakatan bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah berbadan hukum, memiliki surat keterangan terdaftar dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri atau Gubernur/ Bupati atau pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya dalam rangka memberikan nilai manfaat serta mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Belanja hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dianggarkan sebesar Rp7.276.211.000,00 terealisasi sebesar Rp7.182.232.800,00 atau 98,71%. Realisasi Belanja hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp5.200.884.200,00) atau (42,00%) dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Kepada

Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp12.383.117.000,00.

c. Belanja Hibah Dana BOS

Belanja hibah dana BOS adalah hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat yang ditransfer secara langsung ke rekening sekolah swasta. Nilai belanja hibah BOS adalah sebesar nilai transfer dana BOS ke rekening sekolah swasta.

Belanja hibah Hibah Dana BOS dianggarkan sebesar Rp3.688.720.000,00 terealisasi sebesar Rp3.688.252.000,00 atau 99,99%. Realisasi Belanja Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp128.843.200,00 atau 3,62% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp3.559.408.800,00.

d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik adalah Bantuan keuangan dari APBD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada Partai Politik berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp667.578.559,00 terealisasi sebesar Rp667.578.559,00 atau 100,00%. Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp3.675.713,00) atau (0,55%) dari Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp671.254.272,00.

e. Belanja Hibah Dana BOSP

Belanja Hibah Dana BOSP dianggarkan sebesar Rp2.460.740.000,00 terealisasi sebesar Rp2.459.215.000,00 atau 99,94%. Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp2.459.215.000,00 dari Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp0,00.

Untuk lebih rinci realisasi belanja hibah terdapat dalam lampiran 5 pada laporan keuangan ini.

5.1.2.1.6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
Pada Tahun Anggaran 2024 Belanja Bantuan Sosial tidak terserap karena pada tahun ini tidak terdapat bencana alam (diluar bencana kebakaran) yang berdampak sosial luas serta tidak terdapat Surat Tanggap Bencana Alam dari Bupati Lampung Barat.

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp45.000.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Realisasi Belanja Hibah Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp244.550.000,00) atau (100,00%) dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp244.550.000,00, dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 129. Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	45.000.000,00	0,00	0,00	(45.000.000,00)	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Bantuan Sosial Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	74.550.000,00	(74.550.000,00)	(100,00)

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
	yang Direncanakan kepada Individu							
3.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	(170.000.000,00)	(100,00)
Jumlah		45.000.000,00	0,00	0,00	(45.000.000,00)	244.550.000,00	(244.550.000,00)	(100,00)

5.1.2.2. BELANJA MODAL

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/ pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp163.892.744.934,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp155.348.663.663,00 atau 94,79% mengalami peningkatan sebesar Rp38.341.237.531,00 atau 32,77% bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp117.007.426.132,00.

Tabel 130. Belanja Modal TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.805.825.852,00	20.116.516.662,00	96,69	(689.309.190,00)	23.471.410.062,00	(3.354.893.400,00)	(14,29)
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.479.225.145,00	88.928.047.258,00	92,17	(7.551.177.886,00)	20.128.517.180,00	68.799.530.079,00	341,80
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	41.635.055.304,00	41.372.206.332,00	99,37	(262.848.972,00)	67.418.166.745,00	(26.045.960.413,00)	(38,63)
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.774.708.633,00	4.734.413.410,00	99,16	(40.295.223,00)	5.836.651.645,00	(1.102.238.235,00)	(18,88)
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	197.930.000,00	197.480.000,00	99,77	(450.000,00)	152.680.500,00	44.799.500,00	29,34
Jumlah		163.892.744.934,00	155.348.663.663,00	94,79	(8.544.081.271,00)	117.007.426.132,00	38.341.237.531,00	32,77

Berikut tabel rincian belanja modal TA 2024 dan 2023

Tabel 131. Rincian Belanja Modal TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Peralatan dan Mesin							
1.	Alat Besar Darat	0,00	0,00	-	0,00	118.259.198,00	(118.259.198,00)	(100,00)
2.	Alat Bantu	109.597.000,00	102.237.000,00	93,28	(7.360.000,00)	340.103.854,00	(237.866.854,00)	(69,94)
3.	Alat Angkutan Darat Bermotor	4.464.181.000,00	4.424.260.000,00	99,11	(39.921.000,00)	982.800.000,00	3.441.460.000,00	350,17
4.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	648.101.000,00	645.000.000,00	99,52	(3.101.000,00)	451.861.515,00	193.138.485,00	42,74
5.	Alat Bengkel Bermesin	30.470.000,00	29.900.000,00	98,13	(570.000,00)	72.961.000,00	(43.061.000,00)	(59,03)
6.	Alat Bengkel Tak Bermesin	2.382.300,00	2.382.300,00	100,00	0,00	13.094.300,00	(10.712.000,00)	(81,81)
7.	Alat Ukur	25.936.500,00	25.934.440,00	99,99	(2.060,00)	4.082.500,00	21.851.940,00	535,26
8.	Alat Pengolahan	339.417.500,00	338.554.200,00	99,75	(863.300,00)	701.119.000,00	(362.564.800,00)	(51,71)
9.	Alat Kantor	634.518.000,00	527.557.160,00	96,70	(6.960.840,00)	279.850.160,00	247.707.000,00	88,51
10.	Alat Rumah Tangga	3.223.424.348,00	3.098.639.178,00	96,13	(124.785.170,00)	10.291.266.322,00	(7.192.627.144,00)	(69,89)
11.	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	100.600.000,00	99.561.000,00	98,97	(1.039.000,00)	235.935.500,00	(136.374.500,00)	(57,80)
12.	Alat Studio	114.536.000,00	107.250.000,00	93,64	(7.286.000,00)	471.742.499,00	(364.492.499,00)	(77,27)
13.	Alat Komunikasi	38.440.000,00	38.440.000,00	100,00	0,00	79.200.000,00	(40.760.000,00)	(51,46)
14.	Peralatan Pemancar	173.750.000,00	173.191.500,00	99,68	(558.500,00)	76.880.000,00	96.311.500,00	125,28
15.	Alat Kedokteran	1.917.350.000,00	1.910.543.500,00	99,65	(6.806.500,00)	1.496.998.000,00	413.545.500,00	27,62
16.	Alat Kesehatan Umum	69.330.000,00	69.330.000,00	100,00	0,00	0,00	69.330.000,00	-

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
17.	Unit Alat Laboratorium	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00	0,00	44.000.000,00	(38.900.000,00)	(88,41)
18.	Alat Peraga Praktek Sekolah	191.460.000,00	190.785.000,00	99,65	(675.000,00)	20.925.000,00	169.860.000,00	811,76
19.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	32.375.000,00	32.335.000,00	99,88	(40.000,00)	6.393.000,00	25.942.000,00	405,79
20.	Komputer Unit	1.358.295.000,00	1.333.223.305,00	98,15	(25.071.695,00)	1.423.255.050,00	(90.031.745,00)	(6,33)
21.	Peralatan Komputer	590.723.797,00	583.432.497,00	98,77	(7.291.300,00)	249.179.220,00	334.253.277,00	134,14
22.	Alat Eksplorasi Topografi	325.200.000,00	324.320.910,00	99,73	(879.090,00)	0,00	324.320.910,00	-
23.	Sumur	285.000.000,00	253.886.756,00	99,61	(1.113.244,00)	24.780.750,00	259.106.006,00	1.045,59
24.	Alat Pelindung	5.829.000,00	5.828.857,00	100,00	(143,00)	10.000.000,00	(4.171.143,00)	(41,71)
25.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	265.206.400,00	264.705.137,00	99,81	(501.263,00)	0,00	264.705.137,00	-
26.	Peralatan Olahraga	59.845.000,00	58.934.000,00	98,48	(911.000,00)	93.542.000,00	(34.608.000,00)	(37,00)
27.	Peralatan dan Mesin BOS	3.399.372.719,00	3.345.182.969,00	98,41	(54.189.750,00)	3.922.690.700,00	(577.507.731,00)	(14,72)
28.	Peralatan dan Mesin BLUD	2.495.385.288,00	2.096.001.953,00	84,00	(399.383.335,00)	2.060.470.494,00	35.531.459,00	1,72
	Jumlah	**20.805.825.852,00**	**20.116.516.662,00**	**96,69**	**(689.309.190,00)**	**23.471.410.062,00**	**(3.354.893.400,00)**	**(14,29)**
	Gedung dan Bangunan							
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	95.930.025.145,00	88.393.377.259,00	92,14	(7.536.647.886,00)	18.905.915.180,00	69.487.462.079,00	367,54
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	-	0,00	35.900.000,00	(35.900.000,00)	(100,00)
3.	Bangunan Menara Perambuan	0,00	0,00	-	0,00	793.711.000,00	(793.711.000,00)	(100,00)
4.	Tugu/Tanda Batas	169.200.000,00	168.670.000,00	99,69	(530.000,00)	164.876.000,00	3.794.000,00	2,30
5.	Gedung dan Bangunan BLUD	380.000.000,00	366.000.000,00	96,32	(14.000.000,00)	228.115.000,00	137.885.000,00	60,45
	Jumlah	**96.479.225.145,00**	**88.928.047.259,00**	**92,17**	**(7.551.177.886,00)**	**20.128.517.180,00**	**68.799.530.079,00**	**341,80**
	Jalan, Jaringan dan Irigasi							
1.	Jalan	34.641.246.454,00	34.414.026.502,00	99,34	(227.219.952,00)	49.555.278.801,00	(15.141.252.299,00)	(30,55)
2.	Jembatan	2.419.200.000,00	2.409.918.000,00	99,62	(9.282.000,00)	2.306.361.920,00	103.556.080,00	4,49
3.	Bangunan Air Irigasi	1.580.273.550,00	1.575.571.050,00	99,70	(4.702.500,00)	3.103.583.000,00	(1.528.011.950,00)	(49,23)
4.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.123.460.300,00	1.120.125.380,00	99,70	(3.334.920,00)	12.286.443.024,00	(11.166.317.644,00)	(90,88)
5.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	6.000.000,00	-
6.	Bangunan Air Kotor	394.875.000,00	391.565.400,00	99,16	(3.309.600,00)	166.500.000,00	225.065.400,00	135,17
7.	Instalasi Lain	1.470.000.000,00	1.455.000.000,00	98,98	(15.000.000,00)	0,00	1.455.000.000,00	-
	Jumlah	**41.635.055.304,00**	**41.372.206.332,00**	**99,37**	**(262.848.972,00)**	**67.418.166.745,00**	**(26.045.960.413,00)**	**(38,63)**
	Aset Tetap Lainnya							
1.	Bahan Perpustakaan Tercetak	140.453.000,00	114.549.000,00	81,56	(25.904.000,00)	876.491.500,00	(761.942.500,00)	(86,93)
2.	Bahan Perpustakaan Tersekam dan Bentuk Mikro	19.002.833,00	16.026.510,00	84,34	(2.976.323,00)	6.105.000,00	9.921.510,00	162,51
3.	Kartografi, Naskah, dan Lukisan	0,00	0,00	-	0,00	38.628.000,00	(38.628.000,00)	(100,00)
4.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-
5.	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	-	0,00	498.094.035,00	(498.094.035,00)	(100,00)
6.	Aset Tetap Lainnya BOS	4.610.252.800,00	4.598.837.900,00	99,75	(11.414.900,00)	4.417.333.110,00	181.504.790,00	4,11
	Jumlah	**4.774.708.633,00**	**4.734.413.410,00**	**99,16**	**(40.295.223,00)**	**5.836.651.645,00**	**(1.102.238.235,00)**	**(18,88)**
	Aset Lainnya							
1.	Aset Tidak Berwujud	197.930.000,00	197.480.000,00	99,77	(450.000,00)	152.680.500,00	44.799.500,00	29,34
2.	Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah	**197.930.000,00**	**197.480.000,00**	**99,77**	**(450.000,00)**	**152.680.500,00**	**44.799.500,00**	**29,34**
Jumlah		**163.892.744.934,00**	**155.348.663.663,00**	**94,79**	**(8.544.081.271,00)**	**117.007.426.132,00**	**38.341.237.531,00**	**32,77**

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada tahun anggaran 2024 dan 2023 tidak memiliki belanja modal tanah.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp20.805.825.852,00 Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp20.116.516.662,00 atau 96,69% mengalami penurunan sebesar (Rp3.354.893.400,00) atau (14,29%) bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.471.410.062,00

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagai extracomptable sebesar Rp723.593.180,00 dan Belanja Modal tidak menjadi aset sebesar Rp425.616.900,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam Sistem Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Belanja modal peralatan dan mesin diantaranya meliputi belanja modal alat besar, alat angkut, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer, alat produksi pengolahan dan pemurnian, alat keselamatan kerja, peralatan olahraga, peralatan dan mesin BOS, peralatan dan mesin BLUD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 132. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	PERALATAN DAN MESIN							
1.	**Alat Besar:**	**109.597.000,00**	**102.237.000,00**	**93,28**	**(7.360.000,00)**	**458.363.052,00**	**(356.126.052,00)**	**(77,70)**
	Alat Besar Darat	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.259.198,00**	**(118.259.198,00)**	**(100,00)**
	- Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	0,00	118.259.198,00	(118.259.198,00)	(100,00)
	Alat Bantu	**109.597.000,00**	**102.237.000,00**	**93,28**	**(7.360.000,00)**	**340.103.854,00**	**(237.866.854,00)**	**(69,94)**
	- Electric Generating Set	43.400.000,00	39.940.000,00	92,03	(3.460.000,00)	249.400.000,00	(209.460.000,00)	(83,99)
	- Pompa	33.947.000,00	30.047.000,00	88,51	(3.900.000,00)	48.042.000,00	(17.995.000,00)	(37,46)
	- Mesin Bor	0,00	0,00	∞	0,00	2.311.854,00	(2.311.854,00)	(100,00)
	- Perlengkapan Kebakaran Hutan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	40.350.000,00	(25.350.000,00)	(62,83)
	- Peralatan Selam	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00	0,00	12.000.000,00	∞
	- Alat Bantu Lainnya	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	0,00	0,00	5.250.000,00	∞
2.	**Alat Angkutan:**	**5.112.282.000,00**	**5.069.260.000,00**	**99,16**	**(43.022.000,00)**	**1.434.661.515,00**	**3.634.598.485,00**	**253,34**
	Alat Angkutan Darat Bermotor	**4.464.181.000,00**	**4.424.260.000,00**	**99,11**	**(39.921.000,00)**	**962.800.000,00**	**3.461.460.000,00**	**350,17**
	- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	∞	0,00	727.800.000,00	(727.800.000,00)	(100,00)
	- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	629.550.000,00	601.560.000,00	95,55	(27.990.000,00)	0,00	601.560.000,00	∞
	- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.000.000,00	36.600.000,00	91,50	(3.400.000,00)	0,00	36.600.000,00	∞
	- Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	380.000.000,00	376.600.000,00	99,11	(3.400.000,00)	0,00	376.600.000,00	∞
	- Kendaraan Bermotor Khusus	2.327.106.000,00	2.322.000.000,00	99,78	(5.106.000,00)	255.000.000,00	2.067.000.000,00	810,59
	- Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.087.525.000,00	1.087.500.000,00	100,00	(25.000,00)	0,00	1.087.500.000,00	∞
	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	**648.101.000,00**	**645.000.000,00**	**99,52**	**(3.101.000,00)**	**451.861.515,00**	**193.138.485,00**	**42,74**
	- Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	648.101.000,00	645.000.000,00	99,52	(3.101.000,00)	449.400.000,00	195.600.000,00	43,52
	- Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	0,00	0,00	∞	0,00	2.461.515,00	(2.461.515,00)	(100,00)
3.	**Alat Bengkel dan Alat Ukur**	**58.788.800,00**	**58.216.740,00**	**99,03**	**(572.060,00)**	**90.157.800,00**	**(31.941.060,00)**	**(35,43)**
	Alat Bengkel Bermesin	**30.470.000,00**	**29.900.000,00**	**98,13**	**(570.000,00)**	**72.981.000,00**	**(43.081.000,00)**	**(59,03)**
	- Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	0,00	0,00	∞	0,00	19.200.000,00	(19.200.000,00)	(100,00)
	- Perkakas Bengkel Kayu	29.900.000,00	29.900.000,00	100,00	0,00	51.531.000,00	(21.631.000,00)	(41,98)
	- Perkakas Bengkel Khusus	570.000,00	0,00	∞	(570.000,00)	0,00	0,00	∞
	- Peralatan Las	0,00	0,00	∞	0,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)	(100,00)
	Alat Bengkel Tak Bermesin	**2.382.300,00**	**2.382.300,00**	**100,00**	**0,00**	**13.094.300,00**	**(10.712.000,00)**	**(81,81)**

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	- Perkakas Bengkel Kerja	0,00	0,00	∞	0,00	11.671.000,00	(11.671.000,00)	(100,00)
	- Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	30.000,00	∞
	- Perkakas Bangkel Service	200.100,00	200.100,00	100,00	0,00	0,00	200.100,00	∞
	- Peralatan Tukang Kayu	2.132.200,00	2.132.200,00	100,00	0,00	1.423.300,00	708.900,00	49,81
	- Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	20.000,00	∞
	Alat Ukur	**25.936.500,00**	**25.934.440,00**	**99,99**	**(2.060,00)**	**4.082.500,00**	**21.851.940,00**	**535,26**
	- Alat Ukur Universal	12.250.000,00	12.250.000,00	100,00	0,00	0,00	12.250.000,00	∞
	- Alat Ukur/Pembanding	2.580.000,00	2.580.000,00	100,00	0,00	0,00	2.580.000,00	∞
	- Alat Timbangan/Ukara	11.106.500,00	11.104.440,00	99,98	(2.060,00)	4.082.500,00	7.021.940,00	172,00
4.	**Alat Pertanian**	**339.417.500,00**	**338.554.200,00**	**99,75**	**(863.300,00)**	**701.119.000,00**	**(362.564.800,00)**	**(51,71)**
	Alat Pengolahan	**339.417.500,00**	**338.554.200,00**	**99,75**	**(863.300,00)**	**701.119.000,00**	**(362.564.800,00)**	**(51,71)**
	- Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	(3.700.000,00)	(100,00)
	- Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	0,00	1.152.000,00	2.048.000,00	177,78
	- Alat Panen	0,00	0,00	∞	0,00	13.000.000,00	(13.000.000,00)	(100,00)
	- Alat Processing	229.192.500,00	228.572.200,00	99,73	(620.300,00)	656.267.000,00	(427.694.800,00)	(65,17)
	- Alat Produksi Perikanan	107.025.000,00	106.782.000,00	99,77	(243.000,00)	0,00	106.782.000,00	
	- Alat-Alat Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	(27.000.000,00)	(100,00)
5.	**Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**3.858.542.348,00**	**3.725.757.338,00**	**96,56**	**(132.785.010,00)**	**10.807.051.982,00**	**(7.081.294.644,00)**	**(65,52)**
	Alat Kantor	**534.518.000,00**	**527.557.160,00**	**98,70**	**(6.960.840,00)**	**279.850.160,00**	**247.707.000,00**	**88,51**
	- Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	110.399.000,00	110.104.780,00	99,73	(294.220,00)	99.270.000,00	10.834.780,00	10,91
	- Alat Kantor Lainnya	424.119.000,00	417.452.380,00	98,43	(6.666.620,00)	180.580.160,00	236.872.220,00	131,17
	Alat Rumah Tangga	**3.223.424.348,00**	**3.098.639.178,00**	**96,13**	**(124.785.170,00)**	**10.291.266.322,00**	**(7.192.627.144,00)**	**(69,89)**
	- Mebel	2.412.059.000,00	2.363.165.713,00	97,97	(48.893.287,00)	9.594.668.432,00	(7.231.502.719,00)	(75,37)
	- Alat Pembersih	0,00	0,00	∞	0,00	19.630.400,00	(19.630.400,00)	(100,00)
	- Alat Pendingin	309.975.860,00	296.402.963,00	95,62	(13.572.897,00)	15.655.590,00	280.747.373,00	1.793,27
	- Alat Dapur	117.882.050,00	117.639.561,00	99,79	(242.489,00)	261.477.000,00	(143.837.439,00)	(55,01)
	- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	327.287.438,00	265.212.561,00	81,03	(62.074.877,00)	359.434.900,00	(94.222.339,00)	(26,21)
	- Alat Pemadam Kebakaran	56.220.000,00	56.218.380,00	100,00	(1.620,00)	40.400.000,00	15.818.380,00	39,15
	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejaba	**100.600.000,00**	**99.561.000,00**	**98,97**	**(1.039.000,00)**	**235.935.500,00**	**(136.374.500,00)**	**(57,80)**
	- Meja Kerja Pejabat	44.100.000,00	43.520.000,00	98,68	(580.000,00)	93.084.500,00	(49.564.500,00)	(53,25)
	- Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	∞	0,00	7.881.000,00	(7.881.000,00)	(100,00)
	- Kursi Kerja Pejabat	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00	0,00	39.790.000,00	(13.290.000,00)	(33,40)
	- Kursi Rapat Pejabat	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	90.380.000,00	(75.380.000,00)	(83,40)
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	15.000.000,00	14.541.000,00	96,94	(459.000,00)	4.800.000,00	9.741.000,00	202,94
6.	**Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**	**326.726.000,00**	**318.881.500,00**	**97,60**	**(7.844.500,00)**	**627.822.499,00**	**(308.940.999,00)**	**(49,21)**
	Alat Studio	**114.536.000,00**	**107.250.000,00**	**93,64**	**(7.286.000,00)**	**471.742.499,00**	**(364.492.499,00)**	**(77,27)**
	- Peralatan Studio Audio	18.400.000,00	15.550.000,00	84,51	(2.850.000,00)	132.999.999,00	(117.449.999,00)	(88,31)
	- Peralatan Studio Video dan Film	95.636.000,00	91.200.000,00	95,36	(4.436.000,00)	163.642.500,00	(72.442.500,00)	(44,27)
	- Peralatan Studio Gambar	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	162.904.000,00	(162.304.000,00)	(99,69)
	- Peralatan Cetak	0,00	0,00	∞	0,00	4.400.000,00	(4.400.000,00)	(100,00)
	- Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	∞	0,00	7.896.000,00	(7.896.000,00)	(100,00)
	Alat Komunikasi	**38.440.000,00**	**38.440.000,00**	**100,00**	**0,00**	**79.200.000,00**	**(40.760.000,00)**	**(51,46)**
	- Alat Komunikasi Telephone	28.540.000,00	28.540.000,00	100,00	0,00	13.500.000,00	15.040.000,00	111,41
	- Alat Komunikasi Radio HF/FM	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00	0,00	13.200.000,00	(3.300.000,00)	(25,00)
	- Alat Komunikasi Digital dan	0,00	0,00	∞	0,00	52.500.000,00	(52.500.000,00)	(100,00)

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Konvensional							
	Peralatan Pemancar	**173.750.000,00**	**173.191.500,00**	**99,68**	**(558.500,00)**	**76.880.000,00**	**96.311.500,00**	**125,28**
	- Peralatan Pemancar UHF	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	0,00	1.500.000,00	2.250.000,00	150,00
	- Peralatan Perlengkapan Radio	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	(65.000.000,00)	(100,00)
	- Sumber Tenaga	170.000.000,00	169.441.500,00	99,67	(558.500,00)	10.000.000,00	159.441.500,00	1.594,42
	- Peralatan Pemancar Lainnya	0,00	0,00	-	0,00	380.000,00	(380.000,00)	(100,00)
7.	**Alat Kedokteran dan Kesehatan**	**1.986.680.000,00**	**1.979.873.500,00**	**99,66**	**(6.806.500,00)**	**1.496.998.000,00**	**482.875.500,00**	**32,26**
	Alat Kedokteran	**1.917.350.000,00**	**1.910.543.500,00**	**99,65**	**(6.806.500,00)**	**1.496.998.000,00**	**413.545.500,00**	**27,62**
	- Alat Kedokteran Umum	69.498.000,00	63.120.000,00	90,82	(6.378.000,00)	530.852.000,00	(467.732.000,00)	(88,11)
	- Alat Kedokteran Gigi	0,00	0,00	-	0,00	151.000.000,00	(151.000.000,00)	(100,00)
	- Alat Kedokteran Mata	1.432.002.000,00	1.431.577.000,00	99,97	(425.000,00)	0,00	1.431.577.000,00	-
	- Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	-	0,00	1.146.000,00	(1.146.000,00)	(100,00)
	- Alat Kedokteran Jantung	0,00	0,00	-	0,00	113.200.000,00	(113.200.000,00)	(100,00)
	- Alat Kedokteran Anestesi	0,00	0,00	-	0,00	527.000.000,00	(527.000.000,00)	(100,00)
	- Alat Kedokteran Poliklinik	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00	0,00	0,00	2.625.000,00	-
	- Alat Kesehatan Rehabilitasi Medik	12.625.000,00	12.625.000,00	100,00	0,00	0,00	12.625.000,00	-
	- Alat Kedokteran Lainnya	400.600.000,00	400.596.500,00	100,00	(3.500,00)	173.800.000,00	226.796.500,00	130,49
	Alat Kesehatan Umum	**69.330.000,00**	**69.330.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**69.330.000,00**	-
	- Alat Kesehatan Umum Lainnya	69.330.000,00	69.330.000,00	100,00	0,00	0,00	69.330.000,00	-
8.	**Alat Laboratorium**	**228.935.000,00**	**228.220.000,00**	**99,69**	**(715.000,00)**	**71.318.000,00**	**156.902.000,00**	**220,00**
	Unit Alat Laboratorium	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**100,00**	**0,00**	**44.000.000,00**	**(38.900.000,00)**	**(88,41)**
	- Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	(44.000.000,00)	(100,00)
	- Alat Laboratorium Umum	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00	0,00	0,00	5.100.000,00	-
	Alat Peraga Praktek Sekolah	**191.460.000,00**	**190.785.000,00**	**99,65**	**(675.000,00)**	**20.925.000,00**	**169.860.000,00**	**811,76**
	- Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi IPA Menengah	170.775.000,00	170.100.000,00	99,60	(675.000,00)	0,00	170.100.000,00	-
	- Alat Peraga PAUD/TK	20.685.000,00	20.685.000,00	100,00	0,00	20.925.000,00	(240.000,00)	(1,15)
	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	**32.375.000,00**	**32.335.000,00**	**99,88**	**(40.000,00)**	**6.393.000,00**	**25.942.000,00**	**405,79**
	- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	32.375.000,00	32.335.000,00	99,88	(40.000,00)	6.393.000,00	25.942.000,00	405,79
9.	**Komputer**	**1.949.018.797,00**	**1.916.655.802,00**	**98,34**	**(32.362.995,00)**	**1.672.434.270,00**	**244.221.532,00**	**14,60**
	Komputer Unit	**1.358.295.000,00**	**1.333.223.305,00**	**98,15**	**(25.071.695,00)**	**1.423.255.050,00**	**(90.031.745,00)**	**(6,33)**
	- Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	(5.850.000,00)	(100,00)
	- Personal Computer	1.302.829.000,00	1.277.981.305,00	98,09	(24.847.695,00)	313.233.050,00	964.748.255,00	308,00
	- Komputer Unit Lainnya	55.466.000,00	55.242.000,00	99,60	(224.000,00)	1.104.172.000,00	(1.048.930.000,00)	(95,00)
	Peralatan Komputer	**590.723.797,00**	**583.432.497,00**	**98,77**	**(7.291.300,00)**	**249.179.220,00**	**334.253.277,00**	**134,14**
	- Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938.500,00	(5.938.500,00)	(100,00)
	- Peralatan Mini Computer	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	0,00	60.606.000,00	(43.606.000,00)	(71,95)
	- Peralatan Personal Computer	449.912.500,00	445.760.000,00	99,08	(4.152.500,00)	16.783.600,00	428.976.400,00	2.555,93
	- Peralatan Jaringan	17.449.197,00	17.449.197,00	100,00	0,00	25.714.020,00	(8.264.823,00)	(32,14)
	- Peralatan Komputer Lainnya	106.362.100,00	103.223.300,00	97,05	(3.138.800,00)	140.137.100,00	(36.913.800,00)	(26,34)
10.	**Alat Eksplorasi**	**325.200.000,00**	**324.320.910,00**	**99,73**	**(879.090,00)**	**0,00**	**324.320.910,00**	-
	Alat Eksplorasi Topografi	**325.200.000,00**	**324.320.910,00**	**99,73**	**(879.090,00)**	**0,00**	**324.320.910,00**	-
	- Ukur/Instrumen	325.200.000,00	324.320.910,00	99,73	(879.090,00)	0,00	324.320.910,00	-
11.	**Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian**	**285.000.000,00**	**283.886.756,00**	**99,61**	**(1.113.244,00)**	**24.780.750,00**	**259.106.006,00**	**1.045,59**
	Sumur	**285.000.000,00**	**283.886.756,00**	**99,61**	**(1.113.244,00)**	**24.780.750,00**	**259.106.006,00**	**1.045,59**
	- Sumur Pemboran	285.000.000,00	283.886.756,00	99,61	(1.113.244,00)	24.780.750,00	259.106.006,00	1.045,59
12.	**Alat Keselamatan Kerja**	**5.829.000,00**	**5.828.857,00**	**100,00**	**(143,00)**	**10.000.000,00**	**(4.171.143,00)**	**(41,71)**

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Alat Pelindung	5.829.000,00	5.828.857,00	100,00	(143,00)	10.000.000,00	(4.171.143,00)	(41,71)
	- Topi Kerja	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	0,00	10.000.000,00	(7.200.000,00)	(72,00)
	- Sepatu Lapangan	3.029.000,00	3.028.857,00	100,00	(143,00)	0,00	3.028.857,00	
13.	Rambu-Rambu	265.206.400,00	264.705.137,00	99,81	(501.263,00)	0,00	264.705.137,00	-
	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	265.206.400,00	264.705.137,00	99,81	(501.263,00)	0,00	264.705.137,00	-
	- Rambu Tidak Bersuar	265.206.400,00	264.705.137,00	99,81	(501.263,00)	0,00	264.705.137,00	-
14.	Peralatan Olahraga	59.845.000,00	58.934.000,00	98,48	(911.000,00)	93.542.000,00	(34.608.000,00)	(37,00)
	Peralatan Olahraga	59.845.000,00	58.934.000,00	98,48	(911.000,00)	93.542.000,00	(34.608.000,00)	(37,00)
	- Pemiatan Permainan	59.845.000,00	58.934.000,00	98,48	(911.000,00)	93.542.000,00	(34.608.000,00)	(37,00)
15.	Peralatan dan Mesin BOS	3.399.372.719,00	3.345.182.969,00	98,41	(54.189.750,00)	3.922.690.700,00	(577.507.731,00)	(14,72)
	Peralatan dan Mesin BOS	3.399.372.719,00	3.345.182.969,00	98,41	(54.189.750,00)	3.922.690.700,00	(577.507.731,00)	(14,72)
	- Peralatan dan Mesin BOS	3.399.372.719,00	3.345.182.969,00	98,41	(54.189.750,00)	3.922.690.700,00	(577.507.731,00)	(14,72)
16.	Peralatan dan Mesin BLUD	2.495.385.288,00	2.096.001.953,00	84,00	(399.383.335,00)	2.060.470.494,00	35.531.459,00	1,72
	Peralatan dan Mesin BLUD	2.495.385.288,00	2.096.001.953,00	84,00	(399.383.335,00)	2.060.470.494,00	35.531.459,00	1,72
	- Peralatan dan Mesin BLUD	2.495.385.288,00	2.096.001.953,00	84,00	(399.383.335,00)	2.060.470.494,00	35.531.459,00	1,72
	Jumlah	20.805.825.852,00	20.116.516.662,00	96,69	(689.309.190,00)	23.471.410.062,00	(3.354.893.400,00)	(14,29)

Belanja Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp3.345.182.969,00 menghasilkan aset dan barang ekstrakomptabel dengan rincian sebagai berikut:

a. Peralatan dan Mesin senilai Rp2.786.495.847,00
b. Jalan , Irigasi dan Jaringan senilai Rp19.820.000,00
c. Aset Tetap Lainnya senilai Rp149.510.000,00
d. Barang Ekstrakomptabel senilai Rp201.720.032,00
e. Barang Persediaan senilai Rp187.636.750,00

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp96.479.225.145,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp88.928.047.259,00 atau 92,17% mengalami peningkatan sebesar Rp68.799.530.079,00 atau 341,80% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.128.517.180,00.

Belanja modal gedung dan bangunan diantaranya meliputi belanja modal bangunan gedung, bangunan menara, tugu titik kontrol/pasti, gedung dan bangunan BLUD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 133. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	GEDUNG DAN BANGUNAN							
1.	Bangunan Gedung	95.930.025.145,00	88.393.377.259,00	92,14	(7.536.647.886,00)	18.941.815.180,00	69.451.562.079,00	366,66
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	95.930.025.145,00	88.393.377.259,00	92,14	(7.536.647.886,00)	18.905.915.180,00	69.487.462.079,00	367,54
	- Bangunan Gedung Kantor	3.164.389.545,00	3.152.766.386,00	99,63	(11.623.159,00)	7.199.554.739,00	(4.046.788.353,00)	(56,21)
	- Bangunan Gedung Tempat Ibadah	26.420.000,00	26.318.242,00	99,61	(101.758,00)	0,00	26.318.242,00	-
	- Bangunan Gedung Tempat	9.741.873.000,00	9.706.646.491,00	99,64	(35.226.509,00)	8.363.493.199,00	1.343.153.292,00	16,06

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	Pendidikan							
	- Bangunan Gedung Perkoaan/Koperasi/Pasar	69.017.565.000,00	61.587.919.548,00	89,24	(7.429.645.452,00)	188.671.000,00	61.399.248.548,00	32.543,02
	- Bangunan Gedung Perpustakaan	10.283.774.000,00	10.236.938.972,00	99,54	(46.835.028,00)	0,00	10.236.938.972,00	-
	- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	0,00	-	0,00	39.922.887,00	(39.922.887,00)	(100,00)
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00		20.000.000,00	-
	- Bangunan Fasilitas Umum	940.750.000,00	936.658.272,00	99,57	(4.091.728,00)	509.591.000,00	427.067.272,00	83,81
	- Bangunan Parkir	122.685.000,00	122.441.640,00	99,80	(243.360,00)	298.000.000,00	(175.558.360,00)	(58,91)
	- Taman	299.953.000,00	299.478.000,00	99,84	(475.000,00)	637.244.500,00	(337.766.500,00)	(53,00)
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.312.615.600,00	2.304.209.708,00	99,64	(8.405.892,00)	1.669.437.855,00	634.771.853,00	38,02
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	**35.900.000,00**	**(35.900.000,00)**	**(100,00)**
	- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	-	0,00	35.900.000,00	(35.900.000,00)	(100,00)
2.	**Bangunan Menara**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	**793.711.000,00**	**(793.711.000,00)**	**(100,00)**
	Bangunan Menara Perambuan	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	**793.711.000,00**	**(793.711.000,00)**	**(100,00)**
	- Bangunan Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	-	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
	- Bangunan Menara Pengawas	0,00	0,00	-	0,00	693.711.000,00	(693.711.000,00)	(100,00)
3.	**Tugu Titik Kontrol/Pasti**	**169.200.000,00**	**168.670.000,00**	**99,69**	**(530.000,00)**	**164.876.000,00**	**3.794.000,00**	**2,30**
	Tugu/Tanda Batas	**169.200.000,00**	**168.670.000,00**	**99,69**	**(530.000,00)**	**164.876.000,00**	**3.794.000,00**	**2,30**
	- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	0,00	-	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	- Pagar	169.200.000,00	168.670.000,00	99,69	(530.000,00)	105.000.000,00	63.670.000,00	60,64
	- Tugu/Tanda Batas Lainnya	0,00	0,00	-	0,00	49.876.000,00	(49.876.000,00)	(100,00)
4.	**Gedung dan Bangunan BLUD**	**380.000.000,00**	**366.000.000,00**	**96,32**	**(14.000.000,00)**	**228.115.000,00**	**137.885.000,00**	**60,45**
	Gedung dan Bangunan BLUD	**380.000.000,00**	**366.000.000,00**	**96,32**	**(14.000.000,00)**	**228.115.000,00**	**137.885.000,00**	**60,45**
	- Gedung dan Bangunan BLUD	380.000.000,00	366.000.000,00	96,32	(14.000.000,00)	228.115.000,00	137.885.000,00	60,45
	Jumlah	**95.479.225.145,00**	**88.928.047.259,00**	**92,17**	**(7.551.177.886,00)**	**20.128.517.180,00**	**68.799.530.079,00**	**341,80**

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp41.635.055.304,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp41.372.206.332,00 atau 99,37% mengalami penurunan sebesar (Rp26.045.960.413,00) atau (38,63%) bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp67.418.166.745,00.

Belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi diantaranya meliputi belanja modal jalan dan jembatan, bangunan air sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 134. Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI							
1.	Jalan dan Jembatan	37.060.446.454,00	36.823.944.502,00	99,36	(236.501.952,00)	51.861.640.721,00	(15.037.696.219,00)	(29,00)
	Jalan	34.641.246.454,00	34.414.026.502,00	99,34	(227.219.952,00)	49.555.278.801,00	(15.141.252.299,00)	(30,55)
	- Jalan Kabupaten	28.544.051.200,00	28.335.157.913,00	99,27	(208.893.287,00)	42.696.865.256,00	(14.361.707.343,00)	(33,64)
	- Jalan Desa	5.472.195.254,00	5.459.015.818,00	99,76	(13.179.436,00)	6.113.518.482,00	(654.502.664,00)	(10,71)
	- Jalan Lainnya	625.000.000,00	619.852.771,00	99,18	(5.147.229,00)	744.895.063,00	(125.042.292,00)	(16,79)
	Jembatan	2.419.200.000,00	2.409.918.000,00	99,62	(9.282.000,00)	2.306.361.920,00	103.556.080,00	4,49
	- Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.419.200.000,00	2.409.918.000,00	99,62	(9.282.000,00)	2.306.361.920,00	103.556.080,00	4,49
2.	Bangunan Air	3.104.608.850,00	3.093.261.830,00	99,63	(11.347.020,00)	15.556.526.024,00	(12.463.264.194,00)	(80,12)
	Bangunan Air Irigasi	1.580.273.550,00	1.575.571.050,00	99,70	(4.702.500,00)	3.103.583.000,00	(1.528.011.950,00)	(49,23)
	- Bangunan Waduk Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103.583.000,00	(3.103.583.000,00)	(100,00)
	- Bangunan Pembawa Irigasi	1.552.607.550,00	1.548.030.050,00	99,71	(4.577.500,00)	0,00	1.548.030.050,00	-
	- Bangunan Pembuangan Irigasi	27.666.000,00	27.541.000,00	99,55	(125.000,00)	0,00	27.541.000,00	-
	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.123.460.300,00	1.120.125.380,00	99,70	(3.334.920,00)	12.286.443.024,00	(11.166.317.644,00)	(90,88)
	- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	105.875.000,00	105.215.380,00	99,38	(659.620,00)	459.652.311,00	(354.436.931,00)	(77,11)
	- Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	816.025.300,00	815.895.000,00	99,74	(2.130.300,00)	11.826.790.713,00	(11.010.895.713,00)	(93,10)
	- Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	199.560.000,00	199.015.000,00	99,73	(545.000,00)	0,00	199.015.000,00	-
	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	6.000.000,00	-
	- Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	6.000.000,00	-
	Bangunan Air Kotor	394.875.000,00	391.565.400,00	99,16	(3.309.600,00)	166.500.000,00	225.065.400,00	135,17
	- Bangunan Pembawa Air Kotor	394.875.000,00	391.565.400,00	99,16	(3.309.600,00)	166.500.000,00	225.065.400,00	135,17
3.	Instalasi	1.470.000.000,00	1.455.000.000,00	98,98	(15.000.000,00)	0,00	1.455.000.000,00	-
	Instalasi Lain	1.470.000.000,00	1.455.000.000,00	98,98	(15.000.000,00)	0,00	1.455.000.000,00	-
	- Instalasi Lain	1.470.000.000,00	1.455.000.000,00	98,98	(15.000.000,00)	0,00	1.455.000.000,00	-
	Jumlah	41.635.055.304,00	41.372.206.332,00	99,37	(262.848.972,00)	67.418.166.745,00	(26.045.960.413,00)	(38,63)

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Aset Tetap Lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp4.774.708.633,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.734.413.410,00 atau 99,16% mengalami penurunan sebesar (Rp1.102.238.235,00) atau (18,88%) bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.836.651.645,00.

Belanja modal Aset Tetap Lainnya diantaranya meliputi belanja modal bahan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 135. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	ASET TETAP LAINNYA							
1.	Bahan Perpustakaan	159.455.833,00	130.575.510,00	81,89	(28.880.323,00)	921.224.500,00	(790.648.990,00)	(85,83)
	Bahan Perpustakaan Tercetak	140.453.000,00	114.549.000,00	81,56	(25.904.000,00)	876.491.500,00	(761.942.500,00)	(86,93)
	- Buku Umum	11.136.000,00	11.136.000,00	100,00	0,00	799.178.500,00	(788.042.500,00)	(98,61)
	- Buku Agama	3.858.000,00	3.858.000,00	100,00	0,00	4.007.500,00	(149.500,00)	(3,73)
	- Buku Ilmu Sosial	66.076.500,00	60.983.000,00	92,29	(5.093.500,00)	29.007.500,00	31.975.500,00	110,23
	- Buku Ilmu Bahasa	43.694.000,00	22.896.000,00	52,40	(20.798.000,00)	18.946.500,00	3.949.500,00	20,85
	- Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	7.674.000,00	7.674.000,00	100,00	0,00	18.096.500,00	(10.422.500,00)	(57,59)
	- Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	7.540.000,00	7.540.000,00	100,00	0,00	3.520.000,00	4.020.000,00	114,20
	- Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	12.500,00	0,00	∞	(12.500,00)	0,00	0,00	∞
	- Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	462.000,00	462.000,00	100,00	0,00	3.735.000,00	(3.273.000,00)	(87,63)
	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	19.002.833,00	16.026.510,00	84,34	(2.976.323,00)	6.105.000,00	9.921.510,00	162,51
	- Audio Visual	19.002.833,00	16.026.510,00	84,34	(2.976.323,00)	6.105.000,00	9.921.510,00	162,51
	Kartografi, Naskah, dan Lukisan	0,00	0,00	∞	0,00	38.628.000,00	(38.628.000,00)	(100,00)
	- Lukisan dan Ukiran	0,00	0,00	∞	0,00	38.628.000,00	(38.628.000,00)	(100,00)
2.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	498.094.035,00	(493.094.035,00)	(99,00)
	Barang Bercorak Kebudayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	498.094.035,00	(493.094.035,00)	(99,00)
	- Barang Kerajinan	0,00	0,00	∞	0,00	5.270.835,00	(5.270.835,00)	(100,00)
	- Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	492.823.200,00	(487.823.200,00)	(98,99)
3.	Aset Tetap Lainnya BOS	4.610.252.800,00	4.598.837.900,00	99,75	(11.414.900,00)	4.417.333.110,00	181.504.790,00	4,11
	Aset Tetap Lainnya BOS	4.610.252.800,00	4.598.837.900,00	99,75	(11.414.900,00)	4.417.333.110,00	181.504.790,00	4,11
	- Aset Tetap Lainnya BOS	4.610.252.800,00	4.598.837.900,00	99,75	(11.414.900,00)	4.417.333.110,00	181.504.790,00	4,11
	Jumlah	4.774.708.633,00	4.734.413.410,00	99,16	(40.295.223,00)	5.836.651.645,00	(1.102.238.235,00)	(18,88)

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Aset Lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain.

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp197.930.000,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp197.480.000,00 atau 99,77% mengalami peningkatan sebesar Rp44.799.500,00 atau 29,34% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp152.680.500,00.

Belanja modal Aset Lainnya diantaranya meliputi belanja modal aset tak berwujud sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 136. Rincian Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
	ASET LAINNYA							
1.	Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud	197.930.000,00	197.480.000,00	99,77	(450.000,00)	152.680.500,00	44.799.500,00	29,34
	Aset Tak Berwujud	197.930.000,00	197.480.000,00	99,77	(450.000,00)	152.680.500,00	44.799.500,00	29,34
	- Aset Tak Berwujud-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	152.680.500,00	(152.680.500,00)	(100,00)
	- Aset Tidak Berwujud-Kajian	197.930.000,00	197.480.000,00	99,77	(450.000,00)	0,00	197.480.000,00	∞
	Jumlah	197.930.000,00	197.480.000,00	99,77	(450.000,00)	152.680.500,00	44.799.500,00	29,34

Berikut tabel rincian belanja modal Per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023

Tabel 137. Belanja Modal Per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.194.783.319,00	21.011.388.223,00	99,13	(183.395.096,00)	28.183.000.491,00	(7.171.612.268,00)	(25,45)
2.	Dinas Kesehatan	5.436.400.088,00	4.989.024.952,00	91,77	(447.375.136,00)	2.600.974.916,00	2.388.050.036,00	91,81
3.	RSUD Alimuddin Umar	3.209.573.000,00	3.179.690.457,00	99,07	(29.882.543,00)	2.780.016.289,00	399.674.168,00	14,38
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	41.119.332.015,00	40.865.630.468,00	99,38	(253.701.547,00)	52.696.272.048,00	(11.830.641.580,00)	(22,45)
5.	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	105.870.000,00	105.870.000,00	100,00	0,00	31.500.000,00	74.370.000,00	236,10
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	339.952.200,00	335.452.200,00	98,68	(4.500.000,00)	13.809.082.241,00	(13.473.630.041,00)	(97,57)
7.	Dinas Sosial	42.840.000,00	42.840.000,00	100,00	0,00	67.600.000,00	(24.760.000,00)	(36,63)
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3.242.100.500,00	3.230.769.978,00	99,65	(11.330.522,00)	0,00	3.230.769.978,00	-
9.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA	30.120.000,00	30.120.000,00	100,00	0,00	44.840.000,00	(14.720.000,00)	(32,83)
10.	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup	3.475.140.800,00	3.462.533.000,00	99,64	(12.607.800,00)	1.834.588.000,00	1.627.945.000,00	88,74
12.	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	37.600.000,00	37.600.000,00	100,00	0,00	85.906.000,00	(48.306.000,00)	(56,23)
13.	Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Pekon	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	0,00	234.670.000,00	(218.670.000,00)	(93,19)
14.	Dinas Perhubungan	471.375.000,00	470.495.910,00	99,81	(879.090,00)	156.600.000,00	313.895.910,00	200,44
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	66.453.450,00	66.453.450,00	100,00	0,00	84.696.150,00	(18.242.700,00)	(21,54)
16.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	69.059.935.000,00	61.629.516.048,00	89,24	(7.430.418.952,00)	9.420.587.404,00	52.208.928.644,00	554,20
17.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	241.368.000,00	236.740.000,00	98,08	(4.628.000,00)	3.600.000,00	233.140.000,00	6.476,11
18.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.804.957.000,00	1.595.831.823,00	99,43	(9.125.177,00)	2.254.256.063,00	(658.424.240,00)	(29,21)
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.860.880.333,00	10.799.064.603,00	99,43	(61.815.730,00)	68.266.000,00	10.730.798.603,00	15.719,10
20.	Dinas Perikanan	30.070.800,00	29.860.000,00	99,30	(210.800,00)	18.840.000,00	11.020.000,00	58,49
21.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	16.000.000,00	15.800.000,00	98,75	(200.000,00)	2.500.000,00	13.300.000,00	532,00
22.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	419.420.300,00	417.998.418,00	99,66	(1.423.882,00)	100.780.000,00	317.218.418,00	314,76
23.	Sekretariat Daerah	500.441.110,00	439.428.631,00	87,81	(61.012.479,00)	239.822.809,00	199.605.822,00	83,23
24.	Sekretariat DPRD	103.500.000,00	103.082.750,00	99,60	(417.250,00)	217.532.939,00	(114.450.189,00)	(52,61)
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	49.972.597,00	49.972.597,00	100,00	0,00	0,00	49.972.597,00	-
26.	Badan Pendapatan Daerah	68.160.000,00	68.160.000,00	100,00	0,00	0,00	68.160.000,00	-
27.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	229.663.488,00	204.906.037,00	89,22	(24.757.451,00)	397.330.500,00	(192.424.463,00)	(48,43)
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	0,00	0,00	17.000.000,00	-
29.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	79.450.000,00	73.409.000,00	92,40	(6.041.000,00)	0,00	73.409.000,00	-
30.	Inspektorat	297.699.000,00	297.699.000,00	100,00	0,00	109.068.000,00	188.631.000,00	172,95
31.	Kec. Sumber Jaya	203.693.126,00	203.693.126,00	100,00	0,00	208.745.528,00	(5.052.400,00)	(2,42)
32.	Kec. Way Tenong	209.517.748,00	209.517.748,00	100,00	0,00	206.710.633,00	2.807.115,00	1,36
33.	Kec. Sekincau	255.892.946,00	255.885.000,00	100,00	(7.946,00)	271.726.655,00	(15.841.655,00)	(5,83)
34.	Kec. Belalau	13.800.000,00	13.800.000,00	100,00	0,00	19.200.000,00	(5.400.000,00)	(28,13)
35.	Kec. Batu Brak	23.500.000,00	23.500.000,00	100,00	0,00	7.000.000,00	16.500.000,00	235,71
36.	Kec. Balik Bukit	562.123.012,00	562.122.142,00	100,00	(870,00)	627.013.466,00	(34.891.324,00)	(5,56)
37.	Kec. Sukau	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00	0,00	41.738.000,00	(17.238.000,00)	(41,30)
38.	Kec. Suoh	16.750.000,00	16.750.000,00	100,00	0,00	0,00	16.750.000,00	-

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
39.	Kec. Gedung Surian	17.635.000,00	17.635.000,00	100,00	0,00	22.500.000,00	(4.865.000,00)	(21,62)
40.	Kec. Kebun Tebu	17.250.000,00	17.250.000,00	100,00	0,00	39.912.000,00	(22.662.000,00)	(56,78)
41.	Kec. Air Hitam	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	0,00	44.900.000,00	(36.400.000,00)	(81,07)
42.	Kec. Pagar Dewa	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	0,00	10.000.000,00	(1.500.000,00)	(15,00)
43.	Kec. Batu Ketulis	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	0,00	18.000.000,00	1.500.000,00	8,33
44.	Kec. Bandar Negeri Suoh	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	0,00	18.000.000,00	(4.500.000,00)	(25,00)
45.	Kec. Lumbok Seminung	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	0,00	29.450.000,00	(10.450.000,00)	(35,48)
46.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	83.025.100,00	82.675.100,00	99,58	(350.000,00)	0,00	82.675.100,00	∞
Jumlah		163.892.744.934,00	155.348.663.663,00	94,79	(8.544.081.271,00)	117.007.426.132,00	38.341.237.531,00	32,77

5.1.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

5.1.2.3.1. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Disamping itu digunakan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2.150.745.082,00. Realisasi sebesar Rp1.961.201.439,00 atau 91,19% mengalami peningkatan sebesar Rp453.069.079,00 atau 30,04% bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.508.132.360,00.

Realisasi belanja tidak terduga pada tahun 2024 mengalami penurunan secara signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena terjadi penurunan bencana.

Akun ini menggambarkan Belanja Tidak Terduga untuk Periode TA 2024 dan 2023, dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 138. Belanja Tidak Terduga TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Belanja Tidak Terduga	2.150.745.082,00	1.961.201.439,00	91,19	(189.543.643,00)	1.508.132.360,00	453.069.079,00	30,04
Jumlah		2.150.745.082,00	1.961.201.439,00	91,19	(189.543.643,00)	1.508.132.360,00	453.069.079,00	30,04

Belanja tidak terduga lebih rinci disajikan pada lampiran 7 dalam laporan keuangan ini.

5.1.2.4. BELANJA TRANSFER

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk Transfer yang terdiri dari Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Transfer/Bantuan Keuangan. Transfer/Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan.

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp177.086.570.400,00. Realisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp176.408.899.600,00 atau 99,62% mengalami kenaikan sebesar Rp3.603.890.200,00 atau 2,09% bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp172.805.009.400,00, sebagaimana disajikan pada tabel beribut.

Tabel 139. Belanja Transfer TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Belanja Bagi Hasil	2.370.534.400,00	1.692.863.600,00	71,41	(677.670.800,00)	1.634.829.400,00	58.034.200,00	3,55
2.	Belanja Bantuan Keuangan	174.716.036.000,00	174.716.036.000,00	100,00	0,00	171.170.180.000,00	3.545.856.000,00	2,07
Jumlah		177.086.570.400,00	176.408.899.600,00	99,62	(677.670.800,00)	172.805.009.400,00	3.603.890.200,00	2,09

Belanja Transfer terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan, adapun kedua belanja tersebut dijelaskan lebih rinci dibawah ini.

5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil adalah belanja yang dialokasikan dari sebagian pendapatan PAD Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Pemerintahan Desa, adapun Anggaran Belanja Bagi Hasil TA 2024 sebesar Rp2.370.534.400,00 realisasi sebesar Rp1.692.863.600,00 atau 71,41%, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.634.829.400,00 mengalami peningkatan sebesar Rp58.034.200,00 atau 3,55%, Realisasi belanja tidak tercapai karena sesuai dengan kondisi penerimaan pendapatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024.

Belanja Bagi Hasil pada tahun 2024 mengalami peningkatan 3,55% dari tahun sebelumnya disebabkan karena penerimaan PAD Pajak Daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Belanja Bagi Hasil sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 140. Belanja Bagi Hasil TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.037.512.700,00	1.473.076.700,00	72,30	(564.436.000,00)	1.407.134.300,00	65.942.400,00	4,69
2.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	333.021.700,00	219.786.900,00	66,00	(113.234.800,00)	227.695.100,00	(7.908.200,00)	(3,47)
Jumlah		2.370.534.400,00	1.692.863.600,00	71,41	(677.670.800,00)	1.634.829.400,00	58.034.200,00	3,55

Belanja Bagi Hasil lebih rinci disajikan pada lampiran 8 dan 9 pada laporan keuangan ini.

5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 141. Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Dana Desa	118.449.735.000,00	118.449.735.000,00	100,00	0,00	117.770.480.000,00	679.255.000,00	0,58
2.	Alokasi Dana Desa	56.266.301.000,00	56.266.301.000,00	100,00	0,00	53.399.700.000,00	2.866.601.000,00	5,37
Jumlah		174.716.036.000,00	174.716.036.000,00	100,00	0,00	171.170.180.000,00	3.545.856.000,00	2,07

Tabel diatas menunjukkan anggaran belanja bantuan keuangan TA 2024 sebesar Rp174.716.036.000,00 terealisasi sebesar Rp174.716.036.000,00 atau 100,00%, dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp171.170.180.000,00 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp3.545.856.000,00 atau 2,07%. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu belanja

bantuan keuangan mengalami peningkatan karena tahun 2024 secara nasional penerimaan atas Dana Desa yang diberikan langsung oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Pekon mengalami peningkatan, dan Bantuan Keuangan Dana Desa dari Kabupaten Lampung Barat mengalami peningkatan sebesar Rp2.866.601.000,00.

Belanja bantuan keuangan lebih rinci disajikan pada lampiran 10 dan 11 pada laporan keuangan ini.

5.1.3. SURPLUS/ (DEFISIT)

Dari realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.111.191.957.433,81 dan belanja daerah sebesar Rp1.068.232.029.400,82 dihasilkan surplus sebesar Rp42.959.928.032,99 Dibandingkan dengan surplus pada tahun 2023 sebesar Rp1.426.998.371,04 mengalami peningkatan surplus sebesar Rp41.532.929.661,95 atau 2.910,51%, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 142. Surplus/ (Defisit) Laporan Realisasi Anggaran TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Pendapatan Daerah	1.119.418.377.234,92	1.111.191.957.433,81	99,27	(8.226.419.801,11)	985.836.203.764,84	125.355.753.668,97	12,72
2.	Belanja Daerah	1.130.182.927.936,00	1.068.232.029.400,82	94,52	(61.950.898.535,18)	984.409.205.393,80	83.822.824.007,02	8,52
Surplus/ (Defisit)		(10.764.550.701,08)	42.959.928.032,99	(399,09)	53.724.478.734,07	1.426.998.371,04	41.532.929.661,95	2.910,51

5.1.4. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan. Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan anggaran dan realisasi TA 2024 serta realisasi TA 2023 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 143. Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Penerimaan Pembiayaan	30.683.213.321,08	30.683.213.321,08	100,00	0,00	48.174.340.190,04	(17.491.126.868,96)	(36,31)
2.	Pengeluaran Pembiayaan	19.918.662.620,00	19.918.098.140,00	100,00	(564.480,00)	18.918.125.240,00	999.972.900,00	5,29
Jumlah Pembiayaan Netto (1-2)		10.764.550.701,08	10.765.115.181,08	100,01	564.479,92	29.256.214.950,04	(18.491.099.769,04)	(63,20)

Tabel diatas menunjukkan anggaran pembiayaan netto TA 2024 sebesar Rp10.764.550.701,08 terealisasi sebesar Rp10.765.115.181,08 atau 100,01%, dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp29.256.214.950,04 yang berarti mengalami penurunan sebesar (Rp18.491.099.769,04) atau (63,20%). Realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

5.1.4.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

5.1.4.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari penggunaan Sisa lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun lalu dengan anggaran dan realisasi TA 2024 serta realisasi tahun 2023 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 144. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.683.213.321,08	30.683.213.321,08	100,00	0,00	48.174.340.190,04	(17.491.126.868,96)	(36,31)
Jumlah		30.683.213.321,08	30.683.213.321,08	100,00	0,00	48.174.340.190,04	(17.491.126.868,96)	(36,31)

Tabel diatas menunjukkan anggaran penerimaan pembiayaan TA 2024 sebesar Rp30.683.213.321,08 terealisasi sebesar Rp30.683.213.321,08 atau 100,00%, dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp48.174.340.190,04 yang berarti mengalami penurunan sebesar (Rp17.491.126.868,96) atau (36,31%).

5.1.4.1.2. Penerimaan Pinjaman Daerah

Pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 Pemerintah Kabupaten tidak memiliki pinjaman daerah.

5.1.4.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

5.1.4.2.1. Penyertaan Modal Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan anggaran dan realisasi TA 2024 serta realisasi tahun 2023 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 145. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD :							
	- PT Bank Lampung	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	-
	- BPRS Lampung Barat	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00

Pada Tahun Anggaran 2024 penyertaan modal pada PT Bank Lampung sebesar Rp1.000.000.000,00 sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Bank Lampung Tahun 2024 – 2029 senilai total sebesar Rp12.500.000.000,00 sehingga sampai dengan 31 Desember 2024 masih terdapat kekurangan penyertaan modal tersebut senilai Rp11.500.000.000,00.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat bahwa alokasi penambahan modal disetor sebesar Rp6.000.000.000,00 periode TA 2021 s.d. TA 2025, berdasarkan data bahwa penambahan tersebut telah dilakukan pada TA 2022 s.d. 2024 sebesar Rp3.000.000.000,00, dengan demikian s.d. 31 Desember 2024 masih terdapat kekurangan penambahan modal setor sebesar Rp3.000.000.000,00.

5.1.4.2.2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dengan anggaran dan realisasi TA 2024 serta realisasi tahun 2023 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 146. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1.	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank Bukan (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	17.918.662.620,00	17.918.098.140,00	100,00	(564.480,00)	17.918.125.240,00	(27.100,00)	0,00
Jumlah		17.918.662.620,00	17.918.098.140,00	100,00	(564.480,00)	17.918.125.240,00	(27.100,00)	0,00

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dianggarkan sebesar Rp17.918.662.620,00 terealisasi sebesar Rp17.918.098.140,00 atau 100,00% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp17.918.125.240,00 mengalami penurunan sebesar

(Rp27.100,00) atau (0,00%). Pembayaran sebesar ini merupakan cicilan pokok pinjaman dari dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

5.1.5. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan selisih antara surplus/ (defisit) anggaran dengan pembiayaan netto, dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 147. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6=4-3)	(7)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan	1.119.418.377.234,92	1.111.191.957.433,81	99,27	(8.226.419.801,11)	985.836.203.764,84	125.355.753.668,97	12,72
2	Belanja dan Transfer	1.130.182.927.936,00	1.068.232.029.400,82	94,52	(61.950.898.535,18)	984.409.205.393,80	83.822.824.007,02	8,52
3	Surplus/ (Defisit) (1-2)	(10.764.550.701,08)	42.959.928.032,99	(399,09)	53.724.478.734,07	1.426.998.371,04	41.532.929.661,95	2.910,51
4	Penerimaan Pembiayaan	30.683.213.321,08	30.683.213.321,08	100,00	0,00	48.174.340.190,04	(17.491.126.868,96)	(36,31)
5	Pengeluaran Pembiayaan	19.918.662.620,00	19.918.098.140,00	100,00	(564.480,00)	18.918.125.240,00	999.972.900,00	5,29
6	Pembiayaan Netto (4-5)	10.764.550.701,08	10.765.115.181,08	100,01	564.480,00	29.256.214.950,04	(18.491.099.768,96)	(63,20)
SILPA (3 + 6)		0,00	53.725.043.214,07	-	53.725.043.214,07	30.683.213.321,08	23.041.829.892,99	75,10

Tabel diatas menunjukkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2024 sebesar Rp53.725.043.214,07 dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp30.683.213.321,08 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp23.041.829.892,99 atau 75,10%.

Untuk penjelasan lebih lengkap tentang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dapat dilihat pada CaLK Laporan Perubahan SAL dan penjelasan aset lancar berupa kas dan setara kas pada CaLK Neraca.

5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp53.725.043.214,07 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun – tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih awal tahun 2024 sebesar Rp30.683.213.321,08 atau turun (36,31%) yaitu sebesar (Rp17.491.126.868,96) dari Saldo Anggaran Lebih awal tahun 2023 sebesar Rp48.174.340.190,04.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, Tahun 2024 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp30.683.213.321,08 atau turun (36,31%) yaitu sebesar (Rp17.491.126.868,96) dari tahun 2023 sebesar Rp48.174.340.190,04.

5.2.3. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SILPA tahun 2024 sebesar Rp53.725.043.214,07 atau naik 75,10% yaitu sebesar Rp23.041.829.892,99 dari SiLPA tahun 2023 sebesar Rp30.683.213.321,08.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tidak terdapat koreksi kesalahan Pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya untuk Tahun Anggaran 2024.

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 sebesar Rp53.725.043.214,07 Penjelasan lebih lanjut atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dijabarkan pada tabel - tabel dibawah ini.

Tabel 148. Saldo Anggaran Lebih TA 2024 dan 2023

No	Rincian SiLPA	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Kas di Kas Daerah	50.743.497.315,01	25.819.052.572,19	24.924.444.742,82	96,54
2.	Kas di BLUD – RSUD Alimuddin Umar	2.110.859.215,00	3.923.656.017,00	(1.812.796.802,00)	(46,20)
3.	Kas di BLUD – UMKM Dinas Koperindag	7.454.206,12	11.354.614,86	(3.900.408,74)	(34,35)
4.	Kas di BLUD – Puskesmas	532.732.696,58	613.330.057,40	(80.597.360,82)	(13,14)
5.	Kas Dana BOSP	155.228.447,36	0,00	155.228.447,36	∞
6.	Kas Dana BOS – Dinas Pendidikan	0,00	154.926.617,63	(154.926.617,63)	(100,00)
7.	Kas Lainnya – Dana BOP - Dinas Pendidikan	0,00	15.842.200,00	(15.842.200,00)	(100,00)
8.	Kas Dana BOK Puskesmas	175.271.334,00	145.051.242,00	30.220.092,00	20,83
	SILPA	53.725.043.214,07	30.683.213.321,08	23.041.829.892,99	75,10

SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 sebesar Rp53.725.043.214,07 adapun rincian SAL Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 149. Rincian Saldo Anggaran Lebih TA 2024 dan 2023

No	Rincian SILPA	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	30.683.213.321,08	48.174.340.190,04	(17.491.126.868,96)	(36,31)
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(30.683.213.321,08)	(48.174.340.190,04)	17.491.126.868,96	(36,31)
3.	Sub Total (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	SILPA/ (SiKPA)				
5.	Pendapatan Asli Daerah	71.823.776.727,81	68.748.525.754,84	3.075.250.972,97	4,47
6.	Pendapatan Transfer	1.039.368.180.706,00	917.087.678.010,00	122.280.502.696,00	13,33
7.	Jumlah (5 s.d 6)	1.111.191.957.433,81	985.836.203.764,84	125.355.753.668,97	12,72
8.	Belanja Operasi	734.513.264.698,82	693.088.637.501,80	41.424.627.197,02	5,98
9.	Belanja Modal	155.348.663.663,00	117.007.426.132,00	38.341.237.531,00	32,77
10.	Belanja Tidak Terduga	1.961.201.439,00	1.506.132.360,00	453.069.079,00	30,04
11.	Belanja Transfer	176.408.899.600,00	172.805.009.400,00	3.603.890.200,00	2,09
12.	Jumlah (8 s.d.11)	1.068.232.029.400,82	984.409.205.393,80	83.822.824.007,02	8,52
13.	Penerimaan Pembiayaan	30.683.213.321,08	48.174.340.190,04	(17.491.126.868,96)	(36,31)
14.	Pengeluaran Pembiayaan	19.918.098.140,00	18.918.125.240,00	999.972.900,00	5,29
15.	Jumlah (13 – 14)	10.765.115.181,08	29.256.214.950,04	(18.491.099.768,96)	(63,20)
	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir (3+7-12+15)	53.725.043.214,07	30.683.213.321,08	23.041.829.892,99	75,10

Berikut disajikan tabel Perhitungan Pelampauan / Penghematan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Tahun 2024:

Tabel 150. Pelampauan / Penghematan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2024

No	Rincian SILPA	Anggaran	Realisasi	Pelampauan/ Penghematan	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Pelampauan Pendapatan				
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	69.260.946.657,32	71.823.776.727,81	2.562.830.070,49	3,70
	Pendapatan Transfer	1.050.157.430.577,60	1.039.368.180.706,00	(10.789.249.871,60)	(1,03)
	Sub Jumlah	1.119.418.377.234,92	1.111.191.957.433,81	(8.226.419.801,11)	(0,73)
2.	Penghematan Belanja				
	Belanja Operasi	787.052.867.520,00	734.513.264.698,82	(52.539.602.821,18)	(6,68)
	Belanja Modal	163.892.744.934,00	155.348.663.663,00	(8.544.081.271,00)	(5,21)
	Belanja Tidak Terduga	2.150.745.082,00	1.961.201.439,00	(189.543.643,00)	(8,81)
	Belanja Transfer	177.086.570.400,00	176.408.899.600,00	(677.670.800,00)	(0,38)
	Sub Jumlah	1.130.182.927.936,00	1.068.232.029.400,82	(61.950.898.535,18)	(5,48)
3.	Pembiayaan Netto				
	Penerimaan Pembiayaan	30.683.213.321,08	30.683.213.321,08	0,00	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan	19.918.662.620,00	19.918.098.140,00	(564.480,00)	0,00
	Sub Jumlah	10.764.550.701,08	10.765.115.181,08	564.480,00	0,01
	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir (3+7-12+15)	0,00	53.725.043.214,07	53.725.043.214,07	100,00

Berikut lebih detil rincian SiLPA Per 31 Desember 2024:

1. **Kas Sisa Penyerapan Dana DAK Fisik TA 2024**

1.1. DAK Reguler:

DAK Bidang Pendidikan	Rp	1.870.279.676,00
DAK Bidang Kesehatan dan KB	Rp	251.245.540,00
DAK Bidang Infrastrktur, Perumahan dan Air Minum	Rp	8.209.000,00
DAK Bidang Jalan	Rp	369.437.400,00
DAK Bidang Transportasi Perdesaan	Rp	9.968.490,00
DAK Bidang Pertanian	Rp	259.700,00
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp	142.500,00
DAK Bidang Pariwisata	Rp	1.634.000,00
Sub Jumlah	**Rp**	**2.511.176.306,00**

1.2. DAK IPD/ Penugasan

Penugasan – Pendidikan	Rp	3.101.850,00
Penugasan – Kesehatan (Penurunan Stunting)	Rp	3.116.000,00

Penugasan - Air Minum	Rp	5.194.700,00
Penugasan – Sanitasi	Rp	118.418.397,00
Penugasan – Jalan	Rp	32.202.326,00
Penugasan – Pasar	Rp	1.729.800,00
Penugasan – Pertanian	Rp	88.782.476,00
Penugasan - Kelautan dan Perikanan	Rp	163.000,00
Penugasan - Industri Kecil Menengah	Rp	665.200,00
Penugasan – Pariwisata	Rp	19.522.985,00
Penugasan - Perdagangan	Rp	6.998.945.452,00
Penugasan - Perumahan dan Permukiman	Rp	361.000,00
Sub Jumlah	**Rp**	**7.272.203.186,00**
1.3. DAK Affirmasi		
DAK Afirmasi Pendidikan	Rp	223.874.100,00
DAK Afirmasi Kesehatan (Penguatan Puskesmas DTPK)	Rp	131.001.982,00
DAK Afirmasi Perumahan dan Permukiman	Rp	234.000,00
DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan	Rp	34.044.770,00
DAK Afirmasi Air Minum	Rp	578.000,00
DAK Afirmasi Sanitasi	Rp	3.382.906,00
Sub Jumlah	**Rp**	**393.115.758,00**
2. Kas sisa Penyerapan Dana DAK Non Fisik		
BOK – Dinas	Rp	724.286.498,00
BOK - Puskesmas	Rp	175.271.334,00
Ketahanan Pangan & Pertanian	Rp	96.613.600,00
Fasilitasi Penanaman Modal (FPM)	Rp	56.362.903,00
BOKB	Rp	1.913.656.247,00
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Rp	16.544.002,00
Kepariwisataan	Rp	211.644.500,00
PK2UKM (Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM)	Rp	996.010,00
PK2SIKM (Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM)	Rp	321.553.547,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp	125.491.000,00
Tunjangan Profesi Guru (TPG)	Rp	626.373.480,00
Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNS	Rp	18.426.600,00
Tambahan Penghasilan (Tamsil)	Rp	192.842.321,00
BOSP (BOS Reguler & Kinerja)	Rp	138.408.346,63
Sub Jumlah	**Rp**	**4.618.470.388,63**
3. Kas sisa Dana Insentif Fiskal (DIF)	**Rp**	**462.535.423,00**
4. Kas sisa Dana Alokasi Umum (DAU) - Specific Grant		
DAU SG – Bidang PU	Rp	46.082.928,00
DAU SG – Bidang Kesehatan	Rp	1.793.272.138,00
DAU SG – Bidang Pendidikan	Rp	2.685.132.793,00
DAU SG – Bidang Kelurahan	Rp	1.982.252,00
Sub Jumlah	**Rp**	**4.526.470.111,00**
5. Sisa Kas DBH Sawit	**Rp**	**271.175.080,00**
6. Kas di BLUD RSUD Alimuddin Umar	**Rp**	**2.110.859.215,00**
7. Kas di BLUD PP-KUKM – Dinas Koperasi UKM Perindag	**Rp**	**7.454.206,12**
8. Kas di BLUD Puskesmas - Dinas Kesehatan	**Rp**	**532.732.696,58**
9. Kas di Sekolah (Jasa Giro)	**Rp**	**276.098,73**
SiLPA Dana Earmark (1 s.d. 8)	**Rp**	**22.706.468.469,06**
10. SiLPA yang bisa digunakan untuk Operasional	**Rp**	**31.018.574.745,01**
Jumlah SiLPA	**Rp**	**53.725.043.214,07**

Berdasarkan saldo kas di Neraca Per 31 Desember 2024 sebesar Rp53.738.202.531,07 dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp53.725.043.214,07 terdapat selisih sebesar Rp13.159.317,00 dapat dijelaskan berikut:

1. Utang PFK atas transaksi tahun 2024 menggunakan Dana BOSP sebesar Rp10.228.878,00 yang sampai dengan tanggal neraca belum disetorkan.
2. Uang Dana BOS Affirmasi sebesar Rp2.930.439,00 bukan merupakan unsur SILPA, uang ini merupakan saldo sejak tahun 2022, hal ini terjadi karena pada tahun 2022 Pendapatan dan Belanja atas Dana BOS Affirmasi tidak masuk dalam APBD, sehingga pencatatan pendapatan dan beban hanya dicatat pada Laporan Operasional saja dan tidak di catat pada LRA. Pada akhir tahun 2022 masih tersisa sejumlah tersebut sehingga uang tersebut tidak termasuk unsur SILPA melainkan kas diluar SiLPA.

5.3 PENJELASAN POS – POS NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai harta atau aset, kewajiban atau utang dan ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kekayaan sendiri atau ekuitas. Komposisi Neraca Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 151. Neraca Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	**Aset**				
2.	Aset Lancar	139.312.997.715,97	105.901.292.856,28	33.411.704.859,69	31,55
	Penyisihan Piutang	(1.382.162.549,78)	(13.464.942.016,30)	12.082.779.466,52	(89,74)
	Aset Lancar Bersih	**137.930.835.166,19**	**92.436.350.839,98**	**45.494.484.326,21**	**49,22**
3.	Investasi Jangka Panjang	43.574.267.933,83	41.330.213.725,66	2.244.054.208,17	5,43
	Investasi Jangka Panjang Bersih	**43.574.267.933,83**	**41.330.213.725,66**	**2.244.054.208,17**	**5,43**
4.	Aset Tetap	4.377.594.469.750,49	4.201.074.228.511,49	176.520.241.239,00	4,20
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.837.864.803.718,39)	(1.642.130.036.933,04)	(195.734.766.785,35)	11,92
	Aset Tetap Bersih	**2.539.729.666.032,10**	**2.558.944.191.578,45**	**(19.214.525.546,35)**	**(0,75)**
5.	Aset Lainnya	233.472.119.986,74	228.310.153.599,39	5.161.966.387,35	2,26
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(36.085.919.529,00)	(2.870.439.575,00)	(33.215.479.954,00)	1.157,16
	Aset Lainnya Bersih	**197.386.200.457,74**	**225.439.714.024,39**	**(28.053.513.566,65)**	**(12,44)**
6.	**Jumlah Aset**	**2.918.620.969.589,86**	**2.918.150.470.168,48**	**470.499.421,38**	**0,02**
7.	**Kewajiban**				
8.	Kewajiban Jangka Pendek	40.029.721.447,25	29.937.934.224,15	10.091.787.223,10	33,71
9.	Kewajiban Jangka Panjang	16.424.888.255,00	34.342.951.595,00	(17.918.063.340,00)	(52,17)
10.	**Jumlah Kewajiban**	**56.454.609.702,25**	**64.280.885.819,15**	**(7.826.276.116,90)**	**(12,18)**
11.	**Ekuitas**				
12.	Ekuitas	2.862.166.359.887,61	2.853.869.584.349,33	8.296.775.538,28	0,29
13.	**Jumlah Ekuitas**	**2.862.166.359.887,61**	**2.853.869.584.349,33**	**8.296.775.538,28**	**0,29**
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**2.918.620.969.589,86**	**2.918.150.470.168,48**	**470.499.421,38**	**0,02**

Untuk lebih jelasnya rincian aset, kewajiban dan ekuitas disajikan dibawah ini.

5.3.1. ASET

Aset merupakan salah satu pos yang terdapat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Total aset Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.918.620.969.589,86 naik sebesar Rp470.499.421,38 atau 0,02% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.918.150.470.168,48 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 152. Aset Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Aset Lancar	139.312.997.715,97	105.901.292.856,28	33.411.704.859,69	31,55
	Penyisihan Piutang	(1.382.162.549,78)	(13.464.942.016,30)	12.082.779.466,52	(89,74)
	Sub Jumlah	**137.930.835.166,19**	**92.436.350.839,98**	**45.494.484.326,21**	**49,22**
2	Investasi Jangka Panjang	43.574.267.933,83	41.330.213.725,66	2.244.054.208,17	5,43
	Sub Jumlah	**43.574.267.933,83**	**41.330.213.725,66**	**2.244.054.208,17**	**5,43**
3	Aset Tetap	4.377.594.469.750,49	4.201.074.228.511,49	176.520.241.239,00	4,20
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.837.864.803.718,39)	(1.842.130.036.933,04)	(195.734.706.785,35)	11,92
	Sub Jumlah	**2.539.729.666.032,10**	**2.558.944.191.578,45**	**(19.214.525.546,35)**	**(0,75)**
4	Aset Lainnya	233.472.119.386,74	228.310.153.599,39	5.161.966.387,35	2,26
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(36.085.919.529,00)	(2.870.439.575,00)	(33.215.479.954,00)	1.157,16
	Sub Jumlah	**197.386.200.457,74**	**225.439.714.024,39**	**(28.053.513.566,65)**	**(12,44)**
	Jumlah Aset	**2.918.620.969.589,86**	**2.918.150.470.168,48**	**470.499.421,38**	**0,02**

Kenaikan sebagian besar disebabkan oleh penambahan aset tetap akibat dari belanja modal dana APBD murni maupun belanja modal dari sumber dana Bantuan Operasional Sekolah.

Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagian besar terdiri atas aset tetap bersih yaitu Rp2.539.729.666.032,10 atau 87,02% dari keseluruhan aset yang dimiliki. Berikut komposisi aset Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Per 31 Desember 2024.

5.3.1.1.ASET LANCAR

Aset lancar terdiri atas kas dan setara kas serta aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 pada tabel berikut.

Tabel 153. Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Kas di Kas Daerah	50.743.497.315,01	25.819.052.572,19	24.924.444.742,82	96,54
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	-
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	-
4.	Kas di BLUD	2.651.046.117,70	4.597.603.900,41	(1.946.557.782,71)	(42,34)
5.	Kas Dana BOS	0,00	281.132.047,63	(281.132.047,63)	(100,00)
6.	Kas Lainnya	0,00	15.842.200,00	(15.842.200,00)	(100,00)
7.	Kas Dana BOSP	168.387.764,36	0,00	168.387.764,36	-
8.	Kas Dana BOK Puskesmas	175.271.334,00	145.051.242,00	30.220.092,00	20,83
9.	Piutang Pajak Daerah	47.271.712,00	55.285.946,00	(8.014.234,00)	(14,50)
10.	Piutang Retribusi Daerah	3.905.529.291,00	41.882.856,00	3.863.646.435,00	9.224,89
11.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	118.450.130,00	0,00	118.450.130,00	-
12.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	167.260.589,28	2.501.714.574,80	(2.334.453.985,52)	(93,31)
13.	Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.000.176.000,00	112.945.547,00	1.887.230.453,00	1.670,92
14.	Piutang Transfer antar Daerah	64.358.083.112,00	58.541.978.212,00	5.816.104.900,00	9,93
15.	Penyisihan Piutang	(1.382.162.549,78)	(13.464.942.016,30)	12.082.779.466,52	(89,74)
16.	Beban Dibayar Dimuka	13.081.250,00	13.081.250,00	0,00	0,00
17.	Persediaan	14.964.943.100,62	13.775.722.508,25	1.189.220.592,37	8,63
	Jumlah Aset Lancar	**137.930.835.166,19**	**92.436.350.839,98**	**45.494.484.326,21**	**49,22**

Berdasarkan tabel rincian aset lancar di atas, secara umum terjadi peningkatan nilai aset lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp45.494.484.326,21 atau 49,22% jika dibanding pada 31 Desember 2023 sebesar Rp92.436.350.839,98.

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah saldo uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku pemegang kas daerah dalam bentuk rekening giro yang terdapat pada Bank Lampung Cabang

Pembantu Liwa nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Barat, Nomor 387.00.09.00001 9. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ini digunakan untuk menampung seluruh transaksi kas daerah yang meliputi pengeluaran dan penerimaan dari PAD serta transfer dari Pemerintah Provinsi dan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2024 sebesar Rp50.743.497.315,01 naik sebesar Rp24.924.444.742,82 atau 96,54% dibandingkan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.819.052.572,19 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 154. Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	RKUD SILPA	50.743.497.315,01	25.819.052.572,19	24.924.444.742,82	96,54
	Jumlah	50.743.497.315,01	25.819.052.572,19	24.924.444.742,82	96,54

Dari jumlah Kas di Kas Daerah tersebut diatas terdapat senilai Rp19.724.922.570,00 berupa kas yang dibatasi penggunaannya (earmark) dengan rincian sebagai berikut:

a. Sisa DAK Reguler		Rp	2.511.176.306,00
b. Sisa DAK Penugasan		Rp	7.272.203.186,00
c. Sisa DAK Affirmasi		Rp	393.115.758,00
d. Sisa DAK Non Fisik		Rp	4.288.246.706,00
e. Sisa Dana Insentif Fiskal		Rp	462.535.423,00
f. Sisa DAU Spesific Grant (SG)		Rp	4.526.470.111,00
g. Sisa DBH Sawit		Rp	271.175.080,00
	Jumlah	Rp	19.724.922.570,00

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan pada 31 Desember 2024 dan 2023 tidak memiliki saldo, karena seluruh penerimaan telah disetorkan ke RKUD atau ke Kas BLUD.

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran pada 31 Desember 2024 dan 2023 tidak memiliki saldo, karena seluruh sisa Uang Persediaan telah disetrokan ke RKUD.

5.3.1.1.4. Kas di BLUD

Kas di BLUD adalah saldo kas Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang berasal dari penerimaan BLUD RSUD Alimuddin Umar berupa jasa layanan rumah sakit dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berupa jasa layanan atas pinjaman dana bergulir UMKM dan pendapatan jasa giro bank dan Kas di BLUD Puskesmas.

Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.651.046.117,70 turun sebesar (Rp1.946.557.782,71) atau (42,34%) dari tahun 2023 sebesar Rp4.597.603.900,41 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 155. Kas di BLUD Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Kas SILPA				
1.	Kas di BLUD RSUD Alimuddin Umar	2.110.859.215,00	3.923.656.017,00	(1.812.796.802,00)	(46,20)
2.	Kas di BLUD Dinkop UKM Perindag	7.454.206,12	11.354.614,86	(3.900.408,74)	(34,35)
3.	Kas di BLUD Puskesmas	532.732.696,58	613.330.057,40	(80.597.360,82)	(13,14)
	Kas Non SILPA				
1.	Kas Utang PFK Puskesmas	0,00	49.263.211,15	(49.263.211,15)	(100,00)
	Jumlah Seluruh	2.651.046.117,70	4.597.603.900,41	(1.946.557.782,71)	(42,34)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa kas di BLUD berada pada 3 (tiga) Perangkat Daerah disajikan pada lampiran 14, dengan penjelasan berikut:

1. BLUD RSUD Alimuddin Umar total sebesar Rp2.110.859.215,00 terdiri dari:
   a. Kas Tunai sebesar Rp66.592.557,00 (terdiri atas uang tunai panjar kegiatan sebesar Rp55.943.367,00 dan uang tunai kas penerimaan sebesar Rp10.649.190,00); dan
   b. Rekening Koran BLUD RSUD Alimuddin Umar sebesar Rp2.044.266.658,00 yang digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi ditempatkan pada Bank BNI Rekening a.n. PPK BLUD RSUD Alimuddin Umar Giro Nomor 1237656932.

2. BLUD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp7.454.206,12 terdiri dari:
   a. Rekening Giro Bank Lampung No. 387.00.05.00308.4 a.n. UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM Rekening Jasa sebesar Rp4.961.277,23 (Digunakan untuk penempatan, pencairan jasa dana pengguliran dana BLUD UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM).
   b. Rekening Giro Bank Lampung No. 387.00.05.00309.3 a.n. BLUD UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM Rek. Lain-lain sebesar Rp2.492.928,89 (untuk menampung pendapatan jasa giro rekening lain-lain, jasa giro rekening pokok, jasa giro rekening jasa serta pendapatan denda keterlambatan pembayaran pokok dan jasa).

3. BLUD Puskesmas sebesar Rp532.732.696,58 dengan rincian sebagai berikut:

1)	Puskesmas Sumberjaya	Rp	184.707.293,80
2)	Puskesmas Kebun Tebu	Rp	2.854,00
3)	Puskesmas Gedung Surian	Rp	13.591.844,00
4)	Puskesmas Air Hitam	Rp	113.006,00
5)	Puskesmas Pajar Bulan	Rp	39.961.148,18
6)	Puskesmas Sekincau	Rp	3.729.162,00
7)	Puskesmas Pagar Dewa	Rp	0,80
8)	Puskesmas Batu Ketulis	Rp	32.375.722,40
9)	Puskesmas Kenali	Rp	526.575,00
10)	Puskesmas Batu Brak	Rp	3.821.026,80
11)	Puskesmas Bandar Negeri Suoh	Rp	7.829.515,00
12)	Puskesmas Srimulyo	Rp	1.078.137,60
13)	Puskesmas Liwa	Rp	4.270.463,00
14)	Puskesmas Buay Nyerupa	Rp	227.055.553,00
15)	Puskesmas Lombok	Rp	13.670.395,00
Jumlah		Rp	532.732.696,58

5.3.1.1.5. Kas Dana BOS

Kas Dana BOS merupakan akun yang menampung sisa kas Dana BOS di sekolah-sekolah. Per 31 Desember 2024, saldo Kas Dana BOS sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar (Rp281.132.047,63) atau (100,00%) dibandingkan dengan saldo tahun 2023 sebesar Rp281.132.047,63. Penurunan tersebut disebabkan oleh pemindahan Kas Dana BOS ke akun Kas Dana BOSP pada tahun 2024. rincian Kas Dana BOS disajikan sebagai berikut.

Tabel 156. Kas Dana BOS Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Kas Dana BOS				
	Kas SILPA				
	- Dinas Pendidikan, BOS Reguler	0,00	98.411.867,63	(98.411.867,63)	(100,00)
	- Dinas Pendidikan, BOS Kinerja	0,00	56.514.750,00	(56.514.750,00)	(100,00)
	Jumlah Kas SILPA	0,00	154.926.617,63	(154.926.617,63)	(100,00)
	Kas Non SILPA				
	- Dinas Pendidikan (BOS Affirmasi)	0,00	2.930.439,00	(2.930.439,00)	(100,00)
	- Dinas Pendidikan (BOS Reguler PFK)	0,00	114.155.765,00	(114.155.765,00)	(100,00)
	- Dinas Pendidikan (BOS Kinerja PFK)	0,00	9.119.226,00	(9.119.226,00)	(100,00)
	Jumlah Kas Non SILPA	0,00	126.205.430,00	(126.205.430,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	281.132.047,63	(281.132.047,63)	(100,00)

5.3.1.1.6. Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan akun yang digunakan untuk mencatat kas selain kas yang berada di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOSP, Kas Dana BOK Puskesmas Per 31 Desember 2024, saldo Kas Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (Rp15.842.200,00) atau (100,00%) dibandingkan tahun 2023.

Pemindahan pencatatan Kas BOP Kesetaraan ke Kas BOSP berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 63 Tahun 2023 bahwa Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) adalah Dana Aloksi Khusus Non Fisik utnuk mendukung biaya operasional non personalia bagi Satuan Pendidikan terdiri atas : BOP PAUD, BOS, BOP Kesetaraan.

Berikut rincian Kas Lainnya sebagai berikut.

Tabel 157. Kas Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	**Kas Lainnya**				
	Kas SILPA				
	- Kas BOP Kesetaraan Reguler – Diedik	0,00	2.382.200,00	(2.382.200,00)	(100,00)
	- Kas BOP Kesetaraan Kinerja - Diedik	0,00	13.460.000,00	(13.460.000,00)	(100,00)
	Jumlah Kas SILPA	0,00	15.842.200,00	(15.842.200,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	15.842.200,00	(15.842.200,00)	(100,00)

5.3.1.1.7. Kas Dana BOSP

Kas Dana BOSP merupakan akun yang menampung sisa kas dana BOSP (Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan) pada sekolah-sekolah. Per 31 Desember 2024, saldo Kas Dana BOSP sebesar Rp168.387.764,36, mengalami peningkatan sebesar Rp168.387.764,36 dibandingkan dengan saldo tahun 2023 sebesar Rp0,00

Pemindahan pencatatan Kas BOS menjadi Kas Dana BOSP berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputasan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguna dan Keuangan Daerah bahwa telah ditambahkan Kode Akun 1.1.01.10.01.0001 - Kas Dana BOSP (Digunakan untuk mencatat kas di Kas Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang menampung seluruh penerimaan satuan pendidikan dan membayar seluruh pengeluaran satuan pendidikan.

disajikan pada Lampiran 15 dan Tabel berikut.

Tabel 158. Kas Dana BOSP Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
2.	**Kas Dana BOSP**				
	Kas SILPA				
	- Dinas Pendidikan: BOS Reguler	109.777.596,63	0,00	109.777.596,63	∞
	- Dinas Pendidikan: BOS Kinerja)	28.630.750,00	0,00	28.630.750,00	∞
	- Dinas Pendidikan: BOP Kesetaraan Reguler	1.050.002,00	0,00	1.050.002,00	∞
	- Dinas Pendidikan: BOP Kesetaraan Kinerja	15.494.000,00	0,00	15.494.000,00	∞
	- Dinas Pendidikan: BOS Reguler (Jasa Giro)	276.098,73	0,00	276.098,73	∞
	Jumlah Kas SILPA	155.228.447,36	0,00	155.228.447,36	∞
	Kas Non SILPA				
	- Dinas Pendidikan (BOS Afirmasi)	2.930.439	0,00	2.930.439	∞
	- Dinas Pendidikan (BOS Reguler PFK)	8.862.078,00	0,00	8.862.078,00	∞
	- Dinas Pendidikan (BOS Kinerja PFK)	1.366.800,00	0,00	1.366.800,00	∞
	Jumlah Kas Non SILPA	13.159.317,00	0,00	13.159.317,00	∞
	Jumlah	168.387.764,36	0,00	168.387.764,36	∞

Saldo Kas Non SiLPA sebesar Rp13.159.317,00 terdiri atas:

1. Utang PFK atas transaksi tahun 2024 menggunakan Dana BOSP sebesar Rp10.228.878,00 yang sampai dengan tanggal neraca belum disetorkan, terdapat pada:

1)	SD Negeri 1 Gunung Terang	Rp	312.445,00
2)	SD Negeri 1 Basungan	Rp	219.000,00
3)	SD Negeri Waspada	Rp	1.244.948,00
4)	SD Negeri 2 Tanjung Raya	Rp	190.000,00
5)	SD Negeri 2 Bandar Baru	Rp	151.500,00
6)	SD Negeri 3 Hanakau	Rp	120.000,00
7)	SD Negeri 1 Pagar Dewa	Rp	1.344.150,00
8)	SMP Negeri 2 Liwa	Rp	1.529.525,00
9)	SMP Negeri 1 Sekincau	Rp	2.868.310,00
10)	SMP Negeri 3 Sukau	Rp	882.200,00
11)	SMP Negeri 1 Sekincau	Rp	1.366.800,00
	Total	Rp	10.228.878,00

2. Uang Dana BOS Affirmasi sebesar Rp2.930.439,00 bukan merupakan unsur SILPA, uang ini merupakan saldo sejak tahun 2022, hal ini terjadi karena pada tahun 2022 Pendapatan dan Belanja atas Dana BOS Affirmasi tidak masuk dalam APBD, sehingga pencatatan pendapatan dan beban hanya dicatat pada Laporan Operasional saja dan tidak di catat pada LRA. Pada akhir tahun 2022 masih tersisa sejumlah tersebut sehingga uang tersebut tidak termasuk unsur SILPA melainkan kas diluar SiLPA, terdapat pada:

1)	SDN 1 Bumi Agung	Rp	57.500,00
2)	SDN Sukamarga	Rp	30.000,00
3)	SDN Way Suluh	Rp	19.000,00
4)	SDN Negeri Jaya	Rp	16.000,00
5)	SDN Kali Pasir	Rp	20.000,00
6)	SDN 1 Bandar Baru	Rp	210,00
7)	SDN Hantatai	Rp	25.000,00
8)	SDN 1 Banding Agung	Rp	20.000,00
9)	SDN 2 Sumber Alam	Rp	4.600,00
10)	SDN 3 Banding Agung	Rp	7.000,00
11)	SMP Satap 2 Balik Bukit	Rp	2.557.091,00
12)	SMPN 1 Bandar Negeri Suoh	Rp	92.000,00
13)	SMPN 1 Suoh	Rp	27.000,00
14)	SMPN 3 Sukau	Rp	38,00
15)	SMPN Satu Atap 1 Suoh	Rp	55.000,00
	Total	Rp	2.930.439,00

5.3.1.1.8. Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas merupakan akun yang menampung sisa kas Dana BOK Puskesmas yang bersumber dari APBN. Per 31 Desember 2024, saldo Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp175.271.334,00, mengalami peningkatan sebesar Rp30.220.092,00 atau 20,83% sebesar dibandingkan dengan saldo tahun 2023 sebesar Rp145.051.242,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 159. Kas Dana BOK Puskesmas Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Kas Dana BOK Puskesmas				
	Kas SILPA				
	- Puskesmas Sumberjaya	24.840.371,00	3.012.026,00	21.828.345,00	724,71
	- Puskesmas Kebun Tebu	7.473.789,00	3.411.504,00	4.062.285,00	119,06
	- Puskesmas Gedung Surian	11.380.320,00	7.676.814,00	3.703.506,00	48,24
	- Puskesmas Air Hitam	59.855.221,00	5.558.268,00	54.296.953,00	976,87
	- Puskesmas Pajar Bulan	1.105.000,00	3.251.844,00	(2.146.844,00)	(66,02)
	- Puskesmas Sekincau	3.410.200,00	12.355.719,00	(8.945.519,00)	(72,40)
	- Puskesmas Pagar Dewa	1.505.000,00	1.407.814,00	97.186,00	6,90
	- Puskesmas Batu Ketulin	0,00	505.514,00	(505.514,00)	(100,00)

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
	- Puskesmas Kenali	2.555.396,00	2.163.884,00	391.512,00	18,09
	- Puskesmas Batu Brak	4.460.053,00	21.942.586,00	(17.482.533,00)	(79,67)
	- Puskesmas Bandar Negeri Suoh	5.127.000,00	2.535.036,00	2.591.964,00	102,25
	- Puskesmas Srimulyo	12.476.254,00	2.403.806,00	10.072.448,00	419,02
	- Puskesmas Liwa	4.999.007,00	2.913.825,00	2.085.182,00	71,56
	- Puskesmas Buay Nyerupa	15.167.300,00	61.048.664,00	(45.881.364,00)	(75,16)
	- Puskesmas Lombok	20.916.413,00	14.763.928,00	6.152.485,00	41,67
	Jumlah	**175.271.334,00**	**145.051.242,00**	**30.220.092,00**	**20,83**

Selain yang tersaji dalam akun Kas dan Setara kas, terdapat sebanyak 544 rekening pada Bank Lampung dan BRI, sudah tidak digunakan pada tahun 2024. Sebanyak 92 rekening diantaranya memiliki saldo per 31 Desember 2024 dengan total sebesar Rp22.725.099,13. Selain itu, terdapat sebanyak 287 rekening pada Bank Lampung masih aktif digunakan. Sebanyak 18 diantaranya memiliki saldo per 31 Desember 2024 dengan total sebesar Rp4.846.266,67, disajikan pada lampiran 12 dan lampiran 13.

PIUTANG

Piutang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Lampung Barat atas penerimaan kas, baik berupa pendapatan yang belum diterima secara tunai maupun tagihan lainnya. Per 31 Desember 2024, saldo akun piutang sebesar Rp70.596.770.834,28, mengalami kenaikan sebesar Rp9.342.963.698,48 atau 15,25% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp61.253.807.135,80. Adapun rincian Piutang dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 160. Daftar Piutang Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Piutang Pajak Daerah	47.271.712,00	55.285.946,00	(8.014.234,00)	(14,50)
2.	Piutang Retribusi Daerah	3.905.529.291,00	41.882.856,00	3.863.646.436,00	9.224,89
3.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	118.450.130,00	0,00	118.450.130,00	-
4.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	167.260.589,28	2.501.714.574,80	(2.334.453.985,52)	(93,31)
5.	Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.000.176.000,00	112.945.547,00	1.887.230.453,00	1.670,92
6.	Piutang Transfer Antar Daerah	64.358.083.112,00	58.541.978.212,00	5.816.104.900,00	9,93
	Jumlah	**70.596.770.834,28**	**61.253.807.135,80**	**9.342.963.698,48**	**15,25**

Berikut tabel Perhitungan Piutang Akhir 31 Desember 2024

Tabel 161. Perhitungan Piutang Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Piutang 31 Desember 2023 (Rp)	Pendapatan - LO	Pendapatan - LRA	Piutang 31 Desember 2024 (Rp)	Selisih *)
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4-5-6
1.	Piutang Pajak Daerah	55.285.946,00	15.812.918.531,00	15.820.932.765,00	47.271.712,00	0,00
2.	Piutang Retribusi Daerah	41.882.856,00	38.100.447.232,00	2.166.946.349,00	3.905.529.291,00	32.069.854.448,00
3.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,0	5.972.469.064,91	5.854.018.934,91	118.450.130,00	0,00
4.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.501.714.574,80	21.845.619.337,48	47.981.878.678,90	167.260.589,28	(23.801.805.355,90)
5.	Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	112.945.547,00	836.551.403.847,00	966.625.034.394,00	2.000.176.000,00	(121.960.861.000,00)
6.	Piutang Transfer Antar Daerah	58.541.978.212,00	88.559.251.212,00	82.743.146.312,00	64.358.083.112,00	0,00
	Jumlah	**61.253.807.135,80**	**1.006.842.109.224,39**	**1.111.191.957.433,81**	**70.596.770.834,28**	**(113.692.811.907,90)**

*) Pendapatan yang mempengaruhi LO tapi tidak mempengaruhi LRA atau sebaliknya, dijelaskan pada masing-masing jenis pendapatan berikut.

Adapun lebih rinci rincian piutang disajikan pada lampiran 16 pada laporan keuangan ini. Berikut penjelasan terhadap masing-masing jenis piutang sebagai berikut:

5.3.1.1.9. Piutang Pajak Daerah

Piutang pajak merupakan pos untuk menampung saldo tagihan pajak daerah kepada pihak ketiga yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan. Piutang Pajak terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah,

sampai dengan batas waktu tertentu pada tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah). Saldo Piutang Pajak Kabupaten Lampung Barat Per 31 Desember 2024 sebesar Rp47.271.712,00 atau turun sebesar (Rp8.014.234,00) atau (14,50%) dibandingkan TA 2023 sebesar Rp55.285.946,00.

Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya, Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya di pindahkan pencatatannya menjadi Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman, dan Piutang Pajak Parkir dipindahkan pencatatannya menjadi Piutang PBJT-Jasa Parkir. Pemindahan pencatatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan Perda Kab. Lampung Barat Nomor 1 Tahun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Lebih lengkap rincian piutang pajak daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 162. Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman	38.462.796,00	0,00	38.462.796,00	-
2.	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	21.871.896,00	(21.871.896,00)	(100,00)
3.	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	29.864.050,00	(29.864.050,00)	(100,00)
4.	Piutang PBJT-Jasa Parkir	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	-
5.	Piutang Pajak Parkir	0,00	3.550.000,00	(3.550.000,00)	(100,00)
6.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan P2	6.208.916,00	0,00	6.208.916,00	-
	Jumlah	47.271.712,00	55.285.946,00	(8.014.234,00)	(14,50)

Berikut tabel Perhitungan Piutang Pajak Daerah Akhir Per 31 Desember 2024

Tabel 163. Perhitungan Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Piutang 31 Desember 2023 (Rp)	Pendapatan - LO	Pendapatan - LRA	Piutang 31 Desember 2024 (Rp)	Selisih *)
1.	2	3	4	5	6	7 = 3+4-5-6
1.	Piutang Pajak Daerah	55.285.946,00	15.812.918.531,00	15.820.932.765,00	47.271.712,00	0,00
	Jumlah	55.285.946,00	15.812.918.531,00	15.820.932.765,00	47.271.712,00	0,00

5.3.1.1.9.1. Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman

Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman pada tahun 2024 sebesar Rp38.462.796,00 mengalami penurunan sebesar (Rp13.273.150,00) atau (25,66%) dari tahun 2023 sebesar Rp51.735.946,00 (Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp21.871.896,00 + Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Rp29.864.050,00).

Perhitungan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman Tahun 2024:

1	Piutang Awal Tahun	Rp	51.735.946,00
2	Pendapatan LO	Rp	1.771.806.077,00
3	Pelunasan atas Piutang Awal Tahun (LRA)	(Rp	35.245.296,00)
4	Penerimaan LRA Tahun 2024 atas Penetapan Tahun 2024	(Rp	1.749.833.931,00)
5	Piutang Akhir Tahun	Rp	38.462.796,00

5.3.1.1.9.2. Piutang PBJT-Jasa Parkir

Piutang PBJT-Jasa Parkir pada tahun 2024 sebesar Rp2.600.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp950.000,00) atau (26,76%) dari Piutang Pajak Tahun 2023 sebesar Rp3.500.000,00.

Perhitungan Piutang PBJT-Jasa Parkir Tahun 2024:

1	Piutang Awal Tahun	Rp	3.550.000,00
2	Pendapatan LO	Rp	108.900.000,00
3	Penerimaan LRA selama tahun 2024	(Rp	109.850.000,00)
4	Piutang Akhir Tahun	Rp	2.600.000,00

5.3.1.1.9.3. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan P2

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 pada tahun 2024 sebesar Rp6.208.916,00 mengalami peningkatan sebesar Rp6.208.916,00 dari tahun 2023 sebesar Rp0,00. Peningkatan piutang ini karena beberapa wajib pajak belum melunasi PBB P2 terletak pada Kecamatan Balik Bukit senilai Rp3.481.820,00 dan Kecamatan Sumber Jaya sebesar Rp2.727.096,00.

Perhitungan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 Tahun 2024:

1	Piutang Awal Tahun	Rp	0,00
2	Pendapatan LO	Rp	5.279.375.204,00
3	Penerimaan LRA selama tahun 2024	(Rp	5.273.166.288,00)
4	Piutang Akhir Tahun	Rp	6.208.916,00

5.3.1.1.10. Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung saldo tagihan retribusi daerah kepada pihak ketiga (wajib retribusi daerah) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan. Piutang Retribusi terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan sehingga timbul tagihan atas hak Pemerintah Daerah melalui beberapa Perangkat Daerah pengelola terkait, yang sampai dengan pelaporan neraca belum dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah. Saldo Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Per 31 Desember 2024 sebesar Rp56.542.856,00 mengalami peningkatan sebesar Rp14.660.000,00 atau 35,00% dibandingkan dari tahun 2023 sebesar Rp41.882.856,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 164. Piutang Retribusi Daerah Per Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	**Dinas Kesehatan**				
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Gedung Surian	46.031.705,00	0,00	46.031.705,00	∞
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kebun Tebu	37.518.275,00	0,00	37.518.275,00	∞
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sumber Jaya	27.006.850,00	0,00	27.006.850,00	∞
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Air Hitam	26.281.560,00	0,00	26.281.560,00	∞
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Fajar Bulan	104.783.630,00	0,00	104.783.630,00	∞
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sekincau	60.219.785,00	0,00	60.219.785,00	∞
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pagar Dewa	10.683.405,00	0,00	10.683.405,00	∞
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Batu Ketulis	60.034.540,00	0,00	60.034.540,00	∞
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kenali	35.402.800,00	0,00	35.402.800,00	∞
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Batu Brak	21.510.500,00	0,00	21.510.500,00	∞
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bandar Negeri Suoh	30.243.350,00	0,00	30.243.350,00	∞
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Srimulyo	22.990.800,00	0,00	22.990.800,00	∞
	Piutang Retribusi Pelayanan KesehatanPuskesmas Liwa	0,00	0,00	0,00	∞
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Buay Nyerupa	40.137.750,00	0,00	40.137.750,00	∞
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lombok	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	∞
	Sub Jumlah	**530.644.950,00**	**0,00**	**530.644.950,00**	∞
2.	**RSUD Alimuddin Umar**				
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.318.341.485,00	0,00	3.318.341.485,00	∞
	Sub Jumlah	**3.318.341.485,00**	**0,00**	**3.318.341.485,00**	∞
3.	**Diskominfo**				
	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	25.680.356,00	25.680.356,00	0,00	0,00
	Sub Jumlah	**25.680.356,00**	**25.680.356,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**BPKD**				
	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	79.000,00	(79.000,00)	(100,00)
	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	0,00	16.127.500,00	(16.127.500,00)	(100,00)
	Sub Jumlah	**0,00**	**16.202.500,00**	**(16.202.500,00)**	**(100,00)**
5.	**Badan Pendapatan Daerah**				
	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	75.000,00	0,00	75.000,00	∞
	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	30.787.500,00	0,00	30.787.500,00	∞
	Sub Jumlah	**30.862.500,00**	**0,00**	**30.862.500,00**	∞
	Jumlah	**3.905.529.291,00**	**41.882.856,00**	**3.863.646.435,00**	**9.224,89**

Berikut tabel Perhitungan Piutang Retribusi Daerah Akhir Per 31 Desember 2024

Tabel 165. Perhitungan Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Piutang 31 Desember 2023 (Rp)	Pendapatan - LO	Pendapatan - LRA	Piutang 31 Desember 2024 (Rp)	Selisih *)
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4-5-6
1	Piutang Retribusi Daerah	41.882.856,00	38.100.447.232,00	2.166.946.349,00	3.905.529.291,00	32.069.854.448,00
Jumlah		41.882.856,00	38.100.447.232,00	2.166.946.349,00	3.905.529.291,00	32.069.854.448,00

Selisih antara Piutang Awal Tahun + Pendapatan LO – Pendapatan LRA dengan Piutang Akhir Tahun sebesar Rp32.069.854.448,00 adalah merupakan Pendapatan LRA diterima dimuka yaitu:

1. Penerimaan diterima dimuka atas sewa tanah an Bpk. GNTR sebesar (Rp 5.737.500,00)
2. Peningkatan sewa kios diterima di muka pada Dinas Koperasi UMK Perindag sebesar (Rp460.000,00)
3. Perhitungan selisih pada RSUD Alimuddin Umar Rp18.113.323.403,00 (penjelasan rinci pada 5.3.1.1.10.1 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan)
4. Perhitungan selisih pada Puskesmas Rp13.962.728.545,00 (penjelasan rinci pada 5.3.1.1.10.1 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan)

5.3.1.1.10.1. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan piutang klaim yang timbul dari jasa pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah (RSUD dan Puskesmas) kepada masyarakat, yang belum dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan terdapat pada 2 unit organisasi Dinas Kesehatan yaitu pada RSUD Alimuddin Umar sebesar Rp3.318.341.485,00 dan pada 15 Puskesmas sebesar Rp530.644.950,00.

Berikut tabel Perhitungan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Akhir Per 31 Desember 2024

Tabel 166. Perhitungan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Piutang 31 Desember 2023 (Rp)	Pendapatan - LO	Pendapatan - LRA	Piutang 31 Desember 2024 (Rp)	Selisih *)
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4-5-6
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	0,00	14.493.373.495,00	0,00	530.644.950,00	13.962.728.545,00
2.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	0,00	21.431.664.888,00	0,00	3.318.341.485,00	18.113.323.403,00
Jumlah		0,00	35.925.038.383,00	0,00	3.848.986.435,00	32.076.051.948,00

Selisih sebesar Rp32.076.051.948,00 tersebut diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

1 **Penentuan Piutang Akhir Puskesmas:**

a. Piutang Awal Lain-lain PAD yang sah	Rp	265.879.565,00
b. Pendapatan Jasa Layanan Maret-Desember Puskes dicatat pada Retribusi Daerah	Rp	14.493.373.495,00
c. Pendapatan Jasa Layanan Jan-Febr Puskes dicatat pada Lain-lain PAD yang sah	Rp	2.650.911.840,00
d. Pendapatan LRA Puskesmas	Rp	(16.478.430.850,00)
e. Angsuran utang yang dikompensasi dengan piutang tahun 2024 atas pengembalian kelebihan pembayaran kapitasi perserta PBIJK pada FKTP Tahun 2021 berdasrkan BA Kompensasi Kapitasi	Rp	(401.089.100,00)
Piutang Akhir Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan	Rp	**530.644.950,00**

2 **Penentuan Piutang Akhir RSUD Alimuddin Umar:**

a. Piutang Awal Lain-lain PAD yang sah	Rp	2.091.053.809,00
b. Pendapatan Jasa Layanan Maret-Desember RSUD dicatat pada Retribusi Daerah (LO)	Rp	21.431.664.888,00
c. Pendapatan Jasa Layanan Jan-Feb Puskes dicatat pada Lain-lain PAD yang sah (LO)	Rp	4.386.740.804,00
d. Pendapatan LRA RSUD	(Rp	24.377.834.316,00)

e.	Pembayaran utang kelebihan pembayaran pendapatan BLUD RSUD atas pembayaran BPJS tahun lalu	Rp	(389.063.300,00)
f.	Mencatat Surat Tindak Lanjut Konfirmasi Hasil Audit Administrasi klaim RSDU AU atas kelebihan pembayaran klaim dari tahun 2021 s.d. 2024	Rp	175.779.600,00
	Piutang Akhir Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan	Rp	**3.318.341.485,00**

3	**Selisih sebesar Rp32.076.051.948,00:**		
a.	Kenaikan Nilai Piutang (Rp3.318.341.485-Rp2.091.053.809,00) RSUD	Rp	(1.227.287.676,00)
b.	Kenaikan Nilai Piutang (Rp530.644.950,00-Rp265.879.565,00) Puskesmas	Rp	(264.765.385,00)
c.	Piutang Awal Lain-lain PAD yang sah RSUD	Rp	(2.091.053.809,00)
d.	Piutang Awal Lain-lain PAD yang sah Puskesmas	Rp	(265.879.565,00)
e.	Pendapatan Jasa Layanan Maret-Desember dicatat pada Pendapatan Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan RSUD	Rp	21.431.664.888,00
f.	Pendapatan Jasa Layanan Maret-Desember Puskes dicatat pada Pendapatan Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Rp	14.493.373.495,00
	Selisih	Rp	**32.076.051.948,00**

5.3.1.1.10.2. Piutang Retribusi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada tahun 2024 sebesar Rp25.680.356,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2023 dicatat sebesar Rp25.680.356,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah berupaya untuk melakukan penagihan terhadap piutang tersebut. Berdasarkan surat Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 800/020/III.17/2025 tanggal 31 Januari 2025 terdapat beberapa kondisi yang mengakibatkan piutang tersebut tidak tertagih antara lain : a) terdapat 3 tower PT TBG sudah dibongkar tanpa pemberitahuan kepada Pemkab Lampung Barat sehingga SKRD masih terbit. b) Terdapat tower PT Telkomsel dan PT STP sudah pindah kepemilikan ke PT TBG sehingga terdapat dobel penerbitan SKRD. c) Terdapat penerimaan piutang yang tidak sesuai dengan nominal SKRD yang diterbitkan.

5.3.1.1.10.3. Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan

Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp75.000,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2023 sebesar Rp75.000,00. Pemungutan retribusi penyewaan tanah dan bangunan pada tahun 2023 dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan pada tahun 2024 sudah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah.

5.3.1.1.10.4. Piutang Penyewaan Tanah

Piutang Retribusi Penyewaan Tanah tahun 2024 sebesar Rp30.787.500,00 mengalami peningkatan sebesar Rp14.660.000,00 dari tahun 2023 sebesar Rp16.127.500,00. Pemungutan retribusi penyewaan tanah pada tahun 2023 dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan pada tahun 2024 sudah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah.

5.3.1.1.11. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HKPYD)

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HKPYD) merupakan pos untuk menampung saldo tagihan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan berupa dividen BUMD yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Berita Acara Pembagian Dividen. Pada tahun 2024 terdapat Piutang HKPYD kepada Perumda Limau Kunci berdasarkan Berita Acara tanggal 27 Maret 2024 ditandatangani oleh Dewan Pengawas dan Direktur Permuda Limau Kunci serta Surat Pernyataan Direktur Perumda Limau Kunci Nomor 27/000/I/II/2025 tanggal 10 Februari 2025, bahwa Dividen atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 sebesar Rp118.450.130,00 akan disetor ke RKUD pada Tahun 2025.

Adapun lebih rinci piutang HKPYD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 167. Piutang HKPYD Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Piutang Dividen Perumda Air Minum Limau Kunci	118.450.130,00	0,00	118.450.130,00	∞
Jumlah		118.450.130,00	0,00	118.450.130,00	∞

Berikut tabel Perhitungan Piutang Pajak Daerah Akhir Per31 Desember 2024

Tabel 168. Perhitungan Piutang HKPYD Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Piutang 31 Desember 2023 (Rp)	Pendapatan - LO	Pendapatan - LRA	Piutang 31 Desember 2024 (Rp)	Selisih *)
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4-5-6
1.	Piutang Dividen Perumda Air Minum Limau Kunci	0,00	5.972.469.064,91	5.854.018.934,91	118.450.130,00	0,00
Jumlah		0,00	5.972.469.064,91	5.854.018.934,91	118.450.130,00	0,00

Adapun dividen atas Laba Tahun Buku 2024 PT. BPRS Lampung Barat (Perseroda) sebesar Rp437.594.857,21 tidak dicatat sebagai Piutang HKPYD karena RUPS Penentuan Dividen baru dilakukan pada tanggal 17 Februari 2025 dengan Akta Notaris Amilda Riansyah, S.H., M.Kn Nomor 15.

Serta dividen atas Laba Tahun Buku 2024 PT. Bank Lampung sebesar Rp2.740.462.090,16 tidak dicatat sebagai Piutang HKPYD karena RUPS Penentuan Dividen baru dilakukan pada tanggal 3 Februari 2025 dengan Akta Notaris Ria Yuliana, S.H., M.Kn Nomor 483.

5.3.1.1.12. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang sah merupakan piutang Pendapatan Asli Daerah yang tidak termasuk piutang pendapatan retribusi, piutang pendapatan pajak, piutang pendapatan dari perizinan tertentu dan piutang dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Saldo piutang lain lain PAD yang sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp167.260.589,28 atau mengalami penurunan sebesar (Rp2.334.453.985,52) atau (93,31%) dari tahun 2023 sebesar Rp2.501.714.574,80 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 169. Piutang Lain-lain PAD yang Sah Per Objek
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	55.781.641,04	62.510.851,56	(6.729.210,52)	(10,76)
2.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	40.054,24	1.180.349,24	(1.139.695,00)	(96,56)
3.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	49.798.294,00	17.000.000,00	32.798.294,00	192,93
4.	Piutang Pendapatan BLUD	0,00	2.356.933.374,00	(2.356.933.374,00)	(100,00)
5.	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	61.640.000,00	64.090.000,00	(2.450.000,00)	(3,82)
	Jumlah Total	167.260.589,28	2.501.714.574,80	(2.334.453.985,52)	(93,31)

Berikut tabel Perhitungan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Akhir Per31 Desember 2024

Tabel 170. Perhitungan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Piutang 31 Desember 2023 (Rp)	Pendapatan - LO	Pendapatan - LRA	Piutang 31 Desember 2024 (Rp)	Selisih *)
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4-5-6
1.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.501.714.574,80	21.845.619.337,48	47.981.878.678,90	167.260.589,28	(23.801.805.355,90)
Jumlah		2.501.714.574,80	21.845.619.337,48	47.981.878.678,90	167.260.589,28	(23.801.805.355,90)

Selisih antara Piutang Awal Tahun + Pendapatan LO – Pendapatan LRA dengan Piutang Akhir Tahun sebesar (Rp23.801.805.355,90) dijelaskan berikut:

Tabel 171. Rincian Selisih antara Piutang Akhir dengan Rumus Piutang Akhir Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Selisih
1	2	7 = 3+4-5-6
1.	Piutang Pendapatan LO atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atas Pejabat Lain disajikan pada akun Aset Lainnya (Tagihan Jangka Panjang) - OPD BKAD	6.028.566.717,35
2.	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum Rp1.689.189,25, pendapatanya masuk ke Lain-lain PAD yang Sah - UPU RSUD Alimuddin Umar	(1.689.189,25)
3.	Kompensasi piutang atas iuran jaminan kesehatan bagi non ASN tagihan iuran PBPU Pemda berdasarkan Berita Acara Kesepakatan nomor: 1582/BA/XII-06/0724 Tanggal 12 Desember 2024 tentang kompensasi atas potongan pajak Rokok tahun 2024 dan kompensasi atas temuan BPK RI dan PMK 51 Tahun 2024	1.627.996.264,00
4.	Pendapatan hasil sewa BMD (LO) (Lain-lain PAD yang Sah) yang merupakan penyesuaian dari pendapatan diterima dimuka Sewa Gedung dan Bangunan	5.000.000,00
5.	Perhitungan selisih pada RSUD Alimuddin Umar Rp17.900.039.703,00 (penjelasan rinci pada 5.3.1.1.12.4. Piutang Pendapatan BLUD)	(17.900.039.703,00)
6.	Perhitungan selisih pada Puskesmas Rp13.561.639.445,00 (penjelasan rinci pada 5.3.1.1.12.4. Piutang Pendapatan BLUD)	(13.561.639.445,00)
	Jumlah	(23.801.805.355,90)

Tabel 172. Piutang Lain-lain PAD yang Sah Per OPD
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	**Dinas Kesehatan**				
	Piutang Pendapatan BLUD	0,00	265.879.565,00	(265.879.565,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	265.879.565,00	(265.879.565,00)	(100,00)
2.	**RSUD Alimuddin Umar**				
	Piutang Pendapatan BLUD	0,00	2.091.053.809,00	(2.091.053.809,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	2.091.053.809,00	(2.091.053.809,00)	(100,00)
3.	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**				
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	40.654,24	1.180.349,24	(1.139.695,00)	(96,56)
	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	55.781.641,04	62.510.851,56	(6.729.210,52)	(10,76)
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	49.798.294,00	17.000.000,00	32.798.294,00	192,93
	Jumlah	105.620.589,28	80.691.200,80	24.929.388,48	30,89
4.	**Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag**				
	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	61.640.000,00	64.090.000,00	(2.450.000,00)	(3,82)
	Jumlah	61.640.000,00	64.090.000,00	(2.450.000,00)	(3,82)
	Jumlah Total	167.260.589,28	2.501.714.574,80	(2.334.453.985,52)	(93,31)

5.3.1.1.12.1. Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Saldo Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun 2024 sebesar Rp55.781.641,04 mengalami penurunan sebesar (Rp6.729.210,52) atau (10,76%) dari saldo tahun 2023 sebesar Rp62.510.851,56. Piutang ini merupakan tagihan kepada pihak ketiga yang disebabkan oleh hasil pemeriksaan BPK RI. Dari sejumlah piutang tersebut sebagian telah memiliki surat keterangan kesanggupan untuk membayar.

5.3.1.1.12.2. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

Saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun 2024 sebesar Rp40.654,24 mengalami penurunan sebesar (Rp1.139.695,00) atau (96,56%) dari tahun 2023 sebesar Rp1.180.349,24. Piutang ini merupakan denda terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) yang belum diterima.

5.3.1.1.12.3. Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Saldo Piutang Pendapatan dari Pengembalian tahun 2024 sebesar Rp49.798.294,00 mengalami peningkatan sebesar Rp32.798.294,00 atau 192,93% dari tahun 2023 sebesar Rp17.000.000,00. Piutang ini merupakan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan.

5.3.1.1.12.4. Piutang Pendapatan BLUD

Piutang pendapatan BLUD adalah hak BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas penyerahan barang, jasa, atau transaksi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan BLUD. Piutang ini terdiri atas : Piutang Non Kapitasi, Piutang Prolanis dan JKN Kesehatan.

Piutang Non Kapitasi adalah hak klaim atau tagihan yang dimiliki oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terhadap BPJS Kesehatan atas pelayanan kesehatan yang tidak termasuk dalam sistem pembayaran kapitasi (pada Puskesmas). Piutang Prolanis timbul akibat pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan yang mengikuti Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) (pada Puskesmas).

Piutang JKN Kesehatan pada RSUD adalah tagihan yang timbul karena RSUD telah memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Piutang ini merupakan hak klaim RSUD terhadap BPJS Kesehatan untuk menerima pembayaran atas jasa pelayanan yang telah diberikan.

Saldo Piutang Pendapatan BLUD tahun 2024 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (Rp2.356.933.374,00) atau (100,00%) dibandingkan saldo tahun 2023 sebesar Rp2.356.933.374,00.

Rincian Piutang Pendapatan BLUD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 173. Rincian Piutang Pendapatan BLUD Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	**RSUD Alimuddin Umar**				
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	2.091.053.809,00	(2.091.053.809,00)	(100,00)
	Jumlah	**0,00**	**2.091.053.809,00**	**(2.091.053.809,00)**	**(100,00)**
2.	**Dinas Kesehatan**				
	Puskesmas Sumber jaya	0,00	35.363.530,00	(35.363.530,00)	(100,00)
	Puskesmas Kebun tebu	0,00	16.329.100,00	(16.329.100,00)	(100,00)
	Puskesmas Gedung Surian	0,00	25.262.195,00	(25.262.195,00)	(100,00)
	Puskesmas Fajar Bulan	0,00	40.534.760,00	(40.534.760,00)	(100,00)
	Puskesmas Sekincau	0,00	18.669.490,00	(18.669.490,00)	(100,00)
	Puskesmas Pagar Dewa	0,00	3.400.000,00	(3.400.000,00)	(100,00)
	Puskesmas BNS	0,00	5.458.000,00	(5.458.000,00)	(100,00)
	Puskesmas Sirmulyo	0,00	11.697.500,00	(11.697.500,00)	(100,00)
	Puskesmas Kenali	0,00	30.892.720,00	(30.892.720,00)	(100,00)
	Puskesmas Batu Brak	0,00	10.279.180,00	(10.279.180,00)	(100,00)
	Puskesmas Buay Nyerupa	0,00	30.386.180,00	(30.386.180,00)	(100,00)
	Puskesmas Lombok	0,00	7.015.000,00	(7.015.000,00)	(100,00)
	Puskesmas Air Hitam	0,00	11.900.000,00	(11.900.000,00)	(100,00)
	Puskesmas Batu Ketulis	0,00	18.691.910,00	(18.691.910,00)	(100,00)
	Jumlah	**0,00**	**265.879.565,00**	**(265.879.565,00)**	**(100,00)**
	Jumlah Total	**0,00**	**2.356.933.374,00**	**(2.356.933.374,00)**	**(100,00)**

Tabel 174. Rincian Selisih antara Piutang Akhir dengan Rumus Piutang Lain-lain PAD yang Sah Akhir Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Piutang 31 Desember 2023 (Rp)	Pendapatan - LO	Pendapatan - LRA	Piutang 31 Desember 2024 (Rp)	Selisih *)
1.	2	3	4	5	6	7 = 3+4-5-6
1.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah RSUD	2.091.053.809,00	4.386.740.804,00	24.377.634.316,00	0,00	(17.900.039.703,00)
2.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Puskesmas	265.879.565,00	2.650.911.840,00	16.478.430.850,00	0,00	(13.561.639.445,00)
	Jumlah	**2.356.933.374,00**	**7.037.652.644,00**	**40.856.265.166,00**	**0,00**	**(31.461.679.148,00)**

Selisih sebesar (Rp31.461.679.148,00) tersebut diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

1	**Penentuan Piutang Akhir Puskesmas:**		
	a. Piutang Awal Lain-lain PAD yang sah	Rp	265.879.565,00
	b. Pendapatan Jasa Layanan Maret-Desember Puskes dicatat pada Retribusi Daerah	Rp	14.493.373.495,00
	c. Pendapatan Jasa Layanan Jan-Febr Puskes dicatat pada Lain-lain PAD yang sah	Rp	2.650.911.840,00
	d. Pendapatan LRA Puskesmas	Rp	(16.478.430.850,00)
	e. Angsuran utang yang dikompensasi dengan piutang tahun 2024 atas pengembalian kelebihan pembayaran kapitasi perserta PBIJK pada FKTP Tahun 2021 berdasrkan BA Kompensasi Kapitasi	(Rp	401.089.100,00)
	f. Reklas Piutang Lain-lain PAD yang sah ke Piutang Retribusi Pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan	(Rp	530.644.950,00)
	Piutang Akhir Lain-Lain PAD	Rp	**0,00**
2	**Penentuan Piutang Akhir RSUD Alimuddin Umar:**	Rp	
	a. Piutang Awal Lain-lain PAD yang sah	Rp	2.091.053.809,00
	b. Pendapatan Jasa Layanan Maret-Desember RSUD dicatat pada Retribusi Daerah	Rp	21.431.664.888,00
	c. Pendapatan Jasa Layanan Jan-Feb Puskes dicatat pada Lain-lain PAD yang sah	Rp	4.386.740.804,00
	d. Pendapatan LRA RSUD	(Rp	24.377.834.316,00)
	e. Pembayaran utang kelebihan pembayaran pendapatan BLUD RSUD atas pembayaran BPJS tahun lalu	(Rp	389.063.300,00)
	f. Mencatat Surat Tindak Lanjut Konfirmasi Hasil Audit Administrasi klaim RSDU AU atas kelebihan pembayaran klaim dari tahun 2021 s.d. 2024	Rp	175.779.600,00
	g. Reklas Piutang Lain-lain PAD yang sah ke Piutang Retribusi Pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan	(Rp	3.318.341.485,00)
	Piutang Akhir Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan	Rp	**0,00**
3	**Selisih sebesar Rp31.461.679.148,00:**	Rp	
	a. Pembayaran utang kelebihan pembayaran pendapatan BLUD RSUD atas pembayaran BPJS tahun lalu	(Rp	389.063.300,00)
	b. Mencatat Surat Tindak Lanjut Konfirmasi Hasil Audit Administrasi klaim RSDU AU atas kelebihan pembayaran klaim dari tahun 2021 s.d. 2024	Rp	175.779.600,00
	c. Reklas Piutang Lain-lain PAD yang sah ke Piutang Retribusi Pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan (RSUD)	(Rp	3.318.341.485,00)
	d. Pendapatan Jasa Layanan Maret-Desember Puskes dicatat pada Lain-lain PAD yang sah RSUD	Rp	21.431.664.888,00
	Sub Jumlah	**Rp**	**17.900.039.703,00**
	a. Pendapatan Jasa Layanan Maret-Desember Puskes dicatat pada Retribusi Daerah	Rp	14.493.373.495,00
	b. Angsuran utang yang dikompensasi dengan piutang tahun 2024 atas pengembalian kelebihan pembayaran kapitasi perserta PBIJK pada FKTP Tahun 2021 berdasrkan BA Kompensasi Kapitasi (Puskesmas)	(Rp	401.089.100,00)
	c. Reklas Piutang Lain-lain PAD yang sah ke Piutang Retribusi Pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan	(Rp	530.644.950,00)
	Sub Jumlah	**Rp**	**13.561.639.445,00**
	Jumlah Total	**Rp**	**31.461.679.148,00**

5.3.1.1.12.5. Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir adalah piutang yang muncul akibat pengelolaan dana bergulir yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat.

Saldo Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir tahun 2024 sebesar Rp61.640.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp2.450.000,00) atau (3,82%) dibandingkan saldo tahun 2023 sebesar Rp64.090.000,00.

Lebih rinci terhadap saldo piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 tersebut disajikan pada Lampiran 22.

5.3.1.1.13. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan pos untuk menampung saldo tagihan/ piutang transfer dari pemerintah pusat dhi adalah Kementerian Keuangan yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan kedepan. Piutang Transfer Pemerintah Pusat terjadi dikarenakan adanya Kurang Bayar tahun 2023 berdasarkan PMK 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2024, serta terdapat Piutang berupa Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp151.861.000,00 disajikan sebagai Aset Lainnya – Tagihan Jangka Panjang. Berikut rincian Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 175. Piutang Transfer Pemerintah Pusat 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Piutang DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.061.862.000,00	0,00	1.061.862.000,00	-
2.	Piutang DBH PPh Pasal 21	778.453.000,00	0,00	778.453.000,00	-
3.	Piutang DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29WPOPDN	103.056.000,00	308,00	103.055.692,00	33.459.640,26
4.	Piutang DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5.424.000,00	112.941.910,00	(107.517.910,00)	(95,20)
5.	Piutang DBH SDA Minyak Bumi	0,00	1.097,00	(1.097,00)	(100,00)
6.	Piutang DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	51.381.000,00	885,00	51.380.115,00	5.805.662,71
7.	Piutang DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	1.347,00	(1.347,00)	(100,00)
	Jumlah	2.000.176.000,00	112.945.547,00	1.887.230.453,00	1.670,92

Berikut tabel Perhitungan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Akhir Per31 Desember 2024

Tabel 176. Perhitungan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Piutang 31 Desember 2023 (Rp)	Pendapatan - LO	Pendapatan - LRA	Piutang 31 Desember 2024 (Rp)	Selisih *)
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4-5-6
1.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	112.945.547,00	836.551.403.847,00	956.625.034.394,00	2.000.176.000,00	(121.960.861.000,00)
	Jumlah	112.945.547,00	836.551.403.847,00	956.625.034.394,00	2.000.176.000,00	(121.960.861.000,00)

Selisih antara Piutang Awal Tahun + Pendapatan LO – Pendapatan LRA dengan Piutang Akhir Tahun sebesar Rp121.960.861.100,00 dijelaskan berikut:

Tabel 177. Rincian Selisih antara Piutang Akhir dengan Rumus Piutang Akhir Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	Penerimaan Dana Desa dari Pemerintah Pusat diterima langsung RKDesa dari RKUN, hanya dicatat pada LRA, tidak dicatat pada LO sebesar Rp118.449.735.000,00.	118.449.735.000,00
2.	Penerimaan pada RKUD dari Bank Indonesa 519000289980 milik Kabupaten Lampung Barat atas saldo Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) tahun lalu, disajikan Saldo Awal Aset Lainnya - Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	3.862.987.000,00
3.	Penyajian Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) tahun 2024, dana telah di Transfer dari RKUN ke Rek. Bank Indonesa 519000289980 milik Kabupaten Lampung Barat, disajikan pada Aset Lainnya sebesar Rp151.861.000,00.	(151.861.000,00)
	Jumlah	121.960.861.000,00

Pendapatan Dana Desa dicatat di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan bukan di Laporan Operasional (LO) karena LRA mencerminkan realisasi anggaran yang diterima, termasuk pendapatan Dana Desa, sementara LO fokus pada hasil kegiatan operasional keuangan, termasuk pendapatan dan biaya yang terkait dengan kegiatan operasional.

5.3.1.1.13.1. Piutang DBH Pajak Bumi dan Bangunan

Piutang DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan PBB yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan.

Perhitungan nilai akhir Piutang DBH Pajak Bumi dan Bangunan:

1.	Piutang 31 Desember 2023	Rp	0,00
2.	Perpres 76/2023 APBN Tahun 2024 DBH Pajak Bumi dan Bangunan (LO)	Rp	1.556.418.000,00
3.	PMK 89/2024, PMK LB / KB Tahun 2024 (KB Tahun 2023 (LO)	Rp	1.387.877.000,00
4.	SIKD-NG, 31 Des 2024, Pemotongan Piutang (LO)	(Rp	189.934.000,00)
5.	SIKD-NG, 31 Des 2024, Reklas ke Piutang TDF (Neraca)	(Rp	136.081.000,00)
6.	Penerimaan DBH PBB selama Tahun 2024 (LRA)	(Rp	1.556.418.000,00)
7.	Piutang 31 Desember 2024	Rp	1.061.862.000,00

5.3.1.1.13.2. Piutang DBH PPh Pasal 21

Piutang DBH PPh Pasal 21 adalah merupakan bagian dari Transfer ke Daerah atas pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.

Perhitungan nilai akhir Piutang DBH PPh Pasal 21:

1.	Piutang 31 Desember 2023	Rp	0,00
2.	Perpres 76/2023 APBN Tahun 2024 DBH PPh Pasal 21 (LO)	Rp	3.821.767.000,00
3.	PMK 89/2024, PMK LB / KB Tahun 2024 (KB Tahun 2023 (LO)	Rp	1.017.456.000,00
4.	SIKD-NG, 31 Des 2024, Pemotongan Piutang (LO)	(Rp	239.003.000,00)
5.	Penerimaan DBH PPh Psl 21 selama Tahun 2024 (LRA)	(Rp	3.821.767.000,00)
6.	Piutang 31 Desember 2024	Rp	778.453.000,00

5.3.1.1.13.3. Piutang DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN

Piutang DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN adalah merupakan bagian dari Transfer ke Daerah atas angsuran pajak penghasilan yang dibayar setiap bulan oleh Wajib Pajak dan kekurangan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak setelah dilakukan perhitungan akhir dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Perhitungan nilai akhir Piutang DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN:

1.	Piutang 31 Desember 2023	Rp	308,00
2.	Perpres 76/2023 APBN Tahun 2024 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN (LO)	Rp	161.526.000,00
3.	PMK 89/2024, PMK LB / KB Tahun 2024 (KB Tahun 2023 & 2022 (LO)	Rp	134.695.692,00
4.	SIKD-NG, 31 Des 2024, Pemotongan Piutang (LO)	(Rp	31.640.000,00)
5.	Penerimaan DBH PPh Psl 25/29 selama Tahun 2024 (LRA)	(Rp	161.526.000)
6.	Piutang 31 Desember 2024	Rp	103.056.000,00

5.3.1.1.13.4. Piutang DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Piutang DBH CHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi dan kabupaten penghasil cukai atau penghasil tembakau.

Perhitungan nilai akhir Piutang DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT):

1.	Piutang 31 Desember 2023	Rp	112.941.910,00
2.	Perpres 76/2023 APBN Tahun 2024 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) (LO)	Rp	126.210.000,00
3.	PMK 89/2024, PMK LB / KB Tahun 2024 (KB Tahun 2023 & 2022 (LO)	(Rp	94.607.910,00)
4.	Penerimaan DBH CHT selama Tahun 2024 (LRA)	(Rp	137.455.000,00)
5.	Penerimaan DBH CHT KB atas PMK 89/2024 (LRA)	(Rp	1.665.000,00)
6.	Piutang 31 Desember 2024	Rp	5.424.000,00

5.3.1.1.13.5. Piutang DBH SDA Minyak Bumi

Piutang DBH SDA Minyak Bumi adalah jumlah dana yang seharusnya diterima oleh daerah sebagai bagi hasil dari dari penerimaan negara SDA Minyak Bumi.

Perhitungan nilai akhir Piutang DBH SDA Minyak Bumi

1.	Piutang 31 Desember 2023	Rp	1.097,00
2.	Perpres 76/2023 APBN Tahun 2024 DBH SDA Minyak Bumi (LO)	Rp	2.904.457.000,00
3.	PMK 89/2024, PMK LB / KB Tahun 2024 (KB Tahun 2023 & 2022 (LO)	Rp	903,00
4.	SIKD-NG, 31 Des 2024, Reklas ke Piutang TDF (Neraca)	(Rp	2.000,00)
5.	Penerimaan DBH SDA Minyak Bumi selama Tahun 2024 (LRA)	(Rp	2.904.457.000,00)
6.	Piutang 31 Desember 2024	Rp	0,00

5.3.1.1.13.6. Piutang DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi

Piutang DBH SDA pengusahaan panas bumi adalah dana yang belum diterima oleh daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam yang bersumber dari pengusahaan panas bumi. DBH SDA panas bumi ini adalah bagian dari transfer ke daerah yang berasal dari penerimaan SDA panas bumi.

Perhitungan nilai akhir Piutang DBH SDA Minyak Bumi

1.	Piutang 31 Desember 2023	Rp	885,00
2.	Perpres 76/2023 APBN Tahun 2024 DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi (LO)	Rp	1.841.061.000,00
3.	PMK 89/2024, PMK LB / KB Tahun 2024 (KB Tahun 2023 & 2022 (LO)	Rp	67.156.115,00
4.	SIKD-NG, 31 Des 2024, Reklas ke Piutang TDF (Neraca)	(Rp	15.776.000,00)
5.	Penerimaan DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi selama Tahun 2024 (LRA)	(Rp	1.841.061.000,00)
6.	Piutang 31 Desember 2024	Rp	51.381.000,00

5.3.1.1.13.7. Piutang DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Piutang DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah piutang yang berasal dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), yang merupakan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA). DBH SDA ini dialokasikan ke daerah sebagai bagian dari dana perimbangan antara pusat dan daerah.

Perhitungan nilai akhir Piutang DBH SDA Minyak Bumi

1.	Piutang 31 Desember 2023	Rp	1.347,00
2.	Perpres 76/2023 APBN Tahun 2024 DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) (LO)	Rp	151.447.000,00
3.	PMK 89/2024, PMK LB / KB Tahun 2024 (KB Tahun 2023 & 2022 (LO)	Rp	653,00
4.	SIKD-NG, 31 Des 2024, Reklas ke Piutang TDF (Neraca)	(Rp	2.000,00)
5.	Penerimaan DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) selama Tahun 2024 (LRA)	(Rp	151.447.000,00)
6.	Piutang 31 Desember 2024	Rp	0,00

5.3.1.1.14. Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan pos untuk menampung saldo tagihan/ piutang transfer dari pemerintah daerah lainnya dhi adalah Pemerintah Provinsi Lampung yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan.

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 sebesar Rp64.358.083.112,00 mengalami peningkatan sebesar Rp5.816.104.900,00 atau 9,93% dibandingkan dari tahun 2023 sebesar Rp58.541.978.212,00 Saldo piutang transfer pemerintah daerah lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 178. Piutang Transfer Antar Daerah 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Piutang Pajak KB (PKB)	13.396.770.011,00	12.340.200.970,00	1.056.569.041,00	8,56
2.	Piutang Bea Balik Nama KB (BBN - KB)	11.693.387.172,00	7.028.302.719,00	4.665.084.453,00	66,38
3.	Piutang Pajak Bahan Bakar KB (PBB - KB)	34.882.442.309,00	34.812.496.882,00	69.945.427,00	0,20
4.	Piutang Pajak Air Permukaan (PAP)	434.689.294,00	369.138.944,00	65.550.350,00	17,76
5.	Piutang Pajak Rokok	3.950.794.326,00	3.991.836.697,00	(41.044.371,00)	(1,03)
	Jumlah	64.358.083.112,00	58.541.978.212,00	5.816.104.900,00	9,93

*) KB = Kendaraan Bermotor

Berikut tabel Perhitungan Piutang Transfer Antar Daerah Per 31 Desember 2024

Tabel 179. Perhitungan Piutang Transfer Antar Daerah Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	LO	LRA	31 Desember 2024 (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4-5-6
1.	Piutang Transfer Antar Daerah	58.541.978.212,00	88.559.251.212,00	82.743.146.312,00	64.358.083.112,00	0,00
	Jumlah	58.541.978.212,00	88.559.251.212,00	82.743.146.312,00	64.358.083.112,00	0,00

5.3.1.1.14.1. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Piutang kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas pemungutan PKB, hak Kabupaten Lampung Barat yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan.

Perhitungan nilai akhir Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

1.	Piutang 31 Desember 2023	Rp	12.340.200.970,00
2.	G/343/VI.03/HK/2024 SK Gub -TW I 2024	Rp	3.475.296.383,00
3.	G/429/VI.03/HK/2024 SK Gub -TW II 2024	Rp	3.503.194.648,00
4.	G/715/VI.03/HK/2024 SK Gub -TW III 2024	Rp	4.630.305.900,00
5.	G/147/VI.03/HK/2024 SK Gub -TW IV 2024	Rp	5.263.269.463,00
6.	Penerimaan PKB selama Tahun 2024 (LRA)	(Rp	15.815.497.353,00)
7.	Piutang 31 Desember 2024	Rp	13.396.770.011,00

5.3.1.1.14.2. Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah Piutang kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas pemungutan BBN KB, hak Kabupaten Lampung Barat yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan.

BBNKB adalah pajak yang dikenakan pada saat terjadi penyerahan hak milik kendaraan bermotor dari satu pemilik ke pemilik lain termasuk karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. BBNKB merupakan pajak yang dibayar sekali saat peralihan kepemilikan, dan bukan pajak tahunan.

Perhitungan nilai akhir Piutang BBN KB:

1.	Piutang 31 Desember 2023	Rp	7.028.302.719,00
2.	G/343/VI.03/HK/2024 SK Gub -TW I 2024	Rp	2.309.220.958,00
3.	G/429/VI.03/HK/2024 SK Gub -TW II 2024	Rp	2.530.395.832,00
4.	G/715/VI.03/HK/2024 SK Gub -TW III 2024	Rp	3.115.300.425,00
5.	G/147/VI.03/HK/2024 SK Gub -TW IV 2024	Rp	3.738.469.957,00
6.	Penerimaan BBN KB selama Tahun 2024 (LRA)	(Rp	7.028.302.719,00)
7.	Piutang 31 Desember 2024	Rp	11.693.387.172,00

5.3.1.1.14.3. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB)

Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB) adalah Piutang kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas pemungutan PBB KB, merupakan hak Kabupaten Lampung Barat yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan.

Objek PBBKB adalah penyerahan bahan bakar kendaraan bermotor dari penyedia kepada konsumen. Subjek PBBKB adalah konsumen, sedangkan wajib PBBKB adalah orang pribadi atau badan penyedia bahan bakar yang menyerahkan.

Perhitungan nilai akhir Piutang PBBKB:

1.	Piutang 31 Desember 2023		Rp	34.812.496.882,00
2.	G/343/VI.03/HK/2024	SK Gub -TW I 2024	Rp	8.392.576.972,00
3.	G/429/VI.03/HK/2024	SK Gub -TW II 2024	Rp	8.677.676.177,00
4.	G/715/VI.03/HK/2024	SK Gub -TW III 2024	Rp	9.066.763.236,00
5.	G/147/VI.03/HK/2024	SK Gub -TW IV 2024	Rp	8.745.425.924,00
6.	Penerimaan BBN KB selama Tahun 2024 (LRA)		(Rp	34.812.496.882,00)
7.	Piutang 31 Desember 2024		Rp	34.882.442.309,00

5.3.1.1.14.4. Piutang Pajak Air Permukaan

Piutang Pajak Air Permukaan (PAP) adalah Piutang kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas pemungutan PAP, merupakan hak Kabupaten Lampung Barat yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan.

Objek Wajib Pajak PAP adalah pengambilan dan /atau pemanfaatan air permukaan. Subjek PAP adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfatatan air permukaan.

Perhitungan nilai akhir Piutang PAP:

1.	Piutang 31 Desember 2023		Rp	369.138.944,00
2.	G/343/VI.03/HK/2024	SK Gub -TW I 2024	Rp	116.027.531,00
3.	G/429/VI.03/HK/2024	SK Gub -TW II 2024	Rp	183.880.271,00
4.	G/715/VI.03/HK/2024	SK Gub -TW III 2024	Rp	125.250.798,00
5.	G/147/VI.03/HK/2024	SK Gub -TW IV 2024	Rp	125.558.225,00
6.	Penerimaan PAP selama Tahun 2024 (LRA)		(Rp	485.166.475,00)
7.	Piutang 31 Desember 2024		Rp	434.689.294,00

5.3.1.1.14.5. Piutang Pajak Rokok

Piutang Pajak Air Permukaan (PAP) adalah Piutang kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas pemungutan PAP, merupakan hak Kabupaten Lampung Barat yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan.

Objek Wajib Pajak PAP adalah pengambilan dan /atau pemanfaatan air permukaan. Subjek PAP adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfatatan air permukaan.

Perhitungan nilai akhir Piutang Pajak Rokok:

1.	Piutang 31 Desember 2023		Rp	3.991.838.697,00
2.	G/322/VI.03/HK/2024	Pajak Rokok Desember 2023		3.760.513.141,00
3.	G/323/VI.03/HK/2024	Pajak Rokok Triwulan I TA.2024	Rp	5.866.849.613,00
4.	G/430/VI.03/HK/2024	Pajak Rokok Triwulan II TA.2024	Rp	5.100.137.973,00
5.	G/714/VI.03/HK/2024	Pajak Rokok Triwulan III TA.2024	Rp	5.882.343.459,00
6.	G/870/VI.03/HK/2024	Pajak Rokok Triwulan IV TA.2024	Rp	3.950.794.326,00
7.	Penerimaan Pajak Rokok selama Tahun 2024 (LRA)		(Rp	24.601.682.883,00)
8.	Piutang 31 Desember 2024		Rp	3.950.794.326,00

Penerimaan Bagi Hasil Pajak berdasarkan dasar hukum Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 180. Dasar Hukum Pendapatan dan Piutang Bagi Hasil Pajak Tahun 2024

No	Keputusan Gubernur Lampung			Realisasi 2023	Piutang 2023	Realisasi 2024	Piutang 2024
	Nomor	Uraian	Nominal				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=4-5	(7)	(8)=4-5-7
1.	G/349/VI.03/HK/2023	DBH Pajak TW I 2023	14.789.537.829,00	6.306.271.316,00	8.483.266.513,00	8.483.266.513,00	0,00
2.	G/460/VI.03/HK/2023	DBH Pajak TW II 2023	14.650.377.960,00	0,00	14.650.377.960,00	14.650.377.960,00	0,00

No	Keputusan Gubernur Lampung			Realisasi 2023	Piutang 2023	Realisasi 2024	Piutang 2024
	Nomor	Uraian	Nominal				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=4-5	(7)	(8)=4-5-7
3	G/695/VI.03/HK/2023	DBH Pajak TW III 2023	16.167.655.477,00	0,00	16.167.655.477,00	16.167.655.477,00	0,00
4	G/155/VI.03/HK/2024	DBH Pajak TW IV 2023	15.248.839.565,00	0,00	15.248.839.565,00	15.248.839.565,00	0,00
5	G/343/VI.03/HK/2024	DBH Pajak TW I 2024	14.293.121.844,00	0,00	0,00	3.591.323.914,00	10.701.797.930,00
6	G/429/VI.03/HK/2024	DBH Pajak TW II 2024	14.895.146.928,00	0,00	0,00	0,00	14.895.146.928,00
7	G/715/VI.03/HK/2024	DBH Pajak TW III 2024	16.937.620.359,00	0,00	0,00	0,00	16.937.620.359,00
8	G/147/VI.03/HK/2025	DBH Pajak TW IV 2024	17.872.723.569,00	0,00	0,00	0,00	17.872.723.569,00
9	G/819/VI.03/HK/2023	Pajak Rokok TW IV 2023	3.991.838.697,00	0,00	3.991.838.697,00	3.991.838.697,00	0,00
10	G/322/VI.03/HK/2024	Pajak Rokok Des 2023	3.760.513.141,00	0,00	0,00	3.760.513.141,00	0,00
11	G/323/VI.03/HK/2024	Pajak Rokok TW I 2024	5.866.849.613,00	0,00	0,00	5.866.849.613,00	0,00
12	G/430/VI.03/HK/2024	Pajak Rokok TW II 2024	5.100.137.973,00	0,00	0,00	5.100.137.973,00	0,00
13	G/714/VI.03/HK/2024	Pajak Rokok TW III 2024	5.882.343.459,00	0,00	0,00	5.882.343.459,00	0,00
14	G/870/VI.03/HK/2024	Pajak Rokok TW IV 2024	3.950.794.326,00	0,00	0,00	0,00	3.950.794.326,00
		Jumlah	153.407.500.740,00	6.306.271.316,00	58.541.978.212,00	82.743.146.312,00	64.358.083.112,00

Lebih rinci Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya untuk masing – masing Jenis Piutang berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Lampung dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 181. Dasar Hukum Piutang Transfer Antar Daerah Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Dasar Hukum Penetapan Piutang			31 Desember 2024
		Dasar	Tanggal	Nomor	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**				
	Triwulan II TA 2024	Kep.Gub	31/07/2024	G/429/VI.03/HK/2024	3.503.194.648,00
	Triwulan III TA 2024	Kep.Gub	31/10/2024	G/715/VI.03/HK/2024	4.630.305.900,00
	Triwulan IV TA 2024	Kep.Gub	14/02/2025	G/147/VI.03/HK/2025	5.263.269.463,00
2.	**Pajak BBN KB**				
	Triwulan I TA 2024	Kep.Gub	27/05/2024	G/343/VI.03/HK/2024	2.309.220.958,00
	Triwulan II TA 2024	Kep.Gub	31/07/2024	G/429/VI.03/HK/2024	2.530.395.832,00
	Triwulan III TA 2024	Kep.Gub	31/10/2024	G/715/VI.03/HK/2024	3.115.300.425,00
	Triwulan IV TA 2024	Kep.Gub	14/02/2025	G/147/VI.03/HK/2025	3.738.469.957,00
3.	**Pajak Bahan Bakar KB (PBB - KB)**				
	Triwulan I TA 2024	Kep.Gub	27/05/2024	G/343/VI.03/HK/2024	8.392.576.972,00
	Triwulan II TA 2024	Kep.Gub	31/07/2024	G/429/VI.03/HK/2024	8.677.676.177,00
	Triwulan III TA 2024	Kep.Gub	31/10/2024	G/715/VI.03/HK/2024	9.066.763.236,00
	Triwulan IV TA 2024	Kep.Gub	14/02/2025	G/147/VI.03/HK/2025	8.745.425.924,00
4.	**Pajak Air Permukaan (PAP)**				
	Triwulan II TA 2024	Kep.Gub	31/07/2024	G/429/VI.03/HK/2024	183.850.271,00
	Triwulan III TA 2024	Kep.Gub	31/10/2024	G/715/VI.03/HK/2024	125.250.798,00
	Triwulan IV TA 2024	Kep.Gub	14/02/2025	G/147/VI.03/HK/2025	125.558.225,00
5.	**Pajak Rokok**				
	Triwulan IV TA 2024	Kep.Gub	24/12/2024	G/870/VI.03/HK/2024	3.950.794.326,00
	Jumlah				64.358.083.112,00

5.3.1.1.15. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun kedepan sehingga piutang yang disajikan merupakan nilai yang dapat direalisasikan/ (*Net Realizable Value*).

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 ini melakukan penyisihan terhadap piutang, untuk penyisihan piutang yang merupakan penyesuaian tahun - tahun sebelumnya menjadi unsur pengurang ekuitas, sedangkan untuk penyisihan piutang pada tahun berkenaan merupakan unsur beban penyisihan piutang.

Berikut disajikan dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang yaitu kualitas piutang, yang diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori pada tabel dibawah ini.

Tabel 182. Kategori Kualitas Penyisihan Piutang

No	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**Penyisihan Piutang Pajak Daerah**			
	Umur Piutang 0 s.d. 1 Tahun dan/atau	Umur Piutang 1 s.d. 2 Tahun dan/atau	Umur Piutang 3 s.d. 5 Tahun dan/atau	Umur Piutang > 5 Tahun dan/atau
	WP menyetuju hasil pemeriksaan dan/atau	WP Menyetuju sebagian hasil pemeriksaan dan/atau	WP tidak menyetuju seluruh hasil pemeriksaan dan/atau	WP Tidak ditemukan dan/atau
	WP Kooperatif dan/atau	WP Kurang Kooperatif dan/atau	WP Tidak Kooperatif dan/atau	WP Bangkrut/Meninggal Dunia dan/atau
	WP Likuid dan/atau	WP Mengajukan Banding dan/atau	WP mengalami kesulitan likuiditas dan/atau	WP mengalami musibah dan/atau
	WP Tidak melakukan Banding dan/atau	Tarif Penyisihan 10,00%	Tarif Penyisihan 50,00%	Tarif Penyisihan 100,00%
	Tarif Penyisihan 0,5%			
2	**Penyisihan Piutang Selain Pajak Daerah**			
	Umur Piutang 0 s.d. 1 Bulan dan/atau	Umur Piutang 1 s.d. 3 Bulan dan/atau	Umur Piutang 3 s.d. 12 Bulan dan/atau	Umur Piutang > 12 Bulan dan/atau
	Belum dilunasi s.d. tanggal jatuh tempo dan/atau	Jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	Jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	Jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan
	Tarif Penyisihan 0,5%	Tarif Penyisihan 10,00%	Tarif Penyisihan 50,00%	Tarif Penyisihan 100,00%

Adapun rincian penyisihan piutang Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 183. Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Penyisihan Pajak Daerah	11.632.053,08	5.152.805,00	6.479.248,08	125,74
2.	Penyisihan Retribusi Daerah	100.582.196,42	35.756.006,00	64.826.192,42	181,30
3.	Penyisihan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	59.225.065,00	0,00	59.225.065,00	-
4.	Penyisihan Lain-lain PAD yang Sah	142.861.442,28	143.677.302,05	(815.859,77)	(0,57)
5.	Penyisihan Transfer Pemerintah Pusat	200.017.600,00	564.727,74	199.452.872,26	35.318,41
6.	Penyisihan Transfer Antar Daerah	0,00	13.279.791.175,51	(13.279.791.175,51)	(100,00)
7.	Penyisihan Pokok Dana Bergulir	867.844.191,00	0,00	867.844.191,00	-
	Jumlah	**1.382.162.549,78**	**13.464.942.016,30**	**(12.082.779.466,52)**	**(89,74)**

Berikut tabel Perhitungan Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2024

Tabel 184. Perhitungan Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Penyisihan Piutang 31 Desember 2023 (Rp)	Laporan Operasional *)	Neraca **)	Penyisihan Piutang 31 Desember 2024 (Rp)	Selisih ***)
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4-5-6
1.	Penyisihan Pajak Daerah	5.152.805,00	11.632.053,08	5.152.805,00	11.632.053,08	0,00
2.	Penyisihan Retribusi Daerah	35.756.006,00	54.114.916,55	0,00	100.582.196,42	(10.711.275,87)
3.	Penyisihan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	59.225.065,00	0,00	59.225.065,00	0,00
4.	Penyisihan Lain-lain PAD yang Sah	143.677.302,05	18.499.147,00	8.603.730,90	142.861.442,28	10.711.275,87
5.	Penyisihan Transfer Pemerintah Pusat	564.727,74	199.475.194,03	22.321,77	200.017.600,00	0,00
6.	Penyisihan Transfer Antar Daerah	13.279.791.175,51	0,00	13.279.791.175,51	0,00	0,00
7.	Penyisihan Pokok Dana Bergulir	0,00	0,00	(867.844.191,00)	867.844.191,00	0,00
	Jumlah	**13.464.942.016,30**	**342.946.375,66**	**12.425.725.842,18**	**1.382.162.549,78**	**0,00**

*) Menambah Beban Penyisihan Piutang, Menambah Saldo Penyisihan Piutang

**) - Mengurangi Penyisihan Piutang, Menambah Ekuitas
- Penyisihan Pokok Dana Bergulir, menambah Penyisihan Piutang dan Menambah Investasi Non Permanen Dana Bergulir

***) Selisih sebesar Rp10.711.275,87 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyesuaian atas penyisihan piutang awal periode Lain-lain PAD yang sah – Pendapatan BLUD Puskesmas sebesar Rp1.329.397,82, direklas ke Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum – Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pada akhir tahun 2024.
2. Penyesuaian atas penyisihan piutang awal periode Lain-lain PAD yang sah – Pendapatan BLUD RSUD sebesar Rp9.381.878,05, direklas ke Penyisihan Piutang Retribusi Jasa

Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada akhir tahun 2024.

Berikut tabel Penyisihan Piutang Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 185. Penyisihan Piutang Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	**Dinas Kesehatan**				
	Lain-lain PAD yang Sah :				
	- Pendapatan BLUD	0,00	1.329.397,82	(1.329.397,82)	(100,00)
	Penyisihan Piutang Retribusi:				
	- Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	27.447.634,99	0,00	27.447.634,99	-
	Jumlah	**27.447.634,99**	**1.329.397,82**	**26.118.237,17**	**1.964,67**
2.	**RSUD Alimuddin Umar**				
	Lain-lain PAD yang Sah :				
	- Pendapatan BLUD	0,00	9.381.878,05	(9.381.878,05)	(100,00)
	Penyisihan Piutang Retribusi:				
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	16.591.707,43	0,00	16.591.707,43	-
	Jumlah	**16.591.707,43**	**9.381.878,05**	**7.209.829,38**	**76,85**
3.	**Diskominfo**				
	Retribusi Daerah :				
	- Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	25.680.356,00	25.679.756,00	600,00	0,00
	Jumlah	**25.680.356,00**	**25.679.756,00**	**600,00**	**0,00**
4.	**Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag**				
	Lain-lain PAD yang Sah :				
	- Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Pendapatan dari UPT BLUD Perkuatan Permodalan	61.640.000,00	62.965.000,00	(1.325.000,00)	(2,10)
	Pokok Dana Bergulir				
	Penyisihan Pokok Dana Bergulir	867.844.191,00	0,00	867.844.191,00	-
	Jumlah	**929.484.191,00**	**62.965.000,00**	**866.519.191,00**	-
5.	**Badan Pendapatan Daerah**				
	Pajak Daerah :				
	- Pajak Bumi dan Bangunan P2	31.044,56	0,00	31.044,56	-
	- PBJT-Restoran	11.588.008,50	0,00	11.588.008,50	-
	- PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	13.000,00	0,00	13.000,00	-
	Retribusi Daerah :				
	- Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	75.000,00	0,00	75.000,00	-
	- Retribusi Penyewaan Tanah	30.787.500,00	0,00	30.787.500,00	-
	Jumlah	**42.494.553,06**	**0,00**	**42.494.553,06**	-
6.	**BKAD**				
	Pajak Daerah :				
	- Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	4.985.734,75	(4.985.734,75)	(100,00)
	- Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	149.320,25	(149.320,25)	(100,00)
	- Pajak Parkir	0,00	17.750,00	(17.750,00)	(100,00)
	Retribusi Daerah :				
	- Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	75.000,00	(75.000,00)	(100,00)
	- Retribusi Penyewaan Tanah	0,00	10.001.250,00	(10.001.250,00)	(100,00)
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	59.225.065,00	0,00	59.225.065,00	-
	Lain-lain PAD yang Sah				
	- Pendapatan Denda PBB-P2	40.654,24	590.174,62	(549.520,38)	(93,11)
	- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	55.781.641,04	62.510.851,56	(6.729.210,52)	(10,76)
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	25.399.147,00	6.900.000,00	18.499.147,00	268,10
	Jumlah	**140.446.507,28**	**85.230.081,18**	**55.216.426,10**	**64,79**
7.	**PPKD**				
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :				
	- DBH Pajak Bumi dan Bangunan	106.186.200,00	0,00	106.186.200,00	-

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
	- DBH PPh Pasal 21	77.845.300,00	0,00	77.845.300,00	-
	- DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WP OPDN	10.305.600,00	1,54	10.305.598,46	669.194.705,19
	- DBH Cukai Hasil Tembakau (DHT)	542.400,00	564.709,55	(22.309,55)	(3,95)
	- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	5,48	(5,48)	(100,00)
	- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	5.138.100,00	4,43	5.138.095,57	115.984.098,65
	- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	6,74	(6,74)	(100,00)
	Pendapatan Transfer Antar Daerah :				
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	2.340.876.638,62	(2.340.876.638,62)	(100,00)
	- Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	1.481.093.220,62	(1.481.093.220,62)	(100,00)
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	9.351.705.131,68	(9.351.705.131,68)	(100,00)
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	0,00	86.156.991,10	(86.156.991,10)	(100,00)
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	19.959.193,49	(19.959.193,49)	(100,00)
	Jumlah	**200.017.600,00**	**13.280.355.903,25**	**(13.080.338.303,25)**	**(98,49)**
	Jumlah Total	**1.382.162.549,78**	**13.464.942.016,30**	**(12.082.779.466,52)**	**(89,74)**

Piutang Dana Bagi Hasil kepada Pemerintah Provinsi Lampung tidak dilakukan penyisihan karena mengacu pada Berita Acara Tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 900.1.14.5/5171/VI.02/2024 bahwa piutang tersebut jatuh tempo secara bertahap mulai tahun 2025 s.d. tahun 2028, serta mengacu pada Perbup Nomor 15 Tahun 2023 Kebijakan Akuntansi terkait Piutang bahwa penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Saldo penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2024 sebesar Rp867.844.191,00. Nilai penyisihan tersebut memiliki kode akun 1.1.10.02.14.0001, yang merupakan bagian dari kode kelompok akun penyisihan piutang dengan kode akun 1.1.10, sedangkan Dana Bergulir Pokok masuk dalam kelompok Investasi Non Permanen Kode Rekening 1.2.01.05.03.

Adapun Aging schedule penyisihan piutang per 31 Desember 2024 dan Saldo Rincian Mutasi Penyisihan Piutang tiap Perangkat Daerah disajikan pada Lampiran 17 dan lampiran 18.

5.3.1.1.16. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayr di muka merupakan beban yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat hingga tanggal pelaporan, namun belum dikonsumsi atau digunakan. Saldo beban jasa dibayar di muka per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.081.250,00, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2023. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 186. Beban Jasa Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	RSUD Alimuddin Umar	13.081.250,00	13.081.250,00	0,00	0,00
	Jumlah	**13.081.250,00**	**13.081.250,00**	**0,00**	**0,00**

Penjelasan lebih rinci beban jasa dibayar dimuka dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 187. Rincian Beban Jasa Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	RSUD Alimuddin Umar	
	1) Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	13.081.250,00
	Jumlah	**13.081.250,00**

5.3.1.1.17. Persediaan

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria pakai habis kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang masih berada pada SKPD. Saldo Persediaan tersebut per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp14.964.943.100,62 dan Rp13.775.722.508,25. Saldo Persediaan Tahun 2023 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp1.189.220.592,37 atau 8,63% dibandingkan tahun 2023.

Nilai persediaan yang dicatat per tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan pada Berita Acara Stock Opname persediaan per tanggal 31 Desember 2024. Masing-masing OPD hanya mencatat persediaan awal dan persediaan akhir serta belum melakukan pencatatan mutasi persediaan, kecuali Dinas Kesehatan, RSUD Alimuddin Umar dan Puskesmas telah mencatat mutasi persediaan. Hal tersebut dilakukan karena Dinas Kesehatan, RSUD Alimuddin Umar dan Puskesmas telah melakukan pencatatan persediaan menggunakan aplikasi SELENA dan SIMRS.

Persediaan yang disajikan merupakan persediaan yang berada di gudang farmasi untuk persediaan obat-obatan, persediaan selain obat berada pada masing-masing bidang.

Persediaan yang ada pada tahun 2024 seluruhnya adalah persediaan Bahan Pakai Habis. Persediaan Bahan Pakai Habis merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional entitas.

Rincian Persediaan Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 188. Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
1. Persediaan Bahan Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	768.216.008,00	932.625.738,15	(164.409.730,07)	(17,63)
- Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas	20.057.500,00	9.678.250,00	10.379.250,00	107,24
- Persediaan Bahan Baku	15.668.100,00	16.058.100,00	(390.000,00)	(2,43)
- Persediaan Alat Tulis Kantor	10.503.000,00	27.893.700,00	(17.390.700,00)	(62,35)
- Persediaan Kertas dan Cover	115.234.800,00	81.428.680,00	33.806.120,00	41,52
- Persediaan Bahan Cetak	5.955.325,00	0,00	5.955.325,00	∞
- Persediaan Benda Pos	146.000,00	568.000,00	(422.000,00)	(74,30)
- Persediaan Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	476.122.068,00	543.382.307,00	(67.260.239,00)	(12,38)
- Persediaan Bahan Komputer	291.327.100,00	590.543.032,00	(299.215.932,00)	(50,67)
- Persediaan Perabot Kantor	169.345.209,15	191.583.927,04	(22.238.717,89)	(11,61)
- Persediaan Alat Listrik	4.841.000,00	8.264.000,00	(3.423.000,00)	(41,42)
- Persediaan Perlengkapan Dinas	576.797.365,66	735.083.857,00	(158.286.491,34)	(21,53)
- Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	690.000,00	0,00	690.000,00	∞
- Persediaan Obat	4.584.876.115,14	4.443.166.727,27	141.709.387,87	3,19
- Persediaan Obat-obatan lainnya	3.859.882.786,59	4.273.320.403,79	(413.437.617,20)	(9,67)
- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	4.053.403.525,00	1.917.796.038,00	2.135.607.487,00	111,36
- Persediaan Natura	10.377.200,00	4.329.750,00	6.047.450,00	139,67
- Persediaan Natura dan Pakan Lainnya	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	∞
Jumlah	**14.964.943.100,62**	**13.775.722.508,25**	**1.189.220.592,37**	**8,63**

Berikut tabel persediaan per Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Tabel 189. Perbandingan Persediaan Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

NO	SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Lebih/ (Kurang)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Sekretariat Daerah	1.488.000,00	4.081.000,00	(2.593.000,00)	(63,54)
2.	Sekretariat DPRD	25.000,00	55.000,00	(30.000,00)	(54,55)
3.	Inspektorat	851.000,00	1.378.000,00	(527.000,00)	(38,24)
4.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	110.000,00	220.911.025,00	(220.801.025,00)	(99,95)
5.	Badan Pendapatan Daerah	231.053.074,00	0,00	231.053.074,00	-
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	505.000,00	325.000,00	180.000,00	55,38
7.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	458.000,00	287.000,00	171.000,00	59,58
8.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	280.000,00	322.000,00	(42.000,00)	(13,04)
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	354.000,00	1.408.000,00	(1.054.000,00)	(74,86)
10.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	230.000,00	145.000,00	85.000,00	58,62
11.	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	380.000,00	250.000,00	130.000,00	52,00
12.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.967.000,00	48.299.700,00	(38.332.700,00)	(79,36)
13.	Dinas Kesehatan	4.986.180.465,74	5.958.755.491,00	(972.575.005,26)	(16,32)
14.	Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	2.060.071.625,00	210.000,00	2.049.861.625,00	976.124,58
15.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	477.500,00	517.500,00	(40.000,00)	(7,73)
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	310.000,00	16.373.100,00	(16.063.100,00)	(98,11)
17.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.306.000,00	1.670.000,00	636.000,00	38,08
18.	Dinas Ketahanan Pangan	607.799.400,00	522.193.538,00	85.605.862,00	16,39
19.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	264.891.070,00	297.778.270,00	(32.887.200,00)	(11,04)
20.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	85.000,00	1.208.000,00	(1.123.000,00)	(92,96)
21.	Dinas Perikanan	1.820.000,00	372.000,00	1.448.000,00	389,25
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon	240.000,00	130.000,00	110.000,00	84,62
23.	Dinas Lingkungan Hidup	93.515.600,00	130.086.200,00	(36.570.600,00)	(28,11)
24.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	390.000,00	858.000,00	(468.000,00)	(54,55)
25.	Dinas Sosial	545.000,00	264.000,00	281.000,00	106,44
26.	Dinas Perhubungan	1.397.206.000,00	1.396.075.000,00	1.131.000,00	0,08
27.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.105.000,00	1.520.000,00	(415.000,00)	(27,30)
28.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	615.000,00	202.000,00	413.000,00	204,46
29.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	535.660.094,00	866.739.764,00	(331.079.670,00)	(38,20)
30.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	15.668.100,00	0,00	15.668.100,00	-
31.	RSUD Alimuddin Umar	2.692.177.712,00	2.433.751.714,00	258.425.998,00	10,62
32.	Kec. Balik Bukit	269.000,00	561.000,00	(292.000,00)	(52,05)
33.	Kec. Belalau	1.190.000,00	360.000,00	830.000,00	230,56
34.	Kec. Sumber Jaya	1.885.000,00	1.943.000,00	(58.000,00)	(2,99)
35.	Kec. Way Tenong	63.000,00	46.000,00	17.000,00	36,96
36.	Kec. Sekincau	204.000,00	189.000,00	15.000,00	7,94
37.	Kec. Suoh	134.000,00	156.000,00	(22.000,00)	(14,10)
38.	Kec. Batu Brak	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
39.	Kec. Sukau	125.000,00	110.000,00	15.000,00	13,64
40.	Kec. Gedung Surian	125.000,00	140.000,00	(15.000,00)	(10,71)
41.	Kec. Kebun Tebu	339.000,00	369.000,00	(30.000,00)	(8,13)
42.	Kec. Air Hitam	225.000,00	145.000,00	80.000,00	55,17
43.	Kec. Pagar Dewa	255.000,00	61.000,00	194.000,00	318,03
44.	Kec. Batu Ketulis	525.000,00	470.000,00	55.000,00	11,70
45.	Kec. Bandar Negeri Suoh	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
46.	Kec. Lumbok Semmung	310.000,00	165.000,00	145.000,00	87,88
47.	Kelurahan Pasar Liwa	135.000,00	155.000,00	(20.000,00)	(12,90)
48.	Kelurahan Way Mengaku	231.000,00	235.000,00	(4.000,00)	(1,70)
49.	Kelurahan Sekincau	155.000,00	189.000,00	(34.000,00)	(17,99)
50.	Kelurahan Fajar Bulan	125.000,00	250.000,00	(125.000,00)	(50,00)
51.	Kelurahan Tugu Sari	1.488.000,00	809.000,00	679.000,00	83,93
52.	Puskesmas Liwa	186.021.325,04	141.310.452,00	44.710.873,04	31,64
53.	Puskesmas Kenali	116.722.736,47	120.695.539,00	(3.972.802,53)	(3,29)

NO	SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Lebih/ (Kurang)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
54	Puskesmas Sumberjaya	116.706.541,55	172.161.405,00	(55.454.863,45)	(32,21)
55	Puskesmas Fajar Bulan	127.149.486,02	140.035.410,00	(12.885.923,98)	(9,20)
56	Puskesmas Sekincau	139.003.821,41	91.400.550,00	47.603.271,41	52,08
57	Puskesmas Srimulyo	185.619.421,07	199.406.168,11	(13.786.747,04)	(6,91)
58	Puskesmas Batu Brak	161.560.646,41	161.342.037,00	218.609,41	0,14
59	Puskesmas Buay Nyerupa	99.461.436,64	91.875.399,00	7.586.037,64	8,26
60	Puskesmas Gedung Surian	123.740.557,80	32.833.323,31	90.907.234,49	276,87
61	Puskesmas Kebun Tebu	177.322.926,68	140.692.609,00	36.630.317,68	26,04
62	Puskesmas Air Hitam	144.524.071,76	87.761.044,83	56.763.026,95	64,68
63	Puskesmas Pagar Dewa	114.096.849,96	114.771.048,00	(674.198,02)	(0,59)
64	Puskesmas Batu Ketulis	190.474.958,98	178.710.797,00	11.764.161,98	6,58
65	Puskesmas Bandar Negeri Suoh	79.848.581,72	74.726.602,00	5.121.979,72	6,85
66	Puskesmas Lombok	97.462.078,33	114.800.822,00	(17.338.743,67)	(15,10)
	JUMLAH	**14.964.943.100,62**	**13.775.722.508,25**	**1.189.220.592,37**	8,63

Rincian Persediaan pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 190. Rincian Persediaan Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023

SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Lebih/ (Kurang)	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(2)	(4=2-3)	(5=4/3)
1. Sekretariat Daerah				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	513.000,00	666.000,00	(153.000,00)	(22,97)
- Persediaan Kertas dan Cover	350.000,00	980.000,00	(630.000,00)	(64,29)
- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	60.000,00	(60.000,00)	(100,00)
- Persediaan Bahan Komputer	625.000,00	2.375.000,00	(1.750.000,00)	(73,68)
Jumlah	**1.488.000,00**	**4.081.000,00**	**(2.593.000,00)**	**(63,54)**
2. Sekretariat DPRD				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
- Persediaan Kertas dan Cover	0,00	55.000,00	(55.000,00)	(100,00)
Jumlah	**25.000,00**	**55.000,00**	**(30.000,00)**	**(54,55)**
3. Inspektorat				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	181.000,00	398.000,00	(217.000,00)	(54,52)
- Persediaan Kertas dan Cover	420.000,00	355.000,00	65.000,00	18,31
- Persediaan Bahan Komputer	250.000,00	625.000,00	(375.000,00)	(60,00)
Jumlah	**851.000,00**	**1.378.000,00**	**(527.000,00)**	**(38,24)**
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Kertas dan Cover	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	220.801.025,00	(220.801.025,00)	(100,00)
Jumlah	**110.000,00**	**220.911.025,00**	**(220.801.025,00)**	**(99,95**
5. Badan Pendapatan Daerah				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Kertas dan Cover	380.000,00	0,00	380.000,00	-
- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	230.673.074,00	0,00	230.673.074,00	-
Jumlah	**231.053.074,00**	0,00	**231.053.074,00**	-
6. BAPPEDA				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	70.000,00	40.000,00	30.000,00	75,00
- Persediaan kertas dan cover	185.000,00	160.000,00	25.000,00	15,63
- Persediaan Bahan Komputer	250.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00
Jumlah	**505.000,00**	**325.000,00**	**180.000,00**	55,38
7. Badan Riset dan Inovasi Daerah				

SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Lebih/ (Kurang)	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(2)	(4=2-3)	(5=4/3)
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	155.000,00	90.000,00	65.000,00	72,22
- Persediaan Kertas dan Cover	110.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
- Persediaan Bahan Komputer	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
Persediaan Perabot Kantor	68.000,00	17.000,00	51.000,00	300,00
Jumlah	**458.000,00**	**287.000,00**	**171.000,00**	**59,58**
8. **Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	95.000,00	202.000,00	(107.000,00)	(52,97)
- Persediaan Kertas dan Cover	185.000,00	120.000,00	65.000,00	54,17
Jumlah	**280.000,00**	**322.000,00**	**(42.000,00)**	**(13,04)**
9. **BPBD**				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	68.000,00	276.000,00	(208.000,00)	(75,36)
- Persediaan Kertas dan Cover	105.000,00	470.000,00	(365.000,00)	(77,66)
- Persediaan Benda Pos	0,00	50.000,00	(50.000,00)	(100,00)
- Persediaan Bahan Komputer	125.000,00	500.000,00	(375.000,00)	(75,00)
- Persediaan Perabot Kantor	56.000,00	112.000,00	(56.000,00)	(50,00)
Jumlah	**354.000,00**	**1.408.000,00**	**(1.054.000,00)**	**(74,86)**
10. **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	45.000,00	25.000,00	20.000,00	80,00
- Persediaan Kertas dan Cover	60.000,00	120.000,00	(60.000,00)	(50,00)
- Persediaan Bahan Komputer	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
Jumlah	**230.000,00**	**145.000,00**	**85.000,00**	**58,62**
11. **Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	85.000,00	(85.000,00)	(100,00)
- Persediaan Kertas dan Cover	130.000,00	165.000,00	(35.000,00)	(21,21)
- Persediaan Bahan Komputer	250.000,00	0,00	250.000,00	-
Jumlah	**380.000,00**	**250.000,00**	**130.000,00**	**52,00**
12. **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	4.832.000,00	20.957.700,00	(16.125.700,00)	(76,94)
- Persediaan Kertas dan Cover	3.289.000,00	13.136.000,00	(9.847.000,00)	(74,96)
- Persediaan Benda Pos	36.000,00	198.000,00	(162.000,00)	(81,82)
- Persediaan Bahan Komputer	875.000,00	8.527.000,00	(7.652.000,00)	(89,74)
- Persediaan Perabot Kantor	0,00	77.000,00	(77.000,00)	(100,00)
- Persediaan Alat Listrik	0,00	2.118.000,00	(2.118.000,00)	(100,00)
- Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	690.000,00	0,00	690.000,00	100,00
- Persediaan Obat	0,00	3.121.000,00	(3.121.000,00)	(100,00)
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	245.000,00	165.000,00	80.000,00	48,48
Jumlah	**9.967.000,00**	**48.299.700,00**	**(38.332.700,00)**	**(79,36)**
13. **Dinas Kesehatan**				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	240.778.281,18	383.867.640,00	(143.089.358,82)	(37,28)
- Persediaan Kertas dan Cover	81.597.000,00	50.341.440,00	31.255.560,00	62,09
- Persediaan Bahan Cetak	892.755,75	0,00	892.755,75	100,00
- Persediaan Perabot Kantor	109.713.558,83	147.226.178,00	(37.512.619,17)	(25,48)
- Persediaan Perlengkapan Dinas	417.626.113,00	668.392.015,00	(250.765.902,00)	(37,52)
- Persediaan Obat	2.507.131.014,60	2.750.820.159,00	(243.689.144,40)	(8,86)
- Persediaan Obat-obatan Lainnya	1.626.439.762,38	1.956.108.059,00	(329.668.296,62)	(16,84)
Jumlah	**4.986.180.485,74**	**5.958.755.491,00**	**(972.575.005,26)**	**(16,32)**
14. **Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat**				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Kertas dan Cover	250.000,00	210.000,00	40.000,00	19,05
- Persediaan untuk Dijual/diserahkan kepada masyarakat	2.049.821.625,00	0,00	2.049.821.625,00	-

SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Lebih/ (Kurang)	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(2)	(4=2-3)	(5=4/3)
Jumlah	2.050.071.625,00	210.000,00	2.049.861.625,00	976.124,58
15. Dinas Kepemudaan, Olahraga & Pariwisata				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
- Persediaan Kertas dan Cover	110.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
- Persediaan Bahan Komputer	125.000,00	375.000,00	(250.000,00)	(66,67)
- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	232.500,00	77.500,00	155.000,00	200,00
Jumlah	477.500,00	517.500,00	(40.000,00)	(7,73)
16. Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Baku	0,00	16.058.100,00	(16.058.100,00)	(100,00)
- Persediaan Kertas dan Cover	310.000,00	315.000,00	(5.000,00)	(1,59)
Jumlah	310.000,00	16.373.100,00	(16.063.100,00)	(98,11)
17. Dinas PP, KB, PP, dan PA				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	2.306.000,00	770.000,00	1.536.000,00	199,48
- Persediaan Kertas dan Cover	0,00	900.000,00	(900.000,00)	(100,00)
Jumlah	2.306.000,00	1.670.000,00	636.000,00	38,08
18. Dinas Ketahanan Pangan				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
- Persediaan Kertas dan Cover	0,00	155.000,00	(155.000,00)	(100,00)
- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	607.669.400,00	522.038.538,00	85.630.862,00	16,40
Jumlah	607.799.400,00	522.193.538,00	85.605.862,00	16,39
19. Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	264.836.070,00	297.723.270,00	(32.887.200,00)	(11,05)
Persediaan Kertas dan Cover	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Jumlah	264.891.070,00	297.778.270,00	(32.887.200,00)	(11,04)
20. Dinas Perkebunan & Peternakan				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Kertas dan Cover	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
- Persediaan Benda Pos	30.000,00	50.000,00	(20.000,00)	(40,00)
- Persediaan Obat	0,00	656.000,00	(656.000,00)	(100,00)
- Persediaan Obat-obatan Lainnya	0,00	447.000,00	(447.000,00)	(100,00)
Jumlah	85.000,00	1.208.000,00	(1.123.000,00)	(92,96)
21. Dinas Perikanan				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	10.000,00	82.000,00	(72.000,00)	(87,80)
- Persediaan Kertas dan Cover	185.000,00	165.000,00	20.000,00	12,12
- Persediaan Natura dan Pakan Lainnya	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
- Persediaan Bahan Komputer	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
Jumlah	1.820.000,00	372.000,00	1.448.000,00	389,25
22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Pekon				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
- Persediaan Kertas dan Cover	220.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
Jumlah	240.000,00	130.000,00	110.000,00	84,62
23. Dinas Lingkungan Hidup				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	93.375.600,00	130.011.200,00	(36.635.600,00)	(28,18)
- Persediaan Kertas dan Cover	110.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
- Persediaan Benda Pos	30.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
Jumlah	93.515.600,00	130.086.200,00	(36.570.600,00)	(28,11)
24. Dinas Penanaman Modal, PTSP				
Persediaan Barang Pakai Habis				

SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Lebih/ (Kurang)	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
- Persediaan Alat Tulis Kantor	10.000,00	150.000,00	(140.000,00)	(93,33)
- Persediaan kertas dan cover	130.000,00	210.000,00	(80.000,00)	(38,10)
- Persediaan Bahan Komputer	250.000,00	498.000,00	(248.000,00)	(49,80)
Jumlah	**390.000,00**	**858.000,00**	**(468.000,00)**	**(54,55)**
25. Dinas Sosial				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	105.000,00	99.000,00	6.000,00	6,06
- Persediaan Kertas dan Cover	440.000,00	165.000,00	275.000,00	166,67
Jumlah	**545.000,00**	**264.000,00**	**281.000,00**	**106,44**
26. Dinas Perhubungan				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
- Persediaan Kertas dan Cover	105.000,00	160.000,00	(55.000,00)	(34,38)
- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1.381.000,00	235.000,00	1.146.000,00	487,66
- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	1.395.680.000,00	1.395.680.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**1.397.206.000,00**	**1.396.075.000,00**	**1.131.000,00**	**0,08**
27. Dinas Komunikasi dan Informatika				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
- Persediaan Alat Tulis Kantor	65.000,00	75.000,00	(10.000,00)	(13,33)
- Persediaan Kertas dan Cover	430.000,00	390.000,00	40.000,00	10,26
- Persediaan Benda Pos	40.000,00	200.000,00	(160.000,00)	(80,00)
- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	285.000,00	(285.000,00)	(100,00)
- Persediaan Bahan Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**1.105.000,00**	**1.520.000,00**	**(415.000,00)**	**(27,30)**
28. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	12.000,00	(12.000,00)	(100,00)
- Persediaan Kertas dan Cover	240.000,00	65.000,00	175.000,00	269,23
- Persediaan Bahan Komputer	375.000,00	125.000,00	250.000,00	200,00
Jumlah	**615.000,00**	**202.000,00**	**413.000,00**	**204,46**
29. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Kertas dan Cover	8.575.000,00	5.375.000,00	3.200.000,00	59,53
- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	241.982.994,00	285.846.732,00	(43.863.738,00)	(15,35)
- Persediaan Bahan Komputer	284.702.100,00	574.518.032,00	(289.815.932,00)	(50,45)
- Persediaan Perabot Kantor	400.000,00	1.000.000,00	(600.000,00)	(60,00)
Jumlah	**535.660.094,00**	**866.739.764,00**	**(331.079.670,00)**	**(38,20)**
30. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Baku	15.668.100,00	0,00	15.668.100,00	∞
Jumlah	**15.668.100,00**	**0,00**	**15.668.100,00**	∞
31. RSUD Alimuddin Umar				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	1.565.000,00	891.000,00	674.000,00	75,65
- Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas	19.987.500,00	9.596.250,00	10.391.250,00	108,28
- Persediaan Alat Tulis Kantor	769.000,00	2.661.000,00	(1.892.000,00)	(71,10)
- Persediaan Bahan Cetak	787.020,00	0,00	787.020,00	∞
- Persediaan Kertas dan Cover	0,00	215.000,00	(215.000,00)	(100,00)
- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	2.000.000,00	36.164.550,00	(34.069.550,00)	(94,23)
- Persediaan Perabot Kantor	17.683.100,00	12.854.275,00	4.828.825,00	37,57
- Persediaan Alat Listrik	4.841.000,00	6.098.000,00	(1.257.000,00)	(20,61)
- Persediaan Obat	1.020.464.386,00	719.380.541,00	301.083.845,00	41,85
- Persediaan Obat-obatan Lainnya	1.613.618.506,00	1.641.571.348,00	(27.952.842,00)	(1,70)
- Persediaan Natura	10.377.200,00	4.329.750,00	6.047.450,00	139,67
Jumlah	**2.692.177.712,00**	**2.433.751.714,00**	**258.425.998,00**	**10,62**
32. Kec. Balik Bukit				
Persediaan Barang Pakai Habis				

SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Lebih/ (Kurang)	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(2)	(4=2-3)	(5=4/3)
- Persediaan Alat Tulis Kantor	84.000,00	411.000,00	(327.000,00)	(79,56)
- Persediaan Kertas dan Cover	185.000,00	110.000,00	75.000,00	68,18
- Persediaan Benda Pos	0,00	40.000,00	(40.000,00)	(100,00)
Jumlah	269.000,00	561.000,00	(292.000,00)	(52,05)
33. Kec. Belalau				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Kertas dan Cover	440.000,00	110.000,00	330.000,00	300,00
- Persediaan Bahan Komputer	750.000,00	250.000,00	500.000,00	200,00
Jumlah	1.190.000,00	360.000,00	830.000,00	230,56
34. Kec. Sumberjaya				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	85.000,00	48.000,00	37.000,00	77,08
- Persediaan Kertas dan Cover	1.300.000,00	1.270.000,00	30.000,00	2,36
- Persediaan Bahan Komputer	500.000,00	625.000,00	(125.000,00)	(20,00)
Jumlah	1.885.000,00	1.943.000,00	(58.000,00)	(2,99)
35. Kec. Way Tenong				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	63.000,00	46.000,00	17.000,00	36,96
Jumlah	63.000,00	46.000,00	17.000,00	36,96
36. Kec. Sekincau				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
- Persediaan Kertas dan Cover	154.000,00	139.000,00	15.000,00	10,79
Jumlah	204.000,00	189.000,00	15.000,00	7,94
37. Kec. Suoh				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	24.000,00	46.000,00	(22.000,00)	(47,83)
- Persediaan Kertas dan Cover	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Jumlah	134.000,00	156.000,00	(22.000,00)	(14,10)
38. Kec. Batu Brak				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Kertas dan Cover	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
- Persediaan Benda Pos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Jumlah	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
39. Kec. Sukau				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Kertas dan Cover	125.000,00	110.000,00	15.000,00	13,64
Jumlah	125.000,00	110.000,00	15.000,00	13,64
40. Kec. Gedung Surian				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	35.000,00	(35.000,00)	(100,00)
- Persediaan Kertas dan Cover	125.000,00	105.000,00	20.000,00	19,05
Jumlah	125.000,00	140.000,00	(15.000,00)	(10,71)
41. Kec. Kebun Tebu				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	89.000,00	91.000,00	(2.000,00)	(2,20)
- Persediaan Kertas dan Cover	125.000,00	105.000,00	20.000,00	19,05
- Persediaan Bahan Komputer	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
- Persediaan Alat Listrik	0,00	48.000,00	(48.000,00)	(100,00)
Jumlah	339.000,00	369.000,00	(30.000,00)	(8,13)
42. Kec. Air Hitam				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	65.000,00	40.000,00	25.000,00	62,50
- Persediaan Kertas dan Cover	160.000,00	105.000,00	55.000,00	52,38
Jumlah	225.000,00	145.000,00	80.000,00	55,17
43. Kec. Pagar Dewa				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	6.000,00	(6.000,00)	(100,00)

SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Lebih/ (Kurang)	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(2)	(4=2-3)	(5=4/3)
- Persediaan Kertas dan Cover	130.000,00	55.000,00	75.000,00	136,36
- Persediaan Bahan komputer	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
Jumlah	255.000,00	61.000,00	194.000,00	318,03
44. Kec.Batu Ketulis				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Kertas dan Cover	275.000,00	220.000,00	55.000,00	25,00
- Persediaan bahan komputer	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Jumlah	525.000,00	470.000,00	55.000,00	11,70
45. Kec. Bandar Negeri Suoh				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	355.000,00	410.000,00	(55.000,00)	(13,41)
- Persediaan Kertas dan Cover	165.000,00	110.000,00	55.000,00	50,00
Jumlah	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
46. Kec. Lumbok Seminung				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
- Persediaan Kertas dan Cover	65.000,00	165.000,00	(100.000,00)	(60,61)
- Persediaan Bahan komputer	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
Jumlah	310.000,00	165.000,00	145.000,00	87,88
47. Kelurahan Pasar Liwa				
Persediaan Barang Pakai Habis				
Persediaan Alat Tulis Kantor	10.000,00	30.000,00	(20.000,00)	(66,67)
- Persediaan Bahan komputer	125.000,00	125.000,00		
Jumlah	135.000,00	155.000,00	(20.000,00)	(12,90)
48. Kelurahan Way Mengaku				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	61.000,00	0,00	61.000,00	100,00
- Persediaan Kertas dan Cover	170.000,00	110.000,00	60.000,00	54,55
- Persediaan Bahan komputer	0,00	125.000,00	(125.000,00)	(100,00)
Jumlah	231.000,00	235.000,00	(4.000,00)	(1,70)
49. Kelurahan Sekincau				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	50.000,00	(50.000,00)	(100,00)
- Persediaan Kertas dan Cover	155.000,00	139.000,00	(16.000,00)	11,51
Jumlah	155.000,00	189.000,00	(34.000,00)	(17,99)
50. Kelurahan Fajar Bulan				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan komputer	125.000,00	250.000,00	(125.000,00)	100,00
Jumlah	125.000,00	250.000,00	(125.000,00)	(50,00)
51. Kelurahan Tugu Sari				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Alat Tulis Kantor	48.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
- Persediaan Kertas dan Cover	940.000,00	410.000,00	530.000,00	129,27
- Persediaan Bahan Komputer	500.000,00	375.000,00	125.000,00	33,33
Jumlah	1.488.000,00	809.000,00	679.000,00	83,93
52. Puskesmas Liwa				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	18.241.345,58	7.896.184,00	10.345.161,58	131,01
- Persediaan Kertas dan Cover	920.300,00	278.760,00	641.540,00	230,14
- Persediaan bahan cetak	51.323,00	0,00	51.323,00	∞
- Persediaan Perabot Kantor	2.508.390,56	3.620.196,00	(1.111.805,44)	(30,71)
- Persediaan Peralatan Dinas	20.347.854,72	7.825.917,00	12.521.937,72	160,01
- Persediaan Obat	85.962.821,83	67.604.790,00	18.358.031,83	27,15
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	57.989.289,35	54.084.605,00	3.904.684,35	7,22
Jumlah	186.021.325,04	141.310.452,00	44.710.873,04	31,64
53. Puskesmas Kenali				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	5.103.305,00	5.527.924,00	(424.619,00)	(7,68)
- Persediaan bahan cetak	280.206,00	0,00	280.206,00	∞

SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Lebih/ (Kurang)	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
- Persediaan Perabot Kantor	1.651.114,80	1.298.838,00	352.276,80	27,12
- Persediaan Perlengkapan Dinas	2.068.730,40	1.943.570,00	125.160,40	6,44
- Persediaan Obat	71.104.506,63	55.719.784,00	15.384.722,63	27,61
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	36.514.873,64	56.205.423,00	(19.690.549,36)	(35,03)
Jumlah	**116.722.736,47**	**120.695.539,00**	**(3.972.802,53)**	**(3,29)**
54. Puskesmas Sumber Jaya				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	21.359.221,65	9.618.290,00	11.740.931,65	122,07
- Persediaan bahan cetak	51.323,00	0,00	51.323,00	-
- Persediaan Perabot Kantor	4.128.204,40	1.278.817,00	2.849.387,40	222,81
- Persediaan Perlengkapan Dinas	777.000,00	6.635.915,00	(5.858.915,00)	(88,29)
- Persediaan Obat	59.929.859,72	100.350.807,00	(40.420.947,28)	(40,28)
Persediaan Obat Obatan Lainnya	30.460.932,78	54.277.561,00	(23.816.628,22)	(43,88)
Jumlah	**116.706.541,55**	**172.161.405,00**	**(55.454.863,45)**	**(32,21)**
55. Puskesmas Fajar Bulan				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	7.746.638,90	13.087.989,25	(5.341.150,35)	(40,81)
- Persediaan bahan cetak	2.506.198,00	0,00	2.506.198,00	-
- Persediaan Kertas dan Cover	296.700,00	650.440,00	(354.740,00)	(54,54)
- Persediaan Perabot Kantor	2.253.702,24	1.332.245,92	921.456,32	69,17
- Persediaan Perlengkapan Dinas	14.724.128,20	2.465.579,00	12.258.549,20	497,19
- Persediaan Obat	56.237.395,59	63.429.093,02	(7.191.697,43)	(11,34)
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	43.385.523,09	59.070.062,81	(15.684.539,72)	(26,55)
Jumlah	**127.149.486,02**	**140.035.410,00**	**(12.885.923,98)**	**(9,20)**
56. Puskesmas Sekincau				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	3.480.285,30	4.716.934,00	(1.236.648,70)	(26,22)
- Persediaan Kertas dan Cover	1.832.000,00	278.760,00	1.553.240,00	557,20
- Persediaan Perabot Kantor	3.110.428,48	1.652.867,00	1.457.561,48	88,18
- Persediaan Perlengkapan Dinas	14.595.212,00	4.893.324,00	9.701.888,00	198,27
- Persediaan Obat	82.248.810,24	50.989.785,00	31.259.025,24	61,30
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	33.737.085,39	28.868.880,00	4.868.205,39	16,86
Jumlah	**139.003.821,41**	**91.400.550,00**	**47.603.271,41**	**52,08**
57. Puskesmas Srimulyo				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	10.450.745,20	13.415.125,15	(2.964.379,95)	(22,10)
- Persediaan Kertas dan Cover	1.319.900,00	557.520,00	762.380,00	136,74
- Persediaan bahan cetak	30.190,00	0,00	30.190,00	-
- Persediaan Perabot Kantor	2.400.965,28	3.851.429,12	(1.450.463,84)	(37,66)
- Persediaan Perlengkapan Dinas	7.241.435,80	7.870.024,00	(628.588,20)	(7,99)
- Persediaan Obat	95.779.648,50	101.875.795,30	(6.096.146,80)	(5,98)
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	68.396.536,29	71.836.274,54	(3.439.738,25)	(4,79)
Jumlah	**185.619.421,07**	**199.406.168,11**	**(13.786.747,04)**	**(6,91)**
58. Puskesmas Batu Brak				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	8.044.295,80	9.360.863,00	(1.316.567,20)	(14,06)
- Persediaan Kertas dan Cover	1.832.000,00	185.840,00	1.646.160,00	885,79
- Persediaan Perabot Kantor	2.394.829,32	3.197.094,00	(802.264,68)	(25,09)
- Persediaan Perlengkapan Dinas	7.300.592,40	6.974.140,00	326.452,40	4,68
- Persediaan Obat	86.543.774,77	88.405.766,00	(1.861.991,23)	(2,11)
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	55.445.154,12	53.218.334,00	2.226.820,12	4,18
Jumlah	**161.560.646,41**	**161.342.037,00**	**218.609,41**	**0,14**
59. Puskesmas Buay Nyerupa				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	5.379.324,00	5.872.434,00	(493.110,00)	(8,40)
- Persediaan Kertas dan Cover	458.000,00	185.840,00	272.160,00	146,45
- Persediaan Perabot Kantor	909.565,92	0,00	909.565,92	100,00
- Persediaan Perlengkapan Dinas	2.459.038,50	448.885,00	2.010.153,50	447,81
- Persediaan Obat	54.513.830,08	57.009.061,00	(2.495.230,92)	(4,38)

SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Lebih/ (Kurang)	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	35.741.678,14	28.359.179,00	7.382.499,14	26,03
Jumlah	99.461.436,64	91.875.399,00	7.586.037,64	8,26
60. Puskesmas Gedung Surian				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	17.801.385,24	2.190.667,75	15.610.717,49	712,60
- Persediaan Kertas dan Cover	312.300,00	199.800,00	112.500,00	56,31
- Persediaan bahan cetak	82.599,00	0,00	82.599,00	∞
- Persediaan Perabot Kantor	2.505.784,24	885.101,00	1.620.683,24	183,11
- Persediaan Perlengkapan Dinas	14.551.578,00	2.918.155,00	11.633.423,00	398,66
- Persediaan Obat	62.255.415,83	15.735.783,12	46.519.632,71	295,63
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	26.231.495,49	10.903.816,44	15.327.679,05	140,57
Jumlah	123.740.557,80	32.833.323,31	90.907.234,49	276,87
61. Puskesmas Kebun Tebu				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	11.318.928,20	8.004.546,00	3.314.382,20	41,41
- Persediaan Kertas dan Cover	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00
- Persediaan bahan cetak	60.380,00	0,00	60.380,00	∞
- Persediaan Perabot Kantor	4.061.537,84	1.745.631,00	2.315.906,84	132,67
- Persediaan Perlengkapan Dinas	23.793.000,00	0,00	23.793.000,00	100,00
- Persediaan Obat	75.082.181,86	59.459.113,00	15.623.068,86	26,28
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	62.969.398,78	71.483.319,00	(8.513.920,22)	(11,91)
Jumlah	177.322.926,68	140.692.609,00	36.630.317,68	26,04
62. Puskesmas Air Hitam				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	19.031.407,54	6.643.645,00	12.387.762,54	186,46
- Persediaan Kertas dan Cover	1.761.300,00	37.500,00	1.723.800,00	4.596,80
- Persediaan bahan cetak	39.554,25	0,00	39.554,25	∞
- Persediaan Perabot Kantor	4.499.638,88	2.412.279,00	2.087.559,88	86,54
- Persediaan Perlengkapan Dinas	10.575.212,00	4.876.897,00	5.698.315,00	116,84
- Persediaan Obat	76.572.035,66	48.708.891,83	27.863.143,83	57,20
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	32.044.723,45	25.081.832,00	6.962.891,45	27,76
Jumlah	144.524.071,78	87.761.044,83	56.763.026,95	64,68
63. Puskesmas Pagar Dewa				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	5.376.732,55	8.333.540,00	(2.956.807,45)	(35,48)
- Persediaan Kertas dan Cover	1.777.900,00	185.840,00	1.592.060,00	856,68
- Persediaan bahan cetak	15.095,00	0,00	15.095,00	∞
- Persediaan Perabot Kantor	3.326.953,92	2.497.802,00	829.151,92	33,20
- Persediaan Perlengkapan Dinas	9.601.428,52	2.690.398,00	6.911.030,52	256,88
- Persediaan Obat	58.701.869,00	57.324.300,00	1.377.569,00	2,40
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	35.296.870,99	43.739.168,00	(8.442.297,01)	(19,30)
Jumlah	114.096.849,98	114.771.048,00	(674.198,02)	(0,59)
64. Puskesmas Batu Ketulis				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	22.397.377,19	12.518.781,00	9.878.596,19	78,91
- Persediaan Kertas dan Cover	1.503.100,00	185.840,00	1.317.260,00	708,81
- Persediaan bahan cetak	618.387,50	0,00	618.387,50	∞
- Persediaan Perabot Kantor	3.537.222,88	2.804.760,00	732.462,88	26,11
- Persediaan Perlengkapan Dinas	21.370.490,12	7.715.192,00	13.655.298,12	176,99
- Persediaan Obat	94.994.351,03	99.217.065,00	(4.222.713,97)	(4,26
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	46.054.030,20	56.299.159,00	(10.245.128,74)	(18,15)
Jumlah	190.474.958,98	178.710.797,00	11.764.161,98	6,58
65. Puskesmas Bandar Negeri Suoh				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	4.469.834,90	5.999.176,00	(1.529.341,10)	(25,49)
- Persediaan Kertas dan Cover	274.800,00	437.100,00	(162.300,00)	(37,13)
- Persediaan bahan cetak	257.068,50	0,00	257.068,50	∞0
- Persediaan Perabot Kantor	1.068.452,36	1.582.994,00	(514.541,64)	(32,50)
- Persediaan Perlengkapan Dinas	2.333.092,00	3.754.764,00	(1.421.672,00)	(37,86)

SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Lebih/ (Kurang)	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
- Persediaan Obat	44.843.186,00	36.524.391,00	8.318.795,00	22,78
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	26.602.147,96	26.428.177,00	173.970,96	0,66
Jumlah	79.848.381,72	74.726.602,00	5.121.979,72	6,85
66. Puskesmas Lumbok				
Persediaan Barang Pakai Habis				
- Persediaan Bahan Kimia	7.460.027,85	6.946.527,00	513.500,85	7,39
- Persediaan bahan cetak	283.225,00	0,00	283.225,00	-
- Persediaan Perabot Kantor	3.067.559,20	2.137.420,00	930.139,20	43,52
- Persediaan Perlengkapan Dinas	7.430.460,00	5.679.082,00	1.751.378,00	30,84
- Persediaan Obat	52.511.027,80	66.834.607,00	(14.323.579,20)	(21,43)
- Persediaan Obat-Obatan Lainnya	26.709.778,48	33.203.186,00	(6.493.407,52)	(19,56)
Jumlah	97.462.078,33	114.800.822,00	(17.338.743,67)	(15,10)
JUMLAH TOTAL	14.964.943.100,62	13.775.722.508,25	1.189.220.592,37	8,63

Jumlah persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.964.943.100,62 tersebut tidak termasuk persediaan obat yang telah kedaluwarsa sebesar Rp242.067.087,00 pada RSUD Alimuddin Umar, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Puskesmas Batu Ketulis, Puskesmas Liwa, dan Puskesmas Bandar Negeri Suoh, dan Puskesmas Srimulyo, sesuai dengan rincian berikut:

1. RSUD Alimuddin Umar sebesar Rp43.671.103,00
2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp167.372.650,00
3. Puskesmas Batu Ketulis sebesar Rp14.472.082,00
4. Puskesmas Liwa sebesar Rp472.000,00
5. Puskesmas Bandar Negeri Suoh sebesar Rp12.214.158,00
6. Puskesmas Srimulyo sebesar Rp3.865.094,00

Lebih rinci persediaan obat kedaluwarsa pada 6 OPD tersebut, disajikan pada lampiran 19.

Bahan kimia dan obat kedaluwarsa tersebut merupakan hasil inventarisasi tahun 2022 sampai dengan 2024 dan belum dapat dimusnahkan karena Pemerintah Kabupaten Lampung Barat belum mempunyai fasilitas khusus untuk memusnahkan barang tersebut. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat merencanakan akan melakukan kerjasama dengan pihak yang telah memiliki fasilitas tersebut untuk memusnahkan seluruh bahan kimia dan obat yang telah kedaluwarsa tersebut.

5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

Nilai Investasi Jangka Panjang Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.574.267.933,83 mengalami peningkatan sebesar Rp2.244.054.208,17 atau 5,43% dari Tahun 2023 sebesar Rp41.330.213.725,66 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 191. Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Lebih/ (Kurang)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	1.318.613.500,00	438.454.309,00	880.159.191,00	200,74
2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	42.255.654.433,83	40.891.759.416,66	1.363.895.017,17	3,34
	Jumlah	43.574.267.933,83	41.330.213.725,66	2.244.054.208,17	5,43

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

5.3.1.2.1.1. Dana Bergulir Melalui BLUD

Investasi Jangka Panjang Non Permanen – Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kelompok pembiayaan, diperuntukkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dimanfaatkan secara bergulir. Adapun maksud dan tujuan dari penyediaan dan pengelolaan Dana Bergulir adalah untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja. Pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk periode Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2009, dan UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM dibawah koordinasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan untuk periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2024. Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Bruto per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.318.613.500,00 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp438.454.309,00 mengalami peningkatan Rp880.159.191,00 atau 200,74%. Kenaikan signifikan ini karena pada tahun 2023 penyajian pokok dana bergulir disajikan secara netto langsung mengurangi nilai pokok tersebut, sedangkan pada tahun 2024 penyisihan atas pokok tersebut telah disajikan pada akun penyisihan dana bergulir sebagai kontra akun pokok dana bergulir.

Tabel 192. Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik (Turun)		Keterangan
				(Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)	(7)
1.	APBD TA. 2003	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	SK Bupati No. B/125/KPTS/IV.09/2003
2.	APBD TA. 2004	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	SK Bupati No. B/219/KPTS/IV.09/2004
3.	APBD TA. 2005	305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	0,00	SK Bupati No. B/206/KPTS/IV.09/2005
4.	APBD TA. 2006	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	SK Bupati No. B/273/KPTS/IV.09/11/2006
5.	APBD TA. 2007	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	SK Bupati No. B/288/KPTS/IV.09/XII/2007
6.	Jumlah (1 s.d. 5)	1.515.000.000,00	1.515.000.000,00	0,00	0,00	
7.	Dialihkan ke Kab. Pesisir Barat	(196.386.500,00)	(196.386.500,00)	0,00	0,00	SK Bupati No. B/433/KPTS/II.14/2014
8.	Dana Bergulir Bruto (6 – 7)	1.318.613.500,00	1.318.613.500,00	0,00	0,00	
9.	Dana Bergulir melalui BLUD	1.318.613.500,00	438.454.309,00	880.159.191,00	200,74	Penyajian pada Neraca

Saldo penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2024 sebesar Rp867.844.191,00. Nilai penyisihan tersebut memiliki kode akun 1.1.10.02.14.0001. yang merupakan bagian dari kode kelompok akun penyisihan piutang dengan kode akun 1.1.10.

Pada tahun 2023 akun penyisihan dana bergulir belum terdapat pada Bagan Akun Standar yang diatur oleh Permendagri. Sehingga pada tahun 2023 nilai penyisihan dana bergulir yang disajikan pada neraca sebesar Rp0,00.

Adapun pada tahun 2024 nilai penyisihan dana bergulir telah disajikan pada neraca namun masih masuk ke dalam akun 1.1.10 (penyisihan piutang), sehingga nilai dana bergulir pada neraca tidak dapat disajikan secara langsung dengan kontra akunnya yaitu penyisihan dana bergulir pada bagian aset lancar.

Adapun penyajian nilai netto dana bergulir adalah sebagai berikut

Tabel 193. Dana Bergulir Bersih Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Lebih/ (Kurang)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dana Bergulir Bruto	1.318.613.500,00	438.454.309,00	880.159.191,00	200,74
2	Penyisihan Dana Dana Bergulir	867.844.191,00	0,00	867.844.191,00	-
	Dana Bergulir Bersih	**450.769.309,00**	**438.454.309,00**	**12.315.000,00**	**2,81**

Pencatatan Penyisihan Dana Bergulir pada tahun 2023 belum dilakukan karena Bagan Akun Standar Penyisihan tersebut baru terbit pada tahun 2024 yaitu SE Nomor 900.1.15.5-3406 kode akun 1.1.10.02.14.0001 (Penyisihan Dana Bergulir), sehingga penyajian pada neraca terhadap penyisihan tersebut langsung mengurangi nilai pokok dana bergulir tersebut (*netto*).

Nilai bersih (*netto*) Dana Bergulir per 31 Desember 2024 sebesar Rp450.769.309,00. Adapun daftar umur Piutang Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih berdasarkan dana yang masih ada disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 194. Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih dan Kas Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah Per 31 Des 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3 s.d 6)
1	Piutang Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	867.844.191,00	867.844.191,00
2	Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	867.844.191,00	867.844.191,00
3	**Nilai Bersih Piutang (1-2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Kas Dana Bergulir	450.769.309,00	0,00	0,00	0,00	450.769.309,00
5	**Nilai Bersih Dana Bergulir (3+4)**	**450.769.309,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.769.309,00**

Penyisihan Dana Bergulir Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp867.844.191,00 dan Rp880.159.191,00 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 195. Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Lebih/ (Kurang)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Penyisihan Dana Dana Bergulir	867.844.191,00	880.159.191,00	(12.315.000,00)	(1,40)
	Jumlah	**867.844.191,00**	**880.159.191,00**	**(12.315.000,00)**	**(1,40)**

Penyisihan Dana Bergulir ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, penyisihan 0,5%
   a. Pinjaman Dana Bergulir masih dalam tenggang waktu; dan/atau
   b. Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
   c. Penerima dana kooperatif;
2. Kualitas Kurang Lancar, penyisihan 10,00%
   a. Pinjaman Dana Bergulir telah jatuh tempo 1 sampai 3 bulan; dan/atau
   b. Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
   c. Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
3. Kualitas Diragukan, penyisihan 50,00%
   a. Pinjaman Dana Bergulir telah jatuh tempo 4 sampai 6 bulan; dan/atau
   b. Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
   c. Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan;
4. Kualitas Macet, penyisihan 100,00%
   a. Pinjaman Dana Bergulir telah jatuh tempo lebih dari 6 bulan; dan/atau
   b. Penerima dana tidak diketahui keberdaannya; dan/atau
   c. Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan /atau meninggal dunia

Dari jumlah piutang pokok macet sebesar Rp867.844.191,00 tersebut, terdapat piutang tidak teridentifikasi sebesar Rp81.564.596,00 berdasarkan Surat Pernyataan Kepala UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM serta Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan tanggal 23 Maret 2015. Permasalahan terjadi karena antara lain: a) Penarikan untuk honor pendamping menggunakan Pokok Dana Bergulir; b) Pada tahun 2003–2008

pengelola dana bergulir tidak memperhatikan pengembalian keuntungan pada tahun berjalan, sehingga dana pokok ikut terpakai belanja operasional BLUD.

Sementara piutang tidak teridentifikasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp76.119.331,00, terdapat penurunan sebesar Rp5.445.265,00 = (Rp81.564.596,00 - Rp76.119.331,00) disebabkan karena kurun waktu tahun 2021 dan 2022 terdapat beberapa nasabah yang lebih membayar nilai pokok pinjaman, kelebihan pembayaran tersebut dikurangkan terhadap nilai Pokok Piutang Tidak Teridentfikasi.

Dari data diatas terdapat penyisihan dana bergulir sebesar Rp867.844.191,00 yang harus ditagih oleh UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM. Adapun dana bergulir netto sebesar Rp450.769.309,00 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 196. Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Netto Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Lebih/ (Kurang)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Kas di RK Bank Lampung	450.769.309,00	432.694.309,00	18.075.000,00	4,18
2.	Piutang Pokok Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Piutang Pokok Kurang Lancar	0,00	5.760.000,00	(5.760.000,00)	(100,00
4.	Piutang Pokok Diragukan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**450.769.309,00**	**438.454.309,00**	**12.315.000,00**	**2,81**

Pada Neraca ditampilkan dana bergulir senilai bruto, namun sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat BAB VI Akuntansi Dana Bergulir paragraf 18 menyatakan bahwa secara periodik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) serta sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 Lampiran I.07 PSAP 06-06 Paragraf 29 menyatakan bahwa investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Adapun lebih rinci dana bergulir yang berupa piutang kepada pihak lain disajikan pada lampiran 22 dalam laporan keuangan ini.

5.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah.

Pada pembentukan perusahaan daerah dinyatakan dalam akta pendirian perusahaan yang selanjutnya pemerintah menyertakan modalnya yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Penyertaan modal pemerintah menggambarkan jumlah yang disetorkan oleh pemerintah kedalam penyertaan modal pada perusahaan negara/ daerah. Suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan daerah jika pemerintah daerah memiliki mayoritas atau lebih dari 51% saham perusahaan dimaksud. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui dari peraturan daerah, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, serta bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dilakukan dengan 2 metode yaitu:

1. Metode Biaya (*Cost Method*)
   Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar harga perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut berupa dividen, diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi pada badan usaha/ badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

2. Metode Ekuitas (*Equity Method*)
   Dengan menggunakan metode ekuitas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan, dan ditambah atau dikurangi sebesar laba atau rugi yang diumumkan oleh perusahaan setelah tanggal perolehan. Bagian laba berupa deviden,

kecuali deviden dalam bentuk saham, yang diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan mengurangi nilai investasi pada badan usaha/ badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Berikut nilai investasi jangka panjang permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.255.654.433,83 mengalami peningkatan sebesar Rp1.363.895.017,17 atau 3,34% dari Tahun 2023 sebesar Rp40.891.759.416,66 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 197. Investasi Jangka Panjang Permanen Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Lebih/ (Kurang)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Perumda Limau Kunci	4.939.946.180,86	5.054.200.691,46	(114.254.510,60)	(2,26)
2.	Pesagi Mandiri (Perseroda)	7.059.002.001,00	7.425.224.594,00	(366.222.593,00)	(4,93)
3.	PT BPRS Lampung Barat (Perseroda)	11.548.986.251,97	10.704.614.131,20	844.372.120,77	7,89
4.	PT Bank Lampung	18.707.720.000,00	17.707.720.000,00	1.000.000.000,00	5,65
Jumlah		42.255.654.433,83	40.891.759.416,66	1.363.895.017,17	3,34

Berikut adalah tabel mengenai jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

Tabel 198. Jumlah Penyertaan, Tingkat Pengendalian dan Metode Penilaian Investasi Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Metode Penilaian	Nilai Investasi Per 31 Des 2024 (Rp) dan Prosentase Kepemilikan		Nilai Investasi Per 31 Des 2023 (Rp) dan Prosentase Kepemilikan	
			(Rp)	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Perumda Limau Kunci	Ekuitas	4.939.946.180,86	68,75	5.054.200.691,46	67,86
2.	Pesagi Mandiri (Perseroda)	Ekuitas	7.059.002.001,00	100,00	7.425.224.594,00	100,00
3.	PT BPRS Lampung Barat (Perseroda)	Ekuitas	11.548.986.251,97	96,1111	10.704.614.131,20	95,6250
4.	PT Bank Lampung	Biaya (Cost)	18.707.720.000,00	4,04	17.707.720.000,00	4,22
Jumlah			42.255.654.433,83	-	40.891.759.416,66	-

Untuk lebih rinci terhadap investasi jangka panjang permanen Kabupaten Lampung Barat, dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini.

5.3.1.2.2.1.1. Perumda Air Minum Limau Kunci

Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Pasal 10 ayat (1) PDAM sebagai perusahaan milik pemerintah daerah adalah suatu alat kelengkapan otonomi daerah. Penyertaan tersebut dicatat sebesar investasi awal yaitu seluruh peralihan aset Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat ditambah dengan penyetoran dana/modal serta ditambah atau dikurangi sebesar perubahan yang terjadi pada ekuitas dana PDAM itu sendiri (metode ekuitas). Metode ekuitas mengakui bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan, selain itu bila kenaikan ekuitas karena penerimaan hibah, bantuan atau donasi akan menambah nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Dengan terbitnya Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci maka badan hukum menjadi Perumda.

Nilai penyertaan pada Neraca Perumda Limau Kunci per 31 Desember 2023 dan 2024 pada tabel berikut.

Tabel 199. Nilai Penyertaan pada Perumda Limau Kunci Per 31 Desember 2023 dan 2024

Uraian	Tahun 2023		Mutasi +/- Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2024	
	Nilai Penyertaan	%		Nilai Penyertaan	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pemerintah Pusat	3.802.964.050,00	23,72	0,00	3.802.964.050,00	23,72
Pemprov Lampung	220.413.600,00	1,38	0,00	220.413.600,00	1,38
Pemda Lampung Barat	11.017.675.906,00	68,75	0,00	11.017.675.906,00	68,75
Pemda Lampung Utara	7.219.556,00	0,05	0,00	7.219.556,00	0,05
Modal Hibah	977.538.700,00	6,10	0,00	977.538.700,00	6,10
Jumlah	16.025.811.812,00	100,00	0,00	16.025.811.812,00	100,00

Posisi ekuitas pada Neraca Perumda Limau Kunci per 31 Desember 2023 dan 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 200. Posisi Nilai Ekuitas pada Perumda Limau Kunci Per 31 Desember 2023 dan 2024

No	Uraian	Nilai Penyertaan s.d. Tahun 2023	Mutasi Tambah/ (Kurang) Tahun 2024				Nilai Ekuitas Netto Tahun 2024
			Koreksi Laba ditahan thn sebelumnya	Laba/ (Rugi) Ditahan Thn Lalu	Pembagian Deviden	Laba/ (Rugi) Tahun Berjalan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pemerintah Pusat	3.802.964.050,00	692.611,98	(2.360.283.300,87)	0,00	(40.129.967,34)	1.403.243.593,77
2	Pemprov Lampung	220.413.600,00	40.154,25	(136.796.174,41)	0,00	(2.325.867,52)	81.329.712,32
3	Pemda Lampung Barat	11.017.675.906,00	2.007.165,41	(5.963.475.214,54)	0,00	(116.261.676,01)	4.939.946.180,86
4	Pemda Lampung Utara	7.219.556,00	1.315,24	(4.480.767,43)	0,00	(76.182,82)	2.663.920,99
5	Modal Hibah	977.538.700,00	178.084,91	(113.181.012,75)	0,00	(10.315.268,72)	854.220.503,44
	Jumlah	16.025.811.812,00	2.919.531,79	(8.578.218.470,00)	0,00	(169.108.962,41)	7.281.403.911,38

Dalam Laporan Keuangan Perumda Air Minum Limau Kunci (*Audited*) Tahun Buku 2024 disajikan laba yang belum dibagikan (akumulasi kerugian) sebesar (Rp8.744.407.900,62), dan Rugi tahun berjalan sebesar (Rp169.108.962,41) serta penyertaan modal Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp11.017.675.906,00. Berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Limau Kunci (*Audited*) Laba/(rugi) ditahan s.d. tahun lalu, laba/(rugi) tahun berjalan serta modal akhir *Audited* Tahun Buku 2024 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 201. Proporsi Nilai Penyertaan, Laba ditahan, dan Modal Bersih Akhir Perumda Air Minum Limau Kunci Per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai Penyertaan s.d. 31 Des 2024	Laba/ (Rugi) Ditahan s.d. 31 Desember 2024		Modal Bersih Akhir Per 31 Des 2024	
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pemerintah Pusat	3.802.964.050,00	(2.399.720.456,23)	27,45	1.403.243.593,77	19,27
Pemprov Lampung	220.413.600,00	(139.083.887,68)	1,59	81.329.712,32	1,12
Pemda Lampung Barat	11.017.675.906,00	(6.077.729.725,14)	69,51	4.939.946.180,86	67,84
Pemda Lampung Utara	7.219.556,00	(4.555.635,01)	0,05	2.663.920,99	0,04
Modal Hibah	977.538.700,00	(123.318.196,56)	1,40	854.220.503,44	11,73
Jumlah	16.025.811.812,00	(8.744.407.900,62)	100,00	7.281.403.911,38	100,00

Berdasarkan tabel diatas terdapat Modal Hibah sebesar Rp977.538.700,00, adapun penerimaan hibah tersebut sejak tahun 2009 s.d. 2022 berupa aset tetap dan uang dari beberapa sumber antara lain hibah dari Perpamsi (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia).

Berdasarkan Surat Keterangan Perumda Air Minum Limau Kunci Nomor 69/PDAM.LB/V/2025 Tanggal 19 Mei 2025, bahwa dokumen penerimaan hibah tersebut sedang ditelusuri di Kantor Perumda Air Minum Limau Kunci.

5.3.1.2.2.1.2. PT Pesagi Mandiri (Perseroda)

Rincian penyertaan modal pada PT Pesagi Mandiri (Perseroda) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 202. Penyertaan Modal pada PT Pesagi Mandiri (Perseroda) Per 31 Desember 2023 dan 2024

Uraian	Tahun 2023		Mutasi Penambahan/ (Pengurangan)Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2024	
	Nilai Penyertaan (Rp)	(%)		Nilai Penyertaan (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+4)	(6)
Pemda Lampung Barat	10.633.729.000,00	100,00	0,00	10.633.729.000,00	100,00
Jumlah	10.633.729.000,00	100,00	0,00	10.633.729.000,00	100,00

Posisi ekuitas pada Neraca PT Pesagi Mandiri (Perseroda) per 31 Desember 2024 pada tabel berikut.

Tabel 203. Posisi Nilai Ekuitas Pada PT Pesagi Mandiri (Perseroda)

No	Uraian	Nilai Penyertaan s.d. Tahun 2023	Mutasi Tambah/ (Kurang) Tahun 2024			Nilai Bersih Ekuitas Tahun 2024
			Penambahan/ Pengurangan Penyertaan Modal	Laba/ (Rugi) Ditahan Tahun Lalu	Laba/ (Rugi) Tahun Berjalan dan Koreksi Laba Thn Lalu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3 s.d 6)
1	Pemda Lambar	10.633.729.000,00	0,00	(3.208.504.406,00)	(366.222.593,00)	7.059.002.001,00
Jumlah		10.633.729.000,00	0,00	(3.208.504.406,00)	(366.222.593,00)	7.059.002.001,00

Dalam Laporan Keuangan PT Pesagi Mandiri (Perseroda) *Audited* Tahun Buku 2024 disajikan laba yang belum dibagikan (akumulasi kerugian) sampai dengan akhir tahun sebesar (Rp3.574.726.999,00) serta rugi tahun berjalan sebesar (Rp366.222.593,00).

Penyajian penyertaan modal pada PT Pesagi Mandiri (Perseroda) Tahun Buku 2024 sebesar Rp10.633.729.000,00 dikurangi akumulasi kerugian yang ditahan sehingga nilai bersih penyertaan modal sebesar Rp7.059.002.001,00. Laba/(rugi) tahun berjalan serta modal akhir tahun 2024 *Audited* terlihat pada tabel berikut.

Tabel 204. Proporsi Nilai Penyertaan, Rugi dan Laba serta Modal Akhir

Uraian	Nilai Penyertaan Per 31 Desember 2023 (Rp)	Laba/ (Rugi) Ditahan s.d. 31 Desember 2023		Laba/ (Rugi) Tahun Berjalan& Koreksi		Modal Bersih Akhir Per 31 Des 2024 (Rp)
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=2+3+5)
Pemda Lampung Barat	10.633.729.000,00	(3.208.504.406,00)	100,00	(366.222.593,00)	100,00	7.059.002.001,00
Jumlah	10.633.729.000,00	(3.208.504.406,00)	100,00	(366.222.593,00)	100,00	7.059.002.001,00

Berikut disajikan tabel Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat kepada pada PT Pesagi Mandiri (Perseroda).

Tabel 205. Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada PT Pesagi Mandiri (Perseroda)

No	Dasar Hukum Penyertaan / Keterangan	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun ini (2024)	Sisa Modal yang belum disertakan
(1)	(2)	(3)	(4)	5 = 3-4
1.	Perda No 16 Thn 2010	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
2.	Perda No 6 Thn 2014	8.000.000.000,00	1.683.729.000,00	6.316.271.000,00
3.	Penyesuaian Perda No 6 Thn 2014	(6.316.271.000,00)	0,00	(6.316.271.000,00)
4.	Perda No 8 Thn 2015	7.450.000.000,00	7.450.000.000,00	0,00
5.	Perda No 3 Thn 2015 (Aset Tanah)	3.361.996.000,00	3.361.996.000,00	0,00
6.	Perda No 10 Thn 2016 (Pengembalian Tanah Kepada Pemda Lampung Barat)	(3.361.996.000,00)	(3.361.996.000,00)	0,00
Jumlah		10.633.729.000,00	10.633.729.000,00	0,00

Nilai modal disetor Kabupaten Lampung Barat sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp10.633.729.000,00 sementara berdasarkan Akta Notaris Dewi Sukmasari, S.H., M.Kn, Akta Nomor 09 Tanggal 26 Juli 2024 tentang Pendirian Badan Hukum PT Pesagi Mandiri Perseroda dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0060590.AH.01.01 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Pesagi Mandiri Perseroda bahwa modal ditempatkan sebesar Rp7.429.000.000,00. Pencatatan modal setor pada akta notaris sebesar Rp7.429.000.000,00 tersebut mengacu pada Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan mengkaji ulang Perda Nomor 5 Tahun 2021 tersebut.

Berdasarkan Laporan Auditor Independen KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan Nomor 00050/3.0385/AU.2/10/1558-1/1/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 atas pemeriksaan Laporan Keuangan PD Pesagi Mandiri (Perseroda) Tahun Buku 2021 terdapat penghapusan piutang a.n. PBJ sebesar Rp1.962.182.000,00. Piutang yang telah dihapusbukukan tersebut akan disajikan sebagai piutang kembali pada Laporan Keuangan PT Pesagi Mandiri (Perseroda) Tahun Buku 2025.

5.3.1.2.2.1.3. PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat pada pokoknya mengubah tiga hal yaitu:

1. Mengubah nama Perusahaan semula PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda) diubah menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda) disingkat PT BPRS Lampung Barat (Perseroda).
2. Modal dasar semula sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ditetapkan menjadi sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah).
3. Pemenuhan modal dasar tersebut dapat dilakukan oleh pihak ketiga paling banyak sebesar 20% dari modal dasar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan poin 2 diatas, sampai dengan 31 Desember 2024 masih terdapat modal yang belum disetor sebesar Rp27.000.000.000,00 (Rp36.000.000.000,00 – Rp9.000.000.000,00)

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 Audited PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda), tanggal 21 Januari 2025 diketahui bahwa komposisi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda) dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 206. Penyertaan Modal pada PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda) Per 31 Desember 2023 dan 2024

Uraian	Tahun 2023		Mutasi +/- Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2024	
	Nilai penyertaan (Rp)	%		Nilai penyertaan (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pemda Lampung Barat	7.650.000.000,00	95,625	1.000.000.000,00	8.650.000.000,00	96,11
Dra. Helwiati Komala Dewi	235.000.000,00	2,938	0,00	235.000.000,00	2,61
Drs. Dimyati Amin	100.000.000,00	1,250	0,00	100.000.000,00	1,11
Ir. Mulyadi Insan	15.000.000,00	0,188	0,00	15.000.000,00	0,17
Jumlah	**8.000.000.000,00**	**100,00**	**1.000.000.000,00**	**9.000.000.000,00**	**100,00**

Posisi ekuitas pada Neraca PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda) per 31 Desember 2024 pada tabel berikut.

Tabel 207. Posisi Nilai Ekuitas pada PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda) Per 31 Des 2024

No	Uraian	Nilai Penyertaan s.d. Tahun 2024	Mutasi Tambah/ (Kurang) Tahun 2024				Nilai Ekuitas Netto Tahun 2024
			Pemakaian Cadangan	Laba/ (Rugi) Ditahan Tahun Lalu	Pembagian Deviden	Laba/ (Rugi) Tahun Berjalan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=3+4+5+6+7)
1	Pemda Lampung Barat	8.650.000.000,00	(297.267.153,94)	3.054.614.131,20	(653.987.738,40)	795.627.013,11	11.548.986.251,97
2	Dra. Helwiati Komala Dewi	235.000.000,00	(9.131.736,10)	113.771.541,89	(20.089.819,41)	24.440.829,81	343.990.816,19
3	Drs. Dimyati Amin	100.000.000,00	(3.885.845,15)	48.413.421,65	(8.548.859,33)	10.400.353,11	146.379.070,28
4	Ir. Mulyadi Insan	15.000.000,00	(582.876,77)	7.262.013,26	(1.282.328,90)	1.560.052,97	21.956.860,56
	Jumlah	**9.000.000.000,00**	**(310.867.611,96)**	**3.224.061.108,00**	**(683.908.746,04)**	**832.028.249,00**	**12.061.312.999,00**

Tabel 208. Proporsi Nilai Penyertaan, Rugi dan Laba serta Modal Akhir PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda) Per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai penyertaan s.d. 31 Des 2024 (Rp)	Laba/ (Rugi) Ditahan s.d. 31 Des 2023	Pembagian Deviden & Pemakaian Cadangan	Laba/ (Rugi) Tahun Berjalan	Modal Akhir Netto s.d. 31 Des 2024 (Rp)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=2+3+4+5)	(7)
Pemda Lampung Barat	8.650.000.000,00	3.054.614.131,20	(951.254.892,34)	795.627.013,11	11.548.986.251,97	95,788
Dra. Helwiati Komala Dewi	235.000.000,00	113.771.541,89	(29.221.555,51)	24.440.829,81	343.990.816,19	2,83
Drs. Dimyati Amin	100.000.000,00	48.413.421,65	(12.434.704,48)	10.400.353,11	146.379.070,28	1,20
Ir. Mulyadi Insan	15.000.000,00	7.262.013,26	(1.865.205,67)	1.560.052,97	21.956.860,56	0,18
Jumlah	**9.000.000.000,00**	**3.224.061.108,00**	**(994.776.358,00)**	**832.028.249,00**	**12.061.312.999,00**	**100,00**

Berikut disajikan tabel Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat kepada pada PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Barat.

Tabel 209. Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda)

No	Dasar Hukum Penyertaan / Keterangan	Jumlah Penyertaan Modal Daerah (Rp)	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun ini (2024) (Rp)	Sisa Modal yang belum disertakan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	5 = 3-4
1.	Perda No 8 Tahun 2010	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
2.	Perda No 12 Tahun 2012	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
3.	Perda No 5 Tahun 2013	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00
4.	Perda No 11 Tahun 2016	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.	Perda No 8 Tahun 2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
6.	Perda No 4 Tahun 2021	6.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
7.	Perubahan Perda No 4 Tahun 2021 dg Perda No 6/2024	(3.000.000.000,00)	0,00	(3.000.000.000,00)
8.	Perda No 6 Tahun 2024 Rp36.000.000.000,00 Perubahan Perda 4 Tahun 2021	27.350.000.000,00	0,00	27.350.000.000,00
	Jumlah	36.000.000.000,00	8.650.000.000,00	27.350.000.000,00

Dividen PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda) atas laba tahun buku 2024 telah dinyatakan pada Akta Notaris Amilda Riansyah, S.H., M.Kn. Nomor 15 Tanggal 17 Februari 2025 untuk Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp437.594.857.21 akan dibagikan pada tahun 2025.

5.3.1.2.2.1.4. PT Bank Pembangunan Daerah Lampung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2024 Tanggal 24 Desember 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 5) tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Tahun 2024-2029 bahwa nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dianggarkan sebesar Rp12.500.000.000,00. Pada Tahun Anggaran 2024 penambahan penyertaan modal pada PT Bank Lampung sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga masih terdapat kekurangan penyertaan modal tersebut senilai Rp11.500.000.000,00 lagi.

Berikut rincian saham yang telah diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Lampung disajikan pada tabel berikut.

Tabel 210. Rincian Bukti Saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Tanggal Terbit	Jumlah	
			Lembar	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	A. 1949984 s.d. 1897332	10 Januari 2000	47.349	473.490.000,00
2.	A. 2326108 s.d. 2343883	31 Januari 2001	17.776	177.760.000,00
3.	A. 2620283 s.d. 2635738	30 Januari 2003	15.456	154.560.000,00
4.	A. 4500728 s.d. 4515342	31 Desember 2004	14.615	146.150.000,00
5.	A. 6193181 s.d. 6221694	7 Juni 2005	28.514	285.140.000,00
6.	A. 6750395 s.d. 6827598	28 April 2006	77.204	772.040.000,00
7.	A. 8997299 s.d. 9079698	27 Juni 2007	82.400	824.000.000,00
8.	A. 11153699 s.d. 11249698	30 Mei 2008	96.000	960.000.000,00
9.	A. 12757786 s.d. 12798571	10 Juni 2009	40.786	407.860.000,00
10.	A. 12982081 s.d. 13082752	3 Agustus 2011	100.672	1.006.720.000,00
11.	A. 13670153 s.d. 13770152	30 November 2011	100.000	1.000.000.000,00
12.	A. 14691213 s.d. 14791212	31 Desember 2014	100.000	1.000.000.000,00
13.	A. 16075213 s.d. 16175212	31 Desember 2014	100.000	1.000.000.000,00

No	Uraian	Tanggal Terbit	Jumlah	
			Lembar	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	A. 17374487 s.d. 17424486	31 Desember 2015	50.000	500.000.000,00
15.	A. 19809763 s.d. 19859762	31 Desember 2016	50.000	500.000.000,00
16.	A. 20309763 s.d. 20359762	06 Juli 2017	50.000	500.000.000,00
17.	A. 22481688 s.d. 22531687	31 Desember 2018	50.000	500.000.000,00
18.	A. 24031688 s.d. 24081687	31 Desember 2019	50.000	500.000.000,00
19.	A. 24981688 s.d. 25081687	26 Oktober 2020	100.000	1.000.000.000,00
20.	A. 32455654 s.d. 32755653	31 Desember 2020	300.000	3.000.000.000,00
21.	A. 37735654 s.d. 37835653	31 Desember 2021	100.000	1.000.000.000,00
22.	A. 39654178 s.d. 39754177	31 Desember 2021	100.000	1.000.000.000,00
23.	A. 40690323 s.d. 40790322	30 Desember 2022	100.000	1.000.000.000,00
24.	-	31 Desember 2024	100.000	1.000.000.000,00
Jumlah			**1.870.772**	**18.707.720.000,00**

Penyertaan modal pada tahun 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00 belum memiliki Nomor Seri Saham karena masih dalam proses pengajuan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Lampung kepada Bank Indonesia sehingga belum memperoleh persetujuan izin terbit surat berharga.

Berikut disajikan tabel Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab upaten Lampung Barat kepada pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung.

Tabel 211. Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung

No	Dasar Hukum Penyertaan / Keterangan	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun ini (2024)	Sisa Modal yang belum disertakan
(1)	(2)	(3)	(4)	5 = 3-4
1.	No Saham 1849984 - 1897332	473.490.000,00	473.490.000,00	0,00
2.	No Saham 2326106 - 2343863	177.760.000,00	177.760.000,00	0,00
3.	No Saham 2620283 - 2635738	154.560.000,00	154.560.000,00	0,00
4.	No Saham 1041188 - 1061973	407.860.000,00	407.860.000,00	0,00
5.	No Saham 4500728 - 4515342	146.150.000,00	146.150.000,00	0,00
6.	No Saham 6193101 - 6221894	285.140.000,00	285.140.000,00	0,00
7.	No Saham 6750395 - 6827598	772.040.000,00	772.040.000,00	0,00
8.	No Saham 8997299 - 9079698	824.000.000,00	824.000.000,00	0,00
9.	No Saham 11249898 - 111153599	960.000.000,00	960.000.000,00	0,00
10.	No Saham 12962081-13082752	1.006.720.000,00	1.006.720.000,00	0,00
11.	Perda No 5 Thn 2009	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
12.	Perda No 11 Thn 2009	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
13.	Perda No 14 Thn 2010	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
14.	Perda No 5 Thn 2011	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
15.	Perda No 10 Thn 2012	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
16.	Perda No 12 Thn 2013	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
17.	Perda No 5 Thn 2014	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
18.	Perda No 9 Thn 2015	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
19.	Perda No 10 Thn 2016	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
20.	Perda No 9 Thn 2018	12.500.000.000,00	8.000.000.000,00	4.500.000.000,00
21.	Penyesuaian atas terbitnya Perda No 9 Thn 2018	(4.500.000.000,00)	0,00	(4.500.000.000,00)
22.	Perda No 5 Thn 2024	12.500.000.000,00	1.000.000.000,00	11.500.000.000,00
Jumlah		**30.207.720.000,00**	**18.707.720.000,00**	**11.500.000.000,00**

Dividen PT Bank Pembangunan Daerah Lampung atas laba tahun buku 2024 telah dinyatakan pada Akta Notaris Ria Yuliana, S.H., M.Kn. Nomor 483 Tanggal 03 Februari 2025 untuk Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp2.740.462.090,16 akan dibagikan pada tahun 2025.

5.3.1.3. ASET TETAP

Aset Tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan Aset Tetap yang dimiliki/ dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2024. Perolehan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berasal dari kapitalisasi belanja modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai Aset Tetap tahun anggaran berkenaan. Aset Tetap merupakan aset berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional.

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.377.594.469.750,49 mengalami peningkatan sebesar Rp176.520.241.239,00 atau 4,20% dari saldo aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.201.074.228.511,49 dengan rincian mutasi Aset Tetap selama tahun anggaran 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 212. Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2024

	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah	Kurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)
1.	Tanah	652.395.963.680,00	1.625.369.550,00	1.614.063.815,00	652.407.269.415,00
2.	Peralatan dan Mesin	478.161.840.538,69	23.596.911.776,00	4.766.435.555,00	496.992.316.759,69
3.	Gedung dan Bangunan	934.369.585.791,34	43.701.344.189,00	15.258.219.625,00	962.812.710.355,34
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.064.141.579.802,07	122.204.886.548,00	38.623.490.287,00	2.147.722.976.063,07
5.	Aset Tetap Lainnya	70.217.802.881,39	4.757.451.710,00	0,00	74.975.254.591,39
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.787.455.818,00	40.896.486.748,00	0,00	42.683.942.566,00
7.	**Jumlah Harga Perolehan**	**4.201.074.228.511,49**	**236.782.450.521,00**	**60.262.209.282,00**	**4.377.594.469.750,49**
8.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(401.364.827.559,04)	(33.951.154.355,35)	(2.095.868.003,00)	(433.220.113.911,39)
9.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(170.968.053.036,00)	(19.953.112.558,00)	(4.384.028.804,00)	(186.537.136.790,00)
10.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(1.067.135.729.638,00)	(163.929.772.432,00)	(15.767.110.313,00)	(1.215.298.391.757,00)
11.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(2.661.426.700,00)	(147.734.560,00)	0,00	(2.809.161.260,00)
12.	**Jumlah Akumulasi Penyusutan**	**(1.642.130.036.933,04)**	**(217.981.773.905,35)**	**(22.247.007.120,00)**	**(1.837.864.803.718,39)**
13.	**Nilai Buku (7-12)**	**2.558.944.191.578,45**	**18.800.676.615,65**	**38.015.202.162,00**	**2.539.729.666.032,10**

Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lampung Barat selama tahun 2024 terdiri dari (1) penambahan yang merupakan perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan perolehan lain yang sah seperti hibah dan penerimaan fasilitas umum. (2) pengurangan yang merupakan nilai Aset Tetap yang dihapuskan. (3) karena perpindahan (*reclass*) antar SKPD dan antar jenis karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan. dan (4) koreksi atas pencatatan Aset Tetap sebelumnya.

Rincian Aset Tetap pada masing-masing SKPD Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2024 disajikan pada lampiran 25.

Mutasi Aset Tetap Kabupaten Lampung Barat selama Tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 213. Mutasi Aset Tetap Tahun 2024

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo Per 31 Desember 2023	**4.201.074.228.511,49**
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal	155.348.663.663,00
Belanja Lainnya	36.723.000,00
Penyelesaian KDP	0,00
Hibah	37.054.861.451,00
Reklasifikasi/ Koreksi 1	1.927.067.000,00
Reklasifikasi/ Koreksi 2	702.365.200,00
Mutasi OPD	43.090.921.207,00
Jumlah Mutasi Tambah	**238.160.621.521,00**
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal Extra Comptable	741.379.400,00
Belanja Modal Non Aset	621.561.600,00

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Belanja Modal Aset Tak Berwujud	197.480.000,00
Belanja Modal Aset Lain-Lain	0,00
Hibah Non Aset	0,00
Penghapusan/Koreksi Pencatatan	0,00
Pengherhian Aset	9.029.968.075,00
Reklasifikasi/ Koreksi 1	7.959.070.000,00
Reklasifikasi/ Koreksi 2	0,00
Penyelesaian KDP	0,00
Mutasi OPD	43.090.921.207,00
Jumlah Mutasi Kurang	**61.640.380.282,00**
Total Mutasi	**176.520.241.239,00**
Saldo per 31 Desember 2024	**4.377.594.469.750,49**
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024	(1.837.864.803.718,39)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	**2.539.729.666.032,10**

Perubahan nilai aset tetap adalah sebesar Rp176.520.241.239,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penambahan nilai aset sebesar Rp238.160.621.521,00 terdiri dari:

1. Realisasi belanja modal sebesar Rp155.348.663.663,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp0,00
   b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp20.116.516.662,00
   c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp88.928.047.259,00
   d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp41.372.206.332,00
   e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.734.413.410,00
   f. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp197.480.000,00

   Realisasi belanja modal sebesar Rp155.348.663.663,00 sesuai LRA tersebut, dicatatkan sebagai Aset Tetap sebesar Rp153.788.242.663,00 sedangkan sebesar Rp1.560.421.000,00 tidak dicatatkan sebagai Aset Tetap. Realisasi belanja modal sebesar Rp1.560.421.000,00 yang tidak dicatatkan sebagai Aset Tetap tersebut, dirinci sebagai berikut:
   a. Belanja Modal yang menjadi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp197.480.000,00
   b. Belanja Modal yang menjadi aset Ekstra Komptabel sebesar Rp741.379.400,00
   c. Belanja Modal yang tidak menjadi aset sebesar Rp621.561.600,00

2. Belanja Lainnya berasal dari Belanja Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp36.723.000,00 berupa komputer/laptop, alat kantor dan rumah tangga, dan bangunan gedung pada Badan Kesbangpol, Badan Kepegawaian dan PSDM, dan Kecamatan Batu Brak.

3. Hibah sebesar Rp37.054.861.451,00 berupa:
   a. Hibah Tanah sebesar Rp154.350,00
   b. Hibah Peralatan dan Mesin pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp128.261.000,00
   c. Hibah Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp10.059.194,00
   d. Hibah Peralatan dan Mesin pada puskesmas se-Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp182.250.000,00
   e. Hibah berupa aset Jalan, Jaringan dan Irigasi pada PPKD sebesar Rp36.734.136.907,00.

4. Reklasifikasi/koreksi 1 sebesar Rp1.927.087.000,00 berupa Koreksi nilai aset di neraca pada Pengelola Barang berupa reklasifikasi/perubahan nama aset tanah dari Tanah PMI menjadi Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan sebesar Rp1.047.000.000,00 dan koreksi nilai Bangunan Gedung Pendidikan sebesar Rp880.087.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Reklasifikasi/koreksi 2 sebesar Rp702.365.200,00 berupa pencatatan nilai aset di neraca atas perolehan aset Tanah dan Bangunan Gedung, terdiri dari:
   a. Tanah Bangunan RSUD Alimuddin Umar (belum bersertifikat) seluas 27.972 meter persegi dengan nilai perolehan sesuai NJOP sebesar Rp559.440.000,00
   b. Tanah bangunan pendidikan dan latihan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Tanah Sanggar Kegiatan Belajar Kec. Sumber Jaya sebesar Rp15.000.000,00
   c. Bangunan gedung pendidikan dan latihan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Tanah Sanggar Kegiatan Belajar Kec. Sumber Jaya sebesar Rp56.700.000,00
   d. Tanah bangunan rumah negara golongan II pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Tanah perumahan guru SDN 2 Tapak Siring Kec. Sukau sebesar Rp3.775.200,00
   e. Rumah negara golongan II tipe 48 pada Pengelola Barang sebesar Rp28.650.000,00 dan
   f. Rumah negara golongan II tipe 36 pada Pengelola Barang sebesar Rp38.800.000,00.
6. Mutasi Aset sebesar Rp43.090.921.207,00 yang terdapat pada beberapa OPD, terdiri dari:
   a. Mutasi tambah Peralatan dan mesin sebesar Rp2.974.724.995,00.
   b. Mutasi tambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.628.431.925,00.
   c. Mutasi tambah Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp38.487.764.287,00.

b. Pengurangan nilai Aset Tetap sebesar Rp61.640.380.282,00 terdiri dari:

1. Belanja Modal yang menjadi aset Ekstra Comptable sebesar Rp741.379.400,00
2. Belanja Modal yang tidak menjadi aset/non aset sebesar Rp621.561.600,00
3. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp197.480.000,00
4. Penghentian aset tetap sebesar Rp9.029.968.075,00 terdiri dari:
   a. Aset Tetap Tanah sebesar Rp567.063.815,00
   b. Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.609.460.560,00
   c. Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.717.717.700,00
   d. Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp135.726.000,00
5. Reklasifikasi/Koreksi 1 sebesar Rp7.959.070.000,00 terdiri dari:
   a. Reklasifikasi Aset Tanah pada Pengelola Barang sebesar Rp1.047.000.000,00 atas perubahan nama dan luas dari sebelumnya tanah PMI menjadi Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan.
   b. Reklasifikasi Aset Bangunan Gedung pada Dinas Kepemudaan, Pariwisata, dan Olah Raga sebesar Rp6.912.070.000,00 karena pencatatan ganda.
6. Mutasi Kurang Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp43.090.921.207,00 yang terdapat pada beberapa OPD, terdiri dari:
   a. Mutasi tambah Peralatan dan mesin sebesar Rp2.974.724.995,00.
   b. Mutasi tambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.628.431.925,00.
   c. Mutasi tambah Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp38.487.764.287,00.

5.3.1.3.1. Tanah

Saldo Aset Tetap berupa Tanah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp652.407.269.415,00 dan Rp652.395.963.680,00 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp11.305.735,00 atau 0,0017%. Terdapat 1 (satu) objek/persil tanah kosong eks. BUMD Pesagi Mandiri (berlokasi di Pasar Lama Kecamatan Sekincau) dengan luas 3.379 m² senilai Rp3.361.996.000,00 merupakan objek tanah bermasalah (dalam sengketa) dengan pihak lain (Umar Jogja, dkk) sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No. 26/G/2015/PTUN-BL tanggal 22 Desember 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Medan No.54/B/2016/PTTUN-MDN tanggal 16 Mei 2016. Tercatat juga 1 (satu) objek/persil tanah Bangunan Tempat Pendidikan dan Latihan dengan luas 2.555 m² senilai Rp27.500.000,00 yang masih dipergunakan oleh sekolah swasta (SMP Roworejo Kecamatan Suoh) belum dilengkapi dengan Surat perjanjian pinjam pakai.

Aset Tanah dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sampai dengan 31 Desember 2024 berjumlah 843 bidang/persil. Dari jumlah tersebut belum semua bidang tanah dilengkapi dengan Sertifikat Hak Pakai, beberapa bidang tanah masih dicatat berdasarkan akta jual beli, akta hibah, dan dalam bentuk penguasaan. Rincian tersebut dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 214. Bukti Kepemilikan Aset Tanah Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Bidang/Persil
(1)	(2)	(3)
1.	Sertifikat Hak Pakai	414
2.	Akta Jual Beli	1
3.	Akta Hibah	11
4.	Belum dilengkapi bukti kepemilikan	417
	Jumlah	843

Rincian bidang tanah sesuai dengan bukti kepemilikannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 26.

Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap adalah Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset Tetap Tanah Per SKPD pada periode TA.2024 dan TA.2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 27.

Pada tahun 2024 telah dilakukan pengsertifikasian tanah sebanyak 12 bidang dengan total luas bidang 299.579 meter persegi. dengan penambahan sertifikat sebanyak 14 Buku. Adapun atas lokasi tanah yang belum terdapat bukti kepemilikan akan dilakukan proses pensertifikatan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah.

Mutasi Aset Tetap berupa Tanah Kabupaten Lampung Barat selama tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 215. Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2024

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo Per 31 Desember 2023	**652.395.963.680,00**
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal	0,00
Belanja Lainnya	0,00
Hibah	154.350,00
Reklasifikasi/ Koreksi 1	1.047.000.000,00
Reklasifikasi/Koreksi 2	578.215.200,00
Mutasi OPD	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	**1.625.369.550,00**
Mutasi Kurang :	
Penghentian Aset	567.063.815,00
Reklasifikasi/ Koreksi 1	1.047.000.000,00
Reklasifikasi/ Koreksi 2	0,00
Mutasi OPD	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	**1.614.063.815,00**
Total Mutasi	**11.305.735,00**
Saldo per 31 Desember 2024	**652.407.269.415,00**

Perubahan nilai aset tetap tanah senilai Rp11.305.735,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi tambah aset tetap tanah sebesar Rp1.625.369.550,00 terdiri dari:
   1. Hibah pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp154.350,00 terdiri dari:
      a. Tanah Bangunan Laboratorium (Alat pengujian kualitas air secara kontinyu) dengan luas 9 meter persegi dengan nilai perolehan sebesar Rp64.350,00 berlokasi di Pekon Lombok, Kec. Lumbok Seminung berdasarkan Surat Keterangan Hibah an. Rohmadi tanggal 3 Juli 2024.

b. Tanah Bangunan Laboratorium (Alat pengujian kualitas air secara kontinyu) dengan luas 9 meter persegi dengan nilai perolehan sebesar Rp90.000,00 berlokasi di Pekon Kerang, Kec. Batu Brak. berdasarkan Surat Keterangan Hibah an. Anggi Aldilla tanggal 12 September 2023.

2. Reklasifikasi/koreksi 1 sebesar Rp1.047.000.000,00 berasal dari koreksi pencatatan aset tanah pada Pengelola Barang yang sebelumnya bernama Tanah PMI menjadi Aset Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan beserta perubahan luasannya karena sebagian tanahnya telah dihibahkan pada Tahun 2023.

3. Reklasifikasi/koreksi 2 sebesar Rp578.215.200,00 terdiri dari:
   a. Tanah Bangunan Rumah Sakit Alimuddin Umar seluas 27.972 meter persegi dengan nilai perolehan sebesar Rp559.440.000,00 pada RSUD Alimuddin Umar.
   b. Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan SKB Sumber Jaya seluas 1.500 meter persegi dengan nilai perolehan sebesar Rp15.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
   c. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II berupa perumahan guru SDN 2 Tapak Siring Kec. Sukau seluas 528 meter persegi dengan nilai perolehan sebesar Rp3.775.200,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Mutasi Kurang Aset Tanah Sebesar Rp1.614.063.815,00 terdiri dari:

1. Penghentian Aset Tanah sebesar Rp567.063.815,00 berupa Tanah yang akan dipindahtangankan melalui proses hibah ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Pemerintah Provinsi Lampung. Penghentian aset tanah ini berdasarkan Naskah Hibah Nomor: 030/63/IV.01/2024 tanggal 17 Januari 2024 dan Berita Acara Serah Terima Hibah BMD Nomor: 030/64/IV.01/2024 tanggal 17 Januari 2024 kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Naskah Hibah Nomor: 030/219/IV.01/2024 tanggal 30 Desember 2024 dan Berita Acara Serah Terima Hibah BMD Nomor: 030/220/IV.01/2024 tanggal 30 Desember 2024 kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Rincian atas aset tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran 28.

2. Reklasifikasi/koreksi 1 sebesar Rp1.047.000.000,00 berasal dari koreksi pencatatan aset tanah pada Pengelola Barang yang sebelumnya bernama Tanah PMI menjadi Aset Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan beserta perubahan luasannya karena sebagian tanahnya telah dihibahkan pada Tahun 2023.

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp496.992.316.759,69 dan Rp478.161.840.538,69 mengalami peningkatan sebesar Rp18.830.476.221,00 atau 3,94%.

Terdapat aset berupa 69 (enam puluh sembilan) unit kendaraan roda 3, roda 4, dan roda 6 senilai Rp4.892.980.400,00 yang diserahkan oleh Dinas Perhubungan dan dipergunakan oleh kelompok tani di Kabupaten Lampung Barat tetapi belum dilengkapi dengan Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang, dengan rincian:

Tabel 216. Aset Tetap – Kendaraan yang Belum Dilengkapi Naskah Hibah dan BAST

No	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	5	6
1.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Isuzu/Dmax/BE 8078 MZ	2009	323.832.500,00
2.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Isuzu/Dmax/BE 9054 MZ	2009	323.832.500,00
3.	1.3.2.02.01.03.001.	Truck	Mitsubishi/FE74HD/BE 9357 MZ	2009	295.000.000,00
4.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Isuzu/TBR 54 Turbo /BE 9361 MZ	2010	145.043.000,00
5.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Isuzu/TBR 54 Turbo /BE 9363 MZ	2010	145.043.000,00
6.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Isuzu/TBR 54 Turbo /BE 9364 MZ	2010	145.043.000,00
7.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9366 MZ	2011	149.600.000,00
8.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9367 MZ	2011	149.600.000,00
9.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9368 MZ	2011	149.600.000,00
10.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9369 MZ	2011	149.600.000,00
11.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9370 MZ	2011	149.600.000,00
12.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9372 MZ	2011	149.607.000,00

No	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	5	6
13.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9373 MZ	2011	149.600.000,00
14.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9374 MZ	2011	149.600.000,00
15.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9375 MZ	2011	149.600.000,00
16.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9376 MZ	2011	149.600.000,00
17.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6084 MZ	2012	19.587.750,00
18.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6085 MZ	2012	19.587.750,00
19.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6086 MZ	2012	19.587.950,00
20.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6087 MZ	2012	19.587.750,00
21.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6091 MZ	2012	19.587.750,00
22.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6092 MZ	2012	19.587.750,00
23.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6093 MZ	2012	19.587.750,00
24.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6094 MZ	2012	19.587.750,00
25.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6095 MZ	2012	19.587.750,00
26.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6096 MZ	2012	19.587.950,00
27.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6098 MZ	2012	19.587.750,00
28.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6099 MZ	2012	19.587.750,00
29.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6102 MZ	2012	19.587.750,00
30.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6103 MZ	2012	19.587.750,00
31.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6104 MZ	2012	19.587.750,00
32.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6105 MZ	2012	19.587.750,00
33.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6106 MZ	2012	19.587.750,00
34.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6108 MZ	2012	19.587.750,00
35.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6110 MZ	2012	19.587.750,00
36.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6112 MZ	2012	19.587.750,00
37.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6113 MZ	2012	19.587.750,00
38.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6114 MZ	2012	19.587.750,00
39.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6115 MZ	2012	19.587.750,00
40.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6117 MZ	2012	19.587.750,00
41.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6118 MZ	2012	19.587.750,00
42.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6119 MZ	2012	19.587.750,00
43.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6121 MZ	2012	19.587.750,00
44.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6122 MZ	2012	19.587.750,00
45.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6123 MZ	2012	19.587.750,00
46.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6126 MZ	2012	19.587.750,00
47.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6127 MZ	2012	19.587.750,00
48.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6128 MZ	2012	19.587.750,00
49.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6129 MZ	2012	19.587.750,00
50.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6130 MZ	2012	19.587.750,00
51.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6131 MZ	2012	19.587.750,00
52.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6132 MZ	2012	19.587.750,00
53.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6133 MZ	2012	19.587.750,00
54.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6134 MZ	2012	19.587.750,00
55.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6135 MZ	2012	19.587.750,00
56.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6136 MZ	2012	19.587.750,00
57.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6137 MZ	2012	19.587.750,00
58.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6139 MZ	2012	19.587.750,00
59.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6140 MZ	2012	19.587.750,00
60.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6141 MZ	2012	19.587.750,00
61.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6142 MZ	2012	19.587.750,00
62.	1.3.2.02.01.05.002.	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar/Triseda/BE 6143 MZ	2012	19.587.750,00
63.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9389 MZ	2013	159.734.600,00
64.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9390 MZ	2013	159.734.600,00
65.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9391 MZ	2013	159.734.600,00
66.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9394 MZ	2013	159.734.600,00
67.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9389 MZ	2013	159.734.600,00
68.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9392 MZ	2013	159.734.600,00
69.	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Mitsubishi/L300/BE 9387 MZ	2013	159.734.900,00
				JUMLAH	4.892.980.400,00

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per SKPD pada periode TA 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 29.

Perubahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada periode Tahun 2024 dan 2023 terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 217. Perubahan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	
			Penambahan	Pengurangan		(Rp)	%
1	2	3	4	5	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Alat Besar	14.249.176.119,00	347.290.500,00	0,00	14.596.466.619,00	347.290.500,00	2,44
2	Alat Angkutan	87.938.516.340,00	6.774.099.039,00	2.184.564.739,00	92.528.050.640,00	4.589.534.300,00	5,22
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.852.961.053,00	253.358.639,00	23.750.000,00	6.082.569.692,00	229.608.639,00	3,92
4	Alat Pertanian	3.369.398.872,00	158.840.500,00	0,00	3.528.239.372,00	158.840.500,00	4,71
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	133.953.557.609,08	6.250.447.635,00	661.629.210,00	139.550.376.034,08	5.596.818.425,00	4,18
6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	15.383.615.806,00	1.705.593.650,00	150.701.000,00	16.938.508.456,00	1.554.892.650,00	10,11
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	103.258.092.829,94	2.884.806.310,00	423.690.400,00	105.719.208.739,94	2.461.115.910,00	2,38
8	Alat Laboratorium	34.051.664.999,67	985.727.401,00	253.670.000,00	34.784.722.400,67	733.057.401,00	2,15
9	Alat Persenjataan	463.347.260,00	0,00	14.000.000,00	449.347.260,00	-14.000.000,00	(3,02)
10	Komputer	65.586.148.028,00	3.247.524.993,00	821.015.950,00	68.012.657.071,00	2.426.509.043,00	3,70
11	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	2.321.302.130,00	604.652.012,00	199.680.256,00	2.726.273.886,00	404.971.756,00	17,45
12	Alat Keselamatan Kerja	2.943.146.539,00	189.317.000,00	33.734.000,00	3.098.729.539,00	155.583.000,00	5,29
13	Alat Peraga	1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00	0,00	0,00
14	Peralatan Proses/Produksi	138.439.985,00	0,00	0,00	138.439.985,00	0,00	0,00
15	Rambu - Rambu	4.685.950.706,00	110.275.000,00	0,00	4.796.225.706,00	110.275.000,00	2,35
16	Peralatan Olah Raga	3.965.461.262,00	75.979.097,00	0,00	4.041.440.359,00	75.979.097,00	1,92
	JUMLAH	**478.161.840.538,69**	**23.596.911.776,00**	**4.766.435.555,00**	**496.992.316.759,69**	**18.830.476.221,00**	**3,94**

Mutasi Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 218. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Belanja Modal sesuai LRA	**20.116.516.662,00**
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	(164.460.137,00)
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi	(673.244.900,00)
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	(172.235.000,00)
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
Belanja Modal Non Aset	(723.593.180,00)
Belanja Modal Extra Comptable	(425.616.900,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menjadi asset KIB B	**17.957.346.545,00**
Belanja Modal direklasifikasi dari aset:	**2.142.797.042,00**
- Belanja Modal Tanah Rp0,00 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp2.040.737.042,00 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp102.060.000,00	
Belanja Modal yang menjadi aset tetap Peralatan dan Mesin	
Saldo per 31 Desember 2023	**478.161.840.538,69**
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal	17.957.346.545,00
Belanja Modal di Reklasifikasi	2.142.797.042,00
Belanja Lainnya	19.223.000,00
Hibah	320.570.194,00
Reklasifikasi/ Koreksi 1	0,00
Reklasifikasi/ Koreksi 2	0,00

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Mutasi OPD	2.974.724.995,00
Jumlah Mutasi Tambah	**23.414.661.776,00**
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal Non-Aset	
Penghapusan	
Pengheritan Aset	1.609.460.560,00
Reklasifikasi/ Koreksi 2	0,00
Mutasi OPD	2.974.724.995,00
Jumlah Mutasi Kurang	**4.584.185.555,00**
Total Mutasi 2024	**18.830.476.221,00**
Saldo per 31 Desember 2024	**496.992.316.759,69**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(433.220.113.911,39)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**63.772.202.848,30**

Perubahan nilai Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.830.476.221,00 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

a. Penambahan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp23.414.661.776,00 terdiri dari:

1. Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp17.957.346.545,00 terdiri dari:
   a. Belanja Modal Aset Alat Besar sebesar Rp347.290.500,00
   b. Belanja Modal Aset Alat Angkutan sebesar Rp4.430.973.300,00
   c. Belanja Modal Aset Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp158.139.445,00
   d. Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp158.840.500,00
   e. Belanja Modal Aset Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga sebesar Rp5.473.127.593,00
   f. Belanja Modal Aset Alat Studio dan Alat Komunikasi sebesar Rp456.658.650,00
   g. Belanja Modal Aset Alat Kedokteran sebesar Rp2.322.376.310,00
   h. Belanja Modal Aset Alat Laboratorium sebesar Rp733.057.401,00
   i. Belanja Modal Aset Komputer sebesar Rp3.192.424.993,00
   j. Belanja Modal Aset Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebesar Rp308.886.756,00
   k. Belanja Modal Aset Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp189.317.000,00
   l. Belanja Modal Aset Rambu-Rambu sebesar Rp110.275.000,00
   m. Belanja Modal Aset Peralatan Olah Raga sebesar Rp75.979.097,00

   Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp20.116.516.662,00 sementara penambahan nilai Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal adalah sebesar Rp20.100.143.587,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp16.373.075,00) yang disebabkan oleh reklasifikasi ke dan dari jenis aset lain sesuai dengan Tabel di atas. Reklasifikasi terjadi karena disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dengan penjelasan sebagai berikut:
   a. Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar (Rp164.480.137,00)
   b. Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar (Rp673.244.900,00).
   c. Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp172.235.000,00).
   d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menjadi aset ekstrakontabel sebesar (Rp723.593.180,00).
   e. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak menjadi aset sebesar (Rp425.616.900,00).
   f. Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.040.737.042,00
   g. Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp102.060.000,00.

2. Aset Peralatan dan Mesin yang direklasifikasi dari jenis aset lain Rp2.142.797.042,00 terdiri dari:
   a. Direklasifikasi dari belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.040.737.042,00
   b. Direklasifikasi dari belanja modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp102.060.000,00
3. Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang/Jasa/lainnya sebesar Rp19.223.000,00
4. Hibah sebesar Rp320.570.194,00 dengan rincian:
   a. Hibah 2 unit kendaraan roda dua sebesar Rp52.261.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkah Naskah Hibah Nomor: PRJ-395/BNPB/08/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dan Berita Acara Serah Terima Nomor: BA/ /BNPB/08/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (kurang catat).
   b. Hibah 2 unit kendaraan roda tiga sebesar Rp76.000.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkah Naskah Hibah Nomor: 001/NHD.00.01/PLNNP060200/2024; Nomor: 030/265/NHD/III.13/2024 tanggal 7 November 2024 dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 0012/BAST.00.01/PLNNP060200/2024; Nomor: 030/266/BAST/III.13/2024 tanggal 7 November 2024.
   c. Hibah 1 unit Remote Temperatur Monitoring System (RTMS) sebesar Rp10.059.194,00 pada Dinas Kesehatan berdasarkan Naskah Hibah Nomor: KN.01.08/C.I/4861.235/2024 tanggal 7 Juni 2024 dan Berita Acara Serah Terima Nomor: KN.01.08/C.I/4861.236/2024 tanggal 7 Juni 2024.
   d. Hibah 15 unit Pulse Oximeter dan 15 unit Minar Antropometri Kit sebesar Rp182.250.000,00 pada puskesmas se-Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Hibah Nomor: BJ.01.04/PPK4.1/642/2023 tanggal 24 November 2023 dan Berita Acara Serah Terima Barang Hibah Nomor: BJ.01.04/PPK4.1/177/2023 tanggal 18 September 2023.
5. Mutasi tambah antar OPD sebesar Rp2.974.724.995,00 terletak pada beberapa OPD Pemerintah Kab. Lampung Barat.

b. Pengurangan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.584.185.555,00 terdiri dari:
   1. Penghentian Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.609.460.560,00 yang terdapat pada 8 OPD se-kabupaten Lampung Barat. Penghentian aset ini dilakukan karena barang tersebut dalam kondisi rusak berat dan akan dilakukan penghapusan melalui mekanisme pemindahtanganan/lelang dan dimusnahkan dengan cara dikubur. Penghentian aset ini berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: B/381/KPTS/IV.01/2024 tanggal 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:
      a. Badan Keuangan Aset Daerah sebesar Rp679.397.150,00
      b. Badan Kepegawaian dan PSDM sebesar Rp144.830.500,00
      c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp109.350.200,00
      d. Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp4.700.000,00
      e. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp433.079.800,00
      f. Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan sebesar Rp26.605.510,00
      g. RSUD Alimuddin Umar sebesar Rp68.470.400,00 dan
      h. Satuan Pol. PP sebesar Rp143.027.000,00
   2. Mutasi Kurang Aset yang disebabkan oleh mutasi antar OPD sebesar Rp2.974.724.995,00 yang terdapat pada beberapa OPD se-Kabupaten Lampung Barat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 30.

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp962.812.710.355,34 dan Rp934.369.585.791,34 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp28.443.124.564,00 atau 3,04%.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per SKPD pada periode TA 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 31.

Perubahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada periode Tahun 2024 dan 2023 terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 219. Perubahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2023	Mutasi		31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	
			Penambahan	Pengurangan		(Rp)	%
1	2	3	4	5	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Bangunan Gedung	905.410.045.952,43	43.903.824.690,00	14.784.651.625,00	933.629.219.017,43	28.219.173.065,00	3,12
2	Monumen	10.737.145.845,00	0,00	0,00	10.737.145.845,00	0,00	0,00
3	Tugu Titik Kontrol/Pasti	18.222.393.993,91	697.519.499,00	473.568.000,00	18.446.345.492,91	223.951.499,00	1,23
	JUMLAH	**934.369.585.791,34**	**43.701.344.189,00**	**15.258.219.625,00**	**962.812.710.355,34**	**28.443.124.564,00**	**3,04**

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah melakukan sensus gedung dan bangunan terakhir pada tahun 2007 dan setelah tahun tersebut belum pernah dilakukan kembali sensus serupa atas aset yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan mengupayakan melakukan inventarisasi secara khusus atas bangunan pendidikan yang ada dan hasilnya akan dicatatkan pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel 220. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Belanja Modal sesuai LRA	**88.928.047.259,00**
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin	(2.040.737.042,00)
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi	(4.937.534.122,00)
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	0,00
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	(40.896.486.748,00)
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
Belanja Modal Extra Comptable	(12.786.220,00)
Belanja Modal Non Aset	(153.808.000,00)
Belanja Modal yang menjadi aset Gedung dan Bangunan	**40.886.695.127,00**
Belanja Modal direklasifikasi dari jenis aset lainnya:	**164.480.137,00**
- Belanja Modal Tanah Rp0,00 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp164.480.137,0 - Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp0,00 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp0,00	
Saldo Per 31 Desember 2023	**934.369.585.791,34**
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal	40.886.695.127,00
Belanja Modal Direklasifikasi	164.480.137,00
Belanja Lainnya	17.500.000,00
Penyelesaian KDP	0,00
Hibah	0,00
Reklasifikasi/koreksi 1	880.087.000,00
Reklasifikasi/koreksi 2	124.150.000,00
Mutasi OPD	1.628.431.925,00
Jumlah Mutasi Tambah	**43.701.344.189,00**
Mutasi Kurang :	
Penghentian Aset	6.717.717.700,00

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Koreksi/Reklasifikasi 2	6.912.070.000,00
Penghapusan	0,00
Mutasi OPD	1.628.431.925,00
Jumlah Mutasi Kurang	**15.258.219.625,00**
Total Mutasi 2024	**28.443.124.564,00**
Saldo per 31 Desember 2024	**962.812.710.355,34**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(186.537.136.790,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**776.275.573.565,34**

Nilai Aset Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp28.443.124.564,00 terdiri dari:

a. Penambahan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp43.701.344.189,00 terdiri dari:
   1. Realisasi belanja modal sebesar Rp40.886.695.127,00 terdiri dari:
      a) Bangunan Gedung (C1) sebesar Rp40.189.175.628,00
      b) Tugu Titik Kontrol/Pasti (C4) sebesar Rp697.519.499,00.

      Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp88.928.047.259,00 sementara penambahan nilai Aset Gedung dan Bangunan dari belanja modal sebesar Rp41.051.175.264,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp47.876.871.995,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:

      a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke jenis aset lain sebesar Rp48.041.352.132,00. Reklasifikasi terjadi karena disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, terdiri daridengan rincian:
         1) Direklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.040.737.042,00 sesuai dengan lampiran 32
         2) Direklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp4.937.534.122,00 sesuai dengan lampiran 33
         3) Direklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp40.896.486.748,00 sesuai dengan lampiran 34
         4) Direklasifikasi ke Aset Exstrakomtabel sebesar Rp12.786.220,00 sesuai dengan lampiran 35
         5) Direklasifikasi menjadi barang non aset sebesar Rp153.808.000,00 sesuai dengan Lampiran 36
   2. Belanja Modal dari jenis aset lain yang direklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp164.480.137,00 sesuai dengan lampiran 37
   3. Belanja Lainnya berupa Belanja Barang dan Jasa (belanja pemeliharaan) sebesar Rp17.500.000,00 pada Badan Kepegawaian dan PSDM berupa Tempat Parkir Semi Permanen.
   4. Reklasifikasi/koreksi 1 sebesar Rp880.087.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa reklasifikasi pencatatan pemeliharaan bangunan gedung yang sebelumnya tercatat pada Aset Lain-Lain
   5. Reklasifikasi/koreksi 2 sebesar Rp124.150.000,00 dengan rincian:
      a. Bangunan Gedung Pendidikan sebesar Rp56.700.000,00 berupa Bangunan SKB Kec. Sumber Jaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
      b. Rumah Negara Golongan II tipe 48 sebesar Rp28.650.000,00 pada Pengelola Barang
      c. Rumah Negara Golongan II tipe 36 sebesar Rp38.800.000,00 pada Pengelola Barang
   6. Mutasi Tambah SKPD sebesar Rp1.628.431.925,00 pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata dan Sekretariat Daerah, dengan rincian sesuai Lampiran 38

b. Pengurangan nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp15.258.219.625,00 terdiri dari:
   1. Penghentian asset sebesar Rp6.717.717.700,00 dengan rincian (Lampiran 39):

a. Penghentian aset sebesar Rp1.290.785.700,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
b. Penghentian aset sebesar Rp5.126.342.000,00 pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan.
c. Penghentian aset sebesar Rp300.590.000,00 pada Pengelola Barang.

2. Reklasifikasi/Koreksi 1 sebesar Rp6.912.070.000,00
3. Berasal dari mutasi antar OPD sebesar Rp1.628.431.925,00 pada Dinas PUPR, sesuai Lampiran 40.

5.3.1.3.4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Aset Tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.147.722.976.063,07 dan Rp2.064.141.579.802,07 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp83.581.396.261,00 atau 4,05%.

Jalan, jaringan, dan irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut: (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan; (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya; (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya. Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 41.

Berikut disajikan tabel Perubahan Nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2024

Tabel 221. Perubahan Nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Per 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2023	Mutasi		31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	
			Penambahan	Pengurangan		(Rp)	%
1	2	3	4	5	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Jalan dan Jembatan	1.557.033.703.271,40	44.712.439.502,00	3.279.630.000,00	1.598.466.512.773,40	41.432.809.502,00	2,66
2	Bangunan Air	418.181.007.419,67	6.530.525.837,00	434.353.380,00	424.277.179.876,67	6.096.172.457,00	1,46
3	Instalasi	47.508.617.991,00	59.698.327.209,00	29.277.709.907,00	77.929.235.293,00	30.420.617.302,00	0,00
4	Jaringan	41.418.251.120,00	11.263.594.000,00	5.631.797.000,00	47.050.048.120,00	5.631.797.000,00	13,60
JUMLAH		2.064.141.579.802,07	122.204.886.548,00	38.623.490.287,00	2.147.722.976.063,07	83.581.396.261,00	4,05

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui PUPR telah menerbitkan Keputusan Bupati Nomor: B/323/KPTS/III.03/2024 tanggal 4 Desember 2023 tentang Ruas Jalan Kabupaten, terdiri dari 147 ruas jalan dengan panjang 668,90 kilometer, dan Keputusan Bupati Nomor: B/273/KPTS/II.08/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Desa (Pekon), terdiri dari 321 ruas sepanjang 382,40 kilometer.

Mutasi Aset Tetap berupa Jalan, Jaringan, dan Irigasi Kabupaten Lampung Barat selama tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 222. Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2024

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Belanja Modal sesuai LRA	**41.372.206.332,00**
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin	0,00
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	0,00
Belanja Modal Non Aset	**0,00**
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset KDP	0,00
Belanja Modal Non Aset	0,00
Belanja Modal yang menjadi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	**41.372.206.332,00**
Belanja Modal direklasifikasi dari aset:	**5.610.779.022,00**
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp673.244.900,00	
- Belanja Modal Bangunan Gedung Rp4.937.534.122,00	
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp0,00	

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo Per 31 Desember 2023	**2.064.141.579.802,07**
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal	41.372.206.332,00
Belanja Modal Direklasifikasi	5.610.779.022,00
Belanja Lainnya	0,00
Reklasifikasi/ Koreksi 2	0,00
Penyelesaian KDP	0,00
Hibah	36.734.136.907,00
Mutasi OPD	38.487.764.287,00
Jumlah Mutasi Tambah	**122.204.886.548,00**
Mutasi Kurang :	
Penghantian Aset	135.726.000,00
Reklasifikasi/ Koreksi 2	0,00
Mutasi OPD	38.487.764.287,00
Jumlah Mutasi Kurang	**38.623.490.287,00**
Total Mutasi 2024	**83.581.396.261,00**
Saldo per 31 Desember 2024	**2.147.722.976.063,07**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(1.215.298.391.757,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**932.424.584.306,07**

Nilai Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami Peningkatan sebesar Rp83.581.396.261,00 terdiri dari:

a. Penambahan nilai aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp122.204.886.548,00 terdiri dari:

1. Realisasi belanja modal sebesar Rp41.372.206.332,00
   - Belanja Modal Jalan dan Jembatan (D1) sebesar Rp36.823.944.502,00
   - Belanja Modal Bangunan Air/Irigasi (D2) sebesar Rp3.093.261.830,00
   - Belanja Modal Instalasi (D3) sebesar Rp1.455.000.000,00.

   Realisasi Belanja Modal sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp41.372.206.322,00 sementara penambahan nilai Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Belanja Modal sebesar Rp46.982.985.354,00 sehingga terjadi selisih lebih sebesar Rp5.610.779.022,00 berasal dari Belanja Modal dari jenis aset lain yang direklasifikasi ke Aset JJI sebesar Rp5.610.779.022,00 Reklasifikasi terjadi karena disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, dengan rincian:
2. Direklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp673.244.900,00, sesuai Lampiran 42.
3. Direklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.937.534.122,00, sesuai Lampiran 43.
4. Hibah dari Kementerian PUPR Republik Indonesia sebesar Rp36.734.136.907,00 terdiri dari:
   a. Hibah peningkatan jalan poros desa dan jalan usaha tani sebesar Rp3.279.630.000,00 pada Pengelola Barang.
   b. Hibah instalasi sebesar Rp33.454.506.907,00 pada Pengelola Barang.
5. Mutasi tambah antar OPD sebesar Rp38.487.764.287,00 yang terdapat pada Dinas TPH, Dinas PUPR, Kec. Sumber Jaya, Kec. Kebun Tebu, Puskesmas Sekincau, Puskesmas Batu Ketulis, dan Puskesmas Srimulyo. Mutasi dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada pada masing-masing OPD. Rincian aset yang dimutasikan tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran 44.

b. Pengurangan nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp38.623.490.287,00 terdiri dari:

1. Penghentian Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp135.726.000,00 berupa 1 unit Bangunan Toilet A dan Bangunan Toilet B pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan. Penghentian aset ini dilakukan karena barang tersebut dihapuskan melalui metode pemusnahan (dihancurkan) sesuai dengan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/381/KPTS/IV.01/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Bangunan Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya,Jalan, Jaringan dan Irigasi.
2. Mutasi kurang antar OPD sebesar Rp38.487.764.287,00 pada Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan Pengelola Barang.

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp74.975.254.591,39 dan Rp70.217.802.881,39 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp4.757.451.710,00 atau 6,78%.

Berikut disajikan tabel Perubahan Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 :

Tabel 223. Perubahan Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	
			Penambahan	Pengurangan		(Rp)	%
1	2	3	4	5	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Bahan Perpustakaan	62.321.033.846,39	4.185.624.310,00	0,00	66.506.658.156,39	4.185.624.310,00	6,72
2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	7.727.764.035,00	571.827.400,00	0,00	8.299.591.435,00	571.827.400,00	7,40
3	Hewan	36.800.000,00	0,00	0,00	36.800.000,00	0,00	0,00
4	Tanaman	132.205.000,00	0,00	0,00	132.205.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**70.217.802.881,39**	**4.757.451.710,00**	**0,00**	**74.975.254.591,39**	**4.757.451.710,00**	**6,78**

Mutasi Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya Kabupaten Lampung Barat tahun selama 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 224. Mutasi Aset Tetap Berupa Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sesuai LRA	**4.734.413.410,00**
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin	(102.060.000,00)
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	0,00
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	0,00
Belanja Modal direklasifikasi ke Aset Ekstrakomptable	(5.000.000,00)
Belanja Modal Non Aset	(42.136.700,00)
Belanja Modal ATL yang menjadi ATL	**4.585.216.710,00**
Belanja Modal direklasifikasi dari aset:	**172.235.000,00**
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp118.622.000,00	
Saldo Per 31 Desember 2023	**70.217.802.881,39**
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal	4.585.216.710,00
Belanja Lainnya	172.235.000,00
Hibah	0,00
Reklasifikasi/ Koreksi 1	0,00
Mutasi Pemangkat Daerah	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	**4.757.451.710,00**
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal Non Aset	
Belanja Modal Yang Direklasifikasi	
Reklasifikasi/Koreksi 1	
Penghentian Aset	

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Mutasi Perangkat Daerah	
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Total Mutasi 2024	4.757.451.710,00
Saldo per 31 Desember 2024	74.975.254.591,39
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	(2.809.161.260,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	72.166.093.331,39

Nilai Aset Tetap Berupa Aset Tetap Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp4.757.451.710,00 terdiri dari:

a. Penambahan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp4.757.451.710,00 terdiri dari:

1. Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.585.216.710,00 terdiri dari:
   a) Bahan Perpustakaan (E1) sebesar Rp4.107.936.800,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
   b) Bahan Perpustakaan (E1) sebesar Rp53.492.510,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
   c) Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan (E2) sebesar Rp418.787.400,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
   d) Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan (E2) sebesar Rp5.000.000,00 pada Kelurahan Sekincau.
2. Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp172.235.000,00 pada Puskesmas Sekincau dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dari jumlah aset tetap lainnya sebesar Rp74.975.254.591,39 tersebut, terdapat aset tetap lainnya berupa buku pelajaran SD, Multimedia pembelajaran interaktif, buku mewarnai TK, dan sarana penunjang pembelajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diperuntukkan bagi beberapa sekolah swasta senilai Rp155.989.786,00. Aset berupa buku-buku yang telah diserahkan kepada sekolah swasta tersebut akan ditindaklanjuti dengan proses hibah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 225. Aset Tetap Lainnya Diperuntukkan Bagi Sekolah Swasta Tahun 2024

No	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1.3.5.01.01.01.006	Buku Pelajaran SD	SDS Karya Bakti	2010	51.638.393,00
2.	1.3.5.01.01.01.006	Buku Pelajaran SD	SDS Kartini	2010	51.638.393,00
3.	1.3.5.01.01.07.002	Multimedia Pemb Interaktif	SDS Selandau Tengah	2011	6.435.000,00
4.	1.3.5.01.01.08.005	Buku Mewarnai TK	TK Sai Betik	2011	1.977.000,00
5.	1.3.5.01.01.08.005	Buku Mewarnai TK	TK Dharma Wanita	2011	1.977.000,00
6.	1.3.5.01.01.08.005	Buku Mewarnai TK	TK DW Pura Jaya	2011	1.977.000,00
7.	1.3.5.01.01.08.005	Buku Mewarnai TK	TK Miftahul Janah	2011	1.977.000,00
8.	1.3.5.01.01.08.005	Buku Mewarnai TK	TK Tunas Bangsa	2011	1.977.000,00
9.	1.3.5.01.01.08.005	Buku Mewarnai TK	TK Citra Danna	2011	1.977.000,00
10.	1.3.5.01.01.08.005	Buku Mewarnai TK	TK Nurul Islam	2011	1.977.000,00
11.	1.3.5.01.01.08.005	Buku Mewarnai TK	TK DW Giham Sukamaju	2011	1.977.000,00
12.	1.3.5.01.01.08.005	Buku Mewarnai TK	TK Nurul Islam	2011	1.977.000,00
13.	1.3.5.01.01.08.005	Buku Mewarnai TK	TK Roudhatul Ulum	2011	1.977.000,00
14.	1.3.5.01.01.08.005	Buku Mewarnai TK	TK ABA Sukarame	2011	1.977.000,00
15.	1.3.5.01.01.08.005	Buku Mewarnai TK	TK Kartika II	2011	1.977.000,00
16.	1.3.5.01.01.08.005	Buku Mewarnai TK	TK Bunda Khotijah	2011	1.977.000,00
17.	1.3.5.01.01.08.005	Buku Mewarnai TK	TK DW Tanjung Raya	2011	1.977.000,00
18.	1.3.5.01.01.08.005	Buku Mewarnai TK	TK Nusantara	2011	1.977.000,00
19.	1.3.5.01.01.08.005	Buku Mewarnai TK	TK Bhakti Mulya	2011	1.977.000,00
20.	1.3.5.01.01.08.005	Buku Mewarnai TK	TK DW BN Suoh	2011	1.977.000,00
21.	1.3.5.01.01.01.006	Buku TK	TK Dharma Wanita	2011	1.977.000,00
22.	1.3.5.01.01.01.006	Sarana Penunjang Pembljr	SDS Selandau Tengah	2011	10.692.000,00
				JUMLAH	155.989.786,00

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Rincian Aset Tetap Lainnya per OPD Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 45.

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp42.683.942.566,00 dan Rp1.787.455.818,00 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp40.896.486.748,00 atau 2.287,97%.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, yang proses perolehannya dan/ atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Konstruksi Dalam Pengerjaan hanya terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dinas PUPR melalui surat pernyataan kepala dinas Nomor: 600/40/III.03/2022 tanggal 9 Februari 2022 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan gedung/bangunan serta Jalan, Jaringan dan Irigasi tersebut tidak dilanjutkan pembangunan fisiknya dan diusulkan untuk dihapus.

Berikut tabel perbandingan Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD pada periode TA. 2024:

Tabel 226. Konstruksi Dalam Pengerjaan di Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024

NO	SKPD	Jumlah	Jumlah	Lebih/ (Kurang)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dinas PU	1.709.644.608,00	1.511.364.408,00	198.280.200,00	13,12
2	BPBD	276.091.410,00	276.091.410,00	0,00	0,00
3	Dinas Koperasi, UKM, & Perdagangan	40.698.206.548,00	0,00	40.698.206.548,00	∞
JUMLAH		42.683.942.566,00	1.787.455.818,00	40.896.486.748,00	2.287,97

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran 46.

Mutasi Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Kabupaten Lampung Barat selama tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 227. Mutasi Aset Tetap Berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo Per 31 Desember 2023	1.787.455.818,00
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal	40.896.486.748,00
Reklasifikasi	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	40.896.486.748,00
Mutasi Kurang :	
Penyelesaian KDP	0,00
Penghentian Aset KDP	0,00
Mutasi Perangkat Daerah	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Total Mutasi 2024	40.896.486.748,00
Saldo per 31 Desember 2024	42.683.942.566,00

Perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp40.896.486.748,00 terdiri dari:

1. Mutasi tambah Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp40.896.486.748,00 berasal dari:
   a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan sebesar Rp268.039.924,00 pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan.

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan sebesar Rp35.701.296.333,00 pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan.
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan sebesar Rp198.280.200,00 pada Dinas PUPR berupa pembangunan Gedung Depo Arsip.
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan sebesar Rp4.728.870.291,00 pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan.

Penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp40.698.206.548,00 disebabkan oleh kegiatan pembangunan Pasar Tematik Wisata Jelajah Danau Ranau pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan. Kegiatan pembangunan tersebut belum dapat terselesaikan 100% sampai dengan 31 Desember 2024 sehingga diadakan addendum kontrak perpanjangan masa pengerjaan selama 50 hari kerja. Berdasarkan addendum kontrak tersebut, pembangunan Pasar Tematik Wisata Jelajah Danau Ranau telah dapat terselesaikan 100%, yang mana penyerahannya tahap pertama telah dilakukan terakhir pada tanggal 19 Februari 2025.

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.837.864.803.718,39 dan Rp1.642.130.036.933,04 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp195.734.766.785,35 atau 11,92%.

Akumulasi Penyusutan merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 228. Rincian Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
Peralatan dan Mesin	433.220.113.911,39	401.364.827.559,04	31.855.286.352,35	7,94
Gedung dan Bangunan	186.537.136.790,00	170.968.053.036,00	15.569.083.754,00	9,11
Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.215.298.391.757,00	1.067.135.729.638,00	148.162.662.119,00	13,88
Aset Tetap Lainnya	2.809.161.260,00	2.661.426.700,00	147.734.560,00	5,55
Jumlah	**1.837.864.803.718,39**	**1.642.130.036.933,04**	**195.734.766.785,35**	**11,92**

Nilai perolehan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.377.594.469.750,49 dan apabila disandingkan dengan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp1.837.864.803.718,39) maka nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.539.729.666.032,10.

Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan dan nilai buku kelompok Aset Tetap tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 229. Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2024

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku	
		Rp	%	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4=3/2)	(5=2-3)	(6=5/2)
Tanah	662.407.269.415,00	0,00	0,00	662.407.269.415,00	100,00
Peralatan dan Mesin	496.992.316.759,69	433.220.113.911,39	87,17	63.772.202.848,30	12,83
Gedung dan Bangunan	962.812.710.355,34	186.537.136.790,00	19,37	776.275.573.565,34	80,63
Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.147.722.976.063,07	1.215.298.391.757,00	56,59	932.424.584.306,07	43,41
Aset Tetap Lainnya	74.975.254.591,39	2.809.161.260,00	3,75	72.166.093.331,39	96,25
Konstruksi Dalam Pengerjaan	42.683.942.566,00	0,00	0,00	42.683.942.566,00	100,00
Jumlah	**4.377.594.469.750,49**	**1.837.864.803.718,39**	**41,98**	**2.539.729.666.032,10**	**58,02**

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 telah melakukan penyusutan aset tetap, sedangkan beban penyusutan semester II tahun 2023 Rp38.498.266.037,00 atas beban penyusutan jalan dan jembatan belum dilakukan karena kekeliruan perhitungan dalam kertas kerja, sehingga penyusutan semester II tahun 2023 baru dilakukan pada tahun 2024 dengan mengoreksi ekuitas sesuai dengan Surat Pernyataan Kepala Bidang Barang Milik Daerah Nomor 024/120/IV.01/2025 Tanggal 21 April 2024, Lampiran 49.

5.3.1.4. DANA CADANGAN

5.3.1.4.1. Dana Cadangan

Pada Tahun 2024 dan 2023 Kabupaten Lampung Barat tidak miliki saldo dana cadangan.

5.3.1.5. ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Saldo bersih Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp197.386.200.457,74 mengalami penurunan sebesar (Rp28.053.513.566,65) atau (12,44%) dari saldo aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp225.439.714.024,39 dengan rincian komposisi kelompok Aset Lainnya dan mutasi selama tahun anggaran 2024 yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 230. Rincian Mutasi Aset Lainnya Tahun 2024

NO	URAIAN	Jumlah	Jumlah	Lebih/ (Kurang)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Tagihan Jangka Panjang	9.536.724.645,74	3.508.157.928,39	6.028.566.717,35	171,84
2.	Aset Tidak Berwujud	3.865.476.371,00	3.667.996.371,00	197.480.000,00	5,38
3.	Aset Lain-lain	219.918.057.970,00	217.471.012.300,00	2.447.045.670,00	1,13
4.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.107.357.122,00)	(2.870.439.575,00)	(236.917.547,00)	8,25
5.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(32.978.562.407,00)	0,00	(32.978.562.407,00)	∞
6.	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	151.861.000,00	3.662.987.000,00	(3.511.126.000,00)	(95,85)
	JUMLAH	197.386.200.457,74	225.439.714.024,39	(28.053.513.566,65)	(12,44)

5.3.1.5.1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas Tagihan Penjualan Angsuran dan Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah.

Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (UU 15 Tahun 2006 tentang BPK). Penyajian Piutang Ganti Rugi pada aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Berikut Piutang Tagihan Jangka Panjang disajikan tabel berikut.

Tabel 231. Tagihan Jangka Panjang Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	9.536.724.645,74	3.508.157.928,39	6.028.566.717,35	171,84
Jumlah	9.536.724.645,74	3.508.157.928,39	6.028.566.717,35	171,84

Pada Tahun Anggaran 2024 Tagihan Jangka Panjang mengalami peningkatan sebesar Rp6.028.566.717,35 atau 171,84% apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar

Rp3.508.157.928,39. Peningkatan ini disebabkan karena terdapat beberapa hasil pemeriksaan yang mengakibatkan kewajiban berbagai pihak yang sampai dengan tanggal neraca belum dilakukan pelunasan.

Berikut rincian tagihan jangka panjang berdasarkan tahun pemeriksaan:

1.	Hasil Pemeriksaan Tahun 2023 sebesar	Rp2.768.641.306,65
2.	Hasil Pemeriksaan Tahun 2024 sebesar	Rp6.768.083.339,09
3.	Total	Rp9.536.724.645,74

Lebih detil rincian tagihan jangka panjang tersebut disajikan pada Lampiran 23.

5.3.1.5.2. Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Lainnya berupa aset tak berwujud Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.865.476.371,00 dan Rp3.667.996.371,00 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp197.480.000,00 atau 5,38%. Nilai tersebut adalah nilai sebelum memperhitungkan amortisasi aset tak berwujud senilai (Rp3.107.357.122,00) sehingga nilai buku aset tak berwujud adalah sebesar Rp758.119.249,00.

Aset Tidak Berwujud adalah aset *non-moneter* yang tidak mempunyai wujud fisik dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, Aset Tidak Berwujud menggunakan metode amortisasi garis lurus. Masa manfaat atau umur ekonomis aset tak berwujud ditentukan sesuai objeknya, yang mana untuk Software ditetapkan selama 5 tahun (10 semester) sedangkan untuk Lisensi/frenchise, hak cipta, hak paten, dan kajian ditetapkan selama 10 tahun (20 semester).

Saldo Aset Lainnya berupa Aset Tidak Berwujud Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 232. Aset Lainnya Berupa Aset Tidak Berwujud
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
1. Aset Tidak Berwujud	3.865.476.371,00	3.667.996.371,00	197.480.000,00	5,38
2. Akumulasi Amortisasi ATB	(3.107.357.122,00)	(2.870.439.575,00)	(236.917.547,00)	8,25
Nilai Buku	758.119.249,00	797.556.796,00	(39.437.547,00)	(4,94)

Nilai Aset Tidak Berwujud per OPD tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 47.

Mutasi Aset Lainnya berupa aset tidak berwujud Kabupaten Lampung Barat tahun selama 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 233. Mutasi Aset Lainnya Berupa Aset Tidak Berwujud Tahun 2024

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo per 31 Desember 2023	**3.667.996.371,00**
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal	197.480.000,00
Belanja Lainnya	0,00
Hibah	0,00
Reklasifikasi/ Koreksi	0,00
Mutasi Perangkat Daerah	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	**197.480.000,00**
Mutasi Kurang :	
Penghapusan	0,00

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Penghentian Aset	0,00
Reklasifikasi/ Koreksi	0,00
Mutasi Perangkat Daerah	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	**0,00**
Total Mutasi 2024	**197.480.000,00**
Saldo per 31 Desember 2024	**3.865.476.371,00**
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	(3.107.357.122,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**758.119.249,00**

Nilai Aset Tak Berwujud mengalami peningkatan sebesar Rp197.480.000,00 bersumber dari belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berupa Kajian Resiko Bencana Kabupaten Lampung Barat.

Daftar Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 234. Rincian Aset Lainnya Berupa Aset Tidak Berwujud Per 31 Des 2024

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
(1)	(2)	(2)	(4=2-3)	5=(4/3)
1. Software PKMG	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2. Software Pelayanan Rujukan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
3. Software Manajemen RS	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00
4. Software BPRS	165.660.000,00	165.660.000,00	0,00	0,00
5. Vmware vSphere 6 Essentials	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00
6. Devloy Vmware vSphere 6	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
7. Web Hosting ISP Config	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
8. Zimbra Mail Server	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
9. Aplikasi SIPPD	344.069.091,00	344.069.091,00	0,00	0,00
10. Aplikasi SIG Kawasan Kopi	168.367.000,00	168.367.000,00	0,00	0,00
11. Software Zimbra (Diskominfo)	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	0,00
12. Design Web (Diskominfo)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
13. Software/ Aplikasi Komputer (Dinas Perpustakaan&Arsip)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
14. Software/ Aplikasi Perpustakaan (Dinas Perpustakaan&Arsip)	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00
15. Aplikasi Software Sistem Pelaporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
16. Aplikasi SiAP Online	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00
17. Design Web (BLHKP)	49.526.900,00	49.526.900,00	0,00	0,00
18. Software Weight Bridge	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00
19. Aplikasi Software SAPK	29.875.000,00	29.875.000,00	0,00	0,00
20. Software SIMPEG	321.250.000,00	321.250.000,00	0,00	0,00
21. Software Gaji	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
22. Windows Server	28.820.000,00	28.820.000,00	0,00	0,00
23. Oracle Database standart license dan Oracle database ATS	133.485.000,00	133.485.000,00	0,00	58,94
24. Internet developer suite-license dan IDS ATS	83.957.500,00	83.957.500,00	0,00	0,00
25. Microsoft Visual Studio Pro	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00
26. Matrixc Professional	34.375.000,00	34.375.000,00	0,00	0,00
27. Design Software PSE (KP3M)	122.732.000,00	122.732.000,00	0,00	0,00
28. Software GIS	168.800.000,00	168.800.000,00	0,00	0,00
29. Software Managemen dan Scurity (Dinas Kominfo)	112.350.000,00	112.350.000,00	0,00	0,00
30. Aplikasi Sip-Online	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00
31. Software Kohort	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
32. Digital Library System (DLS)	80.250.000,00	80.250.000,00	0,00	0,00
33. Lisensi Mesin Absensi	48.750.000,00	48.750.000,00	0,00	0,00

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	5=(4/3)
34. Software Pembelajaran	1.677.290,00	1.677.290,00	0,00	0,00
35. Operating System	8.764.850,00	8.764.850,00	0,00	0,00
36. Office	28.693.650,00	28.693.650,00	0,00	0,00
37. Operating System	8.764.850,00	8.764.850,00	0,00	0,00
38. Office	28.693.650,00	28.693.650,00	0,00	0,00
39. Operating System	8.764.850,00	8.764.850,00	0,00	0,00
40. Office	28.693.650,00	28.693.650,00	0,00	0,00
41. MICROSOF	4.894.350,00	4.894.350,00	0,00	0,00
42. Sistem Aplikasi Web	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
43. Shutdown Software	2.601.040,00	2.601.040,00	0,00	0,00
44. Sistem Aplikasi Web	48.950.000,00	48.950.000,00	0,00	0,00
45. Software SIM PKB	189.500.000,00	189.500.000,00	0,00	0,00
46. Kajian Tunjangan Transportasi DPRD	74.250.000,00	74.250.000,00	0,00	0,00
47. Kajian Tunjangan Perumahan DPRD	74.250.000,00	74.250.000,00	0,00	0,00
48. install Aplikasi SIM RS	6.110.000,00	6.110.000,00	0,00	0,00
49. Digital Library System (DLS)	14.940.200,00	14.940.200,00	0,00	0,00
50. Aplikasi Pajak Non-Tunai "PM_SANTUN)	199.800.000,00	199.800.000,00	0,00	0,00
51. Aplikasi Inventarisasi Aset Daerah	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00
52. Aplikasi SIMASET	199.900.000,00	199.900.000,00	0,00	0,00
53. Aplikasi MARKETPLACE (UMKM)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
54. Aplikasi E-Ticketing Kebun Raya Liwa	152.680.500,00	152.680.500,00	0,00	100,00
55. Kajian Resiko Bencana	197.480.000,00	0,00	197.480.000,00	100,00
Harga Perolehan	**3.865.476.371,00**	**3.667.996.371,00**	**197.480.000,00**	5,38
Akumulasi Amortisasi	(3.107.357.122,00)	(2.870.439.575,00)	(236.917.547,00)	8,25
Nilai Buku	**758.119.249,00**	**797.556.796,00**	**(39.437.547,00)**	(4,94)

5.3.1.5.3. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp219.918.057.970,00 dan Rp217.471.012.300,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.447.045.670,00 atau 1,13%.

Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sampai dengan tahun 2024 sebesar (Rp32.978.562.407,00). Nilai akumulasi penyusutan ini diperoleh dari koreksi Akumulasi penyusutan sebagai akibat penghentian aset tetap sejak tahun 2015 sampai dengan 2023 sebesar Rp31.938.376.257,00 dan akumulasi penyusutan sebagai akibat penghentian aset tetap tahun 2024 sebesar Rp1.040.186.150,00. Nilai penyusutan Aset Lain-Lain sebelum Tahun 2015 dan Aset yang pencatatannya secara langsung ditempatkan pada Jenis Aset Lain-Lain tidak dapat ditampilkan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rincian Aset Lain-Lain Per OPD Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 48.

Mutasi Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain Kabupaten Lampung Barat selama tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 235 Mutasi Aset Lainnya Berupa Aset Lain-lain Tahun 2024

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo per 31 Desember 2023	217.471.012.300,00
Mutasi Tambah:	
Hibah	14.203.988.794,00
Reklasifikasi/ Koreksi 1	0,00
Reklasifikasi/ Koreksi 2	0,00
Mutasi OPD	14.203.988.794,00
Penghentian Aset	9.029.968.075,00
Jumlah Mutasi Tambah	**37.437.945.663,00**
Mutasi Kurang :	
Penghapusan	19.906.824.199,00
Reklasifikasi/ Koreksi 1	880.087.000,00
Penghentian Aset	0,00
Mutasi OPD	14.203.988.794,00
Jumlah Mutasi Kurang	**34.990.899.993,00**
Total Mutasi 2024	**2.447.045.670,00**
Saldo per 31 Desember 2024	**219.918.057.970,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(32.978.562.407,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**186.939.495.563,00**

Perubahan nilai Aset Lain-lain sebesar Rp2.447.045.670,00 terdiri dari :

1. Mutasi Tambah Aset lain-Lain sebesar Rp37.437.945.663,00 terdiri dari:
   a. Hibah dari Kementerian PUPR sebesar Rp14.203.988.794,00 berupa Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Pengelola Barang. Pencatatan aset yang berasal dari Hibah Kementerian PUPR Republik Indonesia ke dalam Jenis Aset Lain-Lain dikarenakan aset tersebut akan ditindaklanjuti dengan proses hibah ke masyarakat dan penyertaan modal ke BUMD Perumda Air Minum Limau Kunci.

   b. Mutasi tambah antar OPD sebesar Rp14.203.988.794,00 pada Dinas PUPR.

   c. Penghentian Aset sebesar Rp9.029.968.075,00 dikarenakan aset tersebut telah dihapuskan sesuai dengan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/381/KPTS/IV.01/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Penghapusan Dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Bangunan Gedung, Kendaraan,Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya, Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana terdapat dalam lampiran 25, dengan rincian:
      a) BKAD sebesar Rp679.397.150,00 berupa Aset Peralatan dan Mesin
      b) Badan Kepegawaian dan PSDM sebesar Rp144.830.500,00 berupa Aset Peralatan dan Mesin.
      c) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp1.400.135.900,00 berupa Aset Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan.
      d) Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp4.700.000,00 berupa Aset Peralatan dan Mesin.
      e) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp433.079.800,00 berupa Aset Peralatan dan Mesin.
      f) Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan sebesar Rp5.288.673.510,00 berupa Aset Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi.
      g) Pengelola Barang sebesar Rp300.590.000,00 berupa Aset Gedung dan Bangunan.
      h) RSUD Alimuddin Umar sebesar Rp68.470.400,00 berupa Aset Peralatan dan Mesin.
      i) Sekretariat Daerah sebesar Rp567.063.815,00 berupa Aset Tanah.
      j) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp143.027.000,00 berupa Aset Peralatan dan Mesin.

2. Pengurangan nilai Aset Lain-lain sebesar Rp34.990.899.993,00 terdiri dari:

   a. Penghapusan Aset Lain-lain sebesar Rp19.906.824.199,00. Penghapusan aset ini didasarkan pada Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/381/KPTS/IV.01/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Penghapusan Dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Bangunan Gedung, Kendaraan,Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya, Jalan, Jaringan dan Irigasi, dengan rincian:
      a) Penghapusan Aset Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya Rusak Berat/Usang (1.5.4.01.01.01) sebesar Rp8.079.262.552,00 pada BKAD, BKPSDM, Dinas Perikanan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, RSUD Alimuddin Umar, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 46.
      b) Penghapusan Aset tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya yang tidak dipergunakan pada proses pemerintahan (1.5.4.01.01.02) sebesar Rp11.827.561.647,00 pada Sekretariat Daerah, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Pengelola Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran 47.

   b. Reklasifikasi/koreksi 1 sebesar Rp880.087.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa reklasifikasi rehabilitasi gedung pendidikan ke Aset Gedung dan Bangunan.

   c. Mutasi kurang antar OPD sebesar Rp14.203.988.794,00 pada Pengelola Barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 48

Rincian Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 236 Rincian Aset Lain-lain Berupa Aset Lain-lain Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(2)	(4=2-3)	(5=4/3)
Peralatan dan Mesin rusak berat	12.410.291.557,00	12.213.773.873,00	196.517.684,00	1,61
Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam proses operasional pemerintahan	3.943.582.136,00	3.943.582.136,00	0,00	0,00
Gedung dan Bangunan Rusak Berat	743.526.000,00	1.623.613.000,00	(880.087.000,00)	(54,21)
Gedung dan Bangunan yang tidak dipergunakan	18.610.654.170,00	18.610.654.170,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan rusak berat	6.028.165.710,00	6.028.165.710,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tidak dipergunakan dalam proses operasional pemerintahan	174.887.347.282,00	171.643.266.320,00	3.244.080.962,00	1,89
Aset Tetap Lainnya Rusak Berat	861.090.420,00	974.556.396,00	(113.465.976,00)	(11,64)
Aset Tetap Lainnya yang tidak dipergunakan dalam proses operasional pemerintahan	2.433.400.695,00	2.433.400.695,00	0,00	0,00
Jumlah	**219.918.057.970,00**	**217.471.012.300,00**	**2.447.045.670,00**	**1,13**

5.3.1.5.4. Akumulasi Amortisasai Aset Tidak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.107.357.122,00 dan Rp2.870.439.575,00 mengalami peningkatan sebesar Rp236.917.547,00 atau 8,25%.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud merupakan kontra akun Aset Tidak Berwujud yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tidak Berwujud.

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 237. Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.107.357.122,00	2.870.439.575,00	236.917.547,00	8,25
Jumlah	**3.107.357.122,00**	**2.870.439.575,00**	**236.917.547,00**	**8,25**

Nilai perolehan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.865.476.371,00 dan apabila disandingkan dengan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp3.107.357.122,00) maka nilai buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp758.119.249,00.

Rincian nilai perolehan Aset Tidak Berwujud dan nilai buku Aset Tidak Berwujud tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 238. Nilai Perolehan, Akumulasi Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tidak Berwujud Tahun 2024

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi		Nilai Buku	
		Rp	%	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4=3/2)	(5=2-3)	(6=5/2)
Aset Tidak Berwujud	3.865.476.371,00	3.107.357.122,00	80,39	758.119.249,00	19,61
Jumlah	**3.865.476.371,00**	**3.107.357.122,00**	**80,39**	**758.119.249,00**	**19,61**

5.3.1.5.5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp32.978.562.407,00 dan Rp0,00 mengalami peningkatan sebesar Rp32.978.562.407,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lain-lain yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lain-lain.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 239. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	32.978.562.407,00	0,00	32.978.562.407,00	-
Jumlah	**32.978.562.407,00**	**0,00**	**32.978.562.407,00**	-

Nilai perolehan Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp219.918.057.970,00 dan apabila disandingkan dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar (Rp32.978.562.407,00) maka nilai buku Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp186.939.495.563,00.

Rincian nilai perolehan Aset Lain-lain dan nilai buku Aset Lain-lain tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 240. Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Lain-lain Tahun 2024

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi		Nilai Buku	
		Rp	%	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4=3/2)	(5=2-3)	(6=5/2)
Aset Lain-lain	219.918.057.970,00	32.978.562.407,00	15,00	186.939.495.563,00	85,00
Jumlah	**219.918.057.970,00**	**32.978.562.407,00**	**15,00**	**186.939.495.563,00**	**85,00**

5.3.1.5.6. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda Perihal Pengelolaan DBH dan/atau DAU Melalui Fasilitas TDF yang pada pokoknya mengatur penyesuian kebijakan akuntansi terkait TDF tersebut yaitu : (a) Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF, Pemda mencatat sebagai Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer-DTU DBH/DAU (LO); (b) Dalam hal Bank Indonesia telah memberikan remunerasi atas DBH/DBU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka Pemda mencatat sebagai Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Neraca) pada Pendapatan Bunga Lain-lain PAD Yang Sah atau akun sejenisnya (LO).

Pada tanggal pelaporan Neraca 31 Desember 2024 terdapat Dana TDF Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang telah disetorkan oleh RKUN ke Rekening Nomor 519000289980 atas nama 'Rek. Lain BI TDF TKD Kab Lampung Barat' sebesar Rp151.861.000,00 sesuai dengan Surat Kepala KPPN Liwa Nomor S-21/KPN.0804/2025 tanggal 13 Januari 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 241. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)
Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
1. DBH PBB (Bagian Daerah) - Migas	0,00	102.745.000,00	(102.745.000,00)	(100,00)
2. DBH PBB (Bagian Daerah) – Perkebunan	118.131.000,00	68.703.000,00	49.428.000,00	71,94
3. DBH PBB (Bagian Daerah) – Perhutanan	0,00	6.276.000,00	(6.276.000,00)	(100,00)
4. DBH PBB (Bagian Daerah) – Panas Bumi	0,00	36.444.000,00	(36.444.000,00)	(100,00)
5. DBH PBB (Bagian Daerah) – Minerba	0,00	3.267.000,00	(3.267.000,00)	(100,00)
6. DBH PBB (Bagian Daerah) – Lainnya	0,00	12.453.000,00	(12.453.000,00)	(100,00)
7. DBH PBB (Bagian Daerah) – Sektor Lainnya	17.950.000,00	0,00	17.950.000,00	∞
8. DBH PPh Pasal 21	0,00	787.967.000,00	(787.967.000,00)	(100,00)
9. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29WPOPDN	0,00	4.193.000,00	(4.193.000,00)	(100,00)
10. DBH SDA Minyak Bumi	2.000,00	477.977.000,00	(477.975.000,00)	(100,00)
11. DBH SDA Panas Bumi Set. Bagian Pemerintah	1.000,00	2.002.641.000,00	(2.002.640.000,00)	(100,00)
12. DBH SDA Panas Bumi Iuran Tetap	15.775.000,00	19.072.000,00	(3.297.000,00)	(17,29)
13. DBH SDA Minerba Iuran Tetap	0,00	75.879.000,00	(75.879.000,00)	(100,00)
14. DBH SDA Kehutanan PSDH	2.000,00	65.370.000,00	(65.368.000,00)	(100,00)
Jumlah	**151.861.000,00**	**3.662.987.000,00**	**(3.511.126.000,00)**	**(95,85)**

Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) DBH PBB terdiri atas DBH PBB sektor Migas, Perkebunan, Perhutanan, Panas Bumi, Minerba, Lainnya, serta Sektor Lainnya

1	Saldo Dana TDF Awal Tahun 2024	Rp	3.662.987.000,00
2	Penambahan TDF, sumber : Aplikasi SIKD-NG tanggal 31 Des 2024 (Perpindahan Dana dari RKUN ke Rekening BI milik Kabupaten Lampung Barat) dan Surat KPPN Liwa No.S-21/KPN.0804/2025 Tanggal 13 Januari 2025	Rp	151.861.000,00
3	Penerimaan pada RKUD atas TDF Tahun Lalu	(Rp	3.662.987.000,00)
4	**TDF Akhir Tahun 2024**	**Rp**	**151.861.000,00**

5.3.1.6. PROPERTI INVESTASI

5.3.1.6.1. Properti Investasi Tanah

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 dan 2023 belum memiliki Properti Investasi Tanah, disebabkan karena Kabupaten Lampung Barat belum memiliki Kebijakan Akuntansi tentan Properti Investasi. Saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sedang menyiapkan perubahan Kebijakan Akuntansi tentang Properti Investasi tersebut.

5.3.1.6.2. Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 dan 2023 belum memiliki Properti Investasi Gedung dan Bangunan.

5.3.1.6.3. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Pada Tahun 2024 dan 2023 Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki akumulasi Properti Investasi.

5.3.2. KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pada TA 2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki kewajiban atau tagihan yang harus diselesaikan, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 242. Kewajiban Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kewajiban Jangka Pendek				
	1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	10.228.878,00	172.538.202,15	(162.309.324,15)	(94,07)
	2. Utang Bunga	32.396.851,00	49.299.557,00	(16.902.706,00)	(34,29)
	3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	17.918.063.340,00	17.918.063.340,00	0,00	0,00
	4. Pendapatan Diterima Dimuka	8.483.850.689,25	3.430.680.684,00	5.053.170.005,25	147,29
	5. Utang Belanja	11.130.322.842,00	7.983.610.755,00	3.146.712.087,00	39,41
	6. Utang Jangka Pendek Lainnya	2.454.858.847,00	383.741.686,00	2.071.117.161,00	539,72
	Sub Jumlah	40.029.721.447,25	29.937.934.224,15	10.091.787.223,10	33,71
2	Kewajiban Jangka Panjang				
	1. Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	16.424.888.255,00	34.342.951.595,00	(17.918.063.340,00)	(52,17)
	Sub Jumlah	16.424.888.255,00	34.342.951.595,00	(17.918.063.340,00)	(52,17)
	Jumlah	56.454.609.702,25	64.280.885.819,15	(7.826.276.116,90)	(12,18)

Kewajiban sebesar Rp56.454.609.702,25 lebih rinci disajikan pada lampiran 20.

5.3.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang perhitungan fihak ketiga merupakan pos untuk mencatat kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Utang PFK 31 Desember 2024 dan 2023 pada tabel berikut.

Tabel 243. Utang PFK Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	10.228.878,00	123.274.991,00	(113.046.113,00)	(91,70)
2	Dinas Kesehatan	0,00	49.263.211,15	(49.263.211,15)	(100,00)
	Jumlah	10.228.878,00	172.538.202,15	(162.309.324,15)	(94,07)

Berdasarkan tabel Utang PFK di atas, diketahui utang PFK per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.228.878,00 atau turun sebesar (Rp162.309.324,15) atau (94,07%) dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp172.538.202,15.

Utang PFK Tahun 2023 sebesar Rp172.538.202,15 telah dibayar lunas, sedangkan pada tahun 2024 utang PFK masih ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp10.228.878,00 merupakan atas transaksi kegiatan pada tahun berkenaan.

5.3.2.1.2. Utang Bunga

Utang Bunga (*Accrued Interest*) adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Adapun akun ini merupakan utang bunga atas pinjaman kepada PT SMI periode 26 sampai dengan 31 Desember 2024 atas Perjanjian Nomor PERJ-165/SMI/1021 Tanggal 25 Oktober 2021, bunga 5,66% per annum, bunga dibayarkan setiap tanggal 25.

Utang Bunga Tahun 2024 sebesar Rp32.396.851,00 apabila dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp49.299.557,00 maka mengalami penurunan sebesar (Rp16.902.706,00), perhitungan Utang Bunga disajikan pada Lampiran 52.

Tabel 244. Utang Bunga Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN-Jangka Menengah	32.396.851,00	49.299.557,00	(16.902.706,00)	(34,29)
Jumlah		32.396.851,00	49.299.557,00	(16.902.706,00)	(34,29)

5.3.2.1.3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan sebagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi pelaporan. Adapun akun ini pada TA 2024 merupakan bagian lancar terhadap utang kepada PT SMI sebesar Rp17.918.063.340,00, apabila dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp17.918.063.340,00 maka tidak mengalami perubahan, adapun akun tersebut adalah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Menengah (Utang yang akan jatuh Tempo Januari s.d. Desember 2024 (Rp1.493.171.945 x 12 Bulan = Rp17.918.063.340,00), rincian bagian lancar utang jangka panjang disajikan pada lampiran 21 dan tabel dibawah ini.

Tabel 245. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Bagian lancar utang kepada PT SMI	17.918.063.340,00	17.918.063.340,00	0,00	0,00
Jumlah		17.918.063.340,00	17.918.063.340,00	0,00	0,00

5.3.2.1.4. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pos untuk mencatat pendapatan yang seharusnya belum diterima sampai dengan tanggal neraca tetapi sudah diterima didepan/ dimuka, pada Tahun 2024 ini terdapat pendapatan diterima dimuka total senilai Rp8.483.850.689,25 atau mengalami peningkatan sebesar Rp5.053.170.441,25 atau 147,29% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp3.430.680.684,00. Peningkatan secara signifikan atas pendapatan diterima dimuka ini antara lain karena terdapat lebih bayar Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5.050.283.316,00 (PMK 89/2024). Pendapatan Diterima dimuka dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 246. Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	PPKD				
	1) DBH Pajak Bumi dan Bangunan:				
	- LB DBH Pajak Bumi dan Bangunan - Pertambangan Migas TA 2021	0,00	358.085.000,00	(358.085.000,00)	(100,00)
	- Alokasi LB DBH PBB Bagi Rata TA 2022	69.373.000,00	69.373.552,00	(552,00)	(0,00)
	- Alokasi LB DBH PBB Bagian Daerah Pertambangan Migas TA 2022	489.169.000,00	489.168.909,00	91,00	(0,00)
	- Alokasi LB DBH PBB Bagian Daerah Sektor Lainnya TA 2022	91.213.000,00	91.213.407,00	(407,00)	(0,00)
	- LB DBH Pajak Bumi dan Bangunan BP - Pertambangan Migas TA 2021	0,00	11.936.000,00	(11.936.000,00)	(100,00)
	- LB DBH Pajak Bumi dan Bangunan BP - Pertambangan Migas TA 2022	16.306.000,00	16.306.117,00	(117,00)	(0,00)
	- LB DBH Pajak Bumi dan Bangunan BP - Sek Lainnya TA 2022	3.040.000,00	3.040.708,00	(708,00)	(0,02)
	2) DBH PPh Pasal 21:				
	- Alokasi LB DBH PPh Pasal 21 TA 2023	93.679.000,00	93.679.292,00	(292,00)	(0,00)
	3) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT):				
	- LB DBH CHT TA 2022	4.231.000,00	4.231.146,00	(146,00)	(0,00)
	4) DBH SDA Gas Bumi				
	- LB DBH SDA Gas Bumi TA 2021 30%	139.138.173,00	420.369.609,00	(281.231.436,00)	(66,90)
	- LB DBH SDA Gas Bumi TA 2021 0,5%	2.665.827,00	2.665.827,00	0,00	(0,00)
	5) DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi				
	- Alokasi LB DBH SDA Panas Bumi TA 2021 Iuran Tetap	20.745.900,00	20.745.906,00	(6,00)	(0,00)
	- Alokasi LB DBH SDA Panas Bumi TA 2022 Iuran Tetap	30.489.100,00	30.489.698,00	(598,00)	(0,00)
	- Alokasi LB DBH SDA Panas Bumi TA 2023	1.266.520.000,00	0,00	1.266.520.000,00	∞
	6) DBH SDA Pengusahaan Minyak Bumi				
	- LB DBH SDA Minyak Bumi TA 2023	1.568.770.000,00	0,00	1.568.770.000,00	∞
	7) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara				
	- LB DBH SDA Minerba TA 2022 Iuran Tetap	209.668.000,00	209.668.694,00	(694,00)	(0,00)
	- LB DBH SDA Minerba TA 2023 Iuran Tetap	138.707.000,00	0,00	138.707.000,00	∞
	- LB DBH SDA Minerba TA 2021 Royalti	102.951.100,00	102.951.312,00	(212,00)	(0,00)
	- LB DBH SDA Minerba TA 2022 Royalti	910.508.900,00	910.508.929,00	(29,00)	(0,00)
	8) DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
	- Alokasi LB DBH SDA Kehutanan TA 2021	28.488.000,00	28.488.308,00	(308,00)	(0,00)
	- Alokasi LB DBH SDA Kehutanan TA 2023	63.536.000,00	0,00	63.536.000,00	∞
	9) DBH SDA Perikanan				
	- Alokasi LB DBH SDA Perikanan TA 2021	97.877.600,00	97.877.649,00	(49,00)	∞
	- Alokasi LB DBH SDA Perikanan TA 2022	295.260.400,00	295.260.621,00	(221,00)	∞
	- Alokasi LB DBH SDA Perikanan TA 2023	660.690.000,00	0,00	660.690.000,00	∞
	10) DBH SDA Perkebunana Sawit				
	- Alokasi LB DBH SDA Perkebunan Sawit TA 2023	2.003.317.000,00	0,00	2.003.317.000,00	
	Sub Jumlah	8.306.544.000,00	3.256.260.684,00	5.050.283.316,00	155,09
2.	Badan Pendapatan Daerah				
	- Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah	5.737.500,00	0,00	5.737.500,00	∞
	- Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	∞
	Sub Jumlah	8.237.500,00	0,00	8.237.500,00	∞
3.	RSUD Alimuddin Umar				
	- Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	1.689.189,25	0,00	1.689.189,25	∞
	Sub Jumlah	1.689.189,25	0,00	1.689.189,25	∞
4.	Dinas Koperasi, UMK, Perindag				
	- Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	167.380.000,00	166.920.000,00	460.000,00	0,28
	Sub Jumlah	167.380.000,00	166.920.000,00	460.000,00	0,28
5.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah				
	- Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(100,00)
	Sub Jumlah	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(100,00)
	Jumlah	8.483.850.689,25	3.430.680.684,00	5.053.170.005,25	147,29

Penjelasan rinci Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut:

1. Pendapatan diterima dimuka (Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak ke III) sampai dengan 31 Desember 2024 pada PPKD sebesar Rp8.306.544.000,00 merupakan pencatatan pendapatan transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang lebih bayar kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang berdasarkan PMK 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024, yang masih menjadi lebih bayar oleh pemerintah pusat sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

   Berikut Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat sebesar Rp8.306.544.000,00 sebagai berikut:

1.	Pendapatan Diterima Dimuka (DBH) Pemerintah Pusat – Awal Tahun 2024	Rp	3.256.260.684,00
2.	PMK 89/2024, PMK LB / KB Tahun 2024 atas Transfer 2023 & 2022 (AJP Penambahan Nilai Lebih Bayar)	Rp	5.701.540.091,00
3.	PMK 89/2024, PMK LB / KB Tahun 2024 atas Transfer 2023 & 2022 (AJP Penurunan Nilai Lebih Bayar)	(Rp	651.256.775,00)
4.	Pendapatan Diterima Dimuka (DBH) Pemerintah Pusat – Akhir Tahun 2024	Rp	8.306.544.000,00

2. Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 31 Desember 2024 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp8.237.500,00 merupakan pendapatan sewa atas Bangunan ATM Bank dan sewa atas tanah/ lahan kosong.

3. Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 31 Desember 2024 pada RSUD Alimuddin Umar sebesar Rp1.689.189,25 merupakan pendapatan sewa atas Bangunan ATM Bank.

4. Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 31 Desember 2024 pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp167.380.000,00 merupakan pencatatan pendapatan sewa ruko pada lokasi Hamtebiu sebanyak 12 orang penyewa total sebesar Rp68.080.000,00, pada Kecamatan Way Tenong sebanyak 4 orang sebesar total Rp29.700.000,00, lokasi Pasar Liwa sebanyak 3 orang penyewa total sebesar Rp69.600.000,00.

5.3.2.1.5. Utang Belanja

Utang Belanja merupakan pos untuk mencatat kewajiban atas beban yang sudah terpakai tetapi sampai dengan akhir tahun 2024 belum dibayar/ yang harus diselesaikan senilai Rp11.130.322.842,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp3.146.712.087,00 atau 39,41% dari tahun 2023 sebesar Rp7.983.610.755,00 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 247. Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	101.414.729,00	136.924.250,00	(35.509.521,00)	(25,93)
2.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektif Lainnya ASN	2.086.665.200,00	699.642.600,00	1.387.022.600,00	198,25
3.	Utang Belanja Jasa	615.720.534,00	426.397.213,00	189.323.321,00	44,40
4.	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	7.195.110.479,00	5.773.812.392,00	1.421.298.087,00	24,62
5.	Utang Belanja Bagi Hasil	631.411.900,00	525.513.300,00	105.898.600,00	20,15
6.	Utang Belanja Bantuan Keuangan	500.000.000,00	421.321.000,00	78.679.000,00	18,67
Jumlah		11.130.322.842,00	7.983.610.755,00	3.146.712.087,00	39,41

Tabel 248. Utang Belanja tiap OPD Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	**Dinas Pendidikan**				
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektif Lainnya ASN	1.932.500.000,00	699.642.600,00	1.232.857.400,00	176,21

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	124.013.400,00	0,00	124.013.400,00	∞
	Utang Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	30.151.800,00	0,00	30.151.800,00	∞
	Utang Belanja Barang & Jasa	1.733.210,00	2.304.956,00	(571.746,00)	(24,81)
2.	**Dinas Kesehatan**				
	Utang Belanja Barang & Jasa	202.650.182,00	5.452.034,00	197.198.148,00	3.616,96
	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	690.780.249,00	346.504.540,00	344.275.709,00	99,36
3.	**RSUD Alimuddin Umar**				
	Utang Belanja Barang & Jasa	25.120.900,00	26.724.147,00	(1.603.247,00)	(6,00)
	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	6.504.330.230,00	5.427.307.852,00	1.077.022.378,00	19,84
4.	**Dinas PU PR**				
	Utang Belanja Gaji & Tunjangan	101.414.729,00	76.079.250,00	25.335.479,00	33,30
5.	**Satpol PP**				
	Utang Belanja Barang & Jasa	3.257.997,00	4.387.262,00	(1.129.265,00)	(25,74)
6.	**BPBD**				
	Utang Belanja Barang & Jasa	39.365,00	45.460,00	(6.095,00)	(13,41)
7.	**Dinas Sosial**				
	Utang Belanja Barang & Jasa	1.177.170,00	3.088.654,00	(1.911.484,00)	(61,89)
8.	**Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA**				
	Utang Belanja Barang & Jasa	163.680,00	7.120.994,00	(6.957.314,00)	(97,70)
9.	**Dinas Ketahanan Pangan**				
	Utang Belanja Barang & Jasa	1.131.885,00	1.068.126,00	63.759,00	5,97
10.	**Dinas Lingkungan Hidup (DLH)**				
	Utang Belanja Barang & Jasa	300.878.995,00	300.728.539,00	150.456,00	0,05
11.	**Disdukcapil**				
	Utang Belanja Barang & Jasa	2.958.013,00	3.637.939,00	(679.926,00)	(18,69)
12.	**Dinas PMP**				
	Utang Belanja Barang & Jasa	1.647.876,00	1.641.326,00	6.550,00	0,40
13.	**Dinas Perhubungan**				
	Utang Belanja Barang & Jasa	3.678.266,00	4.349.200,00	(670.934,00)	(15,43)
14.	**Dinas Komunikasi dan Informatika**				
	Utang Belanja Barang & Jasa	1.590.320,00	1.592.136,00	(1.816,00)	(0,11)
15.	**Dinas Koperasi, Perindag**				
	Utang Belanja Barang & Jasa	3.434.042,00	4.298.753,00	(864.711,00)	(20,12)
16.	**DINAS PM, PTSP DAN NAKER**				
	Utang Belanja Barang & Jasa	2.205.305,00	1.213.929,00	991.376,00	81,67
17.	**Dinas Kepemudaan, Olahraga**				
	Utang Belanja Barang & Jasa	1.637.386,00	543.785,00	1.093.601,00	201,11
18.	**Dinas Perpustakaan & KD**				
	Utang Belanja Barang & Jasa	2.423.334,00	2.410.234,00	13.100,00	0,54
19.	**Dinas Perikanan**				
	Utang Belanja Barang & Jasa	1.906.930,00	1.934.202,00	(27.272,00)	(1,41)
20.	**Dinas TPH**				
	Utang Belanja Barang & Jasa	1.529.693,00	1.461.983,00	67.710,00	4,63
21.	**Dinas BUNNAK**				
	Utang Belanja Barang & Jasa	5.825.012,00	6.082.060,00	(257.048,00)	(4,23)
22.	**Sekretariat Daerah**				
	Utang Belanja Barang & Jasa	31.134.456,00	25.075.313,00	6.059.143,00	24,16
23.	**Sekretariat DPRD**				
	Utang Belanja Barang & Jasa	8.464.153,00	11.384.075,00	(2.919.922,00)	(25,65)
24.	**BAPPEDA**				
	Utang Belanja Barang & Jasa	1.108.088,00	1.094.843,00	13.245,00	1,21
25.	**Badan Pendapatan Daerah**				
	Utang Belanja Barang & Jasa	1.339.224,00	0,00	1.339.224,00	∞
26.	**BUD (PPKD)**				
	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	535.336.000,00	426.345.100,00	108.990.900,00	25,56
	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	96.075.900,00	99.168.200,00	(3.092.300,00)	(3,12)

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	421.321.000,00	(421.321.000,00)	(100,00)
	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Pemerintah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	∞
27.	**BKAD**				
	Utang Belanja Barang & Jasa	4.229.046,00	4.927.204,00	(698.158,00)	(14,17)
28.	**BKPSDM**				
	Utang Belanja Barang & Jasa	362.065,00	1.504.611,00	(1.142.546,00)	(75,94)
29.	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**				
	Utang Belanja Barang & Jasa	2.766.205,00	1.012.444,00	1.753.761,00	173,22
30.	**Inspektorat**				
	Utang Belanja Barang & Jasa	89.480,00	91.980,00	(2.500,00)	(2,72)
31.	**Kec. Balik Bukit**				
	Utang Belanja Gaji & Tunjangan	0,00	29.500.000,00	(29.500.000,00)	(100,00)
32.	**Kec. Lumbok Seminung**				
	Utang Belanja Gaji & Tunjangan	0,00	12.470.000,00	(12.470.000,00)	(100,00)
33.	**Kantor Kesatuan Bangsa & Politik**				
	Utang Belanja Gaji & Tunjangan	0,00	18.875.000,00	(18.875.000,00)	(100,00)
	Utang Belanja Barang & Jasa	1.238.256,00	1.221.024,00	17.232,00	1,41
	Jumlah	**11.130.322.842,00**	**7.983.610.755,00**	**3.146.712.087,00**	**39,41**

Lebih rinci utang belanja dijelaskan pada Lampiran 16 dan dengan penjelasan berikut ini.

1. Utang belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.188.079.929,00 terdapat pada:
   - Dinas Pendidikan sebesar Rp2.086.665.200,00 terdiri atas
     a. Utang Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 0749.1204/PLPP.3.2/TP/T/2/2024 tentang Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Untuk Semester 2 (Dua) Tahun Anggaran 2024, sebanyak 6 orang selama 10 bulan total Rp124.013.400,00.

     b. Utang Tunjangan Khusus Guru PNSD (TKG) tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0019.1204/PLPP.3.2/TK/T2/2024 tentang Penerima Tunjangan Khusus Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung untuk Semester 2 (Dua) Tahun Anggaran 2024, sebanyak 9 orang jumlah total sebesar Rp30.151.800,00

     c. Utang Tamsil Guru PNSD tahun 2024 berdasarkan Keputuasn Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Nomor 800/89/III.01/2024 tentang Penerima Tambahan Penghasilan Guru Apratur Sipil Negara Kabupaten Lampung, sebanyak 773 orang x Rp250.000/orang x 10 bulan (maret – desember 2024) total sebesar Rp1.932.500.000,00.
   - Dinas PU PR berupa Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Tahun 2024 Rp101.414.729,00.
2. Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan kewajiban kepada pihak ketiga/ lainnya berupa jasa yang telah dikonsumsi tetapi sampai dengan 31 Desember 2024 belum terbayarkan sebesar Rp615.720.534,00 tersebar pada 29 (dua puluh sembilan) Perangkat Daerah terdiri atas : Tagihan Telpon Rp2.845.357,00; Tagihan Air Rp8.865.781,00; Tagihan Listrik Rp360.012.917,00; Internet/Faksimili/Kawat Rp46.126.619,00, Utang Jaminan Kesehatan Perangkat Kepala Desa dan Perangkat Rp197.869.860,00.
3. Utang belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp7.195.110.479,00 merupakan utang belanja barang/ jasa kepada pihak ketiga/ lainnya terdapat pada: Dinas Kesehatan Rp690.780.249,00

dan pada BLUD RSUD Alimuddin Umar sebesar Rp6.504.330.230,00 antara lain utang SIMRS, Utang Rujukan dan Ambulan, Utang Obat Medis, Utang BHP Medis, Utang BHP Makan Bergizi, Utang Gas Dapur Gizi, Utang Jasa Pelayanan JKN 2024, Utang Pelayanan Umum 2024, dan Utang Internet.

4. Utang belanja bagi hasil di PPKD kepada Pemerintahan Pekon sebesar Rp631.411.900,00 terdiri atas SE Bupati Nomor : B/174/KPTS/IV.02/2025, tanggal 18 Maret 2025 :
   - Utang belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Rp535.336.000,00, berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat.
   - Utang belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Rp96.075.900,00, berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat.
5. Utang kepada Kabupaten Way Kanan atas rencana pembangunan bandara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan perjanjian kerja sama Nomor : 500.11.25.2/5407/VI.02/2024 tanggal 22 Oktober 2024 sebesar Rp500.000.000,00.

5.3.2.1.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan pos untuk mencatat kewajiban atas beban yang sudah terpakai tetapi sampai dengan akhir tahun 2024 belum dibayar/ yang harus diselesaikan dan uang titipan dari pihak lain yang belum didistribusikan kepada yang berhak menerima, senilai Rp2.454.858.847,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.071.117.161,00 atau 539,72% dari tahun 2023 sebesar Rp383.741.686,00 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 249. Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	PPKD				
	Utang Kelebihan Pembayaran atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	301.141.297,00	301.141.297,00	0,00	0,00
	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD	2.153.717.550,00	0,00	2.153.717.550,00	∞
	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	82.600.389,00	(82.600.389,00)	(100,00)
	Jumlah	**2.454.858.847,00**	**383.741.686,00**	**2.071.117.161,00**	**539,72**

Berikut penjelasan lebih rinci dari tabel Utang Jangka Pendek Lainnya diatas.

1. Utang kelebihan pembayaran atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah berupa utang atas LHP BPK Nomor 31A/LHP/XVIII.BLP/05/2023 atas LKPD Tahun 2022 berupa penggunaan Dana BOS sumber dana APBN sebesar Rp301.141.297,00 terdiri atas a) SDN 1 Liwa Rp2.890.909,00; b) SDN 3 Liwa Rp12.762.636,00; c) SDN 3 Way Empulau Ulu Rp16.528.482,00; d) SDN 3 Way Mengaku Rp900.000,00; e) SDN 3 Kali Pasir Rp17.569.500,00; f) SMPN 1 BNS Rp178.963.870,00; g) SMPN 1 Sukau Rp57.651.900,00; h) SMPN 2 BNS Rp10.176.000,00; i) SMPN 3 BNS Rp3.698.000,00. Uang tersebut telah disetor oleh masing-masing sekolah ke RKUD namun Pemkab Lampung Barat belum menyetorkan ke RKUN.
2. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD sebesar Rp2.153.717.550,00 merupakan kewajiban BLUD 15 Puskesmas sebesar Rp992.124.850,00 dan BLUD RSUD Alimuddin Umar sebesar Rp1.161.592.700,00 terhadap BPJS Kesehatan atas kelebihan pembayaran jasa layanan yang telah disalurkan oleh BPJS Kesehatan kepada dua BLUD tersebut.

5.3.2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

5.3.2.2.1. Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada pihak lain yang melebihi satu periode akuntansi yaitu kewajiban kepada PT Sarana Multi Infrastruktur. Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.424.888.255,00 mengalami penurunan sebesar (Rp17.918.063.340,00) atau (52,17%) dibandingkan dari saldo Per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.342.951.595,00. Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank merupakan utang

kepada PT. SMI berdasarkan Perjanjian Nomor PERJ-165/SMI/1021 Tanggal 25 Oktober 2021, dengan pembayaran bunga 5,66% per annum.

Nilai Kewajiban Jangka Panjang ini yang akan jatuh tempo periode lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yaitu periode Januari 2026 sampai dengan Desember 2026 dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Pembayaran periode Januari 2026 – Oktober 2026 (10 Bulan x Rp1.493.171.945,00)	= Rp14.931.719.450,00
2. Pembayaran periode November s.d. Desember 2026	= Rp 1.493.168.805,00
Jumlah	= Rp16.424.888.255,00

Adapun rincian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) disajikan pada lampiran 17 dan pada tabel berikut ini.

Tabel 250. Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	PPKD				
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah – Utang Pokok Pinjaman PEN kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	16.424.888.255,00	34.342.951.595,00	(17.918.063.340,00)	(52,17)
	Jumlah	16.424.888.255,00	34.342.951.595,00	(17.918.063.340,00)	(52,17)

5.3.3. EKUITAS

5.3.3.1. EKUITAS

5.3.3.1.1. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Total saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.862.166.359.887,61 mengalami peningkatan kekayaan bersih sebesar Rp8.296.775.538,28 atau 0,29% jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.853.869.584.349,33.

Peningkatan ekuitas tahun 2024 tersebut disebabkan adanya surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp93.599.834.073,93 dan dampak kumulatif karena perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar : transaksi lain-lain yang mengakibatkan pengurangan ekuitas sebesar (Rp85.303.058.535,65) secara rinci tentang peningkatan ekuitas tahun 2024 dapat dilihat dalam penjelasan CaLK tentang Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaanya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos – Pos Luar Biasa.

Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Lampung Barat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu kegiatan operasional, kegiatan non operasional.

5.4.1. PENDAPATAN DAERAH – LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan LO pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing masing dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 251. Pendapatan LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	81.731.454.165,39	71.088.470.900,54	10.642.983.264,85	14,97
2	Pendapatan Transfer	925.110.655.059,00	842.338.382.554,00	82.772.272.505,00	9,83
3	Lain – Lain Pendapatan yang Sah	52.173.731.932,00	23.053.728.722,00	29.120.003.710,00	126,31
Pendapatan – LO		1.059.015.841.156,39	936.480.581.676,54	122.535.259.479,85	13,08

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan – LO TA. 2024 sebesar Rp1.059.015.841.156,39 mengalami peningkatan sebesar Rp122.535.259.479,85 atau 13,08% dibandingkan Pendapatan – LO TA. 2023 sebesar Rp936.480.581.676,54.

5.4.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2024 dan 2023, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 252. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pajak Daerah – LO	15.812.918.531,00	14.870.851.762,00	942.066.769,00	6,33
2	Retribusi Daerah – LO	38.100.447.232,00	2.356.222.250,00	35.744.224.982,00	1.517,01
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	5.972.469.064,91	4.895.841.920,94	1.076.627.143,97	21,99
4	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO	21.845.619.337,48	48.965.554.967,60	(27.119.935.630,12)	(55,39)
Jumlah		81.731.454.165,39	71.088.470.900,54	10.642.983.264,85	14,97

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah – LO TA. 2024 sebesar Rp81.731.454.165,39 mengalami peningkatan sebesar Rp10.642.983.264,85 atau 14,97% dari Pendapatan – LO TA. 2023 sebesar Rp71.088.470.900,54.

Rincian masing-masing Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.1.1. Pajak Daerah - LO

Pajak Daerah - LO adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2024, sehingga nilai pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang ditetapkan pada tahun 2024 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun 2024, adapun pemungutan Pajak Daerah dilakukan Badan Pendapatan Daerah dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 253. PAD – Pajak Daerah – LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Pajak Hotel-LO	0,00	153.059.250,00	(153.059.250,00)	(100,00)
2.	Pajak Restoran-LO	0,00	1.731.189.392,00	(1.731.189.392,00)	(100,00)
3.	Pajak Hiburan-LO	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
4.	Pajak Reklame-LO	247.192.326,00	158.057.616,00	89.134.710,00	56,39
5.	Pajak Penerangan Jalan-LO	0,00	7.653.132.882,00	(7.653.132.882,00)	(100,00)
6.	Pajak Parkir-LO	0,00	107.000.000,00	(107.000.000,00)	(100,00)
7.	Pajak Air Tanah-LO	608.472,00	0,00	608.472,00	-
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	462.039.288,00	0,00	462.039.288,00	-
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	5.279.375.204,00	4.695.387.522,00	583.987.682,00	12,44
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	328.368.600,00	368.025.100,00	(39.656.500,00)	(10,78)
11.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	9.495.334.641,00	0,00	9.495.334.641,00	-
	Jumlah	15.812.918.531,00	14.870.851.762,00	942.066.769,00	6,33

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan PAD Pajak Daerah – LO TA 2024 sebesar Rp15.812.918.531,00 mengalami peningkatan sebesar Rp942.066.769,00 atau 6,33% dari PAD Pajak Daerah – LO TA 2023 sebesar Rp14.870.851.762,00.

Berikut disajikan tabel Perbedaan PAD-Pajak Daerah LRA dan LO.

Tabel 254. Perbedaan PAD – Pajak Daerah dan LO TA 2024

No	Uraian	LRA	LO	Selisih	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	6
1.	Pajak Reklame-LO	247.192.326,00	247.192.326,00	0,00	-
2.	Pajak Air Tanah-LO	608.472,00	608.472,00	0,00	-
3.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	462.039.288,00	462.039.288,00	0,00	-
4.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	5.273.166.288,00	5.279.375.204,00	(6.208.916,00)	Selisih
5.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	328.368.600,00	328.368.600,00	0,00	-
6.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	9.509.557.791,00	9.495.334.641,00	14.223.150,00	Selisih
	Jumlah	15.820.932.765,00	15.812.918.531,00	8.014.234,00	

5.4.1.1.1.1. Pajak Hotel – LO

Pendapatan Pajak Hotel – LO tahun 2024 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (Rp153.059.250,00) dari tahun 2023 sebesar Rp153.059.250,00 hal ini karena penerimaan Pajak Hotel-LO tahun 2024 disajikan pada PBJT-Jasa Perhotelan-LO.

5.4.1.1.1.2. Pajak Restoran – LO

Pendapatan Pajak Restoran – LO tahun 2024 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (Rp1.731.189.392,00) dari tahun 2023 sebesar Rp1.731.189.392,00 hal ini karena penerimaan Pajak Restoran-LO tahun 2024 disajikan pada PBJT-Makan dan/atau Minuman-LO.

5.4.1.1.1.3. Pajak Hiburan – LO

Pendapatan Pajak Hiburan – LO tahun 2024 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (Rp5.000.000,00) dari tahun 2023 sebesar Rp5.000.000,00 hal ini karena penerimaan Pajak Hiburan-LO tahun 2024 disajikan pada PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO.

5.4.1.1.1.4. Pajak Reklame – LO

Pendapatan Pajak Reklame – LO tahun 2024 sebesar Rp247.192.326,00 mengalami peningkatan sebesar Rp89.134.710,00 atau 56,39% dari tahun 2023 Rp158.057.616,00. Penerimaan ini semua berdasarkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang diterbitkan pada tahun 2024 dan sampai dengan akhir tahun tidak memiliki Piutang Pajak Reklame.

Pada Tahun 2024 Pendapatan LRA sebesar Rp247.192.326,00 dibandingkan dengan Pendapatan LO sebesar Rp247.192.326,00 sehingga tidak terdapat selisih.

5.4.1.1.1.5. Pajak Penerangan Jalan-LO

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan – LO tahun 2024 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (Rp7.653.132.882,00) dari tahun 2023 sebesar Rp7.653.132.882,00 hal ini karena penerimaan Pajak Penerangan Jalan-LO tahun 2024 disajikan pada PBJT-Tenaga Listrik-LO.

5.4.1.1.1.6. Pajak Parkir – LO

Pendapatan Pajak Pakir – LO tahun 2024 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (Rp107.000.000,00) dari tahun 2023 sebesar Rp107.000.000,00 hal ini karena penerimaan Pajak Parkir-LO tahun 2024 disajikan pada PBJT-Jasa Parkir-LO.

5.4.1.1.1.7. Pajak Air Tanah – LO

Pendapatan Pajak Air Tanah – LO tahun 2024 sebesar Rp608.472,00 mengalami peningkatan sebesar Rp608.472,00 dari tahun 2023 sebesar Rp0,00. Pemungutan Pajak Air Tanah-LO baru dilakukan pada Tahun 2024 sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retirbusi Daerah.

Pada Tahun 2024 Pendapatan LRA sebesar Rp608.472,00 dibandingkan dengan Pendapatan LO sebesar Rp608.472,00 sehingga tidak terdapat selisih.

5.4.1.1.1.8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO

Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO tahun 2024 sebesar Rp462.039.288,00 mengalami peningkatan sebesar Rp462.039.288,00 dari tahun 2023 sebesar Rp0,00. Pemungutan Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO baru dilakukan pada Tahun 2024 sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retirbusi Daerah.

Pada Tahun 2024 Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA sebesar Rp462.039.288,00 dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO sebesar Rp462.039.288,00 sehingga tidak terdapat selisih.

5.4.1.1.1.9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) -LO

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO tahun 2024 sebesar Rp5.279.375.204,00 mengalami peningkatan sebesar Rp583.987.682,00 atau 12,44% dari tahun 2023 Rp4.695.387.522,00.

Pendapatan ini berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB yang diterbitkan pada tahun 2024 (Pendapatan – LO) sebesar Rp5.279.375.204,00 dan diterima pada RKUD (Pendapatan – LRA) sebesar Rp5.273.166.288,00 sehingga terdapat piutang akhir sebesar Rp6.208.916,00.

5.4.1.1.1.10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO

Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO tahun 2024 sebesar Rp328.368.600,00 mengalami penurunan sebesar (Rp39.656.500,00) atau (10,78%) dari tahun 2023 Rp368.025.100,00.

Pada Tahun 2024 seluruh SPTPD Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Pendapatan LO) sebesar Rp328.368.600,00 telah diterima pada RKUD (Pendapatan LRA) sebesar Rp328.368.600,00 sehingga tidak terdapat selisih.

5.4.1.1.1.11. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO

Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO tahun 2024 sebesar Rp9.495.334.641,00 mengalami peningkatan sebesar Rp9.495.334.641,00 dari tahun 2023 sebesar Rp0,00.

Pada tahun 2024 Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO terdiri atas a) PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO; b) PBJT-Tenaga Listrik-LO; c) PBJT-Jasa Perhotelan-LO; d) PBJT-Jasa Parkir-LO; e) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO, sedangkan pada tahun 2023 disajikan pada kode rekening secara masing-masing yaitu : a) Pajak Hotel-LO; b) Pajak Restoran–LO; c) Pajak Hiburan-LO; d) Pajak Penerangan Jalan-LO; e) Pajak Parkir-LO.

Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO 2024 serta pajak lainnya yang pada tahun 2023 telah disatukan menjadi PBJT-LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 255. Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO TA 2024 dan Pendapatan Pajak 2023 yang disatukan menjadi PBJT-LO Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	1.771.806.077,00	0,00	1.771.806.077,00	-
2.	PBJT-Tenaga Listrik-LO	7.431.331.045,00	0,00	7.431.331.045,00	-
3.	PBJT-Jasa Perhotelan-LO	174.297.519,00	0,00	174.297.519,00	-
4.	PBJT-Jasa Parkir-LO	108.900.000,00	0,00	108.900.000,00	-
5.	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	-
6.	Pajak Restoran–LO	0,00	1.731.189.392,00	(1.731.189.392,00)	(100,00)
7.	Pajak Penerangan Jalan-LO	0,00	7.653.132.882,00	(7.653.132.882,00)	(100,00)
8.	Pajak Hotel-LO	0,00	153.059.250,00	(153.059.250,00)	(100,00)
9.	Pajak Parkir-LO	0,00	107.000.000,00	(107.000.000,00)	(100,00)
10.	Pajak Hiburan-LO	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	9.495.334.641,00	9.649.381.524,00	(154.046.883,00)	(1,60)

Berikut disajikan tabel Perbedaan Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO dan LRA.

Tabel 256. Perbedaan Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO dan LRA

No	Uraian	LRA	LO	Selisih	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	6
1.	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.785.079.227,00	1.771.806.077,00	13.273.150,00	Selisih
2.	PBJT-Tenaga Listrik	7.431.331.045,00	7.431.331.045,00	0,00	-
3.	PBJT-Jasa Perhotelan	174.297.519,00	174.297.519,00	0,00	-
4.	PBJT-Jasa Parkir	109.850.000,00	108.900.000,00	950.000,00	Selisih
5.	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	-
	Jumlah	9.509.557.791,00	9.495.334.641,00	14.223.150,00	

5.4.1.1.1.11.1. PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO

Pendapatan PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO merupakan nilai SPTPD diterbitkan pada tahun 2024 sebesar Rp1.771.806.077,00, dari jumlah SPTPD yang terbit ini terdapat senilai Rp476.850,00 (bagian dari nilai Rp38.462.796,00) yang sampai dengan tanggal pelaporan masih menjadi piutang.

Berikut Perhitungan Pendapatan PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO, Pendapatan LRA, dan Piutang Per 31 Desember 2024:

Piutang Awal Tahun	Rp	51.735.946,00
Penetapan SPTPD (LO)	Rp	1.771.806.077,00
Penerimaan RKUD (LRA)		(Rp 1.785.079.227,00)
Piutang Akhir Tahun	Rp	38.462.796,00

Berikut perhitungan selisih antara Pendapatan LRA dan LO sebesar Rp13.273.150,00

Pendapatan LRA	Rp	1.785.079.227,00
Pendapatan LO		(Rp 1.771.806.077,00)
Selisih	Rp	13.273.150,00

Selisih ini merupakan penurunan nilai piutang awal dibandingkan dengan piutang akhir periode yaitu (Rp51.735.946,00 - Rp38.462.796,00 = Rp13.273.150,00)

5.4.1.1.1.11.2. PBJT-Tenaga Listrik-LO

Pendapatan PBJT-Tenaga Listrik-LO sebesar Rp7.431.331.045,00 merupakan nilai SPTPD diterbitkan pada tahun 2024.

Berikut Perhitungan Pendapatan PBJT-Tenaga Listrik-LO, Pendapatan LRA, dan Piutang Per 31 Desember 2024:

Piutang Awal Tahun	Rp	0,00
Penetapan SPTPD (LO)	Rp	7.431.331.045,00
Penerimaan RKUD (LRA)		(Rp 7.431.331.045,00)
Piutang Akhir Tahun	Rp	0,00

5.4.1.1.1.11.3. PBJT-Jasa Perhotelan-LO

Pendapatan PBJT-Jasa Perhotelan-LO sebesar Rp174.297.519,00 merupakan nilai SPTPD diterbitkan pada tahun 2024 terdiri atas : BPJT-Hotel Rp154.354.762,00 dan BPJT-Losmen Rp19.942.757,00.

Berikut Perhitungan Pendapatan PBJT- Jasa Perhotelan-LO, Pendapatan LRA, dan Piutang Per 31 Desember 2024: Piutang Awal Tahun

Piutang Awal Tahun	Rp	0,00
Penetapan SPTPD (LO)	Rp	174.297.519,00
Penerimaan RKUD (LRA)		(Rp 174.297.519,00)
Piutang Akhir Tahun	Rp	0,00

5.4.1.1.1.11.4. PBJT-Jasa Parkir-LO

Pendapatan PBJT-Jasa Parkir-LO sebesar Rp108.900.000,00 merupakan nilai SPTPD diterbitkan pada tahun 2024.

Berikut Perhitungan Pendapatan PBJT- Jasa Parkir-LO, Pendapatan LRA, dan Piutang Per 31 Desember 2024:

Piutang Awal Tahun	Rp	3.550.000,00
Penetapan SPTPD (LO)	Rp	108.900.000,00
Penerimaan RKUD (LRA)		(Rp 109.850.000,00)
Piutang Akhir Tahun 2024	Rp	2.600.000,00

Berikut perhitungan selisih antara Pendapatan LRA dan LO

Pendapatan LRA	Rp	109.850.000,00
Pendapatan LO		(Rp 108.900.000,00)
Selisih	Rp	950.000,00

Selisih ini merupakan penurunan nilai piutang awal dibandingkan dengan piutang akhir periode yaitu (Rp3.550.000,00 - Rp2.600.000,00 = Rp950.000,00)

5.4.1.1.1.11.5. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO

Pendapatan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO sebesar Rp9.000.000,00 merupakan nilai SPTPD diterbitkan pada tahun 2024.

Berikut Perhitungan Pendapatan PBJT- Jasa Kesenian dan Hiburan-LO, Pendapatan LRA, dan Piutang Per 31 Desember 2024:

Piutang Awal Tahun	Rp	0,00
Penetapan SPTPD (LO)	Rp	9.000.000,00
Penerimaan RKUD (LRA)	(Rp	9.000.000,00)
Piutang Akhir Tahun	Rp	0,00

5.4.1.1.2. Retribusi Daerah - LO

Retribusi Daerah - LO dipungut oleh beberapa Perangkat Daerah penghasil retribusi yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat didasarkan atas Perda tentang Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 257. Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Retribusi Jasa Umum	36.403.164.955,00	844.194.472,00	35.558.970.483,00	4.212,18
2	Retribusi Jasa Usaha	1.492.867.300,00	1.286.836.050,00	206.031.250,00	16,01
3	Retribusi Perizinan Tertentu	204.414.977,00	225.191.728,00	(20.776.751,00)	(9,23)
Jumlah		38.100.447.232,00	2.356.222.250,00	35.744.224.982,00	1.517,01

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA.2024 sebesar Rp38.100.447.232,00 mengalami peningkatan sebesar Rp35.744.224.982,00 atau 1.517,01% dari PAD Retribusi Daerah – LO TA. 2023 sebesar Rp2.356.222.250,00. Signifikansi peningkatan pendapatan retribusi ini karena dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku mulai 16 Februari 2024, bahwa Pelayanan Kesehatan pada RSUD dan Puskesmas pencatatannya termasuk bagian dari Retribusi Jasa Umum, sedangkan pada tahun sebelumnya disajikan pada Lain-lain PAD yang Sah.

5.4.1.1.2.1. Retribusi Jasa Umum - LO

Retribusi Jasa Umum - LO merupakan sumber PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Retribusi Jasa Umum dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 258. Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	35.925.038.383,00	0,00	35.925.038.383,00	∞
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	149.936.000,00	134.608.000,00	15.328.000,00	11,39
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	69.290.000,00	75.520.000,00	(6.230.000,00)	(8,18)
4.	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	238.940.572,00	199.168.972,00	39.771.600,00	19,97
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	55.000.000,00	(55.000.000,00)	(100,00)
6.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO	0,00	1.553.500,00	(1.553.500,00)	(100,00)
7.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	0,00	4.400.000,00	(4.400.000,00)	(100,00)
8.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	0,00	373.944.000,00	(373.944.000,00)	(100,00)
Jumlah		36.403.164.955,00	844.194.472,00	35.558.970.483,00	4.212,18

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO TA 2024 sebesar Rp36.403.164.955,00 mengalami peningkatan sebesar Rp35.558.970.483,00 atau 4.212,18% dari PAD Retribusi Jasa Umum – LO TA. 2023 sebesar Rp844.194.472,00.

Berikut disajikan tabel Perbedaan Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO dan LRA.

Tabel 259. Perbedaan Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO dan LRA

No	Uraian	LRA	LO	Selisih	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	6
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	35.925.038.383,00	(35.925.038.383,00)	Selisih
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	149.936.000,00	149.936.000,00	0,00	-
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	89.250.000,00	89.250.000,00	0,00	-
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	238.940.572,00	238.940.572,00	0,00	-
	Jumlah	478.126.572,00	36.403.164.955,00	(35.925.038.383,00)	-

5.4.1.1.2.1.1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pelayanan kesehatan ini berada pada RSUD Alimuddin Umar dan Puskesmas. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO tahun 2024 sebesar Rp35.925.038.383,00 mengalami peningkatan sebesar Rp35.925.038.383,00 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp0,00. Signifikansi peningkatan pendapatan retribusi ini karena dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku mulai 16 Februari 2024, bahwa Pelayanan Kesehatan pada RSUD dan Puskesmas pencatatannya termasuk bagian dari Retribusi Jasa Umum, sedangkan pada tahun sebelumnya disajikan pada Lain-lain PAD yang Sah - Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO. Sehingga seluruh penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan dari bulan Maret s.d. Desember 2024 disajikan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan penerimaan dari bulan Januari s.d. Februari 2024 disajikan pada Lain-lain PAD yang Sah-Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO.

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan ini terdapat pada RSUD Alimuddin Umar sebesar Rp21.431.664.888,00 dan Puskesmas sebesar Rp14.493.373.495,00.

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan LO sebesar Rp35.925.038.383,00 dibandingkan dengan Pendapatan LRA sebesar Rp0,00, terdapat selisih Rp35.925.038.383,00 hal ini terjadi karena Pendapatan Pelayanan Kesehatan LRA disajikan pada Lain-lain PAD yang Sah - Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan. Penjelasan lebih rinci terhadap selisih ini dijelaskan pada akun "Lain-lain PAD yang Sah-LO - Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO".

5.4.1.1.2.1.2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO

Pendapatan Retribusi Pelayanaan Persampahan/ Kebersihan-LO tahun 2024 sebesar Rp149.936.000,00 merupakan SKRD diterbitkan pada tahun 2024. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp134.608.000,00 mengalami peningkatan Rp15.328.000,00.

Berikut Perhitungan Pendapatan Retribusi Pelayanaan Persampahan/ Kebersihan-LO, Pendapatan LRA, dan Piutang Per 31 Desember 2024:

Piutang Awal Tahun	Rp 0,00
Penetapan SKRD	Rp 149.936.000,00
Penerimaan RKUD (LRA)	(Rp 149.936.000,00)
Piutang Akhir Tahun	Rp . 0,00

5.4.1.1.2.1.3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO

Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO tahun 2024 sebesar Rp89.250.000,00 merupakan SKRD diterbitkan pada tahun 2024. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp75.520.000,00 mengalami peningkatan Rp13.730.000,00.

Berikut Perhitungan Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO, Pendapatan LRA, dan Piutang Per 31 Desember 2024:

Piutang Awal Tahun	Rp	0,00
Penetapan SKRD	Rp	89.250.000,00
Penerimaan RKUD (LRA)	(Rp	89.250.000,00)
Piutang Akhir Tahun	Rp .	0,00

5.4.1.1.2.1.4. Retribusi Pelayanan Pasar-LO

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar-LO tahun 2024 sebesar Rp238.940.572,00 merupakan SKRD diterbitkan pada tahun 2024. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp199.168.972,00 mengalami peningkatan Rp39.771.600,00.

Berikut rincian Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar-LO tahun 2024:

- Retribusi Pelataran	Rp 50.164.000,00
- Retribusi Los	Rp139.347.200,00
- Retribusi Kios	Rp 49.429.372,00
- Total	Rp238.940.572,00

Berikut Perhitungan Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO, Pendapatan LRA, dan Piutang Per 31 Desember 2024:

Piutang Awal Tahun	Rp	0,00
Penetapan SKRD	Rp	238.940.572,00
Penerimaan RKUD (LRA)	(Rp	238.940.572,00)
Piutang Akhir Tahun	Rp .	0,00

5.4.1.1.2.1.5. Pendapatan Retribusi Jasa Umum -LO yang Dihentikan Pemungutannya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis pendapatan retribusi jasa umum yang dipungut TA 2023 tetapi TA 2024 telah dihentikan pemungutannya:

1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
2. Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO
3. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO
4. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO

Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Per 31 Desember 2024 dan 2023 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 260. Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum
Per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	**Dinas Kesehatan**				
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Gedung Surian	958.071.604,00	0,00	958.071.604,00	-
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Kebun Tebu	1.174.419.694,00	0,00	1.174.419.694,00	-
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sumber Jaya	1.146.158.272,00	0,00	1.146.158.272,00	-
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Air Hitam	483.124.323,00	0,00	483.124.323,00	-
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Fajar Bulan	1.609.702.506,00	0,00	1.609.702.506,00	-
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sekincau	1.103.271.833,00	0,00	1.103.271.833,00	-
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pagar Dewa	630.496.253,00	0,00	630.496.253,00	-
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Batu Ketulis	837.079.786,00	0,00	837.079.786,00	-
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kenali	997.296.140,00	0,00	997.296.140,00	-
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Batu Brak	809.331.194,00	0,00	809.331.194,00	-
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bandar Negeri Suoh	1.002.154.907,00	0,00	1.002.154.907,00	-
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Srimulyo	840.813.053,00	0,00	840.813.053,00	-
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Liwa	1.377.647.278,00	0,00	1.377.647.278,00	-

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Buay Nyerupa	1.090.877.994,00	0,00	1.090.877.994,00	∞
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lombok	432.928.656,00	0,00	432.928.656,00	∞
	Jumlah	**14.493.373.495,00**	**0,00**	**14.493.373.495,00**	∞
2.	**RSUD Alimuddin Umar**				
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	21.431.664.888,00	0,00	21.431.664.888,00	∞
	Jumlah	**21.431.664.888,00**	**0,00**	**21.431.664.888,00**	∞
3.	**Dinas Perhubungan**				
	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	89.250.000,00	75.520.000,00	13.730.000,00	18,18
	Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	55.000.000,00	(55.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**89.250.000,00**	**130.520.000,00**	**(41.270.000,00)**	**(31,62)**
4.	**Dinas Lingkungan Hidup**				
	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	106.080.000,00	100.060.000,00	6.020.000,00	6,02
	Pengolahan Limbah Cair	0,00	1.553.500,00	(1.553.500,00)	(100,00)
	Jumlah	**106.080.000,00**	**101.613.500,00**	**4.466.500,00**	**4,40**
5.	**Dinas Koperindag dan Pasar**				
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	43.856.000,00	34.548.000,00	9.308.000,00	26,94
	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	238.940.572,00	199.168.972,00	39.771.600,00	19,97
	Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	4.400.000,00	(4.400.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**282.796.572,00**	**238.116.972,00**	**44.679.600,00**	**18,76**
6.	**Dinas KOMINFO**				
	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	373.944.000,00	(373.944.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**0,00**	**373.944.000,00**	**(373.944.000,00)**	**(100,00)**
	Jumlah	**36.403.164.955,00**	**844.194.472,00**	**35.558.970.483,00**	**4.212,18**

5.4.1.1.2.2. Retribusi Jasa Usaha - LO

Retribusi Jasa Usaha - LO merupakan sumber PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah Kabupaten Lampung Barat, Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 261. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	777.920.000,00	584.080.750,00	193.839.250,00	33,19
2.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	348.820.000,00	410.551.400,00	(61.731.400,00)	(15,04)
3.	Retribusi Terminal-LO	0,00	6.300.000,00	(6.300.000,00)	(100,00)
4.	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	10.700.000,00	25.348.000,00	(14.648.000,00)	(57,79)
5.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	124.118.500,00	88.894.000,00	35.224.500,00	39,63
6.	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	5.953.500,00	5.376.000,00	577.500,00	10,74
7.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	141.636.000,00	78.979.000,00	62.657.000,00	79,33
8.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	83.719.300,00	87.306.900,00	(3.587.600,00)	(4,11)
	Jumlah	**1.492.867.300,00**	**1.286.836.050,00**	**206.031.250,00**	**16,01**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Retribusi Jasa Usaha – LO TA. 2024 sebesar Rp1.492.867.300,00 mengalami peningkatan sebesar Rp206.031.250,00 atau 16,01% dari PAD Retribusi Jasa Usaha – LO TA. 2023 sebesar Rp1.286.836.050,00.

Berikut disajikan tabel Perbedaan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO dan LRA.

Tabel 262. Perbedaan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO dan LRA

No	Uraian	LRA	LO	Selisih	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	6
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	768.997.500,00	777.920.000,00	(8.922.500,00)	Selisih
2.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	349.280.000,00	348.820.000,00	460.000,00	Selisih
3.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	-
4.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	124.118.500,00	124.118.500,00	0,00	-
5.	Retribusi Rumah Potong Hewan	5.953.500,00	5.953.500,00	0,00	-
6.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	141.636.000,00	141.636.000,00	0,00	-
7.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	83.719.300,00	83.719.300,00	0,00	-
	Jumlah	**1.484.404.800,00**	**1.492.867.300,00**	**(8.462.500,00)**	

5.4.1.1.2.2.1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp777.920.000,00 merupakan SKRD diterbitkan pada tahun 2024. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp584.080.750,00 mengalami peningkatan Rp193.839.250,00.

Berikut rincian Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO tahun 2024:

- Retribusi Pemakaian Alat	Rp103.200.000,00
- Retribusi Pemakaian Ruangan	Rp 63.800.000,00
- Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Rp532.950.000,00
- Retribusi Penyewaan Tanah	Rp 77.970.000,00
- Total	Rp777.920.000,00

Berikut Perhitungan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO, Pendapatan LRA, dan Piutang Per 31 Desember 2024:

Piutang Awal Tahun	Rp	16.202.500,00
Pendapatan Diterima Dimuka Awal Tahun	(Rp	0,00)
Pendapatan Diterima Dimuka Akhir Tahun	Rp	5.737.500,00
Penetapan SKRD (LO)	Rp	777.920.000,00
Penerimaan RKUD (LRA)	(Rp	768.997.500,00)
Piutang Akhir Tahun	Rp	30.862.500,00

Berikut perhitungan selisih antara Pendapatan LRA dan LO

Pendapatan LO	Rp	777.920.000,00
Pendapatan LRA	(Rp	768.997.500,00)
Selisih	Rp	8.922.500,00

Selisih sebesar Rp8.922.500,00 merupakan peningkatan nilai Piutang akhir dibandingkan dengan piutang awal periode dikurangi peningkatan Pendapatan Diterima Dimuka akhir dibandingkan dengan awal periode yaitu (Rp30.862.500,00-Rp16.202.500,00=Rp14.660.000,00) - (Rp5.737.500,00-Rp0,00=Rp5.737.500,00).

5.4.1.1.2.2.2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO

Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO tahun 2024 sebesar Rp348.820.000,00 merupakan SKRD diterbitkan pada tahun 2024. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp410.551.400,00 mengalami penurunan (Rp61.731.400,00).

Berikut Perhitungan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO, Pendapatan LRA, dan Piutang Per 31 Desember 2024:

Piutang Awal Tahun	Rp	0,00
Penetapan SKRD (LO)	Rp	348.820.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka Awal	(Rp	166.920.000,00)
Pendapatan Diterima Dimuka Akhir	Rp	167.380.000,00
Penerimaan RKUD (LRA)	(Rp	349.280.000,00)
Piutang Akhir Tahun	Rp	0,00

Berikut perhitungan selisih antara Pendapatan LRA dan LO

Pendapatan LRA	Rp	349.280.000,00
Pendapatan LO	(Rp	348.820.000,00)
Selisih	Rp	460.000,00

Selisih ini merupakan peningkatan nilai pendapatan diterima dimuka akhir dibandingkan dengan awal periode yaitu (Rp167.380.000,00 – Rp166.920.000,00 = Rp460.000,00).

5.4.1.1.2.2.3. Retribusi Terminal-LO

Pendapatan Retribusi Terminal-LO tahun 2024 sebesar Rp0,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp6.300.000,00 mengalami penurunan (Rp6.300.000,00).

Retribusi Terminal tidak lagi diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sehingga tidak dilakukan pemungutan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2024.

5.4.1.1.2.2.4. Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO

Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO tahun 2024 sebesar Rp10.700.000,00 merupakan SKRD diterbitkan pada tahun 2024. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp25.348.000,00 mengalami penurunan (Rp14.648.000,00)

Berikut Perhitungan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO, Pendapatan LRA, dan Piutang Per 31 Desember 2024.

Piutang Awal Tahun	Rp	0,00
Penetapan SKRD	Rp	10.700.000,00
Penerimaan RKUD (LRA)	(Rp	10.700.000,00)
Piutang Akhir Tahun	Rp .	0,00

5.4.1.1.2.2.5. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO

Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO tahun 2024 sebesar Rp124.118.500,00 merupakan SKRD diterbitkan pada tahun 2024. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp88.894.000,00 mengalami peningkatan Rp35.224.500,00.

Berikut Perhitungan Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO, Pendapatan LRA, dan Piutang Per 31 Desember 2024:

Piutang Awal Tahun	Rp	0,00
Penetapan SKRD	Rp	124.118.500,00
Penerimaan RKUD (LRA)	(Rp	124.118.500,00)
Piutang Akhir Tahun	Rp .	0,00

5.4.1.1.2.2.6. Retribusi Rumah Potong Hewan-LO

Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan-LO tahun 2024 sebesar Rp5.953.500,00 merupakan SKRD diterbitkan pada tahun 2024. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp5.376.000,00 mengalami peningkatan Rp577.500,00.

Berikut Perhitungan Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan-LO, Pendapatan LRA, dan Piutang Per 31 Desember 2024:

Piutang Awal Tahun	Rp	0,00
Penetapan SKRD	Rp	5.953.500,00
Penerimaan RKUD (LRA)	(Rp	5.953.500,00)
Piutang Akhir Tahun	Rp .	0,00

5.4.1.1.2.2.7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO

Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO tahun 2024 sebesar Rp141.636.000,00 merupakan SKRD diterbitkan pada tahun 2024. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp78.979.000,00 mengalami peningkatan Rp62.657.000,00.

Berikut Perhitungan Pendapatan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO, Pendapatan LRA, dan Piutang Per 31 Desember 2024:

Piutang Awal Tahun	Rp	0,00
Penetapan SKRD	Rp	141.636.000,00
Penerimaan RKUD (LRA)	(Rp	141.636.000,00)
Piutang Akhir Tahun	Rp .	0,00

5.4.1.1.2.2.8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp83.719.300,00 merupakan SKRD diterbitkan pada tahun 2024. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp87.306.900,00 mengalami peningkatan (Rp3.587.600,00).

Berikut Perhitungan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO, Pendapatan LRA, dan Piutang Per 31 Desember 2024:

Piutang Awal Tahun	Rp	0,00

Penetapan SKRD	Rp	83.719.300,00
Penerimaan RKUD (LRA)	(Rp	83.719.300,00)
Piutang Akhir Tahun	Rp .	0,00

Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 263. Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**				
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	305.400.000,00	178.450.000,00	126.950.000,00	71,14
	Sub Jumlah	**305.400.000,00**	**178.450.000,00**	**126.950.000,00**	**71,14**
2.	**Dinas Kesehatan**				
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	3.000.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00	66,67
	Sub Jumlah	**3.000.000,00**	**1.800.000,00**	**1.200.000,00**	**66,67**
3.	**Dinas PU PR**				
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	131.400.000,00	122.000.000,00	9.400.000,00	7,70
	Sub Jumlah	**131.400.000,00**	**122.000.000,00**	**9.400.000,00**	**7,70**
4.	**Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**				
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	12.782.000,00	0,00	12.782.000,00	-
	Sub Jumlah	**12.782.000,00**	**0,00**	**12.782.000,00**	**-**
5.	**Dinas Perhubungan**				
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	3.500.000,00	2.700.000,00	800.000,00	29,63
	Retribusi Terminal-LO	0,00	6.300.000,00	(6.300.000,00)	(100,00)
	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	10.700.000,00	25.348.000,00	(14.648.000,00)	(57,79)
	Jumlah	**14.200.000,00**	**34.348.000,00**	**(20.148.000,00)**	**(58,66)**
6.	**Dinas Lingkungan Hidup**				
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	12.000.000,00	7.200.000,00	4.800.000,00	66,67
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	7.512.000,00	72.204.000,00	(64.692.000,00)	(89,60)
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	6.087.300,00	10.433.400,00	(4.346.100,00)	(41,66)
	Jumlah	**25.599.300,00**	**89.837.400,00**	**(64.238.100,00)**	**(71,50)**
7.	**Dinas Koperindag dan Pasar**				
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	9.000.000,00	5.700.000,00	3.300.000,00	57,89
	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	348.820.000,00	410.551.400,00	(61.731.400,00)	(15,04)
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	0,00	12.073.500,00	(12.073.500,00)	(100,00)
	Jumlah	**357.820.000,00**	**428.324.900,00**	**(70.504.900,00)**	**(16,46)**
8.	**Sekretariat Daerah**				
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	56.250.000,00	52.850.000,00	3.400.000,00	6,43
	Jumlah	**56.250.000,00**	**52.850.000,00**	**3.400.000,00**	**6,43**
9.	**Badan Pendapatan Daerah**				
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	235.570.000,00	0,00	235.570.000,00	-
	Jumlah	**235.570.000,00**	**0,00**	**235.570.000,00**	**-**
10.	**Badan Riset Daerah**				
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	-
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	78.780.000,00	0,00	78.780.000,00	-
	Jumlah	**81.030.000,00**	**0,00**	**81.030.000,00**	**-**
11.	**BKAD**				
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	0,00	194.930.750,00	(194.930.750,00)	(100,00)
	Jumlah	**0,00**	**194.930.750,00**	**(194.930.750,00)**	**(100,00)**
12.	**Dinas Komunikasi dan Informasi**				
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	0,00	5.400.000,00	(5.400.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**0,00**	**5.400.000,00**	**(5.400.000,00)**	**(100,00)**
13.	**Dinas Peternakan dan Perkebunan**				
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	8.400.000,00	5.900.000,00	2.500.000,00	42,37
	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	5.953.500,00	5.376.000,00	577.500,00	10,74
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	47.594.000,00	0,00	47.594.000,00	-
	Jumlah	**61.947.500,00**	**11.276.000,00**	**50.671.500,00**	**449,37**
14.	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**				
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	7.550.000,00	4.750.000,00	2.800.000,00	58,95
	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-	124.118.500,00	88.894.000,00	35.224.500,00	39,63

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	LO				
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	7.750.000,00	6.775.000,00	975.000,00	14,39
	Jumlah	**139.418.500,00**	**100.419.000,00**	**38.999.500,00**	**38,84**
15.	**Dinas Perikanan**				
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	3.600.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	50,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	64.850.000,00	64.800.000,00	50.000,00	0,08
	Jumlah	**68.450.000,00**	**67.200.000,00**	**1.250.000,00**	**1,86**
Jumlah Keseluruhan		**1.492.867.300,00**	**1.286.836.050,00**	**206.031.250,00**	**16,01**

5.4.1.1.2.3. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan sumber PAD yang berhubungan dengan fungsi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagai Regulator dan Otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Retribusi Perizinan Tertentu dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 264. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	0,00	22.609.000,00	(22.609.000,00)	(100,00)
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	204.414.977,00	202.582.728,00	1.832.249,00	0,90
Jumlah		**204.414.977,00**	**225.191.728,00**	**(20.776.751,00)**	**(9,23)**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Retribusi Perizinan Tertentu – LO TA 2024 sebesar Rp204.414.977,00 mengalami penurunan sebesar (Rp20.776.751,00) atau (9,23%) dari PAD Retribusi Perizinan Tertentu – LO TA 2023 sebesar Rp225.191.728,00.

Berikut disajikan tabel Perbedaan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO dan LRA.

Tabel 265. Perbedaan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertetnu-LO dan LRA

No	Uraian	LRA	LO	Selisih	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	6
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	204.414.977,00	204.414.977,00	0,00	-
Jumlah		**204.414.977,00**	**204.414.977,00**	**0,00**	-

5.4.1.1.2.3.1. Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Retribusi Izin Usaha Perikanan – LO sejak tahun 2024 tidak dipungut lagi.

5.4.1.1.2.3.2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO

Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO tahun 2024 sebesar Rp204.414.977,00 merupakan SKRD diterbitkan pada tahun 2024. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp202.582.728,00 mengalami peningkatan Rp1.832.249,00.

Berikut Perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO, Pendapatan LRA, dan Piutang Per 31 Desember 2024:

Piutang Awal Tahun	Rp	0,00
Penetapan SKRD	Rp	204.414.977,00
Penerimaan RKUD (LRA)	(Rp	204.414.977,00)
Piutang Akhir Tahun	Rp .	0,00

Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Per 31 Desember 2024 dan 2023 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 266. Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	204.414.977,00	202.582.728,00	1.832.249,00	0,90
	Jumlah	204.414.977,00	202.582.728,00	1.832.249,00	0,90
2.	Dinas Perikanan				
	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	22.609.000,00	(22.609.000,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	22.609.000,00	(22.609.000,00)	(100,00)
Jumlah		204.414.977,00	225.191.728,00	(20.776.751,00)	(9,23)

5.4.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO merupakan sumber PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan realisasi TA 2024 dan 2023 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 267. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dividen PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	5.200.031.196,51	4.895.841.920,94	304.189.275,57	6,21
2	Dividen PT BPRS Lampung Barat (Perseroda)	653.987.738,40	0,00	653.987.738,40	-
3	Dividen Perumda Limau Kunci (Perseroda)	118.450.130,00	0,00	118.450.130,00	-
Jumlah		5.972.469.064,91	4.895.841.920,94	1.076.627.143,97	21,99

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA. 2024 sebesar Rp5.972.469.064,91 mengalami peningkatan sebesar Rp1.076.627.143,97 atau 21,99% dari PAD Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA. 2023 sebesar Rp4.895.841.920,94.

Berikut disajikan tabel Perbedaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan LRA.

Tabel 268. Perbedaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan LRA

No	Uraian	LRA	LO	Selisih	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	6
1.	Dividen PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	5.200.031.196,51	5.200.031.196,51	0,00	-
2.	Dividen PT BPRS Lampung Barat (Perseroda)	653.987.738,40	653.987.738,40	0,00	-
3.	Dividen Perumda Limau Kunci (Perseroda)	0,00	118.450.130,00	(118.450.130,00)	Selisih
Jumlah		5.854.018.934,91	5.972.469.064,91	(118.450.130,00)	Selisih

Berikut Perhitungan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipishakan-LO, Pendapatan LRA, dan Piutang Per 31 Desember 2024:

Piutang Awal Tahun	Rp	0,00
Penetapan (LO)	Rp	5.972.469.064,91
Penerimaan RKUD (LRA)	(Rp	5.854.018.934,91)
Piutang Akhir Tahun	Rp	118.450.130,00

Selisih sebesar Rp118.450.130,00 merupakan peningkatan nilai piutang akhir dibandingkan dengan piutang awal periode yaitu (Rp118.450.130,00 - Rp0,00 = Rp118.450.130,00).

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA. 2024 sebesar Rp5.972.469.064,91 terdapat pada 3 (tiga) tempat penghasil dividen yang diterima oleh Kabupaten lampung Barat yaitu:

a. Dividen PT Bank Pembangunan Daerah Lampung, berupa dividen atas laba Tahun Buku 2023 dibagikan pada tahun 2024 berdasarkan RUPS Akta Notaris Ria Yuliana S.H.M.Kn No 2818 Tanggal 28 Februari 2024, sebesar Rp5.200.031.196,51.

b. Dividen PT BPRS Lampung Barat (Perseroda), berupa dividen atas laba Tahun Buku 2023 dibagikan pada tahun 2024 berdasarkan RUPS Akta Notaris Amilda Riansyah S.H.M.Kn No 27 Tanggal 31 Januari 2024, sebesar Rp653.987.738,40.

c. Dividen Perumda Limau Kunci (Perseroda) atas Laba Tahun Buku 2023 dibagikan pada tahun 2025 berdasarkan Berita Acara Tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp118.450.130,00.

5.4.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah - LO

Lain-lain PAD yang Sah – LO merupakan Pendapatan Asli Daerah selain Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang terdiri atas 4 Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan, RSUD Alimuddin Umar, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, BKAD, dengan realisasi tahun 2024 dan 2023 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 269. Lain-lain PAD yang Sah - LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Hasil Sewa BMD-LO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	2.086.692.088,95	1.465.965.881,46	620.726.207,49	42,34
3.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	965.301.990,16	2.134.496.422,69	(1.169.194.432,53)	(54,78)
4.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	0,00	39.300.000,00	(39.300.000,00)	(100,00)
5.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	9.765.167.169,36	5.034.443.250,25	4.730.723.919,11	93,97
6.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	0,00	6.372.100,00	(6.372.100,00)	(100,00)
7.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	3.780.393,00	0,00	3.780.393,00	∞
8.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	0,00	1.006.335,84	(1.006.335,84)	(100,00)
9.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	5.518.000,00	1.250.000,00	4.268.000,00	341,44
10.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	255.479.299,00	281.069.435,00	(25.590.136,00)	(9,10)
11.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	1.634.981.912,00	1.381.369,00	1.633.600.543,00	118.268,53
12.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-LO	0,00	2.590.000,00	(2.590.000,00)	(100,00)
13.	Pendapatan dari BLUD-LO	0,00	39.986.335.531,00	(39.986.335.531,00)	(100,00)
14.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	7.037.652.644,00	0,00	7.037.652.644,00	∞
15.	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	62.951.581,75	0,00	62.951.581,75	∞
16.	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	15.225.638,00	0,00	15.225.638,00	∞
17.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO	7.868.591,26	6.344.612,36	1.523.978,90	24,02
	Jumlah	**21.845.619.337,48**	**48.965.554.967,60**	**(27.119.935.630,12)**	**(55,39)**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 sebesar Rp21.845.619.337,48 mengalami penurunan sebesar (Rp27.119.935.630,12) atau (55,39% dari Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 sebesar Rp48.965.554.967,60.

Berikut disajikan tabel Perbedaan Lain-lain PAD yang Sah-LO dan LRA.

Tabel 270. Perbedaan Lain-lain PAD yang Sah-LO dan LRA

No	Uraian	LRA	LO	Selisih	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	6
1.	Hasil Sewa BMD	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	Selisih
2.	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.086.692.088,95	2.086.692.088,95	0,00	-
3.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	965.301.990,16	965.301.990,16	0,00	-
4.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.743.329.692,53	9.765.167.199,36	(6.021.837.506,83)	Selisih
5.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.780.393,00	3.780.393,00	0,00	-
6.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.139.695,00	0,00	1.139.695,00	Selisih
7.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	5.518.000,00	5.518.000,00	0,00	-
8.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	222.681.005,00	255.479.299,00	(32.798.294,00)	Selisih
9.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	6.985.648,00	1.634.981.912,00	(1.627.996.264,00)	Selisih
10.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	40.856.255.166,00	7.037.652.644,00	33.818.612.522,00	Selisih
11.	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	64.640.771,00	62.951.581,75	1.689.189,25	Selisih
12.	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	15.225.638,00	15.225.638,00	0,00	-
13.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.318.591,26	7.868.591,26	2.450.000,00	Selisih
	Jumlah	47.981.878.678,90	21.845.619.337,48	26.136.259.341,42	

5.4.1.1.4.1. Hasil Sewa BMD-LO

Hasil sewa Barang Milik Daerah (BMD) adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pemanfaatan BMD melalui sewa, pada Tahun 2024 penerimaan ini sebesar Rp5.000.000,00, bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp5.000.000,00 tidak mengalami perubahan Pendapatan-LO.

Berikut Perhitungan Pendapatan Hasil Sewa BMD-LO, Pendapatan LRA, dan Piutang Per 31 Desember 2024:

Pendapatan Diterima Dimuka Awal Tahun	Rp	7.500.000,00
Penetapan LO	(Rp	5.000.000,00)
Penerimaan RKUD (LRA)	Rp	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Akhir Tahun	Rp	2.500.000,00

Pada Tahun 2024 tidak terdapat penerimaan LRA karena sudah diterima pada tahun sebelumnya, tetapi Pendapatan LO dicatat sebesar Rp5.000.000,00 pada tahun 2024 karena merupakan nilai sewa BMD untuk satu tahun tersbut, sehingga Pendapatan Diterima Dimuka Akhir Tahun masih senilai Rp2.500.000,00.

5.4.1.1.4.2. Jasa Giro pada Kas Daerah-LO

Pendapatan Jasa Giro pada Kas Daerah-LO sebesar Rp2.086.692.088,95 merupakan pendapatan atas jasa giro dari 7 (tujuh) jenis rekening koran yang menghasilkan pendapatan jasa giro dan masuk ke RKUD Kabupaten Lampung Barat yaitu:

1.	Jasa Giro dari RKUD	Rp	2.004.034.074,34
2.	Jasa Giro dari Rekening Bendahara Pengeluaran	Rp	9.341.238,40
3.	Jasa Giro dari Rekening Puskesmas	Rp	25.082.016,00
4.	Jasa Giro dari Rekening Sekolah-Lainnya	Rp	9.429.586,94
5.	Jasa Giro dari Bendahara BOS	Rp	11.093.731,84
6.	Jasa Giro dari Rekening Pekon	Rp	22.756.307,48
7.	Jasa Giro dari Lainnya - Lembaga/Badan/Organisasi	Rp	4.935.133,95
	Jumlah	Rp	2.086.692.088,95

Penetapan (LO)	Rp	2.086.692.088,95
Penerimaan RKUD (LRA)	(Rp	2.086.692.088,95)
Piutang Akhir Tahun	Rp	0,00

5.4.1.1.4.3. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO

Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO merupakan pendapatan bunga atas penempatan deposito pada bank lampung selama tahun 2024 dan pendapatan bunga remunerasi dari dana TDF, dengan rincian sbb;

Pendapatan Bunga Deposito	Rp 923.698.630,16
Pendapatan Bunga Remunerasi	Rp 41.603.360,00
Jumlah	Rp 965.301.990,16

Penetapan (LO)	Rp	965.301.990,16
Penerimaan RKUD (LRA)	(Rp	965.301.990,16)
Piutang Akhir Tahun	Rp	0,00

5.4.1.1.4.4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO

Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain adalah proses yang dilakukan untuk memulihkan Kerugian Daerah yang disebabkan oleh kelalaian dari pegawai tersebut.

Piutang TGR Awal Tahun (Aset Lancar)		Rp	62.510.851,56
Tagihan Jangka Panjang (TGR) Awal Tahun (Aset Lainnya)		Rp	3.508.157.928,39
	Saldo Awal	Rp	3.570.668.779,95
Pendapatan TGR – LO		Rp	9.765.167.199,36
Pendapatan TGR - LRA		(Rp	3.743.329.692,53)
	Saldo Akhir	Rp	9.592.506.286,78

Saldo akhir sebesar Rp9.592.506.286,78 terdiri atas :

1. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Aset Lancar)	Rp	55.781.641,04
2. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Aset Lainnya)	Rp	9.536.724.645,74
Jumlah	Rp	9.592.506.286,78

Selisih antara Pendapatan TGR LO dan Pendapatan TGR LRA adalah selisih antara Piutang Awal tahun dengan Piutang Akhir tahun, perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan TGR – LO	Rp	9.765.167.199,36
Pendapatan TGR – LRA	(Rp	3.743.329.692,53)
Selisih	Rp	6.021.837.506,83

Saldo Tagihan TGR Awal Tahun	Rp	3.570.668.779,95
Saldo Tagihan TGR Akhir Tahun	(Rp	9.592.506.286,78)
Selisih	Rp	6.021.837.506,83

5.4.1.1.4.5. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

Pendapatan ini merupakan penerimaan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dan diterima pada tahun 2024 sebesar Rp3.780.393,00.

Penetapan (LO)	Rp	3.780.393,00
Penerimaan RKUD (LRA)	(Rp	3.780.393,00)
Piutang Akhir Tahun	Rp	0,00

5.4.1.1.4.6. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Pendapatan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya/ keterlambatan pembayaran PBBP2.

Pendapatan LO	Rp 0,00
Pendapatan LRA	(Rp 1.139.695,00)
Selisih	Rp1.139.695,00

Selisih sebesar Rp1.139.695,00 merupakan penurunan Piutang Pendapatan Denda PBBP2 yaitu Piutang Awal – Piutang Akhir = Rp1.180.349,24 - Rp40.654,24.

5.4.1.1.4.7. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO

Pendapatan ini merupakan penerimaan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas yang ditetapkan dan diterima pada tahun 2024 sebesar Rp5.518.000,00.

Penetapan (LO)	Rp 5.518.000,00
Penerimaan RKUD (LRA)	(Rp 5.518.000,00)
Piutang Akhir Tahun	Rp 0,00

5.4.1.1.4.8. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengembalian kelebihan pembayaran yang telah dilakukan oleh OPD terkait belanja gaji dan tunjangan ASN-LO. Pendapatan ini dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti kesalahan dalam perhitungan gaji dan tunjangan, atau karena adanya koreksi setelah dilakukan audit.

Pendapatan – LO sebesar	Rp 255.479.299,00
Pendapatan – LRA sebesar	(Rp 222.681.005,00)
Selisih	Rp 32.798.294,00

Selisih ini merupakan kenaikan piutang pengembalian tahun 2024 yaitu:

Piutang awal tahun	Rp 17.000.000,00
Pendapatan LO	Rp 255.479.299,00
Pendapatan LRA	(Rp 222.681.005,00)
Piutang akhir tahun	Rp 49.798.294,00

Selisih antara Piutang Akhir dengan Piutang Awal tahun sebesar Rp32.798.294,00 (Rp49.798.294,00 - Rp17.000.000,00).

5.4.1.1.4.9. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas (kekayaan bersih) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atas hasil pemeriksaan pihak terkait.

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO tahun 2024 sebesar Rp1.634.981.912,00.

Pendapatan – LO	Rp 1.634.981.912,00
Pendapatan – LRA	(Rp 6.985.648,00)
Selisih	Rp 1.627.996.264,00

Selisih sebesar Rp1.627.996.264,00 merupakan Piutang atas iuran jaminan kesehatan bagi non ASN tagihan iuran PBPU Pemda berdasarkan Berita Acara Kesepakatan nomor: 1582/BA/XII-06/0724 Tanggal 12 Desember 2024 tentang kompensasi atas potongan pajak Rokok tahun 2024 dan kompensasi atas temuan BPK RI dan PMK 51 Tahun 2024.

5.4.1.1.4.10. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO

Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan - LO merupakan pendapatan atas jasa layanan yang diberikan oleh RSUD dan Puskesmas total senilai Rp7.037.652.644,00.

Perbedaan Pendapatan LRA dan LO

Pendapatan LRA	Rp 40.856.265.166,00
Pendapatan LO	(Rp 7.037.652.644,00)
Selisih	Rp 33.818.612.522,00

Perhitungan Piutang Jasa Layanan Dinkes dan Puskemas

1	Piutang Awal Tahun RSUD	Rp 2.091.053.809,00		
	Piutang Awal Tahun Puskesmas	Rp 265.879.565,00		
	Jumlah Piutang Awal		Rp	2.356.933.374,00
2	Pendapatan–LO Puskesmas (Periode Jan-Februari)	Rp 2.650.911.840,00		
	Pendapatan–LO RSUD (Periode Jan-Februari)	Rp 4.386.740.804,00		
	Pendapatan–LO RSUD (Disajikan pada Retribusi Daerah, Maret-Des)	Rp 21.431.664.888,00		
	Pendapatan–LO Puskesmas (Disajikan pada Retribusi Daerah, Maret-Des)	Rp 14.493.373.495,00		
	Jumlah Pendapatan LO		Rp	42.962.691.027,00
3	Pendapatan – LRA RSUD	Rp 24.377.834.316,00		
	Pendapatan – LRA Puskesmas	Rp 16.478.430.850,00		
	Jumlah Pendapatan LRA		(Rp	40.856.265.166,00)
4	Lainnya:			
	- Pembayaran utang kelebihan pembayaran pendapatan BLUD RSUD atas pembayaran BPJS tahun lalu	(Rp 389.063.300,00)		
	- Mencatat Surat Tindak Lanjut Konfirmasi Hasil Audit Administrasi klaim RSDU AU atas kelebihan pembayaran klaim dari tahun 2021 s.d. 2024	Rp 175.779.600,00		
	- Angsuran utang yang dikompensasi dengan piutang tahun 2024 atas pengembalian kelebihan pembayaran kapitasi perserta PBIJK pada FKTP Tahun 2021 berdasrkan BA Kompensasi Kapitasi.	(Rp 401.089.100,00)		
	Jumlah Lainnya		(Rp	614.372.800,00)
5	Piutang Akhir Tahun RSUD	Rp 3.318.341.485,00		
	Piutang Akhir Tahun Puskesmas	Rp 530.644.950,00		
	Jumlah Piutang Akhir		**Rp**	**3.848.986.435,00**

Selisih Pendapatan LO dan LRA sebesar Rp33.818.612.522,00 terdiri atas

1.	Kenaikan Piutang Rp3.848.986.435,00 - Rp2.356.933.374,00	(Rp	1.492.053.061,00)
2.	Pendapatan–LO RSUD (Disajikan pada Retribusi Daerah, Maret-Des)	Rp	21.431.664.888,00
3.	Pendapatan–LO Puskesmas (Disajikan pada Retribusi Daerah, Maret-Des)	Rp	14.493.373.495,00
4.	Pembayaran utang kelebihan pembayaran pendapatan BLUD RSUD atas pembayaran BPJS tahun lalu.	(Rp	389.063.300,00)
5.	Mencatat Surat Tindak Lanjut Konfirmasi Hasil Audit Administrasi klaim RSDU AU atas kelebihan pembayaran klaim dari tahun 2021 s.d. 2024	Rp	175.779.600,00
6.	Angsuran utang yang dikompensasi dengan piutang tahun 2024 atas pengembalian kelebihan pembayaran kapitasi perserta PBIJK pada FKTP Tahun 2021 berdasrkan BA Kompensasi Kapitasi.	(Rp	401.089.100,00)
	Jumlah	**Rp**	**33.818.612.522,00**

Signifikansi penurunan Lain-lain PAD yang Sah - Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO karena dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku mulai 16 Februari 2024, bahwa Pelayanan Kesehatan pada RSUD dan Puskesmas pencatatannya termasuk bagian dari Retribusi Jasa Umum, sedangkan pada tahun sebelumnya disajikan pada Lain-lain PAD yang Sah - Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO.

Sehingga seluruh penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan dari bulan Maret s.d. Desember 2024 disajikan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan penerimaan dari bulan Januari s.d. Februari 2024 disajikan pada Lain-lain PAD yang Sah-Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO.

5.4.1.1.4.11. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO

Penerimaan ini merupakan pendapatan yang diterima oleh RSUD Alimuddin Umar hasil kerja sama dengan pihak lain, antara lain : Pelayanan Lain lain Sewa Rumdin, Pelayanan lain - lain GSG, Pelayanan lain - lain Parkir, Pelayanan Sewa ATM, Pelayanan Lain lain Pendidikan dan pelatihan (diklat), Pendapatan lain - lain Daur ulang Limbah total sebesar Rp62.951.581,75.

Penetapan (LO)	Rp	62.951.581,75
Penerimaan RKUD (LRA)	(Rp	64.640.771,00)
Selisih	Rp	1.689.189,25

Selisih ini merupakan peningkatan Pendapatan Diterima sebesar Rp1.689.189,25

Pendapatan Diterima Dimuka awal Tahun RSUD	Rp	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka akhir Tahun RSUD	Rp	1.689.189,25
Selisih	Rp	1.689.189,25

5.4.1.1.4.12. Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO

Penerimaan ini merupakan pendapatan atas jasa giro pada BLUD RSUD Alimuddin Umar, yang ditetapkan dan diterima pada Tahun 2024 senilai Rp15.225.638,00.

Penetapan (LO)	Rp	15.225.638,00
Penerimaan RKUD (LRA)	(Rp	15.225.638,00)
Piutang Akhir Tahun	Rp	0,00

5.4.1.1.4.13. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO merupakan pendapatan bunga atas pengguliran dana kepada masyakat/ pelaku usaha dan pendapatan jasa giro/denda yang diterima oleh BLUD Dana Bergulir selama tahun 2024 sebesar Rp7.868.591,26. Bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2023 Rp6.344.612,36 mengalami peningkatan Rp1.523.978,90.

Berikut perhitungan pendapatan LO dan LRA atas Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

Piutang Awal Tahun	Rp	64.090.000,00
Penetapan (LO)	Rp	7.868.591,26
Penerimaan RKUD (LRA)	(Rp	10.318.591,26)
Piutang Akhir Tahun	Rp	61.640.000,00

Penerimaan RKUD (LRA)	Rp	10.318.591,26
Penetapan (LO)	(Rp	7.868.591,26)
Selisih	Rp	2.450.000,00

Selisih ini merupakan penurunan nilai piutang akhir dibandingkan dengan piutang awal periode yaitu (Rp64.090.000,00 - Rp61.640.000,00 = Rp2.450.000,00).

Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut

Tabel 271. Lain-lain PAD yang Sah - LO per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Dinas Kesehatan				
a)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	1.627.996.264,00	0,00	1.627.996.264,00	-
b)	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	2.650.911.840,00	0,00	2.650.911.840,00	-
c)	Pendapatan dari BLUD-LO	0,00	15.492.557.811,00	(15.492.557.811,00)	(100,00)
	Jumlah	4.278.908.104,00	15.492.557.811,00	(11.213.649.707,00)	(72,38)

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
2.	RSUD Alimuddin Umar				
a)	Pendapatan BLUD dan Jasa Layanan-LO	4.386.740.804,00	0,00	4.386.740.804,00	∞
b)	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	62.951.581,75	0,00	62.951.581,75	∞
c)	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	15.225.638,00	0,00	15.225.638,00	∞
d)	Pendapatan dari BLUD-LO	0,00	24.493.777.720,00	(24.493.777.720,00)	(100,00)
	Jumlah	4.464.918.023,75	24.493.777.720,00	(20.028.859.696,25)	(81,77)
3.	Dinas Koperindag Pasar				
a)	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir LO	7.868.591,26	6.344.612,36	1.523.978,90	24,02
	Jumlah	7.868.591,26	6.344.612,36	1.523.978,90	24,02
4.	Badan Pendapatan Daerah				
	Hasil Sewa BMD-LO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	∞
	Jumlah	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	∞
5.	BPKD				
a)	Hasil Sewa BMD-LO	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
b)	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	2.086.692.088,95	1.465.965.881,46	620.726.207,49	42,34
c)	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	965.301.990,16	2.134.496.422,69	(1.169.194.432,53)	(54,78)
d)	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	0,00	39.300.000,00	(39.300.000,00)	(100,00)
e)	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	9.765.167.199,36	5.034.443.280,25	4.730.723.919,11	93,97
f)	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	0,00	6.372.100,00	(6.372.100,00)	(100,00)
g)	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	3.780.393,00	0,00	3.780.393,00	∞
h)	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	0,00	1.006.335,84	(1.006.335,84)	(100,00)
i)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	0,00	281.069.435,00	(281.069.435,00)	(100,00)
j)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	5.518.000,00	1.250.000,00	4.268.000,00	341,44
k)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	255.479.299,00	0,00	255.479.299,00	∞
l)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	0,00	1.381.369,00	(1.381.369,00)	(100,00)
m)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	6.985.648,00	0,00	6.985.648,00	∞
n)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-LO	0,00	2.590.000,00	(2.590.000,00)	(100,00)
	Jumlah	13.088.924.618,47	8.972.874.824,24	4.116.049.794,23	45,87
	Jumlah	21.845.619.337,48	48.965.554.967,60	(27.119.935.630,12)	(55,39)

5.4.1.2. PENDAPATAN TRANSFER - LO

Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah pusat – lainnya dan transfer pemerintah provinsi.

Tabel 272. Pendapatan Transfer – LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :				
	- Dana Perimbangan-LO	816.444.665.847,00	733.351.544.525,00	83.093.121.322,00	11,33
	- Insentif Fiskal-LO	20.106.738.000,00	5.893.114.000,00	14.213.624.000,00	241,19
	Sub Jumlah	836.551.403.847,00	739.244.658.525,00	97.306.745.322,00	13,16
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah :				
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	88.559.251.212,00	103.093.724.029,00	(14.534.472.817,00)	(14,10)
	Sub Jumlah	88.559.251.212,00	103.093.724.029,00	(14.534.472.817,00)	(14,10)
	Jumlah	925.110.655.059,00	842.338.382.554,00	82.772.272.505,00	9,83

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Transfer TA. 2024 sebesar Rp925.110.655.059,00 mengalami peningkatan sebesar Rp82.772.272.505,00 atau 9,83% dari Pendapatan Transfer TA 2023 sebesar Rp842.338.382.554,00. Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut.

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2024 sebesar Rp836.551.403.847,00 mengalami kenaikan sebesar Rp97.306.745.322,00 atau 13,16% dari Tahun 2023 sebesar Rp739.244.658.525,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO tahun 2024 terdiri atas :

1.	Dana Perimbangan-LO	Rp816.444.665.847,00
2.	Insentif Fiskal-LO	Rp 20.106.738.000,00
3.	Total	Rp836.551.403.847,00

5.4.1.2.1.1. Transfer Pemerintah Pusat – LO (Dana Perimbangan)

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk Periode TA.2024 dan TA 2023 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 273. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA. 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	7.650.764.782,00	10.853.908.308,00	(3.203.143.526,00)	(29,51)
2	Dana Bagi Hasil SDA	9.853.984.671,00	14.082.087.329,00	(4.228.102.658,00)	(30,02)
3	Dana Alokasi Umum	541.231.171.108,00	514.643.114.814,00	26.588.056.294,00	5,17
4	DAK Fisik	119.832.295.786,00	54.035.898.900,00	65.796.396.886,00	121,76
5	DAK Non Fisik	137.876.449.500,00	139.736.535.174,00	(1.860.085.674,00)	(1,33)
	Jumlah	816.444.665.847,00	733.351.544.525,00	83.093.121.322,00	11,33

5.4.1.2.1.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan kepada Kabupaten Lampung Barat untuk periode TA 2024 dan 2023, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 274. Dana Perimbangan – DBH Pajak TA. 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Pajak Bumi & Bangunan (PBB)	2.754.361.000,00	5.725.470.000,00	(2.971.109.000,00)	(51,89)
2.	PPh Psl 21, 25, 29	4.864.801.692,00	4.961.718.308,00	(96.916.616,00)	(1,95)
3.	Cukai Hasil Tembakau	31.602.090,00	166.720.000,00	(135.117.910,00)	(81,04)
	Jumlah	7.650.764.782,00	10.853.908.308,00	(3.203.143.526,00)	(29,51)

Berikut disajikan tabel Perbedaan Dana Perimbangan-DBH Pajak -LO dan LRA.

Tabel 275. Perbedaan Dana Perimbangan-DBH Pajak-LO dan LRA

No	Uraian	LRA	LO	Selisih	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	6
1.	Pajak Bumi & Bangunan (PBB)	1.786.306.000,00	2.754.361.000,00	(968.055.000,00)	Selisih
2.	PPh Psl 21, 25, 29	4.775.453.000,00	4.864.801.692,00	(89.348.692,00)	Selisih
3.	Cukai Hasil Tembakau	139.120.000,00	31.602.090,00	107.517.910,00	Selisih
		6.700.879.000,00	7.650.764.782,00	(949.885.782,00)	

5.4.1.2.1.1.1.1. Pajak Bumi & Bangunan (PBB)

Penerimaan Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Tahun 2024 sebesar Rp2.754.361.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023 DBH Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	1.556.418.000,00
2.	PMK 89/2024 PMK LB / KB Tahun 2024, KB Tahun 2023	Rp	1.387.877.000,00
3.	SIKD-NG Tgl 31 Des 2024, Potongan TDF	(Rp	189.934.000,00)
	Jumlah	Rp	2.754.361.000,00

Piutang PBB awal tahun		Rp	0,00
Piutang PBB awal tahun TDF		Rp	229.888.000,00
	Jumlah Piutang Awal	**Rp**	**229.888.000,00**
Pendapatan PBB – LO		Rp	2.618.280.000,00
Pendapatan PBB – LO TDF		Rp	136.081.000,00
	Jumlah Pendapatan LO	**Rp**	**2.754.361.000,00**
Pendapatan PBB – LRA		Rp	1.556.418.000,00
Pendapatan PBB – LRA TDF		Rp	229.888.000,00
	Jumlah Pendapatan LRA	**Rp**	**1.786.306.000,00**
Piutang PBB akhir tahun		Rp	1.061.862.000,00
Piutang PBB akhir tahun TDF		Rp	136.081.000,00
	Jumlah Piutang Akhir	**Rp**	**1.197.943.000,00**

Perbedaan Pendapatan LO dan LRA sebagai berikut:

Pendapatan LO	Rp2.754.361.000,00
Pendapatan LRA	Rp1.786.306.000,00
Selisih	Rp 968.055.000,00

Selisih sebesar Rp968.055.000,00 merupakan kenaikan jumlah piutang akhir dibandingkan dengan piutang awal tahun (Rp1.197.943.000,00 - Rp229.888.000,00).

5.4.1.2.1.1.1.2. PPh Psl 21, 25. 29

Penerimaan PPh Psl 21,25,29 Tahun 2024 sebesar Rp4.864.801.692,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023 DBH PPh Psl 21,25,29	Rp	3.983.293.000,00
2.	PMK 89/2024 PMK LB / KB Tahun 2024, KB Tahun 2023, KB Tahun 2022	Rp	1.152.151.692,00
3.	SIKD-NG Tgl 31 Des 2024, Potongan TDF	(Rp	270.643.000,00)
	Jumlah	Rp	4.864.801.692,00

Piutang PPh Psl 21,25,29 awal tahun		Rp	308,00
Piutang PPh Psl 21,25,29 awal tahun TDF		Rp	792.160.000,00
	Jumlah Piutang Awal	**Rp**	**792.160.308,00**
Pendapatan PPh Psl 21,25,29 – LO		Rp	4.864.801.692,00
Pendapatan PPh Psl 21,25,29 – LO TDF		Rp	0,00
	Jumlah Pendapatan LO	**Rp**	**4.864.801.692,00**
Pendapatan PPh Psl 21,25,29 – LRA		Rp	3.983.293.000,00
Pendapatan PPh Psl 21,25,29 – LRA TDF		Rp	792.160.000,00
	Jumlah Pendapatan LRA	**Rp**	**4.775.453.000,00**
Piutang PPh Psl 21,25,29 akhir tahun		Rp	881.509.000,00
Piutang PPh Psl 21,25,29 akhir tahun TDF		Rp	0,00
	Jumlah Piutang Akhir	**Rp**	**881.509.000,00**

Perbedaan Pendapatan LO dan LRA sebagai berikut:

Pendapatan LO	Rp4.864.801.692,00
Pendapatan LRA	(Rp4.775.453.000,00)
Selisih	Rp 89.348.692,00

Selisih ini merupakan kenaikan jumlah piutang akhir dibandingkan dengan piutang awal tahun (Rp881.509.000,00 - Rp792.160.308,00 = Rp89.348.692,00)

5.4.1.2.1.1.1.3. Cukai Hasil Tembakau

Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Tahun 2024 sebesar Rp31.602.090,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	PMK No 6 Tahun 2024 DBH CHT	Rp	126.210.000,00
2.	PMK 89/2024 PMK LB / KB Tahun 2024, KB Tahun 2023, KB Tahun 2022	(Rp	94.607.910,00)
	Jumlah	Rp	31.602.090,00

Piutang Cukai Hasil Tembakau awal tahun	Rp	112.941.910,00
Jumlah Piutang Awal	**Rp**	**112.941.910,00**
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau – LO	Rp	31.602.090,00
Jumlah Pendapatan LO	**Rp**	**31.602.090,00**
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau – LRA	Rp	139.120.000,00
Jumlah Pendapatan LRA	**Rp**	**139.120.000,00**
Piutang Cukai Hasil Tembakau akhir tahun	Rp	5.424.000,00
Jumlah Piutang Akhir	**Rp**	**5.424.000,00**

Perbedaan Pendapatan LO dan LRA sebagai berikut:

Pendapatan LO	Rp 31.602.090,00
Pendapatan LRA	(Rp139.120.000,00)
Selisih	(Rp107.517.910,00)

Selisih ini merupakan penurunan jumlah piutang akhir dibandingkan dengan piutang awal tahun (Rp5.424.000,00- Rp112.941.910,00 = -Rp107.517.910,00)

5.4.1.2.1.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan kepada Kabupaten Lampung Barat untuk periode TA 2024 dan 2023, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 276. Dana Perimbangan – DBH Sumber Daya Alam TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi	2.904.457.903,00	7.277.526.097,00	(4.373.068.194,00)	(60,09)
2.	DBH SDA Pertambangan Panas Bumi	1.908.217.115,00	4.902.728.885,00	(2.994.511.770,00)	(61,08)
3.	DBH SDA Pertambangan Umum	113.350.000,00	303.187.000,00	(189.837.000,00)	(62,61)
4.	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	151.447.653,00	311.896.347,00	(160.448.694,00)	(51,44)
5.	DBH SDA Perikanan	1.097.155.000,00	1.286.749.000,00	(189.594.000,00)	(14,73)
6.	DBH SDA Hasil Perkebunana Sawit	3.679.357.000,00	0,00	3.679.357.000,00	∞
	Jumlah	**9.853.984.671,00**	**14.082.087.329,00**	**(4.228.102.658,00)**	**(30,02)**

Berikut disajikan tabel Perbedaan Dana Perimbangan-DBH Sumber Daya Alam -LO dan LRA.

Tabel 277. Perbedaan Dana Perimbangan-DBH SDA-LO dan LRA

No	Uraian	LRA	LO	Selisih	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	6
1.	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi	3.382.434.000,00	2.904.457.903,00	477.976.097,00	Selisih
2.	DBH SDA Pertambangan Panas Bumi	3.862.774.000,00	1.908.217.115,00	1.954.556.885,00	Selisih
3.	DBH SDA Pertambangan Umum	189.229.000,00	113.350.000,00	75.879.000,00	Selisih
4.	DBH SDA Kehutanan-PSDH	216.817.000,00	151.447.653,00	65.369.347,00	Selisih
5.	DBH SDA Perikanan	1.097.155.000,00	1.097.155.000,00	0,00	-
6.	DBH SDA Hasil Perkebunana Sawit	3.679.357.000,00	3.679.357.000,00	0,00	-
Jumlah		12.427.766.000,00	9.853.984.671,00	2.573.781.329,00	

5.4.1.2.1.1.2.1. DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Tahun 2024 sebesar Rp2.904.457.903,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023 DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi	Rp	2.904.457.000,00
2.	PMK 89/2024 PMK LB / KB Tahun 2024, KB Tahun 2023, KB Tahun 2022	Rp	903,00
	Jumlah	Rp	2.904.457.903,00

Perhitungan selisih Pendapatan LRA dan LO sebesar Rp477.976.097,00

1.	Piutang Awal Tahun	Rp	1.097,00
2.	TDF Awal Tahun	Rp	477.977.000,00
3.	TDF Akhir Tahun	(Rp	2.000,00)
4.	Pendapatan LO	Rp	2.904.457.903,00
5.	Pendapatan LRA	(Rp	3.382.434.000,00)
6.	Piutang Akhir	(Rp	0,00)
7.	Selisih	Rp	0,00

Selisih sebesar Rp477.976.097,00, merupakan Penurunan Piutang akhir dengan awal periode dan penurunan TDF akhir dengan awal periode yaitu (Rp1.097,00-Rp0,00=Rp1.097,00)+(Rp477.977.000,00-Rp2.000,00=Rp477.975.000,00).

5.4.1.2.1.1.2.2. DBH SDA Pertambangan Panas Bumi

Penerimaan DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun 2024 sebesar Rp1.908.217.115,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023 DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi	Rp	1.841.061.000,00
2.	PMK 89/2024 PMK LB / KB Tahun 2024, KB Tahun 2023, KB Tahun 2022	Rp	67.156.115,00
	Jumlah	Rp	1.908.217.115,00

Perhitungan selisih Pendapatan LRA dan LO sebesar Rp1.954.556.885,00

1.	Piutang Awal Tahun	Rp	885,00
2.	TDF Awal Tahun	Rp	2.021.713.000,00
3.	TDF Akhir Tahun	(Rp	15.776.000,00)
4.	Pendapatan LO	Rp	1.908.217.115,00
5.	Pendapatan LRA	(Rp	3.862.774.000,00)
6.	Piutang Akhir	(Rp	51.381.000,00)
7.	Selisih	Rp	0,00

Selisih sebesar Rp1.954.556.885,00, merupakan Penurunan Piutang akhir dengan awal periode dan penurunan TDF akhir dengan awal periode yaitu (Rp885,00 - Rp51.381.000,00 = Rp51.380.115,00) + (Rp2.021.713.000,00 - Rp15.776.000,00 = Rp2.005.937.000,00).

5.4.1.2.1.1.2.3. DBH SDA Pertambangan Umum

Penerimaan DBH SDA Pertambangan Pertambangan Umum Tahun 2024 sebesar Rp113.350.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023 DBH SDA Pertambangan Umum	Rp	113.350.000,00
	Jumlah	Rp	113.350.000,00

Perhitungan selisih Pendapatan LRA dan LO sebesar Rp75.879.000,00

1.	Piutang Awal Tahun	Rp	0,00
2.	TDF Awal Tahun	Rp	75.879.000,00
3.	TDF Akhir Tahun	(Rp	0,00)
4.	Pendapatan LO	Rp	113.350.000,00
5.	Pendapatan LRA	(Rp	189.229.000,00)
6.	Piutang Akhir	(Rp	0,00)
7.	Selisih	Rp	0,00

Selisih sebesar Rp75.879.000,00, merupakan penurunan TDF akhir periode dengan TDF awal yaitu (Rp75.879.000,00 - Rp0,00 = Rp75.879.000,00).

5.4.1.2.1.1.2.4. DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO

Penerimaan DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO Tahun 2024 sebesar Rp151.447.653,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023 DBH SDA Kehutanan PSDH	Rp	151.447.000,00

2	PMK 89/2024 PMK LB / KB Tahun 2024, KB Tahun 2023, KB Tahun 2022	Rp	653,00
	Jumlah	Rp	151.447.653,00

Perhitungan selisih Pendapatan LRA dan LO sebesar Rp65.369.347,00

1	Piutang Awal Tahun	Rp	1.347,00
2	TDF Awal Tahun	Rp	65.370.000,00
3	TDF Akhir Tahun	(Rp	2.000,00)
4	Pendapatan LO	Rp	151.447.653,00
5	Pendapatan LRA	(Rp	216.817.000,00)
6	Piutang Akhir	(Rp	0,00)
7	Selisih	Rp	0,00

Selisih sebesar Rp65.369.347,00, merupakan penurunan TDF akhir periode dengan TDF awal dan Piutang Awal dengan Piutang Akhir yaitu (Rp65.370.000,00 - Rp2.000,00 = Rp65.369.347,00) + (Rp1.347,00 0,00 = Rp1.347,00)

5.4.1.2.1.1.2.5. DBH SDA Perikanan

Penerimaan DBH SDA Perikanan Tahun 2024 sebesar Rp1.097.155.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1	Perpres 76/2023 DBH SDA Perikanan	Rp	1.097.155.000,00
	Jumlah	Rp	1.097.155.000,00

5.4.1.2.1.1.2.6. DBH SDA Hasil Perkebunana Sawit

Penerimaan DBH SDA Hasil Perkebunana Sawit Tahun 2024 sebesar Rp3.679.357.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1	Perpres 76/2023 DBH SDA Perkebunan Sawit	Rp	3.679.357.000,00
	Jumlah	Rp	3.679.357.000,00

5.4.1.2.1.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan kepada Kabupaten Lampung Barat untuk periode TA 2024 dan 2023, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 278. Dana Alokasi Umum TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dana Alokasi Umum	541.231.171.108,00	514.643.114.814,00	26.588.056.294,00	5,17
	Jumlah	541.231.171.108,00	514.643.114.814,00	26.588.056.294,00	5,17

Penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2024 sebesar Rp541.231.171.108 dengan rincian sebagai berikut:

1	Perpres 76/2023 DAU Blok Grand (tidak ditentukan penggunaannya)	Rp	434.843.839.000,00
2	Perpres 76/2023 DAU Dukungan Untuk Penggajian PPPK Daerah	Rp	14.657.049.000,00
3	Penyesuaian atas Kekurangan Bayaran dari Pemerintah Pusat kepada Kab. Lambar atas DAU Penggajian PPPK Daerah Rp7.047.860.892,00, Penerimaan disesuaikan dengan Realisasi Kebutuhan Daerah.	(Rp	7.047.860.892,00)
4	Perpres 76/2023 DAU Dukungan Pembangunan Sapras PM di Kelurahan	Rp	1.000.000.000,00

5.	Perpres 76/2023 DAU Dukungan Bidang Pendidikan	Rp	46.169.037.000,00
6.	Perpres 76/2023 DAU Dukungan Bidang Kesehatan	Rp	29.483.685.000,00
7.	Perpres 76/2023 DAU Dukungan Bidang Pekerjaan Umum	Rp	16.969.646.000,00
8.	KMK 416/ 2024 DAU DAU THR & Gaji ke 13 bagi Guru ASN, Gaji ke 13 Rp2.577.888.000 dan THR Rp2.577.888.000	Rp	5.155.776.000,00
	Jumlah	Rp	541.231.171.108,00

5.4.1.2.1.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat – DAK kepada Kabupaten Lampung Barat untuk periode TA 2024 dan TA 2023, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 279. Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	119.832.295.786,00	54.035.898.900,00	65.796.396.886,00	121,78
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	137.876.449.500,00	139.736.535.174,00	(1.860.085.674,00)	(1,33)
	Jumlah	257.708.745.286,00	193.772.434.074,00	63.936.311.212,00	33,00

Berikut disajikan tabel Perbedaan Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO dan LRA.

Tabel 280. Perbedaan Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO dan LRA

No	Uraian	LRA	LO	Selisih	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	6
1.	Dana Alokasi Khusus Fisik	119.832.295.786,00	119.832.295.786,00	0,00	-
2.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	137.876.449.500,00	137.876.449.500,00	0,00	-
Jumlah		257.708.745.286,00	257.708.745.286,00	0,00	-

Rincian Dana Alokasi Khusus pada masing – masing bidang kegiatan dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 281. Dana Alokasi Khusus Per Bidang Kegiatan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	DAK FISIK				
	- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	894.596.000,00	1.059.863.000,00	(165.267.000,00)	(15,59)
	- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	6.570.203.034,00	4.201.354.000,00	2.368.849.034,00	56,38
	- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	3.306.813.279,00	3.515.858.800,00	(209.045.521,00)	(5,95)
	- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah-LO	10.137.377.300,00	0,00	10.137.377.300,00	∞
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	0,00	360.858.000,00	(360.858.000,00)	(100,00)
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO	469.130.000,00	0,00	469.130.000,00	∞
	- DAK Fisik-Bidang IKM-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO	3.310.290.277,00	3.394.868.945,00	(84.578.668,00)	(2,49)
	- DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.629.450.640,00	2.302.102.913,00	(672.652.273,00)	(29,22)
	- DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	15.722.129.000,00	30.849.503.000,00	(15.127.374.000,00)	(49,04)
	- DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	3.343.600.000,00	1.727.200.000,00	1.616.400.000,00	93,58
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	4.948.937.256,00	0,00	4.948.937.256,00	∞
	- DAK Fisik - Bidang Perdagangan - Penugasan	69.499.769.000,00	0,00	69.499.769.000,00	∞
	- DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan-LO	0,00	6.624.290.242,00	(6.624.290.242,00)	(100,00)
	JUMLAH DAK FISIK	119.832.295.786,00	54.035.898.900,00	65.796.396.886,00	121,78

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
2	DAK NON FISIK				
	- DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	37.853.439.558,00	38.075.219.937,00	(221.780.379,00)	(0,58)
	- DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.315.000.000,00	1.550.000.000,00	(235.000.000,00)	(15,16)
	- DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	63.856.385.000,00	61.436.351.940,00	2.420.033.060,00	3,94
	- DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.119.518.000,00	1.430.574.321,00	(311.056.321,00)	(21,74)
	- DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	321.177.000,00	297.750.063,00	23.426.937,00	7,87
	- DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	3.013.095.000,00	3.307.420.000,00	(294.325.000,00)	(8,90)
	- DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	1.084.350.602,00	1.323.690.000,00	(239.339.398,00)	(18,08)
	- DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	20.668.793.081,00	22.108.085.456,00	(1.439.292.375,00)	(6,51)
	- DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	364.744.000,00	0,00	364.744.000,00	-
	- DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	4.513.701.365,00	4.794.125.304,00	(280.423.939,00)	(5,85)
	- DAK Non Fisik-PK2UKM-(Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM)-LO	514.556.000,00	417.482.653,00	97.073.347,00	23,25
	- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	1.040.018.900,00	977.853.000,00	62.165.900,00	6,36
	- DAK Non Fisik-Fasilitasi Penambahan Modal-LO	400.979.600,00	388.358.000,00	12.621.600,00	3,25
	- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	268.224.500,00	229.205.100,00	39.019.400,00	17,02
	- DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian-LO	0,00	650.419.400,00	(650.419.400,00)	(100,00)
	- DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.542.466.894,00	2.750.000.000,00	(1.207.533.106,00)	(43,91)
	Jumlah DAK Non Fisik	137.876.449.900,00	139.736.535.174,00	(1.860.085.674,00)	(1,33)
	JUMLAH DAK	257.708.745.286,00	193.772.434.074,00	63.936.311.212,00	33,00

5.4.1.2.1.1.4.1. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO

Penerimaan DAK Fisik Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO Tahun 2024 sebesar Rp894.596.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023 DAK Fisik Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Rp	896.961.000,00
2.	AJP 31 Des 2024, Piutang Akhir Tahun Nihil	(Rp	2.365.000,00)
	Jumlah	Rp	894.596.000,00

5.4.1.2.1.1.4.2. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO

Penerimaan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO Tahun 2024 sebesar Rp6.570.203.034,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023 DAK Fisik Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Rp	6.613.008.000,00
2.	AJP 31 Des 2024, Piutang Akhir Tahun Nihil	(Rp	42.804.966,00)
	Jumlah	Rp	6.570.203.034,00

5.4.1.2.1.1.4.3. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO

Penerimaan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO Tahun 2024 sebesar Rp3.306.813.279,00dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023 DAK Fisik Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Rp	3.316.148.000,00
2.	AJP 31 Des 2024, Piutang Akhir Tahun Nihil	(Rp	9.334.721,00)
	Jumlah	Rp	3.306.813.279,00

5.4.1.2.1.1.4.4. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah-LO

Penerimaan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp3.306.813.279,00dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	Rp	10.183.774.000,00
2.	AJP 31 Des 2024, Piutang Akhir Tahun Nihil	(Rp	46.396.700,00)
	Jumlah	Rp	10.137.377.300,00

5.4.1.2.1.1.4.5. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO

Penerimaan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO Tahun 2024 sebesar Rp469.130.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	Rp	512.660.000,00
2.	AJP 31 Des 2024, Piutang Akhir Tahun Nihil	(Rp	43.530.000,00)
	Jumlah	Rp	469.130.000,00

5.4.1.2.1.1.4.6. DAK Fisik-Bidang IKM-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM

Penerimaan DAK Fisik-Bidang IKM-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM Tahun 2024 sebesar Rp3.310.290.277,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023 DAK Fisik-Bidang IKM-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	Rp	3.321.738.000,00
2.	AJP 31 Des 2024, Piutang Akhir Tahun Nihil	(Rp	11.447.723,00)
	Jumlah	Rp	3.310.290.277,00

5.4.1.2.1.1.4.7. DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan

Penerimaan DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan Tahun 2024 sebesar Rp1.629.450.640,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023 DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	Rp	2.430.766.000,00
2.	AJP 31 Des 2024, Piutang Akhir Tahun Nihil	(Rp	801.315.360,00)
	Jumlah	Rp	1.629.450.640,00

5.4.1.2.1.1.4.8. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO

Penerimaan DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO Tahun 2024 sebesar Rp15.722.129.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023 DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	Rp	15.876.742.000,00
2.	AJP 31 Des 2024, Piutang Akhir Tahun Nihil	(Rp	154.613.000,00)
	Jumlah	Rp	15.722.129.000,00

5.4.1.2.1.1.4.9. DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup

Penerimaan DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup Tahun 2024 sebesar Rp3.343.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	Rp	3.355.207.000,00
2.	AJP 31 Des 2024, Piutang Akhir Tahun Nihil	(Rp	11.607.000,00)
	Jumlah	Rp	3.343.600.000,00

5.4.1.2.1.1.4.10. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan

Penerimaan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan Tahun 2024 sebesar Rp4.948.937.256,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	Rp	5.012.083.000,00
2.	AJP 31 Des 2024, Piutang Akhir Tahun Nihil	(Rp	63.145.744,00)
	Jumlah	Rp	4.948.937.256,00

5.4.1.2.1.1.4.11. DAK Fisik - Bidang Perdagangan - Penugasan

Penerimaan DAK Fisik - Bidang Perdagangan - Penugasan Tahun 2024 sebesar Rp69.499.769.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	Rp	70.000.000.000,00
2.	AJP 31 Des 2024, Piutang Akhir Tahun Nihil	(Rp	500.231.000,00)
	Jumlah	Rp	69.499.769.000,00

5.4.1.2.1.1.4.12. DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO

Penerimaan DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO Tahun 2024 sebesar Rp37.853.439.558,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023 DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	Rp	37.942.350.000,00
2.	AJP 31 Des 2024, Piutang Akhir Tahun Nihil	(Rp	88.910.442,00)
	Jumlah	Rp	37.853.439.558,00

5.4.1.2.1.1.4.13. DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO

Penerimaan DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO Tahun 2024 sebesar Rp1.315.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	Rp	1.315.000.000,00
		Jumlah	Rp	1.315.000.000,00

5.4.1.2.1.1.4.14. DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO

Penerimaan DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO Tahun 2024 sebesar Rp63.856.385.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023 -DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	Rp	66.253.518.000,00
2.	KMK 423/2024, Revisi DAK Non Fisik	(Rp	2.397.133.000,00)
	Jumlah	Rp	63.856.385.000,00

5.4.1.2.1.1.4.15. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO

Penerimaan DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO Tahun 2024 sebesar Rp1.119.518.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	Rp	1.119.518.000,00
	Jumlah	Rp	1.119.518.000,00

5.4.1.2.1.1.4.16. DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO

Penerimaan DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO Tahun 2024 sebesar Rp321.177.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023 -DAK Non Fisik-TKG PNSD	Rp	404.163.000,00
2.	KMK 423/2024, Revisi DAK Non Fisik	(Rp	82.986.000,00)
	Jumlah	Rp	321.177.000,00

5.4.1.2.1.1.4.17. DAK Non Fisik-PAUD-LO

Penerimaan DAK Non Fisik-PAUD-LO Tahun 2024 sebesar Rp3.013.095.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023 -DAK Non Fisik-PAUD	Rp	3.021.330.000,00
2.	AJP 31 Des 2024, Piutang Akhir Tahun Nihil	(Rp	8.235.000,00)
3.		Jumlah Rp	3.013.095.000,00

5.4.1.2.1.1.4.18. DAK Non Fisik- BOP Pendidikan Kesetaraan-LO

Penerimaan DAK Non Fisik- BOP Pendidikan Kesetaraan-LO Tahun 2024 sebesar Rp321.177.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023 - BOP Pendidikan Kesetaraan	Rp	1.153.140.000,00
2.	AJP 31 Des 2024, Piutang Akhir Tahun Nihil	(Rp	68.789.398,00)
	Jumlah	Rp	1.084.350.602,00

5.4.1.2.1.1.4.19. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO

Penerimaan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO Tahun 2024 sebesar Rp20.668.793.081,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023 – BOK Kesehatan	Rp	21.588.602.000,00
2.	AJP 31 Des 2024, Piutang Akhir Tahun Nihil	(Rp	919.808.919,00)
	Jumlah	Rp	20.668.793.081,00

5.4.1.2.1.1.4.20. DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan

Penerimaan DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 sebesar Rp364.744.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023	Rp	364.744.000,00
	Jumlah	Rp	364.744.000,00

5.4.1.2.1.1.4.21. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO

Penerimaan DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO Tahun 2024 sebesar Rp4.513.701.365,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023	Rp	4.853.514.000,00
2.	AJP 31 Des 2024, Piutang Akhir Tahun Nihil	(Rp	339.812.635,00)
	Jumlah	Rp	4.513.701.365,00

5.4.1.2.1.1.4.22. DAK Non Fisik-PK2UKM-(Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM)-LO

Penerimaan DAK Non Fisik-PK2UKM-(Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM)-LO ahun 2024 sebesar Rp514.556.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023	Rp	514.556.000,00
	Jumlah	Rp	514.556.000,00

5.4.1.2.1.1.4.23. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan

Penerimaan DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan ahun 2024 sebesar Rp1.040.018.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023	Rp	1.091.220.000,00
2.	Potongan SIKD-NG	(Rp	51.201.100,00)
	Jumlah	Rp	1.040.018.900,00

5.4.1.2.1.1.4.24. DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO

Penerimaan DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO ahun 2024 sebesar Rp400.979.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023	Rp	415.178.000,00
2.	AJP 31 Des 2024, Piutang Akhir Tahun Nihil	(Rp	14.198.400,00)
	Jumlah	Rp	400.979.600,00

5.4.1.2.1.1.4.25. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO

Penerimaan DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO Tahun 2024 sebesar Rp268.224.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023	Rp	406.000.000,00
2.	AJP 31 Des 2024, Piutang Akhir Tahun Nihil	(Rp	137.775.500,00)
	Jumlah	Rp	268.224.500,00

5.4.1.2.1.1.4.26. DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM

Penerimaan DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM tahun 2024 sebesar Rp1.542.466.894,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023	Rp	1.719.002.000,00
2.	AJP 31 Des 2024, Piutang Akhir Tahun Nihil	(Rp	176.535.106,00)
	Jumlah	Rp	1.542.466.894,00

5.4.1.2.1.2. Insentif Fiskal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Insentif Fiskal dapat diberikan kepada daerah atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja berdasarkan kriteria pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan Umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.

Penerimaan Insentif Fiskal pada Kabupaten Lampung Barat kategori kinerja percepatan belanja daerah, berdasarkan Keputusan Perpres 76/2023 sebesar Rp14.535.665.000,00 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 295 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal TA 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp5.571.073.000,00.

Realisasi Penerimaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp20.106.738.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp14.213.624.000,00 atau 241,19% jika dibandingkan dengan realisasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp5.893.114.000,00, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 282. Insentif Fiskal TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)		(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Dana Insentif Fiskal	20.106.738.000,00	5.893.114.000,00	14.213.624.000,00	241,19
	Jumlah	20.106.738.000,00	5.893.114.000,00	14.213.624.000,00	241,19

Berikut disajikan tabel Perbedaan Pendapatan Insentif Fiskal-LO dan LRA.

Tabel 283. Perbedaan Dana Insentif Fiskal- LO dan LRA

No	Uraian	LRA	LO	Selisih	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	6
1.	Dana Insentif Fiskal	20.106.738.000,00	20.106.738.000,00	0,00	-
Jumlah		20.106.738.000,00	20.106.738.000,00	0,00	-

Penerimaan Dana Insentif Fiskal-LO Tahun 2024 sebesar Rp20.106.738.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Perpres 76/2023 – Insentif Fiskal	Rp	14.535.665.000,00
2.	PMK 295/2024 – Insentif Fiskal Tambahan	Rp	5.571.073.000,00
	Jumlah	Rp	20.106.738.000,00

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Penerimaan Transfer Antar Daerah merupakan transfer Pemerintah Provinsi Lampung yang dialokasikan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat meliputi dana bantuan untuk pembangunan yang didasarkan pada SK Gubernur Lampung dan rincian Transfer Pemerintah Provinsi Lampung tersaji pada tabel berikut.

Tabel 284. Dasar Hukum Penetapan Transfer Antar Daerah

No	Nomor Dokumen	Tentang	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kep.Gub.Lampung Nomor G/343/VI.03/HK/2024	DBH Pajak TW I 2024	14.293.121.844,00
	Kep.Gub.Lampung Nomor G/429/VI.03/HK/2024	DBH Pajak TW II 2024	14.895.146.928,00
	Kep.Gub.Lampung Nomor G/715/VI.03/HK/2024	DBH Pajak TW III 2024	16.937.620.359,00
	Kep.Gub.Lampung Nomor G/147/VI.03/HK/2025	DBH Pajak TW IV 2024	17.872.723.569,00
	Kep.Gub.Lampung Nomor G/322/VI.03/HK/2024	Pajak Rokok Desember 2023	3.760.513.141,00
	Kep.Gub.Lampung Nomor G/323/VI.03/HK/2024	Pajak Rokok Triwulan I TA.2024	5.866.849.613,00
	Kep.Gub.Lampung Nomor G/430/VI.03/HK/2024	Pajak Rokok Triwulan II TA.2024	5.100.137.973,00
	Kep.Gub.Lampung Nomor G/714/VI.03/HK/2024	Pajak Rokok Triwulan III TA.2024	5.882.343.459,00
	Kep.Gub.Lampung Nomor G/870/VI.03/HK/2024	Pajak Rokok Triwulan IV TA.2024	3.950.794.326,00
		Jumlah	88.559.251.212,00

Tabel 285. Transfer Pemerintah Provinsi TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	88.559.251.212,00	103.093.724.029,00	(14.534.472.817,00)	(14,10)
Jumlah		88.559.251.212,00	103.093.724.029,00	(14.534.472.817,00)	(14,10)

Rincian transfer bagi hasil dari provinsi pada masing – masing akun dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 286. Rincian Transfer Pemerintah Provinsi TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	16.872.066.394,00	19.699.200.225,00	(2.827.133.831,00)	(14,35)
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB)	11.693.387.172,00	12.505.852.906,00	(812.465.734,00)	(6,50)
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB)	34.882.442.309,00	43.532.523.824,00	(8.650.081.515,00)	(19,87)
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan & Air Bawah Tanah	550.716.825,00	648.697.744,00	(97.980.919,00)	(15,10)
5	Pajak Rokok	24.560.638.512,00	26.707.449.330,00	(2.146.810.818,00)	(8,04)
Jumlah		88.559.251.212,00	103.093.724.029,00	(14.534.472.817,00)	(14,10)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO TA 2024 sebesar Rp88.559.251.212,00 mengalami penurunan sebesar (Rp14.534.472.817,00) atau (14,10%) dari Pendapatan – LO TA 2023 sebesar Rp103.093.724.029,00.

Berikut disajikan tabel Perbedaan Transfer Pemerintah Provinsi - LO dan LRA.

Tabel 287. PerbedaanTransfer Pemerintah Provinsi - LO dan LRA

No	Uraian	LRA	LO	Selisih	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	6
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	15.815.497.353,00	16.872.066.394,00	(1.056.569.041,00)	Selisih
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB)	7.028.302.719,00	11.693.387.172,00	(4.665.084.453,00)	Selisih
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB)	34.812.496.882,00	34.882.442.309,00	(69.945.427,00)	Selisih
4.	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan & Air Bawah Tanah	485.166.475,00	550.716.825,00	(65.550.350,00)	Selisih
5.	Pajak Rokok	24.601.682.883,00	24.560.638.512,00	41.044.371,00	Selisih
Jumlah		82.743.146.312,00	88.559.251.212,00	(5.816.104.900,00)	

5.4.1.2.2.1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO sebesar Rp16.872.066.394,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	G/343/VI.03/HK/2024	TW I 2024 PKB	Rp	3.475.296.383,00
2.	G/429/VI.03/HK/2024	TW II 2024 PKB	Rp	3.503.194.648,00
3.	G/715/VI.03/HK/2024	TW III 2024 PKB	Rp	4.630.305.900,00
4.	G/147/VI.03/HK/2024	TW IV 2024 PKB	Rp	5.263.269.463,00
		Jumlah	Rp	16.872.066.394,00

Terdapat Perbedaan Pendapatan LO dan LRA sebagai berikut:

Pendapatan LO	Rp16.872.066.394,00
Pendapatan LRA	(Rp15.815.497.353,00)
Selisih	Rp 1.056.569.041,00

Adapun perhitungan selisih pendapatan LO dan LRA sebagai berikut:

Piutang PKB awal tahun	Rp	12.340.200.970,00
Pendapatan PKB Tahun 2024 – LO	Rp	16.872.066.394,00
Pendapatan PKB Tahun 2024 – LRA	(Rp	15.815.497.353,00)
Jumlah Piutang Akhir	Rp	13.396.770.011,00

Selisih pendapatan LO dan Pendapatan LRA merupakan kenaikan jumlah piutang akhir dibandingkan dengan piutang awal tahun sebesar Rp1.056.569.041,00 (Rp12.340.200.970,00 - Rp13.396.770.011,00).

5.4.1.2.2.2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB)

Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermoro (BBNKB)-LO sebesar Rp11.693.387.172,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	G/343/VI.03/HK/2024	TW I 2024 BBNKB	Rp	2.309.220.958,00
2.	G/429/VI.03/HK/2024	TW II 2024 BBNKB	Rp	2.530.395.832,00
3.	G/715/VI.03/HK/2024	TW III 2024 BBNKB	Rp	3.115.300.425,00
4.	G/147/VI.03/HK/2024	TW IV 2024 BBNKB	Rp	3.738.469.957,00
		Jumlah	Rp	11.693.387.172,00

Terdapat Perbedaan Pendapatan LO dan LRA sebagai berikut:

Pendapatan LO	Rp11.693.387.172,00
Pendapatan LRA	(Rp 7.028.302.719,00)
Selisih	Rp 4.665.084.453,00

Adapun perhitungan selisih pendapatan LO dan LRA sebagai berikut:

Piutang PKB awal tahun	Rp	7.028.302.719,00
Pendapatan PKB Tahun 2024 – LO	Rp	11.693.387.172,00
Pendapatan PKB Tahun 2024 – LRA	(Rp	7.028.302.719,00)
Jumlah Piutang Akhir	Rp	11.693.387.172,00

Selisih pendapatan LO dan Pendapatan LRA merupakan kenaikan jumlah piutang akhir dibandingkan dengan piutang awal tahun yaitu (Rp7.028.302.719,00 - Rp11.693.387.172,00 = Rp 4.665.084.453,00).

5.4.1.2.2.3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB)

Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) -LO sebesar Rp34.882.442.309,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.	G/343/VI.03/HK/2024	TW I 2024 PBB KB	Rp	8.392.576.972,00
6.	G/429/VI.03/HK/2024	TW II 2024 PBB KB	Rp	8.677.676.177,00
7.	G/715/VI.03/HK/2024	TW III 2024 PBB KB	Rp	9.066.763.236,00
8.	G/147/VI.03/HK/2024	TW IV 2024 PBB KB	Rp	8.745.425.924,00
		Jumlah	Rp	34.882.442.309,00

Terdapat Perbedaan Pendapatan LO dan LRA sebagai berikut:

Pendapatan LO	Rp 34.882.442.309,00
Pendapatan LRA	(Rp 34.812.496.882,00)
Selisih	Rp 69.945.427,00

Adapun perhitungan selisih pendapatan LO dan LRA sebagai berikut:

Piutang PBB KB awal tahun	Rp	34.812.496.882,00
Pendapatan PBB KB Tahun 2024 – LO	Rp	34.882.442.309,00
Pendapatan PBB KB Tahun 2024 – LRA	(Rp	34.812.496.882,00)
Jumlah Piutang Akhir	Rp	34.882.442.309,00

Selisih pendapatan LO dan Pendapatan LRA merupakan kenaikan jumlah piutang akhir dibandingkan dengan piutang awal tahun yaitu (Rp34.812.496.882,00 - Rp34.882.442.309,00 = Rp69.945.427,00).

5.4.1.2.2.4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan & Air Bawah Tanah

Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan & Air Bawah Tanah -LO sebesar Rp550.716.825,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	G/343/VI.03/HK/2024	TW I 2024 PAP & PBT	Rp	116.027.531,00
2.	G/429/VI.03/HK/2024	TW II 2024 PAP & PBT	Rp	183.880.271,00
3.	G/715/VI.03/HK/2024	TW III 2024 PAP & PBT	Rp	125.250.798,00
4.	G/147/VI.03/HK/2024	TW IV 2024 PAP & PBT	Rp	125.558.225,00
		Jumlah	Rp	550.716.825,00

Terdapat Perbedaan Pendapatan LO dan LRA sebagai berikut:

Pendapatan LO	Rp	550.716.825,00
Pendapatan LRA	(Rp	485.166.475,00)
Selisih	Rp	65.550.350,00

Adapun perhitungan selisih pendapatan LO dan LRA sebagai berikut:

Piutang PBB KB awal tahun	Rp	369.138.944,00
Pendapatan PBB KB Tahun 2024 – LO	Rp	550.716.825,00
Pendapatan PBB KB Tahun 2024 – LRA	(Rp	485.166.475,00)
Jumlah Piutang Akhir	Rp	434.689.294,00

Selisih pendapatan LO dan Pendapatan LRA merupakan kenaikan jumlah piutang akhir dibandingkan dengan piutang awal tahun yaitu (Rp369.138.944,00 - Rp434.689.294,00 = Rp65.550.350,00).

5.4.1.2.2.5. Pajak Rokok

Penerimaan Pajak Rokok -LO sebesar Rp24.560.638.512,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	G/322/VI.03/HK/2024	Pajak Rokok Desember 2024	Rp	3.760.513.141,00
2.	G/323/VI.03/HK/2024	TW I 2024 Pajak Rokok	Rp	5.866.849.613,00
3.	G/430/VI.03/HK/2024	TW II 2024 Pajak Rokok	Rp	5.100.137.973,00
4.	G/714/VI.03/HK/2024	TW III 2024 Pajak Rokok	Rp	5.882.343.459,00
5.	G/870/VI.03/HK/2024	TW IV 2024 Pajak Rokok	Rp	3.950.794.326,00
		Jumlah	Rp	24.560.638.512,00

Terdapat Perbedaan Pendapatan LO dan LRA sebagai berikut:

Pendapatan LO	Rp	24.560.638.512,00
Pendapatan LRA	(Rp	24.601.682.883,00)
Selisih	Rp	41.044.371,00

Adapun perhitungan selisih pendapatan LO dan LRA sebagai berikut:

Piutang PBB KB awal tahun	Rp	3.991.838.697,00
Pendapatan PBB KB Tahun 2024 – LO	Rp	24.560.638.512,00
Pendapatan PBB KB Tahun 2024 – LRA	(Rp	24.601.682.883,00)
Jumlah Piutang Akhir	Rp	3.950.794.326,00

Selisih pendapatan LO dan Pendapatan LRA merupakan kenaikan jumlah piutang akhir dibandingkan dengan piutang awal tahun yaitu (Rp3.991.838.697,00 - Rp3.950.794.326,00 = Rp41.044.371,00).

5.4.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO

5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah - LO

Penerimaan Pendapatan Hibah – LO Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk periode TA 2024 dan 2023, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 288. Pendapatan Hibah - LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)		(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Hibah	52.173.731.932,00	23.053.728.222,00	29.120.003.710,00	126,31
Jumlah		52.173.731.932,00	23.053.728.222,00	29.120.003.710,00	126,31

Rincian Pendapatan Hibah – LO dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 289. Rincian Pendapatan Hibah - LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Hibah dari Pemerintah Pusat	52.136.123.389,00	22.999.728.222,00	29.136.395.167,00	126,68
2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	37.544.193,00	0,00	37.544.193,00	-
3.	Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	64.360,00	54.000.000,00	(53.935.650,00)	(99,88)
Jumlah		52.173.731.932,00	23.053.728.222,00	29.120.003.710,00	126,31

Berikut rincian pendapatan Hibah Tahun 2024

1. Hibah Obat-obatan dari Kementerian Kesehatan melalui Dinkes Provinsi Total Rp897.521.784,00 (31 BAST).
2. Hibah persediaan blanko KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Kementerian Dalam Negeri Nomor Rp214.416.710,00
3. Hibah CSR 2 unit Sepeda Motor dari PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Bandar Lampung BAST No. 030/266/BAST/III.13/2024 sebesar Rp76.000.000,00.
4. Hibah dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PU berupa peningkatan jalan poros (desa kegeringan Rp1.771.724.000,00 thn 2020, desa Kegeringan Rp248.514.000 thn 2009) total Rp Rp2.020.238.000,00 BAST Nomor BAST No. 855.1/BA/DC/2024.
5. Hibah dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PU berupa peningkatan jalan poros (Kawasan Sukaraja Rp678.166.000 thn 2020, desa sukaraja Rp581.226.000 thn 2009) total Rp1.259.392.000,00 BAST Nomor BAST No. 855.1/BA/DC/2024.
6. Hibah dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PU berupa pembangunan SPAM IKK, SPAM PDAM, SPAM Pedesaan, Pengadaan dan Pembangunan pipa dan asesories sebesar Rp47.658.495.701,00 BAST No. 855.1/BA/DC/2024.
7. Hibah alat ukur universal dari Kementerian Kesehatan NPHD Nomor KN.01.08/C.I/4861.235/2024 tanggal 07 juni 2024 Rp10.059.194,00
8. Hibah Persediaan dari Pemerintah Provinsi pada RSUD AU Direktur RSUD Surat Pernyataan Nomor 900/999/III.02/2025 Senilai Rp37.544.193,00.
9. Hibah Tanah untuk gedung tempat kerja di pada Dinas DLH sebesar Rp64.350,00

Pendapatan Hibah sebesar Rp52.173.731.932,00 tersebut disajikan pada lampiran 24.

5.4.2. BEBAN DAERAH

Beban daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam suatu periode anggaran.

Berikut disajian tabel akun kelompok beban daerah tahun 2024 dan 2023

Tabel 290. Beban Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	BEBAN OPERASI	899.714.640.014,46	817.096.534.117,49	82.618.105.896,97	10,11
2.	BEBAN TRANSFER	58.143.742.200,00	55.537.016.373,00	2.606.725.827,00	4,69
	Jumlah	957.858.382.214,46	872.633.550.490,49	85.224.831.723,97	9,77

5.4.2.1. BEBAN OPERASI

Beban Operasi merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan yang digunakan untuk menunjang operasional kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dengan realisasi pada TA. 2024 dan 2023 pada tabel sebagai berikut.

Tabel 291. Beban Operasi TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Pegawai	445.438.193.423,07	414.097.472.312,00	31.340.721.111,07	7,57
2.	Beban Barang dan Jasa	252.185.752.710,38	245.179.858.903,10	7.005.893.807,28	2,86
3.	Beban Bunga	2.518.033.554,00	3.604.736.719,00	(1.086.703.165,00)	(30,15)
4.	Beban Hibah	51.766.978.290,00	32.310.714.788,00	19.456.263.502,00	60,22
5.	Beban Bantuan Sosial	0,00	244.550.000,00	(244.550.000,00)	(100,00)
6.	Beban Penyisihan Piutang	342.946.375,66	10.408.433.265,21	(10.065.486.889,55)	(96,71)
7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	147.462.735.661,35	111.250.768.130,18	36.211.967.531,17	32,55
	Jumlah	899.714.640.014,46	817.096.534.117,49	82.618.105.896,97	10,11

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Beban Operasi - LO TA 2024 sebesar Rp899.714.640.014,46 mengalami peningkatan sebesar Rp82.618.105.896,97 atau 10,11% jika dibandingkan dari Beban Operasi – LO TA. 2023 sebesar Rp817.096.534.117,49.

Berikut penjelasan rincian masing masing Beban Operasi.

5.4.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam pengeluaran yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai Kabupaten Lampung Barat TA 2024 sebesar Rp445.438.193.423,07 mengalami peningkatan sebesar Rp31.340.721.111,07 atau 7,57% dari TA 2023 sebesar Rp414.097.472.312,00 atau 49,51% jika dibandingkan dengan seluruh beban operasi TA.2024 sebesar Rp899.714.640.014,46 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 292. Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Gaji Pokok ASN	234.253.991.226,00	215.891.248.520,00	18.362.742.706,00	8,51
2.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	22.006.838.835,00	20.397.429.855,00	1.609.408.980,00	7,89
3.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	5.307.435.000,00	5.348.165.000,00	(40.730.000,00)	(0,76)
4.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	14.543.614.000,00	14.463.733.000,00	79.881.000,00	0,55

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
5.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.818.928.700,00	3.855.841.600,00	(36.912.900,00)	(0,96)
6.	Beban Tunjangan Beras ASN	12.571.315.380,00	12.540.392.040,00	30.923.340,00	0,25
7.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	544.467.726,00	313.680.434,00	230.787.292,00	73,57
8.	Beban Pembulatan Gaji ASN	3.185.091,00	3.132.796,00	52.295,00	1,67
9.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.671.492.966,00	8.905.154.384,00	1.766.338.582,00	19,82
10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	482.883.932,00	444.177.956,00	38.705.976,00	8,71
11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.448.651.808,00	1.331.453.892,00	117.197.916,00	8,80
12.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	49.166.051.734,00	47.530.796.026,00	1.635.255.708,00	3,44
13.	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	69.640.183.380,00	60.260.330.440,00	9.379.852.940,00	15,57
14.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	16.800.000,00	(16.800.000,00)	(100,00)
15.	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	350.701.200,00	308.690.400,00	42.010.800,00	13,61
16.	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.523.500.000,00	2.461.900.000,00	61.600.000,00	2,50
17.	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.968.014.731,07	2.534.925.547,00	(566.910.815,93)	(22,36)
18.	Beban Honorarium	880.240.000,00	1.861.700.000,00	(981.460.000,00)	(52,72)
19.	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	1.082.160,00	(1.082.160,00)	(100,00)
20.	Beban Uang Representasi DPRD	779.635.000,00	780.465.000,00	(830.000,00)	(0,08)
21.	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	64.071.000,00	62.212.500,00	1.858.500,00	2,99
22.	Beban Tunjangan Beras DPRD	91.828.560,00	89.511.120,00	2.317.440,00	2,59
23.	Beban Uang Paket DPRD	77.983.500,00	78.046.500,00	(63.000,00)	(0,08)
24.	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.130.760.750,00	1.131.674.250,00	(913.500,00)	(0,08)
25.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	83.585.250,00	100.119.600,00	(16.534.350,00)	(16,51)
26.	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00	2.639.700.000,00	6.300.000,00	0,24
27.	Beban Tunjangan Reses DPRD	441.000.000,00	661.500.000,00	(220.500.000,00)	(33,33)
28.	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	996.290,00	971.465,00	24.825,00	2,56
29.	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.492.927.364,00	3.791.765.636,00	(298.838.272,00)	(7,88)
30.	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	4.321.020.000,00	4.672.612.191,00	(351.592.191,00)	(7,52)
31.	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	313.110.000,00	12.600.000,00	300.510.000,00	2.385,00
32.	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	92.400.000,00	110.880.000,00	(18.480.000,00)	(16,67)
33.	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	390.000.000,00	10.000.000,00	2,56
34.	Beban Pegawai BLUD	1.321.180.000,00	1.103.780.000,00	217.400.000,00	19,70
	Jumlah	**445.438.193.423,07**	**414.097.472.312,00**	**31.340.721.111,07**	**7,57**

Berikut disajikan tabel Perbedaan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024.

Tabel 293. Perbedaan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun 2024

No	Uraian	LRA	LO	Selisih	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	6
1.	Gaji Pokok ASN	234.253.991.226,00	234.253.991.226,00	0,00	-
2.	Tunjangan Keluarga ASN	22.006.836.835,00	22.006.836.835,00	0,00	-
3.	Tunjangan Jabatan ASN	5.307.435.000,00	5.307.435.000,00	0,00	-
4.	Tunjangan Fungsional ASN	14.543.614.000,00	14.543.614.000,00	0,00	-
5.	Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.818.928.700,00	3.818.928.700,00	0,00	-
6.	Tunjangan Beras ASN	12.571.315.380,00	12.571.315.380,00	0,00	-
7.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	544.467.726,00	544.467.726,00	0,00	-
8.	Pembulatan Gaji ASN	3.185.091,00	3.185.091,00	0,00	-
9.	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.671.492.966,00	10.671.492.966,00	0,00	-
10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	482.883.932,00	482.883.932,00	0,00	-
11.	Iuran Jaminan Kematian ASN	1.448.651.808,00	1.448.651.808,00	0,00	-
12.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	49.201.561.255,00	49.166.051.734,00	35.509.521,00	Selisih
13.	Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	69.575.053.960,00	69.640.183.380,00	(65.129.400,00)	Selisih
14.	Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	346.308.000,00	350.701.200,00	(4.393.200,00)	Selisih
15.	Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.206.000.000,00	2.523.500.000,00	(1.317.500.000,00)	Selisih
16.	Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.968.014.731,07	1.968.014.731,07	0,00	-
17.	Honorarium	880.240.000,00	880.240.000,00	0,00	-

No	Uraian	LRA	LO	Selisih	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	6
18.	Uang Representasi DPRD	779.835.000,00	779.835.000,00	0,00	-
19.	Tunjangan Keluarga DPRD	64.071.000,00	64.071.000,00	0,00	-
20.	Tunjangan Beras DPRD	91.828.560,00	91.828.560,00	0,00	-
21.	Uang Paket DPRD	77.983.500,00	77.983.500,00	0,00	-
22.	Tunjangan Jabatan DPRD	1.130.760.750,00	1.130.760.750,00	0,00	-
23.	Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	83.585.250,00	83.585.250,00	0,00	-
24.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00	2.646.000.000,00	0,00	-
25.	Tunjangan Reses DPRD	441.000.000,00	441.000.000,00	0,00	-
26.	Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	996.290,00	996.290,00	0,00	
27.	Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.492.927.364,00	3.492.927.364,00	0,00	-
28.	Tunjangan Transportasi DPRD	4.321.020.000,00	4.321.020.000,00	0,00	-
29.	Uang Jasa Pengabdian DPRD	313.110.000,00	313.110.000,00	0,00	-
30.	Dana Operasional Pimpinan DPRD	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00	-
31.	Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	-
32.	Pegawai BLUD	1.321.180.000,00	1.321.180.000,00	0,00	-
Jumlah		444.086.680.344,07	445.438.193.423,07	(1.351.513.079,00)	-

5.4.2.1.1.1. Beban Gaji Pokok ASN

Beban Gaji Pokok ASN adalah tanggung jawab negara untuk memberikan kompensasi dasar kepada ASN berdasarkan jabatan dan golongan yang dimiliki. Gaji pokok ini merupakan bagian utama dari penghasilan bulanan ASN, di samping tunjangan dan komponen gaji lainnya.

Beban Gaji Pokok ASN pada tahun 2024 sebesar Rp234.253.991.226,00.

Perbedaan Beban LO dan LRA sebagai berikut:

Realisasi Belanja (LRA) Tahun 2024		Rp	234.253.991.226,00
Realisasi Beban (LO) Tahun 2024		(Rp	234.253.991.226,00)
	Selisih	Rp	0,00

Kenaikan jumlah Beban Gaji Pokok ASN pada Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023 disebabkan karena terdapat peningkatan Gaji Pokok PNS sesuai dengan Perpres Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, serta peningkatan jumlah PPPK sebanyak 335 orang berdarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor 823/135/KPTS/IV.05/2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

5.4.2.1.1.2. Beban Tunjangan Keluarga ASN

Beban Tunjangan Keluarga ASN adalah komponen penghasilan tambahan yang diberikan kepada ASN yang memiliki istri/suami dan/atau anak, di luar gaji pokok. Tunjangan ini bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga ASN.

Beban Tunjangan Keluarga ASN pada tahun 2024 sebesar Rp22.006.838.835,00.

Perbedaan Beban LO dan LRA sebagai berikut:

Realisasi Belanja (LRA) Tahun 2024		Rp	22.006.838.835,00
Realisasi Beban (LO) Tahun 2024		(Rp	22.006.838.835,00)
	Selisih	Rp	0,00

Kenaikan jumlah Tunjangan Keluarga ASN pada Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023 disebabkan karena terdapat peningkatan Gaji Pokok PNS dan peningkatan jumlah PPPK yang mengakibatkan peningkatan pembayaran tunjangan keluarga ASN.

5.4.2.1.1.3. Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN adalah kewajiban finansial yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja untuk mendapatkan perlindungan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan.

Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada tahun 2024 sebesar Rp10.671.492.966,00.

Perbedaan Beban LO dan LRA sebagai berikut:

Realisasi Belanja (LRA) Tahun 2024		Rp	10.671.492.966,00
Realisasi Beban (LO) Tahun 2024		(Rp	10.671.492.966,00)
	Selisih	Rp	0,00

Kenaikan jumlah Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023 disebabkan karena terdapat peningkatan Gaji Pokok PNS dan peningkatan jumlah PPPK yang mengakibatkan peningkatan pembayaran iuran jaminan kesehatan ASN, dimana iuran ini dihitung berdasarkan gaji pokok.

5.4.2.1.1.4. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

Beban Tambahan Penghasilan (TPP) berdasarkan Beban Kerja ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan kesejahteraan pegawai. TPP ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, dan faktor objektif lainnya. Pemberian TPP berdasarkan beban kerja dapat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah.

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN pada tahun 2024 sebesar Rp49.166.051.734,00.

Perbedaan Beban LO dan LRA sebagai berikut:

Realisasi Belanja TPP (LRA) Tahun 2024		Rp	49.201.561.255,00
Realisasi Beban TPP (LO) Tahun 2024		(Rp	49.166.051.734,00)
	Selisih	Rp	35.509.521,00

Jumlah selisih ini merupakan kenaikan utang TPP tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023:

Pelunasan Utang TPP Tahun 2023		Rp	136.924.250,00
Utang TPP Tahun 2024		(Rp	101.414.729,00)
	Selisih	Rp	35.509.521,00

Utang Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN tahun 2024 berada pada Dinas PUPR sebesar Rp101.414.729,00.

5.4.2.1.1.5. Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD

Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk PNSD setara dengan satu kali gaji pokok. TPG ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas profesionalisme guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk PNSD pada tahun 2024 sebesar Rp69.640.183.380,00.

Realisasi Beban TPG (LO) Tahun 2024		Rp	69.640.183.380,00
Realisasi Belanja TPG (LRA) Tahun 2024		(Rp	69.575.053.980,00)
	Selisih	Rp	65.129.400,00

Jumlah selisih ini merupakan kenaikan utang TPG tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023:

Pelunasan Utang TPG Tahun 2023		Rp	58.884.000,00
Utang TPG Tahun 2024		(Rp	124.013.400,00)
	Selisih	(Rp	65.129.400,00)

5.4.2.1.1.6. Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD

Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD adalah tunjangan yang diberikan kepada guru PNSD (Pegawai Negeri Sipil Daerah) yang bertugas di daerah khusus, yaitu daerah terpencil, terisolasi, atau daerah yang mengalami bencana alam atau kesulitan hidup lainnya. TKG ini merupakan kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi guru dalam melaksanakan tugas di daerah tersebut.

Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) untuk PNSD pada tahun 2024 sebesar Rp350.701.200,00.

Realisasi Beban TKG (LO) Tahun 2024		Rp	350.701.200,00
Realisasi Belanja TKG (LRA) Tahun 2024		(Rp	346.308.000,00)
	Selisih	Rp	4.393.200,00

Jumlah selisih ini merupakan kenaikan utang TKG tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023:

Pelunasan Utang TKG Tahun 2023		Rp	25.758.600,00
Utang TKG Tahun 2024		(Rp	30.151.800,00)
	Selisih	(Rp	4.393.200,00)

5.4.2.1.1.7. Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) untuk guru PNSD adalah tunjangan tambahan yang diberikan kepada guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Tamsil ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan diberikan secara rutin setiap bulan.

Realisasi Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) untuk guru PNSD pada tahun 2024 sebesar Rp2.523.500.000,00.

Realisasi Beban Tamsil Guru PNSD (LO) Tahun 2024		Rp	2.523.500.000,00
Realisasi Belanja Tamsil Guru PNSD (LRA) Tahun 2024		(Rp	1.206.000.000,00)
	Selisih	Rp	1.317.500.000,00

Jumlah selisih ini merupakan kenaikan utang (Tamsil) untuk guru PNS tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023:

Pelunasan Utang Tamsil Guru PNSD Tahun 2023		Rp	615.000.000,00
Utang Tamsil Guru PNSD Tahun 2024		(Rp	1.932.500.000,00)
	Selisih	(Rp	1.317.500.000,00)

5.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah beban pemakaian persediaan barang atau pemakaian/pengadaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk menunjang operasional kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, pada TA 2024 terdapat Beban Barang dan Jasa sebesar Rp252.185.752.710,38 atau 28,03% dari seluruh beban operasi, jika dibandingkan dengan beban barang dan jasa TA 2023 sebesar Rp245.179.858.903,10 maka mengalami peningkatan sebesar Rp7.005.893.807,28 atau 2,86%.

Tabel 294. Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Bahan Pakai Habis	45.095.586.822,63	50.089.309.809,80	(4.993.722.987,17)	(9,97)
2.	Beban Barang Tak Habis Pakai	20.462.790,00	22.804.420,00	(2.341.630,00)	(10,27)
3.	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.367.861.000,00	0,00	1.367.861.000,00	∞
4.	Beban Jasa Kantor	45.632.510.052,00	49.933.743.661,50	(4.301.233.609,50)	(8,61)
5.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	15.559.571.998,00	11.122.566.654,00	4.437.005.344,00	39,89
6.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.785.010.000,00	1.993.321.500,00	(208.311.500,00)	(10,45)
7.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.519.323.000,00	1.400.195.412,00	119.127.588,00	8,51

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
8.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	297.250.000,00	182.750.000,00	114.500.000,00	62,65
9.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.653.236.244,00	639.186.400,00	2.014.049.844,00	315,10
10.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.558.904.940,00	3.157.983.740,00	(599.078.800,00)	(18,97)
11.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosiseperalisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.323.786.079,00	3.089.266.000,00	(765.479.921,00)	(24,78)
12.	Beban Pemeliharaan Tanah	227.432.820,00	123.008.500,00	104.424.320,00	84,89
13.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.973.697.653,00	5.309.928.862,00	(336.231.209,00)	(6,33)
14.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	536.209.850,00	335.077.248,00	201.132.602,00	60,03
15.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	683.171.000,00	558.874.000,00	124.297.000,00	22,24
16.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	8.170.000,00	0,00	8.170.000,00	-
17.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.155.717.170,00	45.284.426.103,00	(4.128.708.933,00)	(9,12)
18.	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1.412.882.500,00	681.341.388,00	731.541.112,00	107,37
19.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.523.287.896,00	3.459.396.536,00	63.891.360,00	1,85
20.	Beban Barang dan Jasa BOS	17.798.600.601,00	28.653.558.146,00	(10.854.957.545,00)	(37,88)
21.	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	9.754.084.359,00	0,00	9.754.084.359,00	-
22.	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	526.095.000,00	0,00	526.095.000,00	-
23.	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	148.503.000,00	0,00	148.503.000,00	-
24.	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	12.614.091.934,93	0,00	12.614.091.934,93	-
25.	Beban Barang dan Jasa BLUD	40.008.306.000,82	39.143.120.522,80	865.185.478,02	2,21
	Jumlah	**252.185.752.710,38**	**245.179.858.903,10**	**7.005.893.807,28**	**2,86**

Berikut disajikan tabel Perbedaan Beban Barang dan Jasa dan Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024.

Tabel 295. Selisih Beban Barang dan Jasa dengan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024

No	Uraian	LRA	LO	Selisih	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	6
1.	Beban Bahan Pakai Habis	44.939.131.868,00	45.095.586.822,63	(156.454.954,63)	Selisih
2.	Beban Barang Tak Habis Pakai	20.462.790,00	20.462.790,00	0,00	-
3.	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	20.920.000,00	1.367.861.000,00	(1.346.941.000,00)	Selisih
4.	Beban Jasa Kantor	45.388.119.288,00	45.632.510.052,00	(244.390.764,00)	Selisih
5.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	13.733.705.874,00	15.559.571.998,00	(1.825.866.124,00)	Selisih
6.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.785.010.000,00	1.785.010.000,00	0,00	-
7.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.519.323.000,00	1.519.323.000,00	0,00	-
8.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	297.250.000,00	297.250.000,00	0,00	-
9.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.653.236.244,00	2.653.236.244,00	0,00	-
10.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.558.904.940,00	2.558.904.940,00	0,00	-
11.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosiseperalisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.323.786.079,00	2.323.786.079,00	0,00	-
12.	Beban Pemeliharaan Tanah	227.432.820,00	227.432.820,00	0,00	-
13.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.973.697.653,00	4.973.697.653,00	0,00	
14.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	530.809.850,00	536.209.850,00	(5.400.000,00)	
15.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	683.171.000,00	683.171.000,00	0,00	-
16.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	8.170.000,00	8.170.000,00	0,00	-
17.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.155.717.170,00	41.155.717.170,00	0,00	-
18.	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1.412.882.500,00	1.412.882.500,00	0,00	-
19.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.523.287.896,00	3.523.287.896,00	0,00	-
20.	Beban Barang dan Jasa BOS	17.798.600.601,00	17.798.600.601,00	0,00	-
21.	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	9.754.084.359,00	9.754.084.359,00	0,00	-
22.	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	526.095.000,00	526.095.000,00	0,00	-
23.	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	148.503.000,00	148.503.000,00	0,00	-
24.	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	12.614.091.934,93	12.614.091.934,93	0,00	-
25.	Beban Barang dan Jasa BLUD	39.060.562.784,82	40.008.306.000,82	(947.743.216,00)	Selisih
Jumlah		**247.658.956.651,75**	**252.185.752.710,38**	**(4.526.796.058,63)**	

5.4.2.1.2.1. Beban Bahan Pakai Habis

Beban bahan pakai habis adalah biaya yang diakui terkait dengan bahan-bahan yang habis digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah, seperti alat tulis, perlengkapan kantor, atau bahan bakar. Beban ini diakui di akhir periode akuntansi setelah melakukan penghitungan persediaan awal, pembelian, dan sisa persediaan akhir.

Beban Beban bahan pakai habis pada tahun 2024 sebesar Rp45.095.586.822,63.

Realisasi Beban bahan pakai habis (LO) Tahun 2024		Rp	45.095.586.822,63
Realisasi Beban bahan pakai habis (LRA) Tahun 2024		(Rp	44.939.131.868,00)
	Selisih	Rp	156.454.954,63

Jumlah selisih ini merupakan penyesuaian stok fisik persediaan di akhir tahun, penyesuaian Beban Bahan Pakai Habis akibat hasil stok opname di akhir tahun sebesar Rp156.454.954,63.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Metode penghitungannya dilakukan dengan Periodik Method (pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi), beban persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Dalam Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 bahwa pencatatan Beban Bahan Pakai Habis dicatat pada Rincian Objek Akun 8.1.02.01.01. Sedangkan pencatatan Beban Persediaan dicatat sampai pada Sub Rincian Objek Akun 8.1.02.01.01.00xx.

5.4.2.1.2.2. Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Beban aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi adalah biaya yang terkait dengan aset tetap tetapi tidak dianggap sebagai bagian dari nilai aset tersebut.

Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi pada tahun 2024 sebesar Rp1.367.861.000,00.

Realisasi Beban (LO) Tahun 2024		Rp	1.367.861.000,00
Realisasi Belanja (LRA) Tahun 2024		(Rp	20.920.000,00)
	Selisih	Rp	1.346.941.000,00

Jumlah selisih ini merupakan penyesuaian di akhir tahun yaitu:

a. Belanja Modal dibawah nilai kapitalisasi Barang Milik Daerah

1.	Belanja Modal Peralatan dan mesin yang tidak menjadi aset (Ekstracompatible)	Rp	723.593.180,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan mesin yang tidak menjadi aset (Non Aset)	Rp	425.616.900
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak menjadi aset (Ekstracomptable)	Rp	12.786.220
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak menjadi aset (Non Aset)	Rp	153.808.000
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang tidak menjadi aset (Ekstracomptable)	Rp	5.000.000
6.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang tidak menjadi aset (Non Aset)	Rp	42.136.700
	Sub Jumlah (a)	Rp	1.362.941.000,00

b. Koreksi Kesalahan Penganggaran dan Belanja Modal Aset Lainnya yang tidak menjadi aset tetap lainnya:

1.	Penyesuaian atas Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer (kesalahan penganggaran)	(Rp	16.000.000,00)
	Sub Jumlah (b)	(Rp	13.354.000,00)
	Selisih (a-b)	Rp	1.346.941.000,00

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi No. 57 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam Sistem Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, bahwa batas minimal kapitalisasi peralatan dan mesin Rp300.000,00 serta gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000,00

Pada tahun 2023 Barang extra compatable dan non aset disajikan pada akun beban luar biasa lainnya dikarenakan belum terdapat akun Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.

5.4.2.1.2.3. Beban Jasa Kantor

Beban Jasa Kantor adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan operasional kantor, seperti biaya sewa kantor, biaya utilitas (listrik, air, telepon, internet).

Beban Jasa Kantor tahun 2024 sebesar Rp45.632.510.052,00

Perhitungan perbedaan realisasi Beban Jasa Kantor dan Belanja Jasa Kantor sebagai berikut

Realisasi Beban (LO) Tahun 2024		Rp	45.632.510.052,00
Realisasi Belanja (LRA) Tahun 2024		(Rp	45.388.119.288,00)
	Selisih	Rp	244.390.764,00

Jumlah selisih ini merupakan penyesuaian pada akhir tahun atas konsumsi jasa kantor.

1.	Penggunaan jasa tenaga kesehatan, masih menjadi hutang	Rp	256.413.116,00
2.	Konsumsi penggunaan jasa air belum dibayar di akhir tahun	Rp	2.058.299,00
3.	Konsumsi penggunaan jasa listrik belum dibayar di akhir tahun	Rp	689.199,00
4.	Tagihan beban Kawat/Faksimili/Internet/TV tahun ini	Rp	5.292.743,00
5.	Pelunasan utang tahun lalu atas Kawat/Faksimili/Internet/TV	(Rp	18.033.791,00)
6.	Pelunasan utang tagihan Telepon tahun lalu	(Rp	2.637.764,00)
7.	Tagihan Telepon tahun ini, masih menjadi hutang	Rp	608.962,00
	Selisih	Rp	244.390.764,00

5.4.2.1.2.4. Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Beban iuran jaminan/asuransi adalah biaya yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada penyedia asuransi sebagai imbalan atas perlindungan atau jaminan yang diberikan.

Realisasi Beban iuran jaminan/asuransi tahun 2024 sebesar Rp15.559.571.998,00

Perhitungan perbedaan Beban iuran jaminan/asuransi dan Belanja iuran jaminan/asuransi sebagai berikut

Realisasi Beban (LO) Tahun 2024		Rp	15.559.571.998,00
Realisasi Belanja (LRA) Tahun 2024		(Rp	13.733.705.874,00)
	Selisih	Rp	1.825.866.124,00

Jumlah selisih ini merupakan penyesuaian pada akhir tahun atas beban iuran jaminan/asuransi.

1.	Jaminan kesehatan perangkat desa bulan desember belum terbayarkan	Rp	197.869.860,00
2.	Jaminan kesehatan Non ASN Nov-Des 2024, belum terbayar	Rp	1.627.996.264,00
	Selisih	Rp	1.825.866.124,00

Beban asuran mengalami kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp4.437.005.344,00 atau 39,89% karena:

1. Terdapat penambahan jumlah pegawai PPPK sebanyak 335 Orang pada tahun 2024.
2. Penambahan pembayaran iuran asuransi kesehatan 4% melalui Tambahan Penghasilan (TPP) ASN berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor : 900/181/IV.01/2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dari Tambahan Penghasilan PNS Daerah dan Tenaga Kerja Bagi Pekerja Penerima Upah Pemerintah Daerah.

5.4.2.1.2.5. Beban Pemeliharaan Tanah

Tahun 2024 terdapat Beban Pemeliharaan Tanah tetapi sebenarnya adalah untuk pemeliharaan gedung, hal ini terjadi karena terdapat kesalahan pada saat pengajuan SBU (Standar Biaya Umum) pada aplikasi SIPD, seharusnya mengajukan biaya pemeliharaan bangunan.

Beban Pemeliharaan Tanah tahun 2024 sebesar Rp227.432.820,00 mengalami peningkatan sebesar Rp104.424.320,00 atau 84,89% dari tahun 2023 sebesar Rp123.008.500,00.

Peningkatan secara signifikan ini karena terdapat kesalahan penganggaran yang seharusnya pemeliharaan gedung tetapi dipilih pemeliharaan tanah.

5.4.2.1.2.6. Uang yang Diberikan Kepada Masyarakat

Uang yang Diberikan Kepada Masyarakat adalah pemberian bantuan Beasiswa Pendidikan untuk mahasiswa dalam bentuk uang dan hadiah pelunasan PBB untuk mendorong masyarakat/ pekon agar aktif membayar PBB.

Uang yang Diberikan Kepada Masyarakat tahun 2024 sebesar Rp1.412.882.500,00 naik sebesar Rp731.541.112,00 atau 107,37% dari tahun 2023 sebesar Rp681.341.388,00.

Mengalami kenaikan karena:

1. Pada Dinas Kesehatan, adanya penambahan 1 orang penerima Beasiswa Pendidikan untuk Mahasiswa Kedokteran.
2. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat peningkatan Uang Pembinaan untuk juara Olimpiade Sains (OSN), Olimpiade Olahraga (O2SN), Festifal Seni (FLS2N) tingkat Kabupaten untuk SD dan SMP.
3. Pada OPD Bapenda terdapat pemberian hadiah untuk Pelunasan PBB Pekon dan Kecamatan.

5.4.2.1.2.7. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Beban pemeliharaan gedung dan bangunan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjaga kondisi fisik, fungsional, dan estetika gedung agar tetap dalam kondisi baik dan aman digunakan. Ini termasuk biaya perawatan rutin, perbaikan, dan penggantian komponen yang rusak.

Realisasi Beban pemeliharaan gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp536.209.850,00

Perhitungan perbedaan Beban pemeliharaan gedung dan bangunan dan Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagai berikut:

Realisasi Beban (LO) Tahun 2024		Rp	536.209.850,00
Realisasi Belanja (LRA) Tahun 2024		(Rp	530.809.850,00)
	Selisih	Rp	5.400.000,00

Jumlah selisih ini merupakan penyesuaian pada akhir tahun atas beban pemeliharaan gedung.

1. Penyesuaian beban pemeliharaan gedung		Rp	5.400.000,00
	Selisih	Rp	5.400.000,00

5.4.2.1.2.8. Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban barang dan jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah biaya yang timbul akibat pemanfaatan barang dan jasa dalam mendukung kegiatan operasional BLUD. Ini mencakup berbagai jenis pengeluaran, seperti pembelian barang konsumsi dan jasa, perjalanan dinas, pemeliharaan, dan pembayaran honorarium.

Realisasi Beban Barang dan Jasa BLUD-LO tahun 2024 sebesar 40.008.306.000,82

Perhitungan perbedaan Beban Barang dan Jasa BLUD dan Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagai berikut:

Realisasi Beban (LO) Tahun 2024		Rp	40.008.306.000,82
Realisasi Belanja (LRA) Tahun 2024		(Rp	39.060.562.784,82)
	Selisih	Rp	947.743.216,00

Jumlah selisih ini merupakan penyesuaian pada akhir tahun atas Beban Barang dan Jasa BLUD

1. Pembayaran hutang barang dan jasa BLUD tahun 2023 pada Puskesmas.	(Rp	346.498.740,00)
2. Penyesuaian penambahan utang tahun 2024 pada RSUD Alimuddin Umar	Rp	980.270.919,00
3. Penyesuaian penambahan utang tahun 2024 pada puskesmas,	Rp	428.967.133,00

	Koreksi Audit KAP atas utang jasa tenaga kesehatan		
4.	Penyesuaian Persediaan, konsumsi persediaan (Barang dan Jasa BLUD tahun 2023 pada RSUD Alimuddin Umar	(Rp	249.291.748,00)
5.	Koreksi Audite KAP atas Utang Jasa Pelayanan Kesehatan Pasien Umum RSUD tahun 2024		(4.962.222,00)
6.	Koreksi Auidte KAP atas kekurangan jasa pelayanan kessehatan pasien BPJS RSUD Tahun 2024	Rp	1,00
7.	Koreksi Audit KAP atas utang jasa pelayanan kesehantan pasien BPSJ pending bln sept dan okt 2024 RSUD	Rp	101.713.680,00
8.	Koreksi Audite KAP atas persediaan obat obatan lainnya berasal dari hibah RSUD	Rp	37.544.193,00
	Selisih	Rp	947.743.216,00

5.4.2.1.2.9. Beban Barang dan Jasa BOSP

Pada Tahun 2024 Beban barang dan jasa pada BOSP merupakan beban yang dikeluarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudyaaan untuk belanja barang dan jasa sumber dana DAK Non Fisik BOSP-BOS, BOSP-BOP-PAUD, BOSP-BOP Kesetaraan.

Pada Tahun 2023 belanja barang dan jasa BOSP tersebut masih menjadi 1 akun yaitu Belanja Barang dan Jasa BOS, sedangkan pada Tahun 2024 Pencatatan Beban Jasa BOS telah di pisah sesuai dengan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Realisasi Beban Barang dan Jasa BOS tahun 2024 dipecah menjadi

a.	Beban Barang dan Jasa BOS	Rp17.798.600.601,00
b.	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	Rp 9.754.084.359,00
c.	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	Rp 528.095.000,00
d.	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	Rp 148.503.000,00
	Jumlah	Rp 28.229.282.960,00

Realisasi Beban Barang dan Jasa BOPS tahun 2024 sebesar Rp28.229.282.960,00 mengalami penurunan sebesar (Rp424.275.186,00) atau (1,48%) bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp28.653.558.146,00.

5.4.2.1.2.10. Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Beban Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas merupakan pengeluaran yang terkait dengan pemeliharaan dan operasional Puskesmas, seperti biaya operasional, perawatan peralatan medis, konsumsi, dan biaya operasional lainnya. BOK Puskesmas adalah dana bantuan dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, terutama untuk kegiatan promotif dan preventif menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI. Dana ini dialokasikan untuk berbagai kegiatan, termasuk pemberian makanan tambahan, penurunan AKI-AKB, dan upaya deteksi dini penyakit.

Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas Tahun 2024 sebesar Rp12.614.091.934,93 mengalami peningkatan Rp12.614.091.934,93 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas mengalami kenaikan dikarenakan DAK Non Fisik BOK Puskesmas pada TA 2023 kode rekening belanja di Puskesmas dirinci berdasarkan kode rekening belanja, misal Perjalanan Dinas menggunakan kode rekening Belanja Perjalanan Dinas, Belanja ATK menggunakan kode rekening ATK dll.

Sedangkan pada tahun 2024 kode rekening belanja DAK non Fisik BOK Puskesmas hanya ada kode rekening Belanja Pegawai BOK serta Belanja Barang dan Jasa BOK Puskemas.

5.4.2.1.3. Beban Bunga

Beban ini merupakan Beban Bunga yang harus dibayarkan/ dikeluarkan akibat dari peminjaman uang kepada PT SMI Perjanjan nomor PERJ-165/SMI/1021 Tanggal 25 Oktober 2021, bunga 5,66% per annum, bunga dibayarkan setiap tanggal 25.

Pada TA 2024 terdapat Beban Bunga sebesar Rp2.518.033.554,00 atau 0,27% dari seluruh beban operasi, jika dibandingkan dengan Beban Bunga TA 2023 sebesar Rp3.604.736.719,00 maka mengalami penurunan (Rp1.086.703.165,00) atau (30,15%).

Tabel 296. Beban Bunga TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	2.518.033.554,00	3.604.736.719,00	(1.086.703.165,00)	(30,15)
	Jumlah	2.518.033.554,00	3.604.736.719,00	(1.086.703.165,00)	(30,15)

Berikut disajikan Beban Bunga Per Bulan selama tahun 2024.

Tabel 297. Beban Bunga Per Bulan Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Januari	205.414.823,00	SP2D No : 12.01/04.0/000002/LS/5.02
2.	Februari	247.436.826,00	SP2D No : 18.04/04.0/000018/LS/5.02
3.	Maret	224.665.124,00	SP2D No : 18.04/04.0/000032/LS/5.02
4.	April	232.881.717,00	SP2D No : 18.04/04.0/000129/LS/5.02
5.	Mei	218.326.610,00	SP2D No : 18.04/04.0/000190/LS/5.02
6.	Juni	218.326.606,00	SP2D No : 18.04/04.0/000218/LS/5.02
7.	Juli	204.241.021,00	SP2D No : 18.04/04.0/000237/LS/5.02
8.	Agustus	203.771.501,00	SP2D No : 18.04/04.0/000387/LS/5.02
9.	September	196.493.947,00	SP2D No : 18.04/04.0/000404/LS/5.02
10.	Oktober	183.112.638,00	SP2D No : 18.04/04.0/000461/LS/5.02
11.	November	181.938.839,00	SP2D No : 18.04/04.0/000568/LS/5.02
12.	Desember	169.027.049,00	SP2D No : 18.04/04.0/000748/LS/5.02
13.	26 s.d. 31 Desember	32.396.851,00	Utang Bunga Tahun 2024
	Jumlah	2.518.033.554,00	

Perhitungan perbedaan Beban Bunga sebagai berikut

Realisasi Belanja (LRA) Tahun 2024		Rp	2.534.971.060,00
Realisasi Beban (LO) Tahun 2024		(Rp	2.518.033.554,00)
	Selisih	Rp	16.937.506,00

Jumlah selisih ini merupakan penyesuaian pada akhir tahun atas beban pemeliharaan gedung

1. Utang Bunga Awal Tahun		Rp	49.299.557,00
2. Realisasi Beban (LO) Tahun 2024		Rp	2.518.033.554,00
3. Realisasi Belanja (LRA) Tahun 2024		(Rp	2.534.971.060,00)
4. Utang Bunga Akhir Tahun		(Rp	32.396.851,00)
5. Biaya Transfer/ kliring/ biaya administrasi bank		Rp	34.800,00
	Selisih	Rp	0,00

Selisih beban bunga LO dengan Belanja Bunga (LRA) sebesar Rp16.937.506,00 = Utang Bunga Awal tahun – utang bunga akhir tahun + biaya administrsi bank (Rp49.299.557,00 - Rp32.396.851,00 + Rp34.800,00).

5.4.2.1.4. Beban Subsidi

Pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki beban subsidi.

5.4.2.1.5. Beban Hibah

Beban Hibah adalah beban Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya/ masyarakat yang timbul karena adanya perikatan, pada TA 2024 terdapat beban hibah sebesar Rp51.766.978.290,00 atau 0,27% dari seluruh beban operasi, jika dibandingkan dengan beban hibah TA 2023 sebesar Rp32.310.714.788,00 mengalami peningkatan sebesar Rp19.456.263.502,00 atau 60,22%, beban hibah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 298. Beban Hibah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	25.519.241.057,00	15.473.389.371,00	10.045.851.686,00	64,92
2.	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.283.201.042,00	223.545.345,00	1.059.655.697,00	474,02
3.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.691.002.800,00	6.886.252.000,00	(3.195.249.200,00)	(46,40)
4.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.936.230.000,00	4.529.865.000,00	(1.593.635.000,00)	(35,18)
5.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	375.000.000,00	762.000.000,00	(387.000.000,00)	(50,79)
6.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.967.257.832,00	0,00	10.967.257.832,00	-
7.	Beban Hibah kepada Koperasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
8.	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	165.000.000,00	190.000.000,00	(25.000.000,00)	(13,16)
9.	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.688.252.000,00	3.559.408.800,00	128.843.200,00	3,62
10.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	667.578.559,00	671.254.272,00	(3.675.713,00)	(0,55)
11.	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.459.215.000,00	0,00	2.459.215.000,00	-
	Jumlah	51.766.978.290,00	32.310.714.788,00	19.456.263.502,00	60,22

Berikut disajikan tabel Perbedaan Beban Hibah dengan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024.

Tabel 299. Selisih Beban Hibah dengan Belanja Hibah Tahun 2024

No	Uraian	LRA	LO	Selisih	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	6
1.	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	25.519.241.057,00	25.519.241.057,00	0,00	-
2.	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	716.137.227,00	1.283.201.042,00	(567.063.815,00)	-
3.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.691.002.800,00	3.691.002.800,00	0,00	-
4.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.936.230.000,00	2.936.230.000,00	0,00	-
5.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	-
6.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	10.967.257.832,00	(10.967.257.832,00)	
7.	Beban Hibah kepada Koperasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-
8.	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	-
9.	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.688.252.000,00	3.688.252.000,00	0,00	-
10.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	667.578.559,00	667.578.559,00	0,00	-
11.	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.459.215.000,00	2.459.215.000,00	0,00	-
Jumlah		40.232.656.643,00	51.766.978.290,00	(11.534.321.647,00)	-

Selisih sebesar Rp11.534.321.647,00 merupakan beban hibah aset tetap kepada kelompok tani dapat dirinci sebagai berikut:

1. Hibah Tanah	Rp	567.063.815,00
2. Hibah Peralatan dan Mesin	Rp	7.350.000,00
3. Hibah Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	10.959.907.832,00
Total	Rp	11.534.321.647,00

Total Beban Hibah Tahun 2024 sebesar Rp51.766.978,290,00 terdiri dari dua bagian yaitu Beban Hibah yang telah direalisasikan sesuai dengan Belanja Hibah - LRA senilai Rp40.232.656.643,00 (disajikan pada Lampiran 5), dan Beban Hibah berupa penyerahan Aset Tetap senilai Rp11.534.321.647,00 (disajikan pada Lampiran 6).

5.4.2.1.6. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial adalah beban Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam bentuk uang/barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, pada TA 2024 beban bantuan sosial sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari seluruh beban operasi, apabila dibandingkan TA 2023 sebesar Rp244.550.000,00 mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp244.550.000,00) atau (100,00%), disajikan pada tabel berikut.

Tabel 300. Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	74.550.000,00	(74.550.000,00)	(100,00)
2.	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	170.000.000,00	(170.000.000,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	244.550.000,00	(244.550.000,00)	(100,00)

5.4.2.1.7. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari entitas lain, penghitungan beban penyisihan piutang tergantung jenis piutang dan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Kabupaten Lampung Barat tentang Akuntansi Piutang. Tahun 2024 beban penyisihan piutang sebesar Rp342.946.375,66 atau 0,04% dari seluruh beban operasi. Jika dibandingkan dengan beban penyisihan pada TA 2023 sebesar Rp10.408.433.265,21 maka mengalami penurunan sebesar (Rp10.065.486.889,55) atau (96,71%).

Beban penyisihan piutang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 301. Beban Penyisihan Piutang TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	11.632.053,08	727.767,75	10.904.285,33	1.498,32
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	54.114.916,55	14.237.325,00	39.877.591,55	280,09
3.	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	59.225.065,00	0,00	59.225.065,00	-
4.	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	18.499.147,00	28.745.117,03	(10.245.970,03)	(35,64)
5.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	199.475.194,03	347.758,82	199.127.435,21	57.260,21
6.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	10.364.375.296,61	(10.364.375.296,61)	(100,00)
Jumlah		342.946.375,66	10.408.433.265,21	(10.065.486.889,55)	(96,71)

Tabel 302. Beban Penyisihan Piutang Per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023

No	OPD	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
					Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4-5)	(7=6/5)
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah					
	BPKD	Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	0,00	646.104,50	(646.104,50)	(100,00)
	BPKD	Beban Penyisihan Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	68.413,25	(68.413,25)	(100,00)
	BPKD	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	0,00	13.250,00	(13.250,00)	(100,00)
	Bapenda	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	31.044,58	0,00	31.044,58	-

No	OPD	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
					Rp	%
	Bapenda	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Restoran	11.588.008,50	0,00	11.588.008,50	-
	Bapenda	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	13.000,00	0,00	13.000,00	-
		Jumlah	**11.632.053,08**	**727.767,75**	**10.904.285,33**	**1.498,32**
2.	**Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah**					
	Dinkes	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	26.118.237,17	0,00	26.118.237,17	-
	RSUD	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	7.209.829,38	0,00	7.209.829,38	-
	Diskominfo	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	600,00	7.454.200,00	(7.453.600,00)	(99,99)
	Bapenda & BPKD	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah	20.786.250,00	6.783.125,00	14.003.125,00	206,44
		Jumlah	**54.114.916,55**	**14.237.325,00**	**39.877.591,55**	**280,09**
3.	**Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**					
	BKAD	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	59.225.065,00	0,00	59.225.065,00	-
		Jumlah	**59.225.065,00**	**0,00**	**59.225.065,00**	-
4.	**Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**					
	BPKD	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	21.262.693,76	(21.262.693,76)	(100,00)
	BPKD	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBBP2	0,00	582.423,27	(582.423,27)	(100,00)
	BKAD	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	18.499.147,00	6.900.000,00	11.599.147,00	168,10
		Jumlah	**18.499.147,00**	**28.745.117,03**	**(10.245.970,03)**	**(35,64)**
5.	**Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat**					
	PPKD	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH-DBH PBB	106.186.200,00	0,00	106.186.200,00	-
	PPKD	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	77.845.300,00	0,00	77.845.300,00	-
	PPKD	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29WPOPDN	10.305.598,46	1,54	10.305.596,92	669.194.605,19
	PPKD	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	0,00	347.740,63	(347.740,63)	(100,00)
	PPKD	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi	0,00	5,48	(5,48)	(100,00)
	PPKD	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	5.138.085,57	4,43	5.138.091,14	115.960.9 39,65
	PPKD	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH	0,00	6,74	(6,74)	(100,00)
		Jumlah	**199.475.194,03**	**347.758,82**	**199.127.435,21**	**57.260,21**
6.	**Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah**					
	PPKD	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	421.135.348,72	(421.135.348,72)	(100,00)
	PPKD	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	1.237.774.323,42	(1.237.774.323,42)	(100,00)
	PPKD	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	8.611.751.542,28	(8.611.751.542,28)	(100,00)
	PPKD	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Air Permukaan	0,00	73.754.888,70	(73.754.888,70)	(100,00)
	PPKD	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Rokok	0,00	19.959.193,49	(19.959.193,49)	(100,00)
		Jumlah	**0,00**	**10.364.375.296,61**	**(10.364.375.296,61)**	**(100,00)**
		Jumlah	**342.946.375,66**	**10.408.433.265,21**	**(10.065.486.889,55)**	**(96,71)**

Berikut perhitungan beban penyisihan piutang sebesar Rp342.946.375,66 :

Tabel 303. Perhitungan Beban Penyisihan Piutang TA 2024

NO	URAIAN	PENYISIHAN PIUTANG 31 DES 2023	LIS + BEBAN *)	NERACA (Hitam, Merah) **)	PIUTANG TAHUN 2024						SELISIH ****)
					KUALITAS PIUTANG				JUMLAH PIUTANG + PIUTANG DANA BERGULIR ***)	PENYISIHAN PIUTANG (Kualitas Piutang x Tarif)	
					Lancar 0,00%	Kurang Lancar 10,00%	Diragukan 50,00%	Macet 100,00%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11	12=5+10-11
1.	Pajak Kendaraan dan Opsennya	4.685.736,75	0,00	(4.685.736,75)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pajak Rumah Makan dan Opsennya	146.220,25	0,00	(146.220,25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pajak Parkir	17.750,00	0,00	(17.750,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	PBB-P2	0,00	21.044,50	0,00	8.288.916,00	0,00	0,00	0,00	8.288.916,00	21.044,50	0,00
5.	PBJT Restoran	0,00	11.588.008,50		5.217.560,00	25.584.750,00	1.328.460,00	5.301.148,00	38.432.750,00	11.588.008,50	0,00
6.	PBJT Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	0,00	13.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	13.000,00	0,00
7.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	23.228.088,75	0,00	1.596.371.588,00	258.846.545,00	365.460,00	0,00	2.148.985.435,00	44.638.347,42	10.711.275,67
8.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	10.711.275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.711.275,67)
9.	Retribusi Penggunaan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	25.679.750,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.680.350,00	25.680.350,00	25.680.350,00	0,00
10.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	0,00
11.	Retribusi Penyewaan Tanah	10.001.250,00	20.756.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.757.500,00	20.757.500,00	20.757.500,00	0,00
12.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	0,00	59.025.065,00	0,00	0,00	0,00	110.850.130,00	0,00	110.850.130,00	59.025.065,00	0,00
13.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja ASN Tunjangan Keluarga PNS	6.900.000,00	13.889.147,00	0,00	0,00	0,00	46.798.294,00	1.890.000,00	46.798.294,00	13.889.147,00	0,00
14.	Pendapatan Dana PBB-P2	360.174,62	0,00	(360.320,38)	0,00	0,00	0,00	40.654,24	40.654,24	40.654,24	0,00
15.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	42.985.000,00	0,00	(1.325.000,00)	0,00	0,00	0,00	51.040.000,00	51.040.000,00	51.040.000,00	0,00
16.	Tambahan Gaji Kenegeri Daerah terhadap Pegawai Negeri Dalam Dinas/Daerah atau Pegawai Lain	42.916.851,06	0,00	(5.728.210,10)	0,00	0,00	0,00	55.291.841,04	55.291.841,04	55.291.841,04	0,00
17.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.340.816.838,67	0,00	(2.340.816.838,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.386.779.011,00	0,00	0,00
18.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.401.610.230,62	0,00	(1.401.610.230,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.993.387.173,00	0,00	0,00
19.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.351.736.135,88	0,00	(3.351.736.135,88)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.937.442.309,00	0,00	0,00
20.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	80.156.991,10	0,00	(80.156.991,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	438.669.294,00	0,00	0,00
21.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	13.856.193,40	0,00	(13.856.193,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.794.336,00	0,00	0,00
22.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	168.136.298,00	0,00	0,00	1.081.382.000,00	0,00	0,00	1.081.382.000,00	168.136.298,00	0,00
23.	DBH PPh Pasal 21	0,00	77.840.300,00	0,00	0,00	778.403.000,00	0,00	0,00	778.403.000,00	77.840.300,00	0,00
24.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1,54	16.305.990,46	0,00	0,00	163.059.000,00	0,00	0,00	163.059.000,00	16.305.990,00	0,00
25.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	584.398,95	0,00	(22.398,95)	0,00	5.424.000,00	0,00	0,00	5.424.000,00	562.000,00	0,00
26.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Migas Bumi	0,40	0,00	(0,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Panas Bumi	4,43	3.138.050,57	0,00	0,00	31.381.000,00	0,00	0,00	31.381.000,00	3.138.050,00	0,00
28.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,74	0,00	(0,74)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Pokok Dana Bergulir	0,00	0,00	867.844.191,00	0,00	0,00	0,00	867.844.191,00	867.844.191,00	867.844.191,00	0,00
Jumlah		13.484.942.015,36	342.946.375,66	(10.425.735.862,18)	3.692.396.604,00	3.293.791.595,00	158.141.834,00	1.091.200.088,28	71.864.875.826,28	1.502.142.545,78	0,00

*) Total Beban Penyisihan Piutang = Rp342.946.375,66

**) Mengurangi Penyisihan, Menambah Ekuitas total Rp13.293.570.033,18;
Menambah Pokok Dana Bergulir, Menambahan Penyisihan Pokok Dana Bergulir total Rp867.844.191,00

***) Total Piutang Rp70.596.770.834,28 + Dana Bergulir (Rp867.844.191,00 Bagian dari Investasi Non Permanen Rp1.318.613.500,00)

****) Selisih sebesar ±10.711.275,67 merupakan saldo awal penyisihan Lain2 PAD yang sah, telah di reklas ke Retribusi Pelayanan Kesehatan;
Lihat Juga, pada penjelasan Tabel 184. Perhitungan Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2024

5.4.2.1.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama manfaat aset yang ada pada Kabupaten Lampung Barat. Beban penyusutan TA 2024 sebesar Rp147.462.735.661,35 atau 16,39% dari seluruh beban operasi, jika dibandingkan dengan beban penyusutan TA. 2023 sebesar Rp111.250.768.130,18 maka mengalami peningkatan sebesar Rp36.211.967.531,17 atau 32,55%. Beban Penyusutan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 304. Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	33.391.149.074,35	36.415.019.360,18	(3.023.870.285,83)	(8,30)
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.775.171.271,00	18.395.379.336,00	1.379.791.935,00	7,50
3.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	93.911.763.209,00	55.935.247.453,00	37.976.515.756,00	67,89
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	147.734.560,00	227.516.750,00	(79.782.190,00)	(35,07)
5.	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	236.917.547,00	277.605.231,00	(40.687.684,00)	(14,66)
	Jumlah	147.462.735.661,35	111.250.768.130,18	36.211.967.531,17	32,55

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 telah melakukan penyusutan aset tetap, sedangkan beban penyusutan semester 2 tahun 2023 sebesar Rp38.498.266.037,00 atas beban penyusutan jalan dan jembatan belum dilakukan karena kekeliruan perhitungan dalam kertas kerja, sehingga penyusutan semester 2 tahun 2023 dilakukan pada tahun 2024.

Perhitungan Beban Penyusutan sebesar Rp147.462.735.661,35 disajikan pada lampiran 50

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 305. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023

No	Keterangan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	**Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**				
	Beban Penyusutan Alat Besar	595.559.045,67	621.594.628,00	(26.035.582,33)	(4,19)
	Beban Penyusutan Alat Angkutan	3.719.384.305,00	4.110.046.541,00	(390.662.236,00)	(9,51)
	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	506.646.486,00	694.780.939,00	(188.134.453,00)	(27,08)
	Beban Penyusutan Alat Pertanian	53.597.357,00	65.485.630,00	(11.888.273,00)	(18,15)
	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.536.219.224,68	8.861.698.486,35	(325.479.261,67)	(3,67)
	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.290.964.218,00	1.495.377.787,00	(204.413.569,00)	(13,67)
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.442.461.810,00	8.219.893.823,83	(777.432.013,83)	(9,46)
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	1.973.894.712,00	2.194.680.512,00	(220.785.800,00)	(10,06)
	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Komputer	8.588.020.895,00	9.136.399.066,00	(548.378.171,00)	(6,00)
	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	209.665.353,00	290.794.206,00	(81.128.853,00)	(27,90)
	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	164.859.250,00	166.621.000,00	(1.761.750,00)	(1,06)
	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	16.851.746,00	16.851.746,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	162.898.293,00	333.960.020,00	(171.061.727,00)	(51,22)
	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	126.801.379,00	203.509.975,00	(76.708.596,00)	(37,69)
	Jumlah	**33.391.149.074,35**	**36.415.019.360,18**	**(3.023.870.285,83)**	**(8,30)**
2.	**Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan**				
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	19.147.940.261,00	17.802.036.865,00	1.345.903.396,00	7,56
	Beban Penyusutan Monumen	219.229.596,00	213.397.064,00	5.832.532,00	2,73
	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	408.001.414,00	379.945.317,00	28.056.097,00	7,38
	Jumlah	**19.775.171.271,00**	**18.395.379.336,00**	**1.379.791.935,00**	**7,50**
3.	**Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi**				
	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	77.602.947.360,00	39.835.500.233,00	37.767.447.127,00	94,81
	Beban Penyusutan Bangunan Air	12.839.123.039,00	13.163.981.618,00	(324.858.579,00)	(2,47)
	Beban Penyusutan Instalasi	2.071.479.539,00	1.631.415.614,00	440.063.925,00	26,97
	Beban Penyusutan Jaringan	1.398.213.271,00	1.304.349.988,00	93.863.283,00	7,20
	Jumlah	**93.911.763.209,00**	**55.935.247.453,00**	**37.976.515.756,00**	**67,89**
4.	**Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya**				
	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	147.734.560,00	227.516.750,00	(79.782.190,00)	(35,07)
	Jumlah	**147.734.560,00**	**227.516.750,00**	**(79.782.190,00)**	**(35,07)**
5.	**Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud**				
	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	236.917.547,00	277.605.231,00	(40.687.684,00)	(14,66)
	Jumlah	**236.917.547,00**	**277.605.231,00**	(40.687.684,00)	(14,66)
	Jumlah	**147.462.735.661,35**	**111.250.768.130,18**	**36.211.967.531,17**	**32,55**

5.4.2.2. BEBAN TRANSFER

5.4.2.2.1. Beban Bagi Hasil

Beban Bagi Hasil adalah merupakan sebagian dari Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) yang diatribusikan kepada 131 Pemerintah Desa/ Pekon Kabupaten Lampung Barat, pada TA 2024 beban bagi hasil sebesar Rp1.798.762.200,00 atau 0,18% dari seluruh beban, jika dibandingkan dengan Beban Bagi Hasil TA 2023 sebesar Rp1.715.995.373,00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp82.766.827,00 atau 4,82%. Beban Bagi Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut

Tabel 306. Beban Bagi Hasil TA 2024 dan 2023

No	Keterangan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.582.067.600,00	1.486.432.573,00	95.635.027,00	6,51
2.	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	216.694.600,00	230.562.800,00	(13.868.200,00)	(6,01)
	Jumlah	1.798.762.200,00	1.715.995.373,00	82.766.827,00	4,82

Berikut disajikan tabel Perbedaan Beban Bagi Hasil dengan Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024

Tabel 307. Selisih Beban Bagi Hasil dengan Belanja Bagi Hasil Tahun 2024

No	Uraian	LRA	LO	Selisih	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	6
1.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.473.076.700,00	1.582.067.600,00	(108.990.900,00)	Selisih
2.	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	219.786.900,00	216.694.600,00	3.092.300,00	Selisih
Jumlah		1.692.863.600,00	1.798.762.200,00	(105.898.600,00)	Selisih

Perhitungan perbedaan Beban Bagi Hasil sebagai berikut

Realisasi Beban (LO) Tahun 2024	Rp	1.798.762.200,00
Realisasi Belanja (LRA) Tahun 2024	(Rp	1.692.863.600,00)
Selisih	Rp	105.898.600,00

Perhitungan Nilai Utang Akhir Tahun

1. Utang Bagi Hasil Awal Tahun	Rp	525.513.300,00
2. Realisasi Beban (LO) Tahun 2024	Rp	1.798.762.200,00
3. Realisasi Belanja (LRA) Tahun 2024	(Rp	1.692.863.600,00)
4. Utang Bagi Hasi Akhir Tahun	Rp	631.411.900,00

Selisih senilai sebesar Rp105.898.600,00 = Utang Akhir Tahun – Utang Awal Tahun (Rp631.411.900,00 - Rp525.513.300,00)

5.4.2.2.2. Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan adalah berupa Alokasi Dana Pekon (ADP) yang bersumber dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada 131 pekon di Kabupaten Lampung Barat dan Bantuan Keuangan Pembangunan Bandara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanah, pada TA 2024 Beban Bantuan Keuangan sebesar Rp56.344.980.000,00 atau 6,26% dari seluruh beban, jika dibandingkan dengan Beban Bantuan Keuangan TA. 2023 sebesar Rp53.821.021.000,00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp2.523.959.000,00 atau 4,69%. Beban Transfer disajikan pada tabel berikut

Tabel 308. Beban Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023

No	Keterangan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Bantuan Keuangan ke Desa	55.844.980.000,00	53.821.021.000,00	2.023.959.000,00	3,76
2.	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	∞
Jumlah		56.344.980.000,00	53.821.021.000,00	2.523.959.000,00	4,69

Berikut disajikan tabel Perbedaan Beban Bantuan Keuangan dengan Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024.

Tabel 309. Selisih Beban Bantuan Keuangan dengan Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024

No	Uraian	LRA	LO	Selisih	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	6
1	Beban Bantuan Keuangan ke Desa	174.716.036.000,00	55.844.980.000,00	118.871.056.000,00	Selisih
2	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	Selisih
Jumlah		174.716.036.000,00	56.344.980.000,00	118.371.056.000,00	Selisih

Perhitungan perbedaan Beban Bantuan Keuangan sebagai berikut

Realisasi Belanja (LRA) Tahun 2024	Rp	174.716.036.000,00
Realisasi Beban (LO) Tahun 2024	(Rp	56.344.980.000,00)
Selisih	Rp	118.371.056.000,00

Selisih Perhitungan adalah Belanja Dana Desa Sumber APBN = Rp118.449.735,00 hanya dicatat pada LRA tidak dicatat pada LO dan pencatatan Utang Bantuan Keuangan Pembangunan Bandara Gatot Subroto Kabupaten Way Kanan sebesr Rp500.000.000,00 sesuai dengan perjanjian kerja sama Nomor : 500.11.25.2/5407/VI.02/2024 tanggal 22 Oktober 2024.

Selisih Belanja LRA dengan Beban LO sebesar Rp118.371.056.000,00 = Utang Awal Tahun – Utang Akhir Tahun + Belanja Dana Desa Sumber dana APBN (Rp421.321.000,00 – Rp500.000.000,00 + Rp118.449.735.000,00)

5.4.2.3. SURPLUS/ (DEFISIT) DARI OPERASI

Surplus / (Defisit) Dari Operasi Tahun 2024 sebesar Rp101.157.458.941,93 merupakan selisih antara Pendapatan Daerah sebesar Rp1.059.015.841.156,39 dengan Beban Daerah sebesar Rp957.858.382.214,46.

5.4.3. SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

5.4.3.1. SURPLUS NON OPERASIONAL – LO

5.4.3.1.1. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO

Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Surplus dari kegiatan penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar – LO Tahun 2024 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (Rp160.196.170,00) atau (100,00%) dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp160.196.170,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 310. Rincian Surplus Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	160.196.170,00	(160.196.170,00)	(100,00
	Jumlah	0,00	160.196.170,00	(160.196.170,00)	(100,00)

5.4.3.2. DESIFIT NON OPERASIONAL – LO

5.4.3.2.1. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO

Digunakan untuk mencatat selisih kurang dari kegiatan non operasional lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Defisit dari kegiatan non operasional lainnya – LO Tahun 2024 sebesar Rp5.678.954.218,00 mengalami peningkatan Rp5.505.512.891,00 atau 3.174,28% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp173.441.327,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 311. Rincian Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepaasan Aset Non Lancar - LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.678.954.218,00	173.441.327,00	5.505.512.891,00	3.174,28
	Jumlah	5.678.954.218,00	173.441.327,00	5.505.512.891,00	3.174,28

Defisit pelepasan aset Tahun 2024 ini adalah Pencatatan Nilai Buku atas Penghapusan Aset Lainnya berupa (Gedung dan Bangunan, Peralatan Mesin, dan Jalan Jaringan Irigasi) sesuai dengan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/381/KPTS/IV.01/2024 Tanggal 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran 51.

5.4.3.3. SURPLUS/DEFISIT - LO SEBELUM POS LUAR BIASA

Surplus / Defisit – LO sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp95.478.504.723,93 adalah selisih antara Surplus/Defisit Dari Operasi sebesar Rp101.157.458.941,93 dengan jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp5.678.954.218,00).

5.4.4. POS LUAR BIASA

5.4.4.1. PENDAPATAN LUAR BIASA – LO

5.4.4.1.1. Pendapatan Luar Biasa – LO

Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendapatan luar biasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Pada TA 2024 dan 2023 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki pendapatan luar biasa – LO.

5.4.4.2. BEBAN LUAR BIASA

5.4.4.2.1. Beban Luar Biasa

Penurunan ekuitas akibat peristiwa luar biasa yaitu kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Beban luar biasa ini terdiri atas beban tidak terduga dan beban luar biasa lainnya.

Beban Luar Biasa Tahun 2024 sebesar Rp1.878.670.650,00 mengalami penurunan (Rp3.232.905.887,00) atau (63,25%) dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp5.111.576.537,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 312. Rincian Beban Luar Biasa TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Bantuan kepada korban bencana alam dan perbaikan jalan pasca kejadian longsor – beban tak terduga (total)	1.878.601.050,00	1.316.870.260,00	561.730.790,00	42,66
2.	Beban Luar Biasa Lainnya	69.600,00	3.794.706.277,00	(3.794.636.677,00)	(100,00)
	Jumlah	1.878.670.650,00	5.111.576.537,00	(3.232.905.887,00)	(63,25)

Beban luar biasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penjelasan lebih rinci terhadap beban luar biasa berupa Beban Tidak Terduga sebesar Rp1.878.601.050,00 pada lampiran 7 yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan ini, dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Terduga (LRA) Tahun 2024 sebesar	Rp 1.961.201.439,00
b. Pembayaran Utang Sisa Dana Hibah / Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana ke RKUN, Tahun 2024	(Rp 82.600.389,00)
Beban Tidak Terduga Tahun 2024	Rp 1.878.601.050,00

2. Beban Luar Biasa Lainnya sebesar Rp69.600 merupakan beban kliring pembayaran Pokok Pinjaman dan Pembayaran Bunga Pinjaman kepada PT SMI.

5.4.5. SURPLUS/ DEFISIT – LO

Saldo Surplus / Defisit – LO sebesar Rp93.599.834.073,93 merupakan selisih antara Surplus/Defisit – LO Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp95.478.504.723,93 dengan Jumlah Pos Luar Biasa sebesar (Rp1.878.670.650,00).

5.5. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN ARUS KAS

Fungsi Laporan Arus Kas adalah menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Non Anggaran sampai dengan 31 Desember 2024, berikut disajikan secara rinci Laporan Arus sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023.

Tabel 313. Arus Kas Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	198.308.591.695,99	118.233.860.915,04	80.074.730.780,95	67,73
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(157.348.663.663,00)	(117.806.862.544,00)	(39.541.801.119,00)	33,56
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(17.918.098.140,00)	(17.918.125.240,00)	27.100,00	(0,00)
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(162.309.324,15)	43.007.045,34	(205.316.369,49)	(477,40)
	Kenaikan (Penurunan) Kas	22.879.520.568,84	(17.448.119.823,62)	40.327.640.392,46	(231,13)

Arus Kas Bersih Per 31 Desember 2024 terjadi sebesar Rp22.879.520.568,84 mengalami peningkatan sebesar Rp40.327.640.392,46 atau (231,13%) dibandingkan tahun 2023 sebesar (Rp17.448.119.823,62). Rincian Laporan Arus Kas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.5.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk membiayai aktivitas pemerintah selama satu tahun anggaran. Arus Kas bersih atas aktifitas operasi dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 314. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Arus Masuk Kas	1.111.191.957.433,81	985.635.640.176,84	125.556.317.256,97	12,74
2	Arus Keluar Kas	912.883.365.737,82	867.401.779.261,80	45.481.586.476,02	5,24
	Jumlah (1-2)	198.308.591.695,99	118.233.860.915,04	80.074.730.780,95	67,73

Arus Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp198.308.591.695,99 mengalami peningkatan sebesar Rp80.074.730.780,95 atau 67,73% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp118.233.860.915,04. Arus Kas aktivitas operasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.5.1.1.Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Merupakan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah telah diterima selama tahun pelaporan pada tabel berikut.

Tabel 315. Arus Masuk Kas dari PAD Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1)	Penerimaan Pajak Daerah	15.820.932.766,00	14.854.325.262,00	966.607.503,00	6,51
2)	Penerimaan Retribusi Daerah	2.166.946.349,00	2.305.628.800,00	(138.682.451,00)	(6,01)
3)	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.854.018.934,91	5.653.827.320,95	200.191.613,96	3,54
4)	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	47.981.878.678,90	45.734.180.783,89	2.247.697.895,01	4,91
5)	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	956.625.034.394,00	855.646.664.112,00	100.978.370.282,00	11,80
6)	Penerimaan Transfer Antar Daerah	82.743.146.312,00	61.441.013.898,00	21.302.132.414,00	34,67
	Jumlah	1.111.191.957.433,81	985.635.640.176,84	125.556.317.256,97	12,74

5.5.1.1.1. Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan Pajak Daerah merupakan salah satu arus kas masuk berupa bagian dari Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2024 sebesar Rp15.820.932.765,00 dibanding tahun 2023 sebesar Rp14.854.325.262,00 mengalami peningkatan sebesar Rp966.607.503,00 atau 6,51%.

5.5.1.1.2. Penerimaan Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah merupakan salah satu arus kas masuk berupa bagian dari Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2024 sebesar Rp2.166.946.349,00 dibanding tahun 2023 sebesar Rp2.305.628.800,00 mengalami peurunan sebesar (Rp138.682.451,00) atau (6,01%).

5.5.1.1.3. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus kas masuk atas Penerimaan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan salah satu arus kas masuk berupa bagian dari Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2024 sebesar Rp5.854.018.934,91 dibanding tahun 2023 sebesar Rp5.653.827.320,95 mengalami peningkatan sebesar Rp 200.191.613,96 atau 3,54%.

5.5.1.1.4. Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Arus kas masuk atas Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah salah satu arus kas masuk berupa bagian dari Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2024 sebesar Rp47.981.878.678,90 dibanding tahun 2023 sebesar Rp45.734.180.783,89 mengalami peningkatan sebesar Rp2.247.697.895,01 atau 4,91%.

5.5.1.1.5. Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat

Arus kas masuk atas Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat salah satu arus kas masuk berupa bagian dari Penerimaan Transfer, pada tahun 2024 sebesar Rp956.625.034.394,00 dibanding tahun 2023 sebesar Rp855.646.664.112,00 mengalami peningkatan sebesar Rp100.978.370.282,00 atau 11,80%.

5.5.1.1.6. Penerimaan Transfer Antar Daerah

Arus kas masuk atas Penerimaan Transfer Antar Daerah salah satu arus kas masuk berupa bagian dari Pendapatan Transfer, pada tahun 2024 sebesar Rp82.743.146.312,00 dibanding tahun 2023 sebesar Rp61.441.013.898,00 mengalami peningkatan sebesar Rp21.302.132.414,00 atau 34,67%.

5.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Merupakan pengeluaran kas yang berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 316. Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Pembayaran Pegawai	444.086.680.344,07	413.304.423.702,00	30.782.256.642,07	7,45
2.	Pembayaran Barang dan Jasa	247.658.966.651,75	243.673.449.949,80	3.985.506.701,95	1,64
3.	Pembayaran Bunga	2.534.971.060,00	3.555.499.062,00	(1.020.528.002,00)	(28,70)
4.	Pembayaran Hibah	40.232.656.643,00	32.310.714.788,00	7.921.941.855,00	24,52
5.	Pembayaran Bantuan Sosial	0,00	244.550.000,00	(244.550.000,00)	(100,00)
6.	Pembayaran Bagi Hasil	1.692.863.600,00	1.634.829.400,00	58.034.200,00	3,55
7.	Pembayaran Bantuan Keuangan	174.716.036.000,00	171.170.160.000,00	3.545.856.000,00	2,07
8.	Pembayaran Tidak Terduga	1.961.201.439,00	1.508.132.360,00	453.069.079,00	30,04
	Jumlah	912.883.365.737,82	867.401.779.261,80	45.481.586.476,02	5,24

5.5.1.2.1. Pembayaran Pegawai

Merupakan pengeluaran yang berasal dari belanja pegawai yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah dan Belanja selain dana APBD selama tahun 2024 yaitu sebesar Rp444.086.680.344,07

pengeluaran kas pada pos ini digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, gaji dan tunjangan anggota DPRD, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif, Beban penunjang operasional KDH/WDH, biaya pemungutan pajak dan honorarium kegiatan, honorarium pengawas/ pegawai tenaga teknis, belanja pegawai BLUD.

5.5.1.2.2. Pembayaran Barang dan Jasa

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Beban Barang dan Jasa yang telah dikeluarkan dari kas daerah selama tahun 2024 senilai Rp247.658.956.651,75. Pengeluaran pos ini diantaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan habis pakai dan bahan/material, pembayaran jasa kantor, biaya pemeliharaan, biaya cetak dan penggandaan, biaya sewa, biaya makan dan minum, biaya perjalanan dinas, Beban pakaian dinas, biaya jasa konsultasi, premi asuransi kesehatan dan belanja barang dan jasa lainnya.

5.5.1.2.3. Pembayaran Bunga

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Bunga yang telah dikeluarkan dari kas daerah, selama tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2.534.971.060,00 untuk pembayaran bunga pinjaman pada PT SMI.

5.5.1.2.4. Pembayaran Hibah

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Hibah yang telah dikeluarkan dari kas daerah selama tahun 2024 sebesar Rp40.232.656.643,00 pengeluaran pos ini diantaranya hibah pemerintah lainnya, BUMD, badan/lembaga/organisasi dan kelompok masyarakat/perorangan.

5.5.1.2.5. Pembayaran Bantuan Sosial

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki pengeluaran Bantuan Sosial.

5.5.1.2.6. Pembayaran Bagi Hasil

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Beban Bagi Hasil yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2024 sebesar Rp1.692.863.600,00 berupa sharing belanja bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada 131 pekon.

5.5.1.2.7. Pembayaran Bantuan Keuangan

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Bantuan Keuangan yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2024 sebesar Rp174.716.036.000,00 berupa bantuan keuangan kepada 131 pekon baik dari Dana Desa bersumber dari APBN yang ditransfer langsung ke RK Desa maupun Alokasi Dana Pekon yang bersumber dari dana APBD.

5.5.1.2.8. Pembayaran Tidak Terduga

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Tidak Terduga yang telah dikeluarkan dari kas daerah selama tahun 2024 sebesar Rp1.961.201.439,00. Pengeluaran pos ini diantaranya untuk bantuan bencana alam dan perbaikan sarana dan prasarana akibat bencana alam seperti perbaikan jembatan atau jalan di desa yang rusak.

5.5.1.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 sebesar Rp198.308.591.695,99 merupakan selisih antara Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi sebesar Rp1.111.191.957.433,81 dengan Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi sebesar Rp912.883.365.737,82.

5.5.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Berikut disajikan tabel arus kas dari aktivitas investasi Tahun 2024 dan 2023

Tabel 317 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Arus Kas Masuk**				
	- Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	200.563.588,00	(200.563.588,00)	(100,00)
	Jumlah	**0,00**	**200.563.588,00**	**(200.563.588,00)**	**(100,00)**
2	**Arus Kas Keluar**				
	- Perolehan Peralatan dan Mesin	20.116.516.662,00	23.471.410.062,00	(3.354.893.400,00)	(14,29)
	- Perolehan Gedung dan Bangunan	88.928.047.259,00	20.128.517.180,00	68.799.530.079,00	341,80
	- Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	41.372.206.332,00	67.418.166.745,00	(26.045.960.413,00)	(38,63)
	- Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.734.413.410,00	5.836.651.645,00	(1.102.238.235,00)	(18,88)
	- Perolehan Aset Lainnya	197.480.000,00	152.680.500,00	44.799.500,00	29,34
	- Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	Jumlah	**157.348.663.663,00**	**118.007.426.132,00**	**39.341.237.531,00**	**33,34**
	Jumlah (1-2)	**(157.348.663.663,00)**	**(117.806.862.544,00)**	**(39.541.801.119,00)**	**33,56**

Arus Kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas ini sebesar (Rp157.348.663.663,00).

Rincian Arus Kas ini terdiri atas:

5.5.2.1.Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Pada tahun 2024 Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki arus kas masuk atas aktivitas investasi.

5.5.2.1.1. Penjualan atas Peralatan dan Mesin

Merupakan penerimaan atas penjualan peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp200.563.588,00, sedangkan tahun 2024 tidak memiliki penerimaan atas transaksi tersebut.

5.5.2.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

5.5.2.2.1. Perolehan Peralatan dan Mesin

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pos belanja modal peralatan dan mesin dalam rangka memperoleh aset tetap berupa peralatan dan mesin. Selama tahun 2024 pengeluaran dari kas daerah untuk pos ini sebesar Rp20.116.516.662,00.

5.5.2.2.2. Perolehan Gedung dan Bangunan

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pos belanja modal gedung dan bangunan dalam rangka memperoleh Aset Tetap berupa gedung dan bangunan. Selama tahun 2024 pengeluaran dari kas daerah untuk pos ini sebesar Rp88.928.047.259,00.

5.5.2.2.3. Perolehan Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pos belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dalam rangka memperoleh Aset Tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi. Selama tahun 2024 pengeluaran dari kas daerah untuk pos ini sebesar Rp41.372.206.332,00.

5.5.2.2.4. Perolehan Aset Tetap Lainnya

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pos belanja modal aset tetap lainnya dalam rangka memperoleh Aset Tetap berupa buku, barang bercorak seni dan hewan ternak. Selama tahun 2024 pengeluaran dari kas daerah untuk pos ini sebesar Rp4.734.413.410,00.

5.5.2.2.5. Perolehan Aset Lainnya

Merupakan pengeluaran yang berasal dari pos belanja aset lainnya sebesar Rp197.480.000,00.

5.5.2.2.6. Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Merupakan pengeluaran untuk menambahkan nilai investai Kabupaten Lampung Barat kepada pada PT BPRS Lampung Barat (Perseroda) Lampung Barat sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Bank Pembangunan Daerah Lampung sebesar Rp1.000.000.000,00.

5.5.2.3. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 sebesar (Rp157.348.663.663,00) merupakan selisih antara Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi sebesar Rp0,00 dengan Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi sebesar Rp157.348.663.663,00.

5.5.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Berikut disajikan tabel arus kas dari aktivitas pendanaan Tahun 2024 dan 2023

Tabel 318. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Arus Kas Masuk	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Arus Kas Keluar				
	- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	17.918.098.140,00	17.918.125.240,00	(27.100,00)	(0,00)
	Jumlah	17.918.098.140,00	17.918.125.240,00	(27.100,00)	(0,00)
Jumlah (1-2)		(17.918.098.140,00)	(17.918.125.240,00)	27.100,00	(0,00)

5.5.3.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada tahun 2024 Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki arus kas masuk atas aktivitas pembiayaan.

5.5.3.1.1. Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki penerimaan Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank.

5.5.3.2.Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

5.5.3.2.1. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp17.918.098.140,00 atas pinjaman pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

5.5.3.3.Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 sebesar (Rp17.918.098.140,00) merupakan selisih antara Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00 dengan Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan sebesar Rp17.918.098.140,00.

5.5.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas dari aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran Kas bruto yang tidak mempengaruhi APBD. Arus Kas bersih dari aktivitas ini per 31 Desember 2024 adalah (Rp162.309.324,15).

Tabel 319. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Arus Masuk Kas :				
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	62.296.628.966,86	52.760.557.226,15	9.536.071.740,71	18,07
	Jumlah	62.296.628.966,86	52.760.557.226,15	9.536.071.740,71	18,07
2	Arus Keluar Kas :				
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	62.458.938.291,01	52.717.121.430,81	9.741.816.860,20	18,48
	Koreksi Pencatatan Saldo Akhir Kas BOS Kinerja	0,00	428.750,00	(428.750,00)	(100,00)
	Jumlah	62.458.938.291,01	52.717.550.180,81	9.741.388.110,20	18,48
	Jumlah (1 – 2)	(162.309.324,15)	43.007.045,34	(205.316.369,49)	(477,40)

5.5.4.1.Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

5.5.4.1.1. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Merupakan penerimaan dari aktivitas non anggaran yang berasal dari pos Penerimaan PFK selama tahun 2024 sebesar Rp62.296.628.966,86 apabila dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp52.760.557.226,15 mengalami peningkatan sebesar Rp9.536.071.740,71 atau 18,07%.

5.5.4.2.Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

5.5.4.2.1. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Merupakan pengeluaran dari aktivitas non anggaran yang berasal dari pos Pengeluaran PFK selama tahun 2024 sebesar Rp62.458.938.291,01 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp52.717.121.430,81 mengalami peningkatan sebesar Rp9.741.816.860,20 atau 18,48%.

5.5.4.2.2. Koreksi Pencatatan Saldo Akhir Kas BOS Kinerja

Pada tahun 2024 tidak terdapat koreksi pencatatan saldo akhir kas BOS Kinerja

5.5.4.3.Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 sebesar (Rp162.309.324,15) merupakan selisih antara Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris sebesar Rp62.296.628.966,86 dengan Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris sebesar Rp62.458.938.291,01.

5.5.5. SALDO AKHIR KAS

Saldo akhir Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 pada tabel berikut.

Tabel 320. Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Saldo Awal Kas	30.858.681.962,23	48.306.801.785,85	(17.448.119.823,62)	(36,12)
2.	Kenaikan/ (Penurunan Kas)	22.879.520.568,84	(17.448.119.823,62)	40.327.640.392,46	(231,13)
3.	Saldo Akhir Kas (1 + 2)	53.738.202.531,07	30.858.681.962,23	22.879.520.568,84	74,14
	Rincian Saldo Akhir Kas :				
4.	Kas di Kas Daerah	50.743.497.315,01	25.819.052.572,19	24.924.444.742,82	96,54
5.	Kas di BLUD	2.651.046.117,70	4.597.603.300,41	(1.946.557.782,71)	(42,34)
6.	Kas Dana BOSP	168.387.764,36	0,00	168.387.764,36	∞
7.	Kas Dana BOS	0,00	281.132.047,63	(281.132.047,63)	(100,00)
8.	Kas Lainnya	0,00	15.842.200,00	(15.842.200,00)	(100,00)
9.	Kas Dana BOK Puskesmas	175.271.334,00	145.051.242,00	30.220.092,00	20,83
	Saldo Akhir Kas (4 s.d. 11)	53.738.202.531,07	30.858.681.962,23	22.879.520.568,84	74,14

5.6. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ (defisit) – LO, koreksi dan ekuitas akhir, dimana Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 berasal dari Saldo Ekuitas Awal ditambah/ dikurang dengan Surplus/ (Defisit) LO dan Perubahan ekuitas lainnya.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Saldo awal ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp2.853.869.584.349,33, Surplus/ (Defisit) – LO sebesar Rp93.599.834.073,93 merupakan surplus atas kegiatan operasional yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar antara lain Selisih Revaluasi Aktiva Tetap Rp0,00 dan lain-lain sebesar (Rp85.303.058.535,65) sehingga Ekuitas Akhir Tahun 2024 sebesar Rp2.862.166.359.887,61 dapat dirinci sbb:

5.6.1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal TA 2024 sebesar Rp2.853.869.584.349,33 bila dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp2.766.774.873.857,60 mengalami peningkatan sebesar Rp87.094.710.491,73 atau 3,15%.

5.6.2. Surplus/ (Defisit) - LO

Surplus/ (Defisit) - LO TA 2024 sebesar Rp93.599.834.073,93 bila dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp58.722.209.492,05 mengalami peningkatan surplus sebesar Rp34.877.624.581,88 atau 59,39%.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar – Koreksi Nilai Persediaan

Pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 tidak memiliki saldo koreksi nilai persediaan.

5.6.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar – Selisih Revaluasi Aktiva Tetap

Pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 tidak memiliki saldo atas selisih revaluasi aktiva tetap.

5.6.5. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar – Lain lain

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar – lain lain TA 2024 sebesar (Rp85.303.058.535,65) bila dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp28.372.500.999,68 mengalami penurunan sebesar (Rp113.675.559.535,33) atau (400,65%).

Tabel 321. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Dampak Kumulatif/ Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar - Lain-lain	Ekuitas Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saldo Awal Ekuitas	0,00	2.853.869.584.349,33
2	Surplus-LO Tahun Berjalan	0,00	93.599.834.073,93
3	Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
4	Lain-lain		

No	Uraian	Dampak Kumulatif/ Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar - Lain-lain	Ekuitas Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penambahan:		
	1) Penerimaan Hibah Tanah dari Masyarakat Tahun Anggaran 2023, yang baru dicatat pada tahun 2024, dinilai berdasarkan NJOP	90.000,00	
	2) Penambahan harga Perolehan Aset karena Peningkatan Nilai Jual Objek PajakPenambahan atas inventarisasi tanah dilakukan oleh bidang BMD, Tanah Perluasan RSUD = 559.440.000; Bangunan SKB Sumber Jaya Rp15.000.000; Bangunan Gedung SKB Sumber Jaya Rp56.700.000,00; Tanah Perumahan Guru SDN 2 Tapak Siring Rp3.775.200	634.915.200,00	
	3) Koreksi, Pengurangan Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Double Catat atas aset compention Hall Tahun 2006) yang sudah tercatat di Gedung hotel Lumbok seminung	2.557.465.900,00	
	4) Penyesuaian akhir tahun atas Terhadap Piutang mengakibatkan Penurunan Saldo Penyisihan Piutang Akhir dibandingkan Saldo Penyisihan Awal Tahun (UnAudited) (Rp2.492.619.385,06 – Rp2.378.702.928,23 = Rp113.916.456,83)	113.916.456,83	
	5) Koreksi Audited atas Penyisihan Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pemerintah Provinsi (Audited)	13.179.653.576,35	
	6) Penurunan Penyisihan Piutang Pokok Dana Bergulir Thn 2023 Rp880.159.191,00 - Thn 2024 Rp867.844.191 = Rp12.315.000,00	12.315.000,00	
	7) Penambahan atas Inventarisasi dilakukan oleh bidang BMD, Rumah Dinas Type 48 senilai Rp28.650.000 dan Rumah Dinas Type 36 senilai Rp38.800.000,00 = Total Rp67.450.000 (Belakang Bapenda)	67.450.000,00	
	8) Penyesuaian Koreksi Pembayaran Utang Belanja Jasa Tahun 2023 dibayar Tahun 2024	8.275.695,00	
	9) Penyesuaian Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pemerintah Pusat atas DBH yang telah diterima oleh Pemkab Lambar berdasarkan PMK 89 Thn 2024 atas Lebih Bayar/ Kurang Bayar Thn 2024	851.256.775,00	
	10) Pencatatan Hasil LHA KAP atas LK BPRS TB 2024 (atas Laba Tahun 2024 bagian Kabupaten Lampung Barat), (Metode Ekuitas)	795.627.013,11	
	11) Pencatatan Hasil LHA KAP atas LK Perumda Limau Kunci TB 2024 (Koreksi Laba Tahun Sebelumnya), (Metode Ekuitas)	2.007.165,55	
	12) Koreksi Audited atas Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, yang baru dicatat pada tahun 2024	182.250.000,00	
	13) Koreksi Audited atas Persediaan Bahan Cetak (Buku KIA) Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, yang baru dicatat pada tahun 2024	5.168.305,00	
	Jumlah Penambahan	**18.210.391.086,84**	
	Pengurang :		
	1) Koreksi atas Pengurangan Harga Perolehan Bangunan Gedung (Double Catat atas aset compention Hall Tahun 2006) yang sudah tercatat di Gedung hotel Lumbok seminung	6.912.070.000,00	
	2) Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2015 s.d 2024	26.470.968.251,00	
	3) Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2010 s.d 2014	21.405.200.886,00	
	4) Penghapusan aset yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan berupa Ruang Rapat KPU (Gedung Kantor)	291.572.300,00	
	5) Penyesuaian Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pemerintah Pusat atas DBH yang telah diterima oleh Pemkab Lambar berdasarkan PMK 89 Thn 2024 atas Lebih Bayar/ Kurang Bayar Thn 2024	5.701.540.091,00	
	6) Pencatatan Hasil LHA KAP atas LK BPRS TB 2024 (Pemakaian Dana Cadangan), (Metode Ekuitas)	297.267.153,94	
	7) Pencatatan Hasil LHA KAP atas LK BPRS TB 2024 (Pembagian Dividen), (Metode Ekuitas)	653.987.738,40	
	8) Pencatatan Koreksi Kerugian pada BUMD Perumda Limau Kunci Rp116.261.676,01 dan Pesagi Mandiri Rp366.222.593,00 atas LHA KAP (Metode Ekuitas)	482.484.269,01	
	9) Penyesuaian Koreksi Pembayaran Utang Belanja Jasa Tahun 2023 dibayar Tahun 2024	11.745.708,00	
	10) Koreksi kelebihan pembayaran Pendapatan Klaim BLUD RS almuddin umar dari BPJS (Lebih bayar 2021-2023)	1.374.876.400,00	
	11) Koreksi kelebihan pembayaran klaim Dana Kapitasi pada Puskesmas atas transaksi tahun sebelumnya	1.393.213.950,00	
	12) Koreksi Audited oleh KAP atasLaba ditahan Tahun 2023 LK BUMD Perumda Limau Kunci	0,14	

No	Uraian	Dampak Kumulatif/ Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar - Lain-lain	Ekuitas Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)
	13) Koreksi Audited atas Kurang Catat Akumulasi Penyusutan yang diakibatkan kurang catat Semester II Tahun 2023, BA No. 024/120/IV.01/2025	38.498.266.037,00	
	14) Koreksi Audited atas Akumulasi Penyusutan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2024 Berupa Remote Temperature Monitoring System (RTMS) Di Dinas Kesehatan	2.011.838,00	
	15) Koreksi Audited atas Akumulasi Penyusutan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2024 Berupa Remote Temperature Monitoring System (RTMS) Di Dinas Kesehatan	18.225.000,00	
	Jumlah Pengurangan	103.513.449.622,49	
	Jumlah Keseluruhan	0,00	(85.303.058.535,65)
		Jumlah Ekuitas Akhir (1+2+3+4)	2.862.166.359.887,61

5.6.6. EKUITAS AKHIR

Ekuitas akhir sebesar Rp2.862.166.359.887,61 merupakan penjumlahan dari Ekuitas Awal sebesar Rp2.853.869.584.349,33 Surplus/Defisit – LO sebesar Rp93.599.834.073,93 dan Dampak Kumulatif Perubahan/ Kebijakan / Kesalahan Mendasar – Lain lain sebesar (Rp85.303.058.535,65).

5.7. HUBUNGAN ANTAR KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Hubungan/ keterkaitan antara beberapa jenis laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Per 31 Desember 2024 antara lain.

5.7.1. Hubungan antara Laporan Arus Kas dengan Saldo Kas pada Neraca

Saldo akhir kas pada Laporan Arus Kas dan saldo kas pada laporan Neraca per 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp53.738.202.531,07 dan Rp53.738.202.531,07 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Saldo Kas berdasarkan Laporan Arus Kas	Rp 53.738.202.531,07
2. Saldo Kas pada akun Neraca	(Rp 53.738.202.531,07)
3. Selisih	Rp 0,00

Rincian Saldo Kas pada akun Neraca sbb:

1.	Kas di Kas Daerah	Rp	50.743.497.315,01
2.	Kas di BLUD	Rp	2.651.046.117,70
3.	Kas Dana BOSP	Rp	168.387.764,36
4.	Kas Dana BOK Puskesmas	Rp	175.271.334,00
	Jumlah	**Rp**	**53.738.202.531,07**

5.7.2. Hubungan antara Laporan Arus Kas dengan Laporan Realisasi Anggaran

Saldo akhir kas pada Laporan Arus Kas dengan saldo kas pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp53.738.202.531,07 dan Rp53.725.043.214,07 selisih sebesar Rp13.159.317,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Terdapat perbedaan antara saldo Laporan Arus Kas dengan Saldo Laporan Realisasi Anggaran dapat dirinci sebagai berikut:

1. Saldo Kas berdasarkan Laporan Arus Kas	Rp 53.738.202.531,07
2. SILPA Tahun Anggaran	(Rp 53.725.043.214,07)
3. Selisih	**Rp 13.159.317,00**

Rincian perbedaan antara Laporan Arus Kas dengan Laporan Realisasi Anggaran dapat dijelaskan sbb:

1.	Kas Dana BOS Utang PFK – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024	Rp	10.228.878,00
2.	Kas Dana BOS Affirmasi – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022	Rp	2.930.439,00
	Jumlah	**Rp**	**13.159.317,00**

5.7.3. Hubungan antara Laporan Perubahan SAL dengan Laporan Realisasi Anggaran

Tidak terdapat perbedaan antara saldo akhir Laporan Perubahan SAL dengan Saldo Laporan Realisasi Anggaran, masing-masing sebesar Rp53.725.043.214,07.

5.7.4. Hubungan antara Laporan Perubahan Ekuitas dengan Neraca dan Laporan Operasional

Nilai Surplus/ (Defisit) - LO pada Laporan Ekuitas tidak memiliki perbedaan dengan dengan nilai Surplus / (Defisit) – LO pada Laporan Operasional masing-masing sebesar Rp93.599.834.073,93. Nilai Ekuitas Akhir pada Laporan Ekuitas tidak memiliki perbedaan dengan nilai Ekuitas pada Neraca masing-masing sebesar Rp2.862.166.359.887,61.

Gambar. 1.

HUBUNGAN ANTAR LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	2024
1	2	3
1	**ASET**	
2	**ASET LANCAR**	
	Kas di Kas Daerah	50.743.497.315,01
	Kas di BLUD	2.651.046.117,70
	Kas Dana BOSP	188.397.764,36
	Kas Dana BOK Puskesmas	175.271.354,00
	ASET LANCAR	137.930.835.168,19
3	INVESTASI JANGKA PANJANG	45.574.267.993,93
4	ASET TETAP	1.539.729.698.032,10
5	DANA CADANGAN	0,00
6	ASET LAINNYA	197.386.200.457,74
	JUMLAH ASET	**2.918.620.969.589,96**
	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
1	KEWAJIBAN	56.434.609.702,25
2	**EKUITAS**	**2.862.186.359.887,61**
	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	**2.918.620.969.589,96**

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	2024
1	2	3
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	195.338.591.895,88
2	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	(157.348.663.883,00)
3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	(17.916.098.140,00)
4	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	(162.999.324,15)
5	KENAIKAN/PENURUNAN KAS	22.879.530.598,94
6	SALDO AWAL KAS	30.858.681.992,23
7	**SALDO AKHIR KAS**	**53.738.202.531,87**

SELISIH 0,00

KENAIKAN/PENURUNAN KAS

SALDO AWAL KAS

LRA PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	2024
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	1.111.181.857.433,81
2	BELANJA DAERAH	1.068.232.029.400,82
3	SURPLUS / (DEFISIT)	42.959.828.032,99
4	PEMBIAYAAN NETO	10.765.115.181,05
	SILPA	**53.725.043.214,07**

SELISIH 13.159.317,80

RINCIAN SELISIH

Utang PFK BOS Diadik	10.229.878,00
Kas Dana BOS Afirmasi Diadik	2.930.439,00

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	2024
1	2	3
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	30.683.213.321,08
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun	30.683.213.321,08
3	Subtotal (1-2)	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SiKPA)	53.725.043.214,07
5	Subtotal (3+4)	53.725.043.214,07
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6)	**53.725.043.214,07**

SELISIH 0,00

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	2024
1	2	3
1	EKUITAS AWAL	2.853.869.564.349,33
2	SURPLUS/(DEFISIT-LO	**93.599.834.073,93**
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	
	Koreksi Nilai Persediaan	0,00
	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
	Lain-lain	(85.303.038.535,65)
	EKUITAS AKHIR	**2.862.186.359.887,61**

SELISIH 0,00

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	2024
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH-LO	1.059.015.641.156,39
2	BEBAN DAERAH	957.858.382.214,46
3	SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI	101.157.458.941,93
4	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(5.678.954.218,00)
5	JUMLAH POS LUAR BIASA	(1.878.670.650,00)
	SURPLUS/(DEFISIT-LO	**93.599.834.073,93**

SELISIH 0,00

5.7.5. Hubungan antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran

Perbedaan antara pendapatan pada laporan operasional dan pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 322. Penjelasan Perbedaan Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Aggaran

NO	URAIAN	JUMLAH				KETERANGAN
		LRA	LO	SELISIH		
				JUMLAH	RINCIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)	(7)
1.	PENDAPATAN					
2.	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3.	Pendapatan Pajak Daerah	15.820.932.765,00	15.812.918.531,00	8.014.234,00	(6.208.916,00) 13.273.150,00 950.000,00	1. Piutang PBBP2 Tahun 2024 yang hanya dicatat pada LO Senilai (Rp6.208.916,00) 2. Penyesuaian Piutang PBJT-Restoran yang hanya dicatat pada LO Senilai Rp13.273.150,00 3. Penyesuaian Piutang PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir yang hanya dicatat pada LO Senilai Rp950.000,00
4.	Pendapatan Retribusi Daerah	2.166.946.349,00	38.100.447.232,00	(35.933.500.883,00)	(14.660.000,00) 5.737.500,00 460.000,00 (21.431.664.888,00) (14.493.373.495,00)	1. Penyesuaian Piutang Retribusi Penyewaan Tanah yang hanya dicatat pada LO Senilai (Rp14.660.000,00) 2. Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Tahun 2024 yang hanya dicatat pada LO Senilai Rp5.737.500,00 3. Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Tahun 2024 yang hanya dicatat pada LRA Senilai Rp460.000,00 4. Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan RSUD bulan Maret-Desember sebesar (Rp21.431.664.888,00) LO disajikan pada Retribusi Jasa Umum, sedangkan LRA disajikan pada Lain-lain PAD yang Sah- Pendapatan Jasa Layanan 5. Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Puskesmas bulan Maret-Desember sebesar (Rp14.493.373.495,00) LO disajikan pada Retribusi Jasa Umum sedangkan LRA disajikana pada Lain-lain PAD yang Sah- Pendapatan Jasa Layanan
5.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.854.018.934,91	5.972.469.064,91	(118.450.130,00)	(118.450.130,00)	1. Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO yang masih menjadi piutang senilai (Rp118.450.130,00) – Perumda Limau Kunci
6.	Lain-lain PAD yang Sah	47.981.678.678,90	21.845.619.337,48	26.136.259.341,42	(5.000.000,00) (6.021.837.506,83)	1. Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar yang hanya dicatat pada LO Senilai (Rp5.000.000,00) 2. Pencatatan Piutang atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO yang hanya dicatat pada LO Senilai (Rp6.021.837.506,83)

NO	URAIAN	JUMLAH				KETERANGAN
		LRA	LO	SELISIH		
				JUMLAH	RINCIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)	(7)
					1.139.695,00	3. Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan yang dicatat sebagai Piutang pada LO Senilai Rp1.139.695,00
					(32.798.294,00)	4. Penyesuian Penyisihan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang hanya dicatat pada LO Senilai (Rp32.798.294,00).
					(944.749.678,00)	5. Penyesuisin Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan yang hanya dicatat pada LO Senilai (Rp944.749.678,00)
					(389.063.300,00)	6. Penyesuisin Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLJD (Pembayaran BPJS Tahun Lalu) yang hanya dicatat pada LO Senilai (Rp389.063.300,00)
					175.779.600,00	7. Surat tindak lanjut konfirmasi hasil Audit Administrasi Klaim (AAK) RSUD Alimuddin Umar atas Kelebihan bayar klaim dari tahun 2021 sd 2024 sebesar Rp. 1.560.656.000, yang akan dikembalikan secara bertahap sesuai dengan Berita Acara no 445/1407/III.02/2024 dan no 2306/BA/II.08/0924 yang hanya dicatat pada LO senilai Rp175.779.600,00
					1.689.189,25	8. Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum yang hanya dicatat pada LO Senilai Rp1.689.189,25
					2.450.000,00	9. Penyesuisin Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir yang hanya dicatat pada LRA Senilai Rp2.450.000,00
					(1.627.996.264,00)	10. piutang atas iuran jaminan kesehatan bagi non ASN tagihan iuran PBPU Pemda berdasarkan Berita Acara Kesepakatan nomor: 1582/BA/XII-06/0724 Tanggal 12 Desember 2024 tentang kompensasi atas potongan pajak Rokok tahun 2024 dan kompensasi atas temuan BPK RI dan PMK 51 Tahun 2024 Senilai (Rp1.627.996.264,00)
					(141.399.535,00)	11. Penyesuaian Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Puskesmas yang hanya dicatat pada LO Senilai (Rp141.399.535,00)
					(524.454.950,00)	12. Senilai (Rp524.454.950,00) merupakan Koreksi Audited KAP atas Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Per 31 Desember 2024 yang hanya dicatat pada LO
					(282.538.000,00)	13. Senilai Rp282.538.000,00 merupakan Koreksi Audited atas Rat. Pelayanan Kesehatan pasien BPJS klaim pending bulan September dan Oktober 2024 yang belum diterima hasil audit KAP yang hanya dicatat pada LO.
					21.431.664.888,00	14. Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan RSUD bulan Maret-Desember sebesar Rp21.431.664.888,00 LO disajikan pada Retribusi Jasa Umum, sedangkan LRA disajikan pada Lain-lain PAD yang Sah- Pendapatan Jasa Layanan
					14.493.373.495,00	15. Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Puskesmas bulan Maret-Desember sebesar

NO	URAIAN	JUMLAH				KETERANGAN
		LRA	LO	SELISIH		
				JUMLAH	RINCIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)	(7)
						Rp14.493.373.495,00 LO disajikan pada Retribusi Jasa Umum sedangkan LRA disajikana pada Lain-lain PAD yang Sah- Pendapatan Jasa Layanan
7.	Jumlah PAD (3 s.d. 6)	71.823.776.727,81	81.731.454.165,39	(9.907.677.437,58)	(9.907.677.437,58)	
8.	PENDAPATAN TRANSFER					
9.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	956.625.034.394,00	836.551.403.847,00	120.073.630.547,00	(10.550.026.000,00)	1. Pencatatan di LO atas Perpres 76/2023 senilai (Rp10.550.026.000,00) DBH SDA & Pajak Tahun 2024
					(2.607.186.363,00)	2. Pencatatan PMK 69/2024 LB/KB Dana Transfer Ke Daerah Tahun 2024 (Rp2.607.186.363,00) DBH SDA & Pajak Tahun 2024
					460.577.000,00	3. Pencatatan Potongan TDF 2024 SIKD-NG atas DBH SDA Rp460.577.000,00
					14.213.013.000,00	4. Penerimaan DHA SDA & Pajak Tahun 2024 senilai Rp14.213.013.000,00
					118.449.735.000,00	5. Penerimaan Dana Desa Rp118.449.735,00 dicatat hanya pada LRA
					(126.210.000,00)	6. Pencatatan PMK No 8 Tahun 2024 Senilai (Rp126.210.000,00) atas CHT Tahun 2024
					(7.089.000,00)	7. Pencatatan PMK 69/2024 LB / KB Tahun 2024 Senilai (Rp7.089.000,00) atas CHT Tahun 2024
					101.696.910,00	8. Pencatatan PMK 69/2024LK / KB Tahun 2024 Koreksi Piutang awal Senilai Rp101.696.910,00
					139.120.000,00	9. Pencatatan Penerimaan DBH CHT Tahun 2024 Senilai Rp139.120.000,00
10.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.743.146.312,00	88.559.251.212,00	(5.816.104.900,00)	(14.293.121.844,00)	1. Mencatat SK Gub No G/343/VI.03/HK/2024 DBH Pajak TW I 2024 (Rp14.293.121.844,00) hanya pada LO
					(14.895.146.928,00)	2. Mencatat SK Gub NoG/429/VI.03/HK/2024 DBH Pajak TW II 2024 (Rp14.895.146.928,00) hanya pada LO
					(16.937.620.359,00)	3. Mencatat SK Gub No G/715/VI.03/HK/2024 DBH Pajak TW III 2024 (Rp16.937.620.359,00) hanya pada LO
					(17.872.723.569,00)	4. Mencatat SK Gub No G/147/VI.03/HK/2025 DBH Pajak TW IV 2024 (Rp17.872.723.569,00) hanya pada LO
					(3.780.513.141,00)	5. Mencatat SK Gub No G/322/VI.03/HK/2024 DBH Pajak Rokok Desember 2023 (Rp3.780.513.141,00) hanya pada LO
					(5.866.849.613,00)	6. Mencatat SK Gub No G/323/VI.03/HK/2024 DBH Pajak Rokok TW I 2024 (Rp5.866.849.613,00) hanya pada LO
					(5.100.137.973,00)	7. Mencatat SK Gub G/430/VI.03/HK/2024 DBH Pajak Rokok TW II 2024 (Rp5.100.137.973) hanya pada LO
					(5.882.343.459,00)	8. Mencatat SK Gub G/714/VI.03/HK/2024 DBH Pajak Rokok TW III 2024 (Rp5.882.343.459) hanya pada LO

NO	URAIAN	JUMLAH				KETERANGAN
		LRA	LO	SELISIH		
				JUMLAH	RINCIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)	(7)
					(3.950.794.326,00)	9. Mencatat SK Gub Gt/670/VI.03/HK/2024 DBH Pajak Rokok TW IV 2024 (Rp3.950.794.326)hanya pada LO
					82.743.146.312,00	10. Mencatat Penerimaan DBH- Pajak selama tahun 2024 total sebesar Rp82.743.146.312 dicatat di LRA
11.	Jumlah Pendapatan Transfer (9 s.d. 10)	1.039.368.180.706,00	925.110.655.059,00	114.257.525.647,00	114.257.525.647,00	
12.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
13.	Pendapatan Hibah	0,00	52.173.731.932,00	(52.173.731.932,00)	(52.126.064.195,00)	1. Senilai (Rp52.126.064.195,00) Merupakan Pendapatan Hibah Berupa obat - obatan ke Dinas Kesehatan yang hanya dicatat pada LO.
					(64.350,00)	2. Mencatat Surat Keterangan Hibah Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja dan Masyarakat/Perorangan Ke Dinas Lingkungan Hidup (Rp64.350)
					(10.059.194,00)	3. Senilai (Rp10.059.194,00) merupakan koreksi audited atas alat ukur universal dari hibah Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ke Dinas Kesehatan Berdasarkan NPHD NO. KN.01.08/C.II/4861.235/2024 tanggal 07 juni 2024 Rp10.059.194,00 yang hanya dicatat pada lo
					(37.544.193,00)	4. Senilai (Rp37.544.193,00) merupakan Koreksi Audited atas Pendapatan Hibah Persediaan Obat-obatan lainya pada RSUD AU 2024 yang hanya dicatat pada LO
						5.
14.	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah (13)	0,00	52.173.731.932,00	(52.173.731.932,00)	(52.173.731.932,00)	
15.	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (7+11+14)	1.111.191.957.433,81	1.059.015.841.156,39	52.176.116.277,42	52.176.116.277,42	
16.	BELANJA					
17.	BELANJA OPERASI					
18.	Belanja/ Beban Pegawai	444.086.680.344,07	445.438.193.423,07	(1.351.513.079,00)	(65.129.400,00)	1. Senilai (Rp65.129.400,30) Merupakan Pembayaran Carry Over Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD- Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD yang menambah beban (LO) tetapi tidak menambah LRA
					(4.393.200,00)	2. Senilai (Rp4.393.200,00) merupakan Penyesuaian Utang Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD- Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD yang menambah beban (LO) tetapi tidak menambah LRA
					(1.317.520.000,00)	3. Senilai (Rp1.317.500.000,00) merupakan Penyesuaian Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-"ambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD yang menambah beban (LO) tetapi tidak menambah LRA
					(26.300.700,00)	4. Senilai (Rp26.300.700,30) merupakan Penyesuaian Pembayaran hutang kekurangan

NO	URAIAN	JUMLAH				KETERANGAN
		LRA	LO	SELISIH		
				JUMLAH	RINCIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)	(7)
						pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023 Dinas PU dan PR yang menambah beban (LO) tetapi tidak menambah LRA
					29.500.000,00	5. Senilai Rp29.500.000,00 merupakan Pengakuan Utang atas Kekurangan Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Kecamatan Balik Bukit yang menambah beban (LO) tetapi tidak menambah LRA
					12.470.000,00	6. Senilai Rp12.470.000,00 Merupakan Pembayaran utang Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Kecamatan Lumbok Seminung yang mengurangi Beban (LO) tetapi tidak mengurangi LRA.
					18.875.000,00	7. Senilai Rp18.875.000,00 merupakan pembayaran hutang Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023 Badan Kesatuan Bangsa Politik yang mengurangi beban (LO) tetapi tidak mengurangi LRA
					965.221,00	8. Senilai Rp965.221,00 merupakan koreksi audited atas pengurangan hutang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Dinas PU & PR Bulan Desember Tahun 2024, berdasarkan Nota Dinas Nomor 900/71/III.03/I/2025 yang mengurangi beban-LO
19.	Belanja/ Beban Barang dan Jasa	247.658.956.651,75	252.185.752.710,38	(4.526.796.058,63)	17.500.000,00	1. Senilai Rp17.500.000,00 Penyesuaian Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi yang mengurangi Beban (LO)
					(582.070.687,51)	2. Senilai (Rp582.070.687,51) merupakan Beban Pemakaian Persediaan Bahan-Bahan Kimia yang Menambah Beban (LO)
					10.379.250,00	3. Senilai Rp10.391.250,00 Penyesuaian Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas mengurangi Beban + Senilai (Rp12.000,00) Beban Pemakaian Persediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas yang Menambah Beban
					(390.000,00)	4. Senilai (Rp390.000,00) merupakan Beban Pemakaian Persediaan Bahan-bahan Kimia yang menambah beban (LO)
					172.204.349,00	5. Senilai Rp189.762.049,00 Penyesuaian Persediaan ATK mengurangi Beban + Senilai (Rp17.557.700,00) Beban Pemakaian Persediaan ATK yang Menambah Beban
					(5.392.000,00)	6. Senilai Rp5.695.000,00 Penyesuaian Persediaan Kertas dan Cover yang mengurangi Beban + Senilai (Rp12.287.000) Beban Pemakaian Persediaan Kertas dan Cover yang Menambah Beban (LO)
					1.396.000,00	7. Senilai Rp1.396.000,00 Penyesuaian Persediaan Bahan Cetak yang mengurangi Beban (LO)
					(422.000,00)	8. Senilai Rp10.000,00 Penyesuaian Persediaan Benda Pos yang mengurangi Beban (LO) + Senilai (Rp432.000,00) Beban Pemakaian Persediaan Benda Pos yang Menambah Beban (LO)
					(436.440.448,00)	9. Senilai (Rp436.440.448,00) merupakan Beban Pemakaian Persediaan Dokumen/Administrasi Tender yang Menambah Beban (LO)

NO	URAIAN	JUMLAH				KETERANGAN
		LRA	LO	SELISIH		
				JUMLAH	RINCIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)	(7)
					(299.465.932,00)	10. Senilai Rp1.250.000,00 Penyesuaian Persediaan Bahan Komputer yang mengurangi Beban + Senilai (Rp300.715.932,00) Beban Pemakaian Persediaan Bahan Komputer yang Menambah Beban (LO)
					2.541.000,00	11. Senilai Rp3.274.000,00 Penyesuaian Persediaan Perabot Kantor yang mengurangi Beban + Senilai (Rp733.000,00) Beban Pemakaian Persediaan Perabot Kantor yang Menambah Beban
					(3.423.000,00)	12. Senilai (Rp3.423.000,00) Beban Pemakaian Persediaan Alat Listrik yang Menambah Beban
					690.000,00	13. Senilai Rp690.000,00 Penyesuaian Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya yang mengurangi Beban (LO)
					(1.088.297.795,12)	14. Senilai (Rp1.088.297.795,12) Beban Pemakaian Persediaan Obat-Obatan yang Menambah Beban (LO)
					(81.371.178,00)	15. Senilai Rp80.000,00 Penyesuaian Persediaan Obat-Obatan Lainnya yang mengurangi Beban (LO) + Senilai (Rp81.451.178,00) Beban Pemakaian Persediaan Obat-Obatan Lainnya yang Menambah Beban (LO)
					85.785.862,00	16. Senilai Rp85.785.862, Penyesuaian Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat yang mengurangi Beban (LO)
					1.500.000,00	17. Senilai Rp1.500.000,00 merupakan Penyesuaian Persediaan Natura dan Pakan-Natura yang mengurangi Beban (LO)
					(256.413.116,00)	18. Senilai (Rp256.413.116,00) merupakan Beban Pemakaian Jasa Tenaga Kesehatan yang Menambah Beban (LO)
					2.028.802,00	19. Senilai Rp2.637.764,00 Pembayaran Utang Tagihan Telepon yang mengurangi beban + Senilai (Rp608.962,00) Beban Pemakaian Utang Tagihan Telepon yang menambah beban (LO)
					(2.058.299,00)	20. Senilai Rp714.903, Pembayaran Utang Tagihan Air yang mengurangi beban (LO) + Senilai (Rp2.773.202,00) Beban Pemakaian Utang Tagihan Air yang menambah beban (LO)
					(689.199,00)	21. Senilai Rp5.416.436,00 Pembayaran Utang Tagihan Listrik yang mengurangi beban (LO) + Senilai (Rp6.105.635,00) Beban Pemakaian Utang Tagihan Listrik yang menambah beban (LO)
					12.741.048,00	22. Senilai Rp18.033.791,00 Pembayaran Utang Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan yang mengurangi beban (LO) + Senilai (Rp5.292.743,00) Beban Pemakaian Utang Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan yang menambah beban (LO)
					(197.869.860,00)	23. Senilai (Rp197.869.860,00) belanja iuran jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa bulan Desember sub kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat yang belum terbayarkan yang hanya dicatat pada LO
					(1.627.996.264,00)	24. Senilai (Rp1.627.996.264,00) Pencatatan Piutang Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN bulan November-Desember 2024 (PBPU dan PB Pemda dan BBL) yang hanya dicatat pada LO

NO	URAIAN	JUMLAH				KETERANGAN
		LRA	LO	SELISIH		
				JUMLAH	RINCIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)	(7)
					(5.400.000,00)	25. Senilai (Rp.5.400.000,00) Penyesuaian Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir yang menambah beban (LO)
					(813.447.564,00)	26. Senilai Rp.346.498.740,00 penyesuaian utang barang dan jasa BLUD pada Dinas Kesehatan yang mengurangi beban + Senilai (Rp980.270.919,00) Beban Pemakaian Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada RSUD Alimuddin Umar yang menambah beban (LO) + Senilai (Rp428.967.133,00) koreksi Audit KAP atas Utang jasa Tenaga Kesehatan Puskesmas Tahun 2024 yang menambah beban (LO) + Senilai Rp249.291.748,00 Penyesuaian Persediaan dari Beban Barang dan Jasa BLUD pada RSUD Alimuddin Umar yang mengurang beban (LO)
					(1.346.941.000,00)	27. Senilai Rp16.000.000,00 Belanja Peralatan dan Mesin yang hanya dicatat pada LRA, sedangkan di LO dicatat sebagai Aset + Senilai (Rp1.193.700.780,00) Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak menjadi aset (Ekstracompatible dan Non Aset) yang hanya dicatat pada LO + Senilai (Rp166.594.220,00) Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak menjadi aset (Ekstracompatible dan Non Aset) yang hanya dicatat pada LO + Senilai (Rp2.646.000) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang tidak menjadi aset (Ekstracompatible dan Non Aset) yang hanya dicatat pada LO
					2.049.821.625,00	28. Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (kepada Polres Rp394.024.000,00)+ (kpd Koramil, Kodim Rp448.761.300,00) + (Kpd Pangadilan Negeri Rp138.297.200,00) + (Kpd Kejaksaan Rp1.068.739.125,00)
					4.962.222,00	29. Senilai Rp4.962.222,00 Koreksi Audited atas Utang Jasa Pelayanan Kesehatan Pasien Umum RSUD Alimuddin Umar 2024 hasil audit KAP yang hanya dicatat pada LO
					(1,00)	30. Senilai (Rp1) Koreksi Audited atas kekurangan Jasa Pelayanan Kesehatan Pasien BPJS RSUD Alimuddin Umar 2024 yang belum dibayar hasil audit KAP yang hanya dicatat pada LO
					(101.713.680,00)	31. Senilai (Rp101.713.680,00) Koreksi Audited atas Jasa Pelayanan Kesehatan Pasien BPJS pending bulan September dan Oktober 2024 RSUD Alimuddin Umar 2024 yang belum dibayar hasil audit KAP yang hanya dicatat pada LO
					(37.544.193,00)	32. Senilai Rp37.544.193 ,00 Koreksi Audited atas Persediaan Obat-obatan lainnya yang berasal dari hibah RSUD AU 2024 yang hanya dicatat pada LO
20.	Belanja/ Beban Bunga	2.534.971.060,00	2.518.033.554,00	16.937.506,00	16.937.506,00	1. Penyesuaian Utang Bunga atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah yang hanya dicatat pada LO Senilai Rp16.937.506,00
21.	Belanja/ Belanja Hibah	40.232.856.643,00	51.766.978.290,00	(11.534.321.647,00)	(10.959.907.832,00)	1. Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, hibah Jalan, Jaringan dan Irigasi kepada Kelompok Tani SK Penghapusan No. B/381/KPTS/IV.01/2024 Tanggal 31 Desember 2024 sebesar (Rp10.959.907.832,00)
					(567.063.815,00)	2. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat, Senilai (Rp567.063.815,00) merupakan

NO	URAIAN	JUMLAH				KETERANGAN
		LRA	LO	SELISIH		
				JUMLAH	RINCIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)	(7)
						Koreksi Audited atas Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
					(7.350.000,00)	3. Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Senilai (Rp7.350.000,00) Koreksi Audited atas Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang hanya dicatat pada LO
22.	Belanja/ Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Belanja/ Beban Penyisihan Piutang	0,00	342.946.375,66	(342.946.375,66)	(11.632.053,08)	1. Mencatat Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah yang hanya dicatat pada LO sebesar (Rp11.632.053,08).
					(54.114.916,55)	2. Mencatat Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah yang hanya dicatat pada LO sebesar (Rp54.114.916,55).
					(59.225.065,00)	3. Mencatat Beban Penyisihan Piutang HKPYD (Deviden) yang hanya dicatat pada LO sebesar (Rp59.225.065,00).
					(18.499.147,00)	4. Mencatat Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang hanya dicatat pada LO sebesar (Rp 18.499.147,00)
					(199.475.194,03)	5. Mencatat Beban Penyisihan Piutang DBH SDA DTU yang hanya dicatat pada LO sebesar (Rp199.475.194,03)
24.	Belanja/ Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	147.462.735.661,35	(147.462.735.661,35)	(147.462.735.661,35)	Beban Penyusutan dan Amortisasi yang hanya dicatat pada LO Senilai (Rp147.462.735.661,35)
25.	**Jumlah Belanja/ Beban Operasi (18 s.d. 24)**	**734.513.264.698,82**	**899.714.640.014,46**	**(165.201.375.315,64)**	**(165.201.375.315,64)**	
26.	**BELANJA MODAL**					
27.	Belanja Peralatan dan Mesin	20.116.516.662,00	0,00	20.116.516.662,00	20.116.516.662,00	1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang hanya dicatat pada LRA, sedangkan di LO dicatat sebagai Aset Senilai Rp20.116.516.662,00
28.	Belanja Gedung dan Bangunan	88.928.047.259,00	0,00	88.928.047.259,00	88.928.047.259,00	2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang hanya dicatat pada LRA, sedangkan di LO dicatat sebagai Aset Senilai Rp88.928.047.259,00
29.	Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	41.372.206.332,00	0,00	41.372.206.332,00	41.372.206.332,00	3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang hanya dicatat pada LRA, sedangkan di LO dicatat sebagai Aset Senilai Rp41.372.206.332,00
30.	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.734.413.410,00	0,00	4.734.413.410,00	4.734.413.410,00	4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang hanya dicatat pada LRA, sedangkan di LO dicatat sebagai Aset Senilai Rp4.734.413.410,00
31.	Belanja Aset Lainnya	197.480.000,00	0,00	197.480.000,00	197.480.000,00	5. Belanja Modal Aset Lainnya yang hanya dicatat pada LRA, sedangkan di LO dicatat sebagai Aset Senilai Rp197.480.000,00
32.	**Jumlah Belanja Modal (27 s/d 31)**	**155.348.663.663,00**	**0,00**	**155.348.663.663,00**	**155.348.663.663,00**	

NO	URAIAN	JUMLAH				KETERANGAN
		LRA	LO	SELISIH		
				JUMLAH	RINCIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)	(7)
33.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**					
34.	Belanja Tidak Terduga	1.961.201.439,00	0,00	1.961.201.439,00	1.878.601.050,00 82.600.389,00	1. BTT kepada masyarakat terkena musibah bencana alam/Bencana Sosial, perbaikan gorong-gorong, dll yang belum dianggarkan secara rutin Tahun 2024 total Rp1.878.601.050,00 2. Pengembalian Sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2022 ke Rekening Kas Umum Negara Rp82.600.389,00 yang sudah dicatat sebagai Utang pada Tahun sebelumnya
35.	**Jumlah Belanja Tidak Terduga (34)**	**1.961.201.439,00**	**0,00**	**1.961.201.439,00**	**1.961.201.439,00**	
36.	**BELANJA TRANSFER**					
37.	Belanja Bagi Hasil	1.662.863.600,00	1.759.762.200,00	(105.898.600,00)	(108.990.900,00) 3.092.300,00	1. Penyesuaian Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa yang hanya dicatat pada LO Senilai (Rp108.990.900,00) 2. Penyesuaian Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa yang hanya dicatat pada LO Rp3.092.300,00
38.	Belanja Bantuan Keuangan	174.716.036.000,00	56.344.980.000,00	118.371.056.000,00	118.449.735.000,00 421.321.000,00	1. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD Pusat) yang hanya dicatat pada LRA Senilai Rp118.449.735.000,00 2. Pembayaran Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang hanya dicatat pada LO Senilai Rp421.321.000,00, Tahun sebelumnya sudah dicatat sebagai Utang.
					(500.000.000,00)	3. Utang Bantuan Keuangan Pembangunan Bandara Gatsu Waykanan
39.	**Jumlah Belanja Transfer (37 s.d. 38)**	**176.408.899.600,00**	**58.143.742.200,00**	**118.265.157.400,00**	**118.265.157.400,00**	
40.	**JUMLAH BELANJA/ BEBAN**	**1.068.232.029.400,62**	**957.858.382.214,46**	**110.373.647.186,36**	**110.373.647.186,36**	
41.	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (15-40)**	**42.959.928.032,99**	**101.157.458.941,93**	**(58.197.530.908,94)**	**(58.197.530.908,94)**	
42.	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**					
43.	Surplus Penjualan/Pertukaran /Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.	**DEFISIT NON OPERASIONAL-LO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
45.	Defisit Penjualan/Pertukaran /Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	5.678.954.218,00	(5.678.954.218,00)	(5.686.304.218,00)	1. Senilai (Rp5.686.304.218,00) Merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain (Aset Rusak Berat/Usang) yang hanya dicatat pada LO

NO	URAIAN	JUMLAH				KETERANGAN
		LRA	LO	SELISIH		
				JUMLAH	RINCIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)	(7)
					7.350.000,00	2. Senilai Rp7.350.000,00 Koreksi Audited atas Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain (Sepeda Motor Honda/MCB Win/BE 5184 MZ sebanyak 1 Buah Tahun Perolehan 2002)
46.	**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEG. NON OPERASIONAL(43 - 45)**	**0,00**	**(5.678.954.218,00)**	**5.678.954.218,00**	**5.678.954.218,00**	
47.	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (41+46)**	**0,00**	**95.478.504.723,93**	**(52.518.576.890,94)**	**(15.431.855.867,53)**	
48.	**POS LUAR BIASA**					
49.	Pendapatan Luar Biasa-LO	0,00	0,00	0,00		
50.	Beban Luar Biasa	0,00	1.878.670.650,00	(1.878.670.650,00)	(1.878.601.050,00) (69.600,00)	1. BTT kepada masyarakat terkena musibah bencana alam/Bencana Sosial, perbaikan gorong-gorong, dll yang belum dianggarkan secara rutin Tahun 2024 total Rp1.878.601.050,00 dicatat di LRA sebagai Belanja Tidak Terduga 2. Biaya Administrasi Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah yang hanya dicatat pada LO Senilai (Rp69.600,00)
51.	**POS LUAR BIASA (49 - 50)**	**0,00**	**(1.878.670.650,00)**	**1.878.670.650,00**	**1.878.670.650,00**	
52.	**SURPLUS/DEFISIT LO (47 - 51)**	**0,00**	**93.599.834.073,93**	**(50.639.906.040,94)**	**(13.553.185.217,53)**	
53.	**PEMBIAYAAN**					
54.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**					
55.	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	30.683.213.321,08	0,00	30.683.213.321,08	30.683.213.321,08	Hanya dicatat di LRA, tidak dicatat di LO
56.	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan (55)**	**30.683.213.321,08**	**0,00**	**30.683.213.321,08**	**30.683.213.321,08**	
57.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**					
58.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	Dicatat di LRA & Neraca, tidak dicatat di LC
59.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	17.918.098.140,00	0,00	17.918.098.140,00	17.918.098.140,00	Dicatat di LRA & Neraca, tidak dicatat di LC
60.	**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (58 s.d. 59)**	**19.918.098.140,00**	**0,00**	**19.918.098.140,00**	**19.918.098.140,00**	
61.	**PEMBIAYAAN NETO (56 -60)**	**10.765.115.181,08**	**0,00**	**10.765.115.181,08**	**10.765.115.181,08**	
62.	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (41 - 61)**	**53.725.043.214,07**	**0,00**	**53.725.043.214,07**	**(21.880.016.551,45)**	

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

6.1. KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat, yaitu:

1. Dinas Kesehatan

1. Puskesmas Air Hitam :
   a. Realisasi Belanja Sub Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat TA 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp300.000,00. Hal tersebut disebabkan karena tidak ada orang dengan resiko terinfeksi HIV yang ditemukan pada Puskesmas Air Hitam;
   b. Realisasi Belanja Sub Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat TA 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00. Hal tersebut disebabkan Tidak Ditemukannya Pasien / Orang Dengan HIV.
2. Puskesmas Kebun Tebu:

   Realisasi Belanja Sub Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat TA 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp100.000,00. Hal tersebut disebabkan pasien dengan HIV tidak mau dikunjungi, mereka takut dengan opini masyarakat tentang mereka, khawatir keluarga mengetahui keadaan mereka, sejauh ini pasien masih terus minum obat, tetapi mereka yang datang mengambil obat nya sendiri, sehingga anggaran tidak bisa di serap.
3. Puskesmas Kenali:

   Realisasi Belanja Sub Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat TA 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp800.000,00. Hal tersebut disebabkan tidak ada kasus HIV (ODHV) di wilayah kerja puskesmas kenali.
4. Puskesmas Pagar Dewa:

   Realisasi Belanja Sub Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat TA 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp100.000,00. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya kasus HIV di wilayah kerja puskesmas pagar dewa.

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Realisasi Belanja Sub Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana pada Program Pengembangan Perumahan TA 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp82.502.246,00. Hal tersebut disebabkan karena :

a. Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SPM dapat dilaksanakan setelah terbit surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota dan bencana tersebut mengakibatkan kerusakan pada rumah;
b. Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat sejak Januari - Desember Tahun 2024 tidak ada yang mengakibatkan kerusakan berat pada rumah.

3. **Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**

Realisasi Belanja Sub Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00. Hal tersebut disebabkan tidak tersedianya undangan untuk mengikuti pelatihan bagi pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.

4. **Dinas Lingkungan Hidup**

Realisasi Belanja Sub Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00. Hal tersebut disebabkan tidak terdapat pelatihan di TA. 2024.

5. **Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**

Realisasi Belanja Sub Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00. Hal tersebut disebabkan belum adanya balasan surat permohonan pelatihan keuangan dari Universitas Lampung.

6. **Dinas Perikanan**

Realisasi Belanja Sub Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00. Hal tersebut disebabkan anggaran tersebut awalnya di rencanakan untuk pelaksanaan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa yang rutin diikuti untuk pengembangan kompetensi pegawai di Dinas Perikanan, Tahun 2024 tidak dapat dikeluarkan pengunaan dana tersebut karena pelatihan yang dimaksud dilaksanakan secara Daring (Online) dan tidak dikenakan biaya pelatihan serta akomodasinya seperti tahun-tahun sebelumnya.

7. **Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Realisasi Belanja Sub Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00. Hal tersebut disebabkan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang semula dianggarkan untuk 5 orang Penyuluh mengikuti Ujian Kompetensi (Ukom) tapi terkendala karena ada hambatan pada saat penyusunan PAK Integrasinya. Ketika PAK Integrasi selesai diproses Waktu Pendaftaran Gelombang Ukom telah ditutup. Rencananya 5 Penyuluh tersebut akan mengikuti Ukom di Tahun Anggaran 2025.

8. **Sekretariat Daerah**

Realisasi Belanja Sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp81.627.300,00. Hal tersebut disebabkan gaji dan tunjangan yang diambil oleh Pj. Bupati adalah gaji dan tunjangan PNS.

9. **Badan Pendapatan Daerah**

Realisasi Belanja Sub Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp7.860.000,00. untuk Tahun Anggaran 2024 di Sub Kegiatan ini belum ada kerjasama pada Media Massa.

10. **Kecamatan Way Tenong**

Realisasi Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00. Hal tersebut disebabkan karena tidak ada realisasi pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang dilakukan oleh Kecamatan Way Tenong pada anggaran tahun 2024.

11. Kecamatan Sukau

Realisasi Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00. Hal tersebut disebabkan karena pihak penyelenggara tidak melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 , sehingga Kecamatan Sukau tidak bisa merealisasikan kegiatan tersebut.

12. Kecamatan Suoh

Realisasi Belanja Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp900.000,00. Hal tersebut disebabkan Karena STNK tidak ditemukan.

13. Kecamatan Batu Ketulis

Realisasi Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp0,00 atau (0.00%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00. Hal tersebut disebabkan karena pihak penyelenggara tidak melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024.

14. Kecamatan Bandar Negeri Suoh

1. Realisasi Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp0,00 atau (0.00%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00. Hal tersebut disebabkan karena pihak penyelenggara tidak melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024;
2. Realisasi Belanja Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp0,00 atau (0.00%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp3.000.000,00. Hal tersebut disebabkan di DPA Rincian Belanja Tagihan Telepon Sedangkan di Kecamatan Bandar Negeri Suoh Tidak Menggunakan Telepon/tidak adanya tagihan telepon dan tidak diajukan pada perubahan APBD.

6.2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN REALISASI DIBAWAH TARGET PADA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat, yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1) Realisasi Belanja Sub Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp69.001.232,00 atau 72,02% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp95.813.000,00. Hal tersebut karena disesuaikan dengan undangan perjalanan dinas yg tidak dibiayai oleh pelaksana kegiatan;
2) Realisasi Belanja Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp47.698.595,00 atau 65,92% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp72.360.000,00. Hal tersebut disebabkan karena pembayaran Listrik, Air dan Layanan Internet sesuai dengan jumlah tagihan;

3) Realisasi Belanja sub Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Program Pengelolaan Pendidikan TA 2024 sebesar Rp1.536.750.000,00 atau 69,22% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp2.220.000.000,00. Hal tersebut disebabkan karena tidak dibayarkannya honor tenaga pendidik yang kualifikasi pendidikan belum Strata 1 sebanyak 99 orang , 22 orang tenaga pendidik yang sudah terbit NUPTK, 55 orang tenaga pendidik yang sudah diterima sebagai PPPK dan 6 orang yang sudah tidak aktif bertugas;

4) Realisasi Belanja Sub Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah pada Program Pengelolaan Pendidikan TA 2024 sebesar Rp1.086.584.477,00 atau 71,40% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp1.512.739.000,00. Hal tersebut disebabkan karena tidak dibayarkannya 76 orang tenaga pendidik yang sudah diterima sebagai PPPK dan 3 orang yang sudah tidak aktif bertugas;

5) Realisasi Belanja Sub Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik pada Program Pengelolaan Pendidikan TA 2024 sebesar Rp53.299.000,00 atau 44,48% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp119.824.000,00. Hal tersebut disebabkan karena kegiatan yang semula akan dilaksanakan per kecamatan, tetapi pada pelaksanaannya ada beberapa kecamatan yg digabung, sehingga ada beberapa belanja yang tidak dapat terserap;

6) Realisasi Belanja Sub Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik pada Program Pengelolaan Pendidikan TA 2024 sebesar Rp926.550.000,00 atau 75.91% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp1.220.573.800,00. Hal tersebut disebabkan karena berubahnya proses pengadaan barang dan jasa yang semula Lelang Umum menjadi E-Purchasing, sehingga ada tahapan dalam perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan;

7) Realisasi Belanja Sub Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD pada Program Pengelolaan Pendidikan TA 2024 sebesar Rp497.700.000,00 atau 62.84% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp792.000.000,00. Hal tersebut disebabkan karena yang dianggarkan adalah tenaga pendidik PAUD dan TK, sedangkan yang dibayarkan hanya tenaga pendidik TK saja sehingga terdapat 128 tenaga pendidik tidak bisa dibayarkan dan 8 orang tenaga pendidik sudah diterima sebagai PPPK;

8) Realisasi Belanja Sub Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional pada Program Pengembangan Kesenian Tradisional TA 2024 sebesar Rp106.749.350,00 atau 66,16% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp161.350.000,00. Hal tersebut disebabkan karena Nilai UKT Beasiswa Pendidikan Seni yang dianggarkan setiap mahasiswa di SSH senilai Rp 5.000.000,-/semester. Dalam pelaksanaan pembayaran UKT, nilai UKT mahasiswa penerima beasiswa Pendidikan Seni berdasarkan penilaian dari pihak UNILA bervariasi antara Rp1.000.000,- sd Rp5.000.000,- / semester. Hal ini menyebabkan penyerapan dana UKT Beasiswa Pendidikan Seni tidak bisa terserap 100 persen;

9) Realisasi Belanja Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp24.712.871,00 atau 32,95% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp75.000.000,00. Hal tersebut disebabkan karena pembayaran Listrik sesuai dengan jumlah tagihan.

2. Dinas Kesehatan

1) Realisasi Belanja Sub Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp1.500.000,00 atau 15.00% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00. Hal tersebut disebabkan pelatihan perencanaan seharusnya diikuti sebanyak 2 kali tetapi hanya diikuti sebanyak 1 kali dikarenakan jadwal pelatihan yang ke-2 berbarengan dengan adanya kegiatan di kabupaten. selain itu pagu pelatihan 5.000.000, akan tetapi biaya pelatihan yang dibayarkan sebesar 1.500.000;

2) Realisasi Belanja Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp5.860.000,00 atau 59,43% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp9.860.000,00. Hal tersebut disebabkan perbaikan genset tidak dilaksanakan dikarenakan biaya perbaikan melebihi pagu, sehingga tidak dapat dilaksanakan;

3) Realisasi Belanja Sub Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat TA 2024 sebesar Rp66.165.150,00 atau 64,29% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp102.924.000,00. Hal tersebut disebabkan penyerapan dana pada Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota hanya terealisasi sebesar Rp44.241.250,00 dari pagu dana sebesar Rp81.000.000,00, karena menyesuaikan dengan jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas yang terdapat di Instalasi Farmasi dan menyesuaikan dengan perubahan harga BBM setiap bulannya di tahun 2024. Dana Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, sebesar Rp44.241.250,00 sudah mencukupi biaya distribusi ke seluruh puskesmas (15 puskesmas) yang ada di Kabupaten Lampung Barat selama tahun 2024;

4) Realisasi Belanja Sub Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat TA 2024 sebesar Rp27.053.600,00 atau 54,65% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp49.500.000,00. Hal tersebut disebabkan Biaya pengiriman sampel SHK dari DAK tidak terealisasi semua dikarenakan puskesmas yang mengirimkan sampel SHK belum mengajukan klaim biaya pengiriman sampel hingga akhir tahun;

5) Realisasi Belanja Sub Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat TA 2024 sebesar Rp11.312.500,00 atau 36,33% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp31.140.000,00. Hal tersebut disebabkan Kegiatan ini bersumber dana DAK Non Fisik namun pelaksanaan pemantauan KIPI dilaksanakan berbarengan dengan monev imunisasi rutin dari kegiatan lain, hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah tenaga pengelola kabupaten sehingga perjalanan untuk pemantauan KIPI digabung;

3. RSUD Alimuddin Umar

1. Realisasi Belanja Sub Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat TA 2024 sebesar Rp17.853.000,00 atau 39,03% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp45.743.000,00. Hal tersebut disebabkan. karena tidak ada pasien yang berobat dan konsultasi;

2. Realisasi Belanja Sub Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan TA 2024 sebesar Rp2.251.375.000,00 atau 74,89% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp3.006.375.000,00. Hal tersebut disebabkan Anggaran yg tidak terserap itu untuk persiapan 3 (tiga) dr Spesialis ,yg baru terserap dari bln nopember 2024 yaitu dr Saraf jadi sisa anggaran yg ada tidak terserap karna adanya 2 (dua) dr Spesialis yg tidak terpenuhi.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. Realisasi Belanja Sub Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota pada Program Pengembangan Jasa Konstruksi TA 2024 sebesar Rp56.083.100,00 atau 68,60% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp81.748.200,00. Hal tersebut disebabkan karena untuk belanja perjalanan dinas ke luar provinsi dan perjalanan dinas ke luar daerah (Bandar Lampung) tidak ada kegiatan terkait koordinasi ataupun rapat kerja jasa konstruksi;

2. Realisasi Belanja Sub Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang TA 2024 sebesar Rp80.890.400,00 atau 72,34% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp111.820.000,00. Hal tersebut disebabkan karena dalam makan minum serta lainnya menyesuaikan dengan peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Selain itu tidak terserapnya belanja perjalanan dinas dalam daerah karena kegiatan ini dilaksanakan dalam satu tempat yaitu di Ruang Rapat Setdakab, tidak seperti sebelumnya yang dilakukan pada setiap kecamatan.

5. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

1. Realisasi Belanja Sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp1.356.456.187,00 atau 55,54% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp2.442.372.235,00. Hal tersebut disebabkan sesuai kebutuhan jumlah pegawai ASN 17 Orang;
2. Realisasi Belanja Sub Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp5.000.000,00 atau 63,21% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp7.910.000,00. Hal tersebut disebabkan di ambil sesuai kebutuhan dikarenakan pada tahun 2024 belum ada kerja sama langganan koran dan majalah.

6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Realisasi Belanja Sub Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp1.500.000,00 atau 15,00% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00. Hal tersebut disebabkan Tidak ada jadwal kegiatan pelatihan yang di laksanakan di tahun 2024;
2. Realisasi Belanja Sub Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA pada Program Perlindungan Khusus Anak TA 2024 sebesar Rp24.992.501,00 atau 71,41% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp34.999.800,00. Hal tersebut disebabkan karena minimnya kasus tindak kekerasan terhadap Anak di tahun 2024 sehingga layanan rujukan yang diberikan kepada korban mencapai target;
3. Realisasi Belanja Sub Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota pada Program Perlindungan Perempuan TA 2024 sebesar Rp19.504.000,00 atau 25,54% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp76.359.000,00. Hal tersebut disebabkan karena minimnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan di tahun 2024 sehingga layanan rujukan yang diberikan kepada korban mencapai target;
4. Realisasi Belanja Sub Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK pada Program Perlindungan Khusus Anak TA 2024 sebesar Rp149.752.537,00 atau 70,64% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp211.998.100,00. Hal tersebut disebabkan Karena Penjangkauan ditahun 2024 tidak bisa dilakukan secara maximal dikarenakan keluarga korban tidak mau dilakukan penjangkauan ke kediaman korban hanya ingin didampingi pada saat berhadapan ke pihak Kepolisian dan persidangan;
5. Realisasi Belanja Sub Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga pada Program Pengendalian Penduduk TA 2024 sebesar Rp49.900.000,00 atau 47,80% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp104.400.000,00. Hal tersebut disebabkan karna SPJ yang masuk di sesuaikan yg ada;
6. Realisasi Belanja Sub Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB pada Program Pengendalian Penduduk TA 2024 sebesar Rp73.806.999,00 atau 66,14% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp111.600.000,00. Hal tersebut disebabkan tidak ada yang mengajukan untuk melakukan Klaim untuk Pengolahan data karena laporan di entry melalui aplikasi, dan di Balai sudah ada Wifi dan Orbit;

7. Realisasi Belanja Sub Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) TA 2024 sebesar Rp290.007.420,00 atau 57,50% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp504.400.000,00. Hal tersebut disebabkan Jadwal Kegiatan selalu bersamaan dengan jadwal kegiatan yang ada di Pekon, dan adanya penggantian kader dan peserta kegiatan yang diundang dengan yang ada di SK beda orangnya. Sehingga tidak ada kader yang melakukan klaim untuk tagihan Air dan Listrik;

8. Realisasi Belanja Sub Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) TA 2024 sebesar Rp6.671.000,00 atau 2,96% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp225.000.000,00. Hal tersebut disebabkan Jadwal Kegiatan selalu berbenturan dengan jadwal kegiatan yang ada di pekon sehingga tidak terlaksana;

9. Realisasi Belanja Sub Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) TA 2024 sebesar Rp204.000.000,00 atau 50,00% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp408.000.000,00. Hal tersebut disebabkan karna SPJ yang masuk disesuaikan dengan yang ada;

10. Realisasi Belanja Sub Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) TA 2024 sebesar Rp418.338.800,00 atau 70,52% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp593.214.000,00. Hal tersebut disebabkan pada saat pelaksanaan pelayanan KB, sudah sesuai dengan kondisi dan jumlah akseptor IUD;

11. Realisasi Belanja Sub Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) TA 2024 sebesar Rp11.859.000,00 atau 69,57% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp17.550.000,00. Hal tersebut disebabkan kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan target tetapi secara anggaran tidak terealisasi 100% karena memang ada yang tidak di klaim;

12. Realisasi Belanja Sub Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) TA 2024 sebesar Rp41.138.500,00 atau 26,93% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp152.750.000,00. Hal tersebut disebabkan Adanya pergantian kader dan aparat pekon sehingga yang diundang dengan yang ada di SK beda orang;

13. Realisasi Belanja Sub Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) TA 2024 sebesar Rp22.724.000,00 atau 3,95% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp575.000.000,00. Hal tersebut disebabkan jadwal kegiatan selalu berebnturan dengan jadwal kegiatan yang ada di pekon , adanya penggantian kader dan aparat pekon, yang diundang dengan yang ada di SK beda orangnya;

14. Realisasi Belanja Sub Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) pada Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) TA 2024 sebesar Rp387.000.000,00 atau 54,55% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp709.500.000,00. Hal tersebut disebabkan Jadwal kegiatan selalu berbenturan dengan dengan jadwal kegiatan yang ada di Pekon sehingga kegiatan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko stunting tidak terlaksana . Kegiatan pendampingan terhadap KRD dilakukan 12 kali dalam setahun, hanya saja untuk biaya transport TPK nya tidak diganti seluruhnya karena laporan hasil pendampingan belum selesai diinput di new siga, selain itu juga adanya penggantian kader.

7. **Dinas Ketahanan Pangan**

1. Realisasi Belanja Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp12.954.458,00 atau 71,97% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp18.000.000,00. Hal tersebut disebabkan Pembayaran Biaya Listrik, Telepon dan Internet sesuai dengan nota pemakaian resmi yang dikeluarkan oleh PLN dan Telkom, dan pagu anggaran melebihi dari biaya resmi yang dilkeluarkan oleh PLN dan Telkom;

2. Realisasi Belanja Sub Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp3.835.000,00 atau 59,33% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp6.464.000,00. Hal tersebut disebabkan karena sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 (bulan Desember) kondisi listrik dan penerangan kantor di DKP semua masih dalam keadaan utuh dan baik sehingga belum diperlukan untuk penggantian peralatan penerangan di kantor.

8. Dinas Lingkungan Hidup

1. Realisasi Belanja Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp25.288.013,00 atau 41,25% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp61.300.000,00. Hal tersebut disebabkan : karena Pagu melebihi Kebutuhan (realisasi sesuai dengan tagihan air dan listrik);
2. Realisasi Belanja Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp99.724.301,00 atau 73,92% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp134.900.000,00. Hal tersebut disebabkan terdapat keterlambatan dalam proses, sehingga lewat Tahun Anggaran.

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Realisasi Belanja Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp30.806.221,00 atau 75,18% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp40.975.000,00. Hal tersebut disebabkan Realisasi sesuai dengan real cost bukti pembayaran;
2. Realisasi Belanja Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp9.296.725,00 atau 56,21% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp16.540.000,00. Hal tersebut disebabkan Realisasi sesuai dengan real cost bukti pembayaran.

10. Dinas Perhubungan

1. Realisasi Belanja Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp46.363.728,00 atau 73,53% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp63.055.000,00. Hal tersebut disebabkan oleh jumlah nilai yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah tagihan yang dibayarkan;
2. Realisasi Belanja Sub Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) TA 2024 sebesar Rp927.200,00 atau 3,57% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp25.991.200,00. Hal tersebut disebabkan oleh terjadi perubahan nilai jumlah setor yang lebih besar dari pagu yang di anggarkan.

11. Dinas Komunikasi dan Informatika

1) Realisasi Belanja Sub Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp1.000.000,00 atau 62,50% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp1.600.000,00. Hal tersebut disebabkan karena anggaran untuk belanja paket/pengiriman yang tersedia sebesar Rp.600.000,00 tidak terealisasi karena Dinas Kominfo sudah tidak menerbitkan SKRD untuk Retribusi Menara Tower;
2) Realisasi Belanja Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp18.595.184,00 atau 63,68% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp9.200.000,00. Hal tersebut disebabkan karena adanya efisiensi pengeluaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik.

12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

1. Realisasi Belanja Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp40.537.161,00 atau 34,51% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp117.470.000,00. Hal tersebut disebabkan dikarenakan untuk pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di bayarkan sesuai dengan tagihan atau kebutuhan;
2. Realisasi Belanja Sub Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp14.219.000,00 atau 30,30% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp46.929.615,00. Hal tersebut disebabkan Anggaran di BLUD dari pendapatan jasa dan lain-lain untuk tahun 2024 dana yang tersedia 21.673.000 dan realisasi 14.219.000.

13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Realisasi Belanja Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp17.415.264,00 atau 47,41% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp36.734.800,00. Hal tersebut disebabkan realisasi dibayarkan sesuai bukti tagihan setiap bulan.

14. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Realisasi Belanja Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp18.445.146,00 atau 54,25% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp34.000.000,00. Hal tersebut disebabkan realisasi belanja tersebut sesuai dengan rekening tagihan yang ada.

15. Dinas Perikanan

Realisasi Belanja Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp23.207.884,00 atau 66,31% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp35.000.000,00. Hal tersebut disebabkan pembayaran Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dibayarkan sesuai tagihan pembayaran rutin tiap bulannya, hanya saja terjadi selisih salah satunya karena pada Tahun 2024 setelah dilakukan perbaikan jaringan Internet oleh PT Telkom (untuk kelancaran jaringan internet di Dinas Perikanan karena sebelumnya terjadi gangguan jaringan) terjadi penurunan pembayaran tarif tagihan Internet dari tarif sebelumnya yang menyebabkan selisih tagihan lebih murah dari tagihan internet awal saat perencanaan anggaran.

16. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Realisasi Belanja Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp38.930.367,00 atau 65,14% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp59.760.000,00. Hal tersebut disebabkan karena realisasi sesuai dengan jumlah tagihan telepon, pdam, listrik dan wifi yang tercantum di lembar bukti bayar per bulan.

17. Dinas Perkebunan dan Peternakan

Realisasi Belanja Sub Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian pada Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian TA 2024 sebesar Rp357.457.000,00 atau 73,13% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp488.816.850,00. Hal tersebut disebabkan :

1. Adanya penyesuaian harga Bibit Kopi Siap Salur karena mengacu pada jenis dan harga bibit yang disediakan oleh penyedia bibit yang bersertifikat dari Kementerian Pertanian;
2. Adanya belanja yang menurut Pedoman Penggunaan Dana DBH Kelapa Sawit tidak dapat direalisasikan, antara lain Honorarium Petugas Pendataan Pekebun;

3. Pengurangan (rasionalisasi) jumlah peserta Sosialisasi Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat karena secara riil di lapangan jumlah pekebun kelapa sawit di Lampung Barat tidak terlalu banyak sehingga berdampak pada penyerapan anggangan ATK peserta, Makan Minum Rapat, Narasumber dll.

18. Sekretariat Daerah

1. Realisasi Belanja Sub Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp9.464.450,00 atau 43,77% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp21.624.000,00. Hal tersebut disebabkan pos anggaran belanja makan minum rapat evaluasi kinerja setdakab tidak dilaksanakan karena ada beberapa kendala teknis seperti manajemen SDM Bagian Umum yang masih harus upgrade;
2. Realisasi Belanja Sub Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp136.066.800,00 atau 66,25% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp205.371.800,00. Hal tersebut disebabkan ada selisih harga penawaran pada pos belanja modal tempat tidur dan honorarium tenaga kebersihan rumah dinas Wakil Bupati yang tidak bisa terealisasi tapi masih di anggarkan;
3. Realisasi Belanja Sub Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp283.100.000,00 atau 70,95% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp399.000.000,00. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pada saat acara fasilitasi tamu atas tenda, sound system, dan kursi yang disewa;
4. Realisasi Belanja Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp824.170.767,00 atau 67,95% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp1.212.950.000,00. Hal tersebut disebabkan banyak selisih pada pos pajak kendaraan roda empat antara anggaran dan realisasi, serta ada beberapa kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang belum terbayarkan pajaknya;
5. Realisasi Belanja Sub Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp136.918.000,00 atau 74,25% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp184.390.000,00. Hal tersebut disebabkan pada pos belanja servis genset dan bahan bakar disesuaikan dengan kebutuhan kantor dan rumah dinas.

19. Sekretariat DPRD

1. Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp102.828.250,00 atau 74,84% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp137.400.000,00. Hal tersebut karena telah berakhir Masa Jabatan Pimpinan DPRD. Maka untuk pembayaran serta Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan tidak diambil, disesuaikan dengan kebutuhan;
2. Realisasi Belanja Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp563.383.000,00 atau 52,95% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp1.064.063.000,00. Hal tersebut disebabkan terdapat pengadaan belanja PIN Atribut Anggota DPRD yg tidak boleh menggunakan bahan dari (emas), maka pengadaan PIN DPRD disesuaikan dengan bahan yg telah ditetapkan;
3. Realisasi Belanja Fasilitasi Fraksi DPRD pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp90.353.500,00 atau 63,04% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp143.335.000,00. Hal tersebut disesuaikan dengan pelaksanaan rapat-rapat fraksi;

4. Realisasi Belanja Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah pada Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd TA 2024 sebesar Rp6.523.000,00 atau 46,52% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp14.023.000,00. Hal tersebut disesuaikan dengan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

5. Realisasi Belanja Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat pada Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd TA 2024 sebesar Rp21.000.000,00 atau 45,51% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp46.139.800,00. Hal tersebut disesuaikan dengan penyelenggaraan kegiatan yg dilaksanakan;

6. Realisasi Belanja Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd TA 2024 sebesar Rp5.305.500,00 atau 63,59% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp8.343.000,00. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.

20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp13.013.193,00 atau 55,14% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp27.952.597,00. Hal tersebut disebabkan karena pembayaran sesuai dengan kebutuhan operasional kantor.

21. Badan Pendapatan Daerah

1. Realisasi Belanja Sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp1.680.939.953,00 atau 48,34% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp3.477.008.682,00. Hal tersebut disebabkan oleh kelebihan Pengganggaran pada Pagu Gaji dan Tunjangan ASN;

2. Realisasi Belanja Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp15.739.535,00 atau 44,12% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp35.675.000,00. Hal tersebut disebabkan karna kelebihan anggaran;

3. Realisasi Belanja Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp64.739.745,00 atau 65,03% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp99.550.000,00. Hal tersebut di disebabkan karna sisa anggaran yang tidak bisa terealisasi adalah operasional, Pemeliharaan dan BBM untuk kendaraan dinas Esselon II;

4. Realisasi Belanja Sub Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp160.942.500,00 atau 70,12% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp229.509.000,00., di Sub Kegiatan Pendataan nya dilaksanakan di Kecamatan Batu Ketulis dan tidak tercapai 100% Hal tersebut disebabkan di perubahan data wilayah di Kecamatan Batu Ketulis tidak sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan.

22. Badan Keuangan dan Aset Daerah

1. Realisasi Belanja Sub Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp7.242.450,00 atau 69,61% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp10.405.000,00. Hal tersebut disebabkan karena ada anggaran perjalanan dinas yang tidak bisa di realisasikan;
2. Realisasi Belanja Sub Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2024 sebesar Rp83.637.500,00 atau 67,54% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp123.838.000,00. Hal tersebut disebabkan karena kegiatan Perjalanan Dinas untuk Kegiatan Rekonsiliasi Data tidak dilaksanakan secara tatap muka langsung, tetapi dilaksanakan secara Daring (Online);

3. Realisasi Belanja Sub Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2024 sebesar Rp74.272.700,00 atau 68,31% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp108.736.000,00. Hal tersebut disebabkan karena kegiatan Perjalanan Dinas untuk penyerahan laporan/data ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat hanya dikirim secara Online dan melalui pengiriman Via Ekspedisi;

4. Realisasi Belanja Sub Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2024 sebesar Rp289.343.856,00 atau 74,95% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp386.029.000,00. Hal tersebut disebabkan karena kegiatan Perjalanan Dinas untuk Kegiatan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Akuntansi dan Pelaporan tidak dilaksanakan pada Tahun 2024;

5. Realisasi Belanja Sub Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2024 sebesar Rp68.014.095,00 atau 69,03% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp98.525.000,00. Hal tersebut disebabkan karena belanja Honorarium narasumber tidak dapat direalisasikan sebesar Rp17.000.000,- Dikarenakan Tim Pusdatin SIPD RI tidak bisa menjadi narasumber bimtek untuk kabupaten/kota, dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Lampung Senilai Rp8.000.000,- Tidak bisa direalisasikan dikarenakan Koordinasi SIPD RI tidak melalui Provinsi tetapi langsung Kementerian Dalam Negeri;

6. Realisasi Belanja Sub Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2024 sebesar Rp43.911.500,00 atau 66,53% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp66.000.000,00. Hal tersebut disebabkan Karena isi nya Sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tidak perlu ditindaklanjuti Peraturan Bupati.

23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

1. Realisasi Belanja Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur pada Program kepegawaian daerah TA 2024 sebesar Rp221.597.050,00 atau 41,49% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp528.775.000,00. Hal tersebut disebabkan karena belum terbitnya izin pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Tahun 2024 dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

2. Realisasi Belanja Pembinaan Disiplin ASN pada Program kepegawaian daerah TA 2024 sebesar Rp40.400.850,00 atau 59,62% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp67.762.000,00. Hal tersebut disebabkan karena :

   a. tidak ada penyelenggaraan Kegiatan Duta Kopri dari Korpri Provinsi Lampung pada tahun 2024 sehingga anggaran untuk kegiatan terebut tidak bisa direalisasikan;

   b. Kegitan Workshop untuk PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) tidak dapat terlaksana karena target jumlah peserta sosialisasi tidak terpenuhi dan Narasumber pengisi materi untuk kegiatan tersebut tidak tersedia, sehingga anggaran untuk kegiatan tersebut tidak bisa direalisasikan.

24. Badan Riset dan Inovasi Daerah

Realisasi Belanja Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp12.347.405,00 atau 64,97% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp19.005.000,00. Hal tersebut disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan dan pemakaian, sehinga realisasinya hanya Rp12.347.405,00 atau (64,97 %).

25. Inspektorat Daerah

Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp23.539.306,00 atau 53,52% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp43.985.000,00. Hal tersebut disebabkan karena adanya kesalahan kode rekening (seharusnya Instalasi Listrik) sehingga tidak dapat dilaksanakan/direalisasikan.

26. Kecamatan Sumber Jaya

Realisasi Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp2.000.000,00 atau 40.00% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00. Hal tersebut disebabkan Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 untuk biaya pendaftaran 1 orang peserta sebesar Rp2.000.000.

27. Kecamatan Sekincau

Realisasi Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp2.485.000,00 atau 49,70% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00. Hal tersebut disebabkan biaya yg dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan.

28. Kecamatan Belalau

Realisasi Belanja Sub Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif pada Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa TA 2024 sebesar Rp8.137.400 atau 68,36% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp11.904.400,00. Hal tersebut disebabkan kesulitan dalam berkoordinasi dengan Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) dan Komandan rayon militer (danramil).

29. Kecamatan Sukau

Realisasi Belanja Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp8.222.133,00 atau 69,09% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp11.900.000,00. Hal tersebut disebabkan realisasi dibayarkan sesuai bukti tagihan setiap bulan.

30. Kecamatan Bandar Negeri Suoh

Realisasi Belanja Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp6.840.000,00 atau 27,91% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp24.510.000,00. Hal tersebut disebabkan sesuai peraturan honor bendahara pengeluaran hanya Rp570.000,00 per bulan dan Rp570.000.,00 dikali 12 bulan jadi yang bisa direalisasikan hanya Rp6.840.000,00.

31. Kecamatan Lumbok Seminung

Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 Sebesar Rp1.113.800,00 atau 48,43% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp2.300.000,00. Hal tersebut disebabkan realisasi sesuai dengan bukti pembayaran pajak yang ada.

32. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Realisasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp2.455.000,00 atau 69,61% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp3.527.000,00. Hal tersebut disebabkan terdapat anggaran Makan Minum Rapat yang tidak terserap sesuai rencana.

PENUTUP

BAB 7 PENUTUP

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Laporan Keuangan Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan keterbatasan sumber daya yang ada kami berupaya untuk menjaga keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan tanggapan, saran dan masukan dari berbagai pihak guna perbaikan di masa mendatang.

Dan para pemangku kepentingan kiranya berkenan untuk memberikan umpan balik atas informasi yang disajikan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

A KABUPATEN LAMPUNG BA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampung Barat

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
REKAP REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	
				RUPIAH	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6 = 4/3
4	PENDAPATAN DAERAH	1.119.418.377.234,82	1.111.191.957.433,81	(8.226.419.801,11)	99,27
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	69.280.940.857,32	71.823.776.727,81	2.562.830.070,49	103,70
4.1.01	Pajak Daerah	15.567.332.172,00	15.820.932.765,00	253.600.593,00	101,63
4.1.01.09	Pajak Reklame	120.929.700,00	247.192.326,00	126.262.626,00	204,41
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	115.079.700,00	230.774.001,00	115.694.301,00	200,53
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	115.079.700,00	230.774.001,00	115.694.301,00	200,53
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	5.850.000,00	16.418.325,00	10.568.325,00	280,66
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	5.850.000,00	16.418.325,00	10.568.325,00	280,66
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	0,00	608.472,00	608.472,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	0,00	608.472,00	608.472,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	PLTA Way Besai	0,00	608.472,00	608.472,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00	462.039.288,00	162.039.288,00	154,01
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	300.000.000,00	462.039.288,00	162.039.288,00	154,01
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	300.000.000,00	462.039.288,00	162.039.288,00	154,01
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.232.505.380,00	5.273.166.288,00	40.660.908,00	100,78
4.1.01.15.01	PBBP2	5.232.505.380,00	5.273.166.288,00	40.660.908,00	100,78
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	5.232.505.380,00	5.273.166.288,00	40.660.908,00	100,78
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	300.000.000,00	328.368.600,00	28.368.600,00	109,46
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	300.000.000,00	328.368.600,00	28.368.600,00	109,46
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	300.000.000,00	328.368.600,00	28.368.600,00	109,46
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	9.613.887.092,00	9.509.557.791,00	(104.330.301,00)	98,91
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	2.019.067.241,00	1.785.079.227,00	(233.988.014,00)	88,41
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	2.019.067.241,00	1.785.079.227,00	(233.988.014,00)	88,41
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	7.383.856.751,00	7.431.331.045,00	127.874.294,00	101,75
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.383.856.751,00	7.431.331.045,00	127.874.294,00	101,75
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	171.873.108,00	174.297.519,00	2.324.419,00	101,35
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	138.013.100,00	154.354.762,00	16.341.662,00	111,84
4.1.01.19.03.0005	PBJT-Losmen	33.860.008,00	19.942.757,00	(14.017.243,00)	58,72
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	112.200.000,00	109.850.000,00	(2.350.000,00)	97,91
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	112.200.000,00	109.850.000,00	(2.350.000,00)	97,91
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	7.000.000,00	9.000.000,00	2.000.000,00	128,57
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	7.000.000,00	9.000.000,00	2.000.000,00	128,57
4.1.02	Retribusi Daerah	2.356.834.872,00	2.166.846.349,00	(189.878.523,00)	91,94
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	595.572.172,00	478.126.572,00	(117.445.600,00)	80,28
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	158.844.000,00	149.936.000,00	(8.908.000,00)	94,39
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	158.844.000,00	149.936.000,00	(8.908.000,00)	94,39
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	144.216.000,00	89.250.000,00	(54.966.000,00)	61,89
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	144.216.000,00	89.250.000,00	(54.966.000,00)	61,89
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	292.512.172,00	238.940.572,00	(53.571.600,00)	81,69
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	52.800.000,00	50.164.000,00	(2.636.000,00)	95,01
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	167.251.200,00	139.347.200,00	(27.904.000,00)	83,32
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	72.460.972,00	49.429.372,00	(23.031.600,00)	68,22
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.561.252.700,00	1.484.404.900,00	(76.847.900,00)	95,08
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	788.595.000,00	770.997.500,00	(19.597.500,00)	97,51
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	546.750.000,00	532.950.000,00	(13.800.000,00)	97,48
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	72.045.000,00	69.047.500,00	(2.997.500,00)	95,84
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	66.600.000,00	63.800.000,00	(2.800.000,00)	95,80
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	103.200.000,00	103.200.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	359.400.000,00	349.280.000,00	(10.120.000,00)	97,18
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	359.400.000,00	349.280.000,00	(10.120.000,00)	97,18
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	33.468.000,00	10.700.000,00	(22.768.000,00)	31,97
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	33.468.000,00	10.700.000,00	(22.768.000,00)	31,97
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	160.000.000,00	124.118.500,00	(35.881.500,00)	77,57
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	160.000.000,00	124.118.500,00	(35.881.500,00)	77,57
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	5.953.500,00	5.953.500,00	0,00	100,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	5.953.500,00	5.953.500,00	0,00	100,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	129.084.000,00	141.626.000,00	12.542.000,00	109,72
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	129.084.000,00	141.626.000,00	12.542.000,00	109,72
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	84.742.200,00	83.719.300,00	(1.022.900,00)	98,79

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	
				RUPIAH	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6 = 4/3
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	64.800.000,00	64.850.000,00	50.000,00	100,08
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	19.942.200,00	18.869.300,00	(1.072.900,00)	94,62
4.1.02.03	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**200.000.000,00**	**204.414.977,00**	**4.414.977,00**	**102,21**
4.1.02.03.07	**Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**	**200.000.000,00**	**204.414.977,00**	**4.414.977,00**	**102,21**
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00	204.414.977,00	4.414.977,00	102,21
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**5.854.018.934,00**	**5.854.018.934,91**	**0,91**	**100,00**
4.1.03.02	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD**	**5.854.018.934,00**	**5.854.018.934,91**	**0,91**	**100,00**
4.1.03.02.01	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)**	**5.854.018.934,00**	**5.854.018.934,91**	**0,91**	**100,00**
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.854.018.934,00	5.854.018.934,91	0,91	100,00
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**45.482.770.679,32**	**47.981.878.678,90**	**2.499.107.999,58**	**105,49**
4.1.04.05	**Jasa Giro**	**1.888.895.000,00**	**2.086.892.088,95**	**197.797.088,95**	**110,47**
4.1.04.05.01	**Jasa Giro pada Kas Daerah**	**1.888.895.000,00**	**2.086.892.088,95**	**197.797.088,95**	**110,47**
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.888.895.000,00	2.086.892.088,95	197.797.088,95	110,47
4.1.04.07	**Pendapatan Bunga**	**840.821.917,86**	**965.301.990,16**	**124.480.072,30**	**114,80**
4.1.04.07.01	**Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah**	**840.821.917,86**	**965.301.990,16**	**124.480.072,30**	**114,80**
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	840.821.917,86	965.301.990,16	124.480.072,30	114,80
4.1.04.08	**Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**	**2.133.278.118,46**	**3.743.329.692,53**	**1.610.051.574,07**	**175,47**
4.1.04.08.01	**Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara**	**1.850.000,00**	**0,00**	**(1.850.000,00)**	**0,00**
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	0,00
4.1.04.08.02	**Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain**	**2.131.428.118,46**	**3.743.329.692,53**	**1.611.901.574,07**	**175,63**
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.131.428.118,46	3.743.329.692,53	1.611.901.574,07	175,63
4.1.04.11	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**50.000.000,00**	**3.780.393,00**	**(46.219.607,00)**	**7,56**
4.1.04.11.01	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**50.000.000,00**	**3.780.393,00**	**(46.219.607,00)**	**7,56**
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00	3.780.393,00	(46.219.607,00)	7,56
4.1.04.12	**Pendapatan Denda Pajak Daerah**	**204.360,00**	**1.139.695,00**	**935.335,00**	**557,89**
4.1.04.12.15	**Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB/P2)**	**204.360,00**	**1.139.695,00**	**935.335,00**	**557,89**
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBB/P2	204.360,00	1.139.695,00	935.335,00	557,89
4.1.04.15	**Pendapatan dari Pengembalian**	**266.583.000,00**	**235.184.653,00**	**(31.398.347,00)**	**88,22**
4.1.04.15.04	**Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas**	**3.858.000,00**	**5.518.000,00**	**1.660.000,00**	**143,03**
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	3.858.000,00	5.518.000,00	1.660.000,00	143,03
4.1.04.15.08	**Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**200.000.000,00**	**222.681.005,00**	**22.681.005,00**	**111,34**
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	200.000.000,00	222.681.005,00	22.681.005,00	111,34
4.1.04.15.16	**Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa**	**62.725.000,00**	**6.985.648,00**	**(55.739.352,00)**	**11,14**
4.1.04.15.16.0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	62.725.000,00	6.985.648,00	(55.739.352,00)	11,14
4.1.04.16	**Pendapatan BLUD**	**40.262.413.263,00**	**40.936.131.575,00**	**673.718.262,00**	**101,67**
4.1.04.16.02	**Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan**	**40.138.783.263,00**	**40.856.265.166,00**	**717.501.883,00**	**101,79**
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	40.138.783.263,00	40.856.265.166,00	717.501.883,00	101,79
4.1.04.16.04	**Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain**	**75.700.000,00**	**64.640.771,00**	**(11.059.229,00)**	**85,39**
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	75.700.000,00	64.640.771,00	(11.059.229,00)	85,39
4.1.04.16.06	**Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah**	**47.950.000,00**	**15.225.638,00**	**(32.724.362,00)**	**31,75**
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	47.950.000,00	15.225.638,00	(32.724.362,00)	31,75
4.1.04.19	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**	**40.575.000,00**	**10.318.591,26**	**(30.256.408,74)**	**25,43**
4.1.04.19.01	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**	**40.575.000,00**	**10.318.591,26**	**(30.256.408,74)**	**25,43**
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	40.575.000,00	10.318.591,26	(30.256.408,74)	25,43
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.050.157.430.577,80**	**1.039.398.180.706,00**	**(10.759.249.871,80)**	**98,97**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**[illegible]**	**[illegible]**	**(7.659.373.104,86)**	**99,29**
4.2.01.01	**Dana Perimbangan**	**829.177.934.500,00**	**818.068.561.394,00**	**(11.109.373.106,00)**	**98,66**
4.2.01.01.01	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)**	**19.115.735.000,00**	**19.128.645.000,00**	**12.910.000,00**	**100,07**
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.786.306.000,00	1.786.306.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	4.609.734.000,00	4.609.734.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	166.719.000,00	166.719.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	126.210.000,00	139.120.000,00	12.910.000,00	110,23
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	3.382.434.000,00	3.382.434.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	3.002.774.000,00	3.002.774.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	189.229.000,00	189.229.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	216.817.000,00	216.817.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.097.155.000,00	1.097.155.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	3.679.357.000,00	3.679.357.000,00	0,00	100,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)	
				RUPIAH	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6 = 4/3
4.2.01.01.02	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)**	**543.123.256.000,00**	**541.231.171.108,00**	**(1.892.084.892,00)**	**99,65**
4.2.01.01.02.0001	DAU	543.123.256.000,00	541.231.171.108,00	(1.892.084.892,00)	99,65
4.2.01.01.03	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**	**120.727.108.500,00**	**119.832.295.786,00**	**(894.812.714,00)**	**99,26**
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	896.961.000,00	894.596.000,00	(2.365.000,00)	99,74
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	6.613.008.000,00	6.570.203.034,00	(42.804.966,00)	99,35
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.316.148.000,00	3.306.813.279,00	(9.334.721,00)	99,72
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.183.774.000,00	10.137.377.300,00	(46.396.700,00)	99,54
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Percepatan Intervensi Stunting	512.660.000,00	469.130.000,00	(43.530.000,00)	91,51
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	3.321.738.000,00	3.310.290.277,00	(11.447.723,00)	99,66
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.638.787.500,00	1.629.450.640,00	(9.336.860,00)	99,43
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	15.876.742.000,00	15.722.129.000,00	(154.613.000,00)	99,03
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	3.355.207.000,00	3.343.600.000,00	(11.607.000,00)	99,65
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	5.012.093.000,00	4.948.937.256,00	(63.145.744,00)	98,74
4.2.01.01.03.0061	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan	70.000.000.000,00	69.499.769.000,00	(500.231.000,00)	99,29
4.2.01.01.04	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**	**142.161.835.000,00**	**137.876.449.500,00**	**(4.285.385.500,00)**	**96,99**
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	37.942.360.000,00	37.853.439.558,00	(88.913.442,00)	99,77
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.315.000.000,00	1.315.000.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	66.253.518.000,00	63.856.385.000,00	(2.397.133.000,00)	96,38
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.119.518.000,00	1.119.518.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	404.163.000,00	321.177.000,00	(82.986.000,00)	79,47
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.021.200.000,00	3.013.895.000,00	(8.305.000,00)	99,73
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.153.140.000,00	1.084.350.602,00	(68.789.398,00)	94,03
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	21.580.602.000,00	20.660.793.081,00	(919.808.919,00)	95,74
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	364.744.000,00	364.744.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.853.514.000,00	4.513.701.365,00	(339.812.635,00)	93,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PKZUKM	514.556.000,00	514.556.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	1.091.220.000,00	1.040.018.900,00	(51.201.100,00)	95,31
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Permasyarakat Modal	415.178.000,00	400.979.600,00	(14.198.400,00)	96,58
4.2.01.01.04.0022	DAK NonCalk-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.000.000,00	262.224.920,00	(137.775.080,00)	65,57
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.718.002.000,00	1.542.466.894,00	(175.535.106,00)	89,79
4.2.01.05	**Dana Desa**	**118.449.735.000,00**	**118.449.735.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.2.01.05.01	**Dana Desa**	**118.449.735.000,00**	**118.449.735.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	118.449.735.000,00	118.449.735.000,00	0,00	100,00
4.2.01.06	**Insentif Fiskal**	**20.106.738.000,00**	**20.106.738.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.2.01.06.01	**Insentif Fiskal**	**20.106.738.000,00**	**20.106.738.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	20.106.738.000,00	20.106.738.000,00	0,00	100,00
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**86.473.023.077,00**	**82.743.146.312,00**	**(3.729.876.765,00)**	**95,69**
4.2.02.01	**Pendapatan Bagi Hasil**	**86.473.023.077,00**	**82.743.146.312,00**	**(3.729.876.765,00)**	**95,69**
4.2.02.01.01	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**	**86.473.023.077,00**	**82.743.146.312,00**	**(3.729.876.765,00)**	**95,69**
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	16.775.300.308,00	15.815.497.353,00	(959.803.015,00)	94,28
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.912.280.450,00	7.028.302.719,00	(5.883.977.731,00)	54,43
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.523.382.623,00	34.812.496.882,00	4.289.114.259,00	114,05
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	472.069.508,00	485.166.475,00	13.096.967,00	102,77
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	25.789.990.128,00	24.601.692.863,00	(1.188.297.265,00)	95,39

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
REKAP REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH PER PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.119.418.377.234,92	1.111.191.957.433,81	(8.226.419.801,11)	
ORGANISASI	1-01.2-22.0-00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
4	PENDAPATAN DAERAH	325.800.000,00	305.400.000,00	(20.400.000,00)	93,74
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	325.800.000,00	305.400.000,00	(20.400.000,00)	93,74
4.1.02	Retribusi Daerah	325.800.000,00	305.400.000,00	(20.400.000,00)	93,74
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	325.800.000,00	305.400.000,00	(20.400.000,00)	93,74
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	325.800.000,00	305.400.000,00	(20.400.000,00)	93,74
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	289.800.000,00	280.650.000,00	(9.150.000,00)	96,84
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	36.000.000,00	24.750.000,00	(11.250.000,00)	68,75
	Sub Jumlah	325.800.000,00	305.400.000,00	(20.400.000,00)	93,74
ORGANISASI	1-02.0-00.0-00.02.0000 DINAS KESEHATAN				
4	PENDAPATAN DAERAH	17.579.095.283,00	16.481.430.850,00	(1.097.664.433,00)	93,76
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17.579.095.283,00	16.481.430.850,00	(1.097.664.433,00)	93,76
4.1.02	Retribusi Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.132.890.865,00	2.148.751.015,00	15.860.150,00	100,74
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	2.132.890.865,00	2.148.751.015,00	15.860.150,00	100,74
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.132.890.865,00	2.148.751.015,00	15.860.150,00	100,74
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.132.890.865,00	2.148.751.015,00	15.860.150,00	100,74
	Sub Jumlah	17.579.095.283,00	16.481.430.850,00	(1.097.664.433,00)	93,76
	RINCIAN PENDAPATAN 15 BLUD PUSKESMAS :				
	1-02.0-00.0-00.02.0002 PUSKESMAS BATU BRAK				0,00
4	PENDAPATAN DAERAH	1.190.768.057,00	932.546.963,00	(258.221.094,00)	78,31
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.190.768.057,00	932.546.963,00	(258.221.094,00)	78,31
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.190.768.057,00	932.546.963,00	(258.221.094,00)	78,31
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	1.190.768.057,00	932.546.963,00	(258.221.094,00)	78,31
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.190.768.057,00	932.546.963,00	(258.221.094,00)	78,31
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.190.768.057,00	932.546.963,00	(258.221.094,00)	78,31
	1-02.0-00.0-00.02.0003 PUSKESMAS BATU KETULIS				0,00
4	PENDAPATAN DAERAH	949.225.640,00	937.587.082,00	(11.638.558,00)	98,77
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	949.225.640,00	937.587.082,00	(11.638.558,00)	98,77
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	949.225.640,00	937.587.082,00	(11.638.558,00)	98,77
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	949.225.640,00	937.587.082,00	(11.638.558,00)	98,77
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	949.225.640,00	937.587.082,00	(11.638.558,00)	98,77
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	949.225.640,00	937.587.082,00	(11.638.558,00)	98,77
	1-02.0-00.0-00.02.0004 PUSKESMAS SEKINCAU				0,00
4	PENDAPATAN DAERAH	869.552.408,00	869.552.408,00	0,00	100,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	869.552.408,00	869.552.408,00	0,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	869.552.408,00	869.552.408,00	0,00	100,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	869.552.408,00	869.552.408,00	0,00	100,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	869.552.408,00	869.552.408,00	0,00	100,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	869.552.408,00	869.552.408,00	0,00	100,00
	1-02.0-00.0-00.02.0005 PUSKESMAS AIR HITAM				0,00
4	PENDAPATAN DAERAH	504.099.153,00	504.099.153,00	0,00	100,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	504.099.153,00	504.099.153,00	0,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	504.099.153,00	504.099.153,00	0,00	100,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	504.099.153,00	504.099.153,00	0,00	100,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	504.099.153,00	504.099.153,00	0,00	100,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	504.099.153,00	504.099.153,00	0,00	100,00
	1-02.0-00.0-00.02.0006 PUSKESMAS FAJAR BULAN				
4	PENDAPATAN DAERAH	1.071.050.867,00	1.071.050.867,00	0,00	100,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.071.050.867,00	1.071.050.867,00	0,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.071.050.867,00	1.071.050.867,00	0,00	100,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	1.071.050.867,00	1.071.050.867,00	0,00	100,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.071.050.867,00	1.071.050.867,00	0,00	100,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.071.050.867,00	1.071.050.867,00	0,00	100,00
	1-02.0-00.0-00.02.0007 PUSKESMAS BUAY NYERUPA				0,00
4	PENDAPATAN DAERAH	1.079.490.000,00	1.079.490.000,00	0,00	100,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.079.490.000,00	1.079.490.000,00	0,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.079.490.000,00	1.079.490.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	1.079.490.000,00	1.079.490.000,00	0,00	100,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.079.490.000,00	1.079.490.000,00	0,00	100,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.079.490.000,00	1.079.490.000,00	0,00	100,00
	1-02.0-00.0-00.02.0008 PUSKESMAS SUMBER JAYA				0,00
4	PENDAPATAN DAERAH	954.912.381,00	954.912.381,00	0,00	100,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	954.912.381,00	954.912.381,00	0,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	954.912.381,00	954.912.381,00	0,00	100,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	954.912.381,00	954.912.381,00	0,00	100,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	954.912.381,00	954.912.381,00	0,00	100,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	954.912.381,00	954.912.381,00	0,00	100,00
	1-02.0-00.0-00.02.0009 PUSKESMAS KEBUN TEBU				0,00
4	PENDAPATAN DAERAH	1.005.750.220,00	1.326.872.458,00	321.122.238,00	131,93
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.005.750.220,00	1.326.872.458,00	321.122.238,00	131,93
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.005.750.220,00	1.326.872.458,00	321.122.238,00	131,93
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	1.005.750.220,00	1.326.872.458,00	321.122.238,00	131,93
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.005.750.220,00	1.326.872.458,00	321.122.238,00	131,93
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.005.750.220,00	1.326.872.458,00	321.122.238,00	131,93
	1-02.0-00.0-00.02.0010 PUSKESMAS BANDAR NEGERI SUOH				0,00
4	PENDAPATAN DAERAH	1.822.890.713,00	1.125.886.487,00	(697.004.226,00)	61,76
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.822.890.713,00	1.125.886.487,00	(697.004.226,00)	61,76
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.822.890.713,00	1.125.886.487,00	(697.004.226,00)	61,76
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	1.822.890.713,00	1.125.886.487,00	(697.004.226,00)	61,76
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.822.890.713,00	1.125.886.487,00	(697.004.226,00)	61,76
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.822.890.713,00	1.125.886.487,00	(697.004.226,00)	61,76
	1-02.0-00.0-00.02.0011 PUSKESMAS GEDUNG SURIAN				0,00
4	PENDAPATAN DAERAH	649.215.000,00	649.215.000,00	0,00	100,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	649.215.000,00	649.215.000,00	0,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	649.215.000,00	649.215.000,00	0,00	100,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	649.215.000,00	649.215.000,00	0,00	100,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	649.215.000,00	649.215.000,00	0,00	100,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	649.215.000,00	649.215.000,00	0,00	100,00
	1-02.0-00.0-00.02.0012 PUSKESMAS LIWA				0,00
4	PENDAPATAN DAERAH	1.749.032.887,00	1.593.607.280,00	(155.425.607,00)	91,11
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.749.032.887,00	1.593.607.280,00	(155.425.607,00)	91,11
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.749.032.887,00	1.593.607.280,00	(155.425.607,00)	91,11
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	1.749.032.887,00	1.593.607.280,00	(155.425.607,00)	91,11
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.749.032.887,00	1.593.607.280,00	(155.425.607,00)	91,11
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.749.032.887,00	1.593.607.280,00	(155.425.607,00)	91,11
	1-02.0-00.0-00.02.0013 PUSKESMAS LOMBOK				0,00
4	PENDAPATAN DAERAH	445.812.330,00	445.812.330,00	0,00	100,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	445.812.330,00	445.812.330,00	0,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	445.812.330,00	445.812.330,00	0,00	100,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	445.812.330,00	445.812.330,00	0,00	100,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	445.812.330,00	445.812.330,00	0,00	100,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	445.812.330,00	445.812.330,00	0,00	100,00
	1-02.0-00.0-00.02.0014 PUSKESMAS KENALI				0,00
4	PENDAPATAN DAERAH	1.179.771.960,00	1.130.434.071,00	(49.337.889,00)	95,82
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.179.771.960,00	1.130.434.071,00	(49.337.889,00)	95,82
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.179.771.960,00	1.130.434.071,00	(49.337.889,00)	95,82
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	1.179.771.960,00	1.130.434.071,00	(49.337.889,00)	95,82
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.179.771.960,00	1.130.434.071,00	(49.337.889,00)	95,82
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.179.771.960,00	1.130.434.071,00	(49.337.889,00)	95,82
	1-02.0-00.0-00.02.0015 PUSKESMAS PAGAR DEWA	841.720.157,00	739.136.677,00	(102.583.480,00)	87,81
4	PENDAPATAN DAERAH	841.720.157,00	739.136.677,00	(102.583.480,00)	87,81
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	841.720.157,00	739.136.677,00	(102.583.480,00)	87,81
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	841.720.157,00	739.136.677,00	(102.583.480,00)	87,81
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	841.720.157,00	739.136.677,00	(102.583.480,00)	87,81
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	841.720.157,00	739.136.677,00	(102.583.480,00)	87,81
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	841.720.157,00	739.136.677,00	(102.583.480,00)	87,81
	1-02.0-00.0-00.02.0016 PUSKESMAS SRIMULYO				0,00
4	PENDAPATAN DAERAH	1.129.912.645,00	969.476.678,00	(160.435.967,00)	85,80
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.129.912.645,00	969.476.678,00	(160.435.967,00)	85,80
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.129.912.645,00	969.476.678,00	(160.435.967,00)	85,80
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	1.129.912.645,00	969.476.678,00	(160.435.967,00)	85,80
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.129.912.645,00	969.476.678,00	(160.435.967,00)	85,80
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.129.912.645,00	969.476.678,00	(160.435.967,00)	85,80
	JUMLAH PENDAPATAN	17.578.095.283,00	16.481.430.850,00	(1.097.664.433,00)	93,76
ORGANISASI	1.02.0.00.0.00.02.0001 RSUD ALIMUDDIN UMAR				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	22.686.318.000,00	24.457.700.725,00	1.771.382.725,00	107,81
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.686.318.000,00	24.457.700.725,00	1.771.382.725,00	107,81
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	22.686.318.000,00	24.457.700.725,00	1.771.382.725,00	107,81
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	22.686.318.000,00	24.457.700.725,00	1.771.382.725,00	107,81
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	22.562.668.000,00	24.377.834.316,00	1.815.166.316,00	108,04
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	22.562.668.000,00	24.377.834.316,00	1.815.166.316,00	108,04
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	75.700.000,00	64.640.771,00	(11.059.229,00)	85,39
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	75.700.000,00	64.640.771,00	(11.059.229,00)	85,39
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	47.950.000,00	15.225.638,00	(32.724.362,00)	31,75
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	47.950.000,00	15.225.638,00	(32.724.362,00)	31,75
	Sub Jumlah	22.686.318.000,00	24.457.700.725,00	1.771.382.725,00	107,81
ORGANISASI	1-03.1-04.2-10.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
4	PENDAPATAN DAERAH	330.800.000,00	335.814.977,00	5.014.977,00	101,52
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	330.800.000,00	335.814.977,00	5.014.977,00	101,52
4.1.02	Retribusi Daerah	330.800.000,00	335.814.977,00	5.014.977,00	101,52
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	130.800.000,00	131.400.000,00	600.000,00	100,46
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	130.800.000,00	131.400.000,00	600.000,00	100,46
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	15.600.000,00	16.200.000,00	600.000,00	103,85
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	103.200.000,00	103.200.000,00	0,00	100,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	200.000.000,00	204.414.977,00	4.414.977,00	102,21
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00	204.414.977,00	4.414.977,00	102,21
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00	204.414.977,00	4.414.977,00	102,21
	Sub Jumlah	330.800.000,00	335.814.977,00	5.014.977,00	101,52
ORGANISASI	2-07.3-31.0-00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN				
4	PENDAPATAN DAERAH	12.600.000,00	12.782.000,00	182.000,00	101,44
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.600.000,00	12.782.000,00	182.000,00	101,44
4.1.02	Retribusi Daerah	12.600.000,00	12.782.000,00	182.000,00	101,44
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	12.600.000,00	12.782.000,00	182.000,00	101,44
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	12.600.000,00	12.782.000,00	182.000,00	101,44
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	12.600.000,00	12.782.000,00	182.000,00	101,44
	Sub Jumlah	12.600.000,00	12.782.000,00	182.000,00	101,44
ORGANISASI	2-11.0-00.0-00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
4	PENDAPATAN DAERAH	125.386.200,00	131.679.300,00	6.293.100,00	105,02
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	125.386.200,00	131.679.300,00	6.293.100,00	105,02
4.1.02	Retribusi Daerah	125.386.200,00	131.679.300,00	6.293.100,00	105,02
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	106.044.000,00	106.080.000,00	36.000,00	100,03
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	106.044.000,00	106.080.000,00	36.000,00	100,03
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	106.044.000,00	106.080.000,00	36.000,00	100,03
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	19.342.200,00	25.599.300,00	6.257.100,00	132,35
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	7.512.000,00	7.512.000,00	0,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	7.512.000,00	7.512.000,00	0,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	7.342.200,00	6.087.300,00	(1.254.900,00)	82,91
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibitatau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	7.342.200,00	6.087.300,00	(1.254.900,00)	82,91
	Sub Jumlah	125.386.200,00	131.679.300,00	6.293.100,00	105,02
ORGANISASI	2-15.0-00.0-00.12.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
4	PENDAPATAN DAERAH	184.884.000,00	103.450.000,00	(81.434.000,00)	55,95
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	184.884.000,00	103.450.000,00	(81.434.000,00)	55,95
4.1.02	Retribusi Daerah	184.884.000,00	103.450.000,00	(81.434.000,00)	55,95
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	144.216.000,00	89.250.000,00	(54.966.000,00)	61,89
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	144.216.000,00	89.250.000,00	(54.966.000,00)	61,89
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	144.216.000,00	89.250.000,00	(54.966.000,00)	61,89
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	40.668.000,00	14.200.000,00	(26.468.000,00)	34,92
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.200.000,00	3.500.000,00	(3.700.000,00)	48,61
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	7.200.000,00	3.500.000,00	(3.700.000,00)	48,61
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	33.468.000,00	10.700.000,00	(22.768.000,00)	31,97
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	33.468.000,00	10.700.000,00	(22.768.000,00)	31,97
	Sub Jumlah	184.884.000,00	103.450.000,00	(81.434.000,00)	55,95

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
ORGANISASI	2-17.3-20.0-00.16.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
4	PENDAPATAN DAERAH	754.287.172,00	651.395.163,26	(102.892.008,74)	86,36
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	754.287.172,00	651.395.163,26	(102.892.008,74)	86,36
4.1.02	Retribusi Daerah	713.712.172,00	641.076.572,00	(72.635.600,00)	89,82
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	346.312.172,00	282.796.572,00	(62.515.600,00)	81,90
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	52.800.000,00	43.856.000,00	(8.944.000,00)	83,06
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	52.800.000,00	43.856.000,00	(8.944.000,00)	83,06
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	292.512.172,00	238.940.572,00	(53.571.600,00)	81,69
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	52.800.000,00	50.164.000,00	(2.636.000,00)	95,01
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	167.251.200,00	139.347.200,00	(27.904.000,00)	83,32
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	72.460.972,00	49.429.372,00	(23.031.600,00)	68,22
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	368.400.000,00	358.280.000,00	(10.120.000,00)	97,25
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	359.400.000,00	349.280.000,00	(10.120.000,00)	97,18
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	359.400.000,00	349.280.000,00	(10.120.000,00)	97,18
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	40.575.000,00	10.318.591,26	(30.256.408,74)	25,43
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	40.575.000,00	10.318.591,26	(30.256.408,74)	25,43
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	40.575.000,00	10.318.591,26	(30.256.408,74)	25,43
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	40.575.000,00	10.318.591,26	(30.256.408,74)	25,43
	Sub Jumlah	754.287.172,00	651.395.163,26	(102.892.008,74)	86,36
ORGANISASI	2-19.3-26.0-00.16.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA				
4	PENDAPATAN DAERAH	173.100.000,00	139.418.500,00	(33.681.500,00)	80,54
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	173.100.000,00	139.418.500,00	(33.681.500,00)	80,54
4.1.02	Retribusi Daerah	173.100.000,00	139.418.500,00	(33.681.500,00)	80,54
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	173.100.000,00	139.418.500,00	(33.681.500,00)	80,54
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.600.000,00	7.550.000,00	950.000,00	114,39
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	6.600.000,00	7.550.000,00	950.000,00	114,39
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	160.000.000,00	124.118.500,00	(35.881.500,00)	77,57
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	160.000.000,00	124.118.500,00	(35.881.500,00)	77,57
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	6.500.000,00	7.750.000,00	1.250.000,00	119,23
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	6.500.000,00	7.750.000,00	1.250.000,00	119,23
	Sub Jumlah	173.100.000,00	139.418.500,00	(33.681.500,00)	80,54
ORGANISASI	3-25.0-00.0-00.16.0000 DINAS PERIKANAN				
4	PENDAPATAN DAERAH	68.400.000,00	68.450.000,00	50.000,00	100,07
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	68.400.000,00	68.450.000,00	50.000,00	100,07
4.1.02	Retribusi Daerah	68.400.000,00	68.450.000,00	50.000,00	100,07
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	68.400.000,00	68.450.000,00	50.000,00	100,07
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	64.800.000,00	64.850.000,00	50.000,00	100,08
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	64.800.000,00	64.850.000,00	50.000,00	100,08
	Sub Jumlah	68.400.000,00	68.450.000,00	50.000,00	100,07
ORGANISASI	3-27.0-00.0-00.20.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN				
4	PENDAPATAN DAERAH	62.547.500,00	61.947.500,00	(600.000,00)	99,04
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	62.547.500,00	61.947.500,00	(600.000,00)	99,04
4.1.02	Retribusi Daerah	62.547.500,00	61.947.500,00	(600.000,00)	99,04
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	62.547.500,00	61.947.500,00	(600.000,00)	99,04
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9.000.000,00	8.400.000,00	(600.000,00)	93,33
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	9.000.000,00	8.400.000,00	(600.000,00)	93,33
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	5.953.500,00	5.953.500,00	0,00	100,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	5.953.500,00	5.953.500,00	0,00	100,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	47.594.000,00	47.594.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	47.594.000,00	47.594.000,00	0,00	100,00
	Sub Jumlah	62.547.500,00	61.947.500,00	(600.000,00)	99,04
ORGANISASI	4-01.2-07.0-00.28.0000 SEKRETARIAT DAERAH				
4	PENDAPATAN DAERAH	64.200.000,00	56.250.000,00	(7.950.000,00)	87,62
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	64.200.000,00	56.250.000,00	(7.950.000,00)	87,62
4.1.02	Retribusi Daerah	64.200.000,00	56.250.000,00	(7.950.000,00)	87,62

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**	**64.200.000,00**	**56.250.000,00**	**(7.950.000,00)**	**87,62**
4.1.02.02.01	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**	**64.200.000,00**	**56.250.000,00**	**(7.950.000,00)**	**87,62**
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	55.200.000,00	38.800.000,00	(16.400.000,00)	70,29
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	9.000.000,00	17.450.000,00	8.450.000,00	193,89
	Sub Jumlah	**64.200.000,00**	**56.250.000,00**	**(7.950.000,00)**	**87,62**
ORGANISASI	5-02.0-00.0-00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**15.782.477.172,00**	**16.047.580.265,00**	**265.103.093,00**	**101,68**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD**	**15.782.477.172,00**	**16.047.580.265,00**	**265.103.093,00**	**101,68**
4.1.01	**Pajak Daerah**	**15.567.332.172,00**	**15.820.932.765,00**	**253.600.593,00**	**101,63**
4.1.01.09	**Pajak Reklame**	**120.929.700,00**	**247.192.326,00**	**126.262.626,00**	**204,41**
4.1.01.09.01	**Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron**	**115.079.700,00**	**230.774.001,00**	**115.694.301,00**	**200,53**
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	115.079.700,00	230.774.001,00	115.694.301,00	200,53
4.1.01.09.02	**Pajak Reklame Kain**	**5.850.000,00**	**16.418.325,00**	**10.568.325,00**	**280,66**
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	5.850.000,00	16.418.325,00	10.568.325,00	280,66
4.1.01.12	**Pajak Air Tanah**	**0,00**	**608.472,00**	**608.472,00**	0,00
4.1.01.12.01	**Pajak Air Tanah**	**0,00**	**608.472,00**	**608.472,00**	0,00
4.1.01.12.01.0001	PLTA Way Besay	0,00	608.472,00	608.472,00	0,00
4.1.01.14	**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**300.000.000,00**	**462.039.288,00**	**162.039.288,00**	**154,01**
4.1.01.14.37	**Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya**	**300.000.000,00**	**462.039.288,00**	**162.039.288,00**	**154,01**
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	300.000.000,00	462.039.288,00	162.039.288,00	154,01
4.1.01.15	**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBBP2**	**5.232.505.380,00**	**5.273.166.288,00**	**40.660.908,00**	**100,78**
4.1.01.15.01	**PBBP2**	**5.232.505.380,00**	**5.273.166.288,00**	**40.660.908,00**	**100,78**
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	5.232.505.380,00	5.273.166.288,00	40.660.908,00	100,78
4.1.01.16	**Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan BPHTB**	**300.000.000,00**	**328.368.600,00**	**28.368.600,00**	**109,46**
4.1.01.16.01	**BPHTB Pemindahan Hak**	**300.000.000,00**	**328.368.600,00**	**28.368.600,00**	**109,46**
4.1.01.16.01.0001	BPHTB Pemindahan Hak	300.000.000,00	328.368.600,00	28.368.600,00	109,46
4.1.01.19	**Pajak Barang dan Jasa Tertentu PBJT**	**9.613.897.092,00**	**9.509.557.791,00**	**(104.339.301,00)**	**98,91**
4.1.01.19.01	**PBJT Makanan dan/atau Minuman**	**2.019.067.241,00**	**1.785.079.227,00**	**(233.988.014,00)**	**88,41**
4.1.01.19.01.0001	PBJT Restoran	2.019.067.241,00	1.785.079.227,00	(233.988.014,00)	88,41
4.1.01.19.02	**PBJT Tenaga Listrik**	**7.303.656.751,00**	**7.431.331.045,00**	**127.674.294,00**	**101,75**
4.1.01.19.02.0001	PBJT Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.303.656.751,00	7.431.331.045,00	127.674.294,00	101,75
4.1.01.19.03	**PBJT Jasa Perhotelan**	**171.973.100,00**	**174.297.519,00**	**2.324.419,00**	**101,35**
4.1.01.19.03.0001	PBJT Hotel	138.013.100,00	154.354.762,00	16.341.662,00	111,84
4.1.01.19.03.0006	PBJT Losmen	33.960.000,00	19.942.757,00	(14.017.243,00)	58,72
4.1.01.19.04	**PBJT Jasa Parkir**	**112.200.000,00**	**109.850.000,00**	**(2.350.000,00)**	**97,91**
4.1.01.19.04.0001	PBJT Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	112.200.000,00	109.850.000,00	(2.350.000,00)	97,91
4.1.01.19.05	**PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan**	**7.000.000,00**	**9.000.000,00**	**2.000.000,00**	**128,57**
4.1.01.19.05.0002	PBJT Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	7.000.000,00	9.000.000,00	2.000.000,00	128,57
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**215.145.000,00**	**226.647.500,00**	**11.502.500,00**	**105,35**
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**	**215.145.000,00**	**226.647.500,00**	**11.502.500,00**	**105,35**
4.1.02.02.01	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**	**215.145.000,00**	**226.647.500,00**	**11.502.500,00**	**105,35**
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	133.500.000,00	148.000.000,00	14.500.000,00	110,86
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	72.045.000,00	69.047.500,00	(2.997.500,00)	95,84
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00
	Sub Jumlah	**15.782.477.172,00**	**16.047.580.265,00**	**265.103.093,00**	**101,68**
ORGANISASI	5.02.0.00.0.00.22.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.061.191.231.907,92**	**1.052.257.628.153,55**	**(8.933.603.754,37)**	**99,16**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD**	**11.033.801.330,32**	**12.889.447.447,55**	**1.855.646.117,23**	**116,82**
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**5.854.018.934,00**	**5.854.018.934,91**	**0,91**	**100,00**
4.1.03.02	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD**	**5.854.018.934,00**	**5.854.018.934,91**	**0,91**	**100,00**
4.1.03.02.01	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Lembaga Keuangan)**	**5.854.018.934,00**	**5.854.018.934,91**	**0,91**	**100,00**
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Lembaga Keuangan)	5.854.018.934,00	5.854.018.934,91	0,91	100,00
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**5.179.782.396,32**	**7.035.428.512,64**	**1.855.646.116,32**	**135,82**
4.1.04.05	**Jasa Giro**	**1.888.895.000,00**	**2.086.692.088,95**	**197.797.088,95**	**110,47**
4.1.04.05.01	**Jasa Giro pada Kas Daerah**	**1.888.895.000,00**	**2.086.692.088,95**	**197.797.088,95**	**110,47**
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.888.895.000,00	2.086.692.088,95	197.797.088,95	110,47
4.1.04.07	**Pendapatan Bunga**	**840.821.917,86**	**965.301.990,16**	**124.480.072,30**	**114,80**
4.1.04.07.01	**Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah**	**840.821.917,86**	**965.301.990,16**	**124.480.072,30**	**114,80**
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	840.821.917,86	965.301.990,16	124.480.072,30	114,80

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.04.08	**Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**	**2.133.278.118,46**	**3.743.329.692,53**	**1.610.051.574,07**	**175,47**
4.1.04.08.01	**Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara**	**1.850.000,00**	**0,00**	**(1.850.000,00)**	**0,00**
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	0,00
4.1.04.08.02	**Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain**	**2.131.428.118,46**	**3.743.329.692,53**	**1.611.901.574,07**	**175,63**
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.131.428.118,46	3.743.329.692,53	1.611.901.574,07	175,63
4.1.04.11	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**50.000.000,00**	**3.780.393,00**	**(46.219.607,00)**	**7,56**
4.1.04.11.01	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**50.000.000,00**	**3.780.393,00**	**(46.219.607,00)**	**7,56**
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00	3.780.393,00	(46.219.607,00)	7,56
4.1.04.12	**Pendapatan Denda Pajak Daerah**	**204.360,00**	**1.139.695,00**	**935.335,00**	**557,69**
4.1.04.12.15	**Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBBP2**	**204.360,00**	**1.139.695,00**	**935.335,00**	**557,69**
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	204.360,00	1.139.695,00	935.335,00	557,69
4.1.04.15	**Pendapatan dari Pengembalian**	**266.583.000,00**	**235.184.653,00**	**(31.398.347,00)**	**88,22**
4.1.04.15.04	**Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas**	**3.858.000,00**	**5.518.000,00**	**1.660.000,00**	**143,03**
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	3.858.000,00	5.518.000,00	1.660.000,00	143,03
4.1.04.15.08	**Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**200.000.000,00**	**222.681.005,00**	**22.681.005,00**	**111,34**
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN Tunjangan Keluarga PNS	200.000.000,00	222.681.005,00	22.681.005,00	111,34
4.1.04.15.16	**Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa**	**62.725.000,00**	**6.985.648,00**	**(55.739.352,00)**	**11,14**
4.1.04.15.16.0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	62.725.000,00	6.985.648,00	(55.739.352,00)	11,14
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.050.157.430.577,60**	**1.039.368.180.706,00**	**(10.789.249.871,60**	**98,97**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**963.684.407.500,00**	**956.625.034.394,00**	**(7.059.373.106,00)**	**99,27**
4.2.01.01	**Dana Perimbangan**	**825.127.934.500,00**	**818.068.561.394,00**	**(7.059.373.106,00)**	**99,14**
4.2.01.01.01	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DBH**	**19.115.735.000,00**	**19.128.645.000,00**	**12.910.000,00**	**100,07**
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.786.306.000,00	1.786.306.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	4.609.734.000,00	4.609.734.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	165.719.000,00	165.719.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	126.210.000,00	139.120.000,00	12.910.000,00	110,23
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam SDA Minyak Bumi	3.382.434.000,00	3.382.434.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam SDA Pengusahaan Panas Bumi	3.862.774.000,00	3.862.774.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam SDA Mineral dan Batubara-Landrent	189.229.000,00	189.229.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan PSDH	216.817.000,00	216.817.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam SDA Perikanan	1.097.155.000,00	1.097.155.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	3.679.357.000,00	3.679.357.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.02	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU**	**543.123.256.000,00**	**541.231.171.108,00**	**(1.892.084.892,00)**	**99,65**
4.2.01.01.02.0001	DAU	543.123.256.000,00	541.231.171.108,00	(1.892.084.892,00)	99,65
4.2.01.01.03	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus DAK Fisik**	**120.727.108.500,00**	**119.832.295.786,00**	**(894.812.714,00)**	**99,26**
0.4.2.01.01.03.00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	896.961.000,00	894.596.000,00	(2.365.000,00)	99,74
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	6.613.008.000,00	6.570.203.034,00	(42.804.966,00)	99,35
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.316.148.000,00	3.306.813.279,00	(9.334.721,00)	99,72
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.183.774.000,00	10.137.377.300,00	(46.396.700,00)	99,54
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	512.660.000,00	469.130.000,00	(43.530.000,00)	91,51
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	3.321.738.000,00	3.310.290.277,00	(11.447.723,00)	99,66
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.638.787.500,00	1.629.450.640,00	(9.336.860,00)	99,43
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	15.876.742.000,00	15.722.129.000,00	(154.613.000,00)	99,03
4.2.01.01.03.0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	3.355.207.000,00	3.343.600.000,00	(11.607.000,00)	99,65
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	5.012.083.000,00	4.948.937.256,00	(63.145.744,00)	98,74
4.2.01.01.03.0061	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan	70.000.000.000,00	69.499.769.000,00	(500.231.000,00)	99,29
4.2.01.01.04	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus DAK Non Fisik**	**142.161.835.000,00**	**137.876.449.500,00**	**(4.285.385.500,00)**	**96,99**
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	37.942.350.000,00	37.853.439.558,00	(88.910.442,00)	99,77
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.315.000.000,00	1.315.000.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	66.253.518.000,00	63.856.385.000,00	(2.397.133.000,00)	96,38
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.119.518.000,00	1.119.518.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	404.163.000,00	321.177.000,00	(82.986.000,00)	79,47
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.021.330.000,00	3.013.095.000,00	(8.235.000,00)	99,73
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.153.140.000,00	1.084.350.602,00	(68.789.398,00)	94,03

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB BOK	21.588.602.000,00	20.668.793.081,00	(919.808.919,00)	95,74
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB Pengawasan Obat dan Makanan	364.744.000,00	364.744.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB BOKB	4.853.514.000,00	4.513.701.365,00	(339.812.635,00)	93,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PKLUKM	514.556.000,00	514.556.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	1.091.220.000,00	1.040.018.900,00	(51.201.100,00)	95,31
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	415.178.000,00	400.979.600,00	(14.198.400,00)	96,58
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	268.224.500,00	(137.775.500,00)	66,07
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.719.002.000,00	1.542.466.894,00	(176.535.106,00)	89,73
4.2.01.05	**Dana Desa**	**118.449.735.000,00**	**118.449.735.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.2.01.05.01	**Dana Desa**	**118.449.735.000,00**	**118.449.735.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	118.449.735.000,00	118.449.735.000,00	0,00	100,00
4.2.01.06	**Insentif Fiskal**	**20.106.738.000,00**	**20.106.738.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.2.01.06.01	**Insentif Fiskal**	**20.106.738.000,00**	**20.106.738.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	20.106.738.000,00	20.106.738.000,00	0,00	100,00
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**86.473.023.077,60**	**82.743.146.312,00**	**(3.729.876.765,60)**	**95,69**
4.2.02.01	**Pendapatan Bagi Hasil**	**86.473.023.077,60**	**82.743.146.312,00**	**(3.729.876.765,60)**	**95,69**
4.2.02.01.01	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**	**86.473.023.077,60**	**82.743.146.312,00**	**(3.729.876.765,60)**	**95,69**
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	16.775.300.368,60	15.815.497.353,00	(959.803.015,60)	94,28
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.912.280.450,00	7.028.302.719,00	(5.883.977.731,00)	54,43
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.523.382.623,00	34.812.496.882,00	4.289.114.259,00	114,05
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	472.069.508,00	485.166.475,00	13.096.967,00	102,77
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	25.789.990.128,00	24.601.682.883,00	(1.188.307.245,00)	95,39
	Sub Jumlah	**1.061.191.231.907,92**	**1.052.257.628.153,55**	**(8.933.603.754,37)**	**99,16**
ORGANISASI	**5-05.0-00.0-00.24.0000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**				
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**77.250.000,00**	**81.030.000,00**	**3.780.000,00**	**104,89**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**77.250.000,00**	**81.030.000,00**	**3.780.000,00**	**104,89**
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**77.250.000,00**	**81.030.000,00**	**3.780.000,00**	**104,89**
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**	**77.250.000,00**	**81.030.000,00**	**3.780.000,00**	**104,89**
4.1.02.02.01	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.09	**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**	**75.000.000,00**	**78.780.000,00**	**3.780.000,00**	**105,04**
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	75.000.000,00	78.780.000,00	3.780.000,00	105,04
	Sub Jumlah	**77.250.000,00**	**81.030.000,00**	**3.780.000,00**	**104,89**

4

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		BERTAMBAH (BERKURANG)	
			(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	1.130.182.927.936,00	1.066.232.029.400,82	94,32	(61.950.898.535,18)	(5,48)
5.1	BELANJA OPERASI	787.052.857.520,00	734.513.264.698,82	93,32	(52.539.592.821,18)	(6,68)
5.1.01	Belanja Pegawai	478.309.824.473,00	444.086.680.344,87	92,83	(34.283.144.128,13)	(7,17)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	329.654.388.058,00	305.652.864.654,00	92,72	(24.001.563.434,00)	(7,28)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	248.507.663.980,00	234.253.991.226,00	94,26	(14.253.672.754,00)	(5,74)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	209.540.463.489,00	200.381.166.320,00	95,63	(9.159.366.169,00)	(4,37)
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	38.967.200.491,00	33.872.882.906,00	86,93	(5.094.317.585,00)	(13,07)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	25.433.649.588,00	22.006.838.835,00	86,53	(3.426.810.753,00)	(13,47)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	20.542.520.284,00	18.723.903.851,00	91,15	(1.818.616.433,00)	(8,85)
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.891.129.304,00	3.282.934.984,00	67,12	(1.608.194.320,00)	(32,88)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.073.269.500,00	5.307.435.000,00	87,39	(765.834.500,00)	(12,61)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.073.269.500,00	5.307.435.000,00	87,39	(765.834.500,00)	(12,61)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.708.628.200,00	14.543.614.000,00	92,58	(1.165.014.200,00)	(7,42)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15.708.628.200,00	14.543.614.000,00	92,58	(1.165.014.200,00)	(7,42)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.995.104.402,00	3.818.928.700,00	76,45	(1.176.175.702,00)	(23,55)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.105.172.900,00	1.852.785.000,00	88,01	(252.387.900,00)	(11,99)
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.889.931.502,00	1.966.143.700,00	68,03	(923.787.802,00)	(31,97)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	13.823.627.520,00	12.571.315.380,00	90,94	(1.252.312.140,00)	(9,06)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.308.357.440,00	10.311.449.280,00	91,18	(996.908.160,00)	(8,82)
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.515.270.080,00	2.259.866.100,00	89,85	(255.403.980,00)	(10,15)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	585.243.838,00	544.467.726,00	93,03	(40.776.112,00)	(6,97)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	585.243.838,00	544.467.726,00	93,03	(40.776.112,00)	(6,97)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.715.790,00	3.185.091,00	85,72	(530.699,00)	(14,28)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.781.476,00	2.559.834,00	92,03	(221.642,00)	(7,97)
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	934.314,00	625.257,00	66,92	(309.057,00)	(33,08)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.114.469.200,00	10.671.462.966,00	88,09	(1.442.987.234,00)	(11,91)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.233.131.100,00	9.265.336.475,00	90,54	(967.794.625,00)	(9,46)
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.881.338.100,00	1.406.166.491,00	74,74	(475.172.609,00)	(25,26)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	602.251.246,00	482.883.932,00	80,18	(119.367.314,00)	(19,82)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	508.069.536,00	410.988.221,00	80,89	(97.081.315,00)	(19,11)
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	94.181.710,00	71.895.711,00	76,34	(22.285.999,00)	(23,66)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.806.753.834,00	1.448.651.806,00	80,18	(358.102.028,00)	(19,82)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.524.208.700,00	1.232.964.669,00	80,89	(291.244.031,00)	(19,11)
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	282.545.134,00	215.687.139,00	76,34	(66.857.995,00)	(23,66)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	54.700.645.671,00	49.291.561.255,00	89,95	(5.409.084.416,00)	(10,05)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	54.700.645.671,00	49.291.561.255,00	89,95	(5.409.084.416,00)	(10,05)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	53.851.162.101,00	48.456.675.799,00	89,98	(5.394.486.302,00)	(10,02)
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	849.483.570,00	744.885.456,00	87,69	(104.598.114,00)	(12,31)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	77.361.144.881,00	73.975.616.711,07	95,62	(3.385.528.169,93)	(4,38)
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	72.598.560.460,00	69.575.053.960,00	95,84	(3.023.506.480,00)	(4,16)
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	72.598.560.460,00	69.575.053.960,00	95,84	(3.023.506.480,00)	(4,16)
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	447.720.600,00	346.308.000,00	77,35	(101.412.600,00)	(22,65)
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	447.720.600,00	346.308.000,00	77,35	(101.412.600,00)	(22,65)
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.389.267.321,00	1.206.000.000,00	86,81	(183.267.321,00)	(13,19)
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.389.267.321,00	1.206.000.000,00	86,81	(183.267.321,00)	(13,19)
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.011.136.500,00	1.968.014.731,07	97,86	(43.121.768,93)	(2,14)
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.011.136.500,00	1.968.014.731,07	97,86	(43.121.768,93)	(2,14)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	914.460.000,00	880.240.000,00	96,26	(34.220.000,00)	(3,74)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	913.710.000,00	880.240.000,00	96,34	(33.470.000,00)	(3,66)
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	750.000,00	0,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.448.447.003,00	13.443.117.714,00	93,04	(1.005.329.289,00)	(6,96)
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	779.835.000,00	99,72	(2.205.000,00)	(0,28)
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	779.835.000,00	99,72	(2.205.000,00)	(0,28)
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.485.600,00	64.071.000,00	58,52	(45.414.600,00)	(41,48)
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.485.600,00	64.071.000,00	58,52	(45.414.600,00)	(41,48)
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	121.695.600,00	91.858.560,00	75,48	(29.837.040,00)	(24,52)
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	121.695.600,00	91.858.560,00	75,48	(29.837.040,00)	(24,52)
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	84.000.000,00	77.983.500,00	92,84	(6.016.500,00)	(7,16)
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	84.000.000,00	77.983.500,00	92,84	(6.016.500,00)	(7,16)
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.130.760.750,00	99,72	(3.197.250,00)	(0,28)
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.130.760.750,00	99,72	(3.197.250,00)	(0,28)
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.784.100,00	83.585.250,00	66,98	(41.198.850,00)	(33,02)
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.784.100,00	83.585.250,00	66,98	(41.198.850,00)	(33,02)
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	5.000.000,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	5.000.000,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00	2.646.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00	2.646.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	561.500.000,00	441.000.000,00	78,54	(120.500.000,00)	(21,46)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
			(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	561.500.000,00	441.000.000,00	78,54	(120.500.000,00)	(21,46)
5.1.01.04.10	**Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD**	**3.500.000,00**	**996.290,00**	**28,47**	**(2.503.710,00)**	**(71,53)**
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	3.500.000,00	996.290,00	28,47	(2.503.710,00)	(71,53)
5.1.01.04.12	**Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD**	**3.872.800.000,00**	**3.492.927.364,00**	**90,19**	**(379.872.636,00)**	**(9,81)**
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	72.000.000,00	67.695.390,00	94,02	(4.304.610,00)	(5,98)
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.000.000,00	1.603.476,00	53,45	(1.396.524,00)	(46,55)
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.000.000,00	4.810.428,00	80,17	(1.189.572,00)	(19,83)
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.791.800.000,00	3.418.818.070,00	90,16	(372.981.930,00)	(9,84)
5.1.01.04.13	**Belanja Tunjangan Transportasi DPRD**	**4.623.813.703,00**	**4.321.020.000,00**	**93,45**	**(302.793.703,00)**	**(6,55)**
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.623.813.703,00	4.321.020.000,00	93,45	(302.793.703,00)	(6,55)
5.1.01.04.14	**Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD**	**379.900.000,00**	**313.110.000,00**	**82,42**	**(66.790.000,00)**	**(17,58)**
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	379.900.000,00	313.110.000,00	82,42	(66.790.000,00)	(17,58)
5.1.01.05	**Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**	**84.938.820,00**	**0,00**	**0,00**	**(84.938.820,00)**	**(100,00)**
5.1.01.05.01	**Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH**	**64.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**(64.278.000,00)**	**(100,00)**
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	64.278.000,00	0,00	0,00	(64.278.000,00)	(100,00)
5.1.01.05.02	**Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH**	**5.184.100,00**	**0,00**	**0,00**	**(5.184.100,00)**	**(100,00)**
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.184.100,00	0,00	0,00	(5.184.100,00)	(100,00)
5.1.01.05.03	**Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH**	**857.500,00**	**0,00**	**0,00**	**(857.500,00)**	**(100,00)**
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	857.500,00	0,00	0,00	(857.500,00)	(100,00)
5.1.01.05.04	**Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH**	**5.714.900,00**	**0,00**	**0,00**	**(5.714.900,00)**	**(100,00)**
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.714.900,00	0,00	0,00	(5.714.900,00)	(100,00)
5.1.01.05.05	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH**	**3.264.200,00**	**0,00**	**0,00**	**(3.264.200,00)**	**(100,00)**
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.264.200,00	0,00	0,00	(3.264.200,00)	(100,00)
5.1.01.05.06	**Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH**	**2.328.600,00**	**0,00**	**0,00**	**(2.328.600,00)**	**(100,00)**
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.328.600,00	0,00	0,00	(2.328.600,00)	(100,00)
5.1.01.05.07	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH**	**2.669.520,00**	**0,00**	**0,00**	**(2.669.520,00)**	**(100,00)**
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	2.669.520,00	0,00	0,00	(2.669.520,00)	(100,00)
5.1.01.05.08	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH**	**161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**(161.000,00)**	**(100,00)**
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	161.000,00	0,00	0,00	(161.000,00)	(100,00)
5.1.01.05.09	**Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH**	**481.000,00**	**0,00**	**0,00**	**(481.000,00)**	**(100,00)**
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	481.000,00	0,00	0,00	(481.000,00)	(100,00)
5.1.01.06	**Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**	**510.880.000,00**	**492.400.000,00**	**96,38**	**(18.480.000,00)**	**(3,62)**
5.1.01.06.01	**Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD**	**110.880.000,00**	**92.400.000,00**	**83,33**	**(18.480.000,00)**	**(16,67)**
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	92.400.000,00	83,33	(18.480.000,00)	(16,67)
5.1.01.06.02	**Belanja Dana Operasional KDH/WKDH**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.01.99	**Belanja Pegawai BLUD**	**1.609.400.000,00**	**1.321.180.000,00**	**82,09**	**(288.220.000,00)**	**(17,91)**
5.1.01.99.99	**Belanja Pegawai BLUD**	**1.609.400.000,00**	**1.321.180.000,00**	**82,09**	**(288.220.000,00)**	**(17,91)**
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	1.609.400.000,00	1.321.180.000,00	82,09	(288.220.000,00)	(17,91)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**264.590.882.920,00**	**247.658.956.651,75**	**93,60**	**(16.931.926.268,25)**	**(6,40)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**47.674.762.036,00**	**44.980.514.658,00**	**94,35**	**(2.694.247.378,00)**	**(5,65)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**47.032.318.756,00**	**44.939.131.868,00**	**94,35**	**(2.093.186.888,00)**	**(5,65)**
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.084.449.270,00	997.601.990,00	91,99	(86.847.280,00)	(8,01)
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.647.199.017,00	2.579.285.865,00	97,43	(67.913.152,00)	(2,57)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.811.080.294,00	1.709.263.010,00	94,38	(101.817.284,00)	(5,62)
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	255.159.000,00	224.659.000,00	87,70	(31.500.000,00)	(12,30)
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-bi Tabung Pemadam Kebakaran	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-bi Tabung Gas	155.725.000,00	155.725.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	136.250.000,00	136.250.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	77.413.740,00	77.394.300,00	99,97	(19.440,00)	(0,03)
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.555.000,00	4.555.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	67.702.972,00	61.193.052,00	90,38	(6.509.920,00)	(9,70)
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	3.432.000,00	3.432.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	13.620.000,00	13.620.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	960.000,00	960.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	9.100.000,00	7.100.000,00	78,02	(2.000.000,00)	(21,98)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.711.511.900,00	4.352.215.200,00	92,37	(359.296.700,00)	(7,63)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.651.367.320,00	1.629.274.335,00	98,66	(22.092.985,00)	(1,34)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.309.930.800,00	2.271.303.720,00	98,33	(38.627.080,00)	(1,67)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	166.430.000,00	165.966.000,00	99,72	(464.000,00)	(0,28)
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	10.277.500,00	4.490.000,00	43,69	(5.787.500,00)	(56,31)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.584.771.100,00	1.557.082.876,00	98,25	(27.688.224,00)	(1,75)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	391.315.636,00	383.368.220,00	97,97	(7.947.416,00)	(2,03)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	582.717.295,00	581.118.879,00	99,73	(1.598.416,00)	(0,27)
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas	989.987.100,00	983.479.586,00	99,17	(6.507.514,00)	(0,83)
5.1.02.01.01.0033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	1.031.000,00	1.031.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	8.784.000,00	8.584.000,00	97,72	(200.000,00)	(2,28)
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	257.593.000,00	257.057.000,00	99,79	(536.000,00)	(0,21)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.060.119.610,00	5.021.510.653,00	99,24	(38.608.957,00)	(0,76)
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.768.524.783,00	1.691.893.973,00	95,67	(76.630.810,00)	(4,33)
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	47.255.000,00	43.505.000,00	92,06	(3.750.000,00)	(7,94)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dipakai/Diserahkan kepada Masyarakat	5.717.436.107,00	5.396.099.744,00	94,37	(321.736.363,00)	(5,63)
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dipakai/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.777.077.096,00	2.763.170.225,00	99,50	(13.906.873,00)	(0,50)
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	63.601.000,00	63.301.000,00	99,53	(300.000,00)	(0,47)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		BERTAMBAH (BERKURANG)	
			(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	370.000,00	370.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.005.784.720,00	999.141.920,00	99,34	(6.642.800,00)	(0,66)
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	60.197.000,00	60.197.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	105.000.000,00	85.280.000,00	81,22	(19.720.000,00)	(18,78)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.264.663.500,00	6.508.836.920,00	89,60	(755.826.580,00)	(10,40)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.747.305.000,00	1.594.731.400,00	91,27	(152.573.600,00)	(8,73)
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	212.250.000,00	206.175.000,00	97,14	(6.075.000,00)	(2,86)
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	573.878.500,00	573.878.500,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.127.028.500,00	1.099.365.500,00	97,55	(27.663.000,00)	(2,45)
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	525.000.000,00	31.500.000,00	6,00	(493.500.000,00)	(94,00)
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	80.035.000,00	78.985.000,00	98,69	(1.050.000,00)	(1,31)
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	189.500.000,00	187.750.000,00	99,08	(1.750.000,00)	(0,92)
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	48.575.000,00	47.695.000,00	98,19	(880.000,00)	(1,81)
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	87.500.000,00	85.750.000,00	98,00	(1.750.000,00)	(2,00)
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	10.035.000,00	10.035.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	185.000.000,00	183.250.000,00	99,05	(1.750.000,00)	(0,95)
5.1.02.01.02	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**	**21.283.280,00**	**20.462.790,00**	**96,14**	**(820.490,00)**	**(3,86)**
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	11.136.500,00	11.136.500,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	2.946.780,00	2.126.290,00	72,16	(820.490,00)	(27,84)
5.1.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**	**21.160.000,00**	**20.920.000,00**	**98,87**	**(240.000,00)**	**(1,13)**
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.160.000,00	4.920.000,00	95,35	(240.000,00)	(4,65)
5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**70.331.186.292,00**	**70.259.335.425,00**	**88,60**	**(9.641.850.867,00)**	**(11,40)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**51.209.929.546,00**	**45.389.119.288,00**	**88,63**	**(5.821.810.258,00)**	**(11,37)**
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	50.000.000,00	33.117.040,00	66,24	(16.882.960,00)	(33,76)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.643.200.000,00	2.164.700.000,00	81,90	(478.500.000,00)	(18,10)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	359.620.046,00	343.010.000,00	95,38	(16.610.046,00)	(4,62)
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Bencana	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	618.750.000,00	575.750.000,00	93,21	(42.000.000,00)	(6,79)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	27.250.000,00	20.650.000,00	75,78	(6.600.000,00)	(24,22)
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	30.960.000,00	30.960.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	203.100.000,00	203.100.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	835.800.000,00	742.800.000,00	88,87	(93.000.000,00)	(11,13)
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	6.113.600.000,00	4.656.920.000,00	76,17	(1.456.680.000,00)	(23,83)
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.879.595.000,00	5.822.596.500,00	84,64	(1.056.998.500,00)	(15,36)
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	14.250.000,00	13.420.300,00	94,18	(829.700,00)	(5,82)
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.492.949.000,00	4.491.443.800,00	99,97	(1.505.200,00)	(0,03)
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.536.200.000,00	2.440.420.000,00	96,22	(95.780.000,00)	(3,78)
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.602.600.000,00	1.584.100.000,00	98,85	(18.500.000,00)	(1,15)
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	409.960.000,00	409.960.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	216.500.000,00	216.499.384,00	100,00	(616,00)	(0,00)
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	132.000.000,00	132.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	49.100.000,00	49.100.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	27.800.000,00	27.800.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	164.450.000,00	104.026.000,00	63,26	(60.424.000,00)	(36,74)
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.928.000.000,00	1.895.250.000,00	98,30	(32.750.000,00)	(1,70)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.632.720.000,00	1.467.334.497,00	89,87	(165.385.503,00)	(10,13)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.278.870.000,00	1.205.850.000,00	94,29	(73.020.000,00)	(5,71)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	842.600.000,00	826.540.000,00	97,50	(16.060.000,00)	(2,50)
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	446.400.000,00	446.400.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	54.282.000,00	54.250.000,00	99,94	(32.000,00)	(0,06)
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	59.600.000,00	49.550.000,00	83,14	(10.050.000,00)	(16,86)
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	303.800.000,00	302.601.000,00	99,61	(1.199.000,00)	(0,39)
5.1.02.02.01.0040	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	9.000.000,00	7.967.718,00	88,53	(1.032.282,00)	(11,47)
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	142.540.000,00	72.727.097,00	51,02	(69.812.903,00)	(48,98)
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	116.800.000,00	102.400.000,00	87,67	(14.400.000,00)	(12,33)
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	75.000.000,00	74.537.000,00	99,38	(463.000,00)	(0,62)
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	88.230.000,00	88.000.000,00	99,74	(230.000,00)	(0,26)
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pemeliharaan Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	25.000.000,00	24.500.000,00	99,60	(500.000,00)	(0,40)
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	150.100.000,00	148.408.907,00	98,87	(1.691.093,00)	(1,13)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.116.500.000,00	4.753.630.000,00	92,91	(362.870.000,00)	(7,09)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	177.050.000,00	129.560.890,00	73,18	(47.489.110,00)	(26,82)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	248.350.000,00	143.325.135,00	57,71	(105.024.865,00)	(42,29)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	5.608.160.000,00	5.018.636.975,00	89,49	(589.523.025,00)	(10,51)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.106.750.000,00	1.982.027.000,00	94,08	(124.723.000,00)	(5,92)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kuwat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.356.891.000,00	2.124.947.905,00	90,17	(231.943.095,00)	(9,83)
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	207.136.500,00	69.233.610,00	33,42	(137.902.890,00)	(66,58)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	736.176.000,00	244.929.315,00	33,27	(491.246.685,00)	(66,73)
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	124.000.000,00	123.048.620,00	99,23	(951.380,00)	(0,77)
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	**15.799.576.556,00**	**13.733.795.874,00**	**86,92**	**(2.065.670.682,00)**	**(13,08)**
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.257.725.080,00	2.186.390.976,00	96,84	(71.334.104,00)	(3,16)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.008.602.800,00	11.217.164.898,00	86,23	(1.791.337.902,00)	(13,77)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		BERTAMBAH (BERKURANG)	
			(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	297.842.892,00	177.133.335,00	59,47	(120.709.557,00)	(40,52)
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	235.505.784,00	153.016.665,00	64,97	(82.489.119,00)	(35,03)
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**1.912.103.740,00**	**1.785.010.000,00**	**93,35**	**(127.093.740,00)**	**(6,65)**
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.064.328.740,00	993.260.000,00	93,32	(71.068.740,00)	(6,68)
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	244.750.000,00	195.800.000,00	80,00	(48.950.000,00)	(20,00)
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	119.775.000,00	119.075.000,00	99,37	(700.000,00)	(0,63)
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0122	Belanja Sewa Alat Dapur	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	211.525.000,00	205.200.000,00	97,01	(6.325.000,00)	(2,99)
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0198	Belanja Sewa Very High Frequence Omni Range (VOR)	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0425	Belanja Sewa Peralatan Bantu	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0507	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Air	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	875.000,00	875.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**	**1.988.475.000,00**	**1.519.323.000,00**	**76,41**	**(469.152.000,00)**	**(23,59)**
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	93.350.000,00	93.350.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	157.150.000,00	113.590.000,00	72,28	(43.560.000,00)	(27,72)
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	370.300.000,00	312.400.000,00	84,36	(57.900.000,00)	(15,64)
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	73.000.000,00	69.955.000,00	95,83	(3.045.000,00)	(4,17)
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	18.500.000,00	18.500.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0039	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan II	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.227.700.000,00	863.053.000,00	70,30	(364.647.000,00)	(29,70)
5.1.02.02.05.0060	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	36.225.000,00	36.225.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**	**324.250.000,00**	**297.250.000,00**	**91,67**	**(27.000.000,00)**	**(8,33)**
5.1.02.02.07.0026	Belanja Sewa Alat Musik	269.750.000,00	250.750.000,00	92,96	(19.000.000,00)	(7,04)
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.07.0033	Belanja Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	52.000.000,00	44.000.000,00	84,62	(8.000.000,00)	(15,38)
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**2.821.279.450,00**	**2.653.236.244,00**	**94,04**	**(168.043.206,00)**	**(5,96)**
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilik Pemeliharaan dan Kelayakan Bangunan Gedung	789.664.000,00	749.003.580,00	94,85	(40.660.420,00)	(5,15)
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	31.215.000,00	31.148.820,00	99,79	(66.180,00)	(0,21)
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	178.000.000,00	177.000.250,00	99,44	(999.750,00)	(0,56)
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	333.500.000,00	284.606.109,00	85,34	(48.893.891,00)	(14,66)
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	165.900.000,00	160.955.550,00	97,55	(4.944.450,00)	(2,45)
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.303.950.450,00	1.230.764.540,00	94,39	(73.185.910,00)	(5,61)
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	20.000.000,00	19.807.395,00	99,04	(192.605,00)	(0,96)
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**	**2.572.930.990,00**	**2.558.904.940,00**	**99,45**	**(14.025.050,00)**	**(0,55)**
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	670.000.000,00	665.219.000,00	99,29	(4.781.000,00)	(0,71)
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	171.930.000,00	171.409.800,00	99,70	(520.200,00)	(0,30)
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.616.000.000,00	1.607.276.140,00	99,46	(8.723.860,00)	(0,54)
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**	**2.672.042.000,00**	**2.323.786.079,00**	**86,95**	**(348.255.921,00)**	**(13,05)**
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.453.252.000,00	2.127.396.079,00	86,72	(325.855.921,00)	(13,28)
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	37.500.000,00	14.500.000,00	38,67	(23.000.000,00)	(61,33)
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	181.890.000,00	181.890.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**6.777.444.425,00**	**6.423.281.323,00**	**94,77**	**(354.163.102,00)**	**(5,23)**
5.1.02.03.01	**Belanja Pemeliharaan Tanah**	**228.110.000,00**	**227.432.820,00**	**99,70**	**(677.180,00)**	**(0,30)**
5.1.02.03.01.0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	214.110.000,00	213.432.820,00	99,68	(677.180,00)	(0,32)
5.1.02.03.01.0005	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**5.325.046.425,00**	**4.973.697.653,00**	**93,40**	**(351.348.772,00)**	**(6,60)**
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating	101.410.000,00	93.615.000,00	92,31	(7.795.000,00)	(7,69)
5.1.02.03.02.0024	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.563.996.300,00	3.316.248.838,00	93,05	(247.749.462,00)	(6,95)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	156.000.000,00	136.071.000,00	87,23	(19.929.000,00)	(12,76)
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	713.175.000,00	666.471.725,00	93,45	(46.703.275,00)	(6,55)
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	12.000.000,00	5.360.000,00	44,67	(6.640.000,00)	(55,33)
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	195.420.125,00	192.051.090,00	98,28	(3.369.035,00)	(1,72)
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	48.250.000,00	47.600.000,00	98,65	(650.000,00)	(1,35)
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	71.713.000,00	64.717.000,00	90,24	(6.996.000,00)	(9,76)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
			(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	300.000,00	150.000,00	50,00	(150.000,00)	(50,00)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.400.000,00	10.375.000,00	99,76	(25.000,00)	(0,24)
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemberish	8.500.000,00	8.000.000,00	94,12	(500.000,00)	(5,88)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	40.010.000,00	39.450.000,00	98,60	(560.000,00)	(1,40)
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0126	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	6.200.000,00	6.200.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	39.200.000,00	38.253.000,00	97,58	(947.000,00)	(2,42)
5.1.02.03.02.0435	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Personal	219.540.000,00	219.310.000,00	99,90	(230.000,00)	(0,10)
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	34.500.000,00	34.500.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	24.180.000,00	15.075.000,00	62,34	(9.105.000,00)	(37,66)
5.1.02.03.02.0509	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	9.750.000,00	9.750.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**531.724.000,00**	**530.809.850,00**	**99,83**	**(914.150,00)**	**(0,17)**
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	323.029.250,00	322.365.750,00	99,79	(663.500,00)	(0,21)
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	128.694.750,00	128.644.100,00	99,96	(50.650,00)	(0,04)
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	50.000.000,00	49.800.000,00	99,60	(200.000,00)	(0,40)
5.1.02.03.04	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**684.394.000,00**	**683.171.000,00**	**99,82**	**(1.223.000,00)**	**(0,18)**
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan	181.944.000,00	181.944.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	502.450.000,00	501.227.000,00	99,76	(1.223.000,00)	(0,24)
5.1.02.03.05	**Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**8.170.000,00**	**8.170.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	8.170.000,00	8.170.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**44.144.921.500,00**	**41.155.717.170,00**	**93,23**	**(2.989.204.330,00)**	**(6,77)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**44.144.921.500,00**	**41.155.717.170,00**	**93,23**	**(2.989.204.330,00)**	**(6,77)**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.145.446.000,00	27.546.604.339,00	97,87	(598.841.661,00)	(2,13)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.944.658.500,00	8.390.978.382,00	93,81	(553.680.118,00)	(6,19)
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.879.415.000,00	4.273.083.376,00	72,68	(1.606.331.624,00)	(27,32)
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.175.402.000,00	945.051.073,00	80,40	(230.350.927,00)	(19,60)
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**5.283.095.000,00**	**4.936.170.396,00**	**93,43**	**(346.924.604,00)**	**(6,57)**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**1.720.060.000,00**	**1.412.882.500,00**	**82,14**	**(307.177.500,00)**	**(17,86)**
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	737.200.000,00	647.450.000,00	87,83	(89.750.000,00)	(12,17)
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	982.860.000,00	765.432.500,00	77,88	(217.427.500,00)	(22,12)
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**3.563.035.000,00**	**3.523.287.896,00**	**98,88**	**(39.747.104,00)**	**(1,12)**
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.563.035.000,00	3.523.287.896,00	98,88	(39.747.104,00)	(1,12)
5.1.02.88	**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**17.810.106.700,00**	**17.798.600.601,00**	**99,94**	**(11.506.099,00)**	**(0,06)**
5.1.02.88.88	**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**17.810.106.700,00**	**17.798.600.601,00**	**99,94**	**(11.506.099,00)**	**(0,06)**
5.1.02.88.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.810.106.700,00	17.798.600.601,00	99,94	(11.506.099,00)	(0,06)
5.1.02.89	**Belanja Barang dan Jasa BOSP**	**10.481.581.781,00**	**10.430.682.359,00**	**99,51**	**(50.899.422,00)**	**(0,49)**
5.1.02.89.01	**Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS**	**9.804.983.781,00**	**9.754.084.359,00**	**99,48**	**(50.899.422,00)**	**(0,52)**
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	8.856.493.631,00	8.833.794.459,00	99,74	(22.699.172,00)	(0,26)
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	948.490.150,00	920.289.900,00	97,03	(28.200.250,00)	(2,97)
5.1.02.89.02	**Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD**	**528.095.000,00**	**528.095.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	528.095.000,00	528.095.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.89.03	**Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan**	**148.503.000,00**	**148.503.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	148.503.000,00	148.503.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.90	**Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas**	**12.746.241.500,00**	**12.614.091.934,93**	**98,96**	**(132.149.565,07)**	**(1,04)**
5.1.02.90.01	**Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas**	**12.746.241.500,00**	**12.614.091.934,93**	**98,96**	**(132.149.565,07)**	**(1,04)**
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	12.746.241.500,00	12.614.091.934,93	98,96	(132.149.565,07)	(1,04)
5.1.02.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**40.361.543.686,00**	**39.060.562.784,82**	**96,78**	**(1.300.980.901,18)**	**(3,22)**
5.1.02.99.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**40.361.543.686,00**	**39.060.562.784,82**	**96,78**	**(1.300.980.901,18)**	**(3,22)**
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	40.361.543.686,00	39.060.562.784,82	96,78	(1.300.980.901,18)	(3,22)
5.1.03	**Belanja Bunga**	**3.720.929.625,00**	**2.534.971.060,00**	**68,13**	**(1.185.958.565,00)**	**(31,87)**
5.1.03.04	**Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)**	**3.720.929.625,00**	**2.534.971.060,00**	**68,13**	**(1.185.958.565,00)**	**(31,87)**
5.1.03.04.02	**Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-RUMN-Jangka Menengah**	**3.720.929.625,00**	**2.534.971.060,00**	**68,13**	**(1.185.958.565,00)**	**(31,87)**
5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-RUMN-Jangka Menengah	3.720.929.625,00	2.534.971.060,00	68,13	(1.185.958.565,00)	(31,87)
5.1.05	**Belanja Hibah**	**40.336.230.502,00**	**40.232.656.643,00**	**99,74**	**(103.573.859,00)**	**(0,26)**
5.1.05.01	**Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat**	**26.242.989.943,00**	**26.235.378.284,00**	**99,97**	**(7.602.659,00)**	**(0,03)**
5.1.05.01.01	**Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat**	**25.519.241.881,00**	**25.519.241.857,00**	**100,00**	**(824,00)**	**(0,00)**
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	25.519.241.881,00	25.519.241.857,00	100,00	(824,00)	(0,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
			(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	723.739.062,00	716.137.227,00	98,95	(7.601.835,00)	(1,05)
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	723.739.062,00	716.137.227,00	98,95	(7.601.835,00)	(1,05)
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.275.211.000,00	7.182.232.800,00	98,71	(93.978.200,00)	(1,29)
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.742.556.000,00	3.691.002.800,00	98,62	(51.553.200,00)	(1,38)
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan	3.742.556.000,00	3.691.002.800,00	98,62	(51.553.200,00)	(1,38)
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.978.655.000,00	2.936.230.000,00	98,58	(42.425.000,00)	(1,42)
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan	2.978.655.000,00	2.936.230.000,00	98,58	(42.425.000,00)	(1,42)
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	375.000.000,00	375.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	375.000.000,00	375.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	165.000.000,00	165.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	145.000.000,00	145.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.05.05.06.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	3.688.720.000,00	3.688.252.000,00	99,99	(468.000,00)	(0,01)
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.688.720.000,00	3.688.252.000,00	99,99	(468.000,00)	(0,01)
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.688.720.000,00	3.688.252.000,00	99,99	(468.000,00)	(0,01)
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	667.578.559,00	667.578.559,00	100,00	0,00	0,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	667.578.559,00	667.578.559,00	100,00	0,00	0,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	667.578.559,00	667.578.559,00	100,00	0,00	0,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	2.460.740.000,00	2.459.215.000,00	99,94	(1.525.000,00)	(0,06)
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.460.740.000,00	2.459.215.000,00	99,94	(1.525.000,00)	(0,06)
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.460.740.000,00	2.459.215.000,00	99,94	(1.525.000,00)	(0,06)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	45.000.000,00	0,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	45.000.000,00	0,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	45.000.000,00	0,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	45.000.000,00	0,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)
5.2	BELANJA MODAL	163.892.744.934,00	155.348.663.663,00	94,79	(8.544.081.271,00)	(5,50)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.805.825.852,00	20.116.516.662,00	96,69	(689.309.190,00)	(3,31)
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	109.597.000,00	102.237.000,00	93,28	(7.360.000,00)	(6,72)
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Berat	109.597.000,00	102.237.000,00	93,28	(7.360.000,00)	(6,72)
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	43.400.000,00	39.940.000,00	92,03	(3.460.000,00)	(7,97)
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	33.947.000,00	30.047.000,00	88,51	(3.900.000,00)	(11,49)
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Pertengkapan Kebakaran Hutan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03.0013	Belanja Modal Peralatan Selam	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03.0010	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.112.282.000,00	5.069.260.000,00	99,16	(43.022.000,00)	(0,84)
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.464.181.000,00	4.424.260.000,00	99,11	(39.921.000,00)	(0,89)
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	629.550.000,00	601.560.000,00	95,55	(27.990.000,00)	(4,45)
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.000.000,00	36.600.000,00	91,50	(3.400.000,00)	(8,50)
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	380.000.000,00	376.600.000,00	99,11	(3.400.000,00)	(0,89)
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.327.106.000,00	2.322.000.000,00	99,78	(5.106.000,00)	(0,22)
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.087.525.000,00	1.087.500.000,00	100,00	(25.000,00)	(0,00)
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	648.101.000,00	645.000.000,00	99,52	(3.101.000,00)	(0,48)
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	648.101.000,00	645.000.000,00	99,52	(3.101.000,00)	(0,48)
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	58.788.800,00	58.216.740,00	99,03	(572.060,00)	(0,97)
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	30.470.000,00	29.900.000,00	98,13	(570.000,00)	(1,87)
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	29.900.000,00	29.900.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.03.01.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus	570.000,00	0,00	0,00	(570.000,00)	(100,00)
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	2.382.300,00	2.382.300,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.03.02.0001	Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.03.02.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	200.100,00	200.100,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.03.02.0010	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	2.132.200,00	2.132.200,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.03.02.0011	Belanja Modal Peralatan Ukur, Cap, dan Feeling	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	25.936.500,00	25.934.440,00	99,99	(2.060,00)	(0,01)
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	12.250.000,00	12.250.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	2.580.000,00	2.580.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	11.106.500,00	11.104.440,00	99,98	(2.060,00)	(0,02)
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	339.417.500,00	338.554.200,00	99,75	(863.300,00)	(0,25)
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	339.417.500,00	338.554.200,00	99,75	(863.300,00)	(0,25)
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	729.192.500,00	728.572.200,00	99,73	(620.300,00)	(0,27)
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	107.025.000,00	106.782.000,00	99,77	(243.000,00)	(0,23)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.858.542.348,00	3.725.757.338,00	96,56	(132.785.010,00)	(3,44)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	534.518.000,00	527.557.160,00	98,70	(6.960.840,00)	(1,30)
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	110.399.000,00	110.104.780,00	99,73	(294.220,00)	(0,27)
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	424.119.000,00	417.452.380,00	98,43	(6.666.620,00)	(1,57)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.323.424.348,00	3.198.639.178,00	96,13	(124.785.170,00)	(3,87)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		BERTAMBAH (BERKURANG)	
			(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.412.055.000,00	2.363.165.713,00	97,97	(48.893.287,00)	(2,03)
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	309.575.860,00	296.402.963,00	95,62	(13.172.897,00)	(4,38)
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	117.882.050,00	117.639.561,00	99,79	(242.489,00)	(0,21)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	327.787.438,00	265.712.561,00	81,01	(62.074.877,00)	(18,97)
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	56.220.000,00	56.218.380,00	100,00	(1.620,00)	(0,00)
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**	**100.600.000,00**	**99.561.000,00**	**98,97**	**(1.039.000,00)**	**(1,03)**
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	44.100.000,00	43.520.000,00	98,68	(580.000,00)	(1,32)
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	15.000.000,00	14.541.000,00	96,94	(459.000,00)	(3,06)
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**	**326.726.000,00**	**318.881.500,00**	**97,60**	**(7.844.500,00)**	**(2,40)**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**	**114.536.000,00**	**107.250.000,00**	**93,64**	**(7.286.000,00)**	**(6,36)**
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	18.400.000,00	15.550.000,00	84,51	(2.850.000,00)	(15,49)
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	95.636.000,00	91.200.000,00	95,36	(4.436.000,00)	(4,64)
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02	**Belanja Modal Alat Komunikasi**	**38.440.000,00**	**38.440.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	28.540.000,00	28.540.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02.0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.06.03	**Belanja Modal Peralatan Pemancar**	**173.750.000,00**	**173.191.500,00**	**99,68**	**(558.500,00)**	**(0,32)**
5.2.02.06.03.0004	Belanja Modal Peralatan Pemancar UHF	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	170.000.000,00	169.441.500,00	99,67	(558.500,00)	(0,33)
5.2.02.07	**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**	**1.986.680.000,00**	**1.979.873.500,00**	**99,66**	**(6.806.500,00)**	**(0,34)**
5.2.02.07.01	**Belanja Modal Alat Kedokteran**	**1.917.350.000,00**	**1.910.543.500,00**	**99,65**	**(6.806.500,00)**	**(0,35)**
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	69.498.000,00	63.120.000,00	90,82	(6.378.000,00)	(9,18)
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	1.432.002.000,00	1.431.577.000,00	99,97	(425.000,00)	(0,03)
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	12.625.000,00	12.625.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	400.600.000,00	400.596.500,00	100,00	(3.500,00)	(0,00)
5.2.02.07.02	**Belanja Modal Alat Kesehatan Umum**	**69.330.000,00**	**69.330.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	69.330.000,00	69.330.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.08	**Belanja Modal Alat Laboratorium**	**228.935.000,00**	**228.220.000,00**	**99,69**	**(715.000,00)**	**(0,31)**
5.2.02.08.01	**Belanja Modal Unit Alat Laboratorium**	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03	**Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah**	**191.460.000,00**	**190.785.000,00**	**99,65**	**(675.000,00)**	**(0,35)**
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi IPA Menengah	170.775.000,00	170.100.000,00	99,60	(675.000,00)	(0,40)
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	20.685.000,00	20.685.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.08.07	**Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup**	**32.375.000,00**	**32.335.000,00**	**99,88**	**(40.000,00)**	**(0,12)**
5.2.02.08.07.0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	32.375.000,00	32.335.000,00	99,88	(40.000,00)	(0,12)
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**	**1.949.018.797,00**	**1.916.655.802,00**	**98,34**	**(32.362.995,00)**	**(1,66)**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**	**1.358.295.000,00**	**1.333.223.305,00**	**98,15**	**(25.071.695,00)**	**(1,85)**
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.302.829.000,00	1.277.981.305,00	98,09	(24.847.695,00)	(1,91)
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	55.466.000,00	55.242.000,00	99,60	(224.000,00)	(0,40)
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**	**599.723.797,00**	**583.432.497,00**	**98,77**	**(7.291.300,00)**	**(1,23)**
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	449.912.500,00	445.760.000,00	99,08	(4.152.500,00)	(0,92)
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	17.449.197,00	17.449.197,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	106.362.100,00	103.223.300,00	97,05	(3.138.800,00)	(2,95)
5.2.02.11	**Belanja Modal Alat Eksplorasi**	**325.200.000,00**	**324.320.910,00**	**99,73**	**(879.090,00)**	**(0,27)**
5.2.02.11.01	**Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi**	**325.200.000,00**	**324.320.910,00**	**99,73**	**(879.090,00)**	**(0,27)**
5.2.02.11.01.0002	Belanja Modal Ukur/Instrument	325.200.000,00	324.320.910,00	99,73	(879.090,00)	(0,27)
5.2.02.13	**Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian**	**285.000.000,00**	**283.886.756,00**	**99,61**	**(1.113.244,00)**	**(0,39)**
5.2.02.13.01	**Belanja Modal Sumur**	**285.000.000,00**	**283.886.756,00**	**99,61**	**(1.113.244,00)**	**(0,39)**
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	285.000.000,00	283.886.756,00	99,61	(1.113.244,00)	(0,39)
5.2.02.15	**Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja**	**5.829.000,00**	**5.828.857,00**	**100,00**	**(143,00)**	**(0,00)**
5.2.02.15.02	**Belanja Modal Alat Pelindung**	**5.829.000,00**	**5.828.857,00**	**100,00**	**(143,00)**	**(0,00)**
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	3.029.000,00	3.028.857,00	100,00	(143,00)	(0,00)
5.2.02.18	**Belanja Modal Rambu-Rambu**	**265.206.400,00**	**264.705.137,00**	**99,81**	**(501.263,00)**	**(0,19)**
5.2.02.18.01	**Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat**	**265.206.400,00**	**264.705.137,00**	**99,81**	**(501.263,00)**	**(0,19)**
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	265.206.400,00	264.705.137,00	99,81	(501.263,00)	(0,19)
5.2.02.19	**Belanja Modal Peralatan Olahraga**	**59.845.000,00**	**58.934.000,00**	**98,48**	**(911.000,00)**	**(1,52)**
5.2.02.19.01	**Belanja Modal Peralatan Olahraga**	**59.845.000,00**	**58.934.000,00**	**98,48**	**(911.000,00)**	**(1,52)**
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	59.845.000,00	58.934.000,00	98,48	(911.000,00)	(1,52)
5.2.02.88	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS**	**3.399.372.719,00**	**3.345.182.969,00**	**98,41**	**(54.189.750,00)**	**(1,59)**
5.2.02.88.88	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS**	**3.399.372.719,00**	**3.345.182.969,00**	**98,41**	**(54.189.750,00)**	**(1,59)**
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.399.372.719,00	3.345.182.969,00	98,41	(54.189.750,00)	(1,59)
5.2.02.99	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**2.495.385.288,00**	**2.096.001.953,00**	**84,00**	**(399.383.335,00)**	**(16,00)**
5.2.02.99.99	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**2.495.385.288,00**	**2.096.001.953,00**	**84,00**	**(399.383.335,00)**	**(16,00)**
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.495.385.288,00	2.096.001.953,00	84,00	(399.383.335,00)	(16,00)
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**96.479.225.145,00**	**88.928.047.259,00**	**92,17**	**(7.551.177.886,00)**	**(7,83)**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**	**95.930.025.145,00**	**88.393.377.259,00**	**92,14**	**(7.536.647.886,00)**	**(7,86)**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**	**95.930.025.145,00**	**88.393.377.259,00**	**92,14**	**(7.536.647.886,00)**	**(7,86)**
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3.164.389.545,00	3.152.766.386,00	99,63	(11.623.159,00)	(0,37)
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	26.420.000,00	26.318.242,00	99,61	(101.758,00)	(0,39)
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	9.741.873.000,00	9.706.646.491,00	99,64	(35.226.509,00)	(0,36)
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Perdokoan/Koperasi/Pasar	69.017.565.000,00	61.587.919.546,00	89,24	(7.429.645.452,00)	(10,76)
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	10.283.774.000,00	10.236.938.972,00	99,54	(46.835.028,00)	(0,46)
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	940.750.000,00	936.658.272,00	99,57	(4.091.728,00)	(0,43)
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	122.685.000,00	122.441.640,00	99,80	(243.360,00)	(0,20)
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	299.953.000,00	299.478.000,00	99,84	(475.000,00)	(0,16)
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.312.615.600,00	2.304.209.708,00	99,64	(8.405.892,00)	(0,36)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
			(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
5.2.03.04	**Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti**	169.200.000,00	168.670.000,00	99,69	(530.000,00)	(0,31)
5.2.03.04.01	**Belanja Modal Tugu/Tanda Batas**	169.200.000,00	168.670.000,00	99,69	(530.000,00)	(0,31)
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	169.200.000,00	168.670.000,00	99,69	(530.000,00)	(0,31)
5.2.03.99	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	380.000.000,00	366.000.000,00	96,32	(14.000.000,00)	(3,68)
5.2.03.99.99	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	380.000.000,00	366.000.000,00	96,32	(14.000.000,00)	(3,68)
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	380.000.000,00	366.000.000,00	96,32	(14.000.000,00)	(3,68)
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	41.635.055.304,00	41.372.206.332,00	99,37	(262.848.972,00)	(0,64)
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	37.660.446.454,00	36.823.944.502,00	99,36	(236.501.952,00)	(0,64)
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**	34.641.246.454,00	34.414.026.502,00	99,34	(227.219.952,00)	(0,66)
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	28.544.051.200,00	28.335.157.913,00	99,27	(208.893.287,00)	(0,73)
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	5.472.195.254,00	5.459.015.818,00	99,76	(13.179.436,00)	(0,24)
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	625.000.000,00	619.852.771,00	99,18	(5.147.229,00)	(0,82)
5.2.04.01.02	**Belanja Modal Jembatan**	2.419.200.000,00	2.409.918.000,00	99,62	(9.282.000,00)	(0,38)
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.419.200.000,00	2.409.918.000,00	99,62	(9.282.000,00)	(0,38)
5.2.04.02	**Belanja Modal Bangunan Air**	3.104.608.850,00	3.093.261.830,00	99,63	(11.347.020,00)	(0,37)
5.2.04.02.01	**Belanja Modal Bangunan Air Irigasi**	1.580.273.550,00	1.575.571.050,00	99,70	(4.702.500,00)	(0,30)
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.552.607.550,00	1.548.030.050,00	99,71	(4.577.500,00)	(0,29)
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	27.666.000,00	27.541.000,00	99,55	(125.000,00)	(0,45)
5.2.04.02.04	**Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam**	1.123.460.300,00	1.120.125.380,00	99,70	(3.334.920,00)	(0,30)
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	105.875.000,00	105.215.380,00	99,38	(659.620,00)	(0,62)
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	818.025.300,00	815.895.000,00	99,74	(2.130.300,00)	(0,26)
5.2.04.02.04.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	199.560.000,00	199.015.000,00	99,73	(545.000,00)	(0,27)
5.2.04.02.05	**Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah**	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.04.02.05.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.04.02.07	**Belanja Modal Bangunan Air Kotor**	394.875.000,00	391.565.400,00	99,16	(3.309.600,00)	(0,84)
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	394.875.000,00	391.565.400,00	99,16	(3.309.600,00)	(0,84)
5.2.04.03	**Belanja Modal Instalasi**	1.470.000.000,00	1.455.000.000,00	98,98	(15.000.000,00)	(1,02)
5.2.04.03.10	**Belanja Modal Instalasi Lain**	1.470.000.000,00	1.455.000.000,00	98,98	(15.000.000,00)	(1,02)
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	1.470.000.000,00	1.455.000.000,00	98,98	(15.000.000,00)	(1,02)
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	4.774.708.633,00	4.734.413.410,00	99,16	(40.295.223,00)	(0,84)
5.2.05.01	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan**	159.455.833,00	130.575.510,00	81,89	(28.880.323,00)	(18,11)
5.2.05.01.01	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak**	140.453.000,00	114.549.000,00	81,56	(25.904.000,00)	(18,44)
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	11.136.000,00	11.136.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	3.858.000,00	3.858.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	65.076.500,00	60.983.000,00	93,70	(5.093.500,00)	(7,71)
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	43.694.000,00	22.896.000,00	52,40	(20.798.000,00)	(47,60)
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	7.674.000,00	7.674.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	7.540.000,00	7.540.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	12.500,00	0,00	0,00	(12.500,00)	(100,00)
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	462.000,00	462.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.05.01.02	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro**	19.002.833,00	16.026.510,00	84,34	(2.976.323,00)	(15,66)
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	19.002.833,00	16.026.510,00	84,34	(2.976.323,00)	(15,66)
5.2.05.02	**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.05.02.01	**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian**	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.05.88	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS**	4.610.252.800,00	4.598.837.900,00	99,75	(11.414.900,00)	(0,25)
5.2.05.88.88	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS**	4.610.252.800,00	4.598.837.900,00	99,75	(11.414.900,00)	(0,25)
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.610.252.800,00	4.598.837.900,00	99,75	(11.414.900,00)	(0,25)
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**	197.930.000,00	197.480.000,00	99,77	(450.000,00)	(0,23)
5.2.06.01	**Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud**	197.930.000,00	197.480.000,00	99,77	(450.000,00)	(0,23)
5.2.06.01.01	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**	197.930.000,00	197.480.000,00	99,77	(450.000,00)	(0,23)
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	197.930.000,00	197.480.000,00	99,77	(450.000,00)	(0,23)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.150.745.082,00	1.961.201.439,00	91,19	(189.543.643,00)	(8,81)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.150.745.082,00	1.961.201.439,00	91,19	(189.543.643,00)	(8,81)
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.150.745.082,00	1.961.201.439,00	91,19	(189.543.643,00)	(8,81)
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.150.745.082,00	1.961.201.439,00	91,19	(189.543.643,00)	(8,81)
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2.150.745.082,00	1.961.201.439,00	91,19	(189.543.643,00)	(8,81)
5.4	BELANJA TRANSFER	177.086.570.400,00	176.408.899.600,00	99,62	(677.670.800,00)	(0,38)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.370.534.400,00	1.692.863.600,00	71,41	(677.670.800,00)	(28,59)
5.4.01.01	**Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa**	2.037.512.700,00	1.473.076.700,00	72,30	(564.436.000,00)	(27,70)
5.4.01.01.03	**Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa**	2.037.512.700,00	1.473.076.700,00	72,30	(564.436.000,00)	(27,70)
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.037.512.700,00	1.473.076.700,00	72,30	(564.436.000,00)	(27,70)
5.4.01.02	**Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa**	333.021.700,00	219.786.900,00	66,00	(113.234.800,00)	(34,00)
5.4.01.02.01	**Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa**	333.021.700,00	219.786.900,00	66,00	(113.234.800,00)	(34,00)
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	333.021.700,00	219.786.900,00	66,00	(113.234.800,00)	(34,00)
5.4.02	**Belanja Bantuan Keuangan**	174.716.036.000,00	174.716.036.000,00	100,00	0,00	0,00
5.4.02.05	**Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa**	174.716.036.000,00	174.716.036.000,00	100,00	0,00	0,00
5.4.02.05.02	**Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa**	174.716.036.000,00	174.716.036.000,00	100,00	0,00	0,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	118.449.735.000,00	118.449.735.000,00	100,00	0,00	0,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	56.266.301.000,00	56.266.301.000,00	100,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
			(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7

4

REKAP PEMBAYARAN BUNGA
TAHUN ANGARAN 2024

NO	TANGGAL	NOMOR SPZD	KODE REKENING	URAIAN	BUNGA			
					BUNGA	BIAYA ADMINISTRASI BANK	DENDA	JUMLAH
1	1/25/2024	SPZD 12.01/04.0/0000025/5/5.02	5.1.03.04.02.0001	Pembayaran Bunga Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN Jangka Menengah Bulan Januari 2024	254.714.360,00	2.500,00		254.717.260,00
2	21-Feb-24	SPZD 18.04/04.0/0000198/5/5.02	5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMN - Jangka Menengah Bulan Februari TA. 2024	247.436.826,00	2.900,00		247.439.726,00
3	19-Mar-24	SPZD 18.04/04.0/0000335/5/5.02	5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Menengah Bulan Maret TA 2024	224.865.124,00	2.900,00		224.868.024,00
4	22-Apr-24	SPZD 18.04/04.0/0001294/5/5.02	5.1.03.04.02.0001	Belanja Bantuan Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah Bulan April TA 2024	232.881.717,00	2.900,00		232.884.617,00
5	20-May-24	SPZD 18.04/04.0/0001908/5/5.02	5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Menengah Bulan Mei TA 2024	219.326.610,00	2.900,00		219.329.510,00
6	20-Jun-24	SPZD 18.04/04.0/0002168/5/5.02	5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah Bulan Juni TA 2024	219.326.608,00	2.900,00		219.329.508,00
7	22-Jul-24	SPZD 18.04/04.0/0002370/5/5.02	5.1.03.04.02.0001	Pembayaran Pinjaman Dari Lembaga Bukan Bank (LKBB)-BUMN Jangka Menengah Bulan Juli TA 2024	204.241.021,00	2.900,00		204.243.021,00
8	30-Aug-24	SPZD 18.04/04.0/0003974/5/5.02	5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN Jangka Menengah Bulan Agustus TA 2024	203.771.501,00	2.900,00		203.774.401,00
9	30-Sep-24	SPZD 18.04/04.0/0004040/5/5.02	5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN Jangka Menengah Bulan September TA 2024	196.493.947,00	2.900,00		196.496.847,00
10	23-Oct-24	SPZD 18.04/04.0/0004614/5/5.02	5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN Jangka Menengah Bulan Oktober TA 2024	183.112.638,00	2.500,00		183.115.138,00
11	19-Nov-24	SPZD 18.04/04.0/0005095/5/5.02	5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN Jangka Menengah Bulan November TA 2024	181.936.638,00	2.900,00		181.939.538,00
12	20-Dec-24	SPZD 18.04/04.0/0005748/5/5.02	5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN Jangka Menengah Bulan Desember TA 2024	169.021.649,00	2.900,00		169.024.549,00
				Sub Jumlah	2.534.936.248,00	34.800,00	-	2.534.971.360,00

REKAP BELANJA HIBAH PER PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	27.412.559.502,00	27.386.356.843,00
2	DINAS PERPUSTAKAAN	100.000.000,00	100.000.000,00
3	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	105.000.000,00	105.000.000,00
4	DINAS KESEHATAN	230.000.000,00	230.000.000,00
5	DINAS SOSIAL	140.000.000,00	140.000.000,00
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	360.000.000,00	360.000.000,00
7	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	225.000.000,00	225.000.000,00
8	BADAN KEPEGAWAIAN SDM	65.000.000,00	65.000.000,00
9	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	40.000.000,00	40.000.000,00
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	125.000.000,00	125.000.000,00
11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8.483.671.000,00	8.439.699.800,00
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB PP DAN PA	340.000.000,00	330.000.000,00
13	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1.190.000.000,00	1.190.000.000,00
14	SEKRETARIAT DAERAH	1.510.000.000,00	1.486.600.000,00
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000,00	10.000.000,00
	JUMLAH	40.336.230.502,00	40.232.656.643,00

REKAP BELANJA HIBAH PER KODE REKENING
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
A	5.1.05	**Belanja Hibah**	**40.336.230.502,00**	**40.232.656.643,00**
I	5.1.05.01	**Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat**	**26.247.980.943,00**	**26.235.379.254,00**
	5.1.05.01.01	**Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat**	**25.519.241.881,00**	**25.519.241.057,00**
	5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	25.519.241.881,00	25.519.241.057,00
	5.1.05.01.02	**Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat**	**723.739.062,00**	**716.137.227,00**
	5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	723.739.062,00	716.137.227,00
II	5.1.05.05	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**7.276.211.000,00**	**7.182.332.000,00**
	5.1.05.05.01	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**3.742.556.000,00**	**3.691.002.000,00**
	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.742.556.000,00	3.691.002.000,00
	5.1.05.05.02	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	**2.978.655.000,00**	**2.936.230.000,00**
	5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.978.655.000,00	2.936.230.000,00
	5.1.05.05.03	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**375.000.000,00**	**375.000.000,00**
	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	375.000.000,00	375.000.000,00
	5.1.05.05.04	**Belanja Hibah kepada Koperasi**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
	5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	15.000.000,00	15.000.000,00
	5.1.05.05.06	**Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**165.000.000,00**	**165.000.000,00**
	5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	145.000.000,00	145.000.000,00
	5.1.05.05.06.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.000.000,00	20.000.000,00
III	5.1.05.06	**Belanja Hibah Dana BOS**	**3.688.720.000,00**	**3.688.252.000,00**
	5.1.05.06.02	**Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta**	**3.688.720.000,00**	**3.688.252.000,00**
	5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.688.720.000,00	3.688.252.000,00
IV	5.1.05.07	**Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**	**667.578.559,00**	**667.578.559,00**
	5.1.05.07.01	**Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**	**667.578.559,00**	**667.578.559,00**
	5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	667.578.559,00	667.578.559,00
V	5.1.05.08	**Belanja Hibah Dana BOSP**	**2.460.740.000,00**	**2.459.215.000,00**
	5.1.05.08.02	**Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD**	**2.460.740.000,00**	**2.459.215.000,00**
	5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.460.740.000,00	2.459.215.000,00

RINCIAN BELANJA HIBAH PER PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

	5.1.05	BELANJA HIBAH		
I	5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	26.247.980.943,00	26.235.379.254,00
	5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	25.519.241.881,00	25.519.241.057,00
	5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	25.519.241.881,00	25.519.241.057,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
A	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		**25.519.241.881,00**	**25.519.241.057,00**
1	18.04/04.0/000017/LS/8.01.0.00.0 00.26.0000/M/4/2024	HIBAH UANG KEPADA PEMERINTAH PUSAT - KODIM 0422/LAMPUNG BARAT BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2024	200.000.000,00	200.000.000,00
2	18.04/04.0/000026/LS/8.01.0.00.0 00.26.0000/M/4/2024	HIBAH UANG KEPADA PEMERINTAH PUSAT - KEPOLISIAN RESOR LAMPUNG BARAT BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2024	350.000.000,00	350.000.000,00
3	18.04/04.0/000043/LS/8.01.0.00.0 00.26.0000/M/5/2024	BELANJA HIBAH UANG KEPADA PEMERINTAH PUSAT-HIBAH PEMASANGAN PAVING BLOCK MAN 1 LAMPUNG BARAT BULAN MEI TAHUN ANGGARAN 2024	50.000.000,00	50.000.000,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
4	18.04/04.0/000043/LS/8.01.0.00.0 .00.26.0000/M/5/2024	BELANJA HIBAH UANG KEPADA PEMERINTAH PUSAT- HIBAH POLRES LAMPUNG BARAT UNTUK KEGIATAN OPERASI MANTAP PRAJA KRAKATAU 2024 KEPOLISIAN RESOR LAMPUNG BARAT BULAN MEI TAHUN 2024	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
5	18.04/04.0/000044/LS/8.01.0.00.0 .00.26.0000/M/5/2024	BELANJA HIBAH UANG KEPADA PEMERINTAH PUSAT- HIBAH POLRES LAMPUNG BARAT UNTUK KEPERLUAN KEBUTUHAN ANGGARAN SERAGAM POCIL KEPOLISIAN RESOR LAMPUNG BARAT BULAN MEI TAHUN 2024	30.000.000,00	30.000.000,00
6	18.04/04.0/000045/LS/8.01.0.00.0 .00.26.0000/M/5/2024	BELANJA HIBAH UANG KEPADA PEMERINTAH PUSAT- HIBAH KODIM 0422/ LAMPUNG BARAT UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL PAM PILKADA KODIM 0422 LAMPUNG BARAT BULAN MEI TAHUN ANGGARAN 2024	700.000.000,00	700.000.000,00
7	18.04/04.0/000067/LS/8.01.0.00.0 .00.26.0000/M/7/2024	Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat - Hibah Kepolisian Daerah Lampung Anggaran Bulan Juli Tahun 2024	300.000.000,00	300.000.000,00
8	18.04/04.0/000066/LS/8.01.0.00.0 .00.26.0000/M/7/2024	Hibah Uang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Barat Tahap II (Dua) (40%) untuk keperluan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Bulan Juli Tahun 2024	13.441.584.157,00	5.395.143.107,00
10	18.04/04.0/000071/LS/8.01.0.00.0 .00.26.0000/M/8/2024	Hibah Uang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Barat Tahap II (60%) untuk Keperluan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Serentak Bulan Agustus Tahun 2024		8.046.421.050,00
9	18.04/04.0/000068/LS/8.01.0.00.0 .00.26.0000/M/7/2024	Hibah Uang kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung Barat Tahap II (Dua) (40%) untuk Keperluan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Bulan Juli Tahun 2024	8.388.519.900,00	4.180.839.800,00
11	18.04/04.0/000072/LS/8.01.0.00.0 .00.26.0000/M/8/2024	Hibah Uang kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung Barat Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024 untuk Keperluan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Bulan Agustus Tahun 2024)		4.198.681.100,00
12	18.04/04.0/000097/A/S/8.01.0.00.0 .00.26.0000/PR/10/2021	HIBAH UANG KEPADA PEMERINTAH PUSAT - POLRES LAMPUNG BARAT UNTUK PERMOHONAN DUKUNGAN ANGGARAN PENGADAAN PERALATAN RUANG RUPATAMA POLRES LAMPUNG BARAT BULAN OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2024	259.157.824,00	259.157.000,00
		JUMLAH	25.519.241.881,00	25.519.241.057,00

	5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	723.739.062,00	716.137.227,00
	5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	723.739.062,00	716.137.227,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
A	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		683.739.062,00	679.537.227,00
1	18.04/04.0/000033/LS/8.01.0.00.0 .00.26.0000/M/4/2024	Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat - Pengadilan Agama Krui di Liwa Bulan April Tahun Anggaran 2024	28.977.250,00	28.970.000,00
2	18.04/04.0/000064/LS/8.01.0.00.0 .00.26.0000/M/7/2024	Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat (Kejaksaan Negeri Liwa) Bulan Juli Tahun Anggaran 2024	177.464.000,00	176.786.370,00
3	18.04/04.0/000064/LS/8.01.0.00.0 .00.26.0000/M/8/2024	Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat - Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat (Polres Lampung Barat) Pengadaan Alat Pendingin (AC), Portable Sound System, Kursi Rapat, Kursi 1 Biro, Meja Rapat, Laptop, Komputer PC All in one dan Televisi Bulan Agustus Tahun Anggaran 2024	124.999.000,00	124.331.100,00
4	18.04/04.0/000101/A/S/8.01.0.00.0 .00.26.0000/PR/11/2024	Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat - Belanja Hibah Barang Kepada Kejaksaan Negeri Liwa Sarana Perlengkapan Sistem Layanan SIMODEL KEMBAR dan Pelayanan Umum Kejari Liwa Bulan November Tahun Anggaran 2024	352.308.812,00	167.687.957,00
5	18.04/04.0/000102/LS/8.01.0.00.0 .00.26.0000/PR/11/2024	Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat - Belanja Hibah Barang Kepada Kejaksaan Negeri Liwa Sarana Perlengkapan Sistem Layanan SIMODEL KEMBAR dan Pelayanan Umum Kejari LiwaBulan November Tahun Anggaran 2024		181.761.790,00
B	SEKRETARIAT DAERAH		40.000.000,00	36.600.000,00
1	18.04/04.0/000108/LS/4.01.0.00.0 .00.26.0000/PR/11/2024	Belanja Hibah Kendaraan Bermotor Beroda Dua 150 CC TA. 2024, Kejaksaan Negeri Liwa	40.000.000	36.600.000
		JUMLAH	723.739.062,00	716.137.227,00

II	5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.276.211.000,00	7.182.232.800,00
	5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.742.556.000,00	3.691.002.800,00
	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.742.556.000,00	3.691.002.800,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
A	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		1.557.556.000,00	1.516.002.800,00
1		BOP Kesetaraan PKBM BUAY NYERUPA	185.210.000,00	180.092.000,00
2		BOP Kesetaraan PKBM BUNGA TANJUNG	312.030.000,00	302.320.000,00
3		BOP Kesetaraan PKBM HARAPAN BANGSA	32.900.000,00	26.950.000,00
4		BOP Kesetaraan PKBM MAJU BERSAMA	163.410.000,00	149.160.000,00
5		BOP Kesetaraan PKBM INSAN MANDIRI	121.970.000,00	118.312.000,00
6		BOP Kesetaraan PKBM KARYA MAJU	20.910.000,00	20.910.000,00
7		BOP Kesetaraan PKBM ARRIZQI BINA BERSAMA	47.550.000,00	47.550.000,00
8		BOP Kesetaraan PONPES AL- HASYIMIYAH	51.970.000,00	50.150.000,00
9		BOP Kesetaraan PKBM OASE	12.740.000,00	12.740.000,00
10		BOP Kesetaraan PKBM BUMI JAWA	5.400.000,00	5.350.800,00
11	No.18.04/04.0/000013/A/S/1.01.2.2	Operasional Kepaksian Belunguh	20.000.000,00	20.000.000,00
12	No.18.04/04.0/000005/LS/1.01.2.2	Operasional Kepaksian Pemong	20.000.000,00	20.000.000,00
13	No.18.04/04.0/000016/LS/1.01.2.2	Operasional Kepaksian Bejalan Di Way	20.000.000,00	20.000.000,00
14		Operasional Kepaksian Nyerupa	20.000.000,00	20.000.000,00
15	No.18.04/04.0/000024/LS/1.01.2.2	Operasional Marga Liwa	20.000.000,00	20.000.000,00
16	No.18.04/04.0/000012/LS/1.01.2.2	Anjau Silau Kepaksian Belunguh	25.000.000,00	25.000.000,00
17	No.18.04/04.0/000011/A/S/1.01.2.2	Anjau Silau Kepaksian Pemong	150.000.000,00	150.000.000,00
18	No.18.04/04.0/000015/LS/1.01.2.2	Anjau Silau Kepaksian Bejalan Di Way	25.000.000,00	25.000.000,00
19		Anjau Silau Kepaksian Nyerupa	25.000.000,00	25.000.000,00
20	No.18.04/04.0/000007/LS/1.01.2.2	Sekretariat Kepaksian Pemong	50.000.000,00	50.000.000,00
21	No.18.04/04.0/000006/LS/1.01.2.2	Festival Kreteh Nusantara (Kepaksian Pemong)	125.000.000,00	125.000.000,00
22	No.18.04/04.0/000010/LS/1.01.2.2	Pagelaran Kesenian (Kepaksian Pemong)	35.000.000,00	35.000.000,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
23	No.18.04/04.0/0000054/LS/1.01.2.2	Sanggar Sem Setwang	50.000.000,00	50.000.000,00
24	18.04/04.0/0000324/LS/1.01.2.22.0	Andan Mulakat	7.500.000,00	7.500.000,00
25	18.04/04.0/0000063/LS/1.01.2.22.0	LASQI	40.000.000,00	40.000.000,00
26	18.04/04.0/0000157/LS/1.01.2.22.0	AGIPAI	10.000.000,00	10.000.000,00
27	No.18.04/04.0/0000023/LS/1.01.2.2	DKL	50.000.000,00	40.000.000,00
28	18.04/04.0/0000279/LS/1.01.2.22.0	DKL		10.000.000,00
29	18.04/04.0/0000185/LS/1.01.2.22.0	Sanggar Bunga/ Masin	10.000.000,00	10.000.000,00
B	DINAS SOSIAL		140.000.000,00	140.000.000,00
1	18.04/04.0/0000008/LS/1.06.0.00.0 00.05.0000/M/3/2024	Hibah diberikan kepada LKS Bintang	10.000.000,00	10.000.000,00
2	18.04/04.0/0000035/LS/1.06.0.00.0 00.05.0000/M/3/2024	Hibah diberikan kepada Karang Taruna Kabupaten Lampung Barat	54.900.000,00	54.900.000,00
3	18.04/04.0/0000057/LS/1.06.0.00.0 00.05.0000/M/3/2024	Hibah diberikan kepada Karang Taruna Kabupaten Lampung Barat	45.100.000,00	45.100.000,00
4	12.01/04.0/0000034/LS/1.06.0.00.0 00.05.0000/P.02/9/2023	Hibah diberikan kepada PEPABRI	15.000.000,00	15.000.000,00
5	12.01/04.0/0000034/LS/1.06.0.00.0 00.05.0000/P.02/9/2023	Hibah diberikan kepada LVRI	15.000.000,00	15.000.000,00
D	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN		225.000.000,00	225.000.000,00
1	18.04/04.0/0000004/LS/2.07.3.31.0 00.01.0000/M/2/2024	Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan(Hibah Dekranasda); Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00
2	18.04/04.0/0000008/LS/2.07.3.31.0 00.01.0000/M/3/2024	Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan(Hibah Rumah Kreatif); Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00
3	18.04/04.0/0000015/LS/2.07.3.31.0 00.01.0000/M/5/2024	Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan(Hibah Dekranasda)	55.000.000,00	55.000.000,00
E	DINAS PERPUSTAKAAN		100.000.000,00	100.000.000,00
1	18.04/04.0/0000016/LS/2.23.2.24.0 00.17.0000/M/4/2024	Hibah kepada Tim Gerakan Literasi Daerah (TIM GLD) Kabupaten Lampung Barat	50.000.000,00	50.000.000,00
2	18.04/04.0/0000016/LS/2.23.2.24.0 00.17.0000/M/7/2024	Hibah kepada Tim Gerakan Literasi Daerah (TIM GLD) Kabupaten Lampung Barat	50.000.000,00	50.000.000,00
F	BADAN KEPEGAWAIAN SDM		65.000.000,00	65.000.000,00
1	18.04/04.0/0000019/LS/5.03.5.04.0 00.23.0000/M/5/2024	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Keg. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	50.000.000,00	50.000.000,00
2	18.04/04.0/0000028/LS/5.03.5.04.0 00.23.0000/M/7/2024	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Keg. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	15.000.000,00	15.000.000,00
G	DINAS KESEHATAN		210.000.000,00	210.000.000,00
1	18.04/04.0/0000026/LS/1.02.0.00.0 00.02.0000/M/6/2024	Hibah kepada Palang Merah Indonesia Lampung Barat (PMI), Sub kegiatan Pengelolaan upaya pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca krisis kesehatan	150.000.000,00	150.000.000,00
2	18.04/04.0/0000480/LS/1.02.0.00.0 00.02.0000/M/5/2024	Hibah kepada Yayasan jantung Indonesia (YJI), Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	30.000.000,00	30.000.000,00
3	18.04/06.0/0018/LS/1.02.0.00.0. 00.02.0000/M/9/2024	Hibah kepada Persatuan Perawat Indonesia (PPNI), Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi PendudukTerdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	30.000.000,00	30.000.000,00
H	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		15.000.000,00	15.000.000,00
1	18.04/04.0/0000036/LS/2.17.3.30.0 00.14.0000/M/7/2024	Hibah Kadin Lampung Barat Sub kegiatan Pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting pada Pasar rakyat yang Terintegrasi dalam sistem Informasi perdagangan	15.000.000,00	15.000.000,00
I	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		215.000.000,00	215.000.000,00
1	18.04/04.0/0000036/LS/2.19.3.26.0 00.16.0000/M/7/2024	Belanja Hibah Kepada IMMAKALAB (Ikatan Muli Mekhanai Kabupaten Lampung Barat)	50.000.000,00	50.000.000,00
2	18.04/04.0/0000040/LS/2.19.3.26.0 00.16.0000/M/7/2024	Belanja Hibah Kepada LAMPUNG BARAT CREATIVE MOVEMENT (LBCM)	25.000.000,00	25.000.000,00
3	18.04/04.0/0000043/LS/2.19.3.26.0 00.16.0000/M/8/2024	Belanja Hibah Kepada LAMPUNG BARAT BERSATU BIRD CLUB	30.000.000,00	30.000.000,00
4	18.04/04.0/0000017/LS/2.19.3.26.0 00.16.0000/M/4/2024	Belanja Hibah Kepada IKPM Jogyakarta Lampung Barat	50.000.000,00	50.000.000,00
5	18.04/04.0/0000013/LS/2.19.3.26.0 00.16.0000/M/4/2024	Belanja Hibah Kepada GP Ansor Lampung Barat	15.000.000,00	15.000.000,00
6	18.04/04.0/0000014/LS/2.19.3.26.0 00.16.0000/M/4/2024	Belanja Hibah Kepada PMII Lampung Barat	15.000.000,00	15.000.000,00
7	18.04/04.0/0000024/LS/2.19.3.26.0 00.16.0000/M/5/2024	Belanja Hibah Kepada Purna Paskibra Lampung Barat PPI 2024	15.000.000,00	15.000.000,00
8	18.04/04.0/0000034/LS/2.19.3.26.0 00.16.0000/M/6/2024	Belanja Hibah Kepada Pemuda Muhammadiyah Lampung Barat	15.000.000,00	15.000.000,00
J	SEKRETARIAT DAERAH		1.065.000.000,00	1.065.000.000,00
1	18.04/04.0/0000012/LS/4.01.0.00.0 00.28.0000/M/3/2024	HIBAH KEPADA MUSLIMAT NAHDHATUL ULAMA (NU)	20.000.000,00	20.000.000,00
2	18.04/04.0/0000013/LS/4.01.0.00.0 00.28.0000/M/3/2024	HIBAH KEPADA LDII KABUPATEN LAMPUNG BARAT	10.000.000,00	10.000.000,00
3	18.04/04.0/0000021/LS/4.01.0.00.0 00.28.0000/M/4/2024	HIBAH KEPADA PO AISYIYAH LAMPUNG BARAT	20.000.000,00	20.000.000,00
4	18.04/04.0/0000027/LS/4.01.0.00.0 00.28.0000/M/5/2024	HIBAH KEPADA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) LAMPUNG BARAT SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM	25.000.000,00	25.000.000,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
5	18.04/04.0/0000026/LS/4.01.0.00.0.00.28.0000/M/5/2024	HIBAH KEPADA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA (PHDI)	10.000.000,00	10.000.000,00
6	18.04/04.0/0000029/LS/4.01.0.00.0.00.28.0000/M/5/2024	HIBAH KEPADA ORGANISASI FATAYAT NU	10.000.000,00	10.000.000,00
7	18.04/04.0/0000030/LS/4.01.0.00.0.00.28.0000/M/5/2024	HIBAH KEPADA ORGANISASI MAJELIS BUDDHAYANA INDONESIA	10.000.000,00	10.000.000,00
8	18.04/04.0/0000033/LS/4.01.0.00.0.00.28.0000/M/5/2024	HIBAH KEPADA PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU)	50.000.000,00	50.000.000,00
9	18.04/04.0/0000034/LS/4.01.0.00.0.00.28.0000/M/5/2024	HIBAH KEPADA MUHAMMADIYAH LAMPUNG	30.000.000,00	30.000.000,00
10	18.04/04.0/0000040/LS/4.01.0.00.0.00.28.0000/M/6/2024	HIBAH KEPADA PENGURUS BAZNAS LAMPUNG BARAT	100.000.000,00	100.000.000,00
11	18.04/04.0/0000042/LS/4.01.0.00.0.00.28.0000/M/6/2024	HIBAH KEPADA MAJELIS ULAMA INDONESIA	20.000.000,00	20.000.000,00
12	18.04/04.0/0000045/LS/4.01.0.00.0.00.28.0000/M/6/2024	HIBAH KEPADA POSBAKUMADIN LIWA TA. 2024	25.000.000,00	25.000.000,00
13	18.04/04.0/0000044/LS/4.01.0.00.0.00.28.0000/PR/6/2024	HIBAH KEPADA PERSAUDARAAN MUSLIMAH	15.000.000,00	15.000.000,00
14	18.04/04.0/0000093/LS/4.01.0.00.0.00.28.0000/PR/10/2024	HIBAH KEPADA KRISTEN PROTESTAN YANG BERBADAN HUKUM (PENGURUS PERSEKUTUAN GEREJA GEREJA KRISTEN)	10.000.000,00	10.000.000,00
15	18.04/04.0/0000095/LS/4.01.0.00.0.00.28.0000/PR/10/2024	HIBAH KEPADA LPTQ KABUPATEN LAMPUNG BARAT	575.000.000,00	575.000.000,00
16	18.04/04.0/0000100/LS/4.01.0.00.0.00.28.0000/PR/11/2024	HIBAH KEPADA LPTQ KEC. KEBUN TEBU	5.000.000,00	5.000.000,00
17	18.04/04.0/0000101/LS/4.01.0.00.0.00.28.0000/PR/11/2024	HIBAH KEPADA LPTQ KECAMATAN GEDUNG SURIAN	5.000.000,00	5.000.000,00
18	18.04/04.0/0000102/LS/4.01.0.00.0.00.28.0000/PR/11/2024	HIBAH KEPADA LPTQ KECAMATAN WAY TENONG	5.000.000,00	5.000.000,00
19	18.04/04.0/0000104/LS/4.01.0.00.0.00.28.0000/PR/11/2024	HIBAH KEPADA LPTQ KABUPATEN LAMPUNG BARAT	40.000.000,00	40.000.000,00
20	18.04/04.0/0000111/LS/4.01.0.00.0.00.28.0000/PR/11/2024	HIBAH KEPADA LPTQ KECAMATAN SUMBER JAYA	5.000.000,00	5.000.000,00
21	18.04/04.0/0000112/LS/4.01.0.00.0.00.28.0000/PR/11/2024	HIBAH KEPADA LPTQ KECAMATAN BATU KETULIS	5.000.000,00	5.000.000,00
22	18.04/04.0/0000113/LS/4.01.0.00.0.00.28.0000/PR/11/2024	HIBAH KEPADA LPTQ KECAMATAN BATU BRAK	5.000.000,00	5.000.000,00
23	18.04/04.0/0000127/LS/4.01.0.00.0.00.28.0000/PPR1/12/2024	HIBAH KEPADA LPTQ KECAMATAN SEKINCAU	5.000.000,00	5.000.000,00
24	18.04/04.0/0000128/LS/4.01.0.00.0.00.28.0000/PPR1/12/2024	HIBAH KEPADA LPTQ KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG	5.000.000,00	5.000.000,00
25	18.04/04.0/0000131/LS/4.01.0.00.0.00.28.0000/PPR1/12/2024	HIBAH UANG KEPADA LPTQ KECAMATAN SUKAU	5.000.000,00	5.000.000,00
26	18.04/04.0/0000132/LS/4.01.0.00.0.00.28.0000/PPR1/12/2024	HIBAH KEPADA LPTQ KECAMATAN BELALAU	5.000.000,00	5.000.000,00
27	18.04/04.0/0000133/LS/4.01.0.00.0.00.28.0000/PPR1/12/2024	HIBAH KEPADA KATOLIK YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA (GEREJA ST. THEODORUS LIWA)	10.000.000,00	10.000.000,00
28	18.04/04.0/0000138/LS/4.01.0.00.0.00.28.0000/PPR1/12/2024	HIBAH KEPADA LPTQ KECAMATAN PAGAR DEWA	5.000.000,00	5.000.000,00
29	18.04/04.0/0000142/LS/4.01.0.00.0.00.28.0000/PPR1/12/2024	HIBAH KEPADA LPTQ KECAMATAN AIR HITAM	5.000.000,00	5.000.000,00
30	18.04/04.0/0000143/LS/4.01.0.00.0.00.28.0000/PPR1/12/2024	HIBAH KEPADA LPTQ KECAMATAN BALIK BUKIT	5.000.000,00	5.000.000,00
31	18.04/04.0/0000144/LS/4.01.0.00.0.00.28.0000/PPR1/12/2024	HIBAH KEPADA LPTQ KECAMATAN SUOH	5.000.000,00	5.000.000,00
32	18.04/04.0/0000145/LS/4.01.0.00.0.00.28.0000/PPR1/12/2024	HIBAH KEPADA LPTQ KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH	5.000.000,00	5.000.000,00
33		HIBAH KEPADA Mathlaul Anwar	10.000.000,00	0,00
K	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB PP DAN PA		150.000.000,00	150.000.000,00
1	18.04/04.0/0000024/LS/2.08.2.14.0.00.11.0000/M/7/2024	Belanja Hibah Peningkatan Kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan/Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota (PWKI)	15.000.000,00	15.000.000,00
2	18.04/04.0/0000001/LS/2.08.2.14.0.00.11.0000/M/7/2024	Belanja Hibah Peningkatan Kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan/Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota (WKRI)	15.000.000,00	15.000.000,00
3	18.04/04.0/0000015/LS/2.08.2.14.0.00.11.0000/M/7/2024	Belanja Hibah Peningkatan Kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan/Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota (DWP)	25.000.000,00	25.000.000,00
4	18.04/04.0/0000006/LS/2.08.2.14.0.00.11.0000/M/7/2024	Belanja Hibah Peningkatan Kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan/Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota (DWP)	25.000.000,00	25.000.000,00
5	18.04/04.0/0000026/LS/2.08.2.14.0.00.11.0000/M/7/2024	Belanja Hibah Peningkatan Kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan/Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota (DWP)	25.000.000,00	25.000.000,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
6	18.04/04.0/0000404/LS/2.08.2.14.0.00.11.0000/M/7/2024	Belanja Hibah Peningkatan Kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan/Pengembangan kegatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota (DWP)	25.000.000,00	25.000.000,00
7	18.04/04.0/0000354/LS/2.08.2.14.0.00.11.0000/M/7/2024	Belanja Hibah Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Sub Kegatan Penyediaan dan pengembangan materi Pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokasi Kabupaten/Kota (Kostra kependudukan)	20.000.000,00	20.000.000,00
		JUMLAH	3.742.556.000,00	3.691.002.800,00

5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.978.655.000,00	2.936.230.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.978.655.000,00	2.936.230.000,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
A	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		776.655.000,00	776.230.000,00
1	18.04/04.0/0000231/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PR/10/2024	BPPM PKBM Bunga Tanjung	47.775.000,00	47.775.000,00
2	18.04/04.0/0000255/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PR/11/2024	BPPM PKBM Setia Budi	73.395.000,00	73.395.000,00
3	18.04/04.0/0000228/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PR/10/2024	BPPM PKBM Insan Mandiri	37.625.000,00	37.625.000,00
4	18.04/04.0/0000227/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PR/10/2024	BPPM PKBM Karya Maju	43.645.000,00	43.645.000,00
5	18.04/04.0/0000232/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PR/10/2024	BPPM PKBM OASE	17.465.000,00	17.465.000,00
6	18.04/04.0/0000229/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PR/10/2024	BPPM PKBM Bumi Jawa	22.680.000,00	22.680.000,00
7	18.04/04.0/0000230/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PR/10/2024	BPPM PKBM Al Rizqi Sina Bersama	58.345.000,00	58.345.000,00
8	18.04/04.0/0000256/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PR/11/2024	BPPM PKBM Buay Nyerupa	78.925.000,00	78.925.000,00
9	18.04/04.0/0000226/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PR/10/2024	BPPM PKBM Harapan Bangsa	53.550.000,00	53.550.000,00
10	18.04/04.0/0000234/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PR/10/2024	BPPM PKBM Maju Bersama	90.515.000,00	90.090.000,00
11	18.04/04.0/0000225/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PR/10/2024	BPPM PKBM Pondok Hasyimiyah	5.005.000,00	5.005.000,00
12	18.04/04.0/0000233/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PR/10/2024	BPPM PKBM Global Rabbani	27.730.000,00	27.730.000,00
13	No.18.04/04.0/0000014/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/M/3/2024	ISPI	30.000.000,00	30.000.000,00
14	18.04/04.0/0000084/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/M/7/2024	HIMPAUDI	40.000.000,00	40.000.000,00
15	18.04/04.0/0000156/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/M/8/2024	PRAMUKA	75.000.000,00	75.000.000,00
16	18.04/04.0/0000155/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/M/8/2024	PGRI	25.000.000,00	25.000.000,00
17	18.04/04.0/0000153/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/M/8/2024	TPQ Al-Tagwa	10.000.000,00	10.000.000,00
18	18.04/04.0/0000171/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PR/10/2024	TPA Nurul Hikmah	15.000.000,00	15.000.000,00
19	18.04/04.0/0000083/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/M/7/2024	Pondok Al Munawaroh	10.000.000,00	10.000.000,00
20	18.04/04.0/0000081/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/M/7/2024	MTs Yapsi	5.000.000,00	5.000.000,00
21	18.04/04.0/0000082/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/M/7/2024	MTs Al Islamiyah	10.000.000,00	10.000.000,00
B	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		875.000.000,00	875.000.000,00
1	18.04/04.0/0000025/LS/2.19.3.26.0.00.16.0000/M/5/2024	Belanja Hibah Kepada Porwosi Lampung Barat	50.000.000,00	50.000.000,00
2	18.04/04.0/0000026/LS/2.19.3.26.0.00.16.0000/M/5/2024	Belanja Hibah Kepada KONI Lampung Barat	800.000.000,00	800.000.000,00
3	18.04/04.0/0000015/LS/2.19.3.26.0.00.16.0000/M/4/2024	Belanja Hibah Kepada Pokdarwis Rigis jaya	15.000.000,00	15.000.000,00
4	18.04/04.0/0000033/LS/2.19.3.26.0.00.16.0000/M/6/2024	Belanja Hibah Kepada Pokdarwis Pekon Sri Menanti Lampung Barat	15.000.000,00	15.000.000,00
5	18.04/04.0/0000016/LS/2.19.3.26.0.00.16.0000/M/4/2024	Belanja Hibah Kepada DPC MASATA Maliati Lampung Barat	30.000.000,00	30.000.000,00
6	12.01/04.0/0000048/LS/2.19.3.26.0.00.16.0000/M/9/2024	Belanja Hibah Kepada Komunitas Gowesar	50.000.000,00	50.000.000,00
7	18.04/04.0/0000071/LS/2.19.3.26.0.00.16.0000/M/11/2024	Belanja Hibah Kepada Gowes Suka suka Lampung Barat	15.000.000,00	15.000.000,00
C	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		105.000.000,00	105.000.000,00
1	18.04/04.0/0000027/LS/3.27.0.00.0.00.19.0000/M/6/2024	HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI NELAYAN ANDALAN KAB. LAMPUNG BARAT	20.000.000,00	20.000.000,00
2	18.04/04.0/0000028/LS/3.27.0.00.0.00.19.0000/M/6/2024	HIBAH KEPADA HIMPUNAN KELOMPOK TANI INDONESIA KAB. LAMPUNG BARAT	75.000.000,00	75.000.000,00
3	18.04/04.0/0000029/LS/3.27.0.00.0.00.19.0000/M/6/2024	HIBAH KEPADA SERIKAT TANI INDONESIA KAB. LAMPUNG BARAT	10.000.000,00	10.000.000,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
D	SEKRETARIAT DAERAH		405.000.000,00	395.000.000,00
1	18.04/04.0/0000076/LS/4.01.0.00.0 00.26.0000/M/3/2024	HIBAH KEPADA MAJELIS TALIM BAITUL MUKHLISIN ISLAMIYAH LB TH. 2024	100.000.000,00	100.000.000,00
2	18.04/04.0/0000043/LS/4.01.0.00.0 00.26.0000/M/5/2024	HIBAH KEPADA LASKAR SANTRI NUSANTARA	10.000.000,00	10.000.000,00
3	18.04/04.0/0000052/LS/4.01.0.00.0 00.26.0000/M/7/2024	HIBAH KEPADA HARI SANTRI	40.000.000,00	40.000.000,00
4	18.04/04.0/0000053/LS/4.01.0.00.0 00.26.0000/M/7/2024	HIBAH KEPADA QIROATIL KUTUB (MQK)	7.500.000,00	7.500.000,00
5	18.04/04.0/0000054/LS/4.01.0.00.0 00.26.0000/M/7/2024	HIBAH KEPADA MASJID AL KAUTSAR LING. SUKAMAJU SIMPANG SERDANG KEC. BALIK BUKIT	15.000.000,00	15.000.000,00
6	18.04/04.0/0000055/LS/4.01.0.00.0 00.26.0000/M/7/2024	HIBAH KEPADA MASJID AL FURQON PEKON SUKARAME KEC.BELALAU	20.000.000,00	20.000.000,00
7	18.04/04.0/0000061/LS/4.01.0.00.0 00.26.0000/M/8/2024	HIBAH KEPADA MASJID AL HIDAYAH SUKANANTI KEC. BALIK BUKIT	10.000.000,00	10.000.000,00
8	18.04/04.0/0000062/LS/4.01.0.00.0 00.26.0000/M/8/2024	HIBAH KEPADA MASJID NURUL IMAN KEC. BATU BRAK	10.000.000,00	10.000.000,00
9	18.04/04.0/0000063/LS/4.01.0.00.0 00.26.0000/M/8/2024	HIBAH KEPADA MASJID AN NASIR PEKON BUAY NYERUPA KEC. SUKAU	5.000.000,00	5.000.000,00
10	18.04/04.0/0000064/LS/4.01.0.00.0 00.26.0000/M/8/2024	HIBAH KEPADA MASJID AT TAQWA PEKON ARGOMULYO KEC. BATU KETULIS	5.000.000,00	5.000.000,00
11	18.04/04.0/0000065/LS/4.01.0.00.0 00.26.0000/M/8/2024	HIBAH KEPADA MASJID AL MUTATOHIRIN KEC. BANDAR NEGERI SUOH	10.000.000,00	10.000.000,00
12	18.04/04.0/0000066/LS/4.01.0.00.0 00.26.0000/M/8/2024	HIBAH KEPADA MASJID AL JAMIK PEKON KENALI KEC BELALAU	10.000.000,00	10.000.000,00
13	18.04/04.0/0000067/LS/4.01.0.00.0 00.26.0000/M/8/2024	HIBAH KEPADA MASJID AT TAQWA PEKON BEDUDU KEC BELALAU	10.000.000,00	10.000.000,00
14	18.04/04.0/0000068/LS/4.01.0.00.0 00.26.0000/M/8/2024	HIBAH KEPADA MASJID DAARUL QOLAM KEC SEKINCAU	5.000.000,00	5.000.000,00
15	18.04/04.0/0000069/LS/4.01.0.00.0 00.26.0000/M/8/2024	HIBAH KEPADA MASJID AL MUSYAIN PEKON BAHWAY	5.000.000,00	5.000.000,00
16	18.04/04.0/0000070/LS/4.01.0.00.0 00.26.0000/M/8/2024	HIBAH KEPADA MASJID AL MUTTAQIN KEC BALIK BUKIT	5.000.000,00	5.000.000,00
17	18.04/04.0/0000074/LS/4.01.0.00.0 00.26.0000/M/8/2024	HIBAH KEPADA MASJID AT TAQWA DARUSSALAM KEC BATU KETULIS	10.000.000,00	10.000.000,00
18	18.04/04.0/0000075/LS/4.01.0.00.0 00.26.0000/M/8/2024	HIBAH KEPADA MASJID AR RAHMAN KEC SUKAU	10.000.000,00	10.000.000,00
19	18.04/04.0/0000085/LS/4.01.0.00.0 00.26.0000/PR/9/2024	MASJID JAMI AL AMIN PEKON SUKAMARGA KEC SUOH	10.000.000,00	10.000.000,00
20	18.04/04.0/0000086/LS/4.01.0.00.0 00.26.0000/PR/9/2024	HIBAH KEPADA MASJID NURUL IMAN BNS	5.000.000,00	5.000.000,00
21	18.04/04.0/0000091/LS/4.01.0.00.0 00.26.0000/PR/10/2024	HIBAH KEPADA MUSHOLLA NURUL HUDA KEC. SUOH	10.000.000,00	10.000.000,00
22	18.04/04.0/0000092/LS/4.01.0.00.0 00.26.0000/PR/10/2024	HIBAH KEPADA PANITIA NATAL KRISTEN LAMPUNG BARAT (PANITIA PERAYAAN NATAL UMAT KRISTIANI)	10.000.000,00	10.000.000,00
23	18.04/04.0/0000094/LS/4.01.0.00.0 00.26.0000/PR/10/2024	HIBAH KEPADA PANITIA NATAL OIKUMENE	10.000.000,00	10.000.000,00
24	18.04/04.0/0000098/LS/4.01.0.00.0 00.26.0000/PR/11/2024	HIBAH KEPADA BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA (BKPRMI) LAMPUNG BARAT	10.000.000,00	10.000.000,00
25	18.04/04.0/0000108/LS/4.01.0.00.0 00.26.0000/PR/11/2024	HIBAH KEPADA MASJID AL MUJTABA KEC. AIR HITAM	5.000.000,00	5.000.000,00
26	18.04/04.0/0000114/LS/4.01.0.00.0 00.26.0000/PR/11/2024	HIBAH KEPADA MUSHOLA RAUDHATUL JANNAH KECAMATAN KEBUN TEBU	20.000.000,00	20.000.000,00
27	18.04/04.0/0000126/LS/4.01.0.00.0 00.26.0000/PPR1/12/2024	HIBAH KEPADA PANITIA NATAL KATOLIK LAMPUNG BARAT (GEREJA ST. THEODORUS LIWA)	7.500.000,00	7.500.000,00
28	18.04/04.0/0000129/LS/4.01.0.00.0 00.26.0000/PPR1/12/2024	HIBAH KEPADA MUSHOLLA NURUL IMAN KEC. KEBUN TEBU	20.000.000,00	20.000.000,00
29		Hibah Kepada Majelis Al Hidayah Indonesia Lambar	10.000.000,00	
E	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		527.000.000,00	505.000.000,00
1	18.04/04.0/0000114/LS/8.01.0.00.0 00.26.0000/M/3/2024	Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Ninlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Organisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lampung Barat BULAN MARET TA 2024	100.000.000,00	100.000.000,00
2	18.04/04.0/0000208/LS/8.01.0.00.0 00.26.0000/M/4/2024	HIBAH UANG KEPADA ORGANISASI GARUDA BAKTI NUSANTARA KABUPATEN LAMPUNG BARAT BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2024	10.000.000,00	10.000.000,00
3	18.04/04.0/0000211/LS/8.01.0.00.0 00.26.0000/M/4/2024	Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan Paguyuban Lambar Bersatu (PLB) BULAN APRIL Tahun Anggaran 2024	10.000.000,00	10.000.000,00
4	18.04/04.0/0000215/LS/8.01.0.00.0 00.26.0000/M/4/2024	HIBAH UANG KEPADA ORGANISASI SEMKOM MITRA POLRI BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2024	10.000.000,00	10.000.000,00
5	18.04/04.0/0000229/LS/8.01.0.00.0 00.26.0000/M/4/2024	HIBAH UANG KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN PERSATUAN OLAHRAGA DAN SENI PENCAK SILAT KILUANDAN (POSPSK) BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2024	5.000.000,00	5.000.000,00
6	18.04/04.0/0000330/LS/8.01.0.00.0 00.26.0000/M/4/2024	HIBAH UANG KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN MAJELIS DAERAH KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (KAHMI) BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2024	50.000.000,00	50.000.000,00
7	18.04/04.0/0000331/LS/8.01.0.00.0 00.26.0000/M/4/2024	HIBAH UANG KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA BATAK BERSATU DPC LAMPUNG BARAT BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2024	10.000.000,00	10.000.000,00
8	18.04/04.0/0000336/LS/8.01.0.00.0 00.26.0000/M/5/2024	HIBAH UANG KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN - FORUM MASYARAKAT PEDULI LAMBAR BULAN MEI TAHUN ANGGARAN 2024	10.000.000,00	10.000.000,00
9	18.04/04.0/0000447/LS/8.01.0.00.0 00.26.0000/M/5/2024	Hibah Uang kepada Organisasi PSHT Cabang Lampung Barat NIC 068 Pusat Madiun Bulan Mei Tahun Anggaran 2024	23.000.000,00	23.000.000,00
10	18.04/04.0/0000454/LS/8.01.0.00.0 00.26.0000/M/5/2024	HIBAH UANG KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN YAYASAN DEWAN KEMAKMURAN MASYARAKAT (DKM) PEDULI INDONESIA BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2024	5.000.000,00	5.000.000,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
11	18.04/04.0/0000503/LS/B.01.0.00.0 .00.26.0000/M/6/2024	HIBAH UANG KEPADA ORGANISASI BARISAN INDONESIA PEMANTAU DAN PENGAWAS TINDAK PIDANA KORUPSI (BIDIK) DPC KABUPATEN LAMPUNG BARAT BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2024	10.000.000,00	10.000.000,00
12	18.04/04.0/0000544/LS/B.01.0.00.0 .00.26.0000/M/6/2024	HIBAH UANG KEPADA LSM TRANSPARANSI KEBIJAKAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (TEKAD RI) KABUPATEN LAMPUNG BARAT BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2024	10.000.000,00	10.000.000,00
13	18.04/04.0/0000555/LS/B.01.0.00.0 .00.26.0000/M/6/2024	HIBAH UANG KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN LASKAR MERAH PUTIH PERJUANGAN (LMPP) BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2024)	10.000.000,00	10.000.000,00
14	18.04/04.0/0000564/LS/B.01.0.00.0 .00.26.0000/M/6/2024	Hibah Uang kepada Organisasi Laskar Merah Putih (LMP) Bulan Juni Tahun Anggaran 2024	10.000.000,00	10.000.000,00
15	18.04/04.0/0000573/LS/B.01.0.00.0 .00.26.0000/M/6/2024	Hibah Uang kepada Organisasi DPC Pejuang Silwangi Indonesia Kabupaten Lampung Barat Bulan Juni Tahun Anggaran 2024)	15.000.000,00	15.000.000,00
16	18.04/04.0/0000663/LS/B.01.0.00.0 .00.26.0000/M/7/2024	Hibah Uang Kepada Organisasi Kemasyarakatan - Organisasi DPC Perguruan Poku Banten Bulan Juli Tahun Anggaran 2024	10.000.000,00	10.000.000,00
17	18.04/04.0/0000664/LS/B.01.0.00.0 .00.26.0000/M/7/2024	HIBAH UANG KEPADA ORGANISASI DPD KEBUDAYAAN SILAT DAN TARI TUMANDE TARI KOLOT KEBON DJERUK HILIR (KESTI TTKKDH) KABUPATEN LAMPUNG BARAT BULAN JULI TAHUN ANGGARAN 2024	7.000.000,00	7.000.000,00
18	18.04/04.0/0000764/LS/B.01.0.00.0 .00.26.0000/M/8/2024	Hibah Uang kepada Organisasi IKB Buni Basway Lampung Barat Bulan AgustusTahun Anggaran 2024)	20.000.000,00	20.000.000,00
19	18.04/04.0/0000774/LS/B.01.0.00.0 .00.26.0000/M/8/2024	Hibah Uang kepada Organisasi Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Kabupaten Lampung Barat Bulan Agustus Tahun Anggaran 2024)	5.000.000,00	5.000.000,00
20	18.04/04.0/0000785/LS/B.01.0.00.0 .00.26.0000/M/8/2024	Hibah Uang kepada Organisasi Majelis Pengawas Cabang Pemuda Pancasila Bulan Agustus Tahun Anggaran 2024)	35.000.000,00	35.000.000,00
21	18.04/04.0/0000795/LS/B.01.0.00.0 .00.26.0000/M/8/2024	Hibah uang kepada Organisasi Suzuki Katana Jimny Indonesia (SKIn) Chapter Lampung Barat Bulan Agustus Tahun Anggaran 2024)	10.000.000,00	10.000.000,00
22	18.04/04.0/0000830/LS/B.01.0.00.0 .00.26.0000/M/9/2024)	Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan BAKORDA Forum Kader Sida Negara Lampung Barat Bulan Agustus Tahun Anggaran 2024	10.000.000,00	10.000.000,00
23	18.04/04.0/0000920/LS/B.01.0.00.0 .00.26.0000/PR/10/2024	Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan Paguban Lambar Bersatu (PLB) Kabupaten Lampung Barat Bulan Oktober Tahun Anggaran 2024	20.000.000,00	20.000.000,00
24	18.04/04.0/0000944/LS/B.01.0.00.0 .00.26.0000/PR/10/2024	Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Liwa Bulan Oktober Tahun Anggaran 2024	20.000.000,00	20.000.000,00
25	18.04/04.0/0000951/LS/B.01.0.00.0 .00.26.0000/PR/10/2024	Hibah Uang kepada Organisasi Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2024	50.000.000,00	50.000.000,00
26	18.04/04.0/0000105/LS/B.01.0.00.0 .00.26.0000/PR/11/2024	Hibah Uang kepada Organisasi Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD Kabupaten Lampung Barat Bulan November Tahun Anggaran 2024	10.000.000,00	10.000.000,00
27	18.04/04.0/0000105/LS/B.01.0.00.0 .00.26.0000/PR/11/2024	Hibah Uang kepada Organisasi Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKS PI) Kera Sakti Bulan November Tahun Anggaran 2024	5.000.000,00	5.000.000,00
28	18.04/04.0/0000108/LS/B.01.0.00.0 .00.26.0000/PR/11/2024)	Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan Berkan Patriot Bela Negara Bulan November Tahun Anggaran 2024	10.000.000,00	10.000.000,00
29	18.04/04.0/0000123/LS/B.01.0.00.0 .00.26.0000/PPR/12/2024	Hibah Uang kepada Organisasi Persatuan Pensiunan Indonesia (PPI) Tahun Anggaran 2024 Bulan Desember Tahun Anggaran 2024	5.000.000,00	5.000.000,00
30		Anggaran Hibah Tidak Terealisasi	22.900.000,00	
F	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB PP DAN PA		100.000.000,00	100.000.000,00
1	18.04/04.0/0000023/LS/2.08.2.14.0 .00.11.0000/M/7/2024	Belanja Hibah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (PERSIT)	15.000.000,00	15.000.000,00
2	18.04/04.0/0000062/LS/2.08.2.14.0 .00.11.0000/M/7/2024	Belanja Hibah Peningkatan Kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan/Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota (Bayangkari)	20.000.000,00	20.000.000,00
3	18.04/04.0/0000033/LS/2.08.2.14.0 .00.11.0000/M/7/2024	Belanja Hibah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (FKAD)	75.000.000,00	75.000.000,00
4	18.04/04.0/0000040/LS/2.08.2.14.0 .00.11.0000/M/7/2024	Belanja Hibah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan kabupaten/Kota (GOW) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (GOW)	40.000.000,00	40.000.000,00
5	18.04/04.0/0000336/LS/2.08.2.14.0 .00.11.0000/M/7/2024	Belanja Hibah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan (PKBI)	15.000.000,00	15.000.000,00
6	18.04/04.0/0000350/LS/2.08.2.14.0 .00.11.0000/M/7/2024	Belanja Hibah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan (KPAI)	10.000.000,00	
7	18.04/04.0/0000344/LS/2.08.2.14.0 .00.11.0000/M/7/2024	Belanja Hibah Pencehagan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/Kota Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat daerah dalam pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan pencegahan KTA (LPAI)	7.500.000,00	7.500.000,00
8	18.04/04.0/0000723/LS/2.08.2.14.0 .00.11.0000/M/7/2024	Belanja Hibah Pencehagan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/Kota Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat daerah dalam pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan pencegahan KTA (LPAI) Tahap II	7.500.000,00	7.500.000,00
		JUMLAH	2.978.655.888,00	2.938.239.000,00

5.1.05.09.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	375.000.000,00	375.000.000,00
5.1.05.09.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	375.000.000,00	375.000.000,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
A	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		360.000.000,00	360.000.000,00
1	18.04/04.0/0000278/LS/2.18.2.20.2 .21.13.0000/M/8/2024	Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan (RAPI)	25.000.000,00	25.000.000,00
2	18.04/04.0/0000326/LS/2.18.2.20.2 .21.13.0000/M/9/2024	Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan (SPJI)	10.000.000,00	10.000.000,00
3	18.04/04.0/0000333/LS/2.18.2.20.2 .21.13.0000/M/9/2024	Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan (PWRI)	30.000.000,00	30.000.000,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
4	18.04/04.0/0000034/LS/2.16.2.20.2.21.13.0000/M/9/2024	Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan (SMSI)	25.000.000,00	25.000.000,00
5	18.04/04.0/0000035/LS/2.16.2.20.2.21.13.0000/M/9/2024	Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan (FORKOWAP)	25.000.000,00	25.000.000,00
6	18.04/04.0/0000036/LS/2.16.2.20.2.21.13.0000/M/9/2024	Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan (AJOI)	20.000.000,00	20.000.000,00
7	18.04/04.0/0000037/LS/2.16.2.20.2.21.13.0000/M/9/2024	Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan (PWDPI)	10.000.000,00	10.000.000,00
8	18.04/04.0/0000038/LS/2.16.2.20.2.21.13.0000/M/9/2024	Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan (IWO)	30.000.000,00	30.000.000,00
9	18.04/04.0/0000039/LS/2.16.2.20.2.21.13.0000/M/9/2024	Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan (FWI)	150.000.000,00	150.000.000,00
10	18.04/04.0/0000040/LS/2.16.2.20.2.21.13.0000/PR/11/2024	Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan (AWPI)	20.000.000,00	20.000.000,00
11	18.04/04.0/0000041/LS/2.16.2.20.2.21.13.0000/PR/9/2024	Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan (FPI)	15.000.000,00	15.000.000,00
B	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
1	18.04/04.0/0000098/LS/8.01.0.00.0.00.26.0000/PR/10/2024	Hibah Uang Kepada Organisasi Gerakan Nasional Anti Narkotika Bulan Oktober Tahun Anggaran 2024	15.000.000,00	15.000.000,00
		JUMLAH	**375.000.000,00**	**375.000.000,00**

5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	15.000.000,00 15.000.000,00
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	15.000.000,00 15.000.000,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
A	**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
1				
1	18.04/04.0/0000030/LS/2.17.3.30.0.00.16.0000/M/7/2024	Hibah Kepada Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPINDA) Sub Kegiatan Pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan ,penguatan kelembagaan, penataan manajemen ,standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	15.000.000,00
		JUMLAH	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**

5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	165.000.000,00 165.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	145.000.000,00 145.000.000,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
A	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON**		**125.000.000,00**	**125.000.000,00**
1	18.04/01.0/0000001/2.13.0.00.0.00.10.0000/M/1/2024	Belanja Hibah Uang Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	65.000.000,00	65.000.000,00
	18.04/04.0/0000043/LS/2.13.0.00.0.00.10.0000/M/6/2024	Belanja Hibah Uang Kepada Perkumpulan Bersatu Beguwai Jejama Kabupaten Lampung Barat	35.000.000,00	35.000.000,00
	18.04/04.0/0000088/LS/2.13.0.00.0.00.10.0000/PR/11/2024	Belanja Hibah Uang Kepada Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI)	25.000.000,00	25.000.000,00
B	**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**
1	18.04/04.0/0000108/LS/2.17.3.30.0	Hibah Kepada Forum UMKM Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan pengembangan usaha mikro	10.000.000,00	10.000.000,00
C	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**
1	18.04/01.0/0000002/2.11.0.00.0.00	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2024	10.000.000,00	10.000.000,00
		JUMLAH	**145.000.000,00**	**145.000.000,00**

5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	
5.1.05.05.06.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.000.000,00 20.000.000,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
A	**DINAS KESEHATAN**		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**
1	18.04/04.0/0000034/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/M/5/2024	Hibah kepada Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.000.000,00	20.000.000,00
		JUMLAH	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**

II	**5.1.05.06**	**Belanja Hibah Dana BOS**	**3.688.720.000,00**	**3.688.252.000,00**
	5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.688.720.000,00	3.688.252.000,00
	5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.688.720.000,00	3.688.252.000,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
A	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**		**3.688.720.000,00**	**3.688.252.000,00**
1		BOS REGULER SD IT INKORU UMMAH	165.440.000,00	165.440.000,00
2		BOS REGULER SD KARTIKA II-11	120.320.000,00	120.320.000,00
3		BOS REGULER SD IT DAARUL QUDWAH	151.340.000,00	151.340.000,00
4		BOS REGULER SD IT SMART QURANI	78.990.000,00	78.889.800,00
5		BOS REGULER SDS KAYU ARE	13.160.000,00	13.160.000,00
6		BOS REGULER SD SINAR HARAPAN	19.740.000,00	19.740.000,00
7		BOS REGULER SDS MARGA JAYA	51.700.000,00	51.700.000,00
8		BOS REGULER SDS ATAR LEBAR	37.600.000,00	37.600.000,00
9		BOS REGULER SD BUMI JAYA	113.740.000,00	113.740.000,00
10		BOS REGULER SD BANDAR TELADAN	41.360.000,00	41.360.000,00
11		BOS REGULER SD WAY HARU	28.200.000,00	28.200.000,00
12		BOS REGULER SDS MUARA DUA	42.300.000,00	42.300.000,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
13		BOS REGULER SDS BERINGIN JAYA	96.820.000,00	96.820.000,00
14		BOS REGULER SD TRIGAKTI	20.680.000,00	20.680.000,00
15		BOS REGULER SD LEBUAY	26.320.000,00	26.320.000,00
16		BOS REGULER SD ISLAM MIFTAH AL ISTIQLALIYAH	22.560.000,00	22.560.000,00
17		BOS REGULER SDS MARGA JAYA	9.400.000,00	9.400.000,00
18		BOS REGULER SDS SINAR HARAPAN	33.840.000,00	33.840.000,00
19		BOS REGULER SD MEKAR JAYA	67.680.000,00	67.680.000,00
20		BOS REGULER SDS BATU HITAM	33.840.000,00	33.840.000,00
21		BOS REGULER SDS PAGAR DEWA	27.260.000,00	27.260.000,00
22		BOS REGULER SDS TANJUNG KURUNG	95.880.000,00	95.880.000,00
23		BOS REGULER SDS SINAR UMPU	84.600.000,00	84.600.000,00
24		BOS REGULER SDS SELANDAU TENGAH	47.940.000,00	47.940.000,00
25		BOS REGULER SDS KARYA BHAKTI	74.260.000,00	74.260.000,00
26		BOS REGULER SDS TUNGKUS TIGA	73.320.000,00	73.320.000,00
27		BOS REGULER SD TALANG CIAMIS	84.600.000,00	84.600.000,00
28		BOS REGULER SDS TALANG SEMANGKI	51.700.000,00	51.700.000,00
29		BOS REGULER SD TEGAL REJO	54.520.000,00	54.520.000,00
30		BOS REGULER SD ROWO REJO	96.820.000,00	96.820.000,00
31		BOS REGULER SD TIRTO LUHUR	39.480.000,00	39.480.000,00
32		BOS REGULER SD PERTEMUAN JAYA	50.760.000,00	50.760.000,00
33		BOS REGULER SD REJO MULYO	83.660.000,00	83.660.000,00
34		BOS REGULER SD BHAKTI MULYA	105.280.000,00	105.280.000,00
35		BOS REGULER SD KARTINI	59.220.000,00	59.220.000,00
36		BOS REGULER SD KISAM JAYA	29.140.000,00	29.140.000,00
37		BOS REGULER SD IT AL FATIH	177.660.000,00	177.660.000,00
38		BOS KINERJA SDS ATAR LEBAR	22.500.000,00	22.500.000,00
39		BOS KINERJA SDS MARGA JAYA	22.500.000,00	22.500.000,00
40		BOS KINERJA SD KISAM JAYA	22.500.000,00	22.500.000,00
41		BOS KINERJA SDS KARYA BHAKTI	22.500.000,00	22.500.000,00
42		BOS KINERJA SDS PERTEMUAN JAYA	22.500.000,00	22.500.000,00
43				
44		BOS REGULER SMP KHM SUPI	84.240.000,00	84.240.000,00
45		BOS REGULER SMP YATRIMAS BERINGIN	49.140.000,00	49.140.000,00
46		BOS REGULER SMP SUKAJADI	21.060.000,00	20.849.400,00
47		BOS REGULER SMP PLUS DARUL QUR AN	115.830.000,00	115.830.000,00
48		BOS REGULER SMP NUSANTARA	9.360.000,00	9.172.800,00
49		BOS REGULER SMP ISLAM MIFTAH AL ISTIQLALIYAH	19.890.000,00	19.890.000,00
50		BOS REGULER SMP MUHAMMADIYAH 1 DUKAU	65.520.000,00	65.520.000,00
51		BOS REGULER SMP MIFTAHUL ULUM	121.680.000,00	121.680.000,00
52		BOS REGULER SMP BHAKTI MULYA SUOH	138.060.000,00	138.060.000,00
53		BOS REGULER SMP ROWOREJO	95.940.000,00	95.940.000,00
54		BOS REGULER SMP AL-IRSYAD DARUSSALAM	29.250.000,00	29.250.000,00
55		BOS REGULER SMP AL ASHRIYAH ROUDLOTUS SHOLIHIN	242.190.000,00	242.190.000,00
56		BOS REGULER SMP Q MIFTAHUL ULUM	102.960.000,00	102.960.000,00
57		BOS KINERJA SMP YATRIMAS BERINGIN	35.000.000,00	35.000.000,00
58		BOS KINERJA SMP Q MIFTAHUL ULUM	35.000.000,00	35.000.000,00
		JUMLAH	3.888.720.000,00	3.888.252.000,00

IV	5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	667.578.559,00	667.578.559,00
	5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	667.578.559,00	667.578.559,00
	5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	667.578.559,00	667.578.559,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
A	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		667.578.559,00	667.578.559,00
1	18.04/04.0/000019/LS/8.01.0.00.0 00.26.0000/M/4/2024	HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK - PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2024	68.937.873,00	68.937.873,00
2	18.04/04.0/000022/LS/8.01.0.00.0 00.26.0000/M/4/2024	HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK - PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2024	52.226.226,00	52.226.226,00
3	18.04/04.0/000024/LS/8.01.0.00.0 00.26.0000/M/4/2024	HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK - PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) KABUPATEN LAMPUNG BARAT BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2024	137.519.217,00	137.519.217,00
4	18.04/04.0/000027/LS/8.01.0.00.0 00.26.0000/M/4/2024	HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK - PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2024	16.857.984,00	16.857.984,00
5	18.04/04.0/000028/LS/8.01.0.00.0 00.26.0000/M/4/2024	HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK - PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2024	24.941.069,00	24.941.069,00
6	18.04/04.0/000038/LS/8.01.0.00.0 00.26.0000/M/5/2024	HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK - PARTAI DEMOKRAT BULAN MEI TAHUN ANGGARAN 2024	63.829.393,00	63.829.393,00
7	18.04/04.0/000040/LS/8.01.0.00.0 00.26.0000/M/5/2024	HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK - PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) BULAN MEI TAHUN ANGGARAN 2024	24.403.636,00	24.403.636,00
8	18.04/04.0/000041/LS/8.01.0.00.0 00.26.0000/M/5/2024	HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK - PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) BULAN MEI TAHUN ANGGARAN 2024	25.430.652,00	25.430.652,00
9	18.04/04.0/000046/LS/8.01.0.00.0 00.26.0000/M/5/2024	HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK - PARTAI NASDEM BULAN MEI TAHUN ANGGARAN 2024	21.844.073,00	21.844.073,00
10	18.04/04.0/000093/LS/8.01.0.00.0 00.26.0000/PR/10/2024	Hibah Bantuan Keuangan Tahap Kedua kepada Partai Politik - Partai Golongan Karya (GOLKAR) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2024	21.926.554,00	21.926.554,00
11	18.04/04.0/000094/LS/8.01.0.00.0 00.26.0000/PR/10/2024	Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahap Kedua - DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2024	23.283.494,00	23.283.494,00
12	18.04/04.0/000107/LS/8.01.0.00.0 00.26.0000/PR/11/2024	Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bulan November 2024	89.047.192,00	89.047.192,00
13	18.04/04.0/000109/LS/8.01.0.00.0 00.26.0000/PR/11/2024	Hibah Bantuan Keuangan Tahap II kepada Partai Politik - DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bulan November Tahun Anggaran 2024	12.290.950,00	12.290.950,00
14	18.04/04.0/000110/LS/8.01.0.00.0 00.26.0000/PR/11/2024	Hibah Bantuan Keuangan Tahap Kedua kepada Partai Politik - DPC Partai Demokrat Bulan November Tahun Anggaran 2024	29.469.544,00	29.469.544,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
15	18.04/04.0/000111/LS/8.01.0.00.0.00.26.0000/PR/11/2024)	Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tahap Kedua Bulan Nowember Tahun Anggaran 2024	26.517.534,00	26.517.534,00
16	18.04/04.0/000113/LS/8.01.0.00.0.00.26.0000/PR/11/2024)	Hibah Bantuan Keuangan Tahap Kedua kepada Partai Politik - DPD Partai Nasdem Bulan Nowember Tahun 2024	14.029.695,00	14.029.695,00
17	18.04/04.0/000119/LS/8.01.0.00.0.00.26.0000/PR/11/2024)	Hibah Bantuan Keuangan Tahap Kedua kepada Partai Amanat Nasional (PAN) Bulan Desember Tahun Anggaran 2024	15.023.454,00	15.023.454,00
		JUMLAH	667.578.559,00	667.578.559,00

IV	5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	2.460.740.000,00	2.459.215.000,00
	5.1.05.08.07	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.460.740.000,00	2.459.215.000,00
	5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.460.740.000,00	2.459.215.000,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
A	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		2.460.740.000,00	2.459.215.000,00
1		BOP PAUD KB KENCANA INDAH	3.660.000,00	3.660.000,00
2		BOP PAUD TK NUSANTARA	11.590.000,00	11.590.000,00
3		BOP PAUD KB KARTINI	18.910.000,00	18.910.000,00
4		BOP PAUD KB SINAR CIPTA	15.250.000,00	15.250.000,00
5		BOP PAUD KB TUNAS BANGSA	11.590.000,00	11.590.000,00
6		BOP PAUD KB HARAPAN BANGSA	14.640.000,00	14.640.000,00
7		BOP PAUD TK ISLAM ALIF	33.550.000,00	33.550.000,00
8		BOP PAUD KB TUNAS MEKAR	12.200.000,00	12.200.000,00
9		BOP PAUD KB ALISARDIKAH	18.300.000,00	18.300.000,00
10		BOP PAUD TK ISLAM DARUL GOLAM	28.060.000,00	28.060.000,00
11		BOP PAUD KB MUTIARA BUNDA	13.420.000,00	13.420.000,00
12		BOP PAUD KB MUTIARA BUNDA LUMBOK	26.840.000,00	26.840.000,00
13		BOP PAUD KB HYDRO SMART	14.640.000,00	14.640.000,00
14		BOP PAUD TK NURUL IMAN	11.590.000,00	11.590.000,00
15		BOP PAUD TK SUDI ASIH	16.470.000,00	16.470.000,00
16		BOP PAUD KB KASIH BUNDA AN NUR	11.590.000,00	11.590.000,00
17		BOP PAUD TK MAZAYATUL INSAAN	18.300.000,00	18.300.000,00
18		BOP PAUD KB BUNDA NUR	16.470.000,00	16.470.000,00
19		BOP PAUD TK DEWI SARTIKA	14.640.000,00	14.640.000,00
20		BOP PAUD TK MIFTAH ALISTIQLALIYAH	5.490.000,00	5.490.000,00
21		BOP PAUD KB DARMA PERTIWI SIDODADI	18.910.000,00	18.910.000,00
22		BOP PAUD TK MUTIARA YALIMA	9.760.000,00	9.760.000,00
23		BOP PAUD sps HARAPAN BANGSA	4.270.000,00	4.270.000,00
24		BOP PAUD KB MIFTAHUL HUDA	14.640.000,00	14.640.000,00
25		BOP PAUD KB MUTIARA	22.570.000,00	22.570.000,00
26		BOP PAUD TK MUTIARA BUNDA	32.330.000,00	32.330.000,00
27		BOP PAUD KB ISLAM ALIF	15.860.000,00	15.860.000,00
28		BOP PAUD KB TUNAS HARAPAN	17.080.000,00	17.080.000,00
29		BOP PAUD KB AL HIDAYAH SEKINCAU	14.640.000,00	14.640.000,00
30		BOP PAUD TK NURUL ISLAM	60.390.000,00	60.390.000,00
31		BOP PAUD KB MULIA LESTARI	10.980.000,00	10.980.000,00
32		BOP PAUD TK BHAKTI MULYA TUGU RATU	36.600.000,00	36.600.000,00
33		BOP PAUD TK ALMAARIF SUMBER AGUNG	31.110.000,00	31.110.000,00
34		BOP PAUD TK KARTINI	24.400.000,00	24.400.000,00
35		BOP PAUD TK CITRA DHARMA FAJAR BULAN	12.810.000,00	12.810.000,00
36		BOP PAUD TK BHAKTI KARTIKA	19.520.000,00	19.520.000,00
37		BOP PAUD TK DHARMA WANITA TRIMULYO	31.110.000,00	31.110.000,00
38		BOP PAUD TK ISLAM NURUL HUDA	47.580.000,00	47.580.000,00
39		BOP PAUD TK AGITYA INDRI	26.840.000,00	26.840.000,00
40		BOP PAUD KB AZ ZAHRA	18.300.000,00	18.300.000,00
41		BOP PAUD KB DHARMA WANITA	37.820.000,00	37.820.000,00
42		BOP PAUD sps BUNDA	34.160.000,00	34.160.000,00
43		BOP PAUD KB KARTINI G.SURIAN	4.880.000,00	4.880.000,00
44		BOP PAUD TK DHARMA WANITA BAHIWAY	14.030.000,00	14.030.000,00
45		BOP PAUD KB MAZAYATUL INSAAN	3.660.000,00	3.660.000,00
46		BOP PAUD KB AL HUDA	22.570.000,00	22.570.000,00
47		BOP PAUD TK MIFTAHUL ULUM	14.640.000,00	14.640.000,00
48		BOP PAUD TK AL HIDAYAH	17.690.000,00	17.690.000,00
49		BOP PAUD KB HARAPAN BANGSA K.TEBU	11.590.000,00	11.590.000,00
50		BOP PAUD KB CEMARA	20.740.000,00	20.740.000,00
51		BOP PAUD KB MUTIARA BUNDA	4.270.000,00	4.270.000,00
52		BOP PAUD TK AL HIDAYAH	25.620.000,00	25.620.000,00
53		BOP PAUD KB IT AN NAJIEKURI	0,00	0,00
54		BOP PAUD TK ISLAM MUTIARA BUNDA	9.760.000,00	9.760.000,00
55		BOP PAUD TK TUNAS NUSANTARA	57.950.000,00	57.950.000,00
56		BOP PAUD TK ANAK BANGSA	9.760.000,00	9.760.000,00
57		BOP PAUD TK BUNDA NUR	17.690.000,00	17.690.000,00
58		BOP PAUD KB HARAPAN IBU	0,00	0,00
59		BOP PAUD sps KASIH IBU	31.110.000,00	31.110.000,00
60		BOP PAUD TK BANI ISMAIL	21.960.000,00	21.960.000,00
61		BOP PAUD KB AL MUTTAQIN	23.180.000,00	23.180.000,00
62		BOP PAUD KB SEHAT CERIA	19.520.000,00	19.520.000,00
63		BOP PAUD KB RAMADHAN	23.790.000,00	23.790.000,00
64		BOP PAUD KB TAMAN INGAM	23.790.000,00	23.790.000,00
65		BOP PAUD TK ISLAM IQRO	29.280.000,00	29.280.000,00
66		BOP PAUD TK RUMAH QURAN	0,00	0,00

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			ANGGARAN	REALISASI
67		BOP PAUD TK TUNAS BANGSA	17.690.000,00	17.690.000,00
68		BOP PAUD TK IT KHOIRU UMMAH	28.670.000,00	28.670.000,00
69		BOP PAUD TK PRAJA KASIH BUNDA	15.250.000,00	15.250.000,00
70		BOP PAUD KB MAYA PUTRA	35.380.000,00	35.380.000,00
71		BOP PAUD TK SAKINAH	8.540.000,00	8.540.000,00
72		BOP PAUD TK HARAPAN IBU	6.710.000,00	6.710.000,00
73		BOP PAUD TK CENDIKIA	15.250.000,00	15.250.000,00
74		BOP PAUD TK PERMATA BUNDA 2	21.350.000,00	21.350.000,00
75		BOP PAUD KB KESUMA MULYA	0,00	0,00
76		BOP PAUD TK IT AR RAUDHOH	0,00	0,00
77		BOP PAUD KB RUMAH QURAN	0,00	0,00
78		BOP PAUD TK TARBIYATUL ISLAM	7.930.000,00	7.930.000,00
79		BOP PAUD TK BHAKTI SINAR PERSADA	11.590.000,00	11.590.000,00
80		BOP PAUD TK ISLAM MAMBAUL ULUM SIDODADI	12.810.000,00	12.810.000,00
81		BOP PAUD TK DARMA WANITA PURAJAYA	34.160.000,00	34.160.000,00
82		BOP PAUD TK GELORA MEKAR	14.640.000,00	14.640.000,00
83		BOP PAUD TK ANGGUN	23.180.000,00	23.180.000,00
84		BOP PAUD TK AZ ZAHRA GEDUNG SURIAN	13.420.000,00	13.420.000,00
85		BOP PAUD TK SIMPANG LUAS	6.710.000,00	6.710.000,00
86		BOP PAUD TK KARTIKA 11-42	14.030.000,00	14.030.000,00
87		BOP PAUD TK PERTIWI AIR HITAM	17.080.000,00	17.080.000,00
88		BOP PAUD TK AL HUDA	28.060.000,00	28.060.000,00
89		BOP PAUD KB DHARMA PERTIWI	14.640.000,00	14.640.000,00
90		BOP PAUD KB AL HIDAYAH BALIK BUKIT	17.080.000,00	17.080.000,00
91		BOP PAUD KB ANAK BANGSA	21.350.000,00	21.350.000,00
92		BOP PAUD TK TUNAS BANGSA	18.300.000,00	18.300.000,00
93		BOP PAUD KB KASIH BUNDA	11.590.000,00	11.590.000,00
94		BOP PAUD TK KETILANG BEDUDU	9.760.000,00	9.760.000,00
95		BOP PAUD TK ISLAM AZ ZAURA	23.180.000,00	23.180.000,00
96		BOP PAUD sps PERINTIS TUNAS BANGSA	13.420.000,00	13.420.000,00
97		BOP PAUD KB NUSA INDAH	14.640.000,00	14.640.000,00
98		BOP PAUD TK HARAPAN BANGSA B.KETULIS	18.910.000,00	18.910.000,00
99		BOP PAUD KB ADITYA INDRI	10.370.000,00	10.370.000,00
100		BOP PAUD TK KARTINI G. SURIAN	26.230.000,00	26.230.000,00
101		BOP PAUD TK SATU ATAP PURAJAYA	6.100.000,00	6.100.000,00
102		BOP PAUD KB PRAJA KASIH BUNDA	17.690.000,00	17.690.000,00
103		BOP PAUD sps AL IKHLAS	10.370.000,00	10.370.000,00
104		BOP PAUD TK AMANDA	7.320.000,00	7.320.000,00
105		BOP PAUD TK DW ARGOMULYO	18.300.000,00	18.300.000,00
106		BOP PAUD TK SATU ATAP AN NUR PADANG TAMBAK	16.470.000,00	16.470.000,00
107		BOP PAUD TK SIDOMAKMUR	3.660.000,00	3.660.000,00
108		BOP PAUD KB KASIH IBU	1.830.000,00	1.830.000,00
109		BOP PAUD TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL	41.480.000,00	41.480.000,00
110		BOP PAUD TK SAI BETIK	14.640.000,00	14.640.000,00
111		BOP PAUD TK SARTIKA TEMBELANG	3.050.000,00	3.050.000,00
112		BOP PAUD KB PERMATA BUNDA	17.690.000,00	17.690.000,00
113		BOP PAUD sps KASIH BUNDA	27.460.000,00	27.460.000,00
114		BOP PAUD TK SATU ATAP RUA JURAI	24.400.000,00	24.400.000,00
115		BOP PAUD TK DW SIMPANG SARI	20.740.000,00	20.740.000,00
116		BOP PAUD TK KARTIKA GUNUNG RATU	0,00	0,00
117		BOP PAUD TK HARAPAN BANGSA K.TUBU	15.860.000,00	15.860.000,00
118		BOP PAUD TK HARAPAN BUNDA	30.500.000,00	30.500.000,00
119		BOP PAUD TK MIFTAHUL HUDA	15.860.000,00	15.860.000,00
120		BOP PAUD TK DHARMA WANITA	45.140.000,00	45.140.000,00
121		BOP PAUD TK DARMA PERTIWI	10.980.000,00	10.980.000,00
122		BOP PAUD TK AISYAH MARGA JAYA	14.030.000,00	14.030.000,00
123		BOP PAUD TK BANDA MULYA	13.420.000,00	13.420.000,00
124		BOP PAUD KB TUNAS HARAPAN PAGAR DEWA	21.350.000,00	21.350.000,00
125		BOP PAUD KB RIYADHUL JANNAH	18.300.000,00	18.300.000,00
126		BOP PAUD TK MABAR JAYA	9.150.000,00	9.150.000,00
127		BOP PAUD TK TUNAS MANDIRI	46.750.000,00	45.750.000,00
128		BOP PAUD TPA ISLAM IQRO	20.740.000,00	20.740.000,00
129		BOP PAUD TK DW PERSATUAN	0,00	0,00
130		BOP PAUD sps TUNAS MANDIRI	3.050.000,00	1.525.000,00
131		BOP PAUD KB SINAR MULYA	19.520.000,00	19.520.000,00
132		BOP PAUD TK DHARMA WUAYA	4.880.000,00	4.880.000,00
133		BOP PAUD TK IT SABILUL HIDAYAH	25.010.000,00	25.010.000,00
134		BOP PAUD TK NUSA INDAH	9.150.000,00	9.150.000,00
135		BOP PAUD TK IT DAR EL FATH SCHOOL	0,00	0,00
136		BOP PAUD KB BUDI ATIH	9.150.000,00	9.150.000,00
137		BOP PAUD TK PERINTIS TUNAS BANGSA	1.220.000,00	1.220.000,00
138		BOP PAUD TK PERMATA BUNDA 3	28.840.000,00	28.840.000,00
139		BOP PAUD TK HARAPAN MEKAR	6.710.000,00	6.710.000,00
140		BOP PAUD KB PRIMA JASA TEBA LIOKH	10.370.000,00	10.370.000,00
141		BOP PAUD TK DARUSSALAM	13.420.000,00	13.420.000,00
142		BOP PAUD TK MERAH PUTIH	11.590.000,00	11.590.000,00
143		BOP PAUD TK PERTIWI	29.280.000,00	29.280.000,00
144				
		JUMLAH	2.400.740.000,00	2.459.215.000,00

REKAP BEBAN HIBAH (ASET TETAP) PER PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	NOMOR BAST HIBAH	TANGGAL	PENERIMA	OBJEK	NILAI	NOMOR NHD	KETERANGAN
1	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Sakiman Hadi (Kelompok Tani Sido Lestari)	Jalan Usaha Tani	565.015.250,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Kosasih Indra Irawan (Kelompok Tani Karya Tani)	Jalan Usaha Tani	230.748.000,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Kasyanto (Kelompok Tani Pusaka Jaya)	Jalan Usaha Tani	392.427.700,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Ashari (Kelompok Tani Bina Usaha Tani)	Jalan Usaha Tani	210.591.200,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Joni Rohman (Kelompok Tani Tunas Muda)	Jalan Usaha Tani	582.138.500,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Suparman (Kelompok Tani Bandar Mantep)	Jalan Usaha Tani	808.562.000,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Dasron (Kelompok Tani Andini Makmur)	Jalan Usaha Tani	86.678.000,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Haryono (Kelompok Tani Rasa)	Jalan Usaha Tani	283.800.000,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Amprah Yuddin (Kelompok Tani Bina Jaya)	Jalan Usaha Tani	187.696.000,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Sutikno (Kelompok Tani Harapan Mulya)	Jalan Usaha Tani	135.231.000,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Satiyo (Kelompok Tani Tunas Harapan)	Jalan Usaha Tani	472.857.900,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Kasyanto (Kelompok Tani Suka Makmur)	Jalan Usaha Tani	281.775.000,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Bambang HS. (Kelompok Tani Semaka I)	Jalan Usaha Tani	299.805.000,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Suyanto (Kelompok Tani Marga Wiwitan)	Jalan Usaha Tani	281.578.000,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Carda Gumpita (Kelompok Tani Mufakat)	Jalan Usaha Tani	196.847.000,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Hendri Gunawan (Kelompok Tani Ragom Rancaka)	Jalan Usaha Tani	159.893.000,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Bonawan (Kelompok Tani Sehati)	Jalan Usaha Tani	314.399.000,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Andia Rohman (Kelompok Tani Petani Sejahtera)	Jalan Usaha Tani	592.095.150,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Suryanto (Kelompok Tani Karya Bhakti)	Jalan Usaha Tani	352.466.750,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Supriyono (Kelompok Tani Bumi Waras)	Jalan Usaha Tani	726.194.700,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Nuzir Ahmad (Kelompok Tani Jejama)	Jalan Usaha Tani	255.174.000,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Sutarman (Kelompok Tani Sido Muncul)	Jalan Usaha Tani	302.382.000,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Endawan Fery (Kelompok Tani Sinar Serumpun)	Jalan Usaha Tani	992.515.200,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Tiswan (Kelompok Tani Mufakat)	Jalan Usaha Tani	231.809.000,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Mitson Yadi (Kelompok Tani Way Lumbok)	Jalan Usaha Tani	345.725.000,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Istiawan (Kelompok Tani Muloh Tungga)	Jalan Usaha Tani	119.300.000,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Sunayati (Kelompok Tani Cipta Waras)	Jalan Usaha Tani	250.902.000,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Sizli Nawawi (Kelompok Tani Semoga Jaya)	Jalan Usaha Tani	156.357.000,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Aster Lubis (Kelompok Tani Bina Tani)	Jalan Usaha Tani	316.552.000,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Dede Sarjum (Kelompok Tani Makar Makmur I)	Jalan Usaha Tani	426.981.482,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		030/952/BA-HD/01./IV/2022	30-Sep-22	Sarbani (Kelompok Tani Usaha Baru)	Jalan Usaha Tani	401.411.000,00	030/952/NHD/IV.01/2022	Jalan, Irigasi dan Jaringan
2	SEKRETARIAT DAERAH	030/120/IV.01/2024	30-Dec-24	Ir. Fredy SM,MM,CGCAE	Tanah Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Wilayah XIV Lampung Barat	327.441.415,00		Tanah
		030/64/IV.01/2024	17-Jan-24	Ismanto S.Hut,M.P	Tanah Kantor Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Liwa	239.522.400,00		Tanah
		030/65/IV.01/2024	17-Jan-24	Pdt.J. Simanjuntak	Kendaraan Roda Dua (Sepeda Motor)	7.350.000,00		Peralatan dan Mesin
				JUMLAH		11.534.321.647,00		

Lampiran 7.

OPD
5.3.01.01.
5.3.01.01.01
5.3.01.01.01.0001

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga

No	No. SP2D	URAIAN	JUMLAH (Rp) ANGGARAN	JUMLAH (Rp) REALISASI
			2.150.745.002,00	1.961.201.439,00
1	SP2D 18.01/04.0/000022/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Bantuan Kepada masyarakat korban Bencana Alam dan /Bencana Sosial di Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit An. Hendra Saing Tahun Anggaran 2024	5.000.000,00	5.000.000,00
2	SP2D 18.04/04.0/000034/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Pengembalian Sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2022 ke Rekening Kas Umum Negara	82.600.380,00	82.600.380,00
3	SP2D 18.04/04.0/000036/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam/dan Atau Bencana Sosial di Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian An. Gustono Rp 5.000.000 Tahun Anggaran 2024	5.000.000,00	5.000.000,00
4	SP2D 18.04/04.0/000037/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Penyediaan Logistik Dapur Umum untuk Penanganan Konflik Satwa Harimau di Kecamatan Bandar Negeri Suoh TA.2024	22.639.050,00	22.639.050,00
5	SP2D 18.04/04.0/000035/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Perbaikan Bendungan dan Saluran Intake Way Asahan di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau TA.2024	73.269.000,00	73.269.000,00
6	SP2D 18.04/04.0/000039/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Tahun Anggaran 2024	150.000.000,00	150.000.000,00
7	SP2D 18.04/04.0/000162/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam/dan AtauBencana Sosial Di Pekon Tugu Sari Kecamatan Sumberjaya Rp 5.000.000 Tahun Anggaran 2024	5.000.000,00	5.000.000,00
8	SP2D 18.04/04.0/000163/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Pembuatan 1 (Satu) Unit Gorong gorong di Pekon Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya TA.2024	124.825.000,00	124.825.000,00
9	SP2D 18.04/04.0/000177/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Pembersihan Material Longsor di Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh TA.2024	69.875.000,00	69.875.000,00
10	SP2D 18.04/04.0/000109/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Operasional Satuan Tugas Gabungan Penanganan Konflik Satwa Harimau Di Kecamatan Bandar Negeri Suoh TA.2024	45.550.000,00	45.550.000,00
11	SP2D 18.04/04.0/000226/LS/5.02	Pengeluaran Dana TidakTerduga TerhadapPemasangan Bronjong danSaluran Drainase di PekonPangengan KecamatanSekincau TA.2024	161.750.000,00	161.750.000,00
12	SP2D 18.04/04.0/000254/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak Terduga TerhadapPemasangan Batu Beton dan Timbunan Tanah diPekon Muara Jaya II Kecamatan Kebun Tebu TA.2024	70.000.000,00	70.000.000,00
13	SP2D 18.04/04.0/000247/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak Terduga TerhadapPembuatan Talud Penahan Tanah di Pekon BuayNyerupa Kecamatan Sukau TA.2024	125.000.000,00	125.000.000,00
14	SP2D 18.04/04.0/000248/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak Terduga TerhadapPembersihan Material Longsor dinas Jalan SukaJaya-Basungan Kecamatan Pagar Dewa TA.2024	40.000.000,00	40.000.000,00
15	SP2D 18.04/04.0/000249/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak Terduga TerhadapPembuatan Jembatan Way Tulung Pekon Negeri RatuKecamatan Batu Brak TA.2024	150.000.000,00	150.000.000,00
16	SP2D 18.04/04.0/000250/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak Terduga TerhadapPembuatan Lantai Jembatan dan Penimbunan Jalan diPekon Campang Tiga Kecamatan Batu KetulisTA.2024	49.300.000,00	49.300.000,00
17	SP2D 18.04/04.0/000252/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak Terduga TerhadapPembuatan Gorong-gorong dan Penimbunan Tanah diPekon Wunus Jaya Kecamatan Gedung SurianTA.2024	87.000.000,00	87.000.000,00
18	SP2D 18.04/04.0/000251/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap BantuanKepada Masyarakat Korban Bencana Alam/dan AtauBencana Sosial di Pekon semarang Jaya KecamatanAir Hitam An.Tumpal Simamora Rp 5.000.000 TahunAnggaran 2024	5.000.000,00	5.000.000,00
19	SP2D 18.04/04.0/000391/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam/dan Atau Bencana Sosial di Pekon Sindang Pagar Kecamatan Sumber JayaAn.Tuminem Rp 5.000.000 TahunAnggaran 2024	5.000.000,00	5.000.000,00
20	SP2D 18.04/04.0/000390/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam/dan Atau Bencana Sosial di Pekon Serenggas Kecamatan Balik Bukit An.MuzammilRp 5.000.000 Tahun Anggaran 2024	5.000.000,00	5.000.000,00
21	SP2D 18.04/04.0/000409/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tudak Terduga terhadap Perbaikan Saluran irigasi dan Perbaikan Saluran Pasangan Batu Di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Tahun Anggaran 2024	77.617.000,00	77.617.000,00
22	SP2D 18.04/04.0/000422/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Pembuatan Tanggul Dengan Perkuat Beton di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau TA.2024	187.257.000,00	187.257.000,00
23	SP2D 18.04/04.0/000536/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak Terduga TerhadapPembuatan Badan Jalan,Tanggul danNormalisasi Sungai di Pekon Buay NyerupaKecamatan Sukau TA.2024	75.750.000,00	75.750.000,00
24	SP2D 18.04/04.0/000545/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak Terduga TerhadapPasangan Bronjong, Talud dan PerbaikanRabat Beton Bahu Jalan di Pekon HanakauKecamatan Sukau TA.2024	106.015.000,00	106.015.000,00
25	SP2D 18.04/04.0/000579/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak Terduga TerhadapOperasional Satuan Tugas Gabungan Penanganan Konflik Satwa Liar Harimau diKecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh TA.2024	65.000.000,00	65.000.000,00
26	SP2D 18.04/04.0/000601/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak TerdugaTerhadap Bantuan Kepada MasyarakatKorban Bencana Alam/dan AtauBencana Sosial di Pekon Pura MekarKecamatan Gedung Surian An.Hendra Rp5.000.000 Tahun Anggaran 2024	5.000.000,00	5.000.000,00
27	SP2D 18.04/04.0/000602/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak TerdugaTerhadap Bantuan Kepada MasyarakatKorban Bencana Alam/dan AtauBencana Sosial di Pekon KenaliKecamatan Belalau An.Sri Purwati Rp5.000.000 Tahun Anggaran 2024	5.000.000,00	5.000.000,00
28	SP2D 18.04/04.0/001021/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam/dan Atau Bencana Sosial di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau An. Muhammad Taufik Rp 5.000.000 Tahun Anggaran 2024	5.000.000,00	5.000.000,00
29	SP2D 18.04/04.0/001023/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam/dan Atau Bencana Sosial di Pekon Ujung Kecamatan Lumbok Seminung An. Siswanto Rp 5.000.000 Tahun Anggaran 2024	5.000.000,00	5.000.000,00
30	SP2D 18.04/04.0/001022/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam/dan Atau Bencana Sosial di Pekon Lombok Timur Kecamatan Lumbok Seminung An. Renaki Saputra Rp 5.000.000 Tahun Anggaran 2024	5.000.000,00	5.000.000,00
31	SP2D 18.04/04.0/000747/LS/5.02	Pengeluaran Dana Tidak TerdugaTerhadap Penataan Tapak kawasan Zona Penerima UPT KRL Liwa Kecamatan Balik Bukit TA.2024	142.754.000,00	142.754.000,00
32		Anggaran Belanja Tidak Terduga tidak terserap	189.543.643,00	
		JUMLAH	**2.150.745.002,00**	**1.961.201.439,00**

OPD
5.4.01.01.
5.4.01.01.03
5.4.01.01.03.0001

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

No	NAMA KECAMATAN	NAMA PEKON	2.037.512.700,00	1.473.076.700,00	564.436.000,00
			JUMLAH (Rp)		
			ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	BALIK BUKIT	KUBU PERAHU	13.022.300,00	8.792.400,00	4.229.900,00
2	BALIK BUKIT	WAY EMPULAU ULU	13.182.100,00	10.042.000,00	3.140.100,00
3	BALIK BUKIT	WATAS	15.108.900,00	10.586.900,00	4.522.000,00
4	BALIK BUKIT	PADANG DALOM	13.603.300,00	10.408.400,00	3.194.900,00
5	BALIK BUKIT	GUNUNG SUGIH	15.814.400,00	12.758.700,00	3.055.700,00
6	BALIK BUKIT	SERARUS	24.381.200,00	20.417.500,00	3.963.700,00
7	BALIK BUKIT	PADANG CAHYA	19.985.300,00	16.306.800,00	3.678.500,00
8	BALIK BUKIT	SUKARAME	17.637.100,00	13.800.200,00	3.836.900,00
9	BALIK BUKIT	BAHWAY	15.958.100,00	12.021.100,00	3.937.000,00
10	BALIK BUKIT	SEDAMPAH INDAH	14.564.100,00	10.925.600,00	3.638.500,00
11	SUKAU	TANJUNG RAYA	19.183.100,00	12.873.500,00	6.309.600,00
12	SUKAU	HANAKAU	15.968.000,00	12.331.200,00	3.636.800,00
13	SUKAU	BUAY NYERUPA	17.881.600,00	11.571.900,00	6.309.700,00
14	SUKAU	TAPAK SIRING	13.119.000,00	10.155.700,00	2.963.300,00
15	SUKAU	PAGAR DEWA	17.829.100,00	11.549.000,00	6.280.100,00
16	SUKAU	JAGA RAGA	14.772.200,00	11.111.300,00	3.660.900,00
17	SUKAU	SUKA MULYA	12.910.100,00	8.800.000,00	4.110.100,00
18	SUKAU	BANDAR BARU	12.748.100,00	8.697.100,00	4.051.000,00
19	SUKAU	BUMI JAYA	11.079.600,00	7.718.900,00	3.360.700,00
20	SUKAU	TEBA PERING RAYA	11.163.400,00	8.165.000,00	2.998.400,00
21	LOMBOK SEMINUNG	LOMBOK	16.550.900,00	12.464.900,00	4.086.000,00
22	LOMBOK SEMINUNG	HENI ARONG	12.249.900,00	9.114.000,00	3.135.900,00
23	LOMBOK SEMINUNG	SUKA BANJAR	11.048.200,00	8.127.900,00	2.920.300,00
24	LOMBOK SEMINUNG	LUMBOK TIMUR	11.601.400,00	8.543.900,00	3.057.500,00
25	LOMBOK SEMINUNG	SUKA BANJAR II UJUNG REMBUN	12.826.700,00	9.522.300,00	3.304.400,00
26	LOMBOK SEMINUNG	SUKA MAJU	11.010.300,00	8.129.000,00	2.881.300,00
27	LOMBOK SEMINUNG	UJUNG	11.614.900,00	8.188.000,00	3.426.900,00
28	LOMBOK SEMINUNG	KEAGUNGAN	12.706.900,00	8.308.100,00	4.398.800,00
29	LOMBOK SEMINUNG	TAWAN SUKA MULYA	10.591.500,00	7.777.700,00	2.813.800,00
30	LOMBOK SEMINUNG	PANCUR MAS	10.271.600,00	7.422.900,00	2.848.700,00
31	LOMBOK SEMINUNG	LOMBOK SELATAN	11.492.000,00	8.447.500,00	3.044.500,00
32	SUMBERJAYA	SIMPANG SARI	15.397.400,00	12.478.500,00	2.918.900,00
33	SUMBERJAYA	SUKA JAYA	17.473.300,00	11.676.900,00	5.796.400,00
34	SUMBERJAYA	SINDANG PAGAR	17.956.700,00	15.863.700,00	2.093.000,00
35	SUMBERJAYA	SUKA PURA	33.658.300,00	24.217.600,00	9.440.700,00
36	SUMBERJAYA	WAY PETAY	19.828.400,00	15.461.800,00	4.366.600,00
37	KEBUN TEBU	PURA JAYA	17.246.300,00	12.773.800,00	4.472.500,00
38	KEBUN TEBU	PURA WIWITAN	16.844.600,00	12.261.800,00	4.582.800,00
39	KEBUN TEBU	TRIBUDI SYUKUR	16.698.800,00	11.118.300,00	5.580.500,00
40	KEBUN TEBU	MUARA JAYA I	13.828.500,00	10.448.000,00	3.380.500,00
41	KEBUN TEBU	MUARA JAYA II	13.859.100,00	11.292.900,00	2.566.200,00
42	KEBUN TEBU	TRIBUDI MAKMUR	16.013.000,00	12.226.900,00	3.786.100,00
43	KEBUN TEBU	TUGU MULYA	11.449.300,00	8.701.700,00	2.747.600,00
44	KEBUN TEBU	CIPTA MULYA	12.143.800,00	9.390.100,00	2.753.700,00
45	KEBUN TEBU	MUARA BARU	11.601.300,00	8.564.300,00	3.037.000,00
46	KEBUN TEBU	SINAR LUAS	12.292.100,00	9.189.600,00	3.102.500,00
47	WAY TENONG	MUTAR ALAM	19.009.600,00	12.991.000,00	6.018.600,00
48	WAY TENONG	KARANG AGUNG	16.406.900,00	12.609.300,00	3.797.600,00
49	WAY TENONG	PURA LAKSANA	17.186.200,00	12.657.400,00	4.528.800,00
50	WAY TENONG	TANJUNG RAYA	14.978.600,00	11.515.200,00	3.463.400,00
51	WAY TENONG	SUKANANTI	15.263.100,00	9.847.200,00	5.415.900,00
52	WAY TENONG	SUKA RAJA	15.343.100,00	11.606.000,00	3.737.100,00
53	WAY TENONG	PADANG TAMBAK	17.034.000,00	10.832.000,00	6.202.000,00
54	WAY TENONG	TAMBAK JAYA	15.189.200,00	11.553.700,00	3.635.500,00
55	AIR HITAM	SIDODADI	12.002.400,00	8.888.400,00	3.114.000,00
56	AIR HITAM	SEMARANG JAYA	14.765.300,00	11.062.800,00	3.702.500,00
57	AIR HITAM	SUMBER ALAM	14.549.300,00	10.635.100,00	3.914.200,00
58	AIR HITAM	GUNUNG TERANG	13.910.600,00	10.533.000,00	3.377.600,00
59	AIR HITAM	SUKA JADI	12.576.900,00	9.562.100,00	3.014.800,00
60	AIR HITAM	SRI MENANTI	14.691.900,00	10.921.000,00	3.770.900,00
61	AIR HITAM	SINAR JAYA	13.196.600,00	9.865.600,00	3.331.000,00
62	AIR HITAM	RIGIS JAYA	13.129.500,00	9.779.100,00	3.350.400,00
63	AIR HITAM	SUKA DAMAI	11.363.400,00	8.527.800,00	2.835.600,00
64	AIR HITAM	MANGGARAI	11.524.700,00	8.482.800,00	3.041.900,00
65	BELALAU	KENALI	14.870.800,00	9.738.600,00	5.132.200,00
66	BELALAU	KEJADIAN	12.061.000,00	8.450.100,00	3.610.900,00
67	BELALAU	BUMI AGUNG	12.090.100,00	8.215.200,00	3.874.900,00

No	NAMA KECAMATAN	NAMA PEKON	JUMLAH (Rp)		
			ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
68	BELALAU	TURGAK	11.032.400,00	8.090.000,00	2.942.400,00
69	BELALAU	BEDUDU	13.288.000,00	10.041.800,00	3.246.200,00
70	BELALAU	SUKARAME	12.819.000,00	9.605.600,00	3.213.400,00
71	BELALAU	HUJUNG	16.808.500,00	10.666.700,00	6.141.800,00
72	BELALAU	SERUNGKUK	10.772.400,00	7.949.800,00	2.822.600,00
73	BELALAU	SUKA MAKMUR	10.797.100,00	7.913.500,00	2.883.600,00
74	BELALAU	PAJAR AGUNG	10.242.400,00	7.265.400,00	2.977.000,00
75	BELALAU	ARGO MULYO	18.277.700,00	13.953.500,00	4.324.200,00
76	BATU KETULIS	BATU KEBAYAN	14.532.600,00	10.638.400,00	3.894.200,00
77	BATU KETULIS	ATAR BAWANG	14.719.800,00	11.039.100,00	3.680.700,00
78	BATU KETULIS	CAMPANG TIGA	13.775.700,00	8.913.300,00	4.862.400,00
79	BATU KETULIS	LUAS	12.700.600,00	8.831.600,00	3.869.000,00
80	BATU KETULIS	BAKHU	16.412.100,00	11.165.600,00	5.246.500,00
81	BATU KETULIS	WAY NGISON	12.333.000,00	9.102.500,00	3.230.500,00
82	BATU KETULIS	KUBU LIKU JAYA	14.812.700,00	9.614.500,00	5.198.200,00
83	BATU KETULIS	SUMBER REJO	11.292.700,00	7.656.600,00	3.636.100,00
84	BATU KETULIS	ATAR KUWAU	12.522.000,00	9.492.700,00	3.029.300,00
85	SEKINCAU	PAMPANGAN	18.776.800,00	14.377.900,00	4.398.900,00
86	SEKINCAU	WASPADA	18.568.400,00	14.074.500,00	4.493.900,00
87	SEKINCAU	TIGA JAYA	16.737.000,00	12.503.800,00	4.233.200,00
88	SEKINCAU	GIHAM SUKA MAJU	23.723.100,00	19.119.000,00	4.604.100,00
89	PAGAR DEWA	PAHAYU JAYA	17.615.800,00	13.995.100,00	3.620.700,00
90	PAGAR DEWA	BASUNGAN	17.646.200,00	11.247.000,00	6.399.200,00
91	PAGAR DEWA	MEKAR SARI	15.669.100,00	10.001.600,00	5.667.500,00
92	PAGAR DEWA	SIDO MULYO	30.459.800,00	24.277.100,00	6.182.700,00
93	PAGAR DEWA	SIDO DADI	12.148.600,00	8.125.600,00	4.023.000,00
94	PAGAR DEWA	MARGA JAYA	14.974.800,00	9.520.400,00	5.454.400,00
95	PAGAR DEWA	SUKA JAYA	14.677.400,00	10.988.600,00	3.688.800,00
96	PAGAR DEWA	BATU API	11.485.200,00	7.862.300,00	3.622.900,00
97	PAGAR DEWA	PAGAR DEWA	19.102.200,00	12.910.300,00	6.191.900,00
98	PAGAR DEWA	SUKA MULYA	17.266.400,00	10.895.200,00	6.371.200,00
99	BATU BRAK	PEKON BALAK	13.283.800,00	10.118.800,00	3.165.000,00
100	BATU BRAK	KEGERINGAN	16.874.700,00	12.917.900,00	3.956.800,00
101	BATU BRAK	KEMBAHANG	16.797.100,00	11.145.800,00	5.651.300,00
102	BATU BRAK	NEGERI RATU	14.886.900,00	10.098.900,00	4.788.000,00
103	BATU BRAK	KOTA BESI	17.666.400,00	14.028.900,00	3.637.500,00
104	BATU BRAK	SUKA BUMI	14.940.100,00	10.786.600,00	4.153.500,00
105	BATU BRAK	GUNUNG SUGIH	12.816.200,00	8.870.900,00	3.945.300,00
106	BATU BRAK	SUKA RAJA	10.695.200,00	7.638.200,00	3.057.000,00
107	BATU BRAK	CANGGU	12.281.800,00	9.681.800,00	2.600.000,00
108	BATU BRAK	KERANG	11.465.500,00	7.700.600,00	3.764.900,00
109	BATU BRAK	TEBA LOKH	11.421.800,00	8.733.800,00	2.688.000,00
110	SUOH	SUMBER AGUNG	16.129.000,00	10.374.200,00	5.754.800,00
111	SUOH	TUGU RATU	19.728.200,00	12.641.300,00	7.086.900,00
112	SUOH	SUKA MARGA	17.418.700,00	11.208.400,00	6.210.300,00
113	SUOH	BANDING AGUNG	16.851.600,00	12.789.900,00	4.061.700,00
114	SUOH	ROWO REJO	21.257.700,00	13.052.100,00	8.205.600,00
115	SUOH	SIDO REJO	17.816.200,00	13.614.100,00	4.202.100,00
116	SUOH	RINGIN SARI	13.494.700,00	8.934.300,00	4.560.400,00
117	BANDAR NEGERI SUOH	SUOH	25.852.500,00	20.020.700,00	5.831.800,00
118	BANDAR NEGERI SUOH	SRI MULYO	12.280.300,00	8.343.100,00	3.937.200,00
119	BANDAR NEGERI SUOH	BANDAR AGUNG	47.567.900,00	31.918.400,00	15.649.500,00
120	BANDAR NEGERI SUOH	RINGIN JAYA	14.732.900,00	9.662.600,00	5.070.300,00
121	BANDAR NEGERI SUOH	BUMI HANTATAI	25.530.000,00	16.692.400,00	8.837.600,00
122	BANDAR NEGERI SUOH	GUNUNG RATU	15.251.600,00	9.958.200,00	5.293.400,00
123	BANDAR NEGERI SUOH	TANJUNG SARI	13.250.900,00	10.067.200,00	3.183.700,00
124	BANDAR NEGERI SUOH	NEGERI JAYA	17.296.500,00	12.544.200,00	4.752.300,00
125	BANDAR NEGERI SUOH	TEMBELANG	14.755.700,00	10.900.800,00	3.854.900,00
126	BANDAR NEGERI SUOH	TRI MEKAR JAYA	14.246.200,00	10.602.700,00	3.643.500,00
127	GEDUNG SURIAN	CIPTA WARAS	18.119.300,00	12.161.300,00	5.958.000,00
128	GEDUNG SURIAN	GEDUNG SURIAN	20.921.100,00	13.747.000,00	7.174.100,00
129	GEDUNG SURIAN	PURA MEKAR	18.645.500,00	14.419.900,00	4.225.600,00
130	GEDUNG SURIAN	TRI MULYO	19.178.600,00	14.756.600,00	4.422.000,00
131	GEDUNG SURIAN	MEKAR JAYA	18.759.200,00	12.087.400,00	6.671.800,00
		JUMLAH	**2.037.512.700,00**	**1.473.076.700,00**	**564.436.000,00**

OPD
5.4.01.02
5.4.01.02.01
5.4.01.02.01.0001

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

No	NAMA KECAMATAN	NAMA PEKON	333.021.700,00	219.786.900,00	113.234.800,00
			JUMLAH (Rp)		
			ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	BALIK BUKIT	KUBU PERAHU	15.236.400,00	8.752.600,00	6.483.800,00
2	BALIK BUKIT	WAY EMPULAU ULU	2.642.200,00	1.901.000,00	741.200,00
3	BALIK BUKIT	WATAS	2.619.200,00	1.735.500,00	883.700,00
4	BALIK BUKIT	PADANG DALOM	2.393.000,00	1.701.300,00	691.700,00
5	BALIK BUKIT	GUNUNG SUGIH	2.604.200,00	1.722.800,00	881.400,00
6	BALIK BUKIT	SEBARUS	4.930.500,00	3.734.300,00	1.196.200,00
7	BALIK BUKIT	PADANG CAHYA	2.651.000,00	1.707.900,00	943.100,00
8	BALIK BUKIT	SUKARAME	2.826.100,00	1.668.800,00	1.157.300,00
9	BALIK BUKIT	BAHWAY	3.406.100,00	2.512.500,00	893.600,00
10	BALIK BUKIT	SEDAMPAH INDAH	2.319.800,00	1.642.600,00	677.200,00
11	SUKAU	TANJUNG RAYA	5.627.500,00	3.931.000,00	1.696.500,00
12	SUKAU	HANAKAU	2.563.800,00	1.838.200,00	725.600,00
13	SUKAU	BUAY NYERUPA	3.468.400,00	2.363.200,00	1.105.200,00
14	SUKAU	TAPAK SIRING	2.998.800,00	1.987.700,00	1.011.100,00
15	SUKAU	PAGAR DEWA	4.471.400,00	2.986.200,00	1.485.200,00
16	SUKAU	JAGA RAGA	2.413.100,00	1.716.800,00	696.300,00
17	SUKAU	SUKA MULYA	2.101.300,00	1.467.300,00	634.000,00
18	SUKAU	BANDAR BARU	3.141.600,00	1.921.500,00	1.220.100,00
19	SUKAU	BUMI JAYA	2.071.200,00	1.443.700,00	627.500,00
20	SUKAU	TEBA PERING RAYA	2.569.500,00	1.662.200,00	907.300,00
21	LOMBOK SEMINUNG	LOMBOK	8.402.400,00	6.228.500,00	2.173.900,00
22	LOMBOK SEMINUNG	HENI ARONG	1.568.900,00	1.041.000,00	527.900,00
23	LOMBOK SEMINUNG	SUKA BANJAR	1.693.400,00	1.141.000,00	552.400,00
24	LOMBOK SEMINUNG	LUMBOK TIMUR	1.557.000,00	1.031.700,00	525.300,00
25	LOMBOK SEMINUNG	SUKA BANJAR II UJUNG REMBUN	1.574.500,00	1.045.400,00	529.100,00
26	LOMBOK SEMINUNG	SUKA MAJU	1.689.700,00	1.138.500,00	551.200,00
27	LOMBOK SEMINUNG	UJUNG	1.552.700,00	1.028.400,00	524.300,00
28	LOMBOK SEMINUNG	KEAGUNGAN	1.699.600,00	1.146.300,00	553.300,00
29	LOMBOK SEMINUNG	TAWAN SUKA MULYA	1.542.700,00	1.020.400,00	522.300,00
30	LOMBOK SEMINUNG	PANCUR MAS	1.540.100,00	1.018.300,00	521.800,00
31	LOMBOK SEMINUNG	LOMBOK SELATAN	1.844.700,00	1.262.100,00	582.600,00
32	SUMBERJAYA	SIMPANG SARI	19.616.300,00	11.911.500,00	7.704.800,00
33	SUMBERJAYA	SUKA JAYA	2.222.200,00	1.563.700,00	658.500,00
34	SUMBERJAYA	SINDANG PAGAR	2.216.700,00	1.559.900,00	656.800,00
35	SUMBERJAYA	SUKA PURA	2.809.700,00	1.735.400,00	1.074.300,00
36	SUMBERJAYA	WAY PETAY	3.116.800,00	2.280.400,00	836.400,00
37	KEBUN TEBU	PURA JAYA	9.189.300,00	6.954.800,00	2.234.500,00
38	KEBUN TEBU	PURA WIWITAN	2.841.300,00	1.680.600,00	1.160.700,00
39	KEBUN TEBU	TRIBUDI SYUKUR	2.099.400,00	1.465.300,00	634.100,00
40	KEBUN TEBU	MUARA JAYA I	1.856.200,00	1.270.900,00	585.300,00
41	KEBUN TEBU	MUARA JAYA II	2.598.500,00	1.486.700,00	1.111.800,00
42	KEBUN TEBU	TRIBUDI MAKMUR	1.814.700,00	1.237.200,00	577.500,00
43	KEBUN TEBU	TUGU MULYA	1.745.100,00	1.182.400,00	562.700,00
44	KEBUN TEBU	CIPTA MULYA	1.760.600,00	1.194.800,00	565.800,00
45	KEBUN TEBU	MUARA BARU	1.894.300,00	1.301.800,00	592.500,00
46	KEBUN TEBU	SINAR LUAS	1.829.200,00	1.249.600,00	579.600,00
47	WAY TENONG	MUTAR ALAM	1.978.800,00	1.369.000,00	609.800,00
48	WAY TENONG	KARANG AGUNG	3.965.200,00	2.459.600,00	1.505.600,00
49	WAY TENONG	PURA LAKSANA	1.956.700,00	1.351.800,00	604.900,00
50	WAY TENONG	TANJUNG RAYA	1.959.300,00	1.353.300,00	606.000,00
51	WAY TENONG	SUKANANTI	2.606.900,00	1.872.100,00	734.800,00
52	WAY TENONG	SUKA RAJA	2.334.800,00	1.653.900,00	680.900,00
53	WAY TENONG	PADANG TAMBAK	2.656.100,00	1.721.500,00	934.600,00
54	WAY TENONG	TAMBAK JAYA	2.030.200,00	1.410.600,00	619.600,00
55	AIR HITAM	SIDODADI	1.776.800,00	1.207.700,00	569.100,00
56	AIR HITAM	SEMARANG JAYA	2.041.700,00	1.229.800,00	811.900,00
57	AIR HITAM	SUMBER ALAM	2.096.200,00	1.273.800,00	822.400,00
58	AIR HITAM	GUNUNG TERANG	2.536.500,00	1.518.200,00	1.018.300,00
59	AIR HITAM	SUKA JADI	1.713.400,00	1.156.800,00	556.600,00
60	AIR HITAM	SRI MENANTI	2.322.100,00	1.346.100,00	976.000,00
61	AIR HITAM	SINAR JAYA	1.579.600,00	1.049.400,00	530.200,00

No	NAMA KECAMATAN	NAMA PEKON	JUMLAH (Rp)		
			ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
62	AIR HITAM	RIGIS JAYA	1.578.700,00	1.048.700,00	530.000,00
63	AIR HITAM	SUKA DAMAI	1.554.600,00	1.029.800,00	524.800,00
64	AIR HITAM	MANGGARAI	1.555.200,00	1.030.200,00	525.000,00
65	BELALAU	KENALI	5.815.300,00	4.081.000,00	1.734.300,00
66	BELALAU	KEJADIAN	1.632.100,00	1.091.800,00	540.300,00
67	BELALAU	BUMI AGUNG	1.563.400,00	1.036.600,00	526.800,00
68	BELALAU	TURGAK	1.694.000,00	1.141.400,00	552.600,00
69	BELALAU	BEDUDU	1.875.300,00	1.286.100,00	589.200,00
70	BELALAU	SUKARAME	1.652.300,00	1.107.800,00	544.500,00
71	BELALAU	HUJUNG	1.627.400,00	1.087.100,00	540.300,00
72	BELALAU	SERUNGKUK	1.547.800,00	1.025.000,00	522.800,00
73	BELALAU	SUKA MAKMUR	1.542.800,00	1.020.700,00	522.100,00
74	BELALAU	PAJAR AGUNG	1.539.000,00	1.017.500,00	521.500,00
75	BELALAU	ARGO MULYO	1.775.000,00	1.206.700,00	568.300,00
76	BATU KETULIS	BATU KEBAYAN	2.229.200,00	1.380.600,00	848.600,00
77	BATU KETULIS	ATAR BAWANG	2.109.000,00	1.283.800,00	825.200,00
78	BATU KETULIS	CAMPANG TIGA	1.579.200,00	1.049.800,00	529.400,00
79	BATU KETULIS	LUAS	1.637.100,00	1.095.700,00	541.400,00
80	BATU KETULIS	BAKHU	2.480.000,00	1.472.800,00	1.007.200,00
81	BATU KETULIS	WAY NGISON	1.642.600,00	1.100.000,00	542.600,00
82	BATU KETULIS	KUBU LIKU JAYA	1.991.200,00	1.180.600,00	810.600,00
83	BATU KETULIS	SUMBER REJO	1.546.900,00	1.023.700,00	523.200,00
84	BATU KETULIS	ATAR KUWAU	1.567.000,00	1.039.500,00	527.500,00
85	SEKINCAU	PAMPANGAN	2.547.800,00	1.526.500,00	1.021.300,00
86	SEKINCAU	WASPADA	2.026.700,00	1.405.800,00	620.900,00
87	SEKINCAU	TIGA JAYA	2.595.600,00	1.564.700,00	1.030.900,00
88	SEKINCAU	GIHAM SUKA MAJU	4.021.300,00	3.003.800,00	1.017.500,00
89	PAGAR DEWA	PAHAYU JAYA	2.322.800,00	1.660.100,00	662.700,00
90	PAGAR DEWA	BASUNGAN	2.186.100,00	1.548.000,00	638.100,00
91	PAGAR DEWA	MEKAR SARI	1.733.200,00	1.181.100,00	552.100,00
92	PAGAR DEWA	SIDO MULYO	2.421.500,00	1.453.300,00	968.200,00
93	PAGAR DEWA	SIDO DADI	1.684.800,00	1.142.700,00	542.100,00
94	PAGAR DEWA	MARGA JAYA	1.722.400,00	1.169.100,00	553.300,00
95	PAGAR DEWA	SUKA JAYA	1.576.600,00	1.057.300,00	519.300,00
96	PAGAR DEWA	BATU API	1.542.400,00	1.024.000,00	518.400,00
97	PAGAR DEWA	PAGAR DEWA	1.983.600,00	1.190.400,00	793.200,00
98	PAGAR DEWA	SUKA MULYA	1.613.300,00	1.085.900,00	527.400,00
99	BATU BRAK	PEKON BALAK	2.288.100,00	1.617.500,00	670.600,00
100	BATU BRAK	KEGERINGAN	2.431.100,00	1.461.200,00	969.900,00
101	BATU BRAK	KEMBAHANG	2.365.200,00	1.407.600,00	957.600,00
102	BATU BRAK	NEGERI RATU	1.725.600,00	1.166.300,00	559.300,00
103	BATU BRAK	KOTA BESI	3.089.900,00	1.960.600,00	1.129.300,00
104	BATU BRAK	SUKA BUMI	1.807.900,00	1.233.000,00	574.900,00
105	BATU BRAK	GUNUNG SUGIH	1.558.500,00	1.032.800,00	525.700,00
106	BATU BRAK	SUKA RAJA	1.617.600,00	1.080.300,00	537.300,00
107	BATU BRAK	CANGGU	2.165.600,00	1.220.900,00	944.700,00
108	BATU BRAK	KERANG	1.547.200,00	1.023.900,00	523.300,00
109	BATU BRAK	TEBA LIOKH	1.556.900,00	1.031.600,00	525.300,00
110	SUOH	SUMBER AGUNG	2.554.500,00	1.531.900,00	1.022.600,00
111	SUOH	TUGU RATU	2.680.500,00	1.531.700,00	1.148.800,00
112	SUOH	SUKA MARGA	1.927.100,00	1.326.900,00	600.200,00
113	SUOH	BANDING AGUNG	2.420.200,00	1.722.100,00	698.100,00
114	SUOH	ROWO REJO	1.759.300,00	1.191.900,00	567.400,00
115	SUOH	SIDO REJO	1.633.100,00	1.091.500,00	541.600,00
116	SUOH	RINGIN SARI	1.582.100,00	1.051.400,00	530.700,00
117	BANDAR NEGERI SUOH	SUOH	3.063.800,00	1.938.000,00	1.125.800,00
118	BANDAR NEGERI SUOH	SRI MULYO	1.982.900,00	1.372.800,00	610.100,00
119	BANDAR NEGERI SUOH	BANDAR AGUNG	3.496.800,00	2.024.200,00	1.472.600,00
120	BANDAR NEGERI SUOH	RINGIN JAYA	1.883.900,00	1.292.900,00	591.000,00
121	BANDAR NEGERI SUOH	BUMI HANTATAI	1.835.600,00	1.252.900,00	582.700,00
122	BANDAR NEGERI SUOH	GUNUNG RATU	1.966.200,00	1.358.800,00	607.400,00
123	BANDAR NEGERI SUOH	TANJUNG SARI	1.560.600,00	1.035.400,00	525.200,00
124	BANDAR NEGERI SUOH	NEGERI JAYA	1.637.500,00	1.095.000,00	542.500,00
125	BANDAR NEGERI SUOH	TEMBELANG	1.799.400,00	1.225.500,00	573.900,00
126	BANDAR NEGERI SUOH	TRI MEKAR JAYA	2.178.900,00	1.231.400,00	947.500,00
127	GEDUNG SURIAN	CIPTA WARAS	2.230.800,00	1.272.300,00	958.500,00
128	GEDUNG SURIAN	GEDUNG SURIAN	2.545.800,00	1.524.300,00	1.021.500,00
129	GEDUNG SURIAN	PURA MEKAR	3.697.000,00	2.446.700,00	1.250.300,00

No	NAMA KECAMATAN	NAMA PEKON	JUMLAH (Rp)		
			ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
130	GEDUNG SURIAN	TRI MULYO	1.878.200,00	1.287.500,00	590.700,00
131	GEDUNG SURIAN	MEKAR JAYA	1.955.300,00	1.349.200,00	606.100,00
		JUMLAH	**333.021.700,00**	**219.786.900,00**	**113.234.800,00**

9

OPD **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

5.4.02.05 **Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa**

5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

5.4.02.05.02.0004 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa

					118.449.735.000,00	118.449.735.000,00	0,00
			JUMLAH (Rp)				
No	NAMA KECAMATAN	NAMA PEKON	ANGGARAN MURNI (PMK 146 TAHUN 2023)	INSENTIF DD RMK NO 352 TAHUN 2024	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
a	b	c	d	e	f = d+e	g	h = f-g
1	Balik Bukit	Kubu Perahu	1.093.463.000,00		1.093.463.000,00	1.093.463.000,00	0,00
2	Balik Bukit	Padang Cahya	1.351.615.000,00	144.516.000,00	1.496.131.000,00	1.496.131.000,00	0,00
3	Balik Bukit	Sebarus	928.326.000,00		928.326.000,00	928.326.000,00	0,00
4	Balik Bukit	Way Empulau Ulu	858.517.000,00		858.517.000,00	858.517.000,00	0,00
5	Balik Bukit	Gunung Sugih	1.010.881.000,00		1.010.881.000,00	1.010.881.000,00	0,00
6	Balik Bukit	Wates	1.038.846.000,00		1.038.846.000,00	1.038.846.000,00	0,00
7	Balik Bukit	Padang Dalom	748.556.000,00	144.516.000,00	893.072.000,00	893.072.000,00	0,00
8	Balik Bukit	Sukarame	1.049.210.000,00		1.049.210.000,00	1.049.210.000,00	0,00
9	Balik Bukit	Bahway	1.165.063.000,00		1.165.063.000,00	1.165.063.000,00	0,00
10	Balik Bukit	Sedampah Indah	728.262.000,00		728.262.000,00	728.262.000,00	0,00
11	Sumber Jaya	Simpang Sari	1.035.363.000,00	144.516.000,00	1.179.879.000,00	1.179.879.000,00	0,00
12	Sumber Jaya	Sukajaya	849.165.000,00		849.165.000,00	849.165.000,00	0,00
13	Sumber Jaya	Sindang Pagar	855.718.000,00	144.516.000,00	1.000.234.000,00	1.000.234.000,00	0,00
14	Sumber Jaya	Sukapura	896.617.000,00		896.617.000,00	896.617.000,00	0,00
15	Sumber Jaya	Way Petai	1.115.542.000,00		1.115.542.000,00	1.115.542.000,00	0,00
16	Belalau	Kemili	917.742.000,00		917.742.000,00	917.742.000,00	0,00
17	Belalau	Kejadian	729.867.000,00		729.867.000,00	729.867.000,00	0,00
18	Belalau	Bumi Agung	617.890.000,00		617.890.000,00	617.890.000,00	0,00
19	Belalau	Tungak	720.627.000,00		720.627.000,00	720.627.000,00	0,00
20	Belalau	Bedudu	810.350.000,00		810.350.000,00	810.350.000,00	0,00
21	Belalau	Sukarame	701.711.000,00		701.711.000,00	701.711.000,00	0,00
22	Belalau	Hujung	1.142.517.000,00		1.142.517.000,00	1.142.517.000,00	0,00
23	Belalau	Serungkuk	783.941.000,00		783.941.000,00	783.941.000,00	0,00
24	Belalau	Suka Makmur	795.159.000,00		795.159.000,00	795.159.000,00	0,00
25	Belalau	Fajar Agung	723.120.000,00		723.120.000,00	723.120.000,00	0,00
26	Way Tenong	Purakaksana	885.656.000,00	144.516.000,00	1.030.172.000,00	1.030.172.000,00	0,00
27	Way Tenong	Karang Agung	996.676.000,00	144.516.000,00	1.141.192.000,00	1.141.192.000,00	0,00
28	Way Tenong	Mutar Alam	910.149.000,00		910.149.000,00	910.149.000,00	0,00
29	Way Tenong	Tanjung Raya	815.413.000,00	144.516.000,00	959.929.000,00	959.929.000,00	0,00
30	Way Tenong	Sukamanti	1.098.796.000,00	144.516.000,00	1.243.312.000,00	1.243.312.000,00	0,00
31	Way Tenong	Sukaraja	950.891.000,00		950.891.000,00	950.891.000,00	0,00
32	Way Tenong	Padang Tambak	1.063.429.000,00		1.063.429.000,00	1.063.429.000,00	0,00
33	Way Tenong	Tambak Jaya	1.174.173.000,00	144.516.000,00	1.318.689.000,00	1.318.689.000,00	0,00
34	Sekincau	Pampangan	998.369.000,00		998.369.000,00	998.369.000,00	0,00
35	Sekincau	Waspada	838.906.000,00		838.906.000,00	838.906.000,00	0,00
36	Sekincau	Tiga Jaya	843.317.000,00		843.317.000,00	843.317.000,00	0,00
37	Sekincau	Gihom Sukamaju	925.943.000,00	144.516.000,00	1.070.459.000,00	1.070.459.000,00	0,00
38	Suoh	Suka Marga	909.653.000,00	144.516.000,00	1.054.169.000,00	1.054.169.000,00	0,00
39	Suoh	Sumber Agung	842.099.000,00		842.099.000,00	842.099.000,00	0,00
40	Suoh	Tugurejo	1.011.266.000,00		1.011.266.000,00	1.011.266.000,00	0,00
41	Suoh	Banding Agung	844.080.000,00		844.080.000,00	844.080.000,00	0,00
42	Suoh	Roworejo	1.077.550.000,00		1.077.550.000,00	1.077.550.000,00	0,00
43	Suoh	Sidorejo	877.069.000,00		877.069.000,00	877.069.000,00	0,00
44	Suoh	Ringin Sari	792.038.000,00		792.038.000,00	792.038.000,00	0,00
45	Batu Brak	Kembahang	788.226.000,00		788.226.000,00	788.226.000,00	0,00
46	Batu Brak	Negeri Ratu	715.191.000,00		715.191.000,00	715.191.000,00	0,00
47	Batu Brak	Kegeringan	857.517.000,00		857.517.000,00	857.517.000,00	0,00
48	Batu Brak	Gunung Sugih	691.003.000,00		691.003.000,00	691.003.000,00	0,00
49	Batu Brak	Pekon Balak	1.006.216.000,00		1.006.216.000,00	1.006.216.000,00	0,00
50	Batu Brak	Sukabumi	886.919.000,00		886.919.000,00	886.919.000,00	0,00
51	Batu Brak	Canggu	742.051.000,00	144.516.000,00	886.567.000,00	886.567.000,00	0,00
52	Batu Brak	Kota Besi	1.018.560.000,00		1.018.560.000,00	1.018.560.000,00	0,00
53	Batu Brak	Sukaraja	680.879.000,00		680.879.000,00	680.879.000,00	0,00
54	Batu Brak	Kering	676.130.000,00		676.130.000,00	676.130.000,00	0,00
55	Batu Brak	Teba Liyokh	756.269.000,00		756.269.000,00	756.269.000,00	0,00
56	Sukau	Tanjung Raya	1.078.929.000,00	144.516.000,00	1.223.445.000,00	1.223.445.000,00	0,00
57	Sukau	Harakau	853.455.000,00		853.455.000,00	853.455.000,00	0,00
58	Sukau	Buay Nyerupa	810.919.000,00		810.919.000,00	810.919.000,00	0,00
59	Sukau	Tapak Siring	741.841.000,00		741.841.000,00	741.841.000,00	0,00
60	Sukau	Jaga Raga	831.985.000,00		831.985.000,00	831.985.000,00	0,00
61	Sukau	Pagar Dewa	980.721.000,00	144.516.000,00	1.125.237.000,00	1.125.237.000,00	0,00
62	Sukau	Suka Mulya	695.245.000,00		695.245.000,00	695.245.000,00	0,00
63	Sukau	Bandar Baru	807.353.000,00		807.353.000,00	807.353.000,00	0,00
64	Sukau	Bumi Jaya	775.715.000,00	144.516.000,00	920.231.000,00	920.231.000,00	0,00
65	Sukau	Teba Pering Jaya	739.333.000,00	144.516.000,00	883.849.000,00	883.849.000,00	0,00
66	Gedung Surian	Gedung Surian	885.536.000,00		885.536.000,00	885.536.000,00	0,00
67	Gedung Surian	Pura Mekar	1.125.926.000,00	144.516.000,00	1.270.442.000,00	1.270.442.000,00	0,00
68	Gedung Surian	Cipta Waras	841.267.000,00		841.267.000,00	841.267.000,00	0,00
69	Gedung Surian	Tri Mulyo	1.315.289.000,00		1.315.289.000,00	1.315.289.000,00	0,00
70	Gedung Surian	Mekar Jaya	891.780.000,00		891.780.000,00	891.780.000,00	0,00

No	NAMA KECAMATAN	NAMA PEKON	JUMLAH (Rp)				
			ANGGARAN MURNI (PMK 146 TAHUN 2023)	INSENTIF DD KMK NO 352 TAHUN 2024	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
71	Kebun Tebu	Pura Jaya	1.181.691.000,00		1.181.691.000,00	1.181.691.000,00	0,00
72	Kebun Tebu	Pura Wiwitan	834.974.000,00	144.516.000,00	979.490.000,00	979.490.000,00	0,00
73	Kebun Tebu	Tribudi Syukur	831.099.000,00		831.099.000,00	831.099.000,00	0,00
74	Kebun Tebu	Muara Jaya I	800.704.000,00		800.704.000,00	800.704.000,00	0,00
75	Kebun Tebu	Muara Jaya II	1.024.818.000,00	144.516.000,00	1.169.334.000,00	1.169.334.000,00	0,00
76	Kebun Tebu	Tribudi Makmur	751.224.000,00		751.224.000,00	751.224.000,00	0,00
77	Kebun Tebu	Tugu Mulya	849.293.000,00	144.516.000,00	993.809.000,00	993.809.000,00	0,00
78	Kebun Tebu	Cipta Mulya	809.554.000,00		809.554.000,00	809.554.000,00	0,00
79	Kebun Tebu	Muara Baru	723.721.000,00	144.516.000,00	868.237.000,00	868.237.000,00	0,00
80	Kebun Tebu	Sinar Luas	723.320.000,00		723.320.000,00	723.320.000,00	0,00
81	Air Hitam	Sidodadi	960.452.000,00		960.452.000,00	960.452.000,00	0,00
82	Air Hitam	Semarang Jaya	872.524.000,00		872.524.000,00	872.524.000,00	0,00
83	Air Hitam	Sumber Alam	720.073.000,00		720.073.000,00	720.073.000,00	0,00
84	Air Hitam	Gunung Terang	756.221.000,00		756.221.000,00	756.221.000,00	0,00
85	Air Hitam	Suka Jadi	744.805.000,00		744.805.000,00	744.805.000,00	0,00
86	Air Hitam	Sri Menanti	679.155.000,00	144.516.000,00	823.671.000,00	823.671.000,00	0,00
87	Air Hitam	Sinar Jaya	680.679.000,00		680.679.000,00	680.679.000,00	0,00
88	Air Hitam	Rigis Jaya	970.343.000,00		970.343.000,00	970.343.000,00	0,00
89	Air Hitam	Suka Damai	735.688.000,00		735.688.000,00	735.688.000,00	0,00
90	Air Hitam	Manggarai	746.849.000,00		746.849.000,00	746.849.000,00	0,00
91	Pagar Dewa	Pahayu Jaya	826.178.000,00		826.178.000,00	826.178.000,00	0,00
92	Pagar Dewa	Basungan	846.499.000,00		846.499.000,00	846.499.000,00	0,00
93	Pagar Dewa	Mekar Sari	778.928.000,00		778.928.000,00	778.928.000,00	0,00
94	Pagar Dewa	Sidomulyo	936.240.000,00	144.516.000,00	1.080.756.000,00	1.080.756.000,00	0,00
95	Pagar Dewa	Sidodadi	810.112.000,00		810.112.000,00	810.112.000,00	0,00
96	Pagar Dewa	Manga Jaya	1.071.773.000,00		1.071.773.000,00	1.071.773.000,00	0,00
97	Pagar Dewa	Suka Jaya	758.042.000,00		758.042.000,00	758.042.000,00	0,00
98	Pagar Dewa	Batu Api	752.847.000,00		752.847.000,00	752.847.000,00	0,00
99	Pagar Dewa	Pagar Dewa	877.568.000,00		877.568.000,00	877.568.000,00	0,00
100	Pagar Dewa	Suka Mulya	729.861.000,00		729.861.000,00	729.861.000,00	0,00
101	Batu Ketulis	Argomulyo	875.586.000,00		875.586.000,00	875.586.000,00	0,00
102	Batu Ketulis	Batu Kebayan	706.710.000,00		706.710.000,00	706.710.000,00	0,00
103	Batu Ketulis	Atar Bawang	764.395.000,00	144.516.000,00	908.911.000,00	908.911.000,00	0,00
104	Batu Ketulis	Campang Tiga	790.540.000,00	144.516.000,00	935.056.000,00	935.056.000,00	0,00
105	Batu Ketulis	Luas	1.046.454.000,00		1.046.454.000,00	1.046.454.000,00	0,00
106	Batu Ketulis	Bakhu	849.266.000,00		849.266.000,00	849.266.000,00	0,00
107	Batu Ketulis	Way Ngison	786.239.000,00		786.239.000,00	786.239.000,00	0,00
108	Batu Ketulis	Kubu Liku Jaya	822.098.000,00	144.516.000,00	966.614.000,00	966.614.000,00	0,00
109	Batu Ketulis	Sumber Rejo	652.144.000,00		652.144.000,00	652.144.000,00	0,00
110	Batu Ketulis	Atar Kawau	769.593.000,00	144.516.000,00	914.109.000,00	914.109.000,00	0,00
111	Lumbok Seminung	Lombok	1.004.193.000,00		1.004.193.000,00	1.004.193.000,00	0,00
112	Lumbok Seminung	Heni Arong	679.375.000,00		679.375.000,00	679.375.000,00	0,00
113	Lumbok Seminung	Suka Banjar	678.823.000,00		678.823.000,00	678.823.000,00	0,00
114	Lumbok Seminung	Lombok Timur	969.907.000,00		969.907.000,00	969.907.000,00	0,00
115	Lumbok Seminung	Suka Banjar II Ujung Rimi	710.930.000,00		710.930.000,00	710.930.000,00	0,00
116	Lumbok Seminung	Suka Maju	694.152.000,00		694.152.000,00	694.152.000,00	0,00
117	Lumbok Seminung	Ujung	874.206.000,00		874.206.000,00	874.206.000,00	0,00
118	Lumbok Seminung	Kesagungan	955.377.000,00		955.377.000,00	955.377.000,00	0,00
119	Lumbok Seminung	Tawan Suka Mulya	796.636.000,00		796.636.000,00	796.636.000,00	0,00
120	Lumbok Seminung	Pancur Mas	662.973.000,00		662.973.000,00	662.973.000,00	0,00
121	Lumbok Seminung	Lombok Selatan	870.740.000,00		870.740.000,00	870.740.000,00	0,00
122	Bandar Negeri Suoh	Suoh	1.085.798.000,00		1.085.798.000,00	1.085.798.000,00	0,00
123	Bandar Negeri Suoh	Srimulyo	990.074.000,00		990.074.000,00	990.074.000,00	0,00
124	Bandar Negeri Suoh	Bandar Agung	1.345.314.000,00		1.345.314.000,00	1.345.314.000,00	0,00
125	Bandar Negeri Suoh	Ringin Jaya	838.280.000,00		838.280.000,00	838.280.000,00	0,00
126	Bandar Negeri Suoh	Bumi Hantatai	953.011.000,00		953.011.000,00	953.011.000,00	0,00
127	Bandar Negeri Suoh	Gunungrejo	1.125.012.000,00		1.125.012.000,00	1.125.012.000,00	0,00
128	Bandar Negeri Suoh	Tanjungsari	688.023.000,00		688.023.000,00	688.023.000,00	0,00
129	Bandar Negeri Suoh	Negeri Jaya	1.161.204.000,00		1.161.204.000,00	1.161.204.000,00	0,00
130	Bandar Negeri Suoh	Tembelang	795.179.000,00		795.179.000,00	795.179.000,00	0,00
131	Bandar Negeri Suoh	Tri Mekar Jaya	899.840.000,00		899.840.000,00	899.840.000,00	0,00
		JUMLAH	**114.547.803.000,00**	**3.901.932.000,00**	**118.449.735.000,00**	**118.449.735.000,00**	**0,00**

4

Lampiran 11.

OPD
5.4.02
5.4.02.05
5.4.02.05.02
5.4.02.05.02.0005

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa

			56.266.301.000,00	56.266.301.000,00	0,00
No	NAMA KECAMATAN	NAMA PEKON	JUMLAH (Rp)		
			ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	Balik Bukit	Kubu Perahu	360.581.650,00	360.581.650,00	0,00
2	Balik Bukit	Padang Cahya	647.077.800,00	647.077.800,00	0,00
3	Balik Bukit	Sebarus	501.277.800,00	501.277.800,00	0,00
4	Balik Bukit	Way Empulau Ulu	491.677.800,00	491.677.800,00	0,00
5	Balik Bukit	Gunung Sugih	384.877.800,00	384.877.800,00	0,00
6	Balik Bukit	Wates	409.177.800,00	409.177.800,00	0,00
7	Balik Bukit	Padang Dalom	409.177.800,00	409.177.800,00	0,00
8	Balik Bukit	Sukarame	525.577.800,00	525.577.800,00	0,00
9	Balik Bukit	Bahway	549.877.800,00	549.877.800,00	0,00
10	Balik Bukit	Sedampah Indah	384.877.800,00	384.877.800,00	0,00
11	Sumber Jaya	Simpangsari	491.677.800,00	491.677.800,00	0,00
12	Sumber Jaya	Sukajaya	418.777.800,00	418.777.800,00	0,00
13	Sumber Jaya	Sindang Pagar	433.477.800,00	433.477.800,00	0,00
14	Sumber Jaya	Sukapura	515.977.800,00	515.977.800,00	0,00
15	Sumber Jaya	Way Petai	574.177.800,00	574.177.800,00	0,00
16	Belalau	Kenali	394.477.800,00	394.477.800,00	0,00
17	Belalau	Kejadian	360.577.800,00	360.577.800,00	0,00
18	Belalau	Bumi Agung	360.577.800,00	360.577.800,00	0,00
19	Belalau	Turgak	336.277.800,00	336.277.800,00	0,00
20	Belalau	Bedudu	336.277.800,00	336.277.800,00	0,00
21	Belalau	Sukarame	360.577.800,00	360.577.800,00	0,00
22	Belalau	Hujung	428.377.800,00	428.377.800,00	0,00
23	Belalau	Serungkuk	360.577.800,00	360.577.800,00	0,00
24	Belalau	Suka Makmur	384.877.800,00	384.877.800,00	0,00
25	Belalau	Fajar Agung	311.977.800,00	311.977.800,00	0,00
26	Way Tenong	Puralaksana	452.677.800,00	452.677.800,00	0,00
27	Way Tenong	Karang Agung	443.077.800,00	443.077.800,00	0,00
28	Way Tenong	Mutar Alam	443.077.800,00	443.077.800,00	0,00
29	Way Tenong	Tanjungraya	443.077.800,00	443.077.800,00	0,00
30	Way Tenong	Sukananti	428.377.800,00	428.377.800,00	0,00
31	Way Tenong	Sukaraja	443.077.800,00	443.077.800,00	0,00
32	Way Tenong	Padang Tambak	452.677.800,00	452.677.800,00	0,00
33	Way Tenong	Tambak Jaya	443.077.800,00	443.077.800,00	0,00
34	Sekincau	Pampangan	549.877.800,00	549.877.800,00	0,00
35	Sekincau	Waspada	433.477.800,00	433.477.800,00	0,00
36	Sekincau	Tigajaya	491.677.800,00	491.677.800,00	0,00
37	Sekincau	Giham Sukamaju	525.577.800,00	525.577.800,00	0,00
38	Suoh	Suka Marga	467.377.800,00	467.377.800,00	0,00
39	Suoh	Sumber Agung	418.777.800,00	418.777.800,00	0,00
40	Suoh	Tugu Ratu	525.577.800,00	525.577.800,00	0,00
41	Suoh	Banding Agung	418.777.800,00	418.777.800,00	0,00
42	Suoh	Rowo Rejo	467.377.800,00	467.377.800,00	0,00
43	Suoh	Sido Rejo	384.877.800,00	384.877.800,00	0,00
44	Suoh	Ringin Sari	409.177.800,00	409.177.800,00	0,00
45	Batu Brak	Kembahang	467.377.800,00	467.377.800,00	0,00
46	Batu Brak	Negeri Ratu	384.877.800,00	384.877.800,00	0,00
47	Batu Brak	Kegeringan	433.477.800,00	433.477.800,00	0,00
48	Batu Brak	Gunung Sugih	336.277.800,00	336.277.800,00	0,00
49	Batu Brak	Pekon Balak	409.177.800,00	409.177.800,00	0,00
50	Batu Brak	Sukabumi	457.777.800,00	457.777.800,00	0,00

No	NAMA KECAMATAN	NAMA PEKON	JUMLAH (Rp)		
			ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
51	Batu Brak	Canggu	409.177.800,00	409.177.800,00	0,00
52	Batu Brak	Kotabesi	491.677.800,00	491.677.800,00	0,00
53	Batu Brak	Sukaraja	311.977.800,00	311.977.800,00	0,00
54	Batu Brak	Kerang	336.277.800,00	336.277.800,00	0,00
55	Batu Brak	Teba Liokh	360.577.800,00	360.577.800,00	0,00
56	Sukau	Tanjung Raya	622.777.800,00	622.777.800,00	0,00
57	Sukau	Hanakau	564.577.800,00	564.577.800,00	0,00
58	Sukau	Buay Nyerupa	574.177.800,00	574.177.800,00	0,00
59	Sukau	Tapak Siring	409.177.800,00	409.177.800,00	0,00
60	Sukau	Jaga Raga	409.177.800,00	409.177.800,00	0,00
61	Sukau	Pagar Dewa	515.977.800,00	515.977.800,00	0,00
62	Sukau	Suka Mulya	433.477.800,00	433.477.800,00	0,00
63	Sukau	Bandar Baru	409.177.800,00	409.177.800,00	0,00
64	Sukau	Bumi Jaya	384.877.800,00	384.877.800,00	0,00
65	Sukau	Teba Pering Jaya	409.177.800,00	409.177.800,00	0,00
66	Gedung Surian	Gedung Surian	540.277.800,00	540.277.800,00	0,00
67	Gedung Surian	Puramekar	525.577.800,00	525.577.800,00	0,00
68	Gedung Surian	Ciptawaras	443.077.800,00	443.077.800,00	0,00
69	Gedung Surian	Trimulyo	549.877.800,00	549.877.800,00	0,00
70	Gedung Surian	Mekarjaya	598.477.800,00	598.477.800,00	0,00
71	Kebun Tebu	Pura Jaya	428.377.800,00	428.377.800,00	0,00
72	Kebun Tebu	Pura Wiwitan	404.077.800,00	404.077.800,00	0,00
73	Kebun Tebu	Tribudi Syukur	384.877.800,00	384.877.800,00	0,00
74	Kebun Tebu	Muara Jaya I	360.577.800,00	360.577.800,00	0,00
75	Kebun Tebu	Muara Jaya II	433.477.800,00	433.477.800,00	0,00
76	Kebun Tebu	Tri Budi Makmur	336.277.800,00	336.277.800,00	0,00
77	Kebun Tebu	Tugu Mulya	336.277.800,00	336.277.800,00	0,00
78	Kebun Tebu	Cipta Mulya	384.877.800,00	384.877.800,00	0,00
79	Kebun Tebu	Muara Baru	360.577.800,00	360.577.800,00	0,00
80	Kebun Tebu	Sinar Luas	384.877.800,00	384.877.800,00	0,00
81	Air Hitam	Sidodadi	360.577.800,00	360.577.800,00	0,00
82	Air Hitam	Semarang Jaya	409.177.800,00	409.177.800,00	0,00
83	Air Hitam	Sumber Alam	384.877.800,00	384.877.800,00	0,00
84	Air Hitam	Gunungterang	384.877.800,00	384.877.800,00	0,00
85	Air Hitam	Suka Jadi	384.877.800,00	384.877.800,00	0,00
86	Air Hitam	Sri Menanti	384.877.800,00	384.877.800,00	0,00
87	Air Hitam	Sinar Jaya	409.177.800,00	409.177.800,00	0,00
88	Air Hitam	Rigis Jaya	360.577.800,00	360.577.800,00	0,00
89	Air Hitam	Suka Damai	384.877.800,00	384.877.800,00	0,00
90	Air Hitam	Manggarai	384.877.800,00	384.877.800,00	0,00
91	Pagar Dewa	Pahayu Jaya	418.777.800,00	418.777.800,00	0,00
92	Pagar Dewa	Basungan	443.077.800,00	443.077.800,00	0,00
93	Pagar Dewa	Mekar Sari	384.877.800,00	384.877.800,00	0,00
94	Pagar Dewa	Sidomulyo	549.877.800,00	549.877.800,00	0,00
95	Pagar Dewa	Sidodadi	409.177.800,00	409.177.800,00	0,00
96	Pagar Dewa	Marga Jaya	433.477.800,00	433.477.800,00	0,00
97	Pagar Dewa	Suka Jaya	433.477.800,00	433.477.800,00	0,00
98	Pagar Dewa	Batu Api	409.177.800,00	409.177.800,00	0,00
99	Pagar Dewa	Pagar Dewa	409.177.800,00	409.177.800,00	0,00
100	Pagar Dewa	Suka Mulya	409.177.800,00	409.177.800,00	0,00
101	Batu Ketulis	Argomulyo	409.177.800,00	409.177.800,00	0,00
102	Batu Ketulis	Batu Kebayan	384.877.800,00	384.877.800,00	0,00
103	Batu Ketulis	Atar Bawang	384.877.800,00	384.877.800,00	0,00
104	Batu Ketulis	Campang Tiga	384.877.800,00	384.877.800,00	0,00
105	Batu Ketulis	Luas	476.977.800,00	476.977.800,00	0,00
106	Batu Ketulis	Bakhu	467.377.800,00	467.377.800,00	0,00
107	Batu Ketulis	Way Ngison	384.877.800,00	384.877.800,00	0,00
108	Batu Ketulis	Kubu Liku Jaya	433.477.800,00	433.477.800,00	0,00

No	NAMA KECAMATAN	NAMA PEKON	JUMLAH (Rp)		
			ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
109	Batu Ketulis	Sumber Rejo	360.577.800,00	360.577.800,00	0,00
110	Batu Ketulis	Atar Kuwau	433.477.800,00	433.477.800,00	0,00
111	Lumbok Seminung	Lombok	443.077.800,00	443.077.800,00	0,00
112	Lumbok Seminung	Heni Arong	409.177.800,00	409.177.800,00	0,00
113	Lumbok Seminung	Suka Banjar	409.177.800,00	409.177.800,00	0,00
114	Lumbok Seminung	Lombok Timur	360.577.800,00	360.577.800,00	0,00
115	Lumbok Seminung	Suka Banjar II Ujung Rembun	360.577.800,00	360.577.800,00	0,00
116	Lumbok Seminung	Suka Maju	409.177.800,00	409.177.800,00	0,00
117	Lumbok Seminung	Ujung	360.577.800,00	360.577.800,00	0,00
118	Lumbok Seminung	Keagungan	409.177.800,00	409.177.800,00	0,00
119	Lumbok Seminung	Tawan Suka Mulya	384.883.150,00	384.883.150,00	0,00
120	Lumbok Seminung	Pancur Mas	360.577.800,00	360.577.800,00	0,00
121	Lumbok Seminung	Lombok Selatan	384.877.800,00	384.877.800,00	0,00
122	Bandar Negeri Suoh	Suoh	622.777.800,00	622.777.800,00	0,00
123	Bandar Negeri Suoh	Sri Mulyo	360.577.800,00	360.577.800,00	0,00
124	Bandar Negeri Suoh	Bandar Agung	744.277.800,00	744.277.800,00	0,00
125	Bandar Negeri Suoh	Ringin Jaya	418.777.800,00	418.777.800,00	0,00
126	Bandar Negeri Suoh	Bumi Hantatai	515.977.800,00	515.977.800,00	0,00
127	Bandar Negeri Suoh	Gunung Ratu	443.077.800,00	443.077.800,00	0,00
128	Bandar Negeri Suoh	Tanjung Sari	360.577.800,00	360.577.800,00	0,00
129	Bandar Negeri Suoh	Negeri Jaya	491.677.800,00	491.677.800,00	0,00
130	Bandar Negeri Suoh	Tembelang	384.877.800,00	384.877.800,00	0,00
131	Bandar Negeri Suoh	Tri Mekar Jaya	384.877.800,00	384.877.800,00	0,00
		JUMLAH	**56.266.301.000,00**	**56.266.301.000,00**	**0,00**

REKAP REKENING YANG TIDAK PERGUNAKAN

NO	REKENING	NAMA	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	KETERANGAN	NAMA BANK	KET
1	387.00.05.00358.4	DAK SDN 1 PAGAR DEWA	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
2	387.00.05.00359.8	DAK SMP SATAP 2 PAGAR DEWA	297.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
3	387.00.05.00360.9	DAK SDN SIDO MULYO	252.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
4	387.00.05.00361.3	DAK SDN SIDO DADI	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
5	387.00.05.00362.5	DAK SDN KUBU PERAHU	50.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
6	387.00.05.00366.4	DAK SDN ATAR BAWANG	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
7	387.00.05.00371.4	DAK SMPN 1 BATU KETULIS	6.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
8	387.00.05.00375.6	DAK SMPN SATAP I BATU KETULIS	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
9	387.00.05.00376.1	DAK SDS ROWO REJO	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
10	387.00.05.00378.4	DAK SMPN 2 BNS	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
11	387.00.05.00379.4	DAK SMPN SATAP 2 SUKAU	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
12	387.00.05.00380.2	DAK SDN TEBA PERING RAYA	249.200,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
13	387.00.05.00383.4	DAK SMPN I LUMBOK SEMINUNG	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
14	387.00.05.00384.8	DAK SMPN 1 BANDAR NEGERI SUOH	250.500,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
15	387.00.05.00386.9	DAK SDN SUKAMARGA SUOH	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
16	387.00.05.00388.4	DAK SDN TANJUNG RAYA	200.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
17	387.00.05.00389.8	DAK SDN 3 KARANG AGUNG	200.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
18	387.00.05.00391.1	DAK SMPN SATAP 1 BANDAR NEGERI	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
19	387.00.05.00392.6	DAK SDN 2 SUKAJADI BNS	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
20	387.00.05.00393.6	DAK SDN I CIPTAWARAS	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
21	387.00.05.00395.8	DAK SDN 2 TRIMULYO	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
22	387.00.05.00400.2	DAK SDN I PURAWIWITAN	357.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
23	387.00.05.00403.4	DAK SMPN SATAP 1 LUMBOK SEMINU	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
24	387.00.05.00404.8	DAK SMPN SATAP 3 LUMBOK SEMINU	50.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
25	387.00.05.00405.1	DAK SMPN SATAP I SUKAU	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
26	387.00.05.00406.6	DAK SDN 2 PADANG TAMBAK	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
27	387.00.05.00407.6	DAK SDN 1 MUARA BARU	15.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
28	387.00.05.00411.5	DAK SDN 1 GUNUNG TERANG	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
29	387.00.05.00412.2	DAK SMPN 1 PAGAR DEWA	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
30	387.00.05.00414.3	DAK SMPN 4 LIWA	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
31	387.00.05.00415.4	DAK SDN HANTATAI	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
32	387.00.05.00417.1	DAK SDN SIDODADI AIR HITAM	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
33	387.00.05.00419.6	DAK SMPN SATAP 1 PAGAR DEWA	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
34	387.00.05.00420.8	DAK SDN SUKA MAKMUR	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
35	387.00.05.00422.7	DAK SDN 2 PURAJAYA	100.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
36	387.00.05.00423.2	DAK SDN 1 SUKA BANJAR	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
37	387.00.05.00431.8	DAK SDN 1 WAY MENGAKU	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
38	387.00.05.00433.3	DAK SMPN 3 SUKAU	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
39	387.00.05.00436.5	DAK SDN SUKAMAJU KEC BANDAR NE	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
40	387.00.05.00438.0	DAK SDS SINAR UMPU	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
41	387.00.05.00442.0	DAK SDN 1 BAKHU	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
42	387.00.05.00443.8	DAK SDN TURGAK	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
43	387.00.05.00444.4	DAK SDN 3 WAY MENGAKU	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
44	387.00.05.00446.9	DAK SMPN SATAP 1 WAY TENONG	3.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
45	387.00.05.00449.6	DAK SMPN 2 SUKAU	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
46	387.00.05.00450.8	DAK SMP YATRIMAS BERINGIN	1.180.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
47	387.00.05.00453.6	DAK SMPN 2 SUMBER JAYA	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
48	387.00.05.00455.1	DAK SDN PADANG DALOM	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
49	387.00.05.00456.9	DAK SDN GUNUNG RATU BNS	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
50	387.00.05.00460.4	DAK SMPN 2 LIWA	250.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
51	387.00.05.00461.4	DAK SDN SUKARAJA	265.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
52	387.00.05.00733.5	BPP RA ANNUR	1.400.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
53	387.00.05.01028.9	BPP MTS AL ISLAMIYAH	160.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
54	387.00.05.01212.2	BPPM TK KARTIKA GUNUNG RATU	800.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
55	387.00.05.01348.5	DAK SDN SUKARAME BELALAU	500.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
56	387.00.05.01483.6	DAK SDN 1 SUKARAJA	16.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
57	387.00.05.01500.5	DAK SDN BATU KEBAYAN	2.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
58	387.00.05.01507.2	DAK SDN 1 TRIBUDISYUKUR	885,42	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
59	387.00.05.01675.1	BPPM TK PRAJA KASIH BUNDA	583,33	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
60	387.00.05.12703.5	BPPM SD IT DAARUL QUDWAH	0,50	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	
61	0603-01-001024-30-4	SD NEGERI 1 SUMBER	17.887,00	BRI		
62	0603-01-001076-30-5	SD NEGERI KEGERINGAN	11.836,00	BRI		
63	0603-01-001130-30-9	SD NEGERI BANDAR AGUNG	11.221,00	BRI		
64	0603-01-001177-30-1	SD NEGERI SUKABUMI	5.918,00	BRI		
65	0603-01-001012-30-7	SD NEGERI 1 LUAS	11.174,00	BRI		
66	0603-01-000997-30-6	SD NEGERI 1 WAY SINDI	10.631,20	BRI		
67	0603-01-000995-30-8	SD NEGERI FAJAR BULAN	5.405,00	BRI		
68	0603-01-000999-30-2	SD NEGERI 2 KARANG AGUNG	4.719,00	BRI		
69	0603-01-000904-30-7	SMP NEGERI SATAP 1 LUMBOK	5.782,00	BRI		
70	0603-01-000270-30-0	SMP NEGERI 1 SUMBER JAYA	3.425,00	BRI		
71	0603-01-001353-30-5	SMP NEGERI 1 LIWA	3.425,00	BRI		
72	0603-01-000636-30-2	SMP NEGERI SATAP 1 BALIK BUKIT	982.088,00	BRI		
73	0603-01-000531-30-2	SMP NEGERI 2 SUMBER JAYA	970.160,00	BRI		
74	0603-01-000634-30-0	SMP NEGERI 3 BANDAR NEGERI SUOH	660.336,00	BRI		
75	0603-01-000432-30-0	SMP NEGERI 2 BANDAR NEGERI SUOH	433.948,00	BRI		
76	0603-01-000434-30-2	SMP NEGERI SATU ATAP 1 B	299.103,00	BRI		
77	0603-01-001185-30-4	SMP NEGERI 1 LUMBOK SEMINUNG	284.317,00	BRI		
78	0603-01-000431-30-4	SMP NEGERI 1 BANDAR NEGERI SUOH	247.224,00	BRI		

NO	REKENING	NAMA	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	KETERANGAN	NAMA BANK	KET
79	0603-01-000638-30-4	SMP NEGERI 1 BANDAR NEGERI SUOH	244.222,00	BRI		
80	0603-01-000632-30-8	SMP NEGERI 1 ATAP	134.294,00	BRI		
81	387.00.05.00007.5	BENDAHARA PBB LAMPUNG BARAT	292.553,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	Suket
82	387.00.05.00349.8	PROLANIS UPT PUSKESMAS KENALI	200,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	Suket
83	387.00.05.00350.8	PROLANIS UPT PUSKESMAS BATU BR	164,17	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	Suket
84	387.00.05.00352.3	PROLANIS UPT PUSKESMAS GEDUNG	448,74	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	Suket
85	387.00.05.01412.4	PROLANIS UPT PUSKESMAS PAGAR D	40.100,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	Suket
86	387.00.05.00251.5	BEND PUMC BIDANG BINA MARGA	162.250,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	Suket
87	387.00.05.00279.2	BAGIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEK	200.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	Suket
88	387.00.05.00136.5	BENDAHARA RUTIN RSUD LWA	34.450,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	Suket
89	387.00.05.00002.5	BUPATI LAMPUNG BARAT	14.203,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	Suket
90	387.00.05.00230.5	KABAG KEUANGAN PEMDA LAMBAR	425.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG	Suket
91	0603-01-009212-53-4	DINAS KESEHATAN LAMPUNG BARAT	369,00		BRI	Suket
92	387.00.05.03004.4	TIM CSR KABUPATEN LAMPUNG BARA	1.854.188,77		BANK LAMPUNG	Suket
		JUMLAH	22.725.099,13			

REKAP REKENING YANG MASIH DIPERGUNAKAN
BELUM ADA SK BUPATI

NO	REKENING	NAMA	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	KETERANGAN	NAMA BANK
1	387.00.05.00139.3	BPPM PKBM GLOBAL RABBANI	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
2	387.00.05.00476.5	BPP SMP NEGERI 4 LIWA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
3	387.00.05.00477.2	BPP SDN 3 LIWA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
4	387.00.05.00479.3	BPP SDN 2 TRIBUDISYUKUR	500,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
5	387.00.05.00482.9	BPP SDN 1 WAY EMPULAU ULU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
6	387.00.05.00483.3	BPP SDN 1 PADANG CAHYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
7	387.00.05.00486.1	BPPM SDN 1 SUKARAMI	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
8	387.00.05.00487.6	BPP SDN 2 WAY EMPULAU ULU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
9	387.00.05.00490.1	BPPM SDN 1 WAY MENGAKU	450.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
10	387.00.05.00491.6	BPP SDN 1 LIWA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
11	387.00.05.00495.4	BPP SDN GUNUNG SUGIH	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
12	387.00.05.00496.3	BPP SDN 2 LIWA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
13	387.00.05.00498.2	BPP SDN WATES	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
14	387.00.05.00499.5	BPP SMPN 1 LIWA	500,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
15	387.00.05.00501.3	BPP SMPN SATAP 1 BALIK BUKIT	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
16	387.00.05.00504.1	BPP SDN 1 SEBARUS	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
17	387.00.05.00505.6	BPP SMPN 3 LIWA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
18	387.00.05.00508.8	BPP SMPN SEKUTING TERPADU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
19	387.00.05.00510.6	BPP SMPN 2 LIWA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
20	387.00.05.00511.1	BPP SDN 2 BAHWAY	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
21	387.00.05.00516.2	BPP SDN 3 PADANG CAHYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
22	387.00.05.00517.5	BPP SDN PADANG DALOM	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
23	387.00.05.00519.0	BPP SDN 2 PADANG CAHYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
24	387.00.05.00521.5	BPP TKN SKB LAMPUNG BARAT	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
25	387.00.05.00524.7	BPP SDN KUBU PERAHU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
26	387.00.05.00527.9	BPP SDN SEDAMPAH INDAH	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
27	387.00.05.00528.2	BPP SDN 2 SUKARAMI	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
28	387.00.05.00530.3	BPP SDN 2 WAY MENGAKU	360.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
29	387.00.05.00532.2	BPP SDN 1 BAHWAY	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
30	387.00.05.00535.0	BPP SDN 4 LIWA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
31	387.00.05.00536.7	10803496 SD NEGERI 4 LIWA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
32	387.00.05.00537.5	BPPM SDN 3 WAY MENGAKU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
33	387.00.05.00540.7	BPP SDN 2 SUKANANTI	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
34	387.00.05.00542.2	BPP SDN 1 PURA LAKSANA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
35	387.00.05.00544.3	BPP SDN 1 KARANG AGUNG	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
36	387.00.05.00546.8	BPP SDN 2 PADANG TAMBAK	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
37	387.00.05.00549.6	BPP SDN 3 SUKARAJA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
38	387.00.05.00551.1	BPP SDN 2 SUKARAJA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
39	387.00.05.00553.6	BPP SDN 3 FAJAR BULAN	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
40	387.00.05.00555.8	BPP SDN 3 PURALAKSANA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
41	387.00.05.00557.3	BPP SDN 1 FAJARBULAN	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
42	387.00.05.00559.2	BPP SDN 4 PADANG TAMBAK	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
43	387.00.05.00560.4	BPP SDN 4 PADANG CAHYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
44	387.00.05.00563.2	BPP SDN 1 SUKARAJA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
45	387.00.05.00565.7	BPP SDN 1 SUKANANTI	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
46	387.00.05.00567.7	BPP SMPN SATU ATAP 2 BALIK BUK	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
47	387.00.05.00569.2	BPP TKN 1 BALIK BUKIT	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
48	387.00.05.00574.9	BPP SDN 2 KARANG AGUNG	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
49	387.00.05.00575.3	BPP SDN TANJUNG RAYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
50	387.00.05.00578.1	BPP SDN TAMBAK JAYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
51	387.00.05.00579.6	BPP SDN MUTAR ALAM	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
52	387.00.05.00582.1	BPP SDN 2 FAJAR BULAN	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
53	387.00.05.00583.6	BPP SDN 4 FAJAR BULAN	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
54	387.00.05.00586.8	BPP SDN 1 PADANG TAMBAK	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
55	387.00.05.00588.4	BPP SDN 2 PURALAKSANA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
56	387.00.05.00589.8	BPP SDN1 SINDANG PAGAR	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
57	387.00.05.00591.3	BPP SDN 1 PURAWIWITAN	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
58	387.00.05.00593.8	BPP SDN 1 MUARA BARU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG

NO	REKENING	NAMA	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	KETERANGAN	NAMA BANK
59	387.00.05.00595.6	BPP SMPN 1 SUMBER JAYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
60	387.00.05.00598.8	BPP SDN 2 SUKAPURA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
61	387.00.05.00601.7	BPP SMPN 3 SUMBER JAYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
62	387.00.05.00602.5	BPP SDN 4 TUGU SARI	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
63	387.00.05.00604.9	BPP SDN I PURAJAYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
64	387.00.05.00607.8	BPP SDN 2 PURAJAYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
65	387.00.05.00608.1	BPP SDN 1 SINAR LUAS	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
66	387.00.05.00611.8	BPP SDN I MUARAJAYA II	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
67	387.00.05.00612.1	BPP SMPN 2 SUMBER JAYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
68	387.00.05.00615.1	BPP SDN 1 SUKA JAYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
69	387.00.05.00616.8	BPP SDN I TUGUSARI	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
70	387.00.05.00619.2	BPP SDN 3 TUGU SARI	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
71	387.00.05.00622.3	BPP SMPN 2 KEBUN TEBU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
72	387.00.05.00623.9	BPP SDN 2 TUGUSARI	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
73	387.00.05.00626.4	BPP SDN 4 WAY PETAI	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
74	387.00.05.00629.5	BPP SDN I MEKAR JAYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
75	387.00.05.00633.5	BPP SDN I SIMPANG SARI	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
76	387.00.05.00635.9	BPP SDN 3 WAY PETAI	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
77	387.00.05.00637.4	BPP SDN 1 TRIBUDI SYUKUR	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
78	387.00.05.00638.8	BPP SDN 2 MEKARJAYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
79	387.00.05.00643.1	BPP SDN I SUKAPURA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
80	387.00.05.00648.4	BPP TKN SUMBER JAYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
81	387.00.05.00649.3	BPP SMPN I WAY TENONG	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
82	387.00.05.00655.2	BPPM SDN 1 WAY PETAI	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
83	387.00.05.00660.5	BPP SDN 2 WAY PETAI	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
84	387.00.05.00662.1	BPP SMPN 2 WAY TENONG	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
85	387.00.05.00664.4	BPP SDN 3 PADANG TAMBAK	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
86	387.00.05.00668.5	BPP SMPN 1 AIR HITAM	69.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
87	387.00.05.00670.9	BPP SDN 1 TRI MULYO	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
88	387.00.05.00673.7	BPP SDN 1 GUNUNG TERANG	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
89	387.00.05.00675.7	BPPM SDN I GEDUNG SURIAN	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
90	387.00.05.00677.2	BPP SDN 1 SUMBER ALAM	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
91	387.00.05.00679.3	BPP SDN 2 GUNUNG TERANG	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
92	387.00.05.00681.2	BPP SMPN 2 GEDUNG SURIAN	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
93	387.00.05.00683.3	BPP SDN 2 SUMBER ALAM	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
94	387.00.05.00685.8	BPPM SMPN 2 AIR HITAM	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
95	387.00.05.00686.1	BPP SMPN 1 GEDUNG SURIAN	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
96	387.00.05.00689.1	BPP SDN SRIMENANTI	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
97	387.00.05.00691.6	BPPM SDN 2 TRIMULYO	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
98	387.00.05.00694.8	BPP SDN 1 CIPTAWARAS	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
99	387.00.05.00696.3	BPPM SDN 2 PURA MEKAR	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
100	387.00.05.00698.2	BPPM SDN I PURAMEKAR	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
101	387.00.05.00700.9	BPP SDN SIDODADI	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
102	387.00.05.00703.8	BPP SDN SEMARANG JAYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
103	387.00.05.00714.4	BPP TKN 1 WAY TENONG	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
104	387.00.05.00722.6	BPPM SMPN 2 PAGAR DEWA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
105	387.00.05.00729.5	BPPM SDN SUKAMULYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
106	387.00.05.00731.9	BPPM SDN SIDODADI PAGAR DEWA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
107	387.00.05.00735.0	BPP SMPN SATU ATAP I WAY TENON	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
108	387.00.05.00737.5	BPPM SMPN SATAP I PAGAR DEWA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
109	387.00.05.00741.5	BPPM SDN 3 KARANG AGUNG	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
110	387.00.05.00743.9	BPP SMPN I KEBUN TEBU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
111	387.00.05.00746.8	BPP SDN MARGA JAYA	450.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
112	387.00.05.00749.6	BPP SMPN 1 PAGAR DEWA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
113	387.00.05.00751.1	BPPM SDN SIDOMULYO	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
114	387.00.05.00752.6	BPP SMPN SATU ATAP 2 PAGAR DEW	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
115	387.00.05.00757.3	BPP SDN SUKAJAYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
116	387.00.05.00760.4	BPPM SDN PAHAYU JAYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
117	387.00.05.00765.7	BPPM SMPN 3 WAY TENONG	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
118	387.00.05.00794.1	BPP SDN ATAR KUWAU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
119	387.00.05.00795.8	BPPM SDN ATAR BAWANG	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
120	387.00.05.00798.9	BPP SDN 2 PAMPANGAN	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
121	387.00.05.00801.9	BPP SDN 1 SEKINCAU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
122	387.00.05.00803.4	BPPM SDN BATU KEBAYAN	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG

NO	REKENING	NAMA	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	KETERANGAN	NAMA BANK
123	387.00.05.00805.1	BPP SDN WAY NGISON	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
124	387.00.05.00807.6	BPP SDN 1 GIHAM SUKA MAJU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
125	387.00.05.00811.6	BPP SMPN 1 SEKINCAU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
126	387.00.05.00813.8	BPP SDN 1 PAMPANGAN	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
127	387.00.05.00815.3	BPPM SMPN 2 SEKINCAU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
128	387.00.05.00816.9	BPPM SDN 2 SEKINCAU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
129	387.00.05.00819.7	BPPM SDN ARGOMULYO	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
130	387.00.05.00822.5	BPP SDN KUBU LIKU JAYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
131	387.00.05.00824.0	BPP SDN 2 GIHAM SUKAMAJU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
132	387.00.05.00826.5	BPPM SMPN 2 BATU KETULIS	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
133	387.00.05.00827.2	BPP SDN 2 BAKHU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
134	387.00.05.00829.3	BPP SMPN I BATU KETULIS	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
135	387.00.05.00831.2	BPPM SDN WASPADA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
136	387.00.05.00832.9	BPP SDN I LUAS	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
137	387.00.05.00836.1	BPP SDN I BASUNGAN	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
138	387.00.05.00839.1	BPPM SDN I BAKHU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
139	387.00.05.00846.3	BPP SDN CAMPANG TIGA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
140	387.00.05.00852.2	BPP SDN 1 CIPTA MULYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
141	387.00.05.00859.9	BPP SDN 1 PEKON BALAK	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
142	387.00.05.00862.3	BPP SDN SUKA BUMI	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
143	387.00.05.00863.9	BPPM SDN TEBALIOKH	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
144	387.00.05.00866.7	BPP SDN 2 PEKON BALAK	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
145	387.00.05.00868.7	BPPM SDN I KOTA BESI	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
146	387.00.05.00870.7	BPPM SDN TIGA JAYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
147	387.00.05.00874.2	BPPM SMPN I BATU BRAK	500,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
148	387.00.05.00876.3	BPP SDN PAPAHAN	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
149	387.00.05.00878.8	BPP SMPN SATAP I BATUBRAK	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
150	387.00.05.00886.1	BPP SMPN I BELALAU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
151	387.00.05.00888.4	BPP SDN SUKARAME	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
152	387.00.05.00889.3	BPPM SDN SUKA MAKMUR	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
153	387.00.05.00894.9	BPP SDN FAJAR AGUNG	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
154	387.00.05.00904.1	BPP SDN 3 KOTBESI	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
155	387.00.05.00905.8	BPPM SDN SUKARAJA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
156	387.00.05.00908.9	BPP SDN HUJUNG	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
157	387.00.05.00914.5	BPP SDN 1 KENALI	720.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
158	387.00.05.00917.7	BPPM SDN TURGAK	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
159	387.00.05.00919.2	BPP SDN KEGERINGAN	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
160	387.00.05.00920.0	BPP SDN NEGERI RATU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
161	387.00.05.00923.2	BPPM SDN 2 KENALI	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
162	387.00.05.00927.8	BPPM SDN 2 KEMBAHANG	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
163	387.00.05.00930.4	BPPM SDN KEJADIAN	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
164	387.00.05.00932.1	BPP TKN 1 BATU BRAK	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
165	387.00.05.00934.6	BPPM SDN CANGGU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
166	387.00.05.00936.8	BPP SDN 2 BEDUDU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
167	387.00.05.00938.3	BPP SDN 1 BEDUDU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
168	387.00.05.00939.9	BPPM SDN 2 KOTA BESI	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
169	387.00.05.00942.3	BPPM SDN I BUMI AGUNG	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
170	387.00.05.00952.8	BPP SMPN 1 SUOH	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
171	387.00.05.00956.2	BPP SDN SUKA MARGA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
172	387.00.05.00960.2	BPP SDN WAY SULUH	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
173	387.00.05.00962.7	BPP SDN 1 BANDING AGUNG	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
174	387.00.05.00963.0	BPP SDN 1 BANDING AGUNG	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
175	387.00.05.00965.5	BPP SDN 2 BANDING AGUNG	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
176	387.00.05.00967.9	BPP SDN SUMBER AGUNG	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
177	387.00.05.00971.9	BPP SMPN 2 SUOH	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
178	387.00.05.00973.4	BPPM SDN 3 BANDING AGUNG	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
179	387.00.05.00977.6	BPP TKN I SUOH	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
180	387.00.05.00989.7	BPP SDN TUGU RATU	630.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
181	387.00.05.00991.1	BPP SDN TEMBELANG	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
182	387.00.05.00995.8	BPPM SDN TRI MEKAR JAYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
183	387.00.05.00997.3	BPPM SDN KALI PASIR	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
184	387.00.05.00998.9	BPPM SDN SUKA MAJU	1.080.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
185	387.00.05.01000.2	BPPM SDN BANDAR AGUNG	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
186	387.00.05.01003.4	BPP SMPN SATAP 1 BNS	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG

NO	REKENING	NAMA	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	KETERANGAN	NAMA BANK
187	387.00.05.01005.1	BPPM SDN 2 SUKAJADI	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
188	387.00.05.01010.6	BPPM SDN PALANG MERAH	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
189	387.00.05.01016.9	BPP SMPN 3 BNS	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
190	387.00.05.01024.0	BPP SMPN 2 BANDAR NEGERI SUOH	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
191	387.00.05.01036.1	BPP SMPN I BNS	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
192	387.00.05.01038.3	BPP SDS BANDAR TELADAN	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
193	387.00.05.01043.9	BPP SDN 1 KEMBAHANG	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
194	387.00.05.01062.5	BPP SMPN SATAP 2 SUKAU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
195	387.00.05.01064.9	BPP SMPN 1 LOMBOK SEMINUNG	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
196	387.00.05.01076.4	BPP SDN 1 SUKAJADI	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
197	387.00.05.01080.8	BPP SMPN SATAP 1 LUMBOK SEMINU	594.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
198	387.00.05.01084.0	SDN 1 BUAY NYERUPA BPP	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
199	387.00.05.01086.5	SDN 1 TAWAN SUKAMULYA BPP	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
200	387.00.05.01090.5	SDN 1 BANDAR BARU BPPM	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
201	387.00.05.01092.9	BPP SDN TEBA PERING RAYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
202	387.00.05.01094.4	SDN 2 TAPAK SIRING BPPM	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
203	387.00.05.01096.1	BPP SDN 2 BUAY NYERUPA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
204	387.00.05.01100.5	SMPN SATAP 3 LUMBOK SEMINUNG B	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
205	387.00.05.01102.0	SDN 3 BANDAR BARU BPPM	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
206	387.00.05.01104.5	SDN 2 HANAKAU BPPM	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
207	387.00.05.01106.9	SDN 1 TAPAK SIRING BPPM	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
208	387.00.05.01108.4	BPP SDN 1 JAGA RAGA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
209	387.00.05.01110.9	BPP SDN 3 BUAY NYERUPA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
210	387.00.05.01112.4	SDN 3 HANAKAU BPPM	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
211	387.00.05.01114.1	SDN 1 TANJUNG RAYA BPP	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
212	387.00.05.01116.6	SDN 1 LOMBOK BPPM	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
213	387.00.05.01118.8	SDN 1 UJUNG BPPM	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
214	387.00.05.01120.6	BPP SDN 2 BANDAR BARU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
215	387.00.05.01122.8	SDN 1 KAGUNGAN BPPM	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
216	387.00.05.01124.3	BPP SDN 1 HANAKAU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
217	387.00.05.01126.2	SDN 1 HENI ARONG BPPM	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
218	387.00.05.01127.5	BPPM SDN 1 SUKABANJAR	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
219	387.00.05.01130.2	SDN 2 PAGAR DEWA BPPM	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
220	387.00.05.01132.7	BPPM SDN 1 LOMBOK TIMUR	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
221	387.00.05.01134.7	BPP SDN 2 TANJUNG RAYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
222	387.00.05.01135.5	BPPM SDN 2 JAGARAGA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
223	387.00.05.01139.4	BPP SDN 1 PAGAR DEWA	500,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
224	387.00.05.01141.9	BPP SDN 1 SUKA MULYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
225	387.00.05.01145.1	BPP SMPN SATAP 2 LOMBOK SEMINU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
226	387.00.05.01157.1	BPPM SDN 1 SUKA BANJAR II UJUN	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
227	387.00.05.01158.6	10814841 SMP NEGERI 3 SUKAU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
228	387.00.05.01159.6	BPPM SMPN 3 SUKAU	300,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
229	387.00.05.01161.1	BPP SMPN SATAP 1 SUKAU	500,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
230	387.00.05.01163.6	BPP SMPN 1 SUKAU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
231	387.00.05.01166.4	BPP SMPN 2 SUKAU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
232	387.00.05.01172.8	BPP SDN HANTATAI	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
233	387.00.05.01174.6	BPP SDN NEGERI JAYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
234	387.00.05.01175.6	69967302 TPA ISLAM IQRO	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
235	387.00.05.01181.8	BPP TKN BELALAU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
236	387.00.05.01184.9	BPPM TK NEGERI 1 BATU KETULIS	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
237	387.00.05.01186.5	BPPM TK NEGERI SEKINCAU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
238	387.00.05.01189.9	BPP TKN 1 SUKAU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
239	387.00.05.01194.2	BPP TKN 2 SUKAU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
240	387.00.05.01225.5	BPP SDN GUNUNG RATU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
241	387.00.05.01227.0	BPP TKN 1 LUMBOK SEMINUNG	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
242	387.00.05.01244.6	MI MIFTAHUL HUDA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
243	387.00.05.01246.2	BPP TK NEGERI 2 BALIK BUKIT	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
244	387.00.05.01253.4	BPP TKN 1 BNS	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
245	387.00.05.01262.2	BOP TK MIFTAHUL JANNAH	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
246	387.00.05.01266.8	BOP PAUD MIFTAHUL JANNAH	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
247	387.00.05.01270.8	BPPM TK NEGERI GEDUNG SURIAN	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
248	387.00.05.01285.3	BOP PAUD KASIH BUNDA PAMPANGAN	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
249	387.00.05.01305.7	BPP TKN KEBUN TEBU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
250	387.00.05.01323.8	BPP TKN 1 AIR HITAM	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG

NO	REKENING	NAMA	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	KETERANGAN	NAMA BANK
251	387.00.05.01353.7	BPP TKN 1 PAGAR DEWA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
252	387.00.05.01372.2	10803499 SDN 2 SUKA MULYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
253	387.00.05.01441.6	BPPM SDN MUARA JAYA I	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
254	387.00.05.01517.6	MIS AL HIKMAH	250.229,17	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
255	387.00.05.01524.7	BPPM SMPN 3 KEBUN TEBU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
256	387.00.05.01529.7	BPPM SMPN 3 SEKINCAU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
257	387.00.05.01532.6	69810459 KB BUDI ASIH	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
258	387.00.05.01540.7	TK SAKINAH	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
259	387.00.05.01541.7	69975980 RA AL HUDA BUMI AGUNG	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
260	387.00.05.01542.0	69884027 RA AL MUTAQIN ATAR BA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
261	387.00.05.01672.7	BPPM PKBM BUAY NYERUPA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
262	387.00.05.01673.0	BPPM PKBM PONPES AL HASYIMIYAH	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
263	387.00.05.01674.8	BPPM SPNF SKB LAMPUNG BARAT	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
264	387.00.05.01676.2	BPPM PKBM INSAN MANDIRI	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
265	387.00.05.01680.8	BPPM PKBM OASE	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
266	387.00.05.01684.2	SMP IT AL FATIH	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
267	387.00.05.01719.9	BPPM PKBM MAJU BERSAMA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
268	387.00.05.01720.7	BPPM PKBM BUMI JAWA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
269	387.00.05.01721.2	BPPM PKBM SETIA BUDI	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
270	387.00.05.01722.6	BPPM PKBM ARRIZQI BINA BERSAMA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
271	387.00.05.01723.9	BPPM SMPN SATU ATAP 2 SUKAU	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
272	387.00.05.02129.4	70051046 SMP IT DAARUL QUDWAH	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
273	387.00.05.04712.2	BPP SDN 2 SEBARUS	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
274	387.00.05.07797.9	10809955 SDN 4 PADANG CAHYA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
275	387.00.05.07798.7	RA ROUDLOTUS SHOLIHIN	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
276	387.00.05.11891.2	RA TARBIYATUL ATHFAL	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
277	387.00.05.11900.3	MIS AL ISTIQOMAH BATU KETULIS	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
278	387.00.05.12667.6	69967301 TK ISLAM IQRO	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
279	387.00.05.12675.7	69886641 TK PERMATA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
280	387.00.05.12676.0	69990112 TK DEWI SARTIKA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
281	387.00.05.12677.2	69731655 RAS AZ ZAHRA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
282	387.00.05.12701.3	70011830 SD ISLAM MIFTAH AL IS	604,17	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
283	387.00.05.12702.4	70012178 SMP ISLAM MIFTAH AL I	633,33	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
284	387.00.05.12705.3	MTS AL MUNAWWAROH	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
285	387.00.05.12706.5	MTS AL KAROMAH	240.000,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
286	387.00.05.12708.3	69884030 RA NURUL HUDA	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
287	387.00.05.12714.0	BPPM PKBM BUNGA TANJUNG	0,00	REKENING AKTIF	BANK LAMPUNG
			4.846.266,67		

1 RINCIAN SISA KAS DI BLUD & KAS DANA BOK PUSKESMAS PER 31 DESEMBER 2024

NO	NAMA PUSKESMAS	KAS DI BLUD			KAS DANA BOK PUSKESMAS			JUMLAH		
		SILPA	PFK	JUMLAH	SILPA	PFK	JUMLAH	SILPA	PFK	
1	2	3	4	5 = 3+4	6	7	8 = 6+7	9 = 3+6	10 = 4+7	11 = (9+10)
1	SUMBER JAYA	184.707.293,80	0,00	184.707.293,80	24.840.371,00	0,00	24.840.371,00	209.547.664,80	0,00	209.547.664,80
2	KEBUN TEBU	2.854,00	0,00	2.854,00	7.473.789,00	0,00	7.473.789,00	7.476.643,00	0,00	7.476.643,00
3	GEDUNG SURIAN	13.591.844,00	0,00	13.591.844,00	11.380.320,00	0,00	11.380.320,00	24.972.164,00	0,00	24.972.164,00
4	AIR HITAM	113.006,00	0,00	113.006,00	59.855.221,00	0,00	59.855.221,00	59.968.227,00	0,00	59.968.227,00
5	PAJAR BULAN	39.961.148,18	0,00	39.961.148,18	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	41.066.148,18	0,00	41.066.148,18
6	SEKINCAU	3.729.162,00	0,00	3.729.162,00	3.410.200,00	0,00	3.410.200,00	7.139.362,00	0,00	7.139.362,00
7	PAGAR DEWA	0,80	0,00	0,80	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	1.505.000,80	0,00	1.505.000,80
8	BATU KETULIS	32.375.722,40	0,00	32.375.722,40	0,00	0,00	0,00	32.375.722,40	0,00	32.375.722,40
9	KENALI	526.575,00	0,00	526.575,00	2.555.396,00	0,00	2.555.396,00	3.081.971,00	0,00	3.081.971,00
10	BATU BRAK	3.821.026,80	0,00	3.821.026,80	4.460.063,00	0,00	4.460.063,00	8.281.089,80	0,00	8.281.089,80
11	BANDAR NEGERI SUOH	7.829.515,00	0,00	7.829.515,00	5.127.000,00	0,00	5.127.000,00	12.956.515,00	0,00	12.956.515,00
12	SRIMULYO	1.078.137,60	0,00	1.078.137,60	12.476.254,00	0,00	12.476.254,00	13.554.391,60	0,00	13.554.391,60
13	LIWA	4.270.463,00	0,00	4.270.463,00	4.999.007,00	0,00	4.999.007,00	9.269.470,00	0,00	9.269.470,00
14	BUAY NYERUPA	227.055.553,00	0,00	227.055.553,00	15.167.300,00	0,00	15.167.300,00	242.222.853,00	0,00	242.222.853,00
15	LOMBOK	13.670.395,00	0,00	13.670.395,00	20.916.413,00	0,00	20.916.413,00	34.586.808,00	0,00	34.586.808,00
	JUMLAH	532.732.696,58	0,00	532.732.696,58	175.271.334,00	0,00	175.271.334,00	708.004.030,58	0,00	708.004.030,58

2 RINCIAN SISA KAS DI UPTD PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN UKM - DANA BERGULIR PER 31 DESEMBER 2024

NO	NAMA PUSKESMAS	KAS DI BLUD						JUMLAH		
		SILPA	PFK	JUMLAH				SILPA	PFK	
1	2	3	4	5 = 3+4				9 = 3+6	10 = 4+7	11 = (9+10)
1	Bank Lampung Rek 387.00.05.00306.4 (Rekening Jasa)	4.961.277,23	0,00	4.961.277,23				4.961.277,23	0,00	4.961.277,23
2	Bank Lampung Rek 387.00.05.00309.3 (Rekening Lain-lain)	2.492.928,89	0,00	2.492.928,89				2.492.928,89	0,00	2.492.928,89
	JUMLAH	7.454.206,12	0,00	7.454.206,12				7.454.206,12	0,00	7.454.206,12

3 RINCIAN SISA KAS BLUD RSUD ALIMUDDIN UMAR PER 31 DESEMBER 2024

NO	NAMA PUSKESMAS	KAS DI BLUD						JUMLAH		
		SILPA	PFK	JUMLAH				SILPA	PFK	
1	2	3	4	5 = 3+4				9 = 3+6	10 = 4+7	11 = (9+10)
1	BNI Rek 1237656932 (PPK BLUD RSUD ALIMUDDIN UMAR)	2.044.266.658,00	0,00	2.044.266.658,00				2.044.266.658,00	0,00	2.044.266.658,00
2	Kas Tunai	66.592.557,00	0,00	66.592.557,00				66.592.557,00	0,00	66.592.557,00
	JUMLAH	2.110.859.215,00	0,00	2.110.859.215,00				2.110.859.215,00	0,00	2.110.859.215,00

4 JUMLAH

NO	NAMA PUSKESMAS	KAS DI BLUD			KAS DANA BOK PUSKESMAS			JUMLAH		
		SILPA	PFK	JUMLAH	SILPA	PFK	JUMLAH	SILPA	PFK	
1	2	3	4	5 = 3+4	6	7	8 = 6+7	9 = 3+6	10 = 4+7	11 = (9+10)
1	Kas di Puskesmas	532.732.696,58	0,00	532.732.696,58	175.271.334,00	0,00	175.271.334,00	708.004.030,58	0,00	708.004.030,58
2	Kas di UPTD PPK & UKM-Dana Bergulir	7.454.206,12	0,00	7.454.206,12	0,00	0,00	0,00	7.454.206,12	0,00	7.454.206,12
3	Kas di BLUD RSUD Alimuddin Umar	2.110.859.215,00	0,00	2.110.859.215,00	0,00	0,00	0,00	2.110.859.215,00	0,00	2.110.859.215,00
	JUMLAH	2.651.046.117,70	0,00	2.651.046.117,70	175.271.334,00	0,00	175.271.334,00	2.826.317.451,70	0,00	2.826.317.451,70

RINCIAN SISA KAS PADA BENDAHARA BOSP
PER 31 DESEMBER 2024

NO	NAMA SEKOLAH	SISA DANA BOS REGULER SILPA BOS BANK	TUNAI	TOTAL	PPK	SISA DANA BOS AFIRMASI SILPA BOS BANK	TUNAI	TOTAL	PPK	SISA DANA BOS KINERJA SILPA BOS BANK	TUNAI	TOTAL	PPK	SISA BOP KESETARAAN BANK	TUNAI	TOTAL	PPK	JUMLAH SISA BOSP BANK	TUNAI	TOTAL	PPK	TOTAL
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=7+8	10	11	12	13=11+12	14	11	12	13=11+12	14	15=3+7+11	16=4+8+12	17=15+16	18=6+10+14	19=17+18
A	BOP KESETARAAN																					
1	SPNF SKB BALIK BUKIT - REGULER			0,00				0,00				0,00		0,00	1.050.000,00	1.050.000,00		0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
1	SPNF SKB BALIK BUKIT - KINERJA			0,00				0,00				0,00		0,00	15.494.000,00	15.494.000,00		0,00	15.494.000,00	15.494.000,00	0,00	15.494.000,00
	SUB JUMLAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.544.000,00	16.544.000,00	0,00	0,00	16.544.000,00	16.544.000,00	0,00	16.544.000,00
B	SEKOLAH NEGERI - SD																					
1	SD NEGERI SIDODADI	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2	SD NEGERI SEMARANG JAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SD NEGERI SRIMENANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SD NEGERI 1 SUMBER ALAM	0,00	92.561,00	92.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	92.561,00	92.561,00	0,00	92.561,00
5	SD NEGERI 2 SUMBER ALAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
6	SD NEGERI 1 GUNUNG TERANG	150.000,00	0,00	150.000,00	312.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	312.449,00	462.449,00
7	SD NEGERI 2 GUNUNG TERANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SD NEGERI 1 WAY EMPULAU ULU	0,00	1.894,00	1.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.894,00	1.894,00	0,00	1.894,00
9	SD NEGERI 2 WAY EMPULAU ULU	75.940,00	0,00	75.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	75.940,00	0,00	75.940,00	0,00	75.940,00
10	SD NEGERI 1 LIWA	0,00	25.136,00	25.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	25.136,00	25.136,00	0,00	25.136,00
11	SD NEGERI 2 LIWA	0,00	121.933,00	121.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	121.933,00	121.933,00	0,00	121.933,00
12	SD NEGERI 3 LIWA	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00
13	SD NEGERI 4 LIWA	268.490,73	800,00	269.290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	268.490,73	800,00	269.290,73	0,00	269.290,73
14	SD NEGERI 1 SEBARUS	162.752,00	21.380,00	184.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	162.752,00	21.380,00	184.132,00	0,00	184.132,00
15	SD NEGERI 2 SEBARUS	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00
16	SD NEGERI 1 SUKARAMI	0,00	1.367.873,00	1.367.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.367.873,00	1.367.873,00	0,00	1.367.873,00
17	SD NEGERI 2 SUKARAMI	220.000,00	214.430,00	434.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	220.000,00	214.430,00	434.430,00	0,00	434.430,00
18	SD NEGERI 1 WAY MENGAKU	71,00	58.465,00	58.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	4.881.744,00	71,00	58.465,00	58.536,00	0,00	58.536,00
19	SD NEGERI 2 WAY MENGAKU	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00	30.750,00
20	SD NEGERI 3 WAY MENGAKU	0,00	15.098,00	15.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	15.098,00	15.098,00	0,00	15.098,00
21	SD NEGERI 1 PADANG CAHYA	184.820,00	0,00	184.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	184.820,00	0,00	184.820,00	0,00	184.820,00
22	SD NEGERI 2 PADANG CAHYA	14.824,00	90.535,00	105.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	14.824,00	90.535,00	105.359,00	0,00	105.359,00
23	SD NEGERI 3 PADANG CAHYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SD NEGERI 4 PADANG CAHYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SD NEGERI 1 BAHWAY	0,00	56.746,00	56.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	56.746,00	56.746,00	0,00	56.746,00
26	SD NEGERI 2 BAHWAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	SD NEGERI WATES	71,00	25.557,00	25.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	71,00	25.557,00	25.628,00	0,00	25.628,00
28	SD NEGERI SIDAMPAH INDAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	SD NEGERI PADANG DALOM	0,00	10.312,00	10.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	10.312,00	10.312,00	0,00	10.312,00
30	SD NEGERI KUBU PERAHU	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
31	SD NEGERI GUNUNG SUGIH	0,00	132.946,00	132.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	132.946,00	132.946,00	0,00	132.946,00
32	SD NEGERI TRI MEKAR JAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	SD NEGERI NEGERI JAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
34	SD NEGERI KAL PASIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
35	SD NEGERI PALANG MERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SD NEGERI SUKAMAJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	SD NEGERI HANTATAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
38	SD NEGERI TEMBELANG	80.460,00	500,00	80.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	80.460,00	500,00	80.960,00	0,00	80.960,00
39	SD NEGERI BANDAR AGUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	SD NEGERI GUNUNG RATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	SD NEGERI 1 SUKAJADI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	SD NEGERI 2 SUKAJADI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00			0,00	1.265.000,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
43	SD NEGERI CANGGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SD NEGERI SUKARAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	SD NEGERI TEBALIOKH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SD NEGERI SUKABUMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SD NEGERI NEGERI RATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SD NEGERI [illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	SD NEGERI 1 KEMBAHANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SD NEGERI 2 KEMBAHANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	SD NEGERI 1 KOTA BESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	SD NEGERI 2 KOTA BESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	SD NEGERI 3 KOTA BESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	SD NEGERI 1 PEKON BALAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	SD NEGERI 2 PEKON BALAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	SD NEGERI ARGOMULYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	985.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SD NEGERI ATAR BAWANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SD NEGERI BATU KEBAYAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SD NEGERI KUBULUKU JAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	SD NEGERI 1 BAKHU	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
61	SD NEGERI 2 BAKHU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	SD NEGERI 1 LUAS	0,00	4.983.000,00	4.983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	781.700,00	0,00	4.983.000,00	4.983.000,00	0,00	4.983.000,00
63	SD NEGERI ATAR KUWAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	794.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SD NEGERI CAMPANG TIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	980.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SISA DANA BOS REGULER / SILPA BOS BANK	TUNAI	TOTAL	PFK	SISA DANA BOS AFIRMASI / SILPA BOS BANK	TUNAI	TOTAL	PFK	SISA DANA BOS KINERJA / SILPA BOS BANK	TUNAI	TOTAL	PFK	SISA BOP KESETARAAN / SILPA BOP KESETARAAN BANK	TUNAI	TOTAL	PFK	JUMLAH SISA BOSP BANK	TUNAI	TOTAL	PFK	TOTAL
1	2	3	4	5 = 3+4	6	7	8	9 = 7+8	10	11	12	13 = 11+12	14	15	16	17 = 15+16	18	19 = 3+7+11+15	20 = 4+8+12+16	21 = 19+20	22 = 6+10+14+18	23 = 21+22
65	SD NEGERI WAY NGISON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SD NEGERI 1 BEDUDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	SD NEGERI 2 BEDUDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	SD NEGERI 1 KENALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SD NEGERI 2 KENALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	SD NEGERI 1 BUMI AGUNG	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
71	SD NEGERI SUKARAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SD NEGERI SUKA MAKMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	SD NEGERI TURGAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SD NEGERI FAJAR AGUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SD NEGERI PAPAHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	SD NEGERI KEJADIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	SD NEGERI HUJUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	SD NEGERI 1 PURAMEKAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	SD NEGERI 2 PURAMEKAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	SD NEGERI 1 MEKAR JAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SD NEGERI 2 MEKAR JAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	SD NEGERI 1 TRIMULYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SD NEGERI 2 TRIMULYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	SD NEGERI 1 GEDUNG SURIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	SD NEGERI 1 CIPTAWARAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	SD NEGERI 1 PURAJAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SD NEGERI 2 PURAJAYA	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
88	SD NEGERI 1 TRIBUDISYUKUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	SD NEGERI 2 TRIBUDISYUKUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SD NEGERI 1 CIPTAMULYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	SD NEGERI 1 SINAR LUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	SD NEGERI 1 PURAWIWITAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	SD NEGERI 1 MUARA BARU	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
94	SD NEGERI 1 MUARA JAYA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SD NEGERI MUARA JAYA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SD NEGERI 1 TAMAN SUKA MULYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	SD NEGERI 1 KAGUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	SD NEGERI 1 SUKABANJAR	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99	SD NEGERI 1 SB 2 UJUNG PEMBUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	SD NEGERI HENI ARONG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	SD NEGERI 1 LOMBOK TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	SD NEGERI 1 UJUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	SD NEGERI 1 LOMBOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	SD NEGERI SUKAJAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SD NEGERI PAHAYU JAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	SD NEGERI SOGODADI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	SD NEGERI SIDOMULYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	SD NEGERI SUKA MULYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	SD NEGERI 1 BASUNGAN	0,00	199.000,00	199.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00	219.000,00	418.000,00
110	SD NEGERI MARGA JAYA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
111	SD NEGERI 1 PAMPANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SD NEGERI 2 PAMPANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	SD NEGERI 1 GHAM SUKAMAJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	SD NEGERI 2 GHAM SUKAMAJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	SD NEGERI 1 SEDINCAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	SD NEGERI 2 SEDINCAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	SD NEGERI TUA JAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	SD NEGERI WASPADA	0,00	0,00	0,00	1.244.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.948,00	1.244.948,00
119	SD NEGERI 1 TANJUNG RAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	SD NEGERI 2 TANJUNG RAYA	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
121	SD NEGERI 1 BUAY NYERUPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	SD NEGERI 2 BUAY NYERUPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	SD NEGERI 3 BUAY NYERUPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	SD NEGERI 1 BANDAR BARU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
125	SD NEGERI 2 BANDAR BARU	0,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	151.500,00
126	SD NEGERI 3 BANDAR BARU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	SD NEGERI 1 HANAKAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	SD NEGERI 2 HANAKAU	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
129	SD NEGERI 3 HANAKAU	618.500,00	0,00	618.500,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	618.500,00	0,00	618.500,00	121.000,00	739.500,00
130	SD NEGERI 1 PAGAR DEWA	0,00	0,00	0,00	1.344.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.150,00	1.344.150,00
131	SD NEGERI 2 PAGAR DEWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	SD NEGERI 1 JAGARAGA	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
133	SD NEGERI 2 JAGARAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	SD NEGERI 1 TAPAK SIRING	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
135	SD NEGERI 2 TAPAK SIRING	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
136	SD NEGERI 1 SUKA MULYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	SD NEGERI TEBA PERING RAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	SD NEGERI 1 SUKA PURA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
139	SD NEGERI 2 SUKAPURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SISA DANA BOS REGULER			PPK	SISA DANA BOS AFIRMASI			PPK	SISA DANA BOS KINERJA			PPK	SISA BOP KESETARAAN			PPK	JUMLAH			PPK	TOTAL
		SILPA BOS				SILPA BOS				SILPA BOS				SISA BOP KESETARAAN				SISA BOSP				
		BANK	TUNAI	TOTAL		BANK	TUNAI	TOTAL		BANK	TUNAI	TOTAL		BANK	TUNAI	TOTAL		BANK	TUNAI	TOTAL		
1	2	3	4	5 = 3+4	6	7	8	9 = 7+8	10	11	12	13 = 11+12	14	15	16	17 = 15+16	18	19	20	21	22	23
140	SD NEGERI 1 WAY PETAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	SD NEGERI 2 WAY PETAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SD NEGERI 3 WAY PETAI	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
143	SD NEGERI 4 WAY PETAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	SD NEGERI 1 TUGU SARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	SD NEGERI 2 TUGU SARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	SD NEGERI 3 TUGU SARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	SD NEGERI 4 TUGU SARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	SD NEGERI 1 SIMPANG PASAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	SD NEGERI 1 SIMPANG SARI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
150	SD NEGERI 1 SUKAJAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	SD NEGERI 1 BANDING AGUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
152	SD NEGERI 2 BANDING AGUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	SD NEGERI 3 BANDING AGUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
154	SD NEGERI SUKAWARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
155	SD NEGERI WAY BULUH	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5.015.000,00	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00
156	SD NEGERI SUMBER AGUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	SD NEGERI TUGU RATU	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
158	SD NEGERI 1 KARANG AGUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	SD NEGERI 2 KARANG AGUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	SD NEGERI 3 KARANG AGUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SD NEGERI 1 SUKANANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	SD NEGERI 2 SUKANANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	SD NEGERI 1 FAJAR BULAN	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00
164	SD NEGERI 2 FAJAR BULAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	SD NEGERI 3 FAJAR BULAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	SD NEGERI 4 FAJAR BULAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	SD NEGERI 1 PADANG TAMBAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	SD NEGERI 2 PADANG TAMBAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	SD NEGERI 3 PADANG TAMBAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	SD NEGERI 4 PADANG TAMBAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	SD NEGERI 1 PURALAKSANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	SD NEGERI 2 PURALAKSANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	SD NEGERI 3 PURALAKSANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	SD NEGERI 1 SUKARAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SD NEGERI 2 SUKARAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	SD NEGERI 3 SUKARAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	SD NEGERI TANJUNG RAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	SD NEGERI MUTAR ALAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	SD NEGERI TAMBAK JAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB JUMLAH	7.450.460,71	16.524.103,00	23.974.563,71	3.582.043,00	57.500,00	141.810,00	199.310,00	0,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375.344,00	7.507.960,71	39.165.913,00	46.673.873,71	3.582.043,00	50.255.916,71
C	SEKOLAH NEGERI - SMP																					
1	SMP NEGERI 1 AIR HITAM	780,00	1.003.975,00	1.004.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	780,00	1.003.975,00	1.004.755,00	0,00	1.004.755,00
2	SMP NEGERI 2 AIR HITAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SMP NEGERI 1 LIWA	7.629.200,00	0,00	7.629.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	7.629.200,00	0,00	7.629.200,00	0,00	7.629.200,00
4	SMP NEGERI 2 LIWA	344.721,00	3.809.327,00	4.154.048,00	1.529.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	344.721,00	3.809.327,00	4.154.048,00	1.529.525,00	5.683.573,00
5	SMP NEGERI 3 LIWA	171.940,00	0,00	171.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	171.940,00	0,00	171.940,00	0,00	171.940,00
6	SMP NEGERI 4 LIWA	0,00	229.100,00	229.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	229.100,00	229.100,00	0,00	229.100,00
7	SMP NEGERI SATU ATAP 1 BALIK BUKIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SMP NEGERI SATU ATAP 2 BALIK BUKIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557.281,00	2.557.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.557.281,00	2.557.281,00	0,00	2.557.281,00
9	SMP NEGERI SEKUTING TERPADU	49.500,00	5.677.000,00	5.726.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00			0,00	0,00	49.500,00	10.177.000,00	10.226.500,00	0,00	10.226.500,00
10	SMP NEGERI 1 BANDAR NEGERI SUOH	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00
11	SMP NEGERI 2 BANDAR NEGERI SUOH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SMP NEGERI 3 BANDAR NEGERI SUOH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.750,00	428.750,00	0,00			0,00	196.000,00	0,00	428.750,00	428.750,00	0,00	428.750,00
13	SMP NEGERI SATU ATAP 1 BANDAR NEGERI SUOH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SMP NEGERI 1 BATU BRAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SMP NEGERI SATU ATAP 1 BATU BRAK	0,00	47.020,63	47.020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	47.020,63	47.020,63	0,00	47.020,63
16	SMP NEGERI 1 BATU KETULIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00	0,00			0,00	7.044.071,90	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00
17	SMP NEGERI 2 BATU KETULIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SMP NEGERI 1 BELALAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SMP NEGERI 1 GEDUNG SURIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SMP NEGERI 2 GEDUNG SURIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SMP NEGERI 1 KEBUN TEBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	2.886.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SMP NEGERI 2 KEBUN TEBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SMP NEGERI 3 KEBUN TEBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SMP NEGERI 1 LUMBOK SEMINUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SMP NEGERI SATU ATAP 1 LUMBOK SEMINUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SMP NEGERI SATU ATAP 2 LUMBOK SEMINUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	SMP NEGERI SATU ATAP 3 LUMBOK SEMINUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SMP NEGERI 1 PAGAR DEWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	SMP NEGERI 2 PAGAR DEWA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
30	SMP NEGERI SATU ATAP 1 PAGAR DEWA	200,00	9.147.200,00	9.147.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	200,00	9.147.200,00	9.147.400,00	0,00	9.147.400,00
31	SMP NEGERI SATU ATAP 2 PAGAR DEWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	SMP NEGERI 1 SEKINCAU	0,00	3.627.090,00	3.627.090,00	2.869.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.400,00			0,00	0,00	0,00	3.627.090,00	3.627.090,00	4.235.715,00	7.862.805,00

NO	NAMA SEKOLAH	BISA DANA BOS REGULER			PPK	BISA DANA BOS AFIRMASI			PPK	BISA DANA BOS KINERJA			PPK	BISA BOP KEMITRAAN			PPK	JUMLAH			PPK	TOTAL
		BISA BOS				BISA BOS				BISA BOS				BISA BOP KEMITRAAN				BISA BOSP				
		BANK	TUNAI	TOTAL		BANK	TUNAI	TOTAL		BANK	TUNAI	TOTAL		BANK	TUNAI	TOTAL		BANK	TUNAI	TOTAL		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=7+8	10	11	12	13=11+12	14	15	16	17=15+16	18	19=3+7+11+15	20=4+8+12+16	21=5+9+13+17	22=6+10+14+18	23=21+22
33	SMP NEGERI 2 SEKUNCAU	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
34	SMP NEGERI 3 SEKUNCAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SMP NEGERI 1 SUKAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SMP NEGERI 2 SUKAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	SMP NEGERI 3 SUKAU	177.598,00	700.000,00	877.598,00	882.200,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	177.598,00	700.039,00	877.637,00	882.200,00	1.759.837,00
38	SMP NEGERI SATU ATAP 1 SUKAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	SMP NEGERI SATU ATAP 2 SUKAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	SMP NEGERI 1 SUMBER JAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	SMP NEGERI 2 SUMBER JAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	SMP NEGERI 3 SUMBER JAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SMP NEGERI 1 SUOH	0,00	92.837.000,00	92.837.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	92.864.000,00	92.864.000,00	0,00	92.864.000,00
44	SMP NEGERI 2 SUOH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
45	SMP NEGERI 1 WAY TENONG	0,00	2.391.770,00	2.391.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.391.770,00	2.391.770,00	0,00	2.391.770,00
46	SMP NEGERI 2 WAY TENONG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SMP NEGERI 3 WAY TENONG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SMP NEGERI SATU ATAP 1 WAY TENONG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB JUMLAH		**8.873.115,00**	**77.405.443,63**	**86.078.896,63**	**9.282.075,00**	**0,00**	**2.731.129,00**	**2.731.129,00**	**0,00**	**1.202.000,00**	**4.828.750,00**	**6.030.750,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.658.488,00**	**85.015.532,63**	**94.673.977,63**	**9.646.833,00**	**101.357.912,63**
JUMLAH		**16.139.146,73**	**93.939.546,63**	**110.083.693,36**	**9.842.075,00**	**37.000,00**	**2.872.939,00**	**2.935.439,00**	**0,00**	**1.202.000,00**	**27.428.750,00**	**28.630.750,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**16.544.002,00**	**16.544.002,00**	**19.033.002,00**	**17.383.646,73**	**146.775.237,63**	**164.158.884,36**	**10.228.675,00**	**198.387.784,36**

DAFTAR PIUTANG
PER 31 DESEMBER 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		URAIAN	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
PIUTANG DAERAH					70.595.770.834,28
I	PIUTANG PAJAK DAERAH				47.271.712,00
a)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu - PBJT-Makanan dan/atau Minuman				38.462.796,00
1	BAPENDA	17/12/2018	Piutang Akhir Tahun 2018	Piutang Akhir 2018	170.000,00
2	BAPENDA	24/01/2019	00184/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Panwaslu Kec lombok Seminung	52.500,00
3	BAPENDA	24/01/2019	00185/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Panwaslu Kec lombok Seminung	40.000,00
4	BAPENDA	24/01/2019	00186/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Panwaslu Kec lombok Seminung	92.500,00
5	BAPENDA	24/01/2019	00187/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Panwaslu Kec lombok Seminung	267.500,00
6	BAPENDA	24/01/2019	00188/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Panwaslu Kec lombok Seminung	54.000,00
7	BAPENDA	24/01/2019	00189/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Panwaslu Kec lombok Seminung	280.000,00
8	BAPENDA	17/05/2019	02285/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan SDN Argo Mulyo Kec Batu Ketulis	35.000,00
9	BAPENDA	20/05/2019	02321/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Panwaslu kec Batu ketulis	153.000,00
10	BAPENDA	20/05/2019	02322/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Panwaslu kec Batu ketulis	27.500,00
11	BAPENDA	18/07/2019	03108/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Bawaslu Batu Ketulis	27.500,00
12	BAPENDA	18/07/2019	03109/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Bawaslu Batu Ketulis	27.500,00
13	BAPENDA	18/07/2019	03110/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Bawaslu Batu Ketulis	27.500,00
14	BAPENDA	18/07/2019	03111/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Bawaslu Batu Ketulis	27.500,00
15	BAPENDA	18/07/2019	03112/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Bawaslu Batu Ketulis	27.500,00
16	BAPENDA	18/07/2019	03113/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Bawaslu Batu Ketulis	27.500,00
17	BAPENDA	18/07/2019	03114/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Bawaslu Batu Ketulis	27.500,00
18	BAPENDA	18/07/2019	03115/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Bawaslu Batu Ketulis	27.500,00
19	BAPENDA	18/07/2019	03116/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Bawaslu Batu Ketulis	27.500,00
20	BAPENDA	29/07/2019	03408/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Bumi Jaya Kec. Sukau	17.500,00
21	BAPENDA	29/07/2019	03428/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Panwascam Kec. Belalau	90.000,00
22	BAPENDA	29/07/2019	03429/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Panwascam Kec. Belalau	90.000,00
23	BAPENDA	29/07/2019	03434/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Panwascam Kec. Belalau	90.000,00
24	BAPENDA	29/07/2019	03439/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Panwascam Kec. Belalau	90.000,00
25	BAPENDA	29/07/2019	03444/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Panwascam Kec. Belalau	90.000,00
26	BAPENDA	29/07/2019	03449/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Panwascam Kec. Belalau	90.000,00
27	BAPENDA	20/08/2019	03835/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Rigis Jaya Kec Air Hitam	181.818,00
28	BAPENDA	21/08/2019	03843/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Partai Gerindra	1.866.878,00
29	BAPENDA	21/08/2019	03844/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Partai Gerindra	530.000,00
30	BAPENDA	21/08/2019	03981/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Kelurahan Tugu Sari	420.000,00
31	BAPENDA	21/08/2019	03897/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan UPT Puskesmas L.Seminung	100.000,00
32	BAPENDA	08/11/2019	05630/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Puskesmas Batu Ketulis	132.500,00
33	BAPENDA	08/11/2019	05631/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Puskesmas Batu Ketulis	60.500,00
34	BAPENDA	20/11/2019	05797/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Ringin Jaya Kec. BNS	465.250,00
35	BAPENDA	04/12/2019	06241/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Tugu Ratu	100.000,00
36	BAPENDA	04/12/2019	06242/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Tugu Ratu	60.000,00
37	BAPENDA	04/12/2019	06243/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Tugu Ratu	24.000,00
38	BAPENDA	19/12/2019	06824/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan SDN SIDODADI Kec. Pagar Dewa	420.000,00
39	BAPENDA	19/12/2019	06862/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan SMPN 1 Sukau	500.000,00
40	BAPENDA	30/12/2019	07373/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan TPID Kec. Batu Brak	53.200,00
41	BAPENDA	30/12/2019	07442/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan TPID Kec. Kebun Tebu	65.000,00
42	BAPENDA	30/12/2019	07506/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Pancur Mas Kec.L.Seminung	300.000,00
43	BAPENDA	30/12/2019	07507/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Pancur Mas Kec.L.Seminung	100.000,00
44	BAPENDA	30/12/2019	07508/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Pancur Mas Kec.L.Seminung	100.000,00
45	BAPENDA	30/12/2019	07509/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Pancur Mas Kec.L.Seminung	125.000,00
46	BAPENDA	30/12/2019	07510/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Pancur Mas Kec.L.Seminung	50.000,00
47	BAPENDA	30/12/2019	07576/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Gunung Sugih	430.500,00
48	BAPENDA	30/12/2019	07749/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Pagar Dewa Kec. Sukau	90.000,00
49	BAPENDA	30/12/2019	07750/Rest/2019	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Pagar Dewa Kec. Sukau	180.000,00
50	BAPENDA	15/01/2020	00264/Rest/2020	Pajak restoran pada .SMP Satu Atap L.Seminung.	45.000,00
51	BAPENDA	07/02/2020	00581/Rest/2020	Pajak restoran pada .Kec Air Hitam.	120.000,00
52	BAPENDA	02/03/2020	00582/Rest/2020	Pajak restoran pada .Kec Air Hitam.	140.000,00
53	BAPENDA	12/03/2020	01184/Rest/2020	Pajak restoran pada .SDN 1 Heniarong Kec Lombok Seminung.	150.000,00
54	BAPENDA	12/03/2020	00916/Rest/2020	Pajak restoran pada .SDN 3 Fajar Bulan.	100.000,00
55	BAPENDA	28/04/2020	00917/Rest/2020	Pajak restoran pada .SDN 3 Fajar Bulan.	100.000,00
56	BAPENDA	28/04/2020	00918/Rest/2020	Pajak restoran pada .SDN 3 Fajar Bulan.	100.000,00
57	BAPENDA	28/04/2020	00919/Rest/2020	Pajak restoran pada .SDN 3 Fajar Bulan.	40.200,00
58	BAPENDA	28/04/2020	01288/Rest/2020	Pajak restoran pada .SD Negeri I Mekar Jaya Kec. Gedung Surian .	274.000,00
59	BAPENDA	28/04/2020	01525/Rest/2020	Pajak restoran pada .SD Negeri Pahayu Jaya Kec. Pagar Dewa.	27.600,00
60	BAPENDA	05/05/2020	01657/Rest/2020	Pajak restoran pada .Pkn. Tawan Sukamulya Kec. L.Seminung .	18.000,00
61	BAPENDA	24/06/2020	01658/Rest/2020	Pajak restoran pada .Pkn. Tawan Sukamulya Kec. L.Seminung .	45.000,00
62	BAPENDA	27/07/2020	01659/Rest/2020	Pajak restoran pada .Pkn. Tawan Sukamulya Kec. L.Seminung .	60.000,00
63	BAPENDA	27/07/2020	01660/Rest/2020	Pajak restoran pada .Pkn. Tawan Sukamulya Kec. L.Seminung .	60.000,00
64	BAPENDA	27/07/2020	01661/Rest/2020	Pajak restoran pada .Pkn. Tawan Sukamulya Kec. L.Seminung .	42.000,00
65	BAPENDA	29/12/2023	00029514/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN 1 Sukapura	87.500,00
66	BAPENDA	13/05/2023	00022396/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN 1 Sukarame	316.350,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		URAIAN	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
67	BAPENDA	10/07/2023	00023903/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Jagaraga Sukau	7.750,00
68	BAPENDA	13/07/2023	00024006/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Negeri Jaya Kec. BNS	530.000,00
69	BAPENDA	13/07/2023	00024013/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Kenali Kec. Belalau	547.500,00
70	BAPENDA	31/07/2023	00024434/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Kec. BNS	175.200,00
71	BAPENDA	29/08/2023	00024978/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Purnamekar	109.500,00
72	BAPENDA	04/09/2023	00025036/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Kec. BNS	241.500,00
73	BAPENDA	06/09/2023	00025136/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Ringin Jaya Kec. BNS	258.450,00
74	BAPENDA	07/09/2023	00025188/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN 2 Gunung Terang	562.800,00
75	BAPENDA	12/09/2023	00025272/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Purnamekar	109.500,00
76	BAPENDA	26/09/2023	00025766/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Suka Mulya Sukau	250.000,00
77	BAPENDA	26/09/2023	00025771/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Suka Mulya Sukau	125.000,00
78	BAPENDA	26/09/2023	00025775/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Suka Mulya Sukau	50.000,00
79	BAPENDA	13/10/2023	00026295/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Bandar Baru Sukau	86.400,00
80	BAPENDA	17/10/2023	00026328/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN 1 Sukarame	75.000,00
81	BAPENDA	17/10/2023	00026329/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN 1 Sukarame	75.000,00
82	BAPENDA	17/10/2023	00026368/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Trimekar Jaya BNS	273.750,00
83	BAPENDA	17/10/2023	00026371/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Trimekar Jaya BNS	86.250,00
84	BAPENDA	18/10/2023	00026459/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN 4 Liwa	37.500,00
85	BAPENDA	23/10/2023	00026546/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan TK Satu Atap Raa Jurai Gedung Surian	120.000,00
86	BAPENDA	06/12/2023	00027891/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Purnamekar Kec. Gedung Surian	150.000,00
87	BAPENDA	14/12/2023	00028270/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Padang Cahya	236.500,00
88	BAPENDA	27/12/2023	00028977/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Himpaudi	250.000,00
89	BAPENDA	27/12/2023	00028978/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Himpaudi	105.000,00
90	BAPENDA	27/12/2023	00028979/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Himpaudi	105.000,00
91	BAPENDA	27/12/2023	00028980/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Himpaudi	105.000,00
92	BAPENDA	27/12/2023	00028981/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Himpaudi	335.000,00
93	BAPENDA	27/12/2023	00028982/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Himpaudi	228.000,00
94	BAPENDA	27/12/2023	00028984/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Tebaliokh	17.500,00
95	BAPENDA	28/12/2023	00029155/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan Kec. Pagar Dewa	98.550,00
96	BAPENDA	28/12/2023	00029272/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN Campang Tiga	160.000,00
97	BAPENDA	29/12/2023	00029383/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN Bandar Agung	79.700,00
98	BAPENDA	29/12/2023	00029384/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN Bandar Agung	112.500,00
99	BAPENDA	29/12/2023	00029385/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN Bandar Agung	797.000,00
100	BAPENDA	29/12/2023	00029455/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN Bandar Agung	797.000,00
101	BAPENDA	29/12/2023	00029459/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN Bandar Agung	112.500,00
102	BAPENDA	29/12/2023	00029543/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN 1 Sukapura	87.500,00
103	BAPENDA	29/12/2023	00029549/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN 1 Sukapura	87.500,00
104	BAPENDA	29/12/2023	00029550/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN 1 Sukapura	150.000,00
105	BAPENDA	29/12/2023	00029552/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN 1 Sukapura	87.500,00
106	BAPENDA	29/12/2023	00029554/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN 1 Sukapura	87.500,00
107	BAPENDA	29/12/2023	00029555/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN 1 Sukapura	35.000,00
108	BAPENDA	29/12/2023	00029556/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN 1 Sukapura	87.500,00
109	BAPENDA	29/12/2023	00029558/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan SDN 1 Sukapura	35.000,00
110	BAPENDA	29/12/2023	00029615/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan PKBM Harapan Bangsa	490.000,00
111	BAPENDA	29/12/2023	00029616/RES/23	Pajak Restoran Kegiatan PKBM Harapan Bangsa	490.000,00
112	BAPENDA	01/05/2023	00029008/RES/23	RM. Madani	16.114.050,00
113	BAPENDA	27-02-2024	00030339/RES/24	Pajak Restoran Kegiatan Kec. Sumberjaya	1.417.500,00
114	BAPENDA	01-04-2024	00030963/RES/24	Pajak Restoran Kegiatan SDN 1 Purialaksana / Kekurangan stor pajak	52.500,00
115	BAPENDA	03-06-2024	00031959/RES/24	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Sidomijo	81.000,00
116	BAPENDA	04-06-2024	00031962/RES/24	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Sidomijo	248.000,00
117	BAPENDA	03-06-2024	00031965/RES/24	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Sidomijo	40.000,00
118	BAPENDA	06-06-2024	00032119/RES/24	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. argomulyo	520.000,00
119	BAPENDA	27-06-2024	00032733/RES/24	Pajak Restoran Kegiatan SDN Heni areng	27.000,00
120	BAPENDA	12-08-2024	00033682/RES/24	Pajak Restoran Kegiatan Kelurahan Tugu Sari	108.500,00
121	BAPENDA	12-08-2024	00033683/RES/24	Pajak Restoran Kegiatan Kelurahan Tugu Sari	405.000,00
122	BAPENDA	10-09-2024	00034387/RES/24	Pajak Restoran Kegiatan SDN 3 Kenang Agung	180.000,00
123	BAPENDA	27-09-2024	00034830/RES/24	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Sumber Rejo	29.000,00
124	BAPENDA	27-09-2024	00034848/RES/24	Pajak Restoran Kegiatan Pkn. Bakhu	29.000,00
125	BAPENDA	28-10-2024	00035214/RES/24	Pajak Restoran Kegiatan SDN 1 Sumber Alam	20.000,00
126	BAPENDA	25-11-2024	00036266/RES/24	Pajak Restoran Kegiatan SDN 1 LUAS	60.000,00
bj	PBJT-Jasa Parkir			Lokasi	2.600.000,00
1	BAPENDA	24-07-2024	00003034/PKR/24	Pajak Parkir Bank BNI 46	150.000,00
2	BAPENDA	18-03-2024	00002792/PKR/24	Pajak Parkir Bank Eka	150.000,00
3	BAPENDA	24-07-2024	00003033/PKR/24	Pajak Parkir Bank Eka	150.000,00
4	BAPENDA	28-08-2024	00003158/PKR/24	Pajak Parkir Bank Eka	150.000,00
5	BAPENDA	24-07-2024	00003030/PKR/24	Pajak Parkir Bank Mandiri	150.000,00
6	BAPENDA	23-07-2024	00003037/PKR/24	Pajak Parkir Bank Utomo	150.000,00
7	BAPENDA	24-07-2024	00003031/PKR/24	Pajak Parkir Bank BRI Cabang Liwa	150.000,00
8	BAPENDA	23-07-2024	00003035/PKR/24	Pajak Parkir PT. Pegadaian	100.000,00
9	BAPENDA	24-07-2024	00003036/PKR/24	Pajak Parkir RSIA Bunda	1.000.000,00
10	BAPENDA	15-03-2024	00002752/PKR/24	Pajak Parkir RSUD Aimuddin Umar	300.000,00
11	Bapenda	29-10-2024	00003263/PKR/24	Lokasi BANK SYARIAH INDONESIA	150.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		URAIAN	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
d)	**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)**				**6.208.916,00**
1	BAPENDA	29/07/2024	270/204/KPTS/IV.02/2024	Desa Way Mengaku Kec. Balik Bukit	2.711.600,00
2	BAPENDA	29/07/2024	270/204/KPTS/IV.02/2024	Desa Way Emputau Ulu Kec. Balik Bukit	770.220,00
3	BAPENDA	05/01/2024	18.04.060.012	Desa Suka Pura Kec. Sumber Jaya	2.727.096,00
II	**PIUTANG RETRIBUSI DAERAH**				**3.905.529.291,00**
	BLUD DINKES				**530.644.950,00**
1	PKM-Sumberjaya	11/4/2024	014/12/SKR/PKM.SBY/2024	Claim Dana Non Kapitasi	12.040.000,00
2	PKM-Sumberjaya	12/2/2024	015/12/SKR/PKM.SBY/2024	Claim Dana Non Kapitasi	14.998.850,00
3	PKM-Kebun Tebu	11/6/2024	013/12/SKR/JKN RI.RJ/PKM K.TEBU/2024	Claim Dana Non Kapitasi	17.255.840,00
4	PKM-Kebun Tebu	12/4/2024	013/12/SKR/JKN.RI.RJ/PKM K.TEBU/2024	Claim Dana Non Kapitasi	20.262.435,00
5	PKM-Gedung Surian	9/2/2024	/09/SKR/PKM GESU/2024	Claim Dana Non Kapitasi	565.000,00
6	PKM-Gedung Surian	11/6/2024	/11/SKR/PKM GESU/2024	Claim Dana Non Kapitasi	21.797.870,00
7	PKM-Gedung Surian	12/4/2024	/12/SKR/PKM GESU/2024	Claim Dana Non Kapitasi	21.948.835,00
8	PKM-Gedung Surian	10/7/2024	/10/SKR/PKM GESU/2024	Claim Pronalis	620.000,00
9	PKM-Gedung Surian	12/20/2024	/12/SKR/PKM GESU/2024	Claim Pronalis	1.100.000,00
10	PKM-Air Hitam	11/1/2024	/XI/SKR/PKM_AH/2024	Claim Dana Non Kapitasi	8.423.845,00
11	PKM-Air Hitam	12/6/2024	/XII/SKR/PKM_AH/2024	Claim Dana Non Kapitasi	17.457.715,00
12	PKM-Fajar Bulan	11/1/2024	04/12/SKR/PKM F. BULAN/2024	Claim Dana Non Kapitasi	55.996.175,00
13	PKM-Fajar Bulan	12/2/2024	04/12/SKR/PKM F. BULAN/2024	Claim Dana Non Kapitasi	41.737.455,00
14	PKM-Fajar Bulan	11/1/2024	16/12/SKR/PKM .BULAN/2024	Claim Pronalis	3.450.000,00
15	PKM-Fajar Bulan	12/1/2024	16/12/SKR/PKM .BULAN/2024	Claim Pronalis	3.600.000,00
16	PKM-Sekincau	10/28/2024	215/10/SKR/PKM-SKC/2024	Claim Dana Non Kapitasi	17.203.695,00
17	PKM-Sekincau	11/6/2024	022/12/SKR/PKM-SKC/2024	Claim Dana Non Kapitasi	15.714.945,00
18	PKM-Sekincau	12/6/2024	040/12/SKR/PKM-SKC/2024	Claim Dana Non Kapitasi	22.681.145,00
19	PKM-Sekincau	10/28/2024	156/10/SKR/PKM-SKC/2024	Claim Pronalis	500.000,00
20	PKM-Sekincau	11/6/2024	062/11/SKR/PKM-SKC/2024	Claim Pronalis	2.353.000,00
21	PKM-Sekincau	12/6/2024	062/12/SKR/PKM-SKC/2024	Claim Pronalis	1.767.000,00
22	PKM- Batu Ketulis	10/16/2024	0199/10/SKR/PKM.BK/2024	Claim Dana Non Kapitasi	19.458.435,00
23	PKM- Batu Ketulis	11/6/2024	0199/11/SKR/PKM.BK/2024	Claim Dana Non Kapitasi	17.420.790,00
24	PKM- Batu Ketulis	12/11/2024	0199/12/SKR/PKM.BK/2024	Claim Dana Non Kapitasi	21.310.315,00
25	PKM- Batu Ketulis	12/2/2024	0212/11/SKR/PKM.BK/2024	Claim Pronalis	1.845.000,00
26	PKM-Pagar Dewa	12/4/2024	/12/SKR/PKM PAGAR DEWA/2024	Claim Dana Non Kapitasi	10.683.405,00
27	PKM-Kenali	11/6/2024	/11/SKR/PKM.KNL/2024	Claim Dana Non Kapitasi	12.722.000,00
28	PKM-Kenali	12/11/2024	/12/SKR/PKM.KNL/2024	Claim Dana Non Kapitasi	22.680.800,00
29	PKM-Batu Brak	11/6/2024	/11/SKR/PKM-BATUBRAK/2024	Claim Dana Non Kapitasi	10.263.000,00
30	PKM-Batu Brak	18/12/2024	/12/SKR/PKM-BATUBRAK/2024	Claim Dana Non Kapitasi	11.227.500,00
31	PKM-BNS	08/11/2024	/11/SKR/PKM.BNS/2024	Claim Dana Non Kapitasi	10.265.350,00
32	PKM-BNS	11/12/2024	/12/SKR/PKM.BNS/2024	Claim Dana Non Kapitasi	17.825.000,00
33	PKM-BNS	12/24/2024	/12/SKR/PKM.BNS/2024	Claim Pronalis	2.153.000,00
34	PKM-Simulyo	11/6/2024	/11/SKR/PKM-SM/2024	Claim Dana Non Kapitasi	13.607.100,00
35	PKM-Simulyo	12/6/2024	/12/SKR/PKM-SM/2024	Claim Dana Non Kapitasi	9.383.700,00
36	PKM-Bawy Nyerupa	11/6/2024	134/10/SKR/PKM-BN /2024	Claim Dana Non Kapitasi	25.240.800,00
37	PKM-Bawy Nyerupa	18/12/2024	134/10/SKR/PKM-BN /2024	Claim Dana Non Kapitasi	14.896.950,00
38	PKM-Lombok	11/6/2024	/ /SKR/PKM. LBK/2024	Claim Dana Non Kapitasi	2.400.000,00
39	PKM-Lombok	12/2/2024	/ /SKR/PKM. LBK/2024	Claim Dana Non Kapitasi	5.400.000,00
	BLUD RSUD AU				**3.318.341.485,00**
1	RSUD AU	31/12/2024	0511.a/12/SKR/1.02.02/2024	Pelayanan Kesehatan JKN 2024	1.594.476.900,00
2	RSUD AU	31/12/2024	0511.b/12/SKR/1.02.02/2024	Pelayanan Kesehatan JKN 2024	67.936.600,00
3	RSUD AU	31/12/2024	0511.c/12/SKR/1.02.02/2024	Pelayanan Kesehatan JKN 2024	76.576.155,00
4	RSUD AU	31/12/2024	0511.d/12/SKR/1.02.02/2024	Pelayanan Kesehatan JKN 2024	1.296.811.830,00
5	RSUD AU	31/12/2024	0511.e/12/SKR/1.02.02/2024	Pelayanan Kesehatan JKN 2024	282.538.000,00
a)	**RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**				**20.680.356,00**
1	DISKOMINFO	08/02/2021		ERA BANGUN TOWERINDO (EBT)	2.910,00
2	DISKOMINFO	08/02/2021		XL	2.669.700,00
3	DISKOMINFO	06/01/2017		MITRATEL	5.000,00
4	DISKOMINFO	25/02/2019		STP	2.402.730,00
5	DISKOMINFO	08/02/2021		TBG	1.067.935,00
6	DISKOMINFO	06/01/2017		TBG	1.685.930,00
7	DISKOMINFO	25/02/2022		TBG	14.907.200,00
8	DISKOMINFO	15/03/2023		TBG	1.200,00
9	DISKOMINFO	06/01/2017		TELKOMSEL	2.936.970,00
10	DISKOMINFO	25/02/2019		GIHON	1.080,00
b)	**Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan**				**75.000,00**
1	BAPENDA	12-31/2023		Retribusi Sewa Rumah Dinas An. PEGA YANTI, S.IP (KESBANGPOL)	75.000,00
c)	**RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH**				**30.787.500,00**
1	BAPENDA		BA Nilai Sewa Kesepakatan	Penyewaan Tanah An. Antonilli surya	250.000,00
2	BAPENDA		BA Nilai Sewa Kesepakatan	Penyewaan Tanah An. Candra adi winar	400.000,00
3	BAPENDA		BA Nilai Sewa Kesepakatan	Penyewaan Tanah An. Arsaman ij. raya	3.450.000,00
4	BAPENDA		BA Nilai Sewa Kesepakatan	Penyewaan Tanah An.marsudi	375.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		URAIAN	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
5	BAPENDA		BA Nilai Sewa Kesepakatan	Penyewaan Tanah An. wayan suwandi	262.000,00
6	BAPENDA		BA Nilai Sewa Kesepakatan	Penyewaan Tanah An. ariyad	1.750.000,00
7	BAPENDA		BA Nilai Sewa Kesepakatan	Penyewaan Tanah An. Ahmad lani	700.000,00
8	BAPENDA		BA Nilai Sewa Kesepakatan	Penyewaan Tanah An. Rohman bahway	500.000,00
9	BAPENDA		BA Nilai Sewa Kesepakatan	Penyewaan Tanah An. Sutrisno bahway	3.473.000,00
10	BAPENDA		BA Nilai Sewa Kesepakatan	Penyewaan Tanah An. Mizan	15.000,00
11	BAPENDA		BA Nilai Sewa Kesepakatan	Penyewaan Tanah An. Herman	2.212.500,00
12	BAPENDA		BA Nilai Sewa Kesepakatan	Penyewaan Tanah An. Hendri ujung	1.100.000,00
13	BAPENDA		BA Nilai Sewa Kesepakatan	Penyewaan Tanah An. Rizal	2.200.000,00
14	BAPENDA		BA Nilai Sewa Kesepakatan	Penyewaan Tanah An. Junaidi	750.000,00
15	BAPENDA		BA Nilai Sewa Kesepakatan	Penyewaan Tanah An. Suganda	6.250.000,00
16	BAPENDA		BA Nilai Sewa Kesepakatan	Penyewaan Tanah An. Suhendi	4.600.000,00
17	BAPENDA		BA Nilai Sewa Kesepakatan	Penyewaan Tanah An. Maihuri	1.500.000,00
18	BAPENDA		BA Nilai Sewa Kesepakatan	Penyewaan Tanah An. Andre pratama	1.000.000,00
III	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN				118.450.130,00
a)	PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN				118.450.130,00
1	BKAD	27/03/2024	BA PENYETORAN PAD	Deviden Perumda Limau Kunci Bagian Kab Lambar TB 2023	118.450.130,00
IV	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH				167.288.589,28
b)	PIUTANG PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN DANA BERGULIR				61.840.000,00
1	Koperindag	11/10/2003		PK Mat Nuri	2.665.000,00
2	Koperindag	11/10/2003		PK Ie Sukmiasih	1.000.000,00
3	Koperindag	26/10/2004		LKM. PURWAMANDIRI	750.000,00
4	Koperindag	26/10/2004		LKM. SUTRA PESAGI	6.250.000,00
5	Koperindag	26/10/2004		PK. SUROSO	3.825.000,00
6	Koperindag	26/10/2004		PK. KASTUMI	2.025.000,00
7	Koperindag	31/10/2005		PK Zainal	2.150.000,00
8	Koperindag	31/10/2005		PK Sarjak	2.450.000,00
9	Koperindag	08/10/2006		KOP. SINAR TERATE	6.125.000,00
10	Koperindag	08/10/2006		LKM BINA USAHA TERAMPIL	4.625.000,00
11	Koperindag	08/10/2006		PK WATI AYU	200.000,00
12	Koperindag	14/10/2007		LKM Tunggal Jaya	1.675.000,00
13	Koperindag	26/11/2008		PK Siti Maisyaroh	3.200.000,00
14	Koperindag	18/07/2011		EDI SRIANTO	500.000,00
15	Koperindag	18/07/2011		APRINA	400.000,00
16	Koperindag	15/02/2013		IRIANTO	1.800.000,00
17	Koperindag	02/07/2014		Ratna Hayani/Pangku	1.575.000,00
18	Koperindag	15/03/2016		Marwati	775.000,00
19	Koperindag	29/03/2016		Noverawati	800.000,00
20	Koperindag	29/03/2016		Cundra Wati	400.000,00
21	Koperindag	29/03/2016		Emawati	50.000,00
22	Koperindag	17/11/2016		Saglan Mujahidin	650.000,00
23	Koperindag	01/04/2017		Idawati	1.200.000,00
24	Koperindag	01/05/2017		Ermiati	1.100.000,00
25	Koperindag	07/03/2018		Ida Yuliza	500.000,00
26	Koperindag	07/03/2018		Selamatkan	1.600.000,00
27	Koperindag	26/07/2018		Rindawanah	875.000,00
28	Koperindag	13/12/2018		Laomi	1.050.000,00
29	Koperindag	07/05/2019		Ahmadi	1.000.000,00
30	Koperindag	18/09/2019		Mujiyanto	200.000,00
31	Koperindag	16/12/2019		Supriyadi	1.200.000,00
32	Koperindag	16/12/2019		Rizky Saputra	1.800.000,00
33	Koperindag	16/12/2019		Busairi/Edi Bubuk Kopi	725.000,00
34	Koperindag	18/06/2020		Wahyu Anggoro w	700.000,00
35	Koperindag	18/06/2020		Amawati	450.000,00
36	Koperindag	18/06/2020		Maysaroh	420.000,00
37	Koperindag	18/06/2020		Yudi Syaiqinto	1.200.000,00
38	Koperindag	18/06/2020		Ahmad Masykur	1.200.000,00
39	Koperindag	18/06/2020		Dwi Yanto	500.000,00
c)	PIUTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN				55.701.641,04
1	BKAD	01/03/2022	LHP BPK-RI Nomor : 23/Terinci.LKPD.2021.Lambar/04/2022	CV. Ujung Tanjung	0,46
2	BKAD	01/03/2022	LHP BPK-RI Nomor : 23/Terinci.LKPD.2021.Lambar/04/2022	CV Bukit Pesagi	37.176.695,34
3	BKAD	01/03/2022	LHP BPK-RI Nomor : 23/Terinci.LKPD.2021.Lambar/04/2022	CV Sinar Jaya	18.524.945,22
d)	PIUTANG DENDA PBB P2				40.654,24
1	BKAD	31/12/2022	Denda Keterlambatan PBB	Pencatatan Piutang Denda Keterlambatan PBB PT. TSG	40.654,24
e)	PIUTANG PENDAPATAN PENGEMBALIAN GAJI DAN TUNJANGAN				49.798.294,00
1	BKAD	02/01/2023	SKPP No. 991/1408/V.01/2022	Pencatatan Piutang Pendapatan Pengembalian Gaji dan Tunjangan ASN Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022 Sebesar Rp. 49.711.076,- An. Sdr. Muhammad Yusman, NIP. 196311102014071003	1.000.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		URAIAN	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
2	BKAD	10/06/2024	Surat Pernyataan Kesanggupan	Pengembalian Kelebihan Tunjangan Jabatan Fungsional terhitung sejak Bulan September Tahun 2015 s.d. Bulan Januari Tahun 2022 dengan nominal cicilan Rp. 1.366.416,00 setiap bulannya An. Dr. DEVI SILVIA AGUSTINA, Sp. OG.	8.192.504,00
3	BKAD	12/08/2024	Surat Pernyataan Kesanggupan	Pengembalian Kelebihan Tunjangan Keluarga PNS dari Bulan Oktober 2015 s.d. Agustus 2024 An. SEPRIYANTI, S.Pd. NIP 197809102014072005 Sebesar Rp. 44.605.790	40.605.790,00
V	PIUTANG PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT				2.000.176.000,00
1	PPKD	25/10/2024	PMK 89 - 2024	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.061.862.000,00
2	PPKD	25/10/2024	PMK 89 - 2024	DBH PPh Pasal 21	778.453.000,00
3	PPKD	25/10/2024	PMK 89 - 2024	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29WPOPDN	103.056.000,00
4	PPKD	25/10/2024	PMK 89 - 2024	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5.424.000,00
5	PPKD	25/10/2024	PMK 89 - 2024	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	51.381.000,00
VI	PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH				64.358.083.112,00
1	PPKD	31/07/2024	G/429/VI.03/HK/2024	SK Gub -TW II 2024 - PKB	3.503.194.646,00
2	PPKD	31/10/2024	G/715/VI.03/HK/2024	SK Gub -TW III 2024 - PKB	4.630.305.900,00
3	PPKD	14/02/2025	G/147/VI.03/HK/2024	SK Gub -TW IV 2024 - PKB	5.263.269.463,00
1	PPKD	27/05/2024	G/343/VI.03/HK/2024	SK Gub -TW I 2024 - BBNKB	2.309.220.958,00
2	PPKD	31/07/2024	G/429/VI.03/HK/2024	SK Gub -TW II 2024 - BBNKB	2.530.395.632,00
3	PPKD	31/10/2024	G/715/VI.03/HK/2024	SK Gub -TW III 2024 - BBNKB	3.115.300.425,00
4	PPKD	14/02/2025	G/147/VI.03/HK/2024	SK Gub -TW IV 2024 - BBNKB	3.738.469.957,00
4	PPKD	27/05/2024	G/343/VI.03/HK/2024	SK Gub -TW I 2024 - PBBKB	8.392.576.972,00
5	PPKD	31/07/2024	G/429/VI.03/HK/2024	SK Gub -TW II 2024 - PBBKB	8.677.676.177,00
6	PPKD	31/10/2024	G/715/VI.03/HK/2024	SK Gub -TW III 2024 - PBBKB	9.096.763.236,00
7	PPKD	14/02/2025	G/147/VI.03/HK/2024	SK Gub -TW IV 2024 - PBBKB	8.745.425.924,00
8	PPKD	31/07/2024	G/429/VI.03/HK/2024	SK Gub -TW II 2024 - PAP	183.880.271,00
9	PPKD	31/10/2024	G/715/VI.03/HK/2024	SK Gub -TW III 2024 - PAP	125.250.798,00
10	PPKD	14/02/2025	G/147/VI.03/HK/2024	SK Gub -TW IV 2024 - PAP	125.558.225,00
11	PPKD	24/12/2024	G/870/VI.03/HK/2024	Pajak Rokok Triwulan IV TA 2024	3.959.794.326,00

AGING SCHEDULE PIUTANG
PER 31 DESEMBER 2024

No	URAIAN	Piutang 2024	Kualitas dan Umur Piutang				Penyisihan Piutang	Piutang Netto Per 31 Des 2024
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3-8
1	**Dinas Kesehatan**							
	Retribusi Daerah :							
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas							
	Puskesmas Sumber jaya	27.006.850,00	14.966.850,00	12.040.000,00	0,00	0,00	1.278.834,25	25.728.015,75
	Puskesmas Kebun tebu	37.518.275,00	20.262.435,00	17.255.840,00	0,00	0,00	1.826.896,17	35.691.378,83
	Puskesmas Gedung Surian	46.031.705,00	23.048.835,00	22.417.870,00	565.000,00	0,00	2.639.531,17	43.392.173,83
	Puskesmas Fajar Bulan	104.783.630,00	48.787.455,00	55.996.175,00	0,00	0,00	5.843.554,77	98.940.075,23
	Puskesmas Sekincau	60.219.785,00	27.301.145,00	32.918.640,00	0,00	0,00	3.428.369,72	56.791.415,28
	Puskesmas Pagar Dewa	10.683.405,00	10.683.405,00	0,00	0,00	0,00	53.417,02	10.629.987,98
	Puskesmas BNS	30.243.350,00	19.978.000,00	10.265.350,00	0,00	0,00	1.126.425,00	29.116.925,00
	Puskesmas Srimulyo	22.990.800,00	9.383.700,00	13.607.100,00	0,00	0,00	1.407.628,50	21.583.171,50
	Puskesmas Kenali	35.402.800,00	22.680.800,00	12.722.000,00	0,00	0,00	1.385.604,00	34.017.196,00
	Puskesmas Batu Brak	21.510.500,00	11.227.500,00	10.283.000,00	0,00	0,00	1.084.437,50	20.426.062,50
	Puskesmas Buay Nyerupa	40.137.750,00	14.896.950,00	25.240.800,00	0,00	0,00	2.598.564,75	37.539.185,25
	Puskesmas Lombok	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	7.761.000,00
	Puskesmas Air Hitam	26.281.560,00	17.857.715,00	8.423.845,00	0,00	0,00	931.673,07	25.349.886,93
	Puskesmas Batu Ketulis	60.034.540,00	23.155.315,00	36.879.225,00	0,00	0,00	3.803.699,07	56.230.840,93
	Sub Jumlah	**530.644.950,00**	**272.030.105,00**	**258.049.845,00**	**565.000,00**	**0,00**	**27.447.634,99**	**503.197.315,01**
2	**RSUD Alimuddin Umar**							
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan							
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	3.318.341.485,00	3.318.341.485,00	0,00	0,00	0,00	16.591.707,43	3.301.749.777,57
	Sub Jumlah	**3.318.341.485,00**	**3.318.341.485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.591.707,43**	**3.301.749.777,57**
3	**Diskominfo**							
	Retribusi Daerah :							
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	25.680.356,00	0,00	0,00	0,00	25.680.356,00	25.680.356,00	0,00
	Sub Jumlah	**25.680.356,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.680.356,00**	**25.680.356,00**	**0,00**
4	**Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag**							
	Lain-lain PAD yang Sah :							
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Jasas Pengguliran	61.640.000,00	0,00	0,00	0,00	61.640.000,00	61.640.000,00	0,00
	Penyisihan Pokok Dana Bergulir *)							
	Penyisihan Pokok Dana Bergulir *)	0,00	0,00	0,00	0,00	867.844.191,00	867.844.191,00	0,00
	Sub Jumlah	**61.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**929.484.191,00**	**929.484.191,00**	**0,00**
5	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**							
	Pajak Daerah :							
	PBBP2	6.208.916,00	6.208.916,00	0,00	0,00	0,00	31.044,58	6.177.871,42
	PBJT-Restoran	38.462.795,00	3.217.500,00	25.565.750,00	1.326.400,00	8.351.146,00	11.588.008,50	26.874.787,50
	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	2.600.000,00	2.600.000,00				13.000,00	2.587.000,00
	Retribusi Daerah :							
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	75.000,00				75.000,00	75.000,00	0,00

No	URAIAN	Piutang 2024	Kualitas dan Umur Piutang				Penyisihan Piutang	Piutang Netto Per 31 Des 2024
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3-8
	Retribusi Penyewaan Tanah	30.787.500,00				30.787.500,00	30.787.500,00	0,00
	Sub Jumlah	**78.134.212,00**	**12.026.416,00**	**25.565.750,00**	**1.328.400,00**	**39.213.646,00**	**42.494.553,08**	**35.639.658,92**
6	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**							
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan							
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	118.450.130,00	0,00	0,00	118.450.130,00	0,00	59.225.065,00	59.225.065,00
	Lain-lain PAD yang Sah							
	Pendapatan Denda PBBP2	40.654,24	0,00	0,00		40.654,24	40.654,24	0,00
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	55.781.641,04	0,00	0,00	0,00	55.781.641,04	55.781.641,04	0,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	49.798.294,00	0,00		48.798.294,00	1.000.000,00	25.399.147,00	24.399.147,00
	Sub Jumlah	**224.070.719,28**	**0,00**	**0,00**	**167.248.424,00**	**56.822.295,28**	**140.446.507,28**	**83.624.212,00**
7	**PPKD**							
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :							
	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.061.862.000,00	0,00	1.061.862.000,00	0,00	0,00	106.186.200,00	955.675.800,00
	DBH PPh Pasal 21	778.453.000,00	0,00	778.453.000,00	0,00	0,00	77.845.300,00	700.607.700,00
	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	103.056.000,00	0,00	103.056.000,00	0,00	0,00	10.305.600,00	92.750.400,00
	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5.424.000,00	0,00	5.424.000,00	0,00	0,00	542.400,00	4.881.600,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	51.381.000,00	0,00	51.381.000,00	0,00	0,00	5.138.100,00	46.242.900,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah :							
	DBH PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)	13.396.770.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.396.770.011,00
	DBH BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)	11.693.387.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.693.387.172,00
	DBH PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor)	34.882.442.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.882.442.309,00
	DBH PAP (Pajak Air Permukaan)	434.689.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.689.294,00
	DBH Pajak Rokok	3.950.794.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.794.326,00
	Sub Jumlah	**66.358.259.112,00**	**0,00**	**2.000.176.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.017.600,00**	**66.158.241.512,00**
	Jumlah Total	**70.596.770.834,28**	**3.602.398.006,00**	**2.283.791.595,00**	**169.141.824,00**	**1.051.200.488,28**	**1.382.162.549,78**	**70.082.452.475,50**

***) Khusus utk Penyisihan Pokok Dana Bergulir, angka tersebut adalah kontra akun Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir Melalui BLUD**

MUTASI PENYISIHAN PIUTANG PER PERANGKAT DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

No	URAIAN	Penyisihan s.d. Per 31 Des 2023	Penyesuaian Tahun Berkenaan		Penyisihan s.d. Per 31 Des 2024
			Bertambah (Beban Penyisihan) & Pokok Dana Bergulir Neraca	Berkurang (Ekuitas)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)
1.	**Dinas Kesehatan**				
	Lain-lain PAD yang Sah :				
	Pendapatan BLUD	1.329.397,82	0,00	0,00	1.329.397,82
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan				
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	26.118.237,17	0,00	26.118.237,17
	Sub Jumlah	**1.329.397,82**	**26.118.237,17**	**0,00**	**27.447.634,99**
2.	**RSUD Alimuddin Umar**				
	Lain-lain PAD yang Sah :				
	Pendapatan BLUD	9.381.878,05	0,00	0,00	9.381.878,05
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan				
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	7.209.829,38	0,00	7.209.829,38
	Sub Jumlah	**9.381.878,05**	**7.209.829,38**	**0,00**	**16.591.707,43**
3.	**Diskominfo**				
	Retribusi Daerah :				
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	25.679.756,00	600,00	0,00	25.680.356,00
	Sub Jumlah	**25.679.756,00**	**600,00**	**0,00**	**25.680.356,00**
4.	**Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag**				
	Lain-lain PAD yang Sah :				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Jasa Pengguliran	62.965.000,00	0,00	1.325.000,00	61.640.000,00
	Investasi Non Permanen-Dana Bergulir *)				
	Penyisihan Pokok Dana Bergulir		867.844.191,00		867.844.191,00
	Sub Jumlah	**62.965.000,00**	**0,00**	**1.325.000,00**	**929.484.191,00**
5.	**Badan Pendapatan Daerah**				
	Pajak Daerah :				
	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.985.734,75	0,00	4.985.734,75	0,00
	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	149.320,25	0,00	149.320,25	0,00
	Pajak Parkir	17.750,00		17.750,00	0,00
	Pajak Bumi dan Bangunan P2	0,00	31.044,58	0,00	31.044,58
	PBJT-Restoran	0,00	11.588.008,50	0,00	11.588.008,50
	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	Retribusi Daerah :				0,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah	10.001.250,00	20.786.250,00	0,00	30.787.500,00
	Sub Jumlah	**15.229.055,00**	**32.418.303,08**	**5.152.805,00**	**42.494.553,08**
6.	**BKAD**				
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :				
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	0,00	59.225.065,00	0,00	59.225.065,00
	Lain-lain PAD yang Sah				0,00
	Pendapatan Denda PBBP2	590.174,62	0,00	549.520,38	40.654,24
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	62.510.851,56	0,00	6.729.210,52	55.781.641,04
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	6.900.000,00	18.499.147,00		25.399.147,00
	Sub Jumlah	**70.001.026,18**	**77.724.212,00**	**7.278.730,90**	**140.446.507,28**
7.	**PPKD**				
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :				
	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	106.186.200,00	0,00	106.186.200,00
	DBH PPh Pasal 21	0,00	77.845.300,00	0,00	77.845.300,00
	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1,54	10.305.598,46	0,00	10.305.600,00
	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	564.709,55	0,00	22.309,55	542.400,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	5,48		5,48	0,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	4,43	5.138.095,57	0,00	5.138.100,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6,74	0,00	6,74	0,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah :				0,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.340.876.638,62	0,00	2.340.876.638,62	0,00
	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.481.093.220,62	0,00	1.481.093.220,62	0,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan	9.351.705.131,68	0,00	9.351.705.131,68	0,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	86.156.991,10	0,00	86.156.991,10	0,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	19.959.193,49	0,00	19.959.193,49	0,00
	Sub Jumlah	**13.280.355.903,25**	**199.475.194,03**	**13.279.813.497,28**	**200.017.600,00**
	Jumlah Total	**13.464.942.016,30**	**342.946.375,66**	**13.293.570.033,16**	**1.382.162.549,78**

**) Penyisihan Pokok Dana Bergulir tidak menambah beban, tapi menambah pokok investasi*

DAFTAR BAHAN KIMIA DAN OBAT KEDALUWARSA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PER 31 DESEMBER 2024

No.	OPD	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Tahun Kadaluarsa
1	RSUD AU	Ventolin Inhaler	6	126.184,00	757.104,00	2022
2	RSUD AU	Diltiazem	160	205,00	32.800,00	2022
3	RSUD AU	Ampicilin Inj	134	14.892,00	1.995.528,00	2022
4	RSUD AU	Propanolol Tab	330	282,00	93.060,00	2022
5	RSUD AU	Vit B6 10mg	370	131,00	48.470,00	2022
6	RSUD AU	Metyl Prednisolone	9	10.395,00	93.555,00	2022
7	RSUD AU	Fergoxine Inj	1	55.000,00	55.000,00	2022
8	RSUD AU	Otsu Manitol 20%	3	43.500,00	130.500,00	2022
9	RSUD AU	Dumin 250mg	15	8.712,00	130.680,00	2022
10	RSUD AU	Metyl Ergometrine Inj	35	5.500,00	192.500,00	2022
11	RSUD AU	Lidocain Inj	8	1.072,00	8.576,00	2022
12	RSUD AU	OndanCetron	1	3.850,00	3.850,00	2022
13	RSUD AU	Favipiravir	600	15.000,00	9.000.000,00	2022
14	RSUD AU	Oxyterracyline Salep	6	2.010,00	12.060,00	2022
15	RSUD AU	Prointark Inj 10ml	3	13.200,00	39.600,00	2022
16	RSUD AU	Guprin Inj	3	39.600,00	118.800,00	2022
17	RSUD AU	Thiampenicol Kapsul	30	990,00	29.700,00	2022
18	RSUD AU	RyvelDrop 10ml	3	27.500,00	82.500,00	2022
19	RSUD AU	Berry Vision Tab	100	3.377,00	337.700,00	2022
20	RSUD AU	Nucine Tab	90	3.373,00	303.570,00	2022
21	RSUD AU	Cendo Pantocain 0,5%	2	12.405,00	24.810,00	2022
22	RSUD AU	Cendo Pantocain 2%	2	13.556,00	27.112,00	2022
23	RSUD AU	Gentian Violet 1%	24	3.700,00	88.800,00	2022
24	RSUD AU	Pantoprazole	40	37.400,00	1.495.000,00	2022
25	RSUD AU	Alupurinol 100mg	190	132,00	25.080,00	2022
26	RSUD AU	Ivermecline Tab 12mg tab	120	5.600,00	672.000,00	2022
27	RSUD AU	Diltiazem	200	205,00	41.000,00	2023
28	RSUD AU	Anti haemoroid	130	3.267,00	424.710,00	2023
29	RSUD AU	Bunascan Inj	10	65.340,00	653.400,00	2023
30	RSUD AU	Meylon Bp	11	6.749,00	74.239,00	2023
31	RSUD AU	Berry Vision	70	3.377,00	236.390,00	2023
32	RSUD AU	Catarlent	8	23.147,00	185.176,00	2023
33	RSUD AU	LFX	30	14.117,00	423.510,00	2023
34	RSUD AU	Sulcolon	160	6.993,00	1.118.880,00	2023
35	RSUD AU	Ascorbid Acid	100	19.800,00	1.980.000,00	2023
36	RSUD AU	Biosave	1	948.750,00	948.750,00	2023
37	RSUD AU	Piracetam	100	325,00	32.500,00	2023
38	RSUD AU	Disolf Tab 490 mg	30	7.381,00	221.430,00	2023
39	RSUD AU	Modexa Nasal Spary	2	198.000,00	396.000,00	2023
40	RSUD AU	Garkene Syrup	10	51.948,00	519.480,00	2024
41	RSUD AU	Vitamin C Tab	400	308,00	123.200,00	2024
42	RSUD AU	Metamizol Tab	300	225,00	67.500,00	2024
43	RSUD AU	Vitamin C Tab	46	308,00	14.168,00	2024
44	RSUD AU	MgSo4 20%	13	3.580,00	46.540,00	2024
45	RSUD AU	Triamcinolone salep	8	22.866,00	182.928,00	2024
46	RSUD AU	Digoxin 0,5mg tab	1600	124,00	198.400,00	2024
47	RSUD AU	Phytomenadion Tab	43	759,00	32.637,00	2024
48	RSUD AU	Misoprostol(Gastrul)	25	7.659,00	191.475,00	2024
49	RSUD AU	Digoxin Tab	82	124,00	10.168,00	2024
50	RSUD AU	AmoxilineSyirup	1	7.770,00	7.770,00	2024
51	RSUD AU	Dismeno Tab	9	4.496,00	40.464,00	2024
52	RSUD AU	Phenobarbital Tab	13	222,00	2.886,00	2024
53	RSUD AU	Mgso4 20%	6	3.580,00	21.480,00	2024
54	RSUD AU	Fusidic Cream	5	36.630,00	183.150,00	2024
55	RSUD AU	Digoxin	114	124,00	14.136,00	2024
56	RSUD AU	Salep Genoid 0,3%	3	9.754,00	29.262,00	2024
57	RSUD AU	Ceftazidime Tab	6	960,00	5.760,00	2024
58	RSUD AU	Gitas Inj	16	35.631,00	570.096,00	2024
59	RSUD AU	Triamcinolone cr	8	22.866,00	182.928,00	2024
60	RSUD AU	Citicoline 250mg	10	7.909,00	79.090,00	2024
61	RSUD AU	Forotic ft	1	37.962,00	37.962,00	2024
62	RSUD AU	Domperidone Syr	1	12.650,00	12.650,00	2024
63	RSUD AU	Morfin Inj	3	34.359,00	103.077,00	2024
64	RSUD AU	Emtibion Tab	37	1.092,00	40.404,00	2024
65	RSUD AU	Prednison 5mg	47	123,00	5.781,00	2024

No.	OPD	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Tahun Kadaluarsa
66	RSUD AU	D5%Pb 100ml	15	8.100,00	121.500,00	2024
67	RSUD AU	Kidmin	20	54.633,00	1.092.660,00	2024
68	RSUD AU	Gaflux Tab	7	2.467,00	17.269,00	2024
69	RSUD AU	Ketokonazole Tab	33	444,00	14.652,00	2024
70	RSUD AU	Cefazolin Inj	7	6.322,00	44.254,00	2024
71	RSUD AU	Citicoline 1000mg	8	4.529,00	36.232,00	2024
72	RSUD AU	Cendo Tropi Md	5	3.303,00	16.515,00	2024
73	RSUD AU	Citicoline 250mg	5	7.909,00	39.545,00	2024
74	RSUD AU	Cendo NatacenMd	3	317,00	951,00	2024
75	RSUD AU	Ketokonazole Tab	75	444,00	33.300,00	2024
76	RSUD AU	Nacl 100cc	6	7.125,00	42.750,00	2024
77	RSUD AU	Genoind 0,3%	4	9.754,00	39.016,00	2024
78	RSUD AU	Aminoleban Inf	5	74.475,00	372.375,00	2024
79	RSUD AU	Pyrazinamid 500mg	14	365,00	5.110,00	2024
80	RSUD AU	Ibuprofen	15	121,00	1.815,00	2024
81	RSUD AU	Allupurinol	120	275,00	33.000,00	2024
82	RSUD AU	Ketokonazole tab	100	444,00	44.400,00	2024
83	RSUD AU	Picyn Ampicilline	11	14.850,00	163.350,00	2024
84	RSUD AU	Metyl pred Inj	4	20.235,00	80.940,00	2024
85	RSUD AU	Sistenol tab	12	2.220,00	26.640,00	2024
86	RSUD AU	Hydrochlorotiazid	307	148,00	45.436,00	2024
87	RSUD AU	Tiaryt Inj	30	21.134,00	634.020,00	2024
88	RSUD AU	Rifampacin	34	824,00	28.016,00	2024
89	RSUD AU	Otsu mgso4 20%	6	4.973,00	29.838,00	2024
90	RSUD AU	Fargoxin Inj	1	63.270,00	63.270,00	2024
91	RSUD AU	Ephineprine	3	3.885,00	11.655,00	2024
92	RSUD AU	Nevradine	9	2.326,00	20.934,00	2024
93	RSUD AU	Natur-E	5	3.125,00	15.625,00	2024
94	RSUD AU	DomperidonSyrp	4	12.650,00	50.600,00	2024
95	RSUD AU	HCT Tab	212	148,00	31.376,00	2024
96	RSUD AU	Ketokonazole tab	100	444,00	44.400,00	2024
97	RSUD AU	Dismeno 100mg	26	2.286,00	59.436,00	2024
98	RSUD AU	Bamgetol 200mg	200	2.286,00	457.200,00	2024
99	RSUD AU	Losartan 50mg	120	3.333,00	399.960,00	2024
100	RSUD AU	Piroxicam Tab 10mg	500	150,00	75.000,00	2024
101	RSUD AU	Berotec 100mcg	2	81.030,00	162.060,00	2024
102	RSUD AU	Fuladic Cream	8	36.630,00	293.040,00	2024
103	RSUD AU	C Mydriatil	7	29.808,00	208.656,00	2024
104	RSUD AU	Aminoleban	5	74.475,00	372.375,00	2024
105	RSUD AU	Losartan 50mg	30	3.333,00	99.990,00	2024
106	RSUD AU	Glucosamine	77	765,00	58.905,00	2024
107	RSUD AU	Piroxicam Tab 10mg	8	150,00	1.200,00	2024
108	RSUD AU	Proterin Inj	19	4.995,00	94.905,00	2024
109	RSUD AU	Bamgetol 200mg	14	2.286,00	32.004,00	2024
110	RSUD AU	Proster 200	30	7.659,00	229.770,00	2024
111	RSUD AU	Pyrazinamide tab	300	365,00	109.500,00	2024
112	RSUD AU	Simvastatin 10mg	1200	389,00	466.800,00	2024
113	RSUD AU	Aminosteril Infs	7	56.999,00	398.993,00	2024
114	RSUD AU	Norsec Kpsl	8	9.018,00	72.144,00	2024
115	RSUD AU	Pyrazinamide tab	76	365,00	27.740,00	2024
116	RSUD AU	Acyclofir Salep	2	3.804,00	7.608,00	2024
117	RSUD AU	Metamizol	30	225,00	6.750,00	2024
118	RSUD AU	Gastrul	23	7.659,00	176.157,00	2024
119	RSUD AU	Acyclovir SK	30	3.804,00	114.120,00	2024
120	RSUD AU	Alupurinol 100mg	102	275,00	28.050,00	2024
121	RSUD AU	Pyrazinamide Tab	78	365,00	28.470,00	2024
122	RSUD AU	Ketokonazole	45	444,00	19.980,00	2024
123	RSUD AU	Simvastatin 10mg	299	389,00	116.311,00	2024
124	RSUD AU	Aminosteril Infs	5	56.999,00	284.995,00	2024
125	RSUD AU	Acyclovir salep	4	3.804,00	15.216,00	2024
126	RSUD AU	Novomix	2	113.018,00	226.036,00	2024
127	RSUD AU	Nupovol	5	15.818,00	79.090,00	2024
128	RSUD AU	Cendo Hylub	14	11.768,00	164.752,00	2024
129	RSUD AU	Salep Acylovir	3	3.804,00	11.412,00	2024
130	RSUD AU	Meylon Bp	12	7.550,00	90.600,00	2024
131	RSUD AU	Allupurinol 100mg	83	132,00	10.956,00	2024
132	RSUD AU	Sistenol	5	30.250,00	151.250,00	2024
133	RSUD AU	Berotec 100mg	1	81.030,00	81.030,00	2024
134	RSUD AU	Cendo Ifx	95	1.341,00	127.395,00	2024
135	RSUD AU	Ciprofloxacin Inj	1	10.500,00	10.500,00	2024

No.	OPD	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Tahun Kadaluarsa
136	RSUD AU	Metamizol Tab	8	225,00	1.800,00	2024
137	RSUD AU	Levica Inj	4	65.000,00	260.000,00	2024
138	RSUD AU	Seretide	2	109.008,00	218.016,00	2024
139	RSUD AU	Berotec 100mg	1	81.030,00	81.030,00	2024
140	RSUD AU	Meylon Bp	12	7.550,00	90.600,00	2024
141	RSUD AU	Roculax Inj	7	113.220,00	792.540,00	2024
142	RSUD AU	Iremax Ibuprofen	100	732,00	73.200,00	2024
143	RSUD AU	Dismeno Tab	36	4.496,00	161.856,00	2024
144	RSUD AU	Cendo LFX	20	14.245,00	284.900,00	2024
145	RSUD AU	Otsu Salin 3%	6	36.101,00	216.606,00	2024
146	RSUD AU	Levica	20	56.610,00	1.132.200,00	2024
147	RSUD AU	Ceftazidime	10	16.995,00	169.950,00	2024
148	RSUD AU	Piracetam 400mg	150	356,00	53.400,00	2024
149	RSUD AU	Imodium	45	8.266,00	371.970,00	2024
150	RSUD AU	Rydian	21	2.759,00	57.939,00	2024
151	RSUD AU	Rydian	10	2.759,00	27.590,00	2024
152	RSUD AU	Tiaryt	15	63.936,00	959.040,00	2024
153	RSUD AU	Roculac	4	123.200,00	492.800,00	2024
154	RSUD AU	Nacl	4	7.674,00	30.696,00	2024
155	RSUD AU	Sodium Hyalmt	5	330.660,00	1.653.300,00	2024
156	RSUD AU	Cendo Statrol	5	18.839,00	94.195,00	2024
157	RSUD AU	Cendo Pantocain	4	13.556,00	54.224,00	2024
158	RSUD AU	Dopamin Inj	60	13.200,00	792.000,00	2024
159	RSUD AU	Hexymer Tab	434	434,00	188.356,00	2024
160	RSUD AU	Iremax Tab	70	732,00	51.240,00	2024
161	RSUD AU	Genoint Sm	2	8.985,00	17.970,00	2024
162	RSUD AU	Rhino Neo	1	53.780,00	53.780,00	2024
163	RSUD AU	Captopril 25mg	11	85,00	935,00	2024
164	RSUD AU	Tiaryt	64	11.800,00	755.200,00	2024
165	RSUD AU	Ketoconazole	200	489,00	97.800,00	2024
166	RSUD AU	Provula	1	13.640,00	13.640,00	2024
167	RSUD AU	Calcitrol	28	4.648,00	130.144,00	2024
168	RSUD AU	Piroxicam	28	197,00	5.516,00	2024
169	RSUD AU	Rifampicin	69	884,00	60.996,00	2024
170	RSUD AU	Iremax Tab	20	578,00	11.560,00	2024
171	RSUD AU	Leptica	18	7.903,00	142.254,00	2024
172	RSUD AU	Ethigobal	11	1.632,00	17.952,00	2024
173	RSUD AU	Piracetam Inj	7	4.662,00	32.634,00	2024
174	RSUD AU	Sistenol	58	1.760,00	102.080,00	2024
175	RSUD AU	Atropin	9	1.718,00	15.462,00	2024
176	RSUD AU	Hexymer Tab	100	732,00	73.200,00	2024
		JUMLAH			**43.671.103,00**	
1	Dinas TPH	Insektisida Diazinon Sidazinon	5	121.200,00	606.000,00	2024
2	Dinas TPH	Insektisida Imidakloprid Imidaplus	28	121.200,00	3.393.600,00	2024
3	Dinas TPH	Insektisida Ferterra	40	59.125,00	2.365.000,00	2024
4	Dinas TPH	Insektisida Abamektin stadium	155	69.250,00	10.733.750,00	2024
5	Dinas TPH	Insektisida Dimehipo manuver	80	40.500,00	3.240.000,00	2024
6	Dinas TPH	Fungisida Difekonazol Difekonazol	90	52.000,00	4.680.000,00	2024
7	Dinas TPH	Petrofur 3 GR 20 KG (OPP)	960	9.700,00	9.312.000,00	2024
8	Dinas TPH	Montal 400 SL 1 Ltr (Botol Pet)	483	61.100,00	29.511.300,00	2024
9	Dinas TPH	Sultricob 93 WP 400 GR (20 KG)	100	140.700,00	14.070.000,00	2024
10	Dinas TPH	Fungisida Bubuk,B.A.Mankozeb 80%	220	89.975,00	19.794.500,00	2024
11	Dinas TPH	Insektisida Cair, BA.Abamektin 25 GL + Asetamiprid 100 G/L	400	95.260,00	38.104.000,00	2024
12	Dinas TPH	Nordox 56wp,BA Coper Oxide 56%	30	170.500,00	5.115.000,00	2024
13	Dinas TPH	Antracol 70 wp +BA.propinep 70%	24	132.000,00	3.168.000,00	2024
14	Dinas TPH	Agrept 20wp+ BA.Streptomicyin sulfat 20%	35	51.700,00	1.809.500,00	2024
15	Dinas TPH	Aprivu 30EC,BA Sipermetrin 30 g/L	20	71.990,00	1.439.800,00	2024
16	Dinas TPH	Insektisida Tanaman Pangan BA.Difeconazol	28	185.400,00	5.191.200,00	2024
17	Dinas TPH	Fungisida Tanaman Pangan BA.Abamektin	44	174.200,00	7.664.800,00	2024
18	Dinas TPH	Fungisida Tanaman Pangan BA.Mankozeb 82%	40	179.600,00	7.184.000,00	2024
		JUMLAH			**167.372.650,00**	
1	Puskesmas Batu Ketulis	Diazepam injeksi 5 mg (Kadaluarsa)	200	1.545,00	309.000,00	2022
2	Puskesmas Batu Ketulis	Karbamazepin	400	189,00	75.600,00	2023
3	Puskesmas Batu Ketulis	Amoksisilin Syr	200	3.480,00	696.000,00	2023
4	Puskesmas Batu Ketulis	Diazepam 2 mg	3400	86,00	292.400,00	2023
5	Puskesmas Batu Ketulis	Phenobarbital 30 mg	90	171,00	15.390,00	2023
6	Puskesmas Batu Ketulis	Phenobarbital injeksi	149	1.982,00	295.318,00	2023

No.	OPD	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Tahun Kadaluarsa
7	Puskesmas Batu Ketulis	Amitriptilin	2190	175,00	383.250,00	2023
8	Puskesmas Batu Ketulis	Antifungi Salep Whitefield	298	3.477,00	1.036.146,00	2023
9	Puskesmas Batu Ketulis	Diazepam 5 mg	130	108,00	14.040,00	2023
10	Puskesmas Batu Ketulis	Digoksin tablet 0,25 mg	300	124,00	37.200,00	2024
11	Puskesmas Batu Ketulis	Serum Anti Bisa Ular Polivalen injeksi 5 ml (ABU I)	2	517.132,00	1.034.264,00	2024
12	Puskesmas Batu Ketulis	Serum Anti Tetanus Injeksi 1.500 IU/ampul (A.T.S.)	18	152.625,00	2.747.250,00	2024
13	Puskesmas Batu Ketulis	Diazepam injeksi 5mg/ml	25	1.545,00	38.625,00	2024
14	Puskesmas Batu Ketulis	Phenobarbital 30 mg tablet	405	171,00	69.255,00	2024
15	Puskesmas Batu Ketulis	Flufenazine inj 25 mg/ml	30	63.500,00	1.905.000,00	2024
16	Puskesmas Batu Ketulis	Clozapine 25 mg	1500	298,00	447.000,00	2024
17	Puskesmas Batu Ketulis	Fitomenadion(vit k) injeksi 2 mg/ml	120	2.775,00	333.000,00	2024
18	Puskesmas Batu Ketulis	Epineprin injeksi 0,1%	330	3.885,00	1.282.050,00	2024
19	Puskesmas Batu Ketulis	MgSO4 40%	22	5.661,00	124.542,00	2024
20	Puskesmas Batu Ketulis	Amitriptilin tab salut 25 mg (Hcl)	1455	175,00	254.625,00	2024
21	Puskesmas Batu Ketulis	Atropin Sulfat injeksi 0,25 mg/ml - 1 ml	141	3.778,00	532.698,00	2024
22	Puskesmas Batu Ketulis	Fluoksetin kaps 10mg	600	479,00	287.400,00	2024
23	Puskesmas Batu Ketulis	Diazepam 2 mg	772	82,00	63.304,00	2024
24	Puskesmas Batu Ketulis	Metilergometrin Maleat inj 0,200 mg-1 ml	197	2.050,00	403.850,00	2024
25	Puskesmas Batu Ketulis	Anti fungi komb/salep whitefield	375	3.477,00	1.303.875,00	2024
26	Puskesmas Batu Ketulis	Asiklovir 400 mg tab	400	650,00	260.000,00	2024
27	Puskesmas Batu Ketulis	Spironolactone tab 25 mg	700	250,00	175.000,00	2024
28	Puskesmas Batu Ketulis	Metoklopramid tablet 10 mg	500	112,00	56.000,00	2024
		JUMLAH			**14.472.082,00**	
1	Puskesmas Liwa	Diazepam injeksi 5mg/ml	20	1.545,00	30.900,00	2023
2	Puskesmas Liwa	Strip pemeriksaan gula darah	1	167.400,00	167.400,00	2024
3	Puskesmas Liwa	Fluor sediaan topikal	4	66.600,00	266.400,00	2024
4	Puskesmas Liwa	Fenitoin Natrium inj 50mg/ml	2	3.650,00	7.300,00	2024
		JUMLAH			**472.000,00**	
1	Puskesmas BNS	Erytromysin tab 500mg	300	775,00	232.500,00	2022
2	Puskesmas BNS	Serum anti Bisa Ular Inj 5 ml (ABU I)	6	517.312,00	3.103.872,00	2022
3	Puskesmas BNS	Aqua pro injeksi	44	2.650,00	116.600,00	2023
4	Puskesmas BNS	Glukosa larutan infus 5% steril (Produk Lokal)	220	6.627,00	1.457.940,00	2023
5	Puskesmas BNS	Oxymetazoline Hcl 0.025% tetes hidung/iliadin drops	20	35.068,00	701.360,00	2023
6	Puskesmas BNS	Amoxsisilin sirup kering 125mg/5ml	300	2.200,00	660.000,00	2023
7	Puskesmas BNS	Cetrizine 5mg/5ml syr	50	2.090,00	104.500,00	2023
8	Puskesmas BNS	Betametasone salp	6	54,00	324,00	2023
9	Puskesmas BNS	Alkohol 1000ml	14	266.650,00	3.733.100,00	2023
10	Puskesmas BNS	Xylocaine 2%	9	133.200,00	1.198.800,00	2024
11	Puskesmas BNS	Serum anti tetanus	4	152.625,00	610.500,00	2024
12	Puskesmas BNS	MgSO4 40%	22	5.661,00	124.542,00	2024
13	Puskesmas BNS	Fluoksetin Kap	90	479,00	43.110,00	2024
14	Puskesmas BNS	Nystatin tablet	10	1.943,00	19.430,00	2024
15	Puskesmas BNS	Aminophiline	10	148,00	1.480,00	2024
16	Puskesmas BNS	Bysacodyl supp	4	4.325,00	17.300,00	2024
17	Puskesmas BNS	Methylergometrin inj	100	388,00	38.800,00	2024
18	Puskesmas BNS	Spironolacton	200	250,00	50.000,00	2024
		JUMLAH			**12.216.158,00**	
1	Puskesmas Srimulyo	Antifungi Kombi/salep whitefield	200	3.477,00	695.400,00	2024
2	Puskesmas Srimulyo	Fluoksetin kaps 10 mg	1470	479,00	704.130,00	2024
3	Puskesmas Srimulyo	Klorpromazine tab 25 mg	2000	333,00	666.000,00	2024
4	Puskesmas Srimulyo	Metilergometrin Maleat inj 0,200 mg-1 ml	100	2.050,00	205.000,00	2024
5	Puskesmas Srimulyo	Larutan EDTA 10%	3	89.910,00	269.730,00	2024
6	Puskesmas Srimulyo	Larutan Eosin (px faeces) 2%	4	219.780,00	879.120,00	2024
7	Puskesmas Srimulyo	Larutan Truks (px leukosit)	1	27.972,00	27.972,00	2024
8	Puskesmas Srimulyo	Larutan Resseker (px Trombosit)	1	57.942,00	57.942,00	2024
9	Puskesmas Srimulyo	Lar ziehl neelsen (3x100 ml)	1	334.825,00	334.825,00	2024
10	Puskesmas Srimulyo	Larutan Na Citrat 3,8% (Px LED)250	1	24.975,00	24.975,00	2024
		JUMLAH			**3.865.094,00**	
		JUMLAH KESELURUHAN			**242.067.087,00**	

RINCIAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	KODE AKUN	URAIAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG	JUMLAH	Utang PFK	Utang Bunga	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Pendapatan Diterima Dimuka	Utang Belanja	Utang Jangka Pendek Lainnya	Utang Jangka Panjang	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A		2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	40.029.721.447,25	10.229.878,00	32.396.851,00	17.918.063.340,00	8.483.850.689,25	11.130.322.642,00	2.454.858.847,00	-	40.029.721.447,25
1		2.1.31.	Utang Pertitungan Pihak Ketiga (PFK)	10.229.878,00	10.229.878,00	-	-	-	-	-	-	10.229.878,00
		2.1.01.05.01.0001	Utang PPh 21	1.491.500,00	1.491.500,00	-	-	-	-	-	-	1.491.500,00
	Diskbud	2.1.01.05.21.0001	Utang PPh 21	1.491.500,00	1.491.500,00							1.491.500,00
		2.1.01.05.23.0001	Utang PPh 23	14.680,00	14.680,00	-	-	-	-	-	-	14.680,00
	Diskbud	2.1.01.05.23.0001	Utang PPh 23	14.680,00	14.680,00							14.680,00
		2.1.01.06.21.0001	Utang PPN Pusat	7.406.898,00	7.406.898,00	-	-	-	-	-	-	7.406.898,00
	Diskbud	2.1.01.06.21.0001	Utang PPN Pusat	7.406.898,00	7.406.898,00							7.406.898,00
			Utang Pajak Daerah	1.315.800,00	1.315.800,00	-	-	-	-	-	-	1.315.800,00
	Diskbud	2.1.01.09.21.0001	Utang Pajak Daerah	1.315.800,00	1.315.800,00							1.315.800,00
2		2.1.02.	Utang Bunga	32.396.851,00	-	32.396.851,00	-	-	-	-	-	32.396.851,00
		2.1.02.04.02.	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN-Jangka Menengah	32.396.851,00	-	32.396.851,00	-	-	-	-	-	32.396.851,00
	PPKD	2.1.02.04.02.0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	32.396.851,00	-	32.396.851,00						32.396.851,00
3		2.1.04.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	17.918.063.340,00	-	-	17.918.063.340,00	-	-	-	-	17.918.063.340,00
		2.1.04.03.31.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Menengah	17.918.063.340,00	-	-	17.918.063.340,00	-	-	-	-	17.918.063.340,00
	PPKD	2.1.04.03.31.0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Menengah	17.918.063.340,00			17.918.063.340,00					17.918.063.340,00
4		2.1.05.	Pendapatan Diterima Dimuka	8.483.850.689,25	-	-	-	8.483.850.689,25	-	-	-	8.483.850.689,25
		2.1.05.01.31.	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	8.306.544.000,00	-	-	-	8.306.544.000,00	-	-	-	8.306.544.000,00
	PPKD	2.1.05.01.31.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	669.101.000,00				669.101.000,00				669.101.000,00
	PPKD	2.1.05.01.31.0001	DBH PPh Pasal 21	93.879.000,00				93.879.000,00				93.879.000,00
	PPKD	2.1.05.01.31.0001	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.231.000,00				4.231.000,00				4.231.000,00
	PPKD	2.1.05.01.31.0001	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	141.804.000,00				141.804.000,00				141.804.000,00
	PPKD	2.1.05.01.31.0001	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1.317.755.000,00				1.317.755.000,00				1.317.755.000,00
	PPKD	2.1.05.01.31.0001	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Minyak Bumi	1.568.770.000,00				1.568.770.000,00				1.568.770.000,00
	PPKD	2.1.05.01.31.0001	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landreni	1.361.836.000,00				1.361.836.000,00				1.361.836.000,00
	PPKD	2.1.05.01.31.0001	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	92.024.000,00				92.024.000,00				92.024.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KODE AKUN	URAIAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG	JUMLAH	Utang PFK	Utang Bunga	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Pendapatan Diterima Dimuka	Utang Belanja	Utang Jangka Pendek Lainnya	Utang Jangka Panjang	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PPKD	2.1.05.01.01.0001	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.053.828.000,00				1.053.828.000,00				1.053.828.000,00
	PPKD	2.1.05.01.01.0001	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perkebunana Sawit	2.003.317.000,00				2.003.317.000,00				2.003.317.000,00
		2.1.05.04.01	**Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah**	**5.737.500,00**	-	-	-	**5.737.500,00**	-	-	-	**5.737.500,00**
	BAPENDA	2.1.05.04.01.0001	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	5.737.500,00				5.737.500,00				5.737.500,00
		2.1.05.04.03	**Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan**	**171.569.189,25**	-	-	-	**171.569.189,25**	-	-	-	**171.569.189,25**
	KOPDAG	2.1.05.04.03.0012	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	167.380.000,00				167.380.000,00				167.380.000,00
	BAPENDA	2.1.05.04.03.0012	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.500.000,00				2.500.000,00				2.500.000,00
	RSUD	2.1.05.04.03.0032	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	1.689.189,25				1.689.189,25				1.689.189,25
												-
3		**2.1.06.**	**Utang Belanja**	**11.130.322.842,00**	-	-	-	-	**11.130.322.842,00**	-	-	**11.130.322.842,00**
												-
		2.1.06.01.02	**Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**101.414.729,00**	-	-	-	-	**101.414.729,00**	-	-	**101.414.729,00**
	Dinas PU PR	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	101.414.729,00					101.414.729,00			101.414.729,00
		2.1.06.01.03	**Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**2.086.665.200,00**	-	-	-	-	**2.086.665.200,00**	-	-	**2.086.665.200,00**
	DISDIKBUD	2.1.06.01.03.0047	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	124.013.400,00					124.013.400,00			124.013.400,00
	DISDIKBUD	2.1.06.01.03.0048	Utang Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	30.151.800,00					30.151.800,00			30.151.800,00
	DISDIKBUD	2.1.06.01.03.0049	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.932.500.000,00					1.932.500.000,00			1.932.500.000,00
		2.1.06.02.02	**Utang Belanja Jasa**	**615.720.534,00**	-	-	-	-	**615.720.534,00**	-	-	**615.720.534,00**
	Dinkes	2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	40.407,00					40.407,00			40.407,00
	RSUD Alimuddin Umar	2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	529.466,00					529.466,00			529.466,00
	Satpol PP	2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	45.180,00					45.180,00			45.180,00
	DKP	2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	39.907,00					39.907,00			39.907,00
	DINAS PMP	2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	419.250,00					419.250,00			419.250,00
	DISKOMINFO	2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	588.417,00					588.417,00			588.417,00
	DINAS PM & PTSP	2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	73.268,00					73.268,00			73.268,00
	DINAS TPH	2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	39.907,00					39.907,00			39.907,00
	DISBUNNAK	2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	40.685,00					40.685,00			40.685,00
	BAPPEDA	2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	39.907,00					39.907,00			39.907,00
	BKAD	2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	274.206,00					274.206,00			274.206,00
	BKPSDM	2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	86.807,00					86.807,00			86.807,00
	BRIDA	2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	586.360,00					586.360,00			586.360,00
	KESBANGPOL	2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	41.650,00					41.650,00			41.650,00
	DISDIKBUD	2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	28.270,00					28.270,00			28.270,00
	RSUD Alimuddin Umar	2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.102.240,00					1.102.240,00			1.102.240,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KODE AKUN	URAIAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG	JUMLAH	Utang PFK	Utang Bunga	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Pendapatan Diterima Dimuka	Utang Belanja	Utang Jangka Pendek Lainnya	Utang Jangka Panjang	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Satpol PP	2.1.06.02.02.060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	458.555,00					458.555,00			458.555,00
	BPBD	2.1.06.02.02.060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	39.365,00					39.365,00			39.365,00
	DINAS PP, KB, PP & PA	2.1.06.02.02.060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	163.680,00					163.680,00			163.680,00
	DISDUKCAPIL	2.1.06.02.02.060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	472.715,00					472.715,00			472.715,00
	DINAS PMP	2.1.06.02.02.060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	151.100,00					151.100,00			151.100,00
	DISHUB	2.1.06.02.02.060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	101.135,00					101.135,00			101.135,00
	DISKOMINFO	2.1.06.02.02.060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	47.960,00					47.960,00			47.960,00
	KOPDAG	2.1.06.02.02.060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	73.635,00					73.635,00			73.635,00
	DINAS PM & PTSP	2.1.06.02.02.060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	88.145,00					88.145,00			88.145,00
	DISPORA	2.1.06.02.02.060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	139.436,00					139.436,00			139.436,00
	DINAS PERPUSTAKAAN	2.1.06.02.02.060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	161.000,00					161.000,00			161.000,00
	DINAS PERIKANAN	2.1.06.02.02.060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	301.400,00					301.400,00			301.400,00
	DINAS TPH	2.1.06.02.02.060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	87.480,00					87.480,00			87.480,00
	DISBUNNAK	2.1.06.02.02.060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	358.320,00					358.320,00			358.320,00
	SEKRETARIAT DAERAH	2.1.06.02.02.060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	2.699.228,00					2.699.228,00			2.699.228,00
	SEKRETARIAT DPRD	2.1.06.02.02.060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.317.920,00					1.317.920,00			1.317.920,00
	BAPPEDA	2.1.06.02.02.060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	42.595,00					42.595,00			42.595,00
	BKAD	2.1.06.02.02.060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	74.200,00					74.200,00			74.200,00
	BRIDA	2.1.06.02.02.060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	780.442,00					780.442,00			780.442,00
	INSPEKTORAT	2.1.06.02.02.060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	89.480,00					89.480,00			89.480,00
	KESBANGPOL	2.1.06.02.02.060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	87.480,00					87.480,00			87.480,00
	DISDIKBUD	2.1.06.02.02.061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.704.940,00					1.704.940,00			1.704.940,00
	DINKES	2.1.06.02.02.061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.905.408,00					1.905.408,00			1.905.408,00
	RSUD Akhmaddin Umar	2.1.06.02.02.061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	23.489.194,00					23.489.194,00			23.489.194,00
	Satpol PP	2.1.06.02.02.061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	658.392,00					658.392,00			658.392,00
	DINSOS	2.1.06.02.02.061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	216.572,00					216.572,00			216.572,00
	DKP	2.1.06.02.02.061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	266.968,00					266.968,00			266.968,00
	DLH	2.1.06.02.02.061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	300.878.995,00					300.878.995,00			300.878.995,00
	DISDUKCAPIL	2.1.06.02.02.061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	469.088,00					469.088,00			469.088,00
	DINAS PMP	2.1.06.02.02.061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	133.576,00					133.576,00			133.576,00
	DISHUB	2.1.06.02.02.061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	2.129.892,00					2.129.892,00			2.129.892,00
	DISKOMINFO	2.1.06.02.02.061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	953.943,00					953.943,00			953.943,00
	KOPDAG	2.1.06.02.02.061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	463.312,00					463.312,00			463.312,00
	DINAS PM & PTSP	2.1.06.02.02.061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	257.512,00					257.512,00			257.512,00
	DINAS PERPUSTAKAAN	2.1.06.02.02.061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	78.124,00					78.124,00			78.124,00
	DINAS PERIKANAN	2.1.06.02.02.061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	610.690,00					610.690,00			610.690,00
	DINAS TPH	2.1.06.02.02.061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	235.416,00					235.416,00			235.416,00
	DISBUNNAK	2.1.06.02.02.061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	4.398.807,00					4.398.807,00			4.398.807,00
	SEKRETARIAT DAERAH	2.1.06.02.02.061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	12.672.790,00					12.672.790,00			12.672.790,00
	SEKRETARIAT DPRD	2.1.06.02.02.061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	3.955.611,00					3.955.611,00			3.955.611,00
	BAPPEDA	2.1.06.02.02.061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	300.476,00					300.476,00			300.476,00
	BAPENDA	2.1.06.02.02.061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	715.224,00					715.224,00			715.224,00
	BKAD	2.1.06.02.02.061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	2.158.580,00					2.158.580,00			2.158.580,00
	BKPSDM	2.1.06.02.02.061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	275.258,00					275.258,00			275.258,00
	BRIDA	2.1.06.02.02.061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	909.113,00					909.113,00			909.113,00
	KESBANGPOL	2.1.06.02.02.061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	175.036,00					175.036,00			175.036,00
	DINKES	2.1.06.02.02.063	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Ber	2.834.507,00					2.834.507,00			2.834.507,00
	Satpol PP	2.1.06.02.02.063	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Ber	2.095.870,00					2.095.870,00			2.095.870,00
	DINAS SOSIAL	2.1.06.02.02.063	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Ber	960.598,00					960.598,00			960.598,00
	DKP	2.1.06.02.02.063	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Ber	825.010,00					825.010,00			825.010,00
	DISDUKCAPIL	2.1.06.02.02.063	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Ber	2.016.210,00					2.016.210,00			2.016.210,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KODE AKUN	URAIAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG	JUMLAH	Utang PFK	Utang Bunga	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Pendapatan Diterima Dimuka	Utang Belanja	Utang Jangka Pendek Lainnya	Utang Jangka Panjang	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DINAS PMP	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Ber	943.950,00					943.950,00			943.950,00
	DISHUB	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Ber	1.447.239,00					1.447.239,00			1.447.239,00
	KOPDAG	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Ber	2.897.095,00					2.897.095,00			2.897.095,00
	DINAS PM & PTSP	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Ber	1.786.440,00					1.786.440,00			1.786.440,00
	DISPORA	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Ber	1.497.950,00					1.497.950,00			1.497.950,00
	DINAS PERPUSTAKAAN	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Ber	2.184.210,00					2.184.210,00			2.184.210,00
	DINAS PERIKANAN	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Ber	994.840,00					994.840,00			994.840,00
	DINAS TPH	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Ber	1.166.890,00					1.166.890,00			1.166.890,00
	DISBUNNAK	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Ber	1.027.200,00					1.027.200,00			1.027.200,00
	SEKRETARIAT DAERAH	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Ber	15.762.438,00					15.762.438,00			15.762.438,00
	SEKRETARIAT DPRD	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Ber	3.190.622,00					3.190.622,00			3.190.622,00
	BAPPEDA	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Ber	725.110,00					725.110,00			725.110,00
	BAPENDA	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Ber	624.000,00					624.000,00			624.000,00
	BKAD	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Ber	1.722.060,00					1.722.060,00			1.722.060,00
	BRIDA	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Ber	490.290,00					490.290,00			490.290,00
	KESBANGPOL	2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Ber	934.090,00					934.090,00			934.090,00
	DINKES	2.1.06.02.02.0074.	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	197.869.860,00					197.869.860,00			197.869.860,00
		2.1.06.02.03.	**Utang Belanja Pemeliharaan**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DINKES	2.1.06.02.03.0177.	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Parkir	-					-			-
		2.1.06.02.99.	**Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD**	7.195.110.479,00	-	-	-	-	7.195.110.479,00	-	-	7.195.110.479,00
	Dinkes	2.1.06.02.99.5999.	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	690.780.249,00					690.780.249,00			690.780.249,00
	RSUD AU	2.1.06.02.99.5999.	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	6.504.330.230,00					6.504.330.230,00			6.504.330.230,00
		2.1.06.12.	**Utang Belanja Bagi Hasil**	631.411.900,00	-	-	-	-	631.411.900,00	-	-	631.411.900,00
	PPKD	2.1.06.12.03.0001.	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	535.336.000,00					535.336.000,00			535.336.000,00
	PPKD	2.1.06.12.04.0001.	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	96.075.900,00					96.075.900,00			96.075.900,00
		2.1.06.13.	**Utang Belanja Bantuan Keuangan**	500.000.000,00	-	-	-	-	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00
	PPKD	2.1.06.13.04.	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Pemerintah Kabupaten/Kota	500.000.000,00					500.000.000,00			500.000.000,00
6		2.1.07.	**Utang Jangka Pendek Lainnya**	2.454.858.847,00	-	-	-	-	-	2.454.858.847,00	-	2.454.858.847,00
		2.1.07.01.04.	**Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah**	2.454.858.847,00	-	-	-	-	-	2.454.858.847,00	-	2.454.858.847,00
	PPKD	2.1.07.01.04.0008.	Utang Kelebihan Pembayaran atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	301.141.297					-	301.141.297,00		301.141.297,00
	DINKES	2.1.07.01.04.0016.	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD	992.124.850					-	992.124.850,00		992.124.850,00
	RSUD Aliruddin Umar	2.1.07.01.04.0016.	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD	1.161.592.700					-	1.161.592.700,00		1.161.592.700,00
									-			-
B		2.2.	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	16.424.888.255,00	-	-	-	-	-	-	16.424.888.255,00	16.424.888.255,00
1		2.2.03.	**Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank**	16.424.888.255,00	-	-	-	-	-	-	16.424.888.255,00	16.424.888.255,00
	PPKD	2.2.03.01.01.0001.	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	16.424.888.255,00							16.424.888.255,00	16.424.888.255,00
												-
	JUMLAH KEWAJIBAN			56.454.609.702,25	10.228.876,00	32.396.851,00	17.916.063.340,00	8.483.850.689,25	11.130.322.842,00	2.454.858.847,00	16.424.888.255,00	56.454.609.702,25

RINCIAN HUTANG PADA PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI)

NO	URAIAN	PENERIMAAN PINJAMAN	RENCANA ANGGSURAN		REALISASI ANGGSURAN			SISA ANGSURAN		
			WAKTU	JUMLAH	WAKTU	JUMLAH (Rp)	AKUMULASI (Rp)	TOTAL (Rp)	JK PENDEK	JK PANJANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penerimaan Tahun 2021	19.693.117.250,00								
2	Penerimaan Tahun 2022	57.951.820.750,00								
3			31-Aug-22	1.493.171.945,00	Thn 2022	1.493.171.945,00	1.493.171.945,00	76.151.786.055,00		
4			30-Sep-22	1.493.171.945,00	Thn 2022	1.493.171.945,00	2.986.343.890,00	74.658.594.110,00		
5			31-Oct-22	1.493.171.945,00	Thn 2022	1.493.171.945,00	4.479.515.835,00	73.165.422.165,00		
6			30-Nov-22	1.493.171.945,00	Thn 2022	1.493.171.945,00	5.972.687.780,00	71.672.250.220,00		
7			31-Dec-22	1.493.171.945,00	Thn 2022	1.493.171.945,00	7.465.859.725,00	70.179.078.275,00		
8			31-Jan-23	1.493.171.945,00	Thn 2023	1.493.171.945,00	8.959.031.670,00	68.685.906.330,00		
9			28-Feb-23	1.493.171.945,00	Thn 2023	1.493.171.945,00	10.452.203.615,00	67.192.734.385,00		
10			31-Mar-23	1.493.171.945,00	Thn 2023	1.493.171.945,00	11.945.375.560,00	65.699.562.440,00		
11			30-Apr-23	1.493.171.945,00	Thn 2023	1.493.171.945,00	13.438.547.505,00	64.206.390.495,00		
12			31-May-23	1.493.171.945,00	Thn 2023	1.493.171.945,00	14.931.719.450,00	62.713.218.550,00		
13			30-Jun-23	1.493.171.945,00	Thn 2023	1.493.171.945,00	16.424.891.395,00	61.220.046.605,00		
14			31-Jul-23	1.493.171.945,00	Thn 2023	1.493.171.945,00	17.918.063.340,00	59.726.874.660,00		
15			31-Aug-23	1.493.171.945,00	Thn 2023	1.493.171.945,00	19.411.235.285,00	58.233.702.715,00		
16			30-Sep-23	1.493.171.945,00	Thn 2023	1.493.171.945,00	20.904.407.230,00	56.740.530.770,00		
17			31-Oct-23	1.493.171.945,00	Thn 2023	1.493.171.945,00	22.397.579.175,00	55.247.358.825,00		
18			30-Nov-23	1.493.171.945,00	Thn 2023	1.493.171.945,00	23.890.751.120,00	53.754.186.880,00		
19			31-Dec-23	1.493.171.945,00	Thn 2023	1.493.171.945,00	25.383.923.065,00	52.261.014.935,00		
20			31-Jan-24	1.493.171.945,00	Thn 2024	1.493.171.945,00	26.877.095.010,00	50.767.842.990,00		
21			29-Feb-24	1.493.171.945,00	Thn 2024	1.493.171.945,00	28.370.266.955,00	49.274.671.045,00		
22			31-Mar-24	1.493.171.945,00	Thn 2024	1.493.171.945,00	29.863.438.900,00	47.781.499.100,00		
23			30-Apr-24	1.493.171.945,00	Thn 2024	1.493.171.945,00	31.356.610.845,00	46.288.327.155,00		
24			31-May-24	1.493.171.945,00	Thn 2024	1.493.171.945,00	32.849.782.790,00	44.795.155.210,00		
25			30-Jun-24	1.493.171.945,00	Thn 2024	1.493.171.945,00	34.342.954.735,00	43.301.983.265,00		
26			31-Jul-24	1.493.171.945,00	Thn 2024	1.493.171.945,00	35.836.126.680,00	41.808.811.320,00		
27			31-Aug-24	1.493.171.945,00	Thn 2024	1.493.171.945,00	37.329.298.625,00	40.315.639.375,00		
28			30-Sep-24	1.493.171.945,00	Thn 2024	1.493.171.945,00	38.822.470.570,00	38.822.467.430,00		
29			31-Oct-24	1.493.171.945,00	Thn 2024	1.493.171.945,00	40.315.642.515,00	37.329.285.485,00		
30			30-Nov-24	1.493.171.945,00	Thn 2024	1.493.171.945,00	41.808.814.460,00	35.836.123.540,00		
31			31-Dec-24	1.493.171.945,00	Thn 2024	1.493.171.945,00	43.301.986.405,00	34.342.951.595,00		
32			31-Jan-25	1.493.171.945,00			43.301.986.405,00	34.342.951.595,00	1.493.171.945,00	
33			28-Feb-25	1.493.171.945,00			43.301.986.405,00	34.342.951.595,00	1.493.171.945,00	
34			31-Mar-25	1.493.171.945,00			43.301.986.405,00	34.342.951.595,00	1.493.171.945,00	
35			30-Apr-25	1.493.171.945,00			43.301.986.405,00	34.342.951.595,00	1.493.171.945,00	
36			31-May-25	1.493.171.945,00			43.301.986.405,00	34.342.951.595,00	1.493.171.945,00	
37			30-Jun-25	1.493.171.945,00			43.301.986.405,00	34.342.951.595,00	1.493.171.945,00	
38			31-Jul-25	1.493.171.945,00			43.301.986.405,00	34.342.951.595,00	1.493.171.945,00	
39			31-Aug-25	1.493.171.945,00			43.301.986.405,00	34.342.951.595,00	1.493.171.945,00	
40			30-Sep-25	1.493.171.945,00			43.301.986.405,00	34.342.951.595,00	1.493.171.945,00	
41			31-Oct-25	1.493.171.945,00			43.301.986.405,00	34.342.951.595,00	1.493.171.945,00	
42			30-Nov-25	1.493.171.945,00			43.301.986.405,00	34.342.951.595,00	1.493.171.945,00	
43			31-Dec-25	1.493.171.945,00			43.301.986.405,00	34.342.951.595,00	1.493.171.945,00	
44			31-Jan-26	1.493.171.945,00			43.301.986.405,00	34.342.951.595,00		1.493.171.945,00
45			28-Feb-26	1.493.171.945,00			43.301.986.405,00	34.342.951.595,00		1.493.171.945,00
46			31-Mar-26	1.493.171.945,00			43.301.986.405,00	34.342.951.595,00		1.493.171.945,00
47			30-Apr-26	1.493.171.945,00			43.301.986.405,00	34.342.951.595,00		1.493.171.945,00
48			31-May-26	1.493.171.945,00			43.301.986.405,00	34.342.951.595,00		1.493.171.945,00
49			30-Jun-26	1.493.171.945,00			43.301.986.405,00	34.342.951.595,00		1.493.171.945,00
50			31-Jul-26	1.493.171.945,00			43.301.986.405,00	34.342.951.595,00		1.493.171.945,00
51			31-Aug-26	1.493.171.945,00			43.301.986.405,00	34.342.951.595,00		1.493.171.945,00
52			30-Sep-26	1.493.171.945,00			43.301.986.405,00	34.342.951.595,00		1.493.171.945,00
53			31-Oct-26	1.493.171.945,00			43.301.986.405,00	34.342.951.595,00		1.493.171.945,00
54			30-Dec-26	1.493.168.805,00			43.301.986.405,00	34.342.951.595,00		1.493.168.805,00
	JUMLAH	77.644.938.000,00		77.644.938.000,00		43.301.986.405,00	43.301.986.405,00	34.342.951.595,00	17.918.083.340,00	16.424.868.255,00

Pada UPTD PP-KUKM Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DAFTAR ANALISIS UMUR DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2024

No	NASABAH	TAHUN PENGGULIRAN	MASA PIUTANG						PIUTANG			PIUTANG S.D. 31 DESEMBER 2023			ANGSURAN TAHUN 2024	
			TANGGAL SPP	TANGGAL PIUTANG	TANGGAL JATUH TEMPO	Tanggal Tutup Buku Piutang	HARI PIUTANG	JUMLAH BULAN	POKOK	JASA	TOTAL	POKOK	JASA	TOTAL	POKOK	JASA
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	26	27	28=(26+27)	23	24
1	LKM Cempaka	2003	-	12/31/2003	12/31/2006	12/31/2024	6.575	219	50.000.000,00	12.750.000,00	62.750.000,00	7.125.000,00	0,00	7.125.000,00		
2	PK Rasyid	2003	10/11/2003	12/31/2003	12/31/2006	12/31/2024	6.575	219	15.000.000,00	3.825.000,00	18.825.000,00	0,00	0,00	0,00		
3	PK Mat Nur	2003	10/11/2003	12/31/2003	12/31/2006	12/31/2024	6.575	219	15.000.000,00	3.825.000,00	18.825.000,00	11.330.000,00	2.665.000,00	13.995.000,00		
4	PK In Sukmasih	2003	10/11/2003	12/31/2003	12/31/2006	12/31/2024	6.575	219	15.000.000,00	3.825.000,00	18.825.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
5	PK Yanto	2003	10/11/2003	12/31/2003	12/31/2006	12/31/2024	6.575	219	15.000.000,00	3.825.000,00	18.825.000,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00		
6	LKM. PURWAMANDIRI	2004	10/26/2004	12/31/2004	12/31/2007	12/31/2024	6.210	207	50.000.000,00	12.750.000,00	62.750.000,00	15.500.000,00	750.000,00	16.250.000,00		
7	LKM. SUTRA PESAGI	2004	10/26/2004	12/31/2004	12/31/2007	12/31/2024	6.210	207	50.000.000,00	12.750.000,00	62.750.000,00	5.000.000,00	8.250.000,00	13.250.000,00		
8	PK. SUROSO	2004	10/26/2004	12/31/2004	12/31/2007	12/31/2024	6.210	207	15.000.000,00	3.825.000,00	18.825.000,00	14.000.000,00	3.825.000,00	17.825.000,00		
9	PK. KASTUMI	2004	10/26/2004	12/31/2004	12/31/2007	12/31/2024	6.210	207	15.000.000,00	3.825.000,00	18.825.000,00	15.000.000,00	2.025.000,00	17.025.000,00		
10	PK Zuriri	2005	10/31/2005	12/31/2005	12/31/2008	12/31/2024	5.844	195	10.000.000,00	2.450.000,00	12.450.000,00	9.100.000,00	2.150.000,00	11.250.000,00		
11	PK Sanjak	2005	10/31/2005	12/31/2005	12/31/2008	12/31/2024	5.844	195	10.000.000,00	2.450.000,00	12.450.000,00	10.000.000,00	2.450.000,00	12.450.000,00		
12	PK AHMAD TOHIR	2006	10/8/2006	12/31/2006	12/31/2009	12/31/2024	5.479	183	5.000.000,00	1.225.000,00	6.225.000,00	4.225.000,00	0,00	4.225.000,00		
13	KOP. SINAR TERATE	2006	10/8/2006	12/31/2006	12/31/2009	12/31/2024	5.479	183	25.000.000,00	6.125.000,00	31.125.000,00	25.000.000,00	6.125.000,00	31.125.000,00		
14	LKM BINA USAHA TERAMPIL	2006	10/8/2006	12/31/2006	12/31/2009	12/31/2024	5.479	183	25.000.000,00	6.125.000,00	31.125.000,00	25.000.000,00	4.625.000,00	29.625.000,00		
15	PK GUSTAM	2006	10/8/2006	12/31/2006	12/31/2009	12/31/2024	5.479	183	10.000.000,00	2.450.000,00	12.450.000,00	8.950.000,00	0,00	8.950.000,00		
16	PK WATI AYU	2006	10/8/2006	12/31/2006	12/31/2009	12/31/2024	5.479	183	10.000.000,00	2.450.000,00	12.450.000,00	6.650.000,00	200.000,00	6.850.000,00		
17	LKM Tunggal Jaya	2007	10/14/2007	12/31/2007	12/31/2010	12/31/2024	5.114	170	25.000.000,00	6.125.000,00	31.125.000,00	24.000.000,00	1.675.000,00	25.675.000,00		
18	PK Dijon Maryanto	2007	10/14/2007	12/31/2007	12/31/2010	12/31/2024	5.114	170	10.000.000,00	2.450.000,00	12.450.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	300.000,00	
19	Koperasi Wanita Delima	2008	11/26/2008	12/31/2008	12/31/2011	12/31/2024	4.749	158	25.000.000,00	6.125.000,00	31.125.000,00	1.583.331,00	0,00	1.583.331,00		
20	PK Sri Maisyaroh	2008	11/26/2008	12/31/2008	12/31/2011	12/31/2024	4.749	158	15.000.000,00	3.825.000,00	18.825.000,00	12.125.000,00	3.200.000,00	15.325.000,00		
21	PK PD Latansa	2008	11/26/2008	12/31/2008	12/31/2011	12/31/2024	4.749	158	15.000.000,00	3.825.000,00	18.825.000,00	13.125.000,00	0,00	13.125.000,00		
22	PK Suseno	2008	11/26/2008	12/31/2008	12/31/2011	12/31/2024	4.749	158	15.000.000,00	3.825.000,00	18.825.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
23	PK Gatot Sukoco	2008	11/26/2008	12/31/2008	12/31/2011	12/31/2024	4.749	158	10.000.000,00	2.450.000,00	12.450.000,00	0,00	0,00	0,00		
24	SRI YUNI	2010	12/8/2010	12/8/2010	12/8/2012	12/31/2024	4.406	147	5.000.000,00	600.000,00	5.600.000,00	794.000,00	0,00	794.000,00		
25	DARWIN	2010	12/8/2010	12/8/2010	12/8/2012	12/31/2024	4.406	147	5.000.000,00	600.000,00	5.600.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00		
26	AKSAHADI	2010	12/8/2010	12/8/2010	12/8/2012	12/31/2024	4.406	147	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	1.664.666,00	0,00	1.664.666,00		
27	EDI SRIANTO	2011	7/18/2011	7/18/2011	7/18/2013	12/31/2024	4.184	139	5.000.000,00	600.000,00	5.600.000,00	3.671.668,00	500.000,00	4.171.668,00		
28	SUKAMTO	2011	7/18/2011	7/18/2011	7/18/2013	12/31/2024	4.184	139	5.000.000,00	600.000,00	5.600.000,00	941.667,00	0,00	941.667,00	600.000,00	
29	APRINA	2011	7/18/2011	7/18/2011	7/18/2013	12/31/2024	4.184	139	5.000.000,00	600.000,00	5.600.000,00	3.241.000,00	400.000,00	3.641.000,00		
30	M MUZAMIR	2012	2012	2012	2014	12/31/2024	43.643	1.455	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00		
31	FURLINA	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
32	ALAN NURI	2012	Nov-12	Nov-12	Nov-13	12/31/2024	4.078	136	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.380.000,00	0,00	4.380.000,00		
33	BU SUDIN	2012	Apr-12	Apr-12	Apr-13	12/31/2024	4.292	143	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00		
34	ALEX CANDRA	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
35	KHOLIDUN	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
36	CIK IMA	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	915.000,00	0,00	915.000,00		
37	SAHRIAL GERABATAN	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
38	RAFLES TAISON	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
39	BUNADI	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	833.334,00	0,00	833.334,00		
40	EKRONI	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
41	SUMARDI	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	916.667,00	0,00	916.667,00		
42	SAMUSI	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
43	BUDI SANTOSO	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	583.335,00	0,00	583.335,00		
44	AMSIR	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
45	ARDINAL	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
46	ISKANDAR	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.000.000,00		1.000.000,00	532.000,00	0,00	532.000,00		
47	DEDI	2012	7/5/2012	7/5/2012	7/5/2014	12/31/2024	3.832	128	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00		
48	RISWANDI	2012	7/5/2012	7/5/2012	7/5/2014	12/31/2024	3.832	128	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	8.450.000,00	0,00	8.450.000,00		

No	NASABAH	TAHUN PENGGULIR AN	MASA PIUTANG						PIUTANG			PIUTANG S.D. 31 DESEMBER 2023			ANGSURAN TAHUN 2024	
			TANGGAL SPP	TANGGAL PIUTANG	TANGGAL JATUH TEMPO	Tanggal Tutup Buku Piutang	HARI PIUTANG	JUMLAH BULAN	POKOK	JASA	TOTAL	POKOK	JASA	TOTAL	POKOK	JASA
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	26	27	28=(26+27)	23	24
49	SUPIYAH	2012	11/8/2012	11/8/2012	11/8/2014	12/31/2024	3.706	124	5.000.000,00		5.000.000,00	2.198.000,00	0,00	2.198.000,00		
50	**Mawardi Badri (Pengurus Ketu**	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
51	Yasi M. Syarif	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
52	Widodo	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00		
53	Ali Muktarom	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00		
54	Zainal Hasan	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00		
55	Mahendra	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
56	Syapari Alwansah	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
57	Dedi Apriansi	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
58	Desmen	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
59	Iqal. A	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
60	Yanto	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
61	Hendri. D	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
62	Suslanto	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
63	Munanain	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00		
64	Warsito	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
65	Sanani	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
66	Lukman	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
67	Rismanto	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
68	Erwandi	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
69	Sukiman	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
70	Ari	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
71	Duprotu	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
72	Ruslan	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
73	Damla	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
74	Naperwan	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
75	Asmani	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
76	**Mursal (Ketua Kel)**	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00		
77	Rohmi	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
78	Edi Kurniawan	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
79	Hendri Yusef	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
80	Johan Samsi	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
81	Muryani	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
82	Rahmanto	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
83	Efendi	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
84	Zamil Hasan	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
85	Abdul Mutolib	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
86	Munzir	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
87	Sutiono	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
88	Hermansyah	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
89	Mirsan	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
90	Nandang Sellewan	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00		
91	Mariono	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
92	**Ali Yaman (Ketua Kel.)**	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
93	Rudi Yanto	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
94	Ronladi	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
95	Meri Andika	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
96	Riduan	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
97	Ridwan	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
98	Samsun	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
99	Muladin	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
100	Sumnlak	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
101	Sopwan Nuri	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
102	Darmanto	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
103	Mashuri	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		

No	NASABAH	TAHUN PENGGULIRAN	MASA PIUTANG						PIUTANG			PIUTANG S.D. 31 DESEMBER 2023			ANGSURAN TAHUN 2024	
			TANGGAL SPP	TANGGAL PIUTANG	TANGGAL JATUH TEMPO	Tanggal Tutup Buku Piutang	HARI PIUTANG	JUMLAH BULAN	POKOK	JASA	TOTAL	POKOK	JASA	TOTAL	POKOK	JASA
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	26	27	28=(26+27)	23	24
104	Prijoi	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
105	Johan Wahyudi	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
106	Panzal Hakim	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
107	Tahmerullah	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
108	Dewi	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
109	Ambri Arbi	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
110	A. Purnama (Ketua Kel)	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
111	Musiem	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
112	Mat Janun	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00		
113	Iswansyah	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
114	Andes Saputra	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
115	Zaikoni(Pengurus)	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
116	Nahrawi	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
117	Munir	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
118	Maulidi	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
119	Sangkut	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
120	Nur Yanto	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
121	Andri	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
122	Kapzani	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
123	Yuli Iin (Ketua Kel.)	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
124	Ponijo	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00		
125	Zuwandi	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
126	Was Yanto	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
127	Mesud	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00		
128	Sodikin	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00		
129	Nasrin Silalahi	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00		
130	Samsu Iqbal	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00		
131	Herman Efendi	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
132	Winardi	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
133	Sopri Yanto	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
134	Yutra Muryalis	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00		
135	Nasrun Silalahi	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00		
136	Maryati	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00		
137	Maslam	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00		
138	Yulyana	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	3.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.062.500,00	0,00	2.062.500,00		
139	Pramono	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00		
140	Jali Wala Diyanto	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
141	Marsyur	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
142	Sunerto	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00		
143	Romadi	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
144	Guswinarto	2012	2012	2012	2013	12/31/2024	43.644	1.455	1500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
145	SAMSIR	2013	2/15/2013	2/15/2013	2/15/2015	12/31/2024	3.607	120	17.000.000,00	2.040.000,00	19.040.000,00	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00		
146	IRIANTO	2013	2/15/2013	2/15/2013	2/15/2015	12/31/2024	3.607	120	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00		
147	Suarman Marasin	2013	6/10/2013	6/10/2013	6/10/2015	12/31/2024	3.482	116	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00		
148	Yusmali	2013	6/10/2013	6/10/2013	6/10/2015	12/31/2024	3.482	116	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00		
149	Yunar	2013	6/10/2013	6/10/2013	6/10/2014	12/31/2024	3.857	129	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
150	Kamain	2013	12/18/2013	12/18/2013	12/18/2015	12/31/2024	3.301	110	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00		
151	Hakim Sipik	2014	3/6/2014	3/6/2014	3/6/2016	12/31/2024	3.222	107	20.000.000,00	2.400.000,00	22.400.000,00	17.200.000,00	0,00	17.200.000,00		
152	Sepia/Zamzami	2014			3/6/2016	12/31/2024	3.222	107	5.000.000,00	300.000,00	5.300.000,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00		
153	Ratna Hayani/Pangitu	2014	7/2/2014	7/2/2014	7/2/2016	12/31/2024	3.104	103	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	13.125.000,00	1.575.000,00	14.700.000,00		
154	Sangkut	2014	3/6/2014	3/6/2014	3/6/2015	12/31/2024	3.588	120	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	4.866.665,00	0,00	4.866.665,00		
155	Masyati	2015	3/16/2016	3/16/2016	3/16/2017	12/31/2024	2.847	95	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	4.116.000,00	775.000,00	4.891.000,00		
156	Sumyati AR	2015	11/10/2016	11/10/2016	11/10/2017	12/31/2024	2.608	87	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	100.000,00	
157	Noverawati	2016	3/29/2016	3/29/2016	3/29/2018	12/31/2024	2.469	82	15.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	15.300.000,00	800.000,00	16.800.000,00		
158	Sumyati	2016	3/29/2016	3/29/2016	3/29/2018	12/31/2024	2.469	82	12.000.000,00	1.440.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	0,00		

No	NASABAH	TAHUN PENGGULIRAN	MASA PIUTANG						PIUTANG			PIUTANG S.D. 31 DESEMBER 2023			ANGSURAN TAHUN 2024	
			TANGGAL SPP	TANGGAL PIUTANG	TANGGAL JATUH TEMPO	Tanggal Tutup Buku Piutang	HARI PIUTANG	JUMLAH BULAN	POKOK	JASA	TOTAL	POKOK	JASA	TOTAL	POKOK	JASA
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	26	27	28=(26+27)	23	24
159	Cundro Wet	2016	3/29/2016	3/29/2016	3/29/2018	12/31/2024	2,469	82	10,000,000,00	1,200,000,00	11,200,000,00	5,370,027,00	400,000,00	5,770,027,00		
160	Ernawati	2016	3/29/2016	3/29/2016	3/29/2018	12/31/2024	2,469	82	7,500,000,00	900,000,00	8,400,000,00	2,925,000,00	50,000,00	2,975,000,00		
161	Elida Lina	2016	8/29/2016	8/29/2016	8/29/2018	12/31/2024	2,316	77	15,000,000,00	1,800,000,00	16,800,000,00	0,00	0,00	0,00		
162	Sopian Mujahidin	2016	11/17/2016	11/17/2016	11/17/2018	12/31/2024	2,236	75	10,000,000,00	1,200,000,00	11,200,000,00	9,550,000,00	650,000,00	9,700,000,00		
163	Nani Sofiyah	2017	Apr-17	Apr-17	Mar-19	12/31/2024	2,132	71	15,000,000,00	1,800,000,00	16,800,000,00	2,000,000,00	0,00	2,000,000,00		
164	Idawati	2017	Apr-17	Apr-17	Mar-19	12/31/2024	2,132	71	10,000,000,00	1,200,000,00	11,200,000,00	10,000,000,00	1,200,000,00	11,200,000,00		
165	Dewatiyah	2017	Apr-17	Apr-17	Mar-19	12/31/2024	2,132	71	10,000,000,00	1,200,000,00	11,200,000,00	0,00	0,00	0,00		
166	Nana Jinda wati	2017	Apr-17	Apr-17	Mar-19	12/31/2024	2,132	71	5,000,000,00	600,000,00	5,600,000,00	4,350,000,00	0,00	4,350,000,00		
167	Asmae	2017	Sep-17	Sep-17	Sep-19	12/31/2024	1,948	65	20,000,000,00	2,400,000,00	22,400,000,00	450,000,00	0,00	450,000,00	200,000,00	
168	AEP & Ferdian	2017	Sep-17	Sep-17	Sep-19	12/31/2024	1,948	65	15,000,000,00	1,800,000,00	16,800,000,00	5,625,000,00	0,00	5,625,000,00		
169	Ermiati	2017	Sep-17	Sep-17	Sep-19	12/31/2024	1,948	65	10,000,000,00	1,200,000,00	11,200,000,00	9,200,000,00	1,100,000,00	10,300,000,00		
170	Siti Julaeha	2017	Sep-17	Sep-17	Sep-19	12/31/2024	1,948	65	7,500,000,00	900,000,00	8,400,000,00	0,00	0,00	0,00		
171	Ida Yuliza	2018	3/7/2018	3/7/2018	3/7/2020	12/31/2024	1,760	59	20,000,000,00	2,400,000,00	22,400,000,00	11,800,000,00	1,500,000,00	13,300,000,00		1,000,000,00
172	Selamatiton	2018	3/7/2018	3/7/2018	3/7/2020	12/31/2024	1,760	59	20,000,000,00	2,400,000,00	22,400,000,00	17,800,000,00	1,400,000,00	18,600,000,00		
173	Dwi Ranita Sari	2018	3/7/2018	3/7/2018	3/7/2020	12/31/2024	1,760	59	12,000,000,00	1,440,000,00	13,440,000,00	0,00	0,00	0,00		
174	Korlak	2018	7/26/2018	7/26/2018	7/26/2020	12/31/2024	1,619	54	20,000,000,00	2,400,000,00	22,400,000,00	0,00	0,00	0,00		
175	Rindawanah	2018	7/26/2018	7/26/2018	7/26/2020	12/31/2024	1,619	54	15,000,000,00	1,800,000,00	16,800,000,00	12,125,000,00	1,075,000,00	13,200,000,00	300,000,00	200,000,00
176	Andri	2018	7/26/2018	7/26/2018	7/26/2020	12/31/2024	1,619	54	15,000,000,00	1,800,000,00	16,800,000,00	0,00	0,00	0,00		
177	Lasmi	2018	12/13/2018	12/13/2018	12/13/2020	12/31/2024	1,479	49	20,000,000,00	2,400,000,00	22,400,000,00	19,150,000,00	1,050,000,00	20,200,000,00		
178	Samsiar Wati	2018	12/13/2018	12/13/2018	12/13/2020	12/31/2024	1,479	49	15,000,000,00	1,800,000,00	16,800,000,00	3,250,000,00	0,00	3,250,000,00	3,250,000,00	
179	Ahmadi	2019	5/7/2019	5/7/2019	5/7/2021	12/31/2024	1,334	44	20,000,000,00	2,400,000,00	22,400,000,00	17,200,000,00	1,000,000,00	18,200,000,00		
180	Suminem	2019	9/18/2019	9/18/2019	9/18/2021	12/31/2024	1,200	40	20,000,000,00	2,400,000,00	22,400,000,00	14,300,000,00	0,00	14,300,000,00	2,500,000,00	
181	Mulyono	2019	9/18/2019	9/18/2019	9/18/2021	12/31/2024	1,200	40	15,000,000,00	1,800,000,00	16,800,000,00	5,675,000,00	0,00	5,675,000,00	5,675,000,00	
182	Dewatiyah	2019	9/18/2019	9/18/2019	9/18/2021	12/31/2024	1,200	40	10,000,000,00	1,200,000,00	11,200,000,00	0,00	0,00	0,00		
183	Muljianto	2019	9/18/2019	9/18/2019	9/18/2020	12/31/2024	1,565	52	5,000,000,00	300,000,00	5,300,000,00	4,600,000,00	200,000,00	4,800,000,00		
184	Supriyadi	2019	12/16/2019	12/16/2019	12/16/2020	12/31/2024	1,476	49	20,000,000,00	1,200,000,00	21,200,000,00	20,000,000,00	1,200,000,00	21,200,000,00		
185	Sartini	2019	12/16/2019	12/16/2019	12/16/2021	12/31/2024	1,111	37	20,000,000,00	2,400,000,00	22,400,000,00	0,00	0,00	0,00		
186	Rizky Saputra	2019	12/16/2019	12/16/2019	12/16/2021	12/31/2024	1,111	37	15,000,000,00	1,800,000,00	16,800,000,00	15,000,000,00	1,800,000,00	16,800,000,00		
187	Susaei Edi Bubuk Kopi	2019	12/16/2019	12/16/2019	12/16/2021	12/31/2024	1,111	37	15,000,000,00	1,800,000,00	16,800,000,00	15,000,000,00	725,000,00	15,725,000,00		
188	Eva Nurvida	2019	12/16/2019	12/16/2019	12/16/2021	12/31/2024	1,111	37	7,000,000,00	840,000,00	7,840,000,00	0,00	0,00	0,00		
189	Wahya Anggoro w	2020	6/18/2020	6/18/2020	6/18/2022	12/31/2024	927	31	20,000,000,00	2,400,000,00	22,400,000,00	12,700,000,00	700,000,00	13,400,000,00	1,000,000,00	
190	Mamra	2020	6/18/2020	6/18/2020	6/18/2022	12/31/2024	927	31	20,000,000,00	2,400,000,00	22,400,000,00	17,000,000,00	0,00	17,000,000,00		
191	Nurman	2020	6/18/2020	6/18/2020	6/18/2022	12/31/2024	927	31	15,000,000,00	1,800,000,00	16,800,000,00	0,00	0,00	0,00		
192	Armawati	2020	6/18/2020	6/18/2020	6/18/2022	12/31/2024	927	31	10,000,000,00	1,200,000,00	11,200,000,00	6,400,000,00	450,000,00	6,850,000,00		
193	Maysaroh	2020	6/18/2020	6/18/2020	6/18/2021	12/31/2024	1,292	43	7,000,000,00	420,000,00	7,420,000,00	7,000,000,00	420,000,00	7,420,000,00		
194	Rika Ritriana	2020	6/18/2020	6/18/2020	6/18/2021	12/31/2024	1,292	43	7,000,000,00	420,000,00	7,420,000,00	0,00	0,00	0,00		
195	Rukmana	2020	6/18/2020	6/18/2020	6/18/2021	12/31/2024	1,292	43	7,000,000,00	420,000,00	7,420,000,00	0,00	0,00	0,00		
196	Veni Yuniska	2020	6/18/2020	6/18/2020	6/18/2021	12/31/2024	1,292	43	7,000,000,00	840,000,00	7,840,000,00	0,00	0,00	0,00		
197	Yudi Suryanto	2020	6/18/2020	6/18/2020	6/18/2022	12/31/2024	927	31	20,000,000,00	2,400,000,00	22,400,000,00	20,000,000,00	1,200,000,00	21,200,000,00		
198	Ahmad Maslikur	2020	6/18/2020	6/18/2020	6/18/2022	12/31/2024	927	31	20,000,000,00	2,400,000,00	22,400,000,00	20,000,000,00	1,200,000,00	21,200,000,00		
199	Sugino	2020	6/18/2020	6/18/2020	6/18/2022	12/31/2024	927	31	10,000,000,00	1,200,000,00	11,200,000,00	0,00	0,00	0,00		
200	Dwi Yanto	2020	6/18/2020	6/18/2020	6/18/2022	12/31/2024	927	31	10,000,000,00	600,000,00	10,600,000,00	8,300,000,00	500,000,00	8,800,000,00		
201	Rian Junaidi	2020	6/18/2020	6/18/2020	6/18/2021	12/31/2024	1,292	43	7,000,000,00	420,000,00	7,420,000,00	4,420,000,00	0,00	4,420,000,00		
202	Ahmad Mulyadi	2021	11/15/2021	11/15/2021	11/15/2023	12/31/2024	412	14	20,000,000,00	2,400,000,00	22,400,000,00	0,00	0,00	0,00		
203	Rafih Purwasih	2021	11/15/2021	11/15/2021	11/15/2023	12/31/2024	412	14	20,000,000,00	2,400,000,00	22,400,000,00	0,00	0,00	0,00		
204	Lilis Handayani	2021	11/15/2021	11/15/2021	11/15/2023	12/31/2024	412	14	20,000,000,00	2,400,000,00	22,400,000,00	0,00	0,00	0,00		
205	Linda Astuti	2021	11/15/2021	11/15/2021	11/15/2023	12/31/2024	412	14	15,000,000,00	1,800,000,00	16,800,000,00	0,00	900,000,00	900,000,00		900,000,00
206	Mad Husni	2021	11/15/2021	11/15/2021	11/15/2023	12/31/2024	412	14	10,000,000,00	1,200,000,00	11,200,000,00	6,400,000,00	350,000,00	6,750,000,00	4,650,000,00	350,000,00
207	Piutang Tidak Teridentifikasi								82,925,000,00	0,00	82,925,000,00	76,119,331,00		76,119,331,00		
	Jumlah								1,636,675,000,00	219,180,000,00	1,855,855,000,00	885,919,191,00	64,090,000,00	950,009,191,00	18,075,000,00	2,450,000,00
	% Penyisihan															
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih															

Pada UPTD PP-KUKM Dinas Koperasi
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DAFTAR ANALISIS UMUR DANA BER
PER 31 DESEMBER 2024

0,00

No	NASABAH	ANGSURAN TAHUN 2024	PIUTANG S.D. 31 DESEMBER 2024			KETERANGAN	Tanggal Pelaporan	Jumlah Hari Piutang	Kualitas dan Umur Piutang Pokok				Penyisihan Piutang	Piutang Neto
									Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
		TOTAL	POKOK	JASA	TOTAL				Masih Dalam Tenggang Waktu Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo 1-3 Bulan	Telah Jatuh Tempo 4-6 Bulan	Telah Jatuh Tempo lebih 6 bulan		
1	2	25=(23+24)	26	27	28=(26+27)	29	30	31	32	33	34	35	37 = (32 s.d. 36)	38
1	LKM Cempaka		7.125.000,00	0,00	7.125.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	6.575,00	0,00	0,00	0,00	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00
2	PK Rasyid	0,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS	31/12/2024	6.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PK Mat Nur	0,00	11.300.000,00	2.696.000,00	13.996.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	6.575,00	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00
4	PK Im Sukmiasih	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	6.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PK Yanto	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	6.575,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
6	LKM PURWAMANDIRI	0,00	15.500.000,00	750.000,00	16.250.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	6.210,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00
7	LKM SUTRA PESAGI	0,00	5.000.000,00	8.250.000,00	13.250.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	6.210,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
8	PK. SUROSO	0,00	14.000.000,00	3.825.000,00	17.825.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	6.210,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
9	PK. KASTUMI	0,00	15.000.000,00	2.025.000,00	17.025.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	6.210,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
10	PK Zuruf	0,00	9.100.000,00	2.150.000,00	11.250.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	5.844,00	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00
11	PK Sarjan	0,00	10.000.000,00	2.490.000,00	12.490.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	5.844,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
12	PK AHMAD TOHIR	0,00	4.225.000,00	0,00	4.225.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	5.479,00	0,00	0,00	0,00	4.225.000,00	4.225.000,00	0,00
13	KOP. SINAR TERATE	0,00	25.000.000,00	6.125.000,00	31.125.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	5.479,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
14	LKM BINA USAHA TERAMPIL	0,00	28.000.000,00	4.625.000,00	28.625.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	5.479,00	0,00	0,00	0,00	8.960.000,00	8.960.000,00	0,00
15	PK SUSTAM	0,00	8.960.000,00	0,00	8.960.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	5.479,00	0,00	0,00	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00
16	PK WATI AYU	0,00	6.660.000,00	200.000,00	6.860.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	5.479,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
17	LKM Tunggal Jaya	0,00	24.000.000,00	1.675.000,00	25.675.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	5.114,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
18	PK Dihon Menyanto	300.000,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	5.114,00	0,00	0,00	0,00	1.583.331,00	1.583.331,00	0,00
19	Koperasi Wanita Delima	0,00	1.583.331,00	0,00	1.583.331,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	4.749,00	0,00	0,00	0,00	12.125.000,00	12.125.000,00	0,00
20	PK Sri Masyarah	0,00	12.125.000,00	3.200.000,00	15.325.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	4.749,00	0,00	0,00	0,00	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00
21	PK PD Latansa	0,00	13.125.000,00	0,00	13.125.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	4.749,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
22	PK Suseno	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	4.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PK Gatot Sukoco	0,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS	31/12/2024	4.749,00	0,00	0,00	0,00	794.000,00	794.000,00	0,00
24	SRI YUNI	0,00	794.000,00	0,00	794.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	4.409,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
25	DARWIN	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	4.409,00	0,00	0,00	0,00	1.564.666,00	1.564.666,00	0,00
26	AKSAHADI	0,00	1.564.666,00	0,00	1.564.666,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	4.184,00	0,00	0,00	0,00	3.671.668,00	3.671.668,00	0,00
27	EDI SRIANTO	0,00	3.671.668,00	500.000,00	4.171.668,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	4.184,00	0,00	0,00	0,00	341.667,00	341.667,00	0,00
28	SUKAMTO	600.555,00	341.667,00	0,00	341.667,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	4.184,00	0,00	0,00	0,00	3.241.000,00	3.241.000,00	0,00
29	APRINA	0,00	3.241.000,00	400.000,00	3.641.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	4.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MUMUZAMIR	0,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS	31/12/2024	43.643,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
31	YURLINA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00
32	ALAN NURI	0,00	4.380.000,00	0,00	4.380.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	4.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	BU SUDIN	0,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS	31/12/2024	4.292,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
34	ALEX CANDRA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
35	KHOLDUN	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00	915.000,00	0,00
36	CIK IMA	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
37	SAHRIAL GERABATAN	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
38	RAFLES TAISON	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	833.334,00	833.334,00	0,00
39	BUNADI	0,00	833.334,00	0,00	833.334,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
40	EKRONI	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	916.667,00	916.667,00	0,00
41	SUMARDI	0,00	916.667,00	0,00	916.667,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
42	SANUSI	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	583.336,00	583.336,00	0,00
43	BUDI SANTOSO	0,00	583.335,00	0,00	583.335,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
44	AMSIR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
45	ARDINAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00	0,00
46	SKANDAR	0,00	532.000,00	0,00	532.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS	31/12/2024	3.832,00	0,00	0,00	0,00	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00
48	RISWANDI	0,00	8.450.000,00	0,00	8.450.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	3.832,00	0,00	0,00	0,00			

No	NASABAH	ANGSURAN TAHUN 2024	PIUTANG S.D. 31 DESEMBER 2024			KETERANGAN	Tanggal Pelaporan	Jumlah Hari Piutang	Kualitas dan Umur Piutang Pokok				Penyisihan Piutang	Piutang Neto
									Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
		TOTAL	POKOK	JASA	TOTAL				Masih Dalam Tenggang Waktu Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo 1-3 Bulan	Telah Jatuh Tempo 4-6 Bulan	Telah Jatuh Tempo lebih 6 bulan		
1	2	25=(23+24)	26	27	28=(26+27)	29	30	31	32	33	34	35	37 = (32 s.d. 35)	38
49	SUPIYAH	0,00	2.198.000,00	0,00	2.198.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	3.705,00	0,00	0,00	0,00	2.198.000,00	2.198.000,00	0,00
50	**Mawardi Badri (Pengurus Ket)**	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
51	Yesi M. Syarif	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
52	Widodo	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
53	Ali Muktarom	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
54	Zainal Hasan	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
55	Mahendra	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
56	Syaqon Alwanah	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
57	Dedi Aprizani	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
58	Desmeri	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
59	Izal. A	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
60	Yanto	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
61	Hendri. D	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
62	Sukanto	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
63	Munanam	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
64	Warsito	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
65	Semani	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
66	Lukman	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
67	Romanto	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
68	Erwandi	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
69	Sukiman	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
70	Ari	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
71	Cugroni	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
72	Ruskan	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
73	Dahlia	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
74	Napanwin	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
75	Asmani	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
76	**Mursal (Ketua Ket)**	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
77	Rohimi	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
78	Ep Kurniawan	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
79	Hendri Yusef	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
80	Johan Samsi	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
81	Muryani	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
82	Rahmanto	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
83	Efendi	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
84	Zamil Hasan	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
85	Abdul Mutolib	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
86	Munzir	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
87	Sudirno	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
88	Hermansyah	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
89	Mirzan	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
90	Nandang Sebawan	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
91	Mariono	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
92	**Ali Yaman (Ketua Ket.)**	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
93	Rudi Yanto	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
94	Romadi	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
95	Meri Andika	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
96	Riduan	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
97	Ridwan	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
98	Samsuri	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
99	Muladin	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
100	Sumintak	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
101	Sopwan Nuri	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
102	Darmanto	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
103	Mashuri	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

No	NASABAH	ANGSURAN TAHUN 2024	PIUTANG S.D. 31 DESEMBER 2024			KETERANGAN	Tanggal Pelaporan	Jumlah Hari Piutang	Kualitas dan Umur Piutang Pokok				Penyisihan Piutang	Piutang Neto
									Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
		TOTAL	POKOK	JASA	TOTAL				Masih Dalam Tenggang Waktu Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo 1-3 Bulan	Telah Jatuh Tempo 4-6 Bulan	Telah Jatuh Tempo lebih 6 bulan		
1	2	25=(23+24)	26	27	28=(26+27)	29	30	31	32	33	34	35	37 = (32 s.d. 36)	38
104	Pinjon	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
105	Johan Wahyadi	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
106	Penizal Hakim	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
107	Tahmarullah	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
108	Devi	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
109	Ambri Arbi	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
110	A. Purnama (Ketua Kel)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
111	Musiani	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
112	Mel Januri	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
113	Irawansyah	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
114	Andes Saputra	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
115	Zarkoni(Pengurus)	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
116	Nahrawi	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
117	Munir	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
118	Maulad	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
119	Sangkut	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
120	Nur Yanto	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
121	Andri	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
122	Kapsah	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
123	Yut Im (Ketua Kel.)	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
124	Parsip	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
125	Ruwandi	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
126	Was Yanto	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
127	Masud	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
128	Sodikin	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
129	Nasrin Silalahi	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
130	Samsu Iqbal	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
131	Herman Efendi	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
132	Winardi	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
133	Supri Yanto	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
134	Yulra Muryella	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
135	Nasrun Silalahi	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
136	Maryati	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
137	Masiam	0,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00
138	Yuliana	0,00	2.062.500,00	0,00	2.062.500,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	2.062.500,00	2.062.500,00	0,00
139	Pramono	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
140	Jali Waris Diyanto	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
141	Mansyur	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
142	Sunarto	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
143	Romadi	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
144	Gojwinarto	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	43.644,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
145	SAMSIR	0,00	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	3.667,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00
146	WIANTO	0,00	13.000.000,00	1.800.000,00	16.800.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	3.667,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
147	Sujarman Marsdin	0,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS	31/12/2024	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Yusmeli	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	3.492,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
149	Yunar	0,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS	31/12/2024	3.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Kamain	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	3.301,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
151	Hakim Sipik	0,00	17.200.000,00	0,00	17.200.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	3.222,00	0,00	0,00	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00
152	Sopia/Zamzami	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	3.222,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
153	Ratna Hayani/Pangku	0,00	13.125.000,00	1.575.000,00	14.700.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	3.104,00	0,00	0,00	0,00	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00
154	Sangkut	0,00	4.866.665,00	0,00	4.866.665,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	3.568,00	0,00	0,00	0,00	4.866.665,00	4.866.665,00	0,00
155	Masyati	0,00	4.116.000,00	775.000,00	4.891.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	2.847,00	0,00	0,00	0,00	4.116.000,00	4.116.000,00	0,00
156	Sumyati, AR	100.000,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	2.608,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
157	Noverawati	0,00	15.000.000,00	800.000,00	15.800.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	2.469,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
158	Sumyati	0,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS	31/12/2024	2.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	NASABAH	INGSURAN TAHUN 2024	PIUTANG S.D. 31 DESEMBER 2024			KETERANGAN	Tanggal Pelaporan	Jumlah Hari Piutang	Kualitas dan Umur Piutang Pokok				Penyisihan Piutang	Piutang Neto
									Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
		TOTAL	POKOK	JASA	TOTAL				Masih Dalam Tenggang Waktu Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo 1-3 Bulan	Telah Jatuh Tempo 4-6 Bulan	Telah Jatuh Tempo lebih 6 bulan		
1	2	25=(23+24)	26	27	28=(26+27)	29	30	31	32	33	34	35	37 = (32 s.d. 36)	38
159	Cundra Wati	0,00	5.370.027,00	400.000,00	5.770.027,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	2.469,00	0,00	0,00	0,00	5.370.027,00	5.370.027,00	0,00
160	Ernawati	0,00	2.925.000,00	50.000,00	2.975.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	2.469,00	0,00	0,00	0,00	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00
161	Elita Lina	0,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS	31/12/2024	2.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Sopian Mujahidin	0,00	9.050.000,00	650.000,00	9.700.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	2.238,00	0,00	0,00	0,00	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00
163	Nani Soliyah	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	2.132,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
164	Idawati	0,00	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	2.132,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
165	Dawaiyah	0,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS	31/12/2024	2.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Nana Linda wati	0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	2.132,00	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00
167	Azman	200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	1.948,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
168	AEP s. Ferdian	0,00	5.625.000,00	0,00	5.625.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	1.948,00	0,00	0,00	0,00	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00
169	Ermiati	0,00	9.200.000,00	1.100.000,00	10.300.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	1.948,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
170	Siti Julaiha	0,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS	31/12/2024	1.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Ida Yuliza	1.000.000,00	11.800.000,00	500.000,00	12.300.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	1.760,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00
172	Selamatkan	0,00	17.000.000,00	1.600.000,00	18.600.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	1.760,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
173	Dwi Renita Sari	0,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS	31/12/2024	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Korilah	0,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS	31/12/2024	1.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Rindawanah	930.000,00	11.825.000,00	875.000,00	12.700.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	1.619,00	0,00	0,00	0,00	11.825.000,00	11.825.000,00	0,00
176	Andri	0,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS	31/12/2024	1.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Lasmi	0,00	19.150.000,00	1.050.000,00	20.200.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	1.479,00	0,00	0,00	0,00	19.150.000,00	19.150.000,00	0,00
178	Samsiar Wati	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS	31/12/2024	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Ahmadi	0,00	17.200.000,00	1.000.000,00	18.200.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	1.334,00	0,00	0,00	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00
180	Suminam	1.000.000,00	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	1.260,00	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00
181	Mulyono	5.675.000,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS	31/12/2024	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Dawaiyah	0,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS	31/12/2024	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Mulyanto	0,00	4.600.000,00	200.000,00	4.800.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	1.565,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
184	Supriyadi	0,00	20.000.000,00	1.200.000,00	21.200.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	1.416,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
185	Sartini	0,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS	31/12/2024	1.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Rusky Saputra	0,00	15.000.000,00	1.600.000,00	16.600.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	1.111,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
187	Busaini/Edi Budiut Kodi	0,00	15.000.000,00	725.000,00	15.725.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	1.111,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
188	Eva Nurvida	0,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS	31/12/2024	1.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Wahyu Anggoro w	1.000.000,00	11.700.000,00	700.000,00	12.400.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	927,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00
190	Marlina	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	927,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
191	Nurmari	0,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS	31/12/2024	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Arnawati	0,00	6.400.000,00	450.000,00	6.850.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	927,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
193	Maysarah	0,00	7.000.000,00	420.000,00	7.420.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	1.292,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
194	Rika Ratiana	0,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS	31/12/2024	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Rukmana	0,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS	31/12/2024	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	Veni Yunaka	0,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS	31/12/2024	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	Yudi Suryanto	0,00	20.000.000,00	1.200.000,00	21.200.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	927,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
198	Ahmad Masykur	0,00	20.000.000,00	1.200.000,00	21.200.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	927,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
199	Sugino	0,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS	31/12/2024	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Duwi Yanto	0,00	8.300.000,00	500.000,00	8.800.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	927,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00
201	Rian Junaidi	0,00	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	1.292,00	0,00	0,00	0,00	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00
202	Ahmad Mulyadi	0,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS	31/12/2024	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Ratih Puhesim	0,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS	31/12/2024	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Lilis Handayani	0,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS	31/12/2024	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Linda Astuti	900.000,00	0,00	0,00	0,00	LUNAS	31/12/2024	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Madi Husni	5.000.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	BELUM LUNAS	31/12/2024	412,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
207	Piutang Tidak Teridentifikasi	0,00	76.119.331,00	0,00	76.119.331,00	BELUM LUNAS						76.119.331,00	76.119.331,00	0,00
		0,00												
	Jumlah	20.525.000,00	867.844.191,00	61.640.000,00	929.484.191,00				0,00	0,00	0,00	867.844.191,00	867.844.191,00	0,00
	% Penyisihan								5,00%	10,00%	50,00%	100,00%		
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih								0,00	0,00	0,00	867.844.191,00		

Pada UPTD PP-KUKM Dinas Koperasi
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DAFTAR ANALISIS UMUR DANA BER
PER 31 DESEMBER 2024

No	NASABAH	Kualitas dan Umur Pinjaman				Penyisihan Piutang	Piutang Neto
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
		Masih Dalam Tenggang Waktu Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo 1-3 Bulan	Telah Jatuh Tempo 4-6 Bulan	Telah Jatuh Tempo lebih 6 bulan		
1	2	39	40	41	42		
1	LKM Cempaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PK Rasyid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PK Mat Nuri	0,00	0,00	0,00	2.695.000,00	2.695.000,00	0,00
4	PK In Sukmasih	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5	PK Yanto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LKM PURWAWANDIRI	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
7	LKM SUTRA PESAGI	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00
8	PK SUROSO	0,00	0,00	0,00	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00
9	PK KASTUMI	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00
10	PK Zuran	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
11	PK Sarjak	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
12	PK AHMAD TOHIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	KOP. SINAR TERATE	0,00	0,00	0,00	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00
14	LKM BINA USAHA TERAMPIL	0,00	0,00	0,00	4.625.000,00	4.625.000,00	0,00
15	PK GUSTAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PK WATI AYU	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
17	LKM Tunggal Jaya	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00
18	PK Dihon Maryanto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Koperasi Wanita Delima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PK Sit Masyanah	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
21	PK PD Latansa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PK Suseno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PK Galot Sukroto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SRI YUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DARWIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	AKSAHADI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	EDI SRIANTO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
28	SUKAMTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	APRINA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
30	M MUZAMIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	YURLINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ALAN NURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	BU SUDIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ALEX CANDRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	KHOLIDUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CIK IMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	SAHRIAL GERABATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RAFLES TAISON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BUNADI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	EKRONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	SUMARDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	SANUSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BUDI SANTOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	AMSIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ARDINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ISKANDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	RISWANDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	NASABAH	Kualitas dan Umur Piutang/Jasa				Penyisihan Piutang	Piutang Neto
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
		Masih Dalam Tenggang Waktu Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo 1-3 Bulan	Telah Jatuh Tempo 4-6 Bulan	Telah Jatuh Tempo lebih 6 bulan		
1	2	39	40	41	42		
49	SUPIYAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**Mawardi Badri (Pengurus Kelu**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Yasi M. Syarif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Widodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ali Muktarom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zainal Hasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Mahendra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Syaqan Alwansah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Dedi Apriyani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Desmeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Izal. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Yanto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Hendri. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Suparto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Munanain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Warsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Sanatri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Lukman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Riamanto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Erwandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Sukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Cuprani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Ruskan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Dahlia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Nasirwan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Asmani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**Mursal (Ketua Kel)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Rohimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Edi Kurniawan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Hendri Yusef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Johan Samsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Muryani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Rahmanto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Efendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Zamri Hasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Abdul Muloib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Munzir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Sudiono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Hermansyah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Mirzan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Nandang Sebawan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Marono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	**Ali Yaman (Ketua Kel.)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Rudi Yanto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Romadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Meri Andika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Ridwan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Ridwan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Samsun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Muladin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sumintak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Sopwan Nuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Darmanto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Mashuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	NASABAH	Kualitas dan Umur Piutang/Jasa				Penyisihan Piutang	Piutang Neto
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
		Masih Dalam Tenggang Waktu Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo 1-3 Bulan	Telah Jatuh Tempo 4-6 Bulan	Telah Jatuh Tempo lebih 6 bulan		
1	2	39	40	41	42		
104	Pirjon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Usman Wahyudi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Panzai Hakim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Tahmarulloh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Dewi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Ambri Arbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**A. Purnama (Ketua Kel)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Muslani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Mat Jahuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Irawanayah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Andes Saputra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**Zarkoni(Pengurus)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Nahrawi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Munir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Maulidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Sangkut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Nur Yanto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Andri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Kaszani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	**Yut Im (Ketua Kel.)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Ponjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Zuwendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Wea Yanto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Marsudi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Sodikin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Nasrin Silalahi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Samsu rizal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Herman Efendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Winardi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Supri Yanto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Yuna Munyalis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Nasrun Silalahi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Maryati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Maslaini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Yuliyana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Prianono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Jali Wala Diyanto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Menayur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Sunarto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Romadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Suswinarso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	SAMSIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	IRIANTO	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
147	Suarman Marasin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Yusmeli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Yunlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Karnain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Hakim Sidik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Sopia/Zamzami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Ratna Hayani/Fangku	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
154	Sangkut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Masyeli	0,00	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00
156	Sunyati. AR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Noverawati	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
158	Sunyati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	NASABAH	Kualitas dan Umur Piutang/Jasa				Penyisihan Piutang	Piutang Neto
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
		Masih Dalam Tenggang Waktu Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo 1-3 Bulan	Telah Jatuh Tempo 4-6 Bulan	Telah Jatuh Tempo lebih 6 bulan		
1	2	39	40	41	42		
159	Cundra Wati	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
160	Erniwati	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
161	Elda Lina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Sopian Mujahidin	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
163	Nani Soliyah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Idawati	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
165	Dawaliyah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Nana Linda wati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Azman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	AEP s. Ferdian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Ermiati	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
170	Sri Julaiha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Ida Yuliza	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
172	Selamatton	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
173	Dwi Renita Sari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Kor'ah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Rindawanah	0,00	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00	0,00
176	Andri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Lasmi	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
178	Samsiar Wati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Ahmadi	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
180	Suminem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Mulyono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Dawaliyah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Mulyanto	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
184	Supriyadi	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
185	Sartini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Ridky Saputra	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
187	Busaini/Edi Susilok Kop	0,00	0,00	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00
188	Eva Nurvida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Wahyu Anggara w	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
190	Marino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Nurman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Amalwati	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
193	Maysaroh	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
194	Rika Fitriana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Rukmana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	Vani Yuniska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	Yudi Suryanto	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
198	Ahmad Masykur	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
199	Sugimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Dwi Yanto	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
201	Rian Junaidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Ahmad Mulyadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Rasih Purwasih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Lilis Handayani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Linda Astuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Mad Husni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Piutang Tidak Teridentifikasi					0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	61.640.000,00	61.640.000,00	0,00
% Penyisihan		5,00%	10,00%	50,00%	100,00%		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		0,00	0,00	-	61.640.000,00		

DAFTAR TAGIHAN JANGKA PANJANG - TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
PER 31 DESEMBER 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
TAGIHAN JANGKA PANJANG - RGR					9.536.724.645,74
1	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : AA	19.087.500,00
2	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : AN	7.675.000,00
3	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : AS	36.150.000,00
4	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : AW	15.900.000,00
5	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : AM	15.900.000,00
6	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : BS	14.850.000,00
7	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : DY	14.850.000,00
8	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD :DS	14.850.000,00
9	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : DP	15.900.000,00
10	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : DD	21.462.500,00
11	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : EO	36.150.000,00
12	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : FL	36.150.000,00
13	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : HD	15.900.000,00
14	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD :HS	36.150.000,00
15	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : IDSE	36.150.000,00
16	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : JADS	3.737.500,00
17	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : JADS	62.500,00
18	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : JMD	36.150.000,00
19	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : KS	36.150.000,00
20	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : MY	36.150.000,00
21	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : MNW	14.850.000,00
22	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : MS	36.150.000,00
23	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : NR	23.700.000,00
24	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : PRD	36.150.000,00
25	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : PH	36.150.000,00
26	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : RAR	14.850.000,00
27	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : RYA	14.850.000,00
28	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : RC	7.675.000,00
29	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : SM	36.150.000,00
30	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : SEL	36.150.000,00
31	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : SAA	15.900.000,00
32	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : SYT	14.850.000,00
33	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : TR	36.150.000,00
34	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : USJ	36.150.000,00
35	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : UH	36.150.000,00
36	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : WWN	14.850.000,00
37	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : YS	14.850.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
38	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : YDP	34.412.500,00
39	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : YPS	30.150.000,00
40	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : YLN	14.850.000,00
41	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Honorarium BUD, Pembantu Kuasa BUD dan Staf Pembantu Kuasa BUD sebesar Rp1.312.154.500,00 An. BPKD : ZLP	14.850.000,00
42	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : AA	8.160.000,00
43	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : DS	9.120.000,00
44	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : IDSE	9.120.000,00
45	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : MS	3.800.000,00
46	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : SEL	9.120.000,00
47	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : SMD	1.700.000,00
48	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : TS	7.160.000,00
49	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : UH	9.120.000,00
50	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : BR	2.080.000,00
51	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : NJ	4.760.000,00
52	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : RYA	8.360.000,00
53	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : SM	9.120.000,00
54	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : AA	8.160.000,00
55	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : DP	4.000.000,00
56	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : ED	9.120.000,00
57	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : JMD	9.120.000,00
58	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : MS	9.120.000,00
59	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : PH	9.120.000,00
60	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : SEL	9.120.000,00
61	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : SAA	5.600.000,00
62	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : SMD	8.160.000,00
63	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : AS	6.840.000,00
64	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : AW	4.200.000,00
65	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : BS	2.850.000,00
66	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : DY	6.840.000,00
67	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : DD	3.080.000,00
68	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : ED	3.990.000,00
69	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : FL	2.850.000,00
70	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : JMD	3.990.000,00
71	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : KS	2.850.000,00
72	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : SCY	3.990.000,00
73	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : TS	2.850.000,00
74	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : ZLP	2.850.000,00
75	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : RYA	570.000,00
76	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : WNO	3.420.000,00
77	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : DD	3.990.000,00
78	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : YLN	2.850.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
79	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : DD	3.990.000,00
80	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : MY	8.840.000,00
81	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : PRD	2.850.000,00
82	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : TR	2.850.000,00
83	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : DD	1.140.000,00
84	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : HD	7.200.000,00
85	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : YLN	4.655.000,00
86	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : YS	855.000,00
87	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : BS	760.000,00
88	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : DS	760.000,00
89	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : MNW	760.000,00
90	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : WNO	760.000,00
91	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPKD : NR	4.800.000,00
92	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disdikbud : AKS	1.140.000,00
93	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disdikbud : DS	3.600.000,00
94	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disdikbud : MUSH	2.040.000,00
95	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disdikbud : DL	2.040.000,00
96	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disdikbud : IGN	2.400.000,00
97	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disdikbud : AHK	2.400.000,00
98	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : MNT	3.800.000,00
99	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : NYA	5.700.000,00
100	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : ET	5.700.000,00
101	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : DWD	1.710.000,00
102	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : PWN	1.140.000,00
103	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : KHD	1.140.000,00
104	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : IA	5.700.000,00
105	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : ODR	5.700.000,00
106	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : SNK	5.700.000,00
107	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : RUHA	5.700.000,00
108	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : AFA	5.700.000,00
109	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : YU	5.700.000,00
110	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : RXY	1.710.000,00
111	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : YI	1.520.000,00
112	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : DRW	1.520.000,00
113	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : HDAMD	2.280.000,00
114	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : NHA	2.280.000,00
115	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinkes : RSDK	2.280.000,00
116	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. RSUD AU : (JMK)	3.100.000,00
117	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. RSUD AU : (MRN)	1.700.000,00
118	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. RSUD AU : (DST)	2.800.000,00
119	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. RSUD AU : (JMK)	4.800.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
120	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. RSUD AU : (DRIA)	2.300.000,00
121	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. RSUD AU : (KES)	4.800.000,00
122	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. RSUD AU : (RDN)	4.600.000,00
123	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. RSUD AU : (FRID)	4.900.000,00
124	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. RSUD AU : (YLY)	2.300.000,00
125	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. RSUD AU : (MNR)	1.700.000,00
126	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. RSUD AU : (FERD)	1.300.000,00
127	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. RSUD AU : (DST)	1.500.000,00
128	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. RSUD AU : (MHE)	1.500.000,00
129	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Satpol PP : KFK	2.860.000,00
130	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Satpol PP : ABK	5.740.000,00
131	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Satpol PP : ALR	5.860.000,00
132	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Satpol PP : IRIA	5.700.000,00
133	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Satpol PP : GUND	5.590.000,00
134	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPBD : DDNH	4.000.000,00
135	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPBD : RACH	930.000,00
136	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPBD : DDNH	570.000,00
137	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPBD : HAWN	2.560.000,00
138	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPBD : ABR	500,00
139	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPBD : RACH	4.840.000,00
140	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPBD : UUT	2.630.000,00
141	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPBD : MB	710.000,00
142	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPBD : DDNH	4.130.000,00
143	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPBD : MAB	1.000.000,00
144	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPBD : RACH	1.280.000,00
145	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPBD : HERL	600.000,00
146	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BPBD : ABR	310.200,00
147	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinsos : MRD	1.760.000,00
148	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinsos : YAT	6.340.000,00
149	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinsos : SSTM	3.420.000,00
150	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinsos : RMA	4.060.000,00
151	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinsos : MRL	2.565.000,00
152	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinsos : KSM	1.780.000,00
153	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinsos : SSTM	2.350.000,00
154	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinsos : YAT	6.340.000,00
155	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinsos : ASP	1.780.000,00
156	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinsos : RMA	2.470.000,00
157	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinsos : MIS	6.340.000,00
158	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinsos : SSTM	6.840.000,00
159	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PP, KB, PP & PA : NZHT	2.086.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
160	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PP, KB, PP & PA : SYN	4.060.000,00
161	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PP, KB, PP & PA : AST	2.360.000,00
162	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PP, KB, PP & PA : AST	2.360.000,00
163	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PP, KB, PP & PA : NZHT	1.400.000,00
164	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PP, KB, PP & PA : LNA	2.900.000,00
165	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PP, KB, PP & PA : AST	1.700.000,00
166	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PP, KB, PP & PA : MRI	4.320.000,00
167	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PP, KB, PP & PA : SYN	4.060.000,00
168	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Ketahanan Pangan : FAH	4.740.000,00
169	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Ketahanan Pangan : BS	4.740.000,00
170	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Ketahanan Pangan : YAH	4.740.000,00
171	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Ketahanan Pangan : FITT	1.250.000,00
172	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Ketahanan Pangan : SLM	4.740.000,00
173	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Ketahanan Pangan : TP	2.635.000,00
174	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Lingkungan Hidup : ARN	570.000,00
175	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Lingkungan Hidup : ARN	1.140.000,00
176	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Lingkungan Hidup : ARN	2.280.000,00
177	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Lingkungan Hidup : AID	6.840.000,00
178	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Lingkungan Hidup : AID	570.000,00
179	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Lingkungan Hidup : DSE	2.280.000,00
180	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Lingkungan Hidup : ETK	2.400.000,00
181	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Lingkungan Hidup : FRM	1.800.000,00
182	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Lingkungan Hidup : LDK	6.840.000,00
183	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Lingkungan Hidup : LDK	855.000,00
184	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Lingkungan Hidup : LKM	960.000,00
185	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Lingkungan Hidup : MUR	2.400.000,00
186	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Lingkungan Hidup : NEI	1.710.000,00
187	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Lingkungan Hidup : NZHT	570.000,00
188	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Lingkungan Hidup : ONO	2.400.000,00
189	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Lingkungan Hidup : SRW	6.270.000,00
190	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Lingkungan Hidup : SRW	6.270.000,00
191	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Lingkungan Hidup : WBU	4.560.000,00
192	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Dinas Lingkungan Hidup : WBU	1.140.000,00
193	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Lingkungan Hidup : WBU	570.000,00
194	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Dukcapil : WAS	1.200.000,00
195	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Dukcapil : MSE	6.000.000,00
196	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Dukcapil : WAS	1.140.000,00
197	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Dukcapil : ASTIN	1.140.000,00
198	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Dukcapil : WAS	1.140.000,00
199	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Dukcapil : SHS	760.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
200	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disdukcapil : NAZ	855.000,00
201	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disdukcapil : MSE	700.000,00
202	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disdukcapil : IKU	4.560.000,00
203	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disdukcapil : WMD	3.420.000,00
204	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disdukcapil : WAS	3.420.000,00
205	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disdukcapil : TRIS	2.850.000,00
206	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disdukcapil : TRIS	6.840.000,00
207	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disdukcapil : WAS	3.420.000,00
208	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disdukcapil : SHS	3.420.000,00
209	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disdukcapil : NAZ	3.420.000,00
210	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. DPMP : EIND	4.840.000,00
211	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. DPMP : APR	4.840.000,00
212	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. DPMP : NVC	4.840.000,00
213	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. DPMP : NVT	2.560.000,00
214	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. DPMP : AKF	1.687.500,00
215	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. DPMP : EOF	3.990.000,00
216	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. DPMP : EIND	850.000,00
217	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dishub : ASS	4.560.000,00
218	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dishub : SHTD	1.800.000,00
219	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dishub : MYL	2.280.000,00
220	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dishub : ASS	4.560.000,00
221	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dishub : RYT	6.840.000,00
222	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dishub : MYL	4.560.000,00
223	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dishub : FREN	2.137.500,00
224	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dishub : FREN	950.000,00
225	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dishub : MYL	2.660.000,00
226	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : ALM	2.080.000,00
227	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : ASLN	600.000,00
228	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : IINNITA	2.350.000,00
229	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : KSM	1.200.000,00
230	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : KSM	910.000,00
231	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : KSM	1.080.000,00
232	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Diskominfo : WIJ	3.780.000,00
233	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PTSP : WMY	4.690.000,00
234	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PTSP : APY	4.690.000,00
235	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PTSP : AGK	4.690.000,00
236	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PTSP : WMY	1.620.000,00
237	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PTSP : YDS	2.320.000,00
238	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PTSP : BBBA	3.910.000,00
239	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PTSP : BBBA	500.000,00
240	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas PTSP : APY	1.000.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
241	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disporpar : MYR	2.280.000,00
242	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disporpar : ASRS	3.990.000,00
243	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disporpar : ASRS	3.990.000,00
244	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disporpar : ELYU	3.990.000,00
245	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disporpar : ELYU	1.662.500,00
246	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disporpar : ASRS	1.147.500,00
247	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disporpar : NOD	3.990.000,00
248	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disporpar : INUR	3.990.000,00
249	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Perikanan : HYTI	2.660.000,00
250	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Perikanan : HYTI	3.212.000,00
251	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Perikanan : WWY	1.710.000,00
252	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Perikanan : MUY	3.990.000,00
253	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas Perikanan : DRL	1.140.000,00
254	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas TPH : WARS	6.840.000,00
255	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas TPH : SAR	3.990.000,00
256	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas TPH : DS	3.990.000,00
257	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Dinas TPH : MDV	4.560.000,00
258	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disbunnak : YLR	100.000,00
259	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disbunnak : EVDE	100.000,00
260	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disbunnak : SNDR	100.000,00
261	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disbunnak : SRPY	6.140.000,00
262	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disbunnak : SHT	1.580.000,00
263	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disbunnak : YLR	6.140.000,00
264	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disbunnak : MNI	6.140.000,00
265	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disbunnak : SHT	2.150.000,00
266	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disbunnak : SHT	6.140.000,00
267	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disbunnak : REJ	1.580.000,00
268	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Disbunnak : MNI	3.880.000,00
269	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : ANF	6.840.000,00
270	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : AYN	6.840.000,00
271	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : AR	2.280.000,00
272	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : DVS	6.840.000,00
273	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : ELYN	6.840.000,00
274	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : FWSE	1.900.000,00
275	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : FWSE	2.137.500,00
276	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : FWSE	3.420.000,00
277	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : HP	6.840.000,00
278	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : HTO	3.420.000,00
279	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : HTO	6.840.000,00
280	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : HTO	2.850.000,00
281	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : HTO	1.140.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
282	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : HU	3.420.000,00
283	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : HU	6.840.000,00
284	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : IL	6.840.000,00
285	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : IL	2.280.000,00
286	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : KAL	7.200.000,00
287	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : LGN	7.200.000,00
288	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : LBY	3.420.000,00
289	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : MLTP	3.060.000,00
290	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : MLTP	3.060.000,00
291	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : YAN	4.560.000,00
292	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : YAN	6.840.000,00
293	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : NP	1.900.000,00
294	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : NP	2.280.000,00
295	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : NAA	6.840.000,00
296	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : NSSP	6.840.000,00
297	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : RE	6.840.000,00
298	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : RE	2.280.000,00
299	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : RSMA	2.280.000,00
300	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : SAA	3.600.000,00
301	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : SAA	3.600.000,00
302	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : SK	3.420.000,00
303	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : SWN	7.400.000,00
304	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : TN	6.840.000,00
305	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : TN	6.840.000,00
306	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : TN	6.840.000,00
307	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : UA	3.420.000,00
308	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : UA	6.840.000,00
309	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : YS	2.280.000,00
310	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : YS	6.840.000,00
311	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Setdakab : ZAS	6.840.000,00
312	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : ANS	840.000,00
313	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : ALO	5.840.000,00
314	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : ALO	2.920.000,00
315	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : BELL	2.255.000,00
316	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : BELL	4.290.000,00
317	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : ERZ	5.840.000,00
318	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : ERZ	3.120.000,00
319	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : EVAS	1.460.000,00
320	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : GUNN	5.840.000,00
321	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : GUNN	2.920.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
322	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : JAHR	1.710.000,00
323	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : LDR	1.380.000,00
324	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : LDR	570.000,00
325	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : MKT	6.240.000,00
326	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : ZAB	1.580.000,00
327	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : TRIS	840.000,00
328	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : TRIS	3.120.000,00
329	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : TRIS	2.280.000,00
330	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : RYO	6.540.000,00
331	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : RYO	2.065.000,00
332	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Set. DPRD : ZRH	3.120.000,00
333	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Bappeda : MUH	8.160.000,00
334	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Bappeda : FAH	9.120.000,00
335	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Bappeda : RAHS	9.120.000,00
336	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Bappeda : SRS	3.420.000,00
337	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Bappeda : ANK	3.420.000,00
338	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Bappeda : ASP	9.120.000,00
339	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Bappeda : SRS	2.850.000,00
340	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Bappeda : NHS	3.420.000,00
341	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Bappeda : MNS	3.420.000,00
342	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Bappeda : HYM	6.840.000,00
343	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Bappeda : HRLN	4.550.000,00
344	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Bappeda : VIA	3.420.000,00
345	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Bappeda : SRS	2.280.000,00
346	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Bappeda : DOWS	2.565.000,00
347	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Inspektorat Daerah : SRS	1.000.000,00
348	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Inspektorat Daerah : ESSTM	5.000.000,00
349	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Inspektorat Daerah : SRS	2.280.000,00
350	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Inspektorat Daerah : ESSTM	3.420.000,00
351	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Inspektorat Daerah : YSO	1.700.000,00
352	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Inspektorat Daerah : BATPS	1.280.000,00
353	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Inspektorat Daerah : ESSTM	6.840.000,00
354	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Inspektorat Daerah : SRS	6.840.000,00
355	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Inspektorat Daerah : HENR	4.000.000,00
356	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Inspektorat Daerah : YSD	1.900.000,00
357	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : KRI	3.420.000,00
358	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : SIM	1.710.000,00
359	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : KRI	3.420.000,00
360	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : WAN	3.420.000,00
361	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : RAS	6.840.000,00
362	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : MHF	3.420.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
363	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : LOL	3.420.000,00
364	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : SKRS	2.280.000,00
365	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : WAN	1.140.000,00
366	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : MHF	855.000,00
367	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : KRI	760.000,00
368	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : PIT	700.000,00
369	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : PIT	4.560.000,00
370	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. BKPSDM : FAR	1.140.000,00
371	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Balitbang : YAN	2.850.000,00
372	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Balitbang : RWD	1.000.000,00
373	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Balitbang : MYT	1.188.000,00
374	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Balitbang : SAU	2.850.000,00
375	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Balitbang : MYT	2.850.000,00
376	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Balitbang : RSKA	950.000,00
377	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Balitbang : LDYN	1.887.500,00
378	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Balitbang : MYT)	1.331.000,00
379	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Balitbang : RYA	1.331.000,00
380	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Balitbang : AHW	570.000,00
381	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Balitbang : AHW	4.180.000,00
382	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sumber Jaya : EDIS	342.000,00
383	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sumber Jaya : JUN	4.560.000,00
384	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sumber Jaya : MALI	4.560.000,00
385	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sumber Jaya : ENWT	4.560.000,00
386	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sumber Jaya : RUL	1.000.000,00
387	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sumber Jaya : HAM	2.280.000,00
388	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sumber Jaya : SMR	4.560.000,00
389	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sumber Jaya : NER	1.520.000,00
390	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sumber Jaya : ENWT	2.280.000,00
391	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sumber Jaya : IMADE	1.947.500,00
392	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sumber Jaya : JUN	1.995.000,00
393	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Way Tenong : MRU	4.830.000,00
394	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Way Tenong : FAU	4.560.000,00
395	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Way Tenong : DAM	4.600.000,00
396	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Way Tenong : MRU	3.600.000,00
397	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Way Tenong : FAU	4.560.000,00
398	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Way Tenong : DAM	4.200.000,00
399	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Way Tenong : ARD	4.200.000,00
400	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Way Tenong : DEWP	912.000,00
401	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sekincau : (DSPT)	4.100.000,00
402	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sekincau : (SIM)	4.100.000,00
403	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sekincau : (WAN)	4.340.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
404	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sekincau : (NIKA)	1.150.000,00
405	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sekincau : (WAN)	1.940.000,00
406	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sekincau : (EMKO)	1.590.000,00
407	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sekincau : (TAR)	4.100.000,00
408	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sekincau : (EMKO)	1.640.000,00
409	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sekincau : KRY)	1.820.000,00
410	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sekincau : (ROS)	1.440.000,00
411	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Brak : ERMYN	2.060.000,00
412	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Brak : TAM	2.060.000,00
413	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Brak : BEDO	2.200.000,00
414	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Brak : PUL	1.650.000,00
415	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Brak : GALH	1.400.000,00
416	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Brak : MSW	340.000,00
417	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Brak : LBH	380.000,00
418	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Brak : LBH	1.020.000,00
419	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Brak : ASBH	1.250.000,00
420	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Brak : HWRS	1.420.000,00
421	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Brak : PUL	400.000,00
422	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Balik Bukit : CHER	1.000.000,00
423	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Balik Bukit : LKI	3.450.000,00
424	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Balik Bukit : ERNU	1.440.000,00
425	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Balik Bukit : BUDH	3.450.000,00
426	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Balik Bukit : SHRM	3.690.000,00
427	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Balik Bukit : ARD	3.450.000,00
428	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Balik Bukit : DEW	3.700.000,00
429	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Balik Bukit : SHRM	1.640.000,00
430	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Balik Bukit : ARD	1.640.000,00
431	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Balik Bukit : LKI	1.820.000,00
432	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Balik Bukit : WAN	1.820.000,00
433	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sukau : (PAJ)	4.340.000,00
434	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sukau : (YUN)	4.320.000,00
435	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sukau : (SUP)	1.350.000,00
436	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sukau : (ABZ)	2.060.000,00
437	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sukau : (HWNDA)	1.880.000,00
438	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sukau : (AAS)	1.775.000,00
439	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sukau : (YR)	1.680.000,00
440	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sukau : (DES)	2.060.000,00
441	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Sukau : (SMSR)	4.560.000,00
442	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Suoh : LKY	4.560.000,00
443	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Suoh : ROT	4.560.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
444	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Suoh : ALIP	1.520.000,00
445	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Suoh : ALIP	1.900.000,00
446	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Suoh : OKD	4.800.000,00
447	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Suoh : HST	2.280.000,00
448	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Suoh : OKD	2.400.000,00
449	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Suoh : ALP	1.995.000,00
450	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Suoh : MJN	2.100.000,00
451	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Gedung Surian : SLTN	4.560.000,00
452	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Gedung Surian : HTRI	4.560.000,00
453	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Gedung Surian : SEF	1.520.000,00
454	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Gedung Surian : BUCH	4.200.000,00
455	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Gedung Surian : SWJ	4.200.000,00
456	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Gedung Surian : CALM	2.000.000,00
457	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Gedung Surian : ANF	4.000.000,00
458	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Gedung Surian : SEP	4.560.000,00
459	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Kebun Tebu : IRW	4.800.000,00
460	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Kebun Tebu : AHM	4.560.000,00
461	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Kebun Tebu : RSLI	1.140.000,00
462	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Kebun Tebu : DIST	1.995.000,00
463	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Kebun Tebu : DEDG	1.995.000,00
464	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Kebun Tebu : FHT	1.700.000,00
465	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Kebun Tebu : RWI	2.200.000,00
466	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Kebun Tebu : BAD	2.400.000,00
467	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Kebun Tebu : MHJ	4.560.000,00
468	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Air Hitam : HMAS	4.800.000,00
469	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Air Hitam : HABI	4.560.000,00
470	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Air Hitam : SPYT	1.600.000,00
471	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Air Hitam : EVYN	4.560.000,00
472	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Air Hitam : WWN	2.000.000,00
473	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Air Hitam : APT	2.100.000,00
474	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Air Hitam : HARS	2.400.000,00
475	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Air Hitam : INDAR	1.995.000,00
476	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Air Hitam : HARS	2.400.000,00
477	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Pagar Dewa : HADIP	4.560.000,00
478	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Pagar Dewa : IYO	4.560.000,00
479	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Pagar Dewa : SUG	1.520.000,00
480	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Pagar Dewa : HADIP	4.560.000,00
481	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Pagar Dewa : IYO	1.995.000,00
482	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Pagar Dewa : JAM	1.995.000,00
483	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Pagar Dewa : JAM	4.560.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
484	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Pagar Dewa : IYO	1.900.000,00
485	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Ketulis : SAW	4.560.000,00
486	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Ketulis : ARJ	1.900.000,00
487	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Ketulis : ELID	4.800.000,00
488	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Ketulis : ALY	4.800.000,00
489	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Ketulis : ARC	1.520.000,00
490	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Ketulis : ARJ	2.280.000,00
491	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Ketulis : ARC	2.280.000,00
492	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Ketulis : YNH	1.995.000,00
493	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Batu Ketulis : YNH	1.995.000,00
494	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. BNS : PRZ	1.520.000,00
495	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. BNS : LKA	4.560.000,00
496	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. BNS : HRNT	1.900.000,00
497	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. BNS : TSR	4.560.000,00
498	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. BNS : TSR	4.560.000,00
499	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. BNS : PRZ	1.995.000,00
500	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. BNS : SHN	2.100.000,00
501	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. BNS : SHN	2.450.000,00
502	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. BNS : HRNT	2.280.000,00
503	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Lembok Seminung : YUK	4.800.000,00
504	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Lembok Seminung : RYD	4.800.000,00
505	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Lembok Seminung : YUK	1.600.000,00
506	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Lembok Seminung : RYD	2.400.000,00
507	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Lembok Seminung : HWN	2.000.000,00
508	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Lembok Seminung : HWN	2.400.000,00
509	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Kec. Lembok Seminung : RYD	4.800.000,00
510	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Badan Kesbangpol : RDS	3.600.000,00
511	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Badan Kesbangpol : RWT	2.000.000,00
512	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Badan Kesbangpol : MHL	3.420.000,00
513	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Badan Kesbangpol : ASH	2.420.000,00
514	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Badan Kesbangpol : MHL	4.300.000,00
515	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Badan Kesbangpol : DKPT	3.600.000,00
516	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Badan Kesbangpol : SMRLN	2.420.000,00
517	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran Admin dan Operator Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.257.634.500,00 An. Badan Kesbangpol : ELD	4.560.000,00
518	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan sebesar Rp47.880.000,00 An. Setdakab : AH	7.600.000,00
519	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan sebesar Rp47.880.000,00 An. Setdakab : YR	7.600.000,00
520	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan sebesar Rp47.880.000,00 An. Setdakab : RT	5.700.000,00
521	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan sebesar Rp47.880.000,00 An. Setdakab : AT	5.700.000,00
522	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan sebesar Rp47.880.000,00 An. Setdakab : TI	9.120.000,00
523	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan sebesar Rp47.880.000,00 An. Setdakab : AI	5.700.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KETETAPAN		NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
		TANGGAL	NOMOR		
a	b	c	d	e	f
524	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Kelebihan Pembayaran CV MCP sebesar Rp25.608.000,00 An. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.608.000,00
525	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Kekurangan Volume Sebesar Rp11.583.037,73 An. Dinas Lingkungan Hidup	11.583.037,73
526	BKAD	16 Mei 2023	LHP BPK RI Nomor : 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023	Kekurangan Volume dan tidak sesuai spesifikasi kontrak atas pekerjaan Gedung Bangunan pada Dinas Kesehatan An. CV. Sukau Jaya Indonesia (SJI)	107.848.668,82
527	BKAD	02 Mei 2024	LHP BPK RI Th. 2024 No. 36A/LHP/XVIII.BLP/05/2024	Pembayaran Tunjangan Struktural dan Tunjangan Fungsional kepada 40 Pegawai yang Sedang Cuti besar pada 13 OPD Tidak Sesuai Ketentuan	7.085.000,00
528	BKAD	02 Mei 2024	LHP BPK RI Th. 2024 No. 36A/LHP/XVIII.BLP/05/2024	Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai kepada 48 PNS pada Dua OPD Tidak Sesuai Ketentuan	38.858.592,48
529	BKAD	02 Mei 2024	LHP BPK RI Th. 2024 No. 36A/LHP/XVIII.BLP/05/2024	Belanja Barang dan Jasa untuk 12 Kegiatan pada Dinas PPKBPPPA Tidak Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya	1.369.084.540,00
530	BKAD	02 Mei 2024	LHP BPK RI Th. 2024 No. 36A/LHP/XVIII.BLP/05/2024	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada Tiga OPD Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya	186.172.000,00
531	BKAD	02 Mei 2024	LHP BPK RI Th. 2024 No. 36A/LHP/XVIII.BLP/05/2024	Biaya Langsung Personel Jasa Konsultansi Pengawasan pada Dinas PUPR Sebesar Rp120.580.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan	76.569.000,00
532	BKAD	02 Mei 2024	LHP BPK RI Th. 2024 No. 36A/LHP/XVIII.BLP/05/2024	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan	6.474.000,00
533	BKAD	02 Mei 2024	LHP BPK RI Th. 2024 No. 36A/LHP/XVIII.BLP/05/2024	Belanja Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola TI dan Pengeloa Website pada 32 OPD tdk Sesuai Ketentuan	61.357.500,00
534	BKAD	02 Mei 2024	LHP BPK RI Th. 2024 No. 36A/LHP/XVIII.BLP/05/2024	Kekurangan Volume Sebesar Rp98.886.896,32 atas Tujuh Paket Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Bangunan pada Dua OPD	48.183.969,94
535	BKAD	19 Desember 2024	LHP BPK RI Nomor : 45/LHP/XVIII.BLP/12/2024	Pembayaran Belanja Pegawai Tidak Sesuai Ketentuan	34.333.300,00
536	BKAD	19 Desember 2024	LHP BPK RI Nomor : 45/LHP/XVIII.BLP/12/2024	Belanja Pegawai BLUD di Sembilan Puskesmas dan RSUD Almuddin Umar Tidak Sesuai Ketentuan	27.300.000,00
537	BKAD	19 Desember 2024	LHP BPK RI Nomor : 45/LHP/XVIII.BLP/12/2024	Realisasi Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Ketentuan	346.033.410,00
538	BKAD	19 Desember 2024	LHP BPK RI Nomor : 45/LHP/XVIII.BLP/12/2024	Pembayaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas pada Empat OPD Tidak Sesuai Ketentuan	81.836.700,00
539	BKAD	19 Desember 2024	LHP BPK RI Nomor : 45/LHP/XVIII.BLP/12/2024	Realisasi Belanja Pakaian dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Tidak sesuai kondisi sesungguhnya	313.109.577,00
540	BKAD	19 Desember 2024	LHP BPK RI Nomor : 45/LHP/XVIII.BLP/12/2024	Realisasi Uang Makan Jasa Lauk Pauk pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tidak Sesuai Ketentuan	556.000.000,00
541	BKAD	19 Desember 2024	LHP BPK RI Nomor : 45/LHP/XVIII.BLP/12/2024	Kekurangan Volume dan Tidak Sesuai Kontrak atas 11 Paket Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Denda Keterlambatan Belum dikenakan atas Satu Paket Pekerjaan Rehabilitasi pada Dinas PUPR	211.891.746,20
542	BKAD	19 Desember 2024	LHP BPK RI Nomor : 45/LHP/XVIII.BLP/12/2024	Kekurangan Volume dan Tidak Sesuai Sinsalikasi Kontrak serta Denda Keterlambatan belum dikenakan atas Tujuh Paket Pekerjaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.272.216.743,88
543	BKAD	19 Desember 2024	LHP BPK RI Nomor : 45/LHP/XVIII.BLP/12/2024	Pembayaran Realisasi Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Sekretariat Daerah Tidak Sesuai Kondisi Sesungguhnya	29.380.000,00
544	BKAD	19 Desember 2024	LHP BPK RI Nomor : 45/LHP/XVIII.BLP/12/2024	Pengelolaan Belanja Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tidak Sesuai Ketentuan	357.742.250,00
545	BKAD	19 Desember 2024	LHP BPK RI Nomor : 45/LHP/XVIII.BLP/12/2024	Belanja Perjalanan Dinas pada Tiga OPD Tidak Sesuai Ketentuan	65.232.100,00
546	BKAD	19 Desember 2024	LHP BPK RI Nomor : 45/LHP/XVIII.BLP/12/2024	Pengelolaan Belanja Hibah Tidak Sesuai Ketentuan	71.163.820,00
547	BKAD	19 Desember 2024	LHP BPK RI Nomor : 45/LHP/XVIII.BLP/12/2024	Realisasi Belanja Sewa pada Sekretariat Daerah Tidak Sesuai Kondisi Sesungguhnya	58.192.000,00
548	BKAD	19 Desember 2024	LHP BPK RI Nomor : 45/LHP/XVIII.BLP/12/2024	Realisasi Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah pada Dua OPD Tidak Sesuai Ketentuan	386.557.000,00
549	BKAD	19 Desember 2024	LHP BPK RI Nomor : 45/LHP/XVIII.BLP/12/2024	Terdapat Belanja Tambahan Penghasilan ASN pada 13 OPD Tidak Sesuai Ketentuan	75.855.099,51
550	BKAD	19 Desember 2024	LHP BPK RI Nomor : 45/LHP/XVIII.BLP/12/2024	Terdapat Belanja Tunjangan Fungsional ASN dan Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tidak Sesuai Ketentuan dan Membebani kas da	68.256.000,00

RINCIAN PENDAPATAN HIBAH - LO
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	URAIAN	JUMLAH	Rincian	BAST/NPHD/SURAT...	
						NOMOR	TANGGAL
1	7.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	Hibah Dari Pemerintah Pusat Berupa Persediaan Obat-obatan pada Dinas Kesehatan	897.521.784,00	3.097.600,00	SBBK No. 443/078/SBBK/I/2024	26-Jan-24
					1.722.688,00	BAST No.32/IFP/I/2024	29-Jan-24
					2.010.000,00	BAST No.48/IFP/II/2024	16-Feb-24
					2.851.920,00	SBBK No.47/IFP/II/2024	16-Feb-24
					64.519.500,00	SBBK No. 373/IFP/II/2024	16-Feb-24
					2.448.000,00	BAST No.91/IFP/III/2024	28-Mar-24
					915.960,00	SBBK No. 91/IFP/III/2024	28-Mar-24
					7.744.000,00	SBBK No. 400.7.9.3/111/III.02/V/2024	13-May-24
					788.000,00	SBBK No.07/IFP/GIZI/V/2024	21-May-24
					75.350.000,00	SBBK No. 443/428/III.10.3/V/2024	21-May-24
					943.800,00	BAST No.136/IFP/V/2024	28-May-24
					839.630,00	SBBK No.136/IFP/V/2024	28-May-24
					6.555.000,00	SBBK No. 443/454/III.10.3/VI/2024	12-Jun-24
					60.196.144,00	SBBK No. 400.7.8.2/37/SBBK/VI/2024	12-Jun-24
					194.843.840,00	SBBK No.157/IFP/VI/2024	13-Jun-24
					18.565.600,00	SBBK No. 400.7.9.3/128/III.02/VII/2024	26-Jun-24
					26.130.000,00	BAST No.205/IFP/VII/2024	25-Jul-24
					29.705.000,00	SBBK No.205/IFP/VII/2024	25-Jul-24
					14.251.034,00	BAST No.223.a/IFP/VIII/2024	5-Aug-24
					15.712.050,00	BAST No.223/IFP/VIII/2024	5-Aug-24
					2.898.000,00	BAST No.222/IFP/VIII/2024	5-Aug-24
					2.803.300,00	SBBK No. 222/IFP/VIII/2024	5-Aug-24
					14.490.000,00	BAST No.263/IFP/IX/2024	10-Sep-24
					14.016.500,00	SBBK No.263/IFP/IX/2024	10-Sep-24
					8.800.200,00	SBBK No. 443/503/III.10.3/IX/2024	10-Sep-24
					3.570.000,00	SBBK No. 443/530/III.10.3/X/2024	14-Oct-24
					399.600,00	BAST No.307/IFP/X/2024	23-Oct-24
					18.585.600,00	SBBK No. 400.7.9.3/235/III.02/XI/2024	1-Nov-24
					265.480.166,00	BAST No.4/IFP/PROG/IX/2024	15-Nov-24
					31.255.900,00	BAST No.4/IFP/PKD/IX/2024	19-Nov-24
					6.010.752,00	SBBK No. 443/564/III.10.3/XI/2024	26-Dec-24
2	7.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	Hibah Dari Pemerintah Pusat Berupa Persediaan berupa Blanko KTP Elektronik, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	214.416.710,00	10.571.000,00	BAST No. 471.13/13/V.11/2024	9-Jan-24
					30.546.000,00	BAST No. 471.13/55/V.11/2024	26-Jan-24
					40.728.000,00	BAST No. 471.13/101/V.11/2024	16-Feb-24
					40.728.000,00	BAST No. 400.8.1.2/1511/SES	21-May-24

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	URAIAN	JUMLAH	Rincian	BAST/NPHD/SURAT....	
						NOMOR	TANGGAL
					30:546.000,00	BAST No. 471.13/101/V.11/2024	16-Feb-24
					105.710,00	BAST No. 471.13/126/V.11/2024	28-May-24
					30:546.000,00	BAST No. 471.13/366/V.11/2024	23-Jul-24
					10:282.000,00	BAST No. 800.8.1/897/V.11/2024	27-Jul-24
					20:364.000,00	BAST No. 800.8.1/813/V.11/2024	8-Nov-24
3	7.3.01.01.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	CSR dari PT. PLN Persero berupa 2 Unit Sepeda Motor Roda 3 Viar/New Karya	76.000.000,00		030/266/BAST/III.13/2024	7/11/2024
4	7.3.01.01.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	Hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum berupa Peningkatan Jalan Poros Desa Kegeringan Rp1.771.724.000,00 Tahun 2020; Peningkatan; dan Peningkatan Jalan Poros Desa Kegeringan Rp248.514.000,00 Tahun 2009	2.020.238.000,00		BAST No. 855.1/BA/DC/2024	27-Dec-24
5	7.3.01.01.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	Hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Berupa Peningkatan Jalan Usaha Tani Kawasan Suka Raja Kec. Batu Brak Rp676.166.000,00 Tahun 2020 dan Jalan Usaha Tani Desa Sukaraja Kec. Batu Brak Kab. Lampung Barat Rp581.226.000,00 (Tahun 2009)	1.259.392.000,00		BAST No. 855.1/BA/DC/2024	27-Dec-24
6	7.3.01.01.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	Hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Berupa Pembangunan SPAM IKK, SPAM PDAM, SPAM Pedesaan, Pengadaan dan Pembangunan Pipa dan Accecoris	47.658.495.701,00		BAST No. 855.1/BA/DC/2024	27-Dec-24
7	7.3.01.01.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	Hibah alat ukur universal dari hibah Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ke Dinas Kesehatan, Berdasarkan NPHD NO. KN.01.08/C.II/4861.235/2024 tanggal 07 juni 2024 Rp10.059.194,00	10.059.194,00			
8	7.3.01.02.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	Hibaher Persediaan yang berasal dari hibah RSUD LWA 2024 Sebesar Rp. 37.544.193 berdasarkan Surat pernyataan Direktur RSUD No 900/999/III.02/2025 (yang sebelumnya penerimaan persediaan tersebut tidak di catat pada Laporan keuangan (sedangkan mencatat penyesuaian nila persediaan akhir tahun sebesar selisih persediaan tahun berjalan (2024) dibandingkan dengan persediaan Tahun Lalu (2023) di lawankan dengan Akun beban barang dan Jasa BLUD	37.544.193,00			
9	7.3.01.03.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	Mencatat Surat Keteangan Hibah Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja dari Masyarakat/Perorangan Ke Dinas Lingkungan Hidup Rp64.350	64.350,00		Surat Keterangan Hibah	
			JUMLAH	52.173.731.932,00			

RINCIAN ASET TETAP PER PERANGKAT DAERAH PER 31 DESEMBER 2024

No.	SKPD/OPD	31 Desember 2024	1 Januari 2024	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Sekretariat Daerah	176.420.748.011,49	249.622.513.781,49	(73.201.765.770,00)	(29,32)
2	Sekretariat DPRD	18.252.978.143,02	18.182.279.393,02	70.698.750,00	0,39
3	Inspektorat	1.787.308.433,33	1.338.919.433,33	448.389.000,00	33,49
4	BPKD	6.836.386.375,00	9.831.488.238,00	(2.995.101.863,00)	(30,46)
5	BAPENDA	3.026.179.750,00	0,00	3.026.179.750,00	100,00
6	BAPPEDA	3.859.900.545,00	3.811.661.225,00	48.239.320,00	1,27
7	Balitbang	95.230.090.905,00	935.729.911,00	94.294.360.994,00	###
8	BKPSDM	1.638.813.858,00	1.749.144.358,00	(110.330.500,00)	(6,31)
9	BPBD	16.587.174.697,00	16.402.073.697,00	185.101.000,00	1,13
10	Badan Kesbangpol	998.196.668,00	899.721.668,00	98.475.000,00	10,95
11	Sat Pol PP	12.379.342.839,00	12.416.499.839,00	(37.157.000,00)	(0,30)
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	734.718.255.704,55	713.608.737.808,55	21.109.517.896,00	2,96
13	Dinas Kesehatan	19.374.077.699,78	19.274.572.966,78	99.504.733,00	0,52
14	Dinas PUPR	2.459.169.184.560,34	2.384.755.868.490,34	74.413.316.070,00	3,12
15	Disduk dan Capil	4.579.772.128,00	4.542.172.128,00	37.600.000,00	0,83
16	Dinas Kepemudaan OR & Pariwisata	56.007.872.435,00	69.741.394.321,00	(13.733.521.886,00)	(19,69)
17	Diskop,UKM, Perindag	109.569.483.476,00	52.586.563.530,00	56.982.919.946,00	108,36
18	Dinas PP, KB, PP,&PA	13.784.184.630,00	13.754.064.630,00	30.120.000,00	0,22
19	Dinas Ket. Pangan	4.265.926.016,00	4.324.166.016,00	(58.240.000,00)	(1,35)
20	Dinas TPH	62.274.513.987,00	60.780.221.987,00	1.494.292.000,00	2,46
21	Dinas Bun & Nak	17.842.193.787,63	17.430.053.589,63	412.140.198,00	2,36
22	Dinas Perikanan	22.454.858.319,80	22.424.998.319,80	29.860.000,00	0,13
23	Dinas PMP	4.023.089.125,00	4.007.089.125,00	16.000.000,00	0,40
24	Dinas LH	63.833.765.695,72	84.085.390.274,72	(20.251.624.579,00)	(24,08)
25	Dinas PM, PTSP, & Naker	1.348.663.932,00	1.116.623.932,00	232.040.000,00	20,78
26	Dinas Sosial	3.886.741.845,00	3.843.901.845,00	42.840.000,00	1,11
27	Dinas Perhubungan	21.881.519.821,00	21.453.023.911,00	428.495.910,00	2,00
28	Dinas Kominfo	5.596.734.312,00	5.963.360.662,00	(366.626.350,00)	(6,15)
29	Dinas Perpus&Arsip	15.987.135.706,00	6.810.851.503,00	9.176.284.203,00	134,73
30	Dinas Tenaga Kerja & Industri	14.575.656.524,00	0,00	14.575.656.524,00	100,00
31	RSUD Liwa	116.717.305.992,77	113.114.616.935,77	3.602.689.057,00	3,18
32	Kec. Balik Bukit	771.953.103,67	839.203.103,67	(67.250.000,00)	(8,01)
33	Kec. Belalau	1.617.438.100,00	1.603.638.100,00	13.800.000,00	0,86
34	Kec. Sumberjaya	6.130.177.650,00	5.936.765.650,00	193.412.000,00	3,26
35	Kec. Way Tenong	1.447.322.283,00	1.435.822.283,00	11.500.000,00	0,80
36	Kec. Sekincau	2.388.442.637,00	2.363.492.637,00	24.950.000,00	1,06
37	Kec. Suoh	1.836.403.800,00	1.819.653.800,00	16.750.000,00	0,92
38	Kec. Batubrak	1.491.130.700,00	1.464.407.700,00	26.723.000,00	1,82
39	Kec. Sukau	1.191.923.894,00	1.167.423.894,00	24.500.000,00	2,10
40	Kec. Gedung Surian	1.294.369.637,00	1.280.609.637,00	13.760.000,00	1,07
41	Kec. Kebun Tebu	1.864.482.755,00	1.742.017.375,00	122.465.380,00	7,03
42	Kec. Air Hitam	1.755.990.775,00	1.747.490.775,00	8.500.000,00	0,49
43	Kec. Pagar Dewa	1.663.460.275,00	1.654.960.275,00	8.500.000,00	0,51
44	Kec.Batu Ketulis	1.922.492.125,00	1.902.992.125,00	19.500.000,00	1,02
45	Kec. BNS	1.750.961.975,00	1.737.461.975,00	13.500.000,00	0,78
46	Kec. Lumbok Seminung	1.858.422.525,00	1.841.672.525,00	16.750.000,00	0,91
47	Kel. Pasar Liwa	3.478.859.563,00	3.553.774.313,00	(74.914.750,00)	(2,11)
48	Kel. Way Mengaku	2.776.017.678,00	2.510.741.786,00	265.275.892,00	10,57
49	Kel. Sekincau	3.163.358.385,00	2.932.923.385,00	230.435.000,00	7,86
50	Kel. Fajar Bulan	3.308.467.820,69	3.110.450.072,69	198.017.748,00	6,37
51	Kel. Tugu Sari	2.884.039.996,00	2.680.376.868,00	203.663.128,00	7,60
52	Puskesmas Liwa	22.608.370.513,84	22.144.988.513,84	463.382.000,00	2,09

No.	SKPD/OPD	31 Desember 2024	1 Januari 2024	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
53	Puskesmas Kenali	14.538.504.647,54	14.034.623.697,54	503.880.950,00	3,59
54	Puskesmas Sumber Jaya	16.244.904.005,53	16.092.022.005,53	152.882.000,00	0,95
55	Puskesmas Fajar Bulan	17.169.865.848,37	17.134.700.587,37	35.165.261,00	0,21
56	Puskesmas Sekincau	13.975.949.641,66	13.289.707.638,66	686.242.003,00	5,16
57	Puskesmas Srimulyo	18.416.328.410,00	17.845.830.642,00	570.497.768,00	3,20
58	Puskesmas Batu Brak	13.654.943.683,62	13.563.438.683,62	91.505.000,00	0,67
59	Puskesmas Buay Nyerupa	15.572.542.051,54	15.311.791.910,54	260.750.141,00	1,70
60	Puskesmas Gedung Surian	13.146.591.892,00	12.784.687.392,00	361.904.500,00	2,83
61	Puskesmas Kebun Tebu	14.165.435.665,00	14.007.173.665,00	158.262.000,00	1,13
62	Puskesmas Air Hitam	14.111.092.718,00	13.932.558.218,00	178.534.500,00	1,28
63	Puskesmas Pagar Dewa	19.485.881.668,42	19.221.375.853,42	264.505.815,00	1,38
64	Puskesmas Batu Ketulis	18.514.884.627,56	17.877.570.127,56	637.314.500,00	3,56
65	Puskesmas BNS	17.284.794.156,62	16.848.032.156,62	436.762.000,00	2,59
66	Puskesmas Lumbok Seminung	13.037.907.621,00	12.921.555.621,00	116.352.000,00	0,90
67	Pengelola Barang	2.162.701.000,00	1.930.590.000,00	232.111.000,00	12,02
	JUMLAH	**4.377.594.469.750,49**	**4.201.074.228.511,49**	**176.520.241.239,00**	**4,20**

DATA BIDANG TANAH BERDASARKAN BUKTI KEPEMILIKAN

No.	OPD	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Bukti Kepemilikan
1	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Komplek Perkantoran 1991/08/04/04/04/00037	Sertipikat
2	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.03.04.003.	Tanah Lapangan Pemancar Lainnya	Tower 2002/08.05.07.04.4.00001	Sertipikat
3	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.03.11.003.	Tanah Untuk Tugu Batas Wilayah	Tugu Perbatasan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
4	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.02.02.004.	Tanah Kosong Yang Tidak Diusahakan	Desa Sukajaya Kec. Sumber Jaya Lampung Barat	Hibah
5	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.02.02.004.	Tanah Kosong Yang Tidak Diusahakan	Desa Sukajaya Kec. Sumber Jaya Lampung Barat	Hibah
6	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.02.02.004.	Tanah Kosong Yang Tidak Diusahakan	Desa Sukajaya Kec. Sumber Jaya Lampung Barat	Hibah
7	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.01.01.003.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. III	Perumahan Serenggai 2001/08.05.04.01.4.00029	Sertipikat
8	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.01.01.003.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. III	Perumahan Pantau 2010/08.05.04.03.1.00012	Sertipikat
9	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.03.04.003.	Tanah Lapangan Pemancar Lainnya	Lokasi Seismograf 2008/08.05.04.03.4.00040	Sertipikat
10	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.02.02.004.	Tanah Kosong	Eks. BUMD Pesagi Mandiri (Sekincau)/08.05.08.02.1.0008	Sertipikat
11	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.02.02.004.	Tanah Kosong	Jalan Adhyaksa Way Mengaku Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
12	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.02.02.004.	Tanah Kosong	Jalan Gajah Mada Pasar Liwa Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
13	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.02.02.004.	Tanah Kosong	Jalan Melati Way Mengaku Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
14	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Gedung Kantor PD Pesagi Mandiri Perkasa	Belum Ada Bukti Kepemilikan
15	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.01.01.005.	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Bangunan Bekas Mess Bina Marga Prov Lampung/Jalan Raden Intan Kelurahan Pasar Liwa, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
16	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.02.02.002.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan	Lapas 2007/08/05/11/014/00002/Jalan Desa, Desa Tanjung Raya, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
17	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.01.01.003.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. III	Rumah Dinas Mosjaba dan karyawan Pemda/Jalan Imam Bonjol, Desa Kubu Perahu, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
18	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.01.01.001.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Rumah Dinas Bupati Lampung Barat/Jalan Teuku Umar, Desa Kubu Perahu, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
19	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.03.13.003.	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Taman Kota/Jalan Raden Intan, Kelurahan Pasar Liwa, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
20	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.03.13.003.	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Taman Bunga/Jalan Teuku Umar, Desa Kubu Perahu, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
21	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.02.02.002.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan	Yayasan Bumi Adi Guna (BPN)/Jalan Teuku Umar, Kelurahan Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
22	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.02.02.002.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan	Kosong/Jalan Teuku Umar , Desa Kubu Perahu, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
23	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.02.02.002.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan	Tanah Kosong Sebarus/Jalan Jend. Sudirman, Desa Sebarus, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
24	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.01.08.001.	Tanah Untuk Bangunan Masjid	Masjid Padang Tambak 1995/ 08.05.07.26.1.001/Jalan Raya Liwa, Desa Tambak Jaya, Kec. Way Tenong, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
25	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.02.02.002.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan	Pekarangan Pantau Kel. Pasar Liwa Kec. Balik Bukit	Akta Jual Beli
26	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.01.01.005.	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Asrama Mahasiswa 2015/08/01170/400010	Sertipikat
27	Sekretariat DPRD	1.3.1.01.01.01.001.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bangunan Rumdin Ketua	Belum Ada Bukti Kepemilikan
28	Sekretariat DPRD	1.3.1.01.01.01.001.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bangunan Rumdin Wk Ketua I	Belum Ada Bukti Kepemilikan
29	Sekretariat DPRD	1.3.1.01.01.01.001.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bangunan Rumdin Wk Ketua II	Belum Ada Bukti Kepemilikan
30	Sekretariat DPRD	1.3.1.01.01.01.005.	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Bangunan Mess DPRD	Belum Ada Bukti Kepemilikan
31	Bida	1.3.1.01.02.04.005.	Kebun Raya	Kebun Raya Liwa/Jalan Teuku Umar , Desa Kubu Perahu, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat 2015/08.05.04.02.4.00001-BK.007107	Sertipikat
32	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 Liwa 2001/08.05.03.05.4.00014-AQ442062	Sertipikat
33	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 Lombok Seminung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
34	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Tri Budi Syukur 2010/08.05.06.07.3.00005	Sertipikat
35	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Way Petai 2008/08.05.06.03.3.00009	Sertipikat
36	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Way Mengaku 2008/08.05.04.03.4.00034	Sertipikat
37	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Way Empulau Ulu 2023/08.05.04.05.4.00006-ABH039934	Sertipikat
38	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Tapak Siring 2020/0805115/4400007	Sertipikat
39	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Tri Mulyo	Belum Ada Bukti Kepemilikan
40	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Kenali 2023/08.05.05.01.4.00012-ABH039724	Sertipikat
41	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Kota Besi 2010/08.05.10.06.3.00003	Sertipikat
42	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Kembahang 2023/08.05.10.01.4.00006-ABH039719	Sertipikat
43	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 Batu Brak	Belum Ada Bukti Kepemilikan
44	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Bakhu 2010/08.05.05.08.3.00001	Sertipikat
45	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Bandar Baru 2020/08.05.11.11.4.00003	Sertipikat
46	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Handing Agung 2023/08.05.04.09.4.00001	Sertipikat
47	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Bandung Agung (Kls Jauh)	Belum Ada Bukti Kepemilikan
48	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Purajaya 2010/08/05/06/06/300003	Sertipikat
49	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Pura Mekar 2023/08.05.15.03.4.00005-ABH039710	Sertipikat
50	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Puralaksana 2010/08/05/07/02/300008	Sertipikat
51	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Sekincau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
52	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Pampangan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
53	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Sebarus 2006/08/05/04/03/400008	Sertipikat
54	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 Way Tenong	Belum Ada Bukti Kepemilikan
55	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Puralaksana 2010/08/05/07/02/300009	Sertipikat
56	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Pekon Balak	Belum Ada Bukti Kepemilikan
57	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Tugu Sari 2023/08.05.06.11.4.00010-ABH039726	Sertipikat
58	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Tri Mulyo	Belum Ada Bukti Kepemilikan
59	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Fajar Bulan 2023/08.05.07.01.4.00020-ABH039928	Sertipikat
60	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Padang Tambak	Belum Ada Bukti Kepemilikan
61	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Gunung Terang	Belum Ada Bukti Kepemilikan
62	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 Sekincau 2015/08.05.08.02.4.00008	Sertipikat
63	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Sukaraja 2020/08.05.04.11.4.000001	Sertipikat
64	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Kanakau 2020/08.05.11.03.4.00004	Sertipikat
65	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TKN 1 Air Hitam 2020/08.05.15.07.4.00001	Sertipikat
66	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 Sumber Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
67	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Tugu Sari 08.05.06.11.4.00011	Sertipikat
68	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Sukaraja 2015/08.05.07.07.4.00002	Sertipikat
69	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Tanjung Raya (Ms Induk)	Belum Ada Bukti Kepemilikan
70	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Tanjung Raya (Ms Jauh)	Belum Ada Bukti Kepemilikan
71	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 2 Sumber Jaya 2006/08/05/06/01400010	Sertipikat
72	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
73	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Padang Tambak 2023/08.05.07.08.4.00005-ABH039712	Sertipikat
74	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TK Dharma Wanita Bakhu	Belum Ada Bukti Kepemilikan

No.	OPD	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Bukti Kepemilikan
75	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Pagar Dewa 2010/08051100300005	Sertipikat
76	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Jaga Raga 08.05.11.05.4.00002	Sertipikat
77	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Karang Agung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
78	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Liwa 2006/08050402400027	Sertipikat
79	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Padang Cahya 2006/08050404400002	Sertipikat
80	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Tanjung Raya 2020/08.05.11.11.4.00002	Sertipikat
81	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Tri Budi Syukur 2010/08050807300006	Sertipikat
82	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Tebaliokh 2020/08051011400001	Sertipikat
83	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TKN 1 Negeri Pembina Liwa 1998/08.05.03.03.4.00007	Sertipikat
84	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 Kebun Tebu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
85	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Muara Jaya II 2010/08050608300004	Sertipikat
86	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Cipta Waras	Belum Ada Bukti Kepemilikan
87	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
88	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Mekar Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
89	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Fajar Bulan 2010/08050701300011	Sertipikat
90	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Padang Tambak 08.05.07.08.4.00001	Sertipikat
91	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Pura Laksana 2010/08050702300007	Sertipikat
92	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Gunung Terang 1995/08.05.01.27.1.00189	Sertipikat
93	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Giham Suka Maju 2010/08050805400010	Sertipikat
94	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Pampangan 2010/08050801300005	Sertipikat
95	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 Pagar Dewa	Belum Ada Bukti Kepemilikan
96	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Bedudu 2010/08050505300002	Sertipikat
97	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Kenali 08.05.25.01.4.00008	Sertipikat
98	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Bakhu 2010/08050507300001	Sertipikat
99	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Luas 2010/08050506300002	Sertipikat
100	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Kota Besi 2020/08.05.01.08.4.00003	Sertipikat
101	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Kembahang	Belum Ada Bukti Kepemilikan
102	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 2 Liwa 2001/08050301400021	Sertipikat
103	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Liwa 2006/08050402400026	Sertipikat
104	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Ratway 2017/08.05.04.11.4.00004-AAL009717	Sertipikat
105	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Padang Cahya 2006/08050404400001	Sertipikat
106	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Suay Nyerupa 2010/08051303300004	Sertipikat
107	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Pagar Dewa 2010/08051100300004	Sertipikat
108	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Jaga Raga 2010/08051105300002	Sertipikat
109	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Hanakau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
110	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Kagungan 2010/08051107300003	Sertipikat
111	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Lombok Timur 2010/08051107300004	Sertipikat
112	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Lombok 2010/08051107300002	Sertipikat
113	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 Suoh 2004/08050903400001	Sertipikat
114	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Banding Agung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
115	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	UPTD Dinas Pendidikan Sumber Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
116	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Sindang Pagar 2020/08050910400010	Sertipikat
117	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Sukajaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
118	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Simpang Sari 2021/08.05.09.01.4.00014	Sertipikat
119	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Tugu Sari 2023/08.05.09.11.4.00018-ABH639714	Sertipikat
120	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Sukapura 2010/08050910300003	Sertipikat
121	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Sukapura	Belum Ada Bukti Kepemilikan
122	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Way Petai	Belum Ada Bukti Kepemilikan
123	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Sinar Luas 2020/08050904300001	Sertipikat
124	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Purajaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
125	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Pura Wiwitan 2023/08.05.10.02.4.00002-ABH639725	Sertipikat
126	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Pura Mekar	Belum Ada Bukti Kepemilikan
127	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Mekar Jaya 2010/08051005300001	Sertipikat
128	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 2 Way Tenong 2023/08.05.07.06.4.00005-ABJ000711	Sertipikat
129	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Karang Agung 2015/08.05.07.03.4.00001	Sertipikat
130	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Mutar Alam 2015/08.05.07.04.4.00001	Sertipikat
131	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Sumber Alam	Belum Ada Bukti Kepemilikan
132	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Tambak Jaya 2003/08.05.01.28.1.00029	Sertipikat
133	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Tanjung Raya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
134	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Fajar Bulan 2010/08050701300012	Sertipikat
135	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Sukananti 2010/08050709400001	Sertipikat
136	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Sukananti	Belum Ada Bukti Kepemilikan
137	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Sukaraja way tenong 2015/08050707400001	Sertipikat
138	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Semarang Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
139	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Sidodadi, Way Tenong	Belum Ada Bukti Kepemilikan
140	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Sri Menanti 2023/08.05.19.06.4.00002-ABH639741	Sertipikat
141	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 2 Sekincau 2003/08050806400001	Sertipikat
142	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Tigajaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
143	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Waspada	Belum Ada Bukti Kepemilikan
144	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Sekincau 2023/08.05.08.05.4.00012-ABH639728	Sertipikat
145	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Giham Suka Maju 2010/08050802300002	Sertipikat
146	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Sukajaya 2020/08.05.21.07.4.00001	Sertipikat
147	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Sidomulyo 2020/08.05.21.04.4.00001	Sertipikat
148	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Pahayu Jaya 2023/08.05.21.01.4.00006-ABH639712	Sertipikat
149	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Suka Mulya 2020/08.05.21.10.4.00001	Sertipikat
150	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Marga Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
151	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Kejadian 2010/08050502300002	Sertipikat
152	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Hujung 208.05.05.07.4.00001	Sertipikat
153	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Sukarame 2020/08.05.05.05.4.00001	Sertipikat
154	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Turgak 2023/08.05.05.04.4.00002-ABH639343	Sertipikat
155	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Bumi Agung 08.05.05.03.4.00001	Sertipikat
156	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Suka Makmur 2023/08.05.05.14.4.00007-ABH639717	Sertipikat
157	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 Batu Ketulis	Belum Ada Bukti Kepemilikan

No.	OPD	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Bukti Kepemilikan
158	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Campang Tiga 2023/08.05.20.20.4.00001	Sertipikat
159	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Way Ngison 20200805200740000	Sertipikat
160	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Kubu Liku Jaya/ 08.05.20.08.4.00001	Sertipikat
161	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Batu Nebayan 2020/08.05.20.02.4.00008	Sertipikat
162	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 Batu Brak 1994/0805021400005	Sertipikat
163	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Sukabumi 2010/08051006400004	Sertipikat
164	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Canggu 2020/08.05.10.07.4.00004	Sertipikat
165	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Kegeringan 2021/08.05.10.03.4.00003	Sertipikat
166	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Sukaraja Batu Brak 2015/08.05.10.05.4.00001	Sertipikat
167	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Pekon Balak 2020/08.05.10.05.4.00004	Sertipikat
168	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Kota Besi 2023/08.05.10.08.4.00004-AEH039744	Sertipikat
169	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Kubu Perahu 2006/08050402400030	Sertipikat
170	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Wates 2020/08.05.04.08.4.00018	Sertipikat
171	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Gunung Sugih 1995/08.05.03.08.1.00052	Sertipikat
172	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Sedampah Indah 2020/08.05.04.12.4.00002	Sertipikat
173	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Liwa 2006/0805040210009	Sertipikat
174	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Sukarami 2023/08.05.04.13.4.00001-AEH039752	Sertipikat
175	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Sukarame 1997/08.05.03.15.1.00006	Sertipikat
176	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Sebarus 2006/08050405400007	Sertipikat
177	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Way Mengaku 2006/08050403400005	Sertipikat
178	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SKB LAMPUNG BARAT 2020/08.05.04.06.4.00004	Sertipikat
179	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 Sukau 2020/08.05.11.03.4.00006	Sertipikat
180	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Bandar Baru 2020/08.05.11.11.4.00002	Sertipikat
181	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Buay Nyerupa 2020/08.05.11.03.4.00005	Sertipikat
182	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Tapak Siring 2020/08.05.11.04.4.00008	Sertipikat
183	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Hanakau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
184	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Heni Arong 2023/08.05.23.02.4.00002-AEH039753	Sertipikat
185	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 SD Ujung Rembun 2020/08.05.23.08.4.00002	Sertipikat
186	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Tambalang	Belum Ada Bukti Kepemilikan
187	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Hantatai 2023/08.05.22.05.4.00005-AEH039749	Sertipikat
188	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Bandar Agung 2023/08.05.22.03.4.00003-AEH039751	Sertipikat
189	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Tri Mekar Jaya 2023/08.05.22.10.4.00001-AEH039743	Sertipikat
190	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Suka Jadi 2023/08.05.22.01.4.00002-AEL000651	Sertipikat
191	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Suka Maju	Belum Ada Bukti Kepemilikan
192	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Sumber Agung 2010/08050506300002	Sertipikat
193	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Suka Marga 2015/08.05.05.01.4.00001	Sertipikat
194	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Tugu Ratu 2020/08.05.05.03.4.00001	Sertipikat
195	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Suka Mulya Sukau 2020/08051110400001	Sertipikat
196	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.02.02.004	Tanah Kosong Yang Tidak Diusahakan	Tanah Eks SDN 3 Pagar Dewa	Belum Ada Bukti Kepemilikan
197	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Bangunan Sekretariat Kwarcab 2006/08050401400025	Sertipikat
198	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 2 Gedung Surian 2004/08050811400001	Sertipikat
199	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Sukarajo	Belum Ada Bukti Kepemilikan
200	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Sumber Alam	Belum Ada Bukti Kepemilikan
201	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	SDN Way Sulah	Belum Ada Bukti Kepemilikan
202	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TK Pertiwi 2006/08.05.04.01.4.00014	Sertipikat
203	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	SDN Negeri Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
204	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Bedudu 2023/08.05.05.05.4.00004-AEH039748	Sertipikat
205	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN Satu Atap 1 Lombok Seminung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
206	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN Satu Atap 2 Pagar Dewa	Belum Ada Bukti Kepemilikan
207	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	SDN Padang Dalom 2020/08050402400004	Sertipikat
208	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 4 Tugu Sari 2020/08050011400013(SDN 5 Simpang Sari)	Sertipikat
209	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Way Petai 2020/08050603400012	Sertipikat
210	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 4 Way Petai	Belum Ada Bukti Kepemilikan
211	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 4 Fajar Bulan 2010/08050701300015	Sertipikat
212	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 4 Padang Tambak	Belum Ada Bukti Kepemilikan
213	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 Air Hitam 2023/08.05.19.07.4.00002-AEL000552	Sertipikat
214	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Argomulyo 2015/08052001400001	Sertipikat
215	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 3 Liwa 2007/08050403400037	Sertipikat
216	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 4 Liwa 2006/08050401400023	Sertipikat
217	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Way Mengaku 2021/08050403400044	Sertipikat
218	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 Way Empulau Ulu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
219	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.02.02.004	Tanah Kosong Yang Tidak Diusahakan	Tanah Eks SDN 4 Pagar Dewa	Belum Ada Bukti Kepemilikan
220	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Pahpukan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
221	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN Satu Atap 2 Sukau 2020/08051111400001	Sertipikat
222	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 2 Kebun Tebu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
223	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN Satu Atap 1 Sukau 2020/08051104400003	Sertipikat
224	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 2 Air Hitam 2023/08.05.19.05.4.00003-AEH039836	Sertipikat
225	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TKN 1 Batu Ketulis	Belum Ada Bukti Kepemilikan
226	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	SDN Sumber Agung / 08050904300006	Sertipikat
227	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Cipta Mulya 2023/08.05.18.08.4.00001-AEH039831	Sertipikat
228	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 2 Sukau 2020/08051113400002	Sertipikat
229	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Belum Ada Bukti Kepemilikan
230	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Padang Cahya 2020/08050404400006	Sertipikat
231	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Negeri Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
232	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 3 Sukau 2020/08051105400003	Sertipikat
233	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN Satu Atap 3 Lombok Seminung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
234	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 3 Way Tenong 2020/08050708400003	Sertipikat
235	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN Satu Atap 1 Way Tenong	Belum Ada Bukti Kepemilikan
236	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TKN 1 Sekincau 2021/08050803400005	Sertipikat
237	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 3 Bandar Negeri Suoh	Belum Ada Bukti Kepemilikan
238	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TKN 1 Kebun Tebu 2020/08051802400001	Sertipikat
239	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	SDN 2 Pekon Balak	Belum Ada Bukti Kepemilikan
240	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TKN 1 Sukau 2021/08051111400004	Sertipikat

No.	OPD	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Bukti Kepemilikan
241	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TKN 1 Way Tenong 2020080507071400007	Sertipikat
242	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TKN 1 Sumberjaya 2023/08.05.06.11.4.00017-ABH620715	Sertipikat
243	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TKN 1 Suoh	Belum Ada Bukti Kepemilikan
244	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Tugu Sari	Belum Ada Bukti Kepemilikan
245	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TKN 1 Lumbok Seminung 2020080523071400002	Sertipikat
246	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TKN 1 Batabu 2020080505071400010	Sertipikat
247	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TKN 1 Bandar Negeri Suoh 2023/08.05.22.01.4.00001-ABH620833	Sertipikat
248	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	SDN Muara Baru	Belum Ada Bukti Kepemilikan
249	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	SDN Tebu Liuh	Belum Ada Bukti Kepemilikan
250	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	SMPN Satu Atap 1 Lumbok Seminung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
251	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Karang Agung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
252	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Tebu Pering Raya 2021/0805111340001	Sertipikat
253	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Kali Pasir	Belum Ada Bukti Kepemilikan
254	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Kesugihan 2020080521022400002	Sertipikat
255	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 4 Liwa 2019080504040400022	Sertipikat
256	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TK Negeri 1 Pagar Dewa 2021/08052102400003	Sertipikat
257	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TK Negeri 1 Gedung Surian 2020080515034000003	Sertipikat
258	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Tapak Siring (ds Jauh)Jalan Desa, Desa Tapak Siring, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
259	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 2 SukajadiJalan Desa, Desa Sukajadi, Kec. Bandar Negeri Suoh, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
260	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Banding Agung SuohJalan Sukabumi Sanggi, Desa Banding Agung, Kec. Suoh, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
261	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Sidodadi/Pagar Dewa 2020/08.05.21.05.4.00002Jalan Desa, Desa Sidodadi, Kec. Pagar Dewa, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
262	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 2 Batu Ketulis 2023/08.05.20.01.4.00002-ABH620724Jalan Lintas Srongit Argomulyo, Desa Argomulyo, Kec. Batu Ketulis, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
263	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 3 Buay Nyerupa 2010/0805130300005Jalan Raya Liwa Muara Dua, Desa Buay Nyerupa Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
264	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Atar Bawang 1999/08.05.02.26.7.00001Jalan Lintas Pekon Atar Bawang, Desa Atar Bawang, Kec. Batu Ketulis, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
265	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Fajar Agung 2020/0805051340001Jalan Lintas Bamasi-Fajar Agung, Desa Fajar Agung, Kec. Batabu, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
266	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Negeri RatuJalan Bawang Bakung, Desa Negeri Ratu, Kec. Batu Brak, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
267	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Bandar BaruJalan Sukajadi-Bandar Baru, Desa Bandar Baru, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
268	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Tawan Suka Mulya 2020/08.05.23.10.4.00001Jalan Seputih Lubuh, Desa Tawan Suka Mulya Kec. Lumbok Seminung, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
269	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN 1 Suka Banjar 2010/0805110030001Jalan Keramat Dangi, Desa Suka Banjar, Kec. Lumbok Seminung, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
270	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 1 BN Suoh 2006/0805050740001Jalan Raya Pekon Bandar Agung, Desa Bandar Agung, Kec. Bandar Negeri Suoh, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
271	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 2 BN Suoh 2005/0805050840001Jalan Desa, Desa Bandar Negeri, Kec. Bandar Negeri Suoh, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
272	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Gunung RatuJalan Wisata Suoh-Gunung Ratu, Desa Gunung Ratu, Kec. Suoh, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
273	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Palang MerahJalan Desa, Desa Palang Merah, Kec. Bandar Negeri Suoh, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
274	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 2 Pagar Dewa 2020/08.05.21.01.4.00003Jalan Simpang Bunglir, Desa Pahayu Jaya, Kec. Pagar Dewa, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
275	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Ujung 2020/0805230840001Jalan Lumbok-Heni Arong, Desa Ujung, Kec. Lumbok Seminung, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
276	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Ex SMAN 2 Sumber JayaJalan Raya Tribudi Syukur, Desa Muara Jaya 2, Kec. Kebun Tebu, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
277	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 3 Kebun TebuJalan Talang Agusnan, Desa Muara Jaya I, Kec. Kebun Tebu, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
278	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SDN 1 Muara Jaya 1 2008/08.05.26.04.3.0001Jalan Desa, Desa Muara Jaya I, Kec. Kebun Tebu, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
279	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Rumah Dinas Guru SDN Sukabumi 2010/08.05.10.06.4.00002Jalan Way Sabang, Desa Sukabumi, Kec. Batu Brak, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
280	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Perluasan SDN 3 Way Petai 2020/08.05.05.03.4.00012Jalan Selingkul, Desa Way Petai, Kec. Sumber Jaya, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
281	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMPN Satu Atap 1 Pagar Dewa 2020/08.05.21.04.4.00003Jalan Talang Jaya, Desa Sidomulyo, Kec. Pagar Dewa, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
282	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	TK Negeri 2 SukauJalan Mawar Pemasaran, Desa Tanjung Raya, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
283	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SDN Negeri Atar KuwauJalan Lingkungan, Desa Atar Kuwau, Kec. Batu Ketulis, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
284	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMP ROWOREJO SUOH	Belum Ada Bukti Kepemilikan
285	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN 3 Sumber Jaya 2023/08.05.02.10.4.00011-ABH620707	Sertipikat
286	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Perluasan SMPN 2 Batu Ketulis 2023/08.05.20.01.4.00003-ABH620226	Sertipikat
287	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMPN Satap 1 Batu Brak 2021/08.05.04.17.4.00004-ABJ008653	Sertipikat
288	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SKB Sumber Jaya	Hibah
289	Dinas Pendidikan	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Perumahan Guru SDN 2 Tapak Siring	Belum Ada Bukti Kepemilikan
290	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.010	Tanah Jembatan	Jembatan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
291	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.010	Tanah Jembatan	Jembatan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
292	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Lembiran Jalan dan Jembatan	Stabilisasi Lorong	Belum Ada Bukti Kepemilikan
293	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.007	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Drainase Kepatian Batabu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
294	Dinas PUPR	1.3.1.01.01.05.003	Tanah Bangunan Sarana Olah Raga Terbuka	Sekuting 2013/08.05.04.08.4.00005	Sertipikat
295	Dinas PUPR	1.3.1.01.01.06.001	Tanah Untuk Bangunan Masjid	Sekuting 2007/08.05.04.09.4.00001	Sertipikat
296	Dinas PUPR	1.3.1.01.01.06.001	Tanah Untuk Bangunan Masjid	Sekuting	Belum Ada Bukti Kepemilikan
297	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.007	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Pembangunan Drainase	Belum Ada Bukti Kepemilikan
298	Dinas PUPR	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	SMP Sekuting Terpadu 2019080504090400016	Sertipikat
299	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Jalan	Jalan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
300	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.10.001	Pengadaan Tanah SPAM IKK	Way Tenong	Belum Ada Bukti Kepemilikan
301	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Sukabumi - Kembahang	Belum Ada Bukti Kepemilikan
302	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Lingkar Kantor Camat Batu Brak	Belum Ada Bukti Kepemilikan
303	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Kota Besi - Sukabumi	Belum Ada Bukti Kepemilikan
304	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Lingkar Kota Liwa	Belum Ada Bukti Kepemilikan
305	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Ruas jalan	Simpang Sordang - Sentang 2023/08.05.04.03.4.000047-ABJ006506; 08.05.04.03.4.00049-ABJ027566	Sertipikat

No.	OPD	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Bukti Kepemilikan
306	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Wates - Komplek Korpri	Belum Ada Bukti Kepemilikan
307	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Sebarus - Empulau Ulu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
308	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Sebarus - Padang Dalom	Belum Ada Bukti Kepemilikan
309	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Penabangan - Sukarame	Belum Ada Bukti Kepemilikan
310	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Gunung Sugih - Sukamarga	Belum Ada Bukti Kepemilikan
311	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Way Mengaku - Komplek Perumahan Pemda 2023/08.05.04.03.4.00048-ABJ300953, 08.05.04.02.4.00032-ABJ300918	Sertipikat
312	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Way Mengaku - Tanah Ertacht 2023/08.05.04.03.4.00048-ABJ300937	Sertipikat
313	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Padang Dalom - Sekading	Belum Ada Bukti Kepemilikan
314	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Sukarame - Gunung 2023/08.05.04.10.4.00002-ABJ300527, 08.05.04.11.4.00005-ABJ300526	Sertipikat
315	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Simpang Sebat - Sukarame 2023/08.05.04.10.4.00003-ABJ300525, 2024/08.05.11.01.4.00015-ABJ300524	Sertipikat
316	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Pekon Balak - Sedampah	Belum Ada Bukti Kepemilikan
317	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Liwa - Hanakau 2023/08.05.04.01.4.00036-ABJ300508, 08.05.11.02.4.00003-ABJ300518, 2024/08.05.11.02.4.00003-ABJ300520	Sertipikat
318	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Pemuka Raya - Way Mengai 2024/08.05.11.01.4.00004-ABJ327610	Sertipikat
319	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Lingkar Kantor Camat Sukau 2023/08.05.11.11.4.00005-ABJ300528	Sertipikat
320	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Simpang Sebat - Sedampah	Belum Ada Bukti Kepemilikan
321	Dinas PUPR	1.3.1.01.01.04.006.	Tanah Bangunan Puskesmas/Pusta/Pospindu	Posta Tambak Jaya 2020/08250/0040001	Sertipikat
322	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.10.001.	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Air Bersih/Air Baku	Reservoir Air Bersih BNS	Belum Ada Bukti Kepemilikan
323	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Lingkar Pekon Fajar Agung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
324	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Sukananti - Sidomulmur 2023/08.05.07.08.4.00009-ABJ307421, 08.05.07.05.4.00003-ABJ307422, 08.05.07.08.4.00008-ABJ327598, 08.05.07.06.4.00002-ABJ302414	Sertipikat
325	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Sukaratu - Rangau 2023/08.05.07.07.4.00010-ABJ300891	Sertipikat
326	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Sukaratu - Tambak Jaya 2023/08.05.07.07.4.00009-ABJ300894, 08.05.07.08.4.00007-ABJ302419	Sertipikat
327	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Kurang Agung - Rangau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
328	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Lingkar Pasar Semen - SMAN 1 Way Tenong 2023/08.05.07.01.4.00023-ABJ300885, 08.05.07.01.4.00021-ABJ307423	Sertipikat
329	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Lingkar Kantor Camat Way Tenong 2023/08.05.07.04.4.00009-ABJ307420	Sertipikat
330	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Simpang Cenguwan - Mutar Alam	Belum Ada Bukti Kepemilikan
331	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Tambak Jaya - Pesantren 2023/08.05.07.09.4.00002-ABJ327571, 2024/08.05.07.09.4.00004-ABJ327569	Sertipikat
332	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Tanjung Raya - Air Putih	Belum Ada Bukti Kepemilikan
333	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Purabakoma - Rangau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
334	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Tanjung Raya - Padang Tambak 2023/08.05.07.05.4.00004-ABJ300892, 08.05.07.05.4.00005-ABJ300845, 08.05.07.07.4.00011-ABJ300873, 08.05.07.08.4.00006-ABJ307425	Sertipikat
335	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Padang Tambak - Air Panas	Belum Ada Bukti Kepemilikan
336	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Padang Tambak - Cempedak 2024/08.05.07.09.4.00003-ABJ327579, 08.05.07.08.4.00009-ABJ327581	Sertipikat
337	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Sidorejo - Air Putih	Belum Ada Bukti Kepemilikan
338	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Lingkar Pekon Pampangan 2023/08.05.08.01.4.00003-ABJ307417	Sertipikat
339	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Kebun - Gihem 2023/08.05.08.05.4.00015-ABJ300944, 08.05.08.08.4.00013-ABJ300983	Sertipikat
340	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Selencau - Waspada 2023/08.05.08.05.4.00014-ABJ327037, 08.05.08.06.4.00002-ABJ327419	Sertipikat
341	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Tiga Jaya - Waspada 2023/08.05.08.07.4.00003-ABJ327402, 08.05.08.06.4.00002-ABJ327408	Sertipikat
342	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Selencau - Talang Sepakat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
343	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Lingkar Selencau 2023/08.05.08.05.4.00018-ABJ327587	Sertipikat
344	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Gihem Balak - Pampangan 2023/08.05.08.06.4.00013-ABJ300964,08.05.08.01.4.00004-ABJ300995	Sertipikat
345	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Lingkar Pekon Gihem 2023/08.05.08.08.4.00014-ABJ300982	Sertipikat
346	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Tambak Jaya - Selencau 2023/08.05.08.05.4.00019-ABJ300972	Sertipikat
347	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Lingkar Kantor Camat Pagar Dewa	Belum Ada Bukti Kepemilikan
348	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Simpang Luas - Hujung 2023/08.05.20.05.4.00003-ABJ307427, 08.05.05.07.4.00005-ABJ327529	Sertipikat
349	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Lingkar Pekon Kenali 2023/08.05.05.01.4.00014-ABJ307434	Sertipikat
350	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Rumi Agung - Serungkuk 2024/08.05.05.08.4.00004-ABJ327613	Sertipikat
351	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Sukarame - Bedudu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
352	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Kenali - Hujung 2023/08.05.05.01.4.00016-ABJ327407, 08.05.05.06.4.00003-ABJ327424	Sertipikat
353	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Serungkuk - Fajar Agung 2023/08.05.05.08.4.00003-ABJ327405	Sertipikat
354	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Hujung - Suka Makmur	Belum Ada Bukti Kepemilikan
355	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Kenitu - Hujung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
356	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Simpang Kembahang - Negeri Ratu 2023/08.05.10.01.4.00008-ABJ300505, 08.05.10.02.4.00001	Sertipikat
357	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Sukarame - Pahitan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
358	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Kegeringan - Tugak	Belum Ada Bukti Kepemilikan
359	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Simpang Bumbon - Tebo Lokit	Belum Ada Bukti Kepemilikan
360	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Bangunan - Tebo Lokit	Belum Ada Bukti Kepemilikan
361	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Pekon Awi - Kuhong	Belum Ada Bukti Kepemilikan
362	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Sukaboni - Tanjung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
363	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Kegeringan - Sukaboni 2023/08.05.10.06.4.00006-ABJ300521	Sertipikat
364	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Way Mengaku - Komplek Korpri 2024/08.05.04.03.4.00030-ABJ327588	Sertipikat
365	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Way Mengaku - Serungguk	Belum Ada Bukti Kepemilikan
366	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Candik - Rawing	Belum Ada Bukti Kepemilikan
367	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Sukamanga - Negeri Ratu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
368	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Penabaran - Candik	Belum Ada Bukti Kepemilikan
369	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Pasar Liwa - Sebarus 2023/08.05.04.01.4.00023-ABJ327570	Sertipikat
370	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Sebarus - Serungguk	Belum Ada Bukti Kepemilikan
371	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Sebarsoah Indah - Talang Delapan 2023/08.05.04.04.4.00007-ABJ300533	Sertipikat
372	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Serbaya - SMPN 1 Liwa 2024/08.05.04.01.4.00038-ABJ327617	Sertipikat
373	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Sedeng - Air Nanakan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
374	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Sampor - Sedeng	Belum Ada Bukti Kepemilikan

No.	OPD	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Bukti Kepemilikan
375	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Ruas Nyerupo - Jaganiaga 2023/08.05.11.03.4.00009-ABJ300510, 08.05.11.12.4.00001-ABJ300511, 08.05.11.04.4.00010-ABJ300508, 08.05.11.13.4.00004-ABJ300509, 08.05.11.05.4.00004-ABJ300513	Sertipikat
376	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Pagar Dewa - Karet 2023/08.05.11.09.4.00008-ABJ300522, 2024/08.05.11.10.4.00004-ABJ327626	Sertipikat
377	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Ruhway - Jejtel	Belum Ada Bukti Kepemilikan
378	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Ruhway - Sarhum	Belum Ada Bukti Kepemilikan
379	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Jaganiaga - Langkat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
380	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Sukamulya - Perbatasan Oku Selatan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
381	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Pagar Dewa - Jaganiaga 2023/08.05.11.06.4.00006-ABJ300532	Sertipikat
382	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Lingkar Kota Sumber Jaya 2023/08.05.06.11.4.00019-ABJ307415	Sertipikat
383	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Lingkar Bungin - Gunung Terang	Belum Ada Bukti Kepemilikan
384	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Way Pritel - Ogan Jaya 2023/08.05.06.03.4.00014-ABJ300577	Sertipikat
385	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Bodong - Suka Utama 2023/08.05.06.09.4.00008-ABJ300619	Sertipikat
386	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Mutar Alam -Gunung Terang 2023/08.05.07.04.4.00009-ABJ300047, 08.05.07.01.4.00023-ABJ300498,08.05.19.02.4.00005-ABJ327546, 08.05.19.03.4.00003-ABJ300584, 08.05.19.07.4.00003-ABJ300568,08.05.19.04.4.00001-ABJ300698	Sertipikat
387	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Sindang Sita - Talang Bambang	Belum Ada Bukti Kepemilikan
388	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Suka Jaya - Blasungan 2023/08.05.06.09.4.00007-ABJ300970, 08.05.06.10.4.00012-ABJ300968	Sertipikat
389	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Pura Jaya - Muara Jaya 2023/08.05.18.01.4.00006-ABJ300951, 08.05.18.08.4.00002-ABJ300952, 08.05.18.07.4.00011-ABJ300961, 08.05.18.10.4.00003-ABJ327935, 08.05.19.04.4.00001-ABJ300957	Sertipikat
390	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Purawelas - Muarajaya II 2023/08.05.18.02.4.00003-ABJ327572, 2024/08.05.18.02.4.00004-ABJ327815	Sertipikat
391	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Tribudisukur - Muarajaya II 2023/08.05.18.03.4.00006-ABJ307426, 08.05.18.06.4.00008-ABJ327573, 08.05.18.05.4.00003-ABJ300971, 08.05.18.05.4.00002-ABJ300980,08.05.18.05.4.00004-ABJ300990	Sertipikat
392	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Lingkar Pasar Way Petay 2023/08.05.06.03.4.00013-ABJ300915	Sertipikat
393	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Rungau - Pahayu Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
394	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Tribudisukur - Muara Jaya 2023/08.05.18.03.4.00005-ABJ307430, 08.05.18.01.4.00007-ABJ327568	Sertipikat
395	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Ciptamulya - Perajaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
396	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Purawelas - Bibi	Belum Ada Bukti Kepemilikan
397	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Dadapan - Talang Panjang 2023/08.05.15.01.4.00001-ABJ307418	Sertipikat
398	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Trimulyo - Talang Panjang 2024/08.05.15.01.4.00003-ABJ327811, 08.05.15.01.4.00004-ABJ327814	Sertipikat
399	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Gunung Terang - Trimulyo 2024/08.05.19.06.4.00004-ABJ327585, 08.05.15.02.4.00003-ABJ327612, 08.05.15.01.4.00002-ABJ327629	Sertipikat
400	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Simpang Dekayan - Mekar Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
401	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Gedung Surian - Ciptawaras 2024/08.05.15.02.4.00003-ABJ327586, 08.05.15.02.4.00002-ABJ327587	Sertipikat
402	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Puramekar - Mekar Jaya 2 2023/08.05.15.05.4.00002-ABJ327412, 08.05.15.03.4.00006-ABJ307433	Sertipikat
403	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Sukajadi - Sidodamai	Belum Ada Bukti Kepemilikan
404	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Gunung Terang - Rigis Jaya 2023/08.05.19.08.4.00001-ABJ300983	Sertipikat
405	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Puramekar - Mekar Jaya 1 2023/08.05.15.03.4.00008-ABJ307418, 08.05.15.05.4.00005-ABJ307429	Sertipikat
406	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Mekar Jaya - Ciptawaras 2024/08.05.15.05.4.00003-ABJ327619	Sertipikat
407	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Gedung Surian - Dadapan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
408	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Sidodadi - Menggara 2023/08.05.19.01.4.00002-ABJ300997, 08.05.19.10.4.00001-ABJ301038	Sertipikat
409	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Puramekar - Air Ringkih 2023/08.05.15.03.4.00008-ABJ300968	Sertipikat
410	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Air Hitam - Sidomulyono	Belum Ada Bukti Kepemilikan
411	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Gunung Jaya - Sumber Alam 2023/08.05.19.02.4.00004-ABJ300938, 08.05.19.03.4.00001-ABJ300979	Sertipikat
412	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Air Hitam - Sumber Alam	Belum Ada Bukti Kepemilikan
413	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Sumber Alam - Trimulyo	Belum Ada Bukti Kepemilikan
414	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Simmekanti - Nembak	Belum Ada Bukti Kepemilikan
415	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Way Kabul - Simmekanti	Belum Ada Bukti Kepemilikan
416	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Simpang Cham - Pahayu Jaya 2023/08.05.08.08.4.00011-ABJ300980	Sertipikat
417	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Simpang Gelar (Gear Wangi) - Waspada 2023/08.05.06.06.4.00001-ABJ327403	Sertipikat
418	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Selencau - Tipajaya 2023/08.05.03.05.4.00017-ABJ327532, 08.05.08.07.4.00002-ABJ307424	Sertipikat
419	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Pampangan - Seringit	Belum Ada Bukti Kepemilikan
420	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Pahayu Jaya - Sidodadi	Belum Ada Bukti Kepemilikan
421	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Seringit (SidomuAyu) - Blasungan 2023/08.05.21.05.4.00005-ABJ307431, 08.05.21.02.4.00006-ABJ307432	Sertipikat
422	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Pahayu Jaya - Blasungan , 2023/08.05.21.01.4.00005-ABJ327540, 08.05.21.03.4.00002-ABJ307425, 08.05.21.06.4.00002-ABJ327411	Sertipikat
423	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Batu Kebayan - Waspada	Belum Ada Bukti Kepemilikan
424	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Luas - Argomulyo 2023/08.05.20.05.4.00002-ABJ307428, 08.05.20.04.4.00002-ABJ327544, 08.05.20.01.4.00004-ABJ327536	Sertipikat
425	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Way Ngisoe - Waspada 2023/08.05.20.07.4.00002-ABJ300996	Sertipikat
426	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Seringit - Argomulyo	Belum Ada Bukti Kepemilikan
427	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Kubulku - Pampangan 2023/08.05.20.08.4.00006-ABJ300945, 2024/08.05.20.08.4.00007-ABJ327308	Sertipikat
428	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Way Ngisoe - Pahitan 2023/08.05.20.07.4.00003-ABJ300974	Sertipikat
429	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Campang - Campang Tiga	Belum Ada Bukti Kepemilikan
430	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Argomulyo - Mukin Tulang 2023/08.05.20.01.4.00006-ABJ327408	Sertipikat
431	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Atar Balung - Tetulandi	Belum Ada Bukti Kepemilikan
432	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Kenali - Kembahang 2023/08.05.05.01.4.00015-ABJ300516, 08.05.05.03.4.00002-ABJ300514, 08.05.05.04.4.00003-ABJ300513, 08.05.10.09.4.00003-ABJ300512, 08.05.10.01.4.00007-ABJ300515, 08.05.06.03.4.00003-ABJ327808	Sertipikat
433	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Sekuting - Sukoarame	Belum Ada Bukti Kepemilikan
434	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Tebapring - Sedawnyuk 2023/08.05.11.13.4.00002-ABJ300517	Sertipikat
435	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Buay Nyerupa - Bandar Baru	Belum Ada Bukti Kepemilikan
436	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Lumbok - Sukabanjar 2023/08.05.23.09.4.00003-ABJ300506, 08.05.23.03.4.00006-ABJ300504	Sertipikat
437	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Lumbok - Hani Harong 2024/08.05.23.08.4.00003-ABJ327618	Sertipikat

No.	OPD	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Bukti Kepemilikan
438	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Pagar Dewa - Lumbok 2023/08.05.11.09.4.00007-AB/J000537, 08.05.11.05.4.00005-AB/J000535, 08.05.11.13.4.00003-AB/J000534, 08.05.23.06.4.00001-AB/J000503, 08.05.23.07.4.00004-AB/J000530, 08.05.23.01.4.00003-AB/J000501, 2024/08.05.23.04.4.00002-AB/J020913	Sertipikat
439	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Sukabanjar - Ujung Rembun	Belum Ada Bukti Kepemilikan
440	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Ling. Wisata Lumbok	Belum Ada Bukti Kepemilikan
441	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Lingkar Way Heni 2023/08.05.22.06.4.00004-AB/J000555	Sertipikat
442	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Way Heni - Sukapadi 2023/08.05.22.08.4.0005-AB/J027547, 08.05.22.01.4.00003-AB/J027548	Sertipikat
443	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Sukapadi - Banding Agung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
444	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Sukamarga - Kalibata	Belum Ada Bukti Kepemilikan
445	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Sukamarga - Tugu Ratu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
446	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Srimulyo - Bandar Agung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
447	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Banding Agung - Akses SMKN Suoh	Belum Ada Bukti Kepemilikan
448	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Sukapadi - Ringin Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
449	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan	Way Heni - Sukamarga 2023/08.05.22.05.4.00006-AB/J027549	Sertipikat
450	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.010.	Tanah Jembatan Way Air	Dinas PUPR	Belum Ada Bukti Kepemilikan
451	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Pema Bidang	Pekon Sidomakmur Kec. Air Hitam	Belum Ada Bukti Kepemilikan
452	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Sukamenanti	Pekon Srimenanti Kec. Air Hitam	Belum Ada Bukti Kepemilikan
453	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Sebabay	Pekon Way Empulu Ulu Kec. Balik Bukit	Belum Ada Bukti Kepemilikan
454	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Sebarus	Pekon Sebarus Kec. Balik Bukit	Belum Ada Bukti Kepemilikan
455	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Lampai Tengah	Pekon Way Mengaku Kec. Balik Bukit	Belum Ada Bukti Kepemilikan
456	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Empulau Ulu	Pekon Way Empulu Ulu Kec. Balik Bukit	Belum Ada Bukti Kepemilikan
457	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Negeri Ratu	Pekon Kembahang Kec. Batu Brak	Belum Ada Bukti Kepemilikan
458	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Laiak/Pulan Petalit	Pekon Kejadian Kec. Belalau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
459	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Bumbon	Pekon Teba Liokh Kec. Batu Brak	Belum Ada Bukti Kepemilikan
460	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Seburas I	Pekon Bumi Agung Kec. Belalau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
461	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Seburas II	Pekon Bumi Agung Kec. Belalau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
462	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Ringkih II	Pekon Purawiwitan Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
463	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Ringkih III	Pekon Purawiwitan Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
464	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Lempaung I	Pekon Gedung Surian Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
465	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Ringkih I	Pekon Purawiwitan Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
466	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Lingkaran II	Pekon Cipta Waras Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
467	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Pakuan II	Pekon Purawiwitan Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
468	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Cabang III	Pekon Mekar Jaya Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
469	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Pakuan	Pekon Purawiwitan Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
470	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Pauh II	Pekon Gedung Surian Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
471	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Lempaung II	Pekon Gedung Surian Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
472	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Durian	Pekon Gedung Surian Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
473	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Tenong PWT	Pekon Gedung Surian Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
474	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Puro Jaya II	Pekon Cipta Mulya Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
475	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Muara Jaya I, II	Pekon Sinar Luas Kec. Kebun Tebu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
476	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Puro Jaya	Pekon Purajaya Kec. Kebun Tebu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
477	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Cilamaya	Pekon Tri Budisukur Kec. Kebun Tebu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
478	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Sawah Lega	Pekon Gedung Surian Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
479	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Besai II	Pekon Muara Jaya II Kec. Kebun Tebu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
480	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Anak Besai I	Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
481	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Bumi Asih	Pekon Tri Budisukur Kec. Kebun Tebu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
482	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Tri Budi Sukur	Pekon Tri Budisukur Kec. Kebun Tebu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
483	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Purawiwitan	Pekon Sinar Luas Kec. Kebun Tebu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
484	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Sindang Raja	Pekon Tugu Mulya Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
485	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Gunung Raya	Pekon Muara Baru Kec. Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
486	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Sebukau I	Pekon Lumbok Timur Kec. Lumbok Seminung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
487	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Pepuh I	Pekon Lumbok Timur Kec. Lumbok Seminung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
488	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Pama Ujang	Pekon Suka Banjar Kec. Lumbok Seminung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
489	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Kotahok	Pekon Kagungan Kec. Lumbok Seminung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
490	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Pepuh II	Pekon Lumbok Timur Kec. Lumbok Seminung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
491	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Tandok	Pekon Lumbok Kec. Lumbok Seminung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
492	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Bongkerai	Pekon Jaga Raga Kec. Sukau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
493	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Uluhan Liwa	Pekon Tapak Siring Kec. Sukau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
494	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Penyelan	Pekon Buay Nyerupa Kec. Sukau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
495	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Lilak	Pekon Sukamulya Kec. Sukau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
496	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Pelakat	Pekon Buay Nyerupa Kec. Sukau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
497	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Kawilan Bandung	Pekon Tapak Siring Kec. Sukau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
498	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Uluhan II	Pekon Bumi Jawa Kec. Sukau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
499	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Lesan Menyet	Pekon Simpang Sari Kec. Sumber Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
500	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Selingkut	Pekon Way Petai Kec. Sumber Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
501	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Beton	Pekon Tugu Sari Kec. Sumber Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
502	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Tenam Bandung	Pekon Sukajaya Kec. Sumber Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
503	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Petai	Pekon Way Petai Kec. Sumber Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
504	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Sukajaya I	Pekon Sukajaya Kec. Sumber Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
505	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Sindang Pagar	Pekon Sindang Pagar, Kec. Sumber Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
506	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Nungku	Pekon Way Petai Kec. Sumber Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
507	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Jati Wangi	Pekon Way Petai Kec. Sumber Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
508	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Campang Lemau	Pekon Sukananti Kec. Way Tenong	Belum Ada Bukti Kepemilikan
509	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Campedak	Pekon Padang Tambak Kec. Way Tenong	Belum Ada Bukti Kepemilikan
510	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Serut	Pekon Tanjung Raya Kec. Way Tenong	Belum Ada Bukti Kepemilikan
511	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Padang Tambak	Pekon Padang Tambak Kec. Way Tenong	Belum Ada Bukti Kepemilikan
512	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi Way Campang Kanan	Pekon Padang Tambak Kec. Way Tenong	Belum Ada Bukti Kepemilikan
513	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Lembaran Jalan dan Jembatan	Stabilisasi Lereng/Jalan Way Robok, Kelurahan Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
514	Dinas PUPR	1.3.1.01.01.04.026.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	Tanah Workshop Dinas PU Bahway/Jalan Desa, Desa Bahway, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
515	Dinas PUPR	1.3.1.01.01.26.003.	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Lainnya	Tanah MAN Internasional (Tanah GOR Ajisaka & Stadion)2010/08.05.04.08.4.00002/Jalan Jend. Sudirman, Desa Watas, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Sertipikat

No.	OPD	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Bukti Kepemilikan
516	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Kumpai	Belum Ada Bukti Kepemilikan
517	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Cengkuan Kelat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
518	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Bentung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
519	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Kuba Pinalia	Belum Ada Bukti Kepemilikan
520	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Sukaresmi II	Belum Ada Bukti Kepemilikan
521	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Ketubun	Belum Ada Bukti Kepemilikan
522	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Limau Kecil	Belum Ada Bukti Kepemilikan
523	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Sukaraja	Belum Ada Bukti Kepemilikan
524	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Muut	Belum Ada Bukti Kepemilikan
525	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Bedudu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
526	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Gelumbun	Belum Ada Bukti Kepemilikan
527	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Lingkaran I	Belum Ada Bukti Kepemilikan
528	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Pauh I	Belum Ada Bukti Kepemilikan
529	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Dingin	Belum Ada Bukti Kepemilikan
530	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Anak Bessy II	Belum Ada Bukti Kepemilikan
531	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Gunung Raya II	Belum Ada Bukti Kepemilikan
532	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Pura Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
533	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Markuk	Belum Ada Bukti Kepemilikan
534	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Kuenbah Usuhan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
535	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Sepulau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
536	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Tanjung Raya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
537	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Tapak Siring	Belum Ada Bukti Kepemilikan
538	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Sukajaya II	Belum Ada Bukti Kepemilikan
539	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Ogan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
540	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Tabang Bandung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
541	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Tabang Bandung II	Belum Ada Bukti Kepemilikan
542	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Selasangan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
543	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Campang Kiri	Belum Ada Bukti Kepemilikan
544	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Kabul I	Belum Ada Bukti Kepemilikan
545	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Fajar Bulan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
546	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Cangkuan I	Belum Ada Bukti Kepemilikan
547	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Kabul II	Belum Ada Bukti Kepemilikan
548	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Cangkuan II	Belum Ada Bukti Kepemilikan
549	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Gadingan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
550	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Air Pudi	Belum Ada Bukti Kepemilikan
551	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Kabul II	Belum Ada Bukti Kepemilikan
552	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Campang Kanan Kecil	Belum Ada Bukti Kepemilikan
553	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Sidumulyo	Belum Ada Bukti Kepemilikan
554	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Semangka Hantatai	Belum Ada Bukti Kepemilikan
555	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Semangka	Belum Ada Bukti Kepemilikan
556	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Sitimulyo	Belum Ada Bukti Kepemilikan
557	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Haru Sekunyit	Belum Ada Bukti Kepemilikan
558	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Gunung Sari	Belum Ada Bukti Kepemilikan
559	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Haru I	Belum Ada Bukti Kepemilikan
560	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Herki	Belum Ada Bukti Kepemilikan
561	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Mega I	Belum Ada Bukti Kepemilikan
562	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Hantatai II	Belum Ada Bukti Kepemilikan
563	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Hantatai I	Belum Ada Bukti Kepemilikan
564	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Kenung I	Belum Ada Bukti Kepemilikan
565	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Kenung II	Belum Ada Bukti Kepemilikan
566	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Pedak Cina	Belum Ada Bukti Kepemilikan
567	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Jelatang	Belum Ada Bukti Kepemilikan
568	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Kak Bening	Belum Ada Bukti Kepemilikan
569	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Kejafan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
570	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Bawang Ujung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
571	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Samang	Belum Ada Bukti Kepemilikan
572	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Sukamanga	Belum Ada Bukti Kepemilikan
573	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Tulang Gelanda	Belum Ada Bukti Kepemilikan
574	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Sumber Agung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
575	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Sukih	Belum Ada Bukti Kepemilikan
576	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Rowo Rejo	Belum Ada Bukti Kepemilikan
577	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Tembelang	Belum Ada Bukti Kepemilikan
578	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Gilum	Belum Ada Bukti Kepemilikan
579	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Pahasu Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
580	Dinas PUPR	1.3.1.01.03.08.001.	Tanah Irigasi	Way Luas	Belum Ada Bukti Kepemilikan
581	Disporia	1.3.1.01.03.13.003.	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Rest Area Puncak Sumber Jaya/08.05.01.21.4.00001	Sertipikat
582	Disporia	1.3.1.01.01.02.006.	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan	Wisata Danau Hanau 2003/08.05.11.07.2.00001	Sertipikat
583	Disporia	1.3.1.01.03.13.003.	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Arung Jeram 2002/08.05.01.29.4.00005	Sertipikat
584	Disporia	1.3.1.01.03.01.014.	Tanah Lapangan Cross	Lapangan Cross	Belum Ada Bukti Kepemilikan
585	Disporia	1.3.1.01.03.13.003.	Tanah Untuk Taman Lainnya	Tanah Destinasi Wisata Bukit Balawang Bakung/Udan Desa, Desa Negeri Ratu, Kec. Batu Brak, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
586	Disporia	1.3.1.01.03.13.003.	Tanah Untuk Taman Lainnya	Tanah Destinasi Wisata Curup Cengkawan/Udan Desa, Desa Way Petai, Kec. Sumber Jaya, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
587	Disporia	1.3.1.01.03.13.003.	Tanah Untuk Taman Lainnya	Tanah Destinasi Wisata Kred Area/Udan Raya Laas, Desa Sidoharjo Pagar, Kec. Sumber Jaya, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
588	Disporia	1.3.1.01.01.02.006.	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan	Wisata Lombok	Belum Ada Bukti Kepemilikan
589	Disporia	1.3.1.01.01.02.006.	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan	Bangunan Wisma Sinday Lapai 2006/08.05.04.01.4.00026	Sertipikat
590	Disporia	1.3.1.01.01.02.006.	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan	Pengembangan Wisma Sinday Lapai 2006/08.05.04.01.4.00026	Sertipikat
591	Disporia	1.3.1.01.01.02.006.	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan	Kawasan Wisata Terpadu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
592	Disporia	1.3.1.01.01.02.006.	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan	Lombok Seminung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
593	Disporia	1.3.1.01.03.01.014.	Tanah Lapangan Cross	Pertusan Motor Cross	Belum Ada Bukti Kepemilikan
594	Disporia	1.3.1.01.01.01.002.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Eks Rumah Dinas Camat Balik Bukit	Belum Ada Bukti Kepemilikan
595	Disporia	1.3.1.01.01.01.002.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Pertusan Eks Rumah Dinas Camat Balik Bukit	Belum Ada Bukti Kepemilikan
596	Sat Pol PP	1.3.1.01.01.04.018.	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	Bangunan Pos Terpadu 2004/08051104/0003	Sertipikat
597	Sat Pol PP	1.3.1.01.01.04.018.	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	Belaku	Belum Ada Bukti Kepemilikan

No.	OPD	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Bukti Kepemilikan
598	DKP	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Gedung Kantor DKP/Jalan Piere Tendean, Kelurahan Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
599	Dinas TPH	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Gedung Kantor BPP Way Tenong	Belum Ada Bukti Kepemilikan
600	Dinas TPH	1.3.1.01.02.03.001.	Tanah Kebun Entres Giham Bakti	Giham Bakti Kecamatan Sekincau	Hibah
601	Dinas TPH	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Gedung Kantor BPP	Balik Bukit	Belum Ada Bukti Kepemilikan
602	Dinas TPH	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Gedung Kantor BPP	Sukau/Jalan Pekon Gedung, Desa Buay Nyerupa, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
603	Dinas TPH	1.3.1.01.01.01.002.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Rumah Dinas BPP Balik Bukit/Jalan Piere Tendean, Desa Sebarus, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
604	Dinas TPH	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Gedung Kantor BPP	Pagar Dewa/Desa Pagar Dewa, Kec. Pagar Dewa, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
605	Dinas TPH	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Gedung Kantor BPP BNS/Jalan Wisata Suoh, Desa Gunung Ratu, Kec. Bandar Negeri Suoh, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
606	Dinas TPH	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Gedung Kantor BPP Gedung Surian/Jalan Raya Pura Mekar, Desa Pura Mekar, Kec. Gedung Surian, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
607	Disbunak	1.3.1.01.02.03.001.	Tanah Kebun Entres Tanjung Raya	Tanjung Raya Kecamatan Sukau	Hibah
608	Disbunak	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Padang Tambak Kecamatan Way Tenong	Hibah
609	Disbunak	1.3.1.01.01.03.024.	Tanah Bangunan Industri Lainnya	Giham Lunik Kecamatan Sekincau	Hibah
610	Disbunak	1.3.1.01.02.03.001.	Tanah Perkebunan Kopi	Kebun	Belum Ada Bukti Kepemilikan
611	Disbunak	1.3.1.01.02.03.001.	Tanah Perkebunan Kopi	Kebun	Belum Ada Bukti Kepemilikan
612	Disbunak	1.3.1.01.01.04.012.	Tanah Bangunan Kandang/Potong Hewan	Rumah Potong Hewan 2006/08.05.04.03.4.00030	Sertipikat
613	Disbunak	1.3.1.01.02.02.002.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan	Lokasi Penanaman Rumput	Belum Ada Bukti Kepemilikan
614	Disbunak	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan Produksi	Tanjung Raya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
615	Disbunak	1.3.1.01.03.07.003.	Tanah Ruas jalan Produksi	Produksi Sembarjaya - Sukapura	Belum Ada Bukti Kepemilikan
616	Dinas Perikanan	1.3.1.01.01.04.013.	Tanah Bangunan Pembibitan	Balai Benih Ikan (BBI) Sumber Jaya 2004/08.05.06.03.4.00006	Sertipikat
617	Dinas Perikanan	1.3.1.01.01.02.008.	Tanah Bangunan Dermaga	Lumbok Seminung/Jalan Taman Sukamulya, Desa Sukabanjar, Kec. Lumbok Seminung, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
618	DLH	1.3.1.01.03.13.003.	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Taman Tugu Selamat datang	Belum Ada Bukti Kepemilikan
619	DLH	1.3.1.01.03.13.003.	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Taman Kota Hanibung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
620	DLH	1.3.1.01.03.13.003.	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Taman PKK	Belum Ada Bukti Kepemilikan
621	DLH	1.3.1.01.03.13.003.	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Taman Median Dua Jalur	Belum Ada Bukti Kepemilikan
622	DLH	1.3.1.01.03.13.003.	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Taman Median Dua Jalur	Belum Ada Bukti Kepemilikan
623	DLH	1.3.1.01.03.13.003.	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Taman Tugu Liwa	Belum Ada Bukti Kepemilikan
624	DLH	1.3.1.01.03.13.003.	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Taman Nomenklatur Selamat datang	Belum Ada Bukti Kepemilikan
625	DLH	1.3.1.01.03.13.003.	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Taman Nomenklatur Taman Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
626	DLH	1.3.1.01.03.13.003.	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Taman Lapangan Merdeka	Belum Ada Bukti Kepemilikan
627	DLH	1.3.1.01.03.13.003.	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Taman Nomenklatur Hanibung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
628	DLH	1.3.1.01.03.13.003.	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	Taman Median Dua Jalur	Belum Ada Bukti Kepemilikan
629	DLH	1.3.1.01.03.03.003.	Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	TPA Batuway 2006/0805041400001	Sertipikat
630	DLH	1.3.1.01.03.03.003.	Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	TPA Sumber Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
631	DLH	1.3.1.01.02.02.002.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan	Perluasan Taman Kota	Belum Ada Bukti Kepemilikan
632	DLH	1.3.1.01.03.03.003.	Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	Perluasan TPA Batuway 2022/08.05.04.11.01713	Sertipikat
633	DLH	1.3.1.01.03.03.003.	Tanah TPA Kubulku	Pekon Kubulku Kec. Batu Ketulis	Belum Ada Bukti Kepemilikan
634	DLH	1.3.1.01.03.03.003.	Tanah TPA Kubulku	Pekon Kubulku Kec. Batu Ketulis/08.05.20.08.4.0004	Sertipikat
635	DLH	1.3.1.01.03.03.003.	Tanah TPA Kubulku	Pekon Kubulku Kec. Batu Ketulis/08.05.20.08.4.0005	Sertipikat
636	DLH	1.3.1.01.03.13.003.	Tanah Untuk Taman Tebing	Tanah Eks Alm Isyad (Taman Hotel Danamo) 2005/08.05.04.01.4.0001/Jalan Raya Liwa, Kel. Pasar Liwa, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
637	DLH	1.3.1.01.03.03.003.	Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	TPA Simpang sari 2006/0805050140001 1	Sertipikat
638	DLH	1.3.1.01.01.04.008.	Tanah Bangunan Laboratorium	Tanah Alat Kualitas Air Secara Kontinyu, Otomatis dan Online (ONLIMO) Di Pekon Kagungan Lumbok Seminung	Hibah
639	DLH	1.3.1.01.01.04.008.	Tanah Bangunan Laboratorium	Tanah Alat Kualitas Air Secara Kontinyu, Otomatis dan Online (ONLIMO) Di Pekon Karang Agung	Hibah
640	Dinsos	1.3.1.01.03.12.001.	Tanah Kuburan Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
641	Dinsos	1.3.1.01.01.04.002.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Gedung Loka Bina Karya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
642	Dishub	1.3.1.01.01.02.007.	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Liwa 2002/0805041400024	Sertipikat
643	Dishub	1.3.1.01.01.02.007.	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Sekincau 2003/0805080540004	Sertipikat
644	Dishub	1.3.1.01.01.04.021.	Tanah Bangunan Gedung Pengujian Kelaikan	Gedung Uji Kendaraan Bermotor	Belum Ada Bukti Kepemilikan
645	Dishub	1.3.1.01.01.02.008.	Tanah Bangunan Dermaga	Kantor Perhubungan Lumbok 2010/08051107300003/Jalan Wisata Lumbok, Desa Kagungan, Kec. Lumbok Seminung, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
646	Diskominfo	1.3.1.01.01.04.019.	Tanah Bangunan Menara Telekomunikasi Seluler BTS	Pekon Pancur Mas Kec. Lumbok Seminung/Jalan Raya Pancur Mas, Desa Pancur Mas, Kec. Lumbok Seminung, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
647	Diskopdag	1.3.1.01.01.02.001.	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Giham 2006/0805080840004	Sertipikat
648	Diskopdag	1.3.1.01.01.01.002.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Rumah Dinas Koperindag	Belum Ada Bukti Kepemilikan
649	Diskopdag	1.3.1.01.01.02.001.	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Inpres Liwa 2005/0805040140021	Sertipikat
650	Diskopdag	1.3.1.01.01.02.001.	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Simpang Sari 2010/0805061630007	Sertipikat
651	Diskopdag	1.3.1.01.01.02.001.	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Senin 2008/0805070130012	Sertipikat
652	Diskopdag	1.3.1.01.01.02.002.	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko	Ruko Way Tenong	Belum Ada Bukti Kepemilikan
653	Diskopdag	1.3.1.01.01.02.002.	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko	Ruko Pasar Kenali 2005/0805020140010	Sertipikat
654	Diskopdag	1.3.1.01.01.02.002.	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko	Perluasan Pasar Liwa 2005/0805040140027	Sertipikat
655	Diskopdag	1.3.1.01.01.02.002.	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko	Ruko Pasar Liwa 2005/0805040140020	Sertipikat
656	Diskopdag	1.3.1.01.01.02.001.	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Sekincau 2004/0805080540008	Sertipikat
657	Diskopdag	1.3.1.01.01.02.001.	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Kenali	Belum Ada Bukti Kepemilikan
658	Diskopdag	1.3.1.01.01.02.001.	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Sabtu Tanjung Raya 2005/0805110140001	Sertipikat
659	Diskopdag	1.3.1.01.01.02.001.	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Pagar Dewa	Belum Ada Bukti Kepemilikan
660	Diskopdag	1.3.1.01.01.02.001.	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Pura Jaya 2023/08.03.15.01.4.00002-AQ1926010	Sertipikat
661	Diskopdag	1.3.1.01.02.02.002.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan	Dekranasda 2022/08.05.04.08.01502/08.05.04.08.01502	Sertipikat
662	Diskopdag	1.3.1.01.01.02.001.	Tanah Bangunan Pasar	Perluasan Pasar Pagar Dewa/Jalan Raya Liwa-Muara Dua, Desa Pagar Dewa, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
663	RSUD Alimuddin Umar	1.3.1.01.01.04.003.	Tanah Bangunan Rumah Sakit	Rumah Sakit 1996/0805030240017	Sertipikat
664	RSUD Alimuddin Umar	1.3.1.01.01.04.003.	Tanah Bangunan Rumah Sakit	Perluasan RSUD Alimuddin Umar	Belum Ada Bukti Kepemilikan
665	Kec. Balik Bukit	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Kecamatan 2006/08.05.04.03.4.00024	Sertipikat
666	Kec. Balik Bukit	1.3.1.01.01.01.001.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Rumah Dinas Camat 2005/08.05.04.02.4.00024	Sertipikat
667	Kec. Belalau	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Camat Belalau 2006/08.05.05.01.4.00008	Sertipikat
668	Kec. Belalau	1.3.1.01.01.01.001.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Rumah Dinas 2006/08.05.05.01.4.00007	Sertipikat
669	Kec. Belalau	1.3.1.01.01.01.002.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Rumah Pegawai	Belum Ada Bukti Kepemilikan
670	Kec. Belalau	1.3.1.01.03.01.005.	Tanah Lapangan Sepak Bola	Lapangan Bola 2006/08.05.05.01.4.00011	Sertipikat
671	Kec. Sumber Jaya	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Camat Sumber Jaya 2006/08.05.06.15.4.00002	Sertipikat
672	Kec. Sumber Jaya	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Camat Lama 2006/08.05.06.11.3.00006	Sertipikat

No.	OPD	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Bukti Kepemilikan
673	Kec. Sumber Jaya	1.3.1.01.01.01.001.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Perumahan Camat/Rumah Camat 2006/08.05.06.15.4.00001	Sertipikat
674	Kec. Sumber Jaya	1.3.1.01.02.07.002.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan	Pekarangan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
675	Kec. Sumber Jaya	1.3.1.01.01.01.004.	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	Perumahan Bandes	Belum Ada Bukti Kepemilikan
676	Kec. Sumber Jaya	1.3.1.01.03.01.005.	Tanah Lapangan Sepak Bola	Lapangan Manunggal 2008/08.05.06.11.3.00005	Sertipikat
677	Kec. Sumber Jaya	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Tugusari Kecamatan Sumber Jaya	Hibah
678	Kec. Sekincau	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Kecamatan Sekincau 2013/08.05.08.01.4.00003	Sertipikat
679	Kec. Sekincau	1.3.1.01.01.01.002.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Rumah Dinas Camat Lama 2013/08050801300007	Sertipikat
680	Kec. Sekincau	1.3.1.01.01.01.002.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Perumahan Kantor Kecamatan Sekincau 2021/08.05.08.08.4.00005Jalan Raya Pampangan, Desa Giham Sukamaju, Kec. Sekincau, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
681	Kec. Way Tenong	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Camat Way Tenong 2006/08.05.07.04.4.00003	Sertipikat
682	Kec. Way Tenong	1.3.1.01.01.02.001.	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Mutar Alam dan Terminal 2006/08.05.07.04.4.00002	Sertipikat
683	Kec. Way Tenong	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	UPTD Mutar Alam Way Tenong 2006/08.05.07.04.4.00003Jalan Poting Marga, Desa Mutar Alam, Kec. Way Tenong, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
684	Kec. Suoh	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor	Belum Ada Bukti Kepemilikan
685	Kec. Batu Brak	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Kecamatan Batu Brak 2008/08.05.10.05.4.00001	Sertipikat
686	Kec. Batu Brak	1.3.1.01.01.01.001.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Rumah Dinas 2006/08.05.10.05.4.00002	Sertipikat
687	Kec. Batu Brak	1.3.1.01.03.01.005.	Tanah Lapangan Sepak Bola	Lapangan Kecamatan/Pekon Balak 2006/08.05.10.05.4.00004	Sertipikat
688	Kec. Batu Brak	1.3.1.01.03.01.005.	Tanah Lapangan Sepak Bola	Lapangan Bola SDN Sukabumi 2010/08.05.10.06.4.00003	Sertipikat
689	Kec. Batu Brak	1.3.1.01.03.01.005.	Tanah Lapangan Sepak Bola	Lapangan Bola SDN I Kembahang	Belum Ada Bukti Kepemilikan
690	Kec. Batu Brak	1.3.1.01.02.02.002.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan	Untuk Kehutanan 2006/08.05.10.05.4.00005	Sertipikat
691	Kec. Sukau	1.3.1.01.01.05.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Kecamatan 2006/08.05.11.03.4.00002	Sertipikat
692	Kec. Sukau	1.3.1.01.01.01.001.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Rumah Dinas 2006/08.05.11.03.4.00003	Sertipikat
693	Kec. Sukau	1.3.1.01.03.01.005.	Tanah Lapangan Sepak Bola	Lapangan Bola 08.05.05.01.4.00011	Sertipikat
694	Kec. Gedung Surian	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor 2010/08.05.15.02.3.00001	Sertipikat
695	Kec. Gedung Surian	1.3.1.01.01.01.001.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Rumah Dinas Camat Gedung Surian 2013/08.05.15.02.3.00002Jalan Desa, Desa Gedung Surian, Kec. Gedung Surian, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
696	Kec. Kebun Tebu	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor 2023/08.05.18.01.4.00002-A8H630704	Sertipikat
697	Kec. Air Hitam	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor 2023/08.05.19.02.4.00003-A8H635718	Sertipikat
698	Kec. Pagar Dewa	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor 2023/08.05.21.02.4.00005-A8H639744	Sertipikat
699	Kec. Batu Ketulis	1.3.1.01.02.02.002.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan	Peninggaman Pekon Bakhu Kec. Batu Ketulis	Belum Ada Bukti Kepemilikan
700	Kec. Batu Ketulis	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor	Belum Ada Bukti Kepemilikan
701	Kec. Lumbok Seminung	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor	Belum Ada Bukti Kepemilikan
702	Kec. Bandar Negeri Suoh	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor	Belum Ada Bukti Kepemilikan
703	Kel. Fajar Bulan	1.3.1.01.01.02.001.	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Minggu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
704	Kel. Fajar Bulan	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Lokasi Kesenian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
705	Kel. Fajar Bulan	1.3.1.01.03.01.005.	Tanah Lapangan Sepak Bola	Lapangan 2008/08.05.07.01.3.00011	Sertipikat
706	Kel. Fajar Bulan	1.3.1.01.01.01.002.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Perumahan Kelurahan Fajar Bulan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
707	Kel. Fajar Bulan	1.3.1.01.02.03.001.	Tanah Perkebunan Kopi	Bengkok 2008/08.05.07.01.3.00010	Sertipikat
708	Kel. Fajar Bulan	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Kelurahan Fajar Bulan 2008/08.05.07.01.3.00013	Sertipikat
709	Kel. Pasar Liwa	1.3.1.01.01.01.002.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Rumah Dinas Guru SD 2005/08050401400012	Sertipikat
710	Kel. Way Mengaku	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Kelurahan Way Mengaku	Belum Ada Bukti Kepemilikan
711	Kel. Tugu Sari	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Kelurahan Tugu Sari 2008/08.05.06.11.3.00004	Sertipikat
712	Kel. Tugu Sari	1.3.1.01.01.01.002.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Perumahan Kelurahan Tugu Sari 2008/08.05.06.11.3.00003	Sertipikat
713	Kel. Tugu Sari	1.3.1.01.02.01.003.	Kolam Air Tawar	Kolam	Belum Ada Bukti Kepemilikan
714	Kel. Sekincau	1.3.1.01.01.03.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kelurahan Sekincau 2010/08050800400003	Sertipikat
715	Puskesmas Gedung Surian	1.3.1.01.01.04.006.	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Trimulyo 2020/08051504400001Jalan R. Sumatri, Desa Trimulyo, Kec. Gedung Surian, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
716	Puskesmas Gedung Surian	1.3.1.01.01.04.006.	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Pura Mekar 2021/08051503400004	Sertipikat
717	Puskesmas Gedung Surian	1.3.1.01.01.04.006.	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Cipta Waras 2021/08051504400002	Sertipikat
718	Puskesmas Gedung Surian	1.3.1.01.01.04.006.	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Bengai	Belum Ada Bukti Kepemilikan
719	Puskesmas Gedung Surian	1.3.1.01.01.04.007.	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Gedung Surian	Belum Ada Bukti Kepemilikan
720	Puskesmas Gedung Surian	1.3.1.01.01.04.007.	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Cipta Waras 2010/08051504300003	Sertipikat
721	Puskesmas Gedung Surian	1.3.1.01.01.04.007.	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Mekar Jaya 2010/08051505500002	Sertipikat
722	Puskesmas Kebun Tebu	1.3.1.01.01.04.006.	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Kebun Tebu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
723	Puskesmas Kebun Tebu	1.3.1.01.01.04.007.	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Purawiwitan 2010/08051805300003	Sertipikat
724	Puskesmas Kebun Tebu	1.3.1.01.01.04.007.	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Muara Jaya I 2010/08051804300002	Sertipikat
725	Puskesmas Kebun Tebu	1.3.1.01.01.04.007.	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Tribudi Sukur 2023/08.05.18.03.4.00004-A8H639711	Sertipikat
726	Puskesmas Kebun Tebu	1.3.1.01.01.04.007.	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Muara Jaya II 2010/08051806300003	Sertipikat
727	Puskesmas Kebun Tebu	1.3.1.01.01.04.006.	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Kebun Tebu 2020/08051801400001	Sertipikat
728	Puskesmas Kebun Tebu	1.3.1.01.01.04.006.	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	PUSTU PURA JAYA KEBUN TEBU 2023/08.05.18.01.4.00004-A8H630720	Sertipikat
729	Puskesmas Kebun Tebu	1.3.1.01.03.01.005.	Tanah Lapangan Sepak Bola	Lapangan 2023/08.05.18.01.4.00003-A8H630705	Sertipikat
730	Puskesmas Sumber Jaya	1.3.1.01.01.04.006.	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Induk Sumber Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
731	Puskesmas Sumber Jaya	1.3.1.01.01.01.002.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Perumahan Puskesmas Sumber Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
732	Puskesmas Sumber Jaya	1.3.1.01.01.04.007.	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Suka Pura	Belum Ada Bukti Kepemilikan
733	Puskesmas Sumber Jaya	1.3.1.01.01.04.007.	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Sindang Pagar 2010/08050614300003	Sertipikat
734	Puskesmas Sumber Jaya	1.3.1.01.01.04.007.	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Simpangsari	Belum Ada Bukti Kepemilikan
735	Puskesmas Sumber Jaya	1.3.1.01.01.04.007.	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Way Petai Kecamatan Sumber Jaya 2020/08050608400011	Sertipikat
736	Puskesmas Air Hitam	1.3.1.01.01.04.007.	Tanah Bangunan Poliklinik	Poskesdes Gunung Terang 2013/08.05.07.17.3.0001Jalan Pasar Baru, Desa Gunung Terang, Kec. Air Hitam, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
737	Puskesmas Air Hitam	1.3.1.01.01.04.006.	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Sumber Alam	Belum Ada Bukti Kepemilikan
738	Puskesmas Air Hitam	1.3.1.01.01.04.007.	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Semarang Jaya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
739	Puskesmas Air Hitam	1.3.1.01.01.04.006.	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Air Hitam 2007/08050714150001	Sertipikat
740	Puskesmas Air Hitam	1.3.1.01.01.04.007.	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Sri Menanti 2010/08050710300001	Sertipikat
741	Puskesmas Fajar Bulan	1.3.1.01.01.04.006.	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Sukananti 2008/08050705300001	Sertipikat
742	Puskesmas Fajar Bulan	1.3.1.01.01.04.006.	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Induk Way Tenong 2008/08050703400001	Sertipikat
743	Puskesmas Fajar Bulan	1.3.1.01.01.01.002.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Perumahan Puskesmas Fajar Bulan/2021/08.05.07.03.4.00006	Sertipikat
744	Puskesmas Fajar Bulan	1.3.1.01.01.01.002.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Perumahan Puskesmas Fajar Bulan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
745	Puskesmas Fajar Bulan	1.3.1.01.01.01.002.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Perumahan Puskesmas Fajar Bulan	Belum Ada Bukti Kepemilikan
746	Puskesmas Fajar Bulan	1.3.1.01.01.04.006.	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Karang Agung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
747	Puskesmas Fajar Bulan	1.3.1.01.01.04.006.	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Pura Laksana	Belum Ada Bukti Kepemilikan
748	Puskesmas Fajar Bulan	1.3.1.01.01.04.006.	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Tambak Jaya 2008/08050703000001	Sertipikat
749	Puskesmas Fajar Bulan	1.3.1.01.01.04.006.	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Sumber Agung Way Tenong 2021/08050703400005	Sertipikat

No	OPD	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Bukti Kepemilikan
750	Puskesmas Fajar Bulan	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Padang Tambak 2023/08.05.07.08.4.00004-A0H639733	Sertipikat
751	Puskesmas Fajar Bulan	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	PERUMAHAN PUSKES KARANG AGUNG 2023/08.05.07.03.4.00007-A0H639747	Sertipikat
752	Puskesmas Fajar Bulan	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	PERUMAHAN PUSKES MUTAR ALAM 2023/08.05.07.04.4.00007-A0H639623	Sertipikat
753	Puskesmas Sekincau	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Sekincau 2015/08050805400004	Sertipikat
754	Puskesmas Sekincau	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Pampangan 2006/08050801400002	Sertipikat
755	Puskesmas Sekincau	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Waspada 2006/08050809400002	Sertipikat
756	Puskesmas Sekincau	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Tiga Jaya 2020/08050807400001	Sertipikat
757	Puskesmas Sekincau	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Betung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
758	Puskesmas Sekincau	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	PUSTU SEKINCAU 2023/08.05.08.05.4.00013-A0H639716	Sertipikat
759	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Pustu Pagar Dewa 2021/08.05.21.09.4.00001Jalan Desa, Desa Pagar Dewa, Kec. Pagar Dewa, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
760	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Sukajaya 2008/08050826300000	Sertipikat
761	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Basungan Pagar Dewa 2020/08052103240001	Sertipikat
762	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Mekarsari 2023/08.05.21.03.4.00001-A0H639742	Sertipikat
763	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Pahayu Jaya 2021/08052101400005	Sertipikat
764	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Sidodadi 2015/08050811300001	Sertipikat
765	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Pahayu Jaya 2023/08.05.21.01.4.00007-A0H639733	Sertipikat
766	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Pagar Dewa 2023/08.05.21.02.4.00004-A0H639721	Sertipikat
767	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Sidodadi Pagar Dewa 2023/08.05.21.05.4.0000A-A0H639726	Sertipikat
768	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Batu Api 2020/08052109400001	Sertipikat
769	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	POSKESDES MARGA JAYA 2023/08.05.21.06.4.00001-A0H639727	Sertipikat
770	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Pustu Kuba Liu Jaya 2021/08.05.20.08.4.00002Jalan Raya Liwa, Desa Kuba Liu, Kec. Batu Ketulis, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
771	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Luas	Belum Ada Bukti Kepemilikan
772	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Bakhu 2023/08.05.20.06.4.00007-A0H639744	Sertipikat
773	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Argomulyo	Belum Ada Bukti Kepemilikan
774	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Argomulyo	Belum Ada Bukti Kepemilikan
775	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Campang 3	Belum Ada Bukti Kepemilikan
776	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Way Ngison	Belum Ada Bukti Kepemilikan
777	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Batu Kebayan 2010/08050810300003	Sertipikat
778	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Sumber Rejo	Belum Ada Bukti Kepemilikan
779	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Batu Ketulis	Belum Ada Bukti Kepemilikan
780	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Perluasan Puskesmas Batu Ketulis 2022/08.05.20.02.01074	Sertipikat
781	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	POSKESDES ATAR KUAW 2023/08.05.20.10.4.00003-A0H639719	Sertipikat
782	Puskesmas Kenali	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Belalau 2006/08050501400003	Sertipikat
783	Puskesmas Kenali	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Hujung 2021/08050507400004	Sertipikat
784	Puskesmas Kenali	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Turgak 2021/08050504400001	Sertipikat
785	Puskesmas Kenali	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Bedudu 2008/08050505300001	Sertipikat
786	Puskesmas Kenali	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	POSKESDES SUKAMANANGMULYI 2023/08.05.05.14.4.00006-A0H639723	Sertipikat
787	Puskesmas Kenali	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Perumahan Dokter Gigi Puskesmas Kenali 2023/08.05.05.01.4.00013-A0H639728	Sertipikat
788	Puskesmas Batu Brak	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Pustu Sukabumi 2016/08.05.21.09.4.00001Jalan Desa, Desa Sukabumi, Kec. Batu Brak, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
789	Puskesmas Batu Brak	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Batu Brak 2006/08051005400003	Sertipikat
790	Puskesmas Batu Brak	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Tebakoh	Belum Ada Bukti Kepemilikan
791	Puskesmas Batu Brak	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Pekon Balak 2015/08051005300000	Sertipikat
792	Puskesmas Batu Brak	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Kembahang 2015/08051001300003	Sertipikat
793	Puskesmas Batu Brak	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Negeri Ratu 2015/08051002300001	Sertipikat
794	Puskesmas Batu Brak	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Suka Raja 2023/08.05.10.09.4.00002-A0H639345	Sertipikat
795	Puskesmas Batu Brak	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Kota Besi	Belum Ada Bukti Kepemilikan
796	Puskesmas Batu Brak	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Suka Bumi 2023/08.05.10.06.4.00008-A0H639347	Sertipikat
797	Puskesmas Bandar Negeri Suoh	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu HantatalJalan Raya Suoh, Desa Bumi Hantatai, Kec. Bandar Negeri Suoh, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
798	Puskesmas Bandar Negeri Suoh	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Bandar Agung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
799	Puskesmas Bandar Negeri Suoh	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Sukajadi 2015/08052201400500	Sertipikat
800	Puskesmas Bandar Negeri Suoh	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Bandar Negeri Suoh 2015/08052204400001	Sertipikat
801	Puskesmas Bandar Negeri Suoh	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Bumi Hantatai 2015/08052205400001	Sertipikat
802	Puskesmas Bandar Negeri Suoh	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Ringin Jaya 2023/08.05.22.04.4.00001-A0H639930	Sertipikat
803	Puskesmas Srimulyo	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Perumahan Puskesmas Suoh 2009/08.05.09.04.3.0000Jalan Lintas Sanggi Pekon Bandar Agung, Desa Srimulyo, Kec. Suoh, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
804	Puskesmas Srimulyo	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Perumahan Puskesmas Suoh 2009/08.05.09.04.3.0004Jalan Lintas Sanggi Pekon Bandar Agung, Desa Srimulyo, Kec. Suoh, Kab. Lampung Barat	Sertipikat
805	Puskesmas Srimulyo	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Sumber Agung SuohJalan Raya Suoh, Desa Sumber Agung, Kec. Suoh, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
806	Puskesmas Srimulyo	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Induk Suoh 2006/08050904400001	Sertipikat
807	Puskesmas Srimulyo	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Perumahan Puskesmas Suoh 2006/08050904400002	Sertipikat
808	Puskesmas Srimulyo	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Perumahan Puskesmas Suoh 2006/08050904400003	Sertipikat
809	Puskesmas Srimulyo	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Tugu Ratu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
810	Puskesmas Srimulyo	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Roworejo	Belum Ada Bukti Kepemilikan
811	Puskesmas Srimulyo	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Bandar agung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
[illegible]	Puskesmas Srimulyo	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	[illegible]	Belum Ada Bukti Kepemilikan
812	Puskesmas Srimulyo	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Sidorejo	Belum Ada Bukti Kepemilikan
814	Puskesmas Srimulyo	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Perumahan Perawat Puskesmas (Sumber Agung)	Belum Ada Bukti Kepemilikan
815	Puskesmas Liwa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas LiwaJalan Letjend . Soeprapto, Desa Sebarus, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
816	Puskesmas Liwa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Sampot	Belum Ada Bukti Kepemilikan
817	Puskesmas Liwa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Bahway 2023/08.05.04.11.4.00003-A0H639932	Sertipikat
818	Puskesmas Liwa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Pesaguan 2015/08050409400001	Sertipikat
819	Puskesmas Liwa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Padang Cahya 2008/08050404300004	Sertipikat
820	Puskesmas Liwa	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Way Mengaku 2006/08050403400001	Sertipikat
821	Puskesmas Liwa	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Polindes Way Empulau Ulu	Belum Ada Bukti Kepemilikan
822	Puskesmas Liwa	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Polindes Gunung Sugih 2010/08050407400001	Sertipikat
823	Puskesmas Liwa	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Polindes Kubu Perahu 2010/08050402400001	Sertipikat
824	Puskesmas Liwa	1.3.1.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Polindes Padang Dalom 2010/08050406400001	Sertipikat

No.	OPD	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Bukti Kepemilikan
625	Puskesmas Liwa	1.3.1.01.01.04.007.	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Sedanyah Indah 3023/08.05.04.12.4.00003-A09.639625	Sertipikat
626	Puskesmas Liwa	1.3.1.01.02.02.004.	Tanah Kosong Yang Tidak Dioperasikan	Tanah Eks Posyandu Pasar Liwa	Belum Ada Bukti Kepemilikan
627	Puskesmas Buay Nyerupa	1.3.1.01.01.04.006.	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Buay Nyerupa/alias Raja Liwa Muara Dua, Desa Buay Nyerupa, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
628	Puskesmas Buay Nyerupa	1.3.1.01.01.04.006.	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Sutung	Belum Ada Bukti Kepemilikan
629	Puskesmas Buay Nyerupa	1.3.1.01.01.04.003.	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Sukau/Eks Puskesmas Buay Nyerupa	Belum Ada Bukti Kepemilikan
630	Puskesmas Buay Nyerupa	1.3.1.01.01.04.006.	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Tanjung Raya	Belum Ada Bukti Kepemilikan
631	Puskesmas Buay Nyerupa	1.3.1.01.01.04.006.	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Perkusian Puskesmas Buay Nyerupa	Belum Ada Bukti Kepemilikan
632	Puskesmas Buay Nyerupa	1.3.1.01.01.04.006.	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Perkusian Puskesmas Buay Nyerupa	Belum Ada Bukti Kepemilikan
633	Puskesmas Buay Nyerupa	1.3.1.01.01.04.007.	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Hanakau	Belum Ada Bukti Kepemilikan
634	Puskesmas Buay Nyerupa	1.3.1.01.01.04.007.	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Jaganaga	Belum Ada Bukti Kepemilikan
635	Puskesmas Buay Nyerupa	1.3.1.01.01.04.007.	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Sukamulya 2023/08.05.11.04.4.00003-A09.639760	Sertipikat
636	Puskesmas Lombok	1.3.1.01.01.04.006.	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Puskesmas Lombok 2023/08.05.23.07.4.00003-A09.639750	Sertipikat
637	Puskesmas Lombok	1.3.1.01.01.04.006.	Tanah Bangunan Puskesmas/Pustu/Posyandu	Pustu Sukabonjar 2006/08/01/06/00001	Sertipikat
638	Puskesmas Lombok	1.3.1.01.01.04.007.	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Hemiarang 2023/08.05.23.02.4.00001-A09.639730	Sertipikat
639	Puskesmas Lombok	1.3.1.01.01.04.007.	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Ujung Ramhun 2023/08.05.23.05.4.00004-A09.639745	Sertipikat
640	Puskesmas Lombok	1.3.1.01.01.04.007.	Tanah Bangunan Poliklinik/Polindes/Poskesdes	Poskesdes Pencur Mas 2023/08.05.23.11.4.00003-A09.639740	Sertipikat
641	Pengelola Barang	1.3.1.01.01.01.003.	Tanah Perumahan Eks PU Pengairan	Jalan Raden Intan, Kelurahan Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Belum Ada Bukti Kepemilikan
642	Pengelola Barang	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Eks Kantor Kelurahan Pasar Liwa 2005/08.05.04.01.4.00015	Sertipikat
643	Pengelola Barang	1.3.1.01.02.02.002.	Tanah Kosong Yang Sudah Dipergunakan (Sebelum PM)	08.05.04.05.4.00015/Jalan Raden Intan, Kelurahan Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat	Sertipikat

RINCIAN ASET TETAP TANAH PER PERANGKAT DAERAH PER 31 DESEMBER 2024

No.	SKPD/OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Sekretariat Daerah	97.348.085.605,00	153.230.049.420,00	(55.881.963.815,00)	(36,47)
2	Sekretariat DPRD	182.500.000,00	182.500.000,00	0,00	0,00
3	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BKAD	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Riset dan Inovasi Daerah	54.997.800.000,00	0,00	54.997.800.000,00	100,00
8	BKPSDM	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Badan Kesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sat. Pol PP	93.724.250,00	93.724.250,00	0,00	0,00
12	Dinas Dikbud.	49.121.848.450,00	49.103.073.250,00	18.775.200,00	0,04
13	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas PUPR	376.674.538.160,00	376.674.538.160,00	0,00	0,00
15	Disduk dan Capil	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Kepemudaan OR & Pariwisata	29.062.876.200,00	28.961.116.200,00	101.760.000,00	0,35
17	Dinas Koperasi dan Perdagangan	5.211.506.000,00	5.211.506.000,00	0,00	0,00
18	Dinas PP, KB, PP,&PA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Ket. Pangan	1.625.000.000,00	1.625.000.000,00	0,00	0,00
20	Dinas TPH	2.931.210.000,00	2.712.110.000,00	219.100.000,00	8,08
21	Dinas Bun & Nak	2.807.097.000,00	2.807.097.000,00	0,00	0,00
22	Dinas Perikanan	909.800.000,00	909.800.000,00	0,00	0,00
23	Dinas PMP	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Dinas LH	6.111.297.100,00	6.111.142.750,00	154.350,00	0,00
25	Dinas PM, PTSP, & Naker	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dinas Sosial	156.760.000,00	156.760.000,00	0,00	0,00
27	Dinas Perhubungan	1.038.120.000,00	1.038.120.000,00	0,00	0,00
28	Dinas Kominfo	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00
29	Dinas Perpus&Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Dinas Tenaga Kerja dan Industri	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RSUD Liwa	2.791.440.000,00	2.232.000.000,00	559.440.000,00	25,06
32	Kec. Balik Bukit	218.000.000,00	308.000.000,00	(90.000.000,00)	(29,22)
33	Kec. Belalau	521.974.000,00	521.974.000,00	0,00	0,00
34	Kec. Sumberjaya	850.276.000,00	850.276.000,00	0,00	0,00
35	Kec. Way Tenong	593.760.000,00	593.760.000,00	0,00	0,00
36	Kec. Sekincau	778.400.000,00	778.400.000,00	0,00	0,00
37	Kec. Suoh	172.800.000,00	172.800.000,00	0,00	0,00
38	Kec. Batubrak	593.160.000,00	593.160.000,00	0,00	0,00
39	Kec. Sukau	357.600.000,00	357.600.000,00	0,00	0,00
40	Kec. Gedung Surian	237.500.000,00	237.500.000,00	0,00	0,00
41	Kec. Kebun Tebu	143.550.000,00	143.550.000,00	0,00	0,00
42	Kec. Air Hitam	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00
43	Kec. Pagar Dewa	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00
44	Kec.Batu Ketulis	362.583.000,00	362.583.000,00	0,00	0,00
45	Kec. BNS	78.650.000,00	78.650.000,00	0,00	0,00
46	Kec. Lumbok Seminung	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00
47	Kel. Pasar Liwa	98.000.000,00	41.730.000,00	56.270.000,00	134,84
48	Kel. Way Mengaku	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00
49	Kel. Sekincau	944.841.000,00	944.841.000,00	0,00	0,00
50	Kel. Fajar Bulan	1.032.100.000,00	1.032.100.000,00	0,00	0,00
51	Kel. Tugu Sari	105.200.000,00	105.200.000,00	0,00	0,00
52	Puskesmas Liwa	7.106.750.000,00	7.106.750.000,00	0,00	0,00
53	Puskesmas Kenali	120.936.000,00	120.936.000,00	0,00	0,00
54	Puskesmas Sumber Jaya	397.590.000,00	397.590.000,00	0,00	0,00

No.	SKPD/OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
55	Puskesmas Fajar Bulan	542.474.000,00	542.474.000,00	0,00	0,00
56	Puskesmas Sekincau	150.065.000,00	150.065.000,00	0,00	0,00
57	Puskesmas Srimulyo	785.117.000,00	785.117.000,00	0,00	0,00
58	Puskesmas Batu Brak	159.908.000,00	159.908.000,00	0,00	0,00
59	Puskesmas Buay Nyerupa	215.088.950,00	215.088.950,00	0,00	0,00
60	Puskesmas Gedung Surian	278.145.000,00	278.145.000,00	0,00	0,00
61	Puskesmas Kebun Tebu	811.271.000,00	811.271.000,00	0,00	0,00
62	Puskesmas Air Hitam	527.430.000,00	527.430.000,00	0,00	0,00
63	Puskesmas Pagar Dewa	142.639.450,00	142.639.450,00	0,00	0,00
64	Puskesmas Batu Ketulis	849.020.000,00	849.020.000,00	0,00	0,00
65	Puskesmas BNS	118.368.250,00	118.368.250,00	0,00	0,00
66	Puskesmas Lumbok Seminung	58.100.000,00	58.100.000,00	0,00	0,00
67	Pengelola Barang	1.659.970.000,00	1.630.000.000,00	29.970.000,00	1,84
	JUMLAH	**652.407.269.415,00**	**652.395.963.680,00**	**11.305.735,00**	**3,05**

MUTASI KURANG PENGHENTIAN ASET TANAH

No	SKPD	KODE BARANG ASET TETAP	KODE BARANG ASET LAINNYA	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	Luas (M2)	NILAI PEROLEHAN	ASAL USUL PEROLEHAN PADA NERACA	KETERANGAN
1	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.01.04.001.	1.5.4.01.01.02.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Komplek Perkantoran 1991 (Kantor Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Liwa)/06040408400007	Semester II	1991	2662.48	239.622.400.00	Penilaian	Hibah Ke Pemerintah Provinsi Lampung
2	Sekretariat Daerah	1.3.1.01.01.04.001.	1.5.4.01.01.02.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Komplek Perkantoran 1991 (Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Wilayah XIV Lampung Barat)/06040408400007	Semester II	1991	3638.25	327.441.415.00	Penilaian	Hibah Ke Pemerintah Provinsi Lampung
Jumlah									567.063.815.00		

RINCIAN ASET PERALATAN DAN MESIN PER PERANGKAT DAERAH PER 31 DESEMBER 2024

No.	SKPD/OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Sekretariat Daerah	36.265.126.865,00	37.029.987.734,00	(764.860.869,00)	(2,07)
2	Sekretariat DPRD	11.511.083.054,00	11.460.384.304,00	50.698.750,00	0,44
3	Inspektorat	1.341.259.433,33	1.068.370.433,33	272.889.000,00	25,54
4	BKAD	4.650.891.506,00	7.065.378.169,00	(2.414.486.663,00)	(34,17)
5	Badan Pendapatan Daerah	2.445.564.550,00	0,00	2.445.564.550,00	100,00
6	BAPPEDA	2.882.386.545,00	2.834.147.225,00	48.239.320,00	1,70
7	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2.516.392.731,00	796.739.911,00	1.719.652.820,00	215,84
8	BKPSDM	1.261.198.307,00	1.389.028.807,00	(127.830.500,00)	(9,20)
9	BPBD	6.628.663.930,00	6.455.712.930,00	172.951.000,00	2,68
10	Badan Kesbangpol	829.269.668,00	730.794.668,00	98.475.000,00	13,48
11	Sat. Pol PP	10.142.719.239,00	10.179.876.239,00	(37.157.000,00)	(0,37)
12	Dinas Dikbud.	131.301.582.978,00	126.040.840.973,00	5.260.742.005,00	4,17
13	Dinas Kesehatan	14.791.855.492,83	14.692.350.759,83	99.504.733,00	0,68
14	Dinas PUPR	5.870.089.878,57	5.790.089.878,57	80.000.000,00	1,38
15	Disduk dan Capil	3.173.394.128,00	3.135.794.128,00	37.600.000,00	1,20
16	Dinas Kepemudaan OR & Pariwisata	6.890.012.990,00	6.885.303.000,00	4.709.990,00	0,07
17	Dinas Koperasi dan Perdagangan	6.308.063.719,00	7.602.784.716,00	(1.294.720.997,00)	(17,03)
18	Dinas PP, KB, PP,&PA	7.150.112.540,00	7.135.112.540,00	15.000.000,00	0,21
19	Dinas Ket. Pangan	1.286.714.860,00	1.344.954.860,00	(58.240.000,00)	(4,33)
20	Dinas TPH	3.636.882.690,00	3.621.082.690,00	15.800.000,00	0,44
21	Dinas Bun & Nak	3.702.913.752,00	3.651.768.092,00	51.145.660,00	1,40
22	Dinas Perikanan	6.115.448.540,00	6.085.588.540,00	29.860.000,00	0,49
23	Dinas PMP	975.606.475,00	959.606.475,00	16.000.000,00	1,67
24	Dinas LH	25.807.936.687,00	24.283.752.507,00	1.524.184.180,00	6,28
25	Dinas PM, PTSP, & Naker	1.123.345.500,00	891.305.500,00	232.040.000,00	26,03
26	Dinas Sosial	2.061.799.256,00	2.030.299.256,00	31.500.000,00	1,55
27	Dinas Perhubungan	13.226.250.221,00	12.797.754.311,00	428.495.910,00	3,35
28	Dinas Kominfo	5.155.917.162,00	5.522.543.512,00	(366.626.350,00)	(6,64)
29	Dinas Perpus&Arsip	3.774.951.746,00	3.585.513.325,00	189.438.421,00	5,28
30	Dinas Tenaga Kerja dan Industri	4.606.905.166,00	0,00	4.606.905.166,00	100,00
31	RSUD Liwa	87.112.403.156,77	84.371.064.499,77	2.741.338.657,00	3,25
32	Kec. Balik Bukit	237.170.103,67	214.420.103,67	22.750.000,00	10,61
33	Kec. Belalau	266.428.100,00	252.628.100,00	13.800.000,00	5,46
34	Kec. Sumberjaya	285.751.650,00	285.751.650,00	0,00	0,00
35	Kec. Way Tenong	269.509.283,00	258.009.283,00	11.500.000,00	4,46
36	Kec. Sekincau	270.913.637,00	245.963.637,00	24.950.000,00	10,14
37	Kec. Suoh	362.972.800,00	346.222.800,00	16.750.000,00	4,84
38	Kec. Batubrak	223.339.700,00	196.616.700,00	26.723.000,00	13,59
39	Kec. Sukau	314.633.094,00	290.133.094,00	24.500.000,00	8,44
40	Kec. Gedung Surian	198.802.637,00	185.042.637,00	13.760.000,00	7,44
41	Kec. Kebun Tebu	394.020.375,00	376.770.375,00	17.250.000,00	4,58
42	Kec. Air Hitam	393.824.775,00	385.324.775,00	8.500.000,00	2,21
43	Kec. Pagar Dewa	379.474.775,00	370.974.775,00	8.500.000,00	2,29
44	Kec.Batu Ketulis	338.555.375,00	319.055.375,00	19.500.000,00	6,11
45	Kec. BNS	449.117.475,00	435.617.475,00	13.500.000,00	3,10
46	Kec. Lumbok Seminung	413.765.775,00	397.015.775,00	16.750.000,00	4,22
47	Kel. Pasar Liwa	188.097.963,00	188.097.963,00	0,00	0,00
48	Kel. Way Mengaku	90.491.500,00	80.491.500,00	10.000.000,00	12,42
49	Kel. Sekincau	285.602.000,00	281.252.000,00	4.350.000,00	1,55
50	Kel. Fajar Bulan	125.487.900,00	125.487.900,00	0,00	0,00
51	Kel. Tugu Sari	188.061.000,00	182.061.000,00	6.000.000,00	3,30
52	Puskesmas Liwa	4.873.550.672,00	4.410.168.672,00	463.382.000,00	10,51
53	Puskesmas Kenali	4.894.285.746,00	4.390.404.796,00	503.880.950,00	11,48
54	Puskesmas Sumber Jaya	4.849.594.093,00	4.696.712.093,00	152.882.000,00	3,26
55	Puskesmas Fajar Bulan	6.864.543.585,30	6.849.378.324,30	35.165.261,00	0,51
56	Puskesmas Sekincau	6.579.412.048,00	6.378.530.045,00	200.882.003,00	3,15
57	Puskesmas Sirimulyo	5.929.691.083,00	5.844.193.315,00	85.497.768,00	1,46
58	Puskesmas Batu Brak	3.664.277.497,00	3.572.772.497,00	91.505.000,00	2,56
59	Puskesmas Buay Nyerupa	6.509.355.518,30	6.248.605.377,30	260.750.141,00	4,17
60	Puskesmas Gedung Surian	3.952.689.548,00	3.590.785.048,00	361.904.500,00	10,08
61	Puskesmas Kebun Tebu	3.722.133.952,00	3.563.871.952,00	158.262.000,00	4,44

No.	SKPD/OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
52	Puskesmas Air Hitam	3.898.734.005,00	3.720.199.505,00	178.534.500,00	4,80
53	Puskesmas Pagar Dewa	6.788.298.486,30	6.523.792.671,30	264.505.815,00	4,05
54	Puskesmas Batu Ketulis	4.809.342.794,00	4.657.028.294,00	152.314.500,00	3,27
55	Puskesmas BNS	6.163.469.808,62	5.726.707.808,62	436.762.000,00	7,63
56	Puskesmas Lumbok Seminung	3.250.175.239,00	3.133.823.239,00	116.352.000,00	3,71
57	Pengelola Barang	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**496.992.316.759,69**	**478.161.840.538,69**	**18.830.476.221,00**	**3,94**

MUTASI ASET PERALATAN DAN MESIN

NO	SKPD LAMA	SKPD BARU	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	JLH BARANG	NILAI PEROLEHAN	ASAL USUL PEROLEHAN
1	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sekincau	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Yamaha/Fazzio/BE 6932 MZ	Semester II	2024	1	24.320.000,00	APBD
2	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sekincau	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Yamaha/Fazzio/BE 6942 MZ	Semester II	2024	1	24.320.000,00	APBD
3	Dinas Kesehatan	Puskesmas Fajar Bulan	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Yamaha/Fazzio/BE 6950 MZ	Semester II	2024	1	24.320.000,00	APBD
4	Dinas Kesehatan	Puskesmas Fajar Bulan	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Yamaha/Fazzio/BE 6945 MZ	Semester II	2024	1	24.320.000,00	APBD
5	Dinas Kesehatan	Puskesmas Fajar Bulan	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Yamaha/Fazzio/BE 6927 MZ	Semester II	2024	1	24.320.000,00	APBD
6	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sumber Jaya	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Yamaha/Fazzio/BE 6941 MZ	Semester II	2024	1	24.320.000,00	APBD
7	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sumber Jaya	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Yamaha/Fazzio/BE 6931 MZ	Semester II	2024	1	24.320.000,00	APBD
8	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Yamaha/Fazzio/BE 6946 MZ	Semester II	2024	1	24.320.000,00	APBD
9	Dinas Kesehatan	Puskesmas Air Hitam	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Yamaha/X-Ride/BE 6534 MZ	Semester II	2024	1	21.260.000,00	APBD
10	Dinas Kesehatan	Puskesmas Air Hitam	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Yamaha/X-Ride/BE 6537 MZ	Semester II	2024	1	21.260.000,00	APBD
11	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kebun Tebu	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Yamaha/X-Ride/BE 6538 MZ	Semester II	2024	1	21.260.000,00	APBD
12	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kebun Tebu	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Yamaha/X-Ride/BE 6549 MZ	Semester II	2024	1	21.260.000,00	APBD
13	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kebun Tebu	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Yamaha/X-Ride/BE 6529 MZ	Semester II	2024	1	21.260.000,00	APBD
14	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kebun Tebu	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Yamaha/X-Ride/BE 6548 MZ	Semester II	2024	1	21.260.000,00	APBD
15	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kenali	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Yamaha/X-Ride/BE 6551 MZ	Semester II	2024	1	21.260.000,00	APBD
16	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gedung Surian	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Yamaha/X-Ride/BE 6552 MZ	Semester II	2024	1	21.260.000,00	APBD
17	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gedung Surian	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Yamaha/X-Ride/BE 6539 MZ	Semester II	2024	1	21.260.000,00	APBD
18	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lombok	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Yamaha/X-Ride/BE 6553 MZ	Semester II	2024	1	21.260.000,00	APBD
19	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lombok	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Yamaha/X-Ride/BE 6543 MZ	Semester II	2024	1	21.260.000,00	APBD
20	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lombok	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Yamaha/X-Ride/BE 6536 MZ	Semester II	2024	1	21.260.000,00	APBD
21	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bandar Negeri Suoh	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Yamaha/X-Ride/BE6530 MZ	Semester II	2024	1	21.260.000,00	APBD
22	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sirmulyo	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Yamaha/X-Ride/BE 6528 MZ	Semester II	2024	1	21.260.000,00	APBD
23	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Yamaha/X-Ride/BE 6547 MZ	Semester II	2024	1	21.260.000,00	APBD
24	Dinas Kesehatan	Puskesmas Liwa	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Yamaha/X-Ride/BE 6540 MZ	Semester II	2024	1	21.260.000,00	APBD
25	Dinas Kesehatan	Puskesmas Buay Nyerupa	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Yamaha/X-Ride/BE 6535 MZ	Semester II	2024	1	21.260.000,00	APBD
26	Dinas Kesehatan	Puskesmas Buay Nyerupa	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Yamaha/X-Ride/BE 6544 MZ	Semester II	2024	1	21.260.000,00	APBD
27	Dinas Kesehatan	Puskesmas Liwa	1.3.2.02.01.06.001.	Mobil Ambulance	Suzuki/APV (Pusling)/BE 9100 MZ	Semester II	2024	1	337.500.000,00	APBD
28	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kenali	1.3.2.02.01.06.001.	Mobil Ambulance	Suzuki/APV/BE 9103 MZ	Semester II	2024	1	375.000.000,00	APBD
29	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bandar Negeri Suoh	1.3.2.02.01.06.001.	Mobil Ambulance	Suzuki/APV/BE 9104 MZ	Semester II	2024	1	375.000.000,00	APBD
30	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gedung Surian	1.3.2.05.02.04.008.	Cold Stroge Can/	Ruang Pengolahan Limbah	Semester II	2024	1	11.200.000,00	APBD
31	Dinas Kesehatan	Puskesmas Air Hitam	1.3.2.05.02.04.008.	Cold Stroge Can/	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	11.200.000,00	APBD
32	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sekincau	1.3.2.05.02.04.008.	Cold Stroge Can/	Ruang Kesling	Semester II	2024	1	11.200.000,00	APBD
33	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.2.05.02.04.008.	Cold Stroge Can/	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	11.200.000,00	APBD
34	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.2.05.02.04.008.	Cold Stroge Can/	Ruang Pengolahan Limbah	Semester II	2024	1	11.200.000,00	APBD
35	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kenali	1.3.2.05.02.04.008.	Cold Stroge Can/	Ruang Pengolahan Limbah	Semester II	2024	1	11.200.000,00	APBD
36	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Brak	1.3.2.05.02.04.008.	Cold Stroge Can/	Ruang Kesling	Semester II	2024	1	11.200.000,00	APBD
37	Dinas Kesehatan	Puskesmas Liwa	1.3.2.05.02.04.008.	Cold Stroge Can/	Ruang Limbah Medis	Semester II	2024	1	11.200.000,00	APBD
38	Dinas Kesehatan	Puskesmas Buay Nyerupa	1.3.2.05.02.04.008.	Cold Stroge Can/	Ruang Pengolahan Limbah	Semester II	2024	1	11.200.000,00	APBD
39	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lombok	1.3.2.05.02.04.008.	Cold Stroge Can/	Ruang Limbah Medis	Semester II	2024	1	11.200.000,00	APBD
40	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.2.06.01.11.099.	Alat Ukur Suhu dan Kelembaban	Ruang Kesling	Semester II	2024	1	396.000,00	APBD
41	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.2.03.03.18.055.	Alat Ukur Kecepatan Aliran Udara	Ruang Kesling	Semester II	2024	1	4.400.000,00	APBD
42	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.2.08.09.03.001.	Alat Ukur Pencahayaan	Ruang Kesling	Semester II	2024	1	825.000,00	APBD
43	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.2.08.09.03.004.	Alat Ukur Kebisingan	Ruang Kesling	Semester II	2024	1	5.500.000,00	APBD

NO	SKPD LAMA	SKPD BARU	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	JLH BARANG	NILAI PEROLEHAN	ASAL USUL PEROLEHAN
44	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.2.08.07.02.022.	Alat Pengukuran partikulat di udara	Ruang Kes ing	Semester II	2024	1	5.500.000,00	APBD
45	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.2.08.01.11.030.	Thermometer Makanan	Ruang Kes ing	Semester II	2024	1	1.540.000,00	APBD
46	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.2.03.03.01.029.	pH Digital	Ruang Kes ing	Semester II	2024	1	795.000,00	APBD
47	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.2.08.01.21.008.	Total Dissolved Solids	Ruang Kes ing	Semester II	2024	1	805.000,00	APBD
48	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.2.08.01.02.001.	Parameter Biologi E. Coli	Ruang Kes ing	Semester II	2024	1	4.045.000,00	APBD
49	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.2.08.01.02.001.	Parameter Biologi Coliform	Ruang Kes ing	Semester II	2024	1	4.045.000,00	APBD
50	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.2.08.01.13.007.	Fotometer	Ruang Kes ing	Semester II	2024	1	31.161.500,00	APBD
51	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.2.08.01.11.003.	Incubator	Ruang Kes ing	Semester II	2024	1	5.100.000,00	APBD
52	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.2.08.01.11.174.	Colony Counter	Ruang Kes ing	Semester II	2024	1	4.500.000,00	APBD
53	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.2.05.01.04.029.	Tas peralatan	Ruang Kes ing	Semester II	2024	1	1.500.000,00	APBD
54	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.2.05.01.04.029.	Tas Khusus Reagen	Ruang Kes ing	Semester II	2024	1	1.200.000,00	APBD
55	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.2.08.01.11.099.	Alat Ukur Suhu dan Kelembaban	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	396.000,00	APBD
56	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.2.03.03.18.055.	Alat Ukur Kecepatan Aliran Udara	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	4.400.000,00	APBD
57	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.2.08.09.03.001.	Alat Ukur Pencahayaan	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	825.000,00	APBD
58	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.2.08.09.03.004.	Alat Ukur Kebisingan	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	5.500.000,00	APBD
59	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.2.08.07.02.022.	Alat Pengukuran partikulat di udara	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	5.500.000,00	APBD
60	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.2.08.01.11.030.	Thermometer Makanan	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	1.540.000,00	APBD
61	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.2.03.03.01.029.	pH Digital	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	795.000,00	APBD
62	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.2.08.01.21.008.	Total Dissolved Solids	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	805.000,00	APBD
63	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.2.08.01.02.001.	Parameter Biologi E. Coli	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	4.045.000,00	APBD
64	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.2.08.01.02.001.	Parameter Biologi Coliform	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	4.045.000,00	APBD
65	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.2.08.01.13.007.	Fotometer	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	31.161.500,00	APBD
66	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.2.08.01.11.003.	Incubator	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	5.100.000,00	APBD
67	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.2.08.01.11.174.	Colony Counter	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	4.500.000,00	APBD
68	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.2.05.01.04.029.	Tas peralatan	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	1.500.000,00	APBD
69	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.2.05.01.04.029.	Tas Khusus Reagen	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	1.200.000,00	APBD
70	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gedung Surian	1.3.2.08.01.11.099.	Alat Ukur Suhu dan Kelembaban	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	396.000,00	APBD
71	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gedung Surian	1.3.2.03.03.18.055.	Alat Ukur Kecepatan Aliran Udara	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	4.400.000,00	APBD
72	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gedung Surian	1.3.2.08.09.03.001.	Alat Ukur Pencahayaan	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	825.000,00	APBD
73	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gedung Surian	1.3.2.08.09.03.004.	Alat Ukur Kebisingan	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	5.500.000,00	APBD
74	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gedung Surian	1.3.2.08.07.02.022.	Alat Pengukuran partikulat di udara	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	5.500.000,00	APBD
75	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gedung Surian	1.3.2.08.01.11.030.	Thermometer Makanan	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	1.540.000,00	APBD
76	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gedung Surian	1.3.2.03.03.01.029.	pH Digital	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	795.000,00	APBD
77	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gedung Surian	1.3.2.08.01.21.008.	Total Dissolved Solids	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	805.000,00	APBD
78	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gedung Surian	1.3.2.08.01.02.001.	Parameter Biologi E. Coli	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	4.045.000,00	APBD
79	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gedung Surian	1.3.2.08.01.02.001.	Parameter Biologi Coliform	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	4.045.000,00	APBD
80	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gedung Surian	1.3.2.08.01.13.007.	Fotometer	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	31.161.500,00	APBD
81	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gedung Surian	1.3.2.08.01.11.003.	Incubator	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	5.100.000,00	APBD
82	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gedung Surian	1.3.2.08.01.11.174.	Colony Counter	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	4.500.000,00	APBD
83	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gedung Surian	1.3.2.05.01.04.029.	Tas peralatan	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	1.500.000,00	APBD
84	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gedung Surian	1.3.2.05.01.04.029.	Tas Khusus Reagen	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	1.200.000,00	APBD
85	Dinas Kesehatan	Puskesmas Air Hitam	1.3.2.08.01.11.099.	Alat Ukur Suhu dan Kelembaban	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	396.000,00	APBD
86	Dinas Kesehatan	Puskesmas Air Hitam	1.3.2.03.03.18.055.	Alat Ukur Kecepatan Aliran Udara	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	4.400.000,00	APBD
87	Dinas Kesehatan	Puskesmas Air Hitam	1.3.2.08.09.03.001.	Alat Ukur Pencahayaan	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	825.000,00	APBD
88	Dinas Kesehatan	Puskesmas Air Hitam	1.3.2.08.09.03.004.	Alat Ukur Kebisingan	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	5.500.000,00	APBD
89	Dinas Kesehatan	Puskesmas Air Hitam	1.3.2.08.07.02.022.	Alat Pengukuran partikulat di udara	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	5.500.000,00	APBD
90	Dinas Kesehatan	Puskesmas Air Hitam	1.3.2.08.01.11.030.	Thermometer Makanan	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	1.540.000,00	APBD

NO	SKPD LAMA	SKPD BARU	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	JLH BARANG	NILAI PEROLEHAN	ASAL USUL PEROLEHAN
91	Dinas Kesehatan	Puskesmas Air Hitam	1.3.2.03.03.01.029.	pH Digital	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	795.000,00	APBD
92	Dinas Kesehatan	Puskesmas Air Hitam	1.3.2.08.01.21.008.	Total Dissolved Solids	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	805.000,00	APBD
93	Dinas Kesehatan	Puskesmas Air Hitam	1.3.2.08.01.02.001.	Parameter Biologi E. Coli	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	4.045.000,00	APBD
94	Dinas Kesehatan	Puskesmas Air Hitam	1.3.2.08.01.02.001.	Parameter Biologi Coliform	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	4.045.000,00	APBD
95	Dinas Kesehatan	Puskesmas Air Hitam	1.3.2.08.01.13.007.	Fotometer	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	31.161.500,00	APBD
96	Dinas Kesehatan	Puskesmas Air Hitam	1.3.2.08.01.11.003.	Incubator	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	5.100.000,00	APBD
97	Dinas Kesehatan	Puskesmas Air Hitam	1.3.2.08.01.11.174.	Colony Counter	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	4.500.000,00	APBD
98	Dinas Kesehatan	Puskesmas Air Hitam	1.3.2.05.01.04.029.	Tas peralatan	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	1.500.000,00	APBD
99	Dinas Kesehatan	Puskesmas Air Hitam	1.3.2.05.01.04.029.	Tas Khusus Reagen	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	1.200.000,00	APBD
100	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gedung Surian	1.3.2.07.01.11.006.	Temperatur Logger Elitech	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	4.622.000,00	APBD
101	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kebun Tebu	1.3.2.07.01.11.006.	Temperatur Logger Elitech	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	4.622.000,00	APBD
102	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sumber Jaya	1.3.2.07.01.11.006.	Temperatur Logger Elitech	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	4.622.000,00	APBD
103	Dinas Kesehatan	Puskesmas Air Hitam	1.3.2.07.01.11.006.	Temperatur Logger Elitech	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	4.622.000,00	APBD
104	Dinas Kesehatan	Puskesmas Fajar Bulan	1.3.2.07.01.11.006.	Temperatur Logger Elitech	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	4.622.000,00	APBD
105	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sekincau	1.3.2.07.01.11.006.	Temperatur Logger Elitech	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	4.622.000,00	APBD
106	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.2.07.01.11.006.	Temperatur Logger Elitech	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	4.622.000,00	APBD
107	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.2.07.01.11.006.	Temperatur Logger Elitech	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	4.622.000,00	APBD
108	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kenali	1.3.2.07.01.11.006.	Temperatur Logger Elitech	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	4.622.000,00	APBD
109	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Brak	1.3.2.07.01.11.006.	Temperatur Logger Elitech	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	4.622.000,00	APBD
110	Dinas Kesehatan	Puskesmas Bandar Negeri Suoh	1.3.2.07.01.11.006.	Temperatur Logger Elitech	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	4.622.000,00	APBD
111	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sritmulyo	1.3.2.07.01.11.006.	Temperatur Logger Elitech	Ruangan Vaksin	Semester II	2024	1	4.622.000,00	APBD
112	Dinas Kesehatan	Puskesmas Liwa	1.3.2.07.01.11.006.	Temperatur Logger Elitech	Ruang Limbah Medis	Semester II	2024	1	4.622.000,00	APBD
113	Dinas Kesehatan	Puskesmas Buay Nyerupa	1.3.2.07.01.11.006.	Temperatur Logger Elitech	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	4.622.000,00	APBD
114	Dinas Kesehatan	Puskesmas Lombok	1.3.2.07.01.11.006.	Temperatur Logger Elitech	Ruang Vaksin	Semester II	2024	1	4.622.000,00	APBD
115	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pagar Dewa	1.3.2.19.01.02.003.	Sumur Bor	Belakang Puskesmas	Semester II	2024	1	99.847.115,00	APBD
116	Dinas Kesehatan	Puskesmas Buay Nyerupa	1.3.2.19.01.02.003.	Sumur Bor	Halaman Belakang	Semester II	2024	1	99.833.141,00	APBD
117	Puskesmas Fajar Bulan	Dinas Kesehatan	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor (Fajar Bulan)	Honda/CRF/BE 6497 MZ	Semester II	2022	1	33.914.739,00	APBD
118	Puskesmas Fajar Bulan	Puskesmas Gedung Surian	1.3.2.07.01.08.030.	USG 2D	Fajar Bulan	Semester II	2022	1	128.600.000,00	APBD
119	Dinas TPH	Bapenda	1.3.2.02.01.02.003.	Mini Bus	Daihatsu/Taruna/BE 2154 MZ	Semester II	2001	1	58.240.000,00	Penilaian
120	Pengelola Barang	DLH	1.3.2.02.01.05.002.	Sepeda Motor Roda 3	Viar/New Karya 150 R Long/BE 6561	Semester II	2024	1	38.000.000,00	Hibah
121	Pengelola Barang	DLH	1.3.2.02.01.05.002.	Sepeda Motor Roda 3	Viar/New Karya 150 R Long/BE 6562	Semester II	2024	1	38.000.000,00	Hibah
122	Sekretariat Daerah	Inspektorat	1.3.2.02.01.02.003.	Mini Bus	Toyota/Innova G/BE 21 M	Semester I	2013	1	248.830.000,00	APBD
123	Inspektorat	Sekretariat Daerah	1.3.2.02.01.02.003.	Minibus	Toyota/Kijang Inova/BE 1116 MZ	Semester I	2006	1	98.140.000,00	Penilaian
				Jumlah					2.974.724.895,00	

RINCIAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN PER PERANGKAT DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

No.	SKPD/OPD	31 Desember 2024	1 Januari 2024	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Sekretariat Daerah	32.866.839.257,82	41.010.121.398,82	(8.143.282.141,00)	(19,86)
2	Sekretariat DPRD	5.975.609.030,02	5.955.609.030,02	20.000.000,00	0,34
3	Inspektorat	435.558.000,00	260.058.000,00	175.500.000,00	67,48
4	BKAD	2.129.215.759,00	2.678.414.959,00	(549.199.200,00)	(20,50)
5	Badan Pendapatan Daerah	549.199.200,00	0,00	549.199.200,00	100,00
6	BAPPEDA	954.502.000,00	954.502.000,00	0,00	0,00
7	Badan Riset dan Inovasi Daerah	13.916.481.596,00	125.100.000,00	13.791.381.596,00	11.024,29
8	BKPSDM	374.169.551,00	356.669.551,00	17.500.000,00	4,91
9	BPBD	1.699.896.437,00	1.687.746.437,00	12.150.000,00	0,72
10	Badan Kesbangpol	159.668.000,00	159.668.000,00	0,00	0,00
11	Sat. Pol PP	1.154.161.000,00	1.154.161.000,00	0,00	0,00
12	Dinas Dikbud	460.377.221.731,16	449.518.086.360,16	10.859.135.371,00	2,42
13	Dinas Kesehatan	4.354.317.606,95	4.354.317.606,95	0,00	0,00
14	Dinas PUPR	110.416.029.545,00	109.568.785.745,00	847.243.800,00	0,77
15	Disduk dan Capil	1.388.964.000,00	1.388.964.000,00	0,00	0,00
16	Dinas Kepemudaan OR & Pariwisata	16.955.043.789,00	30.648.572.039,00	(13.693.528.250,00)	(44,68)
17	Dinas Koperasi dan Perdagangan	51.959.768.602,00	38.421.805.207,00	13.537.963.395,00	35,24
18	Dinas PP, KB, PP,&PA	6.494.174.929,00	6.479.054.929,00	15.120.000,00	0,23
19	Dinas Ket. Pangan	1.350.624.156,00	1.350.624.156,00	0,00	0,00
20	Dinas TPH	7.834.137.364,00	7.834.137.364,00	0,00	0,00
21	Dinas Bun & Nak	7.904.867.538,00	7.543.873.000,00	360.994.538,00	4,79
22	Dinas Perikanan	9.441.017.392,80	9.441.017.392,80	0,00	0,00
23	Dinas PMP	384.554.350,00	384.554.350,00	0,00	0,00
24	Dinas LH	20.075.277.413,72	28.257.029.343,72	(8.181.751.930,00)	(28,95)
25	Dinas PM, PTSP, & Naker	216.280.432,00	216.280.432,00	0,00	0,00
26	Dinas Sosial	773.835.589,00	762.495.589,00	11.340.000,00	1,49
27	Dinas Perhubungan	6.223.054.800,00	6.223.054.800,00	0,00	0,00
28	Dinas Kominfo	378.553.150,00	378.553.150,00	0,00	0,00
29	Dinas Perpus&Arsip	10.800.497.972,00	1.873.144.700,00	8.927.353.272,00	476,60
30	Dinas Tenaga Kerja dan Industri	9.793.234.513,00	0,00	9.793.234.513,00	100,00
31	RSUD Liwa	23.929.031.836,00	23.627.121.436,00	301.910.400,00	1,28
32	Kec. Balik Bukit	316.700.000,00	316.700.000,00	0,00	0,00
33	Kec. Belalau	827.673.000,00	827.673.000,00	0,00	0,00
34	Kec. Sumberjaya	4.798.002.000,00	4.798.002.000,00	0,00	0,00
35	Kec. Way Tenong	583.973.000,00	583.973.000,00	0,00	0,00
36	Kec. Sekincau	1.334.773.000,00	1.334.773.000,00	0,00	0,00
37	Kec. Suoh	1.300.300.000,00	1.300.300.000,00	0,00	0,00
38	Kec. Batubrak	674.451.000,00	674.451.000,00	0,00	0,00
39	Kec. Sukau	518.943.000,00	518.943.000,00	0,00	0,00
40	Kec. Gedung Surian	858.067.000,00	858.067.000,00	0,00	0,00
41	Kec. Kebun Tebu	1.221.697.000,00	1.221.697.000,00	0,00	0,00
42	Kec. Air Hitam	1.222.166.000,00	1.222.166.000,00	0,00	0,00
43	Kec. Pagar Dewa	1.212.485.500,00	1.212.485.500,00	0,00	0,00
44	Kec.Batu Ketulis	1.221.353.750,00	1.221.353.750,00	0,00	0,00
45	Kec. BNS	1.223.194.500,00	1.223.194.500,00	0,00	0,00
46	Kec. Lumbok Seminung	1.373.156.750,00	1.373.156.750,00	0,00	0,00
47	Kel. Pasar Liwa	1.228.929.700,00	1.664.210.700,00	(435.281.000,00)	(26,16)
48	Kel. Way Mengaku	420.635.000,00	420.635.000,00	0,00	0,00
49	Kel. Sekincau	524.331.000,00	500.331.000,00	24.000.000,00	4,80
50	Kel. Fajar Bulan	513.644.532,69	513.644.532,69	0,00	0,00
51	Kel. Tugu Sari	942.873.950,00	942.873.950,00	0,00	0,00
52	Puskesmas Liwa	9.056.122.041,84	9.056.122.041,84	0,00	0,00
53	Puskesmas Kenali	8.012.012.101,54	8.012.012.101,54	(0,00)	(0,00)
54	Puskesmas Sumber Jaya	9.970.656.112,53	9.970.656.112,53	0,00	0,00
55	Puskesmas Fajar Bulan	7.444.524.430,07	7.444.524.430,07	0,00	0,00
56	Puskesmas Sekincau	5.611.433.682,66	5.611.433.682,66	0,00	0,00
57	Puskesmas Srimulyo	9.122.256.693,00	9.122.256.693,00	0,00	0,00

No.	SKPD/OPD	31 Desember 2024	1 Januari 2024	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
58	Puskesmas Batu Brak	9.149.104.953,62	9.149.104.953,62	0,00	0,00
59	Puskesmas Buay Nyerupa	7.206.832.083,24	7.206.832.083,24	0,00	0,00
60	Puskesmas Gedung Surian	7.404.173.344,00	7.404.173.344,00	0,00	0,00
61	Puskesmas Kebun Tebu	8.054.901.513,00	8.054.901.513,00	0,00	0,00
62	Puskesmas Air Hitam	8.250.982.213,00	8.250.982.213,00	0,00	0,00
63	Puskesmas Pagar Dewa	10.813.390.632,12	10.813.390.632,12	0,00	0,00
64	Puskesmas Batu Ketulis	10.901.696.333,56	10.901.696.333,56	0,00	0,00
65	Puskesmas BNS	9.508.694.998,00	9.508.694.998,00	0,00	0,00
66	Puskesmas Lumbok Seminung	8.220.062.000,00	8.220.062.000,00	0,00	0,00
67	Pengelola Barang	502.731.000,00	300.590.000,00	202.141.000,00	67,25
	JUMLAH	**962.812.710.355,34**	**934.369.585.791,34**	**28.443.124.564,00**	**3,04**

REKLASIFIKASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN KE ASET PERALATAN DAN MESIN

NO	SKPD	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	TANGGAL PEROLEHAN	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	NILAI PEROLEHAN
1	Sekretariat Daerah	1.3.2.05.02.01.005	Tempat Tidur King Koil Gran Classic Hb Oakland Antelope	Bagian Umum (RD Sekda)	12 Desember 2024	Semester II	2024	1	83.831.640,00	83.831.640,00
2	Dispora	1.3.2.02.01.01.002	Sepeda Motor Roda Tiga	Viar/V 15 RL W/TIRE 6567 MZ	17 September 2024	Semester II	2024	1	35.000.000,00	35.000.000,00
3	Dispora	1.3.2.05.02.06.077	Tempat sampah taman/outdoor metal wooden dan perlengkapannya	Lumbok seminung	17 September 2024	Semester II	2024	1	4.000.000,00	4.000.000,00
4	Dispora	1.3.2.05.02.06.077	Tempat sampah taman/outdoor metal wooden dan perlengkapannya	Lumbok seminung	17 September 2024	Semester II	2024	1	4.000.000,00	4.000.000,00
5	Dispora	1.3.2.05.02.06.077	Tempat sampah taman/outdoor metal wooden dan perlengkapannya	Lumbok seminung	17 September 2024	Semester II	2024	1	4.000.000,00	4.000.000,00
6	Dispora	1.3.2.05.02.06.077	Tempat sampah taman/outdoor metal wooden dan perlengkapannya	Lumbok seminung	17 September 2024	Semester II	2024	1	4.000.000,00	4.000.000,00
7	Dispora	1.3.2.05.02.06.077	Tempat sampah taman/outdoor metal wooden dan perlengkapannya	Lumbok seminung	17 September 2024	Semester II	2024	1	4.000.000,00	4.000.000,00
8	Dispora	1.3.2.05.02.06.077	Tempat sampah taman/outdoor metal wooden dan perlengkapannya	Lumbok seminung	17 September 2024	Semester II	2024	1	4.000.000,00	4.000.000,00
9	Dispora	1.3.2.05.02.06.077	Tempat sampah taman/outdoor metal wooden dan perlengkapannya	Lumbok seminung	17 September 2024	Semester II	2024	1	4.000.000,00	4.000.000,00
10	Dispora	1.3.2.05.02.06.077	Tempat sampah taman/outdoor metal wooden dan perlengkapannya	Lumbok seminung	17 September 2024	Semester II	2024	1	4.000.000,00	4.000.000,00
11	Dispora	1.3.2.05.02.06.089	Lampu taman	Lumbok seminung	15 November 2024	Semester II	2024	1	7.487.675,00	7.487.675,00
12	Dispora	1.3.2.05.02.06.089	Lampu taman	Lumbok seminung	15 November 2024	Semester II	2024	1	7.487.675,00	7.487.675,00
13	Dispora	1.3.2.05.02.06.089	Lampu taman	Lumbok seminung	15 November 2024	Semester II	2024	1	7.487.675,00	7.487.675,00
14	Dispora	1.3.2.05.02.06.089	Lampu taman	Lumbok seminung	15 November 2024	Semester II	2024	1	7.487.675,00	7.487.675,00
15	Dispora	1.3.2.05.02.06.089	Lampu taman	Lumbok seminung	15 November 2024	Semester II	2024	1	7.487.675,00	7.487.675,00
16	Dispora	1.3.2.05.02.06.089	Lampu taman	Lumbok seminung	15 November 2024	Semester II	2024	1	7.487.675,00	7.487.675,00
17	Dispora	1.3.2.05.02.06.089	Lampu taman	Lumbok seminung	15 November 2024	Semester II	2024	1	7.487.675,00	7.487.675,00
18	Dispora	1.3.2.05.02.06.089	Lampu taman	Lumbok seminung	15 November 2024	Semester II	2024	1	7.487.675,00	7.487.675,00
19	Dispora	1.3.2.05.02.06.089	Lampu taman	Lumbok seminung	15 November 2024	Semester II	2024	1	7.487.675,00	7.487.675,00
20	Dispora	1.3.2.05.02.06.089	Lampu taman	Lumbok seminung	15 November 2024	Semester II	2024	1	7.487.675,00	7.487.675,00
21	Dispora	1.3.2.05.02.06.089	Lampu taman	Lumbok seminung	15 November 2024	Semester II	2024	1	7.487.675,00	7.487.675,00
22	Dispora	1.3.2.05.02.06.089	Lampu taman	Lumbok seminung	15 November 2024	Semester II	2024	1	7.487.675,00	7.487.675,00
23	Dispora	1.3.2.05.02.06.089	Lampu taman	Lumbok seminung	15 November 2024	Semester II	2024	1	7.487.675,00	7.487.675,00
24	Dispora	1.3.2.05.02.06.089	Lampu taman	Lumbok seminung	15 November 2024	Semester II	2024	1	7.487.675,00	7.487.675,00
25	Dispora	1.3.2.05.02.06.089	Lampu taman	Lumbok seminung	15 November 2024	Semester II	2024	1	7.487.675,00	7.487.675,00
26	Dispora	1.3.2.05.02.06.089	Lampu taman	Lumbok seminung	15 November 2024	Semester II	2024	1	7.487.675,00	7.487.675,00
27	Dispora	1.3.2.05.02.06.089	Lampu taman	Lumbok seminung	15 November 2024	Semester II	2024	1	7.487.675,00	7.487.675,00
28	Dispora	1.3.2.05.02.06.089	Lampu taman	Lumbok seminung	15 November 2024	Semester II	2024	1	7.487.675,00	7.487.675,00
29	Dispora	1.3.2.05.02.06.089	Lampu taman	Lumbok seminung	15 November 2024	Semester II	2024	1	7.487.675,00	7.487.675,00
30	Dispora	1.3.2.05.02.06.089	Lampu taman	Lumbok seminung	15 November 2024	Semester II	2024	1	7.487.675,00	7.487.675,00
31	Dispuprk	1.3.2.05.02.01.041	Portasi	Sekretariat	14 Mei 2024	Semester II	2024	1	9.865.660,00	9.865.660,00
32	Diskopdag	1.3.2.03.01.01.036	Timbangan Pos Ukur	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	64.380.000,00	64.380.000,00
33	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
34	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
35	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
36	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
37	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
38	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
39	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
40	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
41	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
42	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
43	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
44	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
45	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
46	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
47	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
48	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
49	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00

NO	SKPD	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	TANGGAL PEROLEHAN	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	NILAI PEROLEHAN
50	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077.	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
51	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077.	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
52	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077.	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
53	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077.	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
54	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077.	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
55	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077.	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
56	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077.	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
57	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077.	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
58	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077.	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
59	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077.	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
60	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077.	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
61	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077.	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
62	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077.	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
63	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077.	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
64	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077.	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
65	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077.	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
66	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077.	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
67	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077.	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
68	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077.	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
69	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077.	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
70	Diskopdag	1.3.2.05.02.06.077.	Tong Sampah Outdoor 3 Warna	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	600.000,00	600.000,00
71	Diskopdag	1.3.2.10.01.02.001.	PC OS Windows 11 Home Ale Ram 8 GB	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	15.000.000,00	15.000.000,00
72	Diskopdag	1.3.2.10.01.02.001.	PC OS Windows 11 Home Ale Ram 8 GB	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	15.000.000,00	15.000.000,00
73	Diskopdag	1.3.2.05.02.11.002.	Meja Kerja (Pengelola)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	3.000.000,00	3.000.000,00
74	Diskopdag	1.3.2.05.02.11.002.	Meja Kerja (Pengelola)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	3.000.000,00	3.000.000,00
75	Diskopdag	1.3.2.05.02.11.002.	Meja Kerja (Informasi Centre)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	3.000.000,00	3.000.000,00
76	Diskopdag	1.3.2.05.02.11.002.	Meja Kerja (Informasi Centre)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	3.000.000,00	3.000.000,00
77	Diskopdag	1.3.2.05.02.31.032.	Kursi Kerja (Pengelola)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	2.000.000,00	2.000.000,00
78	Diskopdag	1.3.2.05.02.31.032.	Kursi Kerja (Pengelola)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	2.000.000,00	2.000.000,00
79	Diskopdag	1.3.2.05.02.31.032.	Kursi Kerja (Informasi Centre)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	2.000.000,00	2.000.000,00
80	Diskopdag	1.3.2.05.02.31.032.	Kursi Kerja (Informasi Centre)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	2.000.000,00	2.000.000,00
81	Diskopdag	1.3.2.05.02.31.032.	Kursi Kerja (Informasi Centre)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	2.000.000,00	2.000.000,00
82	Diskopdag	1.3.2.05.02.31.032.	Kursi Kerja (Informasi Centre)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	2.000.000,00	2.000.000,00
83	Diskopdag	1.3.2.05.02.31.014.	Meja Penerima Informasi Center	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	5.000.000,00	5.000.000,00
84	Diskopdag	1.3.2.05.02.31.002.	Meja Kerja Minimalis Informasi Center	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	500.000,00	500.000,00
85	Diskopdag	1.3.2.05.02.31.002.	Meja Kerja Minimalis Informasi Center	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	500.000,00	500.000,00
86	Diskopdag	1.3.2.05.02.31.002.	Meja Kerja Minimalis Informasi Center	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	31 Desember 2024	Semester II	2024	1	500.000,00	500.000,00
87	Diskopdag	1.3.2.13.01.01.003.	Sumur Bor	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 4)	25 November 2024	Semester II	2024	1	96.085.000,00	96.085.000,00
88	Diskopdag	1.3.2.05.02.01.008.	Sound System Out Door	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 4)	25 November 2024	Semester II	2024	1	42.124.000,00	42.124.000,00
89	Diskopdag	1.3.2.05.02.01.008.	Sound System Out Door	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 4)	25 November 2024	Semester II	2024	1	42.124.000,00	42.124.000,00
90	Diskopdag	1.3.2.06.01.01.009.	Tpa Elektronik Two Way Weatherproof loadspeaker ZS-760-AS	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 4)	25 November 2024	Semester II	2024	1	8.935.000,00	8.935.000,00
91	Diskopdag	1.3.2.06.01.01.095.	Video Tron	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 4)	25 November 2024	Semester II	2024	1	410.000.000,00	410.000.000,00
92	Diskopdag	1.3.2.06.01.01.095.	Video Tron	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 4)	25 November 2024	Semester II	2024	1	410.000.000,00	410.000.000,00
93	Diskopdag	1.3.2.06.01.01.095.	Video Tron	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 4)	25 November 2024	Semester II	2024	1	410.000.000,00	410.000.000,00
94	Dinsikeperin	1.3.2.05.02.01.057.	Kanopi Musholla Shafina Green 10028	Gedung Sarana Produksi Bersama Sentra Olahan Ikan Kecamatan Lumbok Seminung	18 September 2024	Semester II	2024	1	2.318.242,00	2.318.242,00
95	RSUD Almusdin U	1.3.2.05.02.04.008.	Cold Storage	Dekat Innecerator	02 Agustus 2024	Semester II	2024	1	161.000.000,00	161.000.000,00
				Jumlah						2.040.737.042,00

MUTASI KURANG REKLASIFIKASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN KE ASET JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

NO	SKPD	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	TANGGAL PEROLEHAN	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	NILAI PEROLEHAN
1	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.007.	MCK	SDN WAY SULUH	2024-11-15	Semester II	2024	1	53.631.155,00	53.631.155,00
2	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.007.	Rehabilitasi Sedang/Berat Jamban	SDN 2 KEMBAHANG	2024-10-15	Semester II	2024	1	103.777.296,00	103.777.296,00
3	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.007.	Rehabilitasi Sedang/Berat Jamban Toilet	SMPN 2 WAY TENONG	2024-10-18	Semester II	2024	1	95.037.669,00	95.037.669,00
4	Dispora	1.3.4.03.03.03.002.	Bangunan TPS	Lumbok seminung	2024-11-29	Semester II	2024	1	280.228.495,00	280.228.495,00
5	Dispora	1.3.4.02.06.05.007.	Toilet	Lumbok seminung	2024-11-29	Semester II	2024	1	310.038.507,00	310.038.507,00
6	Diskopdag	1.3.4.01.01.09.009.	Jalan Untuk Pejalan Kaki	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 2)	2024-12-31	Semester II	2024	1	581.321.000,00	581.321.000,00
7	Diskopdag	1.3.4.02.06.05.007.	Kamar Mandi/WC	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 2)	2024-12-31	Semester II	2024	1	145.584.000,00	145.584.000,00
8	Diskopdag	1.3.4.02.06.05.007.	Kamar Mandi/WC	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 6)	2024-12-31	Semester II	2024	1	165.037.000,00	165.037.000,00
9	Diskopdag	1.3.4.02.06.05.007.	Kamar Mandi/WC	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 6)	2024-12-31	Semester II	2024	1	165.037.000,00	165.037.000,00
10	Diskopdag	1.3.4.01.01.09.009.	Jalan Untuk Pejalan Kaki	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	747.914.000,00	747.914.000,00
11	Diskopdag	1.3.4.02.04.04.002.	Drainase	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	330.447.000,00	330.447.000,00
12	Diskopdag	1.3.4.02.04.05.007.	Talud (Dinding Penahan Tanah)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	958.889.000,00	958.889.000,00
13	Diskopdag	1.3.4.03.01.03.002.	TPS IPAL	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	135.936.000,00	135.936.000,00
14	Diskopdag	1.3.4.02.06.05.008.	Ground Tank	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	23.591.000,00	23.591.000,00
15	Diskopdag	1.3.4.02.06.05.008.	Ground Tank	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	23.591.000,00	23.591.000,00
16	Diskopdag	1.3.4.03.10.01.001.	Pemasangan MDP/SDP Genset 33KVA (Instalasi Genset)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	9.026.000,00	9.026.000,00
17	Diskopdag	1.3.4.02.06.05.007.	Toilet	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 4)	2024-11-25	Semester II	2024	1	115.855.000,00	115.855.000,00
18	Diskopdag	1.3.4.02.04.05.007.	Dinding Penahan Tanah	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 4)	2024-11-25	Semester II	2024	1	628.301.000,00	628.301.000,00
19	Diskopdag	1.3.4.03.01.05.002.	Instalasi Air Bersih	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 4)	2024-11-25	Semester II	2024	1	64.292.000,00	64.292.000,00
				Jumlah					4.937.534.122,00	

MUTASI KURANG REKLASIFIKASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN KE ASET KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

NO	SKPD	KODE BARANG	KETERANGAN KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	TANGGAL PEROLEHAN	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	NILAI PEROLEHAN
1	Dinas PUPR	1.3.6.01.01.01.003.	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Depo Arsip Perpustakaan	Pembangunan Gedung	2024-09-12	Semester II	2024	1	198.280.200,00	198.280.200,00
2	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	PASAR BAPOK (AREA KERING)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 1)	2024-12-31	Semester II	2024	"	8.887.637.087,00	8.887.637.087,00
3	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	PASAR BAPOK (AREA BASAH)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 1)	2024-12-31	Semester II	2024	"	5.633.860.791,00	5.633.860.791,00
4	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	GAPURA BAPOK	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 1)	2024-12-31	Semester II	2024	"	382.383.365,00	382.383.365,00
5	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.004.	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	INSTALASI LISTRIK	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 1)	2024-12-31	Semester II	2024	"	987.012.000,00	987.012.000,00
6	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	SHELTER GEN Z	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 1)	2024-12-31	Semester II	2024	"	363.371.894,00	363.371.894,00
7	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	FOODCOURT	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 1)	2024-12-31	Semester II	2024	"	866.301.393,00	866.301.393,00
8	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	ZONA KULINER (COFFE RANAU)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 5)	2024-12-31	Semester II	2024	"	583.968.028,00	583.968.028,00
9	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	LAKTASI	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 5)	2024-12-31	Semester II	2024	"	205.608.223,00	205.608.223,00
10	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	REHAP RUMAH JETSKI	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 5)	2024-12-31	Semester II	2024	"	33.742.322,00	33.742.322,00
11	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	GAPURA UTAMA	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 5)	2024-12-31	Semester II	2024	"	450.471.956,00	450.471.956,00
12	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	TUGU KENUI	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 5)	2024-12-31	Semester II	2024	"	844.493.206,00	844.493.206,00
13	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.004.	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	DINDING PENAHAN TANAH	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 5)	2024-12-31	Semester II	2024	"	3.466.562.103,00	3.466.562.103,00
14	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	PEDESTRIAN SELAMAT DATANG	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 5)	2024-12-31	Semester II	2024	"	1.076.027.456,00	1.076.027.456,00
15	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	SHELTER 1	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 5)	2024-12-31	Semester II	2024	"	83.902.436,00	83.902.436,00
16	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	SHELTER 2	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 5)	2024-12-31	Semester II	2024	"	83.902.436,00	83.902.436,00
17	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	DERMAGA 1	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 3)	2024-12-31	Semester II	2024	"	6.290.589.664,00	6.290.589.664,00
18	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	DERMAGA 2	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 3)	2024-12-31	Semester II	2024	"	6.244.444.304,00	6.244.444.304,00
19	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	ZONA UMKM (SHELTER UMKM)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 3)	2024-12-31	Semester II	2024	"	1.233.832.842,00	1.233.832.842,00
20	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.004.	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	WC	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 3)	2024-12-31	Semester II	2024	"	137.648.094,00	137.648.094,00

NO	SKPD	KODE BARANG	KETERANGAN KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	TANGGAL PEROLEHAN	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	NILAI PEROLEHAN
21	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.004.	Gedung dan Bangunan\ Dalam Pengerjaan	WC	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 3)	2024-12-31	Semester II	2024	1	137.648.094,00	137.648.094,00
22	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	Gedung dan Bangunan\ Dalam Pengerjaan	REHAB COTTAGE KIJANG	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 3)	2024-12-31	Semester II	2024	1	645.292.010,00	645.292.010,00
23	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	Gedung dan Bangunan\ Dalam Pengerjaan	REHAB COTTAGE KENUI	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 3)	2024-12-31	Semester II	2024	1	365.792.106,00	365.792.106,00
24	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	Gedung dan Bangunan\ Dalam Pengerjaan	KOLAM RENANG	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 3)	2024-12-31	Semester II	2024	1	95.529.575,00	95.529.575,00
25	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	Gedung dan Bangunan\ Dalam Pengerjaan	REHAB DAN PERLUASAN DERMAGA	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 3)	2024-12-31	Semester II	2024	1	1.330.145.239,00	1.330.145.239,00
26	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.002.	Gedung dan Bangunan\ Dalam Pengerjaan	SUMUR BOR	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 3)	2024-12-31	Semester II	2024	1	268.039.924,00	268.039.924,00
					Jumlah					40.896.486.748,00	

MUTASI KURANG REKLASIFIKASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN KE ASET EXTRA COMPTABLE

NO	SKPD	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	TANGGAL PEROLEHAN	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	NILAI PEROLEHAN
1	Disbunak	Ekstrakomptable	Bangunan Parkir	Sekolah Kopi	2024-05-14	Semester I	2024	1	4,886.220,00	4,886.220,00
2	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Tempat Wudhu)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
3	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Mushalla)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
4	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Toilet)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
5	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Toilet)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
6	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Toilet)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
7	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Toilet)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
8	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Toilet)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
9	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Toilet)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
10	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Toilet)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
11	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Toilet)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
12	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Toilet)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
13	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Toilet)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
14	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Toilet)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
15	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Toilet)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
16	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Toilet)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
17	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Laktasi)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
18	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Laktasi)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
19	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Laktasi)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
20	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Ruang Pengelola)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
21	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Ruang Metrologi)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
22	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Jalur Evakuasi)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
23	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Jalur Evakuasi)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
24	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Jalur Evakuasi)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
25	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Jalur Evakuasi)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
26	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Jalur Evakuasi)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
27	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Jalur Evakuasi)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
28	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Jalur Evakuasi)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
29	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Jalur Evakuasi)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
30	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Jalur Evakuasi)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
31	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Jalur Evakuasi)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
32	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Jalur Evakuasi)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
33	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Jalur Evakuasi)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
34	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Jalur Evakuasi)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
35	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Jalur Evakuasi)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00

NO	SKPD	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	TANGGAL PEROLEHAN	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	NILAI PEROLEHAN
36	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Jalur Evakuasi)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
37	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Jalur Evakuasi)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
38	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Jalur Evakuasi)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
39	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Jalur Evakuasi)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
40	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Jalur Evakuasi)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
41	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Jalur Evakuasi)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
42	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Titik Kumpul)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
43	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Titik Kumpul)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
44	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Titik Kumpul)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
45	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Titik Kumpul)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
46	Diskopdag	Ekstrakomptable	Papan Akrilik (Titik Kumpul)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	120.000,00	120.000,00
47	Diskopdag	Ekstrakomptable	Tong Sampah Stainless	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	200.000,00	200.000,00
48	Diskopdag	Ekstrakomptable	Tong Sampah Stainless	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	200.000,00	200.000,00
49	Diskopdag	Ekstrakomptable	Tong Sampah Stainless	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	200.000,00	200.000,00
50	Diskopdag	Ekstrakomptable	Tong Sampah Stainless	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	200.000,00	200.000,00
51	Diskopdag	Ekstrakomptable	Tong Sampah Stainless	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	200.000,00	200.000,00
52	Diskopdag	Ekstrakomptable	Kursi Information Centre	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	250.000,00	250.000,00
53	Diskopdag	Ekstrakomptable	Kursi Information Centre	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	250.000,00	250.000,00
54	Diskopdag	Ekstrakomptable	Kursi Information Centre	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	250.000,00	250.000,00
55	Diskopdag	Ekstrakomptable	Kursi Information Centre	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	250.000,00	250.000,00
56	Diskopdag	Ekstrakomptable	Kursi Information Centre	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	250.000,00	250.000,00
57	Diskopdag	Ekstrakomptable	Kursi Information Centre	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	250.000,00	250.000,00
Jumlah										12.786.220,00

MUTASI KURANG REKLASIFIKASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN KE NON ASET

NO	SKPD	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	TANGGAL PEROLEHAN	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	NILAI PEROLEHAN
1	Diskopdag	Non Aset	Bibit Asoka	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	9.156.000,00	9.156.000,00
2	Diskopdag	Non Aset	Bibit Sabrina	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	6.539.000,00	6.539.000,00
3	Diskopdag	Non Aset	Bibit Brokoli Kuning	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	6.539.000,00	6.539.000,00
4	Diskopdag	Non Aset	Bibit Sambang Dara	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	6.539.000,00	6.539.000,00
5	Diskopdag	Non Aset	Bibit Pakis Koin	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	6.539.000,00	6.539.000,00
6	Diskopdag	Non Aset	Bibit Cemara (Glodokan Tiang)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	8.175.000,00	8.175.000,00
7	Diskopdag	Non Aset	Bibit Rumput Gajah Mini	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	21.560.000,00	21.560.000,00
8	Diskopdag	Non Aset	Bibit Pucuk Merah	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	24.524.000,00	24.524.000,00
9	Diskopdag	Non Aset	Bibit Asoka	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	16.251.000,00	16.251.000,00
10	Diskopdag	Non Aset	Bibit Bunga Lantana	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	40.629.000,00	40.629.000,00
11	Diskopdag	Non Aset	Bibit Tabebuya Pink	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	7.357.000,00	7.357.000,00
Jumlah										153.808.000,00

MUTASI TAMBAH REKLASIFIKASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN KE ASET GEDUNG DAN BANGUNAN

NO	SKPD	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	TANGGAL PEROLEHAN	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	NILAI PEROLEHAN
1	Disbunak	1.3.3.01.01.06.001	Bangunan Musholla	Sekolah Kopi	2024-08-19	Semester II	2024	1	164.480.137,00	164.480.137,00
JUMLAH										**164.480.137,00**

MUTASI TAMBAH MUTASI SKPD GEDUNG DAN BANGUNAN

NO	SKPD LAMA	SKPD BARU	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	ASAL USUL PEROLEHAN PADA NERACA
1	Dinas PUPR	Dispora	1.3.3.01.02.06.001.	Rehabilitasi Bangun	Hotel Lumbok Seminung	Semester II	2024	1	733.326.200,00	APBD
2	Dinas PUPR	Sekretariat Daerah	1.3.3.01.01.09.001.	Rehabilitasi Anjunga	Way Halim Bandar Lampu	Semester II	2024	1	895.105.725,00	APBD
Jumlah									1.628.431.925,00	

MUTASI KURANG PENGHENTIAN ASET GEDUNG DAN BANGUNAN

NO	SKPD	KODE BARANG ASET TETAP	KODE BARANG ASET LAINNYA	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	ASAL USUL PEROLEHAN PADA NERACA
1	Dinas Perpustakaan	1.3.3.01.01.01.001	1.5.4.01.01.01.003.	Bangunan Gedung Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Balik Bukit	Semester I	1995	1	987.075.000,00	Penilaian
2	Dinas Perpustakaan	1.3.3.01.01.14.001.	1.5.4.01.01.01.003.	Bangunan Garasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Balik Bukit	Semester I	1995	1	14.870.000,00	Penilaian
3	Dinas Perpustakaan	1.3.3.01.01.16.001.	1.5.4.01.01.01.003.	Bangunan Gedung Perpustakaan	Rumah Prestasi	Semester I	2013	1	219.595.700,00	APBD
4	Dinas Perpustakaan	1.3.3.01.01.36.001.	1.5.4.01.01.01.003.	Taman	Rumah Prestasi	Semester I	2013	1	20.000.000,00	APBD
5	Dinas Perpustakaan	1.3.3.01.01.33.001.	1.5.4.01.01.01.003.	Perkerasan Halaman	Dinas Perpustakaan	Semester II	2018	1	49.245.000,00	APBD
6	Diskopdag	1.3.3.01.01.12.001.	1.5.4.01.01.01.003.	Bangunan Ruko A	Hotel Lumbok Seminung	Semester I	2006	1	57.910.000,00	Penilaian I 2022
7	Diskopdag	1.3.3.01.01.12.001.	1.5.4.01.01.01.003.	Bangunan Ruko B	Hotel Lumbok Seminung	Semester I	2006	1	57.910.000,00	Penilaian I 2022
8	Diskopdag	1.3.3.01.01.12.001.	1.5.4.01.01.01.003.	Bangunan Ruko C	Hotel Lumbok Seminung	Semester I	2006	1	57.910.000,00	Penilaian I 2022
9	Diskopdag	1.3.3.01.01.12.001.	1.5.4.01.01.01.003.	Bangunan Ruko D	Hotel Lumbok Seminung	Semester I	2006	1	57.910.000,00	Penilaian I 2022
10	Diskopdag	1.3.3.01.01.36.001.	1.5.4.01.01.01.003.	Kolam dan Pelataran Convention Hall	Jln. Wisata Lombok Sukau	Semester I	2005	1	601.800.000,00	Penilaian
11	Diskopdag	1.3.3.01.01.32.001.	1.5.4.01.01.01.003.	Bangunan Rumah Genset	Hotel Lumbok Seminung	Semester I	2006	1	66.950.000,00	Penilaian I 2022
12	Diskopdag	1.3.3.01.01.39.001.	1.5.4.01.01.01.003.	Pembangunan Landskap West Lombok	Jln. Wisata Lombok Sukau	Semester I	2006	1	2.719.891.000,00	APBD
13	Diskopdag	1.3.3.01.01.32.005.	1.5.4.01.01.01.003.	Kontruksi Tempat Wisata Lumbok	Dispora	Semester II	2017	1	794.155.000,00	APBD
14	Diskopdag	1.3.3.01.01.32.005.	1.5.4.01.01.01.003.	Pergola	Hotel Lumbok Seminung	Semester II	2019	6	238.338.000,00	APBD
15	Diskopdag	1.3.3.04.01.34.001.	1.5.4.01.01.01.003.	Bangunan Pagar	Hotel Lumbok Seminung	Semester I	2011	1	473.568.000,00	Penilaian I 2022
16	Pengelola Barang	1.3.3.01.01.01.001.	1.5.4.01.01.02.003.	Ruang Rapat KPU	Way Mengaku	Semester II	2022	1	300.590.000,00	APBD
				Jumlah					**6.717.717.700,00**	

MUTASI KURANG MUTASI SKPD GEDUNG DAN BANGUNAN

NO	SKPD LAMA	SKPD BARU	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	ASAL USUL PEROLEHAN PADA NERACA
1	Dinas PUPR	Dispora	1.3.3.01.02.06.001.	Rehabilitasi Bangunan Hotel Utama C	Hotel Lumbok Seminung	Semester II	2024	1	733.326.200,00	APBD
2	Dinas PUPR	Sekretariat Daerah	1.3.3.01.01.09.001.	Rehabilitasi Anjungan Lampung Barat	Way Halim Bandar Lampung	Semester II	2024	1	895.105.725,00	APBD
Jumlah									1.628.431.925,00	

RINCIAN ASET TETAP JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PER PERANGKAT DAERAH PER 31 DESEMBER 2024

No.	SKPD/OPD	31 Desember 2024	31-Dec-23	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Sekretariat Daerah	9.595.450.308,67	18.007.109.253,67	(8.411.658.945,00)	(46,71)
2	Sekretariat DPRD	172.128.059,00	172.128.059,00	0,00	0,00
3	Inspektorat	3.236.000,00	3.236.000,00	0,00	0,00
4	BKAD	56.233.750,00	87.649.750,00	(31.416.000,00)	(35,84)
5	Badan Pendapatan Daerah	31.416.000,00	0,00	31.416.000,00	100,00
6	BAPPEDA	22.569.000,00	22.569.000,00	0,00	0,00
7	Badan Riset dan Inovasi Daerah	23.750.686.578,00	13.890.000,00	23.736.796.578,00	170.891,26
8	BKPSDM	3.446.000,00	3.446.000,00	0,00	0,00
9	BPBD	7.982.522.920,00	7.982.522.920,00	0,00	0,00
10	Badan Kesbangpol	9.259.000,00	9.259.000,00	0,00	0,00
11	Sat. Pol PP	821.662.350,00	821.662.350,00	0,00	0,00
12	Dinas Dikbud.	22.655.397.538,00	22.383.131.418,00	272.266.120,00	1,22
13	Dinas Kesehatan	226.231.000,00	226.231.000,00	0,00	0,00
14	Dinas PUPR	1.964.498.790.368,77	1.891.210.998.298,77	73.287.792.070,00	3,88
15	Disduk dan Capil	17.414.000,00	17.414.000,00	0,00	0,00
16	Dinas Kepemudaan OR & Pariwisata	2.244.171.456,00	2.390.635.082,00	(146.463.626,00)	(6,13)
17	Dinas Koperasi dan Perdagangan	5.391.938.607,00	1.347.117.607,00	4.044.821.000,00	300,26
18	Dinas PP, KB, PP,&PA	8.999.000,00	8.999.000,00	0,00	0,00
19	Dinas Ket. Pangan	3.587.000,00	3.587.000,00	0,00	0,00
20	Dinas TPH	47.872.270.933,00	46.612.878.933,00	1.259.392.000,00	2,70
21	Dinas Bun & Nak	3.384.827.297,63	3.384.827.297,63	0,00	0,00
22	Dinas Perikanan	5.891.395.387,00	5.891.395.387,00	0,00	0,00
23	Dinas PMP	2.662.928.300,00	2.662.928.300,00	0,00	0,00
24	Dinas LH	11.711.764.495,00	25.257.245.674,00	(13.545.481.179,00)	(53,63)
25	Dinas PM, PTSP, & Naker	9.038.000,00	9.038.000,00	0,00	0,00
26	Dinas Sosial	894.347.000,00	894.347.000,00	0,00	0,00
27	Dinas Perhubungan	1.393.654.800,00	1.393.654.800,00	0,00	0,00
28	Dinas Kominfo	54.864.000,00	54.864.000,00	0,00	0,00
29	Dinas Perpus&Arsip	29.295.000,00	23.295.000,00	6.000.000,00	25,76
30	Dinas Tenaga Kerja dan Industri	172.166.845,00	0,00	172.166.845,00	0,00
31	RSUD Liwa	2.882.931.000,00	2.882.931.000,00	0,00	0,00
33	Kec. Belalau	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
34	Kec. Sumberjaya	193.412.000,00	0,00	193.412.000,00	100,00
36	Kec. Sekincau	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
41	Kec. Kebun Tebu	105.215.380,00	0,00	105.215.380,00	100,00
47	Kel. Pasar Liwa	1.941.893.500,00	1.637.797.250,00	304.096.250,00	18,57
48	Kel. Way Mengaku	2.194.518.778,00	1.939.242.886,00	255.275.892,00	13,16
49	Kel. Sekincau	1.388.584.385,00	1.191.499.385,00	197.085.000,00	16,54
50	Kel. Fajar Bulan	1.627.235.388,00	1.429.217.640,00	198.017.748,00	13,85
51	Kel. Tugu Sari	1.647.905.046,00	1.450.241.918,00	197.663.128,00	13,63
52	Puskesmas Liwa	1.571.526.200,00	1.571.526.200,00	0,00	0,00
53	Puskesmas Kenali	1.510.849.200,00	1.510.849.200,00	0,00	0,00
54	Puskesmas Sumber Jaya	1.026.642.200,00	1.026.642.200,00	0,00	0,00
55	Puskesmas Fajar Bulan	2.298.323.833,00	2.298.323.833,00	0,00	0,00
56	Puskesmas Sekincau	1.634.254.011,00	1.149.254.011,00	485.000.000,00	42,20
57	Puskesmas Gisimulyo	2.578.842.034,00	2.093.842.034,00	485.000.000,00	23,16
58	Puskesmas Batu Brak	681.231.633,00	681.231.633,00	0,00	0,00
59	Puskesmas Buay Nyerupa	1.641.265.500,00	1.641.265.500,00	0,00	0,00
60	Puskesmas Gedung Surian	1.511.162.400,00	1.511.162.400,00	0,00	0,00
61	Puskesmas Kebun Tebu	1.577.129.200,00	1.577.129.200,00	0,00	0,00
62	Puskesmas Air Hitam	1.433.946.500,00	1.433.946.500,00	0,00	0,00
63	Puskesmas Pagar Dewa	1.741.553.100,00	1.741.553.100,00	0,00	0,00
64	Puskesmas Batu Ketulis	1.954.825.500,00	1.469.825.500,00	485.000.000,00	33,00
65	Puskesmas BNS	1.493.839.500,00	1.493.839.500,00	0,00	0,00
66	Puskesmas Lumbok Seminung	1.509.148.782,00	1.509.148.782,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**2.147.722.976.063,07**	**2.064.141.579.802,07**	**83.581.396.261,00**	**2.560,55**

MUTASI TAMBAH REKLASIFIKASI ASET PERALATAN DAN MESIN KE ASET JALAN, IRIGASI, DAN BANGUNAN

NO	SKPD	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	TANGGAL PEROLEHAN	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	NILAI PEROLEHAN
1	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.008.	Tandon Air Elite 500L/Area Kamar Mandi	SDN SIDOMULYO	2024-02-29	Semester I	2024	1	2.100.000,00	2.100.000,00
2	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.008.	Toren Air Pinguin 1000L/Area Kamar Mandi	SDN 1 MEKARJAYA	2024-06-22	Semester I	2024	1	1.950.000,00	1.950.000,00
3	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.008.	Toren Air Elite 500L	SDN 3 SUKARAJA	2024-09-24	Semestar II	2024	1	1.500.000,00	1.500.000,00
4	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.008.	Tiang Besi/Toren Air ukuran 120x190 dan Toren/Sekolah	SDN 4 Liwa	2024-10-10	Semestar II	2024	1	2.300.000,00	2.300.000,00
5	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.008.	Toren Air/Tandon Air (Pinguin warna Orange)/Sumur Sekolah	SDN 2 Mekarjaya	2024-10-29	Semestar II	2024	1	1.900.000,00	1.900.000,00
6	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.008.	Toren Air/Tandon Air Elite 500Ltr/Area Kamar Mandi	SMPN 1 BATU KETULIS	2024-02-25	Semester I	2024	1	1.200.000,00	1.200.000,00
7	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.008.	Toren Elite 500Ltr/Area Kamar Mandi	SMPN 1 PAGAR DEWA	2024-03-11	Semester I	2024	1	870.000,00	870.000,00
8	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.008.	Tower Air Pinguin 1000L	SMPN 4 LIWA	2024-09-17	Semestar II	2024	1	7.000.000,00	7.000.000,00
9	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.008.	TOREN/TANDON AIR Pinguin 500Ltr/Beranda Toilet	SMPN 3 KEBUN TEBU	2024-09-13	Semestar II	2024	1	1.000.000,00	1.000.000,00
10	Disnakeperin	1.3.4.03.01.05.002.	Sink Portable SUS 304 Full Stainless	Gedung Sarana Produksi Bersama Sentra Olahan Ikan Kecamatan Lumbok Seminung	2024-09-18	Semestar II	2024	1	2.106.225,00	2.106.225,00
11	Disnakeperin	1.3.4.03.01.05.002.	Sink Portable SUS 304 Full Stainless	Gedung Sarana Produksi Bersama Sentra Olahan Ikan Kecamatan Lumbok Seminung	2024-09-18	Semestar II	2024	1	2.106.225,00	2.106.225,00
12	Disnakeperin	1.3.4.03.01.05.002.	Sink Portable SUS 304 Full Stainless	Gedung Sarana Produksi Bersama Sentra Olahan Ikan Kecamatan Lumbok Seminung	2024-09-18	Semestar II	2024	1	2.106.225,00	2.106.225,00
13	Disnakeperin	1.3.4.03.01.05.002.	Sink Portable SUS 304 Full Stainless	Gedung Sarana Produksi Bersama Sentra Olahan Ikan Kecamatan Lumbok Seminung	2024-09-18	Semestar II	2024	1	2.106.225,00	2.106.225,00
14	DLH	1.3.4.03.03.04.001.	Container Sampah	Arm Roll Container Sampah Kap 6 M3	2024-08-25	Semestar II	2024	1	161.250.000,00	161.250.000,00
15	DLH	1.3.4.03.03.04.001.	Container Sampah	Arm Roll Container Sampah Kap 6 M3	2024-08-25	Semestar II	2024	1	161.250.000,00	161.250.000,00
16	DLH	1.3.4.03.03.04.001.	Container Sampah	Arm Roll Container Sampah Kap 6 M3	2024-08-25	Semestar II	2024	1	161.250.000,00	161.250.000,00
17	DLH	1.3.4.03.03.04.001.	Container Sampah	Arm Roll Container Sampah Kap 6 M3	2024-08-25	Semestar II	2024	1	161.250.000,00	161.250.000,00
				Jumlah					673.244.900,00	

MUTASI TAMBAH REKLASIFIKASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN KE ASET JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

NO	SKPD	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	TANGGAL PEROLEHAN	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	HARGA PEROLEHAN
1	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.007.	MCK	SDN WAY SULUH	2024-11-15	Semester II	2024	1	53.631.155,00
2	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.007.	Rehabilitasi Sedang/Berat/Jamban	SDN 2 KEMBAHANG	2024-10-15	Semester II	2024	1	103.777.296,00
3	Dinas Pendidikan	1.3.4.02.06.05.007.	Rehabilitasi Sedang/Berat/Jamban Toilet	SMPN 2 WAY TENONG	2024-10-18	Semester II	2024	1	95.037.669,00
4	Dispora	1.3.4.03.03.03.002.	Bangunan TPS	Lumbok seminung	2024-11-29	Semester II	2024	1	280.228.495,00
5	Dispora	1.3.4.02.06.05.007.	Toilet	Lumbok seminung	2024-11-29	Semester II	2024	1	310.038.507,00
6	Diskopdag	1.3.4.01.01.09.009.	Jalan Untuk Pejalan Kaki	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 2)	2024-12-31	Semester II	2024	1	581.321.000,00
7	Diskopdag	1.3.4.02.06.05.007.	Kamar Mandi/WC	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 2)	2024-12-31	Semester II	2024	1	145.584.000,00
8	Diskopdag	1.3.4.02.06.05.007.	Kamar Mandi/WC	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 6)	2024-12-31	Semester II	2024	1	165.037.000,00
9	Diskopdag	1.3.4.02.06.05.007.	Kamar Mandi/WC	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 6)	2024-12-31	Semester II	2024	1	165.037.000,00
10	Diskopdag	1.3.4.01.01.09.009.	Jalan Untuk Pejalan Kaki	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	747.914.000,00
11	Diskopdag	1.3.4.02.04.04.002.	Drainase	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	330.447.000,00
12	Diskopdag	1.3.4.02.04.05.007.	Talud (Dinding Penahan Tanah)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	958.989.000,00
13	Diskopdag	1.3.4.03.03.03.002.	TPS IPAL	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	135.936.000,00
14	Diskopdag	1.3.4.02.06.05.006.	Ground Tank	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	23.991.000,00
15	Diskopdag	1.3.4.02.06.05.006.	Ground Tank	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	23.991.000,00
16	Diskopdag	1.3.4.03.10.01.001.	Pemasangan MDP/SDP Genset 33KVA (Instalasi Genset)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 7)	2024-12-31	Semester II	2024	1	9.026.000,00
17	Diskopdag	1.3.4.02.06.05.007.	Toilet	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 4)	2024-11-25	Semester II	2024	1	115.855.000,00
18	Diskopdag	1.3.4.02.04.05.007.	Dinding Penahan Tanah	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 4)	2024-11-25	Semester II	2024	1	628.301.000,00
19	Diskopdag	1.3.4.03.01.05.002.	Instalasi Air Bersih	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 4)	2024-11-25	Semester II	2024	1	64.292.000,00
				Jumlah					4.937.934.122,00

MUTASI TAMBAH MUTASI SKPD ATAS ASET JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

NO	SKPD LAMA	SKPD BARU	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	ASAL USUL PEROLEHAN
1	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sekincau	1.3.4.03.02.01.001.	Instalasi IPAL	Halaman Belakang	Semester II	2024	1	485.000.000,00	APBD
2	Dinas Kesehatan	Puskesmas Batu Ketulis	1.3.4.03.02.01.001.	Instalasi IPAL	Halaman Belakang	Semester II	2024	1	485.000.000,00	APBD
3	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sirmulyo	1.3.4.03.02.01.001.	Instalasi IPAL	Halaman Belakang	Semester II	2024	1	485.000.000,00	APBD
4	Dinas PUPR	Kec. Sumber Jaya	1.3.4.02.04.04.002.	Saluran Drainage	Drainase GSG Sumberjaya	Semester II	2024	1	193.412.000,00	APBD
5	Dinas PUPR	Kec. Kebun Tebu	1.3.4.02.04.05.007.	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	Talud Lapangan Pekon Tribudisyukur Kecamatan Kebun Tebu	Semester II	2024	1	105.215.380,00	APBD
6	Pengelola Barang	Dinas PUPR	1.3.4.01.01.05.001.	Jalan Poros Desa	Pekon Kegeringan Kec. Batu Brak Kab. Lampung Barat	Semester I	2009	1	2.020.238.000,00	APBD
7	Pengelola Barang	Dinas TPH	1.3.4.01.01.09.001.	Jalan Usaha Tani	Pekon Sukaraja Kec. Batu Brak Kab. Lampung Barat	Semester I	2009	1	1.259.392.000,00	APBD
8	Pengelola Barang	Dinas PUPR	1.3.4.03.01.05.002.	SPAM IKK	Way Tenong (Fajar Bulan) III	Semester I	2016	1	5.957.531.000,00	Hibah
9	Pengelola Barang	Dinas PUPR	1.3.4.03.01.05.002.	SPAM IKK	Sukau II	Semester I	2015	1	6.801.570.000,00	Hibah
10	Pengelola Barang	Dinas PUPR	1.3.4.03.01.05.002.	SPAM IKK	Way Tenong (Fajar Bulan) IV	Semester I	2016	1	6.553.776.000,00	Hibah
11	Pengelola Barang	Dinas PUPR	1.3.4.03.01.05.002.	SPAM IKK	Giham I	Semester I	2012	1	6.752.603.000,00	Hibah
12	Pengelola Barang	Dinas PUPR	1.3.4.03.01.05.002.	SPAM IKK	Giham II	Semester I	2012	1	518.760.000,00	Hibah
13	Pengelola Barang	Dinas PUPR	1.3.4.03.01.05.002.	SPAM Perdesaan	Lumbok Seminung	Semester I	2007	1	494.855.672,00	Hibah
14	Pengelola Barang	Dinas PUPR	1.3.4.03.01.05.002.	SPAM Perdesaan	Desa Purawiwitan	Semester I	2008	1	743.614.235,00	Hibah
15	Pengelola Barang	Dinas PUPR	1.3.4.04.01.04.002.	SPM MBR	Desa Pampangan	Semester I	2015	1	3.297.798.000,00	Hibah
16	Pengelola Barang	Dinas PUPR	1.3.4.04.01.04.002.	SPAM MBR	Tiga Jaya, Sukabumi & Giham Balak	Semester I	2014	1	2.333.999.000,00	Hibah
					JUMLAH				**38.487.764.287,00**	

RINCIAN ASET TETAP LAINNYA PER PERANGKAT DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

No.	SKPD/OPD	31-Dec-24	31-Dec-23	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Sekretariat Daerah	345.245.975,00	345.245.975,00	0,00	0,00
2	Sekretariat DPRD	411.658.000,00	411.658.000,00	0,00	0,00
3	Inspektorat	7.255.000,00	7.255.000,00	0,00	0,00
4	BKAD	45.360,00	45.360,00	0,00	0,00
6	BAPPEDA	443.000,00	443.000,00	0,00	0,00
7	Badan Riset dan Inovasi Daerah	48.730.000,00	0,00	48.730.000,00	0,00
11	Sat. Pol PP	167.076.000,00	167.076.000,00	0,00	0,00
12	Dinas Dikbud.	71.262.205.007,39	66.563.605.807,39	4.698.599.200,00	7,06
13	Dinas Kesehatan	1.673.600,00	1.673.600,00	0,00	0,00
14	Dinas PUPR	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
16	Dinas Kepemudaan OR & Pariwisa	855.768.000,00	855.768.000,00	0,00	0,00
17	Dinas Koperasi dan Perdagangan	0,00	3.350.000,00	(3.350.000,00)	(100,00)
18	Dinas PP, KB, PP,&PA	130.898.161,00	130.898.161,00	0,00	0,00
20	Dinas TPH	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
21	Dinas Bun & Nak	42.488.200,00	42.488.200,00	0,00	0,00
22	Dinas Perikanan	97.197.000,00	97.197.000,00	0,00	0,00
24	Dinas LH	127.490.000,00	176.220.000,00	(48.730.000,00)	(27,65)
27	Dinas Perhubungan	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
29	Dinas Perpus&Arsip	1.382.390.988,00	1.328.898.478,00	53.492.510,00	4,03
30	Dinas Tenaga Kerja dan Industri	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00
31	RSUD Liwa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
32	Kec. Balik Bukit	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
33	Kec. Belalau	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00
34	Kec. Sumberjaya	2.736.000,00	2.736.000,00	0,00	0,00
35	Kec. Way Tenong	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
36	Kec. Sekincau	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
37	Kec. Suoh	331.000,00	331.000,00	0,00	0,00
38	Kec. Batubrak	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
39	Kec. Sukau	747.800,00	747.800,00	0,00	0,00
47	Kel. Pasar Liwa	21.938.400,00	21.938.400,00	0,00	0,00
48	Kel. Way Mengaku	28.372.400,00	28.372.400,00	0,00	0,00
49	Kel. Sekincau	20.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	33,33
50	Kel. Fajar Bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
52	Puskesmas Liwa	421.600,00	421.600,00	0,00	0,00
53	Puskesmas Kenali	421.600,00	421.600,00	0,00	0,00
54	Puskesmas Sumber Jaya	421.600,00	421.600,00	0,00	0,00
56	Puskesmas Sekincau	784.900,00	424.900,00	360.000,00	84,73
57	Puskesmas Srimulyo	421.600,00	421.600,00	0,00	0,00
58	Puskesmas Batu Brak	421.600,00	421.600,00	0,00	0,00
60	Puskesmas Gedung Surian	421.600,00	421.600,00	0,00	0,00
65	Puskesmas BNS	421.600,00	421.600,00	0,00	0,00
66	Puskesmas Lumbok Seminung	421.600,00	421.600,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**74.975.254.591,39**	**70.217.802.881,39**	**4.757.451.710,00**	**0,02**

RINCIAN ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PER 31 DESEMBER 2024

No.	OPD	KODE BARANG	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	SEMESTER PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	SALDO AKHIR TAHUN 2024
1	BPBD	1.3.6.01.01.01.004.	Perencanaan Rehab Pengaman Sungai	Way Warkuk	Semester II	2023	92.025.680,00
2	BPBD	1.3.6.01.01.01.004.	Perencanaan Rehab Pengaman Sungai	Way Uluhan	Semester II	2023	92.027.880,00
3	BPBD	1.3.6.01.01.01.004.	Perencanaan Rehab Pengaman Sungai	Way Palaka	Semester II	2023	92.057.850,00
4	Dinas PUPR	1.3.6.01.01.01.004.	Studi Kelayakan Jembatan Sekuling-Sukarame	Dinas PUPR	Semester I	2008	352.000.000,00
5	Dinas PUPR	1.3.6.01.01.01.004.	Perencanaan Teknis Air Bersih	Dinas PUPR	Semester I	2008	176.199.000,00
6	Dinas PUPR	1.3.6.01.01.01.004.	Perencanaan Peningkatan Jembatan	Dinas PUPR	Semester I	2009	10.000.000,00
7	Dinas PUPR	1.3.6.01.01.01.004.	Perencanaan Pengembangan sistem Dist.Air Minum	Dinas PUPR	Semester I	2010	144.490.000,00
8	Dinas PUPR	1.3.6.01.01.01.004.	Perencanaan Peningkatan Jalan	Dinas PUPR	Semester I	2010	94.046.100,00
9	Dinas PUPR	1.3.6.01.01.01.004.	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Dinas PUPR	Semester I	2011	12.118.968,00
10	Dinas PUPR	1.3.6.01.01.01.003.	Pengembangan Perumahan	Dinas PUPR	Semester I	2012	269.780.000,00
11	Dinas PUPR	1.3.6.01.01.01.004.	Perencanaan Penataan Kawasan Kota Liwa	Dinas PUPR	Semester I	2013	396.340.000,00
12	Dinas PUPR	1.3.6.01.01.01.004.	Penyusunan Database Jalan Lingkungan (Balik Bukit, Pesisir Tengah, Sumberjaya)	Dinas PUPR	Semester I	2013	55.388.334,00
13	Dinas PUPR	1.3.6.01.01.01.003.	Pembangunan Depo Arsip Perpustakaan	Pembangunan Gedung	Semester II	2024	196.280.200,00
14	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	PASAR BAPOK (AREA KERING)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 1)	Semester II	2024	6.887.637.087,00
15	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	PASAR BAPOK (AREA BASAH)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 1)	Semester II	2024	5.633.860.791,00
16	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	GAPURA BAPOK	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 1)	Semester II	2024	387.383.365,00
17	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.004.	INSTALASI LISTRIK	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 1)	Semester II	2024	987.012.000,00
18	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	SHELTER GEN Z	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 1)	Semester II	2024	363.371.894,00
19	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	FOODCOURT	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 1)	Semester II	2024	866.301.383,00
20	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	ZONA KULINER (COFFE RANAU)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 5)	Semester II	2024	583.968.028,00
21	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	LAKTASI	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 5)	Semester II	2024	205.608.223,00
22	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	REHAP RUMAH JETSKI	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 5)	Semester II	2024	33.742.322,00
23	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	GAPURA UTAMA	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 5)	Semester II	2024	450.471.966,00
24	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	TUGU KENUI	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 5)	Semester II	2024	844.493.206,00
25	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.004.	DINDING PENAHAN TANAH	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 5)	Semester II	2024	3.466.962.103,00
26	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	PEDESTRIAN SELAMAT DATANG	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 5)	Semester II	2024	1.076.027.456,00
27	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	SHELTER 1	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 5)	Semester II	2024	83.902.436,00
28	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	SHELTER 2	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 5)	Semester II	2024	83.902.436,00
29	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	DERMAGA 1	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 3)	Semester II	2024	6.290.589.664,00
30	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	DERMAGA 2	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 3)	Semester II	2024	6.244.444.304,00
31	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	ZONA UMKM (SHELTER UMKM)	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 3)	Semester II	2024	1.233.832.842,00
32	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.004.	WC	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 3)	Semester II	2024	137.648.094,00
33	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.004.	WC	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 3)	Semester II	2024	137.648.094,00
34	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	REHAB COTTAGE KUJANG	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 3)	Semester II	2024	645.292.010,00
35	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	REHAB COTTAGE KENUI	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 3)	Semester II	2024	365.792.106,00
36	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	KOLAM RENANG	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 3)	Semester II	2024	95.529.575,00
37	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.003.	REHAB DAN PERLUASAN DERMAGA	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 3)	Semester II	2024	1.330.145.239,00
38	Diskopdag	1.3.6.01.01.01.002.	SUMUR BOR	PASAR WISATA LUMBOK SEMINUNG (AREA 3)	Semester II	2024	268.039.924,00
	JUMLAH						42.683.942.566,00

RINCIAN ASET TAK BERWUJUD PER PERANGKAT DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

No.	SKPD/OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Sekretariat Daerah	197.000.000,00	197.000.000,00	0,00	0,00
4	BKAD	481.400.000,00	1.124.143.000,00	(642.743.000,00)	(57,18)
5	Badan Pendapatan Daerah	490.062.500,00	0,00	490.062.500,00	100,00
6	BAPPEDA	774.896.091,00	774.896.091,00	0,00	0,00
7	Badan Riset dan Inovasi Daerah	182.680.500,00	30.000.000,00	152.680.500,00	508,94
8	BKPSDM	399.875.000,00	399.875.000,00	0,00	0,00
9	BPBD	197.480.000,00	0,00	197.480.000,00	100,00
12	Dinas Dikbud.	118.947.140,00	118.947.140,00	0,00	0,00
13	Dinas Kesehatan	25.601.040,00	57.601.040,00	(32.000.000,00)	(55,55)
23	Dinas PMP	168.800.000,00	168.800.000,00	0,00	0,00
24	Dinas LH	53.376.900,00	53.376.900,00	0,00	0,00
25	Dinas PM, PTSP, & Naker	122.732.000,00	122.732.000,00	0,00	0,00
27	Dinas Perhubungan	189.500.000,00	189.500.000,00	0,00	0,00
28	Dinas Kominfo	241.325.000,00	241.325.000,00	0,00	0,00
29	Dinas Perpus&Arsip	149.690.200,00	149.690.200,00	0,00	0,00
31	RSUD Liwa	40.110.000,00	40.110.000,00	0,00	0,00
52	Puskesmas Liwa	2.133.333,00	0,00	2.133.333,00	100,00
53	Puskesmas Kenali	2.133.333,00	0,00	2.133.333,00	100,00
54	Puskesmas Sumber Jaya	2.133.333,00	0,00	2.133.333,00	100,00
55	Puskesmas Fajar Bulan	2.133.333,00	0,00	2.133.333,00	100,00
56	Puskesmas Sekincau	2.133.333,00	0,00	2.133.333,00	100,00
57	Puskesmas Srimulyo	2.133.333,00	0,00	2.133.333,00	100,00
58	Puskesmas Batu Brak	2.133.334,00	0,00	2.133.334,00	100,00
59	Puskesmas Buay Nyerupa	2.133.334,00	0,00	2.133.334,00	100,00
60	Puskesmas Gedung Surian	2.133.333,00	0,00	2.133.333,00	100,00
61	Puskesmas Kebun Tebu	2.133.333,00	0,00	2.133.333,00	100,00
62	Puskesmas Air Hitam	2.133.334,00	0,00	2.133.334,00	100,00
63	Puskesmas Pagar Dewa	2.133.333,00	0,00	2.133.333,00	100,00
64	Puskesmas Batu Ketulis	2.133.334,00	0,00	2.133.334,00	100,00
65	Puskesmas BNS	2.133.334,00	0,00	2.133.334,00	100,00
66	Puskesmas Lumbok Seminung	2.133.333,00	0,00	2.133.333,00	100,00
	JUMLAH	**3.865.476.371,00**	**3.667.996.371,00**	**197.480.000,00**	**32,78**

RINCIAN ASET LAIN-LAIN PER PERANGKAT DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

No.	SKPD/OPD	31 Desember 2024	1 Januari 2024	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Sekretariat Daerah	2.678.747.439,00	2.686.097.439,00	(7.350.000,00)	(0,27)
2	Sekretariat DPRD	962.692.600,00	962.692.600,00	0,00	0,00
3	Inspektorat	24.000.466,67	24.000.466,67	0,00	0,00
4	BKAD	543.294.450,00	5.500.000,00	537.794.450,00	9.778,08
6	BAPPEDA	152.314.579,00	152.314.579,00	0,00	0,00
8	BKPSDM	144.984.121,00	5.212.621,00	139.771.500,00	2.681,41
10	Badan Kesbangpol	5.298.333,00	5.298.333,00	0,00	0,00
11	Sat. Pol PP	0,00	96.313.666,00	(96.313.666,00)	(100,00)
12	Dinas Dikbud	25.879.543.018,00	26.759.630.018,00	(880.087.000,00)	(3,29)
13	Dinas Kesehatan	1.035.623.750,00	1.035.623.750,00	0,00	0,00
14	Dinas PUPR	180.123.441.191,00	165.919.452.397,00	14.203.988.794,00	8,56
15	Disduk dan Capil	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
16	Dinas Kepemudaan OR & Pariwisata	31.399.000,00	31.399.000,00	0,00	0,00
17	Dinas Koperasi dan Perdagangan	158.065.500,00	158.065.500,00	0,00	0,00
18	Dinas PP, KB, PP,&PA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
20	Dinas TPH	2.266.442.930,00	13.226.350.762,00	(10.959.907.832,00)	(82,86)
21	Dinas Bun & Nak	1.055.978.300,00	1.055.978.300,00	0,00	0,00
22	Dinas Perikanan	725.650.414,00	839.025.390,00	(113.374.976,00)	(13,51)
23	Dinas PMP	26.557.400,00	26.557.400,00	0,00	0,00
24	Dinas LH	318.442.283,00	318.442.283,00	0,00	0,00
25	Dinas PM, PTSP, & Naker	17.540.000,00	12.840.000,00	4.700.000,00	36,60
26	Dinas Sosial	3.826.000,00	3.826.000,00	0,00	0,00
27	Dinas Perhubungan	979.144.000,00	979.144.000,00	0,00	0,00
28	Dinas Kominfo	294.339.800,00	0,00	294.339.800,00	100,00
31	RSUD Liwa	1.480.372.500,00	2.156.887.900,00	(676.515.400,00)	(31,37)
32	Kec. Balik Bukit	9.628.333,33	9.628.333,33	0,00	0,00
33	Kec. Belalau	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00
34	Kec. Sumberjaya	19.975.000,00	19.975.000,00	0,00	0,00
35	Kec. Way Tenong	4.123.200,00	4.123.200,00	0,00	0,00
36	Kec. Sekincau	281.865.000,00	281.865.000,00	0,00	0,00
37	Kec. Suoh	7.437.000,00	7.437.000,00	0,00	0,00
38	Kec. Batubrak	1.508.000,00	1.508.000,00	0,00	0,00
49	Kel. Sekincau	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00
52	Puskesmas Liwa	26.599.992,00	26.599.992,00	0,00	0,00
53	Puskesmas Kenali	192.015.850,00	192.015.850,00	0,00	0,00
54	Puskesmas Sumber Jaya	15.045.000,00	15.045.000,00	0,00	0,00
55	Puskesmas Fajar Bulan	18.748.049,00	18.748.049,00	0,00	0,00
56	Puskesmas Sekincau	121.070.000,00	121.070.000,00	0,00	0,00
57	Puskesmas Srimulyo	65.313.569,00	65.313.569,00	0,00	0,00
58	Puskesmas Batu Brak	109.156.000,00	109.156.000,00	0,00	0,00
59	Puskesmas Buay Nyerupa	8.024.502,00	8.024.502,00	0,00	0,00
60	Puskesmas Gedung Surian	37.993.000,00	37.993.000,00	0,00	0,00
61	Puskesmas Kebun Tebu	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00
62	Puskesmas Air Hitam	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
64	Puskesmas Batu Ketulis	2.103.400,00	2.103.400,00	0,00	0,00
65	Puskesmas BNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
66	Puskesmas Lumbok Seminung	43.090.000,00	43.090.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**219.918.057.970,00**	**217.471.012.300,00**	**2.447.045.670,00**	**184,68**

Kertas Kerja Perhitungan Koreksi Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan Tahun 2024
(Koreksi Akumulasi Penyusutan JJI SMT II 2023)
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
No. 030/ 98 /BMD/IV.01/2025

No	Nama OPD	Akumulasi Penyusutan Pada Aset Jalan Unaudited	Beban Penyusutan Pada Unaudited	Koreksi Penyusutan Atas Beban Penyusutan Semester II Tahun 2023	Beban Penyusutan Setelah Koreksi	Koreksi Atas Beban Penyusutan Tahun 2024	Koreksi Lebih Catat Beban Penyusutan Tahun 2024	Koreksi Kurang Catat Beban Penyusutan Tahun 2024	Akumulasi Penyusutan Pada Aset Jalan Audited
1	2	3	4	5	6	7 = 6-5	8=7<0	9=7>0	10
1	Brida	11.433.238.618,00	2.224.390.218,00	470.329.284,00	1.754.060.934,00	(470.329.284,00)	470.329.284,00	0,00	11.433.238.618,00
2	BPBD	352.700.167,00	35.406.478,00	22.619.600,00	46.711.778,00	11.305.300,00	0,00	11.305.300,00	386.616.067,00
3	Dinas Pendidikan	10.404.875,00	2.401.125,00	1.600.750,00	3.201.500,00	800.375,00	0,00	800.375,00	12.806.000,00
4	Dinas PUPR	979.715.753.442,00	109.936.296.035,00	37.345.521.460,00	73.934.292.633,00	(36.004.003.403,00)	36.004.003.403,00	0,00	981.057.271.499,00
5	Dispora	30.992.639,00	30.992.639,00	0,00	30.992.639,00	0,00	0,00	0,00	30.992.639,00
6	Dinas TPH	3.275.459.400,00	237.184.400,00	0,00	237.184.400,00	0,00	0,00	0,00	3.275.459.400,00
7	Disbunak	2.364.498.596,00	458.528.446,00	152.842.815,00	305.685.631,00	(152.842.815,00)	152.842.815,00	0,00	2.364.498.596,00
8	Dinas Perikanan	560.832.000,00	31.215.000,00	10.405.000,00	20.810.000,00	(10.405.000,00)	10.405.000,00	0,00	560.832.000,00
9	Dinas PMP	466.824.434,00	181.063.010,00	54.177.403,00	126.885.607,00	(54.177.403,00)	54.177.403,00	0,00	466.824.434,00
10	DLH	2.593.350.859,00	375.530.356,00	125.176.785,00	250.353.571,00	(125.176.785,00)	125.176.785,00	0,00	2.593.350.859,00
11	Dinsos	852.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.408.000,00
12	Dishub	9.875.000,00	5.925.000,00	1.975.000,00	3.950.000,00	(1.975.000,00)	1.975.000,00	0,00	9.875.000,00
13	Dinas Perpustakaan	4.861.500,00	2.083.500,00	694.500,00	1.389.000,00	(694.500,00)	694.500,00	0,00	4.861.500,00
14	Diskopdag	437.537.750,00	66.461.750,00	0,00	66.461.750,00	0,00	0,00	0,00	437.537.750,00
15	Kel. Fajar Bulan	548.397.215,00	198.277.749,00	58.394.243,00	139.883.506,00	(58.394.243,00)	58.394.243,00	0,00	548.397.215,00
16	Kel. Pasar Liwa	693.236.638,00	266.101.052,00	71.911.699,00	194.189.353,00	(71.911.699,00)	71.911.699,00	0,00	693.236.638,00
17	Kel. Way Mengaku	779.416.791,00	289.209.064,00	80.326.114,00	208.882.950,00	(80.326.114,00)	80.326.114,00	0,00	779.416.791,00
18	Kel. Tugu Sari	584.375.750,00	204.121.422,00	56.637.838,00	147.483.584,00	(56.637.838,00)	56.637.838,00	0,00	584.375.750,00
19	Kel. Sekincau	481.981.175,00	176.191.060,00	45.662.546,00	130.528.514,00	(45.662.546,00)	45.662.546,00	0,00	481.981.175,00
	Jumlah	**1.005.196.144.849,00**	**114.723.378.315,00**	**38.498.266.037,00**	**77.602.947.360,00**	**(37.120.430.955,00)**	**37.132.536.630,00**	**12.105.675,00**	**1.006.573.979.931,00**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KERTAS KERJA PENYUSUTAN TAHUN 2024
68 PEMDA

NO	KELOMPOK BARANG	KONTROL SALDO 31 DES 2023	MUTASI TAMBAH BELANJA MODAL	MUTASI TAMBAH BELANJA LAINNYA	MUTASI TAMBAH HIBAH	MUTASI TAMBAH REKLASIFIKASI KOREKSI 1	MUTASI TAMBAH REKLASIFIKASI KOREKSI 2	MUTASI TAMBAH MUTASI SKPD	MUTASI TAMBAH PENGHENTIAN ASET	MUTASI TAMBAH TAHUN 2024
	Tanah	**652.395.963.680,00**	-	-	**154.350,00**	**1.047.000.000,00**	**578.215.200,00**	-	-	**1.625.369.550,00**
A	Tanah	652.395.963.680,00	-	-	154.350,00	1.047.000.000,00	578.215.200,00	-	-	1.625.369.550,00
	Peralatan dan Mesin	**478.161.840.538,69**	**20.100.143.587,00**	**19.223.000,00**	**320.570.194,00**	-	-	**3.156.974.995,00**	-	**23.596.911.776,00**
B.1	Alat Besar	14.245.176.119,00	347.290.500,00	-	-	-	-	-	-	347.290.500,00
B.2	Alat Angkutan	87.938.516.340,00	4.485.973.300,00	-	126.261.000,00	-	-	2.179.864.739,00	-	6.774.099.039,00
B.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.852.961.053,00	222.513.445,00	-	10.059.194,00	-	-	20.780.000,00	-	253.358.639,00
B.4	Alat Pertanian	3.369.396.872,00	158.840.500,00	-	-	-	-	-	-	158.840.500,00
B.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	133.963.567.609,08	6.132.424.635,00	3.223.000,00	-	-	-	122.800.000,00	-	6.258.447.635,00
B.6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	15.383.615.806,00	1.705.593.650,00	-	-	-	-	-	-	1.705.593.650,00
B.7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	103.258.092.829,94	2.322.375.310,00	-	182.250.000,00	-	-	380.180.000,00	-	2.884.805.310,00
B.8	Alat Laboratorium	34.061.664.999,67	733.057.401,00	-	-	-	-	253.670.000,00	-	986.727.401,00
B.9	Alat Persenjataan	463.347.260,00	-	-	-	-	-	-	-	-
B.10	Komputer	65.586.148.028,00	3.231.524.993,00	16.000.000,00	-	-	-	-	-	3.247.524.993,00
B.13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	2.321.302.130,00	404.971.756,00	-	-	-	-	199.680.256,00	-	604.652.012,00
B.15	Alat Kesalamatan Kerja	2.943.146.539,00	189.317.000,00	-	-	-	-	-	-	189.317.000,00
B.16	Alat Perang	1.061.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
B.17	Peralatan Proses/Produksi	138.439.965,00	-	-	-	-	-	-	-	-
B.18	Rambu - Rambu	4.685.950.706,00	110.275.000,00	-	-	-	-	-	-	110.275.000,00
B.19	Peralatan Olah Raga	3.965.461.262,00	75.979.097,00	-	-	-	-	-	-	75.979.097,00
	Gedung dan Bangunan	**936.369.585.791,34**	**41.051.179.264,00**	**17.500.000,00**	-	**880.087.000,00**	**124.150.000,00**	**1.828.431.925,00**	-	**43.701.344.189,00**
C.1	Bangunan Gedung	905.410.045.962,43	40.353.695.765,00	17.500.000,00	-	880.087.000,00	124.150.000,00	1.828.431.925,00	-	43.003.624.690,00
C.2	Monumen	10.737.145.845,00	-	-	-	-	-	-	-	-
C.4	Tugu Tilik Kontrol/Pasti	18.222.393.993,91	697.519.499,00	-	-	-	-	-	-	697.519.499,00
	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	**2.064.141.579.802,87**	**46.982.985.354,00**	-	**36.734.136.907,00**	-	-	**38.487.764.287,00**	-	**122.204.886.548,00**
D.1	Jalan dan Jembatan	1.957.033.703.271,40	38.153.179.502,00	-	3.279.630.000,00	-	-	3.279.630.000,00	-	44.712.439.502,00
D.2	Bangunan Air	418.181.007.419,67	6.231.898.457,00	-	-	-	-	298.527.380,00	-	6.530.525.837,00
D.3	Instalasi	47.508.817.991,00	2.597.907.366,00	-	27.822.709.907,00	-	-	29.277.709.907,00	-	59.698.327.209,00
D.4	Jaringan	41.418.251.120,00	-	-	5.631.797.000,00	-	-	5.631.797.000,00	-	11.263.594.000,00
	Aset Tetap Lainnya	**70.217.803.881,39**	**4.757.451.710,00**	-	-	-	-	-	-	**4.757.451.710,00**
E.1	Bahan Perpustakaan	82.321.033.848,39	4.185.624.310,00	-	-	-	-	-	-	4.185.624.310,00
E.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	7.727.754.035,00	571.827.400,00	-	-	-	-	-	-	571.827.400,00
E.3	Hewan	36.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
E.5	Tanaman	132.205.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	**1.787.453.818,00**	**40.896.486.748,00**	-	-	-	-	-	-	**40.896.486.748,00**
F	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.787.453.818,00	40.896.486.748,00	-	-	-	-	-	-	40.896.486.748,00
	ASET TETAP	**4.201.074.228.511,49**	**153.788.242.663,00**	**36.723.000,00**	**37.054.661.451,00**	**1.927.087.000,00**	**702.365.200,00**	**43.273.171.207,00**	-	**236.782.450.521,00**
	Aset Lainnya	**221.139.008.671,00**	**197.460.000,00**	-	**14.203.988.794,00**	-	-	**14.203.988.794,00**	**9.029.968.075,00**	**37.635.425.663,00**
G.1	Aset Tidak Berwujud	3.667.996.371,00	197.460.000,00	-	-	-	-	-	-	197.460.000,00
G.2	Aset Lain-lain	217.471.012.300,00	-	-	14.203.988.794,00	-	-	14.203.988.794,00	9.029.968.075,00	37.437.945.663,00
	ASET	**4.422.213.237.182,49**	**153.985.722.663,00**	**36.723.000,00**	**51.258.650.245,00**	**1.927.087.000,00**	**702.365.200,00**	**57.477.160.001,00**	**9.029.968.075,00**	**274.417.876.184,00**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KERTAS KERJA PENYUSUTAN TAHUN 2024
68 PEMDA

NO	KELOMPOK BARANG	MUTASI KURANG PENGHAPUSAN	MUTASI KURANG PENGHENTIAN ASET	MUTASI KURANG REKLASIFIKASI KOREKSI 1	MUTASI KURANG MUTASI SKPD	MUTASI KURANG TAHUN 2024	SALDO AKHIR 2024	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN AKHIR TAHUN 2024	NILAI BUKU AKHIR TAHUN 2024
	Tanah	-	**567.063.815,00**	**1.047.000.000,00**	-	**1.614.063.815,00**	**652.407.269.415,00**	-	-	**652.407.269.415,00**
A	Tanah	-	567.063.815,00	1.047.000.000,00	-	1.614.063.815,00	652.407.269.415,00	-	-	652.407.269.415,00
	Peralatan dan Mesin	-	**1.609.460.560,00**	-	**3.156.974.995,00**	**4.766.435.555,00**	**496.992.318.759,69**	**33.391.149.074,35**	**433.220.113.911,39**	**63.772.202.848,30**
B.1	Alat Besar	-	-	-	-	-	14.556.466.619,00	595.559.045,67	13.157.584.867,67	1.398.881.751,33
B.2	Alat Angkutan	-	4.700.000,00	-	2.179.864.739,00	2.184.564.739,00	92.528.050.640,00	3.719.394.305,00	83.215.727.565,00	9.312.323.075,00
B.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	2.970.000,00	-	29.780.000,00	29.750.000,00	6.082.569.692,00	506.646.480,00	5.148.309.945,00	934.259.747,00
B.4	Alat Pertanian	-	-	-	-	-	3.528.239.372,00	93.597.357,00	3.361.335.097,00	166.904.275,00
B.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	538.829.210,00	-	122.800.000,00	661.629.210,00	139.550.376.034,06	8.536.219.224,68	120.713.604.170,11	18.836.771.863,97
B.6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	-	150.701.000,00	-	-	150.701.000,00	16.938.508.456,00	1.290.964.218,00	13.903.978.005,00	3.034.530.451,00
B.7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	-	43.610.400,00	-	380.180.000,00	423.690.400,00	105.719.208.739,94	7.442.461.810,00	96.789.298.219,94	8.929.910.520,00
B.8	Alat Laboratorium	-	-	-	253.670.000,00	253.670.000,00	34.784.722.400,67	1.573.894.712,00	28.925.735.403,67	5.858.986.997,00
B.9	Alat Persenjataan	-	14.000.000,00	-	-	14.000.000,00	449.347.260,00	3.325.000,00	445.097.260,00	4.250.000,00
B.10	Komputer	-	821.015.950,00	-	-	821.015.950,00	68.012.657.071,00	8.588.020.895,00	56.112.000.665,00	11.900.656.406,00
B.13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	-	-	-	199.680.256,00	199.680.256,00	2.726.273.886,00	209.865.363,00	930.620.231,00	1.795.653.655,00
B.15	Alat Keselamatan Kerja	-	33.734.000,00	-	-	33.734.000,00	3.096.729.539,00	164.859.250,00	2.934.688.039,00	164.041.500,00
B.16	Alat Peraga	-	-	-	-	-	1.061.000,00	-	1.061.000,00	-
B.17	Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-	-	138.439.985,00	16.851.746,00	113.099.872,00	25.340.113,00
B.18	Rambu - Rambu	-	-	-	-	-	4.796.225.706,00	162.898.293,00	4.525.518.352,00	270.707.354,00
B.19	Peralatan Olah Raga	-	-	-	-	-	4.041.440.359,00	126.801.379,00	3.942.455.209,00	98.985.150,00
	Gedung dan Bangunan	-	**6.717.717.700,00**	**8.912.070.000,00**	**1.626.431.925,00**	**15.258.219.625,00**	**962.812.710.355,34**	**19.775.171.271,00**	**186.537.136.792,00**	**776.275.573.563,34**
C.1	Bangunan Gedung	-	6.244.149.700,00	8.912.070.000,00	1.626.431.925,00	14.784.651.625,00	933.629.219.017,43	19.147.940.261,00	180.807.887.697,00	752.821.331.320,43
C.2	Monumen	-	-	-	-	-	10.737.145.845,00	219.229.586,00	1.959.582.801,00	8.780.563.044,00
C.4	Tugu Tilik Kontrol/Pasti	-	473.568.000,00	-	-	473.568.000,00	18.446.345.492,91	408.001.414,00	3.772.686.292,00	14.673.659.200,91
	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	**135.726.000,00**	-	**38.487.764.287,00**	**38.623.490.287,00**	**2.147.722.976.063,07**	**93.911.763.269,00**	**1.215.298.391.757,00**	**932.424.584.306,07**
D.1	Jalan dan Jembatan	-	-	-	3.279.630.000,00	3.279.630.000,00	1.598.496.512.773,40	77.602.947.360,00	1.006.573.979.931,00	591.892.532.842,40
D.2	Bangunan Air	-	135.726.000,00	-	298.627.380,00	434.353.380,00	424.277.179.876,67	12.839.123.039,00	169.887.506.334,00	254.389.573.542,67
D.3	Instalasi	-	-	-	29.277.709.907,00	29.277.709.907,00	77.929.235.293,00	2.011.479.539,00	23.835.815.273,00	54.093.420.020,00
D.4	Jaringan	-	-	-	5.631.797.000,00	5.631.797.000,00	47.050.048.120,00	1.396.213.271,00	15.000.990.219,00	32.049.057.901,00
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	**74.975.254.591,39**	**147.734.560,00**	**2.809.161.260,00**	**72.166.093.331,39**
E.1	Bahan Perpustakaan	-	-	-	-	-	66.506.638.156,39	-	-	66.506.638.156,39
E.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-	-	-	-	-	8.299.591.435,00	147.734.560,00	2.809.161.260,00	5.490.430.175,00
E.3	Hewan	-	-	-	-	-	36.800.000,00	-	-	36.800.000,00
E.5	Tanaman	-	-	-	-	-	132.205.000,00	-	-	132.205.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	**42.683.942.566,00**	-	-	**42.683.942.566,00**
F	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	42.683.942.566,00	-	-	42.683.942.566,00
	ASET TETAP	-	**9.029.968.075,00**	**7.959.070.000,00**	**43.273.171.207,00**	**60.262.209.282,00**	**4.377.594.469.750,49**	**147.235.818.114,35**	**1.837.864.803.718,39**	**2.539.729.666.032,10**
	Aset Lainnya	**19.906.824.199,00**	-	**888.087.000,00**	**14.203.988.794,00**	**34.998.899.993,00**	**223.763.534.341,00**	**236.917.547,00**	**36.085.919.529,00**	**187.697.614.812,00**
G.1	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	3.865.476.371,00	236.917.547,00	3.107.357.122,00	758.119.249,00
G.2	Aset Lain-lain	19.906.824.199,00	-	888.087.000,00	14.203.988.794,00	34.998.899.993,00	219.918.057.970,00	-	32.978.562.407,00	186.939.495.563,00
	ASET	**19.906.824.199,00**	**9.029.968.075,00**	**8.839.157.000,00**	**57.477.160.001,00**	**95.261.109.275,00**	**4.601.378.004.091,49**	**147.462.735.661,35**	**1.873.950.723.247,39**	**2.727.427.280.844,10**

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
SK BUPATI NO. B/301/KPTS/IV.01/2024

NO	PERANGKAT DAERAH	NOMOR BA PENGHAPUSAN	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	JUMLAH YANG DIHAPUSKAN/DEFISIT PENGHAPUSAN	KETERANGAN
1	RSUD Alimuddin Umar	900/3080.a/III.02/2024	744.885.800,00	6.360.000,00	738.625.800,00	Aset Rusak Berat/Usang (Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang)
2	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	030/ /BAST-BMD/2024	239.340.666,00	143.027.000,00	96.313.666,00	Aset Rusak Berat/Usang (Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang)
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	030/436/BAST-BMD/2024	138.740.000,00	137.840.000,00	900.000,00	Aset Rusak Berat/Usang (Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang)
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	030/536.a/III.19/2024	5.288.673.510,00	1.375.784.346,00	3.912.889.164,00	Aset Rusak Berat/Usang (Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang)
5	Dinas Perumahan dan Kesimpan	030/620/BAP-BMD/III.19/2024 030/647.A/BAP-BMD/III.19/2024	1.400.135.600,00	584.955.768,00	815.180.612,00	Aset Rusak Berat/Usang (Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang)
6	Dinas Perikanan	360/13/2013/VI/2024	113.374.976,00		113.374.976,00	Aset Rusak Berat/Usang (Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang)
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	030/1111/IV.01/2024	5.059.000,00	3.089.000,00	1.970.000,00	Aset Rusak Berat/Usang (Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang)
	TOTAL		7.930.309.852	2.251.355.634	5.678.954.218	

Lampiran 52

SKEMA PEMBAYARAN BUNGA
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) DAERAH
TAHUN 2024

Period	Start Date	End Date	Interest Day	Starting OS	Principal Repayment	Ending OS	Interest	Keterangan
26	25-Dec-23	25-Jan-24	31	52.261.014.935	1.493.171.945,00	50.767.842.990	254.714.380,00	Pembayaran Pokok & Bunga 2024
27	25-Jan-24	25-Feb-24	31	50.767.842.990	1.493.171.945,00	49.274.671.045	247.436.826,00	Pembayaran Pokok & Bunga 2024
28	25-Feb-24	25-Mar-24	29	49.274.671.045	1.493.171.945,00	47.781.499.100	224.865.125,00	Pembayaran Pokok & Bunga 2024
29	25-Mar-24	25-Apr-24	31	47.781.499.100	1.493.171.945,00	46.288.327.155	232.881.718,00	Pembayaran Pokok & Bunga 2024
30	25-Apr-24	25-May-24	30	46.288.327.155	1.493.171.945,00	44.795.155.210	218.326.610,00	Pembayaran Pokok & Bunga 2024
31	25-May-24	25-Jun-24	31	44.795.155.210	1.493.171.945,00	43.301.983.265	218.326.609,00	Pembayaran Pokok & Bunga 2024
32	25-Jun-24	25-Jul-24	30	43.301.983.265	1.493.171.945,00	41.808.811.320	204.241.021,00	Pembayaran Pokok & Bunga 2024
33	25-Jul-24	25-Aug-24	31	41.808.811.320	1.493.171.945,00	40.315.639.375	203.771.501,00	Pembayaran Pokok & Bunga 2024
34	25-Aug-24	25-Sep-24	31	40.315.639.375	1.493.171.945,00	38.822.467.430	196.493.947,00	Pembayaran Pokok & Bunga 2024
35	25-Sep-24	25-Oct-24	30	38.822.467.430	1.493.171.945,00	37.329.295.485	183.112.638,00	Pembayaran Pokok & Bunga 2024
36	25-Oct-24	25-Nov-24	31	37.329.295.485	1.493.171.945,00	35.836.123.540	181.938.838,00	Pembayaran Pokok & Bunga 2024
37	25-Nov-24	25-Dec-24	30	35.836.123.540	1.493.171.945,00	34.342.951.595	169.027.049,00	Pembayaran Pokok & Bunga 2024
38	25-Dec-24	31-Dec-24	6	34.342.951.595	1.493.171.945,00	32.849.779.650	**32.396.851,00**	Utang Bunga 2024, 6 hari